RKPD
TAHUN 2021

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN ANGGARAN 2020







BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 45 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);

10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 5 Seri E);

11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);

12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 10 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 4 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan Perencanan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Darah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD dalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijak bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup penyusunan RKPD Tahun 2021 meliputi:

a. kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
b. sasaran dan prioritas pembangunan daerah;
c. arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota; dan
d. rencana kerja dan pendanaan daerah.

Pasal 3

RKPD Tahun 2021 disusun dalam rangka menciptakan integrasi, sinkronisasi, sinergitas pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.

Pasal 4

(1) RKPD Tahun 2021 berfungsi sebagai:
    a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2021;
    b. pedoman penyelarasan prioritas pembangunan Provinsi dengan kabupaten/kota; dan
    c. pedoman penyusunan Rancangan KUA dan PPAS Provinsi.
(2) Dalam rangka perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Perangkat Daerah menggunakan RKPD Tahun 2021 untuk menyempurnakan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah.

BAB II
TAHAPAN PENYUSUNAN

Pasal 5

Penyusunan RKPD Tahun 2021 dilakukan melalui tahapan:

a. persiapan penyusunan;
b. penyusunan rancangan awal;
c. penyusunan rancangan;
d. pelaksanaan musrenbang;
e. perumusan rancangan akhir; dan
f. penetapan.

Pasal 6

Kepala Bappeda melakukan verifikasi terhadap rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berkenaan dengan kesesuaiannya dengan RKPD, Renstra Perangkat Daerah serta tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 7

Uraian mengenai dokumen RKPD Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

(1) Gubernur melalui Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2021.

(2) Pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dilakukan untuk menjamin dan memastikan bahwa RKPD telah disusun sesuai dengan tahapan dan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan telah berpedoman pada RPJMD Provinsi serta mengacu pada RKP 2021;

b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah dilakukan untuk menjamin prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, serta indikator kinerja, dan pagu indikatif dalam RKPD telah dipedomani dalam penyusunan rancangan KUA dan PPAS sebagai landasan penyusunan Rancangan APBD Tahun 2021; dan

c. evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah dilakukan untuk menilai daya serap anggaran dan capaian target kinerja program/kegiatan mencakup masukan, keluaran dan hasil yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD Tahun 2021.

(3) Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan RKPD Tahun 2021.

(4) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2021.

(5) Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilaksanakan secara periodik setiap triwulan pada tahun 2021.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 14 Juli 2020

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 14 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

NAZIARTO

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2020 NOMOR 31
SERI E

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2021

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2021

serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Keberhasilan pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selain dilaksanakan jajaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pemerintah Kabupaten/Kota juga ditentukan oleh dukungan masyarakat untuk menjawab tantangan dan mengurangi permasalahan yang ada. Adapun Kaidah pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

1. RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021, tidak hanya memuat kegiatan-kegiatan dalam kerangka investasi pemerintah dan pelayanan publik, tetapi juga memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
2. Perangkat Daerah dan seluruh *stakeholder* pembangunan termasuk masyarakat luas, dunia usaha, berkewajiban dan berperan serta untuk melaksanakan program-program RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 dengan sebaik-baiknya.
3. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maupun dari APBN, maka setiap perangkat daerah perlu membuat Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2021 sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) dengan mempedomani RKPD ini.
4. Pelaksanaan Forum SKPD serta musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD ditujukan untuk mengakomodasi aspirasi dan kepentingan masyarakat serta merupakan wujud partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan.
5. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021, Badan Perencanaan Pembangungan dan Pengembangan Penelitian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkewajiban untuk melakukan pemantauan dan menganalisa terhadap penjabaran dan sinergitas RKPD Tahun 2021 ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dan Kebijakan Umum APBD 2021 serta Prioritas dan Pagu Indikatif PD Tahun 2021.

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

ERZALDI ROSMAN

DAFTAR ISI

Halaman

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 45 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2021 .....

BAB I PENDAHULUAN I.1
- 1.1. Latar Belakang I.1
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan I.7
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen I.9
- 1.4. Maksud dan Tujuan I.10
- 1.5. Sistematika Dokumen RKPD I.11

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II.1
- 2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah II.1
  - 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi II.1
  - 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat II.28
    - 2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan pemerataan ekonomi II.28
    - 2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial II.36
    - 2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga II.58
  - 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum II.62
    - 2.1.3.1. Fokus layanan urusan wajib II.62
    - 2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan II.114
  - 2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah II.134
    - 2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah II.134
    - 2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur II.137
    - 2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi II.139
    - 2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia II.162
- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun 2017 Dan Realisasi RPJMD II.168
- 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah II.530
  - 2.3.1. Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah II.530
  - 2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah II.531
- 2.4. Pokok-Pokok Pikiran DPRD II.550
- 2.5. Capaian Inovasi Daerah II.645

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN III.1
- 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah III.1
  - 3.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pertumbuhan Ekonomi III.3

Halaman

3.1.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) III.3
3.1.1.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi III.5
3.1.1.3. PDRB Perkapita III.7
3.1.1.4. Struktur Perekonomian Daerah III.7
3.1.1.5. Struktur Pengeluaran dalam PDRB III.9
3.1.1.6. Tingkat Inflasi III.9
3.1.1.7. Tingkat Investasi III.10
3.1.1.8. Ekspor dan Impor III.11
3.1.2. Indikator Pembangunan Bidang Kesejahteraan III.13
3.1.2.1. Pengangguran III.13
3.1.2.2. Kemiskinan III.14
3.1.2.3. Ketimpangan Regional III.14
3.1.2.4. Ketimpangan Distribusi Pendapatan III.15
3.1.3. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2018 dan 2019 ..... III.16
3.1.3.1. Tantangan Perekonomian Global dan Nasional 2018 dan 2019 ..... III.16
3.1.3.2. Tantangan Perekonomian Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 dan 2019 ..... III.17
3.1.3.3. Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2019 ..... III.18
3.1.4. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah III.19
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah III.20
3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan III.22
3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah III.25
3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah III.25
3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah III.27
3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah III.31

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV.1
4.1. Tema, Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Daerah IV.1
4.1.1. Tema Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2020 ..... IV.1
4.1.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2020 ..... IV.4
4.1.3. Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2020 ..... IV.8
4.2. Prioritas Pembangunan Daerah dan Sasaran pembangunan IV.14
4.2.1. Prioritas Pembangunan daerah tahun 2020 ..... IV.14
4.2.2. Prioritas Pembangunan Daerah Dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Nasional IV.64
4.2.3. Prioritas Pembangunan Nasional, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah IV.68
4.2.4. Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan SDGs IV.96
4.2.5. Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) IV.121
4.2.6. Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan

Halaman

Pengentasan Kemiskinan IV.130
4.2.7. Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Penciptaan Lapangan Pekerjaan IV.132
4.2.8. Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Revolusi Mental IV.134
4.2.9. Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Pengarusutamaan Gender (PUG) IV.140
4.2.10. Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Perubahan Iklim IV.141
4.2.11. Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Tata Kelola Pemerintahan yang baik IV.143
4.2.12. Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Pengarusutamaam Pembangunan Berkelanjutan IV.147
4.2.13. Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Pemerataan Antar Kelompok Pendapatan IV.147
4.2.14. Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Ketahanan Energi IV.150
4.2.15. Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Ketahanan Pangan IV.151
4.2.16. Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Pengembangan Dunia usaha dan Pariwisata IV.155
4.2.17. Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Pengembangan Infrastruktur, Konektivitas dan kemaritiman IV.159
4.2.18. Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Wilayah IV.161
4.2.19. Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan IV.173
4.2.20. Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Pengembangan Sumber daya Air IV.185
4.2.21. Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Penciptaan Lapangan Pekerjaan IV.180
4.3. Strategi Dan Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan Pembangunan lintas Bidang Melalui Pendekatan Holistik-Tematik, Integratif Dan Spasial IV.180
4.3.1. Pengembangan Pembangunan Agropolitan IV.181
4.3.2. Pembangunan Bahari IV.190
4.3.3. Pengembangan Pariwisata IV.197
4.3.4. Pengembangan Tata Kelola Pertambangan IV.207
4.3.5. Peningkatan Pendapatan Pemerintah daerah IV.214
4.3.6. Peningkatan Ekonomi Masyarakat IV.216
4.3.7. Pembangunan Konektivitas dan Infrastruktur IV.222
4.3.8. Pembangunan Pendidikan IV.226
4.3.9. Pembangunan Kesehatan IV.230
4.3.10. Peningkatkan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik IV.234
4.3.11. Pembangunan Demokrasi IV.245
4.3.12. Peningkatan Pembangunan Bidang Kebencanaan IV.247

Halaman

4.3.13. Pengendalian Lingkungan Hidup IV.250

BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA V.1
5.1. Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan V.1
5.1.1. Arah Kebijakan Pembangunan Kota Pangkalpinang V.2
5.1.2. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bangka V.7
5.1.3. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bangka Barat V.16
5.1.4. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bangka Tengah V.24
5.1.5. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bangka Selatan V.37
5.1.6. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Belitung V.50
5.1.7. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Belitung Timur V.60
5.2. RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) V.68
5.2.1. Indikasi Program Utama Lima Tahunan RTRW Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034 ..... V.69

BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH VI.1
6.1. Rencana Program Prioritas VI.1
6.2. Pagu Indikatif VI.8

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH VII.1
7.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) VII.1
7.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK) VII.4

BAB VIII PENUTUP VIII.1

LAMPIRAN
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2020 PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel	II.1	Luas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2016	II.3
Tabel	II.2	Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota dan Kecamatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013-2017	II.3
Tabel	II.3	Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013-2017	II.4
Tabel	II.4	Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota dan Kelurahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013-2017	II.5
Tabel	II.5	Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota dan Luas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013-2017	II.5
Tabel	II.6	Jenis dan Luas Penggunaan Lahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.7
Tabel	II.7	Sistem Pelabuhan Laut Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.9
Tabel	II.8	Rekapitulasi Proyeksi Kebutuhan Daya Listrik 2010 – 2030– KVA	II.11
Tabel	II.9	Rekapitulasi Proyeksi Kebutuhan Sambungan Telepon 2010 – 2030	II.12
Tabel	II.10	Data Bencana Alam di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016.	II.20
Tabel	II.11	Wilayah yang Berpotensi Rawan Bencana dan Jenis Bencana yang terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.21
Tabel	II.12	Jumlah Penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013–2017	II.23
Tabel	II.13	Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2017	II.23
Tabel	II.14	Jumlah Penduduk Kepulauan Bangka Belitung Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2017 (x1000)	II.25
Tabel	II.15	PDRB Tahun 2014–2018 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (dalam Rp. Miliar)	II.26
Tabel	II.16	Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2014–2018 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (dalam Rp. Miliar)	II.28
Tabel	II.17	Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2013–2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (dalam Rp. Miliar)	II.28
Tabel	II.18	Distribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2013–2017 Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (dalam persen)	II.29

Halaman

Tabel II.19 Perkembangan Distribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2013 s.d 2017 Atas Dasar Harga Konstan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (dalam persen) II.30

Tabel II.20 Perkembangan PDRB Kabupaten/Kota Tahun 2013–2017 Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Miliar Rupiah)..... II.30

Tabel II.21 Perkembangan PDRB Tahun Kabupaten/Kota Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Miliar Rupiah)) II.31

Tabel II.22 Laju Inflasi Tahun 2014-2018 Menurut Kelompok Pengeluaran..... II.33

Tabel II.23 Perkembangan Angka Melek Huruf Usia 15+ Menurut Kabupaten Kota, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2013 s.d 2017 II.35

Tabel II.24 Angka Melek Huruf menurut Kabupaten/Kota Tahun 2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.36

Tabel II.25 Rata-Rata Lama Sekolah Usia 15 Tahun ke Atas Tahun 2013 s.d 2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.37

Tabel II.26 Angka Harapan Sekolah Tahun 2013 s.d 2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.37

Tabel II.27 Perkembangan Angka Putus Sekolah Kabupaten/Kota Se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2016..... II.38

Tabel II.28 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)) 2014-2018 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.39

Tabel II.29 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar & Angka Partisipasi Murni 2014-2018 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung..... II.41

Tabel II.30 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A Tahun 2014/2018 Menurut kabupaten/kota/Provinsi Kepulauan Bangka Belitung/Nasional II.42

Tabel II.31 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B Tahun 2014/2018 Menurut kabupaten/kota/ Provinsi Kepulauan Bangka Belitung/Nasional II.42

Tabel II.32 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/Paket C Tahun 2014/2018 Menurut kabupaten/kota/Provinsi Kepulauan Bangka Belitung/Nasional II.43

Tabel II.33 Perkembangan APM Tahun 2013 s.d 2018 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.45

Tabel II.34 Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2018 menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung..... II.46

Tabel II.35 Perkembangan Angka Kematian Bayi dan Balita Per 1.000 Kelahiran Hidup Tahun 2014-2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.47

Halaman

Tabel II.36 Usia Harapan Hidup menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013 s.d 2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.48

Tabel II.37 Angka Kematian Ibu menurut Kabupaten/Kota Tahun 2014 s.d 2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.49

Tabel II.38 Perkembangan Jumlah Bayi Berat Lahir Rendah dan Gizi Buruk Tahun 2013 s.d 2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.49

Tabel II.39 Jumlah Kasus HIV/AIDS, IMS, DBD, Diare, TB, dan Malaria Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 ..... II.51

Tabel II.40 Perkembangan Kemiskinan Tahun 2014-2018 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.51

Tabel II.41 Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kota dan Desa Tahun 2013-2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.52

Tabel II.42 Data Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013-2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.52

Tabel II.43 Data Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2013-2017 Menurut Provinsi di Pulau Sumatera (ribu jiwa) II.53

Tabel II.44 Persentase penduduk miskin di Pulau SumateraTahun 2013-2017 ..... II.53

Tabel II.45 Perkembangan Ketenagakerjaan Tahun 2014 s.d 2018 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.55

Tabel II.46 Perkembangan Ketenagakerjaan Tahun 2014 s.d 2018 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.55

Tabel II.47 Perkembangan Tingkat Pengangguran dan TPAK Tahun 2014 s.d 2018 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.56

Tabel II.48 Penduduk 15 tahun ke atas Tahun 2014 s.d 2018 menurut Lapangan Pekerjaan Utama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.56

Tabel II.49 Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun 2013 s.d 2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.57

Tabel II.50 Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun 2017 Menurut kabupaten Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.58

Tabel II.51 Jumlah Perkumpulan Cabang Olahraga Atletik Tahun 2013 s.d 2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.59

Tabel II.52 Jumlah Perkumpulan Cabang Olahraga Sepakbola Tahun 2013 s.d 2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.59

Tabel II.53 Jumlah Perkumpulan Cabang Olahraga Bola Voli Tahun 2013 s.d 2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.59

Tabel II.54 Perkembangan Sarana dan Prasarana Olahraga Tahun 2014 s.d 2018 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.60

Halaman

Tabel II.55 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)) 2014-2018 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.61

Tabel II.56 Ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah Tahun 2013 s.d 2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung..... II.62

Tabel II.57 Ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah Tahun 2013 s.d 2017 menurut Kabupaten/KotaProvinsi Kepulauan Bangka Belitung II.63

Tabel II.58 Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2013 s.d 2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung..... II.63

Tabel II.59 Jumlah Guru dan Murid Tahun 2013 s.d 2017 Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung..... II.64

Tabel II.60 Jumlah Rumah Sakit Pemerintah Tahun 2012 s.d 2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.65

Tabel II.61 Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per Jumlah Penduduk Tahun 2012 s.d 2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.65

Tabel II.62 Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.66

Tabel II.63 Perkembangan Persentase Keluarga Yang Memiliki Akses Terhadap Air Bersih Tahun 2013 s.d 2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.66

Tabel II.64 Perkembangan Angka Kesakitan Malaria per 1000 penduduk Tahun 2012 s.d 2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.67

Tabel II.65 Jumlah Kasus HIV Tahun 2013-2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.68

Tabel II.66 Jumlah Kasus Penyakit DBD di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 – 2017..... II.68

Tabel II.67 Perkembangan Jumlah Puskesmas Tahun 2013 s.d 2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.69

Tabel II.68 Perkembangan Jumlah Puskesmas Tahun 2013 s.d 2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung..... II.70

Tabel II.69 Perkembangan Jumlah Dokter Tahun 2013 s.d 2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.70

Tabel II.70 Total Luas Kelas Lahan Kritis Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 ..... II.72

Tabel II.71 Gambaran Pencapaian Kinerja Pembangunan Urusan Penataan Ruang Tahun 2013 s.d 2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.73

Tabel II.72 Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan, Kondisi Jalan, dan Pemerintahan yang Berwenang Mengelola di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Km) Tahun 2018 ..... II.74

Halaman

Tabel II.73 Panjang Jembatan Menurut Jenis Konstruksidan Pemerintahan yang Berwenang Mengelola di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Meter), Tahun 2018 ..... II.75

Tabel II.74 Persentase Rumah Tangga Bersanitasi, Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih, Persentase Rumah Layak Huni, Persentase Kawasan Kumuh Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 ..... II.76

Tabel II.75 Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Tahun 2013 s.d 2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.77

Tabel II.76 Perkembangan Tingkat Pengangguran dan TPAK Tahun 2014 s.d 2018 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.78

Tabel II.77 Data Penduduk yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama Tahun 2013 s.d 2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.78

Tabel II.78 Data TPAK Tahun 2014 s.d 2018 Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.79

Tabel II.79 Data Penduduk yang Bekerja Tahun 2013 s.d 2017 Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.79

Tabel II.80 Data Tingkat Pengangguran Tahun 2013 s.d 2018 Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.80

Tabel II.81 Data Pengangguran Tahun 2013 s.d 2017 Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.81

Tabel II.82 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Tahun 2011 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.81

Tabel II.83 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Tahun 2011 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.82

Tabel II.84 Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Tahun 2014 s.d 2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.82

Tabel II.85 Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Tahun 2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.83

Tabel II.86 Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Tahun 2013 s.d 2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.84

Tabel II.87 Data Ketergantungan Beras 2013-2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.85

Tabel II.88 Data Produksi Padi (Ton) Kabupaten Kota Tahun 2013-2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.86

Tabel II.89 Data Ketersediaan Pangan 2013-2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.86

Halaman

Tabel II.90 Luas Lahan (m^2) Berdasarkan Sertifikat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011-2013 ..... II.88

Tabel II.91 Luas Lahan (m^2) Berdasar Sertifikat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2016 ..... II.88

Tabel II.92 Luas Lahan (m2) Berdasar Sertifikat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2018 ..... II.89

Tabel II.93 Persentase (%) Luas Lahan Bersertifikat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011-2013 ..... II.90

Tabel II.94 Persentase (%) Luas Lahan Bersertifikat Tahun 2014-2016 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.90

Tabel II.95 Persentase (%) Luas Lahan Bersertifikat Tahun 2017-2018 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.91

Tabel II.96 Penyelesaian Kasus Tanah Negara di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011-2013 ..... II.91

Tabel II.97 Penyelesaian Kasus Tanah Negara di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2016 ..... II.92

Tabel II.98 Penyelesaian Kasus Tanah Negara di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2018 ..... II.93

Tabel II.99 Penyelesaian Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Izin Lokasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011-2013 ..... II.93

Tabel II.100 Penyelesaian Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Izin Lokasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2016 ..... II.94

Tabel II.101 Penyelesaian Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Izin Lokasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2018 ..... II.95

Tabel II.102 Perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2013 s.d 2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.96

Tabel II.103 Perkembangan Persentase Keluarga Yang Memiliki Akses Terhadap Air Bersih Tahun 2012 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.97

Tabel II.104 Perkembangan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil II.97

Tabel II.105 Kelompok LPM DAN PKK Tahun 2013 s.d 2017 Menurut kabupaten/kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.98

Tabel II.106 Jumlah Bumdes yang Aktif Tahun 2017 sd Tahun 2018 Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.99

Tabel II.107 Jumlah Posyandu Aktif Tahun 2017 sd Tahun 2018 Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.99

Halaman

Tabel II.108 Jumlah Sekolah Dasar (Sd) Penerima Bantuan Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) Tahun 2017 sd Tahun 2018 Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.100

Tabel II.109 Jumlah Aparatur Desa Yang Terlatih Tahun 2017 sd Tahun 2018 Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung g II.101

Tabel II.110 Jumlah Kawasan Perdesaan Tahun 2016 sd Tahun 2018 Kabupaten Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.101

Tabel II.111 Jumlah Desa Tertinggal dan Berkembang Tahun 2016 sd Tahun 2017 Kabupaten Provinsi Kepulauan Bangka Belitung..... II.102

Tabel II.112 Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2013 s.d 2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.104

Tabel II.113 Rasio Akseptor KB Tahun 2012 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung..... II.104

Tabel II.114 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Tahun 2012 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.105

Tabel II.115 Kunjungan Kapal di Pelabuhan Laut Tahun 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.107

Tabel II.116 Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Berdasarkan Jenis Kendaraan Tahun 2012 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.107

Tabel II.117 Persentase Koperasi Aktif Tahun 2013 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.108

Tabel II.118 Jumlah UKM non BPR/LKM Tahun 2012 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.108

Tabel II.119 Jumlah Investasi dan Investor PMDN/PMA Tahun 2013 s.d 2018 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.109

Tabel II.120 Jumlah Organisasi dan Kegiatan Kepemudaan Tahun 2013 s.d 2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.110

Tabel II.121 Jumlah Klub/Organisasi Olahraga Tahun 2013 s.d 2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.110

Tabel II.122 Buku PDRB dan Provinsi/Kabupaten/Kota Falam Angka Tahun 2013 s.d 2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.111

Tabel II.123 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Tahun 2013 s.d 2017 Kepulauan Bangka Belitung II.112

Tabel II.124 Jumlah Perpustakaan Tahun 2013 s.d 2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.112

Tabel II.125 Urusan Perpustakaan II.113

Tabel II.126 Urusan Kearsipan II.113

Halaman

Tabel II.127 Potensi Kelautan dan Perikanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 – 2017 ..... II.114

Tabel II.128 Kunjungan Wisatawan Dalam dan Luar Negeri Tahun 2013 s.d 2018 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.116

Tabel II.129 Rata-rata Lama Menginap Wisatawan (Hari) Tahun 2013 s.d 2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung..... II.117

Tabel II.130 Jumlah Tenaga Kerja Sektor Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 – 2016 ..... II.117

Tabel II.131 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 – 2017 ..... II.118

Tabel II.132 Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha tanpa Migas (persen) 2013 – 2017 ..... II.118

Tabel II.133 Luas Lahan (Ha) Menurut Jenis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.119

Tabel II.134 Luas Hutan Tahun 2013 s.d 2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .. II.120

Tabel II.135 Potensi Sumber Daya Mineral Logam (ton) Tahun 2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.121

Tabel II.136 Perkembangan Ekspor dan Impor Tahun 2012 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (juta U$) II.121

Tabel II.137 Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah Tahun 2013 s.d 2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.122

Tabel II.138 Penggunaan Lahan di Kawasan Batu Betumpang II.123

Tabel II.139 Kondisi Transmigrasi Di Wilayah Pulau Bangka II.125

Tabel II.140 Kondisi Transmigrasi di Wilayah Pulau Belitung II.127

Tabel II.141 Angka Konsumsi RT per Kapita Tahun 2013 s.d 2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.129

Tabel II.142 Nilai Tukar etani (NTP) Tahun 2013 s.d 2018 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.129

Tabel II.143 Persentase Konsumsi RT Non-Pangan Tahun 2013 s.d 2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.130

Tabel II.144 Indikator Pengeluaran Non Pangan Perkapita Tahun 2016 Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.131

Tabel II.145 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Tahun 2012 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.131

Tabel II.146 Rasio luas Wilayah Produktif Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.132

Tabel II.147 Infrastruktur Tahun 2013 s.d 2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.132

Halaman

Tabel II.148 Jumlah dan Penyelesaian Tindak Pidana Kejahatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 -2016 ..... II.133

Tabel II.149 Data Demonstrasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 - 2016 ..... II.134

Tabel II.150 Realisasi Pajak Daerah Tahun 2013 s.d 2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung(dalam Rp. Juta) II.136

Tabel II.151 Jumlah Peraturan Daerah yang Mendukung Iklim Investasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.136

Tabel II.152 Rasio Lulusan S1/S2/S3 Tahun 2013 s.d 2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.137

Tabel II.153 Rasio Ketergantungan Tahun 2013 s.d 2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung..... II.138

Tabel II.154 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016 ..... II.113

Tabel II.155 Identifikasi Isu Strategis Dalam Penyusunan RKPD Tahun 2020 ..... II.219

Tabel II.156 Identifikasi Permasalahan Pembangunan dari Kebijakan Nasional/Provinsi dan Lingkungan Eksternal Lainnya II.2261

Tabel II.157 Rumusan Usulan Program/Kegiatan Hasil Penelaahan Pokok-pokok Pikiran DPRD dan Validasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.230

Tabel III.1 PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2010 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2018 (juta rupiah) III.4

Tabel III.2 PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan 2010 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun2014-2018(Juta rupiah) III.5

Tabel III.3 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 – 2020..... III.8

Tabel III.4 Distribusi Persentase PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2010 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016–2020 (dalam persen) III.10

Tabel III.5 Ditribusi PDRB Menurut PengeluaranAtas Dasar Harga Konstan 2010 Provinsi Kepulauan Bangka Beiltung Tahun 2016–2020 (dalam persen). III.11

Tabel III.6 Laju Inflasi Tahunan Kota Pangkalpinang Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2014-2018 ..... III.12

Tabel III.7 Laju Inflasi Tahunan Kota Tanjung Pandan Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2015-2018 ..... III.13

Tabel III.8 Perkembangan Realisasi Investasi Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014–2018 ..... III.14

Halaman

Tabel III.9 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016–2020 (dalam persen) III.16

Tabel III.10 Indeks Willamson Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2012–2019) III.18

Tabel III.11 Koefisien Gini Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2013–2019) III.19

Tabel III.12 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 s.d tahun 2021 ..... III.27

Tabel III.13 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 s.d Tahun 2021 ..... III.32

Tabel III.14 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Tahun 2018 s.d Tahun 2021 ..... III.35

Tabel IV.1 Hubungan Visi-Misi dan Tujuan-Sasaran Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 ..... IV.5

Tabel IV.2 Target Sasaran Pembangunan Nasional dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 dan 2020 ..... IV.6

Tabel IV.3 Target Tujuan Tahun 2020 ..... IV.6

Tabel IV.4 Target Sasaran Tahun 2020 ..... IV.7

Tabel IV.5 Hubungan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 ..... IV.9

Tabel IV.6 Arah Kebijkaan dan Program Prioritas yang mendukung Prioritas Pembangunan I (utama) RKPD 2020 ..... IV.22

Tabel IV.7 Arah Kebijkaan dan Program Prioritas yang mendukung Prioritas Pembangunan II (penunjang) RKPD 2020 ..... IV.40

Tabel IV.8 Keselarasan antara Prioritas nasional, Prioritas dan Sasaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 ..... IV.64

Tabel IV.9 Keselarasan Prioritas Nasional, Arah Kebijakan Nasional dan Program Pembangunan Daerah Tahun 2020 ..... IV.67

Tabel IV.10 Keselarasan target indikator pembangunan makro antara target Nasional, Regional Sumatera dan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 ..... IV.93

Tabel IV.11 Arah Kebijkaan, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas RKPD 2020 Dalam Rangka Mendukung Pencapaian Sustainabel Developement Goals (SDGs) IV.95

Tabel IV.12 Arah Kebijkaan dan Program Prioritas RKPD 2020 Dalam Rangka Mendukung Pencapaian SPM 2020 Bidang Pendidikan IV.119

Tabel IV.13 Arah Kebijkaan dan Program Prioritas RKPD 2020 Dalam Rangka Mendukung Pencapaian SPM 2020 Bidang Kesehatan IV.121

Halaman

Tabel IV.14 Arah Kebijkaan dan Program Prioritas RKPD 2020 Dalam Rangka Mendukung Pencapaian SPM 2020 Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang IV.122

Tabel IV.15 Arah Kebijkaan dan Program Prioritas RKPD 2020 Dalam Rangka Mendukung Pencapaian SPM 2020 Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman IV.123

Tabel IV.16 Arah Kebijkaan dan Program Prioritas RKPD 2020 Dalam Rangka Mendukung Pencapaian SPM 2020 Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat IV.124

Tabel IV.17 Arah Kebijkaan dan Program Prioritas RKPD 2020 Dalam Rangka Mendukung Pencapaian SPM 2020 Bidang Sosial IV.125

Tabel IV.18 Arah Kebijkaan, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas RKPD 2020 Dalam Rangka Mendukung Arah Kebijakan Pengentasan Kemiskinan RKP 2020 ..... IV.129

Tabel IV.19 Arah Kebijkaan, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas RKPD 2020 Dalam Rangka Mendukung Arah Kebijakan Penciptaan Lapangan Pekerjaan RKP 2020 ..... IV.131

Tabel IV.20 Arah Kebijkaan, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas RKPD 2020 Dalam Rangka Mendukung Arah Kebijakan Pembangunan Revolusi Mental RKP 2020 ..... IV.132

Tabel IV.21 Arah Kebijkaan, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas RKPD 2020 Dalam Rangka Mendukung Arah Kebijakan Pembangunan Pengarusutamaan Gender RKP 2020 ..... IV.138

Tabel IV.22 Arah Kebijkaan, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas RKPD 2020 Dalam Rangka Mendukung Arah Kebijakan Perubahan Iklim RKP 2020 .. IV.139

Tabel IV.23 Arah Kebijkaan, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas RKPD 2020 Dalam Rangka Mendukung Arah Kebijakan Pengarusutamaam Pembangunan Berkelanjutan RKP 2020 ..... IV.144

Tabel IV.24 Arah Kebijkaan, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas RKPD 2020 Dalam Rangka Mendukung Arah Kebijakan Pemerataan Antar Kelompok Pendapatan RKP 2020 ..... IV.145

Tabel IV.25 Arah Kebijkaan, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas RKPD 2020 Dalam Rangka Mendukung Arah Kebijakan Ketahanan Energi RKP 2020 ..... IV.148

Tabel IV.26 Arah Kebijkaan, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas RKPD 2020 Dalam Rangka Mendukung Arah Kebijakan Ketahanan Pangan RKP 2020 ..... IV.149

Halaman

Tabel IV.27 Arah Kebijkaan, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas RKPD 2020 Dalam Rangka Mendukung Arah Kebijakan Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata RKP 2020 ..... IV.153

Tabel IV.28 Arah Kebijkaan, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas RKPD 2020 Dalam Rangka Mendukung Arah Kebijakan Pengembangan Infrastruktur, Konektivitas dan kemaritiman RKP 2020 ..... IV.157

Tabel IV.29 Arah Kebijkaan, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas RKPD 2020 Dalam Rangka Mendukung Arah Kebijakan Pembangunan wilayah RKP 2020 ..... IV.159

Tabel IV.30 Arah Kebijkaan, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas RKPD 2020 Dalam Rangka Mendukung Arah Kebijakan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan RKP 2020 ..... IV.171

Tabel IV.31 Arah Kebijkaan, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas RKPD 2020 Dalam Rangka Mendukung Arah Kebijakan Peningkatran Sumber Daya Manusia RKP 2020 ..... IV.173

Tabel IV.32 Arah Kebijkaan, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas RKPD 2020 Dalam Rangka Mendukung Arah Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Air RKP 2020 ..... IV.178

Tabel IV.33 Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Lintas Bidang Pengembangan Pembangunan Agropolitan IV.179

Tabel IV.34 Program Pembangunan Perangkat Daerah Yang Mendukung Prioritas Pengembangan Pembangunan Agropolitan IV.180

Tabel IV.35 Stakeholder Yang Mendukung Pengembangan Pembangunan Agropolitan IV.187

Tabel IV.36 Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Lintas Bidang Pembangunan bahari IV.188

Tabel IV.37 Program Pembangunan Perangkat Daerah Yang Mendukung Prioritas Pembangunan Bahari IV.189

Tabel IV.38 Stakeholder Yang Mendukung Pembangunan Lintas Bidang Pembangunan bahari IV.194

Tabel IV.39 Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Prioritas Pengembangan Pariwisata IV.195

Tabel IV.40 Program Pembangunan Perangkat Daerah Yang Mendukung Pembangunan Lintas Bidang Pengembangan Pariwisata IV.197

Tabel IV.41 Stakeholder yang mendukung Prioritas Pengembangan Pariwisata IV.204

Tabel IV.42 Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Prioritas Pengembangan Tata Kelola Pertambangan IV.205

Halaman

Tabel IV.43 Program PembangunanPerangkat Daerah Yang Mendukung Pembangunan Lintas Bidang Pengembangan Tata Kelola Pertambangan IV.207

Tabel IV.44 Stakeholder yang mendukung Prioritas Pengembangan Tata Kelola Pertambangan IV.211

Tabel IV.45 Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Lintas Bidang Peningkatan Pendapatan Pemerintah daerah IV.212

Tabel IV.46 Program Pembangunan Perangkat Daerah Yang Mendukung Pembangunan Lintas Bidang Peningkatan Pendapatan Pemerintah daerah..... IV.212

Tabel IV.47 Stakeholder Yang Mendukung Pembangunan Lintas Bidang Peningkatan Pendapatan Pemerintah daerah IV.214

Tabel IV.48 Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Lintas Bidang Peningkatan Ekonomi Masyarakat IV.214

Tabel IV.49 Program Pembangunan Daerah Yang Mendukung Pembangunan Lintas Bidang Peningkatan Ekonomi Masyarakat IV.215

Tabel IV.50 Stakeholder Yang Mendukung Pembangunan Lintas Bidang Peningkatan Ekonomi Masyarakat IV.219

Tabel IV.51 Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Lintas Bidang Pembangunan Konektivitas dan Infrastruktur IV.220

Tabel IV.52 Program Pembangunan Daerah Yang Mendukung Pembangunan Lintas Bidang Pengembangan Konektivitas dan Infrastruktur IV.222

Tabel IV.53 Stakeholder Yang Mendukung Pembangunan Lintas Bidang Pengembangan Konektivitas dan Infrastruktur IV.223

Tabel IV.54 Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Lintas Bidang Pembangunan Pendidikan IV.224

Tabel IV.55 Program Pembangunan Daerah Yang Mendukung Pembangunan Lintas Bidang Pembangunan Pendidikan IV.225

Tabel IV.56 Stakeholder Yang Mendukung Pembangunan Lintas Bidang Pembangunan Pendidikan IV.227

Tabel IV.57 Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Lintas Bidang Pembangunan Kesehatan..... IV.228

Tabel IV.58 Program Pembangunan Perangkat Daerah Yang Mendukung Pembangunan Lintas Bidang Pembangunan Kesehatan IV.228

Tabel IV.59 Stakeholder Yang Mendukung Pembangunan Lintas Bidang Pembangunan Kesehatan IV.231

Tabel IV.60 Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Lintas Bidang Peningkatkan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik..... IV.232

Halaman

Tabel IV.61 Program Pembangunan Daerah Yang Mendukung Pembangunan Lintas Bidang Peningkatkan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik IV.234

Tabel IV.62 Program Perangkat Daerah Yang Mendukung Prioritas Pembangunan Demokrasi IV.243

Tabel IV.63 Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Prioritas Peningkatan Pembangunan Bidang Kebencanaan IV.245

Tabel IV.64 Program Perangkat Daerah Yang Mendukung Prioritas Peningkatan Pembangunan Bidang Kebencanaan IV.245

Tabel IV.65 Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Lintas BidangPengendalian Lingkungan Hidup IV.247

Tabel IV.66 Program Perangkat Daerah Yang Mendukung Pembangunan Lintas Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup IV.248

Tabel V.1 Sasaran Pemerataan Pembangunan Antar Kabupaten/Kota : Kontribusi Wilayah Terhadap Perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.. V.2

Tabel V.2 Indikator capaian Pembangunan Kota Pangkalpinang tahun 2014-2018 V.3

Tabel V.3 Sasaran. Arah Kebijakan dan Program Prioritas di Kota Pangkalpinang Tahun 2020 ..... V.4

Tabel V.4 Indikator Pembangunan Kabupaten Bangka V.8

Tabel V.5 Sasaran. Arah Kebijakan dan Program Prioritas di Kabupaten Bangka Tahun 2020 ..... V.9

Tabel V.6 Indikator Pembangunan Kabupaten Bangka Barat V.17

Tabel V.7 Sasaran. Arah Kebijakan dan Program Prioritas di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 ..... V.18

Tabel V.8 Indikator Pembangunan Kabupaten Bangka Tengah..... V.25

Tabel V.9 Sasaran. Arah Kebijakan dan Program Prioritas di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020 ..... V.26

Tabel V.10 Indikator Pembangunan Kabupaten Bangka Selatan V.38

Tabel V.11 Sasaran. Arah Kebijakan dan Program Prioritas di Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020 ..... V.39

Tabel V.12 Indikator Pembangunan Kabupaten Belitung V.51

Tabel V.13 Sasaran. Arah Kebijakan dan Program Prioritas di Kabupaten Belitung Tahun 2020 ..... V.53

Tabel V.14 Indikator Pembangunan Kabupaten Belitung Timur V.61

Tabel V.15 Sasaran. Arah Kebijakan dan Program Prioritas di Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 ..... V.62

Halaman

Tabel V.16 Indikasi Program Utama Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034 ..... V.70

Tabel V.17 Indikasi Program Pengembangan Pariwisata Daerah V.107

Tabel VI.1 Pagu Indikatif Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 ..... VI. 8

Tabel VII.1 Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 ..... VII. 2

Tabel VII.2 Penetapan Indikator Kinerja Kunci Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 ..... VII. 5

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar I.1	Bagan Alir Tahapan Penyusunan RKPD Provinsi	I.6
Gambar I.2	Hubungan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, Daerah, dan Perangkat Daerah	I.10
Gambar II.1	Gambar Lokasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.1
Gambar II.2	Peta Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)	II.2
Gambar II.3	Peta Administrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.2
Gambar II.4	Peta Rencana Struktur Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.13
Gambar II.5	Peta Rencana Pola Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.18
Gambar II.6	Peta Kawasan Strategis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.20
Gambar II.7	Peta Rawan Bencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.22
Gambar II.8	Potensi Pengembangan Pariwisata di Kepulauan Bangka Belitung	II.116
Gambar II.9	Peta Lokasi Transmigrasi di Kabupaten Bangka Selatan	II.125
Gambar II.10	Peta Lokasi Transmigrasi Kabupaten Bangka Tengah	II.126
Gambar II.11	Peta Lokasi Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat	II.126
Gambar II.12	Peta Lokasi Transmigrasi Kabupaten Belitung	II.127
Gambar II.13	Peta Lokasi Transmigrasi Kabupaten Belitung Timur	II.128
Gambar III.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016-2020	II.7
Gambar III.2	PDRB Per Kapita Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016-2020 (dalam Rupiah)	II.9
Gambar III.3	Struktur Perekonomian Menurut Lapangan Usaha Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018	II.12
Gambar III.4	Laju Inflasi Kota Pangkalpinang dan Tanjung Pandan Tahun 2016-2020	II.11
Gambar III.5	Perkembangan Ekspor Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016- 2020 (dalam juta US$)	II.15
Gambar III.6	Perkembangan Impor Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016-2020 (dalam juta US$)	II.15
Gambar III.7	Penduduk Miskin Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 – 2019 (dalam persen)	II.17

Halaman

Gambar IV.1	Posisi Dokumen RKPD Tahun 2018 Terhadap RPJPD Tahun 2005 – 2025 dan RPJMD Tahun 2017 – 2022	IV.1
Gambar IV.2	Tema Prioritas Pembangunan Tahun 2019 dalam dokumen RPJMD 2017-2022	IV.2
Gambar IV.3	Posisi Tema Pembangunan RKPD Tahun 2019 Terhadap Tema RKP dan RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	IV.4
Gambar V.1	Perkembangan indikator Makro Pembangunan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018	V.1
Gambar V.2	Perkembangan Indikator Makro Kota Pangkalpinang Tahun 2018	V.3
Gambar V.3	Sasaran Pembangunan Kota Pangkalpinang Tahun 2020	V.4
Gambar V.4	Perkembangan Indikator Makro Kabupaten Bangka Tahun 2018	V.8
Gambar V.5	Sasaran Pembangunan Kabupaten Bangka Tahun 2020	V.9
Gambar V.6	Perkembangan Indikator Makro Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018	V.17
Gambar V.7	Sasaran Pembangunan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020	V.18
Gambar V.8	Perkembangan Indikator Makro Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2017/2018	V.25
Gambar V.9	Sasaran Pembangunan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020	V.26
Gambar V.10	Perkembangan Indikator Makro Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2018	V.38
Gambar V.11	Sasaran Pembangunan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020	V.39
Gambar V.12	Perkembangan Indikator Makro Kabupaten Belitung Tahun 2018	V.51
Gambar V.13	Sasaran Pembangunan Kabupaten Belitung Tahun 2020	V.52
Gambar V.14	Perkembangan Indikator Makro Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017	V.61
Gambar V.15	Sasaran Pembangunan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020	V.62

DAFTAR GRAFIK

Halaman

Grafik	II.1	Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017	II.24
Grafik	II.2	Piramida Penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 dan proyeksi pada Tahun 2020	II.26
Grafik	II.3	Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2014 – 2018 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (dalam persen)	II.27
Grafik	II.4	PDRB Per Kapita Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 -2018	II.32
Grafik	II.5	Laju Inflasi Tahun 2014-2018 Kota Pangkalpinang	II.32
Grafik	II.6	Perbandingan Angka Inflasi Tahun 2014-2018 Kota Pangkalpinang, Tanjung Pandan, Palembang dan Nasional	II.33
Grafik	II.7	Gini Ratio Tahun 2014-2018 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.34
Grafik	II.8	Indeks Williamson Tahun 2011-2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.35
Grafik	II.9	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK/Paket C Tahun 2018 Menurut kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.44
Grafik	II.10	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APM) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan IndonesiaTahun 2014-2018	II.45
Grafik	II.11	Perkembangan APM Tahun 2014-2018 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.46
Grafik	II.12	Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2018 menurut Kabupaten/Kota Provinsi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.47
Grafik	II.13	Persentase Bayi kurus dan Stunting Tahun 2017 menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.50
Grafik	II.14	Grafik Tingkat Kemiskinan (%) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Nasional Tahun 2017	II.54
Grafik	II.15	Panjang Jalan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Km) Tahun 2018	II.75
Grafik	II.16	Grafik Persentase Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintah Tahun 2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.84
Grafik	II.17	Grafik Rasio Akseptor KB Tahun 2012 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung *(update grafik)*	II.105

Halaman

Grafik	II.18	Jumlah Penumpang Berangkat dari Bandara Depati Amir Pangkalpinang dan Bandara H.A.S Hanandjoeddin Tanjungpandann Tahun 2015	II.106
Grafik	III.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2018	III.6
Grafik	III.2	PDRB Per Kapita Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2018 (dalam Rupiah)	III.7
Grafik	III.3	Struktur Perekonomian Menurut Lapangan Usaha Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016	III.8
Grafik	III.4	Laju Inflasi Kota Pangkalpinang dan Tanjung Pandan Tahun 2014-2018	III.10
Grafik	III.5	Perkembangan ICOR dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008–2012	III.12
Grafik	III.6	Perkembangan Ekspor Kepulauan Bangka Belitung Tahun2011-2016 (dalam juta US$)	III.14
Grafik	III.7	Perkembangan Impor Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011-2016(dalam juta US$)	III.14
Grafik	III.8	Penduduk Miskin Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 – 2018	III.16

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari tahapan yang bersifat jangka panjang, menengah, dan tahunan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.

Penyusunan RKPD sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 3 ayat (2), dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan secara terpadu sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepada daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan salah satu dokumen perencanaan pambangunan daerah tahunan yang wajib disusun oleh Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia. Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga memiliki kewajiban dalam menyusun RKPD dimaksud.

Dalam menyusun RKPD Tahun 2021, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengacu pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan menerapkan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (*top-down*), dan bawah-atas (*bottom-up*). Pendekatan politik bermakna bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan. Hal ini dikarenakan rakyat pemilih dalam menentukan pilihannya didasari oleh program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan oleh Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah yang disepakati bersama DPRD. Perencanaan melalui pendekatan teknokratis dilaksanakan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah yang dilaksanakan oleh lembaga atau perangkat daerah yang secara fungsi memiliki tugas untuk itu.

Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang memiliki kepentingan (*stakeholder*) terhadap pembangunan, di mana pelibatan para pihak tersebut dimaksudkan untuk menjaring aspirasi dan menumbuhkembangkan rasa memiliki. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Kelurahan/Desa.

Disamping pendekatan-pendekatan tersebut di atas dan selaras dengan RKP 2021, Penyusunan RKPD 2021 dengan prinsip *money follow program* menggunakan pendekatan Holistik-Tematik, Integratif, dan Spasial dengan penajaman substansi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi. Penguatan implementasi *Money Follow Program* dilakukan melalui penajaman kesinambungan prioritas pembangunan, pengendalian pelaksanaan program dengan penerapan standarisasi kegiatan yang mendukung pencapaian indikator program, dan penajaman integrasi sumber pendanaan.

Penguatan pendekatan Tematik-Holistik, Integratif dan Spasial dilakukan dengan memperhatikan pada pengendalian perencanaan, penguatan perencanaan. Penguatan perencanaan berbasis kewilayahan dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing wilayah, dan penguatan integrasi sumber pendanaan pembangunan. Dengan penerapan seluruh pendekatan perencanaan tersebut di dalam penyusunannya, maka diharapkan dokumen RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 dapat menjadi dokumen perencanaan yang memenuhi prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan dan kesinambungan kemajuan dan kesatuan Nasional.

Selain hal tersebut, sebagai dokumen rencana tahunan daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diantaranya sebagai berikut:

1. RKPD merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJMD kedalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah;
2. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD);
3. RKPD merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);
4. RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan;

Memperhatikan posisi strategis dokumen RKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka diharapkan dapat dihasilkan suatu dokumen perencanaan yang berkualitas dengan mempedomani peraturan perundangan yang berlaku, terutama Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembanguan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RKPD ditetapkan agar dapat memberikan acuan yang efektif bagi pembangunan.

Beberapa hal yang harus menjadi perhatian dalam penyusunan dokumen RKPD, antara lain sebagai berikut:

1. RKPD tahun rencana disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya;
2. program prioritas dalam RKPD harus sesuai dengan prioritas sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJPD, RKP dan Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat serta dengan memperhatikan visi dan misi Kepala Daerah terpilih;
3. program dan kegiatan prioritas dalam RKPD harus konsisten dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. program dan kegiatan prioritas dalam RKPD harus dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (*outcome*) untuk program dan indikator kinerja keluaran (*output*) untuk kegiatan, yang bersifat realistis dan terukur;
5. program dan kegiatan dalam RKPD harus dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017, RKPD disusun melalui tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan RKPD (Pasal 73) meliputi:
   a. penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RKPD;
   b. orientasi mengenai RKPD;
   c. penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD; dan
   d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD.
2. Penyusunan rancangan awal RKPD (Pasal 79) meliputi:
   a. Perumusan rancangan awal RKPD dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut:
      1) analisis gambaran umum kondisi daerah;
      2) analisis rancangan kerangka ekonomi daerah;
      3) analisis kapasitas riil keuangan daerah;
      4) penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah;
      5) perumusan permasalahan pembangunan daerah;
      6) penelaahan terhadap sasaran RPJMD;
      7) penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD;
      8) penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dan program strategis nasional;
      9) penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;
      10) perumusan prioritas pembangunan daerah; dan
      11) perumusan rencana kerja program dan pendanaan.
   b. Penyajian rancangan awal RKPD
      Rancangan awal RKPD disajikan dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut:
      1) pendahuluan;
      2) gambaran umum kondisi daerah;
      3) kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
      4) sasaran dan prioritas pembangunan daerah;
      5) arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota;
      6) rancangan kerja dan pendanaan daerah;

7) kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah;
8) penutup.

3. Penyusunan rancangan RKPD (Pasal 85)

Penyusunan rancangan RKPD adalah proses penyempurnaan rancangan awal RKPD provinsi berdasarkan:

a. rancangan awal Rencana Kerja seluruh Perangkat Daerah provinsi yang telah diverifikasi; dan
b. hasil penelahaan terhadap rancangan awal RKP dan program strategis nasional.

4. Pelaksanaan Musrenbang RKPD.

Musrenbang RKPD dilakukan dalam rangka penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD yang mencakup:

1) menyepakati permasalahan pembangunan daerah;
2) menyepakati prioritas pembangunan daerah;
3) menyepakati arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota lingkup provinsi;
4) menyepakati program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi;
5) penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan nasional; dan
6) klarifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan provinsi dengan program dan kegiatan kabupaten/kota yang diusulkan berdasarkan hasil musrenbang kabupaten/kota.

5. Perumusan rancangan akhir RKPD

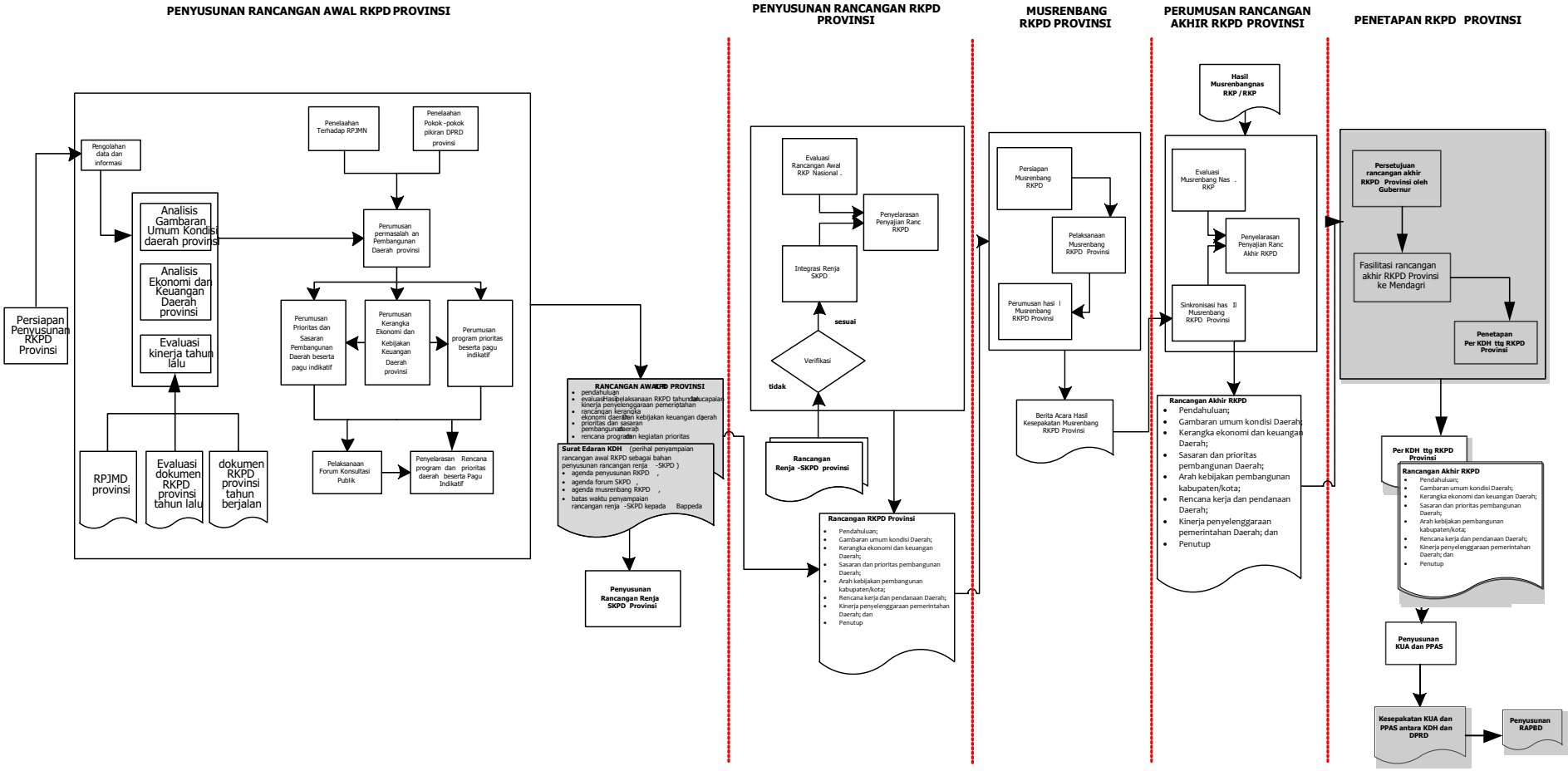
Perumusan rancangan akhir RKPD merupakan proses penyempurnaan rancangan RKPD menjadi rancangan akhir RKPD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RKPD dan bertujuan untuk memastikan program dan kegiatan Perangkat Daerah telah diakomodir dalam rancangan akhir RKPD serta sebagai bahan penyusunan Perkada tentang RKPD.

6. Penetapan RKPD

1) RKPD ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dan dijadikan sebagai:
   a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah;
   b. pedoman penyelarasan prioritas pembangunan provinsi dengan kabupaten/kota; dan
   c. pedoman penyusunan rancangan kebijakan umum APBD Provinsi serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Provinsi.
2) Rancangan kebijakan umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang disampaikan Gubernur kepada DPRD untuk dibahas sebagai landasan penyusunan rancangan APBD.

Penyusunan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 memiliki makna yang strategis karena merupakan penjabaran tahap ketiga dari RPJPD 2005-2025 dan juga merupakan tahun kelima dari pelaksanaan RPJMN 2020-2024. Serta pelaksanaan tahun keempat RPJMD 2017-2022. RKPD yang telah ditetapkan digunakan sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Gambar I.1 Bagan Alir Tahapan Penyusunan RKPD Provinsi



1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembanguan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 – 2034);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 4 Seri E).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

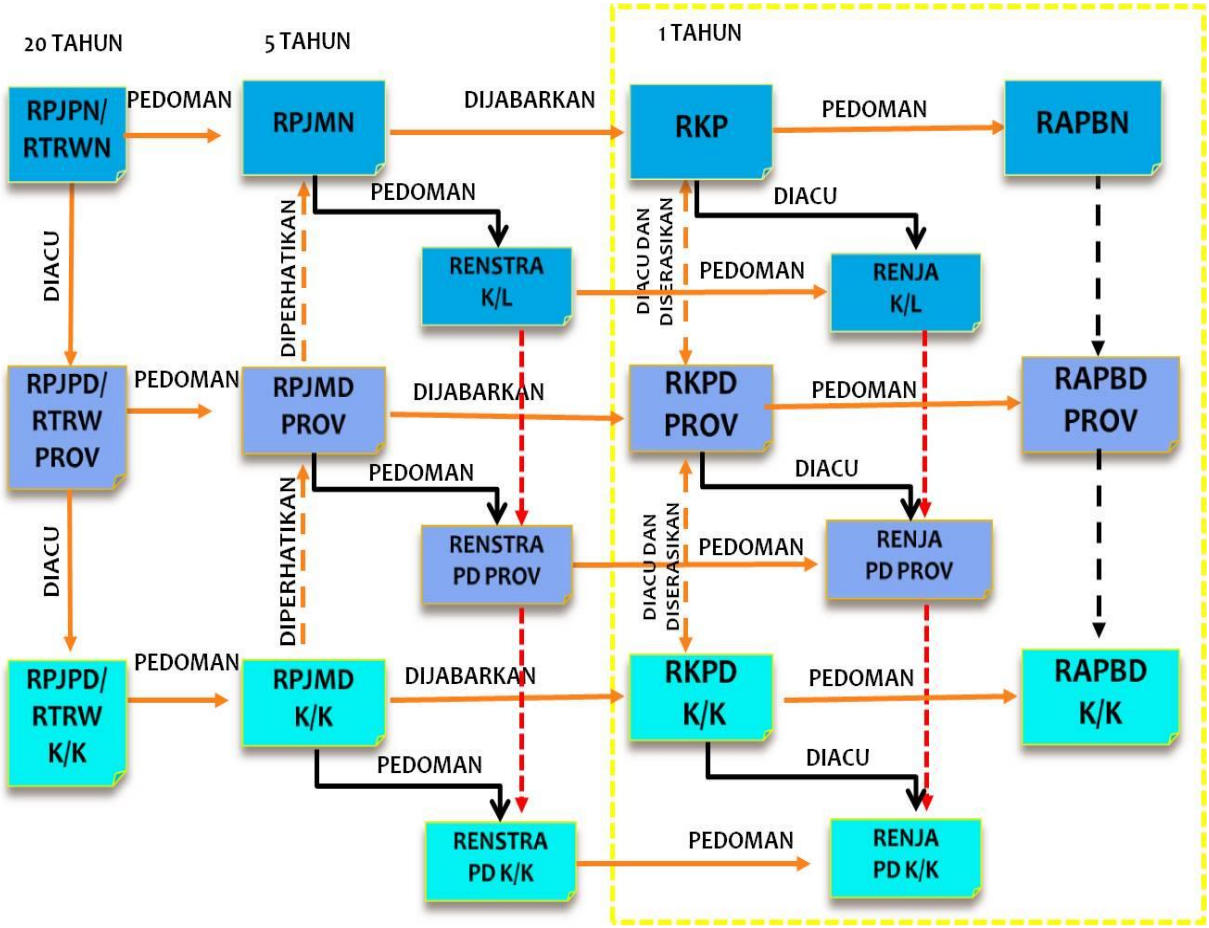
Dalam menyusun dokumen RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memperhatikan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Penyusunan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 merupakan bagian dari penerapan sistem perencanaan pembangunan nasional, dan bagian dari penerapan sistem perencanaan dan penganggaran terpadu. RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 disusun dengan memperhatikan kebijakan tingkat nasional, yang mengacu pada RKP Tahun 2021 yang merupakan penjabaran dari RPJMN Tahun 2020-2024 serta Renstra masing-masing Kementerian dan Lembaga Pemerintah non Kementerian di tingkat pusat. Dalam konteks

daerah, dokumen RKPD Tahun 2021 juga disusun dengan berpedoman pada Perubahan RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 dan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022.

Dokumen-dokumen perencanaaan sebagaimana tersebut di atas yang bersifat spasial perlu disinkronisasikan dengan dokumen-dokumen perencanaan spasial, yaitu dokumen RTRW Nasional, RTR Pulau dan RTR Kawasan Strategis Nasional pada level Pemerintah Pusat dan dokumen RTRW Daerah, RDTR serta RTR Kawasan Strategis Daerah. Dokumen RTRW Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan RPJP Daerah dan RPJM Daerah. Dengan demikian, korelasi antara RKPD dengan dokumen perencanaan spasial (RTRW Daerah) terletak pada hubungannya dengan dokumen antara RPJP Daerah dan RPJM Daerah, yang sama-sama diacu oleh RKPD.

Berdasarkan kondisi di atas, maka keterkaitan antar dokumen perencanaan, spasial dan penganggaran adalah sebagaimana pada Gambar I.2 berikut.

Gambar I.2
Hubungan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Nasional, Daerah, dan Perangkat Daerah



Sumber: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (diolah)

1.4 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun dengan maksud untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki guna peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan.

Adapun tujuannya adalah sebagai acuan bagi seluruh Instansi/Kantor Wilayah/Lembaga Teknis Daerah/Dinas Daerah/Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menyusun program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Tahun Anggaran 2021.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Sistematika Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi gambaran umum penyusunan RKPD yang meliputi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen RKPD dengan dokumen rencana pembangunan daerah, sistematika dokumen RKPD, serta maksud dan tujuan penyusunan RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Berisi penjelasan gambaran umum kondisi daerah dari berbagai aspek, hasil evaluasi RKPD tahun lalu dan tahun berjalan, realisasi RPJMD serta permasalahan pembangunan daerah.

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu (tahun 2019) dan perkiraan tahun berjalan (tahun 2020), yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2021 berdasarkan hasil analisis terhadap evaluasi hasil RKPD tahun lalu (tahun 2019) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi masalah ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta pendanaan.

BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

Mengemukakan tentang arahan kebijakan pembangunan kabupaten/kota yang ditetapkan oleh provinsi, yang nantinya akan menjadi pedoman bagi daerah kabupaten/kota dalam menyusun RKPD.

BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD. Rencana program dan kegitan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Memuat indikator penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dijadikan Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VIII PENUTUP

Berisi penegasan bahwa dalam melaksanakan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 diperlukan sinergitas yang mantap di jajaran pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Bellitung, DPRD, pihak swasta dan seluruh lapisan masyarakat.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah

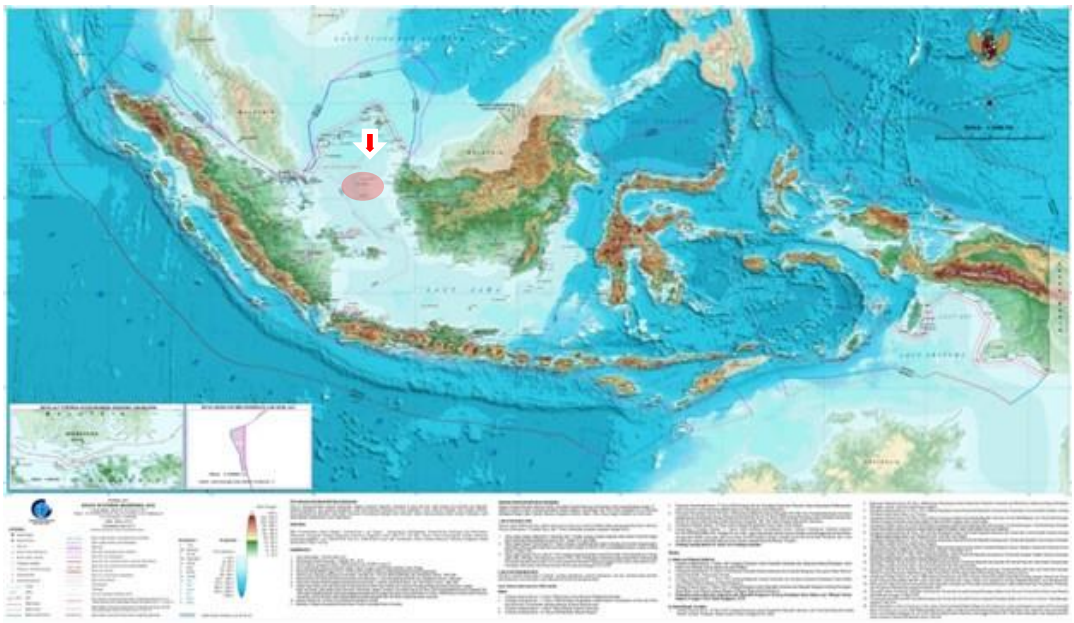
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

A. Kondisi Geografi Daerah

1. Kondisi Astronomis dan Geografi

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara astronomis terletak pada 104°50’ sampai 109°30’ Bujur Timur dan 0°50’ sampai 4°10’ Lintang Selatan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar II.1 berikut ini.

Gambar II.1
Gambar Lokasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Sumber: Badan Informasi Geospasial (BIG), 2018

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berada pada wilayah Indonesia sebelah Barat, dengan posisi geografis yang sangat strategis. Berada pada pertemuan arus Selat Malaka dan Laut Cina Selatan, sehingga menjadi wilayah yang kaya akan sumber daya kelautan dan perikanan. Disamping itu, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dekat dan berada pada Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I, seperti tergambar pada peta Alur Laut Kepulauan Indonesia pada Gambar II.2. Jalur pada ALKI I yang difungsikan untuk pelayaran dari Laut Cina Selatan melintasi Laut Natuna, Selat Karimata, Laut Jawa, dan Selat Sunda ke Samudera Hindia, dan sebaliknya; dan untuk pelayaran dari Selat Singapura melalui Laut Natuna dan sebaliknya (Alur Laut Cabang I A), berada pada posisi silang antara Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan, Pulau Jawa dengan Semanjung Malaysia dan Singapura. Kondisi ini sangat menguntungkan bagi berkembangnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk saat ini dan di masa yang akan datang.

Gambar II.2
Peta Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)



Walaupun demikian, pada wilayah ALKI I terdapat beberapa potensi ancaman, terutama apabila terdapat konflik klaim wilayah di Laut Cina Selatan. Digunakannya wilayah ALKI I untuk kegiatan manuver angkatan perang negara yang terlibat konflik di Cina Selatan. Padatnya lalu lintas pelayaran di Selat Malaka, juga mempunyai potensi kerawanan dalam keamanan kawasan.

Gambar II.3
Peta Administrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Sumber: RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034

Sebagaimana terlihat pada Gambar II.3 posisi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dikelilingi oleh laut dan merupakan daerah kepulauan. Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebelah Barat berbatasan dengan Selat Bangka, sebelah Timur dengan Selat Karimata, sebelah Utara dengan Laut Natuna, sedangkan sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa.

2. Luas dan Daerah Administratif

Luas wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai 81.725,23 km^2. Terdiri atas daratan seluas 16.424,23 km^2 atau 20,10 persen dari total wilayah, dan wilayah laut seluas 65.301,00 km^2 atau 79,90 persen dari total wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang secara terperinci dapat dilihat pada data Tabel II.1.

Tabel II.1
Luas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota dan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016-2020

Nama Kabupaten/Kota	Nama Ibu Kota	Luas Wilayah (Km^2)				
		2016	2017	2018	2019	2020
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
Bangka	Sungailiat	2.950,69	2.950,69	2.950,69	2.950,69	2.950,69
Bangka Barat	Muntok	2.820,61	2.820,61	2.820,61	2.820,61	2.820,61
Bangka Tengah	Koba	2.126,36	2.126,36	2.126,36	2.126,36	2.126,36
Bangka Selatan	Toboali	3.607,08	3.607,08	3.607,08	3.607,08	3.607,08
Belitung	Tanjungpandan	2.293,69	2.293,69	2.293,69	2.293,69	2.293,69
Belitung Timur	Manggar	2.507,00	2.507,00	2.507,00	2.507,00	2.507,00
Pangkalpinang	Pangkalpinang	118,80	118,80	118,80	118,80	118,80
Luas Daratan		16.424,23	16.424,23	16.424,23	16.424,23	16.424,23
Luas Laut		65.301,00	65.301,00	65.301,00	65.301,00	65.301,00
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		**81.725,23**	**81.725,23**	**81.725,23**	**81.725,23**	**81.725,23**

Sumber: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka (2020)

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000, yang pada saat awalnya terdiri dari 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Bangka dan Kabupaten Belitung, serta 1 (satu) Kota yaitu Kota Pangkalpinang. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan pemekaran, dengan membentuk 4 (empat) kabupaten baru yaitu Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Selatan dan Kabupaten Belitung Timur, sehingga saat ini jumlah kabupaten dan kota menjadi 7 (tujuh), terdiri dari 6 (enam) Kabupaten dan 1 (satu) Kota. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara terperinci dapat dilihat pada Tabel II.2 di bawah ini.

Tabel II.2
Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota dan Kecamatan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016-2020

Nama Kota/Kabupaten	Nama Ibu Kota	Jumlah Kecamatan				
		2016	2017	2018	2019	2020
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
Kabupaten Bangka	Sungailiat	8	8	8	8	8
Kabupaten Bangka Barat	Muntok	6	6	6	6	6
Kabupaten Bangka Tengah	Koba	6	6	6	6	6
Kabupaten Bangka Selatan	Toboali	8	8	8	8	8
Kabupaten Belitung	Tanjungpandan	5	5	5	5	5
Kabupaten Belitung Timur	Manggar	7	7	7	7	7
Pangkalpinang	Pangkalpinang	7	7	7	7	7
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		**47**	**47**	**47**	**47**	**47**

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2020)

Tabel II.2 dapat diketahui bahwa, total seluruh kecamatan yang terdapat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebanyak 47 kecamatan. Kabupaten Bangka dan Kabupaten Bangka Selatan memiliki jumlah wilayah Administrasi Kecamatan yang paling banyak se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan jumlah masing-masing 8 kecamatan, sedangkan Kabupaten Belitung merupakan kabupaten yang paling sedikit memiliki wilayah Administrasi Kecamatan yakni sebanyak 5 kecamatan.

Tabel II.3
Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota dan Desa
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016-2020

Nama Kota/Kabupaten	Nama Ibu Kota	Jumlah Desa				
		2016	2017	2018	2019	2020
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
Kabupaten Bangka	Sungailiat	62	62	62	62	62
Kabupaten Bangka Barat	Muntok	60	60	60	60	60
Kabupaten Bangka Tengah	Koba	56	56	56	56	56
Kabupaten Bangka Selatan	Toboali	50	50	50	50	50
Kabupaten Belitung	Tanjungpandan	42	42	42	42	42
Kabupaten Belitung Timur	Manggar	39	39	39	39	39
Pangkalpinang	Pangkalpinang	0	0	0	0	0
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		**309**	**309**	**309**	**309**	**309**

Sumber : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka Tahun (2020)

Tabel II.3 di atas menunjukkan bahwa, Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memiliki jumlah wilayah Administrasi Desa paling banyak adalah Kabupaten Bangka dengan jumlah 62 desa, sedangkan kabupaten yang paling sedikit memiliki wilayah Administrasi Desa adalah Kabupaten Belitung Timur yakni sebanyak 39 desa. Adapun total seluruh desa yang ada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebanyak 309 Desa.

Tabel II.4
Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota dan Kelurahan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016-2020

Nama Kota/Kabupaten	Nama Ibu Kota	Jumlah Kelurahan				
		2016	2017	2018	2019	2020
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
Kabupaten Bangka	Sungailiat	15	19	19	19	19
Kabupaten Bangka Barat	Muntok	4	4	4	4	4
Kabupaten Bangka Tengah	Koba	7	7	7	7	7
Kabupaten Bangka Selatan	Toboali	3	3	3	3	3
Kabupaten Belitung	Tanjungpandan	7	7	7	7	7
Kabupaten Belitung Timur	Manggar	0	0	0	0	0
Pangkalpinang	Pangkalpinang	42	42	42	42	42
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		**78**	**78**	**82**	**82**	**82**

Sumber: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka Tahun (2020)

Tabel II.4 di atas diketahui bahwa Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memiliki jumlah wilayah Administrasi Kelurahan yang paling banyak adalah Kota Pangkalpinang dengan jumlah 42 kelurahan dan kabupaten yang paling sedikit memiliki wilayah Administrasi Kelurahan adalah Kabupaten Belitung Timur yang tidak memiliki wilayah kelurahan. Total seluruh kelurahan yang ada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 78 kelurahan.

Tabel II.5
Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota dan Luas
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016-2020

Nama Kabupaten/Kota	Nama Ibu Kota	Luas Wilayah (Km²)				
		2016	2017	2018	2019	2020
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
Bangka	Sungailiat	2.950,69	2.950,69	2.950,69	2.950,69	2.950,69
Bangka Barat	Muntok	2.820,61	2.820,61	2.820,61	2.820,61	2.820,61
Bangka Tengah	Koba	2.126,36	2.126,36	2.126,36	2.126,36	2.126,36
Bangka Selatan	Toboali	3.607,08	3.607,08	3.607,08	3.607,08	3.607,08
Belitung	Tanjungpandan	2.293,69	2.293,69	2.293,69	2.293,69	2.293,69
Belitung Timur	Manggar	2.507,00	2.507,00	2.507,00	2.507,00	2.507,00
Pangkalpinang	Pangkalpinang	118,80	118,80	118,80	118,80	118,80
Luas Daratan		16.424,23	16.424,23	16.424,23	16.424,23	16.424,23
Luas Laut		65.301,00	65.301,00	65.301,00	65.301,00	65.301,00
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		**81.725,23**	**81.725,23**	**81.725,23**	**81.725,23**	**81.725,23**

Sumber: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka Tahun (2020)

Tabel II.5 di atas dapat diketahui bahwa, Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memiliki luas wilayah administrasi yang paling besar adalah Kabupaten Bangka Selatan dengan luas wilayah 3.607,08 km² dan Kabupaten/Kota yang paling kecil luas wilayah Administrasi adalah Kota Pangkalpinang sebesar 118,80 km². Total luas wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 81.725,23 km² yang terdiri dari luas lautan 65.301,00 km² dan luas daratan 16.424,23 km².

3. Keadaan Topografi, Geologi dan Hidrologi

Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai topografi yang umumnya relatif datar yang terdiri dari dataran rendah hingga berbukit dan hanya sebagian kecil yang bergunung. Ketinggian dataran rendah rata-rata sekitar 50 meter di atas permukaan laut. Titik tertinggi terdapat pada puncak Gunung Maras di Kabupaten Bangka dengan ketinggian 699 meter dan puncak Gunung Tajam di Kabupaten Belitung dengan ketinggian 445 meter di atas permukaan laut. Komposisi lahan datar di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai luas sekitar 46,19 persen, bergelombang 41,08 persen, dan sisanya 12,37 persen merupakan wilayah berbukit dan bergunung serta berawa-rawa. Wilayah berawa-rawa umumnya terdapat di Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Bangka Tengah, dan sebagian kecil di Kabupaten Bangka Selatan.

Pulau Bangka dan Belitung termasuk bagian tengah dari "*Tin Mayor South East Asian Tin Belt*" dengan tipe *granit main range* yang mempunyai ciri-ciri megakristal (terutama *K-Feldspar*) dan terjadi mineralisasi timah beserta mineral ikutannya. Granit ini umumnya terdiri atas granit biotit dan granit muskovit yang semuanya merupakan tipe sedimen tipe S yaang diperkirakan umurnya Trias (Sumber: Arsip PT. Koba Tin: *Survey* dan *Geology Department*, 2007). Oleh karena itu, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki cadangan timah terbesar di Indonesia yang berpotensi sebagai modal dasar pembangunan. Terdapat pula mineral-mineral ikutan timah seperti *Zircon* ($ZrSiO_4$), *Monazite* ($(Ce, La, Dy)PO_4$ $(ThSi)O_2$), *Hematite* (Fe_2O_3), Pyrite (FeS_2),

Ilmenite ($FeTiO_3$), dan *Xenotime* (YPO_4). Sedangkan secara geologis mineralisasi timah di Indonesia terikat pada sabuk granit (*granite belt*) Asia Tenggara yang memanjang dari Yunan (China) melalui Myanmar, Thailand, Semenanjung Melaka sampai pada Kepulauan Indonesia terutama di Pulau Bangka, Pulau Belitung, Pulau Singkep dan Pulau Karimun. Selain produk timah dan mineral ikutannya, ada pula produk tambang lainnya seperti pasir kwarsa (SiO_2), material Kaolin, dan *bilitonite* (dikenal dengan nama "satam"). Satam banyak digunakan untuk ornamen/hiasan cincin, bros, dan perhiasan lainnya. Sedangkan Kaolin merupakan bahan baku untuk pembuatan kertas, keramik, deterjen, lem, kosmetik dan bahan untuk industri kimia. Pasir kuarsa dibandingkan dengan pasir biasa adalah lebih putih dan butirannya lebih kecil. Material ini digunakan untuk pembuatan kaca.

Hasil kajian hidrologi menyatakan bahwa daerah Kepulauan Bangka Belitung dihubungkan oleh perairan laut dan pulau-pulau kecil. Secara keseluruhan daratan dan perairan Bangka Belitng merupakan satu kesatuan dari bagian dataran Sunda, sehingga perairannya merupakan bagian Dangkalan Sunda (Sunda *Shelf*) dengan kedalaman laut tidak lebih dari 30 meter. Kepulauan Bangka Belitung mempunyai dua jenis perairan yaitu perairan terbuka dan perairan semi tertutup. Perairan terbuka yang terdapat di sekitar pulau Bangka terletak di sebelah Utara, Timur dan Selatan Pulau Bangka. Sedangkan perairan semi tertutup terdapat di Selat Bangka dan Teluk Kelabat di Bangka Utara. Sementara itu perairan di Pulau Belitung umumnya bersifat perairan terbuka. Disamping sebagai daerah perairan laut, daerah Kepulauan Bangka Belitung juga mempunyai banyak sungai seperti: Sungai Baturusa, Sungai Kepoh, Sungai Buluh, Sungai Kotawaringin, Sungai Kampa, Sungai Layang, Sungai Manise dan Sungai Kurau di Pulau Bangka. Sedangkan di Pulau Belitung terdapat Sungai Cecuruk, Sungai Buding, dan Sungai Lenggang.

4. Klimatologi

Kepulauan Bangka Belitung memiliki Iklim Tropis yang dipengaruhi angin musim yang mengalami bulan basah dan kering. Berdasarkan data BPS yang dirilis dari BMKG selama tahun 2012-2016, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki suhu rata-rata tahunan antara 27-31 ˚C dan curah hujan rata-rata tahunan antara 397-580 mm. Curah hujan maximum tertinggi terjadi pada tahun 2015 sebesar 577,3 mm di Belitung dan tahun 2012 sebesar 466,2 mm di Pangkalpinang. Sementara kelembabannya relatif tinggi dengan fluktuasi yang kecil. Di bulan Desember dan Januari, biasanya musim penghujan terjadi di Kepulauan Bangka Belitung, disertai angin kencang dan ombak laut cenderung meninggi.

5. Kondisi Lahan

Penggunaan lahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didominasi oleh hutan negara, perkebunan, tegalan dan permukiman. Namun berdasarkan data numerik yang diperoleh dari BPS, terlihat juga bahwa lahan kering yang tidak termanfaatkan juga cukup luas (lahan bukan sawah) mencapai 121.407 Ha. Lebih lanjut dapat diperhatikan Tabel II.6. Dari seluruh luas lahan 69% telah digunakan untuk pertanian legal/kebun/ladang/huma, tambak, kolam/tebat/ empang, lahan untuk tanaman kayu-kayuan, perkebunan negara/swasta, dan lahan sawah. Sedangkan sisanya merupakan bangunan, pekarangan, padang rumput dan lahan yang sementara tidak diusahakan.

Tabel II.6
Jenis dan Luas Penggunaan Lahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Jenis Penggunaan Lahan	Tahun			
	2015	2016	2017	2018
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
Pertanian Sawah	15.719	22.771	25.058	25.093
Tegalan	113.105	117.376	99.038	97.930
Ladang	30.348	28.147	27.435	30.416
Perkebunan	441.152	367.848	391.064	394.408
Hutan Rakyat	47.753	42.637	43.315	43.661
Tambak	*	*	*	*
Kolam	*	*	*	*
Pengembalaan	1.815	2.263	3.232	3.232
Tanah kosong/ (sementara tidak diusahakan)	76.588	67.415	55.987	59.174
Lain-Lain (pekarangan)	397.806	538.195	529.810	519.497
Permukiman	517.741	455.762	489.080	490.607
Hutan Negara	*	*	*	*
Rawa	*	*	*	*
Lainnya	*	*	*	*
JUMLAH	**1.642.027**	**1.642.414**	**1.664.019**	**1.664.018**

Sumber: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka Tahun (2020)
(: dikelompokkan ke jenis penggunaan lahan lainnya)*

Luas Penggunaan Lahan Tahun 2018 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung paling besar digunakan untuk lain-lain (pekarangan) 519.497 Ha, kemudian digunakan untuk permukiman sebesar 490.607 ha dan perkebunan sebesar 394.408 Ha, serta luas penggunaan lahan paling kecil di peruntukan pada pengembalaan sebesar 3.232 Ha.

B. Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan potensi karakteristik wilayah dapat diidentifikasi bahwa wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan perkebunan, perikanan, kehutanan, pertanian, pertambangan, industri, pariwasata dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034, pengembangannya disesuaikan dengan arahan yang digariskan pada RTRWN dan RTR Pulau Sumatera. Perencanaan dan pengembangan dilakukan berdasarkan rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan kawasan strategis.

Perencanaan dan pengembangan rencana struktur ruang, meliputi sistem perkotaan, sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air dan sistem prasarana lingkungan.

1. Rencana Sistem Perkotaan

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014, rencana sistem perkotaan secara hierarkis dan dalam bentuk pusat kegiatan, sesuai dengan kebijakan nasional, potensi, dan rencana pengembangan wilayah provinsi sistem perkotaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

1. Pusat Kegiatan Nasional (PKNp), yaitu: Kota Pangkalpinang;
2. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), meliputi: Muntok, Tanjungpandan, Manggar;
3. Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp), meliputi: Toboali dan Koba;
4. Pusat Kegiatan Lingkungan (PKL), meliputi: Kelapa, Parittiga, Belinyu, Sungailiat, Sungai Selan, Sijuk, Membalong, Badau, Kelapa Kampit, Gantung, Puding Besar, Pangkalanbaru, Payung, dan Selat Nasik.

Namun berdasarkan revisi RTRW Nasional yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017, ada perubahan status sistem perkotaan di mana Kota Pangkalpinang yang tadinya merupakan Pusat Kegiatan Nasional Promosi (PKNp) naik kelas menjadi Pusat Kegiatan Nasional (PKN).

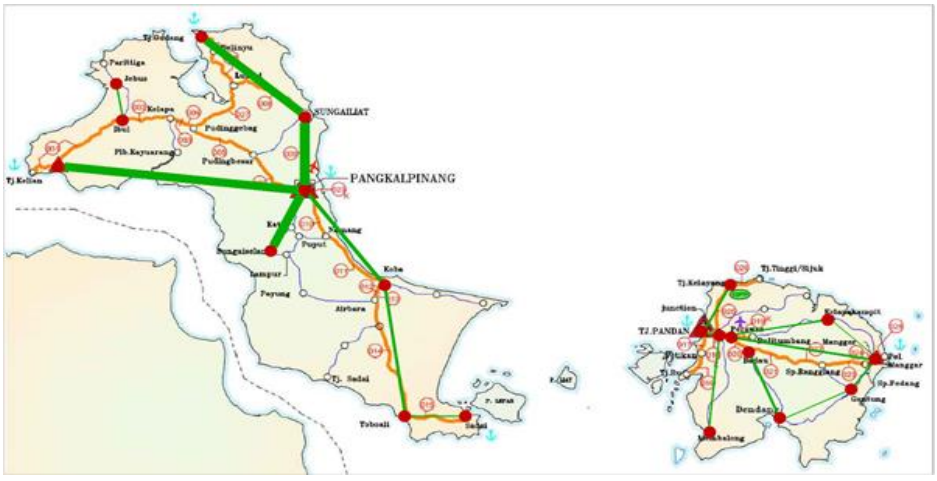
2. Rencana Sistem Jaringan Transportasi

Sesuai dengan karakteristik geografis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang merupakan wilayah kepulauan, maka sistem transportasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung direncanakan sebagai sistem transportasi terpadu antar moda yang meliputi sistem transportasi darat, sistem transportasi laut dan sistem transportasi udara, dengan uraian sebagai berikut:

a. Sistem Transportasi Darat

Sistem transportasi darat yang ada di Provinsi ini terdiri dari: jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan serta jaringan transportasi perkotaan. Peningkatan dan pengembangan jaringan jalan yang berkenaan dengan peningkatan status jalan diatur sesuai peraturan perundang-undangan. Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, terdiri atas: jaringan jalan dan jembatan, jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan.

Gambar. II.4
Traffic Flow pada Ruas Jalan Nasional dan Provinsi
pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Pengembangan jaringan yang menjadi kewenangan pusat diatur dengan Surat Keputusan Menteri terkait, pengembangan jaringan jalan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi diatur dengan Surat Keputusan Gubernur. Pengembangan jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan dilakukan melalui peningkatan dan pengembangan jalur penyeberangan.

b. Sistem Transportasi Laut

Sistem transportasi laut terdiri dari pelabuhan dan alur pelayaran. Pengembangan sistem transportasi laut ditujukan untuk mendukung sistem produksi, sistem pergerakan penumpang dan barang dengan sistem kegiatan perekonomian antar kawasan maupun internasional.

Pengembangan sistem transportasi laut dilakukan melalui pengembangan dan/atau pembangunan pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul dan pelabuhan pengumpan, serta dilakukan juga melalui pengembangan alur pelayaran. Sesuai dengan RTRWN dan kewenangan Pemerintah Provinsi, sistem pelabuhan laut di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

Tabel II.7
Sistem Pelabuhan Laut di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.	Klasifikasi & Nama Pelabuhan	Kabupaten/Kota
(1)	*(2)*	*(3)*
A	**Pelabuhan Utama**	
1	Pelabuhan Tanjung Batu	Belitung
B	**Pelabuhan Pengumpul**	
1	Pelabuhan Belinyu	Bangka
2	Pelabuhan Sadai	Bangka Selatan
3	Pelabuhan Muntok	Bangka Barat
4	Pelabuhan Pangkal Balam	Pangkalpinang
5	Pelabuhan Tanjung Pandan	Belitung
6	Pelabuhan Manggar	Belitung Timur
C	**Pelabuhan Pengumpan**	
1	Pelabuhan Sungailiat	Bangka
2	Pelabuhan Sungai Selan	Bangka Tengah
3	Pelabuhan Toboali	Bangka Selatan
4	Pelabuhan Tanjung Berikat	Bangka Tengah
5	Pelabuhan Tanjung Kalian	Bangka Barat
6	Pelabuhan Tanjung Tedung	Bangka Tengah
7	Pelabuhan Teluk Asam	Belitung Timur
8	Pelabuhan Dendang	Belitung Timur
D	**Pelabuhan Khusus (Wisata)**	
1	Pelabuhan Tanjungpandan	Belitung
2	Pelabuhan Tanjung Kelayang	Belitung

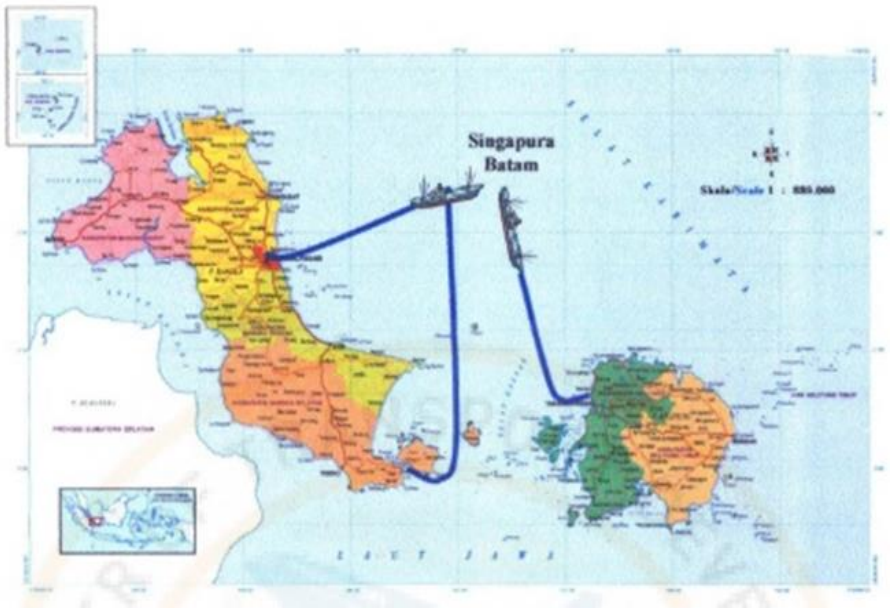
Sumber: Materi Teknis RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034

Adapun angkutan penyeberangan meliputi simpul dan jalur sebagai berikut:

1. Pelabuhan penyeberangan Tanjung Kalian (Kabupaten Bangka Barat) - Tanjung Api-api (Provinsi Sumatera Selatan);
2. Pelabuhan penyeberangan Tanjung Ru (Kabupaten Bangka Barat) - Pelabuhan Belinyu (Kabupaten Bangka);
3. Pelabuhan penyeberangan Pangkal Balam (Kota Pangkal Pinang) - Tanjung Pandan (Kabupaten Belitung); dan

4. Pelabuhan penyeberangan Sadai (Kabupaten Bangka Selatan) - Tanjung Pandan (Kabupaten Belitung) dan Tanjung Api-api (Provinsi Sumatera Selatan).

Gambar. II.5
Pengembangan Jalur Pelayaran Laut



c. Sistem transportasi udara

Sistem transportasi udara terdiri dari tatanan bandar udara dan ruang lalu lintas udara. Tatanan bandar udara terdiri dari: a) bandar udara pengumpul *(hub)*; dan b) bandar udara pengumpan *(spoke).* Bandar udara pengumpul merupakan bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan yang luas dari berbagai bandar udara yang melayani penumpang dan/atau kargo dalam jumlah besar dan mempengaruhi perkembangan ekonomi secara nasional atau berbagai provinsi.

Pengembangan sistem transportasi udara di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terdiri atas: Bandar Udara Depati Amir Pangkalan Baru di Pangkalpinang dan Bandar Udara H.AS. Hanandjoeddin di Tanjung Pandan. Dalam pembangunan dan pengembangan bandar udara harus memperhatikan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Rencana Jaringan Energi

Rasio elektrifikasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebesar 100 persen. Dengan kondisi semua rumah tangga dan desa sudah dialiri listrik PLN. Jumlah pelanggan listrik PLN di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019 berjumlah 472.186 pelanggan, dengan daya terpasang sebesar 352.917 KW dan jumlah produksi listrik sebesar 1.218.892.656 KWh (Babel Dalam Angka 2020).

Gambar. II.6
Kondisi Kelistrikan Bangka Belitung



Pengembangan jaringan energi ditujukan bagi pengembangan jaringan prasarana energi listrik yang meliputi prasarana pembangkit dan jaringan listrik. Pengembangan prasarana pembangkit energi listrik dilakukan dengan memanfaatkan potensi sumber daya primer, terutama sumber energi terbarukan yang banyak tersedia di Kabupaten/Kota diantaranya tenaga air, tenaga surya, tenaga angin, biogas, biomasa, gelombang laut dan sumber energi alternatif lainnya. Pengembangan jaringan energi listrik dilakukan melalui pembangunan pembangkit listrik, gardu induk dan jaringan listrik. Seiring dengan bertambahnya penduduk dan pembangunan wilayah, kebutuhan akan energi listrik tentunya akan semakin meningkat, proyeksi kebutuhan energi listrik dapat dilihat pada Tabel II.8 di bawah ini.

Tabel II.8
Rekapitulasi Proyeksi Kebutuhan Daya Listrik 2010 – 2030– KVA

WILAYAH		2010	2015	2020	2025	2030
(1)		*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
A. PULAU BANGKA						
1	Bangka	138.036	147.013	160.571	175.380	190.182
2	Bangka Barat	73.556	78.340	85.564	93.456	101.344
3	Bangka Tengah	89.821	95.662	104.484	114.120	123.752
4	Bangka Selatan	86.245	91.854	100.325	109.578	118.826
5	Pangkal Pinang	89.501	94.440	102.543	111.341	120.738
JUMLAH		**477.159**	**507.309**	**553.487**	**603.875**	**654.842**
B. PULAU BELITUNG						
6	Belitung	83.842	87.455	92.464	97.759	104.266
7	Belitung Timur	62.441	65.133	68.863	72.807	77.653
JUMLAH		**146.283**	**152.588**	**161.327**	**170.566**	**181.919**
JUMLAH TOTAL		**623.442**	**659.897**	**714.814**	**774.441**	**836.761**

Sumber: Materi Teknis RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034

Gambar. II.7
Rencana Pembangunan Transmisi Bangka Belitung 2017-2026 (RUPTL)



GARDU INDUK	KAPASITAS (MVA)	KETERANGAN
GI MUNTOK	1X60	TARGET OPERASI JUNI 2018 PROGRESS : GROUND BREAKING
GI TOBOALI	1X60	TARGET OPERASI DES 2018 PROGRESS : PEMBEBASAN LAHAN
GI PANGKALPINANG 2	1X60	TARGET OPERASI 2018
GI PANGKALPINANG 3	1X60	TARGET OPERASI 2019
GI BELINYU	1X30	TARGET OPERASI 2026

GARDU INDUK	KAPASITAS (MVA)	KETERANGAN
GI MANGGAR	1X30	TARGET OPERASI 2018 PROGRES : KONSTRUKSI
GI BELITUNG UTARA	1X30	TARGET OPERASI 2019

Dengan keterbatasan alternatif pembangkit listrik maka arahan pengembangan energi listrik di Provinsi Bangka Belitung adalah pembangkit listrik berbahan bakar non minyak, salah satunya adalah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan menggunakan bahan bakar batubara. Sedangkan untuk daerah terpencil arahan penyediaan prasarana listrik adalah dengan membangun jaringan terisolasi. Arahan pengaturan penempatan pembangkit dan jaringan transmisi bertegangan tinggi dengan mengutamakan keselamatan dan keamanan masyarakat dan lingkungan.

Gambar. II.8
Energi Baru dan Terbarukan



Eksisting	Rencana
1) IPP - PLTBm Listrindo 4 MW (Bangka Barat) 2) IPP - PLTBm Belitung Energi 4 MW (Belitung Timur)	1. IPP – PLTBm Energi Karya Persada 6 MW (Sudah PPA, Konstruksi). (Bangka Barat) 2. IPP - PLTBm PT. Sentosa Jaya Purnama 10 MW (Sudah PPA, Konstruksi). (Bangka Tengah)



Eksisting	Rencana
1) IPP - PLT Biogas Austindo 1,2 MW, ekspansi 0,6 MW (total 1,8 MW) . (Belitung Timur) 2) Excess Power - PLTBg Tuing 1,2 MW (Bangka)	1) IPP – PLTBg PT. Bangka Biogas Synergi, 2 MW (sudah PPA, Konstruksi). (bangka) 2) IPP - PLTBg PT. Gunung Sawit Bina Lestari, 4 MW (pengajuan Proposal). (Bangka Barat) 3) IPP - PLTBg PT. Gunung Maras Lestari, 3 MW (pengajuan Proposal). (Bangka) 4) IPP - PLTBg PT. Gunung Sawit Bina Lestari, 4 MW (pengajuan Proposal). (Bangka Barat) 5) IPP - PLTBg PT. Asindo Tech, 4 MW (pengajuan Proposal).(Bangka) 6) IPP - PLTBg PT. Prima Gasifikasi Indonesia, 10 MW (Pengajuan Proposal). (Bangka Selatan)



Eksisting	Rencana
1) PLTS On Grid 1 MWp di Belinyu 2) PLTS Off Grid 40 KWp P. Gersik 3) PLTS Off Grid 80 KWp P. Celagen 4) PLTS Off Grid 80 KWp P. Bukulimau 5) PLTS Off Grid 125 KWp P. Pongok	1) IPP – PLTS Synergi Energy Baru, 4 MW (proposal) (Bangka) 2) IPP – PLTS Cakrawala Energi Nusantara, 1 MW (proposal) (Belitung) 3) IPP – PLTS Pulau Tersebar (8.860 kWp)



Rencana
1) PLTD CPO 5 MW oleh Kementrian ESDM (Belitung)

Tabel II.9
Rasio Desa Berlistrik PLN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.	Kabupaten/Kota	*Jumlah Desa	Desa Berlistrik PLN	Rasio Desa Berlistrik PLN (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(%)*
1	Bangka	71	71	100
2	Bangka Barat	64	64	100
3	Bangka Tengah	63	63	100
4	Pangkalpinang	42	42	100
5	Bangka Selatan	53	53	100
6	Belitung Timur	39	39	100
7	Belitung	49	49	100
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		**381**	**381**	**100**

*Keterangan: *) Distamben Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*

4. Rencana Jaringan Telekomunikasi

Kebutuhan akan telepon terdiri atas kebutuhan domestik dan non domestik. Kebutuhan domestik terdiri atas untuk rumah kecil, rumah sedang dan rumah besar dengan standar masing-masing sebagai berikut:

1. 4 (empat) rumah kecil memiliki 1 (satu) satuan sambungan (sst);
2. 2 (dua) rumah sedang memiliki 1 (satu) satuan sambungan (sst); dan
3. Setiap rumah besar memiliki 1 (satu) satuan sambungan (sst).

Sedangkan standar kebutuhan non-domestik adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan umum dan komersil: 15 persen dari domestik;
2. Wartel: 250 jiwa per wartel; dan
3. Telepon umum: 800 jiwa per unit.

Kedepannya seiring dengan pertambahan penduduk dan pembangunan wilayah, kebutuhan akan sambungan telepon tentunya akan semakin meningkat, proyeksi kebutuhan sambungan telepon per kabupaten/kota dapat dilihat pada Tabel II.10 di bawah ini.

Tabel II.10
Rekapitulasi Proyeksi Kebutuhan Sambungan Telepon 2010 – 2030

WILAYAH		2010	2015	2020	2025	2030
(1)		*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
A. PULAU BANGKA						
1	Bangka	32.582	36.207	39.546	43.193	45.552
2	Bangka Barat	17.363	19.294	21.073	23.017	24.258
3	Bangka Tengah	21.202	23.560	25.733	28.106	30.379
4	Bangka Selatan	20.358	22.622	24.708	26.987	29.170
5	Pangkal Pinang	21.179	23.259	25.255	27.421	29.502
	JUMLAH	**112.683**	**124.942**	**136.315**	**148.724**	**158.861**
B. PULAU BELITUNG						
6	Belitung	19.173	19.963	21.106	22.315	23.491
7	Belitung Timur	14.278	14.867	15.719	16.619	17.495
	JUMLAH	**33.451**	**34.830**	**36.825**	**38.934**	**40.986**
	JUMLAH TOTAL	**146.134**	**159.772**	**173.140**	**187.658**	**199.847**

Sumber: Materi Teknis RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034

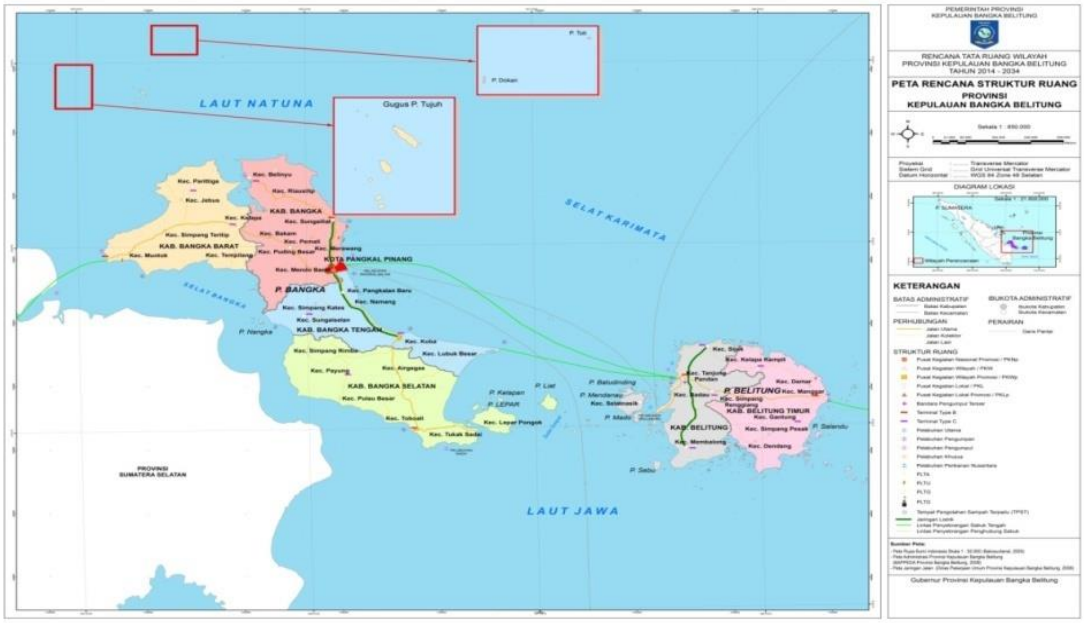
Pengembangan jaringan telekomunikasi meliputi sistem terestrial dan sistem satelit sebagai penghubung lokal dan interlokal, pengembangan jaringan ini dilakukan hingga ke pelosok wilayah yang belum terjangkau sarana prasarana telekomunikasi.

Tersedianya fasilitas telepon sangat diperlukan bagi kelancaran komunikasi dan arus informasi. Sejalan dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan kegiatan ekonomi, maka permintaan terhadap sambungan telepon akan semakin meningkat pada masa yang akan datang. Kebutuhan sambungan telepon se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2010 adalah sebanyak 146.134 sambungan telepon. Jika diasumsikan peningkatan sambungan telepon terus meningkat setiap tahunnya maka kebutuhan sambungan telepon di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai dengan tahun 2030 adalah sebanyak 199.847 sambungan telelpon. Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk tiap tahunnya.

5. Sistem Prasarana Lingkungan

Sistem prasarana lingkungan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, meliputi: tempat pemrosesan akhir sampah (TPA Regional); tempat pengolahan dan/atau pengelolaan limbah domestik; sistem drainase; sistem pengelolaan air minum (SPAM); dan sarana prasarana lingkungan yang sifatnya menunjang kebutuhan dasar masyarakat. SPAM dikembangkan di setiap pusat kegiatan wilayah dan lokal (PKNp, PKW, PKWp, dan PKL).

Gambar II.9
Peta Rencana Struktur Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Sumber: RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034

6. Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Rencana sistem pengembangan sumber daya air di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, meliputi: sistem jaringan sungai, sistem jaringan irigasi, sistem jaringan air baku, sistem pengendalian banjir dan sistem pengamanan pantai, dengan rincian sebagai berikut:

a. Sistem jaringan sungai berupa Wilayah Strategis Nasional yaitu WS Bangka dan Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota yaitu WS Belitung;
b. Sistem jaringan irigasi terdiri atas daerah irigasi kewenangan pemerintah dan daerah irigasi kewenangan pemerintah provinsi;

c. Sistem jaringan air baku terdiri dari: sumber air baku, sistem pengelolaan air baku, dan peruntukan air baku;
d. Sistem pengendalian banjir berupa: pengamanan kawasan tangkapan air hujan, pemeliharaan dan pelestarian kawasan konservasi, pengamanan sempada sungai, pembuatan cek dam penghambat laju daya rusak air, dan pembangunan kanal pengatur distribusi air sungai serta normalisasi sungai;
e. Sistem pengamanan pantai dilakukan dengan cara: naturalisasi pantai dengan penghijauan, pengamanan gundukan pasir, pemecah ombak, turap dan pengamanan sempadan pantai

7. Rencana Pola Ruang

Rencana pola ruang adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah Provinsi yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Dalam rencana pola ruang wilayah provinsi ini juga akan dijabarkan peruntukan ruang untuk kawasan lindung dan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis provinsi.

a. Kawasan lindung

Kawasan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak lebih dari satu wilayah kabupaten/kota, kawasan lindung yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahnya yang terletak di wilayah kota/kabupaten lain, dan kawasan-kawasan lindung lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah provinsi. Kawasan budidaya provinsi adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Rencana pengembangan kawasan lindung, meliputi:

1) Hutan lindung

Sesuai dengan arahan dalam RTRWN dan kondisi ekosistem di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, rencana minimal luas kawasan lindung yang harus dipulihkan kembali dan/atau dipertahankan di provinsi ini mencapai 492.700 ha, di mana 32 persen di antaranya (atau 156.730 ha) merupakan kawasan hutan lindung. Hutan lindung yang dimaksud terdapat di Kabupaten Bangka Barat (28.589 ha), Kabupaten Bangka (15.736 ha), Kabupaten Bangka Tengah (32.226 ha), Kabupaten Bangka Selatan (28.234 ha), Kabupaten Belitung (37.583 ha) dan Kabupaten Belitung Timur (45.874 ha).

2) Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya

Merupakan kawasan gambut dan atau kawasan resapan air hujan. Kawasan bergambut ditetapkan dengan kriteria: kawasan tanah bergambut dengan ketebalan 3 (tiga) meter atau lebih. Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang termasuk dalam kategori ini hanyalah kawasan bergambut di Bangka Barat, tepatnya di Kecamatan Muntok, Sungai Teritip, Kelapa dan Jebus.

3) Kawasan perlindungan setempat

a) **Sempadan Pantai**. Sebagaimana diketahui bahwa Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari 2 (dua) pulau besar: Bangka dan Belitung. Disamping itu terdapat pulau-pulau lain yang lebih kecil yaitu Pulau Nangka, Pulau Penyu, Pulau Burung, Pulau Lepar, Pulau Pongok, Pulau Gelasa, Pulau Panjang, Pulau Tujuh, Pulau Lima, Pulau Lengkuas, Pulau Selindung, Pulau Pelanduk, Pulau Seliu, Pulau Nadu, Pulau

Mendanau, Pulau Batu Dinding, Pulau Sumedang dan pulau-pulau kecil lainnya. Kriteria untuk sempadan pantai adalah wilayah pantai dengan jarak 100 (seratus) meter atau lebih dari titik pasang tertinggi; atau daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai.

b) **Sempadan Sungai**. Adapun sungai-sungai besar yang terdapat di Kepulauan Bangka Belitung diantaranya adalah Sungai Baturusa, Sungai Buluh, Sungai Kotawaringin, Sungai Kampa, Sungai Layang, Sungai Manise dan Sungai Kurau. Ketentuan terkait sempadan sungai adalah daratan sepanjang tepian sungai bertanggul dengan lebar 5 (lima) meter atau lebih dari kaki tanggul sebelah luar; daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar 100 (seratus) meter atau lebih dari titik pasang tertinggi; dan daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar 50 (lima puluh) meter atau lebih dari titik pasang tertinggi.

c) **Sempadan Kolong**. Berupa kolam-kolam bekas galian timah yang tergenang air hujan atau sungai yang dalam hal ini dapat diperlakukan sebagai danau/waduk. Kawasan sempadan kolong ditetapkan dengan kriteria: wilayah daratan dengan jarak antara 50 (lima puluh) meter sampai 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi; atau daratan sepanjang tepian kolong yang lebarnya proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik kolong.

4) Kawasan suaka alam, pelestarian alam, situs dan kawasan cagar budaya

a) **Kawasan Cagar Alam**. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWN, untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat cagar alam sebagai berikut: Cagar Alam Gunung Lalang-Belitung, Gunung Menumbing, Gunung Maras, Gunung Mangkol, Gunung Permisan, dan Jering Menduyung, kawasan Gunung Tajam Belitung.

b) **Taman Wisata Alam Laut**. Taman Wisata Alam Laut di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa Taman Alam Laut Perairan Belitung, Perairan Belitung Timur, dan Perairan Bangka Selatan.

c) **Kawasan Suaka Alam Laut** dan perairan lainnya adalah Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) di Kabupaten Bangka Tengah yang meliputi Pulau Panjang, Pulau Ketawai, Pulau Bebuar, Pulau Gusung Asam dan Pulau Semujur.

Kepulauan Bangka Belitung memiliki kawasan cagar budaya berskala internasional yang berada di bawah naungan UNESCO yaitu kawasan Kota Tua Muntok dan Bukit Menumbing. Di kawasan pusat kota terdapat mercusuar Tanjung Kalian dan Benteng Kuta Seribu yang dibangun tahun 1812-1817, Masjid Jamik dan Klenteng Kung Fuk Nio serta Komplek Perumahan Mayor Chung A Thiam yang berusia ratusan tahun (dibangun 1830-an). Bukit Menumbing yang mempunyai ketinggian hampir 500 meter dpa dan dikelilingi hutan lindung terdapat bangunan tua yang dikenal dengan Giri Sasana Menumbing yang dibangun Belanda pada tahun 1932. Bangunan-bangunan yang dimaksud bukan saja berusia ratusan tahun namun juga mempunyai nilai sejarah, arsitektur dan budaya yang tinggi, sehingga pemerintah daerah bersama UNESCO telah menetapkan kawasan tersebut sebagai kawasan cagar budaya.

5) Kawasan rawan bencana

Berdasarkan data yang tersedia pada laporan RTRW Kabupaten/Kota di Provinsi Bangka Belitung dapat diketahui kawasan rawan bencana, yaitu:

a) Kawasan rawan banjir terdapat di Kecamatan Muntok, Parittiga, Kelapa, Jebus (Kabupaten Bangka Barat), Lubuk Besar, Koba, Namang dan Sungai Selan (Kabupaten Bangka Tengah), Toboali dan Pulau Besar (Kabupaten Bangka Selatan), Kota Pangkalpinang, Sungai Manggar Kecamatan Manggar, Sungai Mayang Kecamatan Kelapa Kampit, Jembatan Gantung (Kabupaten Belitung Timur), Tanjung Pandan (Kabupaten Belitung), Sungai Liat, Puding Besar, Mendo Barat (Kabupaten Bangka);
b) Kawasan rawan abrasi/erosi tersebar di Kecamatan Parit Tiga, Kecamatan Tempilang (Kabupaten Bangka Barat); Kecamatan Koba, Kecamatan Lubuk Besar, Kecamatan Pangkalan Baru (Kabupaten Bangka Tengah); Kecamatan Membalong, Kecamatan Badau, Kecamatan Tanjung Pandan, Kecamatan Selat Nasik dan Kecamatan Sijuk (Kabupaten Belitung); Kecamatan Manggar, Kecamatan Gantung, Kecamatan Simpang Pesak, Kecamatan Dendang dan Kecamatan Damar (Kabupaten Belitung Timur); Pantai Pasir Padi (Kota Pangkalpinang); Kecamatan Lepar Pongok, Kecamatan Tukak Sadai, Kecamatan Simpang Rimba Permis, Kecamatan Toboali (Kabupaten Bangka Selatan); Kecamatan Sungailiat, Kecamatan Belinyu (Kabupaten Bangka); dan
c) Kawasan rawan bencana longsor terdapat di Kecamatan Simpang Teritip (Kabupaten Bangka Barat).

b. Kawasan budidaya

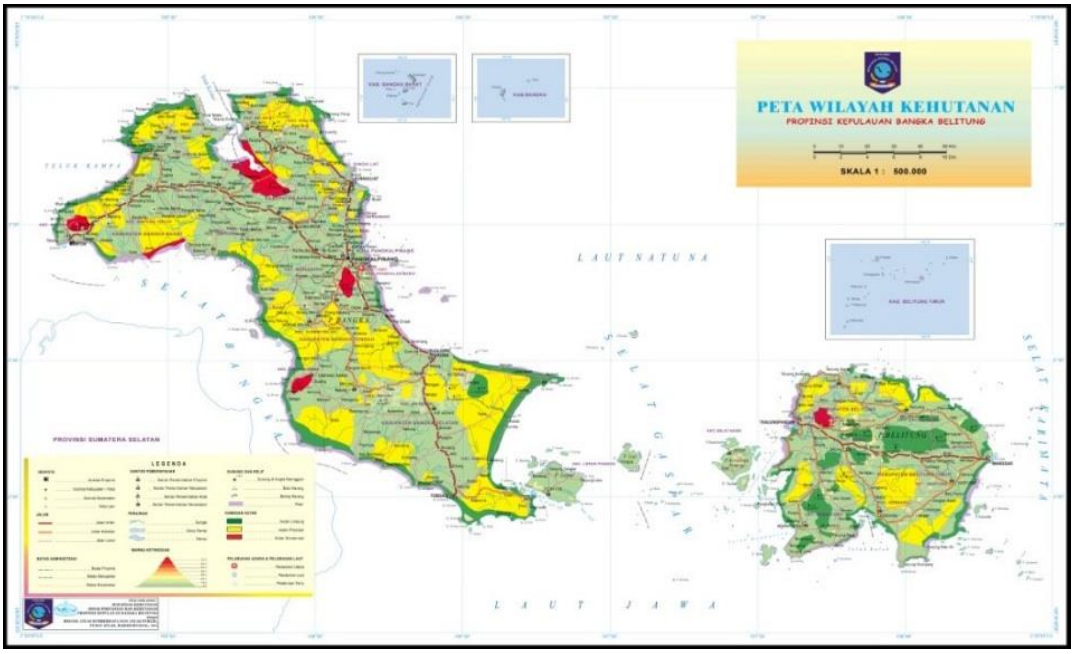
Dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034, yang dimaksud Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Kawasan Budidaya di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari:

1) Kawasan peruntukan hutan produksi

Definisi kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Sedangkan definisi hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan (Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan).

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.798/Menhut-II/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas +19.131 Hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Seluas +10.878 Hektar dan penunjukan bukan Kawasan Hutan menjadi Kawasan Hutan seluas +3.210 Hektar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan lampiran peta keputusan tersebut, kawasan hutan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seluas 659.014,58 Hektar, berdasarkan fungsinya terdiri dari Hutan Konservasi 35.473,00 Ha, Hutan Lindung 189.965,00 Ha, Hutan Produksi 432.882,82 Ha, dan Hutan Produksi Konversi 692,58 Ha.

Gambar II.10
Sebaran Hutan Produksi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

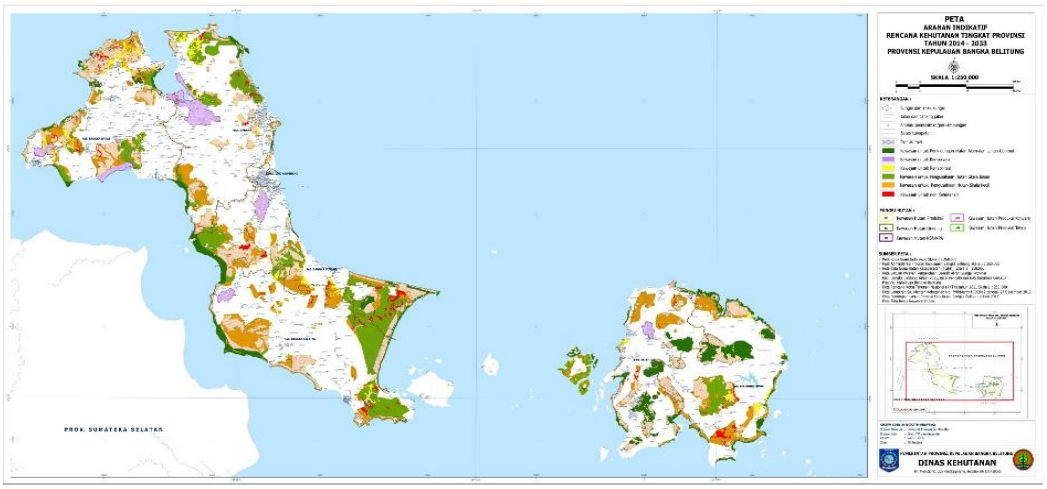


Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018

Rincian luas Hutan Produksi (HP dan HPK) di Kabupaten/Kota sebagai berikut: Kabupaten Bangka (HP 67.083,52; HPK 11,32 ha), Kota Pangkalpinang (HP 0,00 ha; HPK 0,00 ha) Kabupaten Bangka Selatan (HP 106.451,10 ha; HPK 0,00 ha), Kabupaten Bangka Tengah (HP 85.497,75 ha; HPK 0,00 ha), Kabupaten Bangka Barat (HP 78.368,92 ha; HPK 177,67 ha), Kabupaten Belitung (HP 43.595,77 ha; HPK 507,59 ha) dan Kabupaten Belitung Timur (HP 55.650,83 ha; HPK 0,00 ha). Dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 56 Tahun 2014 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Tahun 2014-2034, Kawasan Hutan Produksi diarahkan untuk kegiatan sebagai berikut.

a) Kawasan untuk Rehabilitasi, kriteria Kawasan hutan dalam wilayah DAS kritis dan areal pertambangan.
b) Kawasan untuk Pengusahaan Hutan Skala Kecil, kriteria Kawasan Hutan yang dibebani izin pemanfaatan berbasis masyarakat serta Hutan Produksi, Hutan Tanaman, Semak belukar dan Lahan Garapan yang tidak berizin, dengan luas sesuai dengan peraturan yang berlaku.
c) Kawasan untuk Pengusahaan Hutan Skala Besar, kriteria Kawasan Hutan yang dibebani izin pemanfaatan serta Hutan Produksi dengan penutupan Hutan Sekunder, Hutan Tanaman, Semak Belukar dan Lahan Garapan yang tidak berizin.
d) Kawasan untuk non Kehutanan, kriteria Hutan Produksi dengan penutupan hutan selain Hutan Primer, tidak bergambut lebih dari 2 meter, dengan menggunakan mekanisme ijin pinjam pakai.

Gambar II.11
Arahan Indikatif Pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi dalam RKTP
Tahun 2014-2034



Sumber : RKTP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013-2034.

2) Kawasan peruntukan pertanian

Di wilayah kepulauan Bangka Belitung terdapat lebih kurang 903.450 Ha kawasan pertanian dengan rincian kawasan pertanian tanaman pangan seluas (355.453 ha), pertanian hortikultura seluas (221.512 Ha), perkebunan seluas (316.383 Ha) dan kawasan peternakan seluas (10.102 Ha).

3) Kawasan peruntukan perikanan

Pengembangan kawasan peruntukan perikanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didukung dengan penyediaan pelabuhan ikan yang terdiri atas:

a) Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN);
b) PPN Sungailiat;
c) PPN Tanjung Pandan;
d) Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI):
    a. PPI Kurau;
    b. PPI Manggar;
    c. PPI Sungai Selan;
    d. PPI Sadai;
    e. PPI Selat Nasik; dan
    f. PPI Gantung.

4) Kawasan peruntukan pertambangan

Kawasan peruntukan pertambangan adalah kawasan darat seluas +400.000 Ha di dalam WP yang menyebar di seluruh kabupaten/kota. Pengembangan kawasan peruntukan pertambangan dilakukan dengan memfasilitasi kegiatan ekplorasi peningkatan status WIUP ekspolasi menjadi WIUP operasi produksi sesuai hasil kajian, memfasilitasi dan mengawasi kegiatan operasi produksi, identifikasi dan penetapan wilayah pertambangan rakyat, dan memfasilitasi dan mengawasi kegiatan reklamasi dan pasca tambang. Penetapan kawasan peruntukan pertambangan kawasan darat seluas 357.746 Ha di wilayah WP yang menyebar di seluruh kabupaten/kota.

Gambar. II.12
Peta Kawasan Tambang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



5) Kawasan peruntukan industri

Arahan lokasi pengembangan kawasan industri di Provinsi ini adalah:

a) Kawasan peruntukan industri dan pelabuhan terpadu Muntok di Kabupaten Bangka Barat;
b) Kawasan peruntukan industri dan pelabuhan terpadu Jelitik dan Teluk Belinyu di Kabupaten Bangka;
c) Kawasan peruntukan industri Lubuk Besar di Kabupaten Bangka Tengah;
d) Kawasan peruntukan industri Ketapang di Pangkal Pinang;
e) Kawasan peruntukan industri Sadai di Kabupaten Bangka Selatan;
f) Kawasan peruntukan industri Besar Badau dan Membalong di Kabupaten Belitung; dan
g) Kawasan industri terpadu Air Kelik di Kabupaten Belitung Timur.

6) Kawasan peruntukan pariwisata

Kawasan peruntukan pariwisata terdiri atas:

a) Wisata alam, meliputi:
   a. Seluruh wilayah pesisir Pulau Bangka, Pulau Belitung dan pulau-pulau kecil;
   b. Kawasan pariwisata bahari yang berupa kawasan pantai dan lautnya yang dimanfaatkan untuk pariwisata alam yang ada di Kabupaten/Kota, serta kawasan Pariwisata pulau-pulau kecil yang ada di Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Belitung, dan Kabupaten Belitung Timur;
   c. Kawasan pariwisata alam berupa kawasan wisata hutan;
   d. Kawasan wisata alam berupa pemandian sumber air panas alam yang dimanfaatkan untuk pariwisata di Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Tengah, dan Kabupaten Bangka Selatan;
   e. Taman wisata laut;
   f. Kawasan Strategis Pariwisata Tanjung Kelayang; dan
   g. Kawasan pariwisata alam unggulan lainnya di Kabupaten/Kota.

b) Wisata budaya, meliputi:
   a. Kawasan Kota Tua Mentok di Kabupaten Bangka Barat;
   b. Kawasan Situs Kota Kapur di Kabupaten Bangka;
   c. Kawasan yang di dalamnya terdapat cagar budaya dan atau yang memiliki ciri-ciri cagar budaya di Kabupaten/Kota;
   d. Kawasan wisata budaya yang memiliki daya tarik wisata budaya tangible maupun intangible yang ada di Kabupaten/Kota;

c) Wisata buatan, meliputi:
   Kawasan wisata yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata khusus yang merupakan kreasi artifisial dan kegiatan-kegiatan manusia lainnya, yang meliputi kawasan agro wisata, fasilitas rekreasi dan taman bertema dan resort serta fasilitas olahraga yang ada di Kabupaten/Kota.

7) Kawasan peruntukan permukiman

Kawasan peruntukan permukiman di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki luas kurang lebih 59.188 Ha. Dibedakan menjadi kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan. Kawasan permukiman perkotaan dikembangkan pada pusat-pusat kegiatan/pelayanan seperti kawasan perkotaan Muntok, Sungailiat, Pangkalpinang, Koba, Toboali, Tanjungpandan dan Manggar. Sedangkan kawasan permukiman perdesaan dikembangkan pada wilayah belakang (*hinterland* dari pusat-pusat permukiman yang disebut di atas).

8) Kawasan peruntukan lainnya

Kawasan peruntukan lainnya untuk wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa kawasan latihan militer di Kecamatan Belinyu, Sungailiat dan Kelapa Kampit. Pada kawasan ini selain terdapat instalasi militer juga merupakan kawasan latihan tempur yang mempunyai radius tempur udara (*air weapon range*/AWR), Kawasan peluncuran Rudal dan Kawasan Militer Angkatan Laut (LANAL). Kawasan ini menjadi sangat penting karena menjadi salah satu basis militer TNI dalam rangka menjaga keutuhan NKRI pada kawasan perbatasan, terutama perbatasan dengan Negara Singapura, Malaysia, Thailand dan China

Gambar II.13
Peta Rencana Pola Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Sumber : RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034

c. Kawasan strategis provinsi

Dalam aspek keruangan, kawasan strategis merupakan kawasan yang didalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap:

1. Tata ruang di wilayah sekitarnya;
2. Kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya; dan/atau
3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kawasan strategis provinsi merupakan bagian wilayah provinsi yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi, baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. Penetapan kawasan strategis Provinsi terdiri atas:

1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi, meliputi:

a) Kawasan industri dan pelabuhan Teluk Kelabat di Belinyu Kabupaten Bangka;
b) Kawasan pelabuhan dan industri terpadu Tanjung Berikat di Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah;
c) Kawasan industri dan pelabuhan terpadu (KIPT) Mentok di Kawasan Tanjung Ular Kabupaten Bangka Barat;
d) Kawasan Bandar Udara Depati Amir Pangkalanbaru dan Bandar Udara H. AS Hanandjoeddin Tanjungpandan;
e) Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Batu Betumpang di Kabupaten Bangka Selatan;
f) Kawasan minapolitan Tukak Sadai dan Lepar Pongok di Kabupaten Bangka Selatan;
g) Kawasan pelabuhan dan industri Sadai di Kabupaten Bangka Selatan;
h) Kawasan industri terpadu Suge dan pelabuhan Tanjung Batu di Kecamatan Badau dan Membalong Kabupaten Belitung;
i) Kawasan minapolitan Selat Nasik di Kabupaten Belitung;
j) Kawasan industri perikanan Tanjung Binga di Kabupaten Belitung;
k) Kawasan terpadu mandiri (Kecamatan Gantung) Kabupaten Belitung Timur;
l) Kawasan pelabuhan ASDP Manggar – Ketapang, Kabupaten Belitung Timur;
m) Kawasan Industri Terpadu Air Kelik (KIAK), Kabupaten Belitung Timur;
n) Kawasan pariwisata Tanjung Kelayang – Tanjung Tinggi, Kabupaten Belitung; dan
o) Kawasan lintas timur Pulau Bangka.

Gambar II.14
Peta Kawasan Strategis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Sumber: RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034.

2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya, meliputi: kawasan Universitas Bangka Belitung (UBB) dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) di Kabupaten Bangka, kawasan Kota Tua Mentok di Kabupaten Bangka Barat dan Museum Nasional Maritim di Kabupaten Belitung.

3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup**,** meliputi: Cagar Alam Gunung Lalang di Kabupaten Belitung, Gunung Menumbing di Kabupaten Bangka Barat, Hutan Konservasi Gunung Maras di Kabupaten Bangka, Gunung Mangkol di Kabupaten Bangka Tengah, Gunung Permisan di Kabupaten Bangka Selatan, Jering Menduyung di Kabupatemn Bangka Barat, Kawasan Situs Kota Kapur di Kabupaten Bangka, Kawasan Kepulauan Buku Limau di Kabupaten Belitung Timur, Taman Kehati di Kabupaten Belitung dan Karantina Hewan di Pulau Nadu di Kabupaten Belitung.

C. Wilayah Rawan Bencana

Sejarah kebencanaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disebabkan oleh bencana alam dan bencana sosial. Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, bencana alam lebih disebabkan oleh kondisi geografis seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, angin puting beliung, ancaman gelombang ekstrem dan abrasi laut yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis, dan korban jiwa. Potensi bencana tersebut dapat dilihat pada Tabel II.11.

Tabel II.11
Wilayah yang Berpotensi Rawan Bencana dan Jenis Bencana yang terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

NO	Lokasi Bencana	Jenis Bencana
(1)	*(2)*	*(3)*
1	Bangka	banjir, puting beliung, karhutlah
2	Bangka Tengah	puting beliung, tanah longsor, karhutlah
3	Bangka Selatan	puting beliung dan karhutlah
4	Bangka Barat	banjir, puting beliung, karhutlah
5	Belitung	banjir, puting beliung, karhutlah
6	Belitung Timur	banjir, puting beliung, karhutlah
7	Pangkalpinang	banjir, puting beliung, karhutlah

Sumber: BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2019)

Kawasan rawan bencana alam di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, meliputi:

1. Kawasan rawan banjir terdapat di Kecamatan Gerunggang (Kota Pangkalpinang); Kecamatan Puding, Riau Silip, Mendo Barat (Kabupaten Bangka); Kecamatan Tanjung Pandan (Kabupaten Belitung); Kecamatan Parit Tiga (Kabuapten Bangka Barat); dan Kecamatan Gantung (Kebupaten Belitung Timur);
2. Kawasan rawan puting beliung terdapat di Kecamatan Taman Sari, Rangkui, Gabek, Gerunggang (Kota Pangkalpinang); Kecamatan Bakam (Kabupaten Bangka); Kecamatan Sijuk (Kabupaten Belitung); Kecamatan Pangkalan Baru dan Simpang Katis (Kabupaten Bangka Tengah); Kecamatan Mentok, Jebus, Simpang Teritip, dan Parit Tiga (Kabupaten Bangka Barat); Kecamatan Manggar (Kabupaten Belitung Timur); dan Kecamatan Toboali (Kabupaten Bangka Selatan); dan
3. Kawasan rawan karhutlah tersebar di Kecamatan Pangkal Balam, Bukit Intan, Gerunggang, Girimaya, Gabek (Kota Pangkalpinang); Kecamatan Sungailiat, Pemali, Puding Besar, Belinyu, Mendo Barat, Merawang, Bakam (Kabupaten Bangka); Kecamatan Tanjung Pandan, Sijuk, Badau, Membalong (Kabupaten Belitung); Kecamatanan Pangkalan Baru,

Simpang katis, Koba, Namang, Lubuk Besar (Kabupaten Bangka Tengah); Kecamatan Mentok, Jebus, Kelapa, Parittiga, Tempilang, Simpang Teritip (Kabupaten Bangka Barat); Kecamatan Manggar, Simpang Renggiang, Damar, Gantung (Kabupaten Belitung Timur); Kecamatan Pulau Besar, Toboali dan Tukak Sadai (Kabupaten Bangka Selatan); dan

4. Kawasan rawan bencana longsor terdapat di Kecamatan Lubuk besar (Kabupaten Bangka Tengah).

Gambar II.15

Peta Rawan Bencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Berdasarkan data Badan Penanggulanan Bencana Daerah pada tahun 2019, kebencanaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat 4 (empat) potensi bencana yaitu banjir, puting beliung, tanah longsor dan kebakaran hutan & lahan (karhutla). Pada tahun 2019 kebencanaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didominasi oleh kebakaran hutan sebanyak 391 kejadian, data tersebut dapat dilihat pada Tabel II.12.

Tabel II.12

Data Bencana Alam di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019

Jenis Bencana	Jumlah Kejadian	Korban (Jiwa)			Rumah (unit)				Fasilitas Publik (unit)		
		Meninggal Dunia & Hilang	Luka-luka	Terdampak & mengungsi	Rusak Berat	Rusak Sedang	Rusak Ringan	Terendam	Fasilitas Kesehatan	Fasilitas Peribadatan	Fasilitas Pendidikan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(5)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
Banjir	7	-	3	3	-	3	4	102	-	1	3
Angin Puting Beliung	22	-	-	4	39	104	-	-	-	-	-
Tanah Longsor	2	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kebakaran Hutan & lahan	391	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	422	5	3	7	39	104	4	102	-	1	3

Sumber: BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung -Bidang Kedaruratan dan Logistik (2019)

D. Demografi

Kondisi Demografi Kepulauan Bangka Belitung secara umum tercermin melalui jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, struktur penduduk, sebaran penduduk serta ketenagakerjaan.

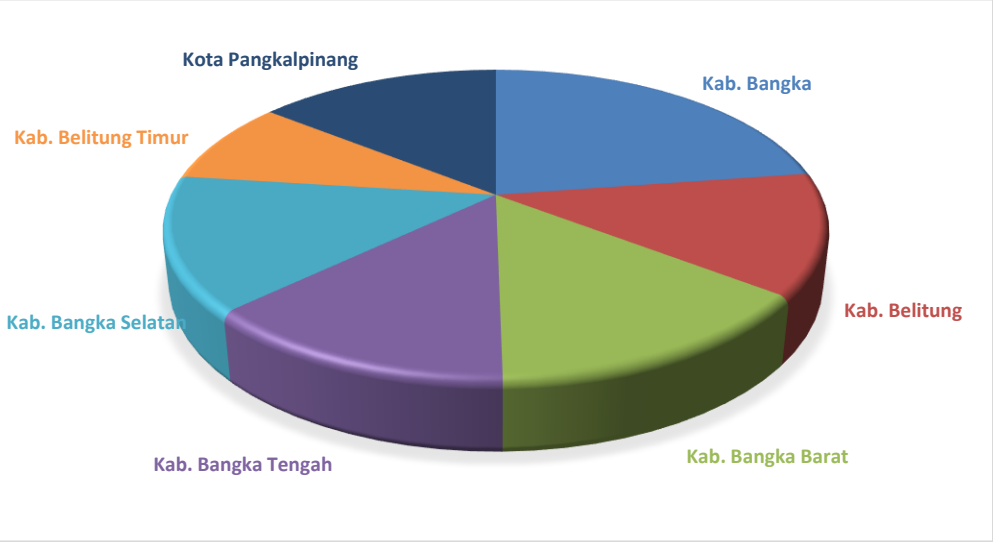
Tabel II.13
Jumlah Penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2015-2019

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1. Jumlah Penduduk	jiwa	1.372.813	1.401.827	1.430.865	1.459.873	1.488.792
a. Laki-Laki	jiwa	713.223	728.580	743.931	759.255	774.523
b. Perempuan	jiwa	659.590	673.247	686.934	700.318	714.269
2. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	persen	2,15	2,11	2,07	2,02	1,98
3. Kepadatan Penduduk	Jiwa/km^2	84	86	87	89	91
4. Rasio Jenis Kelamin	persen	108,13	108,22	108,30	108,37	108,40
5. Rasio Ketergantungan	persen	46,06	45,74	46,05	45,23	49,70

Sumber: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka Tahun (2020)

Data-data pada Tabel II.13 merupakan data yang diperoleh Badan Pusat Statistik tahun 2020. Jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2019 mencapai 1.488.792 jiwa yang terdiri dari 774.523 penduduk berjenis kelamin laki-laki dan 714.269 penduduk berjenis kelamin perempuan, dengan rasio jenis kelamin 108,40. Rasio jenis kelamin di Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2019 sebesar 108,40 yang menunjukkan bahwa jumlah laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah perempuan.

Grafik II.1
Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019



Sumber: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka Tahun (2019)

Jumlah penduduk dan tingkat kepadatan kabupaten/kota tergambar pada Tabel II.14. Tabel tersebut menunjukkan bahwa, penduduk terbanyak pada tahun 2019 berada di

Kabupaten Bangka yaitu sebesar 337,3 ribu jiwa dan yang paling sedikit di Kabupaten Belitung Timur, sebanyak 129,6 ribu jiwa. Berdasarkan tingkat kepadatan penduduk, angka tertinggi berada di Kota Pangkalpinang yakni sebanyak 1.791 orang/km^2, dan terendah di Kabupaten Belitung Timur yakni sebanyak 52 orang/km^2.

Tabel II.14
Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk
menurut Kabupaten/Kota Tahun 2019

Kabupaten/Kota	Luas Wilayah		Penduduk (ribu)		Kepadatan Penduduk (org/km^2)
	Km^2	% luas Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah	% terhadap penduduk Kepulauan Bangka Belitung	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
Kabupaten Bangka	2.950,69	17,97	337,3	22,66	114
Kabupaten Belitung	2.293,69	13,97%	189,8	12,75	83
Kota Pangkalpinang	118,80	0,72%	212,7	14,28	1.791
Kabupaten Bangka Barat	2.820,61	17,17%	213,2	14,31	76
Kabupaten Bangka Tengah	2.126,36	12,95%	196,2	13,18	92
Kabupaten Bangka Selatan	3.607,08	21,96%	210,0	14,10	58
Kabupaten Belitung Timur	2.507,0	15,26%	129,6	8,71	52
Luas Daratan	**16.424,23**	**20,10%**			
Luas Perairan	**65.301,00**	**79,90%**			
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	81.725,23	-	1.488,8	100	91

Sumber: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka Tahun (2020)

Kepadatan penduduk juga menunjukkan peningkatan, dari 89 jiwa per km^2 pada tahun 2018 menjadi 91 jiwa per km^2. Pada tahun 2019 penduduk usia 0-14 tahun berjumlah 390.553, usia 15-64 tahun berjumlah 1.005.214 dan usia 65+ tahun berjumlah 64.106. Pada tahun 2019 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memasuki era bonus demografi, di mana jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dari jumlah penduduk usia tidak bekerja. Agar bonus demografi dapat menjadi keuntungan bagi daerah, maka dibutuhkan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan, pengendalian penduduk, hingga kebijakan ekonomi.

Tabel II.15
Jumlah Penduduk Kepulauan Bangka Belitung
menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2019

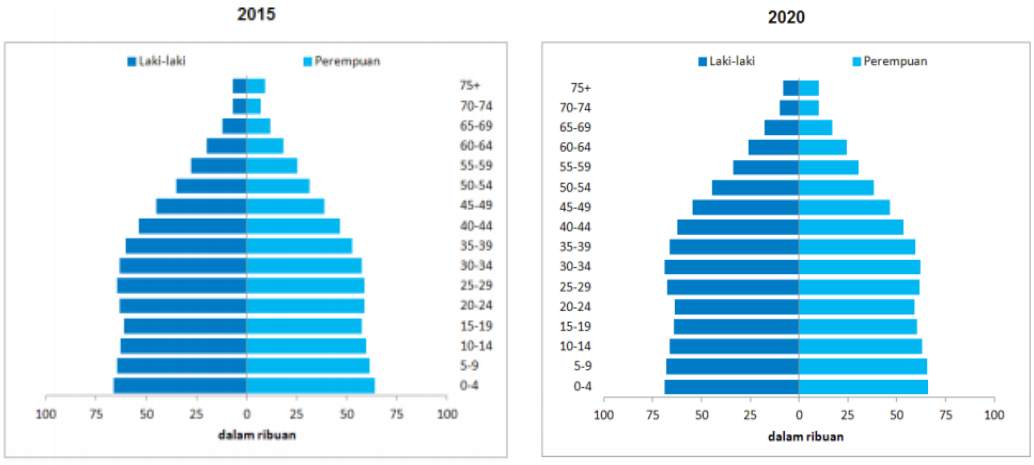
NO	KELOMPOK UMUR (TAHUN)	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	0-4	68.502	65.831	134.333
2	5-9	67.412	64.768	132.180
3	10-14	65.456	62.258	127.714
4	15-19	63.297	59.906	123.203
5	20-24	63.624	58.835	122.459
6	25-29	67.540	61.455	128.995
7	30-34	67.689	61.220	128.909
8	35-39	65.180	58.312	123.492
9	40-44	60.667	52.062	112.729
10	45-49	52.839	45.168	98.007

NO	KELOMPOK UMUR (TAHUN)	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
11	50-54	42.312	36.691	79.003
12	55-59	32.128	29.570	61.698
13	60-64	24.728	23.238	47.966
14	65-69	31.062	33.044	64.106
15	70-74	9.020	9.325	18.345
16	75+	7.641	9.935	17.576
JUMLAH		774.523	714.269	1.488.792

Sumber: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka Tahun (2020)

Di samping jumlah penduduk, juga diperlukan untuk mengetahui proyeksi parameter kependudukan, seperti struktur umur, angka kelahiran total, serta angka harapan hidup. Berdasarkan proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035, yang disusun oleh Bappenas bekerja sama dengan BPS dan UNFPA (*United Nations Population Fund*), proyeksi penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2020 menggambarkan Piramida Penduduk Muda (*Expansive*) (Grafik II.2), di mana sebagian besar penduduk berada dalam kelompok umur muda. Tipe ini memiliki kebiasaan tingkat kelahiran dan kematian yang tinggi dan terdapat pada daerah yang memiliki pertumbuhan penduduk cukup tinggi pula. Pertumbuhan ini disebabkan selisih antara tingkat kematian dan kelahiran yang cukup tinggi di mana penurunan tingkat kematian lebih cepat dibandingkan dengan tingkat kelahiran. Penduduk usia lanjut dan usia produktif termasuk usia angkatan kerja akan bertambah besar proporsinya. Sementara itu penduduk usia muda (bayi dan anak) jumlahnya meningkat.

Grafik II.2
Piramida Penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2015 dan Proyeksi pada Tahun 2020



Sumber: Bappenas, BPS & UNFPO, 2020

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dapat dilihat dari beberapa indikator pembangunan, yaitu pertumbuhan PDRB, laju inflasi provinsi, PDRB per kapita, indeks gini, pemerataan pendapatan versi Bank Dunia, Indeks Ketimpangan *Williamson* (indeks ketimpangan regional), dan persentase penduduk diatas garis kemiskinan.

1. Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator makro yang penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah pada suatu periode tertentu. Gambaran perkembangan PDRB Kepulauan Bangka Belitung pada kurun waktu 2015-2019 atas dasar harga konstan dan atas dasar harga berlaku.

Perekonomian Provinsi Kepuluan Bangka Belitung tahun 2019, diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDRB) atas harga berlaku (ADHB) mencapai Rp 75.830 miliar dan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) 2019 mencapai Rp 53.950 miliar. Berdasarkan Tabel II.16 menunjukkan bahwa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2015-2019 secara nominal nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) relatif lebih besar dibandingkan dengan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK).

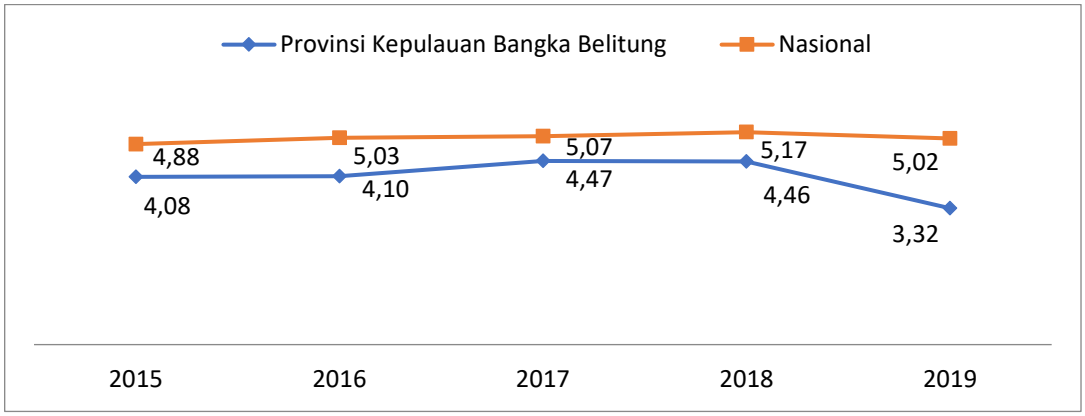
Tabel II.16
PDRB Tahun 2015 –2019 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Miliar Rupiah)

No.	PDRB	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1.	Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	60.992,1	65.048,2	69.861,2	73.069	75.830
2.	Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)	45.961,5	47.848,3	49.986,8	52.212	53.950

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2020)

Sepanjang kurun waktu 2015–2019 laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan tren nasional bersifat fluktuatif yang dihitung berdasarkan PDRB ADHK Tahun 2010 sebagaimana diperlihatkan pada Grafik II.3.

Fokus Grafik II.3
Laju Pertumbuhan Ekonomi (persen)
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015-2019



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2020)

Berdasarkan grafik diatas bahwa perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019 tumbuh sebesar 3,32 persen, melambat dibandingkan tahun 2018 yang sebesar 4,46 persen. Dari sisi produksi, sumber terbesar berasal dari lapangan usaha konstruksi. Sementara dari sisi pengeluaran, sumber pertumbuhan terbesar berasal dari komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga. Secara umum sepanjang waktu lima tahun terakhir, maka dapat diketahui bahwa perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung lebih rendah tingkat capaiannya jika dibandingkan nasional. Perkembangan sektor-sektor ekonomi pembentuk PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sepanjang periode 2015–2019 dapat dilihat pada Tabel II.17 dan Tabel II.18. Dari kedua tabel tersebut memperlihatkan bahwa ada 4 sektor lapangan usaha yang menggerakkan perekonomian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu lapangan usaha industri pengolahan, pertanian, kehutanan, dan perikanan, perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, serta pertambangan dan penggalian.

Tabel II.17
Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2015–2019
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018	2019
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	12.060,4	13.117,2	13.143,2	13.163,1	13.607,7
Pertambangan dan Penggalian	7.735,4	7.743,3	8.182,1	7.754,4	7.199,6
Industri Pengolahan	12.888,4	13.074,1	14.229,6	15.064,4	14.582,1
Pengadaan Listrik dan Gas	51,1	66,6	79,4	86,8	94,7
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	12,0	13,2	15,0	14,8	15,4
Konstruksi	5.264,2	5.753,8	6.371,9	7.106,9	7.864,2
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8.634,3	9.621,6	10.840,5	11.721,2	11.970,7
Transportasi dan Pergudangan	2.461,8	2.642,1	2.900,1	3.104,7	3.380,4
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1459,8	1.609,1	1.734,1	1.896,8	2.205,8
Informasi dan Komunikasi	941,7	1.034,0	1.135,4	1.254,8	1.433,4
Jasa Keuangan dan Asuransi	1095,3	1.198,1	1.280,6	1.415,2	1.509,7
Real Estat	1.964,7	2.104,5	2.281,2	2.517,5	2.625,6
Jasa Perusahaan	169,6	176,4	196,8	217,3	232,3
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.471,6	3.781,6	4.121,1	4.418,2	4.804,2
Jasa Pendidikan	1.639,7	1.859,6	1.960,4	2.128,7	2.324,2
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	710,7	759,8	845,3	905,8	1.023,1
Jasa lainnya	426,6	493,2	548,5	600,4	691,2
Produk Domestik Regional Bruto	**60.987,3**	**65.048,2**	**69.865,2**	**73.121,0**	**75.829,3**

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2020)

Dilihat dari nilai PDRB ADHB, nilai tambah kategori industri pengolahan pada tahun 2019 mencapai sebesar Rp 14.582,1 miliar mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018 sebesar

Rp 15.064,4 milliar. Diikuti oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan meningkat dari Rp 13.607,7 milliar mengalami peningkatan tahun 2018 sebesar Rp 13.163,1 milliar. Sedangkan lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dan lapangan usaha petambangan penggalian masing-masing menjadi Rp 11.970 milliar dan Rp 7.199,6 milliar di tahun 2019. Dari keempat pembentuk PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) tersebut, perkembangan sektor pertambangan dan penggalian pada tahun 2019 sebesar Rp 7.199,6 miliar mengalami penurunan dari tahun 2018 sebesar Rp 7.754,4 miliar, sedangkan sektor-sektor lainnya mengalami peningkatan.

Selanjutnya, dilihat dari nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 nilai bruto lapangan usaha industri pengolahan mencapai sebesar Rp 10.400,6 miliar pada tahun 2015 dan meningkat menjadi sebesar Rp 11.929,8 miliar pada tahun 2019. Untuk nilai tambah bruto kategori pertanian, kehutanan dan perikanan pada periode yang sama sebesar Rp 8.743,5 miliar dan meningkat menjadi Rp 9.869,5 miliar. Nilai tambah bruto kategori pertambangan dan penggalian sebesar Rp 6.458,1 miliar dan meningkat menjadi sebesar Rp 6.627,3 miliar. Begitu juga untuk perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor nilai tambah bruto yang tercipta sebesar Rp 6.402,1 miliar meningkat menjadi Rp 7.576,2 milliar lihat Tabel II.18.

Tabel II.18
Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010
menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2015 – 2019

Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8.743,5	9.123,2	9.095,7	9.591,8	9.869,5
Pertambangan dan Penggalian	6.458,1	6.490,6	6.634,7	6.570,2	6.627,3
Industri Pengolahan	10.400,6	10.680,5	11.337,7	11.791,6	11.929,8
Pengadaan Listrik dan Gas	38,9	43,7	45,9	49,3	52,5
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8,1	8,6	9,4	8,9	9,2
Konstruksi	3.760,1	4.021,6	4.248,5	4.493,1	4.811,1
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.402,1	6.727,7	7.253,3	7.445,1	7.576,2
Transportasi dan Pergudangan	1.662,1	1.752,3	1.892,2	2.021,3	2.066,5
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.034,8	1.086,5	1.136,5	1.207,2	1.318,9
Informasi dan Komunikasi	849,0	926,9	1.002,8	1.110,3	1.263,4
Jasa Keuangan dan Asuransi	807,9	860,0	881,3	941,1	987,8
Real Estat	1.442,0	1.494,6	1.572,2	1.702,5	1.725,7
Jasa Perusahaan	120,3	120,4	127,5	136,0	137,7
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.337,1	2.478,7	2.604,2	2.843,2	3.074,3
Jasa Pendidikan	1.059,0	1.139,3	1.183,2	1.289,8	1.381,4
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	533,9	559,4	605,2	632,8	697,3
Jasa lainnya	304,6	334,4	354,9	381,2	422,5
Produk Domestik Regional Bruto	**45.962,3**	**47.848,4**	**49.985,2**	**52.512,4**	**53.951,1**

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2020)

Selanjutnya distribusi keempat kategori tersebut terhadap PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2015-2019 menjadi sangat dominan. Sebagaimana diperlihatkan pada Tabel II.19, menunjukkan bahwa berdasarkan nilai PDRB ADHB tahun 2019, persentase

distribusi keempat sektor terhadap PDRB mencapai sebesar 62,81 persen yakni industri pengolahan (19,59 persen), pertanian, kehutanan, dan perikanan (17,49 persen), perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor (15,79 persen) serta pertambangan dan penggalian (9,49 persen). Tahun 2019 pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha informasi dan komunikasi sebesar 13,78 persen, diikuti lapangan usaha jasa lainnya serta lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang masing-masing tumbuh sebesar 10,23 persen dan 10,19 persen. Meskipun seluruh lapangan usaha yang ada dalam perekonomian Kepulauan Bangka Belitung mengalami pertumbuhan positif di tahun 2019, namun pada lapangan usaha yang kontribusinya besar, pertumbuhannya tidak setinggi tahun 2018 yang lalu. Seperti pada lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan yang pada tahun 2018 yang tumbuh sebesar 5,45 persen, namun pada tahun 2019 tumbuh melambat sebesar 2,89 persen.

Tabel II.19
Distribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2015–2019 Atas Dasar Harga Berlaku
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (dalam persen)

No	Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018	2019
	(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	19,78	20,17	18,81	18,00	17,94
B.	Pertambangan dan Penggalian	12,68	11,90	11,71	10,60	9,49
C.	Industri Pengolahan	21,13	20,10	20,37	20,60	19,59
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,10	0,11	0,12	0,12
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,Limbah dan Daur Ulang	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
F.	Konstruksi	8,63	8,85	9,12	9,72	10,37
G.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor	14,16	14,79	15,52	15,69	15,79
H.	Transportasi dan Pergudangan	4,04	4,06	4,15	4,25	4,46
I.	Penyedian Akomodasi dan Makan Minum	2,39	2,47	2,48	2,59	2,91
J.	Informasi dan Komunikasi	1,54	1,59	1,62	1,72	1,89
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,80	1,84	1,83	1,94	1,99
L.	Real Estate	3,22	3,24	3,27	3,44	3,46
M, N.	Jasa Perusahaan	0,28	0,27	0,28	0,30	0,31
0.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,69	5,81	5,90	6,04	6,34
P.	Jasa Pendidikan	2,69	2,86	2,81	2,91	3,060
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,17	1,17	1,21	1,24	1,35
R,S.T.U	Jasa Lainnya	0,70	0,76	0,79	0,82	0,91
	PDRB	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2020)

Pada lapangan usaha perkebunan yang merupakan salah satu kontributor terbesar lapangan usaha ini, rendahnya harga komoditas strategis perkebunan Bangka Belitung seperti kelapa sawit, karet dan lada pada tahun 2019 membuat produktivitas menurun. Demikian juga dengan lapangan usaha industri pengolahan yang pada tahun 2018 tumbuh sebesar 4 persen, namun pada 2019 tumbuh melambat sebesar 1,17 persen. Kendala aturan pemerintah membuat perusahaan smelter swasta yang ada di Kepulauan Bangka Belitung berhenti beroperasi karena tidak dapat melakukan ekspor logam timahnya. Pada tahun 2019, hanya beberapa perusahaan smelter swasta yang bisa berproduksi dan melakukan ekspor logam timah.

Dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan, sebesar 0,61 persen pertumbuhan ekonomi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019 berasal dari pertumbuhan lapangan usaha konstruksi sebesar 0,61 persen, diikuti lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan serta lapangan

usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib masing-masing sebesar 0,53 persen dan 0,44 persen. Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Kepulauan Bangka Belitung yang masih terus digencarkan ikut mendorong kinerja lapangan usaha konstruksi pada tahun 2019. Secara teoritis nilai PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan akumulasi dari nilai PDRB Kabupaten dan Kota yang ada di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan PDRB ADHB sebagaimana diperlihatkan pada Tabel II.20 menunjukkan bahwa sepanjang periode tahun 2015–2019 nilai PDRB Kabupaten/Kota dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di bawah capaian nasional. Dari besaran PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut kurun waktu lima tahun terakhir, daerah yang memberikan kontribusi terbesar: 1) Kota Pangkalpinang; 2) Kabupaten Bangka Barat; 3) Kabupaten Bangka.

Tabel II.20
Perkembangan PDRB/PDB Atas Dasar Harga Berlaku
menurut Kabupaten/Kota/Provinsi/Nasional (miliar/triliun rupiah) Tahun 2015 – 2019

Kab/Kota/ Prov/Nasional	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bangka	11.001,4	11.771,7	12.807,9	13.317,0	13.749,2
Belitung	7.328,1	8.001,0	8.739,9	9.318,3	9.869,7
Bangka Barat	11.473,0	12.249,4	13.221,4	13.822,8	14.168,1
Bangka Tengah	7.056,1	7.469,0	7.972,2	8.216,3	8.579,3
Bangka Selatan	6.947,7	7.541,5	8.165,2	8.460,6	8.676,3
Belitung Timur	6.125,9	6.604,2	7.151,8	7.408,8	7.728,2
Pangkalpinang	10.234,6	11.116,5	12.108,6	12.966,1	13.703,3
Kepulauan Bangka Belitung	60.987,3	65.048,2	69.865,2	73.121,0	75.829,3
Nasional (triliun)	11.526.332,8	12.401.728,5	13.589.825,7	14.838.311,5	15.833.943,4

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2020)

Selanjutnya, dilihat berdasarkan PDRB ADHK Tahun 2010 sebagaimana diperlihatkan pada Tabel II.21, juga menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2015–2019 besaran perekonomian daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung relatif lebih kecil dibandingkan dengan besaran perekonomian nasional. Dari besaran PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut kurun waktu lima tahun terakhir, daerah yang memberikan kontribusi terbesar: 1) Kota Pangkalpinang; 2) Kabupaten Bangka Barat; 3) Kabupaten Bangka.

Tabel II.21
Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut
Kabupaten/Kota/Provinsi/Nasional (miliar/triliun rupiah) Tahun 2015–2019

Kab/Kota/ Prov/Nasional	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
Bangka	8.512,4	8.906,2	9.355,3	9.777,0	10.063,1
Belitung	5.400,9	5.669,1	5.969,7	6.290,4	6.505,3
Bangka Barat	8.769,6	9.190,2	9.673,7	10.176,2	10.901,9
Bangka Tengah	5.271,8	5.432,8	5.620,6	5.812,2	5.885,0
Bangka Selatan	5.284,6	5.511,8	5.763,9	6.024,3	6.181,4
Belitung Timur	4.675,2	4.873,9	5.110,3	5.325,5	5.504,0
Pangkalpinang	7.555,0	7.946,0	8.358,5	8.782,6	9.076,3
Kepulauan Bangka Belitung	45.962,3	47.848,4	49.985,2	52.215,4	53.951,1
Nasional (triliun)	8.982.517,1	9.434.613,4	9.912.928,1	10.425.397,3	10.949.243,7

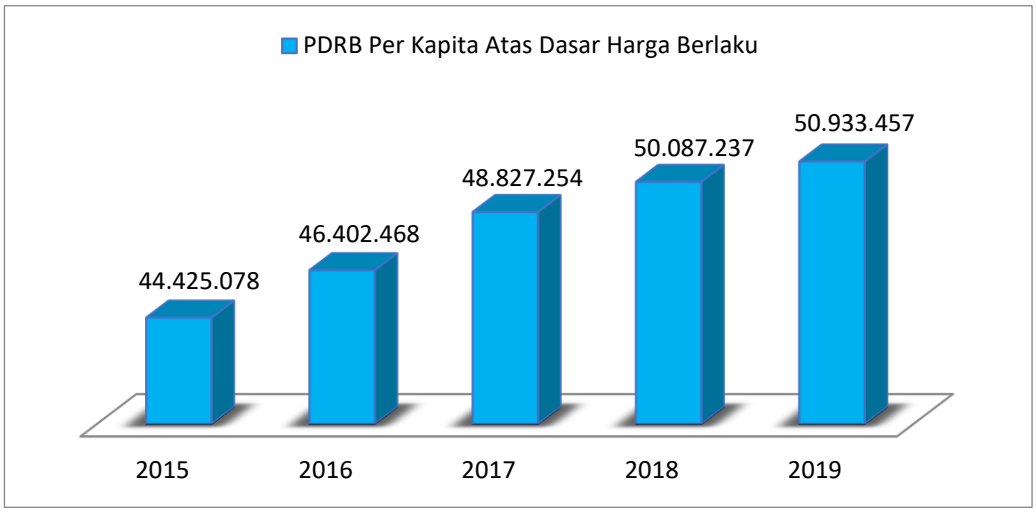
Sumber: BBDA BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2020)

2. PDRB Per Kapita

Nilai PDRB Per Kapita Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2015–2019 mengalami peningkatan. Pada tahun 2015, nilai PDRB per kapita tercatat sebesar Rp 44.425.078

dan mengalami peningkatan secara bertahap tiap tahunnnya menjadi Rp 50.933.457. Hal ini disebabkan karena cukup tingginya laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada kurun waktu tersebut. Gambaran mengenai perkembangan PDRB Per Kapita Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2015–2019, sebagaimana disajikan pada Grafik II.4.

Grafik II.4
PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (juta rupiah)
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 – 2019

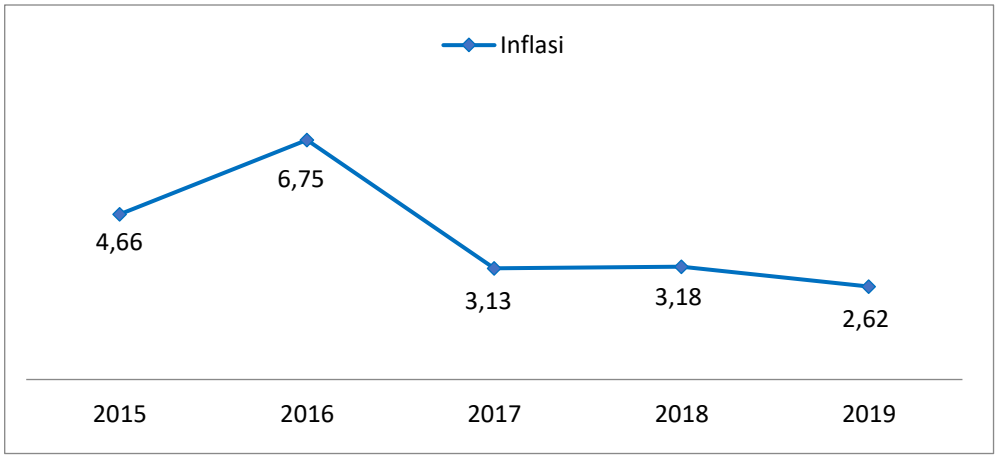


Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Babel, 2020

3. Tingkat Inflasi

Sepanjang tahun 2015 – 2019 secara keseluruhan tingkat Inflasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung *tren* bersifat fluktuatif. Tingkat inflasi tahun 2019 sebesar 2,62 persen mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018 yang sebesar 3,18 persen, bisa dilihat dari Grafik II.5 di bawah ini:

Grafik II.5
Tingkat Inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015-2019



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2020)

Jika dicermati menurut kelompoknya, sepanjang periode tahun 2015–2019 hampir semua kelompok pengeluaran mengalami inflasi. Pada tahun 2019, kelompok pengeluaran yang memberi andil sumbangan didominasi oleh bahan makanan sebesar 1,12 persen, diikuti oleh

makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau sebasar 0,59 persen, dan pendidikan, rekreasi dan olahraga mengalami inflasi sebesar 0,25 persen. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel II.22 di bawah ini:

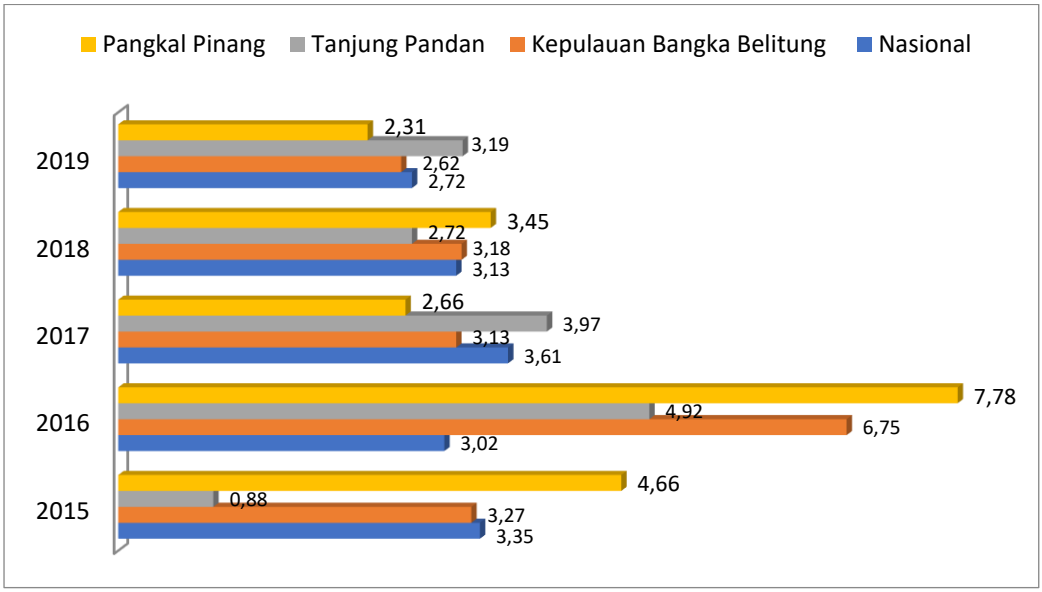
Tabel II.22
Kontribusi Kelompok Pengeluaran Terhadap Inflasi
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015-2019

Kelompok Pengeluaran	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
Umum	**3,27**	**6,75**	**3,13**	**3,18**	**2,62**
1. Bahan Makanan	2,25	11,45	1,66	0,87	1,12
2. Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	6,77	6,64	2,90	0,67	0,59
3. Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar	3,45	2,57	5,63	0,62	0,19
4. Sandang	2,11	5,65	2,06	0,13	0,16
5. Kesehatan	4,92	3,60	3,61	0,11	0,07
6. Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga	8,42	3,78	3,36	0,25	0,25
7. Transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	-1,13	7,27	2,09	0,53	0,24

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Tahun 2019, inflasi Pangkalpinang (2,31 persen) dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2,62 persen) relatif kecil bila dibandingkan dengan inflasi nasional sebesar 2,72. Sementara itu berbeda dengan inflasi Kota Tanjung Pandan tahun 2019 sebesar 3,19 capaiannya lebih tinggi daripada nasional. Angka inflasi sebagaimana dimaksud dapat diamati pada Grafik II.6.

Grafik II.6
Perbandingan Inflasi Pangkalpinang, Tanjung Pandan,
Kepulauan Bangka Belitung, dan Nasional 2015 – 2019

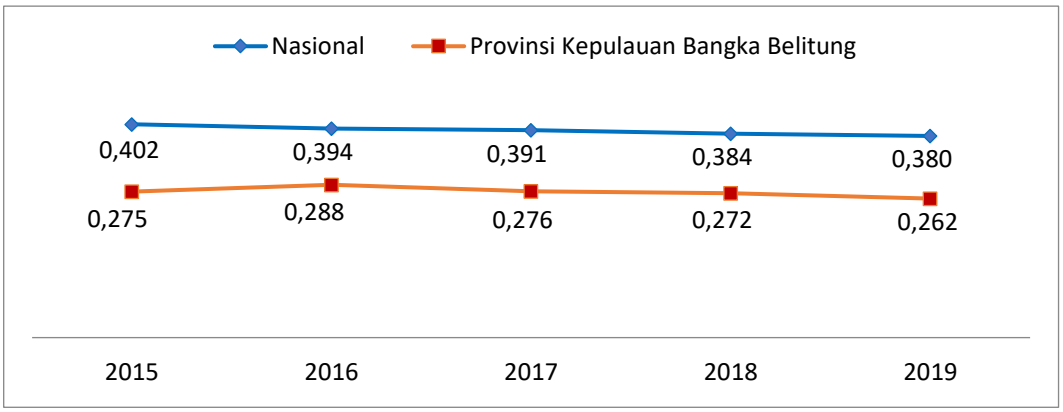


Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2020)

4. Indeks Gini

Berdasarkan Grafik II.7 terlihat bahwa nilai rasio gini Provinsi Kepulauan Bangka Belitung capaiannya lebih rendah daripada nasional. Selama periode 2015-2019 nilai rasio gini mengalami fluktuasi. Sedangkan berbeda dengan capaian nasional nilai rasio gini kurun waktu lima tahun terakhir cenderung menurun. Pada tahun 2019, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Kepulauan Bangka Belitung yang diukur dengan *Gini Ratio* adalah sebesar 0,262. Sementara itu jika dibandingkan dengan *Gini Ratio* tahun 2018 turun sebesar 0,010 poin dari angka 0,272. Pada tahun 2019 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tercatat memiliki nilai *Gini Ratio* terendah di Indonesia yaitu sebesar 0,262. Sedangkan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki nilai *Gini Ratio* tertinggi di Indonesia yaitu sebesar 0,428.

Grafik II.7
Indeks Gini Nasional dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015-2019

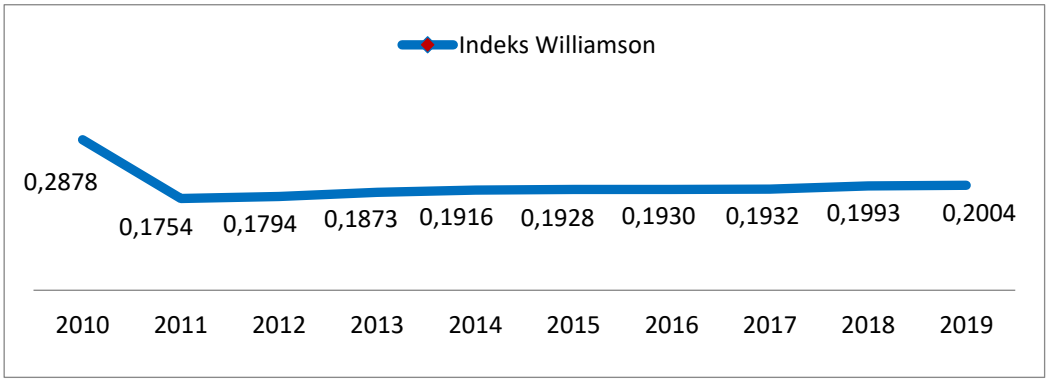


Sumber: Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020 (diolah)

5. Indeks Ketimpangan *Williamson*

Pada periode 2010-2011, Indeks ketimpangan *williamson* Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung menurun. Namun berbeda sepanjang tahun 2011-2019 indeks ketimpangan *Williamson* Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukan bahwa tren mengalami peningkatan, yang menggambarkan pembangunan antarwilayah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung relatif baik. Tahun 2019 capaiannya sebesar 0,2004, lebih tinggi bila dibandingakan tahun 2018 sebesar 0,1993. Artinya secara keseluruhan pembangunan wilayah semakin mendekati merata tersaji pada Grafik II.8.

Grafik II.8
Indeks Ketimpangan *Williamson* Tahun 2010 – 2019
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Sumber: Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020 (diolah)

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

1. Pendidikan

a. Angka melek huruf

Angka melek huruf di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana dapat dilihat pada Tabel II.23 di bawah ini. Data menunjukkan bahwa angka melek huruf usia 15+ di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus meningkat dari 97,63% pada tahun 2015 menjadi 98,18% pada 2019, artinya sekitar 98,18 persen penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berumur 15 tahun ke atas dapat membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya dan ada sekitar 1,82% penduduk Kepulauan Bangka Belitung usia 15+ yang belum melek huruf. Angka melek huruf ini merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana penduduk daerah terbuka terhadap pengetahuan.

Tabel II.23
Perkembangan Angka Melek Huruf Usia 15+
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2015 s.d. 2019

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
Prov. Kep. Bangka Belitung		97,63	97,66	97,63	97.76	98,18

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung , 2020

Angka melek huruf di kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada Tabel II.24 berikut.

Tabel II.24
Angka Melek Huruf menurut Kabupaten/Kota Tahun 2018
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Usia Diatas 15 Tahun Yang Bisa Membaca dan Menulis	Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun keatas	Angka Melek Huruf
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	Kabupaten Bangka	218.598	223.36	98.49
2	Kabupaten Bangka Barat	133.731	138.78	96.94
3	Kabupaten Bangka Selatan	129.505	135.69	96.66
4	Kabupaten Bangka Tengah	124.504	127.33	97.41
5	Kabupaten Belitung	126.995	128.46	98.29
6	Kabupaten Belitung Timur	869.828	88.07	98.03
7	Kota Pangkalpinang	142.962	144.99	98.11
Jumlah		**963.278**	**986.68**	**97.76**

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Data menunjukkan bahwa angka melek huruf terendah dan berada di bawah rata-rata angka provinsi adalah Kabupaten Bangka Selatan.

b. Angka rata-rata lama sekolah

Angka rata-rata lama sekolah juga dapat memberikan gambaran terkait penyelenggaraan pendidikan dan indeks pembangunan manusia di suatu daerah. Angka rata-rata sekolah menjelaskan rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Sementara Angka Harapan Sekolah (HLS) merupakan salah satu output yang dapat digunakan untuk memotret pemerataan pendidikan. HLS mengukur kesempatan pendidikan seorang penduduk dari usia tujuh tahun. Secara sederhana, HLS didefinisikan sebagai angka

partisipasi sekolah menurut umur tunggal. HLS merupakan indikator yang menggambarkan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka ini diperoleh dengan cara membagi banyaknya partisipasi sekolah penduduk pada usia *a* pada tahun *t* dengan jumlah penduduk yang bersekolah pada usia *a* dan tahun *t*. Angka Harapan Sekolah (HLS) bersama-sama dengan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) merupakan dua indikator penghitung IPM.

Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 7,98. Secara keseluruhan di tahun 2019 rata-rata lama sekolah hanya Kota Pangkalpinang (9,80) dan Kabupaten Belitung (8,41) yang angka rata-rata lama sekolahnya berada di atas angka nasional (8,34), ada tiga kabupaten (Bangka Selatan, Bangka Tengah, dan Bangka Barat) memilik angka rata-rata lama sekolah terendah dan berada di bawah rata-rata lama sekolah provinsi seperti pada Tabel II.25 di bawah ini.

Tabel II.25
Rata-Rata Lama Sekolah Usia 15 Tahun ke Atas Tahun 2015 s.d. 2019
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/kota	Rata - Rata Lama Sekolah Usia 15 Tahun ke Atas (Tahun)				
		2015	2016	2017	2018	2019
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1	Bangka	7.96	8.38	8,19	8,20	8.23
2	Belitung	8.27	8.14	8,11	8,15	8.41
3	Bangka Barat	7.43	7.56	7,06	7,18	7.21
4	Bangka Tengah	6.97	7.17	6,79	6,80	7,13
5	Bangka Selatan	5.75	6.63	6,12	6,36	6.42
6	Belitung Timur	7.86	7.95	8,00	8,14	8.15
7	Pangkalpinang	9.99	9.76	9,77	9,78	9.80
Jumlah		**7.79**	**7.62**	**7.78**	**7.84**	**7,98**

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Rata-rata lama sekolah adalah jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan (tidak termasuk tahun mengulang). Angka rata-rata lama sekolah diperoleh dari informasi tentang partisipasi sekolah, jenjang dan jenis pendidikan yang pernah/sedang diduduki, ijazah tertinggi, dan tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki.

Tabel II.26
Angka Harapan Sekolah Tahun 2014 s.d. 2018
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	Harapan Lama Sekolah (Tahun)				
		2014	2015	2016	2017	2018
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1	Bangka	12.33	12.36	12.37	12.58	12.68
2	Belitung	10.77	11.32	11.47	11.51	11.83
3	Bangka Barat	10.99	11.48	11.49	11.50	11.51
4.	Bangka Tengah	11.40	11.72	11.73	11.74	11.75
5.	Bangka Selatan	10.86	10.88	11.25	11.34	11.35
6.	Belitung Timur	10.94	11.28	11.46	11.48	11.49
7.	Pangkalpinang	12.74	12.76	12.77	12.78	12.83
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		**10.96**	**11.18**	**11.60**	**11.71**	**11.83**

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Angka Harapan Sekolah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, walaupun menunjukkan peningkatan dari 10,96 (2014) menjadi 11,83 pada tahun 2018, tetapi masih di bawah Angka Harapan Sekolah (HLS) Indonesia dengan angka 12,85. Apabila dilihat dari peringkat secara nasional posisi HLS berada pada posisi 2 terbawah (urutan 33 dari 34 provinsi), hanya sedikit lebih tinggi 1,29. Saat ini Angka Harapan Sekolah penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tertinggi di Kota Pangkalpinang (12,83), terendah di kabupaten Bangka Selatan (11,35). Hal ini tentu sangat berpengaruh terhadap angka IPM secara keseluruhan.

c. Angka putus sekolah

Angka Putus Sekolah (APTS) adalah angka yang menunjukkan proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Adapun kelompok umur yang dimaksud adalah kelompok umur 7-12 tahun, 13-15 tahun dan 16-18 tahun. Penyebab anak putus sekolah antara lain: karena masalah biaya; ingin membantu orang tua dengan bekerja; atau penyebab lainnya seperti menikah dini. Kasus anak putus sekolah berdampak seperti siklus. Selain berkorelasi dengan persoalan kemiskinan, putus sekolah juga mengakibatkan bertambahnya jumlah pengangguran, bahkan menambah kemungkinan kenakalan anak dan tindak kejahatan dalam kehidupan sosial masyarakat. Begitu seterusnya karena tingkat pendapatan rendah, kemampuan untuk mengakses ke pendidikan formal pun sulit dicapai.

Tabel II.27
Perkembangan Angka Putus Sekolah
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2019

INDIKATOR	2017			2018			2019		
	SD/ MI	SMP/ MTS	SMA/MA /SMK	SD/ MI	SMP /MTS	SMA/MA /SMK	SD/ MI	SMP/ MTS	SMA/MA /SMK
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
Angka Putus Sekolah	0.01	7.38	32.15	0,04	6.92	32.68	0.18	6.78	31.32

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Semakin tinggi angka putus sekolah menggambarkan kondisi pendidikan yang tidak baik dan tidak merata. Begitu sebaliknya jika angka putus sekolah semakin kecil maka kondisi pendidikan di suatu wilayah semakin baik. Pada tahun 2019, angka putus sekolah anak usia SD Bangka Belitung mengalami kenaikan sebesar 0,14 persen dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 0.18 persen. Sedangkan untuk anak usia SMP di Bangka Belitung mengalami penurunan sebesar 0,14 persen dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 6.78 persen dan angka putus sekolah anak usia SMA (pendidikan menengah) Bangka Belitung mengalami penurunan sebesar 1.36 persen dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 31.32 persen. Tabel II.27 menunjukkan pola angka putus sekolah dimana semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin besar angka putus sekolah. Pada tahun 2019, dua dari 1000 anak SD putus sekolah. Namun angka tersebut semakin besar pada jenjang SMA/sederajat, dimana 313 dari 1000 anak SMA/sederajat putus sekolah. Semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin banyak siswa putus sekolah.

Tabel II.28
Jumlah Siswa Putus Sekolah berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016-2019

Jenjang	2016		2017		2018		2019	
	L	P	L	P	L	P	L	P
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
Sekolah Dasar (SD)	154	106	141	66	286	163	253	152
Sekolah Menengah Pertama (SMP)	169	110	258	136	446	88	95	57
Sekolah Menengah Atas (SMA) & Kejuruan (SMK)	404	349	356	222	632	355	99	36

Sumber: Statistik Pendidikan, Kemendikbud – Pusat Data & Teknologi Informasi, 2020

Berdasarkan data dari Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, angka putus sekolah pada jenjang sekolah dasar dari 2016 ke 2019 mengalami peningkatan, sementara pada jenjang sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas/kejuruan mengalami penurunan. Angka putus sekolah tertinggi terjadi pada tahun 2018, di mana di semua jenjang Pendidikan (SD/SMP/SMA/SMK) meningkat tajam. Selain itu, ditemukan juga bahwa siswa laki-laki lebih banyak yang putus sekolah dibandingkan siswa perempuan.

d. Angka partisipasi sekolah

Angka partisipasi sekolah adalah proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. Sejak tahun 2009, pendidikan non formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan. APS dikenal sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan layanan pendidikan di suatu daerah. Semakin tinggi nilai APS, maka daerah tersebut dianggap berhasil menyelenggarakan layanan akses pendidikan. APS yang tinggi juga menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. APS juga merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk terhadap fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia tertentu di suatu daerah. Semakin tinggi angka partisipasi sekolah semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan.

Tabel II.29
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) 2014-2018 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1.	**SD/MI**					
1.1	Jumlah murid usia 7-12 tahun	138.240	143.072	141.586	143.980	143.136
1.2	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	143.890	149.300	150.700	156.800	156.800
1.3	APS 7-12 tahun	96,07	95,83	93,95	91,82	91,29
2.	**SMP/MTs**					
2.1	Jumlah murid usia 13-15 tahun	48.886	50.827	49.590	51.369	44.415
2.2	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	69.610	72.100	72.800	73.800	73.800
2.3	APS 13-15 tahun	70,23	70,5	68,12	69,61	60,18
3.	**SMA/MA/SMK**					
3.1	Jumlah murid usia 16-18 tahun	36.337	37.172	36.731	39.245	37.763
3.2	Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	75.900	71.300	71.500	71.900	71.900
3.3	APS 16-18 tahun	65,9	52,13	51,37	54,58	52,52
4.	**DIPLOMA/PERGURUAN TINGGI**					
4.1	Jumlah murid usia 19-24 tahun	10,072	3,516	19,446	19,633	20,524
4.2	Jumlah penduduk kelompok usia 19-24 tahun					160,473
4.3	APS SMA/MA 19-24 tahun	-	-	-	-	15.99

Sumber: Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud (2019)

Pada Tabel II.29 di atas, Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk usia 7-12 tahun di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebesar 91,29 persen. Hal ini berarti masih ada 8,71 persen penduduk berusia 7-12 tahun yang tidak bersekolah. Sedangkan untuk APS penduduk usia 13-15 tahun baru 60,18 persen yang bersekolah, dan masih terdapat 39,82 persen yang tidak bersekolah.

Untuk penduduk 16-18 tahun baru 52,52 persen yang bersekolah, artinya hampir separuh (47,48 persen) penduduk usia 16-18 tahun tidak bersekolah. Mengingat tingginya penduduk usia 13-15 tahun dan 16-18 tahun yang tidak bersekolah, Pemerintah Daerah perlu mengambil kebijakan untuk meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah. Untuk itu perlu dilakukan analisis penyebab rendahnya APS, apakah karena faktor budaya, kemiskinan, geografi, atau yang lainnya, sehingga bisa diambil kebijakan berupa pemberian beasiswa, pembangunan sarana prasarana sekolah, membangun infrastruktur dasar, atau yang lainnya.

e. Angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni

Angka partisipasi kasar merupakan proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Jika nilai APK mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya.

Sementara itu, angka partisipasi murni merupakan proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih sekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Jika APM 100, berarti seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu. Sejak tahun 2007, pendidikan non formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan.

Tabel II.30
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni 2014-2018
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1.	**SD/MI/Paket A**					
	APK SD/MI/Paket A	113.22	111.07	111.75	110.58	111.15
	APM SD/MI/Paket A	96.49	96.82	96.33	96.07	97.71
2.	**SMP/MTs/Paket B**					
	APK SMP/MTs/Paket B	85.52	87.60	84.38	84.53	85.93
	APM SMP/MTs/Paket B	71.83	69.28	68.57	70.30	73.96
3.	**SMA/MA/SMK/Paket C**					
	APK SMA/MA/SMK/Paket C	75.51	76.41	79.10	82.88	82.21
	APM SMA/MA/SMK/Paket C	56.93	44.32	48.63	53.47	57.86

Sumber: Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud, 2019)

Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari berbagai jenjang pendidikan walau menunjukkan peningkatan dari 2014-2018 (lihat Tabel II.30). Dari besaran APK dan APM yang dicapai, baru APK & APM pada jenjang SD/MI yang dikatakan berhasil. Sementara pada jenjang SMP/MTs dan

SMA/MA/SMK menunjukkan tidak saja belum semua anak bersekolah, namun juga banyak anak bersekolah kurang atau lebih dari usia ideal. Semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah. Nilai APK bisa lebih besar dari 100 persen menunjukkan bahwa terdapat murid yang berusia di luar usia resmi sekolah, atau berdomisili di luar zona daerah di mana sekolah berada.

1) Angka Partisipasi Kasar (APK)

Perkembangan APK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2014-2018 dapat diamati pada Tabel II.31-33 dibawah ini. APK SD/MI/Paket A, APK SMP/MTs/Paket B, dan APK SM/SMA/SMK/Paket C Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami tren menurun sejak 2014.

Tabel II.31
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A Tahun 2014-2018
menurut Kabupaten/Kota/Provinsi Kepulauan Bangka Belitung/Nasional

No	Kabupaten/Kota	SD/MI/Paket A				
		2014	2015	2016	2017	2018
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1	Bangka	115,11	111,67	110,35	107,72	102,43
2	Belitung	109,53	103,33	101,44	98,65	97,67
3	Bangka Barat	116,77	112,71	110,7	108,3	106,53
4.	Bangka Tengah	115,64	111,6	110,21	107,77	107,69
5.	Bangka Selatan	108,67	114,44	112,17	110,51	109,64
6.	Belitung Timur	117,44	104,64	102,2	98,45	97,4
7.	Pangkalpinang	118,32	115,74	113,77	113,71	108,68
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		**114,38**	**111,11**	**109,3**	**107,11**	**104,63**
Indonesia		**109,05**	**107,96**	**106,4**	**105,89**	**91,13**

Sumber: Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud, 2019

Secara keseluruhan pada tahun 2018, APK SD/MI di 7 (tujuh) kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dikatakan berhasil. Artinya anak berusia SD/MI telah bersekolah seluruhnya. Apabila dilihat dari peringkat secara nasional posisi APK SD/MI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (104,63) masih di atas APK Nasional (91,13).

Tabel II.32
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B Tahun 2014-2018
menurut Kabupaten/Kota/Provinsi Kepulauan Bangka Belitung/Nasional

No	Kabupaten/Kota	SMP/MTs/Paket B				
		2014	2015	2016	2017	2018
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1	Bangka	96,72	97,05	98,08	99,71	81,51
2	Belitung	97,92	98,46	99,32	100,9	93,08
3	Bangka Barat	95,56	96,23	97,2	101,93	86,72
4.	Bangka Tengah	91,32	92,14	93,67	94,82	72,9
5.	Bangka Selatan	77,36	78,03	78,47	79,21	72,97
6.	Belitung Timur	97,24	97,88	98,77	100,53	87,77
7.	Pangkalpinang	99,91	100,25	100,42	101,44	93,08
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		**93,39**	**93,98**	**94,82**	**96,54**	**83,2**
Indonesia		**76,35**	**100,72**	**101,05**	**102,08**	**76,35**

Sumber: Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud, 2019

Sementara untuk APK jenjang SMP/MTs, APK tertinggi dicapai oleh Kabupaten Belitung (92,20) dan Kabupaten Bangka (90,68), APK terendah dicapai oleh Kabupaten Bangka

Barat (72,01). Dari 7 (tujuh) kabupaten/kota, hanya 2 (dua) kabupaten memiliki APK di atas rata-rata nasional, sementara 5 (lima) kabupaten/kota APK nya masih di bawah rata-rata nasional. Sementara untuk tingkat provinsi, APK Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2018 masih di bawah rata-rata nasional.

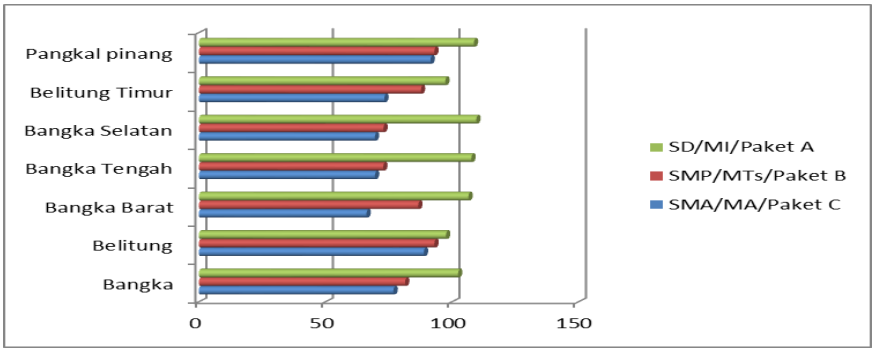
Tabel II.33
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/Paket C Tahun 2014-2018
menurut Kabupaten/Kota/Provinsi Kepulauan Bangka Belitung/Nasional

No	Kabupaten/Kota	SMA/MA/Paket C				
		2014	2015	2016	2017	2018
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1	Bangka	68,17	71,76	74,53	80,42	76,92
2	Belitung	78,48	82,47	85,12	93,36	88,94
3	Bangka Barat	54,69	59,56	62,19	68,71	66,28
4.	Bangka Tengah	59,51	65,2	68,57	72,82	69,61
5.	Bangka Selatan	53,34	58,21	61,04	68,3	69,57
6.	Belitung Timur	54,34	60,03	63,04	73,66	73,3
7.	Pangkalpinang	86,47	90,82	93,21	96,16	91,55
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		**65,9**	**70,57**	**73,13**	**79,34**	**76,71**
Indonesia		**75,53**	**76,45**	**81,95**	**86,94**	**77,77**

Sumber: Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud, 2019

Untuk Jenjang SMA/MA/SMK/Paket C, Angka Partisipasi Kasar (APK) tertinggi dicapai oleh Kabupaten Bangka (120.95), dan terendah Kabupaten Bangka Selatan (48,47). Dari 7 (tujuh) kabupaten/kota, hanya 2 (dua) kabupaten/kota yang berada di atas rata-rata provinsi (82,21) yaitu Kabupaten Bangka (120.95), Kota Pangkalpinang (95,75), dan hanya 2 (dua) kabupaten/kota yang APK SMA/MA/SMK/Paket C nya di atas rata-rata nasional. Sementara 5 (lima) kabupaten lainnya memiliki APK SMA/MA/SMK/Paket C di bawah rata-rata nasional.

Grafik II.9
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK/Paket C Tahun 2018
menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



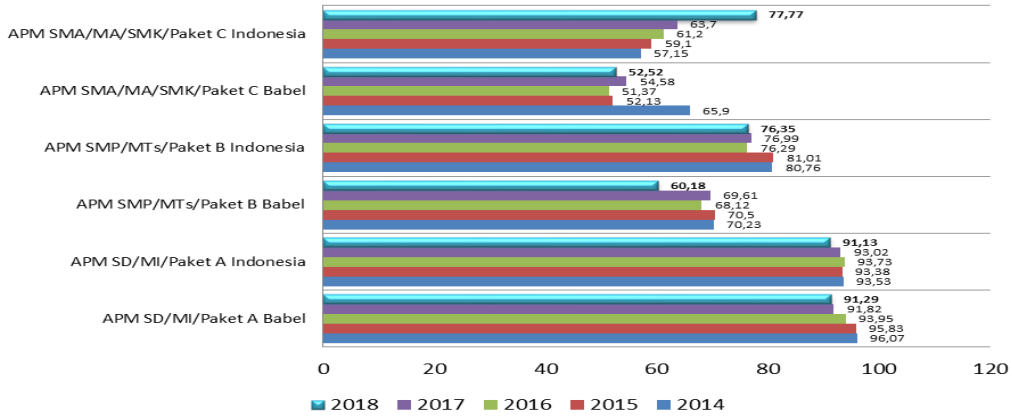
Sumber: Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud, 2019

Pada tahun 2018, khusus capaian kabupaten/kota, SMA/MA/SMK/Paket C tertinggi dicapai oleh Kota Pangkalpinang (91,55), terendah Kabupaten Bangka Barat (66,28). APM SMP/MTs/Paket B tertinggi dicapai oleh Kota Pangkalpinang (93,08) dan Kabupaten Belitung (93,08), terendah diraih oleh Kabupaten Bangka Tengah 72,9. Sementara untuk jenjang APK SD/MI/Paket A capaian tertinggi dicapai oleh Kabupaten Bangka Selatan (109,64), terendah oleh Kabupaten Belitung Timur (97,4).

2) Angka Partisipasi Murni (APM)

Perkembangan angka partisipasi murni Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2014-2018 dapat diamati pada Grafik II.10 dan Tabel II.34. Angka partisipasi murni SD/MI/Paket A, angka partisipasi murni SMP/MTs/Paket B, dan angka partisipasi murni SM/SMA/SMK/Paket C Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami tren menurun sejak 2014, berbeda dengan perkembangan angka partisipasi murni nasional, yang menunjukkan tren meningkat pada semua jenjang pendidikan dari 2014. Pada tahun 2018, hanya angka partisipasi murni SD/MI/Paket A yang berada di atas rata-rata nasional, sementara angka partisipasi murni SMP/MTs/Paket B dan angka partisipasi murni SMA/SMK/MA/Paket C, capaiannya di bawah rata-rata nasional.

Grafik II.10
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK)
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan IndonesiaTahun 2014-2018



Sumber: diolah dari Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud, 2019

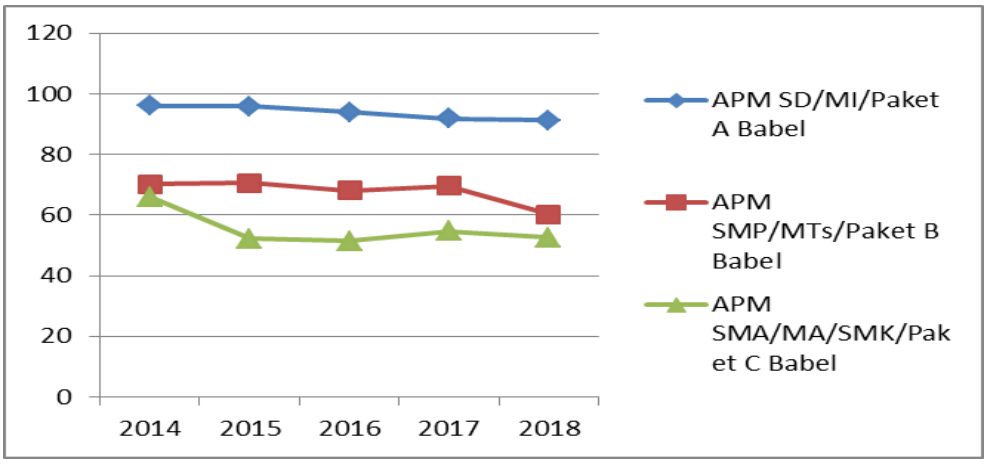
Tabel II.34
Perkembangan APM Tahun 2014- 2018 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1.	**SD/MI**					
	Jumlah siswa kelompok usia 7-12 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI/Paket A	138,240	143,072	141,586	143,980	143,136
	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	143,890	149,300	150,700	156,800	156,800
	APM SD/MI/Paket A	96.07	96.82	96.33	96.07	97.71
2.	**SMP/MTs**					
	Jumlah siswa kelompok usia 13-15 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs/Paket B	48,886	50,827	49,590	51,369	44,415
	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	69,610	72,100	72,800	73,800	73,800
	APM SMP/MTs/Paket B	70.23	69.28	68.57	70.30	73.96
3.	**SMA/MA/SMK**					
	Jumlah siswa kelompok usia 16-18 tahun yang bersekolah dijenjang pendidikanSMA/MA/SMK/Paket C	36,337	37,172	36,731	39,245	37,763
	Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	75,900	71,300	71,500	71,900	71,900
	APM SMA/MA/SMK/Paket C	65.9	44.32	48.63	53.47	57.86

Sumber: Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud, 2019

Perkembangan angka partisipasi murni pada masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2018 dapat dilihat Tabel II.34. Angka partisipasi murni SD/MI yang paling tinggi terdapat di Kabupaten Bangka Barat. Sementara angka partisipasi murni SMP/MTs paling tinggi diperoleh Kabupaten Belitung Timur. Sedangkan angka partisipasi murni SMA/SMK/MA paling tinggi terdapat pada Kota Pangkalpinang. Sedangkan Grafik II.11 menujukan angka partisipasi murni di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kurun waktu tahun 2014-2018 pada jenjang tingkat pendidikan SD/MI/Paket A, SMP/MTs/Paket B, dan SMA/MA/SMK/Paket C.

Gafik II.11
Perkembangan APM Tahun 2014-2018 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Sumber: Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud, 2019

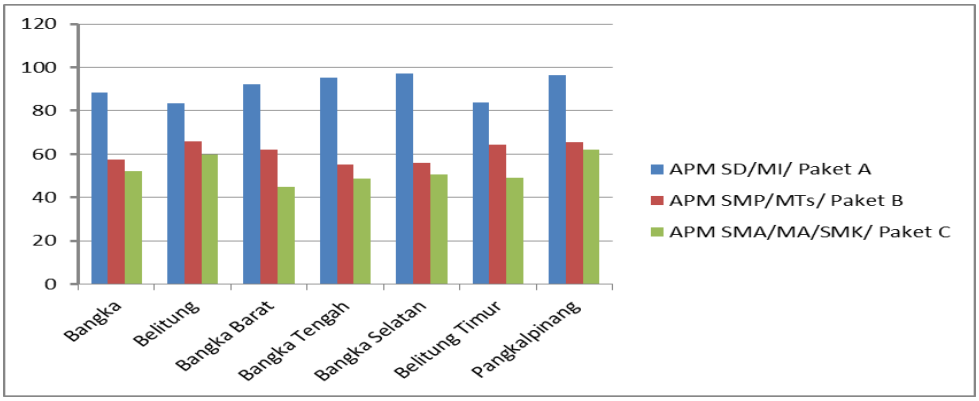
Tabel II.35
Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2018 menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/ Kota	SD/MI			SMP/MTs			SMA/MA/SMK		
		Jumlah siswa usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI/ Paket A	Jumlah penduduk usia 7-12 tahun	APM	Jumlah siswa usia 13-15 tahun bersekolah di SMP/MTs/Paket B	Jumlah penduduk usia 13-15 tahun	APM	Jumlah siswa usia 16-18 tahunbersekolah di SMA/MA/ SMK/Paket C	Jumlah penduduk usia 16-18 tahun	APM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Bangka	31.354	35.464	94,58	9.649	16.826	74,12	8.089	15.530	65,38
2	Belitung	16.474	19.732	99,13	5.786	8.789	79,72	4.890	8.190	50,73
3	Bangka Barat	19.681	21.319	100	5.779	9.295	66,43	4.459	9.944	53,22
4.	Bangka Tengah	22.050	23.154	97,88	5.775	10.435	69,05	4.923	10.120	53,92
5.	Bangka Selatan	21.468	22.101	96,95	6.472	11.585	73,88	4.980	9.834	48,47
6.	Belitung Timur	11.123	13.254	98,46	3.915	6.084	81,09	3.481	7.076	61,51
7.	Pangkalpinang	20.986	21.776	99,18	7.059	10.786	75,13	6.941	11.206	68,68
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		**143.136**	**156.800**	**97,71**	**44.415**	**73.800**	**73,96**	**37.763**	**71.900**	**57,86**
Indonesia		**22.494.720**	**27.843.400**	**91,13**	**7.633.842**	**13.440.400**	**76,35**	**7.418/348**	**13.305.400**	**77,77**

Sumber: Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud, 2019

Pada tahun 2018 Angka Partisipasi Murni pada tingkat pendidikan SD/MI/Paket A dan APM SMP/MTs/Paket B di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah berada di atas rata-rata nasional, di mana APM SD/MI/Paket A sebesar 97,71, APM nasional (91,13), dan APM SMP/MTs/Paket B sebesar 73,96, APM nasional (76,35). Hanya APM SMA/MA/SMK (57,86) yang berada jauh di bawah APM nasional (77,77).

Grafik II.12
Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2018 menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Sumber: Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud, 2019

Khusus capaian kabupaten/kota, APM SD/MI/Paket tertinggi dicapai oleh Kabupaten Bangka Barat (100), terendah Kabupaten Bangka (94,58), APM SMP/MTs/Paket B tertinggi dicapai oleh Kabupaten Belitung Timur (81,09), terendah diraih oleh Kabupaten Bangka Barat 66,43. Sementara untuk jenjang APM SMA/MA/SMK APM tertinggi dicapai oleh Kota Pangkalpinang (68,68), terendah oleh Kabupaten Bangka Selatan (48,47).

2. Kesehatan

a. Angka Kelangsungan Bayi Hidup

Beberapa faktor kesehatan seperti angka kematian bayi dan balita, persentase gizi buruk, angka kematian ibu melahirkan, dan beberapa penyakit yang terjadi menjadi hal penting diperhatikan. Perkembangan angka kematian bayi balita diperlihatkan seperti tabel di bawah ini.

Tabel II.36
Perkembangan Angka Kematian Bayi dan Balita Per 1.000 Kelahiran Hidup
Tahun 2015-2019 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/ Kota	2015		2016		2017		2018		2019	
		Bayi	Balita	Bayi	Balita	Bayi	Balita	Bayi	Balita	Bayi	Balita
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
1	Bangka	7,54	9,58	7,43	8,23	6,27	7,12	3,77	4,56	5,24	6,04
2	Belitung	11,29	12,26	12,17	14,02	10,04	12,12	12,14	13,45	17,77	20,85
3	Bangka Tengah	6,46	7,86	6,46	6,46	6,52	8,35	4,76	6,62	6,30	6,57
4	Bangka Barat	7,37	8,38	6,63	7,14	5,11	6,01	6,04	7,76	3,09	3,37
5	Bangka Selatan	6,28	7,38	5,85	7,52	6,03	6,63	7,43	7,74	9,19	9,80
6	Belitung Timur	8,25	8,25	6,71	8,62	8,95	10,44	13,28	14,71	11,55	13,56
7	Kota Pangkalpinang	3,38	3,38	6,33	6,33	3,11	3,59	3,25	3,72	3,21	3,21
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		**7,05**	**8,13**	**7,22**	**8,07**	**6,25**	**7,35**	**6,31**	**7,37**	**7,17**	**7,97**

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Berdasarkan Tabel 11.36 di atas, angka kematian bayi dan balita pada tahun 2015–2019 di kabupaten/kota menunjukkan tren yang fluktuatif. Pada tahun 2017 angka kematian bayi dan balita mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, sedangkan pada tahun 2018 dan 2019 mengalami kenaikan. Dari 5 (lima) tahun terakhir terlihat kematian bayi dan balita tertinggi terdapat di Kabupaten Belitung. Dengan angka kematian bayi untuk tahun 2019 sebesar 17,77 dan angka kematian balita 20,85. Pada tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung angka kematian bayi tahun 2019 mengalami peningkatan dari tahun 2018 dimana angka kematian bayi tahun ini sebesar 7,17 dan angka kematian balita sebesar 7,97.

b. Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019 sebesar 70,50 tahun. UHH tertinggi selama 6 tahun berturut-turut berada di Kota Pangkalpinang yaitu 73,13 tahun. Sementara UHH terendah berada di Kabupaten Bangka Selatan yaitu 67,90 tahun. Dilihat dari perkembangan UHH di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2014 hingga tahun 2019 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun peningkatan UHH di provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih menjadi prioritas karena angka tersebut masih dibawah target UHH nasional yaitu sebesar 71,34.

Tabel II.37
Usia Harapan Hidup menurut Kabupaten/Kota Tahun 2014-2019
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Provinsi/Kabupaten /Kota	Usia Harapan Hidup (tahun)					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
Bangka	70,47	70,48	70,52	70,58	70,73	70,99
Belitung	70,22	70,32	69,52	70,44	70,64	70,94
Bangka Barat	69,46	69,47	70,38	69,56	69,73	69,99
Bangka Tengah	69,98	70,28	66,99	70,49	70,78	71,16
Bangka Selatan	66,56	66,86	66,99	67,13	67,47	67,90
Belitung Timur	71,03	71,23	71,30	71,37	71,59	71,90
Pangkalpinang	72,31	72,51	72,57	72,64	72,86	73,17
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	**69,72**	**69,88**	**69,92**	**69,95**	**70,18**	**70,50**

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

c. Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup

Berikut ini pada Tabel II. 38 menggambarkan jumlah Angka Kematian Ibu dari tahun 2013 sampai dengan 2019, di mana untuk tahun 2019 AKI paling tinggi di Kabupaten Belitung Timur dengan jumlah kematian 9 orang, jumlah ini merupakan angka tertinggi di Kabupaten Belitung Timur selama 7 tahun terakhir. Sedangkan yang paling rendah di Kota Pangkalpinang dengan jumlah kematian 1 orang. Secara keseluruhan AKI di tingkat provinsi tahun 2019 sebanyak 36 orang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu 44 orang.

Tabel II.38
Angka Kematian Ibu menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013 s.d. 2019
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Provinsi/Kabupaten /Kota	Angka Kematian Ibu (AKI)						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
Bangka	8	7	12	6	4	9	7
Belitung	6	4	3	4	6	6	4
Bangka Barat	5	6	6	5	4	7	5
Bangka Tengah	3	4	2	2	0	6	6
Bangka Selatan	4	4	3	0	2	7	4
Belitung Timur	2	1	1	2	1	4	9
Pangkalpinang	5	2	4	5	4	5	1
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	**33**	**28**	**31**	**24**	**21**	**44**	**36**

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

d. Bayi Dengan Gizi Buruk

Berikut ini pada Tabel II.39 menjelaskan perkembangan status gizi yaitu Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) di mana bayi lahir dengan berat <2.500 gram, serta jumlah balita dengan gizi buruk dari tahun 2015 sampai dengan 2019. Di mana untuk tahun 2019 jumlah bayi BBLR terbanyak terdapat di Kabupaten Belitung, sedangkan BBLR terendah di Kabupaten Bangka Barat. Jumlah balita dengan gizi buruk secara keseluruhan sejak tahun 2015 mengalami penurunan, namun pada tahun 2019 sedikit mengalami peningkatan menjadi 68 kasus. Adapun jumlah kasus balita gizi buruk paling banyak terdapat di Kabupaten Bangka Selatan sebanyak 20 kasus, sedangkan yang paling rendah di Kabupaten Belitung Timur dengan 3 kasus.

Tabel II.39
Perkembangan Jumlah Bayi Berat Lahir Rendah dan Gizi Buruk
Tahun 2015 s.d. 2019 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/ Kota	2015		2016		2017		2018		2019	
		BBLR	Gizi Buruk	BBLR	Gizi Buruk	BBLR	Gizi Buruk	BBLR	Gizi Buruk	BBLR	Gizi Buruk
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
1	Bangka	194	26	179	16	169	7	196	4	187	7
2	Belitung	143	3	137	7	158	6	196	7	255	6
3	Bangka Tengah	171	10	128	14	183	10	168	12	173	10
4	Bangka Barat	107	13	182	6	142	8	117	9	113	8
5	Bangka Selatan	119	10	128	7	125	10	111	11	147	20
6	Belitung Timur	123	8	117	4	115	13	119	10	125	3
7	Kota Pangkalpinang	113	10	117	21	145	17	120	11	130	14
	Provinsi Babel	**970**	**80**	**988**	**75**	**1.037**	**71**	**1.027**	**64**	**1.130**	**68**

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Tabel II.39 menjelaskan perkembangan jumlah bayi berat lahir rendah dan gizi buruk dari tahun 2014 sampai dengan 2018, di mana untuk tahun 2018 kasus gizi buruk paling tinggi di Kabupaten Bangka Barat dengan 12 kasus, sedangkan yang paling rendah di Kabupaten Bangka dengan 4 kasus. BBLR adalah neonatus dengan berat badan lahir pada saat kelahiran kurang dari 2500 gram (sampai 2.499 gram) tanpa memandang masa kehamilan. Berat lahir adalah berat bayi yang ditimbang dalam 1 jam setelah lahir. Untuk keperluan bidan di desa berat lahir diterima dalam 24 jam pertama setelah lahir. Terdapat 2 penyebab kelahiran bayi dengan berat badan kurang dari 2.500 gram (BBLR), yaitu

karena umur kehamilan kurang dari 37 minggu dan berat badan lebih rendah dari semestinya, sekalipun umur kehamilan cukup atau kombinasi keduanya.

e. Persentase *Stunting*

Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan anak lebih pendek (kerdil) dari standar usianya. Grafik II.13 menjelaskan kondisi persentase balita kurus dan *stunting* untuk tahun 2018, dengan balita kurus paling tinggi di Kabupaten Bangka Barat dengan persentase sebesar 7,26 persen dan yang paling rendah di Kabupaten Belitung Timur dengan 0,79 persen. Begitu pula dengan balita *stunting* paling tinggi di Kabupaten Bangka Barat sebesar 18,37 persen dan terendah di Kabupaten Belitung Timur sebesar 2,59 persen.

Grafik II.13
Persentase Bayi kurus dan *Stunting* Tahun 2018
menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Sumber: Buku Saku Nasional PSG, 2019

Berikut ini pada Tabel II.40 menjelaskan perkembangan persentase balita *stunting* dari tahun 2015 sampai dengan 2019, di mana untuk tahun 2019 persentase balita *stunting* sebesar 8,61 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu 12,05. Adapun persentase balita *stunting* paling banyak terdapat di Kabupaten Bangka Barat sebesar 16,96 sedangkan *stunting* paling sedikit di Kota Pangkalpinang dengan persentase sebesar 1,29.

Tabel II.40
Perkembangan Persentase Balita *Stunting* Tahun 2015 s.d. 2019
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Provinsi/Kabupaten /Kota	Persentase Stunting Menurut Kabupaten/Kota				
	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
Bangka	18,66	27,52	27,66	12,21	4,61
Belitung	23,32	18,87	27,66	13,82	10,76
Bangka Barat	23,21	23,21	25	18,37	16,96
Bangka Tengah	19,02	21,96	25,64	6,91	5,85
Bangka Selatan	16,02	25,48	30,03	16,20	9,47
Belitung Timur	9,69	14,72	29,30	2,59	8,02
Pangkalpinang	22,19	21,71	26,69	7,99	1,29
Provinsi Bangka Belitung	**18,93**	**21,91**	**27,30**	**12,05**	**8,61**

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

f. Penyakit Menular

Perkembangan jumlah kasus penyakit menular di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih cukup tinggi, yang ditunjukkan oleh Tabel II.41 berikut ini :

Tabel II.41
Jumlah Kasus HIV/AIDS, IMS, DBD, Diare, TB, dan Malaria menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019

No	Kabupaten/Kota	HIV	DBD	Diare	TB	Malaria
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1	Bangka	46	156	824	502	0
2	Belitung	28	359	2185	261	0
3	Bangka Barat	26	131	5348	193	89
4	Bangka Tengah	9	83	4877	192	5
5	Bangka Selatan	9	57	2839	232	4
6	Belitung Timur	6	17	3331	183	0
7	Kota Pangkalpinang	67	172	5738	480	8
	Provinsi Bangka Belitung	**191**	**975**	**25.142**	**2.043**	**106**

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Kasus penyakit menular dengan jumlah tertinggi adalah diare (25.142 kasus), namun penyakit menular yang perlu mendapat perhatian serius adalah kasus TB (2.043 kasus) dan DBD (975 kasus) yang mengalami peningkatan cukup tinggi dari tahun sebelumnya. Sementara untuk kasus penyakit menular terendah adalah malaria, karena jumlah kasus malaria mengalami penurunan setiap tahunnya.

g. Penyakit Tidak Menular

Selain Penyakit menular permasalahan di Provinsi kepulauan Bangka Belitung yang perlu mendapat perhatian yaitu peningkatan kasus penyakit tidak menular seperti hipertensi dan diabetes melitus. Peningkatan jumlah kasus hipertensi dapat dilihat pada Tabel II.42 di bawah ini.

Tabel II.42
Perkembangan Penderita Hiperetensi/Tekanan Darah Tinggi Tahun 2014-2018 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1	Bangka	1.052	1.866	2.453	12.518	21.389
2	Belitung	126	0	1.516	3.303	19.015
3	Bangka Barat	4.444	1.285	6.476	9.142	41.497
4	Bangka Tengah	12.823	10.972	6.446	16.623	13.364
5	Bangka Selatan	1.648	111	3.026	6.917	17.309
6	Belitung Timur	1.199	0	2.839	3 .492	19.813
7	Kota Pangkalpinang	36.160	1.628	9.712	14.471	35.279
	Provinsi Bangka Belitung	**57.452**	**15.862**	**32.468**	**66.466**	**167.666**

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Pada tahun 2018 jumlah kasus Hipertensi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami peningkatan hampir 200% dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 167.666 kasus. Dengan jumlah kasus tertinggi terdapat di Kota Pangkalpinang yaitu sebanyak 35.279 kasus.

3. Sosial dan Tenaga Kerja

a. Persentase Penduduk Di Atas Garis Kemiskinan

Persentase penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kurun waktu 2014-2018 cenderung fluktuatif, yaitu dari 4,97 persen pada tahun 2014, kemudian mengalami peningkatan tahun 2015 menjadi sebesar 5,40 persen, kemudian mengalami penurunan secara bertahap menjadi 5,25 persen tahun 2018. Penurunan ini dipengaruhi oleh dampak perlambatan perekonomian daerah, sehingga penyediaan lapangan pekerjaan menjadi relatif terbatas.

Tabel II.43
Perkembangan Kemiskinan Tahun 2014-2018 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1.	Persentase Penduduk Miskin (%)	4,97	5,40	5,22	5,20	5,25
2.	Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)	67,2	74,1	72,8	74.1	76,3
3.	Garis Kemiskinan (Rp)	469.814	488.701	534.229	587.530	631.467
4.	Indeks kedalaman Kemiskinan (P1)	0,60	0,67	0,67	0,49	0,69

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Memperhatikan Tabel II.44 di bawah ini, sepanjang periode tahun 2014-2018 tingkat kemiskinan kota dan desa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung fluktuatif. Pada tahun 2018 tingkat kemiskinan kota dan tingkat kemiskinan desa sebesar 2,78 dan 7,16, sedikit menurun dibandingkan tahun 2017 di mana tingkat kemiskinan kota 3,00 dan tingkat kemiskinan desa 7,92. Kemiskinan di perdesaan masih relatif dominan dibandingkan dengan di perkotaan, hal ini disebabkan karena lapangan pekerjaan di desa kurang memberi banyak alternatif, sehingga ketergantungan pada sektor tambang dan pertanian masih sangat besar yang sangat mempengaruhi kemampuan masyarakat desa untuk dapat keluar dari kemiskinan.

Tabel II.44
Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kota dan Desa Tahun 2014-2018
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1.	Tingkat Kemiskinan Kota (%)	3,04	2,77	2,67	3.00	2,78
2.	Tingkat Kemiskinan Desa (%)	6,84	6,83	7,57	7.92	7,16

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018

Sementara itu, berdasarkan Tabel II.45 di bawah ini, dapat diketahui persentase jumlah penduduk miskin yang paling tinggi terdapat di Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur. Sementara itu, angka kemiskinan terendah terdapat di Kabupaten Bangka Barat dan Kota Pangkalpinang.

Tabel II.45
Data Kemiskinan menurut Kabupaten/Kota Tahun 2014-2018
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
Bangka	5,20	5,63	5,52	5,10	5,47
Belitung	7,36	8,38	7.85	7,77	7,56
Bangka Barat	3,15	3,08	2,74	2,98	3,05
Bangka Tengah	3,27	5,67	5,64	6,07	5,81
Bangka Selatan	3,87	3,74	3,62	3,92	3,70
Belitung Timur	6,68	7,33	6,99	6,81	7,06
Kota Pangkalpinang	4,04	4,97	5,02	4,80	4,95
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	**4,97**	**5,40**	**5,22**	**5,20**	**5,25**

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Berdasarkan Tabel II.47 di bawah ini, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung paling sedikit di antara provinsi lainnya yang ada di Sumatera, dan persentasenya juga paling rendah di antara provinsi lain yaitu 5,25 persen pada tahun 2017. Namun demikian hal ini tidak serta merta menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung lebih tinggi dari provinsi lainnya di Sumatera.

Tabel II.46
Data Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2013-2017
menurut Provinsi di Pulau Sumatera (ribu jiwa)

Provinsi	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
Aceh	855,71	837,42	859,41	841,31	829,80
Sumatera Utara	1.390,80	1.360,60	1.508,14	1.452,55	1.320,57
Sumatera Barat	380,63	354,74	349,53	376,51	359.99
Riau	522,53	498,28	562,92	501,59	496.39
Jambi	281,57	281,75	311,56	290,81	278.61
Sumatera Selatan	1108,21	1.085,80	1.112,53	1.096,50	1086.76
Bengkulu	320,41	316,50	322,83	325,60	302.62
Lampung	1134,28	1.143,93	1.100,68	1.139,78	1083.74
Kepulauan Bangka Belitung	*70,90*	*67,23*	*66,62*	*71,07*	*76.20*
Kepulauan Riau	125,02	124,17	114,83	119,14	128.43

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018

Sementara itu berdasarkan data penduduk miskin di Pulau Sumatera tahun 2014-2018, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selalu memiliki persentase penduduk miskin paling rendah di Pulau Sumatera mengungguli 9 (sembilan) provinsi lainnya.

Tabel II.47
Persentase Penduduk Miskin di Pulau Sumatera Tahun 2014-2018

Provinsi	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
Aceh	18,05	17,08	16,73	16,89	16,01
Sumatera Utara	9,38	10,53	10,35	10,22	9,22
Sumatera Barat	7,41	7,31	7,09	6,87	6,65
Riau	8,12	8,42	7,98	7,78	7,39
Jambi	7,92	8,86	8,41	8,19	7,99
Sumatera Selatan	13,91	14,25	13,54	13,19	12,80
Bengkulu	17,48	17,88	17,32	16,45	15,43
Lampung	14,28	14,35	14,29	13,69	13,36
Kepulauan Bangka Belitung	5,36	5,40	5,22	5,20	5,25
Kepulauan Riau	6,70	6,24	5,98	6,06	6,40

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

b. Rasio penduduk yang bekerja

Rasio penduduk yang bekerja merupakan perbandingan antara penduduk yang bekerja dengan angkatan kerja. Rasio ini menggambarkan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja atau bisa disebut sebagai gambaran permintaan tenaga kerja. Selama tiga tahun terakhir (2017-2019) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, rasio penduduk yang bekerja stagnan diangka 0,96. Meskipun demikian jumlah penduduk yang bekerja di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung relatif meningkat selama periode 5 (lima) tahun (2015-2019) diiringi dengan meningkatnya jumlah angkatan kerja. Di tahun 2016 terjadi peningkatan yang melonjak secara dramatis baik jumlah angkatan kerja maupun jumlah penduduk yang bekerja. Namun kembali mengalami penurunan satu poin di tahun 2017 dari 0,97 di tahun 2016 menjadi 0.96 dan terus bertahan sampai dengan tahun 2019.

Tabel II.48
Perkembangan Ketenagakerjaan Tahun 2015 s.d. 2019
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1.	Penduduk Usia kerja	998.120	1.022.955	1.047.683	1.073.861	1.097.261
2.	Angkatan Kerja	665.842	705.173	699.017	727.918	742.798
3.	Penduduk yang Bekerja	623.949	686.830	672.618	701.366	715.927
4.	Rasio Penduduk yang bekerja	0.94	0,97	0,96	0,96	0,96

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Berdasarkan Tabel II.49 di bawah dapat dilihat perkembangan penduduk yang bekerja, angkatan kerja dan penduduk usia kerja di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam 5 (lima) tahun terakhir relatif meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun penduduk usia kerja cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, namun penduduk yang bekerja juga relatif terus meningkat selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Tabel II.49
Perkembangan Ketenagakerjaan Tahun 2015 s.d. 2019
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tahun	Angkatan Kerja				Bukan Angkatan Kerja				Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas	% Angkatan Kerja Terhadap Penduduk Usia Kerja (TKPK)
	Bekerja	Pengangguran	Jumlah AK	% Bekerja / AK	Sekolah	Mengurus	Lainnya	Jumlah BAK		
2015	623.949	41.893	665.842	93,71	75.602	220.803	35.873	332.278	998.120	66,71
2016	686.830	18.343	705.173	97,40	66.849	216.542	34.391	317.782	1.022.955	68,93
2017	672.618	26.399	699.017	96,22	80.170	235.882	32.614	348.666	1.047.683	66,72
2018	701.366	26.552	727.918	96,35	81.716	226.808	37.419	345.943	1.073.861	67,79
2019	715.927	26.871	742.798	96,38	82.178	236.071	36.214	354.463	1.097.261	67,70

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung , 2020

Dalam menggambarkan seberapa penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu daerah dapat dilihat dengan pendekatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), di mana TPAK merupakan persentase antara jumlah angkatan kerja penduduk usia 15 tahun ke atas dengan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas. Dari Tabel II.50, tren TPAK dari tahun 2015-2019 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung fluktuatif di mana tahun 2015 sebesar 66,71 dan mengalami peningkatan di tahun 2016 menjadi 68,93 yang merupakan pencapaian tertinggi selama periode 2015-2019, sedangkan tahun 2017 kembali mengalami penurunan menjadi 66,72. Di tahun 2018 meningkat 1,07 poin menjadi 67,79 persen. Namun turun kembali di tahun 2019 yaitu 67,70 persen.

Tabel II.50
Perkembangan Tingkat Pengangguran dan TPAK Tahun 2015 s.d. 2019
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1.	Tingkat partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	66,71	68,93	66,72	67,79	67,70
2.	Tingkat Pengangguran	6,29	2,60	3,78	3,65	3,62

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Struktur penduduk yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama selama periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 seperti yang ditunjukan pada Tabel II.51 menunjukkan pola perubahan pada masing-masing sektornya. Di sektor primer terjadi pergeseran, di mana untuk lapangan pekerjaan di bidang pertanian tahun 2019 memberikan kontribusi terbesar penyerapan tenaga kerja sebesar 29,09%, meskipun mengalami penurunan dari tahun 2018. Sedangkan untuk lapangan pekerjaan pertambangan dan penggalian memberikan kontribusi terbesar ke tiga pada tahun 2019 sebesar 14,14% meningkat dari tahun 2018 yang berada diangka 13,65%. Hal ini menunjukan bahwa penyerapan tenaga kerja untuk sektor pertanian meningkat dan

masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung lebih cenderung untuk bertani ketimbang untuk bekerja di bidang pertambangan. Di sektor tersier kontribusi penyerapan tenaga kerja terbesar ada pada lapangan pekerjaan perdagangan sebesar 17,37% merupakan penyerapan tenaga kerja kedua terbesar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019. Sektor sekunder mengalami peningkatan penyerapan tenaga kerja dari tahun 2018, di mana kontribusi terbesar ada pada lapangan pekerjaan industri pengolahan sebesar 7,6%.

Tabel II.51
Data Penduduk yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama
Tahun 2016 s.d. 2019 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Lapangan Pekerjaan Utama	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
Sektor Primer :					
1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	36,63	32,13	32,56	*30,99*	*29,09*
2. Pertambangan dan Penggalian	10,47	10,81	13,59	*13,65*	*14,14*
Sektor Sekunder:					
3. Industri Pengolahan	5,75	8,17	6,56	*7,05*	*7,6*
4. Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,61	0.91	0,46	*0,53*	*0,54*
5. Bangunan	4,61	3,21	5,28	*5,08*	*5,26*
Sektor Tersier:					
6. Perdagangan	17,55	19,21	17,48	*18,81*	*17,37*
7. Transportasi dan Pergudangan	2,62	2,39	2,04	1,74	2,24
8. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,14	4,07	3,54	3,9	4,62
9. Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan dan Asuransi, Real Estat	1,49	1,32	1,7	1,65	1,61
10. Jasa Perusahaan	0,98	1,04	0,75	0,97	1,1
11.Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,48	5,28	6,37	6,33	6,11
12. Jasa Pendidikan	4,26	5,01	3,75	3,96	4,48
13. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,64	1,18	1,91	1,54	1,89
14. Jasa Lainnya	2,99	4,6	4,01	3,82	3,95
Jumlah	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional -Sakernas, 2020

Berdasarkan Tabel II.52 secara kewilayahan untuk Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menurut kabupaten/kota dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, berfluktuasi untuk semua kabupaten/kota. Untuk tahun 2019 TPAK tertinggi di Kabupaten Belitung Timur sebesar 71,37 % dan terendah di Kabupaten Bangka sebesar 64,30 %, sedangkan untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2019 sebesar 67,70 %. Secara umum TPAK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berada pada kisaran 67 persen menunjukkan partisipasi penduduk yang bekerja sudah cukup kompetitif dalam pasar tenaga kerja.

Tabel II.52
Data TPAK Tahun 2015 s.d. 2019 menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	*(2)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
1.	Kab. Bangka	63,88	n/a	65,75	64,10	64,30
2.	Kab. Belitung	67,64	n/a	69,29	70,36	68,74
3.	Kab. Bangka Barat	65,47	n/a	68,17	70,47	66,99
4.	Kab. Bangka Tengah	66,48	n/a	69,26	70,99	69,65
5.	Kab. Bangka Selatan	70,32	n/a	64,7	67,40	68,12
6.	Kab. Belitung Timur	68,11	n/a	68	71,93	71,37
7.	Kota Pangkal Pinang	67,41	n/a	63,42	63,64	68,35
Prov. Kep. Bangka Belitung		**66,71**	**68,93**	**66,72**	**67,79**	**67,70**

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Penduduk yang bekerja menurut kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir relatif meningkat, kecuali Kabupaten Bangka Barat di mana pada tahun 2018 sebesar 103.102 orang turun pada tahun 2019 menjadi 100.563 dan Kabupaten Bangka Tengah ditahun 2018 sebesar 94.437 orang menurun ditahun 2019 menjadi 93.483 orang. Sedangkan secara kumulatif untuk wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, penduduk yang bekerja untuk kurun 5 (lima) tahun terakhir relatif meningkat dari tahun ke tahun seiring perkembangan jumlah penduduk. Total jumlah penduduk yang bekerja di tahun 2019 sebanyak 715.927 orang. Untuk lebih jelas dapat melihat Tabel II.53 di bawah ini,

Tabel II.53
Data Penduduk yang Bekerja Tahun 2015 s.d. 2019 menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	*(2)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
1.	Kab. Bangka	131.559	n/a	149.318	149.323	153.874
2.	Kab. Belitung	83.903	n/a	92.112	95.521	95.583
3.	Kab. Bangka Barat	86.480	n/a	96.205	103.102	100.563
4.	Kab. Bangka Tengah	79.971	n/a	90.465	94.437	93.483
5.	Kab. Bangka Selatan	94.575	n/a	90.625	95.494	98.917
6.	Kab. Belitung Timur	59.159	n/a	62.050	67.998	68.906
7.	Kota Pangkal Pinang	88.302	n/a	91.843	95.491	104.601
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		**623.949**	**686.830**	**672.618**	**701.366**	**715.927**

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Tingkat Pengangguran terbuka (TPT) adalah perbandingan antara jumlah pencari kerja dengan jumlah angkatan kerja, yang merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan dari kepala daerah dan menjadi salah satu sasaran ekonomi makro dari pemerintah daerah. Dari Tabel II.54, tingkat pengangguran terbuka di kabupaten/kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan tren fluktuatif selama 5 (lima) tahun terakhir. Untuk tahun 2019 terdapat 3 (tiga) kabupaten dan 1 (satu) kota yang memiliki TPT melebihi TPT Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang tertinggi yaitu Kota Pangkalpinang sebesar 5,01 %, Kabupaten Bangka Tengah sebesar 4,39%, Kabupaten Bangka 3,8% dan

Kabupaten Bangka Selatan sebesar 3,87 %. Sedangkan untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 3,62 % dan secara nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung lebih rendah dari rata-rata nasional dimana rata-rata nasional sebesar 5,28 %.

Tabel II.54
Data Tingkat Pengangguran Tahun 2015 s.d. 2019 menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	*(2)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
1.	Kab. Bangka	8,87	n/a	4,29	4,12	3,8
2.	Kab. Belitung	4,57	n/a	2,57	2,93	2,9
3.	Kab. Bangka Barat	5,92	n/a	4,23	3,11	2,85
4.	Kab. Bangka Tengah	6,58	n/a	3,38	3,93	4,39
5.	Kab. Bangka Selatan	2,01	n/a	2,74	4,35	3,87
6.	Kab. Belitung Timur	2,55	n/a	2,62	1,5	1,71
7.	Kota Pangkal Pinang	10,64	n/a	5,8	4,7	5,01
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		**6,29**	**2,60**	**3,78**	**3,65**	**3,62**

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Berdasarkan Tabel II.55 di bawah ini, dapat dilihat jumlah pengangguran pada tahun 2019 terbesar di Kabupaten Bangka yaitu 6.076 orang dan terendah pada Kabupaten Belitung Timur sebanyak 1.197 orang, sedangkan secara kumulatif untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 26.871 orang, meningkat dari tahun 2018 yang hanya sebanyak 26.552 Orang. Hal ini menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja yang masih rendah dan tidak dapat menampung banyaknya angkatan kerja dan pencari kerja terutama mereka yang datang dari wilayah pedesaan yang masih beranggapan bahwa di wilayah perkotaan lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan di bandingkan wilayah pedesaan.

Tabel II.55
Data Pengangguran Tahun 2015 s.d. 2019 menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	*(2)*	*(3)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
1.	Kab. Bangka	12.805	n/a	6.693	6.410	6.076
2.	Kab. Belitung	4.015	n/a	2.429	2.887	2.853
3.	Kab. Bangka Barat	5.443	n/a	4.244	3.306	2.955
4.	Kab. Bangka Tengah	5.631	n/a	3.161	3.860	4.295
5.	Kab. Bangka Selatan	1.936	n/a	2.553	4.345	3.979
6.	Kab. Belitung Timur	1.550	n/a	1.667	1.035	1.197
7.	Kota Pangkal Pinang	10.513	n/a	5.652	4.709	5.516
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		**41.893**	**18.343**	**26.399**	**26.552**	**26.871**

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

1. Kebudayaan

a. Jumlah grup kesenian

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai salah satu provinsi kepulauan yang menjadikan pariwisata sebagai sektor unggulan daerah. Dalam pengembangan kepariwisataan, selain mengandalkan wisata bahari sebagai daya tarik wisata, yang tak kalah menarik adalah keragaman seni dan budaya yang dimilikinya dan dikemas sebagai bagian dari atraksi budaya dalam mendukung pariwisata.

Tabel II.56
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun 2011 s.d. 2015
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1.	Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk.	1,65	1,72	1,68	1,70	1,73
2.	Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk.	0,0076	0,0074	0,0073	0,0075	0,0077

*Rumus: jumlah grup/klub : jumlah penduduk * 10.000*
Sumber: SKPD yang menangani urusan

Beberapa kebudayaan yang terdapat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antara lain adalah perang ketupat, rebo kasan, mandi belimau, antu bubu maras taun, beripat, dsb. Dalam rangka melestarikan nilai-nilai seni dan, peran sanggar-sanggar kesenian dan budaya yang saat ini semakin tumbuh dan berkembang dengan baik, hal yang tergambarkan pada Tabel II.56.

Berdasarkan data perkembangan grup kesenian di atas, menunjukkan bahwa pada kurun waktu 2013-2017 terjadi kenaikan dan penurunan jumlah grup kesenian di mana tahun 2013 sebesar 1,65 meningkat tahun 2015 menjadi 1,68 dan meningkat pada tahun 2017 menjadi 1,73. Sedangkan untuk jumlah gedung kesenian tahun 2017 sebesar 0,0077 meningkat dibandingkan tahun 2013 sebesar 0,0076.

Tabel II.57
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun 2017
menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk	Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1.	Kab. Bangka	0,503	0
2.	Kab. Belitung	0,328	0
3.	Kab. Bangka Barat	0,167	0
4.	Kab. Bangka Tengah	0,138	0,051
5.	Kab. Bangka Selatan	0,160	0
6.	Kab. Belitung Timur	0,306	0
7.	Kota Pangkal Pinang	0,291	0
Jumlah		**1,894**	**1**

*Rumus: jumlah grup/klub : jumlah penduduk * 10.000*
Sumber: SKPD yang menangani urusan

2. Pemuda dan Olahraga

1) Jumlah Klub Olahraga

Data yang diperoleh dari perangkat daerah yang menangani pemuda dan olahraga, serta organisasi cabang olahraga KONI Kabupaten dan Kota Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, jumlah perkumpulan olahraga pada tahun 2018 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk 6 (enam) cabang olahraga: atletik; sepak bola; bola voli; bola basket; bulutangkis; dan pencak silat adalah sebanyak 1.361 perkumpulan. Data tersebut terdiri dari 183 perkumpulan di Kabupaten Bangka, 246 perkumpulan di Kabupaten Belitung, 246 perkumpulan Kabupaten Bangka Barat, 135 perkumpulan di Kabupaten Bangka Tengah, 248 perkumpulan di Kabupaten Bangka Selatan, 179 perkumpulan di Kabupaten Belitung Timur, dan 124 perkumpulan di Kota Pangkalpinang. Apabila dilihat dari jenis perkumpulannya, maka perkumpulan olahraga di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung paling banyak terdapat pada cabang sepakbola (613 perkumpulan), kemudian bola voli (451 perkumpulan), bulutangkis (118 perkumpulan), pencak silat (95 perkumpulan), bola basket (63 perkumpulan), dan atletik (21 perkumpulan).

Tabel II.58

Jumlah Perkumpulan Cabang Olahraga Atletik
Tahun 2014 s.d. 2018 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1.	Kab. Bangka	2	2	2	2	3
2.	Kab. Belitung	2	2	2	2	3
3.	Kab. Bangka Barat	2	2	2	2	3
4.	Kab. Bangka Tengah	2	2	2	2	2
5.	Kab. Bangka Selatan	2	2	2	2	3
6.	Kab. Belitung Timur	2	2	2	2	2
7.	Kota Pangkal Pinang	3	3	3	3	5
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		**15**	**15**	**15**	**15**	**21**

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Tabel II.58 menunjukkan jumlah perkumpulan cabang olahraga atletik pada masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa pada tahun 2018, Kota Pangkalpinang memiliki jumlah perkumpulan cabang olahraga atletik terbanyak se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tabel II.59

Jumlah Perkumpulan Cabang Olahraga Sepakbola
Tahun 2014 s.d. 2018 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1.	Kab. Bangka	34	40	40	64	64
2.	Kab. Belitung	66	80	110	120	123
3.	Kab. Bangka Barat	64	86	120	120	120
4.	Kab. Bangka Tengah	36	40	56	56	56
5.	Kab. Bangka Selatan	133	135	135	135	135
6.	Kab. Belitung Timur	65	75	75	75	75
7.	Kota Pangkal Pinang	25	32	32	40	40
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		**423**	**488**	**568**	**610**	**613**

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Tabel II.59 menunjukkan jumlah perkumpulan cabang olahraga sepakbola pada masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2018, Kabupaten Bangka Selatan memiliki jumlah perkumpulan cabang olahraga sepakbola terbanyak se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, namun jumlahnya dari tahun ke tahun tidak mengalami pengurangan atau penambahan. Sedangkan Kabupaten Belitung mengalami penambahan jumlah perkumpulan paling banyak, yakni bertambah sebanyak 57 perkumpulan sejak tahun 2014.

Tabel II.60
Jumlah Perkumpulan Cabang Olahraga Bola Voli
Tahun 2014 s.d. 2018 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1.	Kab. Bangka	9	39	25	38	47
2.	Kab. Belitung	10	56	70	76	83
3.	Kab. Bangka Barat	23	45	64	75	80
4.	Kab. Bangka Tengah	15	49	52	48	43
5.	Kab. Bangka Selatan	20	65	76	78	82
6.	Kab. Belitung Timur	10	46	65	78	81
7.	Kota Pangkal Pinang	39	45	47	40	35
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		**126**	**345**	**399**	**433**	**451**

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Tabel II.60 menunjukkan jumlah perkumpulan cabang olahraga bola voli pada masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa tahun 2018, Kabupaten Belitung memiliki jumlah perkumpulan cabang olahraga bola voli terbanyak se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yakni sebanyak 83 perkumpulan.

Tabel II.61 menunjukkan jumlah perkumpulan cabang olahraga bola basket pada masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa Kabupaten Bangka menjadi satu-satunya kabupaten yang mengalami peningkatan jumlah perkumpulan cabang olahraga bola basket. Sedangkan 4 kabupaten dan 1 kota lainnya mengalami penurunan.

Tabel II.61
Jumlah Perkumpulan Cabang Olahraga Bola Basket Tahun 2014 s.d. 2018
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1.	Kab. Bangka	25	25	27	28	30
2.	Kab. Belitung	10	4	4	7	7
3.	Kab. Bangka Barat	7	4	4	4	4
4.	Kab. Bangka Tengah	7	7	7	7	7
5.	Kab. Bangka Selatan	3	3	3	3	3
6.	Kab. Belitung Timur	10	5	5	5	5
7.	Kota Pangkal Pinang	10	10	10	9	7
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		**72**	**58**	**60**	**63**	**63**

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Tabel II.61 menunjukkan jumlah perkumpulan cabang olahraga bulutangkis pada masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa tahun 2018, Kabupaten Bangka Barat memiliki jumlah perkumpulan cabang olahraga bulutangkis terbanyak se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yakni sebanyak 21 perkumpulan. Sedangkan Kabupaten Belitung Timur memiliki perkumpulan cabang olahraga bulutangkis paling sedikit se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yakni hanya sebanyak 10 perkumpulan.

Tabel II.62
Jumlah Perkumpulan Cabang Olahraga Bulutangkis
Tahun 2014 s.d. 2018 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1.	Kab. Bangka	15	10	13	16	16
2.	Kab. Belitung	19	13	14	18	20
3.	Kab. Bangka Barat	10	19	20	20	21
4.	Kab. Bangka Tengah	20	4	8	16	18
5.	Kab. Bangka Selatan	59	6	10	12	15
6.	Kab. Belitung Timur	15	3	5	9	10
7.	Kota Pangkal Pinang	20	14	15	17	18
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		**158**	**69**	**85**	**108**	**118**

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Tabel II.63 menunjukkan jumlah perkumpulan cabang olahraga pencak silat pada masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa tahun 2018, Kabupaten Bangka memiliki jumlah perkumpulan cabang olahraga pencak silat terbanyak se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yakni sebanyak 23 perkumpulan. Kabupaten Bangka Tengah merupakan satu-satunya kabupaten yang mengalami pengurangan jumlah perkumpulan cabang olahraga pencak silat.

Tabel II.63
Jumlah Perkumpulan Cabang Olahraga Pencak Silat
Tahun 2014 s.d. 2018 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1.	Kab. Bangka	19	19	19	23	23
2.	Kab. Belitung	10	10	10	10	10
3.	Kab. Bangka Barat	16	16	18	18	18
4.	Kab. Bangka Tengah	10	10	7	7	9
5.	Kab. Bangka Selatan	9	9	10	10	10
6.	Kab. Belitung Timur	6	6	6	6	6
7.	Kota Pangkal Pinang	16	18	19	19	19
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		**86**	**88**	**89**	**93**	**95**

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

2) Jumlah Gedung Olahraga

Olahraga merupakan bagian penting dalam mengembangkan sumber daya manusia sebagai bagian dari pelaku pembangunan, sehingga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 2014-2018 menempatkan bidang kepemudaan dan olahraga menjadi salah satu prioritas yang selanjutnya pada tahapan implementasi telah diwujudkan melalui dukungan program dan penganggaran. Salah satu wujud nyata dari upaya pengembangan bidang keolahragaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah telah disediakannya lahan seluas ±50 ha untuk pembangunan *Sport Center,* saat ini di kawasan tersebut telah tersedia Gedung Olahraga (GOR) Sahabuddin namun perlu dikembangkan lagi sehingga seluruh *venue* cabang olahraga dapat dibangun di kawasan tersebut.

Tabel II.64
Perkembangan Sarana dan Prasarana Olahraga
Tahun 2014 s.d. 2018 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1.	Jumlah Gedung Olahraga	10	10	10	10	12
2.	Jumlah Lapangan Olahraga	1730	1731	1731	1732	1732

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Dari data perkembangan sarana dan prasarana olahraga di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami peningkatan walaupun tidak terlalu banyak, di mana jumlah gedung olahraga sebanyak 12 buah dan lapangan olahraga pada tahun 2018 sebanyak 1.732 buah.

3) Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan rapat koordinasi sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, itu merupakan beberapa permasalahan dalam olahraga, sedangkan pergaulan bebas, penggunaan narkoba dan degradesi moral merupakan permasalahan dalam pembinaan pemuda. Organisasi pemuda adalah sekelompok pemuda yang berkerjasama dengan suatu perencanaan-perencanaan kerja dan peraturan-peraturan, untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Banyaknya jumlah organisasi pemuda menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan dan semakin banyak jumlah organisasi pemuda menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjangpenyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai untuk memberdayakan pemuda dalam pembangunan daerah.

Hasil Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencatat kemajuan dalam dalam beberapa tahun dengan kenaikan 7,5 poin dari indeks 45,5 di tahun 2015 menjadi 53,00 di tahun 2018. Ini merupakan hal yang positif di mana harapan pemerintah daerah untuk mewujudkan pengembangan potensi intelektuan dan keterampilan pemuda dalam mengembangkan keberdayaan dan pembangunan masyarakat di bidang ekonomi, sosial dan budaya dapat berjalan dengan baik. Untuk itu peningkatkan kualitas pemuda harus tetap dilakukan dengan memberikan pengembangan potensi diri untuk memperkaya *hard skill* dan *soft skill* guna menyiapkan mereka menjadi generasi hebat penerus bangsa.

Tabel II.65
Data Indeks Pembangunan Pemuda Tahun 2015 s.d. 2018
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Domain	2015	2016	2017	2018
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1.	Pendidikan	56,67	60,00	60,00	60,00
2.	Kesehatan dan Kesejahteraan	62,50	57,50	60,00	65,00
3.	Ketenagakerjaan dan Kesempatan	35,00	60,00	45,00	60,00
4.	Partisipasi dan Kepemimpinan	40,00	40,00	40,00	40,00
5.	Gender dan Diskriminasi	33,33	30,00	33,33	40,00
	IPP	**45,50**	**49,50**	**47,67**	**53,00**

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi KepulauanBangka Belitung dan Kementerian Kepemudaan dan Olahraga RI, 2020

4) Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)

Hasil Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2018 menunjukan bahwa (1) Indeks partisipasi 0,26, (2) Indeks ruang terbuka 0,23, (3) Indeks kebugaran 0,19 (4) Indeks SDM Keolahragaan 0,36 dan Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu 0,26. Kesimpulannya adalah Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih berada pada kategori kurang karena Indeks total IPO yang meliputi Partisipasi, Ruang Terbuka, Kebugaran dan SDM Keolahragaan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 0,26 berada direntang 0,24 -0,49. Artinya bahwa pembangunan olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih perlu diperhatikan dan dibenahi oleh pemerintahan dan semua lapisan masyarakat agar pembangunan olahraga di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bisa lebih baik.

Tabel II.66
Data Indeks Pembangunan Olahraga Tahun 2017 s.d. 2018
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Dimensi	2017	2018
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1.	Partisipasi	0,26	0,26
2.	Ruang Terbuka	0,23	0,23
3.	Kebugaran	0,19	0,19
4.	SDM Keolahragaan	0,36	0,36
	IPO	**0,26**	**0,26**

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi KepulauanBangka Belitung dan Kementerian Kepemudaan dan Olahraga RI, 2020

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

1. Urusan pendidikan

a. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. Sejak Tahun 2009, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan. APS dikenal sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan layanan pendidikan di suatu daerah. Semakin tinggi nilai APS, maka daerah tersebut

dianggap berhasil menyelenggarakan layanan akses pendidikan. APS yang tinggi juga menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Semakin tinggi angka partisipasi sekolah semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Angka partisipasi sekolah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2014 s/d 2018 disajikan pada Tabel II.67.

Tabel II.67
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) 2014-2018
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1.	SD/MI					
1.1	Jumlah murid usia 7-12 tahun	138.240	143.072	141.586	143.980	143.136
1.2	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	143.890	149.300	150.700	156.800	156.800
1.3	APS 7-12 tahun	96,07	95,83	93,95	91,82	91,29
2.	SMP/MTs					
2.1	Jumlah murid usia 13-15 tahun	48.886	50.827	49.590	51.369	44.415
2.2	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	69.610	72.100	72.800	73.800	73.800
2.3	APS 13-15 tahun	70,23	70,5	68,12	69,61	60,18
3.	SMA/MA/SMK					
3.1	Jumlah murid usia 16-18 tahun	36.337	37.172	36.731	39.245	37.763
3.2	Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	75.900	71.300	71.500	71.900	71.900
3.3	APS 16-18 tahun	65,9	52,13	51,37	54,58	52,52
4.	DIPLOMA/PERGURUAN TINGGI					
4.1	Jumlah murid usia 19-24 tahun	10,072	3,516	19,446	19,633	20,524
4.2	Jumlah penduduk kelompok usia 19-24 tahun					160,473
4.3	APS SMA/MA 19-24 tahun	-	-	-	-	15.99

Sumber: Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud, 2020

Pada tabel II.67 di atas, Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk usia 7-12 tahun di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebesar 91,29 persen. Hal ini berarti masih ada 8,71 persen penduduk berusia 7-12 tahun yang tidak bersekolah. Sedang untuk APS penduduk usia 13-15 tahun baru 60,18 persen yang bersekolah, dan masih terdapat 39,82 persen yang tidak bersekolah. Untuk penduduk 16-18 tahun baru 52,52 persen yang bersekolah. Mengingat tingginya penduduk usia 13-15 tahun dan 16-18 tahun yang tidak bersekolah, pemerintah daerah perlu mengambil kebijakan untuk meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah. Untuk itu perlu dilakukan analisis penyebab rendahnya APS, apakah karena faktor budaya, kemiskinan, geografi, atau yang lainnya, sehingga bisa diambil kebijakan berupa pemberian beasiswa, pembangunan sarana prasarana sekolah, membangun infrastruktur dasar, atau yang lainnya.

b. Rasio Ketersediaan Gedung Sekolah/Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah menunjukkan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan. Rasio ketersediaan sekolah ini dihitung untuk tiap 10.000 penduduk. Selama kurun waktu 2014-2018, rasio ketersediaan sekolah untuk jenjang pendidikan SD/MI mengalami penurunan.

Tabel II.68
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2014 s.d. 2018
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Jenjang Pendidikan	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1.	SD/MI					
	Jumlah gedung sekolah	812	830	825	832	848
	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	148.649	151.846	149.549	150.252	161.477
	Rasio	54,63	54,66	54,63	54,66	52,39
2.	SMP/MTs					
	Jumlah gedung sekolah	232	244	248	255	259
	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	72.284	73.840	74.754	75.115	78.522
	Rasio	32,10	33,04	33,10	33,40	22,98
3.	SMA/MA/SMK					
	Jumlah gedung sekolah	139	139	140	140	158
	Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	71.981	73.531	73.885	74.530	78.192
	Rasio	19,31	18,90	19,85	19,90	20,21

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Rasio ketersediaan sekolah pada tingkatan SMA/SMK/MA memiliki angka terendah, di mana dengan jumlah penduduk usia sekolah 16-18 tahun yang berjumlah 78.192 orang, kapasitas sekolah hanya tersedia 158 sekolah atau dengan rasio 20,21.

Data mengenai ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah Tahun 2018 menurut kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disajikan pada Tabel II.69.

Tabel II.69
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2018
menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/ Kota	SD/MI			SMP/MTs			SMA/MA/SMK		
		Jumlah gedung sekolah	Jumlah penduduk usia 7-12th	Rasio	Jumlah gedung sekolah	Jumlah penduduk usia 13-15th	Rasio	Jumlah gedung sekolah	Jumlah penduduk usia 16-18th	Rasio
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
1	Bangka	189	36.559	51.70	60	17.866	33.58	36	17.548	20.52
2	Belitung	122	20.331	60.01	32	10.315	31.02	16	10.291	15.55
3	Bangka Barat	138	23.862	57.83	46	10.976	41.91	23	10.595	21.71
4.	Bangka Tengah	101	21.915	46.09	30	10.771	27.85	17	10.908	15.58
5.	Bangka Selatan	98	24.372	40.21	38	11.713	32.44	22	11.428	19.25

No	Kabupaten/ Kota	SD/MI			SMP/MTs			SMA/MA/SMK		
		Jumlah gedung sekolah	Jumlah penduduk usia 7-12th	Rasio	Jumlah gedung sekolah	Jumlah penduduk usia 13-15th	Rasio	Jumlah gedung sekolah	Jumlah penduduk usia 16-18th	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
6.	Belitung Timur	106	13.690	77.43	25	6462	38.69	16	6275	25.50
7.	Pangkalpinang	92	20.749	44.34	27	10.419	25.91	22	11.150	19.73
Jumlah		**846**	**161.477**	**52.39**	**258**	**78.522**	**32.86**	**152**	**78.192**	**19.44**

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Rasio ketersediaan sekolah tahun 2018 tingkat SD/MI terendah terdapat di Kabupaten Bangka Selatan 40,21, tingkat SMP/MTS terendah di Kota Pangkalpinang yaitu 25,91 dan SMA/MA/SMK di Kabupaten Belitung yaitu 15,55, Sedangkan rasio ketersediaan sekolah tahun 2018 tingkat SD/MI tertinggi terdapat di Kabupaten Belitung Timur 77,43, tingkat SMP/MTS di Bangka Barat dan SMA/MA/SMK di Kabupaten Belitung Timur yaitu masing-masing 41,91 dan 25,5.

c. Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-Rata

Rasio murid per guru didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid dengan jumlah guru pada jenjang pendidikan tertentu untuk mengetahui rata-rata jumlah guru yang dapat melayani murid disuatu sekolah atau daerah tertentu. Semakin tinggi rasio tersebut berarti bahwa satu orang tenaga pengajar harus melayani banyak murid. Rasio murid dan guru di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disajikan pada Tabel II.70 berikut.

Tabel II.70
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2014 s.d. 2018
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Jenjang Pendidikan	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	SD/MI					
	Jumlah guru	9,303	9,701	9,283	8544	8665
	Jumlah murid	165,347	165,903	164,727	166610	168877
	Rasio	17.77	17.10	17.75	19.50	19.49
2.	SMP/MTs					
	Jumlah guru	3,839	4164	3920	3836	3883
	Jumlah murid	65,222	68,308	67,152	69,064	68,078
	Rasio	16.99	16.40	17.13	18.00	17.53
3.	SMA/MA/SMK					
	Jumlah guru	3,463	3,615	3,544	3,451	3,600
	Jumlah murid	48,875	50,978	50,839	54,083	56,098
	Rasio	14.11	14.10	14.35	15.67	15.58

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung , 2020

Pada kurun waktu 2014-2018, rasio guru dan murid tertinggi ada pada jenjang pendidikan SD/MI yaitu 19,50 pada Tahun 2017. Hal ini disebabkan jumlah guru pada tingkat SD/MI cenderung menurun setiap tahunnya sementara jumlah murid mengalami peningkatan. Jumlah guru pada tingkat SMP/MTs yang selalu meningkat sampai tahun 2017 dan kembali menurun pada tahun 2018 dengan jumlah murid yang semakin bertambah yang menyebabkan rasio guru dan murid menjadi meningkat juga. Hal yang sama terjadi pada kondisi guru dan murid pada tingkat SMA/MA/SMK. Walaupun pada setiap tingkatan sekolah rasio guru dan murid mengalami fluktuasi naik dan turun namun secara umum rasio guru dan murid pada masing-masing jenjang pendidikan mengalami peningkatan.

Tabel II.71
Jumlah Guru dan Murid Tahun 2018 menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/ Kota	SD/MI			SMP/MTs			SMA/MA/SMK		
		Jumlah guru	Jumlah murid	Rasio	Jumlah guru	Jumlah murid	Rasio	Jumlah guru	Jumlah murid	Rasio
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
1	Bangka	1,810	37,705	20.83	927	16,153	17.43	812	12,413	15.29
2	Belitung	1,118	19,356	17.31	448	8,388	18.72	429	7,361	17.16
3	Bangka Barat	1,407	25,535	18.15	607	9,244	15.23	468	7,413	15.84
4.	Bangka Tengah	1,123	23,388	20.83	469	9,103	19.41	404	6,673	16.52
5.	Bangka Selatan	1,204	24,895	20.68	555	8,939	16.11	458	6,744	14.72
6.	Belitung Timur	875	13,044	14.91	355	5,719	16.11	340	4,650	13.68
7.	Pangkalpinang	1,128	24,954	22.12	522	10,532	20.18	689	10,844	15.74
Jumlah		**8,665**	**168,877**	**19.49**	**3,883**	**68,078**	**17.53**	**3,600**	**56,098**	**15.58**

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Berdasarkan Tabel II.71, rasio guru dan murid pada tahun 2018 pada tingkat SD/MI tertinggi di Kota Pangkalpinang yaitu masing-masing 22,12, tingkat SMP/MTs di Kota Pangkalpinang yaitu 20,18 dan tingkat SMA/MA/SMK di Kabupaten Belitung yaitu 17,16.

2. Urusan Kesehatan

a. Jumlah Rumah Sakit Pemerintah Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pada kurun waktu 2015-2018, ketersediaan fasilitas kesehatan khususnya rumah sakit pemerintah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kondisi baik dan di setiap kabupaten/kota sudah memiliki rumah sakit pemerintah. Berikut ini jumlah rumah sakit pemerintah diuraikan pada Tabel II.72.

Tabel II.72
Jumlah Rumah Sakit Pemerintah Tahun 2015 s.d. 2019
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kabupaten/kota	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
Bangka	2	2	3	4	4
Belitung	1	1	1	1	1
Bangka Barat	1	1	1	1	1
Bangka Tengah	1	1	1	1	1
Bangka Selatan	1	1	1	1	1
Belitung Timur	1	1	1	1	1
Pangkal Pinang	1	1	1	1	1
Prov. Kep. Bangka Belitung	**8**	**8**	**9**	**10**	**10**

Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

b. Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk

Rumah sakit adalah suatu organisasi yang melalui tenaga medis profesional yang terorganisir serta sarana kedokteran yang permanen menyelenggarakan pelayanan kesehatan, asuhan

keperawatan yang berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien.

Tabel II.73
Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per Jumlah Penduduk
Tahun 2014 s.d. 2018 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1.	Jumlah Rumah Sakit Umum (Pemerintah)	8	8	9	10	11
2.	Jumlah Rumah Sakit Jiwa/Paru dan Penyakit Khusus Lainnya	1	2	2	2	4
3.	Jumlah Rumah Sakit AD/AU/AL/ POLRI	-	-	-	-	-
4.	Jumlah Rumah Sakit Swasta	6	4	8	9	13
5.	Jumlah Seluruh Rumah Sakit	15	14	19	21	28
6.	Jumlah Penduduk	1.343.881	1.372.813	1.401.827	1.430.865	1.459.873
7.	Rasio	1: 89.592	1: 98,058	1: 73.780	1:68.136	1:52.138

Sumber: Bangka Belitung Dalam Angka, BPS 2014-2018

Data tentang rasio rumah sakit per satuan penduduk menunjukkan tingkat cakupan pelayanan kesehatan terhadap jumlah penduduk di wilayah pelayanannya. Sejak tahun 2014-2018 jumlah rumah sakit ada 28, terdiri dari rumah sakit pemerintah 11 (sebelas) buah, rumah sakit swasta 13 (tiga belas) buah dan rumah sakit khusus 4 (empat) buah.

Angka rasio rumah sakit per 1.000 penduduk pada tahun 2014 adalah 0,00089 artinya satu rumah sakit melayani 89.000 jiwa, idealnya 1 rumah sakit melayani 100.000 penduduk, sehingga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah mencapai angka ideal untuk Angka Rasio Rumah Sakit.

Tabel II.74
Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2018 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten /Kota	Jumlah Penduduk	Jumlah Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit Umum Pemerintah/RSUD/ Khusus	Jumlah Rumah Sakit Swasta	Rasio Rumah Sakit
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1	Kab. Bangka	330.793	8	6	2	1:41.349
2	Kab. Belitung	186.155	3	1	2	1:62.052
3	Kab. Bangka Barat	209.011	3	1	2	1:69.670
4.	Kab. Bangka Tengah	192.429	2	1	1	1:192.429
5.	Kab. Bangka Selatan	205.901	1	1	0	1:205.901
6.	Kab. Belitung Timur	127.064	1	1	0	1:127.064
7.	Kota Pangkal pinang	208.520	10	4	6	1:20.852
	Jumlah	**1.459.873**	**28**	**15**	**13**	**1:52.138**

Sumber: Kepulauan Bangka Belitung dalam Angka, BPS 2019(diolah)

Bila memperhatikan Tabel II.74 jumlah dan rasio rumah sakit per jumlah penduduk menurut kabupaten/kota, terdapat 3 kabupaten yang belum memiliki rasio ideal yaitu Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Selatan dan Kabupaten Belitung Timur, di mana satu

rumah sakit masih melayani di atas 100.000 penduduk. Untuk itu dibutuhkan minimal 3 rumah sakit baru di masing-masing kabupaten dimaksud.

Dalam rangka pengendalian permasalahan Kesehatan yang terjadi dan upaya peningkatan taraf Kesehatan masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, keberadaan Puskesmas sebagai ujung tombak pembangunan Kesehatan dalam menjalankan program Kesehatan diharapkan mampu sebagai institusi yang melakukan promotive, preventif, dan kuratif di wilayah kerjanya menjadi sangat penting. Adapun perkembangan Puskesmas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada Tabel II.75.

Tabel II.75
Perkembangan Jumlah Puskesmas dan Puskesmas Pembantu menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2014 s.d. 2018 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten /Kota	2014		2015		2016		2017		2018	
		Puskemas	Pustu	Puskemas	Pustu	Puskemas	Pustu	Puskemas	Pustu	Puskemas	Pustu
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
1	Bangka	12	33	12	33	12	39	12	34	12	35
2	Belitung	9	32	9	33	9	32	9	32	9	32
3	Bangka Tengah	8	19	8	19	8	19	8	20	8	19
4	Bangka Barat	7	18	8	18	8	20	8	18	9	20
5	Bangka Selatan	9	29	9	29	9	28	10	28	10	29
6	Belitung Timur	6	17	6	18	7	17	7	18	7	17
7	Kota Pangkalpinang	9	19	9	19	9	19	9	20	19	19
	Provinsi Bangka Belitung	**60**	**167**	**61**	**169**	**62**	**170**	**63**	**170**	**64**	**171**

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Tabel II.76
Jumlah Dokter Umum, Dokter Gigi, dan Dokter Spesialis
menurut Sarana Pelayanan Kesesahatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sarana Yankes	2014			2015			2016			2017			2018		
	Sp	U	G	Sp	U	G	Sp	U	G	Sp	U	G	Sp	U	G
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
Puskesmas	-	203		-	163	57	-	166	57	-	161	65	-	159	61
Rumah Sakit	308			136	192	31	115	248	21	149	219	38	224	467	117
Jumlah	**511**			**136**	**355**	**88**	**115**	**414**	**21**	**149**	**380**	**103**	**224**	**626**	**178**

Sumber: Kepulauan Bangka Belitung dalam Angka 2015-2019

Berdasarkan data pada Tabel II.76 terlihat bahwa jumlah dokter terus mengalami peningkatan. Kebutuhan akan tenaga dokter berdasarkan spesialisasi juga terus meningkat, hal ini penting untuk membantu agar masyarakat tidak harus berobat keluar wilayahnya dan dapat meringankan masyarakat dari sisi pembiayaan.

Pada Tabel II.77 di bawah ini, terlihat bahwa persentase keluarga yang memiliki akses terhadap Air Minum Berkualitas (layak) pada tahun 2019 terdapat 4 kabupaten yang realisasinya di bawah target indikator dan rata-rata provinsi, yaitu Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Belitung Timur yang tidak mencapai 75, sementara dua kabupaten yaitu Kabupaten Belitung dan Kabupaten Bangka

yang berada di bawah rata-rata provinsi. Hanya Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka Barat yang berada di atas rata-rata provinsi.

Tabel II.77
Perkembangan Persentase Keluarga yang memiliki Akses terhadap Air Minum Berkualitas (Layak) Tahun 2015 s.d. 2019 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1	Bangka	75,3	77,94	78,14	82,26	60,2
2	Belitung	84,5	74,22	76,08	76,98	58,1
3	Bangka Tengah	47,7	56,84	59,52	77,63	60,5
4	Bangka Barat	83,7	89,46	88,82	91,28	94,6
5	Bangka Selatan	59,6	74,75	73,62	79,71	100
6	Belitung Timur	76,6	76,02	74,97	76,77	54,40
7	Kota Pangkalpinang	87,7	88,70	94,38	96,69	96,5
Prov. Kep. Bangka Belitung		**73,7**	**77,64**	**78,66**	**83,6**	**78,1**

Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Target eliminasi malaria di Bangka Belitung adalah sampai tahun 2020 sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 293/MENKES/SK/IV/2009 tentang Eliminasi Malaria di Indonesia serta dengan dukungan peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 35 tahun 2009 tentang eliminasi malaria di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta untuk mencapai Bangka Belitung bebas malaria diupayakan angka API < 1‰. Selama tiga tahun berturut-turut tidak ada kasus indigenous dengan sistem surveilans yang sudah baik. Pada tahun 2018 di seluruh provinsi ditemukan kasus malaria sebanyak 94 kasus atau mampu menekan kasus < dari 1/1000 penduduk, hal ini mengalami penurunan dari tahun 2017 sebanyak 359 kasus. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah menerima sertifikat eliminasi malaria sebanyak 5 sertifikat eliminasi malaria yaitu Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Belitung, dan Kabupaten Belitung Timur.

Tabel II.78
Perkembangan Angka Kesakitan Malaria per 1000 penduduk Tahun 2014 s.d. 2018 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1	Bangka	0,48	0,21	0,13	0,05	0,09
2	Belitung	1,31	0,09	0,01	0,01	0,00
3	Bangka Tengah	2,28	0,19	0,36	0,24	0,15
4	Bangka Barat	0,98	0,74	0,09	0,00	0,63
5	Bangka Selatan	1,63	0,30	0,17	0,16	0,04
6	Belitung Timur	0,98	0,05	0,07	0,00	0,07
7	Kota Pangkalpinang	0,31	5,18	0,92	0,01	0,03
Prov. Kep. Bangka Belitung		**1,39**	**0,68**	**0,97**	**0,24**	**0,14**

Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan BPS BBDA 2018/2019

HIV/AIDS merupakan masalah lintas sektoral yang memerlukan perhatian serius dari semua pihak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dengan semakin tersedianya akses pelayanan HIV dan AIDS jumlah kasus yang terlaporkan pun semakin banyak. AIDS (*Acquired Immune*

Deficiency Syndrome) merupakan gejala penyakit berat karena menurunnya imunitas tubuh akibat infeksi HIV (*Human Immuno Deficiency Virus*). Berdasarkan hasil surveilans kasus AIDS di rumah sakit, pada tahun 2018, laporan Kasus HIV direkapitulasi dari data SIHA online yang dikirim dari Kabupaten/Kota, laporan laporan kegiatan konseling dan tes HIV yang dilakukan di layanan KTHIV di 7 (tujuh) Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di layanan Konseling dan Tes Sukarela jumlah yang positif HIV sebanyak 173 orang, jumlah kasus HIV meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini menggambarkan adanya fenomena gunung es dalam masalah HIV dimana peningkatan penemuan kasus HIV/AIDS tidak berarti merupakan suatu kegagalan, melainkan disebabkan semakin banyak kasus yang terlaporkan terkait semakin tersedianya akses bagi masyarakat yang memerlukan. Jumlah kasus HIV/AIDS perKabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2018 disajikan dalam Tabel II.79 di bawah ini.

Tabel II.79
Jumlah Kasus HIV Tahun 2014-2018 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1	Bangka	53	25	25	70	58
2	Belitung	234	27	27	31	23
3	Bangka Tengah	19	35	35	13	12
4	Bangka Barat	14	16	16	34	21
5	Bangka Selatan	15	0	0	8	7
6	Belitung Timur	3	4	4	3	7
7	Kota Pangkalpinang	67	65	65	111	45
Prov. Kep. Bangka Belitung		**205**	**162**	**111**	**270**	**173**

Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014-2018

Berdasarkan distribusi angka kesakitan DBD di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sepanjang tahun 2014-2018 mengalami kenaikan. Angka kasus paling tinggi di Kabupaten Bangka Tengah sebanyak 301 kasus. Pada tahun 2018, Penurunan angka kesakitan DBD cukup signifikan di mana angka penurunan terbesar terdapat di Kabupaten Belitung Timur, dari 41 kasus pada 2017 menjadi 17 kasus pada 2018, sementara kabupaten yang terus mengalami kenaikan signifikan pada tahun 2017 ke tahun 2018 adalah Kabupaten Belitung, Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Bangka Barat. Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) menjadi permasalahan kesehatan masyarakat yang berarti. Penyakit yang ditularkan oleh nyamuk *Aedes Aegypti* dan *Aedes Albopictus* ini kerap menimbulkan kepanikan di masyarakat karena penyebarannya yang cepat dan potensinya menyebabkan kematian. Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan penyakit yang potensial untuk menimbulkan kejadian luar biasa. Penyakit Dengue (DBD) dapat menyerang semua umur, terutama anak-anak. Penyakit ini pun rawan menimbulkan kematian. Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) sampai saat ini masih merupakan masalah kesehatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pencapaian keberhasilan pengendalian penyakit DBD mengacu pada indikator kinerja utama program pengendalian penyakit *arbovirosis* adalah Kabupaten/Kota dengan *inciden rate* DBD ≤ 49 per 100.000 penduduk dan *cases fatality rate* (CFR) ≤ 1 persen.

Tabel II.80

Jumlah Kasus Penyakit DBD di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 – 2018

No	Kabupaten/Kota	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1	Bangka	74	206	67	62	87
2	Belitung	36	114	158	2	127
3	Bangka Tengah	95	158	126	50	301
4	Bangka Barat	45	77	65	87	181
5	Bangka Selatan	55	89	24	45	33
6	Belitung Timur	9	26	12	41	17
7	Kota Pangkalpinang	18	77	38	52	162
Prov. Kep. Bangka Belitung		**332**	**747**	**498**	**339**	**908**

Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Dalam rangka pengendalian permasalahan kesehatan yang terjadi dan peningkatan taraf kesehatan masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, keberadaan sarana dan prasarana kesehatan termasuk pula ketersediaan tenaga dokter menjadi sangat penting. Sebagai salah satu bentuk pelayanan dasar kepada masyarakat, pemerintah berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan akan sarana dan prasarana kesehatan tersebut. Pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Pembangunan kesehatan yang dislenggarakan di Puskesmas bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang: a) memiliki perilaku sehat yang meliputi kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat; b) mampu menjangkau pelayanan kesehatan bermutu; c) hidup dalam lingkungan sehat dan; d) memiliki derajat kesehatan yang optimal baik individu, keluarga,kelompok dan masyarakat.

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Penataan ruang

Dari Tabel II.81 dapat diketahui bahwa total lahan yang dikategorikan kritis di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seluas 20.688 ha atau 1,24 persen, total lahan yang dikategorikan kurang produktif seluas 1.187.155 ha atau 71,11 persen, dan total lahan tidak kritis seluas 461.576 ha atau 27,65 persen.

Tabel II.81

Total Luas Kelas Lahan Kritis Kabupaten/Kota
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018

Kabupaten/Kota	Luas Kelas Lahan Kritis(Ha)					
	Tidak kritis	Potensial kritis	Agak kritis	Kritis	Sangat kritis	Total
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
Bangka	58.469	151.187	87.079	4.832		301.566
Bangka Barat	82.764	148.768	49.279	4.006	12	284.739
Bangka Selatan	63.503	221.296	79.855	4.630	191	369.475
Bangka Tengah	52.017	91.008	71.149	1.776	57	216.007
Belitung	93.307	86.806	44.995	977		226.084
Belitung Timur	106.771	89.947	59.569	4.189		260.476
Pangkalpinag	4.568	5.679	232			10.569
Jumlah	**461.576**	**794.718**	**392.437**	**20.428**	**260**	**1.669.419**

Sumber: Review Lahan Kritis Tahun 2018/BPDASHL Baturusa Cerucuk

Apabila dibandingkan dengan data kelas lahan kritis tahun 2014 yang dirilis oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat disimpulkan bahwa telah terjadi penurunan luas lahan kriteria kritis dan sangat kritis yang cukup signifikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada tahun 2014, luas kelas lahan kriteria kritis adalah 140.887 ha dan luas kelas lahan kriteria sangat kritis adalah 112.879 ha sehinga masing-masing kriteria tersebut turun sebesar 85,50 persen dan 99,77 persen. Penurunan tersebut berkorelasi positif dengan peningkatan luas lahan kriteria tidak kritis yang berlipat-lipat. Sementara itu, luas lahan kriteria potensial kritis menunjukkan peningkatan sebesar 27,25 persen dari 624.532 ha (tahun 2014) menjadi 794.718 ha (tahun 2018). Hal ini disebabkan oleh kondisi alami lahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sebagian besar berupa rawa-rawa.

Urusan penataan ruang, dilaksanakan dalam mendukung target sasaran pembangunan daerah yaitu, terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Capaian kinerja pembangunan pada urusan tata ruang salah satunya adalah dengan melihat kesesuaian antara perancanaan pembangunan daerah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Gambaran mengenai capaian kinerja urusan penataan ruang, adalah sebagaimana yang tertuang di dalam Tabel II.82 berikut.

Tabel II.82
Gambaran Pencapaian Kinerja Pembangunan Urusan Penataan Ruang
Tahun 2013 s.d. 2019 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Indikator Kinerja Sasaran	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
Capaian Luas Kawasan Lindung Terhadap Luas Wilayah Bangka Belitung (%)	11.57	11.57	11.57	11.57	20.98	20,17	20,17
Ketaatan terhadap RTRW	95.00	100.00	100.00	100.00	80.14	80,14	80,14
Persentase Kawasan Strategis yang dikembangkan	3.50	6.89	17.20	19.20	21	16,7	16,7
Jumlah Kawasan Ekonomi Khusus yang dikembangkan	-	-	-	1	1	1	1

Sumber: Dinas PUPR Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Berdasarkan Tabel II.82 di atas, dapat terlihat persentase capaian luas kawasan lindung terhadap luas wilayah Bangka Belitung meningkat dari 11,57 persen menjadi 20,17 persen, begitu pula dengan persentase kawasan strategis yang dikembangkan meningkat sedikit dari 17,20 persen di tahun 2015 menjadi 20 persen ditahun 2019. Angka-angka tersebut berada diatas target yang telah ditetapkan di dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Akan tetapi ketaatan terhadap rencana tata ruang wilayah menunjukkan penurunan sebesar 19,86 persen dan berada di bawah target RPJMD yaitu 100 persen.

b. Pekerjaan umum

Urusan Pekerjaan Umum dilaksanakan guna mendukung target sasaran daerah dalam meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang pembangunan. Salah satunya adalah untuk memastikan panjang jalan dan jembatan dalam kondisi mantap. Perkembangan panjang jalan berdasarkan kewenangan dan kondisi pada masing-masing jalan dan jembatan pada tahun 2019 adalah sebagaimana tertuang didalam Tabel II.83 di bawah ini.

Tabel II.83

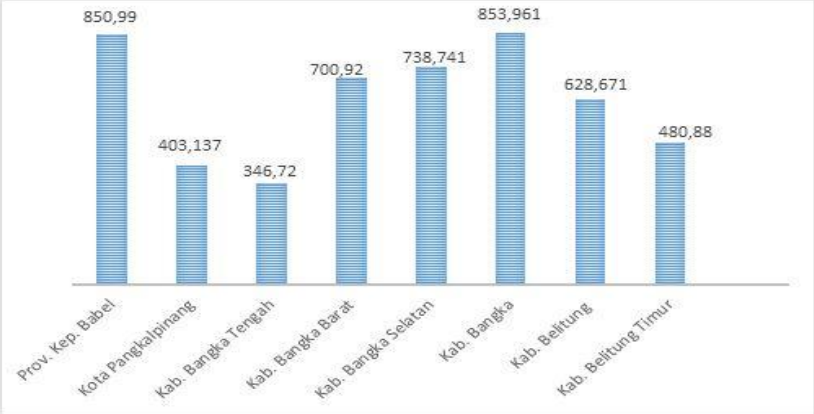
Panjang Jalan menurut Jenis Permukaan, Kondisi Jalan, dan Pemerintahan yang Berwenang Mengelola di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Km) Tahun 2019

No	Kondisi Jalan	Negara	Provinsi
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1.	**Jenis Permukaan**		
	Diaspal	600,42	850,99
	Kerikil	0	0
	Tanah	0	0
2.	**Kondisi Jalan**		
	Baik	462,935	475,96
	Sedang	135,055	235,96
	Rusak	2,267	84,21
	Rusak Berat	0,163	54,86

Sumber: Dinas PUPR, 2020

Grafik II.14

Panjang Jalan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Per Kewenangan (Km) Tahun 2019



Sumber: Dinas PUPR, 2020

Berdasarkan data di atas panjang jalan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sepanjang 850,99 km dengan rincian terdapat 54,86 km panjang jalan provinsi dalam keadaan rusak berat, 84,21 km kondisi jalan rusak, 235,96 km kondisi jalan dalam keadaaan sedang dan 475,96 km kondisi jalan dalam keadaaan baik. Dengan kondisi yang demikian, maka peningkatan kualitas jalan harus mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah.

Tabel II.84

Panjang Jembatan menurut Jenis Konstruksi dan Pemerintahan yang Berwenang Mengelola di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Meter), Tahun 2019

Jenis Kontruksi	Negara	Provinsi
(1)	*(2)*	*(3)*
1. Beton+Kayu/Baja+Kayu	64,9	0
2. Beton Bertulang	1646,60	2277,91
3. Rangka baja	1122,85	759,70
Jumlah/Total	**2834,35**	**3037,61**

Sumber: Dinas PUPR Provinsi, 2020

Berdasarkan data diatas, pembangunan jembatan yang sudah dibangun oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sepanjang 3.037,61 meter yang terdiri dari

Kontruksi Jembatan Beton Bertulang sepanjang 2277,91 meter sedangkan kontruksi jembatan dari Rangka Baja sepanjang 759,70 meter.

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Urusan perumahan dan permukiman dilaksanakan dalam rangka untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat telah bersanitasi, pengurangan kawasan kumuh, rumah tangga pengguna air bersih dan rumah layak huni. Gambaran mengenai perkembangan hal tersebut adalah sebagaimana disajikan pada Tabel II.85.

Tabel II.85
Persentase Rumah Tangga Bersanitasi, Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih, Persentase Rumah Layak Huni, Persentase Kawasan Kumuh Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 dan 2018

Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi		Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih		Persentase Rumah Layak Huni		Persentase Kawasan Kumuh	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
Bangka	91,67	94,99	98,11	98,50	98,01	98,01	0,02	0,03
Belitung	81,60	81,81	100,00	76,28	94,42	100,00	0,04	0,30
Bangka Barat	82,68	91,12	89,16	91,07	98,92	89,99	0,03	0,029
Bangka Tengah	90,05	92,10	80,32	82,63	97,13	97,98	0,02	0,30
Bangka Selatan	79,63	80,93	72,38	73,93	97,14	91,23	0,01	0,0094
Belitung Timur	69,39	74,01	76,22	84,47	54,53	58,89	0,04	0,0118
Kota Pangkalpinang	94,47	94,84	94,47	95,06	95,45	95,04	1,59	0,18
Prov. Kep. Bangka Belitung	**84,21**	**87,11**	**87,24**	**85,14**	**89,91**	**90,16**	**0,25**	**0,12**

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov. Kep. Bangka Belitung, 2019

Persentase rumah tangga bersanitasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2017 sebesar 84,21 persen dan pada tahun 2018 sebesar 87,11 persen mengalami kenaikan sebesar 2,9 persen dengan kabupaten/kota yang bersanitasi tertingi pada tahun 2018 yaitu Kabupaten Bangka sebesar 94,99 persen dan yang terendah yaitu Kabupaten Belitung Timur dengan capaian pada tahun 2018 sebesar 74,01 persen.

Persentase rumah tangga pengguna air bersih di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2017 sebesar 87,24 persen dan pada tahun 2018 sebesar 85,14 persen. Terjadi penurunan persentase penggunaa air bersih sebesar 3,1 persen dikarenakan banyaknya SPAM Pedesaan yang belum optimal penggunaannya. Pada tahun 2018, kabupaten/kota yang memiliki nilai persentase rumah tangga pengguna air bersih tertingi yaitu Kabupaten Bangka sebesar 98,50 persen dan yang terendah yaitu Kabupaten Bangka Selatan dengan capaian sebesar 73,93 persen.

Persentase rumah layak huni di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2017 sebesar 89,91 persen dan pada tahun 2018 sebesar 90,16 persen mengalami kenaikan sebesar 0,25 persen dengan persentase rumah layak huni kabupaten/kota tertingi pada

tahun 2018 yaitu Kabupaten Belitung sebesar 100 persen dan yang terendah yaitu Kabupaten Belitung Timur dengan capaian sebesar 58,89 persen.

Persentase kawasan kumuh di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2017 sebesar 0,25 persen dan pada tahun 2018 sebesar 0,12 persen. Terjadi penurunan luasan kumuh sebesar 0,12 persen. Pada tahun 2018, kabupaten/kota yang memiliki nilai persentase kawasan kumuh tertinggi yaitu Kabupaten Belitung dan Kabupaten Bangka Tengah sebesar 0,30 persen dan yang terendah yaitu Kabupaten Bangka Selatan dengan capaian sebesar 0,0094 persen.

5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Salah satu pendukung ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Perkembangan rasio jumlah polisi pamong praja engan jumlah penduduk dapat dilihat pada Tabel II. 86 berikut ini.

Tabel II.86
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per-10.000 Penduduk
Tahun 2014 s.d. 2018
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	*(2)*	*(4)*	*(5)*	*(5)*	*(5)*	*(5)*
1.	Jumlah Polisi Pamong Praja	1.097	1.229	1.238	1.305	1.449
2.	Jumlah penduduk	1.372.813	1.372.813	1.401.827	1.430.865	1.459
3.	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per-10.000 Penduduk	8.95	8.95	8.83	9.12	9.93

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praj Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Dari tabel di atas, tergambar bahwa rasio jumlah polisi pamong praja per jumlah penduduk terjadi peningkatan sampai dengan tahun 2015 sebesar 8,95 meningkat menjadi 9.93 pada tahun 2018. Kenaikan ini cukup baik, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memberikan perhatian yang cukup terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka belitung.

Tabel II.87
Rasio Pos Siskamling per Jumlah Desa Tahun 2014 s.d. 2018
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1.	Jumlah Pos Siskamling	721	988	1.138	951	1.194
2.	Jumlah Desa	387	386	386	386	391
3.	Rasio Jumlah siskamling	1,86	2,56	2,95	2.46	3.05

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Rasio pos siskamling per jumlah desa/kelurahan sebagai perbandingan jumlah pos siskamling selama 1 (satu) tahun dengan jumlah desa/kelurahan, bertujuan untuk menggambarkan ketersediaan pos siskamling di setiap desa/kelurahan. Dari tabel di atas,

terlihat tren peningkatan rasio jumlah pos siskamling di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di mana pada tahun 2016 sebesar 2,95 meningkat sehingga pada tahun 2018 menjadi 3,05. Hal ini menunjukkan upaya penyediaan salah satu fasilitas dalam menjaga keamanan lingkungan terus ditingkatkan.

6. Urusan Sosial

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967), pembangunan di bidang kesejahteraan sosial terus menerus diupayakan agar berbagai masalah sosial seperti kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, ketunaan sosial, penyimpangan perilaku, ketertinggalan/keterpencilan, serta korban bencana dan akibat tindak kekerasan dapat ditangani secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan. Hal ini merupakan wujud komitmen baik pemerintah maupun pemerintah daerah yang harus dilakukan lebih baik lagi untuk meningkatkan harkat dan martabat sebagian warga masyarakat yang menyandang permasalahan sosial, meningkatkan kualitas dan perluasan jangkauan pelayanan sosial dengan menekankan pada efektifitas penanganan masalah kemiskinan dan masalah sosial yang mendesak.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung meningkat, hal tersebut dapat dilihat pada Tabel II.88 di mana tahun 2017 jumlah PMKS sebesar 48.521 orang, sedangkan tahun 2018 meningkat menjadi 391.124 orang, dan tahun 2019 menjadi sebesar 398.970 orang.

Tabel II.88
Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Tahun 2015 s.d. 2019
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (jiwa)

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	52.346	49.579	48.521	391.124	398.970

Sumber: Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

7. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik yang mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi melalui pengembilan keputusan serta penguasaan terhadap sumberdaya ekonomi. IPG juga termasuk salah satu indikator atau indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia. Gambaran terhadap perkembangan pemberdayaan dan pembangunan gender di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana yang ditampilkan pada Tabel II.89 dan Tabel II.90.

Tabel II.89
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Tahun 2011 s.d. 2018
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

N0	Kabupaten/Kota	Tahun							
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Bangka	52,85	58,07	59,40	62,01	61,32	61,32	47,84	62,20
2.	Belitung	49,21	49,37	48,56	40,16	52,00	52,00	52,72	48,48
3.	Bangka Barat	56,29	58,28	54,81	55,57	59,37	59,37	59,98	49,88
4.	Bangka Tengah	44,54	45,08	54,93	54,29	50,71	50,71	43,30	56,39
5.	Bangka Selatan	43,77	45,79	37,80	37,13	37,93	37,93	48,94	48,46
6.	Belitung Timur	47,21	49,65	50,11	63,33	63,04	63,04	55,54	68,21
7.	Kota Pangkal Pinang	50,01	55,20	56,10	55,44	55,22	55,22	43,35	57,17
Prov. Kepulauan Bangka Belitung		**56,03**	**56,54**	**57,29**	**56,12**	**56,29**	**56,29**	**54,17**	**52,57**

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Tabel II.90
Indeks Pembangunan Gender (IPG) Tahun 2011 s.d. 2018
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	Tahun							
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)	(8)	(9)
1.	Bangka	85,86	86,03	86,77	86,92	87,17	87,17	88.14	88.24
2.	Belitung	85,59	85,73	86,61	87,19	87,98	87,98	87.99	88.62
3.	Bangka Barat	87,28	87,86	88,11	88,56	88,71	88,71	89.41	88.92
4.	Bangka Tengah	89,26	90,06	90,28	90,60	90,61	90,61	90.83	91.04
5.	Bangka Selatan	79,75	81,24	82,17	82,52	82,83	82,83	83.48	83.54
6.	Belitung Timur	83,95	84,17	84,29	85,37	86,10	86,10	86.04	67.36
7.	Kota Pangkal Pinang	82,05	92,08	92,30	92,47	93,09	93,09	92.08	93.94
Prov. Kepulauan Bangka Belitung		**87,10**	**87,54**	**87,73**	**87,74**	**88,37**	**88,37**	**88,93**	**89,15**

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Saat ini meskipun angka IPG dan IDG menunjukkan tren meningkat setiap tahunnya namun secara nasional angka IDG Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (52,67) masih jauh dibawah angka nasional (72.10), begitu juga dengan angka IPG (89.15) masih di bawah angka nasional (90,99). Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi perempuan di Bangka Belitung masih di bawah rata-rata nasional, yang tercermin dari jumlah keterwakilan perempuan di

dalam keanggotaan di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dimana keterwakilan perempuan dalam keanggotaan DPRD mengalami penurunan pada periode 2009-2014 keterwakilan itu berjumlah 5 (lima) orang, dan turun menjadi hanya 2 (dua) orang periode 2014-2018.

b. Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga pemerintahan terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan. Pekerja perempuan di lembaga pemerintahan dapat dikelompokkan berdasarkan jumlah dan persentase perempuan yang menenpati posisi Esselon I–IV. Gambaran terhadap perkembangan pemberdayaan perempuan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat sebagaimana tabel berikut.

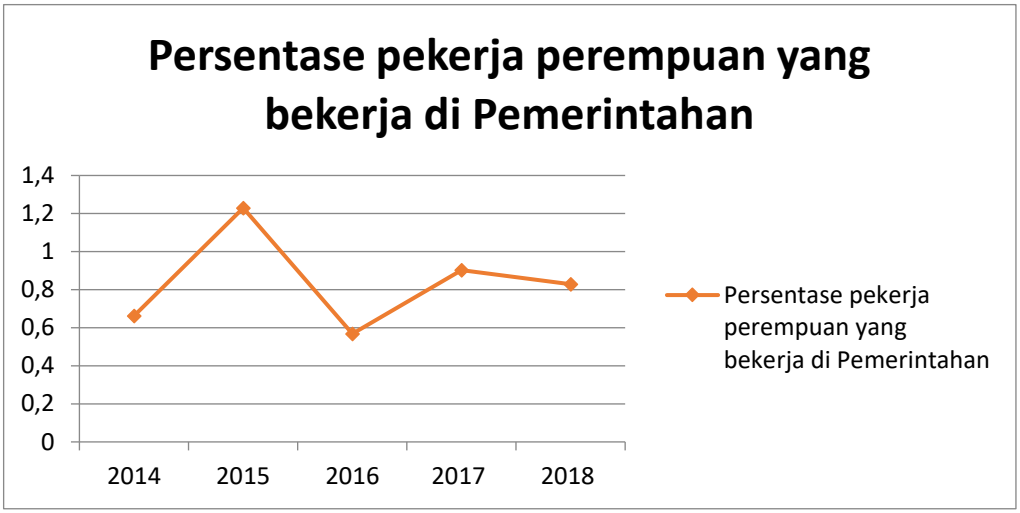
Tabel II.91
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Tahun 2014 s.d. 2018
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1.	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon II	5	4	4	5	4
2.	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon III	51	52	49	50	52
3.	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon IV	191	199	191	188	207
4.	Pekerja perempuan di pemerintah	1.354	1.407	1.403	2.452	2.477
5.	Jumlah pekerja perempuan	204.416	224.467	246.913	271.604	298.764
6.	Persentase pekerja perempuan di lembaga pemerintah	0,66	0,63	0,56	0,90	0,82

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meskipun berfluktuasi dari 0,66 pada tahun 2014 meningkat menjadi 0,82 di tahun 2018. Namun dari sisi jumlah, pekerja perempuan di pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan peningkatan dan jumlah perempuan yang bekerja juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini akan berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat khususnya keluarga. Persentase partisipasi perempuan di Lembaga Pemerintah 2014 s.d 2018 mengalami fluktuasi seperti dapat dilihat Grafik II.15 berikut,

Grafik II.15
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Tahun 2014 s.d. 2018
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Sumber: diolah dari Data BKPSDM Provinsi, 2020

c. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumahtangga. Rasio KDRT adalah jumlah Kekerasan Dalam Rumah Tangga(KDRT) yang dilaporkan dalam periode 1(satu) tahun per 1.000 rumah tangga, gambaran terhadap perkembangan rasio kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana yang ditampilkan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel II.92
Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Tahun 2014 s.d. 2018
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	*(2)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
1.	Jumlah KDRT	115	88	79	46	50
2.	Jumlah Rumah Tangga	368.504	345.928	400.27	410.87	432.906
3.	Rasio KDRT	0,031	0,025	0,020	0,011	0,012

Sumber: Profil Gender Provinsi Kepulauan Bangka Belitung-DP3ACSKB, 2020

Berdasarkan Tabel II.92 jumlah kekerasan dalam rumah tangga Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2014-2018 meskipun terus mengalami penurunan dari 2014 dan sedikit naik pada 2018, tetap diperlukan peningkatan peran lembaga UPT PPPA dalam menangani kasus kekerasan maupun memberikan sosialisasi terkait penanganan maupun pelaporan berbagai tindak kekerasan.

8. Urusan Tenaga Kerja

Pembangunan ketenagakerjaan diarahkan untuk mencapai sasaran peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ditandai dengan meningkatnya penyerapan tenaga kerja dan meningkatnya jumlah penduduk yang bekerja. Dalam setiap pelaksanaan kegiatan harus memperhatikan peningkatnya daya saing dan produktivitas tenaga kerja, peningkatnya pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, terwujudnya hubungan industrial yang harmonis dan meningkatnya peran kelembagaan industrial dan pengembangan Jamsostek, peningkatnya penerapan pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan di tempat kerja, perlindungan tenaga kerja dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan, terwujudnya permukiman dalam kawasan transmigrasi sebagai tempat tinggal dan tempat berusaha yang layak.

Dalam menggambarkan seberapa Penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu daerah dapat dilihat dengan pendekatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dimana TPAK merupakan persentase antara jumlah angkatan kerja penduduk usia 15 tahun ke atas dengan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas. Dari Tabel II.93, tren TPAK dari tahun 2015-2019 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung fluktuatif di mana tahun 2019 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Sedangkan untuk tingkat pengangguran tiga tahun terakhir (2017-2019) cenderung mengalami penurunan, di tahun 2019 tingkat pengangguran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 3,26 persen menempati urutan kesembilan se Indonesia.

Tabel II.93
Perkembangan Tingkat Pengangguran dan TPAK Tahun 2015 s.d. 2019
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1.	Tingkat partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	66,71	68,93	66,72	67,79	67,70
2.	Tingkat Pengangguran	6,29	2,6	3,78	3,65	3,62

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Berdasarkan Tabel II.94, kontribusi penyerapan tenaga kerja terbesar pada tahun 2019 terjadi pada lapangan pekerjaan pertanian yaitu sebesar 208.253. Kontribusi penyerapan tenaga kerja terbesar ke dua ada pada lapangan pekerjaan perdagangan sebesar 124.344, sedangkan kontribusi penyerapan tenaga kerja terbesar ke tiga ada pada lapangan pekerjaan pertambangan dan penggalian sebesar 101.263.

Tabel II.94
Data Penduduk yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama
Tahun 2016 s.d. 2019 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Lapangan Pekerjaan Utama	2016	2017	2018	2019
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
Sektor Primer :				
1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	220.658	219.002	217.325	*208.253*
2. Pertambangan dan Penggalian	78.856	91.438	95.721	*101.263*
Sektor Sekunder:				
3. Industri Pengolahan	56.124	44.153	49.462	*54.396*

Lapangan Pekerjaan Utama	2016	2017	2018	2019
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
4. Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	6.240	3.070	3.696	*3.890*
5. Bangunan	22.041	35.520	35.619	*37.664*
Sektor Tersier:				
6. Perdagangan	131.935	117.556	131.935	*124.344*
7. Transportasi dan Pergudangan	16.432	13.710	12.219	16.025
8. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	27.949	23.833	27.324	33.089
9. Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan dan Asuransi, Real Estat	9.072	11.417	11.559	11.553
10. Jasa Perusahaan	7.114	5.073	6.819	7.860
11.Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	36.292	42.835	44.388	43.763
12. Jasa Pendidikan	34.430	25.237	27.769	32.058
13. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8.105	12.832	10.768	13.502
14. Jasa Lainnya	31.582	26.942	26.762	28.267
Total Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	**686.830**	**672.618**	**701.366**	**715.927**

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), 2020

Berdasarkan Tabel II.95, secara kewilayahan untuk Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menurut kabupaten/kota dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, berfluktuasi untuk semua kabupaten/kota. Untuk tahun 2019 TPAK tertinggi di Kabupaten Belitung Timur sebesar 71,37 % dan terendah di Kabupaten Bangka sebesar 64,30 %, sedangkan untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019 sebesar 67,70 %. Secara umum TPAK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berada pada kisaran 67 persen menunjukkan partisipasi penduduk yang bekerja sudah cukup kompetitif dalam pasar tenga kerja.

Tabel II.95
Data TPAK Tahun 2015 s.d. 2019
menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1.	Kab. Bangka	63,88	n/a	65,75	64,10	64,30
2.	Kab. Belitung	67,64	n/a	69,29	70,36	68,74
3.	Kab. Bangka Barat	65,47	n/a	68,17	70,47	66,99
4.	Kab. Bangka Tengah	66,48	n/a	69,26	70,99	69,65
5.	Kab. Bangka Selatan	70,32	n/a	64,7	67,40	68,12
6.	Kab. Belitung Timur	68,11	n/a	68	71,93	71,37
7.	Kota Pangkal Pinang	67,41	n/a	63,42	63,64	68,35
	Prov. Kep. Bangka Belitung	**66,71**	**68,93**	**66,72**	**67,79**	**67,70**

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Penduduk yang bekerja menurut kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir relatif meningkat, kecuali Kabupaten Bangka Barat dimana pada tahun 2018 sebesar 103.102 orang, turun pada tahun 2019 menjadi 100.563. Kabupaten Bangka Tengah di tahun 2018 sebesar 94.437 orang menurun ditahun 2019 menjadi 93.483 orang. Secara kumulatif untuk wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Penduduk yang bekerja untuk kurun 5 (lima) tahun terkahir relatif meningkat dari

tahun ke tahun seiring perkembangan jumlah penduduk. Total jumlah penduduk yang bekerja ditahun 2019 sebanyak 715.927 orang.

Tabel II.96
Data Penduduk yang Bekerja Tahun 2015 s.d. 2019
menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1.	Kab. Bangka	131.559	n/a	149.318	149.323	153.874
2.	Kab. Belitung	83.903	n/a	92.112	95.521	95.583
3.	Kab. Bangka Barat	86.480	n/a	96.205	103.102	100.563
4.	Kab. Bangka Tengah	79.971	n/a	90.465	94.437	93.483
5.	Kab. Bangka Selatan	94.575	n/a	90.625	95.494	98.917
6.	Kab. Belitung Timur	59.159	n/a	62.050	67.998	68.906
7.	Kota Pangkal Pinang	88.302	n/a	91.843	95.491	104.601
	Prov. Kep. Bangka Belitung	**623.949**	**686.830**	**672.618**	**701.366**	**715.927**

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah perbandingan antara jumlah pencari kerja dengan jumlah angkatan kerja, yang merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan dari kepala daerah dan menjadi salah satu sasaran ekonomi makro dari pemerintah daerah. Dari Tabel II.97, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan tren fluktuatif selama lima tahun terakhir. Untuk Tahun 2019 terdapat 3 (Tiga) Kabupaten dan 1 (satu) Kota yang memiliki TPT melebihi TPT Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang tertinggi yaitu Kota Pangkalpinang sebesar 5,01 %, Kabupaten Bangka Tengah sebesar 4,39% , Kabupaten Bangka 3,8% dan Kabupaten Bangka Selatan sebesar 3,87 %. Sedangkan untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 3,62 % dan secara nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung lebih rendah dari rata-rata nasional dimana rata-rata nasional sebesar 5,28 %.

Tabel II.97
Persentase Tingkat Pengangguran Tahun 2015 s.d. 2019
menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1.	Kab. Bangka	8,87	n/a	4,29	4,12	3,8
2.	Kab. Belitung	4,57	n/a	2,57	2,93	2,9
3.	Kab. Bangka Barat	5,92	n/a	4,23	3,11	2,85
4.	Kab. Bangka Tengah	6,58	n/a	3,38	3,93	4,39
5.	Kab. Bangka Selatan	2,01	n/a	2,74	4,35	3,87
6.	Kab. Belitung Timur	2,55	n/a	2,62	1,5	1,71
7.	Kota Pangkal Pinang	10,64	n/a	5,8	4,7	5,01
	Prov. Kep. Bangka Belitung	**6,29**	**2,60**	**3,78**	**3,65**	**3,62**

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Berdasarkan Tabel II.98, dapat dilihat jumlah pengangguran pada tahun 2019 terbesar di Kabupaten Bangka yaitu 6.076 orang dan terendah pada Kabupaten Belitung Timur sebanyak 1.197 orang, sedangkan secara kumulatif untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 26.871 orang, meningkat dari tahun 2018 yang hanya sebanyak 26.552 orang. Hal ini menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja yang masih rendah dan tidak dapat menampung banyaknya angkatan kerja dan pencari kerja terutama mereka yang datang dari wilayah pedesaan yang masih beranggapan bahwa di wilayah perkotaan lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan di bandingkan wilayah pedesaan.

Tabel II.98
Jumlah Pengangguran Tahun 2015 s.d. 2019
menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1.	Kab. Bangka	12.805	n/a	6.693	6.410	6.076
2.	Kab. Belitung	4.015	n/a	2.429	2.887	2.853
3.	Kab. Bangka Barat	5.443	n/a	4.244	3.306	2.955
4.	Kab. Bangka Tengah	5.631	n/a	3.161	3.860	4.295
5.	Kab. Bangka Selatan	1.936	n/a	2.553	4.345	3.979
6.	Kab. Belitung Timur	1.550	n/a	1.667	1.035	1.197
7.	Kota Pangkal Pinang	10.513	n/a	5.652	4.709	5.516
	Prov. Kep. Bangka Belitung	**41.893**	**18.343**	**26.399**	**26.552**	**26.871**

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Pembangunan Ketenagakerjaan diarahkan untuk mencapai sasaran menurunnya angka pengangguran yang dilakukan melalui upaya penciptaan peluang lapangan pekerjaan dan usaha yang ditandai dengan meningkatnya penciptaan peluang kesempatan kerja bagi pencari kerja dan meningkatnya kualitas hidup serta peran perempuan.

Dalam setiap pelaksanaan kegiatan harus memperhatikan peningkatan penciptaan peluang lapangan pekerjaan dan produktivitas tenaga kerja, peningkatnya pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, terwujudnya hubungan industrial yang harmonis dan meningkatnya peran kelembagaan industrial dan pengembangan Jamsostek, peningkatnya penerapan pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan di tempat kerja, perlindungan tenaga kerja dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan, terwujudnya permukiman dalam kawasan transmigrasi sebagai tempat tinggal dan tempat berusaha yang layak. Dalam menggambarkan seberapa penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu daerah dapat dilihat dengan pendekatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dimana TPAK merupakan persentase antara jumlah angkatan kerja penduduk usia 15 tahun ke atas dengan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas. Dari Tabel II.95, tren TPAK dari tahun 2013-2017 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung fluktuatif dimana tahun 2015 sebesar 66,71 dan tahun 2016 naik menjadi 68,93 sedangkan tahun 2017 turun menjadi 66,72.

9. Urusan Pangan

Ketersediaan pangan dapat bersumber dari produksi pangan lokal maupun mendatangkan dari luar daerah/negara. Ketersediaan pangan (terutama beras) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagian besar berasal dari luar daerah, hanya sebagian kecil yang merupakan produksi dari dalam daerah. Salah satu penyebab utama rendahnya kemampuan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menyediakan pangan dari produksi lokal adalah iklim dan jenis tanah yang kurang mendukung pertumbuhan tanaman pangan. Berdasarkan Tabel II.91 menjelaskan bahwa perbandingan antara kebutuhan beras/tahun (ton) dengan kemampuan produksi bersih beras lokal (ton), Angka kebutuhan beras di tahun 2018 meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 160.557 ton dari 122.118 ton di tahun 2017, tetapi dengan adanya peningkatan produksi bersih beras (produksi lokal) yaitu 32.727 ton dari 21.722 ton di tahun 2017 menyebabkan kondisi ketersediaan beras sebagai pangan utama masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung naik menjadi 20,38 % dari 17,76 % di tahun 2017, dan menurunkan angka ketergantungan beras dari luar daerah dari 82,24 % di tahun 2017 menjadi 79,62 % di tahun 2018.

Data ketergantungan beras Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 – 2019 dapat dilihat dalam Tabel II.99 berikut.

Tabel II. 99
Data Ketergantungan Beras 2015-2019
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Penduduk (Jiwa)	1.372.813	1.401.827	1.430.865	1.459.873
2	Kebutuhan Beras/ Tahun	117.376	119.854	122.118	160.557
3	Produksi Bersih Beras (ton)	15.838	20.706	21.722	32.727
4	Kondisi ketersediaan (%)	13.48	17,30	17,76	20,38
5	Ketergantungan (%)	86,52	82,70	82,24	79,62

Sumber: Dinas Pangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Tabel II.100 di bawah ini menunjukkan produksi padi pada tiap kabupaten setiap tahunnya mengalami peningkatan/penurunan produksi yang berfluktuatif yang dipengaruhi beberapa kendala antara lain faktor cuaca, hama penyakit dan kendala teknis lainnya.

Tabel II.100
Data Produksi Padi (Ton) Kabupaten/Kota Tahun 2015-2019
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.	Kab/ Kota	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Kabupaten Bangka	9.303	6.862	9.666	8.415	8.116
2	Kabupaten Bangka Tengah	365	884	905	1.135	1.403
3	Kabupaten Bangka Barat	3.753	6.171	5.556	6.135	7.014

No.	Kab/ Kota		Tahun			
		2015	2016	2017	2018	2019
4	Kabupaten Bangka Selatan	8.001	17.727	15.471	25.145	27.502
5	Kabupaten Belitung	1.477	1.557	1.650	1.923	1.802
6	Kabupaten Belitung Timur	4.170	2.186	3.876	2.972	2.969
7	Kota Pangkalpinang	-	-	-	-	-
	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	27.069	35.387	37.124	45.725	48.806

Sumber: Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Tabel II.101

Data Ketersediaan Pangan 2015-2019 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Keterangan	Satuan	TAHUN			
			2015	2016	2017	2018
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1	Ketersediaan Beras (Lokal)	Ton/Thn	15.838	20.706	21.722	32.727
2	Ketersediaan Beras (Import)	Ton/Thn	95.390	125.011	146.612,53	160.556,87
3	Ketersediaan Beras (Lokal + Import)	Ton/Thn	112.263	140.849	168.334,27	193.283,47
4	Kebutuhan Beras (HBKN)	Ton/Thn	117.376	119.854	122.118	131.692
5	Ketersediaan Energi	Kkal/Kap/ Hari	2.437,20	2.490	2.643,27	2.791
6	Ketersediaan Protein	Gram/Kap /Hari	79,38	71,56	82,73	100,91
7	Ketersediaan Lemak	Gram/Kap /Hari	144,63	76,55	94,08	83,38
8	PPH Ketersediaan	Skor	78,50	78,78	87,84	88,45

Sumber: Dinas Pangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Berdasarkan Tabel II.101 di atas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2015-2019 ketersedian energi ideal maupun protein ideal telah terpenuhi. Adapun angka ketersediaan energi ideal yang dipersyaratkan adalah 2.400 kkal/kap/hari sedangkan angka ketersediaan idealnya adalah 63 gram/kap/hari.

Berdasarkan Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) X tahun 2012 ditetapkan pun angka ketersediaan energi ideal yang dipersyaratkan adalah 2.400 kkal/kap/hari sedangkan angka ketersediaan idealnya adalah 63 gram/kap/hari. Selanjutnya berdasarkan Tabel II.101 dapat dilihat bahwa sejak tahun 2013 pencapaian ketersediaan energi dan ketersediaan

protein masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melebihi kondisi ideal yang dipersyaratkan.

10. Urusan Pertanahan

a. Persentase Luas Lahan Bersertifikat

Tabel II.102
Luas Lahan (m²) Berdasar Sertifikat
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2016

No	Kab/ Kota	2014					2015						2016					
		HGB	HGU	HM	HP	HPL	HGB	HGU	HM	HP	HPL	HW	HGB	HGU	HM	HP	HPL	HW
1	Bangka	92.935	-	3.012.794	-	-	662.093	128.635	1.543.303	-	-	-	1.325.862	13.370.466	1.510.640	-	550.000	-
2	Bangka Tengah	119.468	-	3.821.638	-	194.723	332.686	-	2.226.024	-	-	-	226.308	-	1.740.960	-	-	-
3	Bangka Barat	444.940	-	7.390.740	-	-	31.915	-	197.805	-	-	-	29.868	-	1.398.692	-	-	-
4	Bangka Selatan	104.354	139.457.500	54.831.907	977.115	-	132.438	139.457.500	59.978.053	1.496.977	-	10.842	556.199	139.457.500	64.299.906	1.768.093	-	10.842
5	Pangkalpinang	1.196.283	-	1.439.515	-	-	800.392	-	1.224.213	-	-	-	266.080	-	1.081.783	-	-	-
6	Belitung	185.019	-	10.549.495	-	-	1.352.501	-	2.766.871	-	-	-	743.381	-	2.944.824	-	-	-
7	Belitung Timur	3.278	-	866.903	-	-	598.850	657.256	1.699.841	-	-	-	377.462	572.400	2.782.879	-	-	-
Jumlah		**2.146.277**	**139.457.500**	**81.912.992**	**977.115**	**194.723**	**3.910.875**	**140.243.391**	**69.636.110**	**1.496.977**	**-**	**10.842**	**3.525.160**	**153.400.366**	**75.759.684**	**1.768.093**	**550.000**	**10.842**

Sumber: Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018
Keterangan: HGB= Hak Guna Bangunan, HGU= Hak Guna Usaha, HM= Hak Milik, HP= Hak Pengelolaan, HPL= Hak Pengelolaan Lahan, HW=Hak Wakaf

Tabel II.103
Luas Lahan (m²) Berdasar Sertifikat
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2018

No.	Kabupaten/ Kota	2017						2018						Jumlah	Luas(*)
		HGB	HGU	HM	HP	HPL	HW	HGB	HGU	HM	HP	HPL	HW		WILAYAH (m2)
1	Bangka	0,0104	3,456	0,0621	0,0078	0,0018	0	0,0368	1,4013	0,0318	0,0131	0	0,0004	424.668.655	2.950.880.000
2	Bangka Tengah	0,0388	0,1145	0,5153	0,0112	0	0	0,0532	0,3859	0,4683	0,0359	0,0004	0	45.004.540	2.155.770.000
3	Bangka Barat	0,0014	0	0,24	0,006	0	0	0,0016	0,4705	1,13	0,0066	0	0	61.705.493	2.820.610.000
4	Bangka Selatan	0,0012	0,93	0,1	0,01	0	0	0,0021	0,34	0,3	0,0084	0	0	77.542.657	3.607.080.000
5	Pangkalpinang	1,031	0	2,7811	1,0481	0	0	2,5841	0	2,9289	0,3599	0	0	14.057.302	89.400.000
6	Belitung	0,0314	0,5868	0,55	0,0156	0	0	0,0571	0,598	1,62	0,0132	0,0013	0	91.690.199	2.293.690.000
7	Belitung Timur	0,0072	0,18	0,1294	0,0155	0	0,0001	0,0098	0,6854	0,55	0,0367	0	0,0001	60.201.739	2.506.910.000
Jumlah		**0,0186**	**0,95**	**0,25**	**0,0163**	**0,0003**	**0**	**0,0378**	**0,65**	**0,65**	**0,0194**	**0,0002**	**0,0001**	**774.870.585**	**16.424.340.000**

Sumber: Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Keterangan: HGB= Hak Guna Bangunan, HGU= Hak Guna Usaha, HM= Hak Milik, HP= Hak Pengelolaan, HPL= Hak Pengelolaan Lahan, HW= Hak Wakaf

Tabel II.104
Persentase (%) Luas Lahan Bersertifikat Tahun 2014-2016
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	2014					2015						2016					
		HGB	HGU	HM	HP	HPL	HGB	HGU	HM	HP	HPL	HW	HGB	HGU	HM	HP	HPL	HW
1	Bangka	30,52	-	989,47	-	-	212,39	41,26	495,07	-	-	-	417,29	4.208,06	475,44	-	-	-
2	Bangka Tengah	67,41	-	2.156,46	-	109,88	183,90	-	1.230,51	-	-	-	122,51	-	942,49	-	-	-
3	Bangka Barat	231,26	-	3.841,44	-	-	16,23	-	100,61	-	-	-	14,87	-	696,56	-	-	-
4	Bangka Selatan	55,07	73.595,46	28.936,26	515,65	-	68,41	72.040,16	30.983,12	773,30	-	5,60	281,38	70.551,74	32.529,41	494,48	-	5,48
5	Pangkalpinang	623,08	-	718,59	-	-	407,94	-	623,96	-	-	-	132,82	-	540,01	-	-	-
6	Belitung	122,00	-	6.929,00	-	-	885,00	-	1.810,00	-	-	-	478,00	-	1.895,00	-	-	-
7	Belitung Timur	2,86	-	740,78	-	-	510,57	550,41	1.423,72	-	-	-	309,47	469,29	2.281,59	-	-	-
Jumlah		**1.132,21**	**73.595,46**	**44.312,00**	**515,65**	**109,88**	**2.284,45**	**72.631,83**	**36.666,99**	**773,30**	**-**	**5,60**	**1.756,35**	**75.229,09**	**39.360,49**	**494,48**	**-**	**5,48**

Sumber: Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018
Keterangan:
HGB= Hak Guna Bangunan, HGU= Hak Guna Usaha, HM= Hak Milik, HP= Hak Pengelolaan, HPL= Hak Pengelolaan Lahan, HW= Hak Wakaf

Tabel II.105
Persentase (%) Luas Lahan Bersertifikat Tahun 2017-2018
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/ Kota	2017						2018					
		HGB	HGU	HM	HP	HPL	HW	HGB	HGU	HM	HP	HPL	HW
1	Bangka	0,0104	3,456	0,0621	0,0078	0,0018	0	0,0368	1,4013	0,0318	0,0131	0	0,0004
2	Bangka Tengah	0,0388	0,1145	0,5153	0,0112	0	0	0,0532	0,3859	0,4683	0,0359	0,0004	0
3	Bangka Barat	0,0014	0	0,24	0,006	0	0	0,0016	0,4705	1,13	0,0066	0	0
4	Bangka Selatan	0,0012	0,93	0,10	0,01	0	0	0,0021	0,34	0,30	0,0084	0	0
5	Pangkalpinang	1,031	0	2,7811	1,0481	0	0	2,5841	0	2,9289	0,3599	0	0
6	Belitung	0,0314	0,5868	0,55	0,0156	0	0	0,0571	0,598	1,62	0,0132	0,0013	0
7	Belitung Timur	0,0072	0,18	0,1294	0,0155	0	0,0001	0,0098	0,6854	0,55	0,0367	0	0,0001
Jumlah		**0,0186**	**0,95**	**0,25**	**0,0163**	**0,0003**	**0**	**0,0378**	**0,65**	**0,65**	**0,0194**	**0,0002**	**0,0001**

Sumber: Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019
Keterangan:
HGB= Hak Guna Bangunan, HGU= Hak Guna Usaha, HM= Hak Milik, HP= Hak Pengelolaan, HPL= Hak Pengelolaan Lahan, HW= Hak Wakaf

b. Penyelesaian Kasus Tanah Negara

Tabel II.106
Penyelesaian Kasus Tanah Negara
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2016

No.	Kabupaten/ Kota	2014			2015			2016		
		Kasus Terdaftar	Kasus Diselesaikan	Penyelesaian Kasus (%)	Kasus Terdaftar	Kasus Diselesaikan	Penyelesaian Kasus (%)	Kasus Terdaftar	Kasus Diselesaikan	Penyelesaian Kasus (%)
1	Bangka	4	-	-	5	1	20	4	2	50
2	Bangka Tengah	1	-	-	2	-	-	9	7	77,7
3	Bangka Barat	3	-	-	3	-	-	2	-	-
4	Bangka Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Pangkalpinang	6	3	50	2	-	-	12	6	50
6	Belitung	5	2	40	5	-	-	11	-	-
7	Belitung Timur	1	-	-	1	-	-	1	-	-
Jumlah Kasus Terdaftar		**20**			**18**			**39**		
Jumlah Kasus Diselesaikan			**5**			**1**			**15**	
Penyelesaian Kasus (%)				**25**			**5,5**			**38,4**

Sumber: Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018

Tabel II.107
Penyelesaian Kasus Tanah Negara
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2018

No	Kabupaten/kota	2017			2018		
		Kasus Terdaftar	Kasus Diselesaikan	Penyelesaian Kasus (%)	Kasus Terdaftar	Kasus Diselesaikan	Penyelesaian Kasus (%)
1	Bangka	2	2	100	1	1	100
2	Bangka Tengah	0	0	0	3	2	66,67
3	Bangka Barat	0	0	0	0	0	0
4	Bangka Selatan	0	0	0	1	1	100
5	Pangkalpinang	2	2	100	3	2	66,67
6	Belitung	0	0	0	0	0	0
7	Belitung Timur	0	0	0	0	0	0
TOTAL		**4**	**4**	**100**	**8**	**6**	**75**

Sumber: Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Kasus sengketa tanah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017 tercatat hanya ada 4 kasus yaitu 2 kasusu di Kabupaten Bangka dan 2 Kasus di Kota Pangkalpinang. Sedangkan tahun 2019 ada 8 kasus yang terdaftra yaitu 1 kasus di Kabupaten Bangka, 3 Kasus di Kabupaten Bangka Tengah, 1 Kasus di Kabupaten Bangka Selatan, dan 3 Kasus di Kota Pangkalpinang. Penyelesaian kasus pada tahun 2018 hanya sebesar 75%. Kasus ini didominasi oleh kasus sengketa tanah desa dan kasus tumpang tindih kepemilikan lahan serta pemalsuan sertifikat

c. Penyelesaian Izin Lokasi

Tabel II.108
Penyelesaian Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Izin Lokasi
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2016

No	Kabupaten/ Kota	2014			2015			2016		
		Permohonan Izin Lokasi	Pemberian Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Izin Lokasi	Penyelesaian Izin Lokasi (%)	Permohonan Izin Lokasi	Pemberian Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Izin Lokasi	Penyelesaian Izin Lokasi (%)	Permohonan Izin Lokasi	Pemberian Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Izin Lokasi	Penyelesaian Izin Lokasi (%)
1	Bangka	5	5	100	5	5	100	-	-	-
2	Bangka Tengah	4	4	100	14	14	100	-	-	-
3	Bangka Barat	2	2	100	-	-	-	-	-	-
4	Bangka Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Pangkalpinang	9	9	100	2	2	100	-	-	-
6	Belitung	5	5	100	9	9	100	-	-	-
7	Belitung Timur	5	5	100	-	-	-	-	-	-
Permohonan Izin Lokasi		**30**	**30**		**30**	**30**		**0**	**0**	
Pemberian Izin Lokasi		**30**	**30**		**30**	**30**		**0**	**0**	
Penyelesaian Izin Lokasi (%)		**100**	**100**		**100**	**100**		**0**	**0**	

Sumber: Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan B98angka Belitung, 2018

Tabel II.109
Penyelesaian Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Izin Lokasi
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2018

No	Kabupaten/ Kota	2017			2018		
		Permohonan Izin Lokasi	Pemberian Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Izin Lokasi	Penyelesaian Izin Lokasi (%)	Permohonan Izin Lokasi	Pemberian Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Izin Lokasi	Penyelesaian Izin Lokasi (%)
1	Bangka	1	1	100	11	11	100
2	Bangka Tengah	4	4	100	9	9	100
3	Bangka Barat	3	3	100	5	5	100
4	Bangka Selatan	1	1	100	2	2	80
5	Pangkalpinang	7	7	100	8	8	100
6	Belitung	23	23	100	15	15	100
7	Belitung Timur	4	4	100	2	2	100
TOTAL		**43**	**43**	**100**	**52**	**43**	**82,69**

Sumber: Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

11. Urusan Lingkungan Hidup

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melaksanakan urusan lingkungan hidup berpedoman pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun mengancam kelangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Kebijakan pengelolaan kualitas lingkungan hidup diarahkan pada peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup yang

mencerminkan kondisi kualitas air, udara dan tutupan lahan, yang diperkuat dengan peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan dan penegakan hukum lingkungan. Gambaran mengenai capaian IKLH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagaimana disajikan pada Tabel II.110.

Tabel II.110
Perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Tahun 2015 s.d. 2019 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
Indeks Kualitas Air	62.05	82.08	72.50	82.12	76.81
Indeks Kualitas Udara	90.61	80.4	94.97	89.09	81.54
Indeks Tutupan Hutan (ITH)	36.41	0	0	0	0
Indek Kualitas Tutupan Hutan (IKTH)	0	35.35	44.01	40.78	41.20
Nilai IKLH	**62,74**	**56.88**	**67.85**	**67.85**	**63.99**

Sumber: Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015-2019

Berdasarkan data di atas, IKLH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung fluktuatif, pada tahun 2019 nilai IKA dan IKU Provinsi menurun dibandingkan tahun 2018. Peningkatan terdapat pada Nilai IKTH yaitu dari 40.78 menjadi 41.20, hal ini disebabkan adanya perubahan metode perhitungan dengan meyempurnakan metode perhitungan IKTL yang mengelaborasikan beberapa parameter kunci yang menggambarkan adanya aspek konservasi, aspek rehabilitasi dan karateristik wilayah secara spasial. Masih dibutuhkan upaya yang optimal dari seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan IKLH di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Untuk indeks kualitas air dihitung untuk 11 sungai dan menggunakan avg NSF memasukkan unsur pencemar untuk 10 parameter+debit, sedangkan udara hanya di hitung 3 titik lokasi: industri, perumahan dan transportasi.

Selanjutnya memperhatikan data pada Tabel II.111, terlihat bahwa persentase keluarga yang memiliki akses terhadap air bersih pada tahun 2014 di semua kabupaten/kota cenderung mengalami penurunan. Penurunan akses terhadap air bersih yang paling besar terjadi di Kabupaten Belitung Timur menjadi 73,82 persen diikuti Kabupaten Bangka Barat menjadi 77,58 persen. Hal ini menandakan kebutuhan masyarakat akan akses air bersih harus menjadi perhatian serius dalam pengolahan dan pemanfaatan sumber-sumber air bersih di tahun berikutnya.

Tabel II.111
Perkembangan Persentase Keluarga yang memiliki Akses terhadap Air Bersih
Tahun 2012 s.d. 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1	Bangka	81,39	87,7	73.82	75,3	77,9
2	Belitung	78,44	75,6	73.73	84,5	74,2
3	Bangka Tengah	78,87	48,2	38.68	47,7	56,8
4	Bangka Barat	54,66	87,4	77.58	83,7	89,5
5	Bangka Selatan	73,80	76,4	75.18	59,6	74,8
6	Belitung Timur	72,39	100	73.82	76,6	76,0
7	Kota Pangkalpinang	91,84	92,0	86.72	87,7	88,7
Prov. Kep. Bangka Belitung		**76,38**	**80,2**	**71.24**	**73,7**	**77,6**

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018

12. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dari data Tabel II.112 terlihat rasio penduduk ber-KTP meningkat secara signifikan dan diiringi dengan kepemilikan KTP yang meningkat. Dari awal tahun 2012 hingga tahun 2018 peningkatan rasio penduduk ber-KTP sebesar 58,68. Di samping itu kepemilikan akta kelahiran juga meningkat dan rasio bayi berakta kelahiran pun meningkat dengan capaian 97,99. Hal ini disebabkan beberapa faktor, diantaranya meningkatnya sistem pelayanan yang dilakukan oleh instansi pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota) dengan melakukan pelayanan jemput bola sampai dengan tingkat desa/kelurahan dan sekolah-sekolah, serta mengembangkan inovasi pelayanan sehingga memudahkan masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan. Selain itu, kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan dokumen, khususnya KTP dan akta kelahiran juga mulai meningkat.

Namun peningkatan ini tidak diiringi rasio pasangan berakta nikah. Meskipun mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun belum menunjukkan hasil yang signifikan (tahun 2018 baru mencapai 38,38). Untuk itu, dibutuhkan pengembangan sistem pelayanan dan inovasi untuk meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan.

Tabel II.112
Perkembangan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 s.d. 2018

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	41	58	60	59	63	93,6	99,68
Rasio Bayi Berakte Kelahiran	-	-	84,4	95.5	95.1	97,92	97,99
Rasio Pasangan Ber-akte Nikah	-	-	22,8	25,7	30	33,24	38,38
Kepemilikan KTP	551.011	740.365	765.507	761.597	837.252	945.036	962.342
Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	287	328	407	292	491	401	457
Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	2.349.199	1.269.381	1.281.099	1.292.863	1.321.117	1.349.121	1.379.767
Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	551.011	740.365	765.507	761.597	837.252	945.036	962.342

Sumber: DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

13. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

a. Pengendalian Penduduk

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana antara lain adalah upaya meningkatkan pengunaan kontrasepsi modern, upaya menurunkan *unmet need* yang saat ini semakin berkembang pada kelompok masyarakat perkotaan dan berpendidikan, keterbatasan SDM petugas penyuluh Keluarga Berencana baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, jumlah provider pelayanan KB yang masih belum memiliki kualifikasi dan kompetensi teknis meds pelayanan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) baik yang sudah dilatih maupun yang belum dilatih serta berbagai masalah terkait kesehatan reproduksi.

Program Keluarga Berencana dikatakan berhasil apabila angka kepesertaan KB Mandiri tinggi, angka kelahiran pada perempuan usia 15-19 tahun rendah dan *unmet need* (kebutuhan keluarga berencana yang belum terpenuhi) yang rendah. Namun kondisi ini tidak terlalu memiliki pengaruh terhadap laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, mengingat pertumbuhan penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selain dari angka kelahiran juga disebabkan adanya migrasi penduduk dari luar Bangka Belitung.

b. Rasio Akseptor KB

Rasio akseptor KB adalah jumlah akseptor KB dalam periode 1 (satu) tahun per 1000 pasangan usia subur pada tahun yang sama. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk. Gambaran terhadap perkembangan Rasio Akseptor KB di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada Table II.113 berikut.

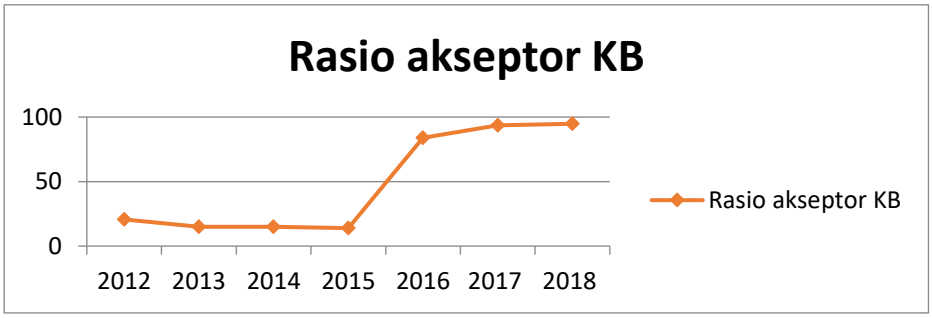
Tabel II.113
Rasio Akseptor KB Tahun 2012 s.d. 2018
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
1.	Jumlah akseptor KB	52.762	40.976	37.576	38.967	229.251	226.099	216.308
2.	Jumlah pasangan usia subur	256.116	272.808	252.481	279.880	273.191	241.658	228.236
3.	Rasio akseptor KB	20,60	15,02	14,88	13,92	83,92	93,56	94,77

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Berdasarkan pada tabel II.113 pada kurun waktu 2012 -2018 rasio akseptor KB di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami tren penurunan, namun di tahun 2016 hingga tahun 2018 terjadi peningkatan yang cukup tinggi dari 13,92 ditahun 2015 menjadi 94,77 pada tahun 2018. Peningkatan rasio akseptor KB menunjukkan tingkat kesertaan berKB sudah semakin baik namun masih ada pekerjaan rumah untuk meningkatkan penggunaan kontrasepsi modern. Peningkatan jumlah akseptor KB juga mempengaruhi penurunan angka *unmet need*. Angka *unmet need* provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami penurunan dari 10,4% (2017) menjadi 8,8 (2018). Hal ini dapat dilihat lebih jelas pada Grafik II.16 berikut:

Grafik II.16
Rasio Akseptor KB Tahun 2012 s.d. 2018
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

c. Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera

Berdasarkan tingkat kesejahteraan kriteria keluarga dibagi menjadi beberapa tahapan, yaitu: Keluarga Pra Sejahtera, Keluarga Sejahtera I, dan keluarga Sejahtera I^{+}. Tahapan ini dibagi berdasarkan kemampuan memenuhi kebutuhan kebutuhan dasarnya.

Keluarga Pra Sejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu atau lebih dari 5 kebutuhan dasarnya, sedangkan Keluarga Sejahtera I merupakan keluarga yang sudah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, diantaranya:

1) melaksanakan ibadah menurut agama oleh masing-masing anggota keluarga;
2) pada umumnya seluruh anggota keluarga makan 2 (dua) kali sehari atau lebih;
3) seluruh anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian;
4) bagian yang terluas dari lantai rumah bukan dari tanah;
5) bila anak sakit atau pasangan usia subur ingin ber KB dibawa kesarana/petugas kesehatan.

Gambaran terhadap perkembangan Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana yang ditampilkan dalam Tabel II.114 berikut.

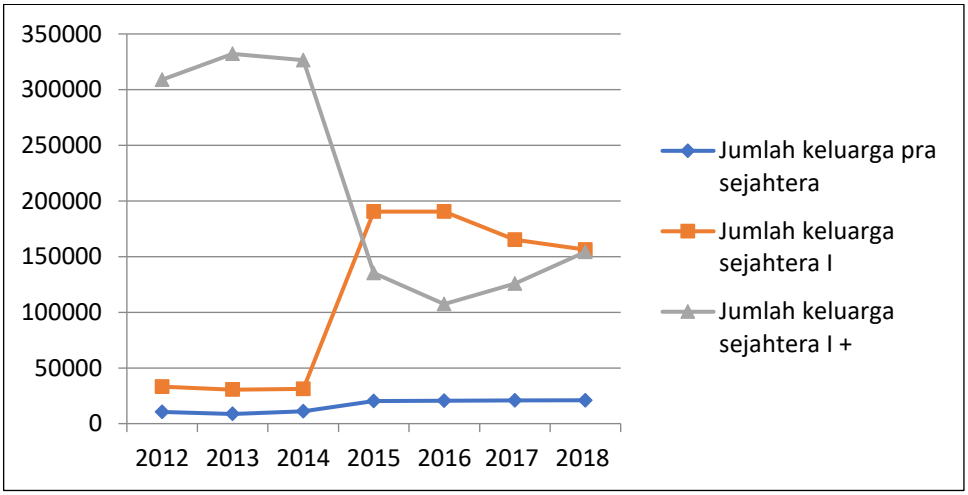
Tabel II.114
Keluarga Pra Sejahtera, Keluarga Sejahtera I, dan Keluarga Sejahtera I+
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 s.d. 2018

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
1.	Jumlah keluarga pra sejahtera	10.462	8.667	10.948	20.248	20.648	20.791	20.986
2.	Jumlah keluarga sejahtera I	33.228	30.487	31.085	190.421	190.421	165.090	156.133
3.	Jumlah keluarga sejahtera I +	308.978	332.088	326.471	135.259	107.369	125.678	154.256
4.	Jumlah keluarga	352.668	371.242	368.504	345.928	318.438	326.411	331.357

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Berdasarkan Grafik II.17 di bawah ini, terlihat Keluarga Pra Sejahtera mengalami peningkatan dua kali lipat dari 10.462 keluarga menjadi 20.986 keluarga. Yang meningkat dan menurun secara drastis terlihat pada Keluarga Sejahtera I dan Keluarga Sejahtera I^{+} . Keluarga Sejahtera I setelah meningkat secara drastic di tahun 2015, mengalami tren menurun hingga 2018. Sementara Keluarga Sejahtera I^{+} yang menurun secara drastis, mengalami tren terus meningkat. Diperlukan pendekatan untuk menurunkan jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I, dan meningkatkan jumlah Keluarga Sejahtera I^{+}.

Grafik II.17
Tren Perkembangan Jumlah Keluarga Pra Sejahtera, Keluarga Sejahtera I, dan Keluarga Sejahtera I+
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 s.d 2018



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

14. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan desa telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sehubungan dengan hal tersebut, beberapa hal dan permasalahan yang harus mendapatkan perhatian oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu: kemampuan kelembagaan pemerintahan desa dalam penyusunan dokumen-dokumen perencanaan desa, kapasitas aparat pemerintahan desa dalam pengelolaan keuangan dan aset desa, belum dipahaminya proses penyusunan pedoman pengelolaan keuangan desa sesuai kondisi di masing-masing desa dengan tetap mempedomani peraturan perundangan, pendataan lembaga kemasyarakatan, pengembangan ada istiadat dan budaya masyarakat desa dan stabilitas lembaga keuangan mikro dan pasar desa.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa atau kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan. Dari tabel di bawah menunjukkan kelompok binaan LPM di Provinsi Kepulauan Bangka belitung cenderung meningkat, di mana tahun 2015 jumlah binaan LPM sebanyak 3.062 meningkat pada tahun 2016 menjadi sebesar 3.176. Kabupaten Belitung Timur memiliki kelompok binaan LPM terbesar pada tahun 2015 yaitu sebanyak 581, namun pada tahun 2016 terjadi penurunan atau terdapat 10 LPM yang tidak aktif, sedangkan Kabupaten Bangka Selatan adalah yang paling rendah yaitu sebanyak 476 LPM. Hingga tahun 2019 jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 3.176, jumlah ini masih sama seperti tahun sebelumnya (tahun 2018), yaitu belum ada penambahan pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

Tabel II.115
Kelompok LPM dan PKK Tahun 2015 s.d. 2019 menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/ Kota	2015		2016		2017		2018		2019	
		LPM	PKK	LPM	PKK	LPM	PKK	LPM	PKK	LPM	PKK
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
1	Bangka	501	1.499	527	1.642	527	1.642	527	1.642	527	1.642
2	Belitung	492	767	487	818	487	818	487	818	487	818
3	Bangka Barat	503	1.480	626	1.584	626	1.584	626	1.584	626	1.584
4.	Bangka Tengah	502	1.202	489	1.397	489	1.397	489	1.397	489	1.397
5.	Bangka Selatan	483	1.481	476	1.424	476	1.424	476	1.424	476	1.424
6.	Belitung Timur	581	1.058	571	1.056	571	1.056	571	1.056	571	1.056
	Jumlah	**3.062**	**7.487**	**3.176**	**7.921**	**3.176**	**7.921**	**3.176**	**7.921**	**3.176**	**7.921**

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga selanjutnya di singkat PKK, adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaanya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesejahteraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan. Dari data di atas, kelompok PKK di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung meningkat, di mana tahun 2015 jumlah kelompok PKK sebanyak 7.487 meningkat pada tahun 2016 menjadi sebesar 7.921. Sedangkan Kabupaten Bangka memiliki kelompok PKK terbanyak pada tahun 2015 sebanyak 1.499, meningkat pada tahun 2019 sebanyak 1.642 kelompok PKK dan Kabupaten Belitung yang paling rendah yaitu sebanyak 818 kelompok PKK. Hingga tahun 2019 jumlah kelompok PKK di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih sama seperti sebelumnya (tahun 2018).

Terdapat beberapa data sektoral yang menjadi kewenangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di antaranya terkait dengan jumlah BUMDes yang aktif, jumlah posyandu aktif, jumlah siswa sekolah dasar yang terfasilitasi dalam program PMT-AS di daerah tertinggal dan terpencil, jumlah aparatur desa terlatih dan jumlah kawasan perdesaan yang dibangun.

Tabel II.116
Jumlah BUMDes yang Aktif Tahun 2017 s.d. Tahun 2018 Kabupaten/Kota
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten	STATUS BUMDes 2017			STATUS BUMDes 2018				
		Persiapan	Terbentuk	Aktif	Pemula	Berkembang	Maju	Mandiri	Unggulan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
1	Bangka	16	32	32	38	12	-	-	1
2	Bangka Tengah	-	44	44	28	17	6	1	5
3	Bangka Barat	-	21	21	2	25	-	-	-
4	Bangka Selatan	-	17	17	40	-	-	-	-
5	Belitung	2	9	9	26	-	-	-	-
6	Belitung Timur	-	24	24	18	5	3	2	3
Prov. Kep. Bangka Belitung		**18**	**147**	**147**	**152**	**59**	**3**	**3**	**9**

Sumber: Data Survey Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2019

Berdasarkan data di atas ada perbedaan status BUMDes tahun 2017 dengan tahun 2018 dikarenakan adanya pembaharuan status yang berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2017 tanggal 29 September 2017 tentang petunjuk teknis operasioanal dan tata cara pemberian bantuan keuangan khusus kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) melalui program peningkatan dan pendampingan kelembagaan BUMDes di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Keterkaitan antara status BUMDes di tahun 2017 dengan tahun 2018 untuk lebih mengetahui BUMDes mana yang benar-benar aktif dan perlu didorong lebih aktif untuk dapat membantu BUMDes tersebut dalam segi keuangan, harapan yang akan didapatkan dengan keaktifan BUMDes adanya bantuan keuangan baik dari pusat, provinsi, kabupaten maupun dana CSR.

Tabel II.117
Jumlah Posyandu Aktif Tahun 2017 s.d. Tahun 2018 Kabupaten/Kota
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten	Kecamatan		Kelurahan		Desa		Puskesmas		Posyandu		Posyandu Aktif	Posyandu Aktif
												Jumlah	Jumlah
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
1	Bangka	8	8	15	19	62	62	12	12	221	227	164	168
2	Belitung	5	5	7	7	42	42	9	9	174	177	119	127
3	Bangka Barat	6	6	4	4	60	60	8	8	171	182	86	112
4	Bangka Tengah	6	6	7	7	56	56	8	9	136	138	27	25
5	Bangka Selatan	8	8	3	3	50	50	9	10	121	121	33	45
6	Belitung Timur	7	7	0	0	39	39	7	7	133	134	131	121
7	Pangkalpinang	7	7	42	42	0	0	9	9	116	116	87	88
Prov. Kep. Bangka Belitung		**47**	**47**	**78**	**82**	**309**	**309**	**62**	**64**	**1072**	**1095**	**647**	**687**

Sumber: Data Survey Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2019

Melihat data posyandu aktif yang terdapat di setiap kabupaten/kota menunjukan adanya peningkatan keaktifan posyandu hal ini terlihat dari jumlah peningkatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2017 dengan total 647 menjadi 687 di tahun 2018 ini menunjukan ada peningkatan keaktifan sebanyak 40 posyandu aktif.

Tabel II. 118
Jumlah Sekolah Dasar (SD) Penerima Bantuan
Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS)
Tahun 2017 s.d. Tahun 2018 Kabupaten/Kota
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten	Kecamatan		Jumlah SD Penerima		Jumlah Siswa Penerima PMT-AS	
		2017	2018	2017	2018	2017	2018
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
1	Bangka	Riau Silip Puding Besar Mendo Barat	Bakam	1 1 1	1	409	90
2	Bangka Barat	Muntok Simpang Tritip Jebus Parit Tiga Kelapa	Tempilang	2 1 1 1 1	1	409	90

No	Kabupaten	Kecamatan		Jumlah SD Penerima		Jumlah Siswa Penerima PMT-AS	
		2017	2018	2017	2018	2017	2018
3	Bangka Tengah	Lubuk Besar Sungai Selan	Lubuk Besar	1 3	1	408	90
4	Bangka Selatan	Air Gegas Pulau Besar Simpang Rimba	Air Gegas	1 1 1	1	408	90
5	Belitung	Membalong Badau Sijuk Tanjungpandan	Badau	2 2 1 1	1	408	90
6	Belitung Timur	Manggar Dendang Simpang Pesak	Simpang Pesak	1 1 1	1	408	90
Prov. Kep. Bangka Belitung				**25**	**6**	**2450**	**540**

Sumber: Data Survey Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2019

Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) merupakan kegiatan pemberian makanan kepada peserta didik murid sekolah dasar umum/madrasah ibtidaiyah (SD/MI) kelas 1-6 dalam bentuk jajanan/kudapan atau makanan lengkap yang aman dan bermutu beserta kegiatan pendukung lainnya dengan memperhatikan aspek mutu dan keamanan pangan. Pada tahun 2017 PMT-AS diberikan kepada 2.450 siswa se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, namun pada tahun 2018 hanya sebanyak 540 siswa.

Berdasarkan Tabel II.119 pada tahun 2017 masih belum ada pelatihan bagi kepala desa dalam pelatihan Revolusi Mental sebaliknya pada tahun 2018 telah dilakukan pelatihan bagi kepala desa sebanya 38 orang dari 6 (enam) kabupaten, dan harapannya pelatihan tersebut dapat mengikut sertakan kepala desa yang lainnya. Pelatihan tidak hanya revolusi mental namun masih banyak pelatihan yang harus ditingkatkan lagi terutama bagi bendahara desa dan pengurus desa lainnya yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, mengingat pada saat ini banyak sekali anggaran yang diperuntukkan bagi desa namun banyak juga pengurus yang masih belum semuanya dapat menyelesaikan laporan keuangannya dengan baik. Dengan melihat data diatas dapat untuk dipertimbangkan kembali pelatihan terkait dengan pengurus desa.

Tabel II. 119
Jumlah Aparatur Desa yang Terlatih
Tahun 2017 s.d. Tahun 2018 Kabupaten/Kota
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten	Jenis Pelatihan 2014			Jenis Pelatihan 2015			Jenis Pelatihan 2016			Jenis Pelatihan 2017			Jenis Pelatihan 2018		
		Bendahara Desa	Peraturan Desa	Bintek BPD	Bendahara Desa	Peraturan Desa	Revolusi Mental (Bagi Kades)	Bendahara Desa	Peraturan Desa	Revolusi Mental (Bagi Kades)	Bendahara Desa	Peraturan Desa	Revolusi Mental (Bagi Kades)	Bendahara Desa	Peraturan Desa	Revolusi Mental (Bagi Kades)
1	Bangka	0	0	9			15			7	9	11	-	-	-	-

No	Kabupaten	Jenis Pelatihan 2014			Jenis Pelatihan 2015			Jenis Pelatihan 2016			Jenis Pelatihan 2017			Jenis Pelatihan 2018		
		Bendahara Desa	Peraturan Desa	Bintek BPD	Bendahara Desa	Peraturan Desa	Revolusi Mental (Bagi Kades)	Bendahara Desa	Peraturan Desa	Revolusi Mental (Bagi Kades)	Bendahara Desa	Peraturan Desa	Revolusi Mental (Bagi Kades)	Bendahara Desa	Peraturan Desa	Revolusi Mental (Bagi Kades)
2	Bangka Tengah			8			5			6	8	11	-	-	-	7
3	Bangka Barat			8			15			6	9	13	-	-	-	5
4	Bangka Selatan			9			15			6	8	11	-	-	-	6
5	Belitung			8			5			5	8	12	-	-	-	8
6	Belitung Timur			8			5			5	8	12	-	-	-	12
Prov. Kep. Bangka Belitung		**-**	**-**	**50**	**-**	**-**	**60**	**-**	**-**	**35**	**50**	**70**	**-**	**-**	**-**	**38**

Sumber : Data Survey Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2019

Tabel II. 120
Jumlah Kawasan Perdesaan Tahun 2016 s.d. Tahun 2018 Kabupaten
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018	
		Kecamatan	Tema Kawasan	Kecamatan	Tema Kawasan	Kecamatan	Tema Kawasan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
1	Bangka	Bakam Pemali Belinyu Riau Silip	- Petanian dan Pariwisata - Pertumbuhan Ekonomi Baru - Pertanian dan Pariwisata - Perikanan dan Pariwisata	-Bakam - Pemali -Belinyu -Riau Silip	-Kawasan Perdesaan Pertanian dan Pariwisata -Kawasan Perdesaan Pertumbuhan Ekonomi Baru - Kawasan Perdesaan Pertanian dan Pariwisata -Kawasan Perikanan dan Pariwisata	-Bakam - Pemali -Belinyu -Riau Silip	-Kawasan Perdesaan Pertanian dan Pariwisata -Kawasan Perdesaan Pertumbuhan Ekonomi Baru - Kawasan Perdesaan Pertanian dan Pariwisata -Kawasan Perikanan dan Pariwisata
2	Bangka Tengah	-	-	-	-	Koba	Kawasan Ekowisata, Sungai dan Pulau
3	Bangka Barat	-	-	-	-	Parit Tiga	Kawasan Mina Politan dan Pariwisata
		-	-	-	-	Simpang Teritip	Kawasan Mina-Industri Kecil Wisata
		-	-	-	-	Simpang Teritip dan Mentok	Kawasan Mina-Agrowisata
4	Bangka Selatan	-	-	Air Gegas	Kawasan Perdesaan Pengembangan Budidaya Lada Putih	Air Gegas	Kawasan Perdesaan Pengembangan Budidaya Lada Putih

No	Kabupaten	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018	
		Kecamatan	Tema Kawasan	Kecamatan	Tema Kawasan	Kecamatan	Tema Kawasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5	Belitung	Selat Nasik	Kawasan Perdesaan Mina Agro Wisata	Selat Nasik	Kawasan Perdesaan Mina Agro Wisata	Selat Nasik	Kawasan Perdesaan Mina Agro Wisata
6	Belitung Timur	Manggar	Kawasan Perdesaan Minapolitan	Manggar	Kawasan Perdesaan Minapolitan	Manggar	Kawasan Perdesaan Minapolitan

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2019

Upaya Pemerintah baik pusat maupun Provinsi maupun kabupaten telah melakukan banyak intervensi berkaitan dengan pengembangan kawasan perdesaan. Melihat data diatas pada tahun 2016, Pemeritah Pusat, Provinsi dan Kabupaten telah melakukan upaya pengembangan kawasan perdesaan di 3 (tiga) Kabupaten yaitu Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur. Berbeda halnya dengan kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Bangka Tengah yang belum menyelesaikan andministrasi dalam dokumen Rencana Pengembangan Kawasan Perdesaan (RPKP) di tahun 2016. Namun Pada tahun 2018 Pemerintah provinsi membantu untuk menyiapkan dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan harapannya dengan tersedianya dokumen RPKP tersebut dapat membantu kabupaten untuk mengembangkan kawasan dan mendapatkan anggaran dari pemerintah pusat.

Berdasarkan sumber data yang disampaikan dan berdasarkan Indeks Desa Membangun yang tertuang dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun pada lampiran nomor urut 2 (dua) menyatakan klasifikasi status desa.

Tabel II. 121
Jumlah Desa Tertinggal dan Berkembang Tahun 2016 s.d. Tahun 2017 Kabupaten Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Status Perkembangan Desa Tertinggal		Status Perkembangan Desa Berkembang	
				2016	2017	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Bangka	3	4	2	2	2	2
2	Belitung	4	8	4	4	4	4
3	Bangka Barat	6	18	9	9	9	9
4	Bangka Tengah	3	3	3	3	-	-
5	Bangka Selatan	8	41	12	12	29	29
6	Belitung Timur	3	6	2	2	4	4
TOTAL		**27**	**80**	**32**	**32**	**48**	**48**

Sumber: Kepmendes, PDT dan Transmigrasi No 126, 2017

Klasifikasi status desa adalah 5 (lima) status kemajuan dan kemandirian desa, yakni dengan penjelasan sebagai berikut.

1. Desa mandiri atau yang disebut desa sembada adalah desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
2. Desa maju atau yang disebut desa pra-sembada adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk

peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.

3. Desa berkembang atau yang disebut desa madya adalah desa potensial menjadi desa maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
4. Desa tertinggal atau yang disebut desa pra-madya adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
5. Desa sangat tertinggal atau yang disebut desa pratama adalah desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, goncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

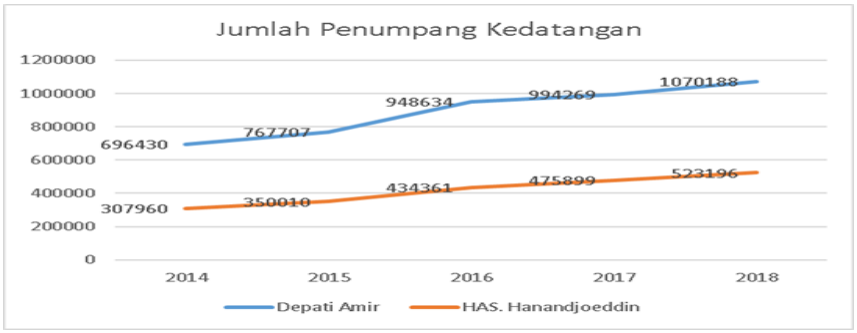
Klasifikasi status desa tersebut di atas dihasilkan berdasarkan indeks desa membangun dengan status kemajuan dan kemandirian desa sebagai berikut.

a. Desa mandiri atau desa madya adalah desa yang memiliki indeks desa membangun lebih besar (>) dari 0,8155.
b. Desa maju atau desa pra-madya adalah desa yang memiliki indeks desa membangun kurang dan sama dengan (=) 0,8155 dan lebih besar (>) dari 0,7072.
c. Desa berkembang atau desa madya adalah desa yang memiliki indeks desa membangun kurang dan sama dengan (=) 0,7072 dan lebih besar (>) dari 0,5989.
d. Desa tertinggal atau desa pra-madya adalah desa yang memilik iindeks desa membangun kurang dan sama dengan (=) 0,5989 dan lebih besar (>) dari 0,4907.
e. Desa sangat tertinggal atau desa pratama adalah desa yang memiliki indeks desa membangun kurang dan lebih kecil (=) dari 0,4907.

15. Urusan Perhubungan

Perhubungan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pelayanan transportasi yang handal, diindikasikan oleh penyelenggaraan transportasi yang aman (*security*), selamat (*safety*), nyaman (*comfortable*), tepat waktu (*punctuality*), terpelihara, mencukupi kebutuhan, menjangkau seluruh pelosok tanah air serta mampu mendukung pembangunan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pelayanan transportasi yang berdaya saing diindikasikan oleh penyelenggaraan transportasi yang efisien, dengan harga terjangkau (*affordability*) oleh semua lapisan masyarakat, ramah lingkungan, berkelanjutan, dilayani oleh SDM yang profesional, mandiri dan produktif. Pengembangan pembangunan infrastruktur perhubungan darat, laut dan udara dan modernisasi moda transportasi untuk membuka akses antar pulau, antar provinsi dan negara termasuk mendukung peningkatan aksesibilitas ke destinasi pariwisata daerah serta peningkatan Status Bandara Depati Amir di Pangkalan Baru, Bangka Tengah dan HAS. Hanandjoeddin di Tanjung Pandan, Belitung menjadi Bandara Internasional. Gambaran tentang perkembangan pelaksanaan urusan perhubungan udara di Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2015, adalah sebagaimana disajikan pada Grafik II.18.

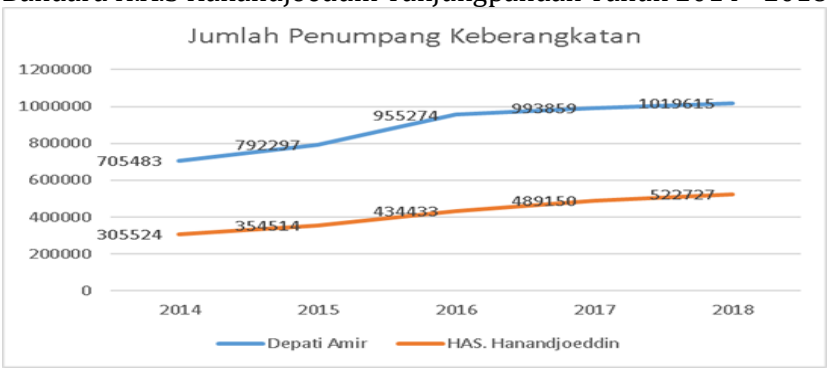
Grafik II.18
Jumlah Penumpang Datang di Bandara Depati Amir Pangkalpinang dan
Bandara H.A.S Hanandjoeddin Tanjungpandan Tahun 2014 – 2018



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Berdasarkan gambar tersebut, pada tahun 2015 kenaikan jumlah penumpang tertinggi terjadi pada bulan Juli, Agustus dan Desember. Hal ini disebabkan karena pada moment tersebut bertepatan dengan liburan anak sekolah, kuliah dan hari besar keagamaan.

Grafik II.19
Jumlah Penumpang Berangkat dari Bandara Depati Amir Pangkalpinang dan
Bandara H.A.S Hanandjoeddin Tanjungpandan Tahun 2014 - 2018



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Sementara itu, gambaran mengenai kondisi perhubungan laut di Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2015 adalah sebagai termuat pada Grafik II.20 berikut.

Grafik II.20
Jumlah Kapal di Pelabuhan Laut Wilayah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2018



Sumber : Dishub Provinsi Babel, 2020

Kunjungan kapal di seluruh pelabuhan di Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2018 masih didominasi oleh pelayaran dalam negeri yaitu sebanyak 2.472 unit dengan berat total 3.122.720 *Grosston.*

Di sisi lain kondisi urusan perhubungan darat pada tahun 2012-2016 yang diukur dari jumlah kendaraan bermotor di Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagaimana tersaji pada Tabel II.122.

Tabel II.122
Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Berdasarkan Jenis Kendaraan
Tahun 2014 s.d. 2018 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tahun	Jenis Kendaraan					
	Sedan	Bus	Jeep	Pickup	Truck	Motor
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
2018	52427	696	4490	17398	8456	330452
2017	50024	747	4720	18727	9099	338475
2016	43681	704	4169	16872	8174	07609
2015	41418	674	4273	17765	8502	325404
2014	36967	659	4329	16670	8235	22178

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Berdasarkan tabel tersebut, maka jenis kendaraan yang memiliki pertumbuhan adalah kendaraan jenis bus. Peningkatan ini diharapkan berkorelasi dengan peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor. Namun disisi lain, kendaraan roda dua mengalami kecenderungan penurunan dalam kurun waktu 2013-2016. Indek ketersediaan infrastruktur perhubungan dan *load factor* tahun 2014-2018 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.123
Load Factor Tahun 2014 s.d 2018 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	*(2)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
1.	Load facktor angkutan	48	36	36	32	24

Sumber : Dishub Provinsi Babel, 2020

Tabel II.124
Indeks di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
dilaksanakan Perhubungan Tahun 2014 s.d. 2018
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	*(2)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
1.	Indeks ketersediaan infrastruktur perhubungan	26	27	28	39	30,25

Sumber : Dishub Provinsi Babel, 2020

16. Urusan Penanaman Modal

Pada tingkat nasional, arah pengembangan penanaman modal diorientasikan pada peningkatan daya saing penanaman modal, hal ini ditegaskan dalam pernyataan visi penanaman modal nasional, yaitu: “Terwujudnya daya saing penanaman modal untuk menunjang kualitas perekonomian nasional”. Peningkatan kualitas pelayanan merupakan indikator utama pencapaian daya saing penanaman modal.

Masih kurangnya kerjasama promosi penanaman modal dan masih rendahnya minat investor untuk berinvestasi, perlunya rebranding investasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menyajikan data terkini (*up to date*) peta potensi sumber daya dan peluang investasi lingkup provinsi, terkoneksinya kemitraan usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dengan investor/pengusaha besar, tersedianya konsep produk turunan komoditas unggulan potensi sumber daya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tersedianya SDM promosi yang mempunyai kemampuan marketing investasi.

Adapun tujuan jangka menengah dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu meningkatkan realisasi investasi dan terwujudnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan untuk mencapai pelayanan prima. Sedangkan sasarannya antara lain: perbaikan kemudahan berinvestasi, meningkatnya nilai realisasi, meningkatnya jumlah investor dan meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan terpadu.

Tabel II.125
Jumlah Proyek dan Nilai Investasi PMDN/PMA
Tahun 2015 s.d. 2019
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Investasi	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1	Jumlah Investor	104	156	235	266	601
2	NilaiInvestasi (Trillin Rp)	2.057,03	2.928,62	3.781,01	3.733,04	4.246,08

Sumber: DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Pada tabel diatas yaitu Tabel II.125 menunjukkkan bahwa jumlah investor di tahun 2018 sebanyak 266 yang mengalami peningkatan sebanyak 335 di tahun 2019. Hal ini diperlukan strategi dan kebijakan yang tepat untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan dan sekaligus meningkatkan jumlah investor yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tabel II.126
Jumlah Perijinan yang diterbitkan Tahun 2015 s.d. 2019
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Investasi	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1	Jumlah Perijinan sektor Pertanian	0	8	20	18	9
2	Jumlah Perijinan sektor perikanan	82	222	455	440	492
3	Jumlah Perijinan sektor Pertambangan	0	0	141	182	203
4	Jumlah Perijinan sektor perdagangan	0	0	11	16	0
5	Jumlah Perijinan sektor lainnya	498	385	387	250	387

Sumber: BP2TPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

17. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Terbatasnya pelatihan olahraga, sarana dan prasarana serta minimnya dana pembinaan, minimnya pembinaan Organisasi Kepemudaan (OKP) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, masih rendahnya prestasi olahraga pelajar daerah dalam even POPWIL (Pekan Olahraga Pelajar Wilayah) I Sumatera Tahun 2018 yang diikuti dari Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Jambi, dan Kepulauan Bangka Belitung yang masih menduduki peringkat 7 dari 7 provinsi, belum optimalnya koordinasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program dan kegiatan. Dinas Kepemudaan dan Olahraga melaksanakan rapat koordinasi sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, itu merupakan beberapa permasalahan dalam olahraga, sedangkan pergaulan bebas, penggunaan narkoba dan degradesi moral merupakan permasalahan dalam pembinaan pemuda.

Organisasi pemuda adalah sekelompok pemuda yang berkerjasama dengan suatu perencanaan-perencanaan kerja dan peraturan-peraturan, untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Banyaknya jumlah organisasi pemuda menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan dan semakin banyak jumlah organisasi pemuda menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai untuk memberdayakan pemuda dalam pembangunan daerah.

Tabel II.127
Jumlah Organisasi dan Kegiatan Kepemudaan Tahun 2014 s.d. 2018
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kegiatan	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1.	Jumlah Organisasi Pemuda	270	270	270	270	270
2.	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	15	12	12	8	10

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Dari data Tabel II.127, jumlah organisasi pemuda di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama 5 (lima) tahun terakhir (2014 s.d 2018) relatif stabil dan tanpa penambahan yaitu sebanyak 270 Organisasi Pemuda. Organisasi olahraga adalah organisasi formal yang dibentuk oleh sekelompok masyarakat olahraga yang bekerjasama dengan suatu perencanaan-perencanaan kerja dan peraturan-peraturan, untuk mencapai suatu tujuan pembangunan dunia olahraga. Dari Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah klub/organisasi olahraga di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama 5 (lima) tahun terakhir banyak mengalami peningkatan dimana pada tahun 2018 sebanyak 1.361 klub/organisasi.

Tabel II.128
Jumlah Klub/Organisasi Olahraga Tahun 2014 s.d. 2018
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Organisasi Olahraga	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1.	Klub/Organisasi Olahraga	880	1063	1216	1322	1361

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Hasil Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencatat kemajuan dalam dalam beberapa tahun dengan kenaikan 7,5 poin dari indeks 45,5 di tahun 2015 menjadi 53,00 di tahun 2018. Ini merupakan hal yang positif dimana harapan pemerintah daerah untuk mewujudkan pengembangan potensi intelektual dan keterampilan pemuda dalam mengembangkan keberdayaan dan pembangunan masyarakat di bidang ekonomi, sosial dan budaya dapat berjalan dengan baik. Untuk itu peningkatkan kualitas pemuda harus tetap dilakukan dengan memberikan pengembangan potensi diri untuk memperkaya *hard skill* dan *soft skill* guna menyiapkan mereka menjadi generasi hebat penerus bangsa.

Tabel II.129
Data Indeks Pembangunan Pemuda Tahun 2015 s.d. 2018
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Domain	2015	2016	2017	2018
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1.	Pendidikan	56,67	60,00	60,00	60,00
2.	Kesehatan dan Kesejahteraan	62,50	57,50	60,00	65,00
3.	Ketenagakerjaan dan Kesempatan	35,00	60,00	45,00	60,00
4.	Partisipasi dan Kepemimpinan	40,00	40,00	40,00	40,00
5.	Gender dan Diskriminasi	33,33	30,00	33,33	40,00
IPP		**45,50**	**49,50**	**47,67**	**53,00**

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Kep. Bangka Belitung dan Kementerian Kepemudaan dan Olahraga RI

Hasil Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2018 menunjukan bahwa (1) Indeks partisipasi 0,26, (2) Indeks ruang terbuka 0,23, (3) Indeks kebugaran 0,19 (4) Indeks SDM Keolahragaan 0,36 dan Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu 0,26. Kesimpulannya adalah Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih berada pada kategori kurang karena Indeks total IPO yang meliputi Partisipasi, Ruang Terbuka, Kebugaran dan SDM Keolahragaan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 0,26 berada direntang 0,24-0,49. Artinya bahwa pembangunan olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih perlu diperhatikan dan dibenahi oleh pemerintahan dan semua lapisan masyarakat agar pembangunan olahraga di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bisa lebih baik.

Tabel II.130
Data Indeks Pembangunan Olahraga Tahun 2015 s.d. 2018
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Dimensi	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1.	Partisipasi				0,26	0,26
2.	Ruang Terbuka				0,23	0,23
3.	Kebugaran				0,19	0,19
4.	SDM Keolahragaan				0,36	0,36
IPO					**0,26**	**0,26**

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Kep. Bangka Belitung
dan Kementerian Kepemudaan & Olahraga RI

18. Urusan Statistik

Pada urusan statistik, terutama statistik sektoral yang dikelola oleh pemerintah daerah, ketersediaan data serta *up-dating* data dan informasi yang akurat menjadi hal yang penting untuk diperkuat, terutama kaitannya sebagai dasar perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, selain itu data tersebut dikelola dalam sistem informasi pembangunan daerah yang transparan dan terintegrasi secara nasional. Data dan informasi dimaksud mencakup kondisi geografis daerah, demografi, potensi sumber daya daerah, ekonomi dan keuangan daerah, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing.

Tabel II.131

Jumlah Data Statistik Per Aspek yang digunakan dalam Penyusunan Perencanaan Tahun 2016 s.d. 2018 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.	Elemen Data	2016	2017	2018	satuan	Urusan	Data Dasar/Data Komposit	Sumber Data
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
1	Layanan Telepon Seluler	0	0		Desa	Kominfo	Data Tunggal	Diskominfo
	Jumlah Desa Terlayani	0	0	35	Desa			Diskominfo
	Jumlah Desa yang belum Terlayani	0	0	1				Diskominfo
	Jumlah BTS	0	0	99	Desa	Desa		Diskominfo
	Jumlah Provider				28 tersebar di Kabupaten/Kota	Desa		Diskominfo
2	Layanan Telepon Kabel							Diskominfo
	Jumlah Jaringan Telepon Tersedia	0	0	11	Desa			Diskominfo
	Jumlah Jaringan Terpasang	0	0	0	SS			Diskominfo
3	Layanan Internet							Diskominfo
	Jumlah Data Terlayani	0	0	25	Desa			Diskominfo
	Jumlah Data Belum Terlayani	0	0					Diskominfo
4	Jumlah Kantor Pos	0	0	5	Desa			Diskominfo
	Jumlah Kantor Pos Pembantu	0	0	3	Desa			Diskominfo
	Jumlah Desa Terlayani Pos Keliling	0	0	19	Desa			Diskominfo
5	Radio	0	0	0				Diskominfo
	Jumlah Stasiun Radio	0	0	0				Diskominfo
	Cakupan Layanan	0	0	0				Diskominfo
6	Televisi	0	0	0				Diskominfo
	Jumlah Stasiun Televisi	0	0	0				Diskominfo
	Cakupan Layanan	0	0	0				Diskominfo
7	Surat Kabar Nasional	0	0	0				Diskominfo
	Surat Kabar Lokal	0	0	0				Diskominfo

Sumber: Buku Cetak Data dan Informasi Pembangunan Tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat disajikan bahwa data yang tersedia meliputi data tahun 2018, dan adapun elemen data yang tersedia terdiri atas: Layanan Telepon Seluler (meliputi: Jumlah Desa Terlayani, Jumlah Desa yang belum terlayani, dan Jumlah BTS); Layanan Telepon Kabel (meliputi: Jumlah Jaringan Telepon Tersedia); Layanan Internet (meliputi: Jumlah Desa Terlayani); Jumlah Kantor Pos (meliputi: Jumlah Kantor Pos

Pembantu, Jumlah Desa Terlayani Pos Keliling). Untuk elemen Jumlah Desa Terlayani Pos Keliling tidak bisa digunakan lagi sebagai elemen data untuk tahun berikutnya, karena dari pihak Kantor Pos sudah menyatakan tidak digunakan lagi.

Tabel II.132
Buku PDRB dan Provinsi/Kabupaten/Kota Dalam Angka Tahun 2011 s.d. 2015
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1.	Buku Provinsi/Kabupaten/Kota dalam angka	8	8	8	8	8
2.	Buku PDRB Provinsi/Kabupaten/Kota	8	8	8	8	8

Sumber : BappedaProvinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015

Berdasarkan tabel di atas, bahwa cetak Buku Provinsi/Kabupaten/Kota dalam angka dan Buku PDRB Provinsi/Kabupaten/Kota tersedia pada tahun 2011 sampai dengan 2015, dimana Bappeda yang berperan dalam mencetak Buku tersebut. sedangkan untuk tahun 2016 sampai dengan 2018 tidak dilakukan cetak Buku tersebut dikarenakan keterbatasan anggaran. Dan pada tahun 2019 telah dilakukan Cetak Buku tersebut masing-masing sebanyak 85 buah, dan disebar ke Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, BPS Provinsi, Kantor Perwakilan BI Bangka Belitung, dan Dinas Komunikasi dan Informatika (dan Statistik) Kabupaten/Kota.

19. Urusan Persandian

Persandian selama lima tahun terakhir belum memiliki struktural esselon empat yang khusus menangani urusan Persandian ini, sejak adanya perubahan terhadap SOTK di masing-masing perangkat daerah, mulai tahun 2017 Struktural Persandian muncul. Fokus urusan persandian ini dalam lima tahun kedepan adalah:

(a) jumlah layanan persandian yang dimanfaatkan oleh Perangkat daerah untuk pengamanan informasi berklasifikasi dan strategis milik pemerintah daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
(b) jumlah penanganan terhadap insiden atau penyimpangan sistem informasi, semakin kecil insiden yang terjadi pada setiap tahunnya merupakan bagian dari indikator kinerja dari urusan persandian. Sehingga diharapkan pada setiap tahunnya jumlah insiden atau penyimpangan sistem informasi di lingkungan Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak lebih besar dari Nol;
(c) adanya kebijakan teknis dan dukungan SDM dibidang keamanan informasi, akan tetapi permasalahan keamanan informasi pada implementasinya berada pada struktural yang berbeda di dalam SOTK yang diterapkan di Perangkat Daerah Komunikasi dan Informatika.

Sinergitas antara keamanan informasi dan persandian sangatlah erat hal ini dapat dilihat dari dukungan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada lima tahun kedepan dalam rangka meningkatkan kemanan informasi dan persandian di Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini. Semakin tingginya tingkat ancaman terhadap informasi strategis yang berasal dari dalam dan luar negeri, maka persandian Republik Indonesia dituntut terus mengembangkan kapabilitas dan kompentensi sumber daya manusia (SDM) sandi, baik pusat maupun daerah.

Berdasarkan data SDM persandian di dinas komunikasi dan Informatika masih perlu ditingkatkan baik jumlah personil serta kualitas SDM persandian. Hal ini untuk mengantisipasi operasional data *center* yang akan datang. SDM persandian dibekali oleh pendidikan dan pelatihan yang sesuai.

Tabel II.133
Jumlah Ketersediaan Sumber Daya Manusia Bidang Persandian

DATA SDM PERSANDIAN
PADA UNIT TEKNIS PERSANDIAN (UTP)
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NO	NAMA PERSONIL	NIP	TEMPAT/ TGL LAHIR	GOL	JABATAN	PENDIDIKAN			KETERANGAN
						UMUM	PIM	FUNGSIONAL/ SANDI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	MUSTARI	196406111989021001	PANGKALPINANG, 11 APRIL 1964	Pembina Tk. I/IV d	KEPALA SEKSI PERSANDIAN	SLTA	IV	-	081278223487
2	MUHAMMAD AKBAR, A.Md	197803252002121004	PANGKALPINANG, 25 MARET 1978	Pembina/III c	OPERATOR SANDI & TELEKOMUNIKASI	D3 KOMUNIKASI	-	SANDIMAN LANJUTAN 2009	082185707306
3	ZULFIKAR, S.Si	198012232009031007	PANGKALPINANG, 23 DES 1980	Pembina/III c	PRANATA ALAT PERSANDIAN	S1 MIPA MATEMATIKA	-	SANDIMAN LANJUTAN 2013	081373641382
4	RINI HAPSARI, A.Md	197806062007012007	PALEMBANG, 06 JUNI 1978	Pembina Muda/III a	OPERATOR SANDI & TELEKOMUNIKASI	D3 TEKNIK TELEKOMUNIKASI	-	PEMBENTUKAN SANDIMAN 2013	081171113688

Sumber : Data Elektronik Personil Sandi pada Seksi Persandian

20. Urusan Kebudayaan

Permasalahan yang dihadapi pada urusan kebudayaan adalah kurangnya dukungan SDM yang mengerti dan mampu dalam bidang ini sehingga tumbuh kembangnya masih tertinggal dengan daerah lainnya. Permasalahan pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya seperti program pelestarian cagar budaya dan permuseuman yaitu belum adanya museum provinsi, program pembinaan kesenian dan perfillman yaitu belum adanya taman budaya dan pasar seni, masih terbatasnya produksi film yang mengangkat tema pendidikan dan budaya, pembangunan karakter bangsa dan penguatan kearifan lokal serta masih terbatasnya ruang pertunjukkan film.

21. Urusan Perpustakaan

Perpustakaan merupakan sarana dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional. Sebagai wahana belajar sepanjang hayat, perpustakaan mampu mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk itu, dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, perlu ditumbuhkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam. Sebagai salah satu upaya untuk memajukan kebudayaan nasional, perpustakaan merupakan wahana pelestarian kekayaan budaya bangsa. Pentingnya keberadaan lembaga perpustakaan sebagai media belajar bagi masyarakat sehingga akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia karena memiliki wawasan yang luas dan pemikiran yang maju untuk mendukung pembangunan daerah. Pembangunan urusan perpustakaan masih dihadapkan pada kendala-kendala antara lain budaya baca masyarakat masih tergolong rendah karena masih dominannya budaya lisan di masyarakat, masih terbatasnya lembaga perpustakaan, sarana dan prasarana termasuk

koleksi buku pustaka dan tenaga pengelola perpustakaan terbatas, baik jumlah, persebaran maupun kompetensinya.

Tabel II.134
Urusan Perpustakaan Tahun 2014 s.d. 2018

No.	Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	3.355	718	6.373	6.253	4.700
2	Jumlah pengunjung perpustakaan keliling per tahun	N/A	N/A	6.565	5.893	4.335
3	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	N/A	N/A	21.137	23.055	22.379
4	Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/hari	279	60	531	521	391
5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	9796	10.791	11.028	11.553	11.738
6	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	1	1	1	1	1

Sumber : Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Berdasarkan tabel di atas menjelaskan bahwa jumlah pengujung perpustakaan per tahun dari tahun 2014-2019 terjadi penurunan dan peningkatan, pada tahun 2015 jumlah pengujung perpustakaan per tahun relatif menurun dari tahun sebelumnya yang berjumlah 718 sedangkan 2014 jumlah pengunjung perpustakaan per tahun berjumlah 3.355, dan pada tahun 2016 jumlah pengunjung perpustakaan per tahun meningkat sangat besar yang berjumlah 6.373 dan tahun selanjutnya di tahun 2017 jumlah pengunjung perpustakaan menurun menjadi 6.253. Pada tahun 2018 jumlah pengunjung menurun kembali menjadi 4.700. Dari tabel di atas menjelaskan Jumlah Pengunjung Perpustakaan Keliling per tahun pada tahun 2014 dan 2015 tidak ada data, di tahun 2016 jumlah pengunjung perpustakaan keliling berjumlah 6.565 pengunjung sedangkan di tahun 2017 berjumlah 5.893 pengunjung, jumlah pengunjung perpustakaan keliling per tahun pada tahun 2018 relatif menurun dengan jumlah 4.335 pengunjung.

Uraian dari Tabel II.134 tentang koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah pada tahun 2014 dan 2015 tidak ada data, pada tahun 2016 berjumlah 21.137, di tahun 2017 koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah meningkat menjadi 23.055 dan pada tahun 2018 terjadi penyusutan koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah berjumlah 22.379. Uraian dari tabel di atas tentang Rasio perpustakaan per satuan penduduk pada tahun 2014-2017 tidak ada data namun di tahun 2018 terdapat 1.341/1.459.873 x 1000. Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan per hari pada tahun 2015 menurun menjadi 60 orang dari tahun sebelumnya pada tahun 2014 berjumlah 279 orang, dari tahun 2015 jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan per hari di tahun 2016 meningkat sangat besar yang berjumlah 531 pengunjung, kemudian menurun di tahun 2017 yang berjumlah 521 dan menurun kembali pada tahun 2018 yang berjumlah 391 orang. Jumlah koleksi judul buku perpustakaan dari tahun 2014-2019 terus meningkat sangat besar, pada tahun 2014 jumlah koleksi judul buku perpustakaan berjumlah 9.796 judul, pada tahun 2015 jumlah koleksi judul buku perpustakaan meningkat dari tahun sebelumnya berjumlah 10.791 di tahun 2016 jumlah koleksi judul buku perpustakaan berjumlah 11.553, jumlah koleksi judul buku terus meningkat pada tahun 2017 berjumlah 11.553 sampai dengan tahun 2018 jumlah koleksi judul buku meningkat sangat besar yang berjumlah 11.738 judul. Selain itu dari Tabel II.134

di atas menjelaskan jumlah pustakawan tenaga teknis dan penilai yang memiliki sertifikat dari tahun 2014 s.d. 2018 berjumlah 1 orang pustakawan.

Tabel II.135
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Tahun 2014 s.d. 2018 Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1.	Jumlah Pengunjung	3.355	718	6.373	6.253	4.700

Sumber: Badan Perpustakaan dan ArsipProvinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Jumlah pengunjung perpustakaan di Provinsi Kepulauan bangka Belitung relatif menurun pada tahun 2015 yang berjumlah 718 sedangkan di tahun sebelumnya pada tahun 2014 berjumlah 3.355 pengunjung, kemudian meningkat sangat besar dari tahun sebelumnya pada tahun 2016 berjumlah 6.373. Jumlah pengunjung perpustakaan seperti yang tergambar pada tabel di atas pada tahun 2017 menurun menjadi 6.253 dan tahun 2018 jumlah pengunjung relatif menurun dari tahun sebelumnya menjadi 4.700 pengunjung.

Tabel II.136
Jumlah Perpustakaan Tahun 2014 s.d. 2018 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1.	**Perpustakaan Milik Pemda**	1.415	1.415	1.415	1.415	1.415
-	Perpustakaan Pemda (Perpustakaan Prov, Kab/Kota	8	8	8	8	8
-	Perpustakaan Desa/Kelurahan	309	309	309	309	309
-	Perpustakaan Kelurahan	85	85	85	85	85
a	PERPUSTAKAAN SEKOLAH NEGERI DAN SWASTA					
-	Perpustakaan SD Negeri	750	750	750	750	750
-	Perpustakaan SMP Negeri	161	161	161	161	161
-	Perpustakaan SMA Negeri	85	85	85	85	85
-	Perpustakaan Peguruan Tinggi Negeri	5	5	5	5	5
-	Perpustakaan Umum	8	8	8	8	8
-	Perpustakaan Khusus	4	4	4	4	4
2.	**Perpustakaan Non Pemda**	525	525	525	525	525
a	PERPUSTAKAAN SEKOLAH NEGERI DAN SWASTA					
-	Perpustakaan SD Swasta	42	42	42	42	42
-	Perpustakaan SMP Swasta	43	43	43	43	43
-	Perpustakaan SMA Swasta	46	46	46	46	46
-	Perguruan Tinggi Swasta	14	14	14	14	14

Sumber : Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Berdasarkan pada tabel di atas menjelaskan bahwa Perpustakaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di kategorikan menjadi 2, yaitu Perpustakaan milik Pemda dan Perpustakaan Non Pemda. Dari tabel di atas Jumlah Perpustakaan Milik Pemda ada beberapa bagian yaitu, Perpustakaan Pemda Prov, Kabupaten/Kota, Perpustakaan Desa/Kelurahan, Perpustakaan Kelurahan, Perpustakaan Sekolah Negeri dan Swasta dan di dalam Perpustakaan Sekolah Negeri dan Swasta terdapat Perpustakaan yang termasuk Pemda seperti, Perpustakaan SD Negeri, Perpustakaan SMP Negeri, Perpustakaan SMA

Negeri. menjadi beberapa perpustakaan yang termasuk pemda, Perpustakaan Perguruan Tinggi Negeri juga termasuk dalam Perpustakaan milik Pemda, dari keseluruhan pada Tabel II.136 menunjukkan bahwa Perpustakaan Milik Pemda selama 5 (lima) tahun terakhir sebanyak 1.415 buah. Sedangkan Perpustakaan Non Pemda selama 5 (lima) tahun terakhir sebanyak 525 buah. Dari tabel di atas yang termasuk dalam Perpustakaan Non Pemda yaitu, Perpustakaan SD Swasta, Perpustakaan SMP Swasta, Perpustakaan SMA swasta dan Perpustakaan Perguruan Tinggi Swasta.

22. Urusan Kearsipan

Tata kelola kearsipan daerah belum terkelola dengan baik. Hal ini terlihat dari persentase sistem kearsipan yang diterapkan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung baru mencapai 70 persen. Selain itu, kurangnya tenaga arsiparis dan masih rendahnya kapasitas sumber daya manusia di bidang kearsipan dan terbatasnya sarana dan prasarana kearsipan. Hal ini terlihat dari jumlah arsiparis yang terdapat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2018 sebanyak 22 arsiparis, sedangkan di Dinas Kearsipan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hanya ada 4 orang arsiparis. Dari sisi jumlah dibandingkan dengan jumlah Perangkat Daerah sebanyak 42, angka ini masih belum mencukupi.

Tabel II.137
Urusan Kearsipan Tahun 2014 s.d. 2018

No.	Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	10%	15%	25%	30%	36%
2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	5	10	10	35	35
3	LAKE (Laporan Audit Kearsipan Eksternal)	-	-	35	39	45,82

Sumber : Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Berdasarkan pada tabel di atas menjelaskan berapa Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku di Dinas Kearsipan dan perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2014 berjumlah 10 persen dan pada tahun 2015 berjumlah 15 persen, kemudian pada tahun 2016 berjumlah 25 persen meningkat di tahun 2017 menjadi 30 persen dan di tahun 2018 Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku meningkat menjadi 36 persen. Dari tabel di atas Peningkatan SDM pengelola Kearsipan pada tahun 2014 berjumlah 5 pengelola dan di tahun 2015-2016 peningkatan SDM pengelola kearsipan berjumlah 10 dan di tahun 2017-2018 berjumlah 35 pengelola. Tabel di atas dapat menjelaskan nilai LAKE (Laporan Audit Kearsipan Eksternal) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2014-2015 belum ada penilaian LAKE, di tahun 2016 LAKE (Laporan Kearsipan Ekternal) bernilai 35, pada tahun 2017 berjumlah 39 dan pada tahun 2018 berjumlah 45,82, nilai tersebut berpredikat buruk. Untuk meningkatkan nilai LAKE banyak aspek/sub aspek yang menjadi penilaian di antaranya di bawah ini.

1. Ketaatan Peraturan Perundang-Undangan, yang terdiri dari:
   a. tata naskah dinas;

b. klasiifikasi arsip;
c. sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis;
d. jadwal retensi arsip;
e. pedoman pengolahan arsip inaktif;
f. pedoman penyusutan arsip;
g. pedoman pengelolaan arsip vital;

2. Program Kearsipan.
3. Pengolahan Arsip Inaktif dengan Retensi Sekurang-kurangnya 10 tahun.
4. Penyusutan Arsip.
5. Pengelolaan Arsip Statis.
6. SDM Kearsipan.
7. Kelembagaan .
8. Prasarana dan Sarana Kearsipan.

23. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Koperasi, usaha kecil dan menengah memiliki peranan penting terhadap pencapaian target sasaran kinerja pembangunan, terutama dalam rangka peningkatan perekonomian masyarakat. Beberapa hal yang masih menjadi permasalahan mendasar pada urusan ini antara lain adalah: masih lemahnya pengawasan terhadap koperasi, kapasitas SDM Koperasi yang masih belum mantap, rendahnya akses anggota koperasi dan UMKM terhadap akses permodalan yang ada, belum optimalnya sarana pemasaran yang salah satunya melalui pasar tradisional, pemberdayaan kepada koperasi dan UMKM yang juga masih belum optimal, serta pengambangan skala usaha yang masih cenderung mengalami stagnasi.

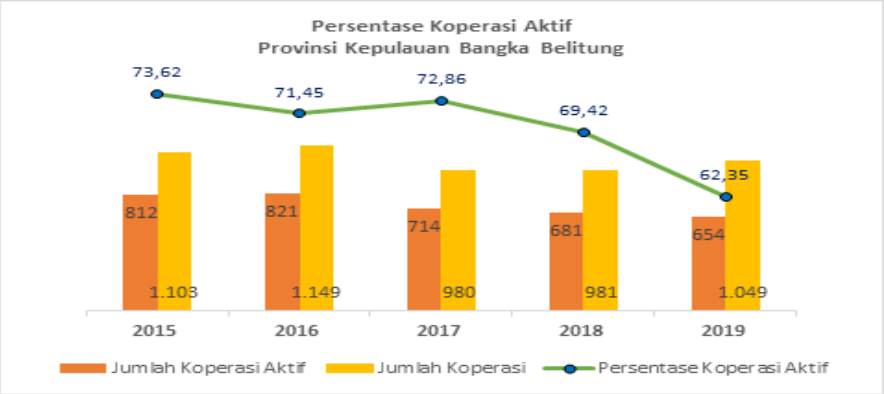
Tabel II.138
Persentase Koperasi Aktif Tahun 2015 s.d. 2019
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1.	Jumlah Koperasi Aktif	812	821	714	681	654
2.	Jumlah Koperasi	1.103	1.149	980	981	1.049
3.	Persentase Koperasi Aktif	73,62	71,45	72,86	69,42	62,35

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Persentase koperasi yang aktif di provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami penurunan semenjak tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, akan tetapi kembali meningkat di tahun 2019 dengan total jumlah koperasi sebanyak 1.049 koperasi. Akan tetapi tren jumlah koperasi yang aktif selama periode 5 tahun mengalami penurunan. Terhitung dari tahun 2017 tercatat 812 koperasi yang aktif, yakni sekitar 73,62% dari jumlah koperasi yang ada. Tahun 2018 kembali menurun menjadi 681 koperasi yang aktif, yakni sekitar 69,42% dari jumlah koperasi yang ada. Dan terakhir di tahun 2019 terjadi penurunan jumlah koperasi aktif menjadi 654 koperasi, dengan persentase 62,35% dari jumlah koperasi yang ada.

Grafik II.21
Persentase Koperasi Aktif Tahun 2015 s.d. 2019
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

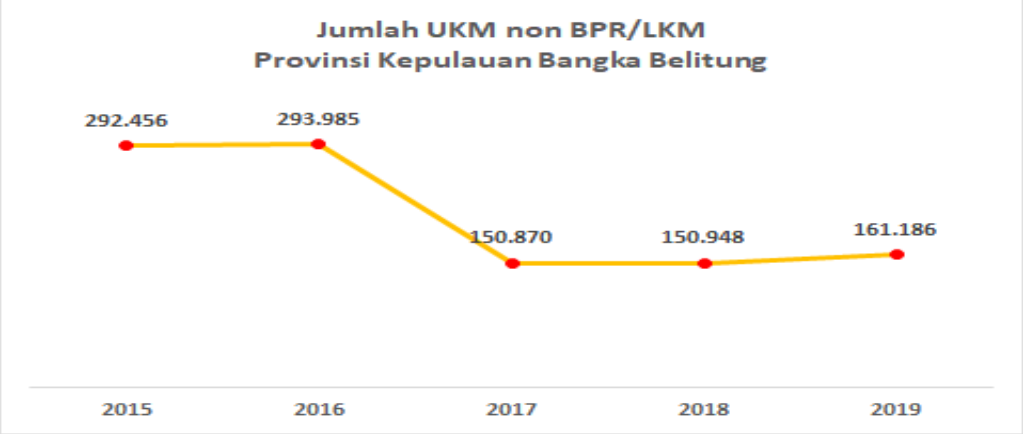
Tabel II.139
Jumlah UKM Non BPR/LKM Tahun 2015 s.d. 2019
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1.	Jumlah UKM	292.456	293.985	150.870	150.948	161.186

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Dari tabel di atas, jumlah UKM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tercatat menurun dari periode 2016 ke 2017. Hal tersebut dikarenakan proses perbaikan dan pembaharuan kualitas data UKM yang dicatat. Hal ini sesuai dengan tren jumlah UKM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama periode 2017 sampai dengan 2019 yang relatif mengalami peningkatan, yakni masing-masing sebesar 150.870 UKM (2017), 150.948 UKM (2018) dan 161.186 UKM (2019).

Grafik II.22
Jumlah UKM Non BPR/LKM Tahun 2015 s.d. 2019
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan

1. Urusan Kelautan dan Perikanan

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan provinsi dengan nomenklatur kepulauan pertama di Indonesia yang diapit oleh 2 (dua) pulau besar yaitu Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Wilayah laut Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kurang lebih 65,301.00 km^2 atau 79,80 persen yang memiliki potensi produksi (ton) dan produksi (ton), baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Adapun potensi pengembangan sumber daya kelautan dan perikanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dapat terlihat pada Tabel II.140.

Tabel II.140
Potensi Kelautan dan Perikanan
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1.	**Perikanan Tangkap (persentase)**	13,18	17,81	20,57	21,58	19,53
a	Potensi Produksi (ton)	1.059.000	1.059.000	1.059.000	1.059.000	1.059.000
b	Produksi (ton)	139.542,95	188.573,60	217.912,23	228.524,56	206.807.79
2.	**Perikanan Budidaya (persentase)**	0,33	0,35	0,25	0,71	0,54
a	Potensi Produksi (ton)	1.316.000	1.316.000	1.316.000	1.316.000	1.316.000
b	Produksi (ton)	4.305,29	4.618,87	3.305,00	9.340,93	7.150,66

Sumber: Statistik Perikanan Tangkap dan Budidaya DKP Prov. Kep. Babel Tahun 2020

Berdasarkan Tabel II.140 di atas, perkembangan produksi perikanan baik penagkapan maupun budidaya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2015-2019 bersifat fluktuatif. Pada tahun 2019 produksi perikanan budidaya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tercatat sebesar 7.150,663 ton, mengalami penurunan dari produksi tahun 2018 yang lalu sebesar 9.340,93 ton. Demikian pula dengan produksi perikanan tangkap yang mengalami penurunan tahun 2018 228.524,56 ton turun menjadi 206.807,79 ton.

Namun dari tabel diatas menunjukkan bahwa potensi besar untuk perikanan tangkap maupun perikanan budidaya masih belum optimal dalam pemanfaatannya. Adapun kendala yang dihadapi sebagai berikut:

1. masih banyak Nelayan yang menggunakan Kapal Trawl yang penggunaannya sudah dilarang karena merusak lingkungan laut (terumbu karang) dan meresahkan nelayan lainnya;
2. masih kurangnya pengawasan di laut karena luasnya perairan Bangka Belitung;
3. kebutuhan benih untuk kegiatan budidaya sebagian besar masih didapatkan dari luar Bangka Belitung;

4. pemanfaatan teknologi baru dalam kegiatan budidaya masih terbatas hal ini dikarenakan kurangnya SDM yang terlatih dan kurangnya permodalan untuk melakukan kegiatan usaha.

Berdasarkan Tabel II.141 sejak tahun 2015-2019 sudah ada kawasan konservasi yang dikelola meliputi wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai berikut:

1. Tahun 2017
   a. Kawasan Konservasi Perairan Gugusan Pulau-Pulau Momparang dan Perairan Sekitarnya Kabupaten Belitung Timur. Nomor SK 52/KEPMEN-KP/2017 Tanggal 22 Desember 2017, dengan status penetapan.
   b. Kawasan Pulau Panjang, Pulau Ketawai, Pulau Bebuar, pulau Gusung Asam dan Pulau Semujur Kabupaten Bangka Tengah. 188.45/268/DKP /2007 Tanggal 17 Juli 2017, dengan status pencadangan.
2. Tahun 2018
   Kawasan Konservasi Perairan Tuing Kabupaten Bangka188.44/739/DKP/2018 Tanggal 27 September 2018 dengan status pencadangan.
3. Tahun 2019
   Kawasan Konservasi Perairan Kabupaten Belitung 188.44/927/DKP/2019 Tanggal 15 Oktober 2019 (Review Pencadangan). Status masih dalam proses penetapan.

Tabel II.141
Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola (ha)
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015-2019

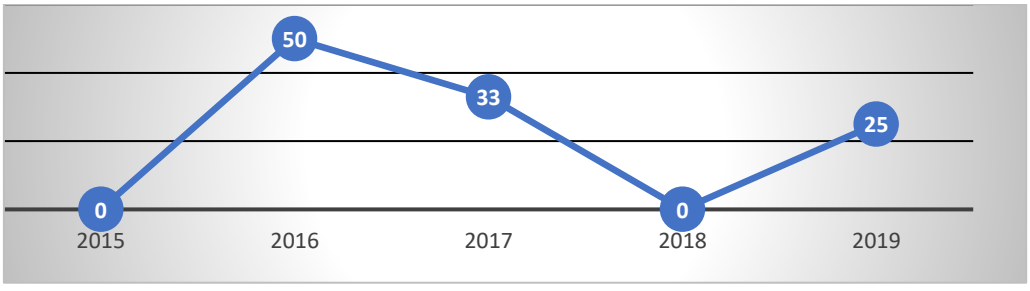
No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	*(2)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
1.	Jumlah kawasan konservasi yang dikelola	-	-	135.239,5	9.809,56	447.785,25

Sumber: DKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

a. Perikanan budidaya

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir produksi perikanan budidaya secara kuantitas mengalami peningkatan setiap tahunnya. Produksi yang meningkat secara signifikan berasal dari komoditas udang vaname untuk budidaya air payau, komoditas lele untuk budidaya air tawar dan kerang darah (kekerangan) untuk kegiatan budidaya laut. Peningkatan jumlah Perusahan pada beberapa kabupaten dan perluasan lahan budidaya vaname berpengaruh terhadap angka produksi yang dihasilkan.

Grafik II.23
Pertumbuhan Produksi Usaha Pengolahan
Hasil Perikanan Budidaya (persen) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 s.d. 2019



Sumber: DKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020
Keterangan: Tahun 2019 Angka Sementara

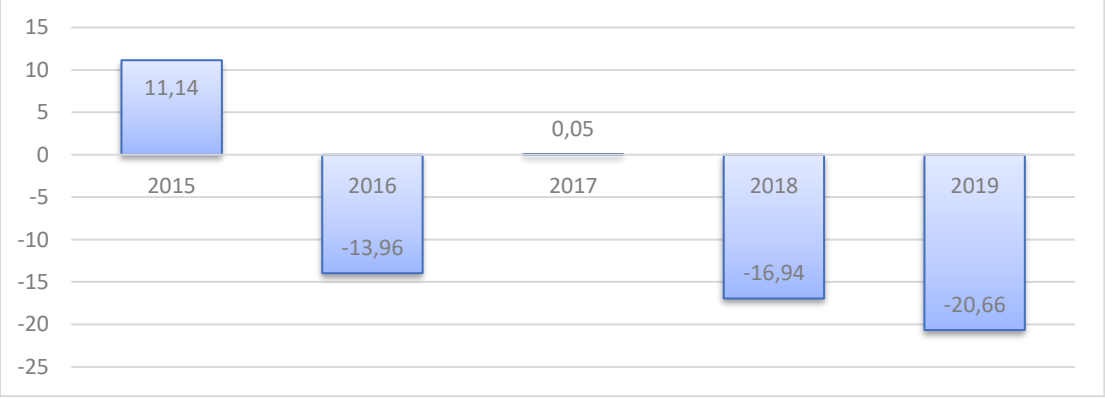
Kegiatan budidaya melalui wadah budidaya Bioflok menjadi salah satu alternative lain budidaya lele di lahan terbatas, menjadi salah satu penunjang kenaikan produksi pada komoditas lele Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2019 tercatat sebesar 7.150,66 ton. Produksi ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang mencapai 9.340,93 ton. Beberapa kendala masih dihadapi para pembudidaya diantaranya adalah masih kurangnya benih produksi dari dalam daerah, sehingga mengandalkan pasokan dari luar. Hal ini menyebabkan padat benih yang ditebar berkurang sebagaimana tersaji pada Grafik II.23.

b. Perikanan Tangkap

Potensi perikanan tangkap di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam skala nasional cukup besar hal ini dikarenakan luas wilayah laut Bangka Belitung yang mencapai 65,501 km²atau 80 % dari total wilayah daratan dengan panjang pantai 1,295.83 km. Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan pembagian Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) termasuk dalam WPP 711 Laut Cina Selatan yang potensinya mencapai 1,059,000 ton/tahun (sumber : KEP MEN KP Nomor : KEPULAUAN 45/MEN/2011 tentang Estimasi potensi sumberdaya Ikan pada masing-masing wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia).

Berdasarkan data statistik Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019, jumlah produksi perikanan tangkap di laut sebesar 206.807.79 Produksi perikanan tangkap di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami fluktuatif dari tahun 2012, produksi terendah terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 139.632,96 ton dan produksi tertinggi dicapai pada tahun 2018 yaitu sebesar 228.524,56 ton, hal ini menunjukkan sektor perikanan tangkap juga memberikan kontribusi yang tidak sedikit bagi perekonomian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Melihat sektor perikanan tangkap yang cukup besar dalam memberikan kontribusi bagi perekonomian masyarakat Bangka Belitung, maka sektor perikanan tangkap diharapkan terus berkembang dan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan tetap berlandaskan penangkapan secara lestari dan berkelanjutan.

Grafik II.24
Pertumbuhan Produksi Usaha Pengolahan
Hasil Perikanan Tangkap (persen)
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015-2019



Sumber: DKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020
Keterangan: Tahun 2019 Angka Sementara

Berdasarkan grafik di atas pada tahun 2019 produksi yang dihasilkan untuk perikanan tangkap hanya 19,53 persen dari total potensi produksi. Sementara itu, untuk perikanan

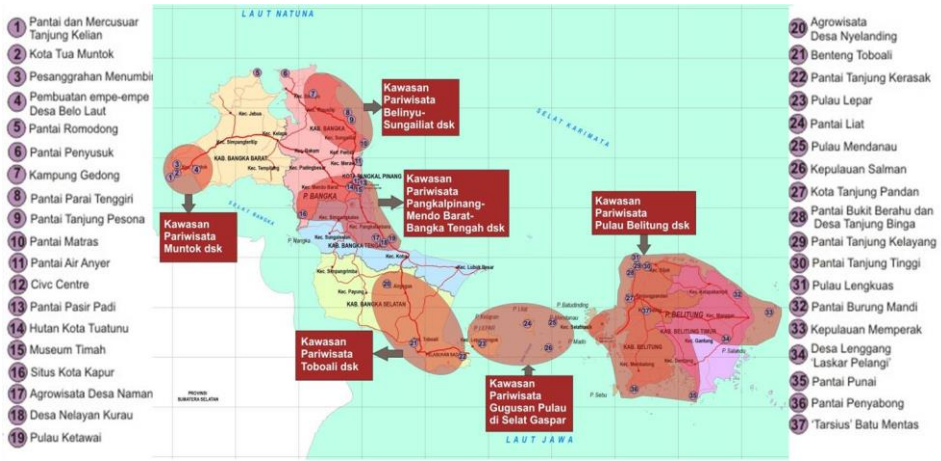
budidaya, hanya 0,54 persen dari total potensi. Artinya, masih sangat terbuka peluang untuk dilakukan peningkatan produksi baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya dalam rangka mensejahterakan masyarakat terutama pembudidaya dan nelayan.

2. Urusan Pariwisata

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki potensi pariwisata yang kaya dan bernilai tinggi dan saat ini mulai mengembangkan pariwisata sebagai salah satu sektor andalan bagi peningkatan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penyediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Sebagai sektor yang ramah lingkungan, pariwisata juga diharapkan dapat menjadi penopang kehidupan masyarakat yang saat ini masih mengandalkan pada sektor pertambangan.

Gambaran mengenai potensi pariwisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagaimana disajikan pada Gambar II.16 berikut.

Gambar II.16
Potensi Pengembangan Pariwisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Sumber: RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034

Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan pariwisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah kurang dikenalnya beberapa tempat wisata di kabupaten yang berada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibandingkan dengan kabupaten lainnya yang telah maju kepariwisataannya turut mempengaruhi kecilnya minat wisatawan untuk berkunjung, disamping juga faktor jarak tempuh dari kota serta fasilitas penunjang kepariwisataan, serta masih terbatasnya kompetensi SDM di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif

Tabel II.142
Kunjungan Wisatawan Tahun 2015 s.d. 2018
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	Jumlah	2015	2016	2017	2018
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1.	Wisatawan Dalam Negeri	256.700	257.595	295.688	362.279	417.818
2.	Wisatawan Luar Negeri	2.299	3.335	5.037	7.143	8.124
	Total	258.999	260.930	300.725	369.422	425.942

Sumber: BBDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Sesuai dengan kategori wisatawan yang dikeluarkan oleh BPS, di mana wisatawan dibagi menjadi 2 jenis yaitu wisatawan dalam negeri (domestik) dan wisatawan luar negeri (mancanegara). Jumlah wisatawan ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk 5 (lima) tahun terakhir cenderung meningkat dan itu sangat baik karena dapat meningkatkan perekonomian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tahun 2014 jumlah wisatawan sebanyak 258.999 orang dan ini meningkat secara bertahap setiap tahunnya menuju 425.942 orang di tahun 2018.

Tabel II.143
Jumlah Daya Tarik Wisata (DTW) di Kabupaten/Kota Tahun 2015 s.d. 2019
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	*(2)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
1.	Kabupaten Bangka	60	60	60	80	81
2.	Kabupaten Belitung	75	75	75	75	81
3.	Kabupaten Bangka Barat	47	47	47	46	47
4	Kabupaten Bangka Tengah	40	40	40	40	42
5	Kabupaten Bangka Selatan	56	56	56	56	66
6	Kabupaten Belitung Timur	120	120	120	120	120
7	Kota Pangkalpinang	19	19	19	25	25

Sumber: BBDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Tabel II.144
Rata-rata Lama Menginap Wisatawan (hari) Tahun 2015 s.d. 2019
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2015	2016	2017	2018
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(7)*
1.	Wisatawan Mancanegara	3,28	2,11	2,22	3,10
2.	Wisatawan Domestik	1,90	1,76	1,93	1,79

Sumber: BBDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Rata-rata lama menginap wisatawan mancanegara tahun 2017 selama 2,22 hari dan meningkat menjadi 3,10 hari pada tahun 2018, sedangkan rata-rata lama menginap wisatawan domestik selama 1,93 hari pada tahun 2017 dan menurun menjadi 1,79 hari pada tahun 2018. Rata-rata lama menginap wisatawan domestik cenderung lebih rendah bila dibandingkan dengan wisatawan mancanegara dikarenakan tujuan wisatawan domestik mengunjungi suatu daerah adalah dalam rangka mengunjungi teman atau keluarga maupun tugas kedinasan.

Tabel II.145
Jumlah Tenaga Kerja Sektor Pariwisata
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1.	Jumlah SDM Pariwisata yang terlatih dan tersertifikasi	200	325	445	599	1.007

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2020

Persentase tenaga kerja sektor pariwisata yang tersertifikasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hanya sebesar 8,87 persen di tahun 2015 dan menurun di tahun 2016 menjadi 4,84 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa jumlah tenaga kerja sektor pariwisata yang tersertifikasi masih jauh dari ideal untuk mendukung pelayanan pariwisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Jumlah tenaga kerja sektor pariwisata dan realisasi PAD sektor pariwisata Kabupaten Belitung lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, hal ini disebabkan oleh berkembangnya pariwisata di Kabupaten Belitung setelah ditetapkannya Pulau Belitung sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Tanjung Kelayang sebagai Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata dan Geopark Pulau Belitung sebagai Geopark Nasional.

Tabel II.146
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2013 – 2017

NO	KAB/KOTA	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1	PANGKALPINANG	7.336.894.862	8.801.420.374	9.631.350.478	9.954.137.659	11.583.060.799,00
2	BANGKA	3.599.872.745	4.136.429.771	4.236.244.364	4.850.669.654	4.496.786.900,33
3	BANGKA TENGAH	6.472.305.848	7.431.657.014	7.419.934.320	10.835.828.660	10.130.943.652,90
4	BANGKA BARAT	982.272.425	1.088.258.520	1.268.342.766	1.279.951.251	1.929.421.180,70
5	BANGKA SELATAN	880.910.600	1.292.168.800	1.254.853.300	1.228.007.952	1.453.701.050,00
6	BELITUNG	5.415.332.790	7.223.515.080	10.606.105.256	14.168.692.380	16.498.482.650,60
7	BELITUNG TIMUR	1.117.619.224	1.830.114.107	1.421.310.603	1.319.978.955	1.504.338.120,00
PAD 7 Kab/Kota		**25.805.208.493**	**31.803.563.666**	**35.838.141.086**	**43.637.266.511**	**47.596.734.354,00**
Kenaikan		**37,82**	**23,24**	**12,69**	**21,76**	**9,07**

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2018

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tahun 2011 sebesar 3,53 persen sedangkan pada tahun 2017 sebesar 4,06 persen terjadi kenaikan yang tidak signifikan dikarenakan selama kurun waktu 6 tahun terjadi kenaikan sebesar 0,53 persen sehingga hal ini perlu didukung dengan berbagai program/kegiatan pemerintah yang bersinergi dan berkesinambungan dimana sektor pariwisata bukan merupakan sektor penyumbang utama PDRB.

3. Urusan Pertanian

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 – 2034, Pasal 31 menyatakan bahwa Kawasan peruntukan pertanian adalah seluas 903.450 ha yang terdiri atas lahan peruntukan tanaman pangan 355.453 Ha, hortikultura 221.512 ha, perkebunan 316.383 Ha, dan peternakan 10.102 ha.

Tabel II.147
Luas Lahan (ha) menurut Jenis di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2018

Penggunaan Lahan		Luas (ha)
(1)		*(2)*
I.	**LAHAN PERTANIAN**	
I.1.	Lahan Sawah	25.093
	a. Irigasi	4.966
	b. Tadah hujan	17.181
	c. Pasang surut	390
	d. Lebak	2.556
I.2.	Lahan Bukan Sawah	1.148.319
	a. Tegal	97.930
	b. Ladang	30.416
	c. Perkebunan	394.408
	d. Hutan rakyat	43.661
	e. Pengembalaan	3.232
	f. Sementara tidak diusahakan	59.174
	g. Lain-lain	519.497
	Jumlah	1.664.018

Sumber: Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka 2019

Tabel II.148
Luas Lahan (ha) menurut Penggunaan Lahan Per-Kabupaten
di Prov. Kep. Bangka Belitung Tahun 2018

Penggunaan Lahan		Kabupaten							Luas Total (Ha)
		Bangka	Bangka Barat	Bangka Tengah	Bangka Selatan	Belitung	Belitung Timur	Pangkalpinang	
(1)		*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
I	**ILAHAN PERTANIAN**	**236.227**	**195.684**	**168.131**	**231.830**	**195.777**	**143.655**	**2.108**	**1.173.412**
	1.1 Lahan Sawah	**3.645**	**2.542**	**306**	**14.789**	**1.159**	**2.832**	**-**	**25.053**
	e. Irigasi	1.078	200	53	1.600	1.061	974	-	4.966
	f. Tadah hujan	943	2.342	253	11.687	98	1.858	-	17.181
	g. Pasang surut	390	-	-	-	-	-	-	390
	h. Lebak	1.054	-	-	1.502	-	-	-	2.556
		232.672	**193.142**	**167.825**	**217.041**	**194.618**	**140.824**	**2.108**	**1.148.319**
	h. Tegal	37.690	2.365	12.655	17.976	10.950	15.383	901	97.930
	i. Ladang	12.818	4.087	1.798	1.985	9.175	593	-	30.416
	j. Perkebunan	108.041	60.982	24.444	72.764	61.608	66.092	478	394.408
	k. Hutan rakyat	13.702	3.468	-	1.448	12.976	12.059	8	43.661
	l. Pengembalaan	-	1.049	-	557	417	1.208	1	3.232
	m. Sementara tidak diusahakan	27.544	15.820	-	5.590	2.502	7.309	410	59.174
	n. Lain-lain	32.697	105.371	128.918	116.689	96.990	38.180	311	519.497
II	**LAHAN NON PERTANIAN**	**58.841**	**92.747**	**597.80**	**128.878**	**33.592**	**107.036**	**9.732**	**490.607**
II.1	Jalan, Pemukiman, Perkantoran, Sungai, dll	58.841	92.747	59.780	128.878	33.592	107.036	9.732	490.607
	Jumlah	**295.068**	**228.431**	**227.911**	**360.708**	**229.369**	**250.691**	**11.840**	**1.664.018**

Sumber: Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka 2018

Permasalahan-permasalahan pada urusan pertanian di Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diantaranya; tingkat ketergantungan masyarakat Bangka Belitung terhadap bahan makanan pokok terutama tanaman pangan (padi dan palawija) sangat tinggi sehingga bahan makanan tersebut sebagian besar dipasok dari luar pulau Bangka Belitung, rendahnya produksi pertanian (khususnya padi) dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, rendahnya produksi sayuran, kurangnya jaminan harga terhadap produk hortikultura, kurangnya jaminan pasar seperti manggis yang termasuk dalam komoditi unggulan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kurangnya penangkar bibit lada pada saat bibit lada dalam polybag sudah mulai menarik minat masyarakat, kurangnya penangkar bibit karet, sehingga masyarakat harus mengirim dari luar daerah yang mengakibatkan harga bibit lebih tinggi (mahal), mata rantai perdagangan Tandan Buah Segar (TBS) terlalu panjang sehingga mengakibatkan harga yang diterima petani kelapa sawit tidak sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh Tim Penetapan Harga TBS Provinsi serta kualitas TBS yang diterima Perkebunan Kelapa Sawit (PKS) sangat rendah, meningkatnya persyaratan mutu hasil pertanian, rendahnya dukungan perbankan terhadap pengembangan pertanian, tingginya angka alih guna (konversi) lahan pertanian menjadi lahan non pertanian, dan tingginya angka kerusakan lahan, pertumbuhan yang cukup pesat dari negara produsen perkebunan lainnya serta minimnya peran Indonesia dalam sistem perdagangan dunia, satu dari negara produsen perkebunan lainnya serta minimnya peran Indonesia dalam sistem perdagangan dunia.

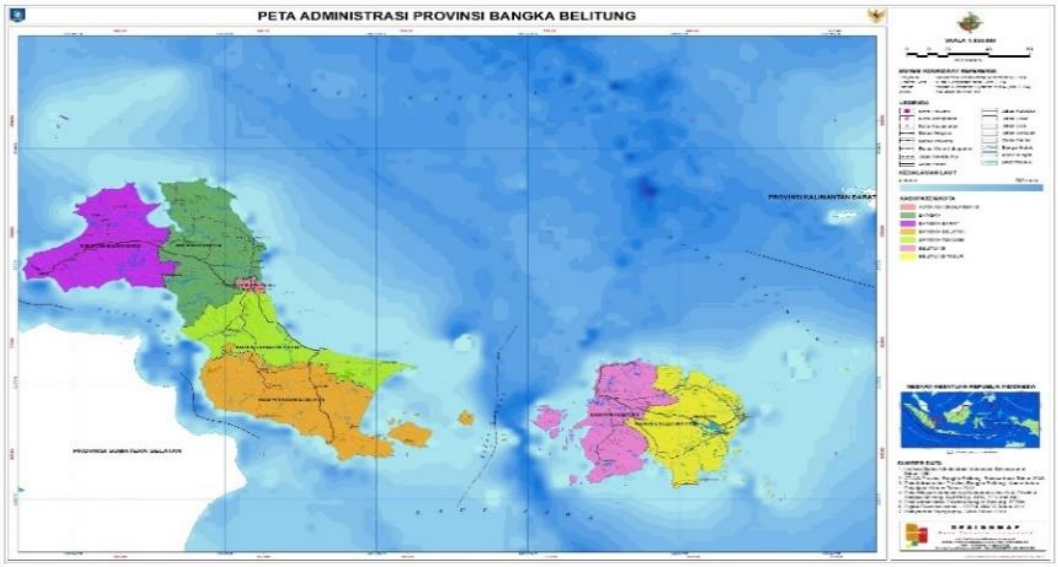
Tabel II.149
Produktivitas Padi Sawah di Kabupaten/Kota Tahun 2015-2019

No	Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1.	Kab. Bangka	3,27	2,66	3,19	2,66
2.	Kab. Belitung	2,75	2,45	2,15	2,50
3.	Kab. Bangka Barat	2,16	2,04	1,78	1,89
4.	Kab. Bangka Tengah	4,11	3,78	4,09	4,14
5.	Kab. Bangka Selatan	2,41	3,10	3,33	3,43
6.	Kab. Belitung Timur	3,52	2,13	2,96	2,62
7.	Kota Pangkal Pinang	-	-	-	-
	Prov. Kep. Bangka Belitung	2,70	2,79	2,98	3,06

Sumber : Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Sedangkan berdasarkan penggunaan lahan/*land use* atau *exiting area* menurut data statistik BPS tahun 2016 adalah luas lahan pertanian yang diusahakan 683.717 ha dari total luas lahan pertanian 1.186.652 ha. Berdasarkan data luasan areal baik RTRW maupun penggunaan lahan dapat ditelaah bahwa potensi pembangunan pertanian masih sangat memungkin untuk dikembangkan baik sebagai kawasan pertanian sub-sektor tertentu maupun pertanian terpadu. Secara terperincian penggunaan lahan/*land use* di provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana gambar berikut.

Gambar II.17
Peta Administrasi Prov .Kep. Bangka Belitung



Beberapa permasalahan yang perlu untuk mendapatkan perhatian dalam pembangunan pertanian selama periode 5 (lima) tahun dari tahun 2017 sampai dengan 2022 yang menjadi sebagian isu-isu strategis, adalah sebagai berikut:

1. belum optimalnya produksi dan produktivitas sub-sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, serta populasi dan produksi sub-sektor peternakan;
2. sumber-sumber benih yang bermutu dan unggul belum tersedia dalam tepat jumlah, waktu dan tepat sasaran;
3. standarisasi produk pertanian atau mutu/kualitas produk pertanian yang relatif masih rendah, yang berakibat rendahnya daya saing dan masih lemahnya jaringan informasi pasar menjadikan posisi tawar petani rendah;
4. Lahan Pertanian:
   (a) belum optimalnya pemanfaatan/produktivitas lahan yang tersedia untuk usaha pertanian;
   (b) konversi lahan pertanian/perubahan fungsi lahan pertanian untuk kebutuhan non-pertanian;
   (c) kecenderungan penurunan kualitas lahan, sebagai akibat pemakaian pupuk kimia serta pestisida yang tidak seimbang dan dilakukan secara terus menerus;
   (d) rata-rata kepemilikan lahan yang sempit;
   (e) lahan untuk usaha ternak yang belum cukup tersedia;
   (f) ketidakpastian status kepemilikan lahan.
5. ketersediaan infrastruktur, sarana dan prasarana dalam pendukung produksi pertanian (irigasi, jalan usaha tani, alsin dan pupuk) masih terbatas;
6. perubahan iklim global, berakibat terjadi perubahan musim, sehingga meningkatkan bencana alam dan perkembangan organisme penganggu tumbuhan (OPT);
7. sumber daya manusia dan kelembagaan pertanian
   (a) Terbatasnya dukungan sumber daya manusia, dari segi kualitas kompetensinya dalam menyerap/ mengadopsi serta menerapkan kemajuan teknologi dan informasi;

(b) Lemahnya kapasitas kelembagaan petani dan penyerapan teknologi pertanian, mengakibatkan petani tidak memiliki nilai/posisi tawar produk;
(c) Rendahnya minat generasi muda untuk mengembangkan dan terlibat dalam usaha di sektor pertanian;
(d) Belum Optimalnya peran penyuluh pertanian dalam peningkatan kapasitas SDM pertanian dalam upaya pengembangan, pemberdayaan, dan penguatan kelembagaan petani serta pengembangan kapasitas petani dalam rangka meningkatkan daya saing petani;

8. terbatasnya/lemahnya petani dalam mengakses sumber-sumber permodalan dalam upaya mengembangkan usaha tani baik dalam proses produksi, pengolahan dan pemasaran produk-produk pertanian.

Kondisi terkini dan isu-isu strategis pembangunan pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dituangkan sebagai kebijakan pada sektor pertanian adalah:

1. kebijakan peningkatan produksi dan produktivitas komoditas strategis dan unggulan daerah (padi, jagung, cabai, bawang merah, sapi, lada dan karet);
2. kebijakan pengembangan produk pertanian yang berkualitas dan berdaya saing baik dalam skala nasional maupun internasional serta penyediaan bahan baku agroindustri;
3. kebijakan pengembangan dan penguatan sistem dan kelembagaan perbenihan/perbibitan;
4. kebijakan pengembangan infrastruktur, sarana prasarana pertanian sebagai dukungan pengembangan pertanian berkelanjutan;
5. kebijakan pengembangan sumber daya manusia pertanian yang unggul dan handal melalui peningkatan sistem penyuluhan, pendidikan dan latihan pertanian;
6. pengembangan kawasan berbasis pertanian mendukung program tematik: pengembangan lapangan pekerjaan (ketenagakerjaan); pengembangan kawasan strategis KTM Batu Betumpang, KTM Gantung; kebijakan dan implementasi perlindungan lahan pertanian berkelanjutan; penurunan angka kemiskinan dan penurunan inflasi di bidang pertanian;
7. kebijakan tata kelola kepemerintahan yang baik dan reformasi birokrasi.

4. Urusan Kehutanan

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.798/Menhut-II/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas +19.131 Hektar, Perubahan Fungsi Kawasn Hutan Seluas +10.878 Hektar dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan seluas +3.210 Hektar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Luas Kawasan Hutan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seluas 659.014,58 Hektar, berdasarkan fungsinya terdiri dari Hutan Konservasi 35.473,00 Ha, Hutan Lindung 189.965,00 Ha, Hutan Produksi 432.882,82 Ha, dan Hutan Produksi Konversi 692,58 Ha.

Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.1940/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/4/2017 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Sampai dengan Tahun 2016, Kawasan Hutan seluas 657.378,26 Ha, terdiri dari 35.750,84 ha Hutan Konservasi, 184.276,95 ha Hutan Lindung, 436.647,89 ha Hutan Produksi dan 692,58 ha Hutan Produksi Konversi.

Perkembangan luas kawasan hutan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada Tabel II.150.

Potensi Hasil Hutan Kepulauan Bangka Belitung, terdiri dari Hasil Hutan Kayu (HHK) dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). Hasil Hutan Kayu (HHK) terdiri dari jenis: meranti, ramin, membalong, mendaru, kerangas, kapuk, jelutung, pulai, mahang, manggeris, gelam, bakau, sengon, dan beberapa jenis dari kelompok rimba campuran lainnya. Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) terdiri dari: gaharu, madu alam, jamur, rotan, getah karet, tanaman bahan obat (pasak bumi), tanaman penghasil buah, tanaman penghasil minyak atsiri. Selain hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu, kawasan hutan memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai wisata alam dan jasa lingkungan untuk mendukung pariwisata. Bahkan telah ditetapkan 2 (dua) kawasan hutan yang dikelola melalui skema izin pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) Juru Seberang dan HKm Bukit Peramun di Kabupaten Belitung sebagai *Geopark* Nasional.

Tabel II.150
Luas Hutan Tahun 2015 s.d. 2019 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Luas Kawasan Hutan	2015 (ha)	2016 (ha)	2017 (ha)	2018 (ha)	2019 (ha)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
Hutan Produksi	432.882,82	432.882,82	436.647,89	436.647,89	436.647,89
Hutan Lindung	189.965	189.965	184.276,95	184.276,93	184.276,93
Hutan Konservasi	35.473	35.473	35.750,84	35.760,84	35.760,84
Hutan Produksi Konversi	692,58	692,58	692,58	692,58	692,58
Jumlah	**654.167,14**	**654.167,15**	**657.378,26**	**657.378,26**	**657.378,26**

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Potensi Kepulauan Bangka Belitung terhadap komoditas sektor kehutanan adalah: meranti, ramin, membalong, mandaru, kerangas, kapuk, jelutung, pulai, mahang, gelam, bakau, madu alam dan rotan.

Kontribusi Kehutanan dan Penebangan Kayu (Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan) dalam PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2018 (dalam miliar rupiah), sebagai berikut: 2014 Rp190,0; 2015 Rp221,3; 2016 Rp239,0; 2017 Rp244,0; 2018 Rp266,2, terdapat kenaikan selama periode tahun 2014-2018. Kontribusi Kehutanan dan Penebangan Kayu (Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan) dalam PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2018 (dalam miliar rupiah), sebagai berikut: 2014 Rp.143,6; 2015 Rp155,2; 2016 Rp158,5; 2017 Rp158,5; 2018 Rp167,2, terdapat kenaikan selama periode tahun 2014-2018. (Sumber : Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Menurut Lapangan Usaha 2014-2018, BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018).

5. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memiliki peran penting dalam pembangunan daerah dalam rangka mendukung perekonomian daerah, keberhasilan pembangunan di bidang Pertambangan dan Energi sangat ditentukan oleh sistem, nilai dan budaya masyarakat yang secara bersama terhimpun pada berbagai sistem kebijakan dalam

pelaksanaan program-program pertambangan dan energi yang ada, termasuk potensi swasta harus dapat berperan aktif sebagai mitra pembangunan di bidang pertambangan dan energi, terwujudnya pembangunan di bidang pertambangan dan energi juga dipengaruhi berbagai faktor yang tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor Pertambangan dan Energi melainkan juga menjadi tanggung jawab berbagai sektor terkait. Untuk kekurangan energi listrik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pihak PT.PLN Persero telah melakukan percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2x30 Megawatt di Desa Air Anyir Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka dan 2 x 16,5 MW di Suge Kabupaten Belitung sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 71 Tahun 2006. Saat ini kedua Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) tersebut sudah beroperasi. Sementara itu, pada sektor pertambangan yang selama ini menjadi penopang utama perekonomian di Kepulauan Bangka Belitung, meskipun produksi pertambangan itu sendiri semakin berkurang saat ini, namun potensi yang dimiliki masih cukup besar.

Selain pertambangan timah, juga terdapat beberapa potensi pertambangan lainnya di di 6 (enam) Wilayah kabupaten kecuali Kota Pangkalpinang di Provinsi kepulauan Bangka Belitung. Dari 10 (sepuluh) potensi sumber daya alam, diketahui kapasitas potensi paling banyak adalah diatas sebesar 53.669.063.466, sedangkan untuk xenotim merupakan kapasitas potensi yang paling sedikit sebesar 697 ton sebagaimana tersaji pada Tabel II.151.

Tabel II.151
Potensi Bahan Galian Provinsi (ton)
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018

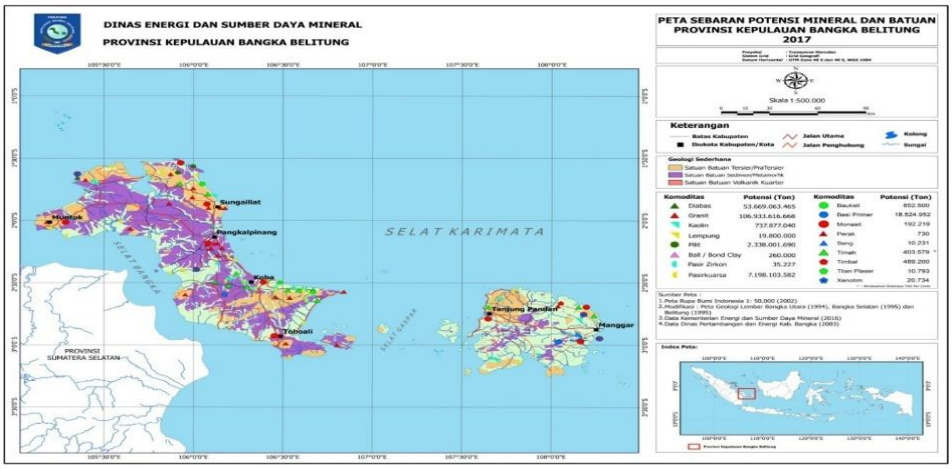
NO	JENIS BAHAN GALIAN	KAPASITAS POTENSI
(1)	*(2)*	*(2)*
1	Timah	5.280.682
2	Bauksit	852.500
3	Monasit	192.219
4	Xenotim	697
5	Diabas	53.669.063.466
6	Titan Plaser	10.974
7	Besi Primer	18.524.953
8	Seng	10.232
9	Timbal	849.250
10	Perak	731

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Untuk kekurangan energi listrik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah mendorong pihak PT. PLN Persero untuk melakukan percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2x30 Megawatt di Desa Air Anyir Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka dan 2 x 16,5 MW di Suge Kabupaten Belitung sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 71 Tahun 2006. Sementara itu, pada sektor pertambangan yang selama ini menjadi penopang utama perekonomian di Kepulauan Bangka Belitung, meskipun produksi pertambangan itu sendiri semakin berkurang saat ini, namun potensi yang dimiliki masih cukup besar. Selain pertambangan timah, juga terdapat beberapa potensi pertambangan lainnya di Kepulauan Bangka Belitung, sebagaimana tersaji pada Tabel II.152 di bawah ini. Data potensi bahan galian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

dibawah ini masih menggunakan data tahun 2016, hal ini karena pembaharuan data tersebut dilakukan setiap empat tahun sekali.

Gambar II.18
Peta Sebaran Potensi Mineral dan Batuan
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017



Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, 2017

Tabel II.152
Potensi Bahan Galian Tahun 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

NO	JENIS BAHAN GALIAN	POTENSI
(1)	*(2)*	*(2)*
1	Kaolin	737,878.040
2	Pasir kwarsa	7.198.103.582
3	Diabas	53.669.063.465
4	Granit	106.933.616,668

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Sementara itu, hingga tahun 2019 dari 6 (enam) potensi Energi Baru dan Terbarukan (EBT) yang tidak ada hanya jenis energi. Sedangkan untuk jenis energi surya potensinya sampai dengan tahun 2050 sebesar 220 MW sebagaimana tersaji pada Tabel II.153.

Tabel II.153
Potensi Energi Baru dan Terbarukan Tahun 2019 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

NO	JENIS ENERGI BARU DAN TERBARUKAN (EBT)	POTENSI
(1)	*(2)*	*(2)*
1	Energi Surya	220 MW
2	Bio Mass	72,45 MW
3	Energi Angin	1,67 MW
4	Energi Air	-
5	Energi Biogas POME	9,4 MW
6	Energi Biodiesel	5 MW

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Tabel II.154
Rasio Elektrifikasi Kabupaten/Kota
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015-2019

No.	Kab/ Kota	Tahun	
		2018	2019
1	Kabupaten Bangka	100,00	99,99
2	Kabupaten Bangka Tengah	100,00	99,99
3	Kabupaten Bangka Barat	99,48	99,99
4	Kabupaten Bangka Selatan	100,00	99,99
5	Kabupaten Belitung	100,00	99,99
6	Kabupaten Belitung Timur	100,00	99,99
7	Kota Pangkalpinang	100,00	99,99
8	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	100,00	99,99

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

6. Urusan Perdagangan

Perdagangan merupakan salah satu sektor yang diharapkan oleh Kepulauan Bangka Belitung dalam menjaga stabilitas perekonomian secara makro. Kondisi perkembangan ekspor dan impor di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada Tabel II.155.

Tabel II.155
Perkembangan Ekspor dan Impor Tahun 2014 s.d. 2019
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (juta U$)

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	*(2)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
1.	**Ekspor**					
	(Juta US $)	**1.191,05**	**1.140,13**	**1.784,13**	**1.774,90**	**1.397,33**
	(Juta Ton)	**360,09**	**306,53**	**836,47**	**815,56**	**650,63**
	Timah	973,2	963,8	1.264,8	1.361,12	
	Non Timah	217,9	326,8	349,7	413,77	
2.	**Impor**					
	(Juta US $)	**49,89**	**132,01**	**74,36**	**15,92**	**16,03**
	(Juta Ton)	**81,68**	**150,50**	**133,99**	**243,11**	**144,74**
	Migas	31,4	41,4	52,4	232,09	
	Non Migas	18,5	90,61	18,1	6,44	

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Ekspor di Kepulauan Bangka Belitung masih sangat didominasi oleh ekspor logam timah. Pada tahun 2015, ekspor Kepulauan Bangka Belitung mencapai 963,8 juta USD, namun pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 963,8 juta USD dan pada tahun 2017 mengalami

penngkatan sampai dengan 1.264,8 juta USD, namun pada tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 1.361,12 juta USD.

Sementara itu, impor Kepulauan Bangka Belitung didominasi oleh impor non migas. Pada tahun 2015, impor mencapai 18,5 juta USD dan meningkat pada tahun 2016 menjadi 90,61 juta USD dan namun pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 18,10 juta USD. Namun kembali menunjukkan penurunan pada tahun 2018 menjadi 6,44 juta USD, namun pada tahun 2018 mengalami sedikit penurunan menjadi 16,7 juta USD. Berdasarkan kondisi ekspor dan impor Kepulauan Bangka Belitung tersebut, maka neraca perdagangan dalam kurun waktu 2012- 2017 tersebut dalam kondisi surplus neraca perdagangan.

7. Urusan Perindustrian

Pengembangan sektor industri di Kepulauan Bangka Belitung dilakukan melalui pengembangan kawasan. Beberapa kawasan yang ada di Kepulauan Bangka Belitung yang akan dikembangkan menjadi kawasan industri antara lain:

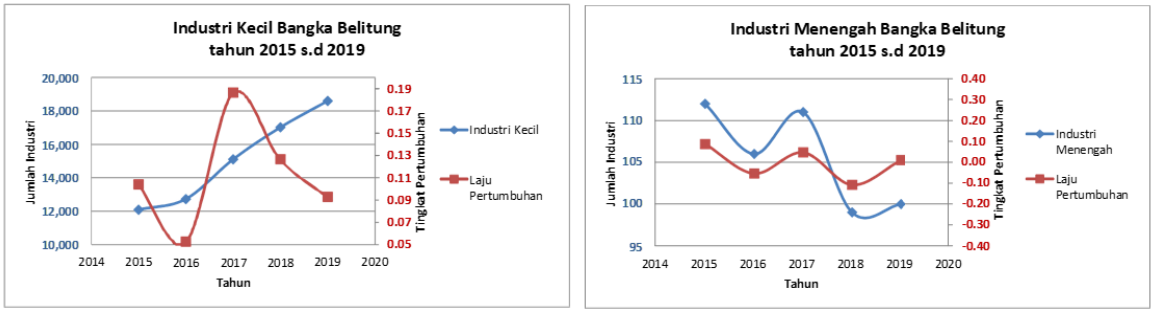
1. kawasan industri dan pelabuhan Teluk Kelabat Belinyu, Kabupaten Bangka;
2. kawasan pelabuhan dan industri terpadu Tanjung Berikat (Kecamatan Lubuk Besar), Kabupaten Bangka Tengah;
3. kawasan industri dan pelabuhan terpadu (KIPT) Muntok di Kawasan Tanjung Ular di Kabupaten Bangka Barat;
4. kawasan Bandar Udara Depati Amir Pangkalanbaru dan Bandar Udara H. AS Hanandjoeddin Tanjungpandan;
5. kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Batu Betumpang, Kabupaten Bangka Selatan;
6. kawasan minapolitan Tukak Sadai dan Lepar Pongok, Kabupaten Bangka Selatan;
7. kawasan pelabuhan dan industri Sadai, Kabupaten Bangka Selatan;
8. kawasan industri terpadu Suge dan pelabuhan Tanjung Batu di Kecamatan Badau dan Membalong Kabupaten Belitung;
9. kawasan minapolitan Selat Nasik, Kabupaten Belitung;
10. kawasan industri perikanan Tanjung Binga, Kabupaten Belitung;
11. kawasan terpadu mandiri (Kecamatan Gantung) Kabupaten Belitung Timur;
12. kawasan pelabuhan ASDP Manggar – Ketapang, Kabupaten Belitung Timur;
13. kawasan Industri Terpadu Air Kelik (KIAK), Kabupaten Belitung Timur;
14. kawasan pariwisata Tanjung Kelayang – Tanjung Tinggi, Kabupaten Belitung; dan
15. kawasan lintas timur Pulau Bangka.

Tabel II.156
Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah Tahun 2014 s.d. 2019
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1.	Industri Kecil	12.094	12.737	15.108	17.024	18.607
	Laju pertumbuhan	0,10	0,05	0,19	0,13	0,09
2.	Industri Menengah	112	106	111	99	100
	Laju pertumbuhan	0,09	-0,05	0,05	-0,11	0,01

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Grafik II.25
Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah Tahun 2014 s.d. 2019
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

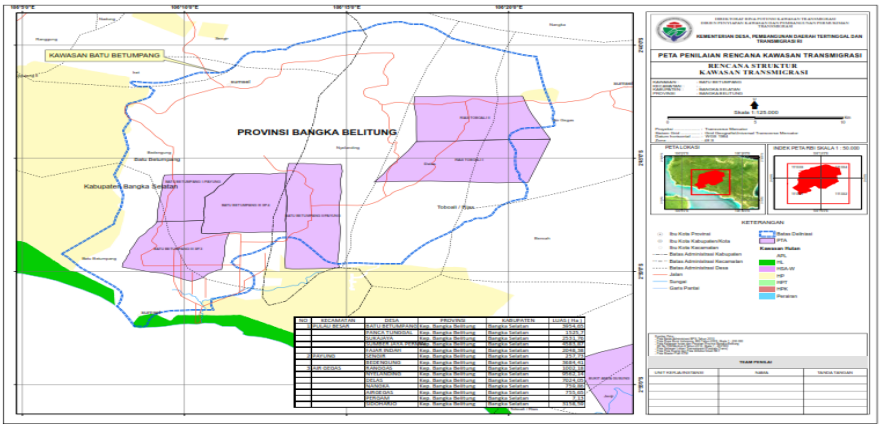
Berdasarkan Tabel II.156 dan Grafik II.25, laju pertumbuhan industri kecil selama periode 5 tahun terakhir cenderung meningkat. Laju pertumbuhan Industri kecil tahun 2015 sebesar 0,10 persen dan secara konsisten naik sebesar 0,05 persen ditahun 2016, tahun 2017 naik sebesar 0,19 persen, tahun 2018 naik sebesar 0,13 persen dan tahun 2019 kembali naik sebesar 0,09 persen.

Sementara itu pada kegiatan industri menengah selama rentang waktu 2015 sampai dengan 2019, laju pertumbuhan industri menengah tercatat cenderung fluktuatif. Tahun 2015 tercatat 0,09 persen dan menunjukan penurunan jumlah di tahun 2016 menjadi -0,56 persen, kembali mengalami perbaikan di tahun 2018 ke angka 0,05 persen, akan tetapi tahun 2018 kembali menurun ke angka -0,11 persen dan di tahun 2019 kembali menunjukkan angka positif ke 0,01 persen.

8. Urusan Transmigrasi

Pada urusan transmigrasi terdapat kawasan terpadu mandiri Batu Betumpang yang juga merupakan salah satu Kawasan Strategi Provinsi dengan luas 41.100,3 ha. Kawasan Kota Terpadu Mandiri harus memperhatikan ketentuan/kriteria yakni kawasan tersebut tidak berada di kawasan hutan. Berdasarkan SK Penunjukkan Kawasan Hutan di Kabupaten Bangka Selatan (SK Menhut No. 357/Menhut-II Tahun 2004) dapat dilihat bahwa di dalam kawasan tidak memiliki status kawasan hutan. Berdasarkan SK tersebut pada kawasan ini berada dalam area penggunaan lain (APL).

Gambar II.19
Peta Penilaian Rencana Kawasan Transmigrasi



Tabel II.157
Penggunaan Lahan di Kawasan Batu Betumpang

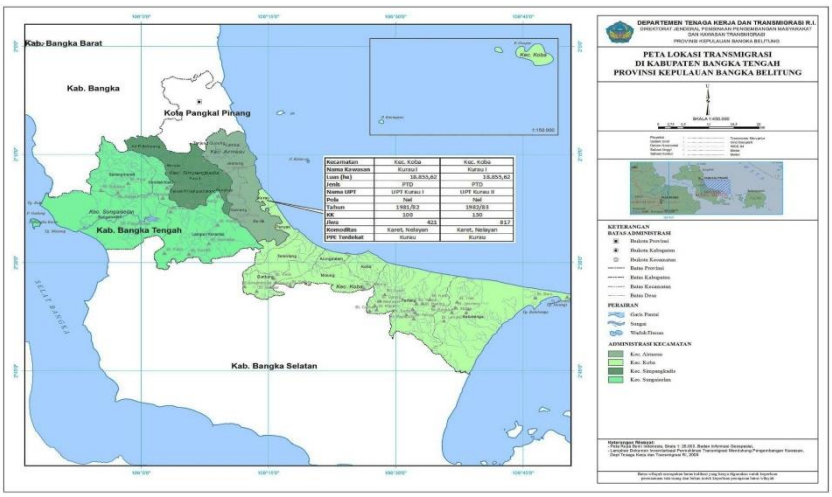
Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	%
(1)	*(2)*	*(3)*
Hutan	2.512,20	6,11%
Hutan Rawa	3.731,56	9,08%
Vegetasi Pantai	6,04	0,01%
Kebun	6.787,10	16,51%
Pemukiman	842,28	2,05%
Semak Belukar	4.046,02	9,84%
Tambak	3,57	0,01%
Pertambangan/Bekas Tambang	572,35	1,39%
Tanah Kosong	5,96	0,01%
Tegalan/Ladang	22.593,22	54,97%
Total	**41.100,3**	**100,00%**

Sumber: Peta SPOT 5 dan Kecamatan Dalam Angka 2007 (diolah)

Transmigrasi di Pulau Bangka dimulai sejak tahun 1981, dimana daerah tujuan transmigrasi adalah Kabupaten Bangka dengan lokasi di Kawasan Mudel (UPT Batu Rusa Tengah) dan saat ini telah diserahkan kepada kepada pemerintah daerah, kemudian telah berkembang menjadi kawasan permukiman perkotaan sehingga batasan dahulu merupakan kawasan transmigrasi sudah tidak terlihat lagi.

Perkembangan transmigrasi di Kabupaten Bangka Tengah awalnya ditempatkan sejumlah 100 kepala keluarga (421 jiwa) yang berasal dari Provinsi Jawa Tengah dan Transmigrasi daerah setempat yang ditempatkan di UPT Kurau, dengan bidang usaha adalah nelayan, dan pada tahun 1982, 1983 Kabupaten Bangka Tengah dijadikan lagi daerah tujuan Transmigrasi dengan sejumlah 150 kepala keluarga (817 jiwa) yang berasal dari wilayah setempat, dengan bidang usaha yang sama yaitu nelayan.

Gambar II.20
Peta Lokasi Transmigrasi Kabupaten Bangka Tengah

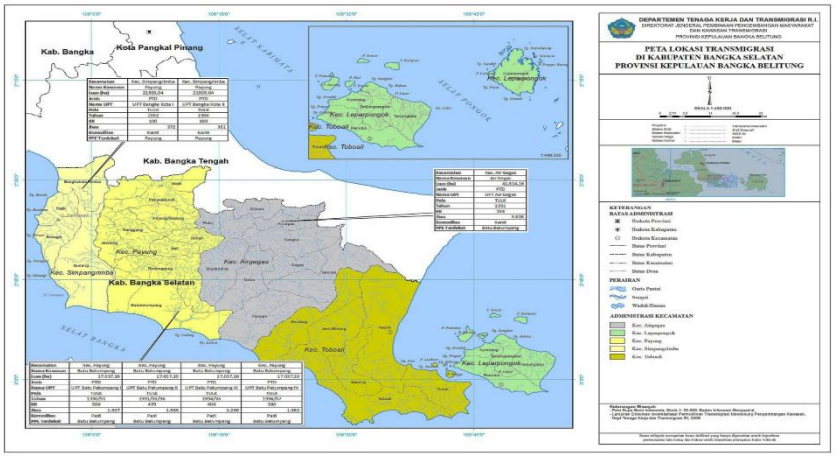


Sumber: Profil Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Babel, 2016

Kabupaten Bangka Selatan dijadikan tempat transmigrasi mulai pada tahun 1982-1983 dengan jumlah transmigrasi sebanyak 298 kepala keluarga (1376 jiwa) yang berasal dari Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan wialayah setempat, yang bergerak dibidang usaha pertanian, yang ditempatkan di UPT Rias Toboali I, dan pada tahun 1986 dan tahun 1991 di UPT Rias Toboali II ditempatkan lagi transmigrasi sebanyak 350 kepala keluarga (1284 jiwa), yang berasal dari Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Transmigrasi wilayah setempat, yang bergerak di bidang usaha pertanian.

UPT Batu Betumpang/Payung selama empat periode (Tahun 1990-1991, 1991-1993-1996, 1994-1995, dan tahun menjadi daerah tujuan transmigrasi yang berasal dari Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta dan Bali Kabupaten tujuan penempatan transmigrasi terbesar adalah di Kabupaten Bangka Selatan dimana dari 4.396 kepala keluarga sebanyak 2.877 kepala keluarga atau 65,45 persen di tempat Bangka Selatan.

Gambar II.21
Peta Lokasi Transmigrasi di Kabupaten Bangka Selatan



Sumber: Profil Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Babel, 2016

Ada beberapa titik yang menjadi tujuan transmigrasi di Pulau Bangka yang salah satunya yaitu UPT Rias dan UPT Bukit Anda di Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan. Sedangkan pada Tahun 2014 ada penempatan transmigrasi di UPT Jebus sebanyak 43 kepala keluarga terdiri dari 10 KK transmigrasi daerah asal Provinsi DIY, 10 KK dari Provinsi Jawa Timur dan 23 KK dari transmigrasi daerah setempat dari Desa Jebus Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat, lebih lengkapnya data transmigrasi di Pulau bangka dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.158
Kondisi Transmigrasi di Wilayah Pulau Bangka

No.	Nama UPT	Lokasi	Jml KK	Jml Jiwa	Asal Trans	Bidang Usaha	Thn Penempatan	Ket
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
1	Kurau I	Kab. Bangka Tengah	100	421	Jateng, Lokal	Nelayan	1981-1983	Belum terbit sertifikat lahan karena tumpang tindih dengan kebun sawit perusahaan
2	Kurau II	Kab. Bangka Tengah	150	817	Kurau, Lokal	Nelayan	1982-1983	
3	Rias Toboali I	Kab. Bangka Selatan	298	1376	Jateng, Jabar, Lokal	Pertanian	1982-1983	
4	Rias Toboali II	Kab. Bangka Selatan	350	1284	Jateng, Jabar, Lokal	Pertanian	1991. 1986	
5	Batu Betumpang I/Payung	Kab. Bangka Selatan	500	1917	Jateng, Jabar, Jatim, DIY, Lokal	Pertanian	1990-1991	

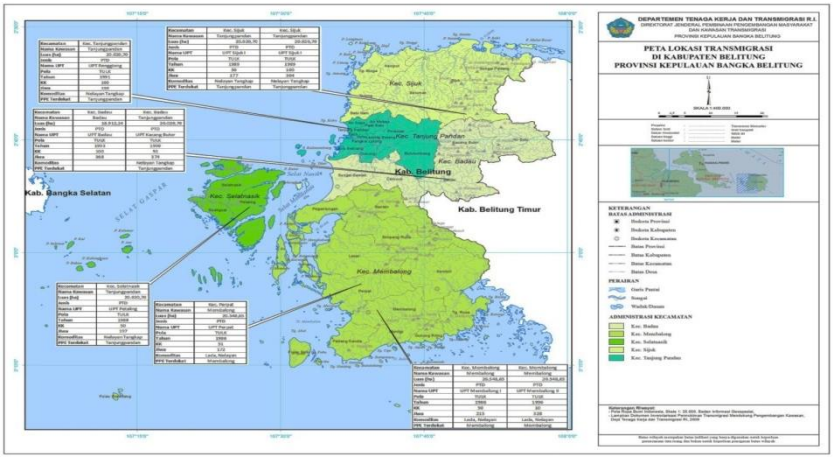
No.	Nama UPT	Lokasi	Jml KK	Jml Jiwa	Asal Trans	Bidang Usaha	Thn Penempatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6	Batu Betumpang II/Payung	Kab. Bangka Selatan	499	1958	Jateng, Jabar, Jatim, DIY, Bali, Lokal	Pertanian	1991-1993-1996	
7	Batu Betumpang III/Payung	Kab. Bangka Selatan	400	1280	Jateng, Jabar, Jatim, Bali Lokal	Pertanian	1994-1995	
8	Batu Betumpang IV/Payung	Kab. Bangka Selatan	380	1382	DKI, Bali, Jabar, Jatim, Jateng, Lokal	Pertanian	1996-1997	
9	Bangka Kota I	Kab. Bangka Selatan	100	372	Jateng, Jabar, Jatim, Lokal	Pertanian	1992	
10	Bangka Kota I	Kab. Bangka Selatan	100	361	Jabar, Jateng	Pertanian	1994	
11	PERMIS	Kab. Bangka Selatan	100	356	Jateng, Jabar, Jatim, Lokal	Pertanian	1995	
12	Bukit Anda	Kab. Bangka Selatan	100	391	Jateng	Pertanian	2004	
13	Bukit Anda	Kab. Bangka Selatan	50	166	Wonosobo	Pertanian	2006	
14	Jebus	Kab. Bangka Barat	43	158	DIY, Jatim, Lokal	Pertanian	2014	

Sumber: Profil Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Babel, 2016

Pulau Belitung yang meliputi 2 wilayah Kabupaten yaitu Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur, dijadikan tempat transmigrasi mulai pada tahun 1986-1993 dengan asal transmigran dari Provinsi Jateng, Jatim, Jabar, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Bali dan Lokal dengan menempati 9 UPT, dengan bidang usaha sektor pertanian, Untuk lebih jelasnya keberadaan kawasan transmigrasi di Kabupaten Belitung, dapat dilihat pada Tabel II.158.

Gambar II.22

Peta Lokasi Transmigrasi Kabupaten Belitung



Sumber: Profil Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Babel, 2016

Tabel II.159

Kondisi Transmigrasi di Wilayah Pulau Belitung

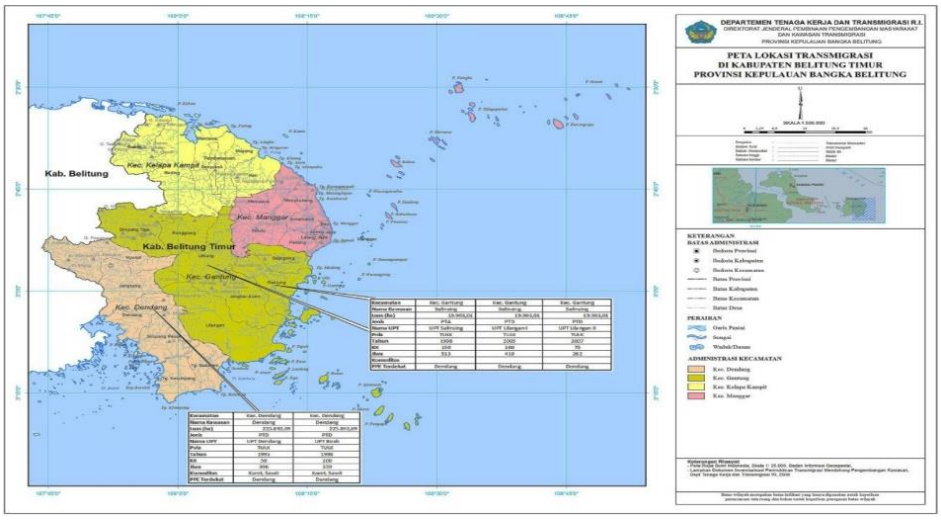
No.	Nama UPT	Lokasi	Jml KK	Jml Jiwa	Asal Trans	Bidang Usaha	Thn Penempatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Perpat	Kab. Belitung	51	172	Jateng	Pertanian	1986	Belum terbitnya sertifikat lahan karena tumpang tindih dengan lahan timah
2	Membalong I	Kab. Belitung	50	215	Jateng	Pertanian	1986	
3	Membalong II	Kab. Belitung	100	328	Jatim, Jateng	Pertanian	1996	
4	Petaling, Selat Nasik	Kab. Belitung	50	197	Jateng, Jatim	Pertanian	1988	
5	Sijuk I	Kab. Belitung	50	177	Jabar, Bali	Pertanian	1989	
6	Sijuk II	Kab. Belitung	100	304	Bali	Pertanian	1989	

No.	Nama UPT	Lokasi	Jml KK	Jml Jiwa	Asal Trans	Bidang Usaha	Thn Penempatan	Ket
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
7	Kacang Butor	Kab. Belitung	93	374	Jateng	Pertanian	1990	
8	Renggiang	Kab. Belitung	100	310	Jatim, Jateng, DIY, Lokal	Pertanian	1991	
9	Badau	Kab. Belitung	100	368	Jabar, DKI, Jateng	Pertanian	1993	
10	Dendang	Kab. Belitung Timur	50	206	Jateng, Lokal	Pertanian	1995	
11	Lilangan I	Kab. Belitung Timur	100	513	Jabar, DKI	Pertanian	1996	
12	Lilangan II	Kab. Belitung Timur	150	513	DIY, Jabar, Jateng	Pertanian	2005	
13	Birah	Kab. Belitung Timur	100	339	DKI, Jatim	Pertanian	1998	
14	Selinsing	Kab. Belitung Timur	100	416	Jabar, Lokal	Pertanian	2005	
15	Selinsing	Kab. Belitung Timur	75	262	Jabar	Pertanian	2007	
	Jumlah		**1269**	**4694**				

Sumber: Profil Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Babel, 2016

Kabupaten Belitung Timur program transmigrasi di mulai tahun 1995, yang jadi tempat tujuan transmigrasi adalah UPT Dendang, dengan jumlah transmigrasi sebanyak 50 kepala keluarga (206 jiwa), berasal dari Provinsi Jawa Tengah, dan berasal dari transmigrasi wilayah setempat. Pada tahun 1996 yang dijadikan tempat transmigrasi adalah UPT Lilangan I, dengan jumlah transmigrasi sebanyak 100 kepala keluarga (513 Jiwa), yang berasal dari Provinsi jabar dan DKI. Pada tahun1998 yang dijadikan daerah tujuan transmigrasi adalah Lilangan II, dengan jumlah transmigrasi sebanyak 150 kepala keluarga (513 jiwa) berasal dari Provinsi Jawa Barat, DKI, dan Jawa Tengah. Pada tahun1998 UPT Birah, menjadi daerah tujuan transmigrasi dari asal Provinsi Jatim, dan DKI dengan jumlah transmigrasi adalah 100 kepala keluarga (339 jiwa).

Gambar II.23
Peta Lokasi Transmigrasi Kabupaten Belitung Timur



Sumber: Profil Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Babel, 2016

Pada tahun 2005 dan 2007 di Kabupaten Belitung Timur yang di jadikan daerah transmigrasi adalah UPT Selinsing, dengan jumlah transmigrasi 100 kepala keluarga (410 jiwa) berasal dari Provinsi Jawa Barat, dan Transmigrasi berasal dari wilayah setempat. Untuk tahun 2007jumlah transmigrasi yang di tempatkan di UPT Selingsing sebanyak 75

kepala keluarga(262 jiwa) yang berasal dari Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, dan transmigrasi dari wilayah setempat, bergerak di bidang pertanian.

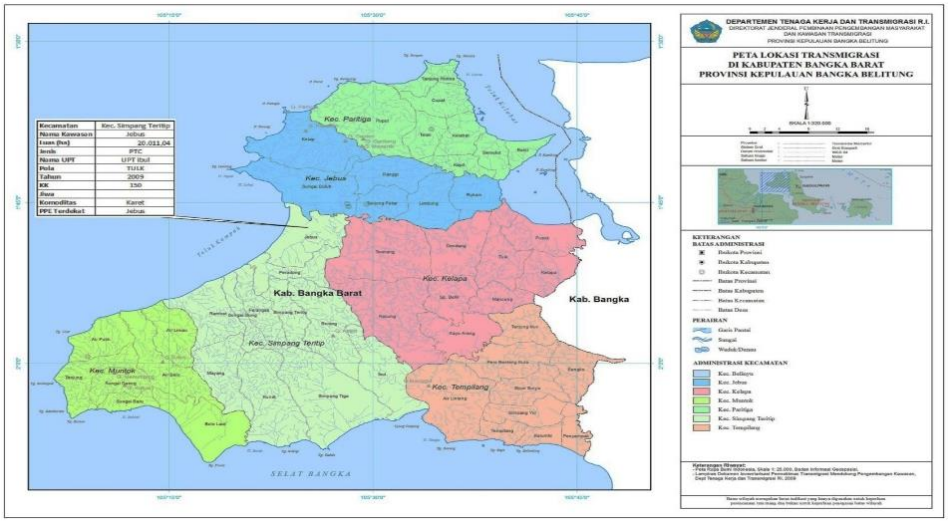
Potensi Wilayah transmigrasi di Kabupaten Belitung Timur adalah :

1. Perkebunan : lada, sawit, karet, coklat, durian,dan kopi
2. Pertanian : sayur mayur, padi, jagung,dan kedelai
3. Perikanan : tambak, keramba,dan rumput laut
4. Peternakan : sapi, kambing, dan unggas.

Lokasi Transmigrasi Bina, ada di:

1. Kecamatan : Gantung
2. Desa : Selinsing
3. Dusun : Danau Merantih
4. Luas Areal : 1.500 ha
5. Daya Tampung : 175 Kepala Keluarga (KK)

Gambar II.24
Peta Lokasi Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat



Sumber: Profil Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Babel, 2016

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

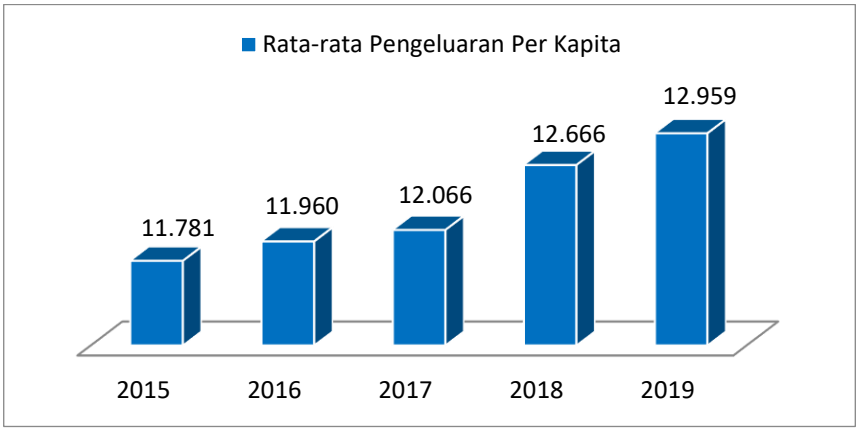
2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita

Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita menggambarkan jumlah pengeluaran rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pengeluaran konsumsi perkapita juga dapat mengindikasikan tingkat kesejahteraan masyarakat. Kemampuan ekonomi rumah tangga melalui cara penggunaan pendapatan yang dibelanjakan/pengeluaran untuk kebutuhannya, maka rata-rata pengeluaran per kapita pengeluaran konsumsi rumah tangga cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Hingga pada tahun 2019, rata-rata pengeluaran per kapita penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang disesuaikan mencapai Rp.12.959.000 per tahun meningkat dari tahun sebelumnya sebesar Rp.293.000 dan menempati peringkat ke lima

tertinggi di Indonesia sebagaimana disajikan pada Grafik II.26.

Grafik II.26
Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita (ribu rupiah)
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015-2019



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

2. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) memberikan gambaran tentang kemampuan petani dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran kebutuhannya. NTP juga dapat mengindikasikan tingkat kesejahteraan petani. Berdasarkan data dapat diketahui bahwa kecenderungan NTP di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sepanjang tahun 2015-2019 mengalami penurunan dengan rasionilasi tukar petani ditampilkan pada Tabel II.160.

Tabel II.160
Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2015 s.d. 2019
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1	Indeks Yang Diterima Petani (lt)	121,95	120,77	116,43	106,13	103,96
2	Indeks Yang Dibayar Petani (lb)	116,47	119,09	122,09	125,73	129,05
3	Rasio	1,05	1,01	0,96	0,84	0,80

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Berdasarkan Tabel II.160 maka diperoleh kondisi NTP di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memperlihatkan perkembangan yang belum menggembirakan. Sepanjang tahun tahun 2015-2016, konsisi menunjukkan indeks yag diterima petan lebih besar daripada indeks yang dibayar petani. Selanjutnya pada tahun 2019, rasio NTP mencapai level terendah selama lima tahun terahkir yaitu sebesar 0,80. Hal ini disebabkan indeks yang diterima petani lebih rendah dari indeks yang dibayar petani, sehingga kondisi ini mempengaruhi tingkat kesejahteraan petani di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

3. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita (Persentase Konsumsi RT untuk Non Pangan)

Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita (persentase konsumsi RT untuk non pangan)menjelaskan berapa besar konsumsi rumah tangga non pangan perkeluarga per

tahun. Sebagaimana diperlihatkan pada Tabel II.161 dapat dijelaskan bahwa konsumsi rumah tangga non pangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung mengalami peningkatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir, tahun 2018 yaitu sebesar Rp709.094 dan tahun 2019 menjadi sebesar Rp758.333. Selain itu, dilihat dari rasio perbandingan antara total pengeluaran dan total pengeluaran konsumsi RT Non-Pangan sepanjang kurun waktu 2015-2017 adalah menurun. Namun mulai tahun 2018-2019 kembali mengalami peningkatan.

Tabel II.161
Persentase Konsumsi RT Non-Pangan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015-2020

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1	Total Pengeluaran Konsumsi RT Non-Pangan	539.290	615.498	639.949	709.094	758.333
2	Total pengeluaran	1.118.101	1.211.879	1.360.994	1.419.495	1.509.974
3	Rasio	0,482	0,508	0,470	0,500	0,502

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Selanjutnya sebagaimana diperlihatkan pada Tabel II.162 menunjukkan bahwa besaran total pengeluaran non-pangan pada setiap kabupaten/kota di lingkup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019 menunjukkan kondisi dengan angka relatif sangat bervariasi. Nilai total tersebut menggambarkan pola pikir atau kebiasaan penduduk setempat terkait perilaku pengeluarannya. Apabila suatu penduduk dalam suatu wilayah/daerah nilai pengeluaran pangannya lebih besar dari pada nilai pengeluaran non-pangan, maka daerah tersebut dapat dikatakan secara relatif sebagai daerah berkembang, tetapi apabila pengeluaran pangan lebih kecil dari pada nilai pengeluaran non-pangan maka daerah tersebut dapat dikatakan relatif maju. Total pengeluaran konsumsi RT pangan dan total pengeluaran serta rasio tertinggi di Kota Pangkalpinang dan terendah di Kabupaten Bangka Selatan.

Tabel II.162
Indikator Pengeluaran Non Pangan Perkapita Tahun 2019 menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019

No	Kabupaten/Kota	Total Pengeluaran Konsumsi RT Non-Pangan	Total pengeluaran	Rasio
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	Kabupaten Bangka	674.074	1.441.834	0,468
2	Kabupaten Bangka Barat	630.236	1.315.113	0,479
3	Kabupaten Bangka Selatan	584.929	1.302.257	0,449
4	Kabupaten Bangka Tengah	716.195	1.425.107	0,503
5	Kabupaten Belitung	887.524	1.667.213	0,532
6	Kabupaten Belitung Timur	855.459	1.678.367	0,510
7	Kota Pangkalpinang	1.055.919	1.884.819	0,560
	Provinsi	**758.333**	**1.509.974**	**0,502**

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

4. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Pertumbuhan investasi merupakan hal yang sangat penting dalam upaya peningkatan penyerapan tenaga kerja yang sekaligus akan mengurangi pengangguran. Adapun gambaran serapan tenaga kerja yang bekerja di perusahaan PMA/PMDN, jumlah

PMA/PMDN, dan daya serap kerja di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sepanjang tahun 2015-2019 kecenderungan bersifat fluktuatif. Pada tahun 2016 merupakan jumlah tenaga kerja yang paling banyak bekerja sebanyak 16.264 dan jumlah PMA/PMDN sebanyak 156. Sementara itu, berbeda dengan potret tahun 2019 jumlah PMA/PMDN yang paling banyak, namun jumlah tenaga kerja yang diserap hanya sebanyak 5.499 dengan rasio sebesar 8,68 sebagaimana disajikan pada Tabel II.163.

Tabel II.163
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	*(2)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
1	Jumlah tenaga kerja yang berkerja pada perusahaan PMA/PMDN	8.255	16.264	3.543	4.512	5.499
2	Jumlah seluruh PMA/PMDN	104	156	235	411	633
3	Rasio daya serap tenaga kerja	79,37	104,26	15,07	10,97	8,68

Sumber: DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

1. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dihitung untuk mengetahui tingkat ketersediaan sarana jalan dapat memberi akses tiap kendaraan. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan adalah perbandingan panjang jalan terhadap jumlah kendaraan.

Tabel II.164
Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Tahun 2014 s.d. 2018
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1	Panjang Jalan Provinsi	899,33	899,33	899,33	899,33	850,99
2	Jumlah Kendaraan	395.951	398.065	381.193	421.792	413.919
3	**Rasio**	**0,0022**	**0,0022**	**0,0023**	**0,0021**	**0,0020**

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Perhubungan

Tabel II.165
Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Kabupaten/Kota di
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018

No	Kabupaten/Kota	Panjang Jalan	Jumlah Kendaraan	Rasio
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	Kabupaten Bangka	N.A	81.821	-
2	Kabupaten Bangka Barat	700,920	43.430	0,016
3	Kabupaten Bangka Selatan	633,970	42.442	0,013
4	Kabupaten Bangka Tengah	346,720	44.006	0,007
5	Kabupaten Belitung	666,024	71.557	0,009
6	Kabupaten Belitung Timur	880,880	45.617	0,019
7	Kota Pangkalpinang	850,990	85.346	0,009
	Prov. Kep. Bangka Belitung	**4.079,504**	**413.919**	**0,0098**

Sumber: Dinas PUPR, 2018 (Untuk Kabupaten Bangka Belum Terisi Masih dianalisis)*

Tabel II.166 di bawah ini menunjukkan jumlah penumpang angkutan laut baik kedatangan dan keberangkatan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa baik kedatangan maupun keberangkatan penumpang yang menggunakan angkutan laut mengalami penurunan yang cukup signifikan.

Tabel II.166
Jumlah Penumpang Angkutan Laut (Jiwa/Orang)

Jenis Pelayaran	Jumlah Penumpang Angkutan Laut (Orang)				
	2013	2014	2015	2016	2017
1. Luar Negeri					
a. Embarkasi	-	-	-	-	-
b. Debarkasi	-	-	-	-	-
2. Dalam Negeri					
a. Embarkasi	118266	77783	54183	32729	33167
b. Debarkasi	108150	64383	48030	32293	29183
Jumlah/ *Total*	**545840**	**142166**	**102213**	**65022**	**62350**

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

2. Luas Wilayah Produktif

Luas wilayah produktif di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggambarkan ketersediaan lahan yang produktif untuk dikelola dan dikembangkan dalam rangka peningkatan produktivitas ekonomi dan kesejahteraan. Persentase seluas wilayah produktif di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disajikan pada Tabel II.167.

Tabel II.167
Rasio luas Wilayah Produktif Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah Produktif	Luas Seluruh Wilayah Budidaya	Rasio
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	Kabupaten Bangka	233.977 ha	295.068 ha	0,79
2	Kabupaten Bangka Barat	218.878 ha	282.061 ha	0,78
3	Kabupaten Bangka Selatan	231.828 ha	360.707 ha	0,64
4	Kabupaten Bangka Tengah	164.227 ha	212.677 ha	0,77
5	Kabupaten Belitung	195.776 ha	229.369 ha	0,85
6	Kabupaten Belitung Timur	139.850 ha	250.691 ha	0,56
7	Kota Pangkalpinang	2.203 ha	11.840 ha	0,19
Jumlah		**1.186.652 ha**	**1.542.414 ha**	**0,73**

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

3. Infrastruktur

Pengembangan infrastruktur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami peningkatan pembangunan. Pengembangan infrastruktur seperti jalan, prasarana transportasi, dan kelistrikan diharapkan dapat mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tabel II.168
Infrastruktur Tahun 2013 s.d. 2018 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Infrastruktur	2013	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
1.	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	4,25	5,83	3,21	n/a	n/a	n/a
2.	Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bus	26	26	26	n/a	n/a	n/a
3.	Ketaatan terhadap RTRW	75	75	100	n/a	n/a	80,14
4.	Persentase Penduduk berakses airbersih	29,29	64,98	46,22	n/a	n/a	87,24
5.	Rasio daya tersambung pada rumah tangga	69,13	67,95	80,96	n/a	n/a	n/a
6.	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik	92,81	80,96	88,96	n/a	n/a	n/a
7.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	0,65	0,66	0,68	n/a	n/a	n/a
8.	Panjang jalan dilalui roda 4	0,93	0,95	0,90	n/a	n/a	n/a

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

1. Angka Kriminalitas

Hakikat manusia sebagai satu-satunya mahluk yang memiliki akal dan pikiran di dunia ini menjadikan manusia selalu mempunyai cara untuk memenuhi segala kebutuhannya. Era modernisasi dan globalisasi telah menghapus batasan-batasan yang ada antar negara di dunia. Berbagai informasi dan pengaruh dari suatu negara dapat masuk dengan mudah ke negara lainnya. Sehingga jarak dan waktu pun saat ini tidak memiliki batasan. Akibatnya negara-negara yang tidak memiliki pertahanan atau filter yang kuat, tidak dapat memilah mana pengaruh yang baik dan pengaruh yang tidak baik. Selain memberi kemudahan di kehidupan manusia modernisasi juga menimbulkan masalah sosial. Kemiskinan, kejahatan, pelacuran, alkoholisme, kecanduan dan perjudian merupakan gejala penyakit sosial yang harus di berbatas dari muka bumi. Indonesia pun sudah mulai banyak terkena proses dari akulturasi negara-negara barat.

Modernisasi sangat cepat merubah budaya Indonesia yang ketimuran dan di kenal dengan sopan santunnya menjadi lebih kebaratan dengan kebebasannya. Modernisasi banyak memberi perubahan pada berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Dampak yang juga sangat besar dari proses modernisasi adalah meningkatnya angka kriminalitas. *Crime* atau kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentangnya. Ada banyak faktor penyebab yang bisa melatar belakangi seseorang melakukan tindakan kriminal, diantaranya yaitu: pertentangan dan persaingan kebudayaan, perbedaan ideologi politik, kepadatan dan komposisi penduduk, perbedaan distribusi kebudayaan, perbedaan kekayaan dan pendapatan, mentalitas yang labil, serta faktor dasar seperti faktor biologis, psikologis dan emosional. Masyarakat modern yang sangat kompleks menumbuhkan aspirasi-aspirasi materiel yang tinggi dan sering disertai oleh ambisi sosial yang tidak sehat. Dambaan pemenuhan kebutuhan materiel yang melimpah tanpa mempunyai kemampuan untuk mencapainya dengan jalan yang wajar, mendorong individu untuk melakukan tindakan kriminal, sungguh pun demikian trend tindakan pidana menurun akan tetapi masih ada tindak pidana yang

dilakukan oleh masyarakat hal itu dapat di lihat dari jumlah kejahatan pidana 207 kasus atau 25,37 persen dari 816 kasus di 2016 menurun menjadi 609 kasus pada 2017. Pada tahun 2018 terjadi penurunaan sebesar 45,65 persen atau 331 kasus. Sedangkan data registrasi Polisi Daerah Kepulauan Bangka Belitung mengungkapkan bahwa kejadian kejahatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama periode tahun 2014-2018 cendrung berflukturasi.

Data dalam 5 tahun terakhir menunjukkan bahwa jumlah tindak pidana berfluktuasi dari tahun ke tahun. Demikian pula penyelesaian tindak pidana, secara umum masih berkisar antara 50 sampai 60 persen tindak pidana yang dapat diselesaikan. Sejumlah faktor penyebab banyaknya jumlah tindak pidana dan belum maksimalnya persentase penyelesaian tindak pidana antara lain banyaknya orang yang mengalami ketertindasan akibat krisis berkepanjangan berujung pada tindak pidana. Selain itu juga dipicu oleh lemahnya kontrol sosial yang tidak diikuti dengan langkah penegakan hukum. Pada saat kontrol sosial melemah, juga terjadi demoralisasi pihak petugas yang mestinya menjaga keamanan. Aparat yang harusnya menjaga keamanan, seringkali justru melakukan tindak pelanggaran. Pada saat yang sama masyarakat belum atau tidak melihat adanya upaya yang berarti dari aparat keamanan sendiri untuk mengembalikan citranya.

Tabel II.169
Jumlah dan Penyelesaian Tindak Pidana Kejahatan
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 -2018

NO	JENIS KRIMINALITAS	TAHUN									
		2014		2015		2016		2017		2018*	
		JTP	PTP	JTP	PTP	JTP	PTP	JTP	PTP	JTP	PTP
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
1	Narkoba	188	197	227	192	107	54	257	132	121	75
2	Pembunuhan	9	8	9	10	2	2	10	8	2	2
3	Penculikan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Seksusal	40	28	58	55	22	13	75	70	7	5
5	Penganiayaan	73	46	88	53	25	8	75	62	10	8
6	Pencurian	148	71	188	77	71	21	70	35	47	21
7	Perampokan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Pemerasan	3	2	8	6	6	2	0	0	0	0
9	Penipuan	182	82	124	63	81	20	31	24	8	5
10	Pemalsuan Uang	0	0	0	0	1	0	33	0	33	30
11	Pembakaran	9	9	15	8	3	0	1	1	1	1
12	Penyelundupan	5	5	5	4	3	0	0	0	0	0
13	Lain-lain	1501	834	1756	1021	495	185	57	42	102	63
Total		**2158**	**1282**	**2478**	**1489**	**816**	**302**	**609**	**374**	**331**	**210**

Sumber: Kepolisian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019
Keterangan:
JTP = Jumlah Tindak Pidana
PTP = Penyelesaian Tindak Pidana

Ada beberapa pandangan mengenai perbuatan apa saja yang dapat dikatakan sebagai kejahatan. Kejahatan dalam pengertian yuridis dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan yang melanggar undang-undang atau ketentuan yang berlaku dan diakui secara legal. Secara kriminologi yang berbasis sosiologis, kejahatan merupakan suatu pola tingkah laku yang merugikan masyarakat (dengan kata lain terdapat korban) dan suatu pola tingkah laku yang mendapatkan reaksi sosial dari masyarakat.

Data dalam 5 tahun terakhir menunjukkan bahwa jumlah tindak pidana berfluktuasi dari

tahun ke tahun. Demikian pula penyelesaian tindak pidana. secara umum masih berkisar antara 50 sampai 60 persen tindak pidana yang dapat diselesaikan. Sejumlah faktor penyebab banyaknya jumlah tindak pidana dan belum maksimalnya persentase penyelesaian tindak pidana antara lain banyaknya orang yang mengalami ketertindasan akibat krisis berkepanjangan berujung pada tindak pidana. Selain itu juga dipicu oleh lemahnya kontrol sosial yang tidak diikuti dengan langkah penegakan hukum. Pada saat kontrol sosial melemah, juga terjadi demoralisasi pihak petugas yang mestinya menjaga keamanan. Aparat yang harusnya menjaga keamanan, seringkali justru melakukan tindak pelanggaran. Pada saat yang sama masyarakat belum atau tidak melihat adanya upaya yang berarti dari aparat keamanan sendiri untuk mengembalikan citranya.

2. Jumlah Demo

Kriminalitas atau kejahatan bukan merupakan peristiwa herediter (bawaan sejak lahir, warisan). Tingkah laku kriminal itu bisa di lakukan siapa saja, baik wanita maupun pria. Dapat berlangsung pada usia anak, dewasa maupun lanjut umur. Kejahatan dan tindakan kriminalitas telah menjadi masalah sosial tersendiri bagi hampir seluruh tatanan masyarakat dunia. Terlebih lagi pada saat sekarang ini maraknya kasus-kasus kriminalitas yang terjadi dimana pelakunya adalah seorang remaja. Pelaku tindakan kriminal saat ini tidak hanya didominasi orang dewasa namun anak pada usia remaja juga sudah banyak yang melakukan tindakan kriminal. Peran remaja yang diharapkan dapat melanjutkan pembangunan dan kemajuan bangsa ini pada kenyataannya melakukan hal-hal yang di larang oleh hukum banyak remaja yang melaukan perbuatan yang sangat tidak di harapkan sebagai penerus generasi bangsa. Kenyataan yang terjadi pada saat ini tindakan penyimpangan yang dilakukan remaja tidak hanya sebatas kasus kenakalan remaja namun sudah menjurus pada tindakan kriminal. Bentuk tindakan kenakalan remaja yang terjadi biasanya seperti tauran/perkelahian dan seks bebas. Namun saat ini muncul tindakan-tindakan kriminal yang di lakukan remaja seperti pencurian, pencabulan, pemerkosaan, penyalahgunaan narkotika, penipuan bahkan tindakan pembunuhan.

Aksi demonstrasi dilakukan oleh banyak orang dan biasanya dilakukan oleh mahasiswa, buruh, atau anggota suatu organisasi. Demonstrasi ini merupakan salah satu cara kelompok tertentu menyuarakan idenya dan tidak heran aksi ini kerap menimbulkan kerugian meskipun tujuannya bisa dibilang cukup baik, “agar suara didengar”. Faktor Penyebab Demonstrasi Kegiatan aksi unjuk rasa tidak terjadi begitu saja, ada banyak faktor yang melatar belakanginya. Mengacu pada pengertian demonstrasi, adapun beberapa faktor penyebab terjadinya demonstrasi adalah sebagai berikut:

1. Ketidakadilan Sosial
   Isu ketidakadilan sosial seringkali menjadi penyebab timbulnya gesekan di masyarakat yang berujung pada aksi unjuk rasa. Masyarakat yang merasa tidak mendapatkan keadilan sosial berkumpul untuk menyuarakan pendapat dan keinginannya. Dengan melakukan aksi ini para demonstran menuntun dan berharap akan mendapatkan keadilan yang lebih merata.
2. Ketidaksesuaian Pendapat
   Perbedaan pendapat yang sangat bertolak belakang antar masing-masing pihak dapat menyebabkan timbulnya aksi unjuk rasa. Demonstrasi dianggap dapat menjadi wadah untuk menyalurkan aspirasi sehingga dengan aksi demonstrasi diharapkan dapat menampung pendapat hingga tercapai tujuan bersama.

3. Aspirasi Masyarakat yang Belum Terpenuhi

   Demontrasi merupakan salah satu bentuk aksi masyarakat dalam memantau kinerja para pengelola negara. Dengan adanya demonstrasi akan membuat para pengelola negara lebih sigap dalam memenuhi aspirasi masyarakat.

Jumlah demonstrasi yang terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung relatif sedikit daripada provinsi lain. Hal ini menggambarkan bahwa kecenderungan stabilitas keamanan bermasyarakat relative lebih aman. Jumlah demo Tahun 2014–2018 masih bersifat fluktuatif yang disebabkan terjadinya gejolak di masyarakat akibat inflasi atau daya beli masyarakat yang kurang tiap tahunnya. Diharapkan tahun–tahun yang akan datang lebih kondusif lagi. Jumlah demonstrasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditampilkan pada Tabel II.170.

Tabel II.170
Data Demonstrasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 -2018

NO	JENIS	TAHUN				
		2014	2015	2016	2017	2018*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1	Bidang Politik	5	4	12	5	2
2	Bidang Ekonomi	10	24	15	3	2
3	Pemogokan Kerja	2	3	-	-	1
4	Jumlah unjuk rasa	17	30	27	8	5

Sumber: Kepolisian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

3. Jumlah Perda yang mendukung Iklim Usaha

Perda merupakan sebuah instrument kebijakan daerah yang sifatnya formal, melalui perda dapat diindikasikan adanya insentif maupun disinsentif suatu kebijakan di daerah terhadap aktivitas perekonomian. Perda yang mendukung iklim investasi dibatasi yaitu perda terkait dengan perizinan, perda terkait dengan lalu lintas barang dan jasa, serta perda terkait dengan ketenagakerjaan. Sebagaimana diperlihatkan pada tabel II.170, dapat dijelaskan bahwa sepanjang kurun waktu 2008-2014 jumlah perda yang sahkan untuk mendukung iklim investasi sebanyak 10 Perda, mulai dari Perda pembentukan BUMD sampai dengan Perda penyertaan modal pada bank pembangunan daerah serta pemberian insentif dan kemudahan berinvestasi.

Tabel II. 171
Jumlah Peraturan Daerah yang mendukung Iklim Investasi
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Nomor	Peraturan Daerah
1	18 Tahun 2008	Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Bumi Bangka Belitung Sejahtera
2	11 Tahun 2008	Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada PT. Bank Perkreditan
3	12 Tahun 2008	Penambahan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Bank Sumsel

No	Nomor	Peraturan Daerah
4	1 Tahun 2010	Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada PT. Bank Sumsel Bangka Belitung
5	3 Tahun 2010	Pembentukan BUMD PT. Penjamin Kredit Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
6	7 Tahun 2011	Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada PT. Bank Pembangunan Sumsel Bangka Belitung
7	7 Tahun 2013	Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada BUMD Perseroan Terbatas Penjamin Kredit Daerah Kepulauan Bangka Belitung
8	3 Tahun 2014	Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada PT. Bank Pembangunan Daerah
9	15 Tahun 2016	Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyertaaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangk Belitung pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.
10	5 Tahun 2017	Pemberian Insentif dan Kemudahan Berinvestasi

Sumber: Biro Hukum Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,2019

4. Kemudahan Perizinan

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada peran usaha mikro, kecil dan menengah, perlu dilakukan penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan terpadu. Dasar hukum dari pelayanan terpadu antara lain, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**.** Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melayani 38 jenis perizinan guna mempermudah para pelaku usaha meningkatkan investasinya di daerah itu. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah mulai melaksanakan penyelenggaraan PTSP sejak pertengahan 2011 bertempat di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM), penyelenggaraan PTSP ini didasarkan pada Peraturan Gubernur Nomor 40 tahun 2010 tertanggal 27 Desember dengan jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan sebanyak 31 jenis baik perizinan penanaman modal maupun perizinan teknis bersifat sektoral. Kewenangan PTSP dalam pelayanan perizinan bertambah menjadi 38 jenis sejak disahkannya Peraturan Gubernur Nomor 44 tahun 2014 tertanggal 12 Mei.

PTSP melayani hampir semua perizinan baik di sektor penanaman modal, komunikasi dan informatika, koperasi dan UKM, sektor kehutanan, perhubungan, kelautan dan perikanan serta sektor perindustrian dan perdagangan. Ini merupakan kebijakan pemerintah provinsi dalam memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha dalam berinvestasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dari 38 jenis perizinan hampir keseluruhannya tanpa dipungut biaya. Tercatat hanya tiga jenis perizinan yang masih dikenakan biaya yakni perizinan pembuatan izin trayek, izin sektor perikanan dan kelautan serta perizinan memperkerjakan tenaga kerja asing (IMTA). Untuk masalah perizinan tersebut pemerintah provinsi menyadari bahwa masih banyak hal yang yang harus dibenahi, namun di tengah keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pihaknya berkomitmen terus meningkatkan

kualitas pelayanannya. Dengan adanya PTSP ini kita semua berharap semoga mutu pelayanan prima bagi masyarakat dapat berjalan secara optimal sesuai dengan mottonya yakni cepat, transparan, sederhana, mudah dan pasti.

5. Pengenaan Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan) kepada pemerintah daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Sebagaimana diperlihatkan pada Tabel II.172 dapat dijelaskan bahwa selama kurun waktu 2014-2018 pajak kendaraan bermotor merupakan sumber pendapatan asli daerah yang paling dominan diikuti oleh pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Sedangkan pajak rokok dan pajak air permukaan kontribusinya masih relatif rendah dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, setiap pungutan yang membebani masyarakat baik berupa pajak atau restribusi harus diatur dengan Undang-Undang Dasar hukum pengenaan pajak daerah dan restribusi daerah antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali atas UU Nomor 34 Tahun 2000 dan UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah;
2. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah; dan
3. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 tentang Restribusi Daerah.

Tabel II. 172
Realisasi Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Tahun 2014 s.d. 2018
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (dalam juta rupiah)

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
A	**PAJAK DAERAH**					
1	Pajak Kendaraan Bermotor	162.036,29	172.239,98	171.879,40	197.962,271	208.756,99
2	Bea Balik Nama KendaraanBermotor	139.175,29	110.239,08	111.656,78	169.320,289	230.410,24
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	163.479,97	165.429,32	151.587,72	182.118,099	265.482,40
4	Pajak Air Permukaan	4.036,07	4.860,32	5.707,53	7.541,444	10.091,51
5	Pajak Rokok	39.534,99	54.176,24	67.152,03	72.194,352	72.494,28
JUMLAH PAJAK DAERAH		**508.262,61**	**506.944,94**	**507.983,46**	**629.136,46**	**787.235,42**
B	**RESTRIBUSI DAERAH**	9.357,40	11.520,36	8.651,87	5.434,54	7.613,35
1	**Restribusi Jasa Umum**	**5.743,20**	**7.643,79**	**4.337,02**	**1.708,72**	**2.826,05**
1	Restribusi Pelayanan Kesehatan	3.279,50	5.022,76	1.231,27	489,738	518,771
2	Restribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	316,29	272,42	156,67	-	-
3	Restribusi Pelayanan Pendidikan	2.147,42	2.348,61	2.949,08	934,985	1.518,280
4	Restribusi Tempat Penggantian Cetak Peta	-	-	-	284,000	789,000

No		Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2		**Restribusi Jasa Usaha**	**1.363,58**	**1.847,89**	**2.634,87**	**2.688,81**	**4.010,41**
	1	Restribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.226,11	1.558,83	2.380,81	2.333,64	3.570,97
	2	Restribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	-	57,94	46,94	99,36	78,86
	3	Restribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	65,570	122,25	101,24	93,23	150,33
	4	Restribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah	71,90	108,87	105,88	162,58	210,26
3		**Restribusi Perizinan Tertentu**	**2.251**	**2.029**	**1.680**	**1.037**	**777**
	1	Restribusi Izin Trayek	55,82	37,45	60,50	86,36	40,50
	2	Restribusi Izin Usaha Perikanan	99,71	41,71	129,69	149,74	133,30
	3	Restribusi Perpanjangan IMTA	2.095,10	1.949,53	1.489,79	800,91	603,08

Sumber: Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Dari data realisasi pajak daerah dan restribusi daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di atas menunjukan peningkatan realisasi penerimaan pajak daerah, dimana pada tahun 2017 jumlah Pajak Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Rp. 629.136,46, (dalam juta) meningkat signifikan di tahun 2018 menjadi sebesar Rp. 787.235,42 (dalam juta) atau mengalami kenaikan sebesar 25,12 persen, sedangkan untuk Restribusi Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di tahun 2017 jumlah yang diperoleh sebesar Rp. 5.434,54 (dalam juta) meningkat signifikan di tahun 2018 sebesar 40,09 persen menjadi Rp. 7.613,35 (dalam juta).

2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

A. Kualitas Tenaga Kerja (Rasio Lulusan S1/S2/S3)

Kualitas tenaga kerja di suatu daerah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan, artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu daerah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Perhitungan kualitas tenaga kerja adalah perbandingan antara banyaknya lulusan perguruan tinggi yang dimiliki daerah yang bersangkutan atau lulusan S1/S2/S3 dengan jumlah penduduk usia kerja.

Tabel II.173
Rasio Lulusan S1/S2/S3 Tahun 2013 s.d 2017
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1.	Jumlah lulusan S1/S2/S3	62.519	93.524	72.763	70.792	66.678
2.	Jumlah penduduk	1.315.123	1.343.881	1.372.813	1.401.827	1.430.865
3.	Rasio lulusan S1/S2/S3 (1/2)	475,39	695,92	530,03	504,99	465,99

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018

Berdasarkan Tabel II.173 dapat dijelaskan bahwa Kualitas tenaga kerja/rasio lulusan S1/S2/S3 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk 5 (lima) tahun terakhir cenderung berfluktuasi dimana tahun 2013 sebesar 475,39 per 10.000 penduduk. Namun meningkat menjadi 695,92 pada tahun 2014 dan mengalami penurunan kembali secara bertahap ditahun 2017 menjadi 465,99 per 10.000 penduduk. Penurunan ini menunjukkan bahwa daya serap tenaga kerja dengan latar pendidikan sarjana/perguruan tinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menurun, walaupun sempat pada tahun 2014 rasio ini meningkat sebesar 695,92 per 10.000 penduduk. Diperlukan strategi dan kebijakan yang tepat untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja yang berdaya saing dengan kompetensi dan latar pendidikan yang sesuai dengan keinginan pengguna tenaga kerja agar dapat terserap dalam perusahaan-perusahaan, dan secara otomatis dapat meningkatkan rasio kelulusan S1/S2/S3.

B. Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan)

Tingkat ketergantungan merupakan rasio perbandingan antara usia tidak produktif dengan jumlah penduduk produktif. Rasio ketergantungan ini digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Berdasarkan Tabel II.174 dapat diketahui bahwa rasio ketergantungan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung mengalami penurunan selama 5 (lima) tahun terakhir, meskipun terjadi peningkatan pada tahun 2016, namun pada tahun 2018 memiliki nilai lebih kecil di antara 5 (lima) tahun terakhir yaitu dari tahun 2014 hingga tahun 2018.

Tabel II.174

Rasio Ketergantungan Tahun 2014 s.d 2018
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1.	Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun	377.995	386.133	392.371	392.057	390.553
2.	Jumlah Penduduk Usia > 64 tahun	50.602	51.688	55.372	59.810	64.106
3.	Jumlah Penduduk Usia tidak Produktif (1)&(2)	428.597	437.821	447.743	451.867	454.659
4.	Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun	915.284	934.992	954.224	978.998	1.003.214
5.	Rasio Ketergantungan (3)/(4)	46,83	46,83	46,92	46,16	45,32

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Data di bawah ini merupakan data yang terkait dengan data urusan pemerintah bidang pemerintahan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian 5 tahun terakhir dan merupakan data RENSTRA pada periode Tahun 2012-2017 dan LAKIP Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai dengan Tahun 2018 yang tertuang pada Tabel II.175.

Tabel II.175
Urusan Pemerintah Bidang Pemerintahan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN CAPAIAN INDIKATOR									
			2014		2015		2016		2017		2018	
			T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Rasio kecukupan sarana dan prasarana dengan kebutuhan pegawai sesuai kualitas pelayanan yang baik	-		0,16	0,20	0,20	0,25	0,25	0,33	0,30	n/a	n/a
	Persentase barang milik daerah/kantor yang terinventarisir sesuai kaidah pencatatan BMD	Persen		50	60	60	65	65	70	70	n/a	n/a
Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Penilaian akuntabilitas kinerja	Nilai / (Skor)		55,06/(C)	61/(B)	60,69/(B)	61/(B)	60,96/(B)	70 (B)	63,65 (B)	76	67.17 / (B)
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai LPPD	Nilai		2,4	2,4	2,4	2,5	2,44	2,5	2,44	n/a	n/a
	Persentase Kecamatan berkinerja baik	Persen		20	20	20	20	0	20	0	n/a	n/a
Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Persentase unit layanan yang telah menerapkan standar pelayanan publik	Persen			100	100	100	100	100	100	n/a	n/a

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN CAPAIAN INDIKATOR									
			2014		2015		2016		2017		2018	
			T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah daerah	Persentase rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	Persen		85	90	90	90	90	100	100	n/a	n/a
Meningkatnya implementasi kerjasama dalam dan luar negeri	persentase naskah kerjasama aktif lingkup dalam negeri yang di implementasikan	Persen			26	26	32	91	42	21	n/a	n/a
Meningkatnya peranan penggunaan layanan administrasi pembangunan	persentase SKPD yang melaksanakan pengadaan barang dan jasa melalui ULP	Persen	-	-	100	72,22	80	66,67	90	89	n/a	n/a
Berkembangnya ekonomi UMKM	persentase UMKM yang berkembang	Persen			20	20	75	75	100	80	n/a	n/a
Tersalurnya bantuan sosial dan hibah kepada masyarakat yang membutuhkan	persentase bantuan sosial dan hibah yang tepat guna dan sasaran ke masyarakat	Persen			100	100	100	100	100	92,3	n/a	n/a

Keterangan: T= Target; R= Realisasi

Sedang Visi dan Misi Gubernur periode 2017- 2022 sudah berbeda, dengan kata lain, terjadinya perubahan terkait kebijakan serta indikator yang mendukung tercapainya Visi dan Misi Gubernur melalui RPJMD. Sasaran dan Indikator sesuai dengan Sekeretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sesuai Table II.176.

Tabel II.176

Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Kesekretariatan Daerah dan Kesekretariatan DPRD

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN CAPAIAN INDIKATOR									
			2018		2019		2020		2021		2022	
			T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Meningkatnya kualitas dan jumlah kebijakan dibidang otonomi daerah, administrasi kewilayahan dan kerjasama	Persentase uraian dalam LPPD Provinsi Kep. Bangka Belitung yang memiliki capaian kinerja dengan predikat tinggi	Persen	80	89,63	85		90		95	-	100	
Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang efisien dibidang otonomi daerah, administrasi kwilayahan dan kerjasama	Terlaksananya pelayanan administrasi dan penyediaan dokumen bagi pemerintah daerah	Persen	80		85		90		95		100	

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN CAPAIAN INDIKATOR									
			2018		2019		2020		2021		2022	
			T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang efisien dibidang otonomi daerah, administrasi kewilayahan dan kerjasama	terlaksananya pelayanan administrasi dan penyediaan dokumen bagi pemerintah daerah	Persen	80		85		90		95		100	
Meningkatnya partisipasi publik dalam berdemokrasi dan berpolitik serta kebebasan menyampiakan pendapat/aspirasi		Persen	80		85		90		95		100	
Meningkatnya pelayanan publik dibidang keagamaan	Persentae fasilitasi bidang keagamaan	Persen	75	96,43	85	-	80	-	85	-	85	
Meningkatnya pelayanan publik kepada penerima hibah dan bansos	Persentase masyarakat penerima hibah bansos yang terbaru	Persen	80	100	85	-	90	-	95	-	90	
Meningkatnya pelayanan dibidang pendidikan KB, pemuda dan pariwisata	Persentase perumusan kebijakan dan koordinasi bidang pendidikan KB, pemudan dan pariwisata	Persen	70	100	70	-	75	-	80	-	100	
Meningkatnya penyusunan kebijakan dibidang produk hukum, penyusunan peraturan perundang-undangan, layanan hukum serta dokumentasi dan informasi hukum	Persentase kualitas dan kuantitas produk hukum	Persen	80	89	85	-	90	-	95	-	100	
	Persentase pelayanan hukum pemerintah daerah	Persen	80	95,8	85	-	90	-	95	-	100	
	Persentase publikasi produk hukum	Persen	80	96	85	-	90	-	95	-	100	
Meningkatnya rekomendasi kebijakan dibidang sumber daya alam	persentase rekomendasi kebijakan terkait sumber daya alam	Persen	80	100	85	-	90	-	95	-	95	
Meningkatnya rekmendasi kebijakan dibidang BUMD, penenaman modal, pariwisata dan budaya	persentase rekomendasi kebijakan terkait BUMD, penenaman modal, pariwisata dan budaya yang diimplementasikan	Persen	80	100		-	90	-	95	-	100	
Meningkatnya rekomendasi kebijakan dibidang administrasi perekonomian	persentase rekomendasi kebijakan terkait administrasi perekonomian yang diimplementasikan	Persen	80	100		-	90	-	95	-	100	
Meningkatnya fasilitasi pengendalian kebijakan dan koordinasi bidang pembangunan	Persentase fasilitasi kebijakan dan koordinasi bidang pembangunan yang termanfaatkan	Persen	80	94	85	-	90	-	95	-	100	

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN CAPAIAN INDIKATOR									
			2018		2019		2020		2021		2022	
			T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Terciptanya pengadaan barang atau jasa yang transparan, akuntabel, terbuka dan kompetitif	Persentase belanja pengadaan melalui e-procurement	Persen	90	100	92	-	94	-	96	-	98	
Meningkatnya nilai manajemen perubahan	Persentase peningkatan komitmen pimpinan PD dan pegawai dalam melakukan RB	Persen	50	100	53	-	60	-	65	-	68	
	Persentase pola pikir dan budaya kerja	Persen	40	100	44	-	47	-	52	-	56	
	Pesentase menurunya resiko kegagalan	Persen	50	100	53	-	56	-	58	-	62	
Meningkatnya penataan dan penguatan organisasi	Persentase perangkat daerah yang efektif dan efisien	Persen	50	100	54	-	56	-	59	-	62	
Meningkatnya penataan ketatalaksanaan pemda	Persentase peningkatan ketatalaksanaan pemda	Persen	55	88,89	60	-	62	-	64	-	68	
Meningkatnya nilai akuntabilitas	Persentase peningkatan nilai laporan kinerja	Persen	56	100	60	-	64	-	67	-	70	
Meningkatnya kualitas pembinaan pelayanan publik	Index pelayanan publik	Persen	50	100	54	-	58	-	62	-	68	
Meningkatnya kepuasan atas pelayanan bidang kerumahtanggaan	Tingkat kepuasan atas pelayanan bidang kerumahtanggaan	Persen	62,51	100	64,46	-	65,42	-	66,4	-	67,4	
Meningkatnya kepuasan atas pelayanan bidang perlengkapan	Tingkat kepuasan atas pelayanan bidang perlengkapan	Persen	62,51	100	64,46	-	65,42	-	66,4	-	67,4	
Meningkatnya kepuasan atas pelayanan bidang keuangan	Tingkat kepuasan atas pelayanan bidang keuangan	Persen	62,51	100	64,46	-	65,42	-	66,4	-	67,4	
Meningkatnya informasi kehumasan yang diterima oleh publik	Persentase informasi kehumasan yang diterima oleh publik	Persen	80	100	100	-	100	-	100	-	100	
Meningkatnya agenda pimpinan daerah yang terlayani	Persentase agenda pimpinan daerah yang terlayani	Persen	80	100	100	-	100	-	100	-	100	

Keterangan: T= Target; R= Realisasi

Untuk tahun 2020-2022 Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terjadi perubahan sasaran dan indikator, hat tersebut dikarenakan untuk menyesuaikan dengan perubahan RPJMD 2017-2022 sesuai dengan table II.177.

Tabel II.177
Urusan Pendukung Urusan Pemerintahaan Sekretariat Daerah

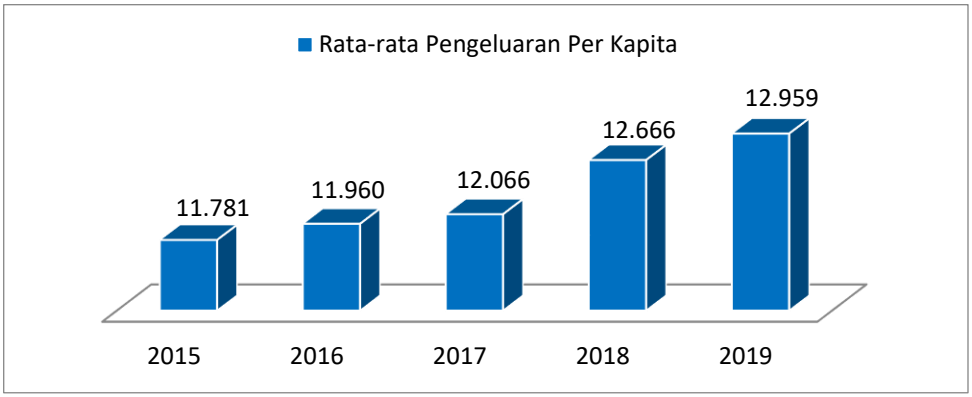
SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN CAPAIAN INDIKATOR					
			2020		2021		2022	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Meningkatnya Koordinasi Penyusunan Kebijakan dibidang Pemerintahan Daerah	Persentase Kebijakan dibidang Penyelenggaran Pemerintahan Daerah yang Terimplementasikan	Persen	90		95	-	100	
Meningkatnya Koordinasi Penyusunan Kebijakan Pembinaan Agama, Sosial dan Budaya	Persentase Kebijakan dibidang Agama, Sosial dan Budaya yang Terimplementasikan	Persen	90	-	95	-	90	
Meningkatnya Keselarasan Kebijakan dibidang Hukum	Presentase kebijakan di bidang produk hukum yang Selaras dan Terimplementasikan	Persen	90	-	95	-	100	
Meningkatnya Koordinasi Penyusunan Kebijakan dibidang Perekonomian dan administrasi Pembangunan	Persentase Kebijakan dibidang Perekonomian dan administrasi Pembangunan yang Terimplementasikan	Persen	90	-	95	-	95	
Meningkatnya Kinerja Pengadaan Barang/Jasa	Nilai Kematangan Kinerja Pengadaan Barang/Jasa	Nilai Kematangan	3	-	4	-	5	
Meningkatnya Pelayanan Publik yang Berkualitas	Tingkat Kepuasan Pelayanan Umum dan Kesekretariatan Setda	Persen	65,42	-	66,4	-	67,4	
Meningkatnya Penataan dan Penguatan Organisasi	Nilai Penataan dan Penguatan Organisasi	Persen	56	-	59	-	62	

C. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita

Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita menggambarkan jumlah pengeluaran rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pengeluaran konsumsi perkapita juga dapat mengindikasikan tingkat kesejahteraan masyarakat. Kemampuan ekonomi rumah tangga melalui cara penggunaan pendapatan yang dibelanjakan/pengeluaran untuk kebutuhannya, maka rata-rata pengeluaran per kapita pengeluaran konsumsi rumah tangga cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Hingga pada tahun 2019, rata-rata pengeluaran per kapita penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang disesuaikan mencapai Rp12.959.000 per tahun meningkat dari tahun sebelumnya sebesar Rp293.000 dan menempati peringkat ke lima tertinggi di Indonesia.

Grafik II.27
Rata-rata Pengeluaran Per Kapita (ribu rupiah)
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015-2019



BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

2. **Nilai Tukar Petani**

Nilai Tukar Petani (NTP) memberikan gambaran tentang kemampuan petani dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran kebutuhannya. NTP juga dapat mengindikasikan tingkat kesejahteraan petani. Berdasarkan data dapat diketahui bahwa kecenderungan NTP di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sepanjang tahun 2015-2019 mengalami penurunan dengan rasionilasi tukar petani ditampilkan pada Tabel II.178

Tabel II.178
Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2015 s.d. 2019
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1	Indeks Yang Diterima Petani (lt)	121,95	120,77	116,43	106,13	103,96
2	Indeks Yang Dibayar Petani (lb)	116,47	119,09	122,09	125,73	129,05
3	Rasio	1,05	1,01	0,96	0,84	0,80

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Berdasarkan Tabel II.177 maka diperoleh kondisi NTP di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memperlihatkan perkembangan yang belum menggembirakan. Sepanjang tahun tahun 2015-2016, konsisi menunjukkan indeks yag diterima petan lebih besar daripada indeks yang dibayar petani. Selanjutnya pada tahun 2019, rasio NTP mencapai level terendah selama lima tahun terahkir yaitu sebesar 0,80. Hal ini disebabkan indeks yang diterima petani lebih rendah dari indeks yang dibayar petani, sehingga kondisi ini mempengaruhi tingkat kesejahteraan petani di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

3. **Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita (Persentase Konsumsi RT untuk Non Pangan)**

Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita (persentase konsumsi RT untuk non pangan) menjelaskan berapa besar konsumsi rumah tangga non pangan perkeluarga per tahun. Sebagaimana diperlihatkan pada Tabel II.179 dapat dijelaskan bahwa konsumsi rumah tangga non pangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung mengalami peningkatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir, tahun 2018 yaitu sebesar Rp709.094 dan tahun 2019 menjadi sebesar Rp758.333. Selain itu, dilihat dari rasio perbandingan

antara total pengeluaran dan total pengeluaran konsumsi RT Non-Pangan sepanjang kurun waktu 2015-2017 adalah menurun. Namun mulai tahun 2018-2019 kembali mengalami peningkatan.

Tabel II.179
Persentase Konsumsi RT Non-Pangan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	*(2)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
1	Total Pengeluaran Konsumsi RT Non-Pangan	539.290	615.498	639.949	709.094	758.333
2	Total pengeluaran	1.118.101	1.211.879	1.360.994	1.419.495	1.509.974
3	Rasio	0,482	0,508	0,470	0,500	0,502

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Selanjutnya sebagaimana diperlihatkan pada Tabel II.180 menunjukkan bahwa besaran total pengeluaran non-pangan pada setiap kabupaten/kota di lingkup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019 menunjukkan kondisi dengan angka relatif sangat bervariasi. Nilai total tersebut menggambarkan pola pikir atau kebiasaan penduduk setempat terkait perilaku pengeluarannya. Apabila suatu penduduk dalam suatu wilayah/daerah nilai pengeluaran pangannya lebih besar dari pada nilai pengeluaran non-pangan, maka daerah tersebut dapat dikatakan secara relatif sebagai daerah berkembang, tetapi apabila pengeluaran pangan lebih kecil dari pada nilai pengeluaran non-pangan maka daerah tersebut dapat dikatakan relatif maju. Total pengeluaran konsumsi RT pangan dan total pengeluaran serta rasio tertinggi di Kota Pangkalpinang dan terendah di Kabupaten Bangka Selatan.

Tabel II.180
Indikator Pengeluaran Non Pangan Perkapita Tahun 2019 Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019

No	Kabupaten/Kota	Total Pengeluaran Konsumsi RT Non-Pangan	Total pengeluaran	Rasio
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	Kabupaten Bangka	674.074	1.441.834	0,468
2	Kabupaten Bangka Barat	630.236	1.315.113	0,479
3	Kabupaten Bangka Selatan	584.929	1.302.257	0,449
4	Kabupaten Bangka Tengah	716.195	1.425.107	0,503
5	Kabupaten Belitung	887.524	1.667.213	0,532
6	Kabupaten Belitung Timur	855.459	1.678.367	0,510
7	Kota Pangkalpinang	1.055.919	1.884.819	0,560
	Provinsi	**758.333**	**1.509.974**	**0,502**

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

4. **Rasio Daya Serap Tenaga Kerja**

Pertumbuhan investasi merupakan hal yang sangat penting dalam upaya peningkatan penyerapan tenaga kerja yang sekaligus akan mengurangi pengangguran. Adapun gambaran serapan tenaga kerja yang bekerja di perusahaan PMA/PMDN, jumlah PMA/PMDN, dan daya serap kerja di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sepanjang tahun

2015-2019 kecenderungan bersifat fluktuatif. Pada tahun 2016 merupakan jumlah tenaga kerja yang paling banyak bekerja sebanyak 16.264 dan jumlah PMA/PMDN sebanyak 156. Sementara itu, berbeda dengan potret tahun 2019 jumlah PMA/PMDN yang paling banyak, namun jumlah tenaga kerja yang diserap hanya sebanyak 5.499 dengan rasio sebesar 8,68 sebagaimana disajikan pada Tabel II.181.

Tabel II.181
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	*(2)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
1	Jumlah tenaga kerja yang berkerja pada perusahaan PMA/PMDN	8.255	16.264	3.543	4.512	5.499
2	Jumlah seluruh PMA/PMDN	104	156	235	411	633
3	**Rasio daya serap tenaga kerja**	**79,37**	**104,26**	**15,07**	**10,97**	**8,68**

Sumber: DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

D. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

1. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dihitung untuk mengetahui tingkat ketersediaan sarana jalan dapat memberi akses tiap kendaraan. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan adalah perbandingan panjang jalan terhadap jumlah kendaraan.

Tabel II.182
Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Tahun 2014 s.d. 2018
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1	Panjang Jalan Provinsi	899,33	899,33	899,33	899,33	850,99
2	Jumlah Kendaraan	395.951	398.065	381.193	421.792	413.919
3	**Rasio**	**0,0022**	**0,0022**	**0,0023**	**0,0021**	**0,0020**

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Perhubungan

Tabel II.183
Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Kabupaten/Kota di
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018

No	Kabupaten/Kota	Panjang Jalan	Jumlah Kendaraan	Rasio
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	Kabupaten Bangka	N.A	81.821	-
2	Kabupaten Bangka Barat	700,920	43.430	0,016
3	Kabupaten Bangka Selatan	633,970	42.442	0,013
4	Kabupaten Bangka Tengah	346,720	44.006	0,007
5	Kabupaten Belitung	666,024	71.557	0,009
6	Kabupaten Belitung Timur	880,880	45.617	0,019
7	Kota Pangkalpinang	850,990	85.346	0,009
	Prov. Kep. Bangka Belitung	**4.079,504**	**413.919**	**0,0098**

Sumber: Dinas PUPR, 2018 (Untuk Kabupaten Bangka Belum Terisi Masih dianalisis)*

Tabel II.184 menunjukkan jumlah penumpang angkutan laut baik kedatangan dan keberangkatan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa baik kedatangan maupun keberangkatan penumpang yang menggunakan angkutan laut mengalami penurunan yang cukup signifikan.

Tabel II.184
Jumlah Penumpang Angkutan Laut (Jiwa/Orang)

Jenis Pelayaran	Jumlah Penumpang Angkutan Laut (Orang)				
	2013	2014	2015	2016	2017
1. Luar Negeri					
b. Embarkasi	-	-	-	-	-
c. Debarkasi	-	-	-	-	-
2. Dalam Negeri					
b. Embarkasi	118266	77783	54183	32729	33167
c. Debarkasi	108150	64383	48030	32293	29183
Jumlah/ *Total*	**545840**	**142166**	**102213**	**65022**	**62350**

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

2. Luas Wilayah Produktif

Luas wilayah produktif di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggambarkan ketersediaan lahan yang produktif untuk dikelola dan dikembangkan dalam rangka peningkatan produktivitas ekonomi dan kesejahteraan. Persentase seluas wilayah produktif di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disajikan pada Tabel II.185.

Tabel II.185
Rasio luas Wilayah Produktif menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah Produktif	Luas Seluruh Wilayah Budidaya	Rasio
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	Kabupaten Bangka	233.977 ha	295.068 ha	0,79
2	Kabupaten Bangka Barat	218.878 ha	282.061 ha	0,78
3	Kabupaten Bangka Selatan	231.828 ha	360.707 ha	0,64
4	Kabupaten Bangka Tengah	164.227 ha	212.677 ha	0,77
5	Kabupaten Belitung	195.776 ha	229.369 ha	0,85
6	Kabupaten Belitung Timur	139.850 ha	250.691 ha	0,56
7	Kota Pangkalpinang	2.203 ha	11.840 ha	0,19
Jumlah		**1.186.652 ha**	**1.542.414 ha**	**0,73**

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

3. Infrastruktur

Pengembangan infrastruktur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami peningkatan pembangunan. Pengembangan infrastruktur seperti jalan, prasarana transportasi, dan kelistrikan diharapkan dapat mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tabel II.186
Infrastruktur Tahun 2013 s.d. 2018 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Infrastruktur	2013	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
1.	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	4,25	5,83	3,21			
2.	Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bus	26	26	26			
3.	Ketaatan terhadap RTRW	75	75	100			80,14
4.	Persentase Penduduk berakses airbersih	29,29	64,98	46,22			87,24
5.	Rasio daya tersambung padarumah tangga	69,13	67,95	80,96			
6.	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik	92,81	80,96	88,96			
7.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	0,65	0,66	0,68			
8.	Panjang jalan dilalui roda 4	0,93	0,95	0,90			

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

E. Fokus Iklim Berinvestasi

1. Angka Kriminalitas

Hakikat manusia sebagai satu-satunya mahluk yang memiliki akal dan pikiran di dunia ini menjadikan manusia selalu mempunyai cara untuk memenuhi segala kebutuhannya. Era modernisasi dan globalisasi telah menghapus batasan-batasan yang ada antar negara di dunia. Berbagai informasi dan pengaruh dari suatu negara dapat masuk dengan mudah ke negara lainnya. Sehingga jarak dan waktu pun saat ini tidak memiliki batasan. Akibatnya negara-negara yang tidak memiliki pertahanan atau filter yang kuat, tidak dapat memilah mana pengaruh yang baik dan pengaruh yang tidak baik. Selain memberi kemudahan di kehidupan manusia modernisasi juga menimbulkan masalah sosial. Kemiskinan, kejahatan, pelacuran, alkoholisme, kecanduan dan perjudian merupakan gejala penyakit sosial yang harus di berbatas dari muka bumi. Indonesia pun sudah mulai banyak terkena proses dari akulturasi negara-negara barat.

Modernisasi sangat cepat merubah budaya Indonesia yang ketimuran dan di kenal dengan sopan santunnya menjadi lebih kebaratan dengan kebebasannya. Modernisasi banyak memberi perubahan pada berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Dampak yang juga sangat besar dari proses modernisasi adalah meningkatnya angka kriminalitas. *Crime* atau kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentangnya. Ada banyak faktor penyebab yang bisa melatar belakangi seseorang melakukan tindakan kriminal, diantaranya yaitu: pertentangan dan persaingan kebudayaan, perbedaan ideologi politik, kepadatan dan komposisi penduduk, perbedaan distribusi kebudayaan, perbedaan kekayaan dan pendapatan, mentalitas yang labil, serta faktor dasar seperti faktor biologis, psikologis dan emosional. Masyarakat modern yang sangat kompleks menumbuhkan aspirasi-aspirasi materiel yang tinggi dan sering disertai oleh ambisi sosial yang tidak sehat. Dambaan pemenuhan kebutuhan materiel yang melimpah tanpa mempunyai kemampuan untuk mencapainya dengan jalan

yang wajar, mendorong individu untuk melakukan tindakan kriminal, sungguh pun demikian trend tindakan pidana menurun akan tetapi masih ada tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat hal itu dapat di lihat dari jumlah kejahatan pidana 207 kasus atau 25,37 persen dari 816 kasus di 2016 menurun menjadi 609 kasus pada 2017. Pada tahun 2018 terjadi penurunaan sebesar 45,65 persen atau 331 kasus. Sedangkan data registrasi Polisi Daerah Kepulauan Bangka Belitung mengungkapkan bahwa kejadian kejahatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama periode tahun 2014-2018 cendrung berflukturasi.

Data dalam 5 tahun terakhir menunjukkan bahwa jumlah tindak pidana berfluktuasi dari tahun ke tahun. Demikian pula penyelesaian tindak pidana, secara umum masih berkisar antara 50 sampai 60 persen tindak pidana yang dapat diselesaikan. Sejumlah faktor penyebab banyaknya jumlah tindak pidana dan belum maksimalnya persentase penyelesaian tindak pidana antara lain banyaknya orang yang mengalami ketertindasan akibat krisis berkepanjangan berujung pada tindak pidana. Selain itu juga dipicu oleh lemahnya kontrol sosial yang tidak diikuti dengan langkah penegakan hukum. Pada saat kontrol sosial melemah, juga terjadi demoralisasi pihak petugas yang mestinya menjaga keamanan. Aparat yang harusnya menjaga keamanan, seringkali justru melakukan tindak pelanggaran. Pada saat yang sama masyarakat belum atau tidak melihat adanya upaya yang berarti dari aparat keamanan sendiri untuk mengembalikan citranya.

Tabel II.187
Jumlah dan PenyelesaianTindak Pidana Kejahatan
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 -2018

NO	JENIS KRIMINALITAS	TAHUN									
		2014		2015		2016		2017		2018*	
		JTP	PTP	JTP	PTP	JTP	PTP	JTP	PTP	JTP	PTP
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
1	Narkoba	188	197	227	192	107	54	257	132	121	75
2	Pembunuhan	9	8	9	10	2	2	10	8	2	2
3	Penculikan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Seksusal	40	28	58	55	22	13	75	70	7	5
5	Penganiayaan	73	46	88	53	25	8	75	62	10	8
6	Pencurian	148	71	188	77	71	21	70	35	47	21
7	Perampokan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Pemerasan	3	2	8	6	6	2	0	0	0	0
9	Penipuan	182	82	124	63	81	20	31	24	8	5
10	Pemalsuan Uang	0	0	0	0	1	0	33	0	33	30
11	Pembakaran	9	9	15	8	3	0	1	1	1	1
12	Penyelundupan	5	5	5	4	3	0	0	0	0	0
13	Lain-lain	1501	834	1756	1021	495	185	57	42	102	63
Total		**2158**	**1282**	**2478**	**1489**	**816**	**302**	**609**	**374**	**331**	**210**

Sumber: Kepolisian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019
Keterangan:
JTP = Jumlah Tindak Pidana
PTP = Penyelesaian Tindak Pidana

Ada beberapa pandangan mengenai perbuatan apa saja yang dapat dikatakan sebagai kejahatan. Kejahatan dalam pengertian yuridis dapat didefinisikan sebaga isuatu tindakan yang melanggar undang-undang atau ketentuan yang berlaku dan diakui secara legal. Secara kriminologi yang berbasis sosiologis, kejahatan merupakan suatu pola tingkah laku yang merugikan masyarakat (dengan kata lain terdapat korban) dan suatu pola tingkah laku yang mendapatkan reaksi sosial dari masyarakat.

Data dalam 5 tahun terakhir menunjukkan bahwa jumlah tindak pidana berfluktuasi dari tahun ke tahun. Demikian pula penyelesaian tindak pidana. secara umum masih berkisar antara 50 sampai 60 persen tindak pidana yang dapat diselesaikan. Sejumlah faktor penyebab banyaknya jumlah tindak pidana dan belum maksimalnya persentase penyelesaian tindak pidana antara lain banyaknya orang yang mengalami ketertindasan akibat krisis berkepanjangan berujung pada tindak pidana. Selain itu juga dipicu oleh lemahnya kontrol sosial yang tidak diikuti dengan langkah penegakan hukum. Pada saat kontrol sosial melemah, juga terjadi demoralisasi pihak petugas yang mestinya menjaga keamanan. Aparat yang harusnya menjaga keamanan, seringkali justru melakukan tindak pelanggaran. Pada saat yang sama masyarakat belum atau tidak melihat adanya upaya yang berarti dari aparat keamanan sendiri untuk mengembalikan citranya.

2. Jumlah Demo

Kriminalitas atau kejahatan bukan merupakan peristiwa herediter (bawaan sejak lahir, warisan). Tingkah laku kriminal itu bisa di lakukan siapa saja, baik wanita maupun pria. Dapat berlangsung pada usia anak, dewasa maupun lanjut umur. Kejahatan dan tindakan kriminalitas telah menjadi masalah sosial tersendiri bagi hampir seluruh tatanan masyarakat dunia. Terlebih lagi pada saat sekarang ini maraknya kasus-kasus kriminalitas yang terjadi dimana pelakunya adalah seorang remaja. Pelaku tindakan kriminal saat ini tidak hanya didominasi orang dewasa namun anak pada usia remaja juga sudah banyak yang melakukan tindakan kriminal. Peran remaja yang diharapkan dapat melanjutkan pembangunan dan kemajuan bangsa ini pada kenyataannya melakukan hal-hal yang di larang oleh hukum banyak remaja yang melaukan perbuatan yang sangat tidak di harapkan sebagai penerus generasi bangsa. Kenyataan yang terjadi pada saat ini tindakan penyimpangan yang dilakukan remaja tidak hanya sebatas kasus kenakalan remaja namun sudah menjurus pada tindakan kriminal. Bentuk tindakan kenakalan remaja yang terjadi biasanya seperti tauran/perkelahian dan seks bebas. Namun saat ini muncul tindakan-tindakan kriminal yang di lakukan remaja seperti pencurian, pencabulan, pemerkosaan, penyalahgunaan narkotika, penipuan bahkan tindakan pembunuhan.

Aksi demonstrasi dilakukan oleh banyak orang dan biasanya dilakukan oleh mahasiswa, buruh, atau anggota suatu organisasi. Demonstrasi ini merupakan salah satu cara kelompok tertentu menyuarakan idenya dan tidak heran aksi ini kerap menimbulkan kerugian meskipun tujuannya bisa dibilang cukup baik, “agar suara didengar”.

Jumlah demonstrasi yang terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung relatif sedikit daripada provinsi lain. Hal ini menggambarkan bahwa kecenderungan stabilitas keamanan bermasyarakat relative lebih aman. Jumlah demo Tahun 2014–2018 masih bersifat fluktuatif yang disebabkan terjadinya gejolak di masyarakat akibat inflasi atau daya beli masyarakat yang kurang tiap tahunnya. Diharapkan tahun–tahun yang akan datang lebih kondusif lagi. Jumlah demonstrasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditampilkan pada Tabel II.188.

Tabel II.188
Data Demonstrasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 -2018

NO	JENIS	TAHUN				
		2014	2015	2016	2017	2018*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1	Bidang Politik	5	4	12	5	2
2	Bidang Ekonomi	10	24	15	3	2
3	Pemogokan Kerja	2	3	-	-	1
4	Jumlah unjuk rasa	17	30	27	8	5

Sumber: Kepolisian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

3. Jumlah Perda yang mendukung Iklim Usaha

Perda merupakan sebuah instrument kebijakan daerah yang sifatnya formal, melalui perda dapat diindikasikan adanya insentif maupun disinsentif suatu kebijakan di daerah terhadap aktivitas perekonomian. Perda yang mendukung iklim investasi dibatasi yaitu perda terkait dengan perizinan, perda terkait dengan lalu lintas barang dan jasa, serta perda terkait dengan ketenagakerjaan. Sebagaimana diperlihatkan pada Tabel II.189, dapat dijelaskan bahwa sepanjang kurun waktu 2008-2014 jumlah perda yang sahkan untuk mendukung iklim investasi sebanyak 10 Perda, mulai dari Perda pembentukan BUMD sampai dengan Perda penyertaan modal pada bank pembangunan daerah serta pemberian insentif dan kemudahan berinvestasi.

Tabel II. 189
Jumlah Peraturan Daerah yang mendukung Iklim Investasi
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Nomor	Peraturan Daerah
1	18 Tahun 2008	Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Bumi Bangka Belitung Sejahtera
2	11 Tahun 2008	Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada PT. Bank Perkreditan
3	12 Tahun 2008	Penambahan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Bank Sumsel
4	1 Tahun 2010	Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada PT. Bank Sumsel Bangka Belitung
5	3 Tahun 2010	Pembentukan BUMD PT. Penjamin Kredit Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
6	7 Tahun 2011	Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada PT. Bank Pembangunan Sumsel Bangka Belitung
7	7 Tahun 2013	Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada BUMD Perseroan Terbatas Penjamin Kredit Daerah Kepulauan Bangka Belitung
8	3 Tahun 2014	Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada PT. Bank Pembangunan Daerah
9	15 Tahun 2016	Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka

No	Nomor	Peraturan Daerah
		Belitung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyertaaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangk Belitung pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.
10	5 Tahun 2017	Pemberian Insentif dan Kemudahan Berinvestasi
11	7 Tahun 2017	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sumber: Biro Hukum Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018

4. Kemudahan Perizinan

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada peran usaha mikro, kecil dan menengah, perlu dilakukan penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan terpadu. Dasar hukum dari pelayanan terpadu antara lain, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**.** Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melayani 38 jenis perizinan guna mempermudah para pelaku usaha meningkatkan investasinya di daerah itu. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah mulai melaksanakan penyelenggaraan PTSP sejak pertengahan 2011 bertempat di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), penyelenggaraan PTSP ini didasarkan pada Peraturan Gubernur Nomor 40 tahun 2010 tertanggal 27 Desember dengan jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan sebanyak 31 jenis baik perizinan penanaman modal maupun perizinan teknis bersifat sektoral. Kewenangan PTSP dalam pelayanan perizinan bertambah menjadi 38 jenis sejak disahkannya Peraturan Gubernur Nomor 44 tahun 2014 tertanggal 12 Mei.

PTSP melayani hampir semua perizinan baik di sektor penanaman modal, komunikasi dan informatika, koperasi dan UKM, sektor kehutanan, perhubungan, kelautan dan perikanan serta sektor perindustrian dan perdagangan. Ini merupakan kebijakan pemerintah provinsi dalam memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha dalam berinvestasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dari 38 jenis perizinan hampir keseluruhannya tanpa dipungut biaya. Tercatat hanya tiga jenis perizinan yang masih dikenakan biaya yakni perizinan pembuatan izin trayek, izin sektor perikanan dan kelautan serta perizinan memperkerjakan tenaga kerja asing (IMTA). Untuk masalah perizinan tersebut pemerintah provinsi menyadari bahwa masih banyak hal yang yang harus dibenahi, namun di tengah keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pihaknya berkomitmen terus meningkatkan kualitas pelayanannya.Dengan adanya PTSP ini kita semua berharap semoga mutu pelayanan prima bagi masyarakat dapat berjalan secara optimal sesuai dengan mottonya yakni cepat, transparan, sederhana, mudah dan pasti.

5. Pengenaan Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan) kepada pemerintah daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Sebagaimana diperlihatkan pada Tabel II.190 dapat dijelaskan bahwa selama kurun waktu 2014-2019 pajak kendaraan bermotor merupakan sumber pendapatan asli daerah yang paling dominan

diikuti oleh pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Sedangkan pajak rokok dan pajak air permukaan kontribusinya masih relatif rendah dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, setiap pungutan yang membebani masyarakat baik berupa pajak atau retribusi harus diatur dengan Undang-Undang Dasar hukum pengenaan pajak daerah dan retribusi daerah antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali atas UU Nomor 34 Tahun 2000 dan UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah; dan
3. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Tabel II. 190
Realisasi Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Tahun 2014 s.d. 2019
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (dalam juta rupiah)

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
A	**PAJAK DAERAH**						
1	Pajak Kendaraan Bermotor	162.036,29	172.239,98	171.879,40	197.962,271	208.756,99	230.000,97
2	Bea Balik Nama KendaraanBermotor	139.175,29	110.239,08	111.656,78	169.320,289	230.410,24	187.494,76
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	163.479,97	165.429,32	151.587,72	182.118,099	265.482,40	236.696,06
4	Pajak Air Permukaan	4.036,07	4.860,32	5.707,53	7.541,444	10.091,51	12.509,18
5	Pajak Rokok	39.534,99	54.176,24	67.152,03	72.194,352	72.494,28	94.296,44
JUMLAH PAJAK DAERAH		**508.262,61**	**506.944,94**	**507.983,46**	**629.136,46**	**787.235,42**	**760.997,41**
B	**RETRIBUSI DAERAH**	9.357,40	11.520,36	8.651,87	5.434,54	7.613,35	8.729,46
1	**Retribusi Jasa Umum**	**5.743,20**	**7.643,79**	**4.337,02**	**1.708,72**	**2.826,05**	**3.039,14**
	1 Retribusi Pelayanan Kesehatan	3.279,50	5.022,76	1.231,27	489,738	518,771	720.98
	2 Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	316,29	272,42	156,67	-	-	-
	3 Retribusi Pelayanan Pendidikan	2.147,42	2.348,61	2.949,08	934,985	1.518,280	790,16
	4 Retribusi Tempat Penggantian Cetak Peta	-	-	-	284,000	789,000	1.528,00
2	**Retribusi Jasa Usaha**	**1.363,58**	**1.847,89**	**2.634,87**	**2.688,81**	**4.010,41**	**5.195,73**
	1 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.226,11	1.558,83	2.380,81	2.333,64	3.570,97	4.740,10

No		Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	2	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	-	57,94	46,94	99,36	78,86	75,43
	3	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	65,570	122,25	101,24	93,23	150,33	89,60
	4	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah	71,90	108,87	105,88	162,58	210,26	229,25
3	**Retribusi Perizinan Tertentu**		**2.251**	**2.029**	**1.680**	**1.037**	**777**	**494,58**
	1	Retribusi Izin Trayek	55,82	37,45	60,50	86,36	40,50	137,53
	2	Retribusi Izin Usaha Perikanan	99,71	41,71	129,69	149,74	133,30	118,46
	3	Retribusi Perpanjangan IMTA	2.095,10	1.949,53	1.489,79	800,91	603,08	238,59

Sumber: Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Dari data realisasi pajak daerah dan retribusi daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di atas menunjukan peningkatan realisasi penerimaan pajak daerah, dimana pada tahun 2018 jumlah Pajak Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Rp787.235,42, (dalam juta) menurun di tahun 2019 menjadi sebesar Rp760.997,41 (dalam juta) atau mengalami penurunan sebesar 1,03 persen, sedangkan untuk Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di tahun 2018 jumlah yang diperoleh sebesar Rp7.613,35 (dalam juta) meningkat signifikan di tahun 2019 sebesar 87,21 persen menjadi Rp8.729,46 (dalam juta).

2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

1. Kualitas Tenaga Kerja (Rasio lulusan S1/S2/S3)

Kualitas tenaga kerja di suatu daerah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan, artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu daerah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Perhitungan kualitas tenaga kerja adalah perbandingan antara banyaknya lulusan perguruan tinggi yang dimiliki daerah yang bersangkutan atau lulusan S1/S2/S3 dengan jumlah penduduk usia kerja.

Tabel II.191
Rasio Lulusan S1/S2/S3 Tahun 2013 s.d. 2017
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Jumlah lulusan S1/S2/S3	62.519	93.524	72.763	70.792	66.678

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.	Jumlah penduduk	1.315.123	1.343.881	1.372.813	1.401.827	1.430.865
3.	Rasio lulusan S1/S2/S3 (1/2)	475,39	695,92	530,03	504,99	465,99

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018

Berdasarkan Tabel II.191 dapat dijelaskan bahwa Kualitas tenaga kerja/rasio lulusan S1/S2/S3 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk 5 (lima) tahun terakhir cenderung berfluktuasi dimana tahun 2013 sebesar 475,39 per 10.000 penduduk. Namun meningkat menjadi 695,92 pada tahun 2014 dan mengalami penurunan kembali secara bertahap ditahun 2017 menjadi 465,99 per 10.000 penduduk. Penurunan ini menunjukkan bahwa daya serap tenaga kerja dengan latar pendidikan sarjana/perguruan tinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menurun, walaupun sempat pada tahun 2014 rasio ini meningkat sebesar 695,92 per 10.000 penduduk. Diperlukan strategi dan kebijakan yang tepat untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja yang berdaya saing dengan kompetensi dan latar pendidikan yang sesuai dengan keinginan pengguna tenaga kerja agar dapat terserap dalam perusahaan-perusahaan, dan secara otomatis dapat meningkatkan rasio kelulusan S1/S2/S3.

2. Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan)

Tingkat ketergantungan merupakan rasio perbandingan antara usia tidak produktif dengan jumlah penduduk produktif. Rasio ketergantungan ini digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Berdasarkan Tabel II.192 dapat diketahui bahwa rasio ketergantungan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung mengalami penurunan selama 5 (lima) tahun terakhir, dimana padatahun 2013 sebesar 46,83 persen dan konstan sepanjang tahun 2014 s.d. 2015, tetapi kemudian meningkat menjadi 46,92 persen. Namun pada tahun 2017 menunjukkan penurunan menjadi 46,16 persen.

Tabel II.192
Rasio Ketergantungan Tahun 2013 s.d. 2017
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun	369.912	377.995	386.133	392.371	392.057
2.	Jumlah Penduduk Usia > 64 tahun	49.520	50.602	51.688	55.372	59.810
3.	Jumlah Penduduk Usia tidak Produktif (1)&(2)	419.432	428.597	437.821	447.743	451.867
4.	Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun	895.691	915.284	934.992	954.224	978.998
5.	Rasio Ketergantungan (3)/(4)	46,83	46,83	46,83	46,92	46,16

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018

Data di bawah ini merupakan data yang terkait dengan data urusan pemerintah bidang pemerintahan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian 5 tahun terakhir dan merupakan data RENSTRA pada

periode Tahun 2012-2017 dan LAKIP Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai dengan Tahun 2018 yang tertuang pada Tabel II.193.

Tabel II.193
Urusan Pemerintah Bidang Pemerintahan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN CAPAIAN INDIKATOR									
			2014		2015		2016		2017		2018	
			T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Rasio kecukupan sarana dan prasarana dengan kebutuhan pegawai sesuai kualitas pelayanan yang baik	-		0,16	0,20	0,20	0,25	0,25	0,33	0,30		
	Persentase barang milik daerah/kantor yang terinventarisir sesuai kaidah pencatatan BMD	Persen		50	60	60	65	65	70	70		
Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Penilaian akuntabilitas kinerja	Nilai / (Skor)		55,06/ (C)	61/ (B)	60,69/ (B)	61 / (B)	60,96/ (B)	70 (B)	63,65 (B)	76	67.17 / (B)
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai LPPD	Nilai		2,4	2,4	2,4	2,5	2,44	2,5	2,44		
	Persentase Kecamatan berkinerja baik	Persen		20	20	20	20	0	20	0		
Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Persentase unit layanan yang telah menerapkan standar pelayanan publik	Persen			100	100	100	100	100	100		
Terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah daerah	Persentase rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	Persen		85	90	90	90	90	100	100		

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN CAPAIAN INDIKATOR									
			2014		2015		2016		2017		2018	
			T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Meningkatnya implementasi kerjasama dalam dan luar negeri	persentase naskah kerjasama aktif lingkup dalam negeri yang di implementasikan	Persen			26	26	32	91	42	21		
Meningkatnya peranan penggunaan layanan administrasi pembangunan	persentase SKPD yang melaksanakan pengadaan barang dan jasa melalui ULP	Persen	-	-	100	72,22	80	66,67	90	89		
Berkembangnya ekonomi UMKM	persentase UMKM yang berkembang	Persen			20	20	75	75	100	80		
Tersalurnya bantuan sosial dan hibah kepada masyarakat yang membutuhkan	persentase bantuan sosial dan hibah yang tepat guna dan sasaran ke masyarakat	Persen			100	100	100	100	100	92,3		

Keterangan: T= Target; R= Realisasi

Sedang Visi dan Misi Gubernur periode 2017- 2022 sudah berbeda, dengan kata lain, terjadinya perubahan terkait kebijakan serta indikator yang mendukung tercapainya Visi dan Misi Gubernur melalui RPJMD. Sasaran dan Indikator sesuai dengan Sekeretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sesuai Table II.194.

Tabel II.194

Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Kesekretariatan Daerah dan Kesekretariatan DPRD

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN CAPAIAN INDIKATOR									
			2018		2019		2020		2021		2022	
			T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Meningkatnya kualitas dan jumlah kebijakan dibidang otonomi daerah, administrasi kewilayahan dan kerjasama	Persentase uraian dalam LPPD Provinsi Kep. Bangka Belitung yang memiliki capaian kinerja dengan predikat tinggi	Persen	80	89,63	85		90		95	-	100	
Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang efisien dibidang otonomi daerah, administrasi kwilayahan dan kerjasama	Terlaksananya pelayanan administrasi dan penyediaan dokumen bagi pemerintah daerah	Persen	80		85		90		95		100	
Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang efisien dibidang otonomi	terlaksananya pelayanan administrasi dan penyediaan dokumen bagi pemerintah daerah	Persen	80		85		90		95		100	

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN CAPAIAN INDIKATOR									
			2018		2019		2020		2021		2022	
			T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
daerah, administrasi kewilayahan dan kerjasama												
Meningkatnya partisipasi publik dalam berdemokrasi dan berpolitik serta kebebasan menyampiakan pendapat/aspirasi		Persen	80		85		90		95		100	
Meningkatnya pelayanan publik dibidang keagamaan	Persentae fasilitasi bidang keagamaan	Persen	75	96,43	85	-	80	-	85	-	85	
Meningkatnya pelayanan publik kepada penerima hibah dan bansos	Persentase masyarakat penerima hibah bansos yang terbaru	Persen	80	100	85	-	90	-	95	-	90	
Meningkatnya pelayanan dibidang pendidikan KB, pemuda dan pariwisata	Persentase perumusan kebijakan dan koordinasi bidang pendidikan KB, pemudan dan pariwisata	Persen	70	100	70	-	75	-	80	-	100	
Meningkatnya penyusunan kebijakan dibidang produk hukum, penyusunan peraturan perundang-undangan, layanan hukum serta dokumentasi dan informasi hukum	Persentase kualitas dan kuantitas produk hukum	Persen	80	89	85	-	90	-	95	-	100	
	Persentase pelayanan hukum pemerintah daerah	Persen	80	95,8	85	-	90	-	95	-	100	
	Persentase publikasi produk hukum	Persen	80	96	85	-	90	-	95	-	100	
Meningkatnya rekomendasi kebijakan dibidang sumber daya alam	persentase rekomendasi kebijakan terkait sumber daya alam	Persen	80	100	85	-	90	-	95	-	95	
Meningkatnya rekmendasi kebijakan dibidang BUMD, penenaman modal, pariwisata dan budaya	persentase rekomendasi kebijakan terkait BUMD, penenaman modal, pariwisata dan budaya yang diimplementasikan	Persen	80	100		-	90	-	95	-	100	
Meningkatnya rekomendasi kebijakan dibidang administrasi perekonomian	persentase rekomendasi kebijakan terkait administrasi perekonomian yang diimplementasikan	Persen	80	100		-	90	-	95	-	100	
Meningkatnya fasilitasi pengendalian kebijakan dan koordinasi bidang pembangunan	Persentase fasilitasi kebijakan dan koordinasi bidang pembangunan yang termanfaatkan	Persen	80	94	85	-	90	-	95	-	100	
Terciptanya pengadaan barang atau jasa yang transparan, akuntabel, terbuka dan kompetitif	Persentase belanja pengadaan melalui e-procurement	Persen	90	100	92	-	94	-	96	-	98	

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN CAPAIAN INDIKATOR									
			2018		2019		2020		2021		2022	
			T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Meningkatnya nilai manajemen perubahan	Persentase peningkatan komitmen pimpinan PD dan pegawai dalam melakukan RB	Persen	50	100	53	-	60	-	65	-	68	
	Persentase pola pikir dan budaya kerja	Persen	40	100	44	-	47	-	52	-	56	
	Pesentase menurunya resiko kegagalan	Persen	50	100	53	-	56	-	58	-	62	
Meningkatnya penataan dan penguatan organisasi	Persentase perangkat daerah yang efektif dan efisien	Persen	50	100	54	-	56	-	59	-	62	
Meningkatnya penataan ketatalaksanaan pemda	Persentase peningkatan ketatalaksanaan pemda	Persen	55	88,89	60	-	62	-	64	-	68	
Meningkatnya nilai akuntabilitas	Persentase peningkatan nilai laporan kinerja	Persen	56	100	60	-	64	-	67	-	70	
Meningkatnya kualitas pembinaan pelayanan publik	Index pelayanan publik	Persen	50	100	54	-	58	-	62	-	68	
Meningkatnya kepuasan atas pelayanan bidang kerumahtanggaan	Tingkat kepuasan atas pelayanan bidang kerumahtanggaan	Persen	62,51	100	64,46	-	65,42	-	66,4	-	67,4	
Meningkatnya kepuasan atas pelayanan bidang perlengkapan	Tingkat kepuasan atas pelayanan bidang perlengkapan	Persen	62,51	100	64,46	-	65,42	-	66,4	-	67,4	
Meningkatnya kepuasan atas pelayanan bidang keuangan	Tingkat kepuasan atas pelayanan bidang keuangan	Persen	62,51	100	64,46	-	65,42	-	66,4	-	67,4	
Meningkatnya informasi kehumasan yang diterima oleh publik	Persentase informasi kehumasan yang diterima oleh publik	Persen	80	100	100	-	100	-	100	-	100	
Meningkatnya agenda pimpinan daerah yang terlayani	Persentase agenda pimpinan daerah yang terlayani	Persen	80	100	100	-	100	-	100	-	100	

Keterangan: T= Target; R= Realisasi

Untuk tahun 2020-2022 Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terjadi perubahan sasaran dan indikator, hat tersebut dikarenakan untuk menyesuaikan dengan perubahan RPJMD 2017-2022 sesuai dengan Table II.195.

Tabel II.195

Urusan Pendukung Urusan Pemerintahaan Sekretariat Daerah

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN CAPAIAN INDIKATOR					
			2020		2021		2022	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Meningkatnya Koordinasi Penyusunan Kebijakan dibidang Pemerintahan Daerah	Persentase Kebijakan dibidang Penyelenggaran Pemerintahan Daerah yang Terimplementasikan	Persen	90		95	-	100	

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN CAPAIAN INDIKATOR					
			2020		2021		2022	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Meningkatnya Koordinasi Penyusunan Kebijakan Pembinaan Agama, Sosial dan Budaya	Persentase Kebijakan dibidang Agama, Sosial dan Budaya yang Terimplementasikan	Persen	90	-	95	-	90	
Meningkatnya Keselarasan Kebijakan dibidang Hukum	Presentase kebijakan di bidang produk hukum yang Selaras dan Terimplementasikan	Persen	90	-	95	-	100	
Meningkatnya Koordinasi Penyusunan Kebijakan dibidang Perekonomian dan administrasi Pembangunan	Persentase Kebijakan dibidang Perekonomian dan administrasi Pembangunan yang Terimplementasikan	Persen	90	-	95	-	95	
Meningkatnya Kinerja Pengadaan Barang/Jasa	Nilai Kematangan Kinerja Pengadaan Barang/Jasa	Nilai Kematangan	3	-	4	-	5	
Meningkatnya Pelayanan Publik yang Berkualitas	Tingkat Kepuasan Pelayanan Umum dan Kesekretariatan Setda	Persen	65,42	-	66,4	-	67,4	
Meningkatnya Penataan dan Penguatan Organisasi	Nilai Penataan dan Penguatan Organisasi	Persen	56	-	59	-	62	

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2020 dan Realisasi RPJMD

Pada tahun 2019 Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan sebanyak 200 program yang terdapat dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022. Untuk tahun 2020, jumlah program yang dilaksanakan sebanyak 199 program. Terhadap program yang telah dilaksanakan, dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel II. 196
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2020
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
		URUSAN WAJIB BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
		PENDIDIKAN																	
		Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah		6	149.234.675.000	0	22.915.715.626				674.315.959				23.590.031.585		0,16	Dinas Pendidikan	
		Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran selama 12 bulan (%)	100	2.300.000.000	100	3.660.269.883	100	2.183.221.783	25	187.096.559	25,00%	8,57 %		3.847.366.442		1,67		
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan	100	1.200.000.000	100	1.098.264.220	100	2.992.143.750	25	6.629.400	25,00%	0,22 %		1.104.893.620		0,92		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
						(%)																
					Peningkatan Disiplin Aparatur	% aparatur yang meningkat disiplin (%)					100	142.022.500	25	-	25,00%	0,00 %		-		#DIV/0!		
					Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat disiplinnya (%)	100	465.000.000	100	79.250.000	100	557.098.000	80	74.440.000	80,00%	13,36 %		153.690.000		0,33		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah di atas 85% (dokumen) (dokumen)	3	800.000.000	2	66.272.500	2	175.540.000	1	9.750.000	50,00%	5,55%		76.022.500		0,10		
					Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan perangkat daerah dengan realisasi target di atas 90% (laporan) (laporan)	8	310.000.000	5	105.269.622	6	158.926.464	5	-	83,33%	0,00%		105.269.622		0,34		
					Pelaksanaan Lomba-Lomba Siswa dan PTK Tingkat Provinsi	Terseleksinya anggota tim lomba Siswa dan PTK Tk. Provinsi (tim)	10	8.000.000.000	10	4.111.518.119	10	5.592.570.000	-	-	0,00%	0,00%		4.111.518.119		0,51		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Pemberian Beasiswa Kepada Siswa/Mahasiswa Tidak Mampu dan/atau berprestasi	Lulusan sekolah menengah yang tidak mampu dan/atau berprestasi menerima beasisw (orang)	25	11.000.000.000	550	12.369.842.232	900	6.950.678.000	737	396.400.000	81,89%	5,70 %		12.766.242.232		1,16		
					Pelaksanaan Kegiatan Siswa dan PTK Tingkat Nasional	Jenis Kegiatan Siswa dan PTK Tk. Nasional dilaksanakan di Prov. Kep. Babel. (jenis)	2	3.000.000.000	1	1.281.422.050	1	195.502.000	-	-	0,00 %	0,00 %		1.281.422.050		0,43		
					Pencetakan Majalah Pendidikan	jumlah majalah yang dicetak (paket) (1)					1	761.560.000	-	-	0,00 %	0,00 %		-		#DIV/0!		
					Rekonsiliasi Keuangan BOS APBD, APBN, IPP dan Bantuan Pemerintah	Jumlah triwulan Rekonsiliasi keuangan (laporan)	4	1.000.000.000	4	143.607.000	4	78.000.000	-	-	0,00 %	0,00 %		143.607.000		0,14		
					Program Peningkatan dan Pegembangan Pelayanan Pendidikan Menengah Atas-		61	222.960.000.000	0	28.622.797.462				407.881.700				29.030.679.162		0,13	Dinas Pendidikan	

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Peningkatan Sarana/Prasarana dan Pengembangan Kelembagaan SMA	Tersediany Meubelair SMA (unit)	5	13.000.000.000	2	7.437.928.327	150	5.742.769.600	-	218.478.500	0,00 %	3,80 %		7.656.406.827		0,59		
					Peningkatan Kualitas Kesiswaan SMA	jumlah lomba kesiswaan SMA (jenis)	7	7.000.000.000	271	3.881.164.634	12	9.635.813.000	-	139.225.000	0,00 %	1,44 %		4.020.389.634		0,57		
					Pengembangan Kurikulum SMA	SMA melaksanakan pendidikan karakter (sekolah)	68	5.000.000.000	67	703.284.490	67	702.100.000	-	50.178.200	0,00 %	7,15 %		753.462.690		0,15		
					Pemberian Beasiswa Siswa SMA	Jumlah siswa SMA tidak mampu mendapat beasiswa (siswa)	2635	3.162.000.000	2485	2.348.700.000	1100	1.100.000.000	-	-	0,00 %	0,00 %		2.348.700.000		0,74		
					Pengembangan Sarana Pendidikan SMA (DAK Reguler)		20	20.000.000.000	53	14.251.720.011		18.086.289.000	-	-	0,00 %	0,00 %		14.251.720.011		0,71		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Kejuruan-		48	233.439.400.000		37.530.345.605				242.875.481				37.773.221.086		0,16	Dinas Pendidikan	
					Peningkatan Sarana/Prasarana dan Pengembangan Kelembagaan SMK	jumlah sarana prasarana SMK (persen)	20	21.500.000.000	15	5.414.943.330	100	7.867.920.000	-	188.778.881	0,00 %	2,40 %		5.603.722.211		0,26		
					Peningkatan Kualitas Kesiswaan SMK	jumlah lomba kesiswaan SMK (jenis)	58	8.500.000.000	57	2.892.764.300	4	3.163.679.540	-	-	0,00 %	0,00 %		2.892.764.300		0,34		
					Pengembangan Kurikulum SMK	Terlaksananya pengembangan kurikulum SMK (sekolah) (sekolah)	1	3.500.000.000	6	1.064.730.528	57	1.028.404.000	-	54.096.600	0,00 %	5,26 %		1.118.827.128		0,32		
					Pemberian Beasiswa Siswa SMK	Jumlah Siswa Tidak Mampu terbiayai (siswa) (siswa)	1918	2.301.600.000	1145	1.223.140.000	1100	1.100.000.000	-	-	0,00 %	0,00 %		1.223.140.000		0,53		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Pengembangan Sarana Pendidikan SMK (DAK Penugasan)		30	15.000.000.000	100	26.934.767.447		32.342.637.000	-	-	0,00 %	0,00 %		26.934.767.447		1,80		
					Program Peningkatanan dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Khusus-		36	72.250.000.000	0	5.074.557.270				332.780.424				5.407.337.694		0,07	Dinas Pendidikan	
					Peningkatan sarana/prasarana dan pengembangan kelembagaan pendidikan khusus	tersedia pagar, mushola, mobil operasional (unit)	1	2.800.000.000	0	1.177.500.000	4	992.200.000	-	-	0,00 %	0,00 %		1.177.500.000		0,42		
					Peningkatan kualitas kesiswaan Pendidikan Khusus	jumlah lomba pendidikan khusus (jenis)	3	1.800.000.000	3	989.054.545	3	1.036.937.000	-	-	0,00 %	0,00 %		989.054.545		0,55		
					Pengembangan kurikulum pendidikan khusus	Jumlah SLB yang menerapkan Kurikulum 2016 dan Kurikulum 2006 (sekolah)	9	1.000.000.000	9	886.069.145	9	838.808.000	9	253.835.000	100,00%	30,26 %		1.139.904.145		1,14		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Peningkatan Fungsi Pelayanan Pusat Layanan Autis	Terlaksananya pelayanan Pusat Layanan Autis (bulan) (bulan)	12	2.750.000.000	12	1.237.341.420	12	1.383.361.000	3	78.945.424	25,00%	5,71%		1.316.286.844		0,48		
					Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan Khusus (DAK Non Fisik)		10	9.000.000.000	1	784.592.160		2.371.681.000	3	78.945.424	0,00%	3,33%		863.537.584		0,10		
					Program Peningkatan dan Pengembangan Kuantitas dan Kualitas Guru Serta Tenaga Kependidikan-		100	42.982.994.000	0	1.995.653.575				181.646.865				2.177.300.440		0,05	Dinas Pendidikan	
					Peningkatan Mutu PTK SMA	Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan Terlatih (orang)	1	4.000.000.000	150	796.611.167	50	4.831.423.600	45	148.669.515	90,00%	3,08%		945.280.682		0,24		
					Peningkatan Mutu PTK SMK	Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan Terlatih (orang (orang)	1	4.000.000.000	1	741.263.423	100	2.878.530.500	-	-	0,00%	0,00%		741.263.423		0,19		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Peningkatan Mutu PTK SLB	Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan SLB Terlatih (orang)	50	3.100.000.000	1	457.778.985	150	925.434.800	140	32.977.350	93,33%	3,56 %		490.756.335		0,16		
					Program Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (DAK Non Fisik)		100	342.946.299.269	0	58.797.407.015				-				58.797.407.015		0,17	Dinas Pendidikan	
					Pengelolaan Dana BOS di SLB Negeri Pangkalpinang (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%) (bulan)	100	190.421.209	80	440.820.000	12	553.600.000,00	3	-	25,00%	0,00 %		440.820.000		2,31		
					Pengelolaan Dana BOS di SLB Negeri Sungailiat (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%) (bulan)	100	107.207.651	95	214.764.000	12	290.000.000,00	3	-	25,00%	0,00 %		214.764.000		2,00		
					Pengelolaan Dana BOS di SLB Negeri Mentok (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%) (bulan)	100	107.207.651	95	185.700.000	12	169.200.000,00	3	-	25,00%	0,00 %		185.700.000		1,73		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Pengelolaan Dana BOS di SLB Negeri Toboali (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%) (bulan)	100	107.207.651	75	166.700.955	12	201.600.000,00	3	-	25,00%	0,00 %		166.700.955		1,55		
					Pengelolaan Dana BOS di SLB Negeri Koba (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%) (bulan)	100	107.207.651	90	141.950.000	12	183.600.000,00	3	-	25,00%	0,00 %		141.950.000		1,32		
					Pengelolaan Dana BOS di SLB Negeri Tanjung Pandan (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%) (bulan)	100	136.562.127	95	252.960.000	12	314.800.000,00	3	-	25,00%	0,00 %		252.960.000		1,85		
					Pengelolaan Dana BOS di SLB Negeri Manggar (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%) (bulan)	100	107.207.651	95	187.106.500	12	249.200.000,00	3	-	25,00%	0,00 %		187.106.500		1,75		
					Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Kota Pangkalpinang (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%) (bulan)	100	853.372.904	70	1.015.997.000	12	1.520.400.000,00	3	-	25,00%	0,00 %		1.015.997.000		1,19		
					Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 2 Kota Pangkalpinang (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%) (bulan)	100	767.606.783	90	1.039.812.750	12	1.311.800.000,00	3	-	25,00%	0,00 %		1.039.812.750		1,35		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 3 Kota Pangkalpinang (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%) (bulan)	100	827.643.068	60	1.123.718.000	12	1.359.400.000,00	3	-	25,00%	0,00%		1.123.718.000		1,36		
					Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 4 Kota Pangkalpinang (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%) (bulan)	100	632.525.142	60	852.389.500	12	1.069.600.000,00	3	-	25,00%	0,00%		852.389.500		1,35		
					Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Pangkalpinang (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%) (bulan)	100	1.466.958.028	75	1.304.922.350	12	1.504.320.000,00	3	-	25,00%	0,00%		1.304.922.350		0,89		
					Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 2 Pangkalpinang (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%) (bulan)	100	2.753.449.843	75	2.135.460.000	12	2.824.000.000,00	3	-	25,00%	0,00%		2.135.460.000		0,78		
					Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 3 Pangkalpinang (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%) (bulan)	100	1.145.335.074	90	1.021.544.268	12	1.447.040.000,00	3	-	25,00%	0,00%		1.021.544.268		0,89		
					Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 4 Pangkalpinang (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%) (bulan)	100	841.580.062	90	929.369.500	12	1.305.600.000,00	3	-	25,00%	0,00%		929.369.500		1,10		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 5 Pangkalpinang (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%) (bulan)	100	621.804.377	90	472.582.000	12	653.120.000,00	3	-	25,00%	0,00 %		472.582.000		0,76		
					Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Bakam, Kabupaten Bangka (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%) (bulan)	100	234.784.756	95	350.238.000	12	399.560.000,00	3	-	25,00%	0,00 %		350.238.000		1,49		
					Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Mendobarat, Kabupaten Bangka (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%) (bulan)	100	522.101.262	75	700.476.000	12	764.400.000,00	3	-	25,00%	0,00 %		700.476.000		1,34		
					Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Belinyu, Kabupaten Bangka (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%) (bulan)	100	521.029.185	75	605.072.643	12	839.160.000,00	3	-	25,00%	0,00 %		605.072.643		1,16		
					Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 2 Mendobarat, Kabupaten Bangka (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%) (bulan)	100	189.757.543	90	312.273.500	12	450.800.000,00	3	-	25,00%	0,00 %		312.273.500		1,65		
					Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Merawang, Kabupaten Bangka (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%) (bulan)	100	436.335.141	90	686.926.745	12	706.160.000,00	3	-	25,00%	0,00 %		686.926.745		1,57		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Pemali, Kabupaten Bangka (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%) (bulan)	100	810.489.843	95	1.247.829.339	12	1.325.520.000,00	3	-	25,00%	0,00%		1.247.829.339		1,54		
					Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Puding Besar, Kabupaten Bangka (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%) (bulan)	100	527.461.644	90	640.827.353	12	628.320.000,00	3	-	25,00%	0,00%		640.827.353		1,21		
					Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 2 Puding Besar, Kabupaten Bangka (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%) (bulan)	100	63.252.514	95	274.424.768	12	196.000.000,00	3	-	25,00%	0,00%		274.424.768		4,34		
					Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Riau Silip, Kabupaten Bangka (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%) (bulan)	100	271.235.358	60	516.858.999	12	711.200.000,00	3	-	25,00%	0,00%		516.858.999		1,91		
					Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Sungailiat, Kabupaten Bangka (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%) (bulan)	100	924.129.954	60	1.127.771.520	12	1.475.040.000,00	3	-	25,00%	0,00%		1.127.771.520		1,22		
					Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Bakam, Bangka (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%) (bulan)	100	523.530.697	60	436.570.000	12	655.680.000,00	3	-	25,00%	0,00%		436.570.000		0,83		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Belinyu, Bangka (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%) (bulan)	100	541.398.639	90	649.941.042	12	753.920.000,00	3	-	25,00%	0,00%		649.941.042		1,20		
					Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Mendo Barat, Bangka (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%) (bulan)	100	459.206.106	60	430.032.000	12	521.920.000,00	3	-	25,00%	0,00%		430.032.000		0,94		
					Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Sungailiat, Bangka (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%) (bulan)	100	1.897.575.427	80	1.325.075.620	12	1.900.160.000,00	3	-	25,00%	0,00%		1.325.075.620		0,70		
					Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 2 Sungailiat, Bangka (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%) (bulan)	100	1.190.004.929	90	952.282.000	12	1.224.640.000,00	3	-	25,00%	0,00%		952.282.000		0,80		
					Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Jebus, Kabupaten Bangka Barat (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%) (bulan)	100	638.957.601	95	843.911.250	12	1.025.640.000,00	3	-	25,00%	0,00%		843.911.250		1,32		
					Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Kelapa, Kabupaten Bangka Barat (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%) (bulan)	100	647.534.214	95	801.122.000	12	947.800.000,00	3	-	25,00%	0,00%		801.122.000		1,24		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Muntok, Kabupaten Bangka Barat (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%) (bulan)	100	626.092.683	60	603.334.617	12	1.114.960.000,00	3	-	25,00%	0,00 %		603.334.617		0,96		
					Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Parit Tiga, Kabupaten Bangka Barat (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%) (bulan)	100	344.136.561	60	432.110.000	12	759.920.000,00	3	-	25,00%	0,00 %		432.110.000		1,26		
					Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%) (bulan)	100	536.038.256	90	802.001.375	12	983.080.000,00	3	-	25,00%	0,00 %		802.001.375		1,50		
					Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Tempilang, Kabupaten Bangka Barat (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%) (bulan)	100	373.082.626	90	531.921.585	12	627.200.000,00	3	-	25,00%	0,00 %		531.921.585		1,43		
					Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Kelapa, Bangka Barat (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%) (bulan)	100	932.706.566	90	813.873.666	12	993.600.000,00	3	-	25,00%	0,00 %		813.873.666		0,87		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Mentok, Bangka Barat (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%) (bulan)	100	1.188.218.135	60	798.442.161	12	1.259.840.000,00	3	-	25,00%	0,00 %		798.442.161		0,67			
					Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Parittiga, Bangka Barat (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%) (bulan)	100	1.089.944.454	60	1.032.710.873	12	1.398.080.000,00	3	-	25,00%	0,00 %		1.032.710.873		0,95			
					Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Tempilang, Bangka Barat (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%) (bulan)	100	493.155.196	60	405.016.650	12	559.680.000,00	3	-	25,00%	0,00 %		405.016.650		0,82			
					Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Koba, Kabupaten Bangka Tengah (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%) (bulan)	100	645.390.061	75	963.506.750	12	1.036.840.000,00	3	-	25,00%	0,00 %		963.506.750		1,49			
					Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Lubukbesar, Kabupaten Bangka Tengah (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%) (bulan)	100	394.524.157	75	846.720.000	12	852.320.000,00	3	-	25,00%	0,00 %		846.720.000		2,15			
					Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Namang, Kabupaten Bangka Tengah (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%) (bulan)	100	438.479.294	95	578.070.000	12	656.320.000,00	3	-	25,00%	0,00 %		578.070.000		1,32			

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Pangkalanbaru, Kabupaten Bangka Tengah (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%) (bulan)	100	424.542.299	95	691.311.850	12	793.240.000,00	3	-	25,00%	0,00%		691.311.850		1,63		
					Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Sungaiselan, Kabupaten Bangka Tengah (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%) (bulan)	100	248.721.751	95	394.896.500	12	505.120.000,00	3	-	25,00%	0,00%		394.896.500		1,59		
					Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 2 Sungaiselan, Kabupaten Bangka Tengah (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%) (bulan)	100	561.768.093	60	795.489.750	12	945.000.000,00	3	-	25,00%	0,00%		795.489.750		1,42		
					Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Koba, Bangka Tengah (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%) (bulan)	100	703.996.910	90	674.409.000	12	978.560.000,00	3	-	25,00%	0,00%		674.409.000		0,96		
					Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 2 Koba, Bangka Tengah (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%) (bulan)	100	1.402.633.437	75	1.131.000.000	12	1.367.360.000,00	3	-	25,00%	0,00%		1.131.000.000		0,81		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Pangkalanbaru, Bangka Tengah (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%) (bulan)	100	1.561.658.120	60	673.793.050	12	1.646.080.000,00	3	-	25,00%	0,00 %		673.793.050		0,43		
					Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Simpangkatis, Bangka Tengah (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%) (bulan)	100	1.275.771.050	95	1.167.142.500	12	1.533.120.000,00	3	-	25,00%	0,00 %		1.167.142.500		0,91		
					Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Sungaiselan, Bangka Tengah (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%) (bulan)	100	355.572.043	80	368.646.000	12	443.200.000,00	3	-	25,00%	0,00 %		368.646.000		1,04		
					Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%) (bulan)	100	494.227.272	95	861.450.429	12	985.320.000,00	3	-	25,00%	0,00 %		861.450.429		1,74		
					Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Kep. Pongok, Kabupaten Bangka Selatan (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%) (bulan)	100	186.541.313	95	409.855.850	12	315.000.000,00	3	-	25,00%	0,00 %		409.855.850		2,20		
					Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Lepar Pongok, Kabupaten Bangka Selatan (DAK	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%) (bulan)	100	232.640.603	60	321.594.000	12	460.600.000,00	3	-	25,00%	0,00 %		321.594.000		1,38		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Non Fisik)																	
					Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Payung, Kabupaten Bangka Selatan (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%) (bulan)	100	599.290.770	95	802.584.000	12	932.960.000,00	3	-	25,00%	0,00%		802.584.000		1,34		
					Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Pulau Besar, Kabupaten Bangka Selatan (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%) (bulan)	100	97.558.963	95	304.528.500	12	231.280.000,00	3	-	25,00%	0,00%		304.528.500		3,12		
					Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%) (bulan)	100	391.307.927	95	541.772.000	12	592.480.000,00	3	-	25,00%	0,00%		541.772.000		1,38		
					Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Toboali, Kabupaten Bangka Selatan (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%) (bulan)	100	882.318.970	75	1.131.940.210	12	1.329.440.000,00	3	-	25,00%	0,00%		1.131.940.210		1,28		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 2 Toboali, Kabupaten Bangka Selatan (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%) (bulan)	100	488.866.890	95	626.262.000	12	798.280.000,00	3	-	25,00%	0,00 %		626.262.000		1,28		
					Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Airgegas , Bangka Selatan (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%) (bulan)	100	659.327.055	60	481.043.000	12	657.600.000,00	3	-	25,00%	0,00 %		481.043.000		0,73		
					Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Payung, Bangka Selatan (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%) (bulan)	100	591.428.876	90	518.384.000	12	715.520.000,00	3	-	25,00%	0,00 %		518.384.000		0,88		
					Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Simpangrimba, Bangka Selatan (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%) (bulan)	100	103.634.063	60	220.901.200	12	339.200.000,00	3	-	25,00%	0,00 %		220.901.200		2,13		
					Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Toboali, Bangka Selatan (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%) (bulan)	100	1.240.035.166	75	1.042.006.455	12	1.230.080.000,00	3	-	25,00%	0,00 %		1.042.006.455		0,84		
					Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Tukak Sadai, Bangka Selatan (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%) (bulan)	100	469.926.871	60	485.854.000	12	591.360.000,00	3	-	25,00%	0,00 %		485.854.000		1,03		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Membalong, Kabupaten Belitung (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%) (bulan)	100	476.001.972	95	636.489.000	12	804.160.000,00	3	-	25,00%	0,00%		636.489.000		1,34		
					Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Sijuk, Kabupaten Belitung (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%) (bulan)	100	487.794.813	95	733.843.100	12	749.280.000,00	3	-	25,00%	0,00%		733.843.100		1,50		
					Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%) (bulan)	100	718.291.263	100	1.472.079.869	12	1.030.120.000,00	3	-	25,00%	0,00%		1.472.079.869		2,05		
					Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 2 Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%) (bulan)	100	751.525.635	95	969.990.000	12	1.076.320.000,00	3	-	25,00%	0,00%		969.990.000		1,29		
					Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Badau, Belitung (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%) (bulan)	100	818.351.738	90	688.792.000	12	864.000.000,00	3	-	25,00%	0,00%		688.792.000		0,84		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Selat Nasik, Belitung (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%) (bulan)	100	235.856.833	80	219.450.000	12	292.800.000,00	3	-	25,00%	0,00%		219.450.000		0,93		
					Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 2 Tanjungpandan, Belitung (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%) (bulan)	100	1.400.846.643	90	1.169.224.000	12	1.417.280.000,00	3	-	25,00%	0,00%		1.169.224.000		0,83		
					Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Tanjungpandan, Belitung (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%) (bulan)	100	1.919.016.957	90	1.344.648.000	12	1.510.400.000,00	3	-	25,00%	0,00%		1.344.648.000		0,70		
					Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 3 Tanjungpandan, Belitung (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%) (bulan)	100	893.397.094	75	742.852.750	12	904.640.000,00	3	-	25,00%	0,00%		742.852.750		0,83		
					Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Damar, Kabupaten Belitung Timur (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%) (bulan)	100	344.136.561	90	411.636.000	12	484.120.000,00	3	-	25,00%	0,00%		411.636.000		1,20		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Gantung, Kabupaten Belitung Timur (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%) (bulan)	100	607.867.383	60	856.928.625	12	1.043.280.000,00	3	-	25,00%	0,00 %		856.928.625		1,41		
					Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 KelapaKampit, Kabupaten Belitung Timur (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%) (bulan)	100		95	889.255.200	12	693.280.000,00	3	-	25,00%	0,00 %		889.255.200		#DIV/0!		
					Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Manggar, Kabupaten Belitung Timur (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%) (bulan)	100	419.181.916	90	618.775.723	12	1.065.680.000,00	3	-	25,00%	0,00 %		618.775.723		1,48		
					Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Simpangpesak, Kabupaten Belitung Timur (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%) (bulan)	100	418.109.840	90	641.814.000	12	745.080.000,00	3	-	25,00%	0,00 %		641.814.000		1,54		
					Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Dendang, Belitung Timur (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%) (bulan)	100	326.983.336	60	178.368.000	12	315.200.000,00	3	-	25,00%	0,00 %		178.368.000		0,55		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Kelapa Kampit, Belitung Timur (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%) (bulan)	100	816.564.944	60	780.856.175	12	896.640.000,00	3	-	25,00%	0,00 %		780.856.175		0,96		
					Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Manggar, Belitung Timur (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%) (bulan)	100	1.075.650.101	65	960.039.000	12	1.345.280.000,00	3	-	25,00%	0,00 %		960.039.000		0,89		
					Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Simpang Renggiang, Belitung Timur (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%) (bulan)	100	262.658.746	90	234.848.000	12	270.720.000,00	3	-	25,00%	0,00 %		234.848.000		0,89		
					Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Pulau Besar, Bangka Selatan (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%) (bulan)	100	184.039.801	95	256.990.000	12	215.680.000,00	3	-	25,00%	0,00 %		256.990.000		1,40		
					Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Simpang Teritip, Bangka Barat (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%) (bulan)	0	-	90	87.302.000	12	200.000.000,00	3	-	25,00%	0,00 %		87.302.000		#DIV/0!		
					Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri Laskar Pelangi (SKO)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%) (bulan)	0	-	80	63.224.000	12	35.280.000,00	3	-	25,00%	0,00 %		63.224.000		#DIV/0!		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Sijuk (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%) (bulan)	0	-	0	-	12	353.920.000,00	3	-	25,00%	0,00 %		-		#DIV/0!		
					Pengelolaan Dana BOS Afirmasi (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%) (bulan)	0	-	0	-	12	1.515.000.000,00	3	-	25,00%	0,00 %		-		#DIV/0!		
					Pengelolaan Dana BOS Kinerja (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%) (bulan)					12	13.408.870.000,00	3	-	25,00%	0,00 %		-		#DIV/0!		
					Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Pangkalpinang dan Bangka		90	209.220.500.000	0	30.582.000.199				2.735.816.031				33.317.816.230		0,16	Dinas Pendidikan	
					Peningkatan Fungsi Pelayanan Pendidikan Wilayah Pangkalpinang dan Bangka	Jumlah sekolah terlayani (Sekolah) (sekolah) (sekolah)	27	12.000.000.000	26	12.195.263.589	26	11.724.988.800	26	1.745.800.000	100,00%	14,89 %		13.941.063.589		1,16		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Pangkalpinang	Jumlah siswa SMK N 1 Pangkalpinang terlayani (siswa) (siswa)	797	2.000.000.000	864	763.830.292	852	1.401.000.000	852	74.438.068	100,00%	5,31%		838.268.360		0,42		
					Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 2 Pangkalpinang	Jumlah siswa SMK N 2 Pangkalpinang terlayani (siswa) (siswa)	1500	3.500.000.000	1549	1.573.061.538	1529	2.337.050.000	1.529	67.680.531	100,00%	2,90%		1.640.742.069		0,47		
					Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 3 Pangkalpinang	Jumlah siswa SMK N 3 Pangkalpinang terlayani (siswa) (siswa)	689	1.500.000.000	759	1.198.993.400	800	1.055.664.000	799	60.000.000	99,88%	5,68%		1.258.993.400		0,84		
					Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 4 Pangkalpinang	Jumlah siswa SMK N 4 Pangkalpinang terlayani (siswa) (siswa)	614	1.228.000.000	616	873.830.469	713	840.721.600	713	55.000.000	100,00%	6,54%		928.830.469		0,76		
					Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 5 Pangkalpinang	Jumlah siswa SMK N 5 Pangkalpinang terlayani (siswa) (siswa)	468	936.000.000	329	371.333.813	372	494.685.600	365	27.999.905	98,12%	5,66%		399.333.718		0,43		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kota Pangkalpinang	Jumlah siswa SMA N 1 Pangkalpinang terlayani (siswa) (siswa)	800	1.600.000.000	946	888.011.949	995	1.203.400.000	995	78.000.000	100,00%	6,48 %		966.011.949		0,60		
					Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Kota Pangkalpinang		839	1.510.200.000	851	818.247.575		1.018.800.000						818.247.575		0,54		
					Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 3 Kota Pangkalpinang	Jumlah siswa SMA N 3 Pangkalpinang terlayani (siswa) (siswa)	923	1.661.400.000	899	1.203.357.620	893	1.145.864.000	893	55.130.210	100,00%	4,81 %		1.258.487.830		0,76		
					Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 4 Kota Pangkalpinang		727	1.308.600.000	684	639.940.000		874.250.000						639.940.000		0,49		
					Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Pangkalpinang	Jumlah siswa SLB N Pangkalpinang terlayani (siswa) (siswa)	290	2.233.000.000	237	884.000.000	260	1.098.200.000	256	62.000.000	98,46%	5,65 %		946.000.000		0,42		
					Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Sungailiat, Bangka	Jumlah siswa SMK N 1 Sungailiat terlayani (siswa) (siswa)	1188	2.376.000.000	1044	1.118.079.530	1082	1.618.000.000	1.061	97.967.630	98,06%	6,05 %		1.216.047.160		0,51		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 2 Sungailiat, Bangka	Jumlah siswa SMK N 2 Sungailiat, Bangka terlayani (siswa) (siswa)	787	1.574.000.000	655	634.358.210	691	933.400.000	683	-	98,84%	0,00 %		634.358.210		0,40		
					Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Mendo Barat, Bangka	Jumlah siswa SMK N 1 mendo Barat, Bangka terlayani (siswa) (siswa)	513	1.026.000.000	270	384.060.000	321	405.830.000	290	-	90,34%	0,00 %		384.060.000		0,37		
					Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Belinyu, Bangka	Jumlah siswa SMK N 1 Belinyu, Bangka terlayani (siswa) (siswa)	556	1.112.000.000	406	546.295.288	417	540.880.000	417	36.348.600	100,00%	6,72 %		582.643.888		0,52		
					Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Bakam, Bangka	Jumlah siswa SMK N 1 Bakam, Sungailia terlayani (siswa) (siswa)	473	946.000.000	356	556.026.350	335	499.064.000	335	53.062.800	100,00%	10,63 %		609.089.150		0,64		
					Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Bakam, Kabupaten Bangka	jumlah siswa sman 1 bakam, kabupaten bangka terlayani (siswa) (siswa)	473	757.800.000	262	306.923.500	281	312.884.000	266	17.572.450	94,66%	5,62 %		324.495.950		0,43		
					Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Belinyu, Kabupaten Bangka	jumlah siswa sman 1 belinyu, kabupaten bangka terlayani (siswa) (siswa)	514	950.000.000	515	693.082.900	525	592.174.000	525	40.000.000	100,00%	6,75 %		733.082.900		0,77		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Mendobarat, Kabupaten Bangka	jumlah siswa sman 1 mendobarat, kabupaten bangka terlayani (siswa) (siswa)	552	1.000.000.000	528	706.100.000	520	661.620.000	513	55.000.000	98,65%	8,31%		761.100.000		0,76		
					Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Mendobarat, Kabupaten Bangka	jumlah siswa sman 2 mendobarat, kabupaten bangka terlayani (siswa) (siswa)	303	545.400.000	247	294.194.270	288	288.910.000	288	-	100,00%	0,00%		294.194.270		0,54		
					Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Merawang, Kabupaten Bangka	jumlah siswa sman 1 merawang, kabupaten bangka terlayani (siswa) (siswa)	512	950.000.000	443	443.653.725	449	502.320.000	449	35.139.610	100,00%	7,00%		478.793.335		0,50		
					Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Pemali, Kabupaten Bangka	jumlah siswa sman 1 pemali, kabupaten bangka terlayani (siswa) (siswa)	800	1.500.000.000	838	790.626.992	868	1.065.000.000	868	67.699.227	100,00%	6,36%		858.326.219		0,57		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Puding Besar, Kabupaten Bangka	jumlah siswa sman 1 puding besar, kabupaten bangka terlayani (siswa) (siswa)	617	1.110.600.000	449	539.504.800	420	567.550.000	420	38.000.000	100,00%	6,70 %		577.504.800		0,52		
					Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Riau Silip, Kabupaten Bangka	jumlah siswa sman 1 riau silip, riau silip terlayani (siswa) (siswa)	434	781.200.000	395	470.424.000	466	448.835.000	466	29.000.000	100,00%	6,46 %		499.424.000		0,64		
					Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Sungailiat, Kabupaten Bangka	jumlah siswa sman 1 sungailiat, kabupaten bangka terlayani (siswa) (siswa)	890	1.700.000.000	907	885.106.000	924	1.094.485.000	924	-	100,00%	0,00 %		885.106.000		0,52		
					Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Puding Besar, Kabupaten Bangka		352	633.600.000	129	302.363.889		300.000.000						302.363.889		0,48		
					Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Sungailiat	Jumlah siswa SLB N Sungailiat terlayani (siswa) (siswa)	136	952.000.000	122	501.330.500	133	564.000.000	133	39.977.000	100,00%	7,09 %		541.307.500		0,57		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka Barat		90	90.231.200.000	0	12.890.492.057				1.427.232.347				14.317.724.404		0,16	Dinas Pendidikan	
					Peningkatan Fungsi Pelayanan Pendidikan Kabupaten Bangka Barat	jumlah sekolah terlayani (sekolah) (sekolah)	13	6.500.000.000	12	5.272.893.857	12	5.725.977.600	12	835.167.597	100,00%	14,59%		6.108.061.454		0,94		
					Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Mentok, Bangka Barat	jumlah siswa smkn 1 mentok, bangka barat terlayani (siswa) (siswa)	793	1.586.000.000	737	827.817.600	706	1.169.713.000	706	56.253.000	100,00%	4,81%		884.070.600		0,56		
					Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Kelapa, Bangka Barat	jumlah siswa smkn 1 kelapa, bangka barat terlayani (siswa) (siswa)	682	1.364.000.000	562	850.657.000	586	858.085.000	568	51.000.000	96,93%	5,94%		901.657.000		0,66		
					Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Parittiga, Bangka Barat	jumlah siswa smkn 1 parittiga, bangka barat terlayani (siswa) (siswa)	735	1.470.000.000	714	1.051.133.900	785	1.018.990.000	785	111.068.250	100,00%	10,90%		1.162.202.150		0,79		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Tempilang, Bangka Barat	jumlah siswa smkn 1 tempilang, bangka barat terlayani (siswa) (siswa)	428	856.000.000	270	429.600.000	332	453.800.000	309	34.000.000	93,07%	7,49 %		463.600.000		0,54		
					Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Simpang Teritip, Bangka Barat	jumlah siswa smkn 1 simpang teritip, bangka barat terlayani (siswa) (siswa)	288	576.000.000	58	315.770.000	128	383.360.500	109	30.000.000	85,16%	7,83 %		345.770.000		0,60		
					Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Jebus, Kabupaten Bangka Barat	jumlah siswa sman 1 jebus, kabupaten bangka barat terlayani (siswa) (siswa)	722	1.299.600.000	645	902.149.000	679	826.300.000	679	32.250.000	100,00%	3,90 %		934.399.000		0,72		
					Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kelapa, Kabupaten Bangka Barat	jumlah siswa sman 1 kelapa, kabupaten bangka barat terlayani (siswa) (siswa)	729	1.312.200.000	614	852.342.000	633	762.500.000	629	100.000.000	99,37%	13,11 %		952.342.000		0,73		
					Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Muntok, Kabupaten Bangka	jumlah siswa sman 1 muntok, kabupaten bangka barat terlayani (siswa)	710	1.278.000.000	690	544.176.300	738	731.300.000	738	39.531.500	100,00%	5,41 %		583.707.800		0,46		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Barat	(siswa)																
					Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Parit Tiga, Kabupaten Bangka Barat	jumlah siswa sman 1 parit tiga, kabupaten bangka barat terlayani (siswa) (siswa)	535	963.000.000	469	511.939.600	503	478.106.000	503	40.600.000	100,00%	8,49 %		552.539.600		0,57		
					Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat	jumlah siswa sman 1 simpang teritip, kabupaten bangka barat terlayani (siswa) (siswa)	719	1.294.200.000	617	469.682.600	642	718.042.594	642	38.362.000	100,00%	5,34 %		508.044.600		0,39		
					Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Tempilang, Kabupaten Bangka Barat	jumlah siswa sman 1 tempilang, kabupaten bangka barat terlayani (siswa) (siswa)	470	846.000.000	383	488.030.200	407	344.460.000	407	29.000.000	100,00%	8,42 %		517.030.200		0,61		
					Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Muntok	jumlah siswa SLB N Muntok, terlayani (siswa) (siswa)	120	840.000.000	74	374.300.000	85	344.500.000	77	30.000.000	90,59%	8,71 %		404.300.000		0,48		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan		90	207.518.000.000	0	29.195.933.576				2.109.990.219				31.305.923.795		0,15		
					Peningkatan Fungsi Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan	jumlah sekolah terlayani (sekolah) (sekolah)	29	15.000.000.000	27	13.443.970.294	28	12.314.027.900	28	1.044.000.000	100,00%	8,48 %		14.487.970.294		0,97		
					Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Koba, Bangka Tengah	jumlah siswa smk n 1 koba, terlayani (siswa) (siswa)	793	1.586.000.000	475	716.999.300	697	638.580.000	540	69.298.000	77,47%	10,85 %		786.297.300		0,50	Dinas Pendidikan	
					Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 2 Koba, Bangka Tengah	jumlah siswa SMK N 2 Koba, bangka tengah terlayani (siswa) (siswa)	866	1.732.000.000	785	586.914.819	774	1.080.702.930	774	65.086.796	100,00%	6,02 %		652.001.615		0,38		
					Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Simpangkatis, Bangka Tengah	jumlah siswa SMK N 1 Simpang katis, bangka tengah terlayani (siswa) (siswa)	888	1.776.000.000	763	949.857.375	865	1.164.100.000	865	78.464.500	100,00%	6,74 %		1.028.321.875		0,58		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Pangkalanbaru, Bangka Tengah	jumlah siswa SMK N 1 Pangkalan baru, bangka tengah terlayani (siswa) (siswa)	900	1.800.000.000	844	503.366.120	924	1.284.600.000	924	46.075.543	100,00%	3,59 %		549.441.663		0,31		
					Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Sungaiselan, Bangka Tengah	jumlah siswa SMK N 1 Sungai selan, bangka tengah terlayani (siswa) (siswa)	351	702.000.000	242	374.100.000	255	304.800.000	254	25.000.000	99,61%	8,20 %		399.100.000		0,57		
					Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Koba, Kabupaten Bangka Tengah	jumlah siswa SMA N 1 Koba, bangka tengah terlayani (siswa) (siswa)	790	1.422.000.000	665	466.122.730	694	767.360.000	689	52.319.080	99,28%	6,82 %		518.441.810		0,36		
					Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Lubukbesar, Kabupaten Bangka Tengah	jumlah siswa SMA N 1 Lubuk besar, bangka tengah terlayani (siswa) (siswa)	550	990.000.000	476	449.795.000	552	517.300.000	552	23.200.000	100,00%	4,48 %		472.995.000		0,48		
					Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Namang, Kabupaten Bangka Tengah	jumlah siswa SMA N 1 Namang, bangka tengah terlayani (siswa) (siswa)	545	981.000.000	421	331.740.000	449	465.600.000	437	32.100.000	97,33%	6,89 %		363.840.000		0,37		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Pangkalanbaru, Kabupaten Bangka Tengah	jumlah siswa SMA N 1 Pangkalan baru, bangka tengah terlayani (siswa) (siswa)	595	1.071.000.000	514	593.231.000	528	566.700.000	528	37.757.000	100,00%	6,66%		630.988.000		0,59		
					Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Sungaiselan, Kabupaten Bangka Tengah	jumlah siswa SMA N 1 Sungai selan, bangka tengah terlayani (siswa) (siswa)	360	648.000.000	247	304.309.900	325	257.600.000	325	11.353.000	100,00%	4,41%		315.662.900		0,49		
					Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Sungaiselan, Kabupaten Bangka Tengah			1.222.200.000		681.263.112		709.700.000						681.263.112		0,56		
					Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri Laskar Pelangi (SKO)	jumlah siswa SMA Laskar Pelangi terlayani (siswa) (siswa)	160	2.100.000.000	24	1.873.475.000	96	3.458.200.000	25	73.849.400	26,04%	2,14%		1.947.324.400		0,93		
					Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB N Koba	jumlah siswa SLB N Koba, bangka tengah terlayani (siswa) (siswa)	100	700.000.000	80	340.202.588	84	441.500.000	84	21.447.000	100,00%	4,86%		361.649.588		0,52		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Toboali, Bangka Selatan	jumlah siswa SMK N 1 Toboali, bangka selatan terlayani (siswa) (siswa)	947	1.894.000.000	723	946.000.300	787	930.080.000	696	70.000.000	88,44%	7,53 %		1.016.000.300		0,54		
					Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Payung, Bangka Selatan	jumlah siswa SMK N 1 Payung, bangka selatan terlayani (siswa) (siswa)	441	918.000.000	3,31	537.800.000	401	442.400.000	401	29.000.000	100,00%	6,56 %		566.800.000		0,62		
					Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Pulau Besar, Bangka Selatan	jumlah siswa SMK N 1 Pulau besar, bangka selatan terlayani (siswa) (siswa)	217	434.000.000	0,89	200.000.000	121	228.956.000	120	19.480.000	99,17%	8,51 %		219.480.000		0,51		
					Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Tukak Sadai, Bangka Selatan	jumlah siswa SMK N 1 Tukak sadai, bangka selatan terlayani (siswa) (siswa)	441	882.000.000	3,13	482.730.000	345	413.100.000	323	30.200.000	93,62%	7,31 %		512.930.000		0,58		
					Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Simpangrimba, Bangka Selatan	jumlah siswa SMK N 1 Simpangrimba, bangka selatan terlayani (siswa) (siswa)	222	444.000.000	0,94	290.455.000	187	248.750.000	187	22.770.000	100,00%	9,15 %		313.225.000		0,71		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Airgegas , Bangka Selatan	jumlah siswa SMK N 1 Air gegas, bangka selatan terlayani (siswa) (siswa)	502	1.004.000.000	374	514.200.000	406	437.384.000	367	38.540.000	90,39%	8,81%		552.740.000		0,55		
					Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan	jumlah siswa SMA N 1 Air gegas, bangka selatan terlayani (siswa) (siswa)	710	1.278.000.000	582	798.000.000	659	606.752.000	659	43.000.000	100,00%	7,09%		841.000.000		0,66		
					Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Lepar Pongok, Kabupaten Bangka Selatan	jumlah siswa SMA N 1 Lepar pongok, bangka selatan terlayani (siswa) (siswa)	366	658.800.000	2,38	291.083.000	301	289.500.000	301	24.000.000	100,00%	8,29%		315.083.000		0,48		
					Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kep. Pongok, Kabupaten Bangka Selatan	jumlah siswa SMA N 1 kep.Pongok, bangka selatan terlayani (siswa (siswa)	321	577.800.000	1,93	261.200.000	225	224.706.000	205	-	91,11%	0,00%		261.200.000		0,45		
					Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Payung, Kabupaten Bangka Selatan	jumlah siswa SMA N 1 Payung, bangka selatan terlayani (siswa) (siswa)	717	1.290.600.000	5,89	600.000.000	621	676.480.000	621	40.000.000	100,00%	5,91%		640.000.000		0,50		
					Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA						77	182.100.0		15.890.0	0,00	8,73		15.890.0		#DIV/0!		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Negeri 1 Pulau Besar, Kabupaten Bangka Selatan							00	-	00	%	%		00				
						jumlah siswa SMA N 1 Pulau besar, bangka selatan terlayani (siswa) (siswa)	273	491.400.000	1,45	234.480.000	177		-		0,00 %			234.480.000		0,48		
					Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan	jumlah siswa SMA N 1 Simpang rimba, bangka selatan terlayani (siswa) (siswa)	524	943.200.000	396	485.439.741	428	525.240.000	396	39.999.900	92,52%	7,62 %		525.439.641		0,56		
					Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Toboali, Kabupaten Bangka Selatan	jumlah siswa SMA N 1 Toboali, bangka selatan terlayani (siswa) (siswa)	900	1.620.000.000	874	877.850.000	900	983.800.000	877	128.000.000	97,44%	13,01 %		1.005.850.000		0,62		
					Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Toboali, Kabupaten Bangka Selatan		606	1.090.800.000	4,78	707.022.000		595.722.000						707.022.000		0,65		
					Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB N Toboali, Kabupaten Bangka Selatan	jumlah siswa SLB N Toboali, bangka selatan terlayani (siswa (siswa)	110	770.000.000	0,83	354.326.297	93	454.525.000	93	29.160.000	100,00%	6,42 %		383.486.297		0,50		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Belitung dan Belitung Timur		90	166.284.800.000	0	19.484.444.192				1.817.982.223				21.302.426.415		0,13	Dinas Pendidikan	
					Peningkatan Fungsi Pelayanan Pendidikan Kabupaten Belitung	jumlah sekolah terlayani (sekolah) (sekolah)	22	12.000.000.000	0,2	7.748.776.577	21	9.773.123.040	21	692.773.392	100,00%	7,09 %		8.441.549.969		0,70		
					Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Tanjungpandan, Belitung	jumlah siswa SMK N 1 Tanjungpandan, Belitung terlayani (siswa) (siswa)	1100	2.200.000.000	9,33	1.150.280.389	1100	1.408.260.000	861	88.966.196	78,27%	6,32 %		1.239.246.585		0,56		
					Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 2 Tanjungpandan, Belitung	jumlah siswa SMK N 2 Tanjungpandan, Belitung terlayani (siswa) (siswa)	866	1.732.000.000	7,8	627.444.363	802	1.141.980.000	800	80.055.600	99,75%	7,01 %		707.499.963		0,41		
						jumlah siswa SMK N 2 Tanjungpandan, Belitung terlayani (siswa) (siswa)					802		-		0,00 %		-		#DIV/0!			

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 3 Tanjungpandan, Belitung	jumlah siswa SMK N 3 Tanjungpandan, Belitung terlayani (siswa) (siswa)	628	1.256.000.000	5,04	577.444.873	532	762.960.000	508	49.777.739	95,49%	6,52 %		627.222.612		0,50		
					Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Badau, Belitung	jumlah siswa SMK N 1 Badau, Belitung terlayani (siswa) (siswa)	619	1.238.000.000	4,69	515.943.731	523	688.025.000	488	35.029.251	93,31%	5,09 %		550.972.982		0,45		
					Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Selat Nasik, Belitung	jumlah siswa SMK N 1 Selat nasik, Belitung terlayani (siswa) (siswa)	260	520.000.000	1,52	236.663.563	164	251.000.000	164	27.072.000	100,00%	10,79 %		263.735.563		0,51		
					Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Membalong, Kabupaten Belitung	jumlah siswa SMA N 1 Membalong, Belitung terlayani (siswa) (siswa)	592	1.065.600.000	4,92	522.803.289	526	696.595.400	526	50.456.421	100,00%	7,24 %		573.259.710		0,54		
					Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Sijuk, Kabupaten Belitung	jumlah siswa SMA N 1 Sijuk, Belitung terlayani (siswa) (siswa)	603	1.085.400.000	4,82	456.172.800	507	662.560.000	492	44.421.975	97,04%	6,70 %		500.594.775		0,46		
					Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung	jumlah siswa SMA N 1 Tanjungpandan, Kabupaten Belitung terlayani	750	1.350.000.000	7,2	786.976.170	751	994.010.000	751	67.498.366	100,00%	6,79 %		854.474.536		0,63		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
						(siswa) (siswa)																
					Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung		885	1.593.000.000	741	903.981.641		969.100.000						903.981.641		0,57		
					Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung	jumlah siswa SLB N Tanjungpandan, Kabupaten Belitung terlayani (siswa) (siswa)	170	850.000.000	136	347.055.850	146	645.000.000	146	39.114.000	100,00%	6,06 %		386.169.850		0,45		
					Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Manggar, Belitung Timur	jumlah siswa SMK 1 MANGGAR, Kabupaten Belitung Timur terlayani (siswa) (siswa)	854	1.708.000.000	675	931.674.000	741	1.210.120.000	741	163.257.500	100,00%	13,49 %		1.094.931.500		0,64		
					Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Kelapa Kampit, Belitung Timur	jumlah siswa SMK N 1 Kelapa kampit, Belitung Timur terlayani (siswa) (siswa)	637	1.274.000.000	4,93	612.416.500	541	716.340.000	468	88.007.200	86,51%	12,29 %		700.423.700		0,55		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Dendang, Belitung Timur	jumlah siswa SMK N 1 Dendang, Belitung Timur terlayani (siswa) (siswa)	266	1.862.000.000	1,26	578.006.150	170	630.300.000	163	49.500.000	95,88%	7,85 %		627.506.150		0,34		
					Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Simpang Renggiang, Belitung Timur	jumlah siswa SMK N 1 Simpang renggiang, Belitung Timur terlayani (siswa) (siswa)	276	552.000.000	162	307.980.000	180	625.920.000	154	45.000.000	85,56%	7,19 %		352.980.000		0,64		
					Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Damar, Kabupaten Belitung Timur	jumlah siswa SMA N 1 Damar, Belitung Timur terlayani (siswa) (siswa)	451	811.800.000	319	370.867.265	355	642.858.092	321	51.997.600	90,42%	8,09 %		422.864.865		0,52		
					Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Gantung, Kabupaten Belitung Timur	jumlah siswa SMA N 1 Gantung, Belitung Timur terlayani (siswa) (siswa)	753	1.355.400.000	6,43	538.748.622	691	925.000.000	691	57.189.250	100,00%	6,18 %		595.937.872		0,44		
					Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 KelapaKampit, Kabupaten Belitung Timur	jumlah siswa SMA N 1 Kelapa kampit, Belitung Timur terlayani (siswa) (siswa)	562	1.011.600.000	4,54	417.546.509	466	607.698.000	457	-	98,07%	0,00 %		417.546.509		0,41		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Manggar, Kabupaten Belitung Timur	jumlah siswa SMA N 1 Manggar, Belitung Timur terlayani (siswa) (siswa)				875.866.000	692	873.400.000	692	82.800.000	100,00%	9,48 %		958.666.000		#DIV/0!		
					Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Simpangpesak, Kabupaten Belitung Timur	jumlah siswa SMA N 1 Simpang pesak, Belitung Timur terlayani (siswa) (siswa)	589	1.060.200.000	459	545.360.000	493	662.630.000	475	44.821.355	96,35%	6,76 %		590.181.355		0,56		
					Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Manggar, Kabupaten Belitung Timur	jumlah siswa SLB N 1 Manggar, Belitung Timur terlayani (siswa) (siswa)	140	980.000.000	102	432.435.900	115	492.500.000	115	35.994.900	100,00%	7,31 %		468.430.800		0,48		
					Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK N 1 Sijuk, Kabupaten Belitung	jumlah siswa SMK N 1 Sijuk, Belitung terlayani (siswa) (siswa)					158	377.788.000	158	24.249.478	100,00%	6,42 %		24.249.478		#DIV/0!		
					KESEHATAN																	

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	1. Persentase tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah Dinas Kesehatan Provinsi dan Balai Labkes; 2. Predikat (Nilai) SAKIP perangkat daerah Dinas Kesehatan Provinsi	1. 90% 2. 90	30.476.920.474	1. 73,45 % 2. 75,84	11.241.688.893	1. 80% 2. 90	5.788.462.535	1. N/A 2. N/A	454.541.662	#VALUE!	8	#VALUE!	11.696.230.555	#VALUE!	38,38	Dinas Kesehatan	
					Pelayanan administrasi perkantoran	Persentase tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah Dinas Kesehatan Provinsi dan Balai Labkes	90%	13.892.223.855	73,45 %	6.979.576.576	80%	3.073.254.135	N/A	360.213.318	#VALUE!	12	#VALUE!	7.339.789.894	#VALUE!	52,83		
					Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah Dinas Kesehatan Provinsi dan Balai Labkes	90%	2.777.283.251	73,45 %	799.668.592	80%	1.139.870.000	N/A	6.621.000	#VALUE!	1	#VALUE!	806.289.592	#VALUE!	29,03		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Peningkatan disiplin aparatur	Persentase tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah Dinas Kesehatan Provinsi dan Balai Labkes	90%	949.098.846	73,45 %	154.460.000	0%	134.800.000	N/A	-	#VALUE!	-	#VALUE!	154.460.000	#VALUE!	16,27		
					Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah Dinas Kesehatan Provinsi dan Balai Labkes	90%	1.145.337.090	73,45 %	234.443.726	80%	-	N/A	-	#VALUE!	#DIV/0!	#VALUE!	234.443.726	#VALUE!	20,47		
					Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan	Predikat (Nilai) SAKIP perangkat daerah Dinas Kesehatan Provinsi	90	2.135.433.453	75,84	315.781.678	90	144.638.800	N/A	35.470.200	#VALUE!	25	#VALUE!	351.251.878	#VALUE!	16,45		
					Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Predikat (Nilai) SAKIP perangkat daerah Dinas Kesehatan Provinsi	90	397.591.463	75,84	52.361.501	90	55.797.000	N/A	-	#VALUE!	-	#VALUE!	52.361.501	#VALUE!	13,17		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Peningkatan kapasitas UPTD Balai Labkes	Persentase tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah Dinas Kesehatan Provinsi dan Balai Labkes	90%	9.179.952.516	73,45 %	2.705.396.820	80%	290.102.600	N/A	51.737.144	#VALUE!	18	#VALUE!	2.757.133.964	#VALUE!	30,03		
					Dukungan manajemen (DAK Non Fisik)	Predikat (Nilai) SAKIP perangkat daerah Dinas Kesehatan Provinsi	90	-	0	-	90	950.000.000	N/A	500.000	#VALUE!	0	#VALUE!	500.000	#VALUE!	#DIV/0!		
					Program Kesehatan Masyarakat	1. Persentase kab/kota yang membuat kebijakan yang mendukung PHBS (%);	100%	42.079.545.647	57,14 %	9.323.252.081	90%	7.775.360.245	57,14%	332.272.300	63	4	1	9.655.524.381	114,28	22,95	Dinas Kesehatan	
						2. Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup (per kelahiran hidup);	19/KH		36/KH		21/KH		8/KH									

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
						3. Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup (per seribu kelahiran hidup);	7.12/ 1000 KH		7,17/ 1000 KH		7.16/100 0 KH		6,60 /10 00 KH									
						4. Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita;	14.15 %		5,62 %		14.25%		5,70 %									
						5. Persentase penduduk yang memiliki kualitas lingkungan sehat;	90%		89,24 %		84,46%		44,4 3%									
						6. Persentase puskesmas yang menjalankan kesehatan kerja dan kesehatan olah raga	80%		100%		70%		53,9 1%									
					Peningkatan kesehatan masyarakat	Persentase kab/kota yang membuat kebijakan yang mendukung PHBS	100%	4.685.109. 785	57,14 %	733.695.6 00	90%	520.682.8 40	57,1 4%	148.350. 000	63	28	1	882.045. 600	114 ,28	18,83		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Upaya peningkatan kesehatan keluarga	Persentase kab/kota yang membuat kebijakan yang mendukung PHBS	100%	4.863.884.329	57,14 %	1.412.210.064	90%	-	57,14%	-	63	#DIV/0!	1	1.412.210.064	114,28	29,03		
					Penurunan kematian ibu	Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup (per kelahiran hidup)	19/KH	7.931.906.362	36/KH	1.218.233.100	21/KH	284.715.260	8	-	#VALUE!	-	#VALUE!	1.218.233.100	#VALUE!	15,36		
					Penurunan angka kematian bayi	Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup (per seribu kelahiran hidup)	7,12/1000 KH	6.545.115.314	7,17/1000 KH	937.880.188	7,16/1000 KH	132.510.000	6,60	-	#VALUE!	-	#VALUE!	937.880.188	#VALUE!	14,33		
					Peningkatan kesehatan gizi anak dan keluarga	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	14,45 %	10.461.715.722	5,62 %	1.600.709.385	14,25%	2.580.620.000	5,70 %	-	40	-	0	1.600.709.385	78,34	15,30		
					Peningkatan penyehatan lingkungan	Persentase penduduk yang memiliki kualitas lingkungan sehat	90%	6.000.487.463	89,24 %	683.902.290	84,46%	189.506.560	44,43%	40.173.100	53	21	1	724.075.390	148,52	12,07		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Peningkatan kesehatan kerja dan olahraga	Persentase puskesmas yang menjalankan kesehatan kerja dan kesehatan olah raga	80%	1.591.326.672	100%	136.507.750	67%	67.325.585	53,91%	-	80	-	2	136.507.750	192,39	8,58		
					BOK Provinsi (Dak Non Fisik)	Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup (per kelahiran hidup)	19/KH	-	36/KH	2.132.080.662	21/KH	-		-	#VALUE!	#DIV/0!	#VALUE!	2.132.080.662	#VALUE!	#DIV/0!		
					Pengadaan makanan tambahan ibu hamil (DAK Fisik)			-		468.033.042	14,25%	-		-	-	#DIV/0!	-	468.033.042	#DIV/0!	#DIV/0!		
					Pembinaan kesehatan keluarga (DAK non fisik)	Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup (per kelahiran hidup)		-		-	21/KH	897.000.000	8	-	#VALUE!	-	8	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
					Penyehatan lingkungan (DAK Non Fisik)	Persentase penduduk yang memiliki kualitas lingkungan sehat		-		-	84,46%	520.000.000	44,43%	15.170.000	53	3	0	15.170.000	#DIV/0!	#DIV/0!		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Uppaya kesehatan kerja dan olahraga (DAK non fisik)	Persentase puskesmas yang menjalankan kesehatan kerja dan kesehatan olah raga		-		-	67%	600.000.000	53,91%	57.489.000	80	10	1	57.489.000	#DIV/0!	#DIV/0!		
					Pembinaan gizi masyarakat (DAK non fisik)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita		-		-	14,25%	876.000.000	5,70%	-	40	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
					Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat (DAK non fisik)	Persentase kab/kota yang membuat kebijakan yang mendukung PHBS		-		-	90%	1.107.000.000	57,14%	71.090.200	63	6	1	71.090.200	#DIV/0!	#DIV/0!		
					Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	1. Persentase Kabupaten/ Kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB paru BTA positif (Success Rate) minimal 85%	100%	29.202.776.971	90%	4.779.320.378	86%	4.633.234.325	17%	83.076.555	20	2	1	4.862.396.933	106,61	16,65	Dinas Kesehatan	

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
						2. Prevalensi HIV (persen) pada penduduk beresiko	<10%		0%		<10%		0%									
						3. Persentase Kabupaten/Kota mencapai eliminasi malaria	100%		86%		100%		86%									
						4. Persentase penanganan penyakit menular lainnya (hepatitis, ispa, diare, kusta, filariasis, DBD , zoonosis)	90%		100%		88%		100 %									
						5. Persentase perempuan usia 30-50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara	37.50 %		39%		28%		42%									

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
						6. Presentase pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular lainnya	90%		125%		87%		0%									
						7. Persentase Kab/Kota yang 20 % Puskesmasnya menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa	100%		100%		90%		100 %									
						8. Persentase Kab/kota yang melaksanakan kewaspadaan dini dan respon	100%		98%		90%		95%									
					Pencegahan dan pengendlaian penyakit menular TB	Persentase Kabupaten/ Kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB paru BTA positif (Success Rate) minimal 85%	100%	1.149.918.784	89,69 %	269.366.100	85,70%	125.995.000	16,92%	4.091.500	20	3	1	273.457.600	106,61	23,78		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Peningkatan pencegahan dan pengendalian HIV	Prevalensi HIV (persen) pada penduduk beresiko	<10%	3.273.590.030	0,39 %	702.108.166	<10%	-	0,33 %	-	#VALUE!	#DIV/0!	0	702.108.166	#VALUE!	21,45		
					Peningkatan pengendalian penyakit malaria	Persentase Kabupaten/Kota mencapai eliminasi malaria	100%	1.140.979.086	85,71 %	169.440.520	100%	23.216.000	85,71%	-	86	-	2	169.440.520	171,42	14,85		
					Penanganan penyakit menular lainnya (hapatitis, ISPA, diare, kusta, filariasis, DBD, zoonosis)	Persentase penanganan penyakit menular lainnya (hepatitis, ispa, diare, kusta, filariasis, DBD , zoonosis)	90%	4.354.828.881	100,00%	803.871.650	88%	75.337.500	100,00%	-	114	-	2	803.871.650	222,22	18,46		
					Peningkatan pengendalian dan pencegahan penyakit kanker	Persentase perempuan usia 30-50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara	37,50 %	524.031.259	38,56 %	143.976.400	27,50%	-	41,81%	-	152	#DIV/0!	1	143.976.400	214,32	27,47		
					Peningkatan pencegahan penyakit tidak menular lainnya (tekanan darah tinggi, obesitas, diabetes	Presentase pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular lainnya	90%	1.230.885.842	125%	289.638.647	87%	113.666.725	0,00 %	21.665.200	-	19	1	311.303.847	139,37	25,29		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					mellitus)																	
					Peningkatan penanganan pelayanan kesehatan jiwa	Persentase Kab/Kota yang 20 % Puskesmasnya menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa	100%	4.103.671.172	100%	465.858.771	90%	135.011.500	100,00%	15.185.255	111	11	2	481.044.026	200,00	11,72		
					Peningkatan surveilans, imunisasi dan kesehatan situasi khusus	Persentase Kab/kota yang melaksanakan kewaspadaan dini dan respon	100%	13.424.871.917	97,71%	1.935.060.124	90%	534.637.600	95,12%	-	106	-	2	1.935.060.124	192,83	14,41		
					Peningkatan cakupan imunisasi dasar lengkap	Persentase Kab/kota yang melaksanakan kewaspadaan dini dan respon					90%	2.000.000.000	95,12%	-	106	-	1	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
					Pencegahan dan pengendalian penyakit	Persentase Kab/kota yang melaksanakan kewaspadaan dini dan respon					90%	1.625.370.000	95,12%	42.134.600	106	3	1	42.134.600	#DIV/0!	#DIV/0!		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Program Pelayanan Kesehatan	1. Jumlah Kecamatan yang memiliki minimal satu Puskesmas yang tersertifikasi akreditasi ; 2. Jumlah RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional ; 3. Persentase kepesertaan JKN ; 4. Persentase PKM yang menyelenggarakan kesehatan tradisional	1. 47 kec ; 2. 10 RSUD ; 3. 70% ; 4. 100%	124.405.126.587	1. 47 kec ; 2. 10 RSUD ; 3. 81,43% ; 4. 98,44%	33.482.190.298	1. 47 kec ; 2. 10 RSUD ; 3. 67% ; 4. 85%	36.074.752.953	1. 47 kec ; 2. 10 RSUD ; 3. 81,34% ; 4. 98,44%	7.314.748.607	#VALUE!	20	#VALUE!	40.796.938.905	#VALUE!	32,79	Dinas Kesehatan	
					Peningkatan pelayanan kesehatan primer	Jumlah Kecamatan yang memiliki minimal satu Puskesmas yang tersertifikasi akreditasi	47 kec	7.286.416.538	47 kec	3.408.328.094	47 kec	165.929.500	47	-	#VALUE!	-	#VALUE!	3.408.328.094	#VALUE!	46,78		
					Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan	Jumlah RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional	10 RSUD	7.971.855.206	10 RSUD	1.530.618.957	10 RSUD	1.391.320.000	10	159.507.529	#VALUE!	11	#VALUE!	1.690.126.486	#VALUE!	21,20		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Pembiayaan jaminan kesehatan masyarakat	Persentase kepesertaan JKN	70%	106.914.637.362	81,43%	28.290.003.257	67,00%	33.268.183.543	81,34%	7.155.241.078	121	22	2	35.445.244.335	232,53	33,15		
					Pengembangan pelayanan kesehatan tradisional	Persentase PKM yang menyelenggarakan kesehatan tradisional	100%	2.232.217.481	98,44%	253.239.990	85%	101.570.910	98,44%	-	116	-	2	253.239.990	196,88	11,34		
					Pelayanan dasar (DAK Fisik)				0,00%	-		1.147.749.000	-	-	#VALUE!	-	#VALUE!	-	#VALUE!	#DIV/0!		
					Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan	1. Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya (kumulatif) ; 2. Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin essensial ; 3. Persentase produk alkes dan PKRT di peredaran yang memenuhi syarat	1. 6182 orang ; 2. 98% ; 3. 94%	18.329.472.587	1. 2049 orang; 2. 96,68% ; 3. 82,05%	3.977.423.963	1. 4746 orang; 2. 96% ; 3. 92%	3.797.375.445	1. 2079 orang ; 2. 100% ; 3. 0%	259.119.200	#VALUE!	7	#VALUE!	4.236.543.163	#VALUE!	23,11	Dinas Kesehatan	

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Pengembangan sumber daya manusia kesehatan /SDMK	Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya (kumulatif)	6182 orang	9.835.982.777	2049	2.620.829.200	4746 orang	3.099.096.125	2079	259.119.200	#VALUE!	8	4.128	2.879.948.400	#VALUE!	29,28		
					Peningkatan pelayanan kefarmasian	Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin essensial	98%	7.348.069.263	97%	1.123.204.464	96%	582.873.000	100 %	-	104	-	2	1.123.204.464	200 ,69	15,29		
					Peningkatan ketersedian alkes dan PKRT	Persentase produk alkes dan PKRT di peredaran yang memenuhi syarat	94%	1.145.420.547	82,05 %	233.390.299	92%	31.375.320	0%	-	-	-	1	233.390.299	87, 29	20,38		
					Kefarmasian Dinkes Provinsi (DAK Fisik)	–			0%	-		-		-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
					Kefarmasian (DAK non Fisik)				0%	-	96%	84.031.000	100 %	-	104	-	1	-	#DIV/0!	#DIV/0!		

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Program Pelayanan Teknis Laboratorium Kesehatan	Jumlah pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan sesuai standar	3400 sampel	6.391.164.839	3825	1.796.976.408	2600 sampel	1.037.710.008	401 sampel	-	#VALUE!	-	#VALUE!	1.796.976.408	#VALUE!	28,12	Dinas Kesehatan	
		Peningkatan dan pengembangan pelayanan teknis laboratorium kesehatan	Jumlah pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan sesuai standar	3400 sampel	6.391.164.839	3825	1.796.976.408	2600 sampel	1.037.710.008	401	-	#VALUE!	-	4.226	1.796.976.408	#VALUE!	28,12		
	1.02.03.01.01	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Tingkat Kepuasan Aaratur perangkat Daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	87%	79.332.815.120	80	100	80,00										RSJ	
	1.02.03.01.01.01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Aparatur perangkat daerah yang dilayani selama 12 bulan (orang)	1896	29.556.336.000	339		12	3.685.752.500	0	417.736.664	0	11	339	417.736.664	17,879747	1,41		
	1.02.03.01.01.02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Aparatur perangkat daerah	1896	43.905.15	339		12	1.300.815.	0	5.479.75	0	0	339	5.479.75	17,879	0,01		

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			yang memanfaatkan sarana dan prasarna perkantoran selama 12 bulan (orang)		0.000				000		0				0	747			
	1.02.03.01.01.03	Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah Aparatur daerah yang meningkatkan disiplinnya (orang)	1896	1.535.969.000			12	-	0	-	-	#DIV/0!	0	-	-	-		
	1.02.03.01.01.04	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan kapasitas aparatur (%)	100	1.635.400.000	70		80	596.660.000	0	2.000.000	0	0	70	2.000.000	70			
	1.02.03.01.01.05	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Perencanaan tahunan perangkat daerah dan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah perangkat daerah diatas 85% (dokumen)	10	589.960.120	2		2	12.000.000	0	-	0	-	2	-	20,00	-		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.02.03.01.01.06				Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah Laporan kinerja dan keuangan perangkat daerah dengan realisasi target diatas 90% (dokumen)	25	2.110.000.000	5		5	11.050.000	0	-	0	-	5	-	20	-		
	1	02	03	08	Program Pelayanan Teknis Medis Kejiwaan dan NAPZA	Persentase penduduk yang mengalami gangguan jiwa , NAPZA dan kesehatan lainnya yang mendapat pelayanan medis kejiwaan .			100%		100%										RSJ	
						Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan teknis medis kejiwaan dan NAPZA																
	1.02.03.08.01				Penyusunan Clinical Pathway dan Discharge Planning ODGJ	Jumlah Kunjungan ke keluarga pasien dan dokumen clinical pathway	1760	1.500.920.000	0	-	100	16.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-		

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.02.03.08.02	Penjangkauan Bebas Pasung	Jumlah ODGJ yang bebas pasung	300	797.945.000	21		55	15.300.000	0	-	0	-	21	-	7	0		
	1.02.03.08.03	Promosi Kesehatan Jiwa	Jumlah Penyuluhan (kali)	416	838.655.000	48		80	159.800.000	0	-	0	-	48	-	11,54	0		
	1.02.03.08.04	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pasien Rumah Sakit	Jumlah tenaga kesehatan non PNS	1224	1.193.949.000	170		100	5.229.800.000	0	604.000.000	-	12	170	604.000.000	13,89	0		
	1.02.03.08..05	Survey Kepuasan Masyarakat	Tingkat Kepuasan Masyarakat (%)	412	420.000.000	78,6		82	1.900.000	0	-	0	-	78,6	-	19,07767			
	1.02.03.01.10	Program Pelayanan Teknis Keperawatan Jiwa dan NAPZA																RSJ	
	1.02.03.01.10.01	Pelayanan Rehabilitasi Psikososial	Jumlah Kunjungna Pasien ke Rehabilitasi Psikososial (kali)	4	1.403.270.000	1	348.400.000	5500	405.695.000		5.280.000	0	1	1	353.680.000	25			

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.02.03.01.10.02	Penyediaan Pelayanan Kesehatan Jiwa Mobilitas Berbasis Kepulauan dan Homevisite	Jumlah Puskesmas yang dikunjungi (%)	100	1.854.988.000	80	1.250.680.000	40	3.950.000		-	0	-	80	1.250.680.000	80	67,42		
	1.02.03.01.10.03	Penilaian Akreditasi	Sertifikat dari KARS (dokumen)	1	4.704.400.000	36	847.100.000	1	259.590.000		-	0	-	36	847.100.000	3600	18,01		
	1.02.03.01.10.04	Jambore Nasional Kesehtan Jiwa	Jumlah Rehabilitan dan pendamping yang diikutsertakan (orang)	5	1.334.505.000	4	590.072.000	40	2.503.145.000		-	0	-	4	590.072.000	80	44,21654471		
	1.02.03.01.10.05	Penyusunan Asuhan Keperawatan Anak dan Remaja serta Psikogeriatrik	Penyusunan Asuhan Keperawatan anak dan remaja serta psikogeriatrik (buku)	1	0	0	-	1	3.200.000		-	0	-	0	0	0	0		
	1.02.03.01.10.06	Audit Mutu Pelayanan Keperawatan dan MPKP	Jumlah Laporan (laporan)	2	0	0	-	2	14.325.000		375.000	0	3	0	375.000	0	#DIV/0!		

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.02.03.01.12	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Jiwa																RSJ	
	1.02.03.01.12.01	Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit	(thn)	5	1.292.010.000	4	416.510.000	12	917.075.000	12	-	100	-		416.510.000	0			
	1.02.03.01.12.02	Peningkatan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Promosi Kesehatan							41.860.000										
	1.02.03.01.12.04	Pemeliharaan rutin/berkala ruang rawat inap rumah sakit (VVIP, VIP, Kelas I,II dan III							193.075.000										
	1.02.03.01.12.08	Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit							47.375.000										
	1.02.03.01.12.11	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit							84.750.000										
	1.02.03.01.12.12	Pengujian dan kalibrasi alat kesehatan							94.750.000										

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.02.03.01.12.13	Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit							986.312.500										
	1.02.03.01.12.17	Pengadaan Pakaian Pasien dan Linen							123.000.000										
	1.02.03.01.12.18	Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (dapur,ruang pasien,laundry,ruang tunggu dll							190.675.000										
	1.02.03.01.12.19	Pengembangan SIMRS							129.480.000										
	1.02.03.01.12.23	Pengadaan Alat Kesehatan (DAK)							515.602.000										
	1.02.03.01.26.01	Belanja modal Pengadaan Konstruksi/pembelian gedung kantor							515.602.000										
	1.02.03.01.26.25	Penyusuna Formularium							2.600.000										

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1	02	03	14	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD																RSJ	
	1.02.03.14.01				Belanja Barang dan Jasa BLUD Rumah Sakit	Terlaksananya pelayanan yang berkualitas (thn)	1	7.806.000.000	1	-	1	7.806.000.000		-	0	-	1	-	100	-		
	1.02.03.14.01				Belanja Modal BLUD Rumah Sakit	Terlaksananya pelayanan yang berkualitas (thn)	1	2.194.000.000	1	-	1	2.194.000.000			0	-	1	-	100	-		
					PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan			97	Rp 11.821.771.992,00			12,84	3.881.334.112,00	#DIV/0!	#DIV/0!	109,51	15.703.106.104	#DIV/0!	#DIV/0!	RSUP	
					Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan	85	Rp 8.825.653.000	90	Rp 8.881.696.659,00	90	10.371.704.000	13,64	1.414.544.580,00	15,153886	14	103,64	10.296.241.239	121,92764	116,66		
					Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	95	Rp 2.000.000	100	Rp 2.062.554.924,00	14	4.205.043.070	11,84	498.028.936,00	84,5972201	12	111,84	2.560.583.860	117,73012	128.029,19		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	85	Rp 1.500.000.000	100	Rp 740.399.500,00	125	822.389.040	17,46	143.610.596,00	13,9700885	17	117,46	884.010.096	138,19131	58,93		
					Kegiatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	persentase peningkatan pengembangan capaian kinerja dan keuangan	3	Rp 210.000.000	90	Rp 3.300.000,00	3	7.480.000	-	-	0	-	90,00	3.300.000	3000	1,57		
					Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen perencanaan	3	Rp 22.150.000	100	Rp 2.950.000,00	3	3.245.000	-	-	0	-	100,00	2.950.000	3333,3333	13,32		
					Kegiatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	jumlah fasilitas kesehatan yang mendapatkan promosi	6	Rp 119.754.000	100	Rp 130.870.909,00	6	479.247.000	4,38	21.000.000,00	73,0312344	4	104,38	151.870.909	1739,6979	126,82		
					Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat						85	14.336.300.000	12,58	1.804.150.000,00	14,8052804	13	12,58	1.804.150.000	#DIV/0!	#DIV/0!		
					PROGRAM PELAYANAN TEKNIS KEPERAWATAN	1. Survey kepuasan pasien terhadap pelayanan publik pelayanan teknis keperawatan RSUP, 2.LOS (Length of Stay),			67	Rp 864.936.055,00			76,50	28.868.695,00	#DIV/0!	#DIV/0!	143,17	893.804.750	#DIV/0!	#DIV/0!	RSUP	

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
						3. Tingkat kelulusan akreditasi RSUP yang memenuhi standar akreditasi																
					Kegiatan Standarisasi Pelayanan Kesehatan	persentase akreditasi pelayanan RS	50	Rp 4.572.000.000		Rp 814.734.655,00	11	11.450.000	5,29	900.000,00	48,1283422	8	5,29	815.634.655	10,588235	17,84		
					Kegiatan Evaluasi Standar Pelayanan Teknis Keperawatan	Jumlah dokumen SOP dalam pelayanan pasien	5	Rp 40.425.000	100	Rp 7.081.000,00	7	6.500.000	5,29	900.000,00	75,6302521	14	105,29	7.981.000	2105,8824	19,74		
					Kegiatan Peningkatan Etika Keperawatan	bertambahnya tenaga keperawatan yang berkompeten	80	Rp 91.531.000	100	Rp 43.120.400,00	90	41.066.720	65,91	27.068.695,00	73,237716	66	165,91	70.189.095	207,39243	76,68		
					Kegiatan Penyusunan SOP Kesehatan						1	17.000.000	-	-	0	-	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
					Kegiatan Penyusunan Pedoman Pelayanan Keperawatan						11	8.700.000	-	-	0	-	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					PROGRAM PELAYANAN TEKNIS MEDIS DAN PENUNJANG MEDIS	1. Survey kepuasan pasien terhadap pelayanan publik ,pelayanan teknis medis dan penunjang medis RSUP, 2. Persentase ketersediaan obat,peralatan dan perbekalan kesehatan, 3. Persentase ketersediaan pelayanan di Rumah Sakit, 4. Rasio korban bencana dengan tenaga kesehatan yang dikirim, 5. Persentase korban bencana yang mendapat pelayanan rujukan			90	Rp 24.962.787.235,00			5,53	766.401.252,00	#DIV/0!	#DIV/0!	95,53	25.729.188.487	#DIV/0!	#DIV/0!	RSUP	
					Kegiatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	persentase ketersediaan obat dan perbekalan	3	Rp 6.000.000.000	100	Rp 14.488.703.975,00	3	9.547.875.000	6,69	638.836.798,00	223,029312	7	106,69	15.127.540.773	3556,3626	252,13		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
						kesehatan																
					Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat	persentase masyarakat yang dilayani sesuai standar	264	Rp 13.000.000.000	85	Rp 9.568.600.000,00	100	1.094.894.000	-	-	0	-	85,00	9.568.600.000	32,19697	73,60		
					Kegiatan Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	meningkatnya kemitraan pelayanan kesehatan	4	Rp 1.419.928.000	85	Rp 905.483.260,00	2	3.206.060.000	0,62	19.928.308,00	31,0791252	1	85,62	925.411.568	2140,5396	65,17		
					Kegiatan Penyusunan Standar Kesehatan dan Evaluasi Standar Kesehatan	jumlah dokumen SOP Pelayanan rumah sakit	0	Rp 133.900.000	-	Rp -			9,83	107.636.146,00	#DIV/0!	#DIV/0!	9,83	107.636.146	#DIV/0!	80,39		
					PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA RUMAH SAKIT UMUM	1. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap sarana dan prasarana pelayanan Rumah Sakit, 2. Persentase sarana dan prasarana yang tersedia di Rumah Sakit			98	Rp 65.597.771.899,55			27,24	1.316.082.455,00	#DIV/0!	#DIV/0!	125,36	66.913.854.355	#DIV/0!	#DIV/0!	RSUP	

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Kegiatan Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	persentase sarana dan prasarana yang tersedia di RS	8	Rp 2.580.663.000	100	Rp 2.177.558.981,00	9	1.302.375.000	16,26	211.740.000,00	180,644336	16	116,26	2.389.298.981	1453,2249	92,58		
					Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	persentase sarana dan prasarana RS yang dipelihara	85	Rp 7.000.000.000	100	Rp 11.062.850.006,72	85	9.854.210.000	10,94	1.077.602.655,00	12,8652406	11	110,94	12.140.452.662	130,5123	173,44		
					Kegiatan Pembangunan Gedung B	Tersedianya Alat-alat kesehatan rumah sakit	1	Rp 9.500.000.000	85	Rp 5.567.894.400,00					#DIV/0!	#DIV/0!	85,00	5.567.894.400	8500	58,61		
					Kegiatan Pengadaan Alat-alat Kesehatan (DAK)	Tersedianya Alat-alat kesehatan rumah sakit	100	Rp 500.000.000	100	Rp 39.851.981.559,15	1	64.214.429.444	0,04	26.739.800,00	4,16414196	0	100,04	39.878.721.359	100,04164	7.975,74		
					Kegiatan Pembangunan Pagar Rumah Sakit	Tersedianya Alat-alat kesehatan rumah sakit	1	Rp 2.000.000.000	-	Rp -			-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0	-		
					Kegiatan Perencanaan Gedung C	Tersedianya Alat-alat kesehatan rumah sakit	1	Rp 900.000.000	100	Rp 769.330.000,00					#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	769.330.000	10000	85,48		
					Kegiatan Pembangunan Masjid	Tersedianya Alat-alat kesehatan rumah sakit	1	Rp 2.000.000.000	-	Rp -					#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0	-		
					Kegiatan Pembangunan Gedung Jenazah Rumah Sakit	Tersedianya Alat-alat kesehatan rumah sakit	1	Rp 2.200.000.000	-	Rp -	1	2.437.540.000	-	-	0	-	0,00	-	0	-		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Kegiatan Pembangunan Gedung Laundry Rumah Sakit	Tersedianya Alat-alat kesehatan rumah sakit	1	Rp 2.000.000.000	100	Rp 2.240.822.952,68					#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	2.240.822.953	10000	112,04		
					Kegiatan Pembangunan Gedung Dapur Rumah Sakit	Tersedianya Alat-alat kesehatan rumah sakit	1	Rp 2.500.000.000	100	Rp 2.467.966.000,00			-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	2.467.966.000	10000	98,72		
					Kegiatan Pembangunan IPAL	Tersedianya Alat-alat kesehatan rumah sakit		Rp 1.500.000.000	100	Rp 1.459.368.000,00			-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	1.459.368.000	#DIV/0!	97,29		
					Kegiatan Pembangunan Sumur Bor	Tersedianya Alat-alat kesehatan rumah sakit	1	Rp 900.000.000	-	-					#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0	-		
					PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN BLUD RSUDP	Pertumbuhan pendapatan BLUD RSUP		Rp 6.000.000.000	90	Rp 13.137.037.317,56			20,99	4.723.728.123,00	#DIV/0!	#DIV/0!	110,99	17.860.765.441	#DIV/0!	297,68	RSUP	
					Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan	Persentase tingkat kepuasan pelayanan pasien		Rp 6.000.000.000	90	Rp 13.137.037.317,56	2	22.500.000.000	20,99	4.723.728.123,00	1049,71736	21	110,99	17.860.765.441	#DIV/0!	297,68		
					PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																	

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah			-				5.416.815.895		780.277.166	#DIV/0!	14,40%	0,00	780.277.166	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas PUPR	
					Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani (orang) (orang)					160	3.165.650.000	40	522.760.200	25,00%	16,51%						
					Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan (orang) (orang)					160	1.598.598.944	40	200.688.589	25,00%	12,55%						
					Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat kapasitasnya (orang) (orang)					50	106.500.000	3	4.633.868	6,00%	4,35%						
					Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah (laporan)					5	191.402.500	3	4.121.500	60,00%	2,15%						

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
						(laporan)																
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah diatas 85% (laporan) (laporan)					2	354.664.451	-	48.073.009	0,00 %	13,55 %						
					Program Kebinamargaan			-				232.141.775.272		39.130.339.475	#DIV/0!	16,86 %	0,00	39.130.339.475	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas PUPR	
					Perencanaan Pembangunan Jalan	Jumlah Dokumen Perencanaan Jalan (Dokumen) (dokumen)					2	1.532.850.000	-	3.900.000	0,00 %	0,25 %						
					Pembangunan Jalan PHNJD	Panjang jalan yang terbangun (km) (km)					15	101.004.857.120	-	17.923.492.750	0,00 %	17,75 %						

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Perencanaan Pembangunan Jembatan	Jumlah dokumen perencanaan jembatan (Dokumen) (dokumen)					1	825.135.000	-	3.856.000	0,00 %	0,47 %						
					Pembangunan Jembatan	Jumlah jembatan yang ditingkatkan/dibangun dalam kondisi baik (unit) (unit)					1	5.568.390.000	-	-	0,00 %	0,00 %						
					Inspeksi Kondisi Jalan	Jumlah dokumen pelaksanaan inspeksi kondisi jalan (Dokumen) (dokumen)					1	121.680.000	-	-	0,00 %	0,00 %						
					Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang jembatan dalam kondisi baik (meter) (meter)					3037,61	1.567.305.000	-	73.909.640	0,00 %	4,72 %						
					Inspeksi Kondisi Jembatan	Jumlah dokumen pelaksanaan inspeksi kondisi jembatan (Dokumen) (dokumen)					1	50.900.000	-	-	0,00 %	0,00 %						

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Rehabilitasi/Pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan labolatorium kebinamargaan	Jumlah alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan yang terpelihara 1 Paket HASIL Panjang Jalan (paket) (paket)					1	156.121.375	1	5.800.000	100,00%	3,72 %						
					Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang jalan yang terpelihara (meter) (meter)					812,27	25.899.358.897	-	2.870.554.300	0,00 %	11,08 %						
					Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang jalan yang terpelihara dalam kondisi mantap (Km) (km)					10	26.279.792.500	-	5.135.113.350	0,00 %	19,54 %						
					Operasional Jembatan Baturusa II	jembatan baturusa II yang terpelihara (unit) (unit)					1	1.776.747.500	1	178.081.435	100,00%	10,02 %						
					Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang terbangun (km) (km)					14,85	66.858.637.880	-	12.935.632.000	0,00 %	19,35 %						
					Pendamping DAK							500.000.000										

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Program Pengembangan Sumber Daya Air			-				32.685.090.600		118.830.710		#DIV/0!	0,36 %	0,00	118.830.710	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas PUPR	
					Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Panjang talud penahan tanah yang terbangun (M) (meter)					425	2.125.255.000	-	1.998.250	0,00 %	0,09 %						
					Rehabilitasi Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Luas Jaringan Irigasi Yang Teraliri (Hektar) (Hektar)					134	6.382.800.000	-	-	0,00 %	0,00 %						
					Peningkatan, pembersihan dan pengerukan sungai/kali	Panjang saluran/sungai (M) (meter)					16500	6.561.108.500	-	836.600	0,00 %	0,01 %						
					Pembangunan embung dan bangunan penampung sumber air lainnya	Luas Area yang Tertata (Hektar) (Hektar)					250	12.695.976.500	-	79.345.860	0,00 %	0,62 %						
					Pemberdayaan Petani Pemakai Air	jumlah gapoktan yang terbedayakan (kelompok) (kelompok)					5	1.116.143.800	5	36.650.000	100,00%	3,28 %						

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Peningkatan Capaian Kinerja Realisasi Bidang Sumber Daya Air	Jumlah laporan capaian kinerja realisasi bidang sumber daya air (laporan) (laporan)					1	3.803.806.800	-	-	0,00 %	0,00 %						
					Program Penataan Ruang dan Pertanahan			-				143.383.614.866		10.429.237.564	#DIV/0!	7,27 %	0,00	10.429.237.564	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas PUPR	
					Survey pelanggaran Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Prov.Kep.Bangka Belitung	Jumlah laporan survey indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang (laporan) (laporan)					1	133.712.000	-	10.575.000	0,00 %	7,91 %						
					Koordinasi Penyelenggaraan Tata Ruang	Jumlah dokumen penyelenggaraan tata ruang (Dokumen) (dokumen)					1	219.285.334	-	17.295.229	0,00 %	7,89 %						
					Penyusunan regulasi RDTR/RRTR Kawasan Strategis Provinsi (KSP)	Regulasi RRTR KSP(KIPT Sadai dan KIPT Tanjung Ular) (regulasi)					2	899.380.300	-	27.767.849	0,00 %	3,09 %						

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Pembinaan dan Pelatihan Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Pembinaan dan Pelatihan Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan (Pembinaan dan Pelatihan)					2	91.601.650	-	16.994.111	0,00 %	18,55 %						
					Sosialisasi NSPK Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah peserta Sosialisasi NSPK Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan (peserta)					50	44.297.600	-	2.230.000	0,00 %	5,03 %						
					Penyusunan Neraca Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Neraca Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan (neraca)					1	574.456.200	-	7.028.000	0,00 %	1,22 %						
					Program Pembinaan Jasa Konstruksi			-				943.286.150		111.133.000	#DIV/0!	11,78 %	0,00	111.133.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas PUPR	
					Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan daerah Provinsi	lah layanan data dan informasi jasa konstruksi (layanan) (layanan)					3	239.480.000	-	23.193.000	0,00 %	9,68 %						

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi (orang) (orang)					150	703.806.150	-	87.940.000	0,00 %	12,49 %						
					Program Pengawasan dan Peralatan PUPR			-				1.498.439.104		131.763.635	#DIV/0!	8,79 %	0,00	131.763.635	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas PUPR	
					Peningkatan Fungsi UPTD Pengawasan dan Peralatan	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani (orang) (orang)					30	1.037.632.104	30	121.235.785	100,00%	11,68 %						
					Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat	Alat Berat yang dipelihara (paket) (paket)					1	425.907.000	1	9.824.850	100,00%	2,31 %						
					Monitoring dan evaluasi peralatan workshop	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi peralatan workshop (laporan) (laporan)					1	34.900.000	-	703.000	0,00 %	2,01 %						
					PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN																	
1	1.04	01	01		Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Persentase pelayanan administrasi perkantoran		19.578.759.197		1.938.909.267		2.087.180.000		421.476.963	#DIV/0!	20,19 %	0,00	2.360.386.230	#DIV/0!	12,06%	DINAS PERUMAHAN RAKY	

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
																					AT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04	01	01	01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya perangko materai dan benda pos lainnya dan paket/pengiriman	Org	8.603.337.300	60	1.149.015.869		1.264.280.000		228.823.064		18,10 %		1.377.838.933		16,02%		
				02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terbayarny jasa listrik, telekomunikasi dan informasi	%	7.726.357.166	100	649.628.500		491.210.000		161.962.000		32,97 %		811.590.500		10,50%		
				04	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terbayarnya Honorarium Pengelola Keuangan	Org	1.541.899.731	6	24.583.163		116.500.000		9.013.054		7,74 %		33.596.217		2,18%		
				06	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terlaksananya Operasional Kebersihan Kantor	Lap	1.207.165.000	9	115.681.735		136.630.000		9.262.145		6,78 %		124.943.880		10,35%		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				07	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Tersedianya alat tulis kantor	Dok	500.000.000	2	-		78.560.000		12.416.700		15,81 %		12.416.700		2,48%		
2	1.04	01	02		Program Keciptakaryaan dan Permukiman			15.549.042.000						8.066.624	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	8.066.624	#DIV/0!	0,05%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04	01	02	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Kawasan Permukiman	Dokumen Perencanaan Kawasan Permukiman yang tersusun	Dokumen Perencanaan Kawasan Permukiman yang tersusun	1.205.972.000	6	230.932.000		1.693.478.750		-		0,00 %		230.932.000		19,15%		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				02	Peningkatan/Perluasan Jaringan Distribusi air minum dan Sambungan Rumah	Jaringan Distribusi Air Minum yang Terpasang	Jaringan Distribusi Air Minum yang Terpasang	4.799.570.000	50	219.793.900		2.797.968.750		1.950.000		0,07 %		221.743.900		4,62%		
				03	Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman di Kawasan Kumuh	Panjang Jalan Permukiman yang terbangun	Panjang Jalan Permukiman yang terbangun	7.273.500.000	380	435.193.000		934.550.000		1.110.000		0,12 %		436.303.000		6,00%		
				04	Pembangunan/Peningkatan Drainase/Gorong-gorong di Kawasan Kumuh	Jumlah Sarana Persampahan yang Tersedia	Jumlah Sarana Persampahan yang Terse	2.270.000.000	-	-		955.660.000		-		0,00 %		-		0,00%		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
							dia															
				08	Pembangunan/peningkatan jalan Lingkungan Permukiman			-	-	-		1.642.500.000		5.006.624		0,30 %		5.006.624		#DIV/0!		
				10	Peningkatan/Penyediaan sarana air limbah di kawasan kumuh			-	-	-		1.033.370.000		-		0,00 %		-		#DIV/0!		
				11	Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara			-	-	-		9.057.527.500			0,00 %	0,09 %						
3	1.04	01	03		Program Pembangunan Perumahan Rakyat			51.892.176.000	-	15.721.594.637				68.685.411	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	15.790.280.048	#DIV/0!	30,43%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04	01	03	01	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak	Jumlah RTLH yang di Renovasi	Unit	41.344.23	178	11.181.02		11.629.26		30.744.5		0,26 %		11.211.7		27,12%		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Huni			0.000		1.100		9.804		62				65.662				
				06	Rapat Koordinasi Bidang Perumahan	Jumlah Rumah yang di Rekonstruksi dan direhabilitasi akibat bencana	Unit	9.751.220.000	75	4.471.187.837		75.161.000		13.894.049		18,49 %		4.485.081.886		46,00%		
				07	Survey dan Pendataan Rumah Tidak layak Huni	Jumlah Kepala Keluarga yang Tersosialisasi	KK	169.600.000	75	69.385.700		94.075.000		16.977.800		18,05 %		86.363.500		50,92%		
				08	Survey Pembiayaan Micro Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Tidak Tetap	Jumlah Peserta Rapat Bidang Perumahan	Peserta	627.126.000	-	-		54.600.000		7.069.000		12,95 %		7.069.000		1,13%		
					KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT																	
					Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah			-						348.797.419	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	348.797.419	#DIV/0!	#DIV/0!	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yg terlayani selama 12 bulan (Orang)					69	1.385.334.000	14	268.333.759	20,29%	19,37%						
					Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan (Orang)					65	295.605.000	14	25.460.660	21,54%	8,61%						
					Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah Laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah dengan Realisasi target diatas 90% (Laporan)					5	112.989.000	3	9.916.800	60,00%	8,78%						

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah perangkat daerah diatas 85% (Dokumen)					4	167.790.000	1	45.086.200	25,00%	26,87%							
					Program Penguatan Kewaspadaan Nasional			-					30.970.320	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	30.970.320	#DIV/0!	#DIV/0!	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
					Pelaksanaan Kewaspadaan Nasional						212.559.610											
					Pencegahan dan Antisipasi Potensi Konflik di daerah						289.895.766											
					Program Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan			-					141.035.237	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	141.035.237	#DIV/0!	#DIV/0!	Badan Kesatuan Bangs	

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
																					a dan Politik	
					Penguatan Wawasan Kebangsaan							1.976.757.400											
					Penguatan Pembauran Kebangsaan							151.495.000											
					Pembinaan Ideologi Kebangsaan							232.344.700											
					Penguatan Bela Negara							180.829.600											
					Program Pembinaan Politik dalam Negeri			-						138.273.080	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	138.273.080	#DIV/0!	#DIV/0!	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
					Pembinaan Politik Daerah							481.390.000											

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Penguatan Kelembagaan Parpol							168.675.000											
					Monitoring dan Pemantauan Perkembangan Situasi Politik di Daerah							136.579.000											
					Penguatan Kapasitas Kelembagaan/Institusi Demokrasi dalam Pembangunan Bidang Politik							376.160.000											
					Program Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan			-						87.145.545	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	87.145.545	#DIV/0!	#DIV/0!	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
					Pembangunan Ketahanan seni dan Budaya							71.138.000											
					Pembangunan Ketahanan Ekonomi							88.415.000											
					Pencegahan dan							143.717.0											

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					penanggulangan Napza							00										
					Pembinaan dan Pengawasan Ormas							121.023.800										
					Forum komunikasi dan kerja sama antar umat beragama							220.282.700										
1	01				Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	100	40.414.223.513	100	100	100	8.453.466.994	100	1.050.701.307	100	12,43	200	1.050.701.407	200,00	2,60	SATPOL PP	
						Predikat SAKIP perangkat daerah	72	891.043.100	63,38	0	69	124.091.946,00	-	14.697.000	0	11,84	76,53	14.697.000	B	1,65		
					Pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah aparatur perangkat daerah yang terlayani selama 12 bulan	233	33.367.076.213	227	12.196.014.728	233	6.806.182.994	227	1.041.864.807	87,1244635	15,31	430	13.237.879.535	184,55	39,67		
					Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah aparatur perangkat daerah yang	233	5.824.924.200	227	1.127.075.966	233	1.615.809.000	227	8.836.500	87,1244	0,55	430	1.135.912.466	184,55	19,50		

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			memanfaatkan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan									635							
		Peningkatan disiplin aparatur	Jumlah aparatur yang meningkat disiplinnya	203	1.222.223.100	203	698.343.100	17	31.475.000	0	0	0	0,00	203	698.343.100	100,00	57,14		
		Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan	Jumlah dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah (Renja PD 2021 dan Renja Perubahan PD 2020)	10	412.123.800	5	62.905.800	2	58.451.000	0	5.092.000	0	8,71	5	67.997.800	50,00	16,50		
		Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan PD (Laporan Triwulan Pengendalian dan Evaluasi Renja PD, LAKIP PD, LKPJ PD, dan Data Sektoral)	30	478.919.300	12	63.508.700	5	65.640.946	3	9.605.000	60	14,63	15	73.113.700	50,00	15,27		
2	02	Program Pembinaan dan Pengembangan Personil Satuan Polisi	Persentase pembinaan dan pengembangan	99%	2.371.433.500	34,41	459.444.831	16,23	390.426.978	0,00	21.034.448	0	5,39	34,41	480.479.279	3.475,76	20,26	SATPOL PP	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pamong Praja	personil Satpol PP																
		Pengiriman peserta bimtek dan diklat peningkatan kompetensi aparatur	Jumlah peserta yang terfasilitasi mengikuti bimtek dan diklat	107	789.517.500	7	76.530.101	15	209.285.778	2	7.124.000	13,33333333	3,40	9	83.654.101	8,41	10,60		
		Pembinaan peningkatan personil bagi Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah peserta yang mengikuti diklat, bimtek, pelatihan dan pembinaan	3840	981.916.000	880	282.415.365	540	107.674.000	93	2.584.000	17,22	2,40	973	284.999.365	25,34	29,02		
		Pembinaan jabatan fungsional polisi pamong praja	Jumlah pejabat fungsional yang dibina	70	600.000.000	50	100.499.365	50	73.467.200	50	11.326.448	100,00	15,42	100	111.825.813	142,86	18,64		
3	03	Program Penegakan Perda dan Perkada	Cakupan penegakkan perda	100	1.941.432.291	100	170.041.200	100	268.864.880	100	13.110.000	100	4,88	200	183.151.200	200,00	9,43	SATPOL PP	
		Penatakelolaan Sekretariat PPNS Prov. Kep. Babel	Jumlah koordinasi penyidikan, pemeriksaan dan penertiban Satpol PP	41	168.227.500	1	6.972.500	3	14.055.000	0	0	0	0,00	1	6.972.500	2,44	4,14		
		Penindakan yustisial terhadap pelanggar perda dan perkada	Jumlah penyelidikan dan penyidikan (pemberkasan)	62	875.959.900	11	27.728.500	13	187.984.880	5	0	38,46153385	0,00	16	27.728.500	25,81	3,17		

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pembinaan dan penindakan non yustisial terhadap pelanggar perda dan perkada	Jumlah warga, aparatur dan badan hukum yang ditindak secara non yustisial	1550	897.244.891	242	135.340.200	252	66.825.000	55	13.110.000	21,8253968	19,62	297	148.450.200	19,16	16,55		
4	05	Program Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Persentase penindakan pelanggaran Tibumtranmas	100	8.082.508.500	100	2.866.597.800	100	2.385.703.200	100	289.485.051	100,00	12,07	200	3.154.482.851	200	39	SATPOL PP	
		Patroli	Jumlah patroli	4.320	811.800.000	0	99.750.000	1.080	84.650.000	273	0	9,26	341,98	100	389.235.051	2	48		
		Gelar pasukan dalam rangka peningkatan penyelenggaraan Tibumtranmas dan Linmas serta kesiapsiagaan Tim Pemadam Kebakaran	Jumlah peserta gelar pasukan	3.200	670.308.500	600	87.627.500	600	102.387.000	0	0	0,00	0,00	600	87.627.500	19	13		
		Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Jumlah penyelenggaraan tibumtranmas Satpol PP (penertiban, pengamanan, dan pengawalan)	1.401	6.600.000.000	12	2.679.220.300	467	2.127.660.700	96	287.885.051	20,56	13,53	108	2.967.105.351	8	45		

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyelenggaraan deteksi dini pelanggaran tibumtranmas	Jumlah deteksi dini pelanggaran tibumtranmas	48	400.000	0	0	12	71.005.500	2	1.600.000	16,67	2,25	2	1.600.000	4	400		
5	06	Program Peningkatan Perlindungan Masyarakat	Persentase peningkatan kualitas Linmas dalam penyelenggaraan Kantrantibnas	23,12	1.334.236.000	1,51	207.787.783	2,72	204.318.520	1,50	65.113.994	55	0,99	3,01	209.815.783	13,02	15,73	SATPOL PP	
			Persentase peningkatan kualitas linmas dalam penanganan bencana dan kebakaran	34,48	2.879.408.000	0	132.868.400	6,05	228.740.810	0	2.028.000	0	0,00	0	134.896.400	0,00	4,68		
		Simulasi akbar pemadam kebakaran	Jumlah peserta simulasi	360	1.334.236.000	0	0	100	77.330.000	0	2.028.000	0	2,62	0	2.028.000	0,00	0,15		
		Penyelenggaran peningkatan kapasitas anggota satuan perlindungan masyarakat se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah peserta Satlinmas dalam penyelenggaraan kantrantibmas	360	1.334.236.000	0	207.787.783	60	204.318.520	60	65.113.994	100	31,87	60	272.901.777	16,67	20,45		

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pendidikan dan pelatihan bencana dan kebakaran bagi satlinmas	Jumlah peserta diklat bencana dan kebakaran bagi satlinmas	800	1.545.172.000	0	132.868.400	100	151.410.810	0	0	0	0,00	0	132.868.400	0,00	8,60		
		SOSIAL																	
		Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah (%)	80,00	30.637.063.000	0,00	6.119.120.000	78	6.880.990.000	-	516.422.094	0,00 %	7,51 %	0,00	6.635.542.094	0,00%	21,66%	DINAS SOSIAL	
			Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan (%)	100,00		0,00		100		-									
		Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah aparatur perangkat daerah yang terlayani (pegawai)					100	2.737.985.980	-	297.809.294	0,00 %	10,88 %						
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah aparatur perangkat daerah yang terlayani (pegawai)					100	849.385.862	-	208.729.800	0,00 %	24,57 %						

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah pegawwai dan pengentahuannya meningkat (pegawai)					300	62.110.500	-	-	0,00 %	0,00 %						
					Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah laporan kinerja dan keuangan yang tersusun (Dokumen)					5	63.475.000	-	-	0,00 %	0,00 %						
					Pengelolaan Data,Informasi Kesejahteraan Sosial	Jumlah data fakir miskin cakupan daerah provinsi yang terhimpun (laporan)					2	478.138.688	-	-	0,00 %	0,00 %						
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun (Dokumen)					4	159.120.000	-	9.883.000	0,00 %	6,21 %						
					Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PMKS/PSKS yang mendapatkan pemberdayaan sosial (%)	27,00	11.316.121.000	0,00	1.698.650.000	18	2.700.000.000	-	-	0,00 %	0,00 %	0,00	1.698.650.000	0,00%	15,01%	DINAS SOSIAL	

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Peningkatan Kecintaan Terhadap Penanaman Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Jumlah orang/pihak yang mendapatkan penghargaan dan penanaman Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (orang)					800	810.985.000	-	-	0,00 %	0,00 %						
						Jumlah sarana dan prasarana TMP yang dapat dipelihara dan disediakan (TMP)					1		-		0,00 %							
					Penyuluhan Sosial	Jumlah kelompok sasaran dan lokasi yang dapat dijangkau dan diberikan penyuluhan sosial (orang)					200	66.678.800	-	-	0,00 %	0,00 %						

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Asistensi dan Advokasi Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial	Jumlah dunia usaha/lembaga/ masyarakat yang menyelenggarakan Pengumpulan Uang/Barang dan Undian Gratis Berhadiah sesuai aturan berlaku (lembaga)					15	35.447.400	-	-	0,00 %	0,00 %						
					Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat	Jumlah Pilar-pilar Sosial yang diberdayakan (orang)					28	135.163.220	-	-	0,00 %	0,00 %						
						Jumlah LK3 yang diberdayakan (LK3)					11		-		0,00 %							
					Peningkatan Nilai-nilai Kesetiakawanan Sosial di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Partisipasi Acara HKSN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (orang)					300	88.420.000	-	-	0,00 %	0,00 %						

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Meningkatnya produksi sub sektor pertanian, peternakan, dan pekerbunaan				Program Peningkatan Pelayanan Teknis Panti Sosial	Persentase PMKS penerima manfaat yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial melalui Pelayanan Teknis Panti Sosial (%)	24,19	11.027.008.000	0,00	1.325.000.000	19	2.225.000.000	-	131.101.250	0,00 %	5,89 %	0,00	1.456.101.250	0,00%	13,20%	DINAS SOSIAL	
					Pelayanan Psikososial bagi PMKS di Panti Sosial Bina Serumpun	Jumlah klien/warga binaan sosial yang mendapatkan pembinaan dan pelayanan psikososial (orang)					30	49.550.000	-	3.925.000	0,00 %	7,92 %						
					Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kessos bagi PMKS	Jumlah klien/warga binaan sosial yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang disediakan (orang)					30	909.370.000	-	119.366.250	0,00 %	13,13 %						

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
						Jumlah peralatan dan perlengkapan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang disediakan (paket)					10		-		0,00 %							
					Advokasi dan Pemulangan Klien/Warga Binaan Sosial	Jumlah klien yang dapat diadvokasi dan dipulangkan (orang)					20	60.520.800	-	7.810.000	0,00 %	12,90 %						
					Rehabilitasi Ringan Prasarana Panti	Jumlah prasarana panti yang direhabilitasi (bulan)					12	76.500.000	-	-	0,00 %	0,00 %						

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Meningkatnya produksi sub sektor pertanian, peternakan, dan pekerbunaan				Program Penguatan Penyelenggaraan Panti Sosial	Persentase PMKS penerima manfaat yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial melalui Penguatan Penyelenggaraan Panti Sosial (%)	4,56	7.521.490.000	0,00	2.120.000.000	6,08	1.450.000.000	-	162.843.650	0,00 %	11,23 %	0,00	2.282.843.650	0,00%	30,35%	DINAS SOSIAL	
					Pendampingan dan Pembinaan Lanjutan Klien	Jumlah klien yang memperoleh pendampingan dan pembinaan lanjutan (orang)					10	40.000.000	-	600.000	0,00 %	1,50 %						
					Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi penghuni panti	Jumlah penghuni panti yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan keterampilan (orang)					20	60.000.000	-	-	0,00 %	0,00 %						

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Pengelolaan Fungsi Pelayanan dan rehabiltasi Sosial Dalam Panti	Jumlah pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dasar yang disediakan bagi penghuni panti (orang)					20	801.000.000	-	102.607.000	0,00 %	12,81 %						
					Penyediaan dan Dukungan Sarana Penunjang Panti	Jumlah sarana penunjang yang disediakan dalam Panti (tahun)					1	596.000.000	-	59.636.650	0,00 %	10,01 %						
					Peningkatan Kapasitas dan Keterampilan Pengelola Panti	Jumlah pengelola panti yang memperoleh pengetahuan dan keterampilan (orang)					4	36.564.100	-	-	0,00 %	0,00 %						
					Program Rehabilitasi Sosial	Persentase anak yang mendapatkan hak dalam pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial (%)	21,52	9.360.695.000	0,00	2.210.000.000	18,99	2.210.000.000	-	84.594.900	0,00 %	3,83 %	0,00	2.294.594.900	0,00%	24,51%	DINAS SOSIAL	

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
						Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial (%)	19,01		0,00		19,01		-									
						Persentase korban Napza (%)	21,05		0,00		21,05		-									
						Persentase Perempuan korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial (%)	22,38		0,00		21,68		-									
					Opitimalisasi Kinerja Komda Lanjut Usia	Jumlah lanjut usia yang Mendapatkan pelayanan dari KOMDA Lanjut Usia Kabupaten/Kota (Komda LU)					1	49.512.000	-	-	0,00 %	0,00 %						

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia	Jumlah Lanjut Usia yang mendapatkan Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial dan Optimalisasi/Meningkatnya Peranan Panti/Yayasan/ Organisasi Sosial dan kader masyarakat dalam pelayanan Lanjut Usia (orang)					140	144.191.500	-	5.800.000	0,00 %	4,02 %						
					Rehabilitasi Sosial bagi Peyandang Disabilitas	Jumlah Penyandang Disabilitas yang Mendapatkan Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial dan Meningkatnya Kinerja dan Peran serta Yayasan/ Lembaga Kesejahteraan Sosial/ Kader/ dan PSKS dalam Memberikan Pel					150	166.507.500	-	26.228.200	0,00 %	15,75 %						

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
						(orang)																
					Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Anak	Jumlah anak yang direhabilitasi dan memperoleh perlindungan sosial (orang)					150	145.865.000	-	1.430.000	0,00 %	0,98 %						
					Pembinaan Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA	Jumlah masyarakat dan korban napza yang mendapatkan pembinaan penyalahgunaan napza (orang)					100	70.219.900	-	24.155.000	0,00 %	34,40 %						

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Pembinaan Sosial Tuna Sosial	Jumlah tuna sosial yang mendapatkan pembinaan sosial (orang)					50	97.275.800	-	-	0,00 %	0,00 %						
					Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran	Jumlah korban tindak kekerasan bermasalah sosial yang mendapat perlindungan dan bantuan usaha (orang)					10	24.700.000	-	-	0,00 %	0,00 %						
					Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak	Jumlah bayi dan anak yang mendapat pertimbangan perizinan untuk di adopsi (orang)					4	63.332.450	-	12.961.700	0,00 %	20,47 %						
					Pendampingan dan advokasi sosial klien bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum	Jumlah anak yang mendapat pendampingan dan advokasi apabila berhadapan dengan hukum (orang)					6	42.109.000	-	14.020.000	0,00 %	33,29 %						

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PSKS yang mendapatkan peningkatan kapasitas berkaitan dengan Kesiapsiagaan bencana (%)	20,00	10.896.660.663	0,00	2.423.300.000	20	2.451.965.000	-	135.944.400	0,00 %	5,54 %	0,00	2.559.244.400	0,00%	23,49%	DINAS SOSIAL	
						Persentase desa/kelurahan rawan bencana yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial (%)	20,00		0,00		20		-									
						Persentase PMKS/PSKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial (%)	20,24		0,00		20,24		-									
						Persentase korban bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (%)	20,00		0,00		20		-									

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Pengelolaan Posko Kebencanaan Alam	Jumlah PSKS yang mendapatkan peningkatan kapasitas berkaitan dengan Kesiapsiagaan Bencana Alam (orang)					0	682.000.000	-	91.310.000	0,00 %	13,39 %						
						Jumlah Desa/Kelurahan Rawan Bencana Alam yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial (desa/kelurahan)					1		-		0,00 %							
						Jumlah Korban Bencana Alam yang mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial (KK)					2		-		0,00 %							

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Pengelolaan Posko Kebencanaan Sosial	Jumlah PSKS yang mendapatkan peningkatkan kapasitas berkaitan dengan Kesiapsiagaan bencana sosial (orang)					25	221.544.000	-	44.634.400	0,00 %	20,15 %						
						Jumlah desa/kelurahan rawan bencana sosial yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial (desa/kelurahan)					6		-		0,00 %							
						Jumlah korban bencana sosial yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (KK)					6		-		0,00 %							

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Penguatan Akses Jaminan Sosial Keluarga	Jumlah pekerja sektor informal/ mandiri dan keluarga miskin penerima PKH yang memperoleh jaminan sosial (orang)					900	171.815.000	-	-	0,00 %	0,00 %						
					Penguatan Jaminan Sosial Keluarga PKH	Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan pendampingan program PKH (orang)					42942	72.340.000	-	-	0,00 %	0,00 %						
					Program Penanganan Farkir Miskin	Persentase PMKS yang mendapatkan Bantuan Usaha (%)	28,20	44.072.557.500	0,00	18.731.000.000	24,27	5.122.000.000	-	26.825.000	0,00 %	0,52 %	0,00	18.757.825.000	0,00%	42,56%	DINAS SOSIAL	
						Persentase PMKS yang mendapatkan Bantuan Beras Sejahtera (%)	20,55		0,00		19,64		-									

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
						Persentase debitur yang membayar tunggakan kredit usaha peningkatan ekonomi masyarakat (KUPEM) (%)	21,41		0,00		21,41		-									
					Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sosial Ekonomi Keluarga Miskin	Jumlah warga miskin pedesaan yang memperoleh bantuan usaha dan bimbingan teknis berusaha (KK)					50	161.512.500	-	-	0,00 %	0,00 %						
					Peningkatan Kualitas Dukungan Program Pusat	Jumlah Dukungan terhadap peningkatan kualitas program Pusat (KUBE)					14	83.202.700	-	-	0,00 %	0,00 %						
					Peningkatan Kualitas Pelayanan Terhadap Bantuan Rastra dan BPNT	Jumlah Rastra dan BPNT yang tersalur kepada Keluarga Miskin (KK)					43019	40.000.000	-	-	0,00 %	0,00 %						

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Stimulan Penguatan Sosial Ekonomi Keluarga Miskin di Wilayah Perdesaan	Jumlah Keluarga Miskin dan rentan di pedesaan yang mendapat pendampingan UEP KUBE (KK)					25	138.560.000	-	-	0,00 %	0,00 %						
					Penguatan dan Peningkatan KUalitas Sosial Ekonomi Pra Sejantera	Jumlah warga miskin perkotaan yang memperoleh bantuan usaha dan bimbingan teknis berusaha (KK)					25	123.435.000	-	19.700.000	0,00 %	15,96 %						
					Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan Usaha Warga Miskin	Jumlah warga miskin pesisir dan pulau pulau kecil yang memperoleh bantuan usaha dan bimbingan teknis berusaha (KK)					30	136.766.150	-	-	0,00 %	0,00 %						
					Penanganan Fakir Miskin Pesisir dan Pulau Pulau Kecil	Jumlah warga miskin pesisir dan pulau pulau kecil yang mendapat pendampingan UEP KUBE (KK)					120	70.000.000	-	-	0,00 %	0,00 %						

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Simulan Penguatan Sosial Ekonomi Keluarga Miskin dan Rentan	Jumlah Keluarga miskin dan rentan yang mendapat pendampingan UEP KUBE (KK)					50	138.758.500	-	7.125.000	0,00 %	5,13 %						
					Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah			-						-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	BPBD	
					Pelayanan Administrasi Perkantoran							1.629.013.104										
					Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							595.743.000										
					Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur							37.500.000										
					Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan							46.448.000										
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							124.683.500										

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana			-						-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	BPBD	
					Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencegahan Banjir di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung							296.396.400										
					Mitigasi Penanggulangan Bencana di Daerah Rawan Bencana							151.465.000										
					Pembekalan Tentang Penanggulangan Bencana Kepada Aparatur Perangkat Daerah, Aparatur Desa/Kelurahan Dan Masyarakat							198.578.000										
					Publikasi Panduan Standar Minimum Penyelamatan Dini Saat Terjadi Bencana							153.080.000										

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Pengurangan Risiko Bencana Dalam Penyelenggaraan Dan Pengembangan Sistem Penanggulangan Bencana Daerah							228.226.300											
					Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana			-						-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	BPBD	
					Bimbingan Teknis Pemulihan Kesehatan Psikis Masyarakat Pasaca Bencana Kabupaten/Kota dan Provinsi							94.126.300											
					Bimbingan Teknis Aparatur Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Dalam Menangani Tindakan Dini Pascabencana							87.135.200											
					Pemeliharaan Jembatan Portable							53.950.000											

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Bongkar Dan Atau Pasang Jembatan Portable								73.059.800										
					Monitoring Dan Evaluasi Pascabencana Ke Kabupaten/Kota								50.047.200										
					Bimbingan Teknis Kajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitu Pasna) Aparatur Provinsi,Kab/Kota								67.121.800										
					Program Kedaruratan dan logistik Penanggulangan Bencana			-						-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	BPBD	
					Pos Komando Tim Reaksi Cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah							1.931.817.500										
					Pengerahan Dan Mobilisasi Tim Reaksi Cepat							270.898.800										
					Pengadaan/Penyediaan Logistik untuk Penanggulangan							122.600.000										

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Bencana																	
					Pengadaan/Penyediaan Peralatan Untuk Penanggulangan Bencana							143.600.000										
					Pemeliharaan / Perawatan Logistik Dan Peralatan Penanggulangan Bencana							1.010.420.960										
					Pengambilan Serta Pendistribusian Logistik Dan Peralatan Penanggulangan Bencana							93.650.500										
					URUSAN WAJIB TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
					TENAGA KERJA																	
	5	2	01		Program peningkatan pelayanan pemerintah	persentase tingkat kepuasan aparatur terhadap pelayanan sekretariat		27.689.565.000,00		6.093.152.000		4.901.731.000,00		657.035.000,00		34,58		6.750.187.000,00		24,38	Dinas Tenaga Kerja	

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	5	2	01	0100	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah (Ket: AA=6 A=5 BB=4 B=3 CC=2 C=1)	100,00	16.529.845.000,00	100,00	5.059.652.000	100,00	3.115.729.000	15,21	473.868.000,00	15,21	15,21		5.533.520.000,00		33,48		
				0200	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan	100,00	5.578.746.000,00	100,00	164.320.000	100	535.532.000	3,27	17.487.000,00	3,27	3,27		181.807.000,00		3,26		
				0800	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuanga	Laporan Triwulan Pengendalian dan Evaluasi Renja PD, LAKIP PD, LPPD PD, LKPJ PD	100,00	260.728.000,00	100	44.050.000	100,00	44.900.000	-	-	0,00	0,00		44.050.000,00		16,90		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				1000	Peningkatan Fungsi Pelayanan Pemerintah pada UPTD Balai Latihan Kerja Industri (BLKI)	Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani pada UPTD Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) selama 12 bulan	100,00	2.660.123.000,00	100,00	683.130.000	12	1.028.870.000	16,10	165.680.000,00	134,19	16,10		848.810.000,00		31,91		
				1000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Perubahan Renstra PD 2017-2022, Renja PD 2020, Renja Perubahan PD 2019 dan Buku Rencana Tenaga Kerja Provinsi (RTKP)	100,00	2.660.123.000,00	100,00	142.000.000	100,00	176.700.000	-	-	0,00	0,00		142.000.000,00		5,34		
	5	2	02		Program Peningkatan Pengawasan Tenaga Kerjaan, Pembinaan Hubungan Industri dan Jaminan Sosial	Persentase perusahaan yang menjalankan norma K3 dan nora kerja		7.603.773.000,00		72.375.000,00		993.477.000,00		112.718.000,00		11,35		185.093.000,00		2,43	Dinas Tenaga Kerja	
	5	2	02		Gema Bulan Bhakti Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Jumlah Perusahaan yang mendapat	100,00	634.748.000,00	100,00	27.490.000,00	100,00	92.720.000	83,96	77.850.000	83,96	83,96		105.340.000,00		16,60		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
						penghargaan																
					Peningkatan fungsi LKS Tripartit dan Pembahasan masalah Ketenagakerjaan	Jumlah Laporan LKS tripartit dan pembahasan masalah ketenagakerjaan	23 kali rapat	1.667.644.000,00			100,00	222.560.000	4,20	9.338.000	4,20	4,20		9.338.000,00		0,56		
					Peningkatan fungsi DP, Pembahasan UMP, UMK/UMSK dan Sosialisasi UMP	Jumlah Laporan Pembahasan UMP	34 Kali Rapat	1.701.864.000,00			5 Dokumen/Laporan	231.172.000	0,00	-	0,00	0,00		-		0,00		
					Penegakan Hukum Ketenagakerjaan	Jumlah penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan di perusahaan	8 Kasus	469.880.000,00			12 bln	79.300.000	0,00	-	0,00	0,00		-		0,00		
					Peningkatan sarana Hubungan Industrial	Jumlah perusahan dalam pembuatan PP/ PKB	360 peserta	412.080.000,00			4 Dokumen/Buku	49.500.000	3,19	1.580.000	3,19	3,19		1.580.000,00		0,38		
					Pemeriksaan Norma Kerja dan norma keselamatan kerja dan Kesehatan Kerja (K3)	Jumlah Perusahaan yang Mendapat Pemeriksaan Norma Kerja dan	861 perusahaan	837.557.000,00			250 perusahaan	109.700.000	5,65	6.198.000	5,65	5,65		6.198.000,00		0,74		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
						Norma K3																
					Pemetaan Pengawasan Ketenagakerjaan	Tersedianya Data Perusahaan,Klarifikasi dan Tingkat Kepatuhan Perusahaan	750 perusahaan	485.000.000,00			750 perusahaan	95.900.000	0,00	-	0,00	0,00		-		0,00		
					Pembinaan dan Penyelesaian PHK Pekerja di Luar Pengadilan HI	Jumlah Kasus PHK Pekerja yang dibina dan diselesaikan di luar pengadalidan HI	645 perusahaan	695.000.000,00			25 Kasus Perselisihan	44.125.000	17,18	7.581.000	17,18	17,18		7.581.000,00		1,09		
					Pemetaan Kerawanan Kondisi HI	Jumlah kondisi Perusahaan yang rawan	100,00	700.000.000,00	100,00	44.885.000,00	100	68.500.000	14,85	10.171.000	14,85	14,85		55.056.000,00		7,87		
	5	2	06		Program Pengembangan Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	100,00	1.871.161.000		62.580.000		312.450.000		6.871.000		2,20		69.451.000		3,71	Dinas Tenaga Kerja	

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	5	2	06		Pemasaran Tenaga Kerja (Job Canvassing)	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan	564 perusahaan	511.132.000			30 Perusahaan	60.450.000	9,89	5.981.000	9,89	9,89		5.981.000		1,17		
					Pembinaan dan Pengendalian Pengunaan TKA	Jumlah pembinaan terhadap perusahaan pengguna TKA	125 perusahaan	777.320.000			20 Perusahaan	71.225.000	1,25	890.000	1,25	1,25		890.000		0,11		
					Bintek Metodologi Bagi Instruktur Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)	Jumlah Peserta bimtek metologi bagi instruktur LPKS	65 LPKS	342.709.000			25 orang	90.200.000	0,00	-	0,00	0,00		-		0,00		
					Bimtek Penerapan tata kelola lembaga pelatihan kerja	Jumlah LPK yang mampu mencapai kompetensi sesuai standar yang berlaku (LPK)	50 LPK	240.000.000	100,00	62.580.000	100	90.575.000	0,00	-	0,00	0,00		62.580.000		26,08		
	5	2	07		Program Peningkatan Pelayanan Teknis Hygienis Perusahaan dan kesehatan kerja	Persentase perusahaan yang diperiksa dan diuji kesehatan lingkungan kerja		804.582.000		31.650.000		122.812.000		9.383.000		7,64		41.033.000		5,10	Dinas Tenaga Kerja	

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dan Pengujian Lingkungan Kerja Di UMKM	Jumlah UMKM yang diperiksa lingkungan kerjanya (UMKM)	100 UMKM	500.000.000			100	62.725.000	-	-	0,00	0,00		-		0,00		
					Pengujian Lingkungan Kerja	Jumlah tenaga kerja dan lingkungan perusahaan yang diperiksa (Perushaan)	100,00	304.582.000,00	100,00	31.650.000	100	60.087.000	16	9.383.000	15,62	15,62		41.033.000		13,47		
	5	2	20		Program Peningkatan Pelayanan Teknis Latihan Kerja Industri	Persentase pencari kerja yang tersertifikasi		19.915.600.000		4.443.840.000		2.467.612.000		206.502.000		8,37		4.650.342.000		23,35	Dinas Tenaga Kerja	
	5	2	20	0100	Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja di Kabupaten/ Kota	Jumlah Pencari kerja bidang pertanian lada, karet dan sapi yang mendapat pelatihan	100,00	16.250.000.000	100,00	778.240.000	100	2.340.292.000	8,68	203.022.000	8,68	8,68		981.262.000		6,04		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Pemasaran UPTD Balai Latihan Kerja	Tersedianya informasi dan program kegiatan UPTD balai latihan kerja bagi masyarakat serta terciptanya dan meningkatnya SDM yang terampil, kompeten dan berdaya saing	560 Orang	3.665.600.000	100,00	3.665.600.000	100	127.320.000	2,73	3.480.000	2,73	2,73		3.669.080.000		100,09		
	5	2	22		Program Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaku usaha/UMKM yang mendapat pembinaan peningkatan produktivitas		948.705.000		59.450.000		229.168.000		-		0,00		59.450.000		6,27	Dinas Tenaga Kerja	
	5	2	22	##	pelayanan dan peningkatan produktivitas	Pelaku usaha/UMKM yang mendapat pembinaan peningkatan produktivitas	100,00	948.705.000	40,00	59.450.000,00	100	229.168.000	-	-	0,00	0,00		59.450.000,00		6,27		
					PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK																	

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH	1. Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah 2. Tingkat Kepuasan Aparatur Daerah Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	3	10.088.203,98	3	3.881.142,86	3	1.688.921,66	-	309.811,59	-	18,34	0	4.151.429,50	-	41,15	DP3ACSKB	
					Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan	100	6.963.843,37	100	3.513.567,39	100	1.358.251,66	25	276.778,62	25,00	20,38	62,50	3.790.346,01	62,50	54,43		
					Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan	100	1.247.055,69	87,5	166.057,72	100	199.940,00	25	8.478,97	25,00	4,24	87,50	174.536,69	87,50	14,00		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah diatas 85%	2	627.625,65	4	64.562,80	4	77.595,00	1	24.554,00	25,00	31,64	4	89.116,80	200,00	14,20		
					Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1. Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi target diatas 90% 2. Jumlah buku dan DVD Profil gender dan Anak 3.Jumlah Informasi yang di publikasikan melalui website	1. 5 2. 100 3. 100	1.249.679,27	0	97.430,00	7 Dok	53.135,00	1. 3 2. 0 3. 50	0,00	100,00	-	7	97.430,00	-	7,80		
6					Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	Persentase perempuan yang tidak bekerja	7,01	6.670.856,78		669.583,10	7,52	1.341.442,50		31.488,07		2,35		561.013,97			DP3ACSKB	

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
						Persentase keterwakilan perempuan dilembaga publik	10,02				10,2											
						Persentase keberdayaan organisasi dan lembaga masyarakat dan berbasis gender	15,26				15,3											
						Persentase kepala keluarga miskin yang diberdayakan	7,64				8,86											
						Persentase anggaran resfonsif Gender (ARG) dalam APBD	3,64				3,58											
					Kegiatan Pemetaan industri rumahan di kab/kota	Jumlah kab/kota yang terpetakan untuk program iR	7	468.741,00	7	7.650,00	2	94.631,00	0	7.620,00	-	8,05	7	15.270,00	100,00	3,26		
					Kegiatan Pembinaan dan Monev Pelaksanaan Program IR Perempuan dii	Jumlah Pembinaan dan Monev	63	636.045,00	14	89.072,30	7	141.766,00	0	0,00	-	-	14	89.072,30	22,22	14,00		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Kab/Kota																	
					Pembinaan Organisasi Perempuan	Terlaksananya Pembinaan Organisasi Perempuann Prov. Kep. Bangka Belitung (bulan)	12	2.114.832,00	24	299.747,57	300	156.721,00	0	0,00	-	-	24	299.747,57	200,00	14,17		
					Kegiatan peningkatan nilai-nilai kejuangan perempuan indonesia	Jumlah peserta peringatan hari ibu (orang)	458	1.160.246,78	1000	326.310,90	800	250.000,00	0	0,00	-	-	1.000	326.310,90	218,34	28,12		
					Penguatan kapasitas Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan PPRG	Jumlah peserta workshop (orang)	380	1.093.688,00	435	147.907,70	65	111.639,00	0	10.320,60	-	9,24	435	158.228,30	114,47	14,47		
					Kegiatan Advokasi dan KIE Pengarusutamaan Gender dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	Jumlah Advokasi dan KIE (orang)	12	781.052,50	40	20.070,00	12	98.707,00	0	13.547,47	-	13,72	40	33.617,47	333,33	4,30		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Kegiatan Pemberdayaan Organisasi Masyarakat dan Lembaga Masyarakat yang berbasis Gender	Jumlah Peserta	50	48.840,00	50	42.857,30	30	120.567,00	0	0,00	-	-	50	42.857,30	100,00	87,75		
					Pelatihan dan Pembentukan Fasilitator Pendidikan Politik Untuk Perempuan	Jumlah Peserta	30	86.684,00	0	-	30	86.684,00	0	0,00	-	-	-	-	-	-		
					Pameran hasi karya perempuan	Jumlah Kab/Kota	7	180.727,50	0	-	7	180.727,50	0	0,00	-	-	-	-	-	-		
					Peningkatan Peran LM/dalam Pencegahan dan Penanganan Stunting (DID)	Jumlah Lembaga	30	100.000,00	0	-	30	100.000,00	0	0,00	-	-	-	-	-	-		
8					Program Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rasio Perempuan Korban Kekerasan per 100.000 penduduk usia 18 Tahun keatas di tingkat daerah provinsi	14,85	7.331.937,70	17,41	539.258,80	16,83	2.176.699,00		187.409,90		8,61		722.804,70			DP3ACSKB	

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
						Rasio Anak yang memerlukan perlindungan khusus per 10.000 anak usia 0-18 Tahun tingkat daerah Provinsi	2,06		4,037		2,3												
						Persentase Kab/Kota Layak Anak	100		14,29		85,71											
					Kegiatan partisipasi anak dalam pembangunan (Forum Anak)	1. peserta forum anak daerah tingkat provinsi 2. peserta forum anak nasional dan kongres anak indonesia	89	988.921,50	70 & 12	357.794,26	70	375.225,00	0	0,00	-	-	70 & 12	357.794,26	70 & 12	36,18		
					Peningkatan Peran Serta Anak dalam Pembangunan	Jumlah peserta Peringatan Hari Anak	400	1.392.217,50	1600	401.354,67	900	363.088,00	0	0,00	-	-	1.600	401.354,67	400,00	28,83		
					Kegiatan TOT bagi aktifis PATBM tk kab/kota	Jumlah aktifis yang mengikuti TOT bagi aktifis PATBM tk kab/kota	480	1.390.246,70	140	203.601,20	70	183.670,00	0	0,00	-	-	140	203.601,20	29,17	14,64		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Kegiatan Penguatan Pembinaan dan Pelayanan Korban Kekerasan	Kelancaran fungsi Penguatan Pembinaan dan Pelayanan Korban Kekerasan (kegiatan)	1	1.172.840,00	2	405.279,05	1	169.570,00	0	3.864,00	-	2,28	2	409.143,05	200,00	34,88		
					Kegiatan Peningkatan fungsi komisi perlindungan anak daerah (KPAD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Kelancaran fungsi KPAD (kegiatan)	1	1.293.621,00	2	410.683,60	1	269.995,00	0	27.595,00	-	10,22	2	438.278,60	200,00	33,88		
					Rapat Koordinasi Provinsi Layak Anak (PROVILA)	Jumlah peserta Rapat Koordinasi	480	330.000,00	45	70.806,12	7	51.060,00	1	15.702,50	14,29	30,75	46	86.508,62	9,58	26,21		
					Rapat Koordinasi Pemenuhan Hak Anak	Jumlah Kab/Kota	7	158.945,00	7	57.769,08	7	158.945,00	7	117.907,40	100,00	74,18	14	175.676,48	200,00	110,53		
					Workshop Pencegahan Kenakalan dan Kekerasan Terhadap Anak bagi Siswa SLTP/SLTA	Jumlah peerta workshop	700	222.475,00	0	0,00	700	222.475,00	0	21.850,00	-	9,82	-	21.850,00	-	9,82		
					Penyusunan Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak	Jumlah dokumen kebijakan	1	95.171,00	0	0,00	1	95.171,00	0	491,00	-	0,52	-	491,00	-	0,52		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Penanganan Korban Kekerasan di Desa Stunting (DID)	0	0	87.500,00	0	0,00	0	87.500,00	0	0,00	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-		
					Implementasi Desa Layak Anak di Desa Stunting (DID)	0	0	200.000,00	0	0,00	0	200.000,00	0	0,00	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-		
					PANGAN																	
					Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah			1.972.890.349		2.675.397.948		1.972.890.349		142.574.912				2.817.972.860			Dinas Pangan	
					Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Aparatur perangkat daerah yang terlayani selama 12 bulan (persen)	100	1.012.130.000	100	2.263.481.681	100	1.012.130.000	-	125.977.368	-	12,45	-	2.389.459.049	-	236,08		
					Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Aparatur perangkat daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkatoran selama 12 bulan	100	592.240.000	100	252.350.017	100	592.240.000	-	7.363.544	-	1,24	-	259.713.561	-	43,85		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
						(persen)																
					Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang meningkat kapasitasnya (persen)	100	145.000.000	85	133.841.250	90	145.000.000	-	3.462.000	-	2,39	-	137.303.250	-	94,69		
					Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan perangkat daerah dengan realisasi target diatas 90% (persen)	4	45.300.000	100	5.525.000	95	45.300.000	-	-	-	0,00	-	5.525.000	-	12,20		
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase capaian dokumen perencanaan (persen)	100	178.220.349	100	20.200.000	93	178.220.349	-	5.772.000	-	3,24	-	25.972.000	-	14,57		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Program Peningkatan Konsumsi Dan Keamanan Pangan			4.500.000.000		1.298.226.410		1.944.707.500		90.959.029				1.303.454.439				Dinas Pangan	
					Promosi Konsumsi dan Keamanan Pangan termasuk gerakan makan sayur, buah,kacang-kacangan dan ayam merawang (GEMA SABUK AMANG)	JUmlah event gerakan GEMA SABUK AMANG (kali)	3	600.000.000	3	92.071.500	2	207.775.000	-	-	-	0,00	-	92.071.500	-	15,35		
					Gelar Pangan Daerah dan Lomba Cipta Menu Pangan B2SA Provinsi dan Nasional	Jumlah event daerah dan nasional (event)	2	500.000.000	2	363.853.800	2	561.698.000	-	-	-	0,00	-	363.853.800	-	72,77		
					Pengembangan Usaha Pemanfaatan Lahan Pekarangan pada kelompok masyarakat	Jumlah kelompok masyarakat pemanfaatan lahan perkarangan yang difasilitasi (kelompok)	47	350.000.000	42	165.631.810	15	204.370.000	-	19.658.700	-	9,62	-	185.290.510	-	52,94		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Penguatan Sarana dan Prasarana Pengawasan Keamanan Pangan Segar	jumlah jenis alat uji rappid test (jenis)	7	800.000.000	7	257.271.400	4	129.575.000	-	-	-	0,00	-	257.271.400	-	32,16		
					Identifikasi dan Analisis Pola Pangan Harapan	Jumlah dokumen data skor PPH (dokumen)	1	300.000.000	1	44.391.000	1	54.470.000		-					-			
					Pengembangan produk pangan lokal hasil pertanian (one village one product)	jumlah pelaku usaha yang difasilitasi (kelompok)	40	600.000.000	-	41.340.000	24	232.519.500		-					-			
					Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Segar	Jumlah pengawasan yang dilaksanakan (kali)	8	500.000.000	7	70.367.900	8	188.820.000	-	35.455.804	-	18,78	-	105.823.704	-	21,16		
					Penilaian Pelaku usaha dalam memperoleh sertifikat produk pertanian (Prima 3, Prima 2 dan No registerasi PSAT)	Jumlah komoditi yang mendapat sertifikat produk pertanian (komoditi)	100	500.000.000	55	182.545.000	50	208.425.000	-	35.844.525	-	17,20	-	218.389.525	-	43,68		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Pemberdayaan lahan pekarangan masyarakat melalui program Kampung/Desa	Jumlah desa/kelurahan KRPL yang dibentuk (kelompok)	14	350.000.000	7	80.754.000	7	157.055.000	-	-	-	0,00	-	80.754.000	-	23,07		
					Program Ketersediaan dan Kerawanan Pangan			2.580.000.000		720.807.564		1.231.172.850		68.324.900				789.132.464			Dinas Pangan	
					Gerakan Pemenuhan Gizi 1000 hari kehidupan	JUmlah orang yang mengikuti kegiatan gerakan pemenuhan gizi (orang)	340	300.000.000	360	179.324.000	700	347.615.500	-	2.672.000	-	0,77	-	181.996.000	-	60,67		
					Pengembangan Daerah Mandiri Pangan	Jumlah terbentuknya daerah mandiri pangan (daerah)	8	550.000.000	8	277.347.714	8	207.148.000	-	11.473.700	-	5,54	-	288.821.414	-	52,51		
					Penanganan Daerah Rawan Pangan	Jumlah orang yang tertangani di daeah rawan pangan (orang)	1000	450.000.000	1000	250.313.250	1000	208.142.750	-	-	-	0,00	-	250.313.250	-	55,63		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Penyusunan dokumen ketersediaan dan akses pangan	JUmlah dokumen ketersediaan dan akses pangan (dokumen)	1	40.000.000	-	-	2	144.240.000		34.541.200	-	23,95	-	34.541.200	-	86,35		
					Peningkatan Fungsi Pelayanan Dewan Ketahanan Pangan	Jumlah dokumen rekomendasi tentang peningkatan ketahanan pangan (dokumen)	1	200.000.000	1	12.082.600	1	171.772.000		5.644.000	-	3,29	-	17.726.600	-	8,86		
					Penyediaan Sarana Pengelolahan Hasil Pangan	Jumlah sarana pengolahan hasil pangan (unit)	1	1.000.000.000	-	-	1	55.905.000	-	7.554.000	-	13,51	-	7.554.000	-	0,76		
					Penyusunan Data Daerah Rawan Pangan	Jumlah dokumen data rawan pangan, FSVA dan SKPG (dokumen)	1	40.000.000	1	1.740.000	3	96.349.600	-	6.440.000	-	6,68	-	8.180.000	-	20,45		
					Program Pengembangan Distribusi, Stabilisasi dan Cadangan Pangan			1.715.000.000		751.110.900		749.504.500		75.970.900	-		-	827.081.800			Dinas Pangan	

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)	Jumlah GAPOKTAN yang difasilitasi (gapoktan)	5	350.000.000	5	101.352.300	5	145.010.000		63.558.900	-		-	164.911.200	-	47,12		
					Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat	JUmlah pembinaan kepada lumbung pangan masyarakat (kali)	2	325.000.000	2	930.000	2	46.770.000	-	12.412.000	-	26,54	-	13.342.000	-	4,11		
					Pengendalian Distribusi Pangan	Jumlah pengawasan pemantauan harga pangan pokok di tingkat produsen, konsumen dan pasokan di 6 pelabuhan (pengawasan)	4	200.000.000	4	46.076.000	4	128.344.500	-	-	-	0,00	-	46.076.000	-	23,04		
					Pengembangan Cadangan Pangan	Jumlah pengadaan cadangan pangan daerah pemerintah provinsi (ton)	50	575.000.000	50	526.000.000	25	308.875.000	-	-	-	0,00	-	526.000.000	-	91,48		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Database Harga dan Stock Pangan Tingkat Distributor	Jumlah dokumen database harga, stock pangan dan dokumen pragnosa pangan (dokumen)	1	120.000.000	4	30.547.500	2	58.175.000	-	-	-	0,00	-	30.547.500	-	25,46		
					Pelatihan Peningkatan Mutu Hasil Gabah dan Beras	Jumlah peserta pelatihan (orang)	1	145.000.000	1	46.205.100	10	62.330.000		-	-	0,00	-	46.205.100	-	31,87		
					PERTANAHAN																	
					Program Penataan Ruang dan Pertanahan			-				74.830.000		270.000	0,00 %	0,36 %	0,00	270.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas PUPR	
					Survey Inventarisasi tanah untuk kepentingan negara	Jumlah dokumen inventarisasi tanah (dokumen)					1	74.830.000	-	270.000	0,00 %	0,36 %						
					LINGKUNGAN HIDUP																	
					Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	Tingkat Kepuasan Aparatur Perangkat Daerah Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	100	40.581.678.018	100	7.462.014.624	100	3.176.192.160		463.825.004		14,60		7.925.839.628		19,53	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
						Predikat Nilai Sakip berada pada Level B (Nilai 74)			76,06		72											
					Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase aparatur yang terlayani selama 12 Bulan	100	10.047.680.000	100	5.927.990.287	100	1.726.055.000	16,25	280.550.760	16,25	16,25	116,25	6.208.541.047	116,25	61,79		
					Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan Sarana dan Prasara Perkantoran	100	25.270.000.000	100	1.268.509.241	9	879.355.000	3,02	26.596.900	33,56	3,02	103,02	1.295.106.141	103,02	5,13		
					Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparatur perangkat daerah yang meningkat kedisiplinannya	100	457.522.268	100	68.600.000	100	0,00	0	-	0	0,00	100,00	68.600.000	100,00	14,99		
					Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur perangkat daerah yang meningkat kapasitasnya	100	1.915.981.250	100	59.939.400	100	147.500.000	17,71	26.128.172	17,71	17,71	117,71	86.067.572	117,71	4,49		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Jumlah dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah perangkat daerah diatas 85%	19	1.065.765.000	7	90.375.696	3	281.482.160	0	130.549.172	0,00	46,38	7,00	220.924.868	36,84	20,73		
					Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan perangkat daerah dengan realisasi target diatas 90%	20	274.729.500	8	46.600.000	4	63.100.000	4	-	0	0,00	12,00	46.600.000	60,00	16,96		
					Penyusunan Peraturan Daerah dibidang Lingkungan Hidup	Jumlah Peraturan Daerah di bidang lingkungan hidup yang Tersusun	5	1.550.000.000	1	0	1	78.700.000	0	-	0	0,00	1,00	-	20,00	0,00		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Program Peningkatan Pelayanan Teknis Laboratorium	Persentase Parameter Kualitas Lingkungan yang terakreditasi	100	17.273.287.498		2.718.482.805		2.341.346.000		252.334.020		10,78		2.970.816.825		17,20	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
						Pertumbuhan pendapatan asli daerah dari Laboratorium lingkungan	2,50 %		1,5		1,15											
					Peningkatan Fungsi Pelayanan Laboratorium	Jumlah Sampel yang dilayani dalam 1 Tahun	6775	6.424.500.000	4385	1.988.462.876	1350	1.469.618.000	726	223.389.320	53,78	15,20	5111	2.211.852.196	75,44	34,43		
						Rekomendasi Hasil Kajian yang Diterbitkan	4		0,00		0		0,00		0,00		0,00		0,00			
					Peningkatan Mutu Pemeriksaaan Kualitas Lingkungan di Laboratorium Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Usulan Parameter Lingkungan untuk Akreditasi	160	1.554.500.000	68,00	273.319.129	34	257.008.000	0,00	14.003.100	0,00	5,45	68,00	287.322.229	42,50	18,48		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Sampling Parameter Kualitas Lingkungan	Jumlah Titik Sampling Parameter Kualitas Lingkungan	190	614.287.498	25	74.670.000	40	56.810.000	10,00	14.941.600	25,00	26,30	35,00	89.611.600	18,42	14,59		
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Laboratorium	Jumlah Paket Pengadaan Sarana dan Prasarana Laboratorium	9	7.695.000.000	4	316.229.000	2	468.385.000	0	-	0,00	0,00 %	4,00	316.229.000	44,44	4,11		
					Peningkatan Kapasitas SDM UPTD Laboratorium Lingkungan	Jumlah SDM UPT Laboratorium yang terlatih	160	545.000.000	32	65.801.800	40	89.525.000	0	-	0,00	0,00	32,00	65.801.800	20,00	12,07		
					Peningkatan Eksistensi Laboratoium Lingkungan	Jumlah Promosi dan Publikasi Laboratorium yang terlaksana	4	290.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		
					Penyusunan Dokumen Lingkungan Laboratorium	Jumlah Dokumen UKL dan UPL Laboratorium	1	150.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		
					Program Peningkatan Tata Kelola Lingkungan	Pertumbuhan kebijakan berkaitan pengelolaan lingkungan	100	14.864.213.335		1.828.939.559		1.336.096.500		68.303.513		5,11		1.509.624.428		10,16	DINAS LINGKUNGAN	

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
						berkelanjutan															HIDUP	
						Persentase permohonan penilaian dokumen lingkungan	36															
					Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Riviu Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW))	Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Riviu Peninjuan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah yang tersusun (Dokumen)	0	-	1	600.000.000	0	0	-	-	0	0	0	0	#DIV/0!	0		
					Kajian Valuasi Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Kajian Valuasi Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan yang tersusun	3	972.225.000	0	-	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
						Rekomendasi Hasil Kajian yang Diterbitkan	3		0		0				0		0		0			
					Penyusunan Dokumen KLHS	Jumlah Dokumen KLHS yang tersusun	10	9.453.683.335	2	548.281.109	2	911.913.000	0	-	0	0	2	548.281.109	20,00	5,80		
					Validasi KLHS Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS Kabupaten/Kota yang divalidasi	28	1.175.000.000	1	19.496.200	7	106.345.000	-	3.470.000	0	3,26	7	22.966.200	25,00	1,95		
					Penyusunan Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	Jumlah Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	1	343.953.000	1	260.119.494	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	1	260.119.494	100,00	75,63		
					Penyusunan Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	1	110.765.000	1	104.431.840	0	0	0	0	0	0	1	104.431.840	100,00	94,28		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Analisis Data dan Informasi Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD)	9	1.320.000.000	3	118.235.085	2	167.283.500	1	59.473.513	50	35,55	4	177.708.598	44,44	13,46		
					Layanan Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan	Jumlah Usaha/kegiatan yang dilayani	58	808.300.000	42	98.176.400	12	54.725.000	9	5.360.000	75	9,79	51	103.536.400	87,93	12,81		
					Evaluasi Kinerja Penilaian AMDAL dan Pemeriksaan UKL-UPL serta Penerbitan Izin Lingkungan yang dilakukan Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Hasil Evaluasi	35	680.287.000	14	80.199.431	7	95.830.000	0	-	0	0	14	80.199.431	40,00	11,79		
					Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kawasan Strategis Provinsi KIPT Tanjung Ular	Jumlah Dokumen kajian Lingkungan Hidup Strategis Kawasan Strategis Provinsi KIPT Tanjung ular yang tersusun	1	600.000.000	1	212.381.356	0	-	0	-	0	0	1	212.381.356	100,00	35,40		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Program Peningkatan Pengendalian dan Penaatan Lingkungan Hidup	Rata-rata Penurunan Konsentrasi BOD, COD dan TSS di Masing-Masing Titik Pantau		12.225.345.313		826.488.952		881.538.000		68.538.750		7,77		895.027.702		51	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
						Konsentrasi SO2 dan NO2 di Masing-Masing Titik Pantau																
						Persentase Pengaduan Masyarakat Akibat adanya dugaan Pencemaran da/atau Kerusakan lingkungan Hidup yang ditindak Lanjuti																

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
						Persentase Ketataatan Usaha dan atau Kegiatan terhadap Aspek Pengendalian Pencemaran Air																	
						Persentase Ketataatan Usaha dan atau Kegiatan terhadap Aspek Pengendalian Pencemaran Udara																
						Persentase Ketaatan Usaha/Kegiatan Terhadap Aspek Pengelolaan Limbah Cair																

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
						Persentase Ketaatan Usaha/Kegiatan Terhadap Aspek Dokumen Izin Lingkungkungan																
					Pengendalian Beban Pencemaran Air	Dokumen Inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran dan Kerusakan air Sungai1	4	1.550.642.000	0	194.287.150	0	185.461.000	-	25.116.000	0,00	13,54	-	219.403.150	0,00	14,15		
						Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan untuk Pengendalian Beban Pencemaran Air	5		1		1		-		0,00		1		20,00			
						Dokumen Daya Tampung Beban Pencemaran Sungai yang terhitung	4		1		1		-		0,00		1		25,00			

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bagi Pelaku Usaha/Kegiatan	Jumlah Usaha/Kegiatan yang diawasi	365	2.984.020.000	125	130.903.870	100	216.008.000	19	8.200.000	19,00	3,80	144	139.103.870	39,45	4,66		
					Pemantauan Kualitas Udara di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Titik Pantau Kualitas Udara di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	105	1.685.595.313	42	102.723.600	21	56.124.000	-	-	0,00	0,00	42	102.723.600	40,00	6,09		
					Pemantauan Kualitas Air Sungai di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Titik Pantau Kualitas Air Sungai	378	2.631.831.000	135	246.768.650	108	274.681.000	27	28.732.750	25,00	10,46	162	275.501.400	42,86	10,47		
					Penerimaan, Penelaahan dan Verifikasi Pengaduan Masyarakat	Jumlah Pengaduan Masyarakat yang diverifikasi	70	674.250.000	31	71.866.082	14	68.176.000	8	6.490.000	57,14	9,52	39	78.356.082	55,71	11,62		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Penguatan Upaya Peningkatan Kualitas Air Sungai Berbasis Kinerja Tim Pokja di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Persentase rekomendasi Peningkatan Kualitas Sungai yang ditindak lanjuti (%	100	1.875.000.000	0	79.939.600	1	81.088.000	-	0	0,00	0,00	-	79.939.600	0,00	4,26		
						Dokumen Rencana Aksi Daerah dalam Peningkatan Kualitas Sungai di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang tersusun (Dokumen)	1		1		0		-		0		1		100,00			
					Pemantauan dan Pengawasan Penggunaan Bahan Perusak Ozon (BPO)	Jumlah Kegiatan yang diawasi/dipantau	140	749.007.000	0	-	0	0	-	0	0	0,00	-	-	0,00	0,00		
					Verifikasi permohonan izin pengumpulan limbah B3 skala provinsi	Jumlah Rekomendasi hasil Verifikasi Permohonan Izin yang dikeluarkan	4	75.000.000	0	-	0	0	-	0	0,00	0	-	-	0,00	0,00		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Program Peningkatan Pengolahan Sampah, Pemeliharaan dan Peningatan Kapasitas	Persentase Volume Sampah yang terolah berbasis peran serta masyarakat		21.139.817.308		1.199.282.190		1.698.125.964		117.947.418	#DIV/0!	6,95		1.317.229.608		6,23	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
						Pertumbuhan volume pengolahan sampah yang ramah lingkungan									#DIV/0!							
						Persentase penurunan emisi Gas Rumah Kaca dari sektor limbah terhadap baseline BAU									#DIV/0!							
					Persiapan Rencana Pra Pembangunan Kawasan Tempat Pembuangan akhir Sampah Terpadu Regional)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Rencana Prapembangunan TPA Regional	3	1.250.000.000	2	161.007.590	1	179.978.000	-	10.815.500	0,00	6,01	2	171.823.090	66,67	13,75		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Kader/Kelompok Masyarakat yang terlatih	225	848.770.308	68	441.242.900	45	682.480.000	-	-	0,00	0,00	68	441.242.900	30,22	51,99		
					Pengelolaan Sampah Laut)	Rekomendasi Hasil Kajian yang diterbitkan (	3	975.000.000	0	-	1	196.946.000	-	15.540.000	0,00	7,89	-	15.540.000	0,00	1,59		
						Dokumen Kajian Pengelolaan Sampah laut	3		0		1		-		0,00		-		0,00			
					Peningkatan Fungsi Pelayanan Tempat Pembuangan Akhir Sampah Terpadu Regional	Volumen Sampah yang dikelola di TPAST Regional (ton)	171000	9.500.000.000	0	-	0	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		
					Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca	Dokumen Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca	5	367.785.000	2	46.203.000	1	81.592.000	-	-	0,00	0,00	2	46.203.000	40,00	12,56		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Implementasi Upaya Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim melalui Program Kampung Iklim (Proklim)	Jumlah Kampung Iklim	25	350.000.000	3	29.036.500	0	-	-	-	0,00	0,00	3	29.036.500	12,00	8,30		
					Pengembangan dan Pengelolaan TPAST Regional)	Jumlah TPAST regional yang terkelola	4	4.550.000.000	1	219.950.000	0	-	-	-	0,00	0,00	1	219.950.000	25,00	4,83		
					(Pemberian Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup Tingkat Provinsi	Jumlah Kampung Iklim yang Mendapat Penghargaan Tingkat Nasional (Kampung Iklim	14	830.397.000	3		3		-		0,00		3		21,43			3 usulan
						Jumlah Kabupaten/Kota yang Mendapat Penghargaan Adipura Tingkat Nasional (Kabupaten/Kota	16		4	54.150.300	4	283.164.000	-	21.720.318	0,00	7,67	4	75.870.618	25,00	9,14		
						Jumlah Penghargaan Kalpataru (Penghargaan)	12		1		3		-		0,00		1		8,33			1 usulan

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
						Jumlah Penghargaan Adiwiyata Tingkat Provinsi (Jenis Penghargaan)	70		13		14		-		0,00		13		18,57			
						Jumlah Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup	12		0				-		0,00		-		0,00			
					Studi Manajemen dan Produksi Persampahan	Jumlah Dokumen Studi Manajemen dan Produksi Persampahan	1	350.000.000	1	231.305.300	0	-	-	-	0,00	0,00	1	231.305.300	100,00	66,09		
					Peningkatan Aksi Peduli Lingkungan	Volume sampah yang terinventarisasi (Ton)	3	1.849.150.000	0	-	1	273.965.964	-	69.871.600	0,00	25,50	-	69.871.600	0,00	3,78		
						Jumlah Aksi Peduli lingkungan yang dilaksanakan (Aksi)	15		0		4		1		25,00		1		6,67			
					Pemantauan dan Evaluasi Program	Rata-rata Nilai Fisik Adipura	74	268.715.0	74	16.386.60	0	-	-	-	0,00	0,00	74	16.386.6	100,00	6,10		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Adipura	(Nilai)		00		0										00				
					ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																	
					Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase Penyediaan database kependudukan tk. Provinsi yang akurat	100	4.738.978,00	100	1.761.423,61	100	759.565,35		102.879,25		13,54		1.845.052,86			DP3ACSKB	
						Persentase pemanfaatan NIK Data base kependudukan dan KTP_el oleh OPD Provinsi	34,37		18,75		21,87											
						Persentase anak usia 0-18 tahun yang memiliki akte kelahiran	90		86,66		89											
						Persentase masyarakat yang mempunyai KTP	95		99,68		93											

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
						Persentase Masyarakat yang memiliki Akte Kematian	69,8		69,94		70											
					Rapat Teknis Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Tk. Provinsi dan Pencatatan Sipil se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah rapat Teknis Penyelengaraan Adminduk (kali)	9	902.635,50	4	52.916,90	30	41.582,00	30	30.444,40	100,00	73,22	34	83.361,30	377,78	9,24		
					Evaluasi Penyelenggaraan Kependudukan dan Pencatatan Sipil se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah laporan Evaluasi Penyelenggaraan Kependudukan dan Pencatatan Sipil se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (kali)	5	1.340.462,50	2	305.736,90	1	158.794,35	0	0,00	-	-	2	305.736,90	40,00	22,81		
					Pembinaan Kab/Kota terkait Kebijakan Administrasi Dukcapil (DAK)	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan	7	466.525,00	7	334.079,45	7	80.525,00	2	29.128,43	100,00	36,17	1. 4 Kali 2. 1 Laporan	363.207,88	-	77,85		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Pelaksanaan Penerbitan KTP-EL di Kab/Kota (DAK)	Jumlah Kab/Kota	7	164.180,00	7	102.075,29	7	34.180,00	1	5.011,60	100,00	14,66	1. 4 Kali 2. 1 Laporan	107.086,89	-	65,23		
					Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (DAK)	1. Jumlah peserta rapat PIAK 2. Jumlah peserta konsolidasi database	1. 66 2. 14	253.776,00	1. 66 2. 14	194.217,04	1. 66 2. 14	33.085,00	1. 70 buku 2. 4 kali 3. 40 buku	6.582,10	100,00	19,89	1. 70 buku 2. 4 kali 3. 40 buku	200.799,14	-	79,12		
					Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK)	Jumlah Laporan	1	292.199,00	1	198.103,71	1	92.199,00	0	10.362,07	100,00	11,24	1	208.465,78	-	71,34		
					Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi Aparatur (DAK)	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis (orang)	100	533.510,00	7	438.271,92	42	33.510,00	42	20.900,65	100,00	62,37	49	459.172,57	-	86,07		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Peningkatan cakupan kepemilikan akta pencatatan sipil	Jumlah Peserta	200	621.820,00	7	116.772,40	200	121.820,00	0	0,00	100,00	-	7	116.772,40	-	18,78		
					Penyusunan profil Kependudukan Desa Stunting Provinsi Kep.Babel (DID)	Jumlah Buku Profil	100	125.000,00	0	0,00	200	125.000,00	0	450,00	100,00	0,36	-	450,00	-	0,36		
					Pengelolaaan pemanfataan data kependudukan	Jumlah peserta	80	38.870,00	0	0,00	80	38.870,00	0	0,00	100,00	-	-	-	-	-		
					PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																	
					PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																	
9					Program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Keluarga	Persentase Gran disign ependudukan	100	5.959.007,00	0	1.344.828,63	12,5	1.224.346,75		13.914,39		1,14		1.357.143,02			DP3ACSKB	

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
						Prevalensi keluarga Pra sejahtera dan Keluarga Pra sejahtera I	8,25		na		9,47													
						Unmeet Need	7,13		8,82		7,39													
						Persentase Desa/Kampung yang menjadi kampung KB	90,5		44,5		59,9													
					Kegiatan Penguatan Komitmen Peningkatan Kinerja Lini Lapangan	Jumlah Peserta	500	1.141.199,70	145	266.834,59	70	166.355,00	0	0,00	-	-	145	266.834,59	29,00	23,38			
					Kegiatan Advokasi dan KIE Program KKBPK	Jumlah Advokasi	66	237.821,05	7	68.114,34	30	30.118,85	0	7.050,00	-	23,41	7	75.164,34	10,61	31,61			
					Kegiatan pelatihan konselor dan pendidik sebaya	Jumlah Peserta pelatihan konselor dan pendidik sebaya	14	696.000,00	60	141.253,00	70	144.006,50	0	0,00	-	-	60	141.253,00	428,57	20,29			

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Kegiatan pembinaan peningkatan peran serta perempuan dalam kehidupan keluarga	Jumlah pemenang lomba dalam rangka hari keluarga	4	1.896.136,85	7	332.583,00	7	134.066,15	0	0,00	-	-	7	332.583,00	175,00	17,54		
					Kegiatan Pembinaan dan Penguatan Kampung KB	Jumlah Pemenang Kampung KB (Pemenang)	27	1.377.554,15	6	534.443,70	20	139.505,00	0	0,00	-	-	6	534.443,70	22,22	38,80		
					Kegiatan Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan kepada pelajar	Jumlah Peserta	60	52.517,50	0	0,00	60	52.517,50	0	0,00	-	-	-	-	-	-		
					Pengembangan Kampung KB Cikar (DID)	Jumlah Peserta	414	174.155,00	0	0,00	60	174.155,00	0	0,00	-	-	-	-	-	-		
					Pendewasaan Usia Perkawinan untuk Pencegahan Stunting (DID)	Jumlah Peserta	420	383.622,75	0	0,00	60	383.622,75	0	6.864,39	-	1,79	-	6.864,39	-	1,79		
					PERHUBUNGAN																	
	2.09.2.09.01.01				Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	A	33.967.295.381	BB	4.824.101.365	B	6.113.750.670		663.309.212				5.487.410.577			DINAS PERHUBUN	

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
																					GAN	
						Meningkatnya Kepuasaan Aparatur Perangkat Daerah Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	100		100		100											
						Meningkatnya Kepuasaan Masyarkat terhadap pelayanan di sektor transportasi	100		100		70											
	2.09.2.09.01.01.01				Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang memadai (Bulan)	12	12.536.145.381	12	1.338.807.313	12	2.241.031.030	3	341.657.244	25,00%	15,25%	12	1.680.464.557	100%	13,40%		
	2.09.2.09.01.01.02				Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang memadai (Bulan)	12	7.079.255.000	12	1.800.521.763	12	1.855.235.000	3	28.616.073	25,00%	1,54%	12	1.829.137.836	100%	25,84%		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.09.2.09.01.01.03				Peningkatan Disiplin Aparatur	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang memadai (Bulan)	140	306.000.000	140	149.998.500	0	-	-	-	0,00 %	0,00 %	140	149.998.500	100 %	49,02%		
	2.09.2.09.01.01.04				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah SDM yang mengikuti Diklat serta Bimtek (Orang)	75	814.260.000	75	49.333.368	15	103.710.000	-	-	0,00 %	0,00 %	75	49.333.368	100 %	6,06%		
	2.09.2.09.01.01.05				Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan	Jumlah Dokumen Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	755.525.000	4	213.439.084	4	150.990.100	1	20.143.890	25,00%	13,34 %	4	233.582.974	100 %	30,92%		
	2.09.2.09.01.01.06				Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan PD (Dokumen)	5	88.675.000	5	38.370.700	5	55.000.000	1	13.000.000	20,00%	23,64 %	5	51.370.700	100 %	57,93%		
	2.09.2.09.01.01.07				Pengelolaan dan Pengembangan Website Dinas Perhubungan	pengelolaan Website Dinas Perhubungan Prov. Kep. Babel (Tahun)	12	344.100.000	12	28.500.000	12	24.600.000	-	-	0,00 %	0,00 %	12	28.500.000	100 %	8,28%		
	2.09.2.09.01.01.08				Pengumpulan Data Dan Monitoring Pelayananan Jasa	Tersedianya Database Pelayanan jasa Perhubungan	30	121.260.000	30	43.257.432	30	31.546.350	-	-	0,00 %	0,00 %	30	43.257.432	100 %	35,67%		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Perhubungan	(Buku)																
	2.09.2.09.01.01.09				Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Melalui Kerjasama dengan Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD)	Pendaftaran dan Beasiswa Bagi Taruna/I STTD dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Orang)	41	9.701.589.500	41	1.115.177.618	40	1.600.987.850	31	259.892.005	77,50%	16,23%	31	1.375.069.623	76%	14,17%		
	2.09.2.09.01.01.10				Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di bidang perhubungan	Jumlah Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Bidang Perhubungan (Dokumen)	5	195.130.000	5	46.695.587	1	50.650.340	-	-	0,00%	0,00%	5	46.695.587	100%	23,93%		
	2.09.2.09.01.01.14				Diklat Pemberdayaan Masyarakat di Sekolah	Pendaftaran dan Seleksi Diklat Pemberdayaan Masyarakat di STIP (orang)	150	2.025.355.500	0	-			-	-	0,00%	0,00%	0	-	0%	0,00%		
	2.09.2.09.01.02				Program Pengembangan dan Pembangunan Perhubungan Darat	Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana perhubungan	100%	82.672.690.436		2.063.546.322		8.631.750.039	-	105.449.176			0	2.168.995.498	0%	2,62%	DINAS PERHUBUNGAN	

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
						darat																
	2.09.2.09.01.02.01				Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Persentase Pembangunan Perlengkapan Jalan terhadap Kondisi Optimal pada ruas jalan provinsi di pulau bangka (%)	100%	20.599.248.230	0	7.747.290	20	1.465.764.675	-	20.611.437	0,00 %	1,41 %	0	28.358.727	0%	0,14%		
	2.09.2.09.01.02.03				Penyelenggaraan Penilaian Analisis Dampak Lalu Lintas	Jumlah Rekomendasi Penyelenggaraan Penilaian Analis Dampak Lalu Lintas (Dokumen)	20	642.955.500	4	43.096.815	4	64.419.824	-	-	0,00 %	0,00 %	4	43.096.815	20%	6,70%		
	2.09.2.09.01.02.04				Pemeliharaan Alat Keselamatan Transportasi	Prosentase Perlengkapan Jalan dalam kondisi baik (%)	75	6.933.900.000	30	498.263.354	70	1.436.966.450	20	62.298.204	28,57%	4,34 %	50	560.561.558	67%	8,08%		
	2.09.2.09.01.02.05				Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Tersedianya Perlengkapan jalan Ruas Jalan di Pulau Bangka (unit)	938	41.065.983.106	105	250.647.500	100	4.970.695.500	-	22.539.535	0,00 %	0,45 %	105	273.187.035	11%	0,67%		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.09.2.09.01.02.08				Inspeksi/Pengawasan Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Data Hasil Inspeksi Pengujian Kendaraan Bermotor di Wilayah Provinsi Kep. Bangka Belitung (Dokumen)	3	224.590.000	1	37.411.800	0	-	-	-	0,00 %	0,00 %	1	37.411.800	33%	16,66%		
	2.09.2.09.01.02.10				Penilaian Penghargaaan Wahana Tata Nugraha Tingkat Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan penghargaan WTN (Kabupaten/Kota)	7	1.150.157.900	4	36.518.900	0	-	-	-	0,00 %	0,00 %	4	36.518.900	57%	3,18%		
	2.09.2.09.01.02.13				Review Tatanan Transportasi Wilayah (Tatrawil) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Dokumen Tatrawil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Dokumen)	1	947.802.000	1	908.944.117	0	-	-	-	0,00 %	0,00 %	1	908.944.117	100 %	95,90%		
	2.09.2.09.01.02.14				Inventarisasi Kebutuhan Fasilitasi Keselamatan Jalan Provinsi di Pulau Bangka	Jumlah Dokumen Inventarisasi Kebutuhan Fasilitas Keselamatan Jalan Provinsi di Pulau Bangka	0	0	0	-	0	-	-	-	0,00 %	0,00 %	0	-	0%	0,00%		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
						(Dokumen)																
	2.09.2.09.01.02.15				Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru mudik/Awak Kendaraan Umum Teladan	Jumlah Peserta Pemilihan Penghargaan Awak Kendaraan Umum Teladan (Peserta)	70	582.890.000	14	80.311.768	14	67.826.410	-	-	0,00 %	0,00 %	14	80.311.768	20%	13,78%		
	2.09.2.09.01.02.16				Penyelenggaraan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Jumlah Peserta Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan lalu lintas (Peserta)	150	1.033.641.000	30	97.791.551	30	373.894.330	-	-	0,00 %	0,00 %	30	97.791.551	20%	9,46%		
	2.09.2.09.01.02.17				Pengadaan Peralatan Pendukung Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Peralatan Pendukung Pemeliharaan Perlengkapan Jalan (1)	2	394.350.700	0	-	0	-	-	-	0,00 %	0,00 %	0	-	0%	0,00%		
	2.09.2.09.01.02.19				Pengoperasian Bus Sekolah	Jumlah Bus Sekolah yang beroperasi	48	9.097.172.000	10	102.813.227	6	252.182.850	-	-	0,00 %	0,00 %	10	102.813.227	21%	1,13%		
	2.09.2.09.01.02.20				Pengadaan Bus Sekolah	Jumlah Bus Sekolah yang beroperasi	5	3.891.181.400	0	-	1	741.181.400	-	15.427.660	0,00 %	0,00 %	0	15.427.660	0%	0,40%		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.09.2.09.01.02.15				Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZoSS) di Jalan Provinsi	Jumlah unit Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZoSS) di Jalan Provinsi	8	582.890.000	0	-	0	-	-	-	0,00 %	0,00 %	0	-	0%	0,00%		
	2.09.2.09.01.02.16				Peningkatan Peralatan Automatic Traffic Control System (ATCS) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah pemasangan ATCS	4	1.033.641.000	0	-	3	1.181.468.000	-	5.301.768	0,00 %	0,45 %	0	5.301.768	0%	0,51%		
	2.09.2.09.01.02.17				Penyelenggaraan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Dokumen Hasil Survey dan Manajemen Rekayasa lalu Lintas	12	394.350.700	0	-	3	468.027.008	-	-	0,00 %	0,00 %	0	-	0%	0,00%		
	2.09.2.09.01.02.13				Penyusunan DED dan SID Pelabuhan ASDP di Kawasan konektivitas Pulau bangka dan pulau belitung serta pulau-pulau kecil	Jumlah Dokumen DED dan SID Pelabuhan ASDP	1	1.377.560.972	0	-	1	1.377.560.972	-	-	0,00 %	0,00 %	0	-	0%	0,00%		
	2.09.2.09.01.02.15				Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Terminal Tipe B	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Terminal Tipe B	1	527.312.000	0	-	1	527.312.000	-	1.390.000	0,00 %	0,00 %	0	1.390.000	0%	0,26%		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.09.2.09.01.03				Program Pengembangan dan Pembangunan Perhubungan Laut	Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana perhubungan Laut	100%	420.153.880.213				4.994.285.560	-	47.437.292			0	47.437.292	0%	0,01%	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.09.2.09.01.03.01				Rehabilitasi Pelabuhan/Dermaga	Jumlah Unit Pelabuhan/Dermaga yang dipeliahra	1	1.089.631.500	0	-	1	1.089.631.500	-	1.550.000	0,00 %	0,14 %	0	1.550.000	0%	0,14%		
	2.09.2.09.01.03.02				Sosialisasi Keselamatan Pelayaran untuk pengguna jasa pelayaran	Jumlah Pengguna Jasa pelayaran yang mendapatkan sosialisasi keselamatan pelayaran	1	82.356.400	0	-	1	82.356.400	-	12.410.000	0,00 %	15,07 %	0	12.410.000	0%	15,07%		
	2.09.2.09.01.03.07				Penyusunan rencana induk pelabuhan (RIP) di Kawasan Konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta Pulau-pulau kecil	Jumlah Dokumen Penyusunan rencana induk pelabuhan (RIP) di Kawasan Konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta Pulau-pulau kecil	1	674.000.920	0	-	1	674.000.920	-	14.448.000	0,00 %	2,14 %	0	14.448.000	0%	2,14%		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.09.2.09.01.03.04				Pemeliharaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)	Jumlah Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) yang terpelihara	14	3.683.600.000			1	480.584.160	-	1.087.500	0,00 %	0,23 %	0	1.087.500	0%	0,03%		
	2.09.2.09.01.03.05				Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)	Jumlah Rambu SBNP yang terpasang (Unit)	12	11.700.000.000		3.102.000	1	2.207.564.580	-	15.591.792	0,00 %	0,71 %	0	18.693.792	0%	0,16%		
	2.09.2.09.01.03.21				DED dan SID Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran	Jumlah DED dan SID Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (Dokumen)	2	462.500.000	0	-	2	460.148.000	-	2.350.000	0,00 %	0,51 %	0	2.350.000	0%	0,51%		
	2.09.2.09.01.03.22				Penyusunan Study Kelayakan Pembangunan Pelabuhan/ Dermaga di Kawasan Konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta Pulau-pulau kecil	Jumlah Dokumen Study Kelayakan Pembangunan Pelabuhan/ Dermaga di Kawasan Konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta Pulau-pulau kecil	1	888.950.000	1	278.152.600			-	-	0,00 %	0,00 %	1	278.152.600	100 %	31,29%		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.09.2.09.01.03.23				Penyusunan DED dan SID Pembangunan Pelabuhan/ Dermaga di Kawasan Konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta Pulau-pulau kecil	Jumlah Dokumen Penyusunan DED dan SID Pembangunan Pelabuhan/ Dermaga di Kawasan Konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta Pulau-pulau kecil	1	744.170.125					-	-	0,00 %	0,00 %	0	-	0%	0,00%		
	2.09.2.09.01.03.17				Studi Kelayakan Pengganti Pelabuhan Pangkal Balam	jumlah Dokumen Study Kelayakan Pelabuhan Pangkalbalam (Dokumen)	1	103.000.000.000	1	792.175.604			-	-	0,00 %	0,00 %	1	792.175.604	100 %	0,77%		
	2.09.2.09.01.03.20				Studi Kelayakan Dermaga/Pelabuhan Pulau Gresik Kabupaten Belitung	Jumlah Dokumen Study Kelayakan Dermaga/Pelabuhan Pulau Gersik (Dokumen)	7	4.558.830.000	1	278.152.600			-	-	0,00 %	0,00 %	1	278.152.600	14%	6,10%		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.09.2.09.01.04				Program Peningkatan Pengendalian, Oprasional dan Kebandarudaraan	Meningkatnya Pemenuhan Prasarana Kebandarudaraan	95	115.029.880.000			15	7.104.065.640		94.892.442			0	94.892.442	0%	0,08%	DINAS PERHUBUNGAN	
						Meningkatnya Pelayanan Angkutan	12,50	2.918.324.000			0						0	-	0%	0,00%		
	2.09.2.09.01.04.01				Pengawasan dan Pengendalian Angkutan pada Hari Besar Keagamaan	Jumlah Hari Pelaksanaan Pengawasan dan pengendalian angkutan pada hari besar keagamaan (Hari Besar Keagamaan)	3	413.480.000	3	43.610.000	3	173.679.000		-	0,00 %	0,00 %	3	43.610.000	100 %	10,55%		
	2.09.2.09.01.04.06				Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	Jumlah angkutan Umum yang diperiksa (600)	3.000	975.780.000	600	131.023.300	600	257.900.000		-	0,00 %	0,00 %	600	131.023.300	20%	13,43%		
	2.09.2.09.01.04.07				Penyuluhan Keselamatan dan ketertiban lalu lintas	Jumlah Orang yang tersosialisasi	300	77.478.000	0	-	300	77.478.000		-	0,00 %	0,00 %	0	-	0%	0,00%		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					angkutan jalan																		
	2.09.2.09.01.04.08				pengadaan dan pemasangan billboard keselamatan lalu lintas	Jumlah unit billboard yang terpasang	10	283.923.640	0	-	10	283.923.640		-	0,00 %	0,00 %	0	-	0%	0,00%		
	2.09.2.09.01.04.11				Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung VIP Bandara Depati Amir	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan gedung VIP Bandara Depati Amir	1	1.480.110.000	0	-	1	1.480.110.000		8.994.346	0,00 %	0,61 %	0	8.994.346	0%	0,61%		
	2.09.2.09.01.04.12				Pemeliharaan dan pengoperasian Gedung VIP Bandara Depati Amir	Terlaksananya Pemeliharaan dan Pengoperasian Gedung VIP bandara depati amir	1	1.335.625.000	0	-	1	1.335.625.000		73.173.335	0,00 %	5,48 %	0	73.173.335	0%	5,48%		
	2.09.2.09.01.04.13				Pengadaan Pagar panel Jalan Akses Gedung VIP bandara depati amir	Tersedianya Pagar panel brc jalan akses gedung vip bandara depati amir	1	1.480.110.000	0	-	1	1.099.880.000		-	0,00 %	0,00 %	0	-	0%	0,00%		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.09.2.09.01.04.14				Pengendalian dan Pengawasan Angkutan pada hari-hari peringatan daerah dan nasional	Jumlah Hari Pelaksanaan hari-hari peringatan daerah dan nasional	1	1.335.625.000	0	-	1	2.395.470.000		12.724.761	0,00 %	0,53 %	0	12.724.761	0%	0,95%		
	2.09.2.09.01.04.09				Pengadaan Road Barrier dan Traffic Cone	Jumlah Road Barrier dan Traffic Cone (70)	520	854.064.000	200	42.155.000				-	0,00 %	0,00 %	200	42.155.000	38%	4,94%		
	2.09.2.09.01.04.10				Pekerjaan Konsultansi Penilaian/ Aprraisal Pengembangan Bandara Depati Amir	Jumlah Dokumen Jasa Konsultansi penilaian/ Appraisal Pengembangan bandara depati amir (Dokumen)	0	0	0	-				-	0,00 %	0,00 %	0	-	0%	0,00%		
	2.09.2.09.01.04.12				Pekerjaan Pembangunan Jalan Akses Gedung VIP Bandara Depati Amir	Prosentase Pekerjaan Jalan Akses ke Gedung VIP Bandara Depati Amir (%)	0	4.257.512.000	0	-				-	0,00 %	0,00 %	0	-	0%	0,00%		
	2.09.2.09.01.04.17				Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung VIP Bandara Depati Amir	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan gedung VIP Bandara Depati Amir	1	100.000.000	0	-				-	0,00 %	0,00 %	0	-	0%	0,00%		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.09.2.09.01.04.13				Pengadaan dan Pemasangan Gardu dan Jaringan Listrik ke Gedung VIP Bandara Depati Amir	Terlaksananya Pengadaan dan Pemasangan Gardu dan Jaringan Listrik ke Gedung VIP Bandara Depati Amir (%)	1	646.150.000	1	627.892.000				-	0,00 %	0,00 %	1	627.892.000	100 %	97,17%		
	2.09.2.09.01.04.16				Pengadaan Pagar Panel / BRC Gedung VIP Bandara Depati Amir	Terlaksananya Pengadaan dan Pemasangan Pagar Panel / BRC Gedung VIP Bandara Depati Amir (%)	100	813.200.000	100	800.277.500				-	0,00 %	0,00 %	100	800.277.500	100 %	98,41%		
	2.09.2.09.01.04.18				Pemasangan Saluran Air PDAM Gedung VIP BAndara Depati Amir	Terpasangnya Saluran Air PDAM ke Gedung VIP Bandara Depati Amir (Paket)	1	215.635.000	1	197.850.000				-	0,00 %	0,00 %	1	197.850.000	100 %	91,75%		
	2.09.2.09.01.04.20				Pembangunan Gedung VIP Bandara Depati Amir Lanjutan	Terbayarnya Pembayaran Kekurangan Gedung VIP Bandara Depati Amir	1	568.380.700	1	454.704.522				-	0,00 %	0,00 %	1	454.704.522	100 %	80,00%		
					KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																	

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah			-						201.297.500		#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	201.297.500	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Komunikasi dan Informatika	
					Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan (orang)					53	2.564.921.193	45	115.860.000	84,91%	4,52%						
					Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan (orang)					53	971.771.000	45	-	84,91%	0,00%						
					Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat kapasitasnya (orang)					200	754.200.000	2	5.169.000	1,00%	0,69%						

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah diatas 85% (dokumen)					2	154.140.000	1	79.286.500	50,00%	51,44%						
					Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi target diatas 90% (laporan)					5	57.740.000	3	982.000	60,00%	1,70%						
					Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik			-						154.475.123	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	154.475.123	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Komunikasi dan Informatika	

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Pengelolaan Saluran Komunikasi Pemerintah Daerah dan Non Pemerintah Daerah	Jumlah Saluran Komunikasi Pemda yang dikelola (saluran)					1	969.029.500	-	-	0,00 %	0,00 %						
						Jumlah Saluran Komunikasi Non Pemda yang difasilitasi (saluran)					9		-		0,00 %							
					Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah berita/informasi pemda yang dipublikasikan (berita/informasi)					6000	7.685.841.156	18.550	119.741.915	309,17%	1,56 %						
					Pengelolaan Kemitraan	Jumlah Anggota Kelompok Iinformasi Masyarakat (KIM) yang difasilitasi (orang)					175	465.715.000	45	34.733.208	25,71%	7,46 %						
						Jumlah Pengurus PWI yang difasilitasi (orang)					4		0		0,00 %							
						Jumlah Kampung Radio yang difasilitasi (lokasi)					2		0		0,00 %							

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Pengelolaan Aspirasi Publik Lingkup Pemerintah Daerah	Jumlah Pengelola Aspirasi publik lingkup pemerintah daerah Yang Difasilitasi (orang)					60	213.050.800	-	-	0,00 %	0,00 %						
						Jumlah Aspirasi publik yang dilaporkan (buku/laporan)					12		-		0,00 %							
					Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Teknolgi Informasi			-						456.608.551	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	456.608.551	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Komunikasi dan Informatika	
					Pengembangan dan Pengelolaan Infrastruktur dan Teknologi	Jumlah layanan Infrastruktur dan teknologi (paket data center)					1	3.949.890.000	1	440.008.518	100,00%	11,14 %						
						Jangka waktu layanan colocation (bulan)					12		3		25,00%							
						Jangka waktu layanan paket					12		3		25,00%							

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
						internet (bulan)																
					Layanan Publik dan Pemerintah Berbasis E-Goverment	Kapasitas Layanan Publik dan Pemerintah Berbasis E-Goverment (lisensi aplikasi pendukung)					5	527.713.000	-	6.700.000	0,00 %	1,27 %						
						Kapasitas Layanan Publik dan Pemerintah Berbasis E-Goverment (aplikasi layanan)					5		0		0,00 %							
						Kapasitas Layanan Publik dan Pemerintah Berbasis E-Goverment (website)					40		-		0,00 %							
					Penguatan Jaringan Komunikasi Data Pemerintah	Kapasitas Jaringan Komunikasi Data (interkoneksi)					6	575.000.000	-	33	0,00 %	0,00 %						

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
						Kapasitas Jaringan Komunikasi Data (instalasi jaringan komunikasi)					2		-		0,00 %							
						Kapasitas Jaringan Komunikasi Data (peralatan jaringan komputer)					10		-		0,00 %							
					Pengawasan dan Pengendalian Keamanan Sistem Informasi	Jumlah insiden atau penyimpangan keamanan sistem informasi (insiden)					0	146.250.000	0	9.900.000	0,00 %	6,77 %						
					Perumusan Kebijakan Teknis dan SDM Keamanan Informasi	Jumlah kebijakan teknis di Bidang Keamanan Informasi (kebijakan)					2	736.700.000	-	-	0,00 %	0,00 %						
					KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH																	
					Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah			-				3.646.200.338		571.075.500	#DIV/0!	15,66 %	0,00	571.075.500	#DIV/0!	#DIV/0!	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL	

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
																					DAN MENENGAH	
					Pelayanan Administrasi Perkantoran							2.916.535.078		555.554.550									
					Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							504.050.000		-									
					Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur							118.100.000		-									
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							107.515.260		15.520.950									
					Program Peningkatan Pembinaan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi			-				453.788.510		-	#DIV/0!	0,00 %	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
					Peningkatan Kelembagaan dan							153.009.9		-									

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Perizinan Koperasi							30										
					Peningkatan Partisipasi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan Perkoperasian							134.960.280		-								
					Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan Koperasi							165.818.300		-								
					Program Peningkatan Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi			-				739.062.370		21.110.000	#DIV/0!	2,86 %	0,00	21.110.000	#DIV/0!	#DIV/0!	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
					Pendampingan Pemasaran, Kemitraan, Permodalan dan Jaringan Usaha Koperasi							235.006.740		2.510.000								
					Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi							134.193.970		-								

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Peningkatan Kualitas SDM Koperasi								369.861.660		18.600.000								
					Program Peningkatan Pemberdayaan Usaha Kecil			-				3.013.139.267		132.247.500	#DIV/0!	4,39 %	0,00	132.247.500	#DIV/0!	#DIV/0!	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
					Pendampingan dan Promosi Usaha Kecil							541.202.447		39.663.700								
					Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil							976.782.320		-								
					Peningkatan kualitas Kewirausahaan							1.495.154.500		92.583.800								

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Program Peningkatan Pelayanan Teknis Latihan Perkoperasian, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah			-				2.009.506.540		319.774.700		#DIV/0!	15,91 %	0,00	319.774.700	#DIV/0!	#DIV/0!	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
					Peningkatan fungsi pelayanan pemerintah pada pelatihan koperasi dan UMKM						1.118.615.000		32.362.300									
					Penyelenggaraan Pelatihan Perkoperasian dan UKM						732.776.160		287.412.400									
					Peningkatan Mutu Pelatihan Koperasi dan UKM						158.115.380		-									
					Program Peningkatan Pusat Layanan Usaha Terpadu KUMKM			-			818.300.980		58.090.000		#DIV/0!	7,10 %	0,00	58.090.000	#DIV/0!	#DIV/0!	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENE	

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
																					NGAH	
					Peningkatan Layanan Usaha Terpadu							818.300.980		58.090.000									
					PENANAMAN MODAL																	
					Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah			-				3.415.447.730		184.212.771	#DIV/0!	5,39 %	0,00	184.212.771	#DIV/0!	#DIV/0!	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
					Pelayanan Administrasi Perkantoran							1.804.163.400		152.113.928								
					Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							428.965.000		5.273.150								

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								70.900.000		-								
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								100.674.330		10.925.400									
					Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								34.480.000		-									
					Peningkatan Pelayanan Kantor UPTD PTSP								976.265.000		15.900.293									
					Program Peningkatan Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal			-							63.177.240	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	63.177.240	#DIV/0!	#DIV/0!	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
					Studi Kelayakan Potensi							250.342.2		1.000.00								

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Investasi							00		0								
					Pemutakhiran Data Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID)							79.221.620		-								
					Pelaksanaan matchmaking daerah							230.101.000		8.610.300								
					Workshop Pengembangan usaha daerah							40.359.250		-								
					Rapat koordinasi perencanaan dan pelaksanaan penanaman modal daerah (RKPPMD)							83.016.200		53.566.940								
					Forum komunikasi pemberdayaan usaha daerah							43.687.400		-								
					Program Peningkatan Promosi Penanaman Modal			-						11.977.360	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	11.977.360	#DIV/0!	#DIV/0!	DINAS PENANAMAN MODAL DAN	

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
																					PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
					Penyelenggaraan Pameran Investasi							753.296.500		11.977.360								
					Program Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi			-				524.488.500		43.594.030	#DIV/0!	8,31 %	0,00	43.594.030	#DIV/0!	#DIV/0!	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
					Workshop laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) Online							96.066.500		5.314.230								

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Pemantauan pelaksanaan ketentuan penanaman modal								291.147.000		23.077.800								
					Bimbingan dan penyelesaian masalah penanaman modal								66.200.000		-								
					Penyusunan Dokumen Laporan Kegiatan Penanaman Modal								71.075.000		15.202.000								
					Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu			-					700.100.644		67.021.605	#DIV/0!	9,57 %	0,00	67.021.605	#DIV/0!	#DIV/0!	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
					Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung								576.744.894		67.021.605								

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Penyusunan Kebijakan Standar Pelayanan dalam penyelenggaraan PTSP							35.881.750		-								
					Rakor Forum PTSP se-Provinsi kepulauan bangka Belitung							87.474.000		-								
					KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA																	
					Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah			-				3.766.953.921		649.762.007	#DIV/0!	17,25 %	0,00	649.762.007	#DIV/0!	#DIV/0!	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
					Pelayanan Administrasi Perkantoran							3.065.228.920		535.089.192								
					Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							232.325.001		19.024.670								
					Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur							78.750.000		13.791.200								

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan								221.800.000		77.931.945								
					Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								145.200.000		3.175.000								
					Kegiatan Verifikasi dan evaluasi proposal penerimaan bantuan keuangan APBD di bidang kepemudaan dan olahraga								23.650.000		750.000								
					Program Peningkatan Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda			-					3.426.299.390		147.889.778	#DIV/0!	4,32 %	0,00	147.889.778	#DIV/0!	#DIV/0!	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
					Pemberdayaan Peran serta Pemuda								223.215.000		-								
					Pemberdayaan Pemuda Lintas Negara								217.970.000		14.515.500								

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas, Kreativitas dan Wawasan Pemuda							460.350.000		2.030.000								
					Pengiriman dan Pemberian Penghargaan bagi Pemuda yang Berdedikasi dan Berprestasi							50.875.000		2.350.100								
					Pengembangan, Pembinaan dan Pelatihan Generasi Pemuda							2.249.465.890		7.210.000								
					Pengembangan dan Penumbuhan Kewirausahaan Pemuda							224.423.500		121.784.178								
					Program Peningkatan Pembudayaan dan Peningkatan Prestasi Olah Raga			-				7.414.251.223		331.403.400	#DIV/0!	4,47 %	0,00	331.403.400	#DIV/0!	#DIV/0!	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Pembibitan, Pembinaan dan Pelatihan Olahragawan Berbakat pada Sentra Keolahragaan dan Klub Olahraga							1.365.753.366		110.886.400								
					Pembudayaan dan Pemassalan Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Olahraga Layanan Khusus							649.908.920		149.797.000								
					Bangka Belitung Sport Tourism							46.320.000		-								
					Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga							2.387.405.957		70.720.000								
					Peningkatan Kemampuan Atlet Berprestasi							799.810.480		-								
					Pengiriman Kontingen yang Berprestasi							2.165.052.500		-								

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Program Pengembangan Standarisasi Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga			-				8.347.013.835		38.649.005	#DIV/0!	0,46 %	0,00	38.649.005	#DIV/0!	#DIV/0!	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
					Pengadaan Sarana Kepemudaan dan Olahraga							5.898.835.250		11.446.780								
					Revitalisasi dan Rehabilitasi Prasarana Kepemudaan dan Olahraga							2.247.336.085		1.000.000								
					Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi Prasarana Olahraga							200.842.500		26.202.225								
					STATISTIK																	
					Program Peningkatan Pemberdayaan TIK, Statistik dan Persandian			-						46.338.600	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	46.338.600	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Komunikasi dan Informatika	

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Inventarisasi dan Pengelolaan Data Sektoral Daerah	Jumlah ketersediaan data informasi statistik daerah yang telah diinventarisasi dan diolah (kelompok parameter)					8	106.225.000	-	-	0,00 %	0,00 %						
						Rapat Teknis dalam rangka Kompilasi Data Sektoral dari OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung (kali)					5		-		0,00 %						
					Pengembangan Satu Data/ One Data	Jumlah aparatur perangkat daerah yang meningkat kapasitasnya dalam pengembangan satu data daerah ditingkat Prov. Kep. Babel (orang)					104	75.760.080	-	-	0,00 %	0,00 %						

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Pemberdayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Jumlah pemberdayaan TIK yang diperoleh masyarakat (kali)					21	312.306.773	2	40.500.000	9,52 %	12,97 %						
					PERSANDIAN																	
					Program Peningkatan Pemberdayaan TIK, Statistik dan Persandian			-						46.338.600	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	46.338.600	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Komunikasi dan Informatika	
					Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Persandian	Jumlah layanan persandian yang bisa dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah (layanan)					5	71.755.485	1	5.838.600	20,00%	8,14 %						
					KEBUDAYAAN																	
					Program Pelestarian Budaya							4.892.226.960		113.065.610				113.065.610			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Kajian Tradisi Bangka Belitung	Jumlah naskah kajian tradisi (naskah)					2	209.450.000	-	-	0,00 %	0,00 %	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
					Penulisan Sejarah Bangka Belitung	Jumlah Naskah Sejarah Bangka Belitung (naskah)					2	276.000.000	-	33.373.448	0,00 %	12,09 %	-	33.373.448	#DIV/0!	#DIV/0!		
					Partisipasi dan Penghargaan serta kerjasama di bidang budaya	Jumlah Dukungan Event yang difasilitasi dan penyelenggaraan operasional lembaga adat (dukungan/LAM)					31	2.143.850.240	-	16.000.000	0,00 %	0,75 %	-	16.000.000	#DIV/0!	#DIV/0!		
					Gita bahana dan Aubade Kemerdekaan RI	Jumlah peserta gita bahana dan aubade (orang)					256	535.484.000	-	8.892.157	0,00 %	1,66 %	-	8.892.157	#DIV/0!	#DIV/0!		
					Pengelolaan cagar budaya	Jumlah cagar budaya yang dikelola (cagar budaya)					1	425.278.000	-	5	0,00 %	0,00 %	-	5	#VALUE!	#DIV/0!		
					Festival Budaya Melayu	Jumlah Festival Budaya yang diselenggarakan (Festival/event)					1	389.900.000	-	-	0,00 %	0,00 %	-	-	#VALUE!	#VALUE!		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Pentas seni budaya	jumlah sanggar yang dipentaskan (pentas/event)					138	494.000.000	-	54.800.000	0,00 %	11,09 %	-	54.800.000	#VALUE!	#DIV/0!		
					Penyelenggaraan Festival Kesenian Daerah	Jumlah Festival yang diselenggarakan (event)					3	418.264.720	-	-	0,00 %	0,00 %	-	-	#VALUE!	#VALUE!		
					PERPUSTAKAAN																	
				1	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Predikat nilai SAKIP Perangkat Daerah	3,00	368.755.138.123	4,00	3.478.223.216	3,00	8.148.003.000	3,77	306.887.123,00	125,55%	3,77 %	7,77	3.785.110.339	258,88 %	1,03%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
						tingkat kepuasan apatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	75,00		75,00		75,00				0,00 %	#DIV/0!	75,00	-	100,00 %	#DIV/0!		
					Pelayanan administrasi perkantoran	jumlah aparatur perangkat daerah yang terlayani selama 12 bulan	300,00	11.942.137.253	55,00	2.849.509.028	53	2.247.540.000	20,00	297.362.123,00	37,74%	13,23 %	75,00	3.146.871.151	25,00%	26,35%		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					peningkatan sarana dan prasarana aparatur	jumlah aparatur perangkat daerah yang terlayani	300,00	354.670.734.776	55,00	611.903.413	53	5.749.840.000	15,00	9.525.000,00	28,30%	0,17%	70,00	621.428.413	23,33%	0,18%		
					peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	jumlah aparatur perangkat daerah yang meningkat kapasitasnya	300,00	481.475.329	10,00	10.700.000,00	15	30.000.000	-	-	0,00%	0,00%	10,00	10.700.000	3,33%	2,22%		
					Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah perangkat daerah diatas 85%	10,00	954.894.265	2,00	3.697.125,00	2	67.605.000	5,00	-	250,00%	0,00%	7,00	3.697.125	70,00%	0,39%		
					Penyusunan laporan kinerja dan keuangan Perangkat Daerah	jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan perangkat daerah dengan realisasi target diatas 90%	25,00	705.896.500	5,00	2.413.650,00	9	53.018.000	35,00	-	388,89%	0,00%	40,00	2.413.650	160,00%	0,34%		
				2	Program Pengembangan Bahan Pustaka dan Layanan Perpustakaan	pertambahan jumlah koleksi buku perpustakaan	-	4.621.084.000,00	4,84	223.484.750,00	100	447.002.000	-	-	0,00%	0,00%	4,84	223.484.750	#DIV/0!	4,84%	Dinas Kearsipan dan Perpu	

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
						sekolah															stakaan	
						pertambahan jumlah koleksi bahan pustaka	2.000								#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00%	#DIV/0!		
						pertambahan jumlah pengunjung	61.000								#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00%	#DIV/0!		
					penyusunan bibliografi induk daerah dan katalog induk daerah	Jumlah dokumen Bibliografi Induk Daerah dan Katalog Induk Daerah	10	691.055.000,00	2,00	4.300.000,00	2	61.226.000	65,00	-	3250,00%	0,00%	67,00	4.300.000	670,00%	0,62%		
					Pengumpulan koleksi hasil terbitan daerah	jumlah koleksi hasil terbitan daerah	2.680	347.350.000,00	430,00	-	75	51.259.000	45,00		60,00%	0,00%	475,00	-	17,72%	0,00%		
					pelayanan perpustakaan keliling	jumlah pengunjung Perpustakaan Keliling Bagi pelajar, mahasiswa dan Masyarakat	42.500	1.432.000.000,00	6.868,00	8.525.350,00	1.100	82.691.800	25,00	-	2,27%	0,00%	6893,00	8.525.350	16,22%	0,60%		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					pengembangan minat dan budaya baca	Jumlah peserta lomba menulis puisi untuk anak SD, lomba bercerita bahasa daerah, lomba menulis anak untuk anak SMP dan SMA dan lomba penulisan cerita rakyat daerah	5.070	2.150.679.000,00	260,00	210.659.400,00	270	251.825.200	15,00	-	5,56 %	0,00 %	275,00	210.659.400	5,42%	9,80%		
				3	Program Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan	persentase perpustakaan terakreditasi	100	1.296.502.000	3,29	42.616.950	100,00	191.068.590	-	-	0,00 %	0,00 %	3,29	42.616.950	3,29%	3,29%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
						pertambahan pengelola perpustakaan yang dapat menerapkan perpustakaan sesuai standar	200								#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00%	#DIV/0!		
					lomba pustakawan terbaik tingkat provinsi	Jumlah pustakawan teladan tingkat	95	620.000.0	7,00	23.807.20	10	46.009.25	-	-	0,00 %	0,00 %	7,00	23.807.2	7,37%	3,84%		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
						provinsi		00		0		0						00				
					lomba pengelolaan perpustakaan sekolah tingkat provinsi kepulauan bangka belitung	jumlah perpustakaan sekolah yang mengikuti lomba	20	676.502.000	-	-	14	33.989.850	-		0,00 %	0,00 %	0,00	-	0,00%	0,00%		
					akreditasi perpustakaan sekolah	jumlah perpustakaan sekolah yang sudah terakreditasi	4,00	676.843.000	4,00	18.809.750	4	43.543.100	-		0,00 %	0,00 %	4,00	18.809.750	100,00 %	2,78%		
					Peningkatan lapasitas SDM Perpustakaan	jumlah peserta bimtek	4,00	676.843.000	-	-	20	67.526.390	-		0,00 %	0,00 %	0,00	-	0,00%	0,00%		
					KEARSIPAN																	
				4	Program peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan	persentase kelembagaan kearsipan yang melaksanakan tertib arsip	100	1.446.810.002	3,79	54.828.138	100,00	252.037.000	-	-	0,00 %	0,00 %	3,79	54.828.138	3,79%	3,79%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Peningkatan kapasitas SDM Kearsipan	jumlah peserta bimtek kearsipan OPD Provinsi, Jumlah peserta bimtek kearsipan SMA,SMK dan SLB Provinsi	203	1.446.810.002	-	-	43	62.879.000	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
					Arsip masuk desa	jumlah desa/kelurahan yang mendapatkan layanan sadar arsip	239,00	910.000.000,00	25,00	12.585.000,00	25	41.858.000	-		0,00%	0,00%	25,00	12.585.000	10,46%	1,38%		
					Lomba kearsipan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	jumlah peserta lomba arsiparais teladan tingkat provinsi, jumlah peserta lomba pengelolaan arsip tingkat LKD Kab/kota OPD Kab/Kota dan Desa/Kelurahan	239,00	910.000.000,00	35,00	41.029.238,00	21	99.030.000	-		0,00%	0,00%	35,00	41.029.238	14,64%	4,51%		
					Pengawasan kearsipan di pemerintah prov kep babel	jumlah OPD Provinsi Kep.Babel yang diawasi	45,00	1.437.717.900,00	4,00	1.213.900,00	4	48.270.000	-		0,00%	0,00%	4,00	1.213.900	8,89%	0,08%		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				5	Program Peningkatan Pengelolaan dan Pelestarian Kearsipan	pertambahan jumlah arsip dinamis dan statis yang dikelola sesuai standar	1.765	335.503.000	0,09	300.000	100,00	272.395.460	-	-	0,00%	0,00%	0,09	300.000	0,01%	0,09%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
					pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah	Jumlah arsip daerah yang dipelihara provinsi	1.000	335.503.000	200,00	300.000	200	4.900.000	65,00	-	32,50%	0,00%	265,00	300.000	26,50%	0,09%		
					Pedampingan pengelolaan arsip dinamis di Kab/Kota	jumlah arsip dinamis yang dikelola di 7 Kab/Kota	1.900,00	1.916.125.000	-	-	1.300	81.615.460	11,80		0,91%	0,00%	11,80	-	0,62%	0,00%		
					Pameran arsip statis pemerintah provinsi kepulauan bangka belitung	jumlah pengunjung pameran	40,00	500.000.000	1.000,00	-	300	79.650.000	-		0,00%	0,00%	1000,00	-	2500,00%	0,00%		
					Penelusuran sejarah pembentukan provinsi kepulauan bangka belitung	Jumlah arsip sejarah provinsi kepulauan bangka belitung	40,00	500.000.000	-	-	16	106.230.000	60,00		375,00%	0,00%	60,00	-	150,00%	0,00%		
					URUSAN PILIHAN																	
					KELAUTAN DAN PERIKANAN																	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
I	3.01.3.01.01.01	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	A	41.522.095.397		8.895.787.842		4.084.619.342	-	42.692.674	#DIV/0!	1,0%	0	8.938.480.516	#VALUE!	22%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.01.3.01.01.01.01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan (%)	100	16.352.053.675	100	5.632.605.733,00	100	2.020.839.742	18,51	347.847.424	0,1851	17,2 %	119	5.980.453.157	119 %	37%		
1	3.01.3.01.01.01.02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan (%)	100	14.804.439.872	100	2.204.496.668	100	1.328.600.000	1,56	18.607.902	0%	1,40 %	102	2.223.104.570	102 %	15%		
2	3.01.3.01.01.01.04	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan	100	7.129.684.850	100	359.941.654	100	192.456.600	2,71	4.369.600	3%	2,27 %	103	364.311.254	103 %	5%		

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			(%)																
3	3.01.3.01.01.01.06	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi target diatas 90% (Dokumen)	4	1.083.973.000	4	121.863.100,00	4	167.733.000	-	-	0%	0,00 %	4	121.863.100	100 %	11%		
4	3.01.3.01.01.01.07	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah diatas 85% (Dokumen)	2	2.151.944.000	2	576.880.687	2	374.990.000	-	34.742.000	0%	9,26 %	2	611.622.687	100 %	28%		

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	3.01.3.01.01.02	Program Pengembangan Pengelolaan Ruang Laut	Persentase sarana dan prasarana yang terbangun di Desa Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)							0,000	-	#VALUE!	0,0%	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
1	3.01.3.01.01.02.01	Pembangunan Dermaga Jetty	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dimanfaatkan oleh masyarakat pesisir	17,00	42.771.600.000	0	393.008.000	4	4.974.000.000	-	-	0%	0,0%	0	393.008.000	0,00%	0,92%		
2	3.01.3.01.01.02.03	Peningkatan Fungsi Pengelolaan Ruang Laut	Jumlah rekomendasi teknis penerbitan perizinan (berkas rekomendasi)	56	1.485.440.000	0	112.679.400	7	204.969.440	-	-	-	0,0%	0	112.679.400	0,00%	7,59%		
3	3.01.3.01.01.02.06	Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah	Luas kawasan konservasi Perairan Daerah yang ditetapkan (Hektar)	556150	1.670.020.000	595.182,01	388.226.200	544000	309.299.000	-	13.422.000	-	4,3%	595.182		107,02%	0,00%		
4	3.01.3.01.01.02.13	Peningkatan BOOST Center	Jumlah layanan Fungsi BOOST Center	12	1.245.048.000	12	138.919.400	12	152.765.000	3,00	19.162.200	25	12,5%	15	158.081.600	125,00%	12,70%		

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	3.01.3.01.01.03	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Volume Produksi Perikanan Tangkap (Ton)							-	-	0,00 %	0,00 %	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
1	3.01.3.01.01.03.02	pengadaan sarana dan prasarana perikanan tangkap	Jumlah Sarana Prasarana yang dibagikan ke masyarakat (Unit)	5.530	30.399.295.000	220	952.717.200	1050	425.214.159	-	1.000.000	0,00 %	0,24 %	220	953.717.200	3,98%	3,14%		
2	3.01.3.01.01.03.03	Peningkatan Fungsi Pelayanan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)	Jumlah Layanan Fungsi Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) (bulan)	12	23.958.715.900	12	2.373.766.342	12	2.365.404.230	3,00	266.002.159	0,00 %	11,25 %	15	2.639.768.501	125,00 %	11,02%		
3	3.01.3.01.01.03.04	Peningkatan dan Pengembangan PPI	Jumlah PPI yang ditingkatkan dan dikembangkan (PPI)	60	11.741.740.000	2	409.145.921	2	194.058.760	-	-	0,00 %	0,00 %	2	409.145.921	3,33%	3,48%		
4	3.01.3.01.01.03.08	peningkatan pengelolaan sumber daya ikan	Jumlah Nelayan yang dibina (orang)	305	1.315.930.000	280	110.931.389	70	195.282.760	-	3.481.300	0,00 %	1,78 %	280	114.412.689	91,80%	8,69%		

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
5	3.01.3.01.01.03.12	Pemantauan dan Evaluasi kesesuaian sarana dengan aktifitas nelayan	Jumlah nelayan yang dipantau dan di evaluasi kesesuian sarana dengan aktifitas perikanan tangkap (orang)	370	480.000.000	120	0	90	72.983.000	-	-	0,00 %	0,00 %	120	-	32, 43%	0,00%		
6	3.01.3.01.01.03.13	Peningkatan Pelayanan Perizinan Perikanan Tangkap	Jumlah rekomendasi teknis penerbitan perizinan (berkas rekomendasi)	1.200	1.250.000.000	327	0	100	139.674.405	-	-	0,00 %	0,00 %	327	-	27, 25%	0,00%		
7	3.01.3.01.01.03.14	Peningkatan Kesejahteraan Nelayan	Jumlah nelayan yang dibantu sarana dan prasarananya (orang)	2.800	10.200.000.000	60	26.580.000	300	66.101.800	-	4.530.000	0,00 %	0,00 %	60	31.110.000	2,14%	0,31%		
	3.01.3.01.01.04	Program Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya dan Pengolahan Hasil Perikanan	Persentase penduduk yang bekerja di sektor perikanan budidaya dan Usaha Pengolahan & Pemasaran (%)															DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	3.01.3.01.01.04.02	Pengadaan Vaksinasi dan Cara Pemberian Vaksinasi Perikanan Budidaya	Jumlah pembudidaya yang dibantu vaksinasi perikanan	600	1.065.000.000	0	0	200	206.740.960	-	-	0,00 %	0,00 %	0	-	0,00%	0,00%		
	3.01.3.01.01.04.05	Pengembangan dan Pembinaan Promosi serta Kerjasama Pemasaran	Jumlah promosi usaha perikanan (kegiatan)	24	3.388.932.000	7	654.773.800	5	481.762.180	-	-	0,00 %	0,00 %	7	654.773.800	29,17%	19,32%		
	3.01.3.01.01.04.06	Pembinaan Pasar Hasil Perikanan se- Bangka Belitung	Jumlah pasar hasil perikanan yang dibina (Pasar)	35	469.940.000	14	42.987.000	7	129.662.824	-	-	0,00 %	0,00 %	14	42.987.000	40,00%	9,15%		
	3.01.3.01.01.04.07	Pameran Sektor Kelautan dan Perikanan	Jumlah promosi usaha perikanan (Pameran)	23	3.321.688.000	6	415.172.480	5	244.640.400	-	1.310.000	0,00 %	0,00 %	6	416.482.480	26,09%	12,54%		
	3.01.3.01.01.04.09	Pembinaan Pra-Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP) untuk Unit Pengolahan Ikan	Jumlah pelaku usaha yang dibina untuk mendapatkan penerbitan SKP pada UPI skala menengah-besar maupun skala mikro-kecil (orang)	150	833.700.000	62	108.297.700	30	148.856.520	-	-	0,00 %	0,00 %	62	108.297.700	41,33%	12,99%		

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	3.01.3.01.01.04.18	Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha Pengolahan Hasil Perikanan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil Perikanan	46	10.040.000.000	4	227.654.733	6	655.140.368	-	-	0,00 %	0,00 %	4	227.654.733	8,70%	2,27%		
	3.01.3.01.01.04.19	Pengadaan sarana dan prasarana perikanan budidaya	Jumlah Luasan Areal Budidaya	38	3.856.000.000	2	94.356.000	2	199.920.200	-	-	0,00 %	0,00 %	2	94.356.000	5,26%	2,45%		
	3.01.3.01.01.04.20	Penyusunan Dokumen Perencanaan pembangunan Cold Storage	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Cold Storage	9	27.376.800.000	4	0	4	369.075.000	-	-	0,00 %	0,00 %	4	-	44,44%	0,00%		
	3.01.3.01.01.04.21	Percontohan Budidaya Perikanan	Jumlah sarana dan prasarana perikanan budidaya yang diadakan bagi masyarakat (Paket)	28	2.850.000.000	0	0	1	179.584.083	-	1.230.000	0,00 %	0,00 %	0	1.230.000	0,00%	0,04%		
	3.01.3.01.01.05	Program Peningkatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persentase Pelaku Usaha yang Taat Aturan (%)															DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	3.01.3.01.01.05.01	pengawasan sumber daya kelautan	Jumlah hari operasi kapal pengawas (Hari)	840	8.015.210.000	46	1.162.563.155	50	912.177.490	7,00	111.900.000	14,00%	0,00%	53	1.274.463.155	6,31%	15,90%		
	3.01.3.01.01.05.02	pengawasan sumber daya perikanan	jumlah POKMASWAS aktif (kelompok)	70	2.022.515.000	30	84.319.300	60	204.745.500	-	1.550.000	0,00%	0,00%	30	85.869.300	42,86%	4,25%		
	3.01.3.01.01.05.03	pengawasan tindak pidana kelautan dan perikanan	jumlah perkara tindak pidana kelautan dan perikanan yang selesai disidik secara akuntabel dan tepat waktu (Berkas)	59	1.104.000	3	76.068.100	3	230.455.240	-	3.100.000	0,00%	0,00%	3	79.168.100	5,08%	7171,02%		
	3.01.3.01.01.06	Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pengujian dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan	Persentase Produk Hasil Kelautan dan Perikanan yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan (%)															DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.01.3.01.01.06.01	Peningkatan fungsi laboratorium pengujian dan penerapan mutu hasil perikanan	jumlah Bulan layanan fungsi pengujian dan pengendalian mutu hasil	12	4.870.286.000	12	1.142.506.945	12	586.230.800	-	75.035.311	0,00%	0,00%	12	1.217.542.256	100,00%	25,00%		

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			perikanan (bulan)																
	3.01.3.01.01.06.02	Pembinaan supervisi dan sosialisasi penerapan standar mutu dan keamanan pangan produk hasil kelautan dan perikanan	Jumlah UPI yang dibina dalam rangka memenuhi standar sertifikasi mutu dan keamanan pangan hasil produk kelautan dan perikanan (UPI)	500	1.050.000.000	35	22.945.500	180	153.866.900	-	1.860.000	0,00 %	0,00 %	35	24.805.500	7,00%	2,36%		
	3.01.3.01.01.06.03	Peningkatan kapasitas pengujian mutu hasil produk kelautan dan perikanan	Jumlah sampel yang diuji untuk keamanan pangan produk kelautan dan perikanan dari bahan berbahaya (Sampel)	3.500	1.300.000.000	930	195.000.000	12	180.987.100	-	-	0,00 %	0,00 %	930	195.000.000	26,57%	15,00%		
	3.01.3.01.01.07	Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pembenihan Ikan Air Payau	Pertumbuhan pendapatan asli daerah (Juta Rupiah)															DINAS KELAUTAN DAN PERIK	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
																		ANAN	
	3.01.3.01.01.07.03	Penanganan Hama dan Penyakit Ikan Air Payau	Tingkat survival rate benih	38	655.512.000	0	78.734.500	33%	79.250.000	-	18.510.000	0,00 %	0,00 %	0	97.244.500	0,00%	14,83%		
	3.01.3.01.01.07.05	Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTD Balai Pemuliaan Ikan (Air Payau)	Jumlah Bulan layanan fungsi produksi dan penanganan hama dan penyakit (bulan)	12	4.141.160.000	12	2.377.831.847	12	1.623.763.700	3,00	139.613.821	25,00%	0,00 %	15	2.517.445.668	125,00 %	60,79%		
	3.01.3.01.01.07.06	Peningkatan Produksi UPTD Balai Pemuliaan Ikan (Air Payau)	Jumlah Produksi Benih (Juta ekor)	214	8.488.730.400	437	923.818.500	12	400.000.000	0,66	2.175.000	5,50 %	0,00 %	438	925.993.500	204,51 %	10,91%		
	3.01.3.01.01.08	Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pembenihan Ikan Laut	Pertumbuhan pendapatan asli daerah (Juta Rupiah)															DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.01.3.01.01.08.05	Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTD Balai Pemuliaan Ikan Laut	Jumlah Bulan layanan fungsi produksi dan penanganan	12	6.039.380.000	12	1.637.149.859	12	1.098.596.000	3,00	98.027.809	25,00%	0,00 %	15	1.735.177.668	125,00 %	28,73%		

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			hama dan penyakit (bulan)																
	3.01.3.01.01.08.06	Peningkatan Produksi UPTD Balai Pemuliaan Ikan	Jumlah produksi benih (juta ekor)	0,38	2.223.906.000	0,02	568.204.141	80000	506.125.000	-	2.175.000	0,00 %	0,00 %	0	570.379.141	5,26%	25,65%		
	3.01.3.01.01.08.07	Penanganan Hama dan Penyakit Ikan Air Laut	Tingkat survivle rate	38	475.000.000	0	0	70000	61.500.000	-	1.250.000	0,00 %	0,00 %	0	1.250.000	0,00%	0,26%		
		PARIWISATA																	
		Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah							7.086.509.001		502.327.953				502.327.953			Dinas Kebudayaan da Pariwisata	
		Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah ASN Disbudpar yang terlayani (orang)					57	3.269.702.660	57	362.390.793	100,00%	11,08 %	57	362.390.793	#DIV/0!	#DIV/0!		
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang terpelihara (unit)					141	3.055.775.000	8	94.607.840	5,67 %	3,10 %	8	94.607.840	#DIV/0!	#DIV/0!		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN Disbudpar yang meningkat kapasitasnya (orang)					15	139.720.795	-	-	-	-	-	-	-	-		
					Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah dokumen pelaporan dan capaian kinerja yang tersusun (dokumen)					5	105.225.000	-	-	-	-	-	-	-	-		
					Peningkatan Fungsi UPT Disbudpar di Belitung	Jumlah ASN UPTD yang terlayani (orang)					4	257.235.546	4	37.729.320	100,00%	14,67%	4	37.729.320	#DIV/0!	#DIV/0!		
					Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun (dokumen)					7	258.850.000	1	7.600.000	14,29%	2,94%	1	7.600.000	#DIV/0!	#DIV/0!		
					Program Pengembangan Destinasi Pariwisata							6.018.277.609		56.876.945				56.876.945			Dinas Kebudayaan da Pariwisata	

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Pemberdayaan Masyarakat di Destinasi Pariwisata	Jumlah desa wisata dan pokdarwis yang diberdayakan (desa wisata/pokdarwis)					8	217.860.000	-	12.590.000	0,00 %	5,78 %	-	12.590.000	#DIV/0!	#DIV/0!		
					Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana di Destinasi Pariwisata	Jumlah sarana prasarana yang terbangun (unit)					49	457.120.000	-	-	0,00 %	0,00 %	-	-	#VALUE!	#VALUE!		
					Forum koordinasi pengembangan destinasi pariwisata	Jumlah dokumen kesepakatan yang tersusun (dokumen)					2	251.384.000	-	-	0,00 %	0,00 %	-	-	#VALUE!	#VALUE!		
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program dan Kegiatan Lintas Sektor Pariwisata	Jumlah pengelola pokdarwis yang tersosialisasi (orang)					150	106.627.000	-	-	0,00 %	0,00 %	-	-	#VALUE!	#VALUE!		
					Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan destinasi pemasaran pariwisata pada Sekretariat Dewan	Jumlah kawasan ekonomi khusus yang termonitoring dan terevaluasi (kawasan)					3	204.250.000	-	-	0,00 %	0,00 %	-	-	#VALUE!	#VALUE!		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Kawasan KEK																	
					Penyusunan Interpretasi Berbasis Geowisata di Daya Tarik Wisata di Pulau Belitung	Tersusunnya intreprestasi di Daya Tarik Wisata (dokumen)					1	573.077.000	-	-	0,00 %	0,00 %	-	-	#VALUE!	#VALUE!		
					Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata																Dinas Kebudayaan da Pariwisata	
					Peningkatan Pencitraan Pariwisata Kepulauan Bangka Belitung	Tersedianya Bahan Promosi Pariwisata (bahan promosi dan informasi)					6	652.618.000	-	-	0,00 %	0,00 %	-	-	#VALUE!	#VALUE!		
					Pelayanan Informasi Pariwisata	Tersedianya informasi destinasi pariwisata Bangka Belitung (TIC)					4	106.768.090	-	1.600.000	0,00 %	1,50 %	-	1.600.000	#DIV/0!	#DIV/0!		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Pemasaran Pariwisata	Jumlah media informasi yang berbasisi IT (media)					5	518.250.000	-	-	0,00 %	0,00 %	-	-	#VALUE!	#VALUE!		
					Pelaksanaan Promosi Pariwisata Dalam Negeri	Jumlah partisipasi event promosi pariwisata di dalam dan luar daerah (event)					4	898.105.350	-	-	0,00 %	0,00 %	-	-	#VALUE!	#VALUE!		
					Partisipasi Event Promosi Pariwisata	Jumlah dukungan penyelenggaraan event yang difasilitasi (event)					20	684.299.090	-	-	0,00 %	0,00 %	-	-	#VALUE!	#VALUE!		
					Pelaksanaan Promosi Pariwisata melalui media	Jumlah kerjasama dengan maskapai dan media (media)					5	960.269.079	-	42.686.945	0,00 %	4,45 %	-	42.686.945	#DIV/0!	#DIV/0!		
					Penyusunan Profil Pariwisata Bangka Belitung	Jumlah buku profil pariwisata (dokumen)					1	92.200.000	-	-	0,00 %	0,00 %	-	-	#VALUE!	#VALUE!		
					Pengembangan Promosi Kawasan Ekonomi Khusus	Terselenggaranya event promosi pariwisata (event)					2	295.450.000	-	-	0,00 %	0,00 %	-	-	#VALUE!	#VALUE!		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kelembagaan Kepariwisataan								2.830.043.567		37.577.000				37.577.000			Dinas Kebudayaan da Pariwisata	
					Partisipasi Event Festival Nusantara	Jumlah event / festival yang diselenggarakan (duk event / festival)					30	330.700.000	-	-	0,00 %	0,00 %	-	-	#VALUE!	#VALUE!		
					Penyelenggaraan pelatihan dasar bagi sumber daya pariwisata	Jumlah Peserta Pelatihan dasar Sumber Daya Pariwisata (orang)					400	475.150.000		14.415.100	0,00 %	3,03 %	-	14.415.100	#VALUE!	#DIV/0!		
					Penyelenggaraan sertifikasi bagi sumber daya pariwisata	Jumlah peserta sertifikasi sumber daya pariwisata (orang)					300	710.343.800		9.987.600	0,00 %	1,41 %	-	9.987.600	#VALUE!	#DIV/0!		
					Penyelengaraan pemilihan putra-putri kepariwisataan provinsi kepulauan bangka belitung	Jumlah sumberdaya manusia yang mampu mempromosikan pariwisata daerah (orang)					66	667.946.460	-	-	0,00 %	0,00 %	-	-	#VALUE!	#VALUE!		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Penyelengaraan kegiatan wisata kuliner	Jumlah pelaku ekonomi kreatif wisata kuliner (orang)					50	151.114.280	-	4.410.000	0,00 %	2,92 %	-	4.410.000	#VALUE!	#DIV/0!		
					Pengembangan industri perfilman, animasi, video dan fotografi	Jumlah pelaku ekonomi kreatif industri perfilman, animasi, video dan fotografi (orang)					70	322.544.027	-	-	0,00 %	0,00 %	-	-	#VALUE!	#VALUE!		
					Peningkatan peran serta kelembagaan dalam pengembangan pariwisata daerah	Jumlah dokumen kesepakatan pengembangan kelembagaan pariwisata daerah (dokumen)					1	86.085.000	-	2.020.000	0,00 %	2,35 %	-	2.020.000	#VALUE!	#DIV/0!		
					Forum komunikasi pemangku kepentingan pariwisata dalam pembangunan kepariwisataan Daerah	Jumlah naskah kesepakatan yang disepakati (naskah)					3	86.160.000	-	6.744.300	0,00 %	7,83 %	-	6.744.300	#VALUE!	#DIV/0!		
					PERTANIAN																	

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan	* Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah (Ket: AA=6 A=5 BB=4 B=3 CC=2 C=1) *Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan		8.170.530.000		8.444.204.075		9.304.983.080		1.056.635.978				9.500.840.053		116,28		
					Pelayanan Administrasi Perkantoran	* Jumlah aparatur perangkat daerah yang di layani (ASN) * Jumlah aparatur Perangkat Daerah yang dilayani (PHL)	100	5.418.230.000	100%	7.099.612.303	126 ASN	7.048.247.080	-	964.424.153	-	13,68	-	8.064.036.456		148,83	Dinas Pertanian	
					Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor (unit)	100	1.402.300.000	100%	940.760.826	20 unit	1.433.990.000	-	39.263.725	-	2,74	-	980.024.551		69,89		
					Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Kompentensi (orang)	100	450.000.000	100%	286.508.446	70 orang	345.850.000	-	6.370.900	-	1,84	-	292.879.346		65,08		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Pertanian	Jumlah Dokumen Perencanaan (Dok)	4	407.535.000	3 Dok	62.917.000	4 dokumen	251.806.000	-	13.996.000	-	5,56	-	76.913.000		18,87		
					Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Dokumen Laporan Kinerja dan Keuangan (Dok)	100	492.465.000	100%	54.405.500	4	225.090.000	-	32.581.200	-	14,47	-	86.986.700		17,66		
					Program Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura	* Produksi komoditi strategis tanaman pangan (padi) * Peningkatan Produksi Bawang dan Cabai (Ha) *Produksi komoditi strategis Hortikultura (Cabai Besar) * Produksi komoditi strategis Hortikultura (Cabai Rawit) * Produksi komoditi strategis Hortikultura (Bawang Merah) * Kawasan komoditas padi * Kawasan komoditi		5.750.000.000		555.002.000		1.567.075.000		116.659.100			671.661.100		11,68	Dinas Pertanian	

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
						cabai * Kawasan bawang merah																
					Pengembangan Komoditi Hortikultura melalui penerapan budidaya Tanaman yang baik	Peningkatan Produksi Bawang dan Cabai (Ha)	38 Ha	1.450.000.000			18,25 Ha	644.100.000	-	9.402.000	-	1,46	-	9.402.000		64,84%		
					Pengembangan Komoditi Pangan dangan Penerapan GP-PTT (Padi dan Jagung)	Pelaksanaan GP-PTT Tanaman Padi dan Jagung di Provinsi Kep. Bangka Belitung (Ha)	1000 Ha	3.000.000.000	13 Ha	302.942.000	100 Ha	273.025.000	-	15.098.200	-	5,53	-	318.040.200		10,60		
					Pengembangan komoditi hortikultura Lokal yang Unggul	Peningkatan Produksi Hortikultura (Durian) (Ha)	30 Ha	1.000.000.000	140 Ha	188.125.000	46 Ha	553.960.000	-	-	-	0,00	-	188.125.000		18,81		
					Promosi produk pangan dan hortikultura yang bermutu dan berdaya	Peningkatan Promosi Produk Hortikultura	3 Kegiatan	300.000.000	6 Ha	63.935.000	2 keg/even	95.990.000	-	92.158.900	-	96,01	-	156.093.900		52,03		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					saing	(Kegiatan)																
					Program Pengembangan Prasarana, Sarana Pertanian dan Penyuluhan Pertanian	* Ketersediaan Prasarana dan Sarana Pertanian * Kebijakan dan implementasi Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan * Peningkatan pemberdayaan petani dalam mendukung sektor pertanian * Peningkatan fungsi kelembagaan pertanian		12.637.640.500		2.729.758.025		17.366.064.250		71.300.000				2.801.058.025		22,16	Dinas Pertanian	
					Pembangunan jaringan irigasi tersier	Meningkatnya Saluran Jaringan Irigasi (M3)	1000 M3	3.500.000.000	500 Ha	667.509.615	2650 M3	3.635.935.250	-	-	-	0,00	-	667.509.615		19,07		
					Pemetaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Tersedianya aplikasi spasial LP2B (Paket/Dok)	0	0	1 Dok	472.667.480	1 Paket/Dok	214.477.000	-	-	-	0,00	-	472.667.480		#DIV/0!		
					Pembangunan jalan	Panjang jalan produksi	10	1.200.000.			33 Km	11.699.68		13.910.0		0,12		13.910.0		1,16		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					produksi pertanian	pertanian (Km)	KM	000	-	-		4.000	-	00	-		-	00				
					Pengembangan pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian	Terjaminnya kualitas pupuk, pestisida melalui pengawasan dan berkembangnya UPJA Alsintan (%)	100	700.000.000	100%	225.833.215	1	205.029.000	-	2.970.000	-	1,45	-	228.803.215		32,69		
					Rembug Tani Nasional	Terlaksananya keikusertaan dalam pelaksanaan PENAS (%)	100	1.837.640.500	-	-	1	494.250.000	-	3.920.000	-	0,79	-	3.920.000		0,21		
					Peningkatan kapabilitas penyuluhan dan SDM pertanian	Meningkatnya Kapabilitas Penyuluh dan SDM Pertanian (orang)	100	1.350.000.000	100%	640.713.000	1000 Orang	447.975.000	-	47.040.000	-	10,50	-	687.753.000		50,94		
					Fasilitasi asuransi pertanian	Tersedianya asuransi pertanian (Ha)	5000 Ha	600.000.000	2500 Ha	180.254.000	3500 Ha	180.342.000	-	1.640.000	-	0,91	-	181.894.000		30,32		
					Pemberian asuransi peternakan	Tersedianya asuransi peternakan (ekor)	2000 Ekor	200.000.000	2000 ekor	107.588.000	1200 ekor sapi	100.320.000	-	1.820.000	-	1,81	-	109.408.000		54,70		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Pengembagan optimasi lahan	Meningkatnya indeks pertanian (IP)	1000 IP	3.250.000.000	1000 IP	435.192.715	100 IP	388.052.000	-	0	-	0,00	-	435.192.715		13,39		
					Program Pengembangan Perkebunan	* Peningkatan produksi lada * Peningkatan produksi karet * Pengembangan kawasan lada		7.550.000.000		7.307.114.670		5.655.075.000		6225630				7.369.370.970		97,61	Dinas Pertanian	
					Intensifikasi tanaman perkebunan	Luasan Tanaman Lada yang di identifikasi/luasan bantuan saprodi tanaman lada (Ha)	1500 Ha	4.000.000.000	1500 Ha	7.031.363.420	1500 Ha	3.935.325.000	-	1584850	-	0,40	-	7.047.211.920		176,18		
					Ekstensifikasi/Perluasan Areal Tanaman Perkebunan	Penyediaan bibit tanaman perkebunan rakyat (sawit) (Ha)	50 Ha	950.000.000	-	-	50 Ha	399.000.000	-	3802780	-	9,53	-	38.027.800		4,00		
					Penanganan pasca panen tanaman perkebunan	* Sarana Bangunan UPH Bokar (unit) * Alat Pasca Panen Karet (Paket)	12 Unit	2.100.000.000	4 Unit	275.751.250	6 Unit	1.221.850.000	-	3080000	-	0,25	-	278.831.250		13,28		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Peningkatan pemasaran komoditas strategis perkebunan	Tersedianya Dokumen penetapan harga pasar komoditas perkebunan (sawit) (bulan)	100	500.000.000	-	-	12 Bulan	98.900.000	-	5300000	-	5,36	-	5.300.000		1,06		
					Program Pengembangan Peternakan dan Kesehatan Hewan	* Jumlah populasi ternak besar sapi * Jumlah populasi ternak ayam * Kawasan pengembangan ternak sapi		4.109.830.000		2.713.576.778		2.937.242.000		107442140	-		-	2.821.018.918		68,64	Dinas Pertanian	
					Peningkatan populasi ternak	Meningkatnya populasi ternak (sapi) (ekor)	6	2.506.930.000	6%	2.197.018.000	130 Ekor	2.179.475.000	-	1970640	-	0,90	-	2.216.724.400		88,42		
					Peningkatan pengolahan dan pemasaran hasil produksi subsektor Peternakan	Meningkatnya pemasaran hasil produksi subsektor peternakan (%)	100	500.000.000	100%	150.190.928	1	124.684.000	-	1375000	-	1,10	-	151.565.928		30,31		
					Peningkatan Fungsi Pelayanan Laboratorium Keswan dan Klinik Hewan	Meningkatnya Fungsi pelayanan laboratorium keswan dan klinik (ekor)	100	450.000.000	100%	261.227.250	400 Ekor	376.508.000	-	4070618 1	-	10,81	-	301.933.431		67,10		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Hewan Menular Strategis Zoonosis dan Gangguan Reproduksi	Menurunnya angka kesakitan dan kematian ternak akibat penyakit menular zoonosis pada ternak (sampel)	100 Sampel	400.000.000	100%	105.140.600	800 Sample	82.525.000	-	44804559	-	54,29	-	149.945.159		37,49		
					Pengawalan dan Bimtek Pengolahan Limbah ternak Sapi/pupuk kompos/Organik	Terlaksananya pengawalan dan Bimtek Pengolahan Limbah ternak sapi/pupuk kompos/pupuk organik (kelompok)	30 Kelompok	252.900.000	-	-	30 Klmpk	174.050.000		850000	-	0,49	-	850.000		0,34		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Benih	* Jumlah benih tanaman perkebunan yang bersertifikat dan berlabel * Jumlah benih tanaman pangan yang bersertifikat dan berlabel * Jumlah benih tanaman hortikultura yang bersertifikat dan berlabel * Pengawasan peredaran benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan * Jumlah varietas unggul yang didaftarkan		628.225.000		328.122.300		493.510.000		55261000				383.383.300		61,03	Dinas Pertanian	

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Pengawasan peredaran benih dan pembinaan produsen	Terawasinya dan terbinanya produsen benih yang mengedarkan benih (Produsen-penangkar/Kab-kota) (Produsen-penangkar kab/kota)	54	128.225.000	7 Kab/ kota	3.575.000	40 Produsen /penangkar	74.350.000	-	7320000	-	9,85	-	10.895.000		8,50		
					Sertifikasi benih Pertanian/ Perkebunan	Meningkatnya kualitas benih di wilayah provinsi kep. Bangka Belitung (%)	100	200.000.000	1	1.047.900	1	72.300.000	-	1629160	-	22,53	-	17.339.500		8,67		
					Penilaian kultivar/varietas unggul lokal	Bertambahnya jumlah varietas unggul lokal di Provinsi Kep. Bangka Belitung (Varietas)	2	100.000.000	3 Varietas	1.875.000	2 Varietas	42.460.000	-	5340000	-	12,58	-	7.215.000		7,22		
					Peningkatan fungsi pelayanan UPTD BPSMB	Meningkatnya fungsi pelayanan UPTD BPSMB (UPTD)	1	200.000.000	1 UPTD	321.624.400	1 UPTD	304.400.000	-	2630940	-	8,64	-	347.933.800		173,97		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Program Peningkatan Pelayanan Teknis Proteksi Tanaman	Terkendalinya areal tanam yang terserang OPT dan DPI		460.600.000		461.102.210		550.000.000		28035610				489.137.820		106,20	Dinas Pertanian	
					Peningkatan pelayanan teknis proteksi tanaman	* Jumlah Layanan Laboratorium Pestisida (layanan) * Jumlah Laboratorium Hama Penyakit (unit)	5	160.600.000	5%	278.338.135	2 Layanan	350.000.000	-	4335000	-	1,24	-	282.673.135		176,01		
					Peningkatan fungsi pelayanan UPTD Balai Proteksi Tanaman	* Layanan Administrasi Perkantoran (bulan)* Jumlah Kursi Rapat (unit)	1	300.000.000	12 Bulan	182.764.075	12 bulan	200.000.000	-	23700610	-	11,85	-	206.464.685		68,82		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pengembangan Benih Pertanian	* Ketersediaan kandang ternak, gudang pakan, gedung pertemuan dan sarana prasarana * Ketersediaan bibit ayam * Ketersediaan anakan sapi * Ketersediaan benih sumber padi * Ketersediaan bibit lada * Ketersediaan bibit karet		3.318.670.000		5.102.456.988		3.521.065.000		-		0,00		5.102.456.988		153,75	Dinas Pertanian	
					Peningkatan fungsi pelayanan UPTD Balai Benih Pertanian	Meningkatnya fungsi pelayanan UPTD Balai Benih Pertanian (UPTD)	100%	480.000.000	1 UPTD	433.419.272	1 UPTD	442.750.000	-	-	-	0,00	-	433.419.272		90,30		
					Pembangunan akses informasi perbenihan	Pusat Unggulan Inovasi (Dokumen)	100%	250.000.000	-	-	1 Dokumen	165.050.000	-	-	-	0,00	-	-		0,00		
					Penyediaan benih sumber dan benih sebar	Tersedianya Benih Lada dalam Polibag (Polibag)	100	938.670.000	100%	805.834.786	50000 Polybag	445.350.000	-	-	-	0,00	-	805.834.786		85,85		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Pengembangan perbibitan ternak ruminansia	* Jumlah Bibit Sapi (ekor) * Jumlah Bibit Ayam (ekor)	15000	1.200.000.000	6000 Ekor	1.041.960.110	25 Ekor	997.715.000	-	-	-	0,00	-	1.041.960.110		86,83		
					Integrasi jagung dan sapi	Tersedianya pakan ternak (jagung) (Ha)	10	150.000.000	10 Ha	73.243.500	3 Ha	73.700.000	-	-	-	0,00	-	73.243.500		48,83		
					Pengembangan sarana dan prasarana UPTD Balai Benih Pertanian	Sarana dan Prasarana di UPTD Balai Benih Pertanian (Paket)	1	300.000.000	1 Paket	2.747.999.320	1 Paket	1.396.500.000	-	-	-	0,00	-	2.747.999.320		916,00		
					KEHUTANAN																	
1	3.04.3.04.01				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran untuk mendukung teknis kegiatan dinas		26.973.234.700	78,51	4.464.693.288		7.115.250.177		365.698.797				4.830.392.085			DINAS KEHUTANAN	
1	3.04.3.04.01.01.01				Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Aparatur Perangkat	100,00	10.693.240.000	94,99	3.398.339.818	100,00	1.974.370.000	37,88	348.595.097	17,66	17,66	66,44	3.746.934.915	66,44	35,04		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2	2				Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100,00	12.421.330.000	70,68	913.862.905	100,00	4.816.275.177	81,84	14.893.700	0,31	0,31	76,26	928.756.605	76,26	7,48		
3	4				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kebersihan kantor	210,00	1.625.000.000	71,32	119.428.515	100,00	187.232.000	95,01	-	0,00	0,00	83,17	119.428.515	39,60	7,35		
4	6				Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	20,00	235.405.000	61,48	2.450.000	100,00	48.480.000	61,25	2.210.000	4,56	4,56	61,37	4.660.000	306,83	1,98		
5	7				Penyusunan Sistem Database kehutanan Berbasis IT	Tersedianya alat tulis kantor	12,00	1.418.072.800	87,79	23.662.050	100,00	-	92,21	-	#DIV/0!	#DIV/0!	90,00	23.662.050	750,00	1,67		
6	8				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	25,00	580.186.900	84,81	6.950.000	100,00	88.893.000	83,46	-	0,00	0,00	84,14	6.950.000	336,54	1,20		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2					Program Peningkatan Tata Kelola dan Pemanfaatan Kawasan Hutan	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pengembangan Hutan		11.795.922.313	81,01	1.948.857.461,98		793.037.000		32.395.297							DINAS KEHUTANAN	
1	1				Pemanfaatan Kawasan Hutan	Tersedianya data dan informasi pembangunan kehutanan	16,00	2.324.900.150	81,86	44.930.250	100,00	137.796.000	96,24	7.173.700	5,21	5,21	89,05	52.103.950	556,56	2,24		
2	2				Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu	Tersedianya data monitoring dan evaluasi terpadu pemegang IPPKH	10,00	2.339.821.500	71,58	103.995.100	100,00	191.534.000	96,64	5.030.000	2,63	2,63	84,11	109.025.100	841,10	4,66		
3	3				Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Hutan	Terlaksananya penyusunan dan sisialisasi NSDH	8,00	2.298.368.000	98,84	99.458.600	100,00	103.630.000	90,80	18.961.597	18,30	18,30	94,82	118.420.197	#####	5,15		
4	5				Peningkatan Usaha Hasil Hutan Kayu	Tersedianya informasi batas kawasan hutan	60,00	1.563.650.163	99,11	46.889.200	100,00	109.574.000	94,52	1.230.000	1,12	1,12	96,82	48.119.200	161,36	3,08		
5	6				Expo Pengembangan dan Promosi Hasil Hutan	Terlaksanya kegiatan penyediaan data dan informasi kawasan hutan melalui pemanfaatan SIG	5,00	3.104.000.000	99,90	331.191.746	100,00	250.503.000	93,53	-	0,00	0,00	96,72	331.191.746	#####	10,67		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
						kehutanan																
6	##				Penyelesaian Penyediaan Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA)	Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis di bidang perpetaan kehutanan	100,00	-	0,00	0	100,00	-	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	#DIV/0!		
7	##				Pengadaan Kendaraan Roda Dua (R-2) UPTD KPH (DAK Kehutanan)	Terlaksanya bimbingan teknis terhadap pemegang IPPKH dan apartur kehutanan	100,00	165.182.500	82,59	165.182.500	100,00	-	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	41,30	165.182.500	41,30	100,00		
8	##				Pembangunan Sumber Benih dan Konservasi Exsitu Gaharu dan Pelawan	Terlaksanya Musyawarah Nasional Forum Gaharu Indonesia	100,00	2.073.625.000	99,40	211.046.500	100,00	303.164.000	57,40	-	0,00	0,00	78,40	211.046.500	78,40	10,18		
9	##				Pembangunan Kantor Resort KPH (DAK Kehutanan)	Terlaksanya Penyelesaian Penyediaan Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA)	0,00	-	95,80	946.163.565,98	100,00	-	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	47,90	946.163.566	#####	#DIV/0!		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
10					Pembangunan Sarana dan Prasarana Operasional KPH (DAK Kehutanan)	Terlaksanya Penyelesaian Penyediaan Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA)	0,00	-	95,80	946.163.565,98	100,00	1.608.000.000	0,00	-	0,00	0,00	47,90	946.163.566	#####	#DIV/0!		
3					Program : Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam (SDA) dan Ekosistem	Jumlah pelanggaran hutan yang ditindak dan penurunan luas kebakaran hutan		12.566.411.860	81,70	1.561.253.860		2.217.418.560		263.194.340							DINAS KEHUTANAN	
1	1				Penertiban Pelanggaran Tindak Pidana Kehutanan		11,00	2.725.960.000	8,83	2.080.000	100,00	189.700.000	98,82	16.677.340	8,79	8,79	53,83	18.757.340	489,32	0,69		
2	2				Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan		791,00	2.342.387.000	97,63	152.337.000	100,00	260.018.000	99,98	56.199.700	21,61	21,61	98,81	208.536.700	12,49	8,90		
3	6				Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan		60,00	3.532.240.000	99,45	305.480.000	100,00	-	99,29	-	#DIV/0!	#DIV/0!	99,37	305.480.000	165,62	8,65		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
3	##				Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengamanan Hutan oleh Polhut		155.000,00	2.167.000.000	97,19	181.486.600	100,00	-	99,29	-	#DIV/0!	#DIV/0!	98,24	181.486.600	0,06	8,38		
3	##				Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengamanan Hutan		0,00	-	0,00	-	0,00	1.553.072.000	99,29	148.827.300	9,58	9,58	49,65	148.827.300	#####	#DIV/0!		
4	##				Tenaga Pendukung Polisi Hutan		100,00	74.561.300	98,38	492.883.600	100,00	-	71,75	-	#DIV/0!	#DIV/0!	85,07	492.883.600	85,07	661,04		
5	##				Identifikasi dan Inventarisasi Kawasan Ekosistem Essensial		10,00	1.509.635.000	76,59	23.555.000	0,00	-	99,50	-	#DIV/0!	#DIV/0!	88,05	23.555.000	880,45	1,56		
5	##				Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Ekosistem Essensial		100,00	214.628.560	0,00	-	100,00	214.628.560	99,50	41.490.000	19,33	19,33	49,75	41.490.000	49,75	19,33		
6	##				Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH-Kehutanan)		0,00	-	93,84	403.431.660	0,00	-	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	46,92	403.431.660	#####	#DIV/0!		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
4	##				Program Pengelolaan DAS dan Pemberdayaan Masyarakat	Penurunan luas lahan kritis		14.673.074.040	74,07	834.086.391		1.190.064.800		86.913.030							DINAS KEHUTANAN	
1	1				Pembinaan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai		3.194,64	1.423.000.000	72,42	49.711.500	100,00	210.455.800	9,20	19.357.000	9,20	9,20	40,81	69.068.500	1,28	4,85		
2	2				Pemenuhan Kewajiban Rehabilitasi DAS bagi Pemegang IPPKH		33,00	1.096.062.500	91,19	2.330.000	100,00	-	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	45,60	2.330.000	138,17	0,21		
3	3				Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan		100,00	1.038.471.540	73,77	61.104.400	100,00	-	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	36,89	61.104.400	36,89	5,88		
4	4				Penyelenggaraan Penyuluhan Kehutanan		195,00	3.161.035.000	85,73	135.878.700	100,00	218.120.000	1,56	3.392.600	1,56	1,56	43,65	139.271.300	22,38	4,41		
5	5				Rehabilitasi Hutan dan Lahan		9.492,50	4.260.365.000	82,09	341.433.500	100,00	463.216.000	11,48	53.183.230	11,48	11,48	46,79	394.616.730	0,49	9,26		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
6	6				Pengembangan Perhutanan Sosial		119.289,00	3.694.140.000	57,66	243.628.291	100,00	298.273.000	3,68	10.980.200	3,68	3,68	30,67	254.608.491	0,03	6,89		
1	##				Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha Ekonomi Produktif (DAK Kehutanan)		0,00	-	22,36	497.478.631	100,00	-	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	11,18	497.478.631	#####	#DIV/0!		
2	##				Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH-DR Kehutanan)		0,00	-	76,18	227.910.750	100,00	337.659.000	0,00	-	0,00	0,00	38,09	227.910.750	#####	#DIV/0!		
3	##				Rehabilitasi Hutan dan Lahan di KPHP Bubus Panca (DBH-DR Kehutanan)		0,00	-	89,69	92.703.500	100,00	-	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	44,85	92.703.500	#####	#DIV/0!		
4	##				Rehabilitasi Hutan dan Lahan di KPHP Sigambir Kotawaringin (DBH-DR Kehutanan)		0,00	-	0,00	0	100,00	-	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	#####	#DIV/0!		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
5	##				Rehabilitasi Hutan dan Lahan di KPHP Sungai Sembulan (DBH-DR Kehutanan)		0,00	-	81,57	278.976.775	100,00	-	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	40,79	278.976.775	#####	#DIV/0!		
6	##				Rehabilitasi Hutan dan Lahan di KPHP Muntai Palas (DBH-DR Kehutanan)		0,00	-	86,48	167.489.379	100,00	-	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	43,24	167.489.379	#####	#DIV/0!		
3	##				Rehabilitasi Hutan dan Lahan di KPHP Rambat Menduyung (DBH-DR Kehutanan)		0,00	-	90,46	111.030.000	100,00	-	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	45,23	111.030.000	#####	#DIV/0!		
4	##				Rehabilitasi Hutan dan Lahan di KPHP Jebu Bembang Antan (DBH-DR Kehutanan)		0,00	-	90,37	214.391.100	100,00	-	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	45,19	214.391.100	#####	#DIV/0!		
5	##				Rehabilitasi Hutan dan Lahan di KPHL Belantu Mendanau (DBH-DR Kehutanan)		0,00	-	92,39	397.445.664	100,00	-	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	46,20	397.445.664	#####	#DIV/0!		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
6	##				Rehabilitasi Hutan dan Lahan di KPHP Gunung Duren (DBH-DR Kehutanan)		0,00	-	92,72	385.060.443	100,00	-	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	46,36	385.060.443	#####	#DIV/0!		
7					Rehabilitasi Mangrove di kecamatan Kelapa Kab. Bangka Barat (DAK KEHUTANAN)		0,00	-	92,39	397.445.664	100,00	104.400.000	0,00	-	0,00	0,00	46,20	397.445.664	#####	#DIV/0!		
8					Rehabilitasi Mangrove di kecamatan Mendo Barat Kab. Bangka (DAK KEHUTANAN)		0,00	-	92,72	385.060.443	100,00	104.400.000	0,00	-	0,00	0,00	46,36	385.060.443	#####	#DIV/0!		
5	##				Program Peningkatan Pelayanan Teknis Tata Kelola Kehutanan	Penurunan luas lahan kritis		4.627.761.000	74,07	-		442.164.700		21.035.000							DINAS KEHUTANAN	
1	1				Pelayanan Teknis UPTD KPHP Sigambir Kotawaringin		100,00	734.254.000	72,42	0	100,00	74.100.000	0,00	-	0,00	0,00	36,21	-	36,21	0,00		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2	2				Pelayanan Teknis UPTD KPHP Bubus Panca		100,00	812.655.000	91,19	0	100,00	72.965.000	28,83	21.035.000	28,83	28,83	60,01	21.035.000	60,01	2,59		
3	3				Pelayanan Teknis UPTD KPHP Muntai Palas		100,00	731.684.000	73,77	0	100,00	74.350.000	0,00	-	0,00	0,00	36,89	-	36,89	0,00		
4	4				Pelayanan Teknis UPTD KPHP Sungai Sembulan		100,00	782.984.000	85,73	0	100,00	73.524.700	0,00	-	0,00	0,00	42,87	-	42,87	0,00		
5	5				Pelayanan Teknis UPTD KPHP Rambat Menduyung		100,00	783.500.000	82,09	0	100,00	74.100.000	0,00	-	0,00	0,00	41,05	-	41,05	0,00		
6	6				Pelayanan Teknis UPTD KPHP Jebu Bembang Antan		100,00	782.684.000	57,66	0	100,00	73.125.000	0,00	-	0,00	0,00	28,83	-	28,83	0,00		
7	7				Pelayanan Teknis UPTD KPHL Belantu Mendanau		100,00	762.500.000	22,36	0	100,00	74.500.000	0,00	-	0,00	0,00	11,18	-	11,18	0,00		
8	8				Pelayanan Teknis UPTD KPHP Gunung Duren		100,00	762.500.000	76,18	0	100,00	71.850.000	31,63	22.727.800	31,63	31,63	53,91	22.727.800	53,91	2,98		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
9	9				Pelayanan Administrasi Perkantoran UPTD KPHP Rambat Menduyung		100,00	783.500.000	89,69	92.703.500	100,00	208.110.000	0,00	-	0,00	0,00	44,85	92.703.500	44,85	11,83		
10	##				Pelayanan Administrasi Perkantoran UPTD KPHP Jebu Bembang Antan		100,00	782.684.000	0,00	0	100,00	199.252.000	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		
11	##				Pelayanan Administrasi Perkantoran UPTD KPHP Bubus Panca		100,00	812.655.000	81,57	278.976.775	100,00	200.006.520	10,89	21.789.700	10,89	10,89	46,23	300.766.475	46,23	37,01		
12	##				Pelayanan Administrasi Perkantoran UPTD KPHP Sigambir Kotawaringin		100,00	734.254.000	86,48	167.489.379	100,00	199.170.000	9,60	19.128.000	9,60	9,60	48,04	186.617.379	48,04	25,42		
13	##				Pelayanan Administrasi Perkantoran UPTD KPHP Sungai Sembulan		100,00	782.984.000	90,46	111.030.000	100,00	226.350.000	8,59	19.436.012	8,59	8,59	49,53	130.466.012	49,53	16,66		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
14	##				Pelayanan Administrasi Perkantoran UPTD KPHP Muntai Palas		100,00	731.684.000	90,37	214.391.100	100,00	220.231.200	0,00	-	0,00	0,00	45,19	214.391.100	45,19	29,30		
15	##				Pelayanan Administrasi Perkantoran UPTD KPHL Belantu Mendanau		100,00	762.500.000	92,39	397.445.664	100,00	245.000.000	0,00	-	0,00	0,00	46,20	397.445.664	46,20	52,12		
16	##				Pelayanan Administrasi Perkantoran UPTD KPHP Gunung Duren		100,00	762.500.000	92,72	385.060.443	100,00	238.931.600	11,15	26.630.787	11,15	11,15	51,94	411.691.230	51,94	53,99		
					ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL																	
					Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah			-						-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Pelayanan Administrasi Perkantoran								1.675.768.075										
					Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							543.320.000										
					Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur							127.687.500										
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							106.879.500										
					Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan							121.015.500										
					Penyebaraan data informasi bidang Energi dan sumber daya mineral (ESDM)							201.535.900										
					Pendataan Aset SKPD							83.099.650										
					Monitoring dan Evaluasi Program Kinerja SKPD							109.807.000										

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Rapat Koordinasi Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung							78.850.750										
					Peningkatan Fungsi Pelayanan Cabang Dinas Wilayah Bangka							647.299.060										
					Peningkatan Fungsi Pelayanan Cabang Dinas Wilayah Bangka Barat							603.512.660										
					Peningkatan Fungsi Pelayanan Cabang Dinas Wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan							557.723.910										
					Peningkatan Fungsi Pelayanan Cabang Dinas Wilayah Belitung							620.674.000										
					Peningkatan Fungsi Pelayanan Cabang Dinas Wilayah Belitung Timur							518.190.660										

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Program Peningkatan Pengelolaan Geologi dan Air Tanah			-						-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
					Penyelidikan Kebumian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung							90.095.435										
					Pembinaan Supervisi Pengelolan Air Tanah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung							117.105.845										
					Peningkatan Fungsi Pelayanan Cetak Peta							117.083.150										
					Kajian Pengelolaan dan Pemanfaatan Mineral Ikutan							251.847.220										
					Indentifikasi Potensi Mineral ikutan							277.534.975										

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Penyajian data dan peta potensi Sumber Daya Mineral								139.613.500										
					Program Pengembangan Pertambangan Mineral Logam			-						-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
					Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Logam							145.477.150										
					Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara							66.757.700										
					Verifikasi, Evaluasi terhadap dokumen Rencana Reklamasi (RR)							59.620.700										

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Pembinaan Pengembangan dan Pemerdayaan Masyarakat Sekitar (Community Developmen and Carporate Sosial Responsibility/CD-CSR)							59.620.700										
					Program Pengembangan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan			-						-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
					Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Pertambangan Bukan Logam dan Batuan							160.132.150										
					Program Pengembangan Sumber Daya Energi			-						-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA	

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
																					MINERAL	
					Pembinaan dan Pengawasan di Bidang Ketenagalistrikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung							75.297.500										
					Optimalisasi lifing MIGAS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Partisipasi ADPM (Asosiasi Daerah Penghasil MIGAS)							98.411.250										
					Pembinaan dan Pemantauan Pendistribusian BBM dan Gas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung							60.016.750										
					PERDAGANGAN																	
I	3.06.3.06.01.01				Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Predikat (NILAI) SAKIP Perangkat Daerah	4,00	17.622.589.628	3	8.214.646.984	3,00	3.077.003.500		387.903.479	-	12,6 %	3	8.602.550.463	75, 00%	48,82%	DISPERINDAG	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Tingkat Kepuasan Aparatur Perangkat Daerah Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	100,00		100		100,00			-	-	#DIV/0!	100	-	100,00 %	#DIV/0!		
1	3.06.3.06.01.01.01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan (orang)	660	12.451.640.650	264	6.892.918.828	132	2.262.122.500	30	340.568.072	23%	15,06 %	294	7.233.486.900	44,55%	58,09%		
2	3.06.3.06.01.01.02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan (orang)	660	2.983.775.000	264	1.094.577.855,65	132	434.091.000	30	13.131.909	23%	3,03 %	294	1.107.709.765	44,55%	37,12%		
3	3.06.3.06.01.01.03	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat kapasitasnya (orang)	195	712.604.400	18	76.477.600	20	125.600.000	-	875.000	0%	0,70 %	18	77.352.600	9,23%	10,85%		

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
4	3.06.3.06.01.01.04	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan Tingkat Konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah di atas 85%(dokumen)	11	1.101.865.750	4	108.327.000	4	198.190.000	2	33.328.498	50%	16,82%	6	141.655.498	54,55%	12,86%		
5	3.06.3.06.01.01.05	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah dengan Realisasi Target diatas 90 % (Jenis Dokumen)	25	372.703.828	10	42.345.700	5	57.000.000	3	-	60%	0,00%	13	42.345.700	52,00%	11,36%		
II	3.06.3.06.01.02	Program Pengembangan Perdagangan	Pertumbuhan Volume ekspor (ton)	4.309.000	19.056.510.000	1.481.141,19	1.052.948.103	862.000	3.279.140.080	0,00	90.197.848	0%	2,8%	1.481.141	1.143.145.951	34,37%	0,060	DISPERINDAG	
			Persentase Rumah tangga Miskin yang bekerja di sektor perdagangan	50		0	0	10		-	-	0%	#DIV/0!	0	-	0,00%	#DIV/0!		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
						Persentase Pemantauan dan Pengawasan Distribusi dan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (18 bahan kebutuhan Pokok)	100		83		89				0%				0,00%	#DIV/0!		
						Persentase Peningkatan sarana dan Prasarana Perdagangan yang dibangun	100		2,30		12		0,00	-	0%	#DIV/0!	2	-	2,30%	#DIV/0!		
						Pertumbuhan Nilai Resi Gudang yang diterbitkan	100		20		40			-	0%	#DIV/0!	20	-	20,00%	#DIV/0!		
						Pertumbuhan komoditi yang terjual melalui pasar lelang (komoditi)	4		0		1		-	-	0%	#DIV/0!	0	-	0,00%	#DIV/0!		

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Persentase Peningkatan Promosi Produk Dalam negeri	50		10	0	10		-	-	0%				0,00%	#DIV/0!		
1	3.06.3.06.01.02.01	Pelaksanaan Pasar Murah	Jumlah Pelaksanaan (kali)	270	2.960.000.000	71	463.491.600	50	353.708.000	3	17.825.000	6,00%	5,04%	74	481.316.600	27,41%	16,26%		
2	3.06.3.06.01.02.02	Verifikasi dan Pengawasan Perdagangan Sumber Daya Mineral	Jumlah Pelaku Usaha (Pelaku usaha)	250	3.200.000.000	59	159.764.172	50	148.725.000	13	6.490.000	26,00%	4,36%	72	166.254.172	28,80%	5,20%		
3	3.06.3.06.01.02.04	Pembinaan ,Monitoring dan Evaluasi Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha (Pelaku usaha)	300	1.343.000.000	80	77.898.000			-	-	0,00%	0,00%	80	77.898.000	26,67%	5,80%		
			Jumlah Distributor dan Pelaku Usaha yang dimonitoring (Distributor/ Pelaku Usaha)					45	80.262.000	-	-	0,00%	0,00%	0					
4	3.06.3.06.01.02.05	Peningkatan dan Perluasan Akses Pasar	Jumlah keiukutsertaan (kali)	72	7.572.600.000	3	176.744.631			-	-	0,00%	0,00%	3	176.744.631	4,17%	2,33%		
			Jumlah Pelaku Usaha yang terfasilitasi akses					15	2.080.650.080	-	59.102.4	0,00%	2,84%	0	59.102.4	0,00%	0,78%		

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			pasar (pelaku usaha)								56				56				
5	3.06.3.06.01.02.06	Peningkatan Kemampuan SDM Perdagangan dan Produk	Jumlah (orang)	960	2.068.910.000	170	120.834.700			-	-	0,00 %	0,00 %	170	120.834.700	17,71%	5,84%		
			Jumlah Peserta/Pelaku Usaha yang terlatih	0				40	292.720.000	-	6.780.392	0,00 %	2,32 %	0	6.780.392	0,00%	0,33%		
6	3.06.3.06.01.02.07	Informasi Perdagangan Dalam Negeri	tersedianya data informasi harga barang pokok dan barang penting lainnya (komoditi)	80	831.000.000	20	25.120.000	20	229.325.000	-	-	0,00 %	0,00 %		25.120.000				
7	3.06.3.06.01.02.09	Peningkatan Kemampuan Pengelola Resi Gudang	jumlah orang (orang)	54	1.081.000.000	10	29.095.000	10	93.750.000	-	-	0%	0,00 %	10	29.095.000	18,52%	2,69%		
III	3.06.3.06.01.05	Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Kemetrologian	Persentase Pengawasan Barang Beredar, Jasa dan Tertib Niaga (112 barang SNI wajib; 140 pelaku usaha Tertib Niaga)	100,00	15.107.000.000	24	583.362.830	18	888.540.000		62.759.900	-	7,06 %	24	646.122.730	0,00%	4,28%	DISPERINDAG	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Indeks Keberdayaan Konsumen (Ket : Sadar =0 - 20 ,Paham =21-40 , Mampu = 41-60, Kritis = 61-80, Berdaya = 81-100)	34		43,44	0	25		0,00	-	-	0,0%	43	-	0,00%	#DIV/0!		
			Persentase Pengembagan Standarisasi dan Lab Kemetrologian	0		0	0	20		-	-	-	0,0%	0	-	0,00%	#DIV/0!		
1	3.07.3.06.01.18.01	Pengawasan Barang Beredar dan Jasa	Jumlah Barang dan Jasa (Barang dan Jasa)	50	4.221.500.000	20	271.994.740			-	0	0,00%	0,00%	20	271.994.740	40,00%	6,44%		
			Jumlah Barang Beredar yang diawasi (Barang)					16	210.140.000		0	0,00%	0,00%	0	-	0,00%			
2	3.07.3.06.01.18.02	Tim Koordinasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)	Jumlah Kabupaten/Kota (Kab/Kota)	35	1.400.000.000	7	84.333.690	7	116.875.000	1	26.910.500	14,29%	23,03%	8	111.244.190	22,86%	7,95%		
3	3.07.3.06.01.18.03	Survey Pengukuran Indeks Keberdayaan Konsumen	Jumlah Konsumen (orang)	2000	645.500.000	800	102.335.200	400	80.850.000	-	-	0,00%	0,00%	800	102.335.200	40,00%	15,85%		

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
4	3.07.3.06.01.18.04	Pos Layanan Pengaduan Konsumen	Jumlah Pengaduan Konsumen (Pengaduan)	134	1.450.000.000	36	41.579.400	34	199.370.000	6	35.849.400		17,98 %	42	77.428.800	31, 34%	5,34%		
5	3.07.3.06.01.18.05	Sosialisasi Kelembagaan dan Pemberdayaan Konsumen	Jumlah Peserta (Orang)	1830	2.090.000.000	100	69.496.800	100	81.280.000	-	-	0,00 %	0,00 %	100	69.496.800	5,46%	3,33%		
6	3.07.3.06.01.18.06	Pelaksanaan Penentuan Penegakan Hukum Pelaggaran Dalam Rangka Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Serta Tertib Niaga	Kasus (kasus)	14	2.200.000.000		4.625.000			-	-	0,00 %	0,00 %	0	4.625.000	0,00%	0,21%		
			Jumlah Pelanggaran yang ditindak lanjuti secara hukum (Kasus)					1	83.850.000										
7	3.07.3.06.01.18.07	Pengawasan Tertib Niaga	Jumlah Pengawasan (Kali)	98	3.100.000.000	14	8.998.000			-	-	0,00 %	0,00 %						
			Jumlah Pelaku Usaha Perdagangan yang diawasai (Pelaku Usaha)					25	116.175.000										

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
IV	3.06.3.06.01.06.01	Program Peningkatan Pelayanan Teknis Sertifikasi dan Pengendalian Mutu Produk	Persentase komoditi unggulan daerah diuji yang memenuhi standar pengujian	72,00	6.619.601.000	36	1.590.011.494	18	3.114.760.000	-	61.666.671	0%	2,0%	36	1.651.678.165	0%	0%	DISPERINDAG	
1	3.07.3.06.01.19.01	Peningkatan Pelayanan Pemerintah UPTD BSPM	Jumlah Pegawai (orang)	115	4.730.780.000	49	1.345.334.814,17	23	640.520.000	-	49.963.371	0%	7,80 %	49	1.395.298.185	42, 61%	29%		
3	3.07.3.06.01.19.02	Pemeliharaan dan Penambahan Status Akreditasi Laboratorium	Jumlah Lingkup Akreditasi (Ruang lingkup)	19	745.424.000	4	83.380.810	2	270.270.000	-	11.703.300	0%	4,33 %	4	95.084.110	21, 05%	13%		
3	3.07.3.06.01.19.03	Monitoring Mutu Pengujian	Laporan Mutu Komoditi (Laporan)	6	1.143.397.000	3	161.295.870	1	97.720.000	-	-	0%	0,00 %	3	161.295.870	50, 00%	14%		
4	3.07.3.06.01.19.03	Penyediaan Peralatan Uji Mutu Barang di BPSMB (DAK)	Tersedianya Sarana dan Peralatan Laboratorium (Paket)					1	2.106.250.000										
		PERINDUSTRIAN																	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
I	3.07.3.06.01.03	Program Pengembangan Wilayah dan Pengawasan Industri	Jumlah Kawasan Strategis/ kawasan Industri/ Kawasan Sentra (Kawasan)	4	6.848.418.000	1	82.144.717	1	612.810.000	-	42.692.674	0	7,0%	1	124.837.391	25%	2%	DISPERINDAG	
			Jumlah Industri yang memenuhi standar Industri (industri)	75		33		15		-	-	0	0,0%	33	-	44%	#DIV/0!		
1	3.07.3.06.01.16.01	Pengembangan Kawasan Strategis/kawasan industri//sentra	Jumlah Dokumen yang tersusun (dokumen)	5	2.186.358.000	0	0	1	275.200.000	-	18.830.975	0%	6,84 %	0	18.830.975	0%	1%		
2	3.07.3.06.01.16.02	Pembinaan Kawasan Strategis/kawasan industri /sentra	Jumlah lokasi Pembinaan (lokasi)	8	1.250.000.000	0	0	4	131.240.000	-	10.456.800	0%	7,97 %	0	10.456.800	0%	1%		
3	3.07.3.06.01.16.03	Pendataan Perizinan Industri	Jumlah Buku yang disusun (buku)	4	1.300.000.000	1	6.900.000	1	101.320.000	-	3.950.000	0%	3,90 %	1	10.850.000	25%	1%		
4	3.07.3.06.01.16.04	Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Industri	Jumlah industri yang diawasi (industri)	258	2.112.060.000	108	75.244.717	50	105.050.000	-	9.454.899	0%	9,00 %	108	84.699.616	42%	4%		

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
II	3.06.3.06.01.04	Program Pengembangan Sumberdaya, Fasilitasi dan Akses Industri	Persentase Tenaga Kerja Industri terhadap total Tenaga Kerja	26,20	15.533.116.936	11,07	3.813.119.482	5,24	3.863.015.000	0,00	189.092.085	-	4,9%	11	4.002.211.567	42,25%	25,77%	DISPERINDAG	
			Persentase Tenaga Kerja yang terserap di Industri Kelautan dan Perikanan	3,55		2,9		0,71		0,00	-	-	0,0%	3	-	81,69%	#DIV/0!		
			Persentase Tenaga Kerja yang terserap di Industri Pariwisata	1,694		0,619		0,333		0,000	-	-	0,0%	1	-	36,54%	#DIV/0!		
			Persentase Industri yang memiliki Informasi Kandungan Nutrisi Olahan Pangan	34,98		5,5		6,71		0,00	-	-	0,0%	6	-	15,72%	#DIV/0!		
			Pertumbuhan industri pada Sektor Pertanian	7620		2.996		1.524		-	-	-	0,0%	2.996	-	39,32%	#DIV/0!		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
						Persentase Tenaga Kerja Industri pada sektor pertanian	52,16		25,88		10,44		0,00			0,0%	26		49,62%	#DIV/0!		
						Pertumbuhan industri turunan Potensi Sumber Daya Mineral yang dikembangkan (unit)	23		8		5		0,00	-	-	0,0%	8	-	34,78%	#DIV/0!		
						Persentase Tenaga Kerja yang terserap di Bidang Industri Turunan Pertambangan	5,180		1,085	3.813.119.482	1,036		0,000		-	0,0%	1	3.813.119.482	20,95%	#DIV/0!		
1	3.07.3.06.01.17.01				Pengembangan Sumber Daya Manusia Melalui Pelatihan	Jumlah SDM Yang Terlatih (Pelaku Industri/Masyarakat)	580	1.997.439.000	205	766.523.510	170	554.950.000	-	14.878.400	0,00 %	2,68 %	205	781.401.910	35,34%	39,12%		
2	3.07.3.06.01.17.02				Peningkatan Daya Saing Produk Industri	Jumlah Pelaku Industri yang terfasilitasi (Pelaku industri)	4.050	4.666.086.468	1.310	1.073.199.780			-	-	0,00 %	0,00 %	1.310	1.073.199.780	32,35%	23,00%		

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Jumlah Produk industri yang terfasilitasi Perizinan	0				550	418.365.000	-	13.730.500	0,00%	3,28%	0	13.730.500	0,00%	0,29%		
3	3.07.3.06.01.17.03	Rumah Pengembangan Produk	Jumlah Pelaku Industri yang terfasilitasi (Pelaku industri)	2.280	3.112.601.648	800	414.759.420			-	-	0,00%	0,00%	800	414.759.420	35,09%	13,33%		
			Jumlah kemasan produk industri yang terfasilitasi	0				450	1.615.570.000	66	63.816.695	14,67%	3,95%	66	63.816.695	0,00%	0,00%		
4	3.07.3.06.01.17.04	Pembinaan dan Pengembangan OVOP	Jumlah OVOP (OVOP)	43	900.000.000	12	106.195.400	9	92.475.000	-	18.914.585	0,00%	20,45%	12	125.109.985	27,91%	13,90%		
5	3.07.3.06.01.17.05	Pemberdayaan Dekranasda	Jumlah Pelaku Industri/Masyarakat (Pelaku Industri/Masyarakat)	2.550	4.306.989.820	1.000	1.452.441.372			-	-	0,00%	0,00%	1.000	1.452.441.372	39,22%	33,72%		
			Jumlah Pelaku Industri yang terfasilitasi (Pelaku industri)					500	951.475.000	150	77.751.905	30,00%	8,17%	150	77.751.905				
6	3.07.3.06.01.17.06	Peningkatan Kemampuan Teknologi	Jumlah Teknolgi Tepat Guna (TTG)	11	550.000.000	0	0	2	230.180.000	-	-	0,00%	0,00%						

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Tepat Guna Produk Olahan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Peserta Seminar Nasional (Peserta)					200		-									
					TRANSMIGRASI																	
					Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigarasi	Jumlah warga transmigrasi yang mendapatkan peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam meningkatkan kualitas hidup di kawasan transmigrasi		1.988.105.000		196.614.000		127.190.000		-		0,00		196.614.000		9,89	Dinas Tenaga Kerja	
					peningkatan kapasitas SDM bidang Transmigras	Meningkatnya Pengatuhan dan Keterampilan dan meningkatkan kualitas hidup dikawasan transmigrasi	4 Dok	1.083.105.000	100,00	104.500.000	100	94.860.000	-	-	0,00	0,00		104.500.000		9,65		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Peningkatan Fungsi POKJA KTM Tingkat Provinsi	Meningkatnya Pengatuhan dan Keterampilan dan meningkatkan kualitas hidup dikawasan transmigrasi	540 Orang	905.000.000	100,00	92.114.000,00	100	32.330.000	-	-	0,00	0,00		92.114.000		10,18		
					FUNGSI PENUNJANG																	
					PERENCANAAN																	
					Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Tingkat Kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan (Predikat)	100,00	37.869.534.100	60,00	6.440.435.100	100	5.139.859.000		527.749.944		10,27 %					BAPPEDA DAN LITBANG	
						Predikat SAKIP Bappeda (Predikat)	92,00		82,00		82											
					Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah aparatur perangkat daerah yang terlayani (Orang)					100	2.757.815.000	25	462.086.399	25,00%	16,76 %						

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah aparatur perangkat daerah yang terlayani (Orang)					100	1.827.900.000	25	44.739.245	25,00%	2,45%						
					Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah Yang Terlayani (Orang)					60	252.674.000	3	9.187.500	5,00%	3,64%						
					Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah Laporan Kinerja dan Keuangan yang Tersusun (Laporan)					7	102.804.000	4	-	57,14%	0,00%						
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Tersusun (Dokumen)					3	198.666.000	-	11.736.800	0,00%	5,91%						
					Program Perencanaan, Evaluasi Dan Informasi Pembangunan Daerah	Persentase konsistensi program pembangunan di RKPD dengan RPJMD dan Renstra dengan RPJMD) (Persen)	100,00	26.990.808.050	100,00	3.508.712.000	100	3.143.256.400		159.828.707		5,08%					BAPPEDA DAN LITBANG	

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
						Persentase data perencanaan pembangunan yang digunakan berdasarkan SIPD dan SIG (Persen)	100,00		65,00		90											
						Persentase rumusan hasil pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditindaklanjuti (Persen)	95,00		65,00		90											
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang Disusun Tepat Waktu (Dokumen)					2	1.471.490.500	-	95.139.789	0,00 %	6,47 %						
					Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah sistem informasi perencanaan pembangunan daerah yang dikelola (Aplikasi)					2	191.300.000	-	17.376.043	0,00 %	9,08 %						

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah yang dilaporkan tepat waktu (laporan)					16	189.587.000	1	-	6,25 %	0,00 %						
					Pengembangan Sistem Informasi Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah sistem informasi pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah yang dikembangkan dan dikelola (Aplikasi)					1	171.068.000	-	-	0,00 %	0,00 %						
					Pengembangan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah elemen data SIPD yang terbaharukan dan tervalidasi (Elemen data)					1000	148.530.400	-	-	0,00 %	0,00 %						
					Penyusunan Rumusan Kebijakan Percepatan Pembangunan Daerah	Jumlah rekomendasi kebijakan percepatan pembangunan daerah yang tersusun					2	743.408.500	-	11.100.000	0,00 %	1,49 %						

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
						(laporan/rekomendasi)																
					Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah	Jumlah rekomendasi/kesepakatan hasil sinkronisasi perencanaan pembangunan pusat dan daerah yang disusun (Rekomendasi/Kesepakatan)					2	227.872.000	1	36.212.875	50,00%	15,89%						
					Program Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase rumusan hasil pengendalian dan evaluasi pada dokumen perencanaan PD mitra kerja Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang ditindaklanjuti (Persentase)	90,00	8.857.969.500	60,00	584.649.000	90	470.010.880		5.175.000	0	1,10%					BAPPEDA DAN LITBANG	

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
						Persentase Renstra PD mitra kerja Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang baik (memiliki rencana kinerja yang baik, tepat, dan jelas sasaran dan tujuannya dengan indikator yang tepat) (Persentase)	90,00		60,00		90											
					Perencanaan Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah I	Jumlah rekomendasi hasil koordinasi perencanaan urusan PU dan Penataan Ruang, Pertanian, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta pada penunjang urusan perencanaan yang dihasilkan (Rekomendasi/Laporan)					1	141.608.000		2.765.000	0,00 %	1,95 %						

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Perencanaan Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah II	Jumlah rekomendasi hasil koordinasi perencanaan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi,, Pehubungan, Komunikasi dan Informasi, Statistik serta Persandian yang dihasilkan (Rekomendasi/Laporan)					4	143.547.600		1.960.000	0,00 %	1,37 %						Tidak Ada()
					Pengendalian dan Evaluasi Sub Bidang Infratruktur dan Pengembangan Wilayah I	Jumlah rekomendasi hasil pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja pada urusan PU dan Penataan Ruang, Pertanian, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					4	106.192.280		450.000	0,00 %	0,42 %						

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
						serta pada penunjang urusan pere (Dokumen)																
					Pengendalian dan Evaluasi Sub Bidang Infratruktur dan Pengembangan Wilayah II	Jumlah rekomendasi hasil pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja pada urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi, Perhubungan, Komunikasi dan Informasi, Statistik serta Per (Dokumen)					1	78.663.000		-	0,00 %	0,00 %						

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Program Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Persentase Renstra PD mitra kerja Bidang Perekonomian dan SDA yang baik (memiliki rencana kinerja yang baik, tepat, dan jelas sasaran dan tujuannya dengan indikator yang tepat) (Persentase)	90,00	8.702.707.500	60,00	882.328.500	90	522.100.250		12.130.000	0,00 %	2,32 %					BAPPEDA DAN LITBANG	
						Persentase rumusan hasil pengendalian dan evaluasi pada dokumen perencanaan PD mitra kerja Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang ditindaklanjuti (Persentase)	90,00		60,00		90											

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Perencanaan Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam I	Jumlah rekomendasi hasil koordinasi perencanaan urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, UKM, Penanaman Modal, Kebudayaan, Tenaga Kerja dan Pariwisata serta pada penunjangn urusan keuangan yang di (Rekomendasi/Laporan)						1	147.093.000		7.350.000	0,00 %	5,00 %						

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Perencanaan Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam II	Jumlah rekomendasi hasil koordinasi perencanaan urusan Lingkungan hidup, kehutanan, ESDM, Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan yang dihasilkan (Rekomendasi/Laporan)					4	152.272.250		-	0,00 %	0,00 %							Tidak Ada()
					Pengendalian dan Evaluasi Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam I	Jumlah rekomendasi pemantauan, dalev dan pelaporan kinerja pada urusan Perindagkop, UKM, Penanaman Modal, Kebudayaan, Tenaga Kerja dan Pariwisata serta pada penunjang urusan keuangan yang dihasilkan d (Dokumen)					4	115.854.000		-	0,00 %	0,00 %							

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Pengendalian dan Evaluasi Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam II	Jumlah rekomendasi hasil pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja pada urusan Lingkungan hidup, Kehutanan, ESDM, Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan yang dihasilkan dan disampaik (Dokumen)					4	106.881.000		4.780.000	0,00 %	4,47 %						
					Program Perencanaan Sosial,Budaya dan Pemerintahan	Persentase Renstra PD mitra kerja Bidang sosial budaya dan pemerintahan yang baik (memiliki rencana kinerja yang baik, tepat, dan jelas sasaran dan tujuannya dengan indikator yang tepat) (Persentase)	90,00	8.944.352.250	65,00	664.352.250	90	754.507.000		18.605.100	0,00 %	2,47 %					BAPPEDA DAN LITBANG	

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
						Persentase rumusan hasil pengendalian dan evaluasi pada dokumen perencanaan PD mitra Bidang Perencanaan Sosial, Budaya dan Pemerintahan ditindaklanjuti (Persentase)	90,00		60,00		90			-	0,00 %	0,00 %						

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Perencanaan Sub Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan I	Jumlah rekomendasi hasil koordinasi perencanaan urusan Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Pemuda, Olahraga, Kearsipan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Adminduk Capil, Pemberdayaan Perempuan (Rekomendasi/Laporan)						1	170.664.000		14.266.500	0,00 %	8,36 %						

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Perencanaan Sub Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan II	Jumlah rekomendasi hasil koordinasi perencanaan, pemantauan urusan perpustakaan dan trantibbum linmas serta pada penunjang urusan pengawasan, Setwan, Setda, Badan penghubung daerah, Litbang kepegawaia (Rekomendasi/Laporan)					1	143.112.000		750.000	0,00 %	0,52 %						Tidak Ada()

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Pengendalian dan Evaluasi Sub Bidang Perencanaan Sosial, Budaya dan Pemerintahan I	Jumlah rekomendasi hasil pementauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja pada mira kerja Sub Bidang Perencanaan Sosial, Budaya dan Pemerintahan I yang dihasilkan dan disampaikan tepat waktu (Dokumen)					4	109.636.000		3.588.600	0,00 %	3,27 %						
					Pengendalian dan Evaluasi Sub Bidang Perencanaan Sosial, Budaya dan Pemerintahan II	Jumlah rekomendasi hasil pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja pada mitra Sub Bidang Perencanaan Sosial, Budaya dan Pemerintahan II yang dihasilkan dan disampaikan					4	102.725.000		-	0,00 %	0,00 %						

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
						tepat waktu (Dokumen)																
					Penyusunan Study Perencanaan Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan	Jumlah studi perencanaan bidang sosial, budaya dan pemerintahan yang dihasilkan (Dokumen)					1	228.370.000		-	0,00 %	0,00 %						
					KEUANGAN																	
					Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah			-				13.651.075.662		1.490.815.626	#DIV/0!	10,92 %	0,00	1.490.815.626	#DIV/0!	#DIV/0!	BADAN KEUANGAN DAERAH	

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Pelayanan Administrasi Perkantoran								9.116.407.952		1.231.896.026								
					Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								4.146.516.000		222.218.000									
					Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								274.671.710		36.701.600									
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								53.750.000		-									
					Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								43.480.000		-									
					Pengelolaan Kehumasan pada Bakuda								16.250.000		-									
					Program Peningkatan Tata Kelola Pendapatan Pajak Daerah			-					6.994.616.867				#DIV/0!	0,00 %	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	BADAN KEUANGAN DAERAH	

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Intensifikasi Sumber-sumber Pajak Daerah								752.962.100		12.204.000								
					Peningkatan Fungsi Pelayanan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pajak Daerah								366.278.360		-								
					Peningkatan Fungsi Pelayanan Samsat Corner								55.564.000		-								
					Rapat Koordinasi PKB dan BBNKB dengan instansi Terkait								55.434.060		-								
					Sosialisasi Pajak Daerah								150.229.000		28.900.000								
					Peningkatan Pelayanan Pemerintah pada UPTB Wilayah Kota Pangkalpinang								906.944.000		121.012.535								
					Peningkatan pelayanan pemerintahan pada UPTB wilayah Kabupaten Bangka								998.087.000		149.427.474								

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Peningkatan pelayanan pemerintah pada UPTB wilayah Kabupaten Belitung							897.611.000		77.036.597								
					Peningkatan pelayanan pemerintah pada UPTB Wilayah Kabupaten Bangka Tengah							592.223.200		45.966.596								
					Peningkatan Pelayanan pemerintah pada UPTB Kabupaten Bangka Barat							734.240.000		33.172.245								
					Peningkatan pelayanan pemerintah pada							762.518.392		40.555.986								
					Peningkatan pelayanan pemerintah pada UPTB Kabupaten Belitung Timur							666.886.375		66.916.657								
					Penyusunan Regulasi/Kebijakan Bidang Tata Kelola Pajak Daerah							55.639.380		-								

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Program Peningkatan Tata Kelola Pendapatan, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain yang Sah			-			760.144.120			#DIV/0!	0,00 %	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	BADAN KEUANGAN DAERAH	
					Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Penerimaan Restribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain						210.875.370		13.040.786									
					Rapat Kerja Restribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain						20.720.000		-									
					Rakor Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak						95.302.000		-									
					Tim pengawasan peningkatan pendapatan daerah						300.672.500		12.478.421									
					Bimbingan Teknis Pengelolaan Retribusi Daerah						50.302.000		-									

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Penyusunan Regulasi/Kebijakan Bidang Tata Kelola Retribusi dan Pendapatan lain-lain yang Sah							82.272.250		6.159.815									
					Program Penganggaran Pembangunan Daerah			-				1.865.980.699			#DIV/0!	0,00 %	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	BADAN KEUANGAN DAERAH	
					Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Gubernur Tentang APBD							1.178.244.199		69.093.197								
					Sosialisasi Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD							168.562.500		-								
					Evaluasi Raperda Kab/Kota tentang APBD							368.830.000		-								
					Rapat-rapat Koordinasi Pembinaan Keuangan Pemerintah							150.344.000		-								

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Kabupaten/Kota																	
					Program Peningkatan Pelayanan Akutansi dan Pelaporan			-				926.723.170			#DIV/0!	0,00 %	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	BADAN KEUANGAN DAERAH	
					Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD							271.664.850		-								
					Peningkatan Fungsi Pelayanan Aplikasi SIMDA keuangan							259.600.000		-								
					Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran							53.313.000		-								
					Evaluasi Raperda Kab/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan							126.067.470		-								

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					APBD																	
					Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung							125.277.850		-								
					Penyusunan Regulasi/Kebijakan Bidang Akutansi dan Pelaporan							90.800.000		-								
					Program Peningkatan Tata Kelola Aset Daerah			-				1.639.865.676			#DIV/0!	0,00 %	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	BADAN KEUANGAN DAERAH	

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Pembinaan teknis Pejabat Penata Usahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang dan Pengurus Barang Pembantu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung							128.291.240		-								
					Pembinaan teknis Pejabat Penata Usahaan Barang, Pengurus Barang Pengelola dan Pembantu Pengurus Barang Pengelola pada BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung							206.950.000		-								
					Pengamanan dan Pengawasan Barang Milik Daerah							108.927.200		-								
					Penyusunan Harga Satuan Barang dan Jasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung							134.176.000		42.160.143								

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Penghapusan barang milik daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung							238.673.986		10.297.650								
					Penyusunan laporan barang milik daerah							56.897.000		4.000.000								
					Sertifikasi Lahan Milik pemerintah daerah							222.111.300		6.160.000								
					Penyusunan rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Pengadaan dan Pemeliharaan							85.000.000		2.230.000								
					Peningkatan Fungsi Pelayanan Aplikasi SIMDA BMD							169.120.000		37.919.900								
					Penilaian/Appraisal Barang Milik Daerah/Asset Daerah							197.081.950		8.284.600								
					Penyusunan Regulasi/Kabijakan Biang Tata Kelola Aset Daerah							92.637.000		3.600.000								

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Program Peningkatan Fungsi Perbendaharaan dan Verifikasi			-				392.000.200			#DIV/0!	0,00 %	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	BADAN KEUANGAN DAERAH	
					Pembinaan Teknis Bendahara Pengeluaran dan PPK SKPD (PPRG)							143.666.640		-								
					Sosialisasi Penata usahaan Keuangan							136.113.560		-								
					Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah							112.220.000		-								
					KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																	
					Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Nilai Kepuasan Pelayanan Sekretariat BKPSDMD	100%	67.529.966.000	92,58 %	8.158.619.494	95%	8.158.619.494	23%	909.180.720	24%	11,14 %	115,08 %	18.302.573.312	115,08 %	27,10%	BKPSDM	
						Nilai LAKIP BKPSDMD	75		65,00		65,00		0		0,00 %		80,60		107,47 %			

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
						Persentase Sarana dan Prasarana yang Layak Fungsi	93%		91%		91%		70%		77%		165,00 %		177,42 %			
						Nilai Indeks Profesional ASN	90		76		76		0		0		63		69,71%			
					Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Pegawai BKPSDM yang Terlayani (Orang)	187	27.284.200.000	195	10.822.716.320	187	4.697.835.994	0	827.936.322	0,00 %	17,62 %	195	11.650.652.642	104,28 %	42,70%		
					Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Paket Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kantor (Paket)	26	30.307.032.000	18	4.964.935.946	6	2.735.053.000	0	49.934.998	0,00 %	1,83 %	18	5.014.870.944	69,23%	16,55%		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor Yang Terpelihara (Paket)	10		20		10		2		20,00%		22		220,00 %			
						Jumlah Kendaraan Dinas Yang Terpelihara (unit)	46		6		7		7		100,00%		13		28,26%			

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Penyusunan Dokumen Perencaaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan penganggaran Responsif Gender (Dokumen)	20	1.100.448.000	15	142.847.301	5	142.795.500	0	18.869.500	0,00 %	13,21 %	15	161.716.801	75, 00%	14,70%		
						Jumlah Dokumen (Dokumen)	10		4		2		0		0,00 %		4		40, 00%			
					Penguatan Kelembagaan / Organisasi	Jumlah Laporan (Laporan)	6	1.056.000.000	3	172.695.694	1	115.220.000	0	-	0,00 %	0,00 %	3	172.695.694	50, 00%	16,35%		
					Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Aparatur yang meningkat kapasitasnya (Orang)	2835	5.257.786.000	1995	951.574.630	1207	357.683.000	0	-	0,00 %	0,00 %	1995	951.574.630	70, 37%	18,10%		
					Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah Pegawai BKPSDMD yang meningkat disiplinnya (Orang)	187	1.724.200.000	187	259.869.250			0	-	#DIV /0!	#DIV /0!	187	259.869.250	100 ,00 %	15,07%		
					Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan (Laporan)	45	800.300.000	16	78.753.400	9	110.032.000	2	12.439.900	22,22%	11,31 %	18	91.193.300	40, 00%	11,39%		
					Program Pengadaan Pegawai, Mutasi, Promosi, Dan	Persentase Pegawai ASN yang Ditempatkan Sesuai Dengan	98%	18.136.517.000	90,69 %	3.134.352.264	83%	2.009.642.500	30,00%	387.546.651	36,14%	19,28 %	120 ,69 %	3.521.898.915	123 ,15 %	19,42%	BKPSDM	

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Kepangkatan	Kompetensi																
						Persentase Pemenuhan Pegawai Sesuai Dengan Kebutuhan dan Formasi	98%		60,38 %		92%		0,00 %		0,00 %		60, 38%		61, 61%			
						Persentase Pegawai ASN Naik Pangkat dan Pensiun Tepat waktu	98%		107,26%		93%		38,00%		40,86%		145 ,26 %		148 ,22 %			
					Pengadaan CASN dan Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN/Sekolah Kedinasan Lainnya	Jumlah Peserta Yang Lulus Seleksi Calon Praja IPDN/Sekolah Kedinasan (Orang)	100	3.999.478.000	27	176.012.380	25	669.000.000	0	204.071.375	0,00 %	30,50 %	27	380.083.755	27, 00%	9,50%		
						Jumlah ASN Yang Lulus Seleksi Mutasi (Orang)	200		0				0		#DIV /0!		0		0,0 0%			
						Jumlah Peserta Yang Lulus CASN/ASN	600		0		150		0		0,00 %		0		0,0 0%			

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
						(Orang)																
					Penyusunan Dokumen Manajemen Pola Karir	Jumlah Dokumen (Dokumen)	3	300.000.000	0	0	1	47.225.500	0		0,00 %	0,00 %	0	-	0,00%	0,00%		
					Perencanaan ASN	Jumlah Dokumen Perencanaan ASN (Dokumen)	8	730.457.000	5	49.249.700	2	79.274.000	0	9.928.015	0,00 %	12,52 %	5	59.177.715	62,50%	8,10%		
					Perencanaan dan Pengadaan ASN	Jumlah Peserta Yang Lulus Seleksi Calon Praja IPDN / Sekolah Kedinasan (Orang)	125	6.768.079.000	37	571.804.759		-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	37	571.804.759	29,60%	8,45%		
						Jumlah Yang Lulus Seleksi CASN/ASN (Orang)	750		250				0		#DIV/0!		250		33,33%			
						Jumlah Dokumen Perencanaan Kepegawaian (Dokumen)	20		2				0		#DIV/0!		2		10,00%			
					Pengelolaan Administrasi Kepangkatan dan Pensiun	Jumlah ASN yang Diusulkan Naik Pangkat dan Pensiun (Orang)	4310	1.053.482.000	2.480	140.716.382	900	84.925.000	382	20.841.700	42,44%	24,54 %	2.862	161.558.082	66,40%	15,34%		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Promosi dan Mutasi ASN	Jumlah ASN yang di Promosi / Mutasi (Orang)	1360	5.285.021.000	921	2.196.569.043	270	1.129.218.000	81	152.705.561	30,00%	13,52%	1.002	2.349.274.604	73,68%	44,45%		
						Jumlah ASN Yang Lulus Seleksi Talent Scouting (Orang)	800		-		200		0		0,00%		0		0,00%			
						Jumlah ASN Yang Mengikuti Assesment (Orang)	400		179		100		25		25,00%		204		51,00%			
						Jumlah ASN yang Lulus Seleksi Mutasi (Orang)	316		40		63		4		6,35%		44		13,92%			
					Program Penilaian Kinerja, Disiplin, Informasi Dan Kesejahteraan ASN	Persentase ASN Yang SKP nya Dinilai Tepat Waktu	98%	63.343.002.770	71,66%	6.388.217.677	76%	2.210.263.120	54,06%	58.415.145	71,13%	2,64%	125,72%	6.446.632.822	128,29%	10,18%	BKPSDM	
						Persentase Akurasi Data dan informasi Kepegawaian	98%		95,07%		90%		0,00%		0,00%		95,07%		97,01%			

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
						Persentase Kasus Pelanggaran Disiplin Minimal Sedang	0,09 %		0,22 %		0,13%		0,00 %		0,00 %		0,2 2%		246 ,50 %			
						Persentase ASN Yang Menerima Penghargaan	3,73 %		6,59 %		2,21%		0,00 %		0,00 %		6,5 9%		176 ,54 %			
					Pembinaan ASN	Jumlah ASN Yang Dibina Rohaninya (Orang)	2.400	3.322.299.920	0	44.261.000		244.331.000	0,00 %	15.841.320	#DIV /0!	6,48 %	-	60.102.320	0,0 0%	1,81%		
						Jumlah ASN Yang Diperiksa Untuk Cuti Sakit/Kejiwaan (Orang)	12		0				0,00 %		#DIV /0!		-		0,0 0%			
						Jumlah ASN Yang Dibina Disiplinnya (Orang)	14.000		0				0,00 %		#DIV /0!		-		0,0 0%			
						Jumlah ASN Yang Terbina (Orang)	27.631		4633		6909		1016		14,7 1%		5.649		20, 44%			
						Jumlah Kasus Pelanggaran Disiplin Yang Ditangani (Kasus)	28		0				0		#DIV /0!		-		0,0 0%			

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Pengembangan Profesi ASN	Jumlah ASN yang mengikuti Tilawatil Quran Tingkat Nasional (Orang)	36	24.346.178.550	0	4.148.768.907	18	1.067.654.460	0	-	0,00 %	0,00 %	0	4.148.768.907	0,00 %	17,04%		
						Jumlah ASN Yang Dikembangkan Profesinya (Orang)	14.466		4077		3.123		0		0,00 %		4077		28, 18%			
					Peningkatan Kesejahteraan ASN	Jumlah ASN Yang Sejahtera (Orang)	12.952	3.344.860.300	4.537	226.690.000		293.900.000	0	0	#DIV /0!	0,00 %	4537	226.690.000	35, 03%	6,78%		
						Jumlah ASN Yang Menerima Pembekalan Purnabhakti (Orang)	350		0		70		0		0,00 %		0		0,00 %			
						Jumlah ASN Yang Berprestasi (Orang)	25		0		5		0		0,00 %		0		0,00 %			
						Jumlah ASN Yang Menerima KGB (Orang)	7.500		0		1.500		0		0,00 %		0		0,00 %			
						Jumlah ASN Yang Menerima Satya Lencana (Orang)	500		0		100		0		0,00 %		0		0,00 %			

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Monitoring dan Evaluasi Kinerja ASN	Jumlah ASN yang di monev SKP-nya (Orang)	3.500	1.023.840.000	2.980	254.575.610	3.500	97.977.660	2.886	28.669.460	82,46%	29,26%	5.866	283.245.070	167,60%	27,66%		
						Jumlah Dokumen (Dokumen)	1		1				-		#DIV/0!		1		100,00%			
						Jumlah Aplikasi Kinerja yang dibangun / dikembangkan (Aplikasi)	5		-		1		1		100,00%		1		20,00%			
						Jumlah Rapergub Tunjangan Kinerja yang dirancang (Rapergub)	1		-				-		#DIV/0!		-		0,00%			
						Jumlah ASN Yang Memiliki Kinerja (SKP) Baik (Orang)	3.500		-		3.100		-		0,00%		-		0,00%			
					Pembinaan dan Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah ASN Yang mengikuti Workshop (Orang)	304	7.595.797.000	-	391.656.964		-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	391.656.964	0,00%	5,16%		
						Jumlah ASN Yang Diperiksa Untuk Cuti Sakit /	15		1				0		#DIV/0!		1		6,67%			

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
						Kejiwaan (Orang)																
						Jumlah ASN yang diverifikasi/divalidasi (Orang)	3.000		3.000				0		#DIV/0!		3.000		100,00%			
						Jumlah ASN yang diperiksa Narkoba (Orang)	6.900		-				0		#DIV/0!		-		0,00%			
						Jumlah ASN Yang Dibina Pernikahan/Perceraian (Orang)	10		-				0		#DIV/0!		-		0,00%			
						Jumlah Regulasi Kepegawaian (Dokumen)	15		4				0		#DIV/0!		4		26,67%			
						Jumlah ASN Yang Dibina Disiplinnya (Orang)	5.000		3.309				0		#DIV/0!		3.309		66,18%			
						Jumlah Kasus Pelanggaran Disiplin Yang Ditangani (Kasus)	30		10				0		#DIV/0!		10		33,33%			
					Penguatan Sistem Informasi dan	Jumlah Arsip Kepegawaian	4.500	4.596.468.	4.500	680.044.2		506.400.0	0	13.904.3	#DIV/0!	2,75 %	4.5	693.948.	100,00	15,10%		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Pengelolaan Database / Arsip Kepegawaian	(Arsip)		000		06		00		65			00	571	%			
						Jumlah ASN Yang Diperbaiki NIP, Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir (Orang)	50		5				0		#DIV/0!		5		10,00%			
						Jumlah Data Kepegawaian Yang Diupdate (Data)	8.500		8.500				0		#DIV/0!		8.500		100,00%			
						Jumlah Buku Profil Kepegawaian dan DUK (Buku)	1.400		450		3		0		0,00%		450		32,14%			
						Jumlah Artikel, Konten, Terjemahan (Artikel/terjemahan/konten)	1.750		150				0		#DIV/0!		150		8,57%			
						Jumlah Aplikasi Kepegawaian yang dibangun/dikembangkan (Aplikasi)	20		5				0		#DIV/0!		5		25,00%			

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
						Jumlah ID Card (Buah)	11.000		2.700		4000		0		0,00 %		2.700		24,55%			
						Jumlah Karpeg, Karis/Karsu Yang Diterbitkan (Kartu)	1.000		20		250		0		0,00 %		20		2,00%			
					Peningkatan Kesejahteraan, Pemberian Penghargaan dan Pengembangan Profesi ASN	Jumlah ASN yang menerima KGB (Orang)	12.748	19.113.559.000	1.524	642.220.990			0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	1.524	642.220.990	11,95%	3,36%		
						Jumlah ASN yang menerima KARIS / KARSU / KARPEG (Orang)	500		20				0		#DIV/0!		20		4,00%			
						Jumlah Kegiatan Bakti Sosial KORPRI (Kegiatan)	20		-				0		#DIV/0!		-		0,00%			
						Jumlah Dokumen Kepengurusan KORPRI dan Koperasi (Dokumen)	7		-				0		#DIV/0!		-		0,00%			
						Jumlah Atlet ASN Yang Mengikuti Kejuaraan KORPRI antar Instansi	2.940		-				0		#DIV/0!		-		0,00%			

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
						Pemprov / PORNAS (Orang)																
						Jumlah ASN Purnabakti (Orang)	465		64				0		#DIV/0!		64		13,76%			
						Jumlah ASN yang dibina rohaninya (Orang)	8.000		580				0		#DIV/0!		580		7,25%			
						Jumlah ASN penerima Satya Lencana (Orang)	500		168				0		#DIV/0!		168		33,60%			
						Jumlah ASN yang mengikuti Tilawatil Quran (Orang)	33		14				0		#DIV/0!		14		42,42%			
						Jumlah ASN berprestasi (Orang)	23		3				0		#DIV/0!		3		13,04%			
					Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara	Persentase Pegawai ASN Yang Memenuhi Kompetensi Dasar dan Manajerial	100%	71.553.459.500	74,18%	11.651.215.432	97%	6.568.757.571	0,00%	350.549.804	0,00%	5,34%	74,18%	12.001.765.236	74,18%	16,77%	BKPSDM	

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
						Persentase Pegawai ASN Yang Meningkat Kompetensi Teknis dan Fungsional	97%		19,38 %		60%		6,02 %		10,03%		25,40%		26,19%			
						Nilai Akreditasi Diklat	81		85,88		81		0		0,00 %		85,88		106,02 %			
						Persentase Pegawai ASN Yang Meningkat Pendidikan Formalnya	52,80 %		31,17 %		41,90%		7,69 %		18,35%		38,86%		73,59%			
					Ujian Dinas dan Seleksi Diklatpim III dan IV	Jumlah ASN Yang Lulus Ujian Dinas (Orang)	410	1.703.200.000	194	72.729.400			0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	194	72.729.400	47,32%	4,27%		
						Jumlah ASN Yang Lulus Seleksi Diklatpim III dan IV (Orang)	400		0				0		#DIV/0!		0		0,00%			
					Pengukuran dan Pemetaan Kompetensi ASN	Jumlah ASN Yang Mengikuti Uji Sertifikasi (Orang)	1.000	1.000.000.000	0	-	40	121.671.950	0	-	0,00 %	0,00 %	0	-	0,00%	0,00%		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Pengembangan Kompetensi Dasar dan Manajerial	Jumlah ASN Yang Lulus Pendidikan Kepemimpinan Pengawas (Orang)	320	20.272.944.000	0	3.754.746.450	80	2.980.097.026	0	9.002.500	0,00 %	0,30 %	0	3.763.748.950	0,00%	18,57%		
						Jumlah ASN yang Lulus Diklat Kepemimpinan (Orang)	720		120		80		0		0,00 %		120		16,67%			
						Jumlah ASN yang Lulus Diklat Dasar (Orang)	600		423		0		-		#DIV/0!		423		70,50%			
					Pengembangan Kompetensi Teknis dan Fungsional	Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat teknis dan fungsional (Orang)	4880	34.749.996.500	1946	5.088.493.420	800	2.204.031.545	325	260.000.957	40,63%	11,80 %	2271	5.348.494.377	46,54%	15,39%		
						Jumlah ASN yang mengikuti Diklat dan Bimtek Melalui Jalur Kontribusi (Orang)	120		145				13		#DIV/0!		158		131,67 %			
						Jumlah ASN yang mengikuti magang (Orang)	4		0				0		#DIV/0!		0		0,00%			

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Peningkatan Pendidikan Formal	Jumlah ASN yang Yang Menerima Beasiswa dan Cost Sharing (Orang)	35	14.437.610.000	73	3.605.156.786	26	1.012.600.550	2	69.546.358	7,69 %	6,87 %	75	3.674.703.144	214,29 %	25,45%		
						Jumlah ASN yang Yang Menerima Beasiswa (Orang)	152		0				0		#DIV/0!		0		0,00%			
					Peningkatan Mutu Kediklatan	Nilai akreditasi diklat (Nilai)	81	2.092.909.000	85,88	280.858.146	81	250.356.500	0	11.999.989	0,00 %	4,79 %	85,88	292.858.135	106,02 %	13,99%		
						Jumlah Dokumen (Dokumen)	15		5		3		1		33,33%		6		40,00%			
					Program Penilaian dan Pemetaan Kompetensi ASN	Prosentase ASN Yang Mempunyai Profil Kompetensi Sesuai Dengan Standar Penilaian	60%	10.026.468.000	30,68 %	520.003.212	0,00%	0	0,00 %	-	#DIV/0!	#DIV/0!	30,68%	520.003.212	51,14%	5,19%	BKPSDM	
					Pengukuran dan Penilaian Kompetensi Aparatur	Jumlah ASN yang lulus seleksi Talent Scounting (Orang)	900	10.026.468.000	85	520.003.212			0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	85	520.003.212	9,44%	5,19%		
						Jumlah ASN Yang Lulus Ujian Dinas Tingkat I dan II	400		0				0		#DIV/0!		0		0,00%			

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
						(Orang)																
						Jumlah ASN yang Mengikuti Assesment (Orang)	1200		303				0		#DIV/0!		303		25,25%			
						Jumlah ASN Yang Dipetakan Rekam Jejaknya (Orang)	800		0				0		#DIV/0!		0		0,00%			
						Jumlah ASN Yang Lulus Seleksi PIM III dan IV (Orang)	400		0				0		#DIV/0!		0		0,00%			
						Jumlah ASN Yang Mengikuti Roadshow Penilaian Kompetensi ASN (Orang)	14		0				0		#DIV/0!		0		0,00%			
						Jumlah ASN Yang Dianalisa Kebutuhan Uji Kompetensinya (Orang)	34		0				0		#DIV/0!		0		0,00%			

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
						Jumlah Laporan Evaluasi Penilaian dan pemetaan Kompetensi ASN (Laporan)	4		0				0		#DIV/0!		0		0,00%			
					PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																	
					Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase hasil inovasi daerah yang dikembagkan (%)	80,00	14.214.471.500	60,00	1.642.080.000	75	2.098.685.800		32.539.385	0,00 %	1,55 %					BAPPEDA DAN LITBANG	
						Persentase hasil penelitian yang digunakan sebagai bahan perumusan kebijakan (Persentase)	86,00		60,00		80		-	-	0,00 %	0,00 %						
					Penelitian Prioritas Pembangunan Daerah	Jumlah penelitian dan pengembangan prioritas daerah yang dilakukan (Penelitian)					4	325.564.600	-	-	0,00 %	0,00 %						

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Penguatan Jaringan Kelitbangan	Jumlah kegiatan pendukung/penunjang kelitbangan (Laporan)					3	264.078.700	1	10.775.085	33,33%	4,08%						
					Penguatan Sistem Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi Daerah yang dikembangan (Dokumen)					2	1.187.792.500	-	18.614.300	0,00%	1,57%						
					Peningkatan Peran Dewan Riset Daerah Dalam Pembangunan	Jumlah rekomendasi kebijakan pembangunan yang dirumuskan oleh DRD (Rekomendasi)					8	321.250.000	-	3.150.000	0,00%	0,98%						
					PENGAWASAN																	
	4.05.4.05.01.01				Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Tingkat Kepuasan Aparatur Perangkat Daerah Terhadap Pelayanan Kesekretariatan (%)		11.,924,000,000		5.649.028.179		10.039.987.500		546.708.253	#DIV/0!	5,45%	0,00	6.195.736.432	#DIV/0!	51,96%	Inspektorat	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4.05.4.05.01.01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Aparatur Perangkat Daerah Yang Terlayani Selama 12 Bulan (%)	100,00	2.260.000.000	100,00	3.637.514.733	100,00	1.688.502.500	25	382.023.253	25,00%	22,62%		4.019.537.986		177,86%		
	4.05.4.05.01.02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Aparatur Perangkat Daerah Yang Memanfaatkan Sarana dan Prasarana Perkantoran Selama 12 Bulan (%)	100,00	8.777.000.000	100,00	1.063.931.413	100,01	7.856.710.000	25	40.835.000	25,00%	0,52%		1.104.766.413		12,59%		
	4.05.4.05.01.04	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Jumlah Aparatur Perangkat daerah Yang Mneingkat Kapasitasnya (%)	100,00	759.000.000	100,00	891.805.983	100,02	444.500.000	25	115.200.000	25,00%	25,92%		1.007.005.983		132,68%		
	4.05.4.05.01.05	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Perangkat daerah dengan Realisasi Target Diats 90% (Laporan)	4,00	92.000.000	4,00	39.126.350	4,00	20.400.000	1,00	5.000.000	25,00%	24,51%		44.126.360		47,96%		

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4.05.4.05.01.06	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah Dokumen Terhadap Perencanaan Tahunan Perangkat Aderah Dengan Tingkat Konsistensinya Jangka Menengah Perangkat daerah Diatas 85% (Dokumen)	7,00	36.000.000	7,00	16.649.700	7,00	29.875.000	2,00	3.650.000	28,57%	12,22%		20.299.700		56,39%		
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah																			
	4.05.4.05.01.02	Program Pengawasan dan Pembinaan Pemerintah dan Aparatur			1.611.000.000		211.720.680		421.960.000		64.875.000	#DIV/0!	15,37%	0,00	276.595.680	#DIV/0!	17,17%	Inspektorat	
	4.05.4.05.01.02.07	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung	Jumlah Laporan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Laporan)	4,00	400.000.000	50,00	140.542.230	4	94.800.000	-	-	0,00%	0,00%		140.542.230		35,14%		
	4.05.4.05.01.02.09	Pembinaan dan Penyusunan Pelaporan E-LHKPN	Persentase Kepatuhan Pelaporan	0,00	-	100,00	56.267.450	100	98.300.000	95	53.050.000	95,00%	53,97%		109.317.450		#DIV/0!		

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4.05.4.05.01.02.10	Pelaporan Rencana Aksi PPK Terintegrasi dan Korsupgah	Persentase Penyelesaian Laporan Dalam Sistem MCP dan Kordupgah	4,00	170.000.000	50,00	-	100	9.030.000	25	250.000	25,00%	2,77%		250.000		0,15%		
	4.05.4.05.01.02.11	Evaluasi Lakip dan EKPPD/LPPD Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi SAKIP dan EKPPD Pada Provinsi dan Kab/Kota	8,00	350.000.000	100,00	-	8	149.800.000	1	7.750.000	12,50%	5,17%		7.750.000		2,21%		
	4.05.4.05.01.02.12	Penilaian Internal Zona Intergritas	Jumlah Intu Kerja Zona Integritas (Dokumen)	5,00	350.000.000	100,00	1.981.000	5	18.860.000	-	-	0,00%	0,00%		1.981.000		0,57%		
	4.05.4.05.01.02.13	Monev Laporan Gratifikasi	Jumlah Laporan Gratifikasi (Laporan)	12,00	185.000.000	100,00	12.930.000	12	20.160.000	-	-	0,00%	0,00%		12.930.000		6,99%		
	4.05.4.05.01.02.14	Penanganan Whistle Blower System	Jumlah Pengaduan Melalui Whistle Blower System (Laporan)	12,00	156.000.000	100,00	-	12	31.010.000	3	3.825.000	25,00%	12,33%		3.825.000		2,45%		
	4.05.4.05.01.03	Program Pengawasan dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah							2.965,510,794		294.236.000	#DIV/0!	9,95%	0,00	295.211.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Inspektorat	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4.05.4.05.01.03.01	Penyelesaian TPTGR Oleh Majelis dan Sekretariat TPTGR Keuangan dan Barang Daerah	Persentase Pengembalian Uang Yang Disetorkan Ke Kas Daerah (%)	20,00	674.000.000	15,00	284.954.000	15	84.200.000	2	975.000	13,33%	1,16 %		285.929.000		42,42%		
	4.05.4.05.01.03.02	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Jumlah Perangkat Daerah yang Diawasi Terhadap Pemeriksaan Laporan Keuangan (SPI dan Kepatuhan) dan Pemeriksaan Kinerja (Obrik)	160,00	3.403.000.000	150,00	5.389.774.183	150	1.857.000.000	24	213.225.000	16,00%	11,48 %		5.602.999.183		164,65%		
	4.05.4.05.01.03.03	Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Daerah	Jumlah Rakor yang Dilaksanakan Terkait Program Kerja Pengawasan Tahunan (Rakor)	2,00	363.000.000	2,00	225.493.478	1	187.900.000	-	-	0,00 %	0,00 %		225.493.478		62,12%		
	4.05.4.05.01.03.04	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	Jumlah Evaluasi dan Pemantauan yang Dilaksanakan Atas Penyelesaian Rekomendasi LH APIP dan BPK (Orbik)	160,00	915.000.000	150,00	1.077.500.284	150	468.250.000	20	59.550.000	13,33%	12,72 %		1.137,050,284		124,27%		

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4.05.4.05.01.03.05	Sapu Bersih Pungutan Liar di Lingkungan Provinsi Kep. Bangka Belitung	Jumlah Laporan Tim Satgas Saber Pungli Atas Uang dan Barang Daerah (Laporan)	2,00	460.000.000	2,00	364.056.700	2	182.128.000	-	-	0,00 %	0,00 %		364.056.700		79,14%		
	4.05.4.05.01.03.07	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengaduan Kasus Yang Ditindak Lanjuti Atas Keuangan dan Barang Daerah (Laporan Pengaduan)	20,00	297.799.000	15,00	211.823.100	15	186.032.794	2	21.461.000	13,33%	11,54 %		233.284.100		78,34%		
	4.05.4.05.01.04	Program Pengawasan dan Pembinaan Pembangunan, Sosial, Ekonomi dan Budaya									900.000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	900.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Inspektorat	
	4.05.4.05.01.04.03	Peningkatan Sistem Aplikasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (Upgrading)	Tingkat Akurasi Data Hasil Pengawasan Atas Pemeriksaan APIP dan BPK (%)	100,00	197.300.000	100,00	62.856.459	100	69.750.000	-	-	0,00 %	0,00 %		62.856.459		31,86%		
	4.05.4.05.01.04.05	Sistem Pengendalian Intern Perangkat Daerah		42,00	303.876.000	42,00	157.829.110	42	43.250.000	6	900.000	14,29%	2,08 %		125.729.110		52,23%		
	4.05.4.05.01.04.07	Pelaksanaan Diklat SPIP		100,0	425.000.0	100,0	-	100	250.085.0	-	-	0,00	0,00		-		0,00%		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Bagi Perangkat Daerah		0	00	0			00			%	%						
	4.05.4.05.01.04.08				Survey Penilaian Intergritas		0,00	-	0,00	-	1	140.000.000	-	-	0,00 %	0,00 %		-		#DIV/0!		
					SEKRETARIAT DAERAH																	
				1	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan (%)	100	50.942.622.648	150,79	74.866.848.773	100	44.036.121.427	17	5.889.080.010	17,00%	13,37 %	167,79	80.755.928.783	167,79 %	158,52%	Biro Umum	
					Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan (%)	100	27.469.877.000			100	15.916.950.370	19,65	3.120.471.144	19,65%	19,60 %	19,65	3.120.471.144	19,65%	11,36%		
					Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kepuasan Aparatur Perangkat Daerah Terhadap Pelayanan Kesekretariatan (%)	100	23.573.345.160			100	15.822.751.700	16,08	2.536.345.066	16,08%	16,03 %	16,08	2.536.345.066	16,08%	10,76%		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kepuasan Aparatur Perangkat Daerah Terhadap Pelayanan Kesekretariatan (%)	100	362.000.000			100	372.085.000	10,80	40.000.000	10,80%	10,75 %	10,80	40.000.000	10,80%	11,05%		
					Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Daerah	Tingkat Kepuasan Aparatur Perangkat Daerah Terhadap Pelayanan Kesekretariatan (%)	100	2.399.025.000			100	1.662.284.800	11,57	192.263.800	11,57%	11,57 %	11,57	192.263.800	11,57%	8,01%		
					Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah																	
				2	Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Perekonomian	Prosentase Koordinasi Kebijakan Perekonomian (%)	100	1.306.000.000	134,86	2.249.043.862	100	1.250.000.000		63.137.513	0,00 %	5,05 %	134 ,86	2.312.181.375	134 ,86 %	177,04%	Biro Ekonomi	
					Koordinasi Pengawasan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Provinsi Kepulauan Bangka belitung	jumlah rekomendasi tim pengendalian inflasi daerah (rekomendasi)	2	53.902.000			2	97.833.900	-	13.820.000	0,00 %	14,13 %	0,00	13.820.000	0,00%	25,64%		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Koperasi dan UMKM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Rekomendasi Koperasi dan UKM (Rekomendasi)	2	38.050.000			2	57.186.146	-	5.778.900	0,00 %	10,11 %	0,00	5.778.900	0,00%	15,19%		
					Monitoring dan Evaluasi Analisis Makro Ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Rekomendasi Analisis Makro Ekonomi (Rekomendasi)	2	1.201.812.000			2	77.760.900	-	4.204.000	0,00 %	5,41 %	0,00	4.204.000	0,00%	0,35%		
					Monitoring,Evaluasi Promosi potensi daerah (EXPO) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Rekomendasi Promosi Potensi Investasi Daerah (Rekomendasi)	1	74.950.000			1	68.358.900	-	7.265.300	0,00 %	10,63 %	0,00	7.265.300	0,00%	9,69%		
					Forum Pengembangan Ekonomi	Jumlah Rekomendasi Pembangunan dan Pengembangan Ekonomi Daerah (Rekomendasi)	1	50.302.000			1	78.319.900	-	3.193.000	0,00 %	4,08 %	0,00	3.193.000	0,00%	6,35%		
					Monitoring dan Evaluasi Sistem Resi Gudang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Rekomendasi Sistem Resi Gudang (Rekomendasi)	1	37.350.000			1	70.757.400	-	4.770.000	0,00 %	6,74 %	0,00	4.770.000	0,00%	12,77%		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Monitoring dan Evaluasi Perindustrian dan Perdagangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Rekomendasi Perindustrian dan Perdagangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Rekomendasi)					1	69.567.900	-	5.540.300	0,00 %	7,96 %	0,00	5.540.300	#DIV/0!	#DIV/0!		
					Kerjasama IMT-GT Regional Sumatera dan Sekretariat IMT-GT Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Rekomendasi Kerjasama(Rekomendasi)					2	154.271.900	-	11.136.013	0,00 %	7,22 %	0,00	11.136.013	#DIV/0!	#DIV/0!		
					Monitoring dan Evaluasi Berkah Mart di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Rekomendasi (Rekomendasi)					1	69.307.900	-	7.430.000	0,00 %	10,72 %	0,00	7.430.000	#DIV/0!	#DIV/0!		
				3	Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Sumber Daya Alam	Prosentase Koordinasi Kebijakan Sumber Daya Alam (%)	100	882.500.000	121,43	651.362.075	100	505.000.000		40.483.162	0,00 %	8,02 %	121,43	691.845.237	121,43 %	78,40%	Biro Ekonomi	
					Monitoring dan Evaluasi Sektor Hulu dan Hilir Migas	Jumlah Rekomendasi Distribusi Bahan Bakar Minyak dan Gas (Rekomendasi)	1	1.900.000			1	95.451.160		22.378.562	0,00 %	23,45 %	0,00	22.378.562	0,00%	1177,82 %		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penataan serta Pengembangan Lahan Kritis di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Rekomendasi Lahan Kritis di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Rekomendasi)	1	1.512.500			1	69.497.360		7.483.900	0,00 %	10,77 %	0,00	7.483.900	0,00%	494,80%		
					Monitoring dan Evaluasi Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Bukan Logam di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Rekomendasi Usaha Pertambangan MIneral Logam dan Bukan Logam (Rekomendasi)	0	-			1	69.080.000		-	0,00 %	0,00 %	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
					Monitoring, Evaluasi dan Koordinasi Komoditi Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Rekomendasi Pengembangan Potensi Produksi Pertanian, Perkebunan dan Komoditi Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Rekomendasi)	1	1.512.500			1	75.325.600		10.620.700	0,00 %	14,10 %	0,00	10.620.700	0,00%	702,20%		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				4	Program Peningkatan Koordinasi Bumd, Penanaman Modal, Pariwisata dan Budaya	Prosentase Koordinasi Kebijakan BUMD,Penanaman Modal,Pariwisata dan Budaya (%)	100	3.260.000.000	68,99	2.621.929.800	100	967.661.933		14.658.000	0,00 %	1,51 %	68,99	2.636.587.800	68,99%	80,88%	Biro Ekonomi	
					Pembentukan Bank Umum Syariah Bangka Belitung	Jumlah Rekomendasi Pembentukan Bank Umum Syariah (Rekomendasi)	1	37.325.000			1	52.114.668		-	0,00 %	0,00 %	0,00	-	0,00%	0,00%		
					Koordinasi Program CSR di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Rekomendasi/Kesepakatan Program CSR di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Rekomendasi)	2	152.200.560			3	172.005.032		9.588.000	0,00 %	5,57 %	0,00	9.588.000	0,00%	6,30%		
					Monitoring dan Evaluasi Penyertaan Modal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Rekomendasi Penyertaan Modal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Rekomendasi)	1	55.150.000			1	109.140.340		1.780.000	0,00 %	1,63 %	0,00	1.780.000	0,00%	3,23%		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kajian dan Penyusunan Perlindungan Benda Cagar Budaya atau Benda diduga cagar budaya	Jumlah Rekomendasi Pelestarian Benda Cagar Budaya atau Benda Diduga Cagar Budaya (Rekomendasi)	1	141.845.000			2	52.970.700		-	0,00 %	0,00 %	0,00	-	0,00%	0,00%		
					Pengembangan Kemitraan BUMD	Jumlah Rekomendasi Pembinaan dan Tata Kelola BUMD se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Rekomendasi)	1	86.954.440			1	117.853.600		3.290.000	0,00 %	2,79 %	0,00	3.290.000	0,00%	3,78%		
					Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Investasi Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Rekomendasi Investasi Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Rekomendasi)	1				1	50.966.160		-	0,00 %	0,00 %	0,00	-	0,00%	#DIV/0!		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Daya Tarik Wisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Rekomendasi Pengembangan Daya Tarik Wisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung(Rekomendasi)	1				1	52.961.600		-	0,00 %	0,00 %	0,00	-	0,00%	#DIV/0!		
				5	Program Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBN	Prosentase Realisasi Keuangan dan Realisasi Fisik Penyelenggaraan Dana APBN di Provinsi dan Kabupaten/Kota (%)	80,00	1.407.072.623	96,25	494.198.731	85	724.460.022		38.773.908	0,00 %	5,35 %	96,25	532.972.639	120,31 %	37,88%	Biro Pembangunan	
					Koordinasi Kebijakan APBN	Tersedianya laporan (Rekomendasi)					1	168.506.000		10.796.208	0,00 %	6,41 %	0,00	10.796.208	#DIV/0!	#DIV/0!		
					Pembinaan dan Pengendalian Kegiatan Pembangunan yang bersumber dari APBN	Jumlah laporan realisasi keuangan dan realisasi fisik penyelenggaraan dana APBN (Laporan)	2,00	34.550.000			2	228.900.000	-	27.977.700	0,00 %	12,22 %	0,00	27.977.700	0,00%	80,98%		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				6	Program Peningkatan Pelayanan Kehumasan, Dokumentasi, Publikasi Media dan IT	Persentase pemanfaatan media dan IT untuk layanan kehumasan, dokumentasi dan publikasi (%)	85	3.503.023.340	170,37	3.479.126.600	90	1.826.634.238	10	165.962.500	11,11%	9,09 %	180,37	3.645.089.100	212,20 %	104,06%	Biro Humas dan Protokol	
					Publikasi Media Massa / Cetak	Jumlah publikasi di media massa/cetak (Tayang)	154	801.050.000			154	788.426.000	15	119.177.500	9,74 %	15,12 %	15,00	119.177.500	9,74%	14,88%		
					Publikasi Media Elektronik/IT	Jumlah publikasi di media elektronik dan IT (Tayang)	120	312.967.850			150	404.013.000	10	38.750.000	6,67 %	9,59 %	10,00	38.750.000	8,33%	12,38%		
					Pendokumentasian dan Belanja Spanduk/Baleho	Jumlah publikasi media luar (Tayang)	30	167.364.200			30	131.816.000	6	8.035.000	20,00%	6,10 %	6,00	8.035.000	20,00%	4,80%		
					Penerbitan Majalah / Buletin Pemerintah Provinsi	Jumlah Terbitan Majalah/Buletin Pemerintah Provinsi (Eksemplar)	1300	105.500.000			1300	114.380.000		-	0,00 %	0,00 %	0,00	-	0,00%	0,00%		
				7	Program Peningkatan Pelayanan Protokoler	Persentase agenda kepala daerah yang	85,00	535.354.305	92,20	300.918.250	90	548.075.938	11	121.729.147	12,22%	22,21 %	103,20	422.647.397	121,41 %	78,95%	Biro Humas dan Proto	

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
						terlayani (%)															kol	
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan (buah)	1700,00	85.923.750			2300	54.900.000	18	9.957.500	0,78%	18,14%	18,00	9.957.500	1,06%	11,59%		
					Peningkatan Fungsi Keprotokolan	Tersedianya Alat Pendukung Keprotokolan					25	376.763.000	20	76.786.647	80,00%	20,38%	20,00	76.786.647	#DIV/0!	#DIV/0!		
				8	Program Peningkatan Publikasi, Pengumpulan Dan Penyaringan Informasi	Persentase Pelayanan dan Penyampaian informasi kepada aparatur dan publik (%)	85	1.975.838.255	178,37	2.322.081.075	90	1.563.036.938	23	173.531.841	25,56%	11,10%	201,37	2.495.612.916	236,90%	126,31%	Biro Humas dan Protokol	
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan untuk aparatur di sekretariat daerah (eksemplar)	18480	192.346.200			13900	164.346.000	4	6.684.000	0,03%	4,07%	4,00	6.684.000	0,02%	3,47%		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Pengumpulan Infromasi, Layanan Kehumasan, dan Keprotokolan	Frekuensi Layanan Publikasi dan Keprotokolan Kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Dalam dan luar Daerah (Kali)	185	531.594.550			185	316.890.000	18	55.655.250	9,73%	17,56%	18,00	55.655.250	9,73%	10,47%		
					Penguatan Fungsi Pusat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Jumlah Ketersediaan informasi dan dokumentasi yang bisa diakses publik (Perangkat Daerah)	23	19.400.000			33	237.335.000	13	30.686.210	39,39%	12,93%	13,00	30.686.210	56,52%	158,18%		
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Layanan Kehumasan dan keprotokolan	Jumlah Ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Layanan Kehumasan dan Keprotokolan (buah)	4010	624.500.000			6103	473.500.000	16	75.215.700	0,26%	15,89%	16,00	75.215.700	0,40%	12,04%		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Peningkatan Kualitas SDM dan Koordinasi Kehumasan dan Keprotokolan	Jumlah SDM yang mengikuti kursus/pelatihan untuk meningkatkan kompetensi di luar daerah (orang)					5	39.000.000	14	5.290.681	280,00%	13,57%	14,00	5.290.681	#DIV/0!	#DIV/0!		
				9	Program Peningkatan Administrasi Kewilayahan	Persentase penyelesaian kasus tanah negara (meter persegi)	81000000	700.574.000	85,00	5.744.892.383	85000000	521.268.842		23.058.800	0,00%	4,42%	85,00	5.767.951.183	0,00%	823,32%	Biro Pemerintahan	
						Persentase bidang tanah pemerintah provinsi yang bersertifikat (bidang)	30,00		30,00		30	-		-	0,00%	#DIV/0!	30,00	-	100,00%	#DIV/0!		
						persentase kasus sengketa batas wilayah administrasi yang diselesaikan (persentase)	40,00		40,00		40	-		-	0,00%	#DIV/0!	40,00	-	100,00%	#DIV/0!		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Kegiatan Pensertifikatan Tanah Milik Pemerintah Prov. Kep. Bangka Belitung	Terlaksananya proses sertifikat tanah (Bidang)	20,00	572.072.000			100	418.700.000	-	11.963.400	0,00 %	2,86 %	0,00	11.963.400	0,00%	2,09%		
					Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengaduan Sengketa Pertanahan di kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	terlaksananya monitoring dan evaluasi pengaduan sengketa pertanahan di kabupaten/kota se- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (7 Kab/Kota)					7	31.920.000	-	-	0,00 %	0,00 %	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
					Kegiatan pemeliharaan dan pemutakhiran sistem informasi administrasi kewilayahan	Kelengkapan data (7 kab/kota)					7	78.745.212	-	11.095.400	0,00 %	14,09 %	0,00	11.095.400	#DIV/0!	#DIV/0!		
					Kegiatan penegasan batas daerah	Terlaksananya proses penegasan batas daerah (7 kab/kota)					7	43.668.000	-	-	0,00 %	0,00 %	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
					Kegiatan inventarisasi dan pemutakhiran data rupabumi	Terlaksananya inventarisasi data rupabumi (7					7	168.470.468	-	-	0,00 %	0,00 %	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
						kab/kota)																
				10	Program Peningkatan Pembinaan Keagamaan	Prosentase pembinaan keagamaan (persen)	100,00	12.728.933.000	13,87	11.250.186.871	100	8.735.216.501	-	250.504.309	#VALUE!	2,87 %	#VALUE!	11.500.691.180	#VALUE!	90,35%	Biro Kesra	
					Pendampingan Jamaah Haji Prov. Kep. Bangka Belitung	jumlah TPHD yang diberangkatakan (orang)	9,00	520.500.000			9	879.850.000	-	77.063.600	0,00 %	8,76 %	0,00	77.063.600	0,00%	14,81%		
						terseleksinya Petugas Haji Daerah (9)	0,00				0		-		#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
					Penyelenggaraan Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji	jumlah jemaah haji yang diberangkatkan dari dan ke embarkasi (orang)	1100,00	815.009.700			1255	895.400.000	-	74.074.409	0,00 %	8,27 %	0,00	74.074.409	0,00%	9,09%		
					Peningkatan Kehidupan Beragama pada Bulan Ramadhan	Frekuensi Penyelenggaraan Safari Jumat (masjid dan rumah jabatan)	17,00	507.350.000			17	565.425.000	-	-	0,00 %	0,00 %	0,00	-	0,00%	0,00%		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Pembinaan Mental dan Spritual Masyarakat provinsi Kep.Bangka Belitung	Persentase Pembinaan Keagamaan (persentase)	80,00	2.444.201.504			80	867.758.710	-	99.366.300	0,00%	11,45%	0,00	99.366.300	0,00%	4,07%		
					Pembiayaan Transportasi Domestik Jemaah Haji	Jumlah jamaah yang terfasilitasi biaya domestik haji (orang)	1100,00	3.609.871.290			1255	3.616.671.290	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
				11	Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Pendidikan, Kb, Dan Pemuda	prosentase pengembangan pendidikan, keluarga berencana, pemuda dan pariwisata (persen)	100,00	2.010.920.000	86,77	1.323.400.000	100	1.228.252.250	-		#VALUE!	0,00%	#VALUE!	1.323.400.000	#VALUE!	65,81%	Biro Kesra	
					Pelaksanaan Kegiatan TP UKS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah sekolah yang dinilai (sekolah)	28,00	224.209.750			28	267.120.500	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
					Peningkatan Kecintaan Bermasyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Partisipasi acara HUT Bangka Belitung (orang)	3000,00	724.572.500			3000	752.812.500	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				1 2	Program Peningkatan Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penataan Peraturan Perundang-undangan (%)	85	3.420.000.000	157,17	1.985.214.950	90	1.356.434.800		110.391.185	0,00%	8,14%	157,17	2.095.606.135	184,90%	61,28%	Biro Hukum	
					Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum yang selesai disusun (%)	70	118.850.000			70	229.968.875	15	14.119.300	21,43%	6,14%	15,00	14.119.300	21,43%	11,88%		
					Penyusunan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah Naskah Hukum Lainnya yang selesai disusun	100	700.000			100	56.605.910			0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
					Evaluasi Raperda Kabupaten/Kota	Jumlah Raperda Kab/Kota yang selesai dievaluasi (%)	12	6.700.000			10	147.486.060	2	8.845.000	20,00%	6,00%	2,00	8.845.000	16,67%	132,01%		
					Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Usulan Raperda yang selesai disusun	1	86.700.000			10	429.718.098	1	82.787.585	10,00%	19,27%	1,00	82.787.585	100,00%	95,49%		
					Pembinaan Produk hukum Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan PHD Kabupaten/Kota yang dilakukan Pembinaan Teknis (rancangan)					30	149.367.225		4.639.300	0,00%	3,11%	0,00	4.639.300	#DIV/0!	#DIV/0!		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				13	Program Peningkatan Pelayanan Hukum Pemerintah Daerah	Persentase Pelayanan Hukum (%)	85,00	1.816.000.000	96,08	979.271.626	90	622.800.000		8.728.000	0,00 %	1,40 %	96,08	987.999.626	113,03 %	54,41%	Biro Hukum	
					Penyelesaian Perselisihan/Sengketa Perdata antara Pemda dengan Orang/Masyarakat secara Litigasi atau Non Litigasi	Jumlah Kasus Sengketa Perdata yang melalui tahapan proses penyelesaian (kasus)	2,00	103.850.000			1	124.558.995		-	0,00 %	0,00 %	0,00	-	0,00%	0,00%		
					Penyelesaian Sengketa TUN akibat Pelaksanaan Produk Hukum dan Kebijakan Pemda	Jumlah Kasus Sengketa TUN yang melalui tahapan proses penyelesaian (Kasus)	2,00	142.150.000			1	198.197.675		2.583.000	0,00 %	1,30 %	0,00	2.583.000	0,00%	1,82%	Biro Hukum	
					Pembinaan Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Akibat Pelaksanaan Produk Hukum Daerah dan Kebijakan Pemda di Kab/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Laporan Pembinaan Penyelesaian Sengketa Kabupaten/Kota (Laporan)	1,00	6.400.000			1	32.293.300		3.535.000	0,00 %	10,95 %	0,00	3.535.000	0,00%	55,23%		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Pembinaan Pelaksanaan RANHAM di Kab/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Laporan Pembinaan Pelaksanaan Rencana Hak Asasi Manusia (HAM) di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Laporan)	4,00	6.300.000			1	32.340.100		2.610.000	0,00 %	8,07 %	0,00	2.610.000	0,00%	41,43%		
					Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin oleh Lembaga Bantuan Hukum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah masyarakat miskin yang diberikan bantuan hukum (Orang)	40,00	79.250.000			45	86.902.500		-	0,00 %	0,00 %	0,00	-	0,00%	0,00%		
				14	Program Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBD	Persentase Realisasi Program dan Kegiatan APBD Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (%)	90	1.982.884.194	101,46	534.166.170	90	638.455.000		22.329.276	0,00 %	3,50 %	101,46	556.495.446	112,73 %	28,06%	Biro Pembangunan	
					Kebijakan Monitoring Evaluasi APBD	Laporan dan rekomendasi kebijakan Monev APBD (Laporan)	1	15.250.000			1	38.396.000	-	-	0,00 %	0,00 %	0,00	-	0,00%	0,00%		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Peningkatan Fungsi Sitem E-Monep APBD	Laporan koordinasi sistem e-monep (Laporan)	1	42.660.000			1	83.032.340	-	10.235.000	0,00 %	12,33 %	0,00	10.235.000	0,00%	23,99%		
					Peningkatan Capaian Realisasi APBD	Jumlah rekomendasi APBD (Rekomendasi)	1	82.050.000			1	171.179.708	-	8.123.476	0,00 %	4,75 %	0,00	8.123.476	0,00%	9,90%		
					Peningkatan Fungsi Sismontepra APBD Provinsi, Kabupaten/Kota	Jumlah laporan rekomendasi terhadap realisasi program dan kegiatan APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Laporan)	1	30.050.000			1	104.475.708	-	3.970.800	0,00 %	3,80 %	0,00	3.970.800	0,00%	13,21%		
				15	Program Peningkatan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pengadaan Barang dan Jasa (Nilai Indeks Kepuasan)	80	5.034.568.000	91,93	2.682.501.921	94	2.282.250.000		169.543.339	0,00 %	7,43 %	91,93	2.852.045.260	114,92 %	56,65%	Biro layanan Pengadaan	

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
						Persentase RPP siap lelang yang selesai ditangani ULP (persen)	92		55,00		92				0,00 %	#DIV/0!	55,00	-	59,78%	#DIV/0!		
					peningkatan Fungsi pelayanan ULP	Jumlah Waktu Layanan Pengadaan oleh ULP (%)	12	964.500.000			12	1.535.440.000	3	169.543.339	25,00%	11,04 %	3,00	169.543.339	25,00%	17,58%		
					Peningkatan Pembinaan Pengadaan barang dan Jasa	FRekuensi Pelatihan/Pembinaan/bimtek/Pendampingan (%)	3	75.632.000			3	41.130.000	-	-	0,00 %	0,00 %	0,00	-	0,00%	0,00%		
					Pencegahan dan Penanganan Pengaduan	Jumlah sosialisasi (%)	2	81.252.000			2	26.110.000	-	-	0,00 %	0,00 %	0,00	-	0,00%	0,00%		
					Peningkatan pelayanan perencanaan Pengadaan barang dan jasa	Jumlah Pendampingan dan Monev Pengadaan					2	44.630.000	-	-	0,00 %	0,00 %	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
				16	Program Peningkatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pengadaan secara elektronik (Nilai Indeks Kepuasan)	80,00	5.020.020.500	84,50	3.237.026.576	94	1.864.758.960		103.077.794	0,00 %	5,53 %	84,50	3.340.104.370	105,62 %	66,54%	Biro layanan Pengadaan	

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
						Persentase Penggunaan e - Procrument terhadap belanja pengadaan (persen)	92,00		36,00		92			-	0,00 %	#DIV /0!	36,00	-	39,13%	#DIV/0!		
					Peningkatan Fungsi Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Bulan Layanan oleh LPSE (%)	12,00	1.061.111.500			12	932.489.352	3	68.569.420	25,00%	7,35 %	3,00	68.569.420	25,00%	6,46%		
					Peningkatan Layanan dan Dukungan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Penerapan aplikasi pendukung SPSE (%)	2,00	258.274.000			2	123.042.407	2	18.514.795	100,00%	15,05 %	2,00	18.514.795	100,00 %	7,17%		
					Peningkatan Pelayanan dan Registrasi dan Verifikasi	Jumlah Penerapan aplikasi penyedia Barang/Jasa (%)	1,00	110.302.000			1	74.058.768	2	630.000	200,00%	0,85 %	2,00	630.000	200,00 %	0,57%		
					Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Bulan Pemeliharaan & Perangkat SPSE (%)	12,00	527.500.000			12	282.975.000	3	15.363.579	25,00%	5,43 %	3,00	15.363.579	25,00%	2,91%		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				17	Program Pengembangan Otonomi Daerah	Persentase kebijakan yang diterbitkan dalam rangka harmonisasi dan efektifnya pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan (Prosentase)	15	2.638.074.000	10,00	1.969.262.830	11	2.272.931.408		293.279.686	0,00 %	12,90 %	10,00	2.262.542.516	66,67%	85,76%	Biro Pemerintahan	
						Peringkat penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan provinsi (peringkat)	13		10,00		13				0,00 %	#DIV/0!	10,00	-	76,92%	#DIV/0!		
						Jumlah kepala daerah dan anggota legislative yang terfasilitasi secara administrasi (%)	20		5,00		20				0,00 %	#DIV/0!	5,00	-	25,00%	#DIV/0!		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
						Peningkatan kapasitas kelembagaan untuk menciptakan kepuasan masyarakat atas layanan-layanan publik (%)	100,00				90				0,00 %	#DIV/0!	0,00	-	0,00%	#DIV/0!		
					Kegiatan Optimalisasi Penerapan dan Pelaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Terlaksananya penerapan standar pelayanan minimal (SPM) di provinsi kep. bangka belitung (urusan)					6	74.428.000	-	-	0,00 %	0,00 %	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
					Kegiatan laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Terlaksananya evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKPPD) Kab/Kota Prov. Kep. Bangka Belitung (7 kab/kota)					7	526.424.000	-	179.261.539	0,00 %	34,05 %	0,00	179.261.539	#DIV/0!	#DIV/0!		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Kegiatan administrasi izin keluar negeri Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Ketua/Anggota DPRD Prov. Kep. Bangka Belitung ke luar negeri	Jumlah izin keluar negeri yang dikeluarkan (surat izin)					10	103.550.000	-	4.387.360	0,00 %	4,24 %	0,00	4.387.360	#DIV/0!	#DIV/0!		
					Kegiatan administrasi penatausahaan biro pemerintahan	Terlaksana pelayanan administrasi penatausahaan pada biro pemerintahan (dokumen)					6	623.500.000	-	109.630.787	0,00 %	17,58 %	0,00	109.630.787	#DIV/0!	#DIV/0!		
				18	Program Pengembangan Kerja Sama Pemerintah Daerah	Meningkatnya koordinasi hubungan kepala daerah di Prov. Kep. Bangka Belitung (%)	90,00	1.665.551.000	121,56	2.127.881.182	90	1.092.300.000		266.787.600	0,00 %	24,42 %	121,56	2.394.668.782	135,07 %	143,78%	Biro Pemerintahan	
						Meningkatnya jumlah kerjasama antar pemerintah daerah, swasta dan luar negeri (%)	90,00		80,00		90				0,00 %	#DIV/0!	80,00	-	88,89%	#DIV/0!		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Rapat Koordinasi Gubernur dengan Bupati/Walikota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah pertemuan GUbernur dengan Bupati/Walikota se-prov. kep. bangka belitung (Kesepakatan)	1,00	332.188.000			1	405.244.000		179.803.000	0,00 %	44,37 %	0,00	179.803.000	0,00%	54,13%		
					Kegiatan Partisipasi Kontribusi Iuran dan Keikutsertaan dalam Rakor/Rakernas APPSI	Terlaksananya keikutsertaan pemerintah provinsi dalam APPSI (iuran dan rakernas)	1,00	91.150.000			1	94.650.000	-	-	0,00 %	0,00 %	0,00	-	0,00%	0,00%		
					Verifikasi dan Validasi bantuan pemerintah provinsi kepada Pemerintah/pemerintahan daerah lainnya dan BUMD	Terlaksananya verifikasi dan validasi bantuan hibah kepada pemerintah/pemerintah daerah lainnya dan BUMD (proposal)	5,00	14.700.000			6	34.700.000	-	-	0,00 %	0,00 %	0,00	-	0,00%	0,00%		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Penyelarasan program pemerintah daerah dan pusat	Terlaksananya pertemuan-pertemuan penyelarasan program pemerintah pusat/instansi vertikal di prov. kep. bangka belitung dengan pemeritah daerah (pertemuan)	1,00	18.875.000			1	104.144.000	-	-	0,00 %	0,00 %	0,00	-	0,00%	0,00%		
					Kegiatan pengembangan kerjasama daerah	Tersusunnya rekomendasi kerjasama (kesepakatan)					50	84.069.200	-	-	0,00 %	0,00 %	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
				19	Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Sosial, Kesehatan, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Prosentase koordinasi kebijakan sosial, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi (persen)	100,00	1.067.422.000	90,69	536.131.000	100	620.030.000	-	86.984.600	#VALUE!	14,03 %	#VALUE!	623.115.600	#VALUE!	58,38%	Biro Kesra	
					Evaluasi dan Analisi Proposal Bansos dan Hibah	Terlaksananya Evaluasi dan Analisis Proposal Bansos dan Hibah (proposal)	500,00	12.590.000			500	146.068.000	-	45.843.000	0,00 %	31,38 %	0,00	45.843.000	0,00%	364,12%		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Monitoring dan evaluasi dana bantuan sosial dan hibah	Meningkatnya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Bansos dan Hibah (orang)	200,00	9.125.000			230	93.860.000	-	-	0,00 %	0,00 %	0,00	-	0,00%	0,00%		
					Rapat Bagian Sosial, Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi	Terlaksananya pelayanan yang optimal kepada masyarakat (7 kab/kotai)	21,00	73.575.000			7	114.475.000	-	-	0,00 %	0,00 %	0,00	-	0,00%	0,00%		
				20	Program Pengembangan Dokumentasi Hukum Dan Informasi Hukum	Persentase Pengembangan Dokumentasi Hukum dan Informasi Hukum (%)	85,00	1.510.000.000	52,61	1.147.267.822	90	743.427.190		20.570.800	0,00 %	2,77 %	52,61	1.167.838.622	61,89%	77,34%	Biro Hukum	
					Pengelolaan dan Pengembangan JDIH	Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang dipublikasi melalui website JDIH (Peraturan)	80,00	1.296.178.400			120	304.813.944	10	3.000.000	8,33 %	0,98 %	10,00	3.000.000	12,50%	0,23%		
					Rakor Biro Hukum dan Bagian Hukum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Rekomendasi Pembangunan di Bidang Hukum (Rekomendasi)	1,00	46.826.000			1	108.199.209		17.570.800	0,00 %	16,24 %	0,00	17.570.800	0,00%	37,52%		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				21	Program Perencanaan Setda	Persentase Dokumen Keuangan dan Laporan Kinerja meningkat (%)	80	428.313.000	88,58	312.957.118	85	132.532.000		10.257.762	0,00 %	7,74 %	88,58	323.214.880	110,73 %	75,46%	Biro Pembangunan	
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun (Dokumen)	4	35.849.750			3	69.376.542	-	2.759.000	0,00 %	3,98 %	0,00	2.759.000	0,00%	7,70%		
					Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan capaian kinerja dan keuangan Setda (Laporan)	4	32.649.750			4	59.508.542	-	7.498.762	0,00 %	12,60 %	0,00	7.498.762	0,00%	22,97%		
				22	Program Pengendalian Pembangunan Daerah	Prosentase Realisasi Keuangan dan Realisasi Fisik Penyelenggaraan Dana APBD di Provinsi dan Kabupaten/Kota (%)	95,00	1.549.651.606	142,27	1.256.193.655	97	276.887.000		28.093.700	0,00 %	10,15 %	142,27	1.284.287.355	149,76 %	82,88%	Biro Pembangunan	

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Pengendalian Percepatan Pembangunan di Provinsi Kabupaten/Kota	jumlah laporan koordinasi sinkronisasi Pengendalian Percepatan Pembangunan di Provinsi Kabupaten/Kota (Laporan)	1,00	794.134.800			1	221.583.180		28.093.700	0,00 %	12,68 %	0,00	28.093.700	0,00%	3,54%		
				23	Program Pengembangan Data Informasi Layanan Pengadaan	Survey kepuasan masyarakat terhadap pengembangan data informasi layanan pengadaan (Nilai indeks Kepuasan)	80,00	1.446.989.500	82,82	1.048.083.104	94	482.379.553		44.682.232	0,00 %	9,26 %	82,82	1.092.765.336	103,53 %	75,52%	Biro layanan Pengadaan	
						Persentase data dan informasi pengadaan barang/jasa yang dikelola dan dipublikasikan berbasis IT (persen)	92,00		46,00		92				0,00 %	#DIV/0!	46,00	-	50,00%	#DIV/0!		
					Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah SOP dan Penerapannya (Dokumen)	1,00	25.200.000			1	58.894.000	0	-	25,00%	0,00 %	0,25	-	25,00%	0,00%		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Pengelolaan data dan informasi	Jumlah Admin OPD sistem informasi pengadaan (Admin)	42,00	70.327.000			42	97.024.411	-	1.430.000	0,00%	1,47%	0,00	1.430.000	0,00%	2,03%		
					Peningkatan Administrasi Ketatausahaan	Jumlah Dokumen dukungan Data perencanaan,pelaporan dan ketatausahaan (Dokumen)	4,00	969.542.500			8	157.437.725	2	17.259.050	25,00%	10,96%	2,00	17.259.050	50,00%	1,78%		
				24	Program Peningkatan Dan Pengembangan Kelembagaan Serta Analisisi Jabatan	Persentase jumlah OPD provinsi, kabupaten, kota yang efektif dan efisien (%)	75,00	86.699.500,00	90,55	80.528.307,00	85	480.203.800,00		25.993.182,00	0,00%	5,41%	90,55	106.521.489	120,73%	122,86%	Biro Organisasi	
					Validasi Evaluasi jabatan Aparatur sipil Negara Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Perangkat Daerah yang terevaluasi jabatan ASNnya	1,00	47.785.000,00	1,00	46.464.829,00	32	75.740.000,00	-	7.507.732,00	#VALUE!	9,91%	#VALUE!	53.972.561	#VALUE!	112,95%		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Penataan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Perangkat Daerah yang tertata sesuai dengan aturan yang berlaku	1,00	37.114.500,00	1,00	32.553.478,00	2	75.137.100,00		3.630.000,00	0,00 %	4,83 %	1,00	36.183.478	100,00 %	97,49%		
					Penataan Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis/Cabang Dinas Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Unit Pelaksana Dinas dan Cabang Dinas Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang tertata					16	75.795.000,00		6.696.920,00	0,00 %	8,84 %	0,00	6.696.920	#DIV/0!	#DIV/0!		
					Pembinaan dan Pengendalian kelembagaan perangkat daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Tersinkronisasinya Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dengan peraturan yang berlaku	1,00	1.800.000,00	1,00	1.510.000,00	7	72.168.000,00		-	0,00 %	0,00 %	1,00	1.510.000	100,00 %	83,89%		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Analisa beban kerja jabatan aparatur sipil negara pada perangkat daerah dilingkungan pemerintah provinsi kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Perangkat Daerah yang memvalidasi analisa jabatan dan analisa beban kerja perangkat daerah					32	181.363.700,00		8.158.530,00	0,00 %	4,50 %	0,00	8.158.530	#DIV/0!	#DIV/0!		
				25	Program Peningkatan Dan Pengembangan Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan pengembangan kinerja ASN dan Pemerintah Daerah (%)	75,00	68.150.000,00	109,33	66.116.593,00	80	751.854.240,00		51.985.487,00	0,00 %	6,91 %	109,33	118.102.080	145,78 %	173,30%	Biro Organisasi	
					Pembinaan standar manajemen mutu pada OPD, Cabdin dan UPT di lingkungan pemerintah provinsi kepulauan bangka belitung	Jumlah Laporan (Laporan) 42 OPD	1,00	68.150.000,00	1,00	66.116.593,00	42	48.080.920,00		-	0,00 %	0,00 %	1,00	66.116.593	100,00 %	97,02%		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Manajemen Perubahan	- Jumlah Pembinaan Reformasi Birokrasi PD '- Jumlah Asistensi Reformasi Birokrasi '- Jumlah Pengembangan Agen Perubahan					- 42 '- 42 '- 7	340.741.880,00		13.684.299,00	#VALUE!	4,02 %	0,00	13.684.299	#DIV/0!	#DIV/0!		
					Penigkatan Akuntabilitas Kinerja	-Jumlah Pembinaan Akuntabilitas Kabupaten/kota '- Jumlah Pembinaan/penguatan Akuntabilitas					- 7 '- 42	188.150.000,00		21.273.751,00	#VALUE!	11,31 %	0,00	21.273.751	#DIV/0!	#DIV/0!		
					Data dan Informasi Kinerja	- Jumlah Kesepakatan Forsesdasi '- Jumlah data kinerja Perangkat Daerah yang tervalidasi dan terkelola					- 1 '- 42	174.881.440,00		17.027.437,00	#VALUE!	9,74 %	0,00	17.027.437	#DIV/0!	#DIV/0!		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				26	Program Peningkatan Dan Pengembangan Tata Laksana Pemerintah Daerah	Peningkatan kepuasan masyarakat ()	55	1.106.498.700,00	70,00	1.061.546.110,00	80	505.621.740,00		48.789.816,00	0,00 %	9,65 %	70,00	1.110.335.926	127,27 %	100,35%	Biro Organisasi	
					Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Laporan, evaluasi dan pelaksanaan SOP	1	149.550.000,00	1,00	134.466.370,00	1	71.337.200,00	-	5.189.998,00	0,00 %	7,28 %	1,00	139.656.368	100,00 %	93,38%		
					pembinaan pelaksanaan pelayanan publik di provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Unit Layanan yang melaksanakan Pelayanan Publik dengan baik	1	1.219.950,00	1,00	750.000,00	10	95.651.300,00		2.780.000,00	0,00 %	2,91 %	1,00	3.530.000	100,00 %	289,36%		
					Bimtek penyusunan proposal dan pelatihan admin kompetisi inovasi pelayanan publik	Jumlah Inovasi yang dikompetisikan	1	45.395.000,00	1,00	43.929.889,00	10	97.805.300,00		20.963.555,00	0,00 %	21,43 %	1,00	64.893.444	100,00 %	142,95%		
					Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Jumlah Laporan SKM yang nilainya baik	1	1.130.000,00	1,00	900.000,00	10	84.887.300,00		-	0,00 %	0,00 %	1,00	900.000	100,00 %	79,65%		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Peningkatan administrasi ketatausahaan	Jumlah Laporan dukungan data perencanaan, pelaporan dan ketatausahaan	1	909.203.750,00	1,00	881.499.851,00	1	155.940.640,00		19.856.263,00	0,00 %	12,73 %	1,00	901.356.114	100,00 %	99,14%		
					SEKRETARIAT DPRD																	
					Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Nilai Kepuasan Pelayanan Sekretariat DPRD (%)	90,00	68.861.546.659	90,00	19.581.716.349	90	12.051.552.136	90	-	100,00%	0,00 %	90,00	19.581.716.349	100,00 %	28,44%	SEKRETARIAT DPRD	
						Nilai LAKIP Sekretariat DPRD (Predikat)	79,00		74,01		78											
					Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah anggota DPRD dan Pegawai (ASN & THL) Perangkat daerah yang terlayani (orang)	1325,00	59.646.210.385	255,00	17.519.571.644	265	10.937.352.136	-	-	0,00 %	0,00 %	255,00	17.519.571.644	19,25%	29,37%		
					Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah Seragam Anggota DPRD dan Pegawai (ASN dan THL) Perangkat Daerah (Stel)	2813,00	3.882.843.600	544,00	1.512.120.000	562	805.500.000	-	-	100,00%	99,16 %	544,00	1.512.120.000	19,34%	38,94%		

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat kapasitasnya (orang)	400,00	4.882.492.674	75,00	429.339.169	80	190.000.000	-	-	0,00 %	0,00 %	75,00	429.339.169	18,75%	8,79%		
		Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah (Laporan/dokumen)	35,00	225.000.000	7,00	62.387.083	7	56.800.000	-	-	0,00 %	0,00 %	7,00	62.387.083	20,00%	27,73%		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah diatas 85% (Dokumen)	15,00	225.000.000	3,00	58.298.453	3	61.900.000	-	-	0,00 %	0,00 %	3,00	58.298.453	20,00%	25,91%		
		Program Pengembangan Risalah Rapat dan Kajian Produk Hukum Perundang-Undangan	Persentase meningkatnya produk hukum yang ditetapkan oleh lembaga	80,00	398.950.700.481	80,00	123.935.536.642	80	78.666.051.520	60	-	75,00%	0,00 %	140,00	123.935.536.642	175,00 %	31,07%	SEKRETARIAT DPRD	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			DPRD (%)																
		Rapat-rapat paripurna	Jumlah rapat paripurna yang dilaksanakan ((paripurna istimewa/biasa)	75,00	3.539.425.620	28,00	489.119.204	15	184.800.000	-	-	0,00 %	0,00 %	28,00	489.119.204	37,33%	13,82%		
		Pembahasan anggaran pemerintah prov.kep.babel	Dokumen nota/kesepakatan (dokumen/ laporan)	20,00	2.307.727.800	4,00	278.052.704	4	127.500.000	-	-	0,00 %	0,00 %	4,00	278.052.704	20,00%	12,05%		
		Pembahasan rancangan peraturan daerah dan produk hukum lainnya	Jumlah raperda dan produk hukum yang dibahas (Raperda/produk hukum lainnya)	150,00	117.968.236.790	14,00	23.860.286.222	23	17.679.910.300	-	-	0,00 %	0,00 %	14,00	23.860.286.222	9,33%	20,23%		
		Reses	Jumlah dokumen pokok-pokok pikiran DPRD (Dokumen/laporan)	15,00	45.324.872.910	0,00	3.483.119.800	3	2.689.999.750	-	-	0,00 %	0,00 %	0,00	3.483.119.800	0,00%	7,68%		

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Jumlah keikutsertaan pimpinan dan anggota DPRD pada diklat (anggota)	450,00	9.176.270.555	65,00	1.480.897.922	90	1.933.283.000	-	-	0,00 %	0,00 %	65,00	1.480.897.922	14,44%	16,14%		
		Rapat koordinasi asosiasi DPRD provinsi seluruh indonesia (ADPSI)	Jumlah rekomendasi / kesepakatan (kesepakatan)	15,00	3.249.439.475	4,00	402.997.675	3	420.000.000	-	-	0,00 %	0,00 %	4,00	402.997.675	26,67%	12,40%		
		Penyediaan tenaga ahli dan kegiatan akademik	Jumlah tenaga ahli dan pakar hukum (tenaga ahli dan pakar hukum)	50,00	4.452.998.889	10,00	1.202.961.700	12	753.091.200	-	-	0,00 %	0,00 %	10,00	1.202.961.700	20,00%	27,01%		
		Koordinasi dan konsultasi masalah hukum dan administrasi kesekretariatan	Jumlah dokumen/laporan kegiatan koordinasi dan konsultasi (laporan)	35,00	1.221.020.000	3,00	135.800.000	5	179.826.000	-	-	0,00 %	0,00 %	3,00	135.800.000	8,57%	11,12%		
		Kunjungan kerja komisi	Jumlah Laporan Kunjungan Kerja komisi (dokumen / laporan)	1920,00	170.931.688.718	300,00	85.057.659.837	384	48.916.000.000	-	-	0,00 %	0,00 %	300,00	85.057.659.837	15,63%	49,76%		

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Kunjungan kerja badan musyawarah	Jumlah Laporan Kunjungan Kerja Badan Musyawarah (dokumen/ laporan)	30,00	8.066.180.222	6,00	2.105.745.490	6	1.493.467.000	-	-	0,00 %	0,00 %	6,00	2.105.745.490	20,00%	26,11%		
		Kunjungan kerja badan anggaran	Jumlah Laporan Kunjungan Kerja Badan Anggaran (dokumen / laporan)	30,00	15.209.940.885	7,00	2.838.936.375	6	1.516.500.000	-	-	0,00 %	0,00 %	7,00	2.838.936.375	23,33%	18,67%		
		Kunjungan kerja badan legislasi/pembentukan perda	Jumlah laporan Kunjungan Kerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah (dokumen / laporan)	30,00	11.764.715.127	7,00	1.667.626.319	6	1.849.196.270	-	-	0,00 %	0,00 %	7,00	1.667.626.319	23,33%	14,17%		
		Kunjungan kerja badan kehormatan	Jumlah Laporan Kunjungan Kerja Badan Kehormatan (dokumen / laporan)	30,00	5.738.183.490	6,00	932.333.394	6	922.478.000	-	-	0,00 %	0,00 %	6,00	932.333.394	20,00%	16,25%		

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Program Peningkatan Pelayanan Kerumahtanggaan, Kehumasan dan Protokoler Dewan	Persentase Kesesuaian antar informasi yang dipublikasikan dan layanan keprotokoler dewan dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah (%)	95,00	40.879.408.851	95,00	13.805.521.976	95	8.130.940.000	-	-	0,00 %	0,00 %	47,50	13.805.521.976	50,00%	33,77%	SEKRETARIAT DPRD	
		Publikasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Jumlah publikasi fungsi kelembagaan (Publikasi)	150,00	15.016.653.419	233	3.854.562.107	200	1.937.350.000	-	-	0,00 %	0,00 %	233,00	3.854.562.107	155,33 %	25,67%		
			Persentase meningkatnya sarana prasarana lembaga DPRD (%)	80,00															
		Peningkatan sarana dan prasarana DPRD dan Sekretariat	Persentase pelaksanaan pekerjaan peningkatan sarana prasarana perkantoran	80,00	25.862.755.432	100	9.950.959.869	77	6.193.590.000	-	-	0,00 %	0,00 %	100,00	9.950.959.869	125,00 %	38,48%		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
						(Persen)																
					BADAN PENGHUBUNG																	
				1	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Nilai Kepuasan Pelayanan Sekretariat Badan Penghubung ()		135.910.457.300	82	12.913.540.000	72	6.057.933.540	0	863.614.543	0,00 %	14,26 %	82,00	13.777.154.543	#DIV/0!	10,14%	Badan Penghubung	
						Nilai Lakip Badan Penghubung ()	0		75		75		0		0,00 %	#DIV/0!	75,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
					Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Pegawai (ASN dan PHL) Perangkat Daerah yang Terlayani (Orang)	0	34.520.111.800	65	5.747.577.500	65	5.243.558.540	65	863.614.543	100,00%	16,47 %	130,00	6.611.192.043	#DIV/0!	19,15%		
					Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur (%)		7.498.954.000	100	7.006.725.000	100	588.025.000	0	-	0,00 %	0,00 %	100,00	7.006.725.000	#DIV/0!	93,44%		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat kapasitasnya (Orang)		422.830.000	35	100.450.000	33	173.750.000	0		0,00 %	0,00 %	35,00	100.450.000	#DIV/0!	23,76%		
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah diatas 85% (Dokumen)		3.897.710.000	3	2.200.000	4	26.400.000			0,00 %	0,00 %	3,00	2.200.000	#DIV/0!	0,06%		
					Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Perangkat Daerah (Laporan)		423.045.000	5	6.400.000	5	26.200.000	0		0,00 %	0,00 %	5,00	6.400.000	#DIV/0!	1,51%		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Penyediaan Jasa Konsultasi Perencanaan untuk Rehabilitasi Berat Asrama Dayang Putri Bangka Belitung di Jogjakarta	Tersedianya Jasa Konsultasi Perencanaan untuk Rehabilitasi Berat Asrama Dayang Putri Bangka Belitung di Jogjakarta (paket)		80.000.000.000	1	50.187.500	0	-			#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	50.187.500	#DIV/0!	0,06%		
				2	Program Peningkatan Informasi, Investasi dan Pelayanan Serta Hubungan antar Lembaga Penghubung Provinsi	Persentase Promosi, Informasi dan Hubungan Antar Lembaga serta Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Ibukota Jakarta ()	0	34.884.473.000	100	2.825.594.500	100	5.063.861.646	100	92.874.426	100,00%	1,83 %	200,00	2.918.468.926	#DIV/0!	8,37%	Badan Penghubung	
					Penyelenggaraan Keprotokolan dan pelayanan tamu serta pimpinan daerah	Jumlah Penyelenggaraan Keprotokolan di Jabodetabek (kali)		6.021.376.000	100	529.824.000	24	285.305.000	24	45.296.310	100,00%	15,88 %	124,00	575.120.310	#DIV/0!	9,55%		
					Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya	Jumlah Pendampingan Kepala Daerah/Wakìl Kepala Daerah		1.722.857.000	100	94.933.000	12	140.600.000	12	38.211.310	100,00%	27,18 %	112,00	133.144.310	#DIV/0!	7,73%		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
						(Kali)																
					Dialog/Audiensi dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Masyarakat	Jumlah Kegiatan Dialog/Audiensi dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Masyarakat (acara)		9.261.157.000	100	1.341.450.000	2	1.267.025.000	2	1.500.000	100,00%	0,12 %	102,00	1.342.950.000	#DIV/0!	14,50%		
					Rehabilitasi Berat Anjungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Taman Mini	Jumlah Anjungan yang di Rehabilitasi Berat (Anjungan)		10.296.485.000	100	250.187.500	1	2.718.381.646	0	-	0,00 %	0,00 %	100,00	250.187.500	#DIV/0!	2,43%		
					Kegiatan Pengembangan Seni dan Budaya daerah	Meningkatnya Pelaksanaan Event Seni Budaya dan Kegiatan Penyusunan Informasi dan Promosi (%)		6.482.598.000	100	564.200.000	7	602.050.000	7	7.866.806	100,00%	1,31 %	107,00	572.066.806	#DIV/0!	8,82%		

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10 = 6+8		11=10/5 x100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Kerjasama Peliputan Kegiatan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah dengan Media Massa dan Elektronik	Terlaksananya Peliputan Kegiatan dalam Rangka Kehumasan dan Keprotokolan melalui Media Massa dan Elektronik (%)		1.100.000.000	100	45.000.000	12	50.500.000	0	-	0,00 %	0,00 %	100,00	45.000.000	#DIV/0!	4,09%		

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1 Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Pada tahun 2021, isu strategis yang menjadi permasalahan utama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antara lain sebagai berikut.

1. Pertumbuhan ekonomi yang rendah akibat dari Covid-19.
2. Ekspor komoditas strategis yang rendah karena turunnya permintaan pasar global.
3. Produksi dan nilai tambah komoditias unggulan belum optimal.
4. Peningkatan angka kemiskinan dan pengangguran sebagai dampak Covid-19.
5. Pelayanan kesehatan yang belum optimal dan sumber daya kesehatan yang masih rendah.
6. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) cukup tinggi.
7. Tingkat pendidikan SDM Babel masih rendah.
8. Rata-rata lama sekolah masih di bawah rata-rata Nasional.
9. IPM masih di bawah rata-rata Nasional.
10. Ketersediaan pelabuhan yang belum maksimal.
11. Rendahnya jangkauan komunikasi dan informatika terutama di wilayah pedesaan.
12. Reformasi birokrasi belum berjalan optimal.
13. Kualitas lingkungan hidup yang masih rendah.
14. Kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana masih rendah.

A. Prioritas 1: Peningkatan Ekonomi Masyarakat

Sasaran menurunnya angka kemiskinan dengan arah strategi kebijakan:
1. mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;
2. meningkatkan pendapatan masyarakat miskin.

Sasaran menurunnya tingkat pengangguran dengan arah strategi kebijakan:
1. peningkatan kesempatan kerja;
2. peningkatan peran KUKM dalam meningkatkan kesempatan kerja.

Sasaran meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dengan arah strategi kebijakan:
1. peningkatan kompetensi, hubungan industrial dan keselamatan tenaga kerja.

Sasaran meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat dengan arah kebijakan:
1. peningkatan rehabilitasi, jaminan dan perlindungan sosial.

B. Prioritas 2: Pembangunan Agropolitan

Sasaran meningkatkan nilai tambah sektor pertanian berbasis masyarakat, dengan arah strategi kebijakan:
1. peningkatan produksi dan pengelolaan hasil produksi pertanian, perkebunaan dan peternakan berbasis masyarakat.

C. Prioritas 3: Pengembangan Pariwisata

Sasaran meningkatkan nilai tambah sektor pariwisata berbasis masyarakat, dengan arah strategi kebijakan:
1. peningkatan peran serta masyarakat dan kelembagaan pariwisata serta pengembangan ekonomi kreatif berbasis masyarakat.

D. Prioritas 4: Pembangunan Bahari

Sasaran meningkatkan nilai tambah sektor perikanan berbasis masyarakat, dengan arah strategi kebijakan:
1. peningkatan produksi dan pengelolaan hasil produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya berbasis masyarakat.

E. Prioritas 5: Pembangunan Pendidikan

Sasaran meningkatkan pelayanan pendidikan, dengan arah strategi kebijakan:

1. peningkatan akses pelayanan pendidikan.

F. Prioritas 6: Pembangunan Kesehatan

Sasaran meningkatkan pelayanan kesehatan, dengan arah strategi kebijakan:

1. peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.
2. peningkatan pelayanaan kesehatan masyarakat.

2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Memperhatikan perkembangan dari realisasi sasaran pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama 5 (lima) tahun terakhir, maka upaya yang dapat direspon atas perkembangan tersebut adalah sebagai berikut.

A. Urusan Wajib

1. Pendidikan

Permasalahan di bidang pendidikan antara lain:

1. Belum optimalnya pencapaian APK Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, dilihat dari pencapaian tahun 2018 APK Pendidikan Menengah yaitu 82,21 dan pada Tahun 2019 APK Pendidikan Menengah baru mencapai 82,45. Sedangkan untuk APK Pendidikan Khusus pada Tahun 2018 yaitu 52.68 dan pada Tahun 2019 meskipun naik akan tetapi baru mencapai 85,34. Belum optimalnya pencapaian APK ini disebabkan masih banyak siswa yang putus sekolah. Jumlah siswa SMA putus sekolah pada Tahun 2018 sebanyak 210 orang dan pada Tahun 2019 sebanyak 39 orang. Untuk siswa SMK jumlah siswa yang putus sekolah pada Tahun 2018 sebanyak 487 orang dan pada Tahun 2019 sebanyak 86 orang. Masih banyak siswa yang putus sekolah disebabkan karena motivasi siswa untuk bersekolah rendah, masyarakat kesulitan untuk mengakses layanan pendidikan yang letaknya jauh dari pemukiman dan juga karena faktor ekonomi. Agar pencapaian APK Pendidikan menengah dan Pendidikan Khusus dapat meningkat dilakukan beberapa upaya antara lain Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB), penambahan Ruang Kelas Baru (RKB) sehingga memudahkan masyarakat untuk mengakses layanan pendidikan, pemberian beasiswa bagi siswa tidak mampu sehingga dapat memberi motivasi bagi siswa miskin untuk bersekolah.
2. Masih banyak Satuan Pendidikan yang Belum Terakreditasi A, dilihat dari pencapaian tahun 2018 sebesar 40,15 persen dan 2019 sebesar 43,38 persen. Rendahnya mutu satuan pendidikan ini terutama disebabkan oleh faktor kurangnya sarana prasarana pendidikan serta jumlah dan kualitas guru dan tenaga kependidikan. Dilihat dari Neraca Pendidikan Daerah Skor peta mutu pendidikan (PMP) SMA untuk sarana prasarana SMA sebesar 4,65 dan PTK sebesar 3,69 dan Skor peta mutu pendidikan (PMP) SMK untuk sarana prasarana SMK sebesar 3,15 dan PTK sebesar 3,51.

2. Kesehatan

Permasalahan di bidang kesehatan antara lain:

a. besarnya proporsi usia lanjut dan usia produktif akibat urbanisasi yang tidak terkendali;
b. masih rendahnya kualitas penduduk karena masih terdapat kecenderungan meningkatnya AKI & AKB;
c. beban ganda penyakit (*Double Burden Disease*) dimana penyakit penyakit lama belum diatasi dan cenderung meningkat (*re-emerging*) dan muncul lagi penyakit-penyakit yang baru (*new-emerging*);
d. dampak perubahan iklim dan meningkatnya pencemaran lingkungan;
e. perubahan gaya hidup masyarakat yang tidak sehat yang beresiko menyebabkan timbulnya penyakit;

f. penyalahgunaan napza;
g. desentralisasi bidang kesehatan yang tidak optimal;
h. belum optimalnya manajemen kesehatan dalam mendukung pembangunan kesehatan;
i. kurangnya pemberdayaan masyarakat dan sektor swasta yang berperan dalam pembangunan kesehatan;
j. adanya kesenjangan kualitas kesehatan dan akses terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu antar wilayah, gender dan tingkat sosial ekonomi;
k. pelayanan kesehatan reproduksi yang masih lemah;
l. pembiayaan kesehatan belum tersedia merata dan terjangkau oleh masyarakat;
m. masih lemahnya pengawasan mutu obat dan makanan yang beredar di masyarakat;
n. masih kurangnya kualitas & kuantitas SDM kesehatan;
o. belum berkembangnya teknologi dan ilmu baru dibidang kesehatan.

3. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Permasalahan di bidang ketentraman umum dan perlindungan masyarakat antara lain:

1. Terjadinya gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diketahui sepanjang tahun 2017 sebanyak 3.584 orang/pelanggar, tahun 2018 sebanyak 2.353 orang/pelanggar dan tahun 2019 sebanyak 975 orang/pelanggar.
2. Masih tinggi terjadinya tindak kriminal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2016 sebanyak 1.828 kasus, tahun 2017 sebanyak 1490 kasus. Tahun 2018 sebanyak 1.447 kasus dan tahun 2019 sebanyak 1.453 kasus. Jumlah tindak kriminal ini dapat menggambarkan kondisi kenyamanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Belum semua anggota Satlinmas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendapatkan pelatihan dalam rangka membantu penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta membantu penanganan bencana dan kebakaran. Per 31 Desember 2019 jumlah anggota satlinmas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 3.997 orang, namun baru 1030 orang anggota satlinmas yang telah mendapatkan pelatihan.
4. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung termasuk daerah yang yang sering mengalami bencana kebakaran sepanjang tahun 2019 telah terjadi 1.565 kasus kebakaran. Saat ini Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum memiliki peta khusus daerah rawan kebakaran. Tidak hanya itu, kecuali anggota satlinmas, masyarakat/relawan pemadam kebakaran belum diberikan pemahaman metode pemadam kebakaran.

4. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang antara lain:

a. sarana dan prasarana transportasi menunjukkan bahwa secara umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih menghadapi kondisi jalan yang kurang mendukung, khususnya untuk jalan kabupaten dan masih perlunya tambahan jumlah jaringan jalan yang cukup untuk meningkatkan perekonomian masyarakat;
b. belum optimalnya tindakan pemerintah untuk membuka jalur darat dalam rangka membuka keterisolasian wilayah, sehingga menyebabkan aktifitas ekonomi menjadi terganggu;
c. belum optimalnya tata kelola pemanfaatan ruang dalam pembangunan dengan pendekatan kawasan;
d. masih belum optimalnya pembangunan infrastrutur jalan dan jembatan;
e. masih adanya ketidaksesuaian antara tata ruang dengan pembangunan yang dilakukan sehingga akan menimbulkan terjadinya tumpang tindih dalam pemanfaatan ruang dalam pembangunan;
f. belum optimalnya peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan jalan serta jembatan;
g. banyaknya kerusakan jalan yang menyebabkan terputusnya jaringan distribusi;

h. lemahnya jaringan jalan yang berakibat timbulnya ketidakmerataan distribusi barang dan orang, berpotensi munculnya konflik sosial antar penduduk dan antar kabupaten yang ada;
i. pembangunan yang kurang berpedoman kepada tata ruang.

5. Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permasalahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan antara lain:
a. masih rendahnya pemenuhan infrastruktur dasar;
b. masih rendahnya kondisi lingkungan permukiman pada beberapa kawasan dikarenakan belum didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) yang memadai;
c. belum optimalnya penataan kawasan permukiman dikarenakan Belum optimalnya tata kelola penataan kawasan permukiman serta belum menyeluruhnya cakupan layanan akses pengolahan persampahan serta belum adanya TPA Regional;
d. masih rendahnya akses terhadap tempat tinggal/hunian layak yang dilengkapi sarana prasarana dan utilitas yang memadai bagi masyarakat terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat miskin serta masyarakat korban bencana;
e. belum terintegrasi penyediaan air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan dalam penyediaan pengembangan permukiman.

6. Sosial

Permasalahan di bidang sosial antara lain:
a. besaran permasalahan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) yang semakin kompleks meskipun terjadi penurunan pada populasi penduduk miskin;
b. banyaknya partisipasi masyarakat yang belum diimbangi dengan penguatan manajemen pelayanan sosial sehingga berdampak terhadap penanganan PMKS;
c. belum optimalnya pemanfaatan sumber dan potensi kesejahteraan sosial dalam penanganan PMKS;
d. menurunnya nilai-nilai kesetiakawanan sosial dan kearifan lokal, kegotong royongan serta penghargaan terhadap para pahlawan dan perintis kemerdekaan;
e. keterbatasan sarana prasarana panti sosial dalam rangka peningkatan pelayanan sosial.

7. Tenaga Kerja

Permasalahan di bidang tenaga kerja antara lain:
a. rendahnya kualitas tenaga kerja dari data yang ada sebanyak 59,69 % dari total penduduk yang bekerja masih berpendidikan rendah (SMP ke bawah) bahkan 44,69 persen masih berpendidikan sangat rendah (SD ke bawah);
b. kurangnya kompetensi dan kualitas pencari kerja dengan perkembangan lapangan kerja yang terbatas dan kurang harmonisnya hubungan industrial di perusahaan.

8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak antara lain:
a. masih rendahnya kualitas hidup perempuan yang ditunjukkan oleh rendahnya angka IPG dan IDG;
b. rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran perempuan;
c. belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan;
d. masih tingginya praktek buruk terhadap hak-hak anak seperti pekerja anak, perkawinan anak dan anak berhadapan dengan hukum (ABH);

e. belum terpenuhinya hak-hak anak seperti akta kelahiran, PAUD, hidup sehat, sekolah ramah anak, puskesmas ramah anak dan pengasuhan yang aman;
f. kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

9. Pangan

Permasalahan di bidang pangan antara lain:
a. masih tingginya tingkat ketergantungan beras dengan daerah lainnya;
b. belum beragamnya pola konsumsi pangan masyarakat;
c. kecenderungan masyarakat terhadap pangan pokok beras yang tinggi;
d. masih adanya daerah rawan pangan;
e. masih rendahnya kualitas produk olahan pangan yang dihasilkan oleh pelaku usaha atau kelompok masyarakat.

10. Pertanahan

Permasalahan di bidang pertanahan antara lain:
a. masih lemahnyan jaminan kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah bagi masyarakat;
b. ketimpangan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah bagi kesejahteraan masyarakat;
c. belum optimalnya pelayanan tata kelola pertanahan kepada masyarakat;
d. masih kurangnya ketersedian tanah bagi kepentingan pembangunan fasilitas umum untuk masyarakat.

11. Lingkungan Hidup

Permasalahan di bidang Lingkungan Hidup antara lain:
a. belum optimalnya pengendalian terhadap lingkungan hidup;
b. pengelolaan SDA yang masih mengabaikan kelestarian lingkungan;
c. masih rendahnya tingkat kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup;
d. luasnya sebaran dan cepatnya degradasi kualitas lingkungan yang terjadi.

12. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Permasalahan di bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil antara lain:
a. belum optimalnya pendayagunan database kependudukan baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota;
b. rendahnya kualitas pelayanan kabupaten/kota dalam kepemilikan dokumen kependudukan.

13. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana antara lain:
a. tingginya laju pertumbuhan penduduk;
b. masih rendahnya tingkat kesadaran menjadi akseptor KB bagi kaum laki-laki;
c. kurang signifikannya *Contraceptive Prevalence Rate* (CPR) atau cakupan KB aktif;
d. belum terpenuhinya pelayanan *unmet need*;
e. belum optimalnya upaya pendewasaan usia pernikahan;
f. masih tingginya TFR per WUS (15-49 tahun) sebesar 2,6%;
g. terbatasnya fasilitas operasional penggerakan masyarakat dan sarana prasarana pendukung pelayanan KB;

h. peran pengendalian penduduk yang belun optimal di tingkat kabupaten/kota karena belum memiliki bidang pengendalian penduduk;
i. keterbatasn sarana prasarana, anggaran serta kompetensi SDM;
j. rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya KB Pascasalin Metode Konsumsi Jangka Panjang (MKJP);
k. budaya dan agama tertentu yang tidak menyetujui penggunan kontrasepsi.

14. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Permasalahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa antara lain:

a. kurangnya sumber daya manusia yang ada baik secara kualitas maupun kuantitas sehingga ada beberapa tugas pokok dan fungsi yang hanya berjalan di tempat;
b. minimnya anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sehingga pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa tidak dapat dilaksanakan secara optimal;
c. kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan kinerja pegawai dalam upaya pembinaan dan evaluasi yang ada seperti kedesa, kendaraan operasional yang masih minim;
d. kurangnya kualitas sumber daya manusia bagian pengarsipan, belum terlatihnya tenaga bagian arsiparis sehingga pelaksanaan kearsipan belum tertata dan berjalan secara maksimal dan penyelenggaraan manajemen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa di berbagai tingkat administrasi belum terpadu dan berkesinambungan;
e. belum optimal koordinasi, bantuan teknis, monitoring program dan pelaporan. Pelaksanaan kegiatan belum berjalan sinergi dan terkoordinasi dengan baik antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kabupaten/Kota yang mengakibatkan pemantauan dan evaluasi di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa menjadi lemah, setengah-setengah dan tidak efesien, sistem pencatatan dan pelaporan menjadi lambat, belum lengkap dan kurang akurat.

15. Perhubungan

Permasalahan di bidang perhubungan antara lain :

a. masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi dan keahlian di bidang transportasi;
b. rendahnya disiplin berlalu lintas pengguna jalan, sehingga sering mengakibatkan kemacetan dan kecelakaan;
c. jumlah kecelakaan dan pelanggaran yang masih tinggi yang diakibatkan kurangnya fasilitas perlengkapan jalan, dan pertumbuhan jumlah penduduk serta kendaraan yang tidak sebanding dengan kapasitas jalan;
d. jaringan trayek yang belum terstruktur , teratur, terpadu, mengakibatkan pelayanan angkutan umum belum efektif dan efisien;
e. kurangnya data-data di bidang perhubungan sehingga menyulitkan untuk menentukan arah kebijakan perhubungan;
f. masih kurangnya koordinasi antar lintas sektoral di bidang perhubungan sehingga mengakibatkan kurangnya sinkronisasi dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pengawasan dan penegakkan hukum di bidang perhubungan;
g. belum optimalnya pembangunan sektor perhubungan di pulau-pulau berpenduduk sehingga belum mampu meningkatkan taraf ekonomi masyarakat setempat;
h. kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga dan ikut merawat prasarana jalan, sehingga masih banyaknya perlengkapan jalan yang sengaja dirusak atau dibiarkan rusak oleh masyarakat;

i. belum optimalnya pengembangan Bandara H.AS. Hanandjoeddin, Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung;
j. belum adanya keselarasan Rencana Strategis PD dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

16. Komunikasi dan Informatika

Permasalahan di bidang komunikasi dan informatika antara lain:
a. keterbatasan jangkauan jaringan telekomunikasi dan informasi pada kawasan-kawasan strategis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
b. keterbatasan kewenangan pengelolaan sumberdaya teknologi informasi dalam meningkatkan PAD;
c. keterbatasan pendanaan APBD pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan di dalam kewenangan Kominfo.

17. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Permasalahan di bidang koperasi usaha kecil dan menengah antara lain:
a. masih lemahnya koperasi dan UKM pada upaya untuk menjadikan koperasi dan UKM menjadi pelaku ekonomi yang berbasis TI (Teknologi Informasi) dan kuat secara kelembagaan serta jaringan kerja yang luas dalam upaya mendukung visi agri-bahari;
b. masih kurangnya stimulus-stimulus bantuan modal dari pemerintah, pendampingan teknis, pengawasan, dan pelatihan manajemen dalam pengembangan koperasi dan UMKM;
c. masih sedikitnya koperasi dan UKM yang bergerak pada usaha-usaha untuk menopang sektor pariwisata dan pengolahan hasil perikanan dan pertanian;
d. masih adanya koperasi yang tidak aktif dalam menggerakan perekonomian masyarakat.

18. Penanaman Modal

Permasalahan di bidang penanaman modal antara lain:
a. masih rendahnya tingkat investasi yang dilakukan oleh para investor dalam mendukung pembangunan sektor pertanian, pariwisata, perikanan, pertambangan, energi dan perindustrian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
b. penciptaan iklim investasi yang kondusif dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) mutlak diciptakan;
c. belum optimalnya pemberian insentif dan kemudahan bagi para investor dalam berinvestasi di provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
d. belum optimalnya kualitas promosi terhadap investasi daerah;
e. masih perlu ditingkatkan terhadap Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam penguru san semua perizinan.

19. Kepemudaan dan Olahraga

Permasalahan di bidang kepemudaan dan olahraga antara lain:
a. masih belum optimalnya capaian Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, walaupun pada tahun 2018 persentase IPP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai 53 % sudah melebihi target dari capaian nasional yaitu sebesar 50,17%;
b. masih rendahnya capaian Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada tahun 2018 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berada pada kategori kurang yaitu 0,26%. Adapun indeks untuk masing-masing dimensi adalah partisipasi sebesar 2,26%, ruang terbuka sebesar 0,23%, kebugaran 0,19% dan SDM Keolahragaan sebesar 0,36%.

20. Statistik

Permasalahan di bidang statistik antara lain:
a. perlu dilakukan penguatan Data Statistik sektoral sebagai basis data;

b. melihat rentang kendali data yang luas, permasalahan koordinasi lintas perangkat daerah menjadi penting untuk ditingkatkan; dan
c. belum adanya piranti lunak Statistik Sektoral sebagai basis data.

21. Persandian

Permasalahan di bidang persandian antara lain:

a. SDM dibidang Keamanan Informasi sangat dibutuhkan guna mendukung daya saing pada era industry 4.0;
b. Keterbatasan perlatan persandian dalam mengamankan informasi/data strategis Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
c. Terkait kelembagaan yang fungsinya masih terpisah dengan keamanan informasi.

22. Kebudayaan

Permasalahan di bidang kebudayaan antara lain:

a. masih belum optimalnya dukungan kebudayaan dalam mengembangkan sektor pariwisata yang merupakan unggulan daerah;
b. kurangnya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kekayaan dan ke ragaman budaya;
c. kurangnya SDM bidang kebudayaan dalam pelestarian seni budaya lokal dan pengelolaa n warisan budaya;
d. belum adanya komitmen pelaku seni dan budaya.

23. Perpustakaan

Permasalahan di bidang Perpustakaan antara lain :

1. Masih rendahnya tingkat pembinaan perpustakaan

   Hal ini ditandai dengan Perpustakaan yang menjadi kewenangan Provinsi adalah perpustakaan SMA/SMK sederajat. Jumlah Perpustakaan Daerah ada 1 perpustakaan yaitu perpustakaan provinsi, 85 perpustakaan SMA/SMK negeri dan perpustakaan khusus yang ada di OPD sebanyak 4 perpustakaan. Sedangkan Perpustakaan Non Pemda adalah perpustakaan SMA/SMK Swasta sebanyak 46 perpustakaan.

2. Masih rendahnya koleksi buku dan naskah kuno di perpustakaan

   Sampai tahun 2020 koleksi buku yang dimiliki perpustakaan daerah masih sangat sedkit yaitu sebanyak 26.600 koleksi buku, sedangkan untuk naskah kuno sangat minim sekali. Sesuai aturan koleksi buku yang harus di miliki perpustakaan sekurang-kurangnya 0,015 per kapita masyarakat dan subjeknya harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat, jumlah koleksi buku di perpustakaan sekurangnya mencapai minimal 50.000 judul.

24. Kearsipan

Permasalahan di bidang kearsipan antara lain :

1. Masih rendahnya penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan standar baku kearsipan

   Nilai LAKE (Laporan Audit Kearsipan Eksternal) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2016 LAKE (Laporan Kearsipan Ekternal) bernilai 35, pada tahun 2017 berjumlah 39 dan pada tahun 2018 berjumlah 45,82, nilai tersebut berpredikat buruk. Beberapa komposit dalam penilaian antara lain rendahnya SDM pengelola kearsipan, sarana prasarana, tata naskah, dan sebagainya.

B. Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Permasalahan di bidang kelautan dan perikanan antara lain:

a. belum optimalnya nilai tambah industri produk olahan dan pemasaran hasil perikanan yang berdaya saing;
b. masih rendahnya akses permodalan untuk pengembangan usaha;
c. masih rendahnya produktifitas perikanan tangkap maupun perikanan budidaya;
d. masih maraknya *ilegal fishing;*
e. tidak tersedianya SDM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mengurusi bidang pengawasan dan pembinaan kelautan dan perikanan di kabupaten/kota berdasarkan nomenklatur dan kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

2. Pariwisata

Permasalahan di bidang pariwisata antara lain:

a. masih rendahnya kontribusi sektor pariwisata terhadap ekonomi;
b. atraksi wisata yang yang ada di daya tarik wisata pada suatu destinasi pariwisata masih kurang variatif secara kuantitas;
c. rendahnya kemampuan sumber daya pariwisata dalam menghasilkan produk ekonomi kreatif.

3. Pertanian

Permasalahan di bidang pertanian antara lain:

a. belum optimalnya produksi dan produktivitas pertanian dalam memenuhi kebutuhan pangan lokal;
b. konversi lahan pertanian/perubahan fungsi lahan pertanian untuk kebutuhan non-pertanian dan penurunan kualitas lahan pertanian;
c. masih rendahnya rasio ketersediaan infrastruktur, sarana dan prasarana pertanian;
d. sumber-sumber benih yang bermutu dan unggul ditingkat petani belum memadai dan belum tersedia tepat jumlah dan waktu;
e. masih rendahnya daya saing komoditas pertanian tercermin dari kualitas hasil produksi yang belum memenuhi standar mutu dengan karakteristik yang sesuai keinginan konsumen, baik di pasar domestik ataupun pasar ekspor;
f. masih lemahnya kapasitas kelembagaan petani, peran dan fungsi kelembagaan petani sebagai wadah organisasi petani/kelembagaan petani belum berjalan secara optimal (mandiri dan profesional) dan terbatasnya pengetahuan, kemampuan/ ketrampilan dan kemandirian petani;
g. rata-rata kepemilikan lahan yang sempit;
h. perubahan iklim yang memicu bencana alam dan serangan OPT.

4. Kehutanan

Permasalahan di bidang kehutanan antara lain:

a. masih rendahnya kontribusi Sub Sektor kehutanan terhadap PDRB;
b. harmonisasi regulasi dan kebijakan pengelolaan SDA perencanaan tata ruang;
c. pengukuhan kawasan hutan;
d. resolusi konflik agraria;
e. rendahnya perlindungan dan konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
f. kemiskinan sekitar kawasan hutan;
g. rendahnya pengelolaan daerah aliran sungai;
h. masih luasnya lahan kritis.

5. Energi dan Sumber Daya Mineral

Permasalahan di bidang energi dan sumber daya mineral antara lain:

a. belum optimalnya PAD dari sektor energi dan sumber daya mineral;

b. belum optimalnya pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) sebagai sumber energi;
c. belum tersedianya data lahan terganggu dan lahan kritis akibat pertambangan;
d. belum optimalnya pembinaan dan pengawasan pendistribusian minyak dan gas;
e. belum optimalnya pembinaan dan pengawasan di bidang ketenagalistrikan;
f. tumpang tindih kawasan pertambangan dengan sektor lainnya.

6. Perdagangan

Permasalahan di bidang perdagangan antara lain:
a. belum optimalnya koordinasi penanganan ketersediaan dan harga pangan Kebutuhan Pokok Masyarakat (Kepokmas) antar tingkatan pemerintah (pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota);
b. sinergitas daerah dalam memanfaatkan gudang dengan sistem resi gudang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
c. banyaknya sarana perdagangan terutama pasar tradisional dalam kondisi kurang baik.
d. lemahnya sistem tata kelola perdagangan produk;
e. belum optimalnya lembaga perlindungan konsumen dalam melindungi konsumen;
f. masih banyak pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan bidang perdagangan, perlindungan konsumen, dan tertib niaga;
g. belum lengkapnya ketersediaan alat pengujian untuk beberapa komoditi unggulan;
h. masih sedikitnya pengusaha yang melakukan pengujian produk di balai sertifikasi pengujian mutu.

7. Perindustrian

Permasalahan di bidang perindustrian antara lain:
a. terbatasnya kemampuan inovasi dan diversifikasi produk, pengetahuan tentang manajemen usaha, pemasaran dan modal kerja;
b. kurangnya pemahaman manfaat dari legalitas, standardisasi dan sertifikasi produk;
c. belum berkembangnya industri pengolahan yang berbahan baku potensi daerah;
d. belum optimalnya pengelolaan kawasan industri;
e. belum optimalnya pengawasan terhadap industri;
f. belum optimalnya pembentukan sentra industri.

8. Transmigrasi

Permasalahan di bidang transmigrasi antara lain :
a. tidak seimbangnya animo masyarakat dengan kesempatan bertransmigrasi;
b. masih banyak lokasi yang dicadangkan maupun dikembangkan belum clear and clean;
c. masih rendahnya partisipasi daerah dan swasta dalam pembangunan transmigrasi;
d. masih banyaknya lokasi transmigrasi yang tidak berkembang;
e. rendahnya kualitas sarana dan prasarana di lokasi.
f. rendahnya kompetensi warga transmigrasi di wilayah Kepulauan Bangka Belitung

Tabel II.197
Identifikasi Isu Strategis dalam Penyusunan RKPD Tahun 2021

NO	PERANGKAT DAERAH	ISU STRATEGIS RENSTRA PERANGKAT DAERAH		ISU STRATEGIS RPJMD TAHUN 2017-2022	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1	DINAS TENAGA KERJA	1	Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja serta pembinaan hubungan industry dan kesehatan kerja;	1	Tingkat pengangguran lebih tinggi dari laju pertumbuhan ekonomi
		2	Penempatan tenaga kerja dan penciptaan lapangan pekerjaan bagi pencari kerja pada semua sector pembangunan;		
		3	Pengembangan kawsan transmigrasi dan peningkatan penyediaan sarana		

NO	PERANGKAT DAERAH	ISU STRATEGIS RENSTRA PERANGKAT DAERAH		ISU STRATEGIS RPJMD TAHUN 2017-2022	
			dan prasarana serta pemberdayaan mayarakat di kawasan transmigrasi.		
2	DINAS KEHUTANAN	1	Masih Rendahnya Tata Kelola dan Pemanfaatan Kawasan Hutan;		
		2	Rendahnya Penegakan Hukum Pidana Kehutanan;		
		3	Belum Optimalnya Pemberdayaan Masyarakat Kehutanan melalui Perhutanan Sosial;		
		4	Masih Rendahnya Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;	1	Penurunan Tutupan Hutan
		5	Masih Luasnya Lahan Kritis;	2	Penurunan Tutupan Hutan
		6	Masih Rendahnya Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS);	3	Penurunan Tutupan Hutan
		7	Masih Rendahnya Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Pelayanan di Bidang Kehutanan;		
		8	Belum Adanya Sistem Pengelolaan Database Kehutanan Berbasis IT.		
3	DINAS UKM	1	Belum optimalnya upaya pengembangan volume usaha baik koperasi maupun UKM;		Hilirisasi sumber daya mineral masih rendah
		2	Masih rendahnya kemampuan SDM Koperasi dan UKM;		Belum optimalnya pengembangan Potensi Unggulan Daerah sektor Pariwisata, Perkebunan, Perikanan dan Pertambangan yang berkelanjutan
		3	Minimnya jaringan usaha baik UKM maupun koperasi;		Tingkat Investasi Rendah
		4	Belum optimalnya fasilitasi akses sumber permodalan bagi Koperasi dan UKM;		Tingginya Laju Pertumbuhan Penduduk
		5	Belum standarnya desain *packaging* produk KUKM;	5	Isu Infrastruktur dan Konektivitas
		6	Masih terbatasnya fasilitasi pemasaran produk KUKM;	6	Kebutuhan akan energi tidak seimbang dengan pertumbuhan penyediaan sumber energi
4	DINAS KELAUTAN PERIKANAN	1	Masih rendahnya Pertumbuhan Ekonomi dan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan	1	
		2	Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan dalam mentaati peraturan	2	
		3	Masih belum optimalnya pembangunan berbasis pengembangan kawasan kelautan dan perikanan.	3	
5	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	1	Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM Bidang Kebudayaan.	1	Masih lemahnya kualitas dan kapasitas, pengembangan dan inovasi, promosi dan efektifitas pemanfaatan sarana dan prasarana kebudayaan serta kemampuan tata kelola dalam pelestarian kebudayaan.
		2	Masih kurangnya minat dan antusias para remaja terhadap pelestarian seni dan budaya lokal.	2	Belum optimalnya pelestarian budaya lokal yang diarahkan pada pembangunan sosial dalam rangka memperkukuh karakter dan jati diri bangsa
		3	Kurangnya sinergi antar pemangku		

NO	PERANGKAT DAERAH	ISU STRATEGIS RENSTRA PERANGKAT DAERAH		ISU STRATEGIS RPJMD TAHUN 2017-2022	
			kepentingan kebudayaan dan pariwisata.		
		4	Kurangnya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kekayaan dan keragaman budaya.		Masih lemahnya kualitas dan kapasitas, pengembangan dan inovasi, promosi dan efektifitas pemanfaatan sarana dan prasarana kebudayaan serta kemampuan tata kelola dalam pelestarian kebudayaan
		5	Belum optimalnya Infrastruktur, sarana, prasarana dan peran serta pemangku kepentingan pariwisata daerah.		Belum optimalnya penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana serta pengelolaan kawasan dan daya tarik wisata
	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA				Masih kurangnya peran serta dan kerjasama antar pemangku kepentingan (masyarakat, pemerintah, swasta dan lainnya) dalam pengembangan pariwisata daerah
		6	Belum optimalnya pemasaran pariwisata yang terintegrasi.		Belum optimalnya pemasaran destinasi pariwisata
		7	Belum optimalnya daya saing Sumber Daya Pariwisata.		Masih terbatasnya kualitas serta kualitas sumberdaya manusia dan kelembagaan yang bergerak di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif
6	DINAS PERTANIAN	1	Belum optimalnya produksi dan produktivitas sub-sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, serta populasi dan produksi sub-sektor peternakan;		Terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke fungsi lainnya seperti perkebunan, dan pertambangan
		2	Sumber-sumber benih yang bermutu dan unggul belum tersedia dalam tepat jumlah, waktu dan tepat sasaran		Belum optimalnya pembangunan prasarana fisik pendukung pertanian yang dilakukan selama ini dalam mendorong peningkatan produksi pertanian
		3	Standarisasi produk pertanian atau mutu/kualitas produk pertanian yang relatif masih rendah, yang berakibat rendahnya daya saing dan masih lemahnya jaringan informasi pasar menjadikan posisi tawar petani rendah		Masih rendahnya kesejahteraan petani yang terlihat dari nilai tukar petani serta masih rendahnya peningkatan nilai tambah dan pemasaran produk pertanian
		4	Lahan Pertanian : a. Belum optimalnya pemanfaatan/produktivitas lahan yang tersedia untuk usaha pertanian; b. Konversi lahan pertanian/perubahan fungsi lahan pertanian untuk kebutuhan non-pertanian; c. Kecenderungan penurunan kualitas lahan, sebagai akibat pemakaian pupuk kimia serta pestisida yang tidak seimbang dan dilakukan secara terus menerus; d. Rata-rata kepemilikan		Masih rendahnya produktivitas usaha pertanian serta belum optimalnya penerapan teknologi tepat guna yang inovatif.

NO	PERANGKAT DAERAH	ISU STRATEGIS RENSTRA PERANGKAT DAERAH		ISU STRATEGIS RPJMD TAHUN 2017-2022	
			lahan yang sempit; e. Lahan untuk usaha ternak yang belum cukup tersedia; f. Ketidakpastian status kepemilikan lahan		
		5.	Ketersediaan infrastruktur, sarana dan prasarana dalam pendukung produksi pertanian (irigasi, jalan usaha tani, alsin dan pupuk) masih terbatas;		Belum optimalnya populasi dan produksi ternak di semua kabupaten/kota yang ada. Di sisi lain produksi ternak secara komersil masih belum memadai. Kebanyakan masyarakat masih menempatkan peternakan sebagai aktivitas sampingan.
		6.	Perubahan iklim global, berakibat terjadi perubahan musim, sehingga meningkatkan bencana alam dan perkembangan organisme penganggu tumbuhan (OPT);		Belum optimalnya pemberdayaan kelembagaan ekonomi masyarakat petani dan kelompok tani dalam meningkatkan kesejateraan petani
		7.	Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian (a) Terbatasnya dukungan sumber daya manusia, dari segi kualitas kompetensinya dalam menyerap/ mengadopsi serta menerapkan kemajuan teknologi dan informasi; (b) Lemahnya kapasitas kelembagaan petani dan penyerapan teknologi pertanian, mengakibatkan petani tidak memiliki nilai/posisi tawar produk; (c) Rendahnya minat generasi muda untuk mengembangkan dan terlibat dalam usaha di sektor pertanian; (d) Belum Optimalnya peran penyuluh pertanian dalam peningkatan kapasitas SDM pertanian dalam upaya pengembangan, pemberdayaan, dan penguatan kelembagaan petani serta pengembangan kapasitas petani dalam rangka meningkatkan daya saing petani;		
		8.	Terbatasnya/lemahnya petani dalam mengakses sumber-sumber permodalan dalam upaya mengembangkan usaha tani baik dalam proses produksi, pengolahan dan pemasaran produk-produk pertanian		
7	DINAS ESDM	1	Masih rendahnya tata kelola dan nilai tambah produk sumber daya mineral;		
		2	Belum tercapainya “Kemandirian Energi”		
		3	Belum maksimalnya pendataan dan		

NO	PERANGKAT DAERAH	ISU STRATEGIS RENSTRA PERANGKAT DAERAH		ISU STRATEGIS RPJMD TAHUN 2017-2022	
			penelitian potensi Geologi, Sumber Daya Mineral dan Air Tanah.		
8	DINAS PANGAN	1	Belum optimalnya pengawasan keamanan pangan.		
		2.	Masih lemahnya kemampuan produksi pangan lokal yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan di tingkat rumah tangga yang cukup, baik dalam jumlah maupun mutu dan gizinya, aman, merata, dan terjangkau		
		3.	Produksi bahan pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih jauh di bawah kebutuhan konsumsi masyarakat sehingga perlu mendatangkan dari daerah lain sehingga sewaktu-waktu bisa mengancam ketahanan pangan masyarakat Provinsi Kep. Babel		
		4.	Belum adanya perhatian serius yang menyangkut diversifikasi vertikal dan horizontal atas tanaman palawija yang sebenarnya dapat dikembangkan dengan baik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		
9	BAKUDA	1	Kurang optimalnya kualitas pelayanan publik;	1	Reformasi birokrasi dan pelayanan publik belum optimal
		2	Belum optimalnya penerimaan pendapatan daerah melalui PAD;	2	Isu Ekonomi
		3	Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah;	3	Isu Ekonomi
		4	Belum optimalnya pengelolaan asset daerah.	4	Isu Ekonomi
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1	Pengelolaan SDA seperti sumberdaya tambang, yang masih mengabaikan kelestarian lingkungan akan mengakibatkan penurunan daya dukung lingkungan dan penurunan kualitas-kuantitas SDA;		Degradasi kualitas lingkungan hidup
		2	Kurang berfungsinya aparatur penegak hukum dalam menindak permasalahan permasalahan lingkungan lingkungan dapat mengakibatkan makin maraknya kegiatan perusakan lingkungan hidup yang pada akhirnya dapat mengancam keberadaan SDA di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;		
		3	Masih rendahnya tingkat kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup;		
		4	Permasalahan banjir;		Degradasi kualitas lingkungan hidup
		5	Degradasi lingkungan sungai dan pantai akibat pertambangan;		Degradasi kualitas lingkungan hidup
		6	Belum optimalnya pengelolaan lahan kritis.		Degradasi kualitas lingkungan hidup
11	DINAS PERINDAG	1	Pengembangan agroindustri belum optimal guna meningkatkan nilai tambah dari komoditas unggulan		

NO	PERANGKAT DAERAH	ISU STRATEGIS RENSTRA PERANGKAT DAERAH		ISU STRATEGIS RPJMD TAHUN 2017-2022	
			kelautan dan perikanan, pertanian tanaman pangan dan perkebunan.		
		2	Menurunnya kinerja ekspor yang antara lain disebabkan biaya ekonomi tinggi; ketergantungan pada produk primer (nilai tambah rendah), masih besarnya ketergantungan pasar ekspor pada negara tertentu seperti Singapura; keragaman ekspor yang masih rendah; lemahnya sistem jaringan informasi pasar ekspor terutama dalam mendukung peningkatan daya saing ekspor.		
		3	Masih tingginya kontribusi sub kategori Industri Logam Dasar pada Kategori Lapangan Usaha Industri Pengolahan selama 5 (lima) tahun ke belakang, yang sampai saat ini belum dapat diimbangi oleh sub kategori lainnya.		
		4	Belum optimalnya pembentukan kawasan strategis industri/ sentra industri seperti yang tertuang pada Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034.		
		5	Masih tingginya ketergantungan bahan kebutuhan pokok dan barang strategis dari daerah lain di luar Bangka Belitung.		
		6	Daya saing produk IKM Bangka Belitung yang masih rendah.		
12	DP2TPM	1	Belum optimalnya penyediaan data konsep potensi dan peluang investasi yang siap ditawarkan		
		2	Perlunya rebranding investasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		
		3	Belum optimalnya pengembangan kebijakan yang menduk ung penanaman modal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		
		4	Perlunya dilakukan pemberdayaan usaha untuk meningkatkan fasilitasi kemitraan		
		5	Perlunya penguatan iklim usaha dan daya tarik penanaman modal daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		
		6	Masih kurangnya kerjasama promosi penanaman modal dan masih rendahnya minat investor untuk berinvestasi		
		7	Perlunya Peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparatur		
		8	Belum optimalnya pengembangan sistem informasi pelayanan perizinan berbasis teknologi informasi dan komunika		
13	DPMD	1	Tingkat pelayanan pemerintah desa terhadap publik belum optimal	1	Isu Ekonomi
		2	Tingkat kesejahteraan masyarakat desa masih rendah	2	Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang

NO	PERANGKAT DAERAH	ISU STRATEGIS RENSTRA PERANGKAT DAERAH		ISU STRATEGIS RPJMD TAHUN 2017-2022	
					masih rendah
		3	Tingkat pengelolaan dan pendayagunaan SDA serta TTG belum optimal	3	Tingkat pengangguran lebih tinggi dari laju pertumbuhan ekonomi
		4	Tingkat sarana dan prasarana fisik maupun non fisik di desa dan kawasan perdesaan yang belum memadai	4	Nilai tambah dan daya saing produk UKM yang masih rendah
7	STATISTIK	1	Belum optimalnya penyediaan dan pengelolaan data dan informasi yang akurat dan handal		
14	PUPR	1	Isu strategis yang tertuang didalam renstra PUPR dijabarkan perbidang sehingga terlalu banyak isunya	1	Belum optimalnya pengembangan Potensi Unggulan Daerah sektor Pariwisata, Perkebunan, Perikanan dan Pertambangan yang berkelanjutan
				2	Tingkat Investasi Rendah
				3	Tingginya Laju Pertumbuhan Penduduk
15	DISHUB	a	Meningkatkan pelayanan angkutan umum massal perkotaan	a	Konektivitas antar pulau sebagian besar sulit dijangkau
		b	Meningkatkan kinerja lalu lintas jalan perkotaan	b	Kesenjangan pembangunan infrastruktur antar wilayah masih tinggi
		c	Meningkatkan aplikasi teknologi informasi dan skema sistem manajemen transportasi perkotaan dengan indikator penerapan pengaturan persimpangan dengan menggunakan teknologi informasi (ATCS)	c	Potensi sumber daya di kawasan strategis belum terbangun dengan baik
		3	Pengembangan pembangunan infrastruktur perhubungan darat, laut dan udara serta moderinisasi moda transportasi untuk membuka akses antar pulau, antar provinsi dan negara termasuk mendukung peningkatan aksesibilitas ke destinasi pariwisata daerahnguatan konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi multimoda dan antarmoda untuk mengurangi backlog maupun bottleneck kapasitas prasarana transportasi dan sarana transportasi antarmoda dan antar pulau sesuai dengan sistem tronsportasi nasional dan cetak biru transportasi multimoda dimana salah satu fokus pembangunan pada pengembangan pelabuhan pendukung tol laut	3	Kualitas infrastruktur dan konektivitas masih terbatas
		4	Meningkatkan aplikasi teknologi informasi dan skema sistem manajemen transportasi perkotaan dengan indikator penerapan pengaturan persimpangan dengan menggunakan teknologi informasi (ATCS)	4	Keterbatasan infrastruktur komunikasi dan informatika
16	PERKIM		Bidang Cipta Karya dan Kawasan		Isu Kesehatan

NO	PERANGKAT DAERAH	ISU STRATEGIS RENSTRA PERANGKAT DAERAH		ISU STRATEGIS RPJMD TAHUN 2017-2022	
			Permukiman		
		1	Belum optimalnya penyediaan infrastruktur di kawasan strategis Provinsi.	1	Mutu pelayanan kesehatan masih terbatas
		2	Bidang Cipta Karya dan Kawasan Permukiman	2	Kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup sehat masih rendah
		3	Belum optimalnya penyediaan infrastruktur di kawasan strategis Provinsi.	3	Pengguna narkoba dan penderita HIV AIDS meningkat
		4	Belum optimalnya penyediaan infrastruktur di kawasan permukiman.	4	Isu Tata Kelola Pemerintahan dan Pembangunan Demokrasi
		5	Belum tersedianya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional yang berwawasan lingkungan.	5	Reformasi birokrasi dan pelayanan publik belum optimal
		6	Penanganan permukiman kumuh yang belum holistik menyebabkan kondisi kekumuhan tidak dapat diatasi bahkan cenderung mengalami peningkatan luasan.	6	Kondusivitas demokrasi belum stabil
			Bidang Perumahan Rakyat		Isu Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana
		1	Keterbatasan masyarakat miskin dalam rangka pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	1	Lingkungan hidup banyak yang rusak
		2	Belum tersedia dana murah jangka panjang untuk meningkatkan akses dan daya beli rumah bagi masyarakat berpenghasilan menengah kebawah terutama bagi masyarakat miskin dan berpenghasilan tidak tetap.	2	Rawan bencana
		3	Kerusakan lingkungan serta cuaca yang tidak menentu menyebabkan terjadinya bencana alam sehingga mengakibatkan kerusakan pada hunian penduduk.	3	Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang belum konsisten
17	BAPPEDA	1	Kualitas dokumen perencanaan yang dihasilkan belum cukup baik.		
		2	Belum optimalnya peran koordinasi, pembinaan dan pengendalian terhadap perencanaan dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Bappeda.		
		3	Belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah yang telah dikembangkan;		
		4	Tingkat keterisian data pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang masih rendah.		
		5	Masih rendahnya tingkat ketaatan PD dan Kab/Kota dalam menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan, pelaksanaan dan hasil dari perencanaan yang sudah dilakukan.		
		6	Belum termanfaatkan sepenuhnya hasil penelitian dan pengembangan (termasuk inovasi daerah) yang sudah dilakukan dapat digunakan sebagai suatu referensi dalam pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan		

NO	PERANGKAT DAERAH	ISU STRATEGIS RENSTRA PERANGKAT DAERAH		ISU STRATEGIS RPJMD TAHUN 2017-2022	
			daerah.		
18	TRANSMIGRASI	1	Pengembangan kawasan transmigrasi dan peningkatan penyediaan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di kawasan transmigrasi		
19	DISKOMINFO	1	Belum optimalnya pelayanan informasi dan komunikasi publik		
		2	Belum optimalnya penerapan e-Government di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		
		3			
20	BKPSDM	1	Peningkatan kompetensi ASN		Reformasi birokrasi dan pelayanan publik belum optimal
		2	Peningkatan kinerja ASN		Reformasi birokrasi dan pelayanan publik belum optimal
		3	Peningkatan displin ASN		Reformasi birokrasi dan pelayanan publik belum optimal
		4	Seleksi Promosi Jabatan secara terbuka		Reformasi birokrasi dan pelayanan publik belum optimal
21	INSPEKTORAT	1	Masih rendahnya akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan		Reformasi birokrasi dan pelayanan publik belum optimal
		2	Belum terintegrasinya perencanaan, pengangaran dan manajemen kinerja organisasi		Reformasi birokrasi dan pelayanan publik belum optimal
		3			
22	BADAN KESBANGPOL	1	Rendahnya pemehaman masyarakat terhadap penyalagunaan napza		Penggunaan narkoba dan penderita HIV ADIS meningkat
		2	Rendahnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai pancasila di masyarakat		Kondusivitas demokrasi belum stabil
		3	Kurangnya pemahaman dan pendidikan politik masyarakat		Kondusivitas demokrasi belum stabil
		4	Belum optimalnya peran dan fungsi lembaga demokrasi		Reformasi birokrasi dan pelayanan publik belum optimal
23	SEKRETARIAT DPRD	1	Belum optimalnya kompetensi sumber daya aparatur sekretariat DPRD yang sesuai dengan tupoksi nya.	1	Reformasi birokrasi dan pelayanan publik belum optimal
		2	Belum optimalnya Peraturan Daerah sesuai dengan Program Legislasi Daerah yang diusulkan.	2	Reformasi birokrasi dan pelayanan publik belum optimal
		3	Belum optimalnya tenaga Ahli dan Staf ahli bagi Anggota DPRD.	3	Reformasi birokrasi dan pelayanan publik belum optimal
24	DINAS SATPOL PP	1	Masyarakat Provinsi kepulauan Bangka Belitung belum sepenuhnya merasakan tentram, tertib, teratur dan aman serta terlindungi dalam menjalankan kegiatannya.	1	Kondusivitas demokrasi belum stabil
		2	Masih tingginya jumlah pelanggaran perda/perkada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.	2	Kondusivitas demokrasi belum stabil
		3	Belum semua satlinmas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendapatkan pelatihan dalam rangka membantu penyelenggaraan ketetiban umum dan ketentaman masyarakat, serta membantu penanganan bencana dan kebakaran.	3	Reformasi birokrasi dan pelayanan publik belum optimal

Tabel II.198

Identifikasi Permasalahan Pembangunan dari Kebijakan Nasional/Provinsi dan Lingkungan Eksternal Lainnya

No.	Isu Penting dan Permasalahan Mendesak		
	Tingkat Nasional	**Tingkat Provinsi**	**Lingkungan Eksternal lainnya**
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
	Partisipasi penduduk dlm pendidikan dan pelatihan keterampilan perlu terus ditingkatkan.	Tingginya angka anak putus sekolah (*Drop Out*) khususnya pendidikan menengah	Pengembangan Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan Kawasan Strategis Provinsi
	Perlu upaya sinergis dalam peningkatan kualitas pendidikan kejuruan.	Rendahnya rata-rata lama sekolah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Peningkatan Link and match antara dunia Pendidikan/ Pelatihan dengan dunia kerja
	Kompetensi guru masih harus ditingkatkan.	Kesempatan yang diberikan pemerintah setempat bagi guru untuk melanjutkan pendidikan formal masih kurang	Kebijakan otonomi Daerah
	Angka Kematian Ibu (AKI) Masih Tinggi	Masih tingginya angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian bayi	Peningkatan status kesehatan ibu, akses terhadap pelayanan kesehatan, dan perilaku penggunaan fasilitas pelayanan Kesehatan.
	Disparitas Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap Masih Lebar	Angka harapan hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibawah rata-rata nasional	Tingkat pendidikan orangtua dan Pendapatan keluarga
	Stunting pada Balita dan Anemia pada Ibu Hamil Masih Tinggi	Rendahnya kesadaran dan perilaku masyarakat terhadap aspek kesehatan lingkungan.	Kurangnya sinergitas lintas sektor
	Persyaratan pengajuan kredit kepemilikan rumah yang belum mengakomodir Masyarakat Berpenghasilan Rendah	Masih rendahnya kepemilikan rumah bagi masyarakat terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat miskin	
	Keterbatasan ketersediaan lahan untuk pembangunan perumahan, khususnya kelompok masyarakat berpenghasilan rendah	Penanganan kawasan kumuh yang belum terintegrasi antara sektoral serta pemerintah daerah kab/kota	
	Kapasitas & manajemen layanan air minum belum optimal	Masih rendahnya kinerja pelayanan air bersih dan Krisis air baku karena pencemaran yang cukup tinggi akibat aktivitas tambang timah rakyat	
	Kesadaran terhadap pentingnya sanitasi masih sangat rendah	Belum terintegrasi penyediaan air minum dan sanitasi dalam penyediaan pengembangan perumahan	
		Kondisi kemantapan menurun dengan meningkatnya Kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana alam & anomali cuaca	Dampak pemanasan Global (Global Warming)
	Kinerja sektor industri pengolahan dan ekspor mengalami penurunan	Belum optimalnya industri pengolahan berbasis sumber daya alam (karet lada sawit dll)	Meningkatkan ketahanan dan daya saing sektor keuangan dalam mendukung pembangunan/ pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
		Masih kurangnya kerjasama promosi penanaman modal serta rendahnya minat investor untuk berinvestasi	

No.	Isu Penting dan Permasalahan Mendesak		
	Tingkat Nasional	**Tingkat Provinsi**	**Lingkungan Eksternal lainnya**
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
	Masih rendahnya daya saing industri pengolahan yang didukung pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerja yang produktif dan kompeten	Tingginya ketergantungan daerah terhadap produk-produk dan bahan baku yang berasal dari luar daerah untuk kebutuhan konsumsi baik kamoditas pangan mau pun komoditas non pangan	Pengamanan produksi untuk kemandirian dan diversifikasi konsumsi pangan
		Lemahnya Pengembangan budaya inovatif yang berorientasi IPTEK dengan tetap mempertahankan nilai-nilai dan budaya leluhur serta kurangnya minat masyarakat terhadap IPTEK	
	Dibutuhkan penambahan kesempatan kerja > 2 juta dalam setahun	Kurangnya kualitas tenaga kerja, produktifitas tenaga kerja, kesempatan kerja, serta perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan.	Mencapai pertumbuhan yang tinggi dan mengutamakan penumbuhan usaha pemula di ekonomi kreatif
		Meningkatnya tingkat pengangguran di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
	Meningkatkan penyediakan subsidi operasi, memperluas area layanan, menambah trip perintis untuk Angkutan Laut, ASDP, Udara dan Kereta Api	Belum optimalnya Pengembangan transportasi laut dan udara yang murah dalam mendukung pengendalian inflasi dan pengembangan pariwisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
	Pembangunan sistem dan fasilitas angkutan umum massal yang modern, maju, aman, nyaman dan harga yang terjangkau.	Belum optimalnya penataan Transportasi darat termasuk angkutan umum perkotaan yang terjangkau dengan memperhati-kan tata ruang, fungsi, dan mutu lingkungan hidup, sehingga wilayah perkotaan dan sekitarnya makin berfungsi, baik sebagai kawasan permukiman maupun sebagai pusat-pusat produksi, jasa, dan perdagangan	
	Pengurangan desa tertinggal menjadi desa berkembang	Adanya desa berkategori desa tertinggal. hal ini terlihat dari data Indeks Pembangunan Desa (IPD) Tahun 2018 Desa tertinggal 1,29 % Desa Berkembang 88,67% Desa Mandiri 10,03 dari total desa berjumlah 309 desa	
		Masih terjadi Kesenjangan pembangunan sosial dan pembangunan antar wilayah	
	Masih kurangnya peran DPRD dalam mewakili aspirasi masyarakat	Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi masih berfluktuatif, pada tahun 2017 di 80,11 dan pada tahun 2018 pada 73,43	Terwujudnya Proses Positif Konsolidasi Demokrasi

No.	Isu Penting dan Permasalahan Mendesak		
	Tingkat Nasional	Tingkat Provinsi	Lingkungan Eksternal lainnya
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
		Reformasi birokrasi perlu ditingkatkan melalui peningkatan integritas, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik dengan mengoptimalkan kepedulian dan partisipasi masyarakat	

2.4 Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Pokok-pokok pikiran DPRD merupakan masukan yang disampaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait dengan permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh pada saat Paripurna Penyampaian Hasil Reses Anggota DPRD yang dilaksanakan oleh masing-masing Anggota DPRD sesuai dengan Daerah Pemilihannya. Selanjutnya hasil Reses ini akan dipilah berdasarkan Kabupaten/Kota, program dan kegiatan perangkat daerah penanggungjawab dan kewenangan dari program/kegiatan yang diusulkan.

Jumlah pokok pikiran yang dientri melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kementerian Dalam Negeri (SIPD Kemendagri) sebanyak 636 usulan kegiatan, 183 usulan kegiatan terverifikasi diakomodir, sedangkan 453 terverifikasi tidak diakomodir karena berbagai macam sebab yang dapat dilihat pada kolom keterangan. Pokok Pikiran DPRD tersebut 108 diantaranya merupakan kewenangan Kabupaten/Kota. Anggaran yang digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan dari keseluruhan pokir yang diakomodir tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp595.824.814.000,00. Secara lengkap pokok-pokok pikiran DPRD ini sebagaimana yang tersaji pada Tabel II.199 berikut:

Tabel II.199

Rumusan Usulan Program/Kegiatan Hasil Penelaahan Pokok-pokok Pikiran DPRD dan Validasi

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.	Isu/Bidang Urusan	Usulan	Permasalahan	Perangkat Daerah	Lokasi	Koefisien	Status		Keterangan
							Diakomodir	Tidak Diakomodir	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Kesehatan	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Bantuan BPJS Untuk Masyarakat Kurang Mampu	Dinas Kesehatan	Dusun Saber Kec. Bukit Ketok Kec. Belinyu, Kab. Bangka, Belinyu, Bukit Ketok	1 Kegiatan	√		Pemerintah provinsi telah menganggarkan kuota bagi masyarakat Provinsi Kep. Bangka Belitung yang terbagi dalam 7Kab/Kota. untuk masyarakat miskin dan tidak mampu yang belum mempunyai kartu JKN KIS apabila berobat di RS dalam wilayah provinsi dapat ditanggung oleh provinsi dalam 1x periode pengobatan dan selanjutnya atau mendaftarkan sebagai peserta JKN KIS
2	Kesehatan	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Masyarakat Desa Belo Laut Meminta Agar BPJS Digratiskan	Dinas Kesehatan	Desa Belo Laut Mentok, Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	1 Orang	√		Dapat digratiskan, dengan melihat skala prioritas. priotas masyarakat miskin tidak mampu. dan juga memperhatikan kuota yang diberikan kepada Kab/Kota (kuota dianggarkan berdasarkan kemampuan fiskal daerah. Begitupun dengan Kab/Kota
3	Kesehatan	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dicabutnya BPJS	Dinas Kesehatan	Kelurahan Lesung Batang, Kab. Belitung, Seluruh Kecamatan Dan Kelurahan/Desa	1 Masalah		√	Informasi tidak jelas. penyebab di non aktifkan kartu JKN KIS: (1) tunggakan (mandiri), (2) karena dikeluarkan dari PBI APBN atau APBD, (3) tidak ada NIK
4	Kesehatan	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Masyarakat Kurang Tau Proses Pengurusan BPJS	Dinas Kesehatan	Kelurahan Pall Satu, Kab. Belitung, Seluruh Kecamatan Dan Kelurahan/Desa	1 Satuan	√		Sosialisasi kepesertaan JKN KIS dilakukan oleh BPJS kesehatan
5	Kesehatan	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Adanya Standariasi Ataupun Kontrol Yang Lebih Baik Dalam Pelayanan BPJS Kesehatan Ditingkat Pertama Ataupun Rujukan	Dinas Kesehatan	Rumah Makan Bubur Sanghai, Kota Pangkal Pinang, Pangkal Balam, Rejo Sari	1 Kegiatan	√		Perlunya dilakukan koordinasi terkait kebijakan bpjs dalam pelayanan kesehatan

No.	Isu/Bidang Urusan	Usulan	Permasalahan	Perangkat Daerah	Lokasi	Koefisien	Status		Keterangan
							Diakomodir	Tidak Diakomodir	
6	Kesehatan	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Masyarakat Dusun Kamat Meminta Perhatian Pemerintah Terkait Masalah BPJS	Dinas Kesehatan	Dusun Kamat, Kab. Bangka Barat, Tempilang, Simpang Yul	1 Kegiatan	√		Perlunya dilakukan koordinasi terkait kebijakan bpjs dalam pelayanan kesehatan
7	Kesehatan	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Adanya Warga Jl. H.Usman Yang Meminta Bantuan Untuk Pengobatan Gratis Seperti Biaya Operasi Di Jakarta Dan Adakah Dana Untuk Pendamping Seperti Biaya Tiket Dan Biaya-Biaya Lainnya Dan Juga Bagaimana Prosedur Untuk Masuk Rumah Singgah	Dinas Kesehatan	Air Itam Pangkalpinang, Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	1 Kegiatan	√		Dinas kesehatan telah menganggarkan transportasi dan uang harian kepada satu orang pasien dan satu orang pendamping pasien rujukan dengan kriteria: masyarakat miskin tidak mampu, mempunyai kartu JKN KIS kelas 3. prosedurnya keluarga pasien harus mengajukan permohonan bantuan ke dinkes kab/kota
8	Kesehatan	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Masyarakat Desa Keranggan Meminta Agar Iuran BPJS Digratiskan	Dinas Kesehatan	Desa Keranggan, Kab. Bangka Barat, Seluruh Kecamatan Dan Kelurahan/Desa	1 Kegiatan	√		Dapat digratiskan, dengan melihat skala prioritas. priotas masyarakat miskin tidak mampu. dan juga memperhatikan kuota yang diberikan kepada kab/kota (kuota dianggarkan berdasarkan kemampuan fiskal daerah. begitupun dengan kab/kota)
9	Kesehatan	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penambahan Kuota BPJS Pemerintah Untuk Lansia Dan Tidak Mampu	Dinas Kesehatan	Kelurahan Bukit Ketok, Kab. Bangka, Belinyu, Bukit Ketok	1 Kegiatan	√		Tergantung kebijakan TAPD provinsi
10	Kesehatan	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Masyarakat Mengeluhkan Kurangnya Sosialisasi Dan Pelayanan Yang Optimal Dari Pihak BPJS Dan Apabila Kita Menunggak Pembayaran / Seumur Hidup Orang Itu Berhutang Kepada BPJS, Tunggakan BPJS Ini Sangat Memberatkan Warga Bagaimana Solusi Dari Pemerintah	Dinas Kesehatan	Gg. Salam Kacang Pedang, Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Kacang Pedang	1 Kegiatan	√		Perlu koordinasi dengan BPJS kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta JKN KIS. Terkait tunggakan tetap menjadi tanggungan dari peserta JKN KIS. Jika peserta JKN KIS tersebut merupakan masyarakat miskin tidak mampu maka dapat dialihkan ke PBI provinsi atau kab/kota dengan memuat pernyataan pelunasan tunggakan maksimal 6 bulan.

No.	Isu/Bidang Urusan	Usulan	Permasalahan	Perangkat Daerah	Lokasi	Koefisien	Status		Keterangan
							Diakomodir	Tidak Diakomodir	
11	Kesehatan	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Masyarakat Memohon Adanya Sosialisasi Dari Pihak BPJS Mengenai Pelayanan Bagi Pengguna BPJS	Dinas Kesehatan	Kelurahan Jerambah Gantung, Kota Pangkal Pinang, Gabek, Jerambah Gantung	1 Kegiatan	√		Sosialisasi kepesertaan JKN KIS dilakukan oleh BPJS kesehatan
12	Kesehatan	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Mohon Untuk Sosialisasi Dari Pemerintah Car Untuk Mendapatkan BPJS Yang Ditanggung Pemerintah Dan Biaya Sekolah Gratis Untuk Anak-Anak Yang Kurang Mampu	Dinas Kesehatan	Gpib Pangkalpinang, Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Batin Tikal	1 Kegiatan	√		Sosialisasi kepesertaan JKN KIS dilakukan oleh BPJS kesehatan
13	Kesehatan	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Masyarakat Mohon Untuk Sinkronisasi Antara BPJS, Rumah Sakit, Dan Jasa Raharja Terkait Penanganan Klaim Kecelakaan Kerja	Dinas Kesehatan	Jl Pikas 4 Air Salemba, Kota Pangkal Pinang, Gabek, Air Salemba	1 Kegiatan	√		Telah dilakukan sinkronisasi BPJS kesehatan dengan jasa raharja dan kepolisian terkait kecelakaan lalu lintas.
14	Kesehatan	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Adanya Pengawasan Dari Pemerintah Untuk Penerima BPJS Agar Tepat Sasaran	Dinas Kesehatan	Desa Batu Betumpang, Kab. Bangka Selatan, Pulaubesar, Batu Betumpang	1 Kegiatan		√	Dinas kesehatan tidak mempunyai dalam pengawasan penerima bantuan iuran kepada peserta JKN KIS. Tapi wewenang itu dilakukan oleh dinas sosial dalam penentuan sasaran PBI.
15	Kesehatan	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penambahan Kuota BPJS Yang Ditanggung Oleh Pemerintah Untuk Lansia Dan Keluarga Yang Tidak Mampu	Dinas Kesehatan	Lingkungan Sidodadi Kelurahan Srimenanti, Kab. Bangka, Sungailiat, Sri Menanti	1 Kegiatan	√		Tergantung kebijakan TAPD provinsi
16	Kesehatan	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penambahan Kuota BPJS Kesehatan Dari Pemerintah Untuk Lansia Dan Keluarga Tidak Mampu	Dinas Kesehatan	Desa Air Ruai, Kab. Bangka, Pemali, Air Ruai	1 Kegiatan	√		Tergantung kebijakan TAPD provinsi
17	Kesehatan	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Penerima BPJS Agar Tepat Sasaran	Dinas Kesehatan	Batu Betumpang, Kab. Bangka Selatan, Pulaubesar, Batu Betumpang	1 Kegiatan		√	Dinas kesehatan tidak mempunyai dalam pengawasan penerima bantuan iuran kepada peserta JKN KIS. Tapi wewenang itu dilakukan oleh dinas sosial dalam penentuan sasaran PBI.

No.	Isu/Bidang Urusan	Usulan	Permasalahan	Perangkat Daerah	Lokasi	Koefisien	Status		Keterangan
							Diakomodir	Tidak Diakomodir	
18	Kesehatan	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kenaikan Iuran BPJS Dan Pelayananannya	Dinas Kesehatan	Desa Nyuruk, Kab. Belitung Timur, Dendang, Nyuruk	1 Kegiatan		√	Wewenang pemerintah pusat
19	Kesehatan	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Megeluhkan Masalah BPJS Yang Akan Naik Dan Pelayananannya Yang Masih Belum Baik	Dinas Kesehatan	Desa Nyuruk, Kab. Belitung Timur, Dendang, Nyuruk	1 Kegiatan	√		Untuk kenaikan iuran kepesertaan JKN KIS merupakan wewenang pusat. terkait pelayanan pemerintah pusat telah menetapkan regulasi terhadap fkrtl dalam melakukan pelayanan (akreditasi, tarif pelayanan).
20	Kesehatan	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Masyarakat Desa Tanjung Niur Meminta Agar Dibuatkan Puskesmas/Puskesdes Di Tanjung Niur	Dinas Kesehatan	Desa Tanjung Niur, Kab. Bangka Barat, Seluruh Kecamatan Dan Kelurahan/Desa	1 Buah		√	Wewenang Kabupaten/Kota
21	Kesehatan	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Masyarakat Desa Tanjung Niur Meminta Agar Diadakan Kembali Program Jamkesda	Dinas Kesehatan	Desa Tanjung Niur, Kab. Bangka Barat, Tempilang, Tanjung Niur	1 Kegiatan		√	Wewenang Kabupaten/Kota
22	Kesehatan	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Mengharapkan Adanya Dokter Di Puskesmas Kecamatan Pulau Besar	Dinas Kesehatan	Smkn 1 Pulau Besar, Kab. Bangka Selatan, Pulaubesar, Panca Tunggal	1 Kegiatan		√	Wewenang Kabupaten/Kota
23	Kesehatan	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Agar Adanya Pengadaan Mobil Operasional Puskesmas Dan Juga Biaya Untuk Operasionalnya	Dinas Kesehatan	Smkn 1 Pulau Besar, Kab. Bangka Selatan, Pulaubesar, Panca Tunggal	1 Satuan		√	Wewenang Kabupaten/Kota
24	Kesehatan	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Bantuan Mobil Ambulance	Dinas Kesehatan	Desa Kota Waringin, Kab. Bangka, Puding Besar, Kota Waringin	1 Unit		√	Wewenang Kabupaten/Kota

No.	Isu/Bidang Urusan	Usulan	Permasalahan	Perangkat Daerah	Lokasi	Koefisien	Status		Keterangan
							Diakomodir	Tidak Diakomodir	
25	Kesehatan	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Bantuan Mobil Ambulance	Dinas Kesehatan	Desa Kace, Kab. Bangka, Mendo Barat, Kace	1 Unit		√	Wewenang Kabupaten/Kota
26	Kesehatan	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Agar Puskesmas Dialih Fungsikan Dari Rawat Jalan Menjadi Rawat Inap	Dinas Kesehatan	Smkn 1Pulau Besar, Kab. Bangka Selatan, Pulaubesar, Pulaubesar, Seluruh Kelurahan/Desa	1 Kegiatan		√	Wewenang Kabupaten/Kota
27	Kesehatan	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Masyarakat Mengharapkan Renovasi Posyandu Di Kelurahan Kacang Pedang Dan Mohon Bantuan Seperti Timbangan Bayi, Timbangan Badan Dan Meja Untuk Kesejahteraan Masyarakat Sekitar	Dinas Kesehatan	Gg. Salam Kacang Pedang, Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Kacang Pedang	1 Kegiatan		√	Wewenang Kabupaten/Kota
28	Kesehatan	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Mohon Untuk Pihak Rumah Sakit Atau Puskesmas Untuk Mengadakan Sosialisasi Ke Gereja-Gereja Tentang Pentingnya Imunisasai Sebelum Menikah	Dinas Kesehatan	Hotel Pia Pangkalpinang, Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Batin Tikal	1 Kegiatan		√	Wewenang Kabupaten/Kota
29	Kesehatan	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Usulan Fasilitas Rawat Inap Untuk Puskesmas Pongok	Dinas Kesehatan	Pongok, Kab. Bangka Selatan, Lepar Pongok, Tanjunglabu	1 Kegiatan		√	Wewenang Kabupaten/Kota
30	Kesehatan	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Supaya Adanya Dokter Di Puskesmas Kec. Pulau Besar	Dinas Kesehatan	Smkn 1 Pulau Besar, Kab. Bangka Selatan, Pulaubesar, Pulaubesar, Seluruh Kelurahan/Desa	1 Kegiatan		√	Wewenang Kabupaten/Kota

No.	Isu/Bidang Urusan	Usulan	Permasalahan	Perangkat Daerah	Lokasi	Koefisien	Status		Keterangan
							Diakomodir	Tidak Diakomodir	
31	Kesehatan	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Meminta Adanya Pengadaan Mobil Operasional Puskesmas Untuk Di Lapangan Dan Juga Biaya Untuk Operasionalnya	Dinas Kesehatan	Smkn1 Pulau Besar, Kab. Bangka Selatan, Pulaubesar, Pulaubesar, Seluruh Kelurahan/Desa	1 Kegiatan		√	Wewenang Kabupaten/Kota
32	Kesehatan	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Supaya Puskesmas Dialih Fungsikan Dari Rawat Jalan Menjadi Rawat Inap	Dinas Kesehatan	Pulau Besar, Kab. Bangka Selatan, Pulaubesar, Batu Betumpang	1 Kegiatan		√	Wewenang Kabupaten/Kota
33	Kesehatan	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Bantuan Mobil Ambulance Desa	Dinas Kesehatan	Desa Puding Besar, Kab. Bangka, Puding Besar, Puding Besar	1 Kegiatan		√	Wewenang Kabupaten/Kota
34	Kesehatan	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Puskesmas Simpang Rusa Mengajukan Permohonan Penambahan Fasilitas Rawat Inap/UGD 24 Jam Dan Peralatan Untuk Persalinan. Dan Untuk Pembukaan UGD 24 Jam Puskesmas Mengharapkan Penambahan Dokter Jaga Dan Perawat	Dinas Kesehatan	Desa Simpang Rusa, Kab. Belitung, Membalong, Simpang Rusa	1 Kegiatan		√	Wewenang Kabupaten/Kota
35	Kesehatan	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Masyarakat Meminta Pemerinrah Daerah Melakukan Perbaikan Posyandu Yang Ada Di Kelurahan Pangkal Lalang	Dinas Kesehatan	Kelurahan Pangkalllalang, Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	1 Kegiatan		√	Wewenang Kabupaten/Kota
36	Kesehatan	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Meminta Adanya Fogging Di SMAN 1 Tanjungpandan	Dinas Kesehatan	Sman 1 Tanjungpandan, Kab. Belitung, Seluruh Kecamatan Dan Kelurahan/Desa	1 Kegiatan		√	Wewenang Kabupaten/Kota
37	Energi dan Sumber Daya Mineral	Pengelolaan Ketenagalistrikan	Masalah Penerangan Lampu Jalan	Dinas Perhubungan	Desa Rias, Kab. Bangka Selatan, Toboali, Rias	1 Kegiatan		√	Belum Menjadi Prioritas

No.	Isu/Bidang Urusan	Usulan	Permasalahan	Perangkat Daerah	Lokasi	Koefisien	Status		Keterangan
							Diakomodir	Tidak Diakomodir	
38	Energi dan Sumber Daya Mineral	Pengelolaan Ketenagalistrikan	Supaya Dipasang Lampu Penerangan Jalan Di Kecamatan Pulau Besar	Dinas Perhubungan	Smkn 1 Pulau Besar, Kab. Bangka Selatan, Pulaubesar, Panca Tunggal	1 Kegiatan		√	Belum Menjadi Prioritas
39	Energi dan Sumber Daya Mineral	Pengelolaan Ketenagalistrikan	Masalah Penerangan Lampu Jalan Didesa Rias Dan Untuk Dilakukan Pengaspalan Jalan	Dinas Perhubungan	Desa Rias, Kab. Bangka Selatan, Toboali, Rias	1 Kegiatan		√	Belum Menjadi Prioritas
40	Energi dan Sumber Daya Mineral	Pengelolaan Ketenagalistrikan	Masyarakat Di Kecamatan Girimaya Mengusulkan Untuk Tiang Listrik Beton Sebab Yang Selama Ini Kabel Listriknya Nyangkut Dipohon Kelapa	Dinas Perhubungan	Kecamatan Girimaya Kota Pangkal Pinang, Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitintan	1 Kegiatan		√	Bukan kwenangan Dishub. Untuk pengadaan tiang listrik merupakan kewenangan PLN.
41	Energi dan Sumber Daya Mineral	Pengelolaan Ketenagalistrikan	Supaya Dipasang Lampu Penerangan Jalan Di Kec.Pulau Besar	Dinas Perhubungan	Smkn 1 Pulau Besar, Kab. Bangka Selatan, Pulaubesar, Pulaubesar, Seluruh Kelurahan/Desa	1 Kegiatan		√	Belum Menjadi Prioritas
42	Energi dan Sumber Daya Mineral	Pengelolaan Ketenagalistrikan	Bantuan Lampu Penerangan Jalan	Dinas Perhubungan	Desa Air Ruai, Kab. Bangka, Pemali, Air Ruai	1 Kegiatan		√	Kewenangan Kabupaten
43	Energi dan Sumber Daya Mineral	Pengelolaan Aspek Kegeologian	Masyarakat Mengeluh Adanya Ketidakadilan Dari Penegak Hukum Mengenai Penambangan Timah Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Kecil Dan Oleh Perusahaan Besar Karena Penambangan Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Kecil Sering Dirazia Dan Ditahan Sedangkan Penambangan Yang Dilakukan Perusahaan Besar Dibiarkan Saja	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Desa Juru Seberang, Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Juru Seberang	1 Kegiatan		√	Merupakan kewenangan aparat penegak hukum

No.	Isu/Bidang Urusan	Usulan	Permasalahan	Perangkat Daerah	Lokasi	Koefisien	Status		Keterangan
							Diakomodir	Tidak Diakomodir	
44	Energi dan Sumber Daya Mineral	Pengelolaan Ketenagalistrikan	Kendala Pada Listrik Di Pantai Yang Kurang Daya Agar Diusulkan Ke Pln Untuk Penambahan Daya	Dinas Perhubungan	Desa Tanjung Kelumpang, Kab. Belitung Timur, Simpang Pesak, Tanjung Kelumpang	1 Kegiatan		√	Kawasan Pantai Bukan Kewenangan Dishub
45	Energi dan Sumber Daya Mineral	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Permohonan Sumber Air Bersih / Sumur Bor Di RT 06, Sedangkan Untuk Lahannya Sudah Dihibahkan Masyarakat Setempat Dan Di Mesjid Baitul Hikmah Kacang Pedang Yang Selalu Kekeringan.	Dinas Pekerjaan Umum	Kacang Pedang, Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Kacang Pedang	1 Kegiatan		√	Sumur bor tidak dianggarkan di APBD. Tetapi untuk usulan tersebut, sudah diakomodir oleh Badan Geologi Pusat
46	Energi dan Sumber Daya Mineral	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Masyarakat Meminta Penerangan Di Pinggir Pantai	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Desa Tanjung Kelumpang, Kab. Belitung Timur, Seluruh Kecamatan Dan Kelurahan/Desa	1 Kegiatan		√	Wewenang Kabupaten/Kota
47	Energi dan Sumber Daya Mineral	Pengelolaan Izin Lokasi	Masyarakat Yang Mempunyai Lahan Pribadi Dan Mempunyai Kandungan Mineral Tambang Harus Dapat Berperan Dalam Pertambangan Karena Langsung Dapat Meningkatkan Taraf Hidup Mereka Dan Memanfaatkan Iup Yang Ada, Tetapi Harus Ada Pihak Diantara Masyarakat Dengan Pemilik IUP Agar Pertambangan Tersebut Sesuai Dengan Perundangan Yang Ada.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Rumah Makan Bubur Shanghai, Kota Pangkal Pinang, Pangkal Balam, Rejo Sari	1 Kegiatan		√	Wilayah Lokasi tersebut tidak bisa dilakukan penambangan. Belum ada rekomendasi dari kab/kota juga area DAS. Tidak bisa dilakukan oleh individu, karena belum ada regulasinya
48	Energi dan Sumber Daya Mineral	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Bantuan Penerangan Lampu Jalan	Dinas Perhubungan	Dusun Saber Kel. Bukit Ketok Kec. Belinyu, Kab. Bangka, Belinyu, Bukit Ketok	1 Kegiatan		√	Kewenangan Kabupaten
49	Energi dan Sumber Daya Mineral	Pengembangan Permukiman	Bantuan Pembangunan Sumur Bor	Dinas Pekerjaan Umum	Desa Bakam, Kab. Bangka, Bakam, Bakam	1 Kegiatan		√	Sumur bor tidak dianggarkan di APBD. Tetapi untuk usulan tersebut, sudah diakomodir oleh Badan Geologi Pusat

No.	Isu/Bidang Urusan	Usulan	Permasalahan	Perangkat Daerah	Lokasi	Koefisien	Status		Keterangan
							Diakomodir	Tidak Diakomodir	
50	Energi dan Sumber Daya Mineral	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Bantuan Sumur Bor Untuk Air Bersih	Dinas Pekerjaan Umum	Desa Sempan, Kab. Bangka, Pemali, Sempan	1 Kegiatan		√	Kewenangan Kabupaten
51	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Penanggulangan Bencana	Perlunya Koordinasi Terpadu Antara Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota Dalam Penanggulangan Banjir Terutama Kota Pangkalpinang Sebagai Ibu Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rumah Makan Pawon Pangkal Pinang, Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Gedung Nasional	1 Kegiatan		√	Kewenangan Kabupaten/Kota
52	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Penanggulangan Bencana	Permohonan Pembangunan Kolam Retensi Dan Selokan Air Di Seputaran SMP Muhammadiyah Untuk Mengurangi Dampak Banjir Di Seputaran Bukit Sari, Kejaksaan Dan Batin Tikal, Rawa Bangun	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kacang Pedang, Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Kacang Pedang	1 Kegiatan		√	Kewenangan Kabupaten/Kota
53	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Penanggulangan Bencana	Masyarakat Di RW O4 Belakang GOR Mengharapkan Penanggulangan Banjir Di Daerah Tersebut	Dinas Sosial	Gg.Salam Kacang Pedang, Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Kacang Pedang	1 Kegiatan		√	Keterbatasan Pagu Anggaran
54	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Penanggulangan Bencana	Usulan Masyarakat Air Kepala Tujuh Untuk Penanganan Banjir Didaerah Tersebut Yang Apabila Hujan Sebentar Saja Sering Terjadi Banjir	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Air Kepala Tujuh Kota Pangkal Pinang, Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Air Kepala Tujuh	1 Kegiatan		√	Kewenangan Kabupaten/Kota
55	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Penanggulangan Bencana	Masyarakat Mengharapkan Penanggulangan Banjir Didaerah Kelurahan Pintu Air Yang Apabila Hujan Deras Selalu Menyebabkan Banjir Didaerah Tersebut	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kelurahan Pintu Air, Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Pintu Air	1 Kegiatan		√	Kewenangan Kabupaten/Kota
56	Pariwisata	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Perhatian Pemerintah Terhadap Pariwisata Yang Ada Di Desa	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Desa Bukit Layang, Kab. Bangka, Bakam, Bukit Layang	1 Kegiatan	√		

No.	Isu/Bidang Urusan	Usulan	Permasalahan	Perangkat Daerah	Lokasi	Koefisien	Status		Keterangan
							Diakomodir	Tidak Diakomodir	
57	Pariwisata	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Diharapkan Pemerintah Adanya Pemerintah Supaya Adanya Stimulus Dan Perhatian Khusus Terutama Perusahaan Media Yang Konsisten Dalam Pengembangan Pariwisata Dan Periwisata Dan Pendidikan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Rumah Makan Pawon, Kota Pangkal Pinang, Seluruh Kecamatan Dan Kelurahan/Desa	1 Kegiatan		√	1) belum adanya proposal pengajuan sebagai salah satu syarat dalam pengajuan pembangunaan dan pengembangan daya tarik wisata berdasarkan Pergub No. 23 tahun 2019 tentang tata cara pengelolaan hibah dan bansos. 2) status lahan di daya tarik wisata (DTW) harus clear n clean (C.N.C) yang dijelaskan dengan sertifikat dibawah kepemilikan pemerintah desa atau dikelola langsung oleh pokdarwis desa tersebut. 3) adanya pengelola di daya tarik wisata (DTW) yang akan dikembangkan seperti : 1. Pokdarwis 2. HKN 3. desa wisata. 4) pengajuan DTW tersebut harus sesuai dengan Riparprov dan Riparda Kab/Kota.
58	Pariwisata	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Bantuan Meningkatkan Pariwisata Pertanian	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Desa Banyu Asin, Kab. Bangka, Riau Silip, Banyu Asin	1 Kegiatan		√	1) belum adanya proposal pengajuan sebagai salah satu syarat dalam pengajuan pembangunaan dan pengembangan daya tarik wisata berdasarkan Pergub No. 23 tahun 2019 tentang tata cara pengelolaan hibah dan bansos. 2) status lahan di daya tarik wisata (DTW) harus clear n clean (C.N.C) yang dijelaskan dengan sertifikat dibawah kepemilikan pemerintah desa atau dikelola langsung oleh pokdarwis desa tersebut. 3) adanya pengelola di daya tarik wisata (DTW) yang akan dikembangkan seperti : 1. Pokdarwis 2. HKN 3. desa wisata. 4) pengajuan DTW tersebut harus sesuai dengan Riparprov dan Riparda

No.	Isu/Bidang Urusan	Usulan	Permasalahan	Perangkat Daerah	Lokasi	Koefisien	Status		Keterangan
							Diakomodir	Tidak Diakomodir	
59	Pariwisata	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata	Masyarakat Mengharapkan Bantuan Untuk Mengembangkan Pariwisata Di Desa Badau.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Desa Badau, Kab. Belitung, Badau, Badau	1 Kegiatan		√	- perlu didahului dengan idenfikasi kebutuhan - akan diusulkan dalam bentuk kegiatan pelatihan kompetensi tahun 2022
60	Pariwisata	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Adanya Bantuan Untuk Menunjang Pariwisata Di Pantai Desa Batu Betumpang	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Desa Batu Betumpang, Kab. Bangka Selatan, Pulaubesar, Batu Betumpang	1 Kegiatan		√	1) belum adanya proposal pengajuan sebagai salah satu syarat dalam pengajuan pembangunaan dan pengembangan daya tarik wisata berdasarkan Pergub No. 23 tahun 2019 tentang tata cara pengelolaan hibah dan bansos. 2) status lahan di daya tarik wisata (DTW) harus clear n clean (C.N.C) yang dijelaskan dengan sertifikat dibawah kepemilikan pemerintah desa atau dikelola langsung oleh pokdarwis desa tersebut. 3) adanya pengelola di daya tarik wisata (DTW) yang akan dikembangkan seperti : 1. Pokdarwis 2. HKN 3. desa wisata. 4) pengajuan DTW tersebut harus sesuai dengan Riparprov dan Riparda
61	Pariwisata	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Masuarakat Menunggu Kegiatan Yang Direncanakan Dan Dilakukan Mengenai Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Desa Tanjung Kelumpang, Kab. Belitung Timur, Dendang, Dendang, Seluruh Kelurahan/Desa	1 Kegiatan	√		
62	Pariwisata	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata	Masyarakat Meminta Agar Di Desa Tanjung Kelumpang Diberikan Edukasi Terkait Dengan Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Desa Tanjung Kelumpang, Kab. Belitung Timur, Seluruh Kecamatan Dan Kelurahan/Desa	1 Kegiatan	√		

No.	Isu/Bidang Urusan	Usulan	Permasalahan	Perangkat Daerah	Lokasi	Koefisien	Status		Keterangan
							Diakomodir	Tidak Diakomodir	
63	Pariwisata	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Bantuan Menunjang Pariwisata Pantai Batu Betumpang	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Batu Betumpang, Kab. Bangka Selatan, Pulaubesar, Batu Betumpang	1 Kegiatan		√	1) belum adanya proposal pengajuan sebagai salah satu syarat dalam pengajuan pembangunaan dan pengembangan daya tarik wisata berdasarkan Pergub No. 23 tahun 2019 tentang tata cara pengelolaan hibah dan bansos. 2) status lahan di daya tarik wisata (DTW) harus clear n clean (C.N.C) yang dijelaskan dengan sertifikat dibawah kepemilikan pemerintah desa atau dikelola langsung oleh pokdarwis desa tersebut. 3) adanya pengelola di daya tarik wisata (DTW) yang akan dikembangkan seperti : 1. Pokdarwis 2. HKN 3. desa wisata. 4) pengajuan DTW tersebut harus sesuai dengan Riparprov dan Riparda kab/kota.
64	Pariwisata	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata	Masyarakat Mengharapkan Reklamasi Lahan Agar Bisa Dikembangkan Menjadi Kawasan Pariwisata Dan Pada Tahun 2017 BPD Sudah Membuat MOU Dan Sepakat Dalam Kurun 4 Tahun Untuk Reklamasi	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Desa Simpang Rusa, Kab. Belitung, Membalong, Simpang Rusa	1 Kegiatan		√	Reklamasi lahan tidak termasuk dalam ranah tugas dan fungsi
65	Pariwisata	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata	Masyarakat Meminta Diberikan Edukasi Terkait Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Desa Tanjung Kelumpang, Kab. Belitung Timur, Seluruh Kecamatan Dan Kelurahan/Desa	1 Kegiatan	√		

No.	Isu/Bidang Urusan	Usulan	Permasalahan	Perangkat Daerah	Lokasi	Koefisien	Status		Keterangan
							Diakomodir	Tidak Diakomodir	
66	Pariwisata	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Membutuhkan Homestay Di Desa Tanjung Kelumpang	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Desa Tanjung Kelumpang, Kab. Belitung Timur, Seluruh Kecamatan Dan Kelurahan/Desa	1 Kegiatan		√	Akan dikoordinasikan dengan OPD terkiat (perkim)
67	Pariwisata	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pelebaran Jalan Akses Masuk Ke Pantai Punai Karena Yang Sekarang Terlalu Sempit	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Desa Tanjung Kelumpang, Kab. Belitung Timur, Simpang Pesak, Tanjung Kelumpang	1 Kegiatan		√	1) belum adanya proposal pengajuan sebagai salah satu syarat dalam pengajuan pembangunaan dan pengembangan daya tarik wisata berdasarkan Pergub No. 23 tahun 2019 tentang tata cara pengelolaan hibah dan bansos. 2) status lahan di daya tarik wisata (DTW) harus clear n clean (C.N.C) yang dijelaskan dengan sertifikat dibawah kepemilikan pemerintah desa atau dikelola langsung oleh pokdarwis desa tersebut. 3) adanya pengelola di daya tarik wisata (DTW) yang akan dikembangkan seperti : 1. Pokdarwis 2. HKN 3. desa wisata. 4) pengajuan DTW tersebut harus sesuai dengan Riparprov dan Riparda 5) khusus untuk pelebaran akses masuk ke DTW Pantai Punai Belitung Timur menjadi kewenangan dinas PUPR
68	Pariwisata	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata	Membutuhkan Homestay Di Desa Tanjung Kelumpang	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Desa Tanjung Kelumpang, Kab. Belitung Timur, Seluruh Kecamatan Dan Kelurahan/Desa	1 Kegiatan		√	Pembentukan home stay diinisiasi oleh masyarakat setempat dan provinsi dapat memfasilitasi dalam bentuk kegiatan pelatihan pengelolaan home stay dan diusulkan untuk tahun 2022

No.	Isu/Bidang Urusan	Usulan	Permasalahan	Perangkat Daerah	Lokasi	Koefisien	Status		Keterangan
							Diakomodir	Tidak Diakomodir	
69	Pariwisata	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata	Mengusulkan Agar Dibuat Perda Tentang Regulasi Yang Mengatur Kebudayaan Lokal Juga Aturan Untuk Turis Asing Yang Berkunjung Kebelitung Terutama Terkait Busana Dan Perilaku Karena Hal Ini Berpengaruh Pada Perkembangan Masyarakat	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Sman 1 Tanjung Pandan, Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	1 Kegiatan	√		
70	Pariwisata	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata	Regulasi Yang Jelas Untuk Mengatur Kawasan Wisata Tanjung Kelumpang Banyak Investor Yang Masuk Tapi Terhambat Dengan Regulasi	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Desa Tanjung Kelumpang, Kab. Belitung Timur, Simpang Pesak, Tanjung Kelumpang	1 Kegiatan	√		
71	Pariwisata	Pemasaran Pariwisata	Masyarakat Desa Sinar Surya Meminta Untuk Diberikan Bantuan Dana Untuk Acara Keagamaan Dan Seni Budaya	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Usulan Masyarakat Desa Sinar Surya, Kab. Bangka Barat, Tempilang, Sinar Surya	1 Kegiatan	√		Seni budaya merupakan fokus dukungan/partisipasi.
72	Pariwisata	Pemasaran Pariwisata	Memperkuat Regulasi Terkait Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Desa Tanjung Kelumpang, Kab. Belitung Timur, Seluruh Kecamatan Dan Kelurahan/Desa	1 Kegiatan		√	Kerena berdasarkan Ripparprov merupakan kewenangan kabupaten
73	Kehutanan	DAS	Masyarakat Desa Benteng Kota Meminta Agar Dibuatkan Lampu Penerangan Dan Penataan DAS Dengan Semen Agar Lebih Permanen	Dinas Perhubungan	Desa Benteng Kota Muntok, Kab. Bangka Barat, Tempilang, Benteng Kota	1 Kegiatan		√	Kewenangan Kabupaten
74	Kehutanan	DAS	Masyarakat Jalan Delima Siam II Kecamatan Girimaya Mengharapkan Pembangunan Talud	Dinas Kehutanan	Girimaya Kota Pangkal Pinang, Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitintan	1 Kegiatan		v	Pagu anggaran 2021 saat ini sudah habis
75	Kehutanan	DAS	Permohonan Masyarakat Untuk Normalisasi Dan Naturalisasi Saluran-Saluran Air Yang Berhubungan Dengan Sungai	Dinas Kehutanan	Air Kepala Tujuh Kota Pangkalpinang, Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Air Kepala Tujuh	1 Kegiatan		v	Secara khusus untuk menjadi sub kegiatan belum diakomodir karena membutuhkan perencanaan tetapi sementara dapat dimasukkan dalam kegiatan pemeliharaan rutin.

No.	Isu/Bidang Urusan	Usulan	Permasalahan	Perangkat Daerah	Lokasi	Koefisien	Status		Keterangan
							Diakomodir	Tidak Diakomodir	
76	Kehutanan	Pengelolaan Hutan	Masyarakat Desa Cendil Meminta Penyelesaian Permasalahan HTI PT. AKP	Dinas Kehutanan	Desa Cendil, Kab. Belitung Timur, Kelapa Kampit, Cendil	1 Kegiatan	√		
77	Kehutanan	Pengelolaan Hutan	Bantuan Penyelesaian Hutan Produksi Yang Beralih Hutan Tanam Industri	Dinas Kehutanan	Desa Penagan, Kab. Bangka, Mendo Barat, Penagan	1 Kegiatan	√		
78	Kehutanan	Pengelolaan Hutan	Masyarakat Dusun Air Serkuk Meminta Pembebasan Lahan Hutan Produksi Dikarenakan Pertumbuhan Penduduk Di Dusun Tersebut Sudah Semakin Meningkat Dan Padat	Dinas Kehutanan	Desa Air Saga, Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Air Saga	1 Kegiatan		√	Kewenangan mengubah status kawasan hutan dilaksanakan oleh kementerian kehutanan
79	Kehutanan	Pengelolaan Hutan	Masyarakat Mengharapkan Pembebasan Hutan Lindung Agar Dikarenakan Sudah Padatnya Pertumbuhan Penduduk Di Desa Tersebut, Agar Desa Lebih Luas Dan Lebih Berkembang	Dinas Kehutanan	Desa Sungai Samak, Kab. Belitung, Badau, Sungai Samak	1 Kegiatan		√	Kewenangan mengubah status kawasan hutan dilaksanakan oleh kementerian kehutanan
80	Kehutanan	DAS	Masyarakat Sungai Samak Mengharapkan Normalisasi Sungai Kerucut Yang Sedimennya Sudah Lebih Kurang 4 Meter	Dinas Kehutanan	Desa Sungai Samak, Kab. Belitung, Badau, Sungai Samak	1 Kegiatan		√	Sudah diakomodir di tahun 2020, saat proses tender, tetapi gagal lelang. rencana akan dilakukan tender ulang
81	Kehutanan	Pengelolaan Hutan	Masyarakat Meminta Adanya Pembebasan Hutan Lindung Menjadi Hutan Produksi	Dinas Kehutanan	Desa Juru Seberang, Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Juru Seberang	1 Kegiatan	√		Pemanfaatan kawasan hutan lindung dapat dilaksanakan melalui skema perhutanan sosial, tanpa mengubah status menjadi hutan produksi
82	Kehutanan	Pengelolaan Hutan	Masyarakat Meminta Pemerintah Melakukan Penataan Hutan Yang Ada Di Desa Juru Seberang	Dinas Kehutanan	Desa Juru Seberang, Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Juru Seberang	1 Kegiatan	√		Pemanfaatan kawasan hutan lindung dapat dilaksanakan melalui skema perhutanan sosial, tanpa mengubah status menjadi hutan produksi
83	Kehutanan	Pengelolaan Hutan	Masyarakat Dusun Kampung Baru Menolak Pengolahan Hutan Bakau Dari Luar Desa Dikarenakan Masyrakat Takut	Dinas Kehutanan	Desa Simpang Rusa, Kab. Belitung, Membalong, Simpang Rusa	1 Kegiatan	√		Hutan mangrove memiliki nilai ekosistem penting, dapat dikelola dengan tanpa mengubah fungsi utamanya.

No.	Isu/Bidang Urusan	Usulan	Permasalahan	Perangkat Daerah	Lokasi	Koefisien	Status		Keterangan
							Diakomodir	Tidak Diakomodir	
			Apabila Hutan Bakau Tersebut Justru Digunakan Untuk Lokasi Tambang						
84	Kehutanan	Pengelolaan Hutan	Masyarakat Meminta Pemerintah Untuk Melakukan Penataan Hutan Di Desa Sijuk	Dinas Kehutanan	Desa Sijuk, Kab. Belitung, Sijuk, Sijuk	1 Kegiatan	√		Pemanfaatan kawasan hutan lindung dapat dilaksanakan melalui skema perhutanan sosial, tanpa mengubah status menjadi hutan produksi
85	Kehutanan	Pengelolaan Hutan	Masyarakat Meminta Pemerintah Untuk Melakukan Penertiban Penambanagn Illegal	Dinas Kehutanan	Desa Sijuk, Kab. Belitung, Sijuk, Sijuk, Seluruh Kelurahan/Desa	1 Kegiatan	√		
86	Kehutanan	Pengelolaan Hutan	Masyarakat Mengharapkan Kepada Pemerintah Melakukan Pnataan Hutan Yang Ada Didesa Juru Sebrang Ini Dikarenakan Banyak Fasilitas Umum Dan Fasilitas Kelompok Masyarakat Yang Berada Dikawasan Hutan	Dinas Kehutanan	Desa Juru Seberang, Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Juru Seberang	1 Kegiatan		√	Pemanfaatan kawasan hutan lindung dapat dilaksanakan melalui skema perhutanan sosial, tanpa mengubah status menjadi hutan produksi. memanfaatkan dapat dilaksanakan tanpa memiliki.
87	Kehutanan	Pengelolaan Hutan	Masyarakat Dusun Batu Mana Mengharapakan Agara Hutan Lindung Terjaga Dari Aktifitas Pertambangan	Dinas Kehutanan	Dusun Batu Mana, Kab. Belitung, Membalong, Lassar	1 Kegiatan	√		
88	Kehutanan	Pengelolaan Izin Lokasi	Usulan Dari Masyarakat Desa Puput Agar Izin Hutan Tanaman Industri Dihapuskan Dari Wilayah Parittiga	Dinas Kehutanan	Desa Puput Mentok, Kab. Bangka Barat, Parittiga, Puput	1 Wilayah	√		
89	Kelautan dan Perikanan	Pengelolaan Perikanan Tangkap	Usulan Masyarakat Desa Keranggan Agar Diberikan Bantuan Alat Tangkap Nelayan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Desa Keranggan, Kab. Bangka Barat, Seluruh Kecamatan Dan Kelurahan/Desa	1 Buah	√		
90	Kelautan dan Perikanan	Pengelolaan Perikanan Tangkap	Bantuan Alat Tangkap Nelayan Dan Alat Pendeteksi Karang Di Desa Tanjunglabu Kec. Lepat Pongok	Dinas Kelautan dan Perikanan	Tanjunglabu, Kab. Bangka Selatan, Lepar Pongok, Tanjunglabu	1 Kegiatan	√		Alat navigasi belum dianggarkan di tahun 2021

No.	Isu/Bidang Urusan	Usulan	Permasalahan	Perangkat Daerah	Lokasi	Koefisien	Status		Keterangan
							Diakomodir	Tidak Diakomodir	
91	Kelautan dan Perikanan	Pengelolaan Perikanan Tangkap	Tindak Lanjut Untuk Perlindungan Terhadap Pelanggaran Penangkapan Ikan Di Perairan Pongok	Dinas Kelautan dan Perikanan	Pongok, Kab. Bangka Selatan, Lepar Pongok, Tanjunglabu	1 Kegiatan	√		Pengawasan Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (APBD Provinsi)
92	Kelautan dan Perikanan	Pengelolaan Perikanan Tangkap	Optimalisasi Pos Pantau Dan Tim Terpadu Pemerintah Provinsi Untuk Perairan Di Kecamatan Lepar Pongok	Dinas Kelautan dan Perikanan	Tanjunglabu, Kab. Bangka Selatan, Toboali, Toboali, Seluruh Kelurahan/Desa	1 Kegiatan	√		Pengawasan Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (APBD Provinsi)
93	Kelautan dan Perikanan	Pengelolaan Perikanan Budidaya	Bantuan Pembuatan Atau Pencetakan Tambak Kepiting	Dinas Kelautan dan Perikanan	Desa Pangkal Niur, Kab. Bangka, Riau Silip, Pangkal Niur	1 Kegiatan		√	Belum dianggarkan di APBD provinsi untuk 2021, usulan bisa diakomodir melalui CSR pengusaha tambak udang, bantuan pemerintah melalui dana APBN KKP
94	Kelautan dan Perikanan	Pengelolaan Perikanan Tangkap	Masyarakat Nelayan Di Kelurahan Pangkal Lalang Meminta Adanya Dermaga Serta Perbaikan Jalan Dan Penerangan Menuju Pantai	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kelurahan Pangkallalang, Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	1 Kegiatan		√	Belum dianggarkan di APBD provinsi untuk 2021, usulan bisa diakomodir melalui CSR harus disiapkan dulu dokumen perencanaan, amdal, status kawasan dll.
95	Kelautan dan Perikanan	Pengelolaan Perikanan Tangkap	Masyarakat Mengharapkan Penindakan Tegas Nelayan Yang Melakukan Penangkapan Ikan Menggunakan Pukat Trawl Yang Mana Bisa Menyebabkan Kerusakan Ekosistem Laut Yang Ada Dilaut Tersebut	Dinas Kelautan dan Perikanan	Desa Kembiri, Kab. Belitung, Membalong, Kembiri	1 Kegiatan	√		Pengawasan untuk SeProvinsi Kepulauan Bangka Belitung (APBD Provinsi)
96	Kelautan dan Perikanan	Pengelolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Masyarakat Meminta Adanya Pembuatan Fasilitas Tunda Untuk Nelayan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Desa Sijuk, Kab. Belitung, Sijuk, Sijuk	1 Kegiatan		√	Belum dianggarkan di APBD provinsi untuk 2021, usulan bisa diakomodir melalui CSR harus disiapkan dulu dokumen perencanaan, amdal, status kawasan dll.

No.	Isu/Bidang Urusan	Usulan	Permasalahan	Perangkat Daerah	Lokasi	Koefisien	Status		Keterangan
							Diakomodir	Tidak Diakomodir	
97	Kelautan dan Perikanan	Pengelolaan Perikanan Tangkap	Nelayan Desa Sijuk Meminta Untuk Dibuatkan Dermaga Untuk Menepi Dan Pemecah Gelombang	Dinas Kelautan dan Perikanan	Desa Sijuk, Kab. Belitung, Sijuk, Sijuk	1 Kegiatan		√	Belum dianggarkan di APBD provinsi untuk 2021, usulan bisa diakomodir melalui CSR. harus disiapkan dulu dokumen perencanaan, amdal, status kawasan dll.
98	Kelautan dan Perikanan	Pengelolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Masyrakat Mengharapkan Pembangunan Pelabuhan Didesa Tanjung Kelumpang	Dinas Kelautan dan Perikanan	Desa Tanjung Kelumpang, Kab. Belitung Timur, Simpang Pesak, Tanjung Kelumpang	1 Kegiatan		√	Belum dianggarkan di APBD provinsi untuk 2021, usulan bisa diakomodir melalui CSR. harus disiapkan dulu dokumen perencanaan, amdal, status kawasan dll.
99	Kelautan dan Perikanan	Pengelolaan Pelayaran	Mengusulkan Pelabuhan Nelayan Di Desa Tanjung Kelumpang	Dinas Kelautan dan Perikanan	Desa Tanjun Kelumpang, Kab. Belitung Timur, Seluruh Kecamatan Dan Kelurahan/Desa	1 Kegiatan		√	Belum dianggarkan di APBD provinsi u 2021, usulan bisa diakomodir melalui CSR. harus disiapkan dulu dokumen perencanaan, amdal, status kawasan dll.
100	Kelautan dan Perikanan	Pengembangan Jasa Konstruksi	Pembangunan Dermaga Bagi Nelayan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Dusun Air Hantu Desa Deniang, Kab. Bangka, Riau Silip, Deniang	1 Kegiatan		√	Belum dianggarkan di APBD provinsi untuk 2021, usulan bisa diakomodir melalui CSR. harus disiapkan dulu dokumen perencanaan, amdal, status kawasan dll.
101	Kelautan dan Perikanan	Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Masyarakat Mengharapkan Bantuan Dana Hibah Sosial Untuk Para Nelayan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kelurahan Ketapang, Kota Pangkal Pinang, Pangkal Balam, Ketapang	1 Kegiatan		√	Usulan tidak jelas, bantuan berupa apa?
102	Kelautan dan Perikanan	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Tindaklanjut Untuk Perlindungan Terhadap Pelanggaran Penangkapan Ikan Diperairan Pongok	Dinas Kelautan dan Perikanan	Tanjunglabu, Kab. Bangka Selatan, Lepar Pongok, Tanjunglabu	1 Kegiatan	√		Pengawasan untuk Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (APBD Provinsi)
103	Kelautan dan Perikanan	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Masyarakat Kelurahan Kota Tanjung Pandan Mengharapkan Pembangunan SPBE	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Kelurahan Kota Tanjungpandan, Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Tanjung Pandan, Seluruh Kelurahan/Desa	1 Kegiatan		√	Urusan Pendirian SPBE adalah kewenangan pusat bersama PERTAMINA. Namun pemerintah daerah telah merekomendasikan dan sekarang sudah didirikan di Pulau Belitung, namun belum beroperasi karena masih dalam

No.	Isu/Bidang Urusan	Usulan	Permasalahan	Perangkat Daerah	Lokasi	Koefisien	Status		Keterangan
							Diakomodir	Tidak Diakomodir	
									tahap pembangunan
104	Kelautan dan Perikanan	Pengelolaan Perikanan Tangkap	Masyarakat Desa Sinar Surya Meminta Bantuan Perahu Fiber 5 Groston	Dinas Kelautan dan Perikanan	Desa Sinar Surya, Kab. Bangka Barat, Tempilang, Sinar Surya	1 Buah		√	Belum dianggarkan di APBD provinsi untuk 2021, usulan bisa diakomodir melalui CSR bantuan pemerintah melalui dana ABN KKP, DAK Kab/Kota
105	Kelautan dan Perikanan	Pengelolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Masyarakat Mengharapkan Pembangunan Industri Pengelolaan Perikanan Untuk Para Nelayan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kelurahan Ketapang Kota Pangkalpinang, Kota Pangkal Pinang, Pangkal Balam, Ketapang	1 Kegiatan		√	Belum dianggarkan di APBD provinsi untuk 2021, usulan bisa diakomodir melalui CSR, bantuan pemerintah melalui dana APBN KKP, DAK Kab/Kota
106	Kelautan dan Perikanan	Pengelolaan Perikanan Budidaya	Mengusulkan Bekas Lahan TI Dimanfaatkan Untuk Budidayan Ikan Atau Tambak Ikan Untuk Penduduk	Dinas Kelautan dan Perikanan	Toboali, Kab. Bangka Selatan, Toboali, Toboali	1 Kegiatan		√	Kewenangan budidaya air tawar ada di Kab/Kota, usulan bisa melalui DAK Kab/Kota, CSSR, APBD Kab/Kota
107	Kelautan dan Perikanan	Pengelolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Nelayan Mengharapkan Adanya Penambahan Perahu Dan Kapal Motor	Dinas Kelautan dan Perikanan	Desa Batu Betumpang, Kab. Bangka Selatan, Pulaubesar, Batu Betumpang	1 Kegiatan		√	Belum dianggarkan di APBD provinsi untuk 2021, usulan bisa diakomodir melalui CSR, bantuan pemerintah melalui dana APBN KKP, DAK Kab/Kota
108	Kelautan dan Perikanan	Pengelolaan Perikanan Tangkap	Bantuan Kapal Perikanan Dan Alat Tangkap Serta Alat Bantu Penangka Ikan (GPS)	Dinas Kelautan dan Perikanan	Desa Jada Bahrin, Kab. Bangka, Merawang, Jada Bahrin	1 Kegiatan		√	Belum dianggarkan di APBD provinsi untuk 2021, usulan bisa diakomodir melalui CSR, bantuan pemerintah melalui dana APBN KKP, DAK Kab/Kota
109	Kelautan dan Perikanan	Pengelolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Nelayan Mengharapkan Adanya Penambahan Perahu Dan Kapal Motor	Dinas Kelautan dan Perikanan	Batu Betumpang, Kab. Bangka Selatan, Pulaubesar, Batu Betumpang	1 Unit		√	Belum dianggarkan di APBD provinsi untuk 2021, usulan bisa diakomodir melalui CSR, bantuan pemerintah melalui dana APBN KKP, DAK Kab/Kota
110	Kelautan dan Perikanan	Pengelolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Masyarakat Nelayan Di Kelurahan Pangkallalang Meminta Bantuan Dan Pelatihan Terkait Pengelolahan Hasil Tangkap	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kelurahan Pangkallalang, Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	1 Kegiatan		√	Belum dianggarkan di APBD provinsi untuk 2021, usulan bisa diakomodir melalui CSR, bantuan pemerintah melalui dana APBN KKP, DAK Kab/Kota
111	Kelautan dan Perikanan	Pengelolaan Perikanan Budidaya	Peternak Ikan Lele Di Desa Simpang Rusa Mengharapkan Bantuan Bibit Ikan Lele	Dinas Kelautan dan Perikanan	Desa Simpang Rusa, Kab. Belitung, Membalong, Simpang Rusa	1 Kegiatan		√	Kewenangan budidaya air tawar ada di Kab/Kota, usulan bisa melalui DAK Kab/Kota, CSR, APBD Kab/Kota
112	Kelautan dan	Penyediaan Dan	Bantuan Mesin Giling Ikan	Dinas Kelautan	Toboali, Kab. Bangka	1 Unit		√	Belum dianggarkan di APBD provinsi

No.	Isu/Bidang Urusan	Usulan	Permasalahan	Perangkat Daerah	Lokasi	Koefisien	Status		Keterangan
							Diakomodir	Tidak Diakomodir	
	Perikanan	Pengembangan Sarana Pertanian		dan Perikanan	Selatan, Toboali, Toboali				untuk 2021, usulan bisa diakomodir melalui CSR, bantuan pemerintah melalui dana APBN KKP, DAK Kab/Kota
113	Komunikasi dan Informatika	Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Masyarakat Mengharapkan Penambahan Tower Dikarenakan Susahnya Sinyal Untuk Mengakses Internet Di Desa Tersebut Yang Mengakibatkan Terhambatnya Promosi Wisata Di Desa Tersebut.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Desa Simpang Rusa, Kab. Belitung, Membalong, Simpang Rusa	1 Kegiatan		√	Pembangunan tower merupakan kewenangan pusat bukan kewenangan provinsi, kalau menggunakan anggaran APBD hanya dapat dilaksanakan melalui kerjasama antara BUMD dengan fihak ketiga.
114	Komunikasi dan Informatika	Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Masyarakat Mengharapkan Adanya Layanan Internet Gratis Dari Pemerintah Untuk Masyarakat	Dinas Komunikasi dan Informatika	Desa Juru Seberang, Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Juru Seberang	1 Kegiatan		√	Pembangunan tower merupakan kewenangan pusat bukan kewenangan provinsi, kalau menggunakan anggaran APBD hanya dapat dilaksanakan melalui kerjasama antara BUMD dengan fihak ketiga.
115	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Pengembangan UMKM	Pelatihan Kelompok UMKM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Desa Bukit Layang Kecamatan Bakam Bangka, Kab. Bangka, Bakam, Bukit Layang	1 Kegiatan	√		
116	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Pengembangan UMKM	Perlu Dukungan Optimal Untuk Usaha Produktif Baik Melalui Optimaliasi Perda CSR Maupun Perda Zakat	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Rumah Makan Pawon, Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Gedung Nasional	1 Kegiatan	√		
117	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Pengembangan UMKM	Pentingnya Dukungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kepada Kaum Milenial, Sebagai Pengusaha Keil, Mikro Dan Menengah Serta Start-Up	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Rumah Makan Pawon, Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Gedung Nasional	1 Kegiatan	√		
118	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Diharapkan Untuk Penataan Sekolah Dengan Membangun Jalan Lingkungan Disekolah Agar Rapi Dan Teratur Sehingga Tata Ruang Sekolah Menjadi Baik Lagi Di SMAN 2 Pangkalpinang	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Sman 2 Pangkalpinang, Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Kacang Pedang	1 Kegiatan		√	Bukan kewenangan Dinas KUMKM

No.	Isu/Bidang Urusan	Usulan	Permasalahan	Perangkat Daerah	Lokasi	Koefisien	Status		Keterangan
							Diakomodir	Tidak Diakomodir	
119	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Pengembangan UMKM	Usulan Masyarakat Desa Keranggan Meminta Agar Diberikan Bantuan Dana Untuk Usaha Kecil Menengah Dan Memperbanyak Home Industri	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Desa Keranggan, Kab. Bangka Barat, Seluruh Kecamatan Dan Kelurahan/Desa	1 Kegiatan	√		
120	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Supaya Adanya Tempat Penampungan Bagi Siswa/i Yang Sudah Lulus Agar Kemampuan Mereka Dapat Bermanfaat	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Smkn 1 Pulau Besar, Kab. Bangka Selatan, Pulaubesar, Pulaubesar, Seluruh Kelurahan/Desa	1 Kegiatan		√	Bukan kewenangan Dinas KUMKM
121	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Pengembangan UMKM	Disarankan Kepada Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung Melalui Penyuluhan-Penyuluhan Mengenai Lapangan Untuk Melakukan Sosialisasi Program Pemerintah Mengenai Bantuan Pengembangan Usaha Kecil Masyarakat Dan Membantu Masyarakat Untuk Mendapatkan Modal Usaha/UMKM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Lapangan Futsal Lksa Adh Dhuha, Bukit Baru, Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Bukitmerapin	1 Kegiatan	√		
122	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Pengembangan UMKM	Masyarakat Mengharapkan Program Dari Pemerintah Untuk Membantu Perekonomian Kelompok Ibu-Ibu Yang Mempunyai Usaha Produktif Dan Juga Bagaimana Cara Pengembangannya Melalui UMKM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Taman Bunga, Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Taman Bunga	1 Kegiatan	√		

No.	Isu/Bidang Urusan	Usulan	Permasalahan	Perangkat Daerah	Lokasi	Koefisien	Status		Keterangan
							Diakomodir	Tidak Diakomodir	
123	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Penerimaan Peserta Didik Khusus Kota Pangkalpinang Menjadi Dilema Bagi Kami Guru-Guru, Apalagi Sekarang Sudah Sistem Zonasi Banyak LSM Maupun Masyarakat Tidak Mengikuti Prosedur-Prosedur Yang Berlaku, Mohon Kepada Dinas Pendidikan Bisa Menjelaskan Kepada Masyarakat Agar Lebih Tertib Untuk Mengikuti Aturan Yang Berlaku	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Hotel Edotel, Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitbesar	1 Kegiatan	√		Setiap PPDB selalu mengacu pada aturan yang berlaku. setiap tahun Permendikbud ditetapkan (zonasi, prestasi, mutasi) ada Permendikbud yang nantinya diturunkan menjadi peraturan gubernur atau kepala dinas.
124	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Pengembangan UMKM	Diharapkan Eksistensi UMKM Dibantu Dari Sistem Aplikasi Sehingga Lebih Berkembang	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Tanjungpandan, Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Tanjung Pandan, Seluruh Kelurahan/Desa	1 Kegiatan	√		
125	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Pengembangan UMKM	Masyarakat Mengharapkan Bantuan Untuk Penambahan Mesin Tenun Dan Untuk Dapat Mempromosikan Hasil Tenun Tersebut Dapat Dikenal Luas Oleh Masyarakat	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Desa Juru Sebrang, Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Juru Seberang	1 Kegiatan		√	Bukan kewenangan Dinas KUMKM
126	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Pengembangan UMKM	Bumdes Yang Ada Didusun Batu Mana Berharap Adanya Usaha Batako Yang Dikelola Oleh Bumdes Sendiri, Dikarenakan Pasir Yang Ada Di Batu Mana Sangat Bagus Untuk Dikelola Menjadi Batako	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dusun Batu Mana, Kab. Belitung, Membalong, Lassar	1 Kegiatan		√	Bukan kewenangan Dinas KUMKM
127	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Pengembangan UMKM	Diharapkan Eksistensi UMKM Di Belitung Lebih Dibantu Lagi Dalam Sitem Aplikasinya Sehingga Bisa Lebih Maju Dan Berkembang	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Sman 1 Tanjung Pandan, Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	1 Kegiatan	√		Bantuku, (Lalaper) Kegiatan sinergi dengan Kominfo

No.	Isu/Bidang Urusan	Usulan	Permasalahan	Perangkat Daerah	Lokasi	Koefisien	Status		Keterangan
							Diakomodir	Tidak Diakomodir	
128	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Mengusulkan Adanya Foging Disetiap Sekolah Untuk Menghindari Nyamuk DBD Dan Mengharapakan Bantuan Berupa Air Conditioner (AC) Karena Sistem Pemebelajaran Yang Full Day Sehingga Untuk Menjaga Kenyamanan Belajar Mengajar	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Sman 1 Tanjung Pandan, Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	1 Kegiatan		√	Bukan Kewenangan DKUKM
129	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Meminta Penambahan Kuota Beasiswa Bagi Siswa Yang Kurang Mampu	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Smkn 1 Kelapa Kampit, Kab. Belitung Timur, Kelapa Kampit, Kelapa Kampit, Seluruh Kelurahan/Desa	1 Kegiatan		√	Bukan kewenangan Dinas KUMKM
130	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Mengharapkan Kenaikan Gaji Untuk Guru Honorer Dan Penambahan Kuota Beasiswa Karena Banyak Siswa Yang Membutuhkannya	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Sman 1 Damar, Kab. Belitung Timur, Damar, Damar, Seluruh Kelurahan/Desa	1 Kegiatan		√	Bukan kewenangan Dinas KUMKM
131	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Penataan Bangunan Gedung	Supaya Didirikannya Pujasera	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Desa Batu Betumpang, Kab. Bangka Selatan, Pulaubesar, Batu Betumpang	1 Kegiatan		√	Bukan kewenangan Dinas KUMKM
132	Pangan	Pengawasan Keamanan Pangan	Masyarakat Mengharapkan Bantuan Sembako Dikarenakan Jatuhnya Harga Karet Dan Harga Lada	Dinas Pangan	Air Itam Pangkalpinang, Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	1 Kegiatan	√		
133	Pangan	Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Masyarakat Jl. Air Selan Mengharapkan Kepada Pemerintah Agar Mengstabilkan Perekonomian Dikarenakan Harga Lada Dan Timah Yang Turun	Dinas Pangan	Jl. Air Selan Pangkal Pinang, Kota Pangkal Pinang, Gabek, Air Salemba	1 Kegiatan	√		

No.	Isu/Bidang Urusan	Usulan	Permasalahan	Perangkat Daerah	Lokasi	Koefisien	Status		Keterangan
							Diakomodir	Tidak Diakomodir	
134	Pangan	Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Masyarakat Mengeluhkan Kelangkaan Gas Elpiji 3 Kg	Dinas Pangan	Desa Tanjung Batu Itam, Kab. Belitung Timur, Simpang Pesak, Tanjung Batu Itam	1 Kegiatan	√		
135	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Pembangunan Drainase	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kampong Bukit Dempo Kel. Bukit Ketok Kec. Belinyu, Kab. Bangka, Belinyu, Bukit Ketok	1 Kegiatan		√	Kegiatan yang diusulkan adalah pembuat siring jalan dan penggantian gorong - gorong crossing jalan pada jalan kabupaten.
136	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyelenggaraan Jalan	Usulan Dari Masyarakat Desa Buyan Kelumbi Untuk Diadakan Peningkatan Status Jalan Dan Pelebaran Jalan Sangku-Saing Sepanjang 4,5 Kilometer	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Desa Buyan Kelumbi Mentok, Kab. Bangka Barat, Tempilang, Buyan Kelumbi	5 Kilometer		√	Belum dapat dinaikkan status jalannya menjadi jalan provinsi karena ujung ruas dan awal ruas menuju jalan provinsi.
137	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Masalah Air Bersih	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Desa Rias, Kab. Bangka Selatan, Toboali, Rias	1 Kegiatan		√	Kegiatan spam di prioritaskan di kec. tukak sadai
138	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Masalah Saluran Irigasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Desa Rias, Kab. Bangka Selatan, Toboali, Rias	1 Kegiatan		√	Agar dilaksanakan pada satker pjpa, mengingat di rias adalah di kewenangan pusat. provinsi akan membuat surat usulan.
139	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Perbaikan Drainase Dan Saluran	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Desa Air Ruai, Kab. Bangka, Pemali, Air Ruai	1 Kegiatan	√		
140	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyelenggaraan Jalan	Masyarakat Desa Penyampak Meminta Untuk Dilakukan Pengaspalan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Desa Penyampak, Kab. Bangka Barat, Tempilang, Penyampak	1 Kegiatan		√	Sudah diakomodir di tahun 2020 peningkatan Jalan Sangku-Simpang Tempilang sepanjang 2 km (Desa Penyampak 1 km dan Desa Dimpang Yul 1 km)
141	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyelenggaraan Jalan	Perbaikan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kelurahan Jelitik, Kab. Bangka, Sungailiat, Jelitik	1 Kegiatan	√		Tahun 2020 masuk dalam program pemeliharaan rutin jalan
142	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyelenggaraan Jalan	Pelebaran Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Desa Kota Waringin, Kab. Bangka, Puding Besar, Kota Waringin	1.5 Km	√		Tahun 2020 juga ada pelebaran jalan sepanjang 2,3 km

No.	Isu/Bidang Urusan	Usulan	Permasalahan	Perangkat Daerah	Lokasi	Koefisien	Status		Keterangan
							Diakomodir	Tidak Diakomodir	
143	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Masyarakat Desa Penyampak Meminta Untuk Disediakan Sumur Bor Terkait Dengan Air Bersih	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Desa Penyampak, Kab. Bangka Barat, Tempilang, Penyampak	4 Buah		√	UU 17 tahun 2019 tentang sda memang mengalihkan kewenangan pemanfaatan air tanah dari ESDM ke SDA, namun memerlukan landasan hukum lebih lanjut untuk perizinan
144	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyelenggaraan Jalan	Pembangunan Jalan Merpati 476 M Dengan Lebar 3 M	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Jalan Merpati, Kab. Bangka, Sungailiat, Kudai	476 Meter	√		Lermbar kerja Verifikasi DPRD pada Dinas PUPR No. 22
145	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Tahun Pemerintah Memberikan Bantuan Pompa Air Kepada Masyarakat Air Salemba Untuk Kepentingan Umum, Tetapi Sejak Tahun 2006-2009 Pemerintah Kota Maupun Provinsi Tidak Pernah Sama Sekali Mengontrol Kelayakan Mesin Tersebut Sehingga Selama Waktu Tersebut Kita Merawatnya Dengan Swadaya Dari Masyarakat Baik Itu Listrik, Kerusakan Mesin Dan Lain-lain	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jl. Bukit Baru Kota Pangkalpinang, Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Bukitsari	1 Kegiatan		√	Dikoordinasikan dengan instansi terkait
146	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Masalah Saluran Irigasi Karena Kondisi Sudah Memprihatinkan Hampir Tertutup Untuk Perbatasan SPC (P)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Desa Rias, Kab. Bangka Selatan, Toboali, Rias	1 Kegiatan		√	Agar dilaksanakan pada satker PJPA, mengingat di Rias adalah di kewenangan pusat. provinsi akan membuat surat usulan.
147	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Saluran Irigasi Yang Sangat Memprihatinkan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Desa Rias, Kab. Bangka Selatan, Toboali, Rias	1 Kegiatan		√	Agar dilaksanakan pada satker PJPA, mengingat di Rias adalah di kewenangan pusat. provinsi akan membuat surat usulan.
148	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Pembangunan Siring	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Lingkungan Vi Rt 01 Kelurahan Bukit Ketok, Kab. Bangka, Belinyu, Bukit Ketok	1000 Meter	√		

No.	Isu/Bidang Urusan	Usulan	Permasalahan	Perangkat Daerah	Lokasi	Koefisien	Status		Keterangan
							Diakomodir	Tidak Diakomodir	
149	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Masyarakat Menginginkan Sosialisasi Dari Pihak Pemerintah Masalah Sampah Yang Di Daur Ulang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kelurahan Gajah Mada, Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Gajah Mada	1 Kegiatan		√	Dikoordinasikan dengan balai prasarana permukiman wilayah babel
150	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Minimnya Air Bersih Di Desa Rias Kecamatan Toboali	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Desa Rias, Kab. Bangka Selatan, Toboali, Toboali, Seluruh Kelurahan/Desa	1 Kegiatan		√	Kegiatan SPAM di prioritaskan di Kec. TukakSadai
151	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Masyarakat Mengharapkan Solusi Dari Pemerintah Untuk Pengelolaan Daur Ulang Sampah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kelurahan Ketapang, Kota Pangkal Pinang, Pangkal Balam, Ketapang	1 Kegiatan		√	Dikoordinasikan dengan balai prasarana permukiman wilayah babel
152	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Mohon Solusi Dari Pemerintah Untuk Lingkungan Opas Indah Apabila Hujan Deras Air Akan Naik Dan Mengakibatkan Banjir	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jalan Pikas 4 Air Salemba, Kota Pangkal Pinang, Gabek, Air Salemba	1 Kegiatan		√	Saat ini sedang disusun masterplan pengendalian banjir Kota Pangkalpinang, solusi perlu secara terintegrasi dari hulu ke hilir, sehingga perlu menunggu DED
153	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Tindaklanjut Terhadap Keluhan Masyarakat Kepada Perusahaan PT. SNS	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tanjunglabu, Kab. Bangka Selatan, Lepar Pongok, Tanjunglabu	1 Kegiatan	√		Sudah di survey (tindak lanjut oleh instansi terkait)
154	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Pembangunan Drainase	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kecamatan Riau Silip, Kab. Bangka, Riau Silip, Riau Silip, Seluruh Kelurahan/Desa	1 Kegiatan	√		
155	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyelenggaraan Penataan Ruang	Masyarakat Berharap Penyusunan RZWP2K Tidak Ada Penambangan Timah Diwilayah Perairan Belitung	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Desa Cendil, Kab. Belitung Timur, Kelapa Kampit, Cendil	1 Kegiatan	√		Sudah diakomodir
156	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Bantuan Penyediaan Sumur Bor Untuk Air Bersih	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Desa Penagan, Kab. Bangka, Mendo Barat, Penagan	1 Kegiatan		√	UU 17 Tahun 2019 tentang SDA memang mengalihkan kewenangan pemanfaatan air tanah dari ESDM ke SDA. Namun memerlukan landasan hukum lebih lanjut untuk perizinan

No.	Isu/Bidang Urusan	Usulan	Permasalahan	Perangkat Daerah	Lokasi	Koefisien	Status		Keterangan
							Diakomodir	Tidak Diakomodir	
157	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Perbaikan Drainase	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jalan Cendrawasih Rt 02 Rt 03, Kab. Bangka, Sungailiat, Sri Menanti	1 Kegiatan		√	Yang perlu diperbaiki adalah gorong-gorong jalan. Diganti dengan box culvert. Saluran di pinggir jalan, menjadi bagian yang tidak terpisah dengan aset jalan.
158	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyelenggaraan Jalan	Masyarakat Mengharapkan Perbaikan Jalan Desa Badau Dan Pelebaran Jalan Antara Desa Badau-Desa Ibul Jalan Yang Ada Sekarang Kecil Dan Banyak Yang Berlubang Sepanjang 4 Km.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Desa Badau, Kab. Belitung, Badau, Badau	1 Kegiatan	√		Kondisi berlubang mulai tahun 2020 akan ditangani melalui kegiatan pemeliharaan rutin jalan badau-dendang
159	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyelenggaraan Jalan	Perbaikan Pengaspalan Jalan Akses Puding Dan Desa Labu	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Desa Puding Besar, Kab. Bangka, Puding Besar, Puding Besar	1 Kegiatan		√	Tahun 2020 pelebaran Jalan Puding Besar-Saing-Kota Waringin (Desa Labu) sepanjang 1 km
160	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Masyarakat Desa Trans Ibul Mengharapkan Perbaikan Pengairan Sawah Dan Masyarakat Transmigrasi Mengharapkan Kelanjutan Program Pembebasan Lahan Hutan Lindung Yang Sebelumnya Sudah Dipatok Dan Dikoordinatkan Dari Provinsi.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Desa Badau, Kab. Belitung, Badau, Badau	1 Kegiatan		√	
161	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Supaya Membangun Sumur Bor Di SMKN 1 Tukak Sadai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tukak Sadai, Kab. Bangka Selatan, Tukak Sadai, Sadai	1 Kegiatan		√	Alokasi anggaran untuk sarana prasarana terbatas sehingga dialokasikan yang paling prioritas
162	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan Gedung	Bantuan Laboratorium Untuk Praktek Jurusan Perikanan Yang Berbentuk Kapal	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tukak Sadai, Kab. Bangka Selatan, Tukak Sadai, Sadai	1 Kegiatan		√	Alokasi anggaran untuk sarana prasarana terbatas sehingga dialokasikan yang paling prioritas
163	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan Gedung	Mohon Bantuan Gedung Pertemuan Dan Gedung Lab. Komputer	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Desa Batu Betumpang, Kab. Bangka Selatan, Tukak Sadai, Sadai	1 Kegiatan		√	Tidak jelas peruntukannya
164	Pekerjaan Umum	Pengelolaan Dan	Peningkatan Pembangunan	Dinas Pekerjaan	Desa Rias, Kab.	1 Kegiatan		√	Agar dilaksanakan pada satker PJPA

No.	Isu/Bidang Urusan	Usulan	Permasalahan	Perangkat Daerah	Lokasi	Koefisien	Status		Keterangan
							Diakomodir	Tidak Diakomodir	
	dan Penataan Ruang	Pengembangan Sistem Drainase	Saluran Irigasi Yang Sangat Memprihatinkan	Umum dan Penataan Ruang	Bangka Selatan, Toboali, Rias				mengingat di Rias adalah di kewenangan pusat. Provinsi akan membuat surat usulan.
165	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Saluran Irigasi Yang Sangat Memprihatinkan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Desa Rias, Kab. Bangka Selatan, Toboali, Rias	1 Kegiatan		√	Agar dilaksanakan pada satker PJPA mengingat di Rias adalah di kewenangan pusat. Provinsi akan membuat surat usulan.
166	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Pembangunan Drainase Agar Tidak Mengakibatkan Banjir Tahunan Bagi Masyarakat	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Lingkungan Sidodadi Kelurahan Srimenanti, Kab. Bangka, Sungailiat, Sri Menanti	1 Kegiatan		√	Terkendala kepemilikan aset saluran, karena pekerjaannya berupa rehab saluran
167	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Masyarakat Mengharapkan Pembangunan Talud Untuk Menahan Gelombang Pantai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Desa Sungai Samak, Kab. Belitung, Badau, Sungai Samak	1 Kegiatan	√		
168	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Perbaikan Drainase Perlu Direalisasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Desa Sempan, Kab. Bangka, Pemali, Sempan	1 Kegiatan		√	Terkendala kepemilikan aset saluran, karena pekerjaannya berupa rehab saluran
169	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Bantuan Sumur Bor Yang Berdiameter Besar Agar Masyarakat Terpenuhi Kebutuhan Air	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Desa Maras Senang, Kab. Bangka, Bakam, Maras Senang	1 Kegiatan		√	UU 17 tahun 2019 tentang SDA memang mengalihkan kewenangan pemanfaatan air tanah dari ESDM ke SDA, namun memerlukan landasan hukum lebih lanjut untuk perizinan
170	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Pembangunan Drainase Agar Tidak Mengakibatkan Banjir	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Desa Air Ruai, Kab. Bangka, Pemali, Air Ruai	1 Kegiatan		√	Sudah terakomodir di atas
171	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyelenggaraan Jalan	Pelebaran Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Desa Air Gegas, Kab. Bangka Selatan, Air Gegas, Airgegas	1 Kegiatan		√	Masuk dalam rencana pelebaran Jalan Air Gegas-Bedengung; Bedengung-Batu betumpang tahun anggaran 2022
172	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyelenggaraan Jalan	Pengaspalan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Air Gegas, Kab. Bangka Selatan, Air Gegas, Airgegas	1 Kegiatan		√	Masuk dalam rencana pelebaran Jalan Air Gegas-Bedengung; Bedengung-Batu Betumpang tahun anggaran 2022
173	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyelenggaraan Jalan	Masyarakat Meminta Adanya Peninjauan Jalan Diponegoro Tanjung Pandan Yang Merupakan Jalan Provinsi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kelurahan Pangkallalang, Kab. Belitung, Tanjung Pandan,	1 Kegiatan	√		
174	Pekerjaan Umum	Penyelenggaraan	Masyarakat Meminta Adanya	Dinas Pekerjaan	Desa Sijuk, Kab.	1 Kegiatan		√	Tahun 2020 pelebaran Jalan Simpang

No.	Isu/Bidang Urusan	Usulan	Permasalahan	Perangkat Daerah	Lokasi	Koefisien	Status		Keterangan
							Diakomodir	Tidak Diakomodir	
	dan Penataan Ruang	Jalan	Perbaikan Jalan SP IV Sijuk Menuju Buding	Umum dan Penataan Ruang	Belitung, Sijuk, Sijuk				Empat (Sijuk)-Buding di Desa Cendil dan masuk kembali dalam rencana 2022
175	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyelenggaraan Penataan Ruang	Camat Parittiga Meminta Agar Diadakan Guiden Petunjuk Jalan Lokasi Perkantoran, Wisata, Fasum Dan Lokasi Yang Penting Lainnya Agar Ditata Rapi Dan Dibuatkan Segera Oleh Dinas Terkait	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Parittiga Mentok, Kab. Bangka Barat, Parittiga, Parittiga, Seluruh Kelurahan/Desa	1 Buah		√	Kewenangan Kabupaten Bangka Barat
176	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyelenggaraan Jalan	Kurang Lebarnya Jalan Kelurahan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kelurahan Pall Satu, Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Paal Satu	1		√	Bukan kewenangan jalan provinsi
177	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Masyarakat Desa Benteng Kota Meminta Agar Daerah Dermaga Benteng Kota Sampai Pulau Semubung Dipercantik Dan Dikelola Pemerintah Untuk Dijadikan Objek Wisata	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Desa Benteng Kota, Kab. Bangka Barat, Tempilang, Benteng Kota	1 Kawasan		√	Merupakan kewenangan Kabupaten Bangka Barat
178	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyelenggaraan Penataan Ruang	Masalah Perbaikan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Desa Rias, Kab. Bangka Selatan, Toboali, Rias	1 Kegiatan		√	Bukan kewenangan jalan provinsi
179	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyelenggaraan Jalan	Masyarakat Desa Tanjung Niur Meminta Agar Jalan Sepanjang Dusun Sikka Diaspal	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Desa Tanjung Niur, Kab. Bangka Barat, Tempilang, Tanjung Niur	1 Kegiatan		√	Bukan kewenangan jalan provinsi
180	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyelenggaraan Jalan	Pelebaran Jalan Kelurahan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kelurahan Paal, Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Paal Satu	1 Km		√	Bukan kewenangan jalan provinsi
181	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyelenggaraan Jalan	Perbaikan Dan Pengaspalan Jalan Di Kelurahan Lesung Batang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kelurahan Lesung Batang, Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	1 Km		√	Bukan kewenangan jalan provinsi

No.	Isu/Bidang Urusan	Usulan	Permasalahan	Perangkat Daerah	Lokasi	Koefisien	Status		Keterangan
							Diakomodir	Tidak Diakomodir	
182	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyelenggaraan Jalan	Renovasi Jalan Surau Baitul Salam Jalan Kenanga	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kelurahan Pall Saatu, Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Tanjung Pandan, Seluruh Kelurahan/Desa	1 Km		√	Bukan kewenangan jalan provinsi
183	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyelenggaraan Jalan	Pembuatan Jalan Tembus Antara Desa Jengkang Dengan Desa Kembiri	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Desa Jengkang, Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Tanjung Pandan, Seluruh Kelurahan/Desa	1 Km		√	Bukan kewenangan jalan provinsi
184	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyelenggaraan Jalan	Masyarakat Dusun Pelaik Meminta Agar Jalan Keluar Dusun Pelaik Sampai Temping Diaspal	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dusun Pelaik, Kab. Bangka Barat, Tempilang, Tanjung Niur	1 Kegiatan		√	Bukan kewenangan jalan provinsi
185	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyelenggaraan Jalan	Masyarakat Meminta Dibuatkan Jalan Dari Dusun Kamat Desa Simpang Yul	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dusun Kamat, Kab. Bangka Barat, Tempilang, Simpang Yul	1 Kegiatan		√	Bukan kewenangan jalan provinsi
186	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyelenggaraan Jalan	Pengaspalan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jalan Sigambir Desa Air Ruai, Kab. Bangka, Pemali, Air Ruai	1 Kegiatan		√	Bukan kewenangan jalan provinsi
187	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyelenggaraan Jalan	Permohonan Pembuatan Jalan Setapak Di Jl. H. Usman Kelurahan Air Itam Kira-Kira +- 3 Meter Di Cor Beton	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Air Itam, Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	1 Kegiatan		√	Bukan kewenangan jalan provinsi
188	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyelenggaraan Jalan	Pembangunan Plat Duiker	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Desa Air Ruai Sebelum Mesjid Al-Muhajirin, Kab. Bangka, Pemali, Air Ruai	1 Kegiatan		√	Bukan kewenangan jalan provinsi
189	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Pembangunan Drainase	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sepanjang Jalan Tanjung Pesona, Kab. Bangka, Sungailiat, Jelitik	1 Kegiatan		√	Tugas dan fungsi Dinas PUPR Kabupaten

No.	Isu/Bidang Urusan	Usulan	Permasalahan	Perangkat Daerah	Lokasi	Koefisien	Status		Keterangan
							Diakomodir	Tidak Diakomodir	
190	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyelenggaraan Jalan	Pelebaran Jalan Dan Pengaspalan Ulang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jalan Dewi Kwan Yin, Kab. Bangka, Sungailiat, Jelitik	1 Kegiatan		√	Bukan kewenangan jalan provinsi
191	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyelenggaraan Jalan	Bantuan Pengaspalan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Desa Kace Timur, Kab. Bangka, Mendo Barat, Kace Timur	1 Kegiatan		√	Bukan kewenangan jalan provinsi
192	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Pembangunan Drainase	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Simpang Petaling Menuju Mentok, Kab. Bangka, Mendo Barat, Petaling	1 Kegiatan		√	Tugas dan fungsi Dinas PUPR Kabupaten/Satker PJN wilayah Kemenpupr
193	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Apabila Ada Pembangunan Untuk Bandar/Selokan Air Harus Ada Kesepakatan Dari Masyarakat Untuk Merelakan Tempat Pembangunan Bandar/Selokan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Air Itam Pangkalpinang, Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	1 Kegiatan		√	Tugas dan fungsi Dinas PUPR Kota Pangkalpinang
194	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Masyarakat Mengajukan Permohonan Pelebaran Selokan Di Sekitaran RT 03 Lontong Pancur Dikarenakan Apabila Hujan Besar Air Tersebut Bisa Masuk Kerumah-rumah Warga	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Lontong Pancur Pangkalbalam, Kota Pangkal Pinang, Pangkal Balam, Lontong Pancur	1 Kegiatan		√	Tugas dan fungsi Dinas PUPR Kota Pangkalpinang
195	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Masyarakat Mengharapkan Solusi Dari Pemerintah Agar Mobil Pengangkut Sampah Bisa Masuk Kedalam Gang-gang Rumah Masyarakat, Dan Juga Mengharapkan Mengharapkan Ketersediaan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Disekitaran Lontong Pancur	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Lontong Pancur Pangkalbalam, Kota Pangkal Pinang, Pangkal Balam, Lontong Pancur	1 Kegiatan		√	Tugas dan fungsi Dinas Kebersihan, Kebakaran dan Pertamanan
196	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyelenggaraan Jalan	Agar Jalan Dari Kantor Camat Ke Desa Panca Tunggal Di Perlebar Dan Diaspal	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Desa Panca Tunggal, Kab. Bangka Selatan, Pulaubesar, Panca Tunggal	1 Kegiatan		√	Bukan kewenangan jalan provinsi

No.	Isu/Bidang Urusan	Usulan	Permasalahan	Perangkat Daerah	Lokasi	Koefisien	Status		Keterangan
							Diakomodir	Tidak Diakomodir	
197	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyelenggaraan Jalan	Perbaikan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Desa Bukit Layang, Kab. Bangka, Bakam, Bukit Layang	1 Kegiatan		√	Bukan kewenangan jalan provinsi
198	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Perbaikan Drainase Jalan Raya Pangkalpinang - Mentok	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Desa Kace, Kab. Bangka, Mendo Barat, Kace	1 Kegiatan		√	Bukan kewenangan jalan provinsi
199	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Masyarakat Jl. Air Selan Mengharapkan Adanya Tempat Pembuangan Sampah Dan Agar Mobil Sampah Bisa Masuk Ke Gang-gang Dirumah Warga	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jl. Air Selan, Kota Pangkal Pinang, Gabek, Air Salemba	1 Kegiatan		√	Tugas dan fungsi Dinas Kebersihan, Kebakaran dan Pertamanan
200	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Masyarakat Menginginkan Agar Pemerintah Meperbaiki Drainase Dikarenakan Adanya Pembangunan Perumahan Sehingga Menyebabkan Banjir Dan Kerusakan Drainase Tersebut	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Bukit Baru Pangkal Pinang, Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Bukitsari	1 Kegiatan		√	Kewenangan Kota Pangkalpinang
201	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Perlunya Adanya Penambahan Lahan Perkuburan Di Pangkalpinang Mengingat Lahan Perkuburan Yang Sudah Mulai Langka/Habis	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rumah Makan Bubur Shanghai, Kota Pangkal Pinang, Pangkal Balam, Rejo Sari	1 Kegiatan		√	Merupakan kewenangan pemerintah Kota Pangkalpinang
202	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Masyarakat Desa Puput Meminta Agar Lahan Dan Gedung Kosong Yang Berada Di Komplek Timah Jangan Dibiarkan Tidak Terawat Dan Hanya Tempat Kumpulan Anak -anak Remaja Untuk Hal-hal Yang Tidak Baik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Desa Puput Parittiga Mentok, Kab. Bangka Barat, Parittiga, Puput	1 Buah		√	Pemerintah Kab. Bangka Barat

No.	Isu/Bidang Urusan	Usulan	Permasalahan	Perangkat Daerah	Lokasi	Koefisien	Status		Keterangan
							Diakomodir	Tidak Diakomodir	
203	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyelenggaraan Jalan	Usulan Pengaspalan Sepanjang Jalan Di Desa Rias Kecamatan Toboali Untuk Mempermudah Akses Para Petani Dalam Melakukan Aktivitas	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Desa Rias, Kab. Bangka Selatan, Toboali, Rias	1 Kegiata		√	Bukan kewenangan jalan provinsi
204	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Masyarakat Girimaya Mengharapkan Kepda Pemerintah Untuk Pembuatan Sistem Drainase Dikarena Apabila Hujan Deras Menyebabkan Air Masuk Kerumah-rumah Warga	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Girimaya, Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitintan	1 Kegiatan		√	Kewenangan pemerintah Kota Pangkalpinang
205	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Masalah Air Bersih Yang Sangat Minim Dan Kejelasan Mengenai Program Hibah Air Minum Yang Tidak Terealisasi Sampai Saat Ini	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Desa Rias, Kab. Bangka Selatan, Toboali, Rias	1 Kegiatan		√	Tugas dan kewenangan kabupaten
206	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyelenggaraan Jalan	Masalah Perbaikan Jalan Gusung - Pantai Kisut	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Desa Rias, Kab. Bangka Selatan, Toboali, Rias	1 Kegiatan		√	Bukan kewenangan jalan provinsi
207	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengembangan Jasa Konstruksi	Perbaikan Jembatan Antar Desa	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kecamatan Belinyu, Kab. Bangka, Belinyu, Belinyu, Seluruh Kelurahan/Desa	1 Kegiatan		√	Bukan kewenangan jalan provinsi
208	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Bantuan Pemasangan Pam Untuk Air Bersih	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kelurahan Bukit Ketok, Kab. Bangka, Belinyu, Bukit Ketok	1 Kegiatan		√	Tugas dan kewenangan Kabupaten Bangka
209	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyelenggaraan Jalan	Masyarakat Mengharapkan Jalan Setapak Di Gang Sriwijaya Segera Di Realisasikan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Girimaya Kota Pangkal Pinang, Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitintan	1 Kegiatan		√	Bukan kewenangan jalan provinsi

No.	Isu/Bidang Urusan	Usulan	Permasalahan	Perangkat Daerah	Lokasi	Koefisien	Status		Keterangan
							Diakomodir	Tidak Diakomodir	
210	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Masyarakat Kecamatan Girimaya Mengharapkan Dibuatkan Tempat Pembuangan Sampah Dan Mobil Sampah Bisa Masuk Ke Gang-gang Rumah Warga	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kecamatan Girimaya Kota Pangkal Pinang, Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Girimaya, Seluruh Kelurahan/Desa	1 Kegiatan	√		Dapat diusulkan melalui mekanisme DAK
211	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Masyarakat Gg. Salam Kacang Pedang Mengharapkan Bantuan Pemangkasan Pohon-pohon Besar Dikarenakan Meresahkan Warga Sekitar Apabila Terjadi Hujan Besar	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Gg. Salam Kacang Pedang, Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Kacang Pedang	1 Kegiatan		√	Tugas dan fungsi dinas kebersihan, kebakaran dan pertamanan
212	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Saluran Air Yang Ada Di Sekitaran Man Diharapkan Agar Adanya Normalisasi Dan Juga Diharapakan Ada Pengerukan Kolong Air Nangka	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kecamatan Rangkui, Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Keramat	1 Kegiatan		√	Tugas dan fungsi Dinas PUPR Kota Pangkalpinang
213	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyelenggaraan Jalan	Pengusulan Warga Setempat Untuk Pengaspalan Jalan Tembus Dari Desa Kace Kabupaten Bangka Yang Tembus Ke Kelurahan Air Kepala Tujuh	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Air Kelapa Tujuh Kota Pangkal Pinang, Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Air Kepala Tujuh	1 Kegiatan		√	Bukan kewenangan jalan provinsi
214	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Bagaimana Penanganan Masalah Pasar Kaget Yang Ada Di Kelurahan Gajah Mada Dan Penanganannya Dari Pihak Pemerintah. Bagaimana Solusi Dari Pemerintah?	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kelurahan Gajah Mada Kota Pangkalpinang, Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Gajah Mada	1 Kegiatan		√	Kewenangan pemerintah Kota Pangkalpinang
215	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Masyarakat Mengharapkan Penertiban Atau Penambahan Lahan Parkir Di Kawasan Pasar Pagi Karena Sudah Sangat Mengganggu Dan Menyebabkan Kemacetan Apalagi Menjelang Bulan Ramadhan Dan Lebaran Yang Sangat Mengganggu	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Taman Bunga Bukit Baru, Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Taman Bunga	1 Kegiatan		√	Kewenangan pemerintah Kota Pangkalpinang

No.	Isu/Bidang Urusan	Usulan	Permasalahan	Perangkat Daerah	Lokasi	Koefisien	Status		Keterangan
							Diakomodir	Tidak Diakomodir	
216	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Mohon Bantuan Kepada Pemerintah Untuk Pembangunan Sarana Air Bersih	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Taman Bunga, Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Taman Bunga	1 Kegiatan		√	Tugas dan fungsi Dinas PUPR Kota Pangkalpinang
217	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Perkuburan Oikumene Yang Ada Dijalan Koba, Mohon Untuk Pemerintah Lebih Memperhatikan Lagi Kondisinya Di Karenakan Banyaknya Pohon-pohon Besar Untuk Ditebang Sebelum Terjadi Angin Kencang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Hotel Pia Pangkalpinang, Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Batin Tikal	1 Kegiatan		√	Kewenangan untuk penebangan pohon-pohon bukan merupakankewenangan provinsi.
218	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyelenggaraan Jalan	Supaya Jalan Dari Kantor Camat Ke Desa Panca Tunggal Di Perlebar Dan Di Aspal	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Smkn 1 Pulau Besar, Kab. Bangka Selatan, Pulaubesar, Pulaubesar, Seluruh Kelurahan/Desa	1 Kegiatan		√	Bukan kewenangan jalan provinsi
219	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Pembangunan Drainase Disepanjang Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Desa Cit, Kab. Bangka, Riau Silip, Cit	1 Kegiatan		√	Bukan kewenangan jalan provinsi
220	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyelenggaraan Jalan	Masyarakat Berharap Pembangunan Akses Jalan Menuju Tempat Wisata Pantai Tanjung Batu Pulas	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Desa Cendil, Kab. Belitung Timur, Kelapa Kampit, Cendil	1 Kegiatan		√	Bukan kewenangan jalan provinsi
221	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pembuatan Saluran Drainase Pembuangan Air Limbah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Desa Pangkal Niur, Kab. Bangka, Riau Silip, Pangkal Niur	1 Kegiatan		√	Bukan kewenangan jalan provinsi
222	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Pembangunan Siring Di Sepanjang Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Desa Rukam, Kab. Bangka, Mendo Barat, Rukam	1 Kegiatan		√	Bukan kewenangan jalan provinsi
223	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyelenggaraan Jalan	Peningkatan Ruas Jalan Labu-Air Pandan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Desa Kota Kapur, Kab. Bangka, Mendo Barat, Labuh Air Pandan	1 Kegiatan		√	Bukan kewenangan jalan provinsi

No.	Isu/Bidang Urusan	Usulan	Permasalahan	Perangkat Daerah	Lokasi	Koefisien	Status		Keterangan
							Diakomodir	Tidak Diakomodir	
224	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Mohon Untuk Disediakan Lahan Perkuburan Untuk Umat Kristen Yang Dikarenakan Keterbatasan Lahan Perkuburan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Gpib Pangkalpinang, Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Batin Tikal	1 Kegiatan		√	Kewenangan pemerintah Kota Pangkalpinang
225	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyelenggaraan Jalan	Bantuan Untuk Pengembangan Serta Peningkatan Jalan Masuk Di Desa Tukak Sadai Kecamatan Tukak Sadai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tukaksadai, Kab. Bangka Selatan, Tukak Sadai, Tukak Sadai, Seluruh Kelurahan/Desa	1 Kilo Meter		√	Bukan kewenangan jalan provinsi
226	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Pembangunan Dan Perbaikan Drainase	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Komplek Pemda Dan Lingkungan Perumnas Pemda, Kab. Bangka, Sungailiat, Sungailiat, Seluruh Kelurahan/Desa	3680 Meter		√	Bukan kewenangan
227	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyelenggaraan Jalan	Pengaspalan Dan Pemeliharaan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jalan Tanah Puru Di Lingkungan Perumnas Pemda, Kab. Bangka, Sungailiat, Sungailiat, Seluruh Kelurahan/Desa	4640 Meter		√	Bukan kewenangan jalan provinsi
228	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyelenggaraan Jalan	Masyarakat Mengharapkan Pelebaran Jalan Di Desa Air Saga	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Desa Air Saga Belitung, Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Air Saga	1 Kegiatan		√	Bukan kewenangan jalan provinsi
229	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Masyarakat Mengharapkan Pengadaan Kontainer Pembuangan Sampah Untuk Menjaga Kebersihan Desa Agar Bisa Dijadikan Desa Pariwisata	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Desa Air Saga, Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Air Saga	1 Kegiatan		√	Tugas dan fungsi kabupaten belitung

No.	Isu/Bidang Urusan	Usulan	Permasalahan	Perangkat Daerah	Lokasi	Koefisien	Status		Keterangan
							Diakomodir	Tidak Diakomodir	
230	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyelenggaraan Jalan	Masyarakat Mengharapkan Peningkatan Jalan Sentosa Dan Pengaspalan Jalan Menuju Drainase	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Desa Air Saga, Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Air Saga	1 Kegiatan		√	Bukan kewenangan jalan provinsi
231	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyelenggaraan Jalan	Perbaikan Dan Pengaspalan Jalan Yang Rusak	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Desa Sidoharjo, Kab. Bangka Selatan, Air Gegas, Sidoharjo	1 Kegiatan		√	Bukan kewenangan jalan provinsi
232	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyelenggaraan Jalan	Perbaikan Jalan Desa Penyamun Sampai Desa Bukit Layang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Desa Bukit Layang, Kab. Bangka, Bakam, Bukit Layang	1 Kegiatan		√	Bukan kewenangan jalan provinsi
233	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Minta Adanya Pengadaan Sumur Bor Di Asrama Pesantren	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Desa Sidoharjo, Kab. Bangka Selatan, Air Gegas, Sidoharjo	1 Kegiatan		√	Kewenangan kabupaten
234	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyelenggaraan Jalan	Supaya Jalan Menuju Ke Kantor Desa Di Aspal Karena Banyak Yang Rusak	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Desa Batu Betumpang, Kab. Bangka Selatan, Pulaubesar, Batu Betumpang	1 Kegiatan		√	Bukan kewenangan jalan provinsi
235	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyelenggaraan Jalan	Perbaikan Jalan Gusung -Pantai Kisut Yang Merupakan Akses Jalan Bagi Petani	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Desa Rias, Kab. Bangka Selatan, Toboali, Rias	1 Kegiatan		√	Bukan kewenangan jalan provinsi
236	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Minimnya Air Bersih	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Desa Rias, Kab. Bangka Selatan, Toboali, Rias	1 Kegiatan		√	Tugas dan fungsi Dinas Perkim Kabupaten
237	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Jembatan Yang Ada Di RT 18 Dan RT 19 Diperlebar	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Desa Sidoharjo, Kab. Bangka Selatan, Air Gegas, Sidoharjo	1 Kegiatan		√	Kewenangan pemerintah Kab. Bangka Selatan
238	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Memfasilitasi Pembebasan Lahan Untuk Tempat Praktekkejuruan Dan Untuk Gedung Sekolah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tukak Sadai, Kab. Bangka Selatan, Tukak Sadai, Sadai	1 Kegiatan		√	Kewenangan pemerintah Kab. Bangka Selatan

No.	Isu/Bidang Urusan	Usulan	Permasalahan	Perangkat Daerah	Lokasi	Koefisien	Status		Keterangan
							Diakomodir	Tidak Diakomodir	
239	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyelenggaraan Jalan	Perbaikan Jalan Gusung-Pantai Kisut	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Desa Rias, Kab. Bangka Selatan, Toboali, Rias	1 Kegiatan		√	Bukan kewenangan jalan provinsi
240	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyelenggaraan Jalan	Masyarakat Meminta Pengaspalan Jalan Di Desa Jangkang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Desa Jangkang, Kab. Belitung, Seluruh Kecamatan Dan Kelurahan/Desa	1 Kegiatan		√	Bukan kewenangan jalan provinsi
241	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyelenggaraan Jalan	Perbaikan Jalan Yang Rusak	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Lingkungan Sidodadi Kelurahan Srimenanti, Kab. Bangka, Sungailiat, Sungailiat	1 Kegiatan		√	Bukan kewenangan jalan provinsi
242	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Bantuan Pembangunan Drainase Di RT 04 Dan RT 05	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Lingkungan Sidodadi Kelurahan Sri Menanti, Kab. Bangka, Sungailiat, Sri Menanti	1 Kegiatan		√	Tugas dan fungsi dinas perkim kabupaten
243	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Bantuan Tanah Untuk Pembangunan Gedung Serbaguna	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Lingkungan Sidodadi Kelurahan Srimenanti, Kab. Bangka, Sungailiat, Sri Menanti	1 Kegiatan		√	Kewenangan pemerintah Kab. Bangka
244	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyelenggaraan Jalan	Perbaikan Dan Pengaspalan Jalan Dari Balun Ijuk Ke Dusun Limbung	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Desa Jada Bahrin, Kab. Bangka, Merawang, Jada Bahrin	1 Kegiatan		√	Bukan kewenangan jalan provinsi
245	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Masyarkat Desa Sungai Samak Mengharapkan Pembangunan Drainase Di Jalan Provinsi Dikarenakan Sering Terjadinya Banjir Apabila Hujan Deras	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Desa Sungai Samak, Kab. Belitung, Badau, Sungai Samak	1 Kegiatan		√	Bukan kewenangan jalan provinsi

No.	Isu/Bidang Urusan	Usulan	Permasalahan	Perangkat Daerah	Lokasi	Koefisien	Status		Keterangan
							Diakomodir	Tidak Diakomodir	
246	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyelenggaraan Jalan	Perbaikan Dan Pengaspalan Jalan Karena Merupakan Jalan Perekonomian Bagi Masyarakat Kimak	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Desa Kimak, Kab. Bangka, Merawang, Kimak	1 Kegiatan		√	Bukan kewenangan jalan provinsi
247	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Perbaikan Drainase Jalan Raya	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Desa Maras Senang, Kab. Bangka, Bakam, Maras Senang	1 Kegiatan		√	Bukan kewenangan jalan provinsi
248	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyelenggaraan Jalan	Usulan Pengaspalan Jalan Desa Rias	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Desa Rias, Kab. Bangka Selatan, Toboali, Rias	1 Kegiatan		√	Bukan kewenangan jalan provinsi
249	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Pengelolaan Sampah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Desa Air Ruai, Kab. Bangka, Pemali, Pemali	1 Kegiatan		√	Untuk usulan ini menjadi kewenangan dinas perumahan rakyat dan kawasan pemukiman. bappeda kabupaten bangka (lokasi di kecamatan puding besar) berdasarkan hasil kajian lokasi pembangunan tpast regional ada di kecamatan puding besar
250	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Bantuan Pemasangan Pam Karena Kekurangan Air Bersih	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Desa Air Ruai, Kab. Bangka, Pemali, Air Ruai	1 Kegiatan		√	Kewenangan kabupaten
251	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyelenggaraan Jalan	Bantuan Jalan RT 1 Air Kenanga Dan Pengaspalan Jalan Menuju Kuburan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kelurahan Kenanga, Kab. Bangka, Sungailiat, Kenanga	1 Kegiatan		√	Bukan kewenangan jalan provinsi
252	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyelenggaraan Jalan	Pengaspalan Jalan Menuju Ke Kantor Desa	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Batu Betumpang, Kab. Bangka Selatan, Pulaubesar, Batu Betumpang	1 Kegiatan		√	Bukan kewenangan jalan provinsi
253	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan Gedung	Adanya Ruang/Gedung Untuk Menempatkan Siswa/i Dan Mengoptimalkan BLK	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Toboali, Kab. Bangka Selatan, Toboali, Toboali	1 Kegiatan		√	Tugas dan fungsi dinas tenaga kerja kabupaten
254	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyelenggaraan Jalan	Perbaikan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Desa Teladan, Kab. Bangka Selatan, Toboali, Teladan	1 Kegiatan		√	Bukan kewenangan jalan provinsi

No.	Isu/Bidang Urusan	Usulan	Permasalahan	Perangkat Daerah	Lokasi	Koefisien	Status		Keterangan
							Diakomodir	Tidak Diakomodir	
255	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyelenggaraan Jalan	Dibuatkan Jalan Kecil	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Desa Teladan, Kab. Bangka Selatan, Toboali, Teladan	1 Kegiatan		√	Bukan kewenangan jalan provinsi
256	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Dibuatkan Normalisasi Agar Jalan Tidak Rusak	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Desa Teladan, Kab. Bangka Selatan, Toboali, Teladan	1 Kegiatan		√	Bukan kewenangan jalan provinsi
257	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Masyarakat Meminta Adanya Drainase Dilingkungan Gunung Payung	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kelurahan Pangkallalang, Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	1 Kegiatan		√	Prioritas kegiatan di Air Ketekok Belitung
258	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyelenggaraan Jalan	Masyarakat Mengharapkan Penyelesaian Pembangunan Jalan Lingkar Belitung Agar Mempermudah Akses Masyarakat Sekitar	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Desa Kembiri, Kab. Belitung, Membalong, Kembiri	1 Kegiatan		√	Bukan kewenangan jalan provinsi
259	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Masyarakat Mengharapkan Perbaikan Untuk SPAM Yang Mangkrak Sudah Selama 5 Tahun Sehingga Pipa-pipanya Sudah Banyak Yang Berkarat	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Desa Kembiri, Kab. Belitung, Membalong, Kembiri	1 Kegiatan		√	Kewenangan balai prasarana permukiman wilayah babel
260	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyelenggaraan Penataan Ruang	Ketua Adat Desa Simpang Rusa Mengharapkan Pembebasan Lahan Ex Pt.Timah Yang Merupakan Aset Pt. Timah Agar Menjadi Aset Desa	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Desa Simpang Rusa, Kab. Belitung, Membalong, Simpang Rusa	1 Kegiatan		√	Kewenangan pemerintah Kab. Belitung
261	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyelenggaraan Jalan	Masyarakat Dusun Kampung Baru Mengusulkan Pelebaran Jalan Didusun Mereka	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Desa Simpang Rusa, Kab. Belitung, Membalong, Simpang Rusa	1 Kegiatan		√	Bukan kewenangan jalan provinsi

No.	Isu/Bidang Urusan	Usulan	Permasalahan	Perangkat Daerah	Lokasi	Koefisien	Status		Keterangan
							Diakomodir	Tidak Diakomodir	
262	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Masyarakat Mengharapkan Perbaikan Untuk SPAM Yang Tidak Berfungsi Sudah Sejak Lama Sehingga Pipa-pipanya Sudah Banyak Yang Berkarat	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Desa Simpang Rusa, Kab. Belitung, Membalong, Simpang Rusa	1 Kegiatan		√	Kewenangan balai prasarana permukiman wilayah babel
263	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyelenggaraan Penataan Ruang	Masyarakat Meminta Adanya Pemekaran Dusun Menjadi Desa	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dusun Rembikang, Kab. Belitung, Sijuk, Sijuk, Seluruh Kelurahan/Desa	1 Kegiatan		√	Kewenangan pemerintah kab belitung
264	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyelenggaraan Jalan	Meminta Pelebaran Jalan Di Kawasan Panatai Punai Agar Akses Tidak Terlalu Sempit	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Desa Tanjung Kelumpang, Kab. Belitung Timur, Seluruh Kecamatan Dan Kelurahan/Desa	1 Kegiatan		√	Bukan kewenangan jalan provinsi
265	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Tumpang Tindih Aset Tanah Untuk Dihibahkan Ke Desa Atau Pemda	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Desa Tanjung Kelumpang, Kab. Bangka Barat, Seluruh Kecamatan Dan Kelurahan/Desa	1 Kegiatan		√	Kewenangan pemerintah Kab. Bangka Barat
266	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyelenggaraan Jalan	Masyarakat Berharap Adanya Pembagian Jalan Menjadi 2 Sehingga Memudahkan Masyarakat	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kelurahan Pangkallalang, Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	100 Meter		√	Bukan kewenangan jalan provinsi
267	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Masyarakat Mengharapkan Adanya Pemekaran Dari Dusun Menjadi Desa	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dusun Batu Mana, Kab. Belitung, Membalong, Lassar	1 Kegiatan		√	Kewenangan pemerintah Kab. Belitung
268	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Tumpang Tindih Asset Tanah Desa Di Tanjung Kelumpang Agar Dihibahkan Ke Desa Atau Pemda	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Desa Tanjung Kelumpang, Kab. Belitung Timur, Simpang Pesak, Tanjung Kelumpang	1 Kegiatan		√	Kewenangan pemerintah Kab. Belitung Timur

No.	Isu/Bidang Urusan	Usulan	Permasalahan	Perangkat Daerah	Lokasi	Koefisien	Status		Keterangan
							Diakomodir	Tidak Diakomodir	
269	Pendidikan	Pendidikan Dan Tenaga Pendidikan	Bantuan Beasiswa Anak-Anak Untuk Di Pesantren	Dinas Pendidikan	Desa Banyu Asin, Kab. Bangka, Riau Silip, Banyu Asin	1 Kegiatan		√	Beasiswa dialihkan ke bagian kesra
270	Pendidikan	Pendidikan Dan Tenaga Pendidikan	Menambah Beasiswa Di SMK YPN	Dinas Pendidikan	Smk Ypn Belinyu, Kab. Bangka, Belinyu, Belinyu, Seluruh Kelurahan/Desa	1 Kegiatan		√	Tidak jelas beasiswa untuk guru atau siswa
271	Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan	Dana Bos Dialokasikan Dan Dibuat Aturan	Dinas Pendidikan	Smk Ypn Belinyu, Kab. Bangka, Belinyu, Belinyu, Seluruh Kelurahan/Desa	1 Kegiatan		√	Setiap tahun dana BOS dialokasikan baik APBD maupun APBN
272	Pendidikan	Pendidikan Dan Tenaga Pendidikan	Bantuan Pembangunan Laboratorium Multimedia	Dinas Pendidikan	Smk Ypn Belinyu, Kab. Bangka, Belinyu, Belinyu, Seluruh Kelurahan/Desa	1 Kegiatan		√	Alokasi anggaran untuk sarana prasarana terbatas sehingga dialokasikan yang paling prioritas
273	Pendidikan	Pendidikan Dan Tenaga Pendidikan	Bantuan Penyediaan Alat Multimedia Bahasa Indonesia Lengkap Dengan Soundsystem	Dinas Pendidikan	Sma Ypn Belinyu, Kab. Bangka, Belinyu, Belinyu, Seluruh Kelurahan/Desa	1 Kegiatan		√	Alokasi anggaran untuk sarana prasarana terbatas sehingga dialokasikan yang paling prioritas
274	Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan	Usulan Dari Kepala SMAN 1 Simpang Teritip Meminta Agar Pembuatan Parkir Siswa Diperluas	Dinas Pendidikan	Mentok, Kab. Bangka Barat, Simpang Teritip, Berang	1		√	Alokasi anggaran untuk sarana prasarana terbatas sehingga dialokasikan yang paling prioritas
275	Pendidikan	Pendidikan Dan Tenaga Pendidikan	Usulan Dari Guru Honorer SMK Bina Karya 2 Mentok Agar Besaran Gaji Honorer Swasta Disamakan Dengan Honor Daerah Yang Ada Di SMAN Lain	Dinas Pendidikan	Mentok, Kab. Bangka Barat, Mentok, Mentok, Seluruh Kelurahan/Desa	1 Orang		√	Untuk sekoah swasta kewenangan diatur oleh yayasan, pemerintah provinsi hanya mengatur besaran honorer di sekolah negeri
276	Pendidikan	Pendidikan Dan Tenaga Pendidikan	Usulan Dari Guru Honorer SMK Bina Karya 2 Mentok Agar Gaji Mereka Dirinci Dan Dipisah Secara Detail Besaran Dari Dana BOS Dan Insentif Agar Lebih Jelas	Dinas Pendidikan	Smkn Bina Karya 2, Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	1 Orang		√	Sesuai juknis dana BOS

No.	Isu/Bidang Urusan	Usulan	Permasalahan	Perangkat Daerah	Lokasi	Koefisien	Status		Keterangan
							Diakomodir	Tidak Diakomodir	
277	Pendidikan	Pendidikan Dan Tenaga Pendidikan	Usulan Kepala SMKN 1 Parittiga Agar Dibuatkan Lapangan Olahraga Basket Dan Sepakbola	Dinas Pendidikan	Smkn1 Parittiga, Kab. Bangka Barat, Parittiga, Sekar Biru	1 Buah		√	Alokasi anggaran untuk sarana prasarana terbatas sehingga dialokasikan yang paling prioritas
278	Pendidikan	Pendidikan Dan Tenaga Pendidikan	Bantuan Peralatan Untuk Praktek Teknik	Dinas Pendidikan	Smk Ypn, Kab. Bangka, Belinyu, Belinyu, Seluruh Kelurahan/Desa	1 Kegiatan		√	Alokasi anggaran untuk sarana prasarana terbatas sehingga dialokasikan yang paling prioritas
279	Pendidikan	Pendidikan Dan Tenaga Pendidikan	Usulan Masyarakat Air Itam Agar Pihak Sekolah Memberikan Keringanan Kepada Orang Tuya Yang Tidak Mampu Mengenai Uang Komite	Dinas Pendidikan	Air Itam, Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	1 Kegiatan		√	Sekolah akan mempertimbangkan dan mengambil kebijakan untuk siswa tidak mampu
280	Pendidikan	Pendidikan Dan Tenaga Pendidikan	Masalah Insentif Yang Berkaitan Dengan Gaji Guru TK/PAUD	Dinas Pendidikan	Desa Rias, Kab. Bangka Selatan, Toboali, Rias	1 Kegiatan	√		Akan diusulkan melalui bantuan keuangan APBD 2021, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan APBD
281	Pendidikan	Pendidikan Dan Tenaga Pendidikan	Masyarakat Desa Belo Laut Meminta Agar Kuota Beasiswa Bagi Siswa Tidak Mampu Diperbanyak	Dinas Pendidikan	Desa Belo Laut Mentok, Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	1 Kegiatan	√		
282	Pendidikan	Pendidikan Dan Tenaga Pendidikan	Usulan Dari Kepala SMKN 1 Pariitiga Meminta Agar Diberikannya Satu Orang Tenaga Administrasi Pengelola Keuangan Atau Bendahara Yang Berstatus PNS Sesuai Peraturan	Dinas Pendidikan	Smkn 1 Parittiga, Kab. Bangka Barat, Parittiga, Sekar Biru	1 Orang	√		

No.	Isu/Bidang Urusan	Usulan	Permasalahan	Perangkat Daerah	Lokasi	Koefisien	Status		Keterangan
							Diakomodir	Tidak Diakomodir	
283	Pendidikan	Pendidikan Dan Tenaga Pendidikan	Usulan Dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Meminta Agar Diangkat Satu Orang Honorer Untuk Guru Agama Budha Di SMKN 1 Parittiga	Dinas Pendidikan	Kepala Cabang Dinas Wilayah Iii, Kab. Bangka Barat, Parittiga, Sekar Biru	1 Orang	√		Koordinasi dengan pihak kemenag,tentang kewenangan kebutuhan atau pengangkatannya
284	Pendidikan	Pendidikan Dan Tenaga Pendidikan	Perlu Ada Kurikulum Muatan Lokal Khusus Lingkungan Dalam Pembelajaran Lingkungan	Dinas Pendidikan	Rumah Makan Pawon, Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Gedung Nasional	1 Kegiatan	√		
285	Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan	Dengan Adanya Pelaksanaan Latihan Kepemimpinan Siswa Tingkat SLTA Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dapat Kembali Diaktifkan, Karena Sangat Penting Dalam Pengembangaan Karakter Leadership Bagi Penerus Bangsa.	Dinas Pendidikan	Sman 2 Pangkalpinang, Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Kacang Pedang	1 Kegiatan	√		
286	Pendidikan	Pendidikan Dan Tenaga Pendidikan	Masalah Beasiswa	Dinas Pendidikan	Smk N 1 Payung, Kab. Bangka Selatan, Payung, Payung	1 Kegiatan	√		Khusus untuk guru yang lulus seleksi tingkat provinsi
287	Pendidikan	Pendidikan Dan Tenaga Pendidikan	Minta Dibuat Pagar SMKN 1 Payung	Dinas Pendidikan	Smkn 1 Payung, Kab. Bangka Selatan, Payung, Payung	1 Kegiatan		√	Alokasi anggaran untuk sarana prasarana terbatas sehingga dialokasikan yang paling prioritas
288	Pendidikan	Pendidikan Dan Tenaga Pendidikan	Untuk Dibuat Pagar Sekolah Kurang Lebih 600 M Di SMKN 1 Pulau Besar	Dinas Pendidikan	Smkn 1 Pulau Besar, Kab. Bangka Selatan, Pulaubesar, Panca Tunggal	1 Kegiatan		√	Alokasi anggaran untuk sarana prasarana terbatas sehingga dialokasikan yang paling prioritas
289	Pendidikan	Pendidikan Dan Tenaga Pendidikan	Untuk Dibuat Siring/Drainase Di Lahan Praktik Untuk Siswa	Dinas Pendidikan	Smkn 1 Pulau Besar, Kab. Bangka Selatan, Pulaubesar, Panca Tunggal	1 Kegiatan		√	Alokasi anggaran untuk sarana prasarana terbatas sehingga dialokasikan yang paling prioritas

No.	Isu/Bidang Urusan	Usulan	Permasalahan	Perangkat Daerah	Lokasi	Koefisien	Status		Keterangan
							Diakomodir	Tidak Diakomodir	
290	Pendidikan	Pendidikan Dan Tenaga Pendidikan	Adanya Pengadaan Peralatan Belajar Seni Budaya Melayu Karena Tenaga Pengajarnya Sudah Ada	Dinas Pendidikan	Smkn 1 Pilau Besar, Kab. Bangka Selatan, Pulaubesar, Panca Tunggal	1 Kegiatan		√	Akan diusulakan melalui dana DAK 2021
291	Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan	Masyarakat Desa Penyampak Meminta Untuk Memberikan Beasiswa Kurang Mampu Dan Yang Berprestasi	Dinas Pendidikan	Desa Penyampak, Kab. Bangka Barat, Tempilang, Penyampak	1 Kegiatan	√		
292	Pendidikan	Pendidikan Dan Tenaga Pendidikan	Agar Dibuat Gedung UKS Serta Fasilitas Pendukungnya, Rehab Plafon 2 Ruang Kelas Yang Rusak Dan Pembangunan Tempat Parkir Untuk Guru Dan Siswa	Dinas Pendidikan	Smkn 1 Pulau Besar, Kab. Bangka Selatan, Pulaubesar, Panca Tunggal	1 Kegiatan		√	Akan diusulakan melalui dana DAK 2021
293	Pendidikan	Pendidikan Dan Tenaga Pendidikan	Pembangunan Pagar Sekolah	Dinas Pendidikan	Smk Negeri 1 Bakam, Kab. Bangka, Bakam, Bakam, Seluruh Kelurahan/Desa	1 Kegiatan		√	Alokasi anggaran untuk sarana prasarana terbatas sehingga dialokasikan yang paling prioritas
294	Pendidikan	Pendidikan Dan Tenaga Pendidikan	Masalah Insentif Yang Berkaitan Dengan Gaji Guru TK/PAUD Untuk Menaikan Insentif Bagi Guru TK/PAUD	Dinas Pendidikan	Desa Rias, Kab. Bangka Selatan, Toboali, Rias	1 Kegiatan	√		Akan diusulkan melalui bantuan keuangan APBD 2021, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan APBD
295	Pendidikan	Pendidikan Dan Tenaga Pendidikan	Usuan Kenaikan Insentif Guru TK/PAUD Di Desa Rias Kec. Toboali	Dinas Pendidikan	Desa Rias, Kab. Bangka Selatan, Toboali, Rias	1 Kegiatan	√		Akan diusulkan melalui bantuan keuangan APBD 2021, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan APBD
296	Pendidikan	Pendidikan Dan Tenaga Pendidikan	Masalah Untuk Mendapatkan Beasiswa	Dinas Pendidikan	Smk N 1 Payung, Kab. Bangka Selatan, Payung, Payung, Seluruh Kelurahan/Desa	1 Kegiatan	√		

No.	Isu/Bidang Urusan	Usulan	Permasalahan	Perangkat Daerah	Lokasi	Koefisien	Status		Keterangan
							Diakomodir	Tidak Diakomodir	
297	Pendidikan	Pendidikan Dan Tenaga Pendidikan	Agar Dibuat Pagar SMKN 1 Payung	Dinas Pendidikan	Smkn 1 Payung, Kab. Bangka Selatan, Payung, Payung, Seluruh Kel./Desa	1 Kegiatan		√	Alokasi anggaran untuk sarana prasarana terbatas sehingga dialokasikan yang paling prioritas
298	Pendidikan	Pendidikan Dan Tenaga Pendidikan	Untuk Dibuat Pagar Sekolah Kurang Lebih 600 M Di SMKN 1 Pulau Besar	Dinas Pendidikan	Smkn 1 Pulau Besar, Kab. Bangka Selatan, Pulaubesar, Pulaubesar, Seluruh Kel./Desa	1 Kegiatan		√	Alokasi anggaran untuk sarana prasarana terbatas sehingga dialokasikan yang paling prioritas
299	Pendidikan	Pendidikan Dan Tenaga Pendidikan	Untuk Dibuat Siring/Drainase Di Lahan Praktik Untuk Siswa	Dinas Pendidikan	Smkn1 Pulau Besar, Kab. Bangka Selatan, Pulaubesar, Pulaubesar, Seluruh Kelurahan/Desa	1 Kegiatan		√	Alokasi anggaran untuk sarana prasarana terbatas sehingga dialokasikan yang paling prioritas
300	Pendidikan	Pendidikan Dan Tenaga Pendidikan	Untuk Adanya Pengadaan Peralatan Belajar Seni Budaya Melayu Karena Tenaga Pengajarnya Sudah Ada	Dinas Pendidikan	Smk N 1 Pulau Besar, Kab. Bangka Selatan, Pulaubesar, Pulaubesar, Seluruh Kelurahan/Desa	1 Kegiatan		√	Akan diusulakan melalui dana DAK 2021
301	Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan	Masyarakat Mengharapkan Kepada Dinas Pendidikan Untuk Memberikan Keringanan Kepada Wali Murid Yang Kurang Mampu Masalah Iuran Sekolah.	Dinas Pendidikan	Gg. Salam Kacang Pedang, Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Kacang Pedang	1 Kegiatan	√		Akan diusulkan melalui kebijakan pengurangan dampak Covid 19
302	Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan	Masyarakat Mengharapkan Kepada Dinas Pendidikan Atau Pihak Sekolah Untuk Memudahkan Wali Murid Yang Kurang Mampu Dalam Mem-bayar Uang Komite Sekolah	Dinas Pendidikan	Lapangan Futsal Lksa Adh-Dhuha, Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Bukitmerapin	1 Kegiatan	√		Akan diusulkan melalui kebijakan pengurangan dampak Covid 19
303	Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan	Masyarakat Mengharapkan Adanya Fasilitas Untuk Mendapatkan Bantuan Beasiswa Untuk Murid Yang Berprestasi Atau Yang Kurang Mampu	Dinas Pendidikan	Kecamatan Rangkui, Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Keramat	1 Kegiatan	√		

No.	Isu/Bidang Urusan	Usulan	Permasalahan	Perangkat Daerah	Lokasi	Koefisien	Status		Keterangan
							Diakomodir	Tidak Diakomodir	
304	Pendidikan	Pendidikan Dan Tenaga Pendidikan	Guru SMKN I Pangkalpinang Masalah Realisasi Pembayaran Sertifikasi Guru Yang Biasanya Dibayar Pertriwulan Pertama Tetapi Kenyataannya Untuk Sertifikasi Dibayar Pada Bulan Juni	Dinas Pendidikan	Smkn I Pangkalpinang, Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Rawa Bangun	1 Kegiatan		√	Mengacu pada juknis dan regulasi dan data usulan yang disampiakan ke dinas pendidikan
305	Pendidikan	Pendidikan Dan Tenaga Pendidikan	Mohon Kejelasan Dari Pihak Dinas Pendidikan Bagai Mana Perbedaaan Sertifikasi Strukturan Dan Sertifikasi Bagi JFT Kenapa Lebih Besar JFT Untuk Pembayaran TPP-nya	Dinas Pendidikan	Smkn I Pangkalpinang, Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Batin Tikal	1 Kegiatan		√	Mengacu pada juknis dan regulasi
306	Pendidikan	Pendidikan Dan Tenaga Pendidikan	Mohon Bantuan Untuk Perbaikan Atap/Plafon Sekolah Yang Ada Dikelas XII Yang Sudah Rusak, Karena Ditakutkan Akan Mengganggu Pembelajaran Di Sekolah Apabila Terjadi Hujan Deras.	Dinas Pendidikan	Smkn 1 Pangkalpinang, Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Batin Tikal	1 Kegiatan	√		
307	Pendidikan	Pendidikan Dan Tenaga Pendidikan	Mohon Untuk Pemerintah Mengadakan Atau Membuka Lowongan Untuk Guru Agama Kristen Mengingat Disetiap Sekolah Swasta Tidak Adanya Guru Agama Untuk Penganut Agama Kristen	Dinas Pendidikan	Hotel Pia Pangkalpinang, Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Batin Tikal	1 Kegiatan		√	Pengisian kebutuhan guru di sekolah swasta menjadi kewenangan yayasan atau sekolah swasta tersebut
308	Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan	Pemerintah Hampir Mengkebumikan Sekolah-sekolah Swasta Dan Fasilitas Makin Ditingkatkan Untuk Sekolah-sekolah Negeri Dan Diharapakan Kepada Pemerintah Apabila Ada Bantuan Dana Mohon Disetarakan Dengan Sekolah-sekolah Negeri	Dinas Pendidikan	Hotel Pia Pangkalpinang, Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Batin Tikal	1 Kegiatan		√	Anggaran saran dan prasarana terbatas, pemenuhan kebutuhan sesuai dengan prioritas provinsi namun tidak menutup kemungkinan sekolah swasta juga dibantu

No.	Isu/Bidang Urusan	Usulan	Permasalahan	Perangkat Daerah	Lokasi	Koefisien	Status		Keterangan
							Diakomodir	Tidak Diakomodir	
309	Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan	Infrastruktur Pendidikan Seperti Pagar, Sumur Bor, Rumah Dinas Guru	Dinas Pendidikan	Desa Tanjunglabu, Kab. Bangka Selatan, Lepar Pongok, Tanjunglabu	1 Kegiatan		√	Alokasi anggaran untuk sarana prasarana terbatas sehingga dialokasikan yang paling prioritas
310	Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan	Masyarakat Memohon Untuk Dinas Pendidikan Memberikan Dispensasi Kepada Masyarakat Yang Kurang Mampu Dalam Membayar Iuran Sekolah	Dinas Pendidikan	Jl.Pikas 4 Air Salemba, Kota Pangkal Pinang, Gabek, Air Salemba	1 Kegiatan	√		Akan diusulkan melalui kebijakan pengurangan dampak Covid 19
311	Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan	Sekolah-Sekolah Swasta Khusunya SMK Tunas Karya Memohon Untuk Diberikan Bantuan Alat-alat Olahraga	Dinas Pendidikan	Jl Pikas 4 Air Salemba, Kota Pangkal Pinang, Gabek, Air Salemba	1 Kegiatan		√	Alokasi anggaran untuk sarana prasarana terbatas sehingga dialokasikan yang paling prioritas
312	Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan	Mohon Kejelasan Dari Pihak Pemerintah Untuk Status Lahan SMKN 5 Yang Ada Di Provinsi Kep. Babel Sejak Tahun 2016 Dan Kepengurusan Izinnya Juga Belum Selesai Sampai Dengan Saat Ini	Dinas Pendidikan	Hotel Edotel, Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitbesar	1 Kegiatan	√		Akan diteruskan melalui biro pemerintahan
313	Pendidikan	Pendidikan Dan Tenaga Pendidikan	SMKN 5 Pangkalpinang Mohon Untuk Bantuan Dana Untuk Pembangunan Gedung Baru Untuk Pelayanan Administrasi Seperti Ruang Guru Yang Masih Mengindduk Di Ruang Laboratorium Dan Pembangunan Area Parkiran Mengingat Batas Lahan Kami Cuma Tersisa 10 X 30 Cm	Dinas Pendidikan	Hotel Edotel, Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitbesar	1 Kegiatan		√	Alokasi anggaran untuk sarana prasarana terbatas sehingga dialokasikan yang paling prioritas

No.	Isu/Bidang Urusan	Usulan	Permasalahan	Perangkat Daerah	Lokasi	Koefisien	Status		Keterangan
							Diakomodir	Tidak Diakomodir	
314	Pendidikan	Pendidikan Dan Tenaga Pendidikan	Supaya Dibuat Gedung UKS Serta Fasilitas Pendukungnya, Rehab Plafon 2 Ruang Kelas Yang Rusak Dan Pembangunan Tempat Parkir Untuk Guru Dan Siswa	Dinas Pendidikan	Smkn 1 Pulau Besar, Kab. Bangka Selatan, Pulaubesar, Pulaubesar, Seluruh Kelurahan/Desa	1 Kegiatan		√	Akan diusulakan melalui dana DAK 2021
315	Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan	Usulan Pembangunan SMA Negeri Di Kecamatan Tukak Sadai Dikarenakan Jarak Tempuh Yang Jauh Dari Kecamatan Toboali	Dinas Pendidikan	Tukak, Kab. Bangka Selatan, Tukak Sadai, Tukak	1 Kegiatan		√	Akan dipertimbangkan melalui kajian akademis
316	Pendidikan	Pendidikan Dan Tenaga Pendidikan	Diadakan Pelatihan Guru Agama	Dinas Pendidikan	Kecamatan Sungailiat, Kab. Bangka, Sungailiat, Sungailiat, Seluruh Kelurahan/Desa	1 Kegiatan	√		-
317	Pendidikan	Pendidikan Dan Tenaga Pendidikan	Supaya Adanya Tempat Penampungan Bagi Siswa/i Yang Sudah Lulus Agar Kemampuan Mereka Dapat Bermanfaat	Dinas Pendidikan	Pulau Besar, Kab. Bangka Selatan, Pulaubesar, Batu Betumpang	1 Kegiatan		√	Dikoordinasikan dengan stakeholder
318	Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan	Peningkatan Status Sekolah Dari Swasta Ke Negeri	Dinas Pendidikan	Madrasah Aliyah Pangkal Niur, Kab. Bangka, Riau Silip, Pangkal Niur	1 Kegiatan		√	Bukan kewenangan
319	Pendidikan	Pendidikan Dan Tenaga Pendidikan	Bantuan Perangkat Komputer Untuk Ujian Nasional	Dinas Pendidikan	Madrasah Aliyah Pangkal Niur, Kab. Bangka, Riau Silip, Pangkal Niur	1 Kegiatan		√	UN ditidakan digantikan assesment
320	Pendidikan	Pendidikan Dan Tenaga Pendidikan	Bantuan Penambahan Ruang Kelas, Sarana Olahraga, Kesenian Dan Tempat Parkir	Dinas Pendidikan	Sman 2 Mendo Barat, Kab. Bangka, Mendo Barat, Penagan	1 Kegiatan		√	Alokasi anggaran untuk sarana prasarana terbatas sehingga dialokasikan yang paling prioritas

No.	Isu/Bidang Urusan	Usulan	Permasalahan	Perangkat Daerah	Lokasi	Koefisien	Status		Keterangan
							Diakomodir	Tidak Diakomodir	
321	Pendidikan	Pendidikan Dan Tenaga Pendidikan	Diberikan Fasilitas Kejuruan Yang Lebih Memadai	Dinas Pendidikan	Tukak Sadai, Kab. Bangka Selatan, Tukak Sadai, Sadai	1 Kegiatan		√	Alokasi anggaran untuk sarana prasarana terbatas dan bertahap
322	Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan	Bantuan Fasilitasi Meja Kursi Dan Papan Tulis	Dinas Pendidikan	Tukak Sadai, Kab. Bangka Selatan, Tukak Sadai, Sadai	1 Kegiatan		√	Papan tulis dapat dianggarakn melalui dana BOS sekolah
323	Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan	Masyarakat Mengharapkan Pembangunan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) Agar Anak-Anak Mereka Punya Pilihan Antara Sekolah Kejuruan Atau Umum, Dikarenakan Dikecamatan Badau Baru Ada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Saja	Dinas Pendidikan	Desa Sungai Samak, Kab. Belitung, Badau, Sungai Samak	1 Kegiatan		√	Akan dipertimbangkan melalui kajian akademis
324	Pendidikan	Pendidikan Dan Tenaga Pendidikan	Bantuan Untuk Biaya Pendidikan Dan Kesehatan Yang Layak Untuk Anak Ketergangguan Mental	Dinas Pendidikan	Desa Batu Betumpang, Kab. Bangka Selatan, Pulaubesar, Batu Betumpang	1 Kegiatan		√	Konfirmasikan dulu anak ketergangguan mental (ODGJ) atau autis
325	Pendidikan	Pendidikan Dan Tenaga Pendidikan	Usulan Kenaikan Insentif Bagi Guru TK/PAUD	Dinas Pendidikan	Desa Rias, Kab. Bangka Selatan, Toboali, Rias	1 Kegiatan	√		Akan diusulkan melalui bantuan keuangan APBD 2021, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan APBD
326	Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan	Bantuan Pagar Sekolah Untuk STM Dan SMK	Dinas Pendidikan	Desa Rias, Kab. Bangka Selatan, Toboali, Rias	1 Kegiatan		√	Alokasi anggaran untuk sarana prasarana terbatas sehingga dialokasikan yang paling prioritas
327	Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan	Masyarakat Meminta Dibangunkan SMA/SMK Di Kecamatan Dendang	Dinas Pendidikan	Desa Jengkang, Kab. Belitung, Seluruh Kecamatan Dan Kelurahan/Desa	1 Buah		√	Akan dipertimbangkan melalui kajian akademis

No.	Isu/Bidang Urusan	Usulan	Permasalahan	Perangkat Daerah	Lokasi	Koefisien	Status		Keterangan
							Diakomodir	Tidak Diakomodir	
328	Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan	Masyarakat Meminta Kepastian Mengenai Universitas Di Desa Tanjung Kelumpang	Dinas Pendidikan	Desa Tanjung Kelumpang, Kab. Belitung Timur, Dendang, Dendang, Seluruh Kelurahan/Desa	1 Kegiatan		√	Akan dikoordinasikan lebih lanjut
329	Pendidikan	Pendidikan Dan Tenaga Pendidikan	Usulan Kenaikan Insentif Bagi Guru TK/PAUD Di Desa Rias	Dinas Pendidikan	Desa Rias, Kab. Bangka Selatan, Toboali, Rias	1 Kegiatan	√		Akan diusulkan melalui bantuan keuangan APBD 2021, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan APBD
330	Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan	Masyarakat Meminta Terkait Beasiswa Agar Diinfokan Ke Kabupaten Belitung Timur	Dinas Pendidikan	Desa Jangkang, Kab. Belitung Timur, Dendang, Jangkang	1 Kegiatan	√		
331	Pendidikan	Pendidikan Dan Tenaga Pendidikan	Bantuan Dana BOS Bagi SMA	Dinas Pendidikan	Desa Tanjung Labu, Kab. Bangka Selatan, Lepar Pongok, Tanjunglabu	1 Kegiatan	√		SMA sudah mendapat alokasi dana BOS APBD dan APBN
332	Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan	Insfrastruktur Pendidikan Seperti Pagar, Sumur Bor, Rumah Dinas Guru	Dinas Pendidikan	Desa Tanjung Labu, Kab. Bangka Selatan, Lepar Pongok, Tanjunglabu	1 Kegiatan		√	Alokasi anggaran untuk sarana prasarana terbatas sehingga dialokasikan yang paling prioritas
333	Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan	Bantuan Dana BOS Bagi SMA	Dinas Pendidikan	Tanjung Labu, Kab. Bangka Selatan, Lepar Pongok, Tanjunglabu	1 Kegiatan	√		SMA sudah mendapat alokasi dana BOS APBD dan APBN
334	Pendidikan	Pendidikan Dan Tenaga Pendidikan	Pembangunan Infrastruktur Pendidikan Seperti Sumur Bor Dan Rumah Dinas Guru	Dinas Pendidikan	Desa Tanjung Labu, Kab. Bangka Selatan, Lepar Pongok, Tanjunglabu	1 Kegiatan		√	Pembangunan infrastruktur pendidikan seperti sumur bor dan rumah dinas guru dimasukkan ke bidang pengelolaan pendidikan
335	Pendidikan	Pendidikan Dan Tenaga Pendidikan	Memberikan Fasilitasi Keg. Ekstrakulikuler Seperti Drumband	Dinas Pendidikan	Tanjung Labu, Kab. Bangka Selatan, Lepar Pongok, Tanjunglabu	1 Kegiatan		√	Fasilitasi kegiatan ekstrakulikuler seperti drumband dimasukkan ke bidang pengelolaan pendidikan
336	Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan	Pembangunan/Perluasan Mushola Di SMKN 1 Toboali	Dinas Pendidikan	Toboali, Kab. Bangka Selatan, Toboali, Toboali	1 Kegiatan		√	Alokasi anggaran untuk sarana prasarana terbatas sehingga dialokasikan yang paling prioritas

No.	Isu/Bidang Urusan	Usulan	Permasalahan	Perangkat Daerah	Lokasi	Koefisien	Status		Keterangan
							Diakomodir	Tidak Diakomodir	
337	Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan	Bantuan Pagar Sekolah	Dinas Pendidikan	Toboali, Kab. Bangka Selatan, Toboali, Toboali	1 Kegiatan		√	Alokasi anggaran untuk sarana prasarana terbatas sehingga dialokasikan yang paling prioritas
338	Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan	Bantuan Sumur Bor	Dinas Pendidikan	Tukak Saadai, Kab. Bangka Selatan, Tukak Sadai, Sadai	1 Kegiatan		√	Alokasi anggaran untuk sarana prasarana terbatas sehingga dialokasikan yang paling prioritas
339	Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan	Bantuan Bus Sekolah	Dinas Pendidikan	Tukak Sadai, Kab. Bangka Selatan, Tukak Sadai, Sadai	1 Kegiatan		√	Bukan merupakan kewenangan, akan dikoordinasikan dengan dinas perhubungan
340	Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan	Didirikan Pagar Sekolah	Dinas Pendidikan	Desa Air Gegas, Kab. Bangka Selatan, Air Gegas, Airgegas	1 Kegiatan		√	Alokasi anggaran untuk sarana prasarana terbatas sehingga dialokasikan yang paling prioritas
341	Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan	Bantuan Pembangunan/Perluasan Mushola Di SMKN 1 Toboali	Dinas Pendidikan	Toboali, Kab. Bangka Selatan, Toboali, Toboali	1 Kegiatan		√	Alokasi anggaran untuk sarana prasarana terbatas sehingga dialokasikan yang paling prioritas
342	Pendidikan	Pendidikan Dan Tenaga Pendidikan	Bantuan Penimbunan Perataan Dataran Sekolah	Dinas Pendidikan	Toboali, Kab. Bangka Selatan, Toboali, Toboali	1 Kegiatan		√	Alokasi anggaran untuk sarana prasarana terbatas sehingga dialokasikan yang paling prioritas
343	Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan	Pembangunan Sumur Bor Di SMKN 1 Tukak Sadai	Dinas Pendidikan	Tukak Sadai, Kab. Bangka Selatan, Tukak Sadai, Sadai	1 Kegiatan		√	Alokasi anggaran untuk sarana prasarana terbatas sehingga dialokasikan yang paling prioritas
344	Pendidikan	Pendidikan Dan Tenaga Pendidikan	Bantuan Bus Sekolah	Dinas Pendidikan	Tukak Sadai, Kab. Bangka Selatan, Tukak Sadai, Sadai	1 Kegiatan		√	Akan dikoordinasikan dengan dinas perhubungan
345	Pendidikan	Pengendalian Perzinan Pendidikan	Memfasilitasi Pembebasan Lahan Untuk Tempat Praktek Kejuruan Dan Gedung Sekolah	Dinas Pendidikan	Toboali, Kab. Bangka Selatan, Toboali, Toboali	1 Kegiatan		√	Akan dikoordinasikan ke biro pemerintahan
346	Pendidikan	Pendidikan Dan Tenaga Pendidikan	Beasiswa Bagi Yang Berprestasi	Dinas Pendidikan	Tanjung Labu, Kab. Bangka Selatan, Lepar Pongok, Tanjunglabu	1 Kegiatan	√		
347	Pendidikan	Pendidikan Dan Tenaga Pendidikan	Penambahan Sarana SMKN 1	Dinas Pendidikan	Toboali, Kab. Bangka Selatan, Toboali, Toboali	1 Kegiatan		√	Alokasi anggaran untuk sarana prasarana terbatas sehingga dialokasikan yang paling prioritas

No.	Isu/Bidang Urusan	Usulan	Permasalahan	Perangkat Daerah	Lokasi	Koefisien	Status		Keterangan
							Diakomodir	Tidak Diakomodir	
348	Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan	Sarana Dan Prasarana Sekolah Diperhatikan Lagi	Dinas Pendidikan	Toboali, Kab. Bangka Selatan, Toboali, Toboali	1 Kegiatan		√	Alokasi anggaran untuk sarana prasarana terbatas sehingga dialokasikan yang paling prioritas
349	Pendidikan	Pendidikan Dan Tenaga Pendidikan	Beasiswa Bagi Yang Kurang Mampu	Dinas Pendidikan	Tukak Sadai, Kab. Bangka Selatan, Tukak Sadai, Sadai	1 Kegiatan	√		
350	Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan	Masyarakat Meminta Kepastian Adanya Universitas Di Desa Tanjung Kelumpang	Dinas Pendidikan	Desa Tanjung Kelumpang, Kab. Belitung Timur, Seluruh Kecamatan Dan Kelurahan/Desa	1 Kegiatan		√	Akan dilakukan koordinasi dengan pihak terkait
351	Pendidikan	Pendidikan Dan Tenaga Pendidikan	Bantuan Meja, Kursi Dan Papan Tulis	Dinas Pendidikan	Tukak Sadai, Kab. Bangka Selatan, Tukak Sadai, Sadai	1 Kegiatan		√	Papan tulis dapat dianggarakn melalui dana BOS sekolah
352	Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan	SMKN 1 Kelapa Kampit Meminta Agar Dibangun Lapangan Olahraga, Pengaspalan Halaman Sekolah, Pembangunan Laboraturium Bahasa Inggris, Dan Lapangan Upacara	Dinas Pendidikan	Belitung Timur, Kab. Belitung Timur, Seluruh Kecamatan Dan Kelurahan/Desa	1 Kegiatan		√	Alokasi anggaran untuk sarana prasarana terbatas sehingga dialokasikan yang paling prioritas
353	Pendidikan	Pendidikan Dan Tenaga Pendidikan	SMKN 1 Kelapa Kampit Meminta Adanya Beasiswa Guru	Dinas Pendidikan	Kelapa Kampit, Kab. Belitung Timur, Seluruh Kecamatan Dan Kelurahan/Desa	1 Kegiatan	√		Dialoksikan/dianggarkan pada tahun 2020 dan seterusnya
354	Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan	Bantuan Pagar Sekolah Untuk STM Dan SMK	Dinas Pendidikan	Desa Rias, Kab. Bangka Selatan, Toboali, Rias	1 Meter		√	Alokasi anggaran untuk sarana prasarana terbatas sehingga dialokasikan yang paling prioritas
355	Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan	Bantuan Pagar Sekolah	Dinas Pendidikan	Desa Tanjung Labu, Kab. Bangka Selatan, Lepar Pongok, Tanjunglabu	1 Meter		√	Alokasi anggaran untuk sarana prasarana terbatas sehingga dialokasikan yang paling prioritas
356	Pendidikan	Pendidikan Dan Tenaga Pendidikan	Bantuan Pagar Sekolah	Dinas Pendidikan	Lepar Pongok, Kab. Bangka Selatan, Lepar Pongok, Tanjunglabu	1 Meter		√	Bantuan pagar sekolah dimasukkan ke bidang pengelolaan pendidikan

No.	Isu/Bidang Urusan	Usulan	Permasalahan	Perangkat Daerah	Lokasi	Koefisien	Status		Keterangan
							Diakomodir	Tidak Diakomodir	
357	Pendidikan	Pendidikan Dan Tenaga Pendidikan	Bantuan Bus Sekolah	Dinas Pendidikan	Kelurahan Kenanga, Kab. Bangka, Sungailiat, Kenanga	1 Unit		√	Akan dikoordinasikan dengan dinas perhubungan
358	Pendidikan	Pendidikan Dan Tenaga Pendidikan	Bantuan Bus Sekolah	Dinas Pendidikan	Toboali, Kab. Bangka Selatan, Toboali, Toboali	1 Unit		√	Akan dikoordinasikan dengan dinas perhubungan
359	Pendidikan	Pendidikan Dan Tenaga Pendidikan	Bantuan Bus Sekolah	Dinas Pendidikan	Air Gegas, Kab. Bangka Selatan, Air Gegas, Airgegas	1 Unit		√	Akan dikoordinasikan dengan dinas perhubungan
360	Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan	Pengadaan Bus Sekolah	Dinas Pendidikan	Tanjung Labu, Kab. Bangka Selatan, Lepar Pongok, Tanjunglabu	1 Unit		√	Akan dikoordinasikan dengan dinas perhubungan
361	Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan	Bantuan Bus Sekolah	Dinas Pendidikan	Tukak Sadai, Kab. Bangka Selatan, Tukak Sadai, Sadai	1 Unit		√	Akan dikoordinasikan dengan dinas perhubungan
362	Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan	Guru Yang Ada Di SLB Tanjungpandan Meminta Adanya Sanitasi Di Halaman Sekolah Dan Pembuatan Drainase Di Sekolah	Dinas Pendidikan	Kelurahan Pangkallalang, Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	1 Kegiatan		√	Alokasi anggaran untuk sarana prasarana terbatas sehingga dialokasikan yang paling prioritas
363	Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan	Guru Di SMPN 3 Tanjungpandan Pemerintah Dapat Memberi Solusi Terkait Polusi Disekolah Dikarenakan Dekat Dengan Pemeliharaan Ternak	Dinas Pendidikan	Kelurahan Pangkallalang, Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	1 Kegiatan		√	Kewenangan Kab/Kota
364	Pendidikan	Pendidikan Dan Tenaga Pendidikan	Guru Honorer SD 30 Dan Guru TK Membalong Mengeluhkan Kecilnya Gaji/Insentif Yang Mereka Terima Dan Berharap Ada Insentif Lebih Dari Pemerintah Yang Terakhir Kali Diterima Pada Tahun 2014	Dinas Pendidikan	Desa Kembiri, Kab. Belitung, Membalong, Kembiri	1 Kegiatan		√	Guru honorer jenjang SD dan TK berada pada wewenang pemerintah daerah Kabupaten/Kota

No.	Isu/Bidang Urusan	Usulan	Permasalahan	Perangkat Daerah	Lokasi	Koefisien	Status		Keterangan
							Diakomodir	Tidak Diakomodir	
365	Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan	Pegawai Honorer Di SD 30 Membalong Mengharapkan Adanya Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Untuk Tenaga TU Dan Perpustakaan	Dinas Pendidikan	Desa Kembiri, Kab. Belitung, Membalong, Kembiri	1 Kegiatan		√	Guru honorer jenjang SD dan TK berada pada wewenang pemerintah daerah Kabupaten/Kota
366	Pendidikan	Pengendalian Perzinan Pendidikan	Masyarakat Mengharapkan Pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Dipercepat	Dinas Pendidikan	Desa Kembiri, Kab. Belitung, Membalong, Kembiri	1 Kegiatan		√	Sudah diajukan melalui dana pusat untuk pembangunan USB
367	Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan	Masyarakat Meminta Adanya Perpustakaan Global	Dinas Pendidikan	Kelurahan Pangkallalang, Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	1 Kegiatan		√	Akan dipertimbangkan melalui kajian akademis
368	Pendidikan	Pengendalian Perzinan Pendidikan	Masyarakat Berharap Adanya Unversitas Di Belitung	Dinas Pendidikan	Kelurahan Pangkallalang, Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	1 Kegiatan		√	Akan dipertimbangkan melalui kajian akademis
369	Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan	Guru PAUD Dan TK Mengharapkan Penambahan Insentif	Dinas Pendidikan	Desa Sijuk, Kab. Belitung, Sijuk, Sijuk	1 Kegiatan	√		Akan diusulkan melalui bantuan keuangan APBD 2021, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan APBD
370	Pendidikan	Pengendalian Perzinan Pendidikan	Masyarakat Membutuhkan SMK Pariwisata Di Desa Sijuk	Dinas Pendidikan	Desa Sijuk, Kab. Belitung, Sijuk, Sijuk	1 Kegiatan		√	Sudah ada SMK 1 Sijuk
371	Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan	Masyarakat Meminta Adanya Beasiswa Untuk Anak Kurang Mampu	Dinas Pendidikan	Desa Sijuk, Kab. Belitung, Sijuk, Sijuk, Seluruh Kelurahan/Desa	1 Kegiatan	√		
372	Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan	Lamanya Dana BOS Untuk Bantuan Kegiatan SMA	Dinas Pendidikan	Sman 1 Tanjung Pandan, Kab. Belitung, Seluruh Kecamatan Dan Kelurahan/Desa	1 Kegiatan		√	Pencairan dana BOS tergantung pada sekolah masing-masing

No.	Isu/Bidang Urusan	Usulan	Permasalahan	Perangkat Daerah	Lokasi	Koefisien	Status		Keterangan
							Diakomodir	Tidak Diakomodir	
373	Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan	Kurangnya Transparanti Atau Keterbukaan Terkait Dengan Penyebaran Informasi Beasiswa	Dinas Pendidikan	Sman 1 Tanjung Pandan, Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Tanjung Pandan, Seluruh Kelurahan/Desa	1 Kegiatan	√		
374	Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan	Adanya Bantuan AC Untuk Kenyamanan Dalam Proses Belajar Mengajar Di SMAN 1 Tanjungpandan	Dinas Pendidikan	Sman 1 Tanjungpandan, Kab. Belitung, Seluruh Kecamatan Dan Kelurahan/Desa	1 Kegiatan		√	Dapat dianggarkan melalui dana sekolah
375	Pendidikan	Pendidikan Dan Tenaga Pendidikan	Meminta Penambahan Kuota Beasiswa Yang Kurang Mampu Serta Adanya Bimbingan Untuk Keahlian Siswa Dibidang Perhotelan	Dinas Pendidikan	Smkn 1 Kelapa Kampit, Kab. Belitung Timur, Kelapa Kampit, Kelapa Kampit, Seluruh Kelurahan/Desa	1 Kegiatan	√		
376	Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan	SMAN 1 Damar Meminta Untuk Dibuatkan Lapangan Olahraga Serta Fasilitas Lainnya Seperi Parkir, Pagar, Count Block, Gedung Aula, Pos Satpam, Kantin Serta Gapura	Dinas Pendidikan	Sman 1 Damar, Kab. Belitung Timur, Damar, Damar, Seluruh Kelurahan/Desa	1 Kegiatan		√	Belum prioritas dan keterbatasan anggaran
377	Pendidikan	Pendidikan Dan Tenaga Pendidikan	Penambahan Kuota Beasiswa Serta Kenaikan Gaji Honorer	Dinas Pendidikan	Sman 1 Damar, Kab. Belitung Timur, Damar, Damar, Seluruh Kelurahan/Desa	1 Kegiatan	√		Gaji honorer disesuaikan dengan jam mengajar guru minimal 24JP
378	Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan	Pihak SMAN 1 Tanjung Pandan Mengeluhkan Lamanya Pencairan Dana BOS Untuk Bantuan Kegiatan Disekolah Tersebut	Dinas Pendidikan	Sman 1 Tanjung Pandan, Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	1 Kegiatan		√	Pencairan dana BOS tergantung pada sekolah masing-masing

No.	Isu/Bidang Urusan	Usulan	Permasalahan	Perangkat Daerah	Lokasi	Koefisien	Status		Keterangan
							Diakomodir	Tidak Diakomodir	
379	Pendidikan	Pendidikan Dan Tenaga Pendidikan	Kurang Transparannya Informasi Terkait Beasiswa Dari Pemerintah Yang Terkadang Tidak Diterima Oleh Siswa Dan Dinas Pendidikan Dianggap Kurang Terbuka Dalam Penyebaran Informasi	Dinas Pendidikan	SMAN 1 Tanjung Pandan, Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	1 Kegiatan	√		Akan disosialisasikan
380	Pendidikan	Pendidikan Dan Tenaga Pendidikan	Guru SMKN 1 Kelapa Kampit Menginginkan Adanya Beasiswa Untuk Guru	Dinas Pendidikan	SMKN 1 Kelapa Kampit, Kab. Belitung Timur, Kelapa Kampit, Kelapa Kampit, Seluruh Kel./Desa	1 Kegiatan	√		Harus lulus tes seleksi tingkat provinsi
381	Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan	Mengharapkan Pembangunan Lapangan Olahraga, Lab Bahasa Inggris, Dan Pengaspalan Halaman Sekolah	Dinas Pendidikan	SMKN 1 Kelapa Kampit, Kab. Belitung Timur, Kelapa Kampit, Kelapa Kampit, Seluruh Kel./Desa	1 Kegiatan		√	Alokasi anggaran untuk sarana prasarana terbatas sehingga dialokasikan yang paling prioritas
382	Pendidikan	Pengendalian Perzinan Pendidikan	Agar Adanya Bimbingan Untuk Keahlian Siwa Di Bidang Perhotelan	Dinas Pendidikan	SMKN 1 Kelapa Kampit, Kab. Belitung Timur, Kelapa Kampit, Kelapa Kampit, Seluruh Kel./Desa	1 Kegiatan		√	Tergantung kompetensi yang ada di sekolah
383	Pendidikan	Pendidikan Dan Tenaga Pendidikan	Agar Pemerintah Memberikan Perhatian Kepada Mereka Yang Ekonominya Kurang Mampu Dan Ingin Mendapatkan Pendidikan	Dinas Pendidikan	SMAN 1 Damar, Kab. Belitung Timur, Damar, Damar, Seluruh Kelurahan/Desa	1 Kegiatan	√		
384	Pendidikan	Pengendalian Perzinan Pendidikan	Mengharapkan Pembuatan Pagar Belakang Sekolah, Pemasangan Conblok Dihalaman Depan, Pembangunan Lapangan Basket, Pembangunan Fasilitas Kantin Dan Pemasangan Tralis Di Ruangan TIK	Dinas Pendidikan	SMAN 1 Damar, Kab. Belitung Timur, Damar, Damar, Seluruh Kel./Desa	1 Kegiatan		√	Alokasi anggaran untuk sarana prasarana terbatas sehingga dialokasikan yang paling prioritas

No.	Isu/Bidang Urusan	Usulan	Permasalahan	Perangkat Daerah	Lokasi	Koefisien	Status		Keterangan
							Diakomodir	Tidak Diakomodir	
385	Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan	Mengharapkan Pembangunan Gedung Aula, Perluasan Lahan Parkir, Penambahan Ruangan Kelas, Pembangunan Pos Satpam Dan Pembuatan Gapura Sekolah	Dinas Pendidikan	Sman 1 Damar, Kab. Belitung Timur, Damar, Damar, Seluruh Kelurahan/Desa	1 Kegiatan		√	Ruang kelas akan diusulakan melalui dana DAK 2021
386	Pendidikan	Pendidikan Dan Tenaga Pendidikan	Bantuan Peningkatan Ruang UKS Dan Meubelair	Dinas Pendidikan	Smp Negeri 1 Mendo Barat, Kab. Bangka, Mendo Barat, Mendo Barat, Seluruh Kelurahan/Desa	1 Kegiatan		√	Bukan merupakan kewenangan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dapat mengusulkan melalui dana DAK
387	Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan	Usulan Anggaran Bantuan Dana BOS Untk SD, SMP Dan SMA Melalui Bantuan Provinsi	Dinas Pendidikan	Desa Tanjung Labu, Kab. Bangka Selatan, Lepar Pongok, Tanjunglabu	1 Kegiatan		√	BOS SD dan SMP bukan merupakan kewenangan pemerintah provinsi, namun untuk BOS SMA dan SMK di wilayah bangka selatan sudah dialokasikan bos melalui dana APBD provinsi
388	Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan	Masyarakat Mengharapkan Pembangunan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), Dikarenakan Akses Ke SMPN Terdekat Itu Terlalu Jauh	Dinas Pendidikan	Desa Badau, Kab. Belitung, Badau, Badau	1 Kegiatan		√	Bukan merupakan kewenangan pemerintah provinsi
389	Pendidikan	Pendidikan Dan Tenaga Pendidikan	Supaya Dibangun Gedung Madrasah Aliyah Karena Selama Ini Masih Menumpang Di MTS	Dinas Pendidikan	Desa Sidoharjo, Kab. Bangka Selatan, Air Gegas, Sidoharjo	1 Kegiatan		√	Bukan merupakan kewenangan pemerintah provinsi
390	Pendidikan	Pendidikan Dan Tenaga Pendidikan	Kepala BPD Mengharapkan Penambahan Guru Kelas Di Sekolah Dasar Negeri 13 Badau , Yang Sebelumnya Sudah Diusulkan Ke Dinas Pendidikan, Tetapi Belum Terpenuhi.	Dinas Pendidikan	Desa Sungai Samak, Kab. Belitung, Badau, Sungai Samak	1 Kegiatan		√	Wewenang pemerintah Kabupaten/Kota
391	Pendidikan	Pendidikan Dan Tenaga Pendidikan	Bantuan Pembangunan Pagar Sekolah SD 7 Bakam Terkait Keamanan Para Siswa	Dinas Pendidikan	Desa Maras Senang, Kab. Bangka, Bakam, Maras Senang	1 Kegiatan		√	Sekolah Dasar (SD) menjadi wewenang pemerintah kabupaten/kota

No.	Isu/Bidang Urusan	Usulan	Permasalahan	Perangkat Daerah	Lokasi	Koefisien	Status		Keterangan
							Diakomodir	Tidak Diakomodir	
392	Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan	Kepala Sekolah TK Negeri Simpang Rusa Mengharapkan Pengaspalan Jalan Menuju TK Yang Sekarang Masih Tanah Merah Dan Sempit Dan Kepala Sekolah Juga Mengharapkan Pembangunan Pagar Keliling Di Lingkungan TK, Serta Kepala Sekolah Mengharapkan Ada Bantuan Baik Dari Desa Maupun Pemerintah Untuk Pembersihan Lahan Menuju TK Yang Masih Sampah-Sampah Kayu Bekas Pembukaan Aksen Jalan Menuju TK	Dinas Pendidikan	Desa Simpang Rusa, Kab. Belitung, Membalong, Simpang Rusa	1 Kegiatan		√	Bukan merupakan kewenangan
393	Pendidikan	Pendidikan Dan Tenaga Pendidikan	Guru SMPN 2 Membalong Mengharapkan Renovasi Ruang Ketrampilan Di SMP Tersebut Yang Sudah Rusak	Dinas Pendidikan	Desa Simpang Rusa, Kab. Belitung, Membalong, Simpang Rusa	1 Kegiatan		√	SMP berada pada wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota
394	Pendidikan	Pengembangan Bahasa Dan Sastra	Meminta Dibuatkan Regulasi Terkait Dengan Aturan Kebudayaan Lokal Serta Berbusana Dan Perilaku Bagi Turis Yang Datang Ke Belitung	Dinas Pendidikan	Tanjungpandan, Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Tanjung Pandan, Seluruh Kelurahan/Desa	1 Kegiatan		√	Bukan merupakan kewenangan
395	Perhubungan	Pengelolaan Pelayaran	Menginginkan Adanya Pelabuhan Baru Seperti Belitung Induk	Dinas Perhubungan	Desa Tanjung Batu Itam, Kab. Belitung Timur, Dendang, Dendang, Seluruh Kelurahan/Desa	1 Kegiatan		√	Pelabuhan dendang sudah diusulkan melalui APBN
396	Perhubungan	Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Masyarakat Desa Tebing Meminta Agar Dibuatkan Penerangan Lampu Jalan Sepanjang Desa Tebing	Dinas Perhubungan	Mentok, Kab. Bangka Barat, Kelapa, Kelapa, Seluruh Kelurahan/Desa	1 Buah		√	Jalan nasional merupakan kewenangan kementerian

No.	Isu/Bidang Urusan	Usulan	Permasalahan	Perangkat Daerah	Lokasi	Koefisien	Status		Keterangan
							Diakomodir	Tidak Diakomodir	
397	Perhubungan	Penyelenggaraan Lalu Lintas	Usulan Pembangunan Dermaga Di Desa Penutuk Kecamatan Lepar Pongok Untuk Diaktifkan Kembali Sehingga Terutama Mobil Dapat Masuk Dan Akses Lalngganan Kapal Sadai	Dinas Perhubungan	Desa Tanjung Labu, Kab. Bangka Selatan, Lepar Pongok, Tanjunglabu	1 Kegiatan		√	Dalam proses penyusunan dokumen perencanaan
398	Perhubungan	Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Pemasangan Traffic Light	Dinas Perhubungan	Desa Cit, Kab. Bangka, Riau Silip, Cit	1 Kegiatan		√	Jalan nasional merupakan kewenangan kementerian
399	Perhubungan	Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Mohon Fasilitasi Bus Sekolah	Dinas Perhubungan	Tukak Sadai, Kab. Bangka Selatan, Tukak Sadai, Sadai	1 Kegiatan		√	Bus sekolah diadakan melalui program CSR
400	Perhubungan	Pengelolaan Pelayaran	Masyarakat Dsa Cendil Meminta Bantuan Terkait Normalisasi Alur Sungai Untuk Para Nelayan	Dinas Perhubungan	Desa Cendil, Kab. Belitung Timur, Kelapa Kampit, Cendil	1 Kegiatan		v	Memerlukan kajian yang komprehensif dan readiness criteria terutama terkait dengan dokumen lingkungan
401	Perhubungan	Pengelolaan Pelayaran	Masayarakat Meminta Perlunya Pendalaman Sungai Siburik	Dinas Perhubungan	Kelurahan Kota Tanjungpandan, Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	1 Kegiatan		v	Secara khusus tidak menjadi satu sub kegiatan, tetapi untuk pemeliharaan sungai siburik akan dilakukan dengan pemeliharaan rutin setiap tahun
402	Perhubungan	Pengelolaan Pelayaran	Masyarakat Meminta Pemerintah Untuk Melakukan Penggerukan Sungai Pring Agar Nelayan Tetap Bisa Berlabuh	Dinas Perhubungan	Desa Sijuk, Kab. Belitung, Sijuk, Sijuk	1 Kegiatan		v	Memerlukan kajian yang komprehensif dan readiness criteria terutama terkait dengan dokumen lingkungan
403	Perhubungan	Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Masyarakat Mengngusulkan Lampu Penerangan Jalan Di Desa Sungai Samak	Dinas Perhubungan	Desa Sungai Samak, Kab. Belitung, Badau, Sungai Samak	1 Kegiatan		√	Jalan nasional merupakan kewenangan kementerian
404	Perhubungan	Pengelolaan Pelayaran	Menginginkan Pelabuhan Baru	Dinas Perhubungan	Desa Tanjung Batu Itam, Kab. Belitung Timur, Seluruh Kecamatan Dan Kelurahan/Desa	1		√	Pelabuhan lokal merupakan kewenangan kabupaten/kota

No.	Isu/Bidang Urusan	Usulan	Permasalahan	Perangkat Daerah	Lokasi	Koefisien	Status		Keterangan
							Diakomodir	Tidak Diakomodir	
405	Perhubungan	Pengelolaan Pelayaran	Menginginkan Adanya Pelabuhan Baru	Dinas Perhubungan	Desa Tanjung Batu Itam, Kab. Belitung Timur, Seluruh Kecamatan Dan Kelurahan/Desa	1 Paket		√	Pelabuhan lokal merupakan kewenangan kabupaten/kota
406	Perhubungan	Penyelenggaraan Lalu Lintas	Pemasangan Lampu Lalu Lintas	Dinas Perhubungan	Simpang Empat Kantor Desa Air Ruai, Kab. Bangka, Pemali, Air Ruai	1 Kegiatan		√	Dialokasikan oleh dinas perhuhungan kabupaten bangka ta.2019
407	Perhubungan	Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Mengusulkan Perbaikan Jalan Gusung-Pantai Kisut Yang Merupakan Akses Jalan Bagi Petani	Dinas Perhubungan	Desa Rias, Kab. Bangka Selatan, Toboali, Rias	1 Kegiatan		√	Bukan kewenangan provinsi
408	Perhubungan	Pengelolaan Pelayaran	Masyarakat Meminta Dibuatkan Pemecah Gelombang Di Pulau Panai	Dinas Perhubungan	Desa Tanjungkelumpang, Kab. Belitung Timur, Seluruh Kecamatan Dan Kelurahan/Desa	1 Kegiatan		√	Pelabuhan lokal merupakan kewenangan kabupaten/kota
409	Perhubungan	Penyelenggaraan Lalu Lintas	Masyarakat Mengharapkan Bantuan Untuk Membangun Dermaga Di Perairan Dudun Mereka	Dinas Perhubungan	Dusun Batu Mana, Kab. Belitung, Membalong, Lassar	1 Kegiatan		√	Pelabuhan lokal merupakan kewenangan kabupaten/kota
410	Pertanian	Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Bantuan Alat Mesin Pertanian	Dinas Pertanian	Desa Banyu Asin Kec. Riau Silip, Kab. Bangka, Riau Silip, Banyu Asin	1 Kegiatan	√		Bantuan alat mesin pertanian dari dana APBD tidak ada, tapi dapat diusulkan lewat anggaran APBN ditjen prasarana dan sarana pertanian melalui e-proposal
411	Pertanian	Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Masyarakat Desa Belo Laut Meminta Agar Diberikan Bantuan Bibit Sawit	Dinas Pertanian	Desa Belo Laut Mentok, Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	1 Buah	√		Dialokasikan melalui bantuan bibit swakelola
412	Pertanian	Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Masyarakat Desa Puput Meminta Agar Diberikan Bantuan Pupuk Subsidi Dan Pendistribusian Tepat Sasaran	Dinas Pertanian	Desa Puput Mentok, Kab. Bangka Barat, Parittiga, Puput	1 Buah	√		1) mekanisme usulan pupuk subsidi melalui E-RDKK, di alokasikan oleh APBN; 2) desa puput sudah masuk dalam E-RDKK total usulan 371,8 ton, sementara alokasi untuk kecamatan parit tiga setiap tahun hanya 1.451 ton

No.	Isu/Bidang Urusan	Usulan	Permasalahan	Perangkat Daerah	Lokasi	Koefisien	Status		Keterangan
							Diakomodir	Tidak Diakomodir	
413	Pertanian	Penyuluhan Pertanian	Masyarakat Desa Tebing Meminta Agar Penyuluhan Pertanian Bibit Cabai	Dinas Pertanian	Masyarakat Desa Tebing, Kab. Bangka Barat, Kelapa, Tebing	1 Kegiatan	√		Target petani yang dibina melalui bintek, gelar teknologi dsbnya sejumlah 2000 orang
414	Pertanian	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Perlunya Perhatian Khusus Dari Bumn Dan Perusahaan Lainnya Dalam Bidang Pertanian Di Lingkungan Kepulauan Bangka Belitung.	Dinas Pertanian	Rumah Makan Bubur Shanghai, Kota Pangkal Pinang, Pangkal Balam, Rejo Sari	1 Kegiatan	√		Usulan akan didorong melalui CSR
415	Pertanian	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Masyarakat Dusun Kamat Meminta Bantuan Bibit Lada Berkualitas Dan Menaikkan Harga Lada, Karet Dan Sawit Serta Bantuan Subsidi Pupuk Dari Pemerintah	Dinas Pertanian	Dusun Kamat, Kab. Bangka Barat, Tempilang, Simpang Yul	1 Kegiatan	√		1) mekanisme usulan pupuk subsidi melalui E-RDKK, di alokasikan oleh APBN; 2) desa Simpang Yul sudah masuk dalam E-RDKK total usulan 996.212 kg, sementara alokasi untuk kecamatan tempilang setiap tahun hanya 1.802 ton
416	Pertanian	Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Permohonan Bantuan Bibit Buah-Buahan Dan Lain-Lain Kepada Pemerintah	Dinas Pertanian	Air Itam Pangkalpinang, Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	1 Kegiatan	√		
417	Pertanian	Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Permohonan Masyarakat Lontong Pancur Agar Diberikan Bantuan Alat Pemotong Rumput Untuk Merapihkan Lingkungan Sekitar Rumah Warga Terlihat Rapi Dan Bersih	Dinas Pertanian	Lontong Pancur Pangkal Balam, Kota Pangkal Pinang, Pangkal Balam, Lontong Pancur	1 Kegiatan	√		usulan akan diarahkan melalui bantuan sosial atau hibah melalui dinas lingkungan hidup
418	Pertanian	Pengendalian Dan Penanggulanagan Bencana Pertanian	Masyarakat Desa Penyampak Meminta Penyelesaian Masalah Harga Lada, Sawit Dan Karet Serta Meminta Bantuan Subsidi Pupuk Kepada Pemerintah	Dinas Pertanian	Desa Penyampak, Kab. Bangka Barat, Tempilang, Penyampak	1 Kegiatan	√		1) mekanisme usulan pupuk subsidi melalui E-RDKK, di alokasikan dalam APBN; 2) desa penyampak sudah masuk dalam E-RDKK total usulan 1.579.100 kg, sementara alokasi untuk kecamatan tempilang setiap tahun hanya 1.802 ton
419	Pertanian	Pengendalian Dan Penanggulanagan Bencana Pertanian	Mohon Bantuan Cara Mengatasi Banjir Yang Megnakibatkan Gagal Gagal Panen Di Desa Rias Kecamatan Toboali	Dinas Pertanian	Desa Rias, Kab. Bangka Selatan, Toboali, Rias	1 Kegiatan	√		1) pembangunan saluran drainase primer, penataan pintu masuk/keluar dan pembangunan embung oleh (kemen- pu) kewenangan pusat, dan 2) perbanyakan saluran irigasi tersier/kwarter melalui dana

No.	Isu/Bidang Urusan	Usulan	Permasalahan	Perangkat Daerah	Lokasi	Koefisien	Status		Keterangan
							Diakomodir	Tidak Diakomodir	
									optimalisasi lahan dari sumber dana APBN Ditjen PSP Kementan; sedangkan melalui dana APBD dapat diakomodir terkait pembangunan embung/dam parit/long storage
				Dinas Pertanian					1) asuransi usaha tani padi dapat diusulkan oleh seluruh petani yang melaksanakan penanaman padi untuk mengantisipasi terjadinya kondisi banjir, kekeringan dan akibat terkena serangan organisme pengganggu tanaman (OPT)
420	Pertanian	Pengendalian Dan Penanggulanagan Bencana Pertanian	Masalah Mengatasi Banjir Yang Mengakibatkan Gagal Panen	Dinas Pertanian	Desa Rias, Kab. Bangka Selatan, Toboali, Rias	1 Kegiatan	√		1) pembangunan saluran drainase primer, penataan pintu masuk/keluar dan pembangunan embung oleh (Kemen-PU) kewenangan pusat, dan 2) perbanyakan saluran irigasi tersier/kwarter melalui dana optimalisasi lahan dari sumber dana APBN Ditjen PSP Kementan; sedangkan melalui dana APBD dapat diakomodir terkait pembangunan embung/dam parit/long storage
				Dinas Pertanian					1) asuransi usaha tani padi dapat diusulkan oleh seluruh petani yang melaksanakan penanaman padi untuk mengantisipasi terjadinya kondisi banjir, kekeringan dan akibat terkena serangan organisme pengganggu tanaman (OPT)
421	Pertanian	Penegndalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat	Masyarakat Desa Keranggan Meminta Untuk Diberikan Bantuan Bibit Sapi Ternak Unggul	Dinas Pertanian	Desa Keranggan, Kab. Bangka Barat, Seluruh Kecamatan Dan Kelurahan/Desa	1 Kegiatan/Ekor	√		

No.	Isu/Bidang Urusan	Usulan	Permasalahan	Perangkat Daerah	Lokasi	Koefisien	Status		Keterangan
							Diakomodir	Tidak Diakomodir	
422	Pertanian	Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Bantuan Pengadaan Bibit Sapi Dan Ayam	Dinas Pertanian	Tiram, Kab. Bangka Selatan, Tukak Sadai, Tiram	1 Ekor	√		
423	Pertanian	Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Bantuan Untuk Menyediakan Lahan Untuk Masyarakat Desa Tirem Untuk Bersawah Dan Berkebun	Dinas Pertanian	Tiram, Kab. Bangka Selatan, Tukak Sadai, Tiram	1 Kegiatan	√		Akan dilakukan survei lokasi untuk membantu menilai kesesuaian lahan untuk lahan pertanian (bersawah) dan berkebun dapat dilakukan melalui pemetaan lahan pertanian (LP2B)
424	Pertanian	Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Bantuan Bibit Tanaman Holtikulturan Dan Tanaman Hias Untuk Kelompok Tani	Dinas Pertanian	Kecamatan Sungailiat, Kab. Bangka, Sungailiat, Sungailiat, Seluruh Kelurahan/Desa	1 Kegiatan	√		Bantuan untuk komoditas tanaman hortikultura dan bukan untuk tanaman hias
425	Pertanian	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pembangunan Irigasi Di Tanah Gambot Di Kecamatan Untuk Perluasan Wilayah Persawahan	Dinas Pertanian	Tukak, Kab. Bangka Selatan, Tukak Sadai, Tukak	1 Kegiatan	√		1) usulan harus disertai proposal penerima manfaat terhadap bantuan yang diserahkan kepada masyarakat; dan 2) usulan yang bisa diakomodir hanya terkait jaringan irigasi tersier/kwarter atau jaringan irigasi tingkat usaha tani sesuai yang menjadi kewenangan opd pertanian; 3) jika terkait jaringan irigasi primer/skunder dapat diusulkan kepada OPD PU
426	Pertanian	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pembangunan Irigasi Sawah Permanen	Dinas Pertanian	Desa Banyu Asin, Kab. Bangka, Riau Silip, Banyu Asin	1 Kegiatan	√		1) usulan harus disertai proposal penerima manfaat terhadap bantuan yang diserahkan kepada masyarakat; dan 2) usulan yang bisa diakomodir hanya terkait jaringan irigasi tersier/kwarter atau jaringan irigasi tingkat usaha tani sesuai yang menjadi kewenangan OPD Pertanian; 3) jika terkait jaringan irigasi primer/skunder dapat diusulkan kepada OPD PU
427	Pertanian	Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Bantuan Bibit Lada Dan Karet Okulasi	Dinas Pertanian	Kecamatan Riau Silip, Kab. Bangka, Riau Silip, Riau Silip, Seluruh Kel./Desa	1 Kegiatan	√		

No.	Isu/Bidang Urusan	Usulan	Permasalahan	Perangkat Daerah	Lokasi	Koefisien	Status		Keterangan
							Diakomodir	Tidak Diakomodir	
428	Pertanian	Perizinan Usaha Pertanian	Masyarakat Desa Cendil Meminta Perpanjangan HGU Perkebunan Kelapa Sawit Harus Negoisasi Dan Meminta Alokasi Hak Plasma Sebesar 20% Untuk Masyarakat Desa	Dinas Pertanian	Desa Cendil, Kab. Belitung Timur, Kelapa Kampit, Cendil	1 Kegiatan	√		Usulan akan difasilitasi untuk dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait
429	Pertanian	Pengendalian Dan Penanggulanagan Bencana Pertanian	Masyarakat Berharap Pemerintah Dapat Menstabilkan Harga Lada Kembali Agar Tidak Merugikan Para Petani Lada	Dinas Pertanian	Desa Cendil, Kab. Belitung Timur, Kelapa Kampit, Cendil	1 Kegiatan	√		Usulan akan diakomodir dengan membantu peningkatan kualitas lada dengan memfasilitasi pembentukan UPH/UPBB
430	Pertanian	Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Bantuan Pencetakan Sawah Baru Dan Sistem Irigasinya	Dinas Pertanian	Desa Rukam, Kab. Bangka, Mendo Barat, Rukam	1 Kegiatan	√		Akan dilalkukan survei lokasi untuk membantu menilai kesesuaian lahan untuk lahan pertanian (bersawah) dan berkebun dapat dilakukan melalui pemetaan lahan pertanian (LP2B)
431	Pertanian	Penegndalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat	Diadakannya Fogging Terkait Wabah DBD	Dinas Pertanian	Desa Penagan, Kab. Bangka, Mendo Barat, Penagan	1 Kegiatan	√		Usulan akan diarahkan melalui dinas kesehatan
432	Pertanian	Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Peningkatan Harga Lada Dan Karet	Dinas Pertanian	Tanjunglabu, Kab. Bangka Selatan, Lepar Pongok, Tanjunglabu	1 Kilo	√		Usulan akan diakomodir dengan membantu peningkatan kualitas lada dengan memfasilitasi pembentukan UPH/UPBB
433	Pertanian	Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Bantuan Untuk Meningkatkan Harga Lada Dan Karet	Dinas Pertanian	Tukak, Kab. Bangka Selatan, Tukak Sadai, Tukak	1 Kilo	√		Usulan akan diakomodir dengan membantu peningkatan kualitas lada dengan memfasilitasi pembentukan UPH/UPBB
434	Pertanian	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Peningkatan Harga Lada Dan Karet	Dinas Pertanian	Toboali, Kab. Bangka Selatan, Toboali, Toboali, Seluruh Kelurahan/Desa	1 Kilo	√		Usulan akan diakomodir dengan membantu peningkatan kualitas lada dengan memfasilitasi pembentukan UPH/UPBB

No.	Isu/Bidang Urusan	Usulan	Permasalahan	Perangkat Daerah	Lokasi	Koefisien	Status		Keterangan
							Diakomodir	Tidak Diakomodir	
435	Pertanian	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Bantuan Alat Pertanian Seperti Mesin Robi, Bantuan Racun Serta Pupuk	Dinas Pertanian	Desa Banyu Asin, Kab. Bangka, Riau Silip, Banyu Asin	1 Kegiatan	√		1) dapat diusulkan melalui mekanisme e-proposal ditujukan kepada Ditjen PSP Kementerian Pertanian yang akan dipandu pengusulannya oleh PPL setempat atau petugas kabupaten, provinsi setelah ada usulan akan melaksanakan verifikasi data usulan. 2) petani calon penerima manfaat bantuan harus masuk dalam kelompok tani yang sudah didaftarkan dalam simluhtan, 3) usulan alsintan dapat berupa alat prapanen dan alat pasca panen
436	Pertanian	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Masyarakat Mengeluhkan Penurunan Harga Lada Dan Harga Karet Dan Masyarakat Mengharapkan Agar Harga Lada Segera Stabil Kembali.	Dinas Pertanian	Desa Badau, Kab. Belitung, Badau, Badau	1 Kegiatan	√		Usulan akan diakomodir dengan membantu peningkatan kualitas lada dengan memfasilitasi pembentukan UPH/UPBB
437	Pertanian	Pengendalian Dan Penanggulanagan Bencana Pertanian	Masyarakat Mengeluhkan Penurunan Harga Lada Dan Harga Karet Dan Masyarakat Mengharapkan Agar Harga Lada Segera Stabil Kembali.	Dinas Pertanian	Desa Badau, Kab. Belitung, Badau, Badau	1 Kegiatan	√		Usulan akan diakomodir dengan membantu peningkatan kualitas lada dengan memfasilitasi pembentukan UPH/UPBB
438	Pertanian	Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Mengharapkan Adanya Penambahan Bibit Sapi	Dinas Pertanian	Desa Sidoharjo, Kab. Bangka Selatan, Air Gegas, Sidoharjo	1 Kegiatan	√		
439	Pertanian	Pengendalian Dan Penanggulanagan Bencana Pertanian	Harga Karet Diperhatikan Karena Terlalu Murah	Dinas Pertanian	Desa Sidoharjo, Kab. Bangka Selatan, Air Gegas, Sidoharjo	1 Kegiatan	√		Usulan akan diakomodir dengan membantu peningkatan kualitas lada dengan memfasilitasi pembentukan UPBB
440	Pertanian	Pengendalian Dan Penanggulanagan Bencana Pertanian	Mengharapkan Lebih Memperhatikan Harga Karet Dan Lada	Dinas Pertanian	Desa Batu Betumpang, Kab. Bangka Selatan, Pulaubesar, Batu Betumpang	1 Kegiatan	√		Usulan akan diakomodir dengan membantu peningkatan kualitas lada dengan memfasilitasi pembentukan UPH/UPBB
441	Pertanian	Penyediaan Dan Pengembangan	Supaya Adanya Pengawasan Pengadaan Bibit Dari Prov.	Dinas Pertanian	Desa Batu Betumpang, Kab.	1 Kegiatan	√		

No.	Isu/Bidang Urusan	Usulan	Permasalahan	Perangkat Daerah	Lokasi	Koefisien	Status		Keterangan
							Diakomodir	Tidak Diakomodir	
		Sarana Pertanian	Untuk Para Petani		Bangka Selatan, Pulaubesar, Batu Betumpang				
442	Pertanian	Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Mohon Adanya Pengawasan Setiap Proyek Pengadaan Khususnya Persawahan Karena Banyak Yang Tidak Tepat Sasaran	Dinas Pertanian	Desa Batu Betumpang, Kab. Bangka Selatan, Pulaubesar, Batu Betumpang	1 Kegiatan	√		Usulan akan difasilitasi dengan dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait
443	Pertanian	Pengendalian Dan Penanggulanagan Bencana Pertanian	Cara Mengatasi Banjir Yang Mengakibatkan Gagal Panen	Dinas Pertanian	Desa Rias, Kab. Bangka Selatan, Toboali, Rias	1 Kegiatan	√		
444	Pertanian	Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Penambahan Alat-Alat Pertanian Jander, Kamben Dll	Dinas Pertanian	Desa Rias, Kab. Bangka Selatan, Toboali, Rias	1 Unit	√		Usulan akan difasilitasi melalui dana KUR
445	Pertanian	Pengendalian Dan Penanggulanagan Bencana Pertanian	Cara Mengatasi Banjir Yang Mengakibatkan Gagal Panen	Dinas Pertanian	Desa Rias, Kab. Bangka Selatan, Toboali, Rias	1 Kegiatan	√		
446	Pertanian	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Masyarakat Meminta Adanya Plasma Kelapa Sawit Dan Kemitraan Dengan Perkebunan Kelapa Sawit Sehingga Menjadi Pemasukan Bagi Desa Jangkang	Dinas Pertanian	Desa Jangkang, Kab. Belitung Timur, Dendang, Jangkang	1 Kegiatan	√		Usulan akan difasilitasi dengan dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait
447	Pertanian	Pengendalian Dan Penanggulanagan Bencana Pertanian	Masyarakat Petani Mengharapkan Program Tora Agar Lokasi Pertaniannya Dilegalkan Dan Tidak Mengganggu Wilayah Hutan	Dinas Pertanian	Desa Jangkang, Kab. Belitung Timur, Dendang, Jangkang	1 Kegiatan	√		Usulan akan diarahkan melalui dinas kehutanan
448	Pertanian	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Masyarakat Meminta Kuota Pupuk Subsidi Diperbanyak Menjadi 200 Ton	Dinas Pertanian	Desa Jangkang, Kab. Belitung, Seluruh Kecamatan Dan Kelurahan/Desa	200 Ton	√		Usulan akan difasilitasi dengan dilakukan verifikasi pada RDKK
449	Pertanian	Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Bantuan Meningkatkan Harga Lada Dan Karet	Dinas Pertanian	Desa Tanjung Labu, Kab. Bangka Selatan, Lepar Pongok, Tanjunglabu	1 Kegiatan	√		Usulan akan diakomodir dengan membantu peningkatan kualitas lada dengan memfasilitasi pembentukan UPH/UPBB
450	Pertanian	Penyediaan Dan	Bantuan Bibit Kelapa Sawit	Dinas Pertanian	Desa Labu, Kab.	1 Kegiatan	√		Usulan akan difasilitasi dengan

No.	Isu/Bidang Urusan	Usulan	Permasalahan	Perangkat Daerah	Lokasi	Koefisien	Status		Keterangan
							Diakomodir	Tidak Diakomodir	
		Pengembangan Prasarana Pertanian	Untuk Menunjang Perekonomian Masyarakat Labu		Bangka, Puding Besar, Labu				dilakukan survei lokasi dan melakukan bantuan benih swakelola
451	Pertanian	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Bantuan Sapi	Dinas Pertanian	Desa Kimak, Kab. Bangka, Merawang, Kimak	1 Kegiatan	√		
452	Pertanian	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Meningkatkan Harga Lada Dan Karet	Dinas Pertanian	Desa Tanjung Labu, Kab. Bangka Selatan, Lepar Pongok, Tanjunglabu	1 Kegiatan	√		Usulan akan diakomodir dengan membantu peningkatan kualitas lada dengan memfasilitasi pembentukan UPH/UPBB
453	Pertanian	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Harga Lada Dan Karet Diperhatikan	Dinas Pertanian	Toboali, Kab. Bangka Selatan, Toboali, Toboali	1 Kegiatan	√		Usulan akan diakomodir dengan membantu peningkatan kualitas lada dengan memfasilitasi pembentukan UPH/UPBB
454	Pertanian	Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Peningkatan Harga Lada Dan Karet	Dinas Pertanian	Toboali, Kab. Bangka Selatan, Toboali, Toboali	1 Kegiatan	√		Usulan akan diakomodir dengan membantu peningkatan kualitas lada dengan memfasilitasi pembentukan UPH/UPBB
455	Pertanian	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Meningkatkan Harga Lada Dan Karet	Dinas Pertanian	Lepar Pongok, Kab. Bangka Selatan, Lepar Pongok, Tanjunglabu	1 Kegiatan	√		Usulan akan diakomodir dengan membantu peningkatan kualitas lada dengan memfasilitasi pembentukan UPH/UPBB
456	Pertanian	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Kenaikan Harga Lada Dan Karet	Dinas Pertanian	Toboali, Kab. Bangka Selatan, Toboali, Toboali	1 Kegiatan	√		Usulan akan diakomodir dengan membantu peningkatan kualitas lada dengan memfasilitasi pembentukan UPH/UPBB
457	Pertanian	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Memperhatikan Harga Lada Dan Karet	Dinas Pertanian	Batu Betumpang, Kab. Bangka Selatan, Pulaubesar, Batu Betumpang	1 Kegiatan	√		Usulan akan diakomodir dengan membantu peningkatan kualitas lada dengan memfasilitasi pembentukan UPH/UPBB
458	Pertanian	Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Adanya Pengawasan Pengadaan Bibit	Dinas Pertanian	Batu Betumpang, Kab. Bangka Selatan, Pulaubesar, Batu Betumpang	1 Kegiatan	√		
459	Pertanian	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Bantuan Meningkatkan Harga Lada Dan Karet	Dinas Pertanian	Tukak Sadai, Kab. Bangka Selatan, Tukak Sadai, Sadai	1 Kegiatan	√		Usulan akan diakomodir dengan membantu peningkatan kualitas lada dengan memfasilitasi pembentukan

No.	Isu/Bidang Urusan	Usulan	Permasalahan	Perangkat Daerah	Lokasi	Koefisien	Status		Keterangan
							Diakomodir	Tidak Diakomodir	
									UPH/UPBB
460	Pertanian	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Harga Lada Dan Karet	Dinas Pertanian	Desa Teladan, Kab. Bangka Selatan, Toboali, Teladan	1 Kegiatan	√		Usulan akan diakomodir dengan membantu peningkatan kualitas lada dengan memfasilitasi pembentukan UPH/UPBB
461	Pertanian	Pengendalian Dan Penanggulanagan Bencana Pertanian	Masyarakat Mengharapkan Kenaikan Harga Lada Agar Bisa Mensejahterkan Petani Lada.	Dinas Pertanian	Desa Kembiri, Kab. Belitung, Membalong, Kembiri	1 Kegiatan	√		Usulan akan diakomodir dengan membantu peningkatan kualitas lada dengan memfasilitasi pembentukan UPH/UPBB
462	Pertanian	Pengendalian Dan Penanggulanagan Bencana Pertanian	Masyarakat Mengharapkan Kenaikan Harga Lada Agar Bisa Mengsejahterakan Para Petani Lada Di Desa Simpang Rusa.	Dinas Pertanian	Desa Simpang Rusa, Kab. Belitung, Membalong, Simpang Rusa	1 Kegiatan	√		Usulan akan diakomodir dengan membantu peningkatan kualitas lada dengan memfasilitasi pembentukan UPH/UPBB
463	Pertanian	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Masyarakat Mengharapkan Penambahan Kuota Pupuk Bersubsidi	Dinas Pertanian	Desa Simpang Rusa, Kab. Belitung, Membalong, Simpang Rusa	1 Kegiatan	√		Usulan akan difasilitasi dengan dilakukan verifikasi pada RDKK
464	Pertanian	Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Masyarakat Meminta Bantuan Alat Berat Untuk Penggarapan Lahan	Dinas Pertanian	Desa Sijuk, Kab. Belitung, Sijuk, Sijuk	1 Kegiatan	√		Usulan akan difasilitasi melalui dana KUR
465	Pertanian	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Masyarakat Nelayan Meminta Adanya Lampu Jalan Di Desa Sijuk	Dinas Perhubungan	Desa Sijuk, Kab. Belitung, Sijuk, Sijuk	1 Kegiatan		√	Kewenangan Kabupaten
466	Pertanian	Pengendalian Dan Penanggulanagan Bencana Pertanian	Masyarakat Meminta Untuk Memperhatikan Masalah Terkait Dengan Harga Lada Yang Menurun	Dinas Pertanian	Desa Air Seruk, Kab. Belitung, Sijuk, Air Seruk	1 Kegiatan	√		Usulan akan diakomodir dengan membantu peningkatan kualitas lada dengan memfasilitasi pembentukan UPH/UPBB
467	Pertanian	Pengendalian Dan Penanggulanagan Bencana Pertanian	Masyarakat Meminta Untuk Menindaklanjuti Masalah Harga Lada Dan Karet Yang Menurun	Dinas Pertanian	Desa Nyuruk, Kab. Belitung Timur, Dendang, Nyuruk	1 Kegiatan	√		Usulan akan diakomodir dengan membantu peningkatan kualitas lada dengan memfasilitasi pembentukan UPH/UPBB
468	Pertanian	Pengendalian Dan Penanggulanagan Bencana Pertanian	Masyarakat Mengeluhkan Harga Karet Dan Lada Yang Murah Sehingga Membuat Para Petani Khawatir	Dinas Pertanian	Desa Nyuruk, Kab. Belitung Timur, Dendang, Nyuruk	1 Kegiatan	√		Usulan akan diakomodir dengan membantu peningkatan kualitas lada dengan memfasilitasi pembentukan UPH/UPBB

No.	Isu/Bidang Urusan	Usulan	Permasalahan	Perangkat Daerah	Lokasi	Koefisien	Status		Keterangan
							Diakomodir	Tidak Diakomodir	
469	Pertanian	Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Masalah Pembebasan Lahan Yang Diganti Dengan Kompensasi Diberi Sapi Sampai Saat Ini Belum Menerima	Dinas Pertanian	Desa Rias, Kab. Bangka Selatan, Toboali, Rias	1 Kegiatan	√		Akan segera dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait
470	Pertanian	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Bantuan Sapi	Dinas Pertanian	Desa Rias, Kab. Bangka Selatan, Toboali, Rias	1 Kegiatan	√		
471	Pertanian	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Masyarakat Desa Buyan Kelumbi Meminta Untuk Diadakan Cetak Sawah Seluas 100 Hektare	Dinas Pertanian	Desa Buyan Kelumbi, Kab. Bangka Barat, Tempilang, Buyan Kelumbi	100 Hektare	√		Akan dilakukan survei lokasi untuk membantu menilai kesesuaian lahan untuk lahan pertanian dapat dilakukan melalui pemetaan lahan pertanian (LP2B)
472	Pertanian	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Masyarakat Meminta Diadakan Cetak Sawah Di Dusun Pelaik	Dinas Pertanian	Dusun Pelaik, Kab. Bangka Barat, Tempilang, Tanjung Niur	1 Kegiatan	√		Akan dilakukan survei lokasi untuk membantu menilai kesesuaian lahan untuk lahan pertanian dapat dilakukan melalui pemetaan lahan pertanian (LP2B)
473	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Pembangunan Gedung Serbaguna SMAN 1 Kelapa	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Desa Kelapa, Kab. Bangka Barat, Kelapa, Kelapa	1		√	Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Provinsi
474	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Usulan Pembangunan Gedung Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Bangka Barat	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Mentok, Kab. Bangka Barat, Mentok, Mentok, Seluruh Kelurahan/Desa	1		√	Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Provinsi
475	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Kepala SMKN 1 Pariitiga Meminta Agar Dibuatkannya Pagar Dan Gerbang Depan Sekolah	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Smkn 1 Parittiga, Kab. Bangka Barat, Parittiga, Sekar Biru	1 Kegiatan		√	Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Provinsi

No.	Isu/Bidang Urusan	Usulan	Permasalahan	Perangkat Daerah	Lokasi	Koefisien	Status		Keterangan
							Diakomodir	Tidak Diakomodir	
476	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Adanya Ketegasan Pemerintah Tentang Pelanggaran Perda Mengingat Terjadinya Sijuk	Satuan Polisi Pamong Praja	Rumah Makan Pawon, Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Gedung Nasional	1 Kegiatan		√	Menjadi kewenangan Kota Pangkalpinang, dalam hal ini dilaksanakan Satpol PP Kota Pangkalpinang
477	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Tidak Adanya Kejelasan Mengenai Penerangan Lampu Jalan Yang Rusak/Mati Padahal Voucher Pin Sudah Di Potong Untuk Pembayaran Lampu Jalan.	Dinas Perhubungan	Rumah Makan Bubur Shanghai, Kota Pangkal Pinang, Pangkal Balam, Rejo Sari	1 Kegiatan		√	Merupakan kewenangan Kota
478	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Minta Dibuat Talud Pelindung (Talud Penahan Di Daerah Aliran Sungai) Di Desa Nyelanding	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Smkn 1 Payung, Kab. Bangka Selatan, Payung, Payung	1 Kegiatan		√	Pagu anggaran 2021 saat ini sudah habis
479	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Permohonan Masyarakat Kepada Pemerintah Untuk Memberikan Bantuan Perbaikan Jalan Dan Gang Yang Sudah Rusak	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Jalan Air Selan Pangkal Pinang, Kota Pangkal Pinang, Gabek, Air Salemba	1 Kegiatan		√	Belum prioritas
480	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Masyarakat Mengharapkan Pemerintah Provinsi Lebih Memperhatikan Kebersihan Kota Dan Mengharapkan Perhatian Pemerintah Untuk Menyelesaikan Segera Masalah Gapura Yang Ada Di Selindung Baru Dikarena Kan Sangat Membahayakan Keselamatan Bagi Pengguna Jalan Dan Masyarakat Sekitar	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Bukit Baru Pangkal Pinang, Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Bukitsari	1 Kegiatan		√	Akan dikoordinasikan dengan dinas terkait
481	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Masalah Agar Dibuat Talud Pelindung Di Desa Nyelanding	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Smkn 1 Payung, Kab. Bangka Selatan, Payung, Payung, Seluruh Kelurahan/Desa	1 Kegiatan		√	Pagu anggaran 2021 saat ini sudah habis

No.	Isu/Bidang Urusan	Usulan	Permasalahan	Perangkat Daerah	Lokasi	Koefisien	Status		Keterangan
							Diakomodir	Tidak Diakomodir	
482	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Masyarakat Sekitaran Sampur Menginginkan Penerangan Lampu Jalan Agar Tidak Terjadi Tindak Kejahatan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Hotel Pia Pangkalpinang, Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Batin Tikal	1 Kegiatan		√	Tugas dan fungsi balai pengelolaan transportasi darat kemenhub
483	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Bagaimana Solusi Dari Pemerintah Untuk Mendapatkan Rumah Bersubsidi Atau Dengan Cara Apa Memcicil Untuk Membantu Warga Yang Kurang Mampu	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Gpib Pangkalpinang, Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Batin Tikal	1 Kegiatan		√	Akan dikoordinasikan dengan pengembang
484	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Usulan Dari SMK 5 Pangkal Pinang Agar Diberikan Fasilitas UKS, Toilet Yang Nyaman Agar Sistem Belajar Lebih Nyaman Mengingat Sistem Belajar Di Mulai Dari Pagi Hingga Sore	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Hotel Edotel, Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitbesar	1 Kegiatan		√	Alokasi anggaran untuk sarana prasarana terbatas sehingga dialokasikan yang paling prioritas
485	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Bantuan Pembangunan Talud Di Desa Tanjung Ketapang-Suka Damai Sekitar 3 Kilometer	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Toboali, Kab. Bangka Selatan, Toboali, Toboali, Seluruh Kelurahan/Desa	1 Kegiatan		√	Pagu anggaran 2021 saat ini sudah habis
486	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Usulan Pembangunan Pagar Sekolah Untuk STM Dan SMK	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Desa Rias, Kab. Bangka Selatan, Toboali, Rias	1 Kilo Meter		√	Alokasi anggaran untuk sarana prasarana terbatas sehingga dialokasikan yang paling prioritas
487	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Penambahan Sarana SMK Negeri Sepanjang 5 Ha Untuk Okasi	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Tukaksadai, Kab. Bangka Selatan, Tukak Sadai, Tukak	1 Kilometer		√	Alokasi anggaran untuk sarana prasarana terbatas sehingga dialokasikan yang paling prioritas
488	Perumahan Rakyat dan Kawasan	Peningkatan Pelayanan	Sertifikasi Untuk Guru PNS Di SMKN 1 Tukak Sadai	Dinas Perumahan Rakyat dan	Tukak Sadai, Kab. Bangka Selatan,	1 Kegiatan		√	Sertifikasi dikeluarkan oleh kementerian pendidikan dan

No.	Isu/Bidang Urusan	Usulan	Permasalahan	Perangkat Daerah	Lokasi	Koefisien	Status		Keterangan
							Diakomodir	Tidak Diakomodir	
	Permukiman	Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman		Kawasan Permukiman	Tukak Sadai, Sadai				kebudayaan dengan ketentuan dan syarat yang telah ditetapkan
489	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Bantuan Penerangan Lampu Jalan Utama Maupun Jalan Protokol	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kelurahan Kenanga, Kab. Bangka, Sungailiat, Kenanga	1 Kegiatan		√	Tugas dan fungsi balai pengelolaan transportasi darat kemenhub
490	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Pembebasan Lahan Untuk Tempat Praktek Kejuruan Dan Untuk Gedung Sekolah	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Tukak Sadai, Kab. Bangka Selatan, Tukak Sadai, Sadai	1 Kegiatan		√	Alokasi anggaran untuk sarana prasarana terbatas sehingga dialokasikan yang paling prioritas, akan diajukan melalui biro pemerintahan
491	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pengembangan Perumahan	Bantuan Rumah Layak Huni	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dusun Saber Kelurahan Bukit Ketok Kec. Belinyu, Kab. Bangka, Belinyu, Bukit Ketok	1 Kegiatan		√	Bukan kewenangan provinsi sesuai permendagri 90 tahun 2019
492	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Perbaikan Pengaspalan Jalan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kampung Niur Lama Desa Banyu Asin Kec. Riau Silip, Kab. Bangka, Riau Silip, Banyu Asin	1 Kegiatan	√		sudah diakomodir di kelurahan kudai kab. bangka
493	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pengembangan Perumahan	Bantuan Rumah Layak Huni	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Desa Banyu Asin, Kab. Bangka, Riau Silip, Banyu Asin	1 Kegiatan		√	Bukan Kewenangan Provinsi sesuai permendagri 90 tahun 2019
494	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Perbaikan Jembatan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dusun Saber, Kab. Bangka, Belinyu, Bukit Ketok	1 Kegiatan		√	Bukan Tugas dan Fungsi

No.	Isu/Bidang Urusan	Usulan	Permasalahan	Perangkat Daerah	Lokasi	Koefisien	Status		Keterangan
							Diakomodir	Tidak Diakomodir	
495	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pengembangan Perumahan	Rumah Layak Huni Di Kelurahan Paal	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kelurahan Paal, Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Tanjung Pandan, Seluruh Kelurahan/Desa	1 Unit		√	Bukan Kewenangan Provinsi sesuai permendagri 90 tahun 2019
496	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Bantuan Penerangan Lampu Simpalet	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kelurahan Kuday, Kab. Bangka, Sungailiat, Kudai	1 Kegiatan		√	Untuk kudai diakomodir psu untuk jalan lingkungan untuk lampu jalan sebaiknya diusulkan ke Dinas ESDM
497	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Masyarakat Desa Penyampak Meminta Diberikan Penerangan Disepanjang Jalan Desa Penyampak	Dinas Perhubungan	Desa Penyampak, Kab. Bangka Barat, Tempilang, Penyampak	1 Kegiatan		√	Kewenangan Kabupaten
498	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Bantuan Penerangan Lampu Jalan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Desa Bakam, Kab. Bangka, Bakam, Bakam	1 Kegiatan		√	Tugas dan fungsi balai pengelolaan transportasi Darat Kemenhub
499	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Kurangnya Penerangan Lampu Jalan Yang Menjadi Tempat Tongkrongan Anak-anak Nakal Dan Tindak Kejahatan Sehingga Mengganggu Kenyamanan Masyarakat Sekitar	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Jl.Air Selan Pangkal Pinang, Kota Pangkal Pinang, Gabek, Air Salemba	1 Kegiatan		√	Tugas dan fungsi Dishub Kota Pangkalpinang
500	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Usulan Masyarakat Desa Keranggan Meminta Kuota Rumah Layak Huni Diperbanyak	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Desa Keranggan, Kab. Bangka Barat, Seluruh Kecamatan Dan Kelurahan/Desa	1 Kegiatan		√	Bukan kewenangan provinsi sesuai Permendagri 90 tahun 2021

No.	Isu/Bidang Urusan	Usulan	Permasalahan	Perangkat Daerah	Lokasi	Koefisien	Status		Keterangan
							Diakomodir	Tidak Diakomodir	
501	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum	Kurangnya Penerangan Jalan Yang Tembus Antara Kelurahan Tuatunu Dan Desa Air Duren	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Air Kepala Tujuh Kota Pangkalpinang, Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Air Kepala Tujuh	1 Kegiatan		√	Tugas dan fungsi dinas perhubungan Kota Pangkalpinang
502	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum	Masalah Pembangunan Dok Kapal Yang Akan Dilakukan Di Pelabuhan Pangkal Arang Kelurahan Ketapang	Dinas Perhubungan	Kelurahan Ketapang, Kota Pangkal Pinang, Pangkal Balam, Ketapang	1 Kegiatan		√	Bukan Kewenangan Dishub
503	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Masyarakat Memohon Bantuan Untuk Penerangan Lampu Jalan Agar Tidak Terjadi Hal-Hal Yang Tidak Diinginkan Seperti Tidak Kejahatan.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kelurahan Jerambah Gantung, Kota Pangkal Pinang, Gabek, Jerambah Gantung	1 Kegiatan	√		lokasi: Selindung I (10 titik), Selindung 2 (20 titik), Selindung 3 (8 titik)
504	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum	Masyarakat Mengeluhkan Pembangunan Jembatan Gantung Yang Belum Terrealisasi Pembangunannya	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Taman Bunga, Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Taman Bunga	1 Kegiatan		√	Tugas dan fungsi Dinas PUPR Kota Pangkalpinang
505	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Mohon Bantuan Kepada Pemerintah Untuk Penerangan Lampu Jalan Agar Tidak Terjadi Hal-Hal Yang Tidak Diinginkan Seperti Tindak Kejahatan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Taman Bunga Pangkalpinang, Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Taman Bunga	1 Kegiatan	√		Akan dilakukan survei
506	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Bantuan Pembangunan Puskesmas Atau Rumah Sakit Pratama Di Desa Tanjunglabu Kecamatan Lepar Pongok	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Tanjunglabu, Kab. Bangka Selatan, Lepar Pongok, Lepar Pongok, Seluruh Kelurahan/Desa	1 Kegiatan		√	Tugas dan fungsi dinas kesehatan kabupaten bangka selatan
507	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Bantuan Alat Kesehatan Di Desa Tanjung Labu	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Tanjunglabu, Kab. Bangka Selatan, Lepar Pongok, Tanjunglabu	1 Kegiatan		√	Tugas dan fungsi dinas kesehatan kabupaten bangka selatan
508	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Usulan Pembangunan Puskesmas Di Desa Tiram Menjadi RS Pratama	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Tiram, Kab. Bangka Selatan, Tukak Sadai, Tukak Sadai, Seluruh Kelurahan/Desa	1 Kegiatan		√	Tugas dan fungsi dinas kesehatan pemprov

No.	Isu/Bidang Urusan	Usulan	Permasalahan	Perangkat Daerah	Lokasi	Koefisien	Status		Keterangan
							Diakomodir	Tidak Diakomodir	
509	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pengembangan Perumahan	Pembangunan Rumah Layak Huni	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kecamatan Riau Silip, Kab. Bangka, Riau Silip, Riau Silip, Seluruh Kelurahan/Desa	1 Kegiatan		√	Untuk sementara RTLH belum dapat diakomodir dikarenakan kewenangan sesuai Permendagri 90 tahun 2019 hanya untuk lokasi rawan bencana atau relokasi program pemerintah
510	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum	Bantuan Penataan Kampung Kumuh Di Tanjung Ketapang	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Tanjungketapang, Kab. Bangka Selatan, Toboali, Tanjungketapang	1 Kegiatan		√	Bukan kawasan kumuh kewenangan provinsi
511	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum	Pembangunan Jalan Pasir Putih Toboali Yang Merupakan Jalan Utama Bagi Nelayan Dan Petani	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Toboali, Kab. Bangka Selatan, Toboali, Toboali	1 Kegiatan		√	Kewenangan kabupaten bangka selatan
512	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum	Pemasangan Lampu Penerangan Jalan	Dinas Perhubungan	Desa Cit, Kab. Bangka, Riau Silip, Cit	1 Kegiatan		√	Kewenangan kabupaten
513	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum	Bantuan Pembangunan Tiang Listrik	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Jalan Makmur Desa Cit, Kab. Bangka, Riau Silip, Cit	1 Kegiatan		√	Tugas dan fungsi kabupaten bangka
514	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Penerangan Lampu Jalan	Dinas Perhubungan	Desa Pangkal Niur, Kab. Bangka, Riau Silip, Pangkal Niur	1 Kegiatan		√	Kewenangan kabupaten
515	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Pemasangan Tower Telepon Selular	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dusun Air Ketarik, Kab. Bangka, Mendo Barat, Penagan	1 Kegiatan		√	Bukan kewenangan provinsi
516	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Usulan Pembangunan Pagar Kuburan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Desa Rias, Kab. Bangka Selatan, Toboali, Rias	1 Kilo Meter		√	Tugas dan fungsi kabupaten bangka selatan

No.	Isu/Bidang Urusan	Usulan	Permasalahan	Perangkat Daerah	Lokasi	Koefisien	Status		Keterangan
							Diakomodir	Tidak Diakomodir	
517	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Masyarakat Mengusul Kan Lampu Pandu Untuk Nelayan Desa Air Saga Dan Juga Lampu Jalan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Desa Air Saga, Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Air Saga	1 Kegiatan		√	Tugas dan fungsi dinas perhubungan Kab. Belitung
518	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Bantuan Penerangan Lampu Jalan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Jalan Cendrawasih, Kab. Bangka, Sri Menanti	1 Kegiatan		√	Tugas dan fungsi dinas perhubungan kabupaten
519	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Bantuan Lampu Penerangan Jalan	Dinas Perhubungan	Desa Puding Besar, Kab. Bangka, Puding Besar, Puding Besar	1 Kegiatan		√	Kewenangan Kabupaten
520	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Bantuan Lampu Penerangan Jalan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Desa Bukit Layang, Kab. Bangka, Bakam, Bukit Layang	1 Kegiatan		√	Tugas dan fungsi dinas perhubungan kabupaten
521	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Mengharapkan Adanya Pengadaan Mobil Angkutan Sekolah	Dinas Perhubungan	Desa Sidoharjo, Kab. Bangka Selatan, Air Gegas, Sidoharjo	1 Kegiatan		√	Alokasi Melalui CSR
522	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Masyarakat Mengharapakan Perbaikan Akses Jalan Yang Rusak Berlobang Dan Bergelombang Kearah Penggantungan.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Desa Sungai Samak, Kab. Belitung, Badau, Sungai Samak	1 Kegiatan		√	Tugas dan fungsi Dinas PUPR Kab. Belitung
523	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Mohon Bantuan Kolam Renang	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Tukak Sadai, Kab. Bangka Selatan, Tukak Sadai, Sadai	1 Kegiatan		√	Tugas dan fungsi dinas pemuda dan olahraga Kab. Bangka Selatan

No.	Isu/Bidang Urusan	Usulan	Permasalahan	Perangkat Daerah	Lokasi	Koefisien	Status		Keterangan
							Diakomodir	Tidak Diakomodir	
524	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Pagar Kuburan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Desa Rias, Kab. Bangka Selatan, Toboali, Rias	1 Kegiatan		√	Tugas dan fungsi Kabupaten Bangak Selatan
525	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Perbaikan Pengaspaan Jala Sepanjang 10 Km Dari Desa Sidoharjo Menuju Desa Nyelanding	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Sidoharjo, Kab. Bangka Selatan, Air Gegas, Airgegas	1 Kilo Meter		√	Tugas dan fungsi Dinas PUPR Kabupaten
526	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Masyarakat Desa Juru Sebrang Meminta Pembangunan Jembatan Segera Terealisasi	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Desa Juru Sebrang, Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Juru Seberang	1 Kegiatan		√	Tugas dan fungsi Dinas PUPR Kabupaten
527	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Masyarakat Meminta Penerangan Jalan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Desa Jangkang, Kab. Belitung Timur, Dendang, Jangkang	1 Kegiatan		√	Kewenangan Kabupaten Belitung Timur
528	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Bantuan Pagar Kuburan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Desa Rias, Kab. Bangka Selatan, Toboali, Rias	1 Meter		√	Tugas dan fungsi Kabupaten Bangka Selatan
529	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Bantuan Lampu Peneranagan Jalan Di Lingkungan Sidodadi	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Lingkungan Sidodadi Kelurahan Srimenanti, Kab. Bangka, Sungailiat, Sri Menanti	1 Kegiatan		√	Tugas dan fungsi Kabupaten Bangka
530	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Bantuan Lampu Jalan Yang Sudah Diajukan Tetapi Belum Terealisasi	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Desa Kimak, Kab. Bangka, Merawang, Kimak	1 Kegiatan		√	Tugas dan fungsi dinas perhubungan Kabupaten Bangka

No.	Isu/Bidang Urusan	Usulan	Permasalahan	Perangkat Daerah	Lokasi	Koefisien	Status		Keterangan
							Diakomodir	Tidak Diakomodir	
531	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Perbaikan Jembatan Di DAM I Keran Menjadi Akses Penting Bagi Masyarakat	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Desa Air Ruai, Kab. Bangka, Pemali, Air Ruai	1 Kegiatan		√	Tugas dan fungsi Dinas PUPR Kabupaten Bangka
532	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Didirikan Pintu Gerbang Bangka Selatan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Desa Air Gegas, Kab. Bangka Selatan, Air Gegas, Airgegas	1 Kegiatan		√	Kewenangan Kabupaten Bangka Selatan
533	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Didirikan Pujasera Di Desa Batu Betumpang	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Batu Betumpang, Kab. Bangka Selatan, Pulaubesar, Batu Betumpang	1 Kegiatan		√	Tugas dan fungsi UMKM Kab. Bangka Selatan
534	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Masyarakat Meminta Perbaikan Jalan Yg Ada Di Pasar Kelurahan Pangkallalang	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kelurahan Pangkallalang, Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	1 Kegiatan		√	Tugas dan fungsi Dinas PUPR Kabupaten
535	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Masyarakat Meminta Adanya Fasilitas Toilet Yang Ada Dimess Belitung Agar Memudahkan Masyarat Yang Menginap	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kelurahan Pangkalan, Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	1 Kegiatan		√	Tugas dan fungsi Dinas PUPR Kabupaten Belitung
536	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Masyarakat Meminta Diberikan Penerangan Jalan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dusun Rembikang, Kab. Belitung, Sijuk, Sijuk, Seluruh Kelurahan/Desa	1 Kegiatan	√		Jalan utama di Dusun Rembikang sudah terpasang. untuk di jalan lingkungan 2021: 400 titik *(seluruh kab belitung)
537	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Dibangun Taman Bermain Yang Layak Di Belitung	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Tanjungpandan, Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Tanjung Pandan, Seluruh Kelurahan/Desa	1 Kegiatan		√	Tugas dan fungsi Dinas Perkim kabupaten

No.	Isu/Bidang Urusan	Usulan	Permasalahan	Perangkat Daerah	Lokasi	Koefisien	Status		Keterangan
							Diakomodir	Tidak Diakomodir	
538	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Masyarakat Mengharapkan Penerangan Lampu Jalan Karena Kondisi Yang Ada Sekarang Sangat Rawan Dan Tidak Memadai	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dusun Batu Mana, Kab. Belitung, Membalong, Lassar	1 Kegiatan	√		Jalan utama di Dusun Rembikang sudah terpasang. untuk di jalan lingkungan 2021: 400 titik *(seluruh kab belitung)
539	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Mengusulkan Dibangunnya Taman Bermain Yang Layak Seperti Skatepark	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Sman 1 Tanjung Pandan, Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	1 Kegiatan		√	Tugas dan fungsi pemerintah kabupaten
540	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Agar Adanya Penerangan Dipinggir Pantai Pada Saat Malam Hari	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Desa Tanjung Kelumpang, Kab. Belitung Timur, Simpang Pesak, Tanjung Kelumpang	1 Kegiatan		√	Tugas dan fungsi dinas perhubungan kabupaten
541	Sosial	Penanganan Bencana	Masalah Mengatasi Banjir Yang Mengakibatkan Gagal Panen	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Desa Rias, Kab. Bangka Selatan, Toboali, Rias	1 Kegiatan		√	Jika berkenaan dengan infrasrtuktur, maka menjadi kewenangan PUPR
542	Sosial	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Perlunya Aturan Tentang Pahlawan Nasional Baik Berupa Perda Atau Bentuk Lainnya Dikarenakan Perpres Tentang Hal Tersebut Sudah Ada	Dinas Sosial	Rumah Makan Pawon Pangkalpinang, Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Gedung Nasional	1 Kegiatan	√		
543	Sosial	Penanganan Bencana	Masyarakat Di RW 04 Belakang GOR Mengharapkan Kepada Pemerintah Dalam Penanggulangan Banjir Di Daerah Tersebut	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Gg.Salam Kacang Pedang, Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Kacang Pedang	1 Kegiatan		√	Keterbatasan pagu anggaran
544	Tenaga Kerja	Hubungan Industrial	Usulan Dari Masyarakat Desa Tebing Untuk Digiatkan Nya Investor Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit	Dinas Tenaga Kerja	Desa Tebing, Kab. Bangka Barat, Kelapa, Tebing	1 Kegiatan		√	Dinas tenagakerja tidak menangani tentang investor pabrik pengolahan kelapa sawit

No.	Isu/Bidang Urusan	Usulan	Permasalahan	Perangkat Daerah	Lokasi	Koefisien	Status		Keterangan
							Diakomodir	Tidak Diakomodir	
545	Tenaga Kerja	Hubungan Industrial	Permasalahan Melonjaknya Harga Gas Elpiji 3 Kg Dari Warung Dan Kurangnya Pasokan Dari Pangkalan, Masyarakat Berharap Kepada Pemerintah Untuk Gas Elpiji 3 Kg Agar Lebih Diperbanyak	Dinas Tenaga Kerja	Lontong Pancur Pangkalbalam, Kota Pangkal Pinang, Pangkal Balam, Lontong Pancur	1 Kegiatan		√	Dinas tenagakerja tidak menangani tentang gas 3 kg
546	Tenaga Kerja	Perencanaan Tenaga Kerja	Apakah Ada Program Pemerintah Dalam Menghadapi Semakin Banyaknya Pengangguran Di Provinsi Babel	Dinas Tenaga Kerja	Bukit Baru Kota Pangkal Pinang, Kota Pangkal Pinang, Gerunggang	1 Kegiatan		√	Melalui program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja untuk mengurangi pengangguran di provinsi kepualauan bangka belitung
547	Tenaga Kerja	Hubungan Industrial	Usulan Masyarakat Desa Keranggan Meminta Dibuatkan Pangkalan Gas Elpiji	Dinas Tenaga Kerja	Desa Kerangggan Mentok, Kab. Bangka Barat, Seluruh Kecamatan Dan Kelurahan/Desa	1 Kegiatan		√	Dinas tenaga kerja tidak menangani tentang urusan elpiji
548	Tenaga Kerja	Pengawasan Ketenaga Ketenagakerjaan	Masyarakat Gg Salam Kacang Pedang Mengharapkan Kepada Pemerintah Untuk Menyedia-kan Lapangan Pekerjaan Untuk Pemuda-Pemudi Yang Putus Sekolah Dan Sarja Yang Masih Menganggur Untuk Saat Ini	Dinas Tenaga Kerja	Gg.Salam Kacang Pedang, Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Kacang Pedang	1 Kegiatan		√	Untuk mengurangi hal tersebut dinas tenaga kerja provinsi kepulauan bangka belitung mengadakan pelatihan dalam program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja
549	Tenaga Kerja	Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Masyarakat Mengharapkan Pembukaan Lapangan Pekerjaan Bagi Pemuda-Pemudi Yang Putus Sekolah Dan Sarjana Yang Masih Pengangguran	Dinas Tenaga Kerja	Kelurahan Jerambah Gantung, Kota Pangkal Pinang, Gabek, Jerambah Gantung	1 Kegiatan		√	Melalui program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja dinas tenaga kerja provinsi kepulauan bangka belitung dapat memberikan pelatihan kepada pemuda dan pemudi yang putus sekolah
550	Tenaga Kerja	Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Diadakan Pelatihan Kursus Tani, Las, Otomotif Dan Service Elektronik	Dinas Tenaga Kerja	Kecamatan Sungailiat, Kab. Bangka, Sungailiat, Sungailiat, Seluruh Kelurahan/Desa	1 Kegiatan		√	Sudah menjadi kegiatan rutin dinas tenagan kerja provinsi kepulauan bangka belitung dalam program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja

No.	Isu/Bidang Urusan	Usulan	Permasalahan	Perangkat Daerah	Lokasi	Koefisien	Status		Keterangan
							Diakomodir	Tidak Diakomodir	
551	Tenaga Kerja	Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Masyarakat Mengeluhkan Perusahaan Di Desa Badau Banyak Tetapi Pegawai Yang Diperkerjakan Banyak Dari Orang Luar Desa Bukan Warga Dari Desa Badau, Sehingga Masyarakat Mengharapkan Agar Sebaiknya Perusahaan Yang Ada Didesa Terbut Lebih Mementingkan Untuk Meperkerjakan Para Pemuda-pemudi Di Desa Tersebut.	Dinas Tenaga Kerja	Desa Badau, Kab. Belitung, Badau, Badau	1 Kegiatan		√	
552	Tenaga Kerja	Pengawasan Ketenaga Ketenagakerjaan	Masyarakat Mengharapkan Perusahaan-perusahaan Yang Ada Dikecamatan Badau Lebih Memprioritaskan Pemuda-pemudi Yang Ada Di Desa Badau Untuk Dijadikan Pegawai, Selama Ini Memang Ada Beberapa Orang Dari Desa Yang Diperkerjakan Diperusahaan Tersebut Tetapi Apabila Produksi Meningkat Mereka Diistirahatkan Dan Diganti Oleh Pegawai Dari Luar Desa.	Dinas Tenaga Kerja	Desa Badau, Kab. Belitung, Badau, Badau	1 Kegiatan		√	
553	Tenaga Kerja	Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Bantuan Lapangan Kerja Bagi Siswa Yang Telah Lulus	Dinas Tenaga Kerja	Toboali, Kab. Bangka Selatan, Toboali, Toboali	1 Kegiatan		√	Melalui program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja siswa-siswa dapat dilatih
554	Tenaga Kerja	Penempatan Tenaga Kerja	Membuka Lowongan Kerja Bagi Para Siswa/Siswi Dan Untuk Disampaikann Kepada Pejabat Berwenang	Dinas Tenaga Kerja	Toboali, Kab. Bangka Selatan, Toboali, Toboali	1 Kegiatan		√	
555	Tenaga Kerja	Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Membuka Peluang Kerja Bagi Para Siswa/Siswi Yang Telah Lulus	Dinas Tenaga Kerja	Toboali, Kab. Bangka Selatan, Toboali, Toboali	1 Kegiatan		√	

No.	Isu/Bidang Urusan	Usulan	Permasalahan	Perangkat Daerah	Lokasi	Koefisien	Status		Keterangan
							Diakomodir	Tidak Diakomodir	
556	Tenaga Kerja	Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Bantuan Modal Untuk Pelaku Pelatihan Khusus	Dinas Tenaga Kerja	Toboali, Kab. Bangka Selatan, Toboali, Toboali	1 Kegiatan		√	
557	Tenaga Kerja	Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Masyarakat Mengharapkan Adanya Pelatihan Untuk Para Pemuda Karena Terbatasnya Lapangan Kerja Serta Diadakan Program Magang Dari Provinsi Untuk Para Pemuda	Dinas Tenaga Kerja	Dusun Rembikang, Kab. Belitung, Sijuk, Sijuk, Seluruh Kelurahan/Desa	1 Kegiatan		√	Sudah diadakan di dinas tenaga kerja melalui program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja
558	Tenaga Kerja	Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Masyarakat Karang Taruna Meminta Diadakan Pelatihan Untuk Para Pemuda	Dinas Tenaga Kerja	Desa Air Seruk, Kab. Belitung, Sijuk, Air Seruk	1 Kegiatan		√	Sudah diadakan di dinas tenaga kerja melalui program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja
559	Tenaga Kerja	Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meminta Agar Pekerja Tambang Mendapatkan Upah Sesuai Standar Dan Mendapatkan Jamsostek	Dinas Tenaga Kerja	Desa Tanjung Kelumpang, Kab. Belitung Timur, Seluruh Kecamatan Dan Kelurahan/Desa	1 Kegiatan		√	
560	Tenaga Kerja	Hubungan Industrial	Agar Mempercepat Sistem Birokasi Pabrik Untuk Membantu Masyrakat Adil Dan Makmur	Dinas Tenaga Kerja	Desa Tanjung Batu Itam, Kab. Belitung Timur, Simpang Pesak, Tanjung Batu Itam	1 Kegiatan		√	
561	Tenaga Kerja	Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Diharapkan Kepada Pemerintah Untuk Membuka Lapangan Pekerjaan Untuk Anak-Anak Yang Putus Sekolah Dan Sarjana Yang Pengangguran	Dinas Tenaga Kerja	Jl. Air Selan Pangkla Pinang, Kota Pangkal Pinang, Gabek, Air Salemba	1 Kegiatan		√	Disnaker tidak membuka lapangan pekerjaan tetapi memberikan jalan untuk bekerja di perusahaan2 yang membuka lowongan pekerjaan melalui kegiatan job convasing
562	Tenaga Kerja	Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Masyarakat Meminta Pemerintah Kesejahteraan Buruh Diperhatikan	Dinas Tenaga Kerja	Kelurahan Pangkalllalang, Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	1 Kegiatan		√	Untuk pembahasan upah sesuai standar dan mendapatkan hak jamsostek dibahas didalam kegiatan peningkatan fungsi DP, pembahasan UMP, UMK/UMSK dan sosialisasi UMP kegiatan ini dianggarkan tahun 2020-2022
563	Tenaga Kerja	Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Belum Adanya Program CSR Di Beberapa Perusahaan Sehingga Perlu Menjadi Perhatian Pemerintah	Dinas Tenaga Kerja	Dusun Rembikang, Kab. Belitung, Sijuk, Sijuk, Seluruh Kelurahan/Desa	1 Kegiatan		√	Perlu adanya kesepakatan antara pemerintah, perusahaan dan masyarakat. tujuanya adalah untuk melahirkan program CSR yang sesuai kebutuhan dilingkungan

No.	Isu/Bidang Urusan	Usulan	Permasalahan	Perangkat Daerah	Lokasi	Koefisien	Status		Keterangan
							Diakomodir	Tidak Diakomodir	
									sekitar masyarakat.
564	Tenaga Kerja	Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Agar Pekerja Tambang Mendapatkan Upah Yang Sesuai Standar Dan Mendapatkan Hak Seperti Jamsostek Dan Sebagainya	Dinas Tenaga Kerja	Desa Tanjung Kelumpang, Kab. Belitung Timur, Simpang Pesak, Tanjung Kelumpang	1 Kegiatan		√	Untuk pembahasan upah sesuai standar dan mendapatkan hak jamsostek dibahas didalam kegiatan peningkatan fungsi DP, pembahasan UMP, UMK/UMSK dan sosialisasi UMP kegiatan ini dianggarkan tahun 2020-2022
565	Tenaga Kerja	Hubungan Industrial	Permasalahan Melonjaknya Harga Gas Elpiji 3 Kg Dari Warung Dan Kurangnya Pasokan Dari Pangkalan, Masyarakat Mengharapkan Kepada Pemerintah Untuk Memperbanyak Pasokan Gas Elpiji 3 Kg	Dinas Tenaga Kerja	Gg. Salam Kacang Pedang, Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Kacang Pedang	1 Kegiatan		√	Bukan menjadi wewenang dinas tenaga kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
566	Tenaga Kerja	Hubungan Industrial	Masyarakat Memohon Kepada Pemerintah Untuk Mengatasi Kelangkaan Gas Elpiji 3 Kg	Dinas Tenaga Kerja	Taman Bunga, Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Taman Bunga	1 Kegiatan		√	Bukan menjadi wewenang dinas tenaga kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
567	Tenaga Kerja	Pengawasan Ketenaga Ketenagakerjaan	Mohon Bantuan Kepada Pemerintah Untuk Pengangkatan Guru Honorer Yang Mengajar Disekolah-sekolah Swasta	Dinas Tenaga Kerja	Hotel Edotel, Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitbesar	1 Kegiatan		√	Bukan menjadi wewenang dinas tenaga kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
568	Tenaga Kerja	Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Diadakannya Pelatihan Tokoh Agama Dan Pengurus Rumah Ibadah	Dinas Tenaga Kerja	Desa Pangkal Niur, Kab. Bangka, Riau Silip, Pangkal Niur	1 Kegiatan		√	Bukan menjadi wewenang dinas tenaga kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
569	Tenaga Kerja	Hubungan Industrial	Masyarakat Mengharapkan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas Dibelitung Agar Memudahkan Masyarakat Membeli Gas Dan Mengurangi Kelangkaan Gas Didaerah Tersebut	Dinas Tenaga Kerja	Desa Air Saga, Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Air Saga	1 Kegiatan		√	Bukan menjadi wewenang dinas tenaga kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
570	Tenaga Kerja	Hubungan Industrial	Masyarakat Desa Cendil Berharap Ada Evaluasi Terkait Dengan Pemberlakuan Fuel Card Agar Tepat Sasaran Dan	Dinas Tenaga Kerja	Desa Cendil, Kab. Belitung Timur, Kelapa Kampit, Cendil	1 Kegiatan		√	Bukan menjadi wewenang dinas tenaga kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.	Isu/Bidang Urusan	Usulan	Permasalahan	Perangkat Daerah	Lokasi	Koefisien	Status		Keterangan
							Diakomodir	Tidak Diakomodir	
			Tidak Merugikan Masyarakat						
571	Tenaga Kerja	Hubungan Industrial	Masyarakat Dsa Tanjung Batu Itam Meminta Persediaan Gas Elpiji 3Kg Dikarenakan Saat Ini Sudah Langka	Dinas Tenaga Kerja	Desa Tanjung Batu Itam, Kab. Belitung Timur, Dendang, Dendang, Seluruh Kelurahan/Desa	1 Kegiatan		√	Bukan menjadi wewenang dinas tenaga kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
572	Tenaga Kerja	Hubungan Industrial	Masyarakat Meminta Persediaan Gas Elpiji 3Kg Dikarenakan Sudah Langka	Dinas Tenaga Kerja	Desa Lesung Batang, Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	1 Kegiatan		√	Bukan menjadi wewenang dinas tenaga kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
573	Tenaga Kerja	Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Masyarakat Belitung Meminta Agar Memprioritaskan Pekerja Dari Belitung Daripada Pekerja Dari Luar	Dinas Tenaga Kerja	Desa Jengkang, Kab. Belitung Timur, Dendang, Jangkang	1 Kegiatan		√	Bukan menjadi wewenang dinas tenaga kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
574	Tenaga Kerja	Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Memberikan Pelatihan Dan Pengembangan Wawasan Kepada Guru	Dinas Tenaga Kerja	Tanjung Labu, Kab. Bangka Selatan, Lepar Pongok, Tanjunglabu	1 Kegiatan		√	Bukan menjadi wewenang dinas tenaga kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
575	Tenaga Kerja	Hubungan Industrial	Nasyarakat Desa Kembiri Mengharapkan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji Dikarenakan Sering Terjadinya Kelangkaan Gas Elpiji 3 Kg Di Daerah Tersebut	Dinas Tenaga Kerja	Desa Kembiri, Kab. Belitung, Membalong, Kembiri	1 Kegiatan		√	Bukan menjadi wewenang dinas tenaga kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
576	Tenaga Kerja	Hubungan Industrial	Masyarakat Mengusulkan Pembangunan Pabrik Es Agar Tidak Jauh-jauh Ke Tanjung Pandan	Dinas Tenaga Kerja	Desa Tanjung Kelumpang, Kab. Belitung Timur, Simpang Pesak, Tanjung Kelumpang	1 Kegiatan		√	Bukan menjadi wewenang dinas tenaga kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
577	Tenaga Kerja	Hubungan Industrial	Masyarakat Mengeluhkan Kelangkaan Gas Elpiji 3 Kg	Dinas Tenaga Kerja	Desa Nyuruk, Kab. Belitung Timur, Dendang, Nyuruk	1 Kegiatan		√	Bukan menjadi wewenang dinas tenaga kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
578	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Penolakan Penambangan Timah Yang Dilakukan Didesa Tanjung Labu	Satuan Polisi Pamong Praja	Desa Tanjung Labu, Kab. Bangka Selatan, Lepar Pongok, Tanjunglabu	1 Kegiatan	√		Terlebih dahulu akan berkordinasi dengan Satpol PP Kabupaten Bangka Selatan sembari mengumpulkan data dan informasi terlebih dahulu
579	Sekretariat Daerah	Pemerintahan Dan	Masyarakat Desa Tebing	Sekretariat Daerah	Desa Tebing, Kab.	1 Kegiatan	√		Akan diusulkan melalui bantuan

No.	Isu/Bidang Urusan	Usulan	Permasalahan	Perangkat Daerah	Lokasi	Koefisien	Status		Keterangan
							Diakomodir	Tidak Diakomodir	
		Kesejahteraan Rakyat	Meminta Agar Diberikan Gaji Atau Insentif Kepada Tenaga Guru Ngaji		Bangka Barat, Kelapa, Tebing				keuangan APBD 2021, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan APBD
580	Sekretariat Daerah	Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Masyarakat Lontong Pancur Mengharapkan Adanya Pembangunan Rumah Layak Huni Untuk Masyarakat Yang Kurang Mampu	Sekretariat Daerah	Lontong Pancur Pangkal Balam, Kota Pangkal Pinang, Pangkal Balam, Lontong Pancur	1 Kegiatan		√	Untuk sementara RTLH belum dapat di akomodir karena sesuai dengan kewenangan Permendagri No. 90 tahun 2019 hanya untuk dilokasi rawan bencana atau relokasi program pemerintah
581	Sekretariat Daerah	Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Masyarakat Jl. Air Selan Mengharapkan Adanya Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni Untuk Masyarakat Yang Kurang Mampu	Sekretariat Daerah	Jl. Air Selan Pangkalpinang, Kota Pangkal Pinang, Gabek, Air Salemba	1 Kegiatan		√	Untuk sementara RTLH belum dapat di akomodir karena sesuai dengan kewenangan Permendagri No. 90 tahun 2019 hanya untuk dilokasi rawan bencana atau relokasi program pemerintah
582	Sekretariat Daerah	Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Mohon Agar Dan Daba Untuk Kota Dianggarkan Kembali Di Tahun 2021, Dikarenakan Di Tahun 2020 Dana Tersebut Kosong Untuk Kota	Sekretariat Daerah	Taman Bunga, Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Taman Bunga	1 Kegiatan		√	Peruntukannya tidak jelas
583	Sekretariat Daerah	Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Mohon Bantuan Kepada Pemerintah Provinsi Untuk Kegiatan Presparawi (Persatuan Paduan Suara Gerejawi) Yang Akan Dilaksanakan Tahun 2021 Yogyakarta	Sekretariat Daerah	Hotel Pia Pangkalpinang, Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Batin Tikal	1 Kegiatan	√		Diproses dan diakomodir oleh biro kesejahteraan rakyat
584	Sekretariat Daerah	Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Agar Tenaga Honorer Dibayar Dengan APBD Dikarenakan Apabila Dibayarkan Dengan Dana Bos Hanya Dibatasi Sebanyak 15 Persen	Sekretariat Daerah	Hotel Edotel, Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitbesar	1 Kegiatan	√		BOS APBN 2020 sudah mengatur batas maksimal belanja pegawai 50% (dengan ketentuan yang sudah ada dalam juknis), apabila tidak terakomodir dalam BOS APBN maka dibayarkan melalui BOS APBN

No.	Isu/Bidang Urusan	Usulan	Permasalahan	Perangkat Daerah	Lokasi	Koefisien	Status		Keterangan
							Diakomodir	Tidak Diakomodir	
585	Sekretariat Daerah	Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Masyarakat Mengeluhkan Penerapan Kartu Indonesia Sehat Dan Kartu Indonesia Pintar Yang Belum Tepat Sasaran, Contohnya Masih Banyak Masyarakat Yang Terhitung Mampu Tetapi Bisa Mendapatkan Bantuan Tersebut, Sedangkan Masyarakat Yang Seharusnya Mendapatkan Bantuan Tersebut Justru Tidak Terdata Dalam Bantuan Tersebut	Sekretariat Daerah	Desa Air Saga, Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Air Saga	1 Kegiatan		√	Tidak jelas KIP untuk jenjang sekolahnya. KIP dikeluarkan oleh dinas sosial
586	Sekretariat Daerah	Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Bantuan Dana Untuk Pembangunan Masjid Al-Husna	Sekretariat Daerah	Lingkungan Sidodadi Kelurahan Srimenanti, Kab. Bangka, Sungailiat, Sri Menanti	1 Kegiatan		√	Diproses/diakomodir pada tahun 2020
587	Sekretariat Daerah	Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Bantuan Penyelesaian Pembangunan Masjid Nurul Huda Melalui Bantuan Dana Hibah	Sekretariat Daerah	Desa Jada Bahrin, Kab. Bangka, Merawang, Jada Bahrin	1 Kegiatan		√	Proposal belum masuk untuk diproses pada tahun 2021
588	Sekretariat Daerah	Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Bantuan Pembangunan Mesjid	Sekretariat Daerah	Desa Labu, Kab. Bangka, Puding Besar, Labu	1 Kegiatan		√	Diproses/diakomodir pada tahun 2020
589	Sekretariat Daerah	Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Bantuan Dana Untuk Mesjid	Sekretariat Daerah	Kelurahan Kenanga, Kab. Bangka, Sungailiat, Kenanga	1 Kegiatan		√	Diproses/diakomodir pada tahun 2021
590	Sekretariat Daerah	Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Masyarakat Mengharapkan Kemudahan Untuk Mendaftar Bpjs Kesehatan Mandiri Dan Juga Agar Diadakannya SIM Keliling Kedesa-Desa Agar Lebih Memudahkan Masyarakat	Sekretariat Daerah	Desa Kembiri, Kab. Belitung, Membalong, Kembiri	1 Kegiatan		√	Biro kesejahteraan rakyat tidak melayani pendaftaran BPJS kesehatan mandiri dan diadakannya SIM keliling ke desa-desa. barangkali instansi terkait dinas kesehatan dan badan keuangan daerah melayani hal tersebut.
591	Sekretariat Daerah	Pemerintahan Dan	Guru Honorer Berharap Dapat	Sekretariat Daerah	Desa Sijuk, Kab.	1 Kegiatan	√		Gaji guru honorer disesuaikan dengan

No.	Isu/Bidang Urusan	Usulan	Permasalahan	Perangkat Daerah	Lokasi	Koefisien	Status		Keterangan
							Diakomodir	Tidak Diakomodir	
		Kesejahteraan Rakyat	Diperhatikan Terkait Dengan Kesejahteraan		Belitung, Sijuk, Sijuk				jam mengajar guru minimal 24 JP sesuai dengan peraturan gubernur
592	Sekretariat Daerah	Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Belum Adanya Program CSR Di Beberapa Perusahaan Sehingga Perlu Menjadi Perhatian Pemerintah	Sekretariat Daerah	Dusun Rembikang, Kab. Belitung, Sijuk, Sijuk, Seluruh Kelurahan/Desa	1 Kegiatan		√	Biro kesejahteraan rakyat tidak menangani CSR perusahaan. barangkali instansi terkait dinas tenaga kerja menangani hal tersebut.
593	Sekretariat Daerah	Pemberdayaan Sosial	Bantuan Perbaikan Mesjid Banyu Asin	Sekretariat Daerah	Desa Banyu Asin, Kab. Bangka, Riau Silip, Banyu Asin	1 Kegiatan	√		
594	Sekretariat Daerah	Pemberdayaan Sosial	Bantuan Pembangunan Mesjid	Sekretariat Daerah	Desa Sempan, Kab. Bangka, Pemali, Sempan	1 Kegiatan	√		
595	Sekretariat Daerah	Rehabilitasi Sosial	Menginginkan Bantuan Renovasi Rumah Ibadah Di Kelurahan Lesung Batang	Sekretariat Daerah	Kelurahan Lesung Batang, Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Tanjung Pandan, Seluruh Kelurahan/Desa	1 Unit		√	
596	Sekretariat Daerah	Pemberdayaan Sosial	Bantuandana Hibah Untuk Rumah Ibadah	Sekretariat Daerah	Kelurahan Pall Satu, Kab. Belitung, Seluruh Kecamatan Dan Kelurahan/Desa	1 Usulan		√	
597	Sekretariat Daerah	Pemberdayaan Sosial	Bantuan Alokasi Khusus Untuk Mesjid	Sekretariat Daerah	Desa Kace Timur, Kab. Bangka, Mendo Barat, Kace Timur	1 Kegiatan		√	
598	Sekretariat Daerah	Pemberdayaan Sosial	Bantuan Pembangunan Mesjid Jami Nurul Iman	Sekretariat Daerah	Desa Paya Benua, Kab. Bangka, Mendo Barat, Paya Benua	1 Kegiatan		√	Dianggarkan pada tahun 2020
599	Sekretariat Daerah	Pemberdayaan Sosial	Perbaikan Mesjid Al-Qurnia	Sekretariat Daerah	Desa Kace, Kab. Bangka, Mendo Barat, Kace	1 Kegiatan		√	Belum ada proposal
600	Sekretariat Daerah	Pemberdayaan Sosial	Bantuan Perluasan Masjid Al-Muhajirin Dan Tempat Parkir	Sekretariat Daerah	Kelurahan Bukit Ketok, Kab. Bangka, Belinyu, Bukit Ketok	1 Kegiatan		√	Belum ada proposal

No.	Isu/Bidang Urusan	Usulan	Permasalahan	Perangkat Daerah	Lokasi	Koefisien	Status		Keterangan
							Diakomodir	Tidak Diakomodir	
601	Sekretariat Daerah	Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Masyarakat Mengharapkan Bantuan Hibah Sosial Berupa Beasiswa Dan Baiay Berobat Bagi Masyarakat Yang Kurang Mampu	Sekretariat Daerah	Kelurahan Gajah Mada Pangkalpinang, Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Gajah Mada	1 Kegiatan		√	Proposal harus by name by adress
602	Sekretariat Daerah	Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Mengenai Dana Hibah Apakah Harus Melalui Yayasan, Berhubung Gereja Tersebut Tidak Harus Dibawah Pengawasan Yayasan Jadi Bagaimana Kita Mendapatkan Akses Dari Yayasan Tersebut	Sekretariat Daerah	Hotel Pia Pangkalpinang, Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Batin Tikal	1 Kegiatan	√		Memiliki badan hukum yang jelas dari pusat
603	Sekretariat Daerah	Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Mengharapkan Agar Pemerintah Mengimplementasikan Bantuan Sosial Dan Dana Hibah Secara Transparan Dan Adil	Sekretariat Daerah	Hotel Pia Pangkalpinang, Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Batin Tikal	1 Kegiatan	√		Dengan catatan pemohon bantuan hibah melalui proposal dan memiliki badan hukum yang jelas
604	Sekretariat Daerah	Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Bantuan Pembangunan Mesjid	Sekretariat Daerah	Desa Cit, Kab. Bangka, Riau Silip, Cit	1 Kegiatan	√		Jika masjid tersebut memiliki badan hukum yang jelas
605	Sekretariat Daerah	Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Bantuan Mesjid	Sekretariat Daerah	Desa Rukam, Kab. Bangka, Mendo Barat, Rukam	1 Kegiatan	√		Jika masjid tersebut memiliki badan hukum yang jelas
606	Sekretariat Daerah	Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Bantuan Dana Hibah Untuk Mesjid	Sekretariat Daerah	Desa Puding Besar, Kab. Bangka, Puding Besar, Puding Besar	1 Kegiatan		√	Sudah diakomodir pada tahun 2020
607	Sekretariat Daerah	Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Masyarakat Berharap Adanya Bantuan Dana Hibah	Sekretariat Daerah	Desa Jangkang, Kab. Belitung Timur, Dendang, Dendang, Seluruh Kel./Desa	1 Kegiatan		√	Tidak jelas peruntukannya
608	Sekretariat Daerah	Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Bantuan Konblok Mesjid Disimpang Tiga Kelurahan Bukit Ketok	Sekretariat Daerah	Kelurahan Bukit Ketok, Kab. Bangka, Belinyu, Bukit Ketok	1 Kegiatan		√	Belum jelas peruntukan masjid mana
609	Sekretariat Daerah	Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Adanya Bantuan Biaya Pendidikan Dan Kesehatan Untuk Anak Ketergantungan Mental	Sekretariat Daerah	Batu Betumpang, Kab. Bangka Selatan, Pulaubesar, Batu Betumpang	1 Kegiatan		√	Proposal harus jelas by name by adress

No.	Isu/Bidang Urusan	Usulan	Permasalahan	Perangkat Daerah	Lokasi	Koefisien	Status		Keterangan
							Diakomodir	Tidak Diakomodir	
610	Sekretariat Daerah	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Masyarakat Desa Sinar Surya Meminta Agar Dibuatkan Musholla Bagi Nelayan Di Tepi Pantai	Sekretariat Daerah	Masyarakat Desa Sinar Surya, Kab. Bangka Barat, Tempilang, Sinar Surya	1 Buah		√	Proposal belum masuk untuk diproses pada tahun 2021
611	Sekretariat Daerah	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Masyarakat Desa Sangku Meminta Untuk Dibantu Dana Rehab Masjid Desa Sangku	Sekretariat Daerah	Desa Sangku, Kab. Bangka Barat, Tempilang, Sangku	1 Buah		√	Diproses tahun 2020
612	Sekretariat Daerah	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Masyarakat Dusun Kamat Meminta Agar Melakukan Perbaikan Masjid	Sekretariat Daerah	Dusun Kamat, Kab. Bangka Barat, Tempilang, Simpang Yul	1 Buah	√		Jika masjid tersebut memiliki badan hukum yang jelas
613	Sekretariat Daerah	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Masyarakat Mengharapkan Kepada Pemerintah Untuk Memberikan Bantuan Semen 50 Sack Untuk Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Di Mesjid Al-Iman Air Itam	Sekretariat Daerah	Air Itam Pangkalpinang, Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	1 Kegiatan	√		Diproses tahun 2021
614	Sekretariat Daerah	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Masyrakat Mengharapkan Kepada Pemerintah Untuk Membantu Pembangunan Mesjid Di Kacang Pedang Yang Belum Berkembang Seperti Sholat Berjamaah Ataupun Sholat Jumat Jarang Terjadi Karena Mesjid Tersebut Terlalu Kecil,	Sekretariat Daerah	Gg. Salam Kacang Pedang, Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Kacang Pedang	1 Kegiatan		√	Proposal belum masuk untuk diproses pada tahun 2021
615	Sekretariat Daerah	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Masyarakat Desa Keranggan Meminta Dibuatkan Menara Di Masjid Baitul Rahman	Sekretariat Daerah	Desa Keranggan, Kab. Bangka Barat, Seluruh Kecamatan Dan Kelurahan/Desa	1 Kegiatan		√	Diproses tahun 2020

No.	Isu/Bidang Urusan	Usulan	Permasalahan	Perangkat Daerah	Lokasi	Koefisien	Status		Keterangan
							Diakomodir	Tidak Diakomodir	
616	Sekretariat Daerah	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Masyarakat Desa Cendil Meminta Bantuan Dana Untuk Pembangunan Masjid Di Desa Cendil	Sekretariat Daerah	Desa Cendil, Kab. Belitung Timur, Kelapa Kampit, Cendil	1 Kegiatan	√		Diproses tahun 2021
617	Sekretariat Daerah	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Pembangunan Perluasa Mushola Di Desa Toboali	Sekretariat Daerah	Toboali, Kab. Bangka Selatan, Toboali, Toboali	1 Kegiatan		√	Proposal permohonan belum jelas by name by adress
618	Sekretariat Daerah	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Bantuan Pembuatan Masjid	Sekretariat Daerah	Teladan, Kab. Bangka Selatan, Toboali, Teladan	1 Kegiatan		√	Proposal permohonan belum jelas by name by adress
619	Sekretariat Daerah	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Pembuatan Tpa Di Masjid Yang Sudah Ada	Sekretariat Daerah	Desa Teladan, Kab. Bangka Selatan, Toboali, Teladan	1 Kegiatan		√	Proposal permohonan belum jelas by name by adress
620	Sekretariat Daerah	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Masyarakat Meminta Bantuan Dana Untuk Pembangunan Masjid Di Kelurahan Pangkal Lalang	Sekretariat Daerah	Kelurahan Pangkallalang, Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	1 Kegiatan	√		Diakomodir tahun 2021
621	Sekretariat Daerah	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Pengurus Mesjid Al-Fatah Dusun Kampung Baru Mengharapkan Pembuatan Pagar Pembatas Antara Mesjid Dengan Rumah Warga Dan Untuk Pembangunan Tersebut Membutuhkan 1000 Batako, 100 Sak Semen Dan Juga Membutuhkan Beduk Baru	Sekretariat Daerah	Desa Simpang Rusa, Kab. Belitung, Membalong, Simpang Rusa	1 Kegiatan	√		Diakomodir dengan catatan masjid tersebut berbadan hukum

No.	Isu/Bidang Urusan	Usulan	Permasalahan	Perangkat Daerah	Lokasi	Koefisien	Status		Keterangan
							Diakomodir	Tidak Diakomodir	
622	Sekretariat Daerah	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum	Masyarakat Meminta Pembangunan Madrasah Amalia Dan Pembangunan Masjid	Sekretariat Daerah	Kelurahan Pangkallalang, Kab. Belitung, Pangkallalang	1 Kegiatan		√	Proposal permohonan belum jelas by name by adress
623	Sekretariat Daerah	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum	Masyarakat Meminta Bantuan Dana Untuk Pembangunan Masjid Al-Muhajirin Dan Masjid Al-Ikhlas Di Desa Sijuk	Sekretariat Daerah	Desa Sijuk, Kab. Belitung, Sijuk, Sijuk	1 Kegiatan	√		Proposal permohonan dibantu jika masjid tersebut berbadan hukum
624	Sekretariat Daerah	Pengembangan Jasa Konstruksi	Masyarakat Mengharapkan Pemasangan Conblok Dan Pintu Gerbang Di Masjid Al-Mukmin Desa Sungai Samak	Sekretariat Daerah	Desa Sungai Samak, Kab. Belitung, Badau, Sungai Samak	1 Kegiatan		√	Proposal belum masuk untuk diproses pada tahun 2021
625	Sekretariat Daerah	Penataan Bangunan Gedung	Baantuan Gedung Serbaguna Dan Penambahan Gedung Pesantren Nurul Quran	Sekretariat Daerah	Air Gegas, Kab. Bangka Selatan, Air Gegas, Airgegas	1 Kegiatan		√	
626	Sekretariat Daerah	Penataan Bangunan Gedung	Bantuan Pembesaran Pesantren Di Bikang	Sekretariat Daerah	Teladan, Kab. Bangka Selatan, Toboali, Teladan	1 Kegiatan	√		Diproses tahun 2021
627	Sekretariat Daerah	Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Masyarakat Mengharapkan Perbaikan Jalan Desa Ibu-Datuk Mayang Gersik Dan Jalan Kearah Makam Datukmayang Gersik Yang Kerusakannya Cukup Parah Dan Terlalu Berbahaya Untuk Dilewati.	Sekretariat Daerah	Desa Badau, Kab. Belitung, Badau, Badau	1 Kegiatan		√	Bukan kewenangan provinsi
628	Sekretariat Daerah	Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Bantuan 1 Unit Mobil Jenazah	Sekretariat Daerah	Lingkungan Sidodadi Kelurahan Sri-menanti, Sungailiat,	1 Unit		√	Bukan kewenangan biro kesra
629	Sekretariat Daerah	Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Masyarakat Mengharapkan Kepada Pemerintah Membentuk Lembaga Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Yang Kurang Mampu Di Setiap Perangkat Desa	Sekretariat Daerah	Desa Juru Seberang, Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Juru Seberang	1 Kegiatan		√	Pemprov hanya menyiapkan bantuan hukum, sedangkan lembaga bantuan hukum sdh ada disetiap kabupaten, sehingga tdk perlu membuat lembaga bantuan hukum lagi

No.	Isu/Bidang Urusan	Usulan	Permasalahan	Perangkat Daerah	Lokasi	Koefisien	Status		Keterangan
							Diakomodir	Tidak Diakomodir	
630	Sekretariat Daerah	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Mohon Adanya Perhatian Dan Pelayanan Yang Baik Dari Pemerintah Mengenai Anggaran Seperti Mengadakan Acara Resmi Dari Gereja Tapi Tidak Saja Kejelasan Dari Pihak Pemerintah Maupun Gubernur	Sekretariat Daerah	Hotel Pia Pangkalpinang, Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Batin Tikal	1 Kegiatan		√	Bukan kewenangan biro kesra
631	Kepemudaan dan Olahraga	Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Masyarakat Meminta Untuk Dibuatkan Program Kepemudaan Bagi Pemuda-Pemudi Desa Tanjung Niur	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Desa Tanjung Niur, Kab. Bangka Barat, Tempilang, Tanjung Niur	1 Kegiatan	√		
632	Kepemudaan dan Olahraga	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum	Bantuan Mobil Operasional Untuk Kegiatan Olahraga	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Air Gegas, Kab. Bangka Selatan, Air Gegas, Airgegas	1 Unit		√	Disarankan oleh kepala dispora proposal ditujukan ke bakuda provinsi kep babel
633	Kepemudaan dan Olahraga	Pengelolaan Izin Lokasi	Masyarakat Meminta Dibuatkan Stadion Mini Di Desa Sijuk	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Desa Sijuk, Kab. Belitung, Sijuk, Sijuk, Seluruh Kel/Desa	1 Kegiatan		√	Diarahkan menggunakan anggaran dana desa atau dana desa.
634	Sekretariat Daerah	Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Desa Juru Seberang, Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Juru Seberang	1 Kegiatan		√	Tahun 2021 tidak kegiatan berhubungan pembinan bagi perangkat desa karena tidak ada kewenagannya pada Permendagri 90/2019, namun untuk koordinasi ke Dinas PMD bisa langsung pada PPK Dekosentrasi
635	Sekretariat Daerah	Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Masyarakat Mengharapkan Adanya Kotak Pengaduan/ Saran Pada Setiap Desa Karena Selama Ini Tidak Ada Penyelesaian Masalah Dari Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Desa Tanjung Batu Itam, Kab. Belitung Timur, Simpang Pesak, Tanjung Batu Itam	1 Kegiatan		√	Di setiap desa sudah disiapkan kotak pengaduan, tinggal membentuk tim unit pengaduan masyarakat dan melakukan tindaklanjut atas pengaduan masyarakat tersebut
636	Sekretariat Daerah	Pengembangan Permukiman	Masyarakat Mengharapkan Keseriusan Dan Keterlibatan Perusahaan-Perusahaan Yang Ada Di Desa Sungai Samak Dalam Program Pengembangan Dan Pembangunan Desa Tersebut	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Desa Sungai Samak, Kab. Belitung, Badau, Sungai Samak	1 Kegiatan	√		

2.5 Capaian Inovasi Daerah

Inovasi merupakan kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, daya saing daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Inovasi menjadi salah satu tool dalam mengakselarasi peningkatan daya saing. Setiap elemen negara yang meliputi pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil harus melakukan inovasi. Inovasi pada lingkungan instansi pemerintah meliputi antara lain kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota sangat penting karena dapat mengakselerasi inovasi swasta dan masyarakat dalam meningkatkan pelayanan publik.

Pemerintah daerah menjadi salah satu ujung tombak pelayanan publik yang wajib melakukan inovasi. Pelayanan publik yang inovatif akan meningkatkan pelayanan, pemberdayaan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan daya saing yang semakin tinggi. Kemampuan daya saing daerah yang tinggi pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Inovasi, selain diperlukan untuk meningkatkan daya saing daerah dan meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat, pada dasarnya juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi dicanangkan untuk memperbaiki "penyakit-penyakit" di sektor publik melalui pembaruan di 8 (delapan) area sasaran (organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, dan *mindset* serta *cultural* set aparatur).

Inovasi menjadi katalisator untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi, di mana banyak program inovasi merupakan pengejawantahan dari upaya perubahan di area-area tersebut. Lebih jauh lagi, inovasi sesungguhnya dapat dimaknai sebagai reformasi birokrasi kontekstual, artinya pelaksanaan reformasi birokrasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan daerah setempat. Kesadaran pentingnya inovasi saat ini ditandai dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan peluang pemerintah daerah untuk melakukan inovasi. Tepatnya pada Pasal 386 yang menyatakan bahwa "dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah dapat melakukan inovasi". Inovasi yang dimaksud adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berpedoman pada prinsip sebagai berikut: peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak ada konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai-nilai kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri. Berikut beberapa inovasi yang sedang dikembangkan oleh Perangkat Daerah (PD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2020 seperti dalam Tabel II.200.

Tabel II.200
Inovasi Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020

No.	Nama Inovasi	Instansi
(1)	*(2)*	*(3)*
1.	Sipena Sakti (Sistem Pengendalian Evaluasi Renja Perangkat Daerah dan Sakip Terintegrasi)	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
2.	Sirena Jatuh Cinta (Sistem Informasi Perencanaan ASN dalam Mewujudkan Pegawai yang sesuai Kebutuhan (*rightsizing*) dengan Cepat, Integrasi, Tepat dan Akurat)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
3.	Samsat Setempoh	Badan Keuangan Daerah
4.	Sitangguh Gima (Sistem Informasi Tanggap Tangkas Tangguh – *Geospacial Information Management Analysis*)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5.	Si Peri Terbang (Sistem Informasi Pengiriman Terpadu Bahan Tambang)	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Bangka

No.	Nama Inovasi	Instansi
(1)	*(2)*	*(3)*
6.	Tiwi Gadis Baper	Dinas Sosial
7.	Molin Sahabat (Mobil Perlindungan Satu Hati untuk Semua Kerabat)	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3ACSKB)
8.	Kampung KB Cikar	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3ACSKB)
9.	Plat BN (Program Layanan Terpadu Bebas Nyeri)	Dinas Kesehatan (UPTD. Rumah Sakit Umum Provinsi)
10.	Seperadek (Sistem Pelayanan Terpadu Kegawatdaruratan Koroner Akut)	Dinas Kesehatan (UPTD. Rumah Sakit Umum Provinsi)

Sumber: Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Bidang Litbang), 2020

Peningkatan daya saing antar daerah merupakan agenda yang sangat penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, inovasi dalam pembangunan yang berjalan secara komprehensif serta terjadinya kolaborasi antar aktor pembangunan merupakan kunci peningkatan daya saing.

Dalam rangka untuk lebih meningkatkan daya saing daerah, pada tahun 2017-2022 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung fokus untuk menggali dan mengembangkan inovasi daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah dan 13 (tiga belas) Prioritas Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu:

1. pengembangan pembangunan agropolitan;
2. pembangunan bahari;
3. pengembangan pariwisata;
4. pengembangan tata kelola pertambangan;
5. peningkatan ekonomi masyarakat;
6. pengembangan energi dan infrastruktur kewilayahan;
7. pembangunan pendidikan;
8. pembangunan sosial;
9. pembangunan kesehatan;
10. peningkatan tata kelola birokrasi dan pelayanan publik;
11. pembangunan berdemokrasi;
12. peningkatan pembangunan bidang kebencanaan;
13. pengendalian lingkungan hidup.

2.5.1 Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah

A. Sipena Sakti

Sipena Sakti (Sistem Pengendalian Evaluasi Renja Perangkat Daerah dan Sakip Terintegrasi) merupakan Inovasi yang dibuat untuk mempermudah tata kelola di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sipena Sakti terintegrasi dengan e-planning dan e-budgeting untuk membantu mitra Perangkat Daerah yang ada di Bappeda untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap laporan hasil Renja PD yang disampaikan ke Bappeda. Sipena Sakti bertujuan mewujudkan reformasi birokrasi yang berkualitas dan merupakan unggulan pembangunan daerah dalam peningkatan tata kelola birokrasi dan pelayanan publik dengan sasaran meningkatkan tata kelola pemerintahan dengan strategi peningkatan keselararasan antar dokumen perencanaan, pengangaran dan pelaporan.

B. Sirena Jatuh Cinta

Sirena Jatuh Cinta (Sistem Informasi Perencanaan ASN dalam mewujudkan Pegawai yang sesuai Kebutuhan (rightsizing) dengan Cepat, Integrasi, tepat dan Akurat) merupakan suatu inovasi yang inovatif karena memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan tata kelola pemerintah dan pelayanan bidang kepegawaian, menyediakan data perencanaan ASN melalui proses analisis kebutuhan dengan CINTA yaitu mewujudkan pegawai yang sesuai kebutuhan (*rightsizing*) dengan Cepat, Integrasi, Tepat Dan Akurat. Sirena Jatuh Cinta bertujuan mewujudkan reformasi birokrasi yang berkualitas dan merupakan unggulan pembangunan daerah dalam peningkatan tata kelola birokrasi dan pelayanan publik dengan sasaran meningkatnya kualitas ASN melalui strategi peningkatan kompetensi dan profesional ASN.

2.5.2 Inovasi Pelayanan Publik

A. Samsat Setempoh

Samsat Setempoh merupakan layanan inovatif Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diharapkan dapat menjangkau masyarakat yang akan membayar pajak kendaraan pada wilayah terpencil di pedesaan, bertujuan untuk mewujudkan pelayanan terhadap masyarakat yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dan meningkatkan pendapatan asli daerah, serta untuk meningkatkan kesadaraan masyarakat dalam membayar pajak. Terobosan ini diharapkan dapat menjangkau daerah yang tidak dapat terlayani oleh layanan Samsat Induk maupun Samsat Keliling. Samsat Setempoh bertujuan untuk meningkatkan pemerataan pendapatan dan merupakan unggulan pembangunan daerah dalam peningkatan pendapatan pemerintah dengan sasaran meningkatnya pendapatan pemerintah daerah melalui strategi meningkatkan pendapatan asli daerah.

B. Si Peri Terbang

Si Peri Terbang (Sistem Informasi Pengiriman Terpadu Bahan Tambang) merupakan inovasi untuk mngatasi keluhan perusahaan tambang terhadap layanan birokrasi yang tidak efisien, dimana hampir 100 izin usaha tambang di Bangka Belitung yang lokasinya jauh dari ibukota kabupaten sebagai tempat pelayanan dan untuk memperpendek rentang kendali dan kemudahan akses layanan bagi perusahaan tambang dimana hampir 90% lokasinya jauh dari tempat pelayanan. Si Peri Terbang bertujuan mewujudkan reformasi birokrasi dan merupakan unggulan pembangunan daerah dalam peningkatan tata kelola birokrasi dan pelayanan publik dengan sasaran meningkatkan tata kelola pemerintahan dengan strategi meningkatkan tata kelola pengawasan.

2.5.3 Inovasi Daerah lainnya sesuai Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Daerah

A. Tiwi Gadis Baper

Tiwi Gadis Baper (Terapi Wicara Gratis Dinas Sosial Membawa Perubahan) merupakan inovasi yang digagas Dinas Sosial karena satu-satunya layanan terapi wicara gratis di Bangka Belitung. Inovasi ini muncul untuk meringankan beban masyarakat terutama orangtua yang memiliki anak disabilitas agar bisa mendapatkan fasilitas latihan khusus yang sebelumnya tidak tersedia. Selain anak mereka bisa mendapatkan terapi wicara gratis, para orang tua juga mendapat informasi berguna untuk menambah wawasan tentang program pengembangan anak berkebutuhan khusus. Tiwi Gadis Baper bertujuan meningkatkan pendidikan masyarakat dan merupakan unggulan pembangunan daerah dalam pembangunan pendidikan dengan sasaran meningkatkan kesejahteraan sosial melalui strategi peningkatan rehabilitasi, jaminan dan perlindungan sosial.

B. Molin Sahabat

Molin Sahabat (Mobil Perlindungan Satu Hati untuk Semua Kerabat) merupakan alat transportasi multi fungsi yang digunakan untuk penjangkauan korban kekerasan, sosialisasi dan koordinasi dengan mitra atau jejaring kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan

Perlindungan Anak Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Molin Sahabat bertujuan meningkatkan pembangunan sosial masyarakat dan merupakan unggulan pembangunan daerah dalam pembangunan pendidikan dengan sasaran meningkatkan pembangunan responsif gender melalui strategi menekan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak.

C. Kampung KB Cikar

Kampung KB Cikar merupakan Pemberdayaan Masyarakat dalam upaya mengatasi permasalahan sosial di provinsi Kepulauan Bangka Belitung seperti angka perkawinan anak yang tinggi, kasus stunting serta kekerasan pada perempuan dan anak di beberapa wilayah yang cukup tinggi dan mensinergikan seluruh program pembangunan baik dari pusat maupun daerah dalam satu wadah program dengan tujuan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Kampung KB Cikar bertujuan meningkatkan pembangunan sosial masyarakat dan merupakan unggulan pembangunan daerah dalam pembangunan pendidikan dengan sasaran mengendalikan laju pertumbuhan penduduk melalui strategi pengendalian tingkat kelahiran penduduk dan perpindahan penduduk untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang.

D. Sitangguh Gima

Sitangguh Gima (Sistem Informasi Tanggap Tangkas Tangguh – *Geospacial Information Management Analysis*) merupakan inovasi yang muncul murni dari keprihatinan terhadap data yang ada di Indonesia pada umumnya, dan wilayah Kepulauan Bangka Belitung khususnya. Inovasi Sitangguh Gima merupakan ide/gagasan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dengan mengejawantahkan satu data satu pintu terkait kebencanaan, dengan memanfaatkan data berbagai sektor yang diharapkan terwujud kebijakan publik yang prima dan berkualitas. Inovasi ini merupakan langkah awal dalam membangun data yang akurat, terpadu, terintegrasi, tersinkronisasi, non duplikasi beserta pelaporannya. Sitangguh Gima bertujuan meningkatkan tata kelola kebencanaan dan merupakan unggulan pembangunan daerah dalam peningkatan pembangunan bidang kebencanaan dengan sasaran meningkatnya kapasitas daerah terhadap bencana melalui strategi peningkatan kualitas penyelenggaraan penangulangan bencana.

E. Plat BN

Plat BN (Program Layanan Terpadu Bebas Nyeri) merupakan Program Layanan Terpadu Bebas Nyeri (PLAT BN) adalah program inovasi pertama di Indonesia untuk pelayanan nyeri secara terintegrasi. Aspek kebaruan dari program terpadu ini meliputi empat aspek yaitu: 1) Terpadu Sumber Daya Manusia (SDM); 2) Terpadu jenis layanan; 3) Terpadu rujukan berjenjang; dan 4) Terpadu aspek dimensi kesehatan. Penamaan PLAT BN terinspirasi dari keseharian di kehidupan masyarakat berupa kode plat nomor kendaraan bermotor yang mudah diingat dan sering dilihat. Plat BN bertujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan merupakan unggulan pembangunan daerah dalam pembangunan kesehatan dengan sasaran meningkatnya kesehatan masyarakat melalui strategi meningkatkan kualitas kesehatan.

F. Seperadek

Seperadek (Sistem Pelayanan Terpadu Kegawatdaruratan Koroner Akut) merupakan inovasi di bidang kesehatan yang diinisiasi oleh tenaga kesehatan dokter spesialis jantung dan pembuluh darah yang di dukung oleh manajemen RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno. Diharapkan pelayanan ini sebagai salah satu layanan kesehatan unggulan untuk membantu dan bermanfaat bagi masyarakat dari serangan jantung. Seperadek bertujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan merupakan unggulan pembangunan daerah dalam pembangunan kesehatan dengan sasaran meningkatnya kesehatan masyarakat melalui strategi meningkatkan kualitas kesehatan.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 merupakan tahun pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Kondisi krisis pandemi Covid-19, pemerintah memerlukan *unprecedented policies* atau kebijakan yang belum pernah dilakukan. Jika mampu menekan rantai pemutusan virus disertai dengan intervensi kebijakan ekonomi secara maksimal, maka ekonomi akan lebih cepat pulih dan kembali normal. Karena itu, pada Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat (Rakorbangpus) dalam rangka penyusunan RKP Tahun 2021 di Jakarta ditetapkan tema RKP 2021 yaitu "Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial" yang adaptif dan responsive sebagai upaya pemulihan pembangunan nasional pascapandemi Covid-19. Arah kebijakan pembangunan dalam RKP 2021 akan difokuskan pada pemulihan ekonomi untuk beberapa sektor, yaitu :

1. pemulihan Industri, Pariwisata, dan Investasi;
2. reformasi Sistem Kesehatan Nasional;
3. reformasi Sistem Perlindungan Sosial;
4. reformasi Sistem Ketahanan Bencana.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 akan dilakukan dengan penekananan terhadap 7 (tujuh) Prioritas Nasional sebagai berikut:

1. memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menajmin pemerataan;
3. meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Sejalan dengan prioritas nasional tersebut, kebijakan ekonomi daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diarahkan pada pengembangan potensi ekonomi lokal berbasis agri-bahari, yang merupakan misi pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022. Strategi dan Arah Kebijakan peningkatan ekonomi daerah diarahkan pada:

1. peningkatan sarana prasarana produksi pertanian;
2. peningkatan produksi dan pengelolaan hasil produksi pertanian;
3. peningkatan kualitas sumber daya manusia pertanian;
4. pengembangan kawasan Agropolitan dan Teknopark lada air gegas;
5. peningkatan kualitas sumber daya manusia perikanan tangkap dan perikanan budidaya;
6. peningkatan produksi dan pengelolaan hasil produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya;
7. peningkatan sarana prasarana produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya;
8. peningkatan promosi, koordinasi, kerjasama, dan investasi dalam peningkatan produksi dan nilai tambah hasil produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya;
9. peningkatan peran serta masyarakat dan kelembagaan pariwisata serta pengembangan ekonomi kreatif;
10. peningkatan insfrastruktur, sarana dan prasarana destinasi pariwisata;
11. peningkatan kualitas sumber daya manusia pariwisata;
12. peningkatan peran serta kepemudaan dan olah raga serta kebudayaan dalam pengembangan pariwisata;
13. pengembangan hinterland dan kawasan peruntukan pariwisata Tanjung Gunung ;
14. pengembangan hinterland dan kawasan peruntukan pariwisata Lintas Timur Pulau Bangka;
15. pengembangan hinterland dan kawasan peruntukan pariwisata Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Kelayang;
16. pengembangan kawasan peruntukan pariwisata Pulau Punai;
17. pengembangan pintu masuk wisatawan kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Sumatera;
18. pengembangan kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil pendukung pariwisata;
19. peningkatan tata kelola sumber daya mineral yang berwawasan lingkungan;
20. peningkatan ketersediaan energi listrik masyarakat
21. pengembangan Kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu (KIPT) Tanjung Ular;
22. pengembangan Kawasan Strategis Industri Sadai;
23. peningkatan tata kelola industri;
24. peningkatan tata kelola perdagangan;
25. peningkatan kesempatan kerja;
26. peningkatkan peran KUKM dalam meningkatkan kesempatan kerja;
27. peningkatan promosi, koordinasi, kerjasama, dan investasi dalam peningkatan lapangan pekerjaan;
28. peningkatan kompetensi, hubungan industrial dan keselamatan tenaga kerja;
29. mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;
30. peningkatkan pendapatan masyarakat miskin;
31. peningkatan pendapatan masyarakat desa.

Guna menyusun rumusan kebijakan pembangunan ekonomi sebagai upaya untuk mewujudkan keberhasilan dari misi Pertama RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022, maka perlu dilihat terlebih dahulu gambaran umum tentang perkembangan perekonomian Bangka Belitung serta proyeksinya untuk Tahun 2021.

3.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pertumbuhan Ekonomi

3.1.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator makro yang penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah pada suatu periode tertentu. PDRB digunakan sebagai dasar perhitungan laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Selain itu juga untuk melihat struktur ekonomi suatu wilayah, sebagai indikator tingkat kesejahteraan masyarakat dan disparitas sosial. PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah/wilayah dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya, sehingga besarnya PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan teknologi di daerah/wilayah tersebut. PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggambarkan kemampuan daerah tersebut dalam mengelola dan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan jasa. Besarannya tergantung pada hasil penggunaan potensi faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, sumberdaya manusia, modal dan teknologi serta semangat berwirausaha masyarakatnya dalam melakukan kegiatan ekonomi.

Perkembangan PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sepanjang tahun 2017-2019 sebagaimana diperlihatkan pada Tabel III.1 menunjukkan *trend* yang meningkat. Secara nominal PDRB pada tahun 2017 sebesar Rp 49.985,2 Milyar meningkat menjadi sebesar Rp 52.215,4 Milyar pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 menjadi sebesar Rp 53.951,1 Milyar.

Tabel III.1
PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2010
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2021 (Milyar rupiah)

Lapangan Usaha		2017	2018	2019	2020*)	2021*)
(1)		*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	9.095,7	9.591,8	9.869,5	10.458,225	11.082,58
B	Pertambangan dan Penggalian	6.634,7	6.570,2	6.627,3	6.135,96	6.243,69
C	Industri Pengolahan	11.337,7	11.791,6	11.929,8	11.588,62	11.779,83
D	Pengadaan Listrik dan Gas	45,9	49,274	52,502	57,52	62,82
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9,4	8,9	9,2	10,393	10,99
F	Konstruksi	4.248,5	4.493,1	4.811,1	5.084,39	5.381,32
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.253,3	7.445,1	7.576,2	7.724,70	8.055,32
H	Transportasi dan Pergudangan	1.892,2	2.021,3	2.066,5	2.043,12	2.156,92
I	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	1.136,5	1.207,2	1.318,9	1.397,40	1.445,19
J	Informasi dan Komunikasi	1.002,8	1.110,3	1.263,4	1.439,96	1.545,66
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	881,3	941,1	987,8	952,77	994,22
L	Real Estat	1.572,2	1.702,5	1.725,7	1.852,92	1.903,14
M,N	Jasa Perusahaan	127,5	136,0	137,7	129,45	134,66
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.604,2	2.843,2	3.074,3	3.199,07	3.477,70
P	Jasa Pendidikan	1.183,2	1.289,8	1.381,4	1.510,44	1.659,83
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	605,2	632,8	697,3	804,60	857,99
R,S,T,U	Jasa lainnya	354,9	381,2	422,5	451,14	488,17
	Produk Domestik Regional Bruto	**49.985,2**	**52.215,4**	**53.951,1**	**54.841,55**	**57.280,04**

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2017-2019)
**) Tahun 2020-2021 (Proyeksi)*

Dilihat dari perkembangan sektoral, kecuali sektor pertambangan dan penggalian dan sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, hampir seluruh sektor PDRB mengalami peningkatan. Tahun 2019 sektor dengan kontribusi PDRB terbesar diperoleh dari sektor industri pengolahan sebesar Rp 11.929,8 Milyar, diikuti sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan Rp 9.869,5 Milyar, sektor perdagangan besar dan eceran Rp 7.576,2 Milyar, dan sektor pertambangan Rp 6.627,3 Milyar. Kontribusi keempat sektor tersebut sebesar Rp 36.002,8 Milyar atau sebesar 66,73%. Kontribusi sektor lainnya sebesar Rp 17.948,3 Milyar atau sebesar 33,27%. Hal ini mengindikasikan bahwa perekonomian daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sangatlah dipengaruhi oleh perkembangan dan kemajuan dari sektor industri pengolahan, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor perdagangan besar dan eceran, serta sektor pertambangan dan penggalian sehingga sektor-sektor ekonomi lainnya sebagai pendukung dan perkembangan serta kemajuannya sangatlah ditentukan oleh perkembangan dan kemajuan dari keempat sektor dominan.

Dengan arah kebijakan pembangunan ekonomi yang semakin berpihak kepada masyarakat dan dunia usaha, diperkirakan perekonomian daerah sepanjang tahun 2020 dan 2021 akan terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, diperkirakan PDRB akan meningkat menjadi sebesar Rp 54.841,55 Milyar dan pada Tahun 2021 meningkat menjadi sebesar Rp 57.280,04 Milyar. *Trend* peningkatan PDRB sepanjang Tahun 2020 dan 2021, diperkirakan masih dipengaruhi oleh *trend* peningkatan pada sektor industri pengolahan, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor perdagangan besar dan eceran, serta sektor pertambangan dan penggalian. Sedangkan sektor-sektor ekonomi lainnya diperkirakan masih sebagai sektor pendukung dari keempat sektor dominan tersebut. Sementara itu, dilihat dari nilai nominal PDRB berdasarkan pengeluaran atau penggunaan yang menjelaskan bagaimana PDRB suatu wilayah (*region*) digunakan atau dimanfaatkan, baik untuk memenuhi kebutuhan permintaan di dalam wilayah maupun untuk memenuhi kebutuhan di luar wilayah sepanjang tahun 2017-2019 juga menunjukkan peningkatan. Sebagaimana diperlihatkan pada tabel III.2 dapat dijelaskan bahwa komponen pengeluaran pembentuk PDRB masih didominasi oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga, di mana pada tahun 2017 sebesar Rp 26.300,217 juta meningkat menjadi sebesar Rp 27.800,900 juta pada tahun 2018 dan sebesar Rp 28.900,153 juta pada tahun 2019.

Komponen pengeluaran terbesar kedua yang berkontribusi terhadap PDRB adalah ekspor, namun sejalan dengan penurunan harga komoditas ekspor di pasar dunia seperti karet dan CPO memberikan dampak negatif terhadap perkembangan ekspor Kepulauan Bangka Belitung, di mana pada tahun 2017 nilai ekspor mencapai sebesar Rp 25.592,322 juta menurun menjadi sebesar Rp 25.092,158 juta pada tahun 2018, dan kembali mengalami penurunan sebesar Rp 21.266,563 juta pada tahun 2019. Sedangkan untuk komponen investasi (dilihat dari nilai pembentukan modal tetap bruto) secara nominal juga mengalami peningkatan sepanjang periode tahun 2017-2019, yaitu masing-masing sebesar Rp 11.111.056 juta pada tahun 2017, sebesar Rp 11.779.865 juta pada tahun 2018 dan sebesar Rp 12.471,638 juta pada tahun 2019. Sejalan dengan peningkatan komponen investasi, komponen konsumsi pemerintah juga mengalami peningkatan sepanjang periode yang sama, yaitu sebesar Rp 5.030.469 juta pada tahun 2017 meningkat menjadi sebesar Rp 5.060,191 juta pada tahun 2018 dan kembali meningkat menjadi sebesar Rp 5.225,840 juta pada tahun 2019. Pada tahun 2020 dan 2021 diperkirakan konsumsi rumah tangga dan investasi masih

terus menguat, hal ini diindikasikan dengan masih kuatnya tingkat keyakinan konsumen dan pelaku usaha yang masih terlihat optimisme. Peningkatan harga beberapa komoditi unggulan pada tahun 2020 dan 2021 diperkirakan akan terjadi, sehingga akan meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya juga akan mempengaruhi konsumsi rumah tangga.

Tabel III.2
PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan 2010
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2021 (Juta rupiah)

	Pengeluaran	2017	2018	2019	2020*)	2021*)
	(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	26.300,217	27.800,900	28.900,153	29.587,504	30.873,942
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	319,466	337.274	373,596	377,858	429,600
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	5.030,469	5.060,191	5.225,840	5.473,186	6.014,404
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	11.111,056	11.779,865	12.471,638	12.608,070	13.157,225
5	Perubahan Inventori	341,149	393,163	487,968	422,938	458,240
6	Ekspor Luar Negeri	25.592,322	25.092,158	21.266,563	25.829,762	26.606,579
7	Impor Luar Negeri	1.414.959	2.025,935	490,467	3.010,801	2.566,146
8	Net Ekspor Antar Daerah	(17.292.873)	(16.222,198)	(14.284,239)	(16.446,978)	(17.693,804)
PDRB		**49.986.847**	**52.215,418**	**53.951,052**	**54.841,540**	**57.280,040**

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2017-2019)
**) Tahun 2020-2021 (Proyeksi)*

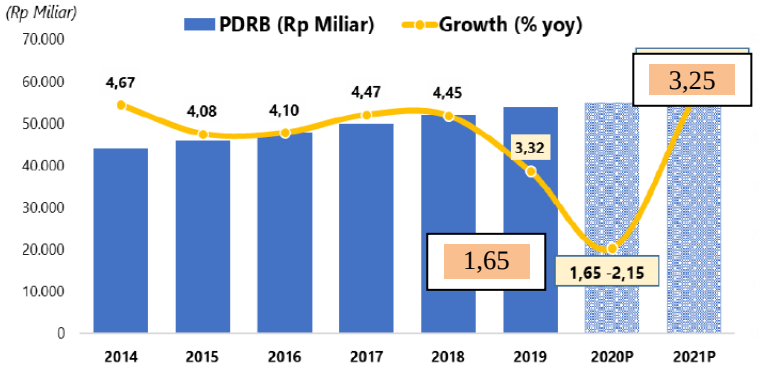
Adanya kebijakan pemerintah terkait dengan pelarangan ekspor *row materials* sumber daya mineral, juga berdampak positif terhadap investasi di Kepulauan Bangka Belitung. Di samping itu, potensi sumber daya alam yang melimpah juga menjadi salah satu daya tarik investasi, sehingga dengan adanya penambahan kapasitas kegiatan produksi dan bisnis akan memperkuat konsumsi rumah tangga. Sejalan dengan penguatan konsumsi rumah tangga dan investasi, ekspor diperkirakan juga akan mengalami kenaikan seiring dengan membaiknya perekonomian dunia.

Penjualan beberapa komoditas unggulan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2020 dan 2021 diperkirakan mulai tumbuh secara positif. Untuk memperkuat perkembangan beberapa komponen pengeluaran tersebut, pengendalian terhadap neraca perdagangan juga harus dilakukan dengan menjaga aktivitas impor lebih rendah dari pada ekspor.

3.1.1.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan indikator dari keberhasilan pembangunan ekonomi yang paling mendasar dan digunakan sampai saat ini. Umumnya pertumbuhan ekonomi diukur dengan perubahan atau kenaikan PDRB, yaitu keseluruhan nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu daerah dalam satu tahun. Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sepanjang periode Tahun 2017-2019 sebagaimana diperlihatkan pada gambar III.1 menurun, dimana pada Tahun 2018 laju pertumbuhan ekonomi mencapai sebesar 4,45 persen menurun dari Tahun 2017 sebesar 4,47 persen dan melambat menjadi sebesar 3,32 persen pada Tahun 2019.

Gambar III.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2019



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2015-2019)
**) Tahun 2020-2021 (Proyeksi)*

Pertumbuhan terjadi pada hampir semua lapangan usaha, kecuali Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian serta Lapangan Usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang yang mengalami kontraksi masing-masing sebesar 0,98 persen dan 3,65 persen pada tahun 2019. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 13,78 persen; diikuti Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib serta Jasa Pendidikan yang mengalami penurunan masing-masing sebesar 8,13 persen dan 7,11 persen pada tahun 2019.

Tabel III.3
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 – 2021

	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020*)	2021*)
(1)		*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-0,36	5,49	2,93	5,97	5,97
B.	Pertambangan dan Penggalian	2,19	(1,08)	0,98	-7,40	1,74
C.	Industri Pengolahan	6,31	4,04	1,07	-2,86	1,65
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	4,85	7,44	6,55	9,56	9,21
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,Limbah dan Daur Ulang	9,79	(5,60)	3,65	13,00	5,74
F.	Konstruksi	5,73	5,76	7,08	5,68	5,84
G.	Perdagangan Besar dan Eceran Motor	7,91	2,65	1,76	1,96	4,28
H.	Transportasi dan Pergudangan	7,99	6,82	2,23	-1,13	5.57
I.	Penyedian Akomodasi dan Makan Minum	4,61	6,22	9,26	5,95	3,42
J.	Informasi dan Komunikasi	8,19	10,72	13,78	13,98	7,34
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,48	6,25	5,50	-3,55	4,35
L.	Real Estate	5,20	8,29	1,36	7,37	2,71
M, N.	Jasa Perusahaan	5,85	6,69	1,26	-5,99	3,02
0.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,06	9,18	8,13	4,06	8,71
P.	Jasa Pendidikan	3,86	9,00	7,11	9,34	9,89
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,19	4,56	10,19	15,38	6,40
R,S.T.U	Jasa Lainnya	6,14	7,39	10,83	6,79	8,21
	PDRB	**4,51**	**4,45**	**3,32**	**1,65**	**3,25**

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2015-2019)
**) Tahun 2020-2021 (Proyeksi)*

3.1.1.3 PDRB Perkapita

PDRB perkapita merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah/daerah. Data statistik ini merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu wilayah/daerah. PDRB perkapita diperoleh dari hasil bagi antara PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang bersangkutan. Jadi besarnya PDRB perkapita tersebut sangat dipengaruhi oleh kedua variabel diatas.

Dalam kurun waktu 2017-2019, sebagaimana diperlihatkan pada tabel III.4 PDRB per kapita Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas dasar harga berlaku terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2017, PDRB perkapita sebesar Rp 48.827.254,- meningkat menjadi sebesar Rp 50.087.237,- pada tahun 2018 dan menjadi sebesar Rp 50.933.457- pada tahun 2019. Sejalan dengan perkembangan perekonomian daerah yang tumbuh pada masa pandemi dan pascapandemi, PDRB perkapita pada tahun 2020-2021 diperkirakan akan lebih kecil dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp 51.955.287 dan sebesar Rp 55.293.406.

Tabel III.4
PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (rupiah)
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 – 2022

PDRB Per Kapita	2017	2018	2019	2020*)	2021*)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	48.827.254	50.087.237	50.933.457	51.955.287	55.293.406

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2015-2019)
**) Tahun 2020-2021 (Proyeksi)*

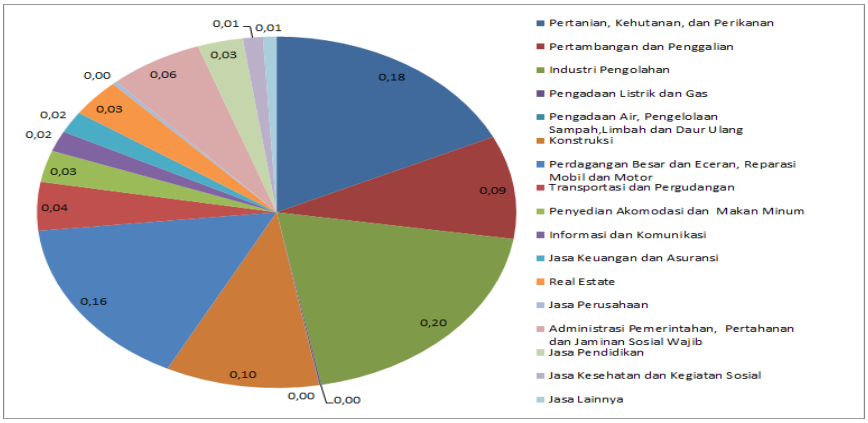
3.1.1.4 Struktur Perekonomian Daerah

Untuk melihat seberapa besar peranan masing-masing sektor ekonomi dan seberapa jauh terjadi pergeseran peranan antara sektor-sektor ekonomi pembentuk PDRB dapat dilihat dari perkembangan struktur ekonomi daerah. Dengan mengetahui struktur perekonomian dapat diperoleh informasi terkait sektor-sektor mana saja yang paling dominan dan potensial untuk dikembangkan.

Struktur perekonomian daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana diperlihatkan pada gambar III.2 dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2019 sektor industri pengolahan masih memberikan kontribusi tertinggi yaitu sebesar 22,11 persen, namun mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2018 yang mencapai sebesar 22,45 persen. Sektor yang memberikan kontribusi paling tinggi setelah sektor industri pengolahan adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yaitu sebesar 18,29 persen, diikuti oleh sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 14,04 persen serta sektor pertambangan dan penggalian sebesar 12,28 persen.

Apabila dicermati secara mendalam memperlihatkan bahwa struktur perekonomian daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah mengalami pergeseran struktur dari yang sebelumnya didominasi oleh sektor primer (sektor pertanian, kehutanan dan perikanan serta sektor pertambangan dan penggalian), bergeser menjadi didominasi oleh sektor tersier (sektor jasa-jasa) sedangkan kontribusi sektor sekunder (sektor industri pengolahan) meskipun secara relatif lebih besar dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya, namun cenderung mengalami penurunan.

Gambar III.2
Struktur Perekonomian Menurut Lapangan Usaha
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019



Sumber: Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (data diolah)

Selanjutnya, sepanjang tahun 2020 dan 2021, diperkirakan struktur perekonomian daerah terjadi penurunan beberapa sektor terutama pada sektor industri pengolahan dan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan akan tetapi kedua sektor ekonomi tersebut masih memiliki peran relatif dominan dengan rata-rata kontribusi terhadap PDRB masing-masing sekitar 20,57 persen dan 19,35 persen.

Tabel III.5
Distribusi Persentase PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2010
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017–2021 (dalam persen)

	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020*)	2021*)
	(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*((6)*
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	18,20	18,27	18,29	19,07	19,35
B.	Pertambangan dan Penggalian	13,27	12,51	12,28	11,19	10,90
C.	Industri Pengolahan	22,68	22,45	22,11	21,13	20,57
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,09	0,09	0,10	1,10	0,10
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,Limbah dan Daur Ulang	0,02	0,02	0.02	0,02	0,02
F.	Konstruksi	8,50	8,56	8,92	9,27	9,39
G.	Perdagangan Besar dan Eceran Motor	14,51	14,18	14.04	14,09	14,06
H.	Transportasi dan Pergudangan	3,79	3,85	3,83	3,73	3,77
I.	Penyedian Akomodasi dan Makan Minum	2,27	2,30	2,44	2,55	2,52
J.	Informasi dan Komunikasi	2,01	2,11	2,34	2,63	2,70
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,76	1,79	1,83	1,74	1,74
L.	Real Estate	3,15	3,24	3,20	3,38	3,32
M, N.	Jasa Perusahaan	0,26	0,26	0,26	0,24	0,24
0.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,21	5,41	5,70	5,83	6,07
P.	Jasa Pendidikan	2,37	2,46	2,56	2,75	2,90
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,21	1,21	1,29	1,47	1,50
R,S.T.U	Jasa Lainnya	0,71	0,73	0,78	0,82	0,85
	PDRB	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2015-2019)
**) Tahun 2020-2021 (Proyeksi)*

3.1.1.5 Struktur Pengeluaran dalam PDRB

Distribusi PDRB dari sisi pengeluaran sepanjang periode tahun 2017-2019 masih didominasi oleh komponen konsumsi rumah tangga dengan kontribusi terhadap PDRB rata-rata di atas 50 persen, diikuti oleh komponen ekspor dan investasi yang masing-masing berkontribusi di atas 40 persen dan di atas 20 persen terhadap PDRB. Selain ketiga komponen tersebut, konsumsi pemerintah juga menjadi komponen pengeluaran penentu bagi perkembangan perekonomian daerah dengan kontribusi terhadap PDRB di 9-10 persen.

Sejalan dengan uraian di atas, diperkirakan motor penggerak perekonomian daerah pada tahun 2019 dan 2020 masih didominasi oleh komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga yang didorong oleh kekuatan ekspor dan investasi serta konsumsi pemerintah. Secara lengkap, gambaran mengenai struktur pengeluaran dalam PDRB Kepulauan Bangka Belitung pada 2017-2021 diperlihatkan pada Tabel III.6 di bawah ini.

Tabel III.6
Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan 2010
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017–2021 (dalam persen)

	Pengeluaran	2017	2018	2019	2020*)	2021*)
	(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	52,61	53,24	53,57	53,17	53,90
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,64	0,65	0,69	0,69	0,75
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	10,06	9,69	9,69	9,98	10,50
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	22,23	22,56	23,12	22,99	22,97
5	Perubahan Inventori	0,68	0,75	0,90	0,77	0,80
6	Ekspor Luar Negeri	51,20	48,06	39,42	44,88	46,45
7	Impor Luar Negeri	2,83	3,88	0,91	2,49	4,48
8	Net Ekspor Antar Daerah	(34,59)	(31,07)	(26,48)	(29,99)	(30,89)
	PDRB	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2015-2019)
**) Tahun 2020-2021 (Proyeksi)*

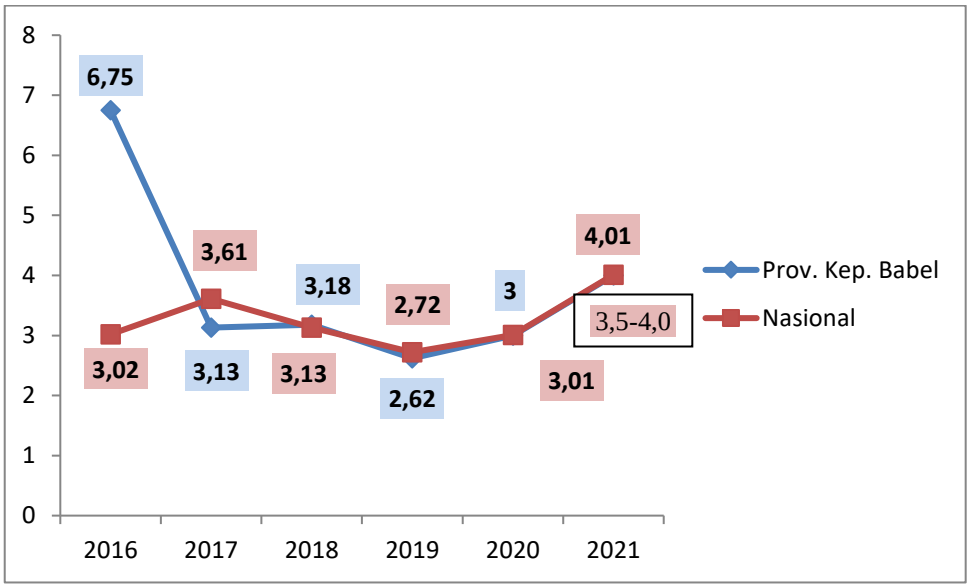
3.1.1.6 Tingkat Inflasi

Pada tahun 2019, Kota Pangkalpinang mengalami inflasi sebesar 2,31 persen dan Tanjungpandan mengalami inflasi sebesar 3,19 persen *year on year*. Berdasarkan laju inflasi dua kota ini maka inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019 sebesar 2,62 persen. Inflasi merupakan cerminan dari kestabilan nilai mata uang. Stabilitas tersebut tercermin dari stabilitas tingkat harga yang kemudian berpengaruh terhadap realisasi pencapaian tujuan pembangunan ekonomi suatu daerah, seperti pemenuhan kebutuhan dasar, pemerataan distribusi pendapatan dan kekayaan, perluasan kesempatan kerja serta stabilitas ekonomi. Dengan memperhatikan kondisi inflasi Kota Pangkalpinang dan Tanjung Pandan Tahun 2019, inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2020 diproyeksikan masih berada pada rentang target inflasi Nasional 3,0 ± 1% dengan tekanan yang cenderung menurun dari 2019.

Inflasi Provinsi Bangka Belitung pada tahun 2020 diproyeksikan masih berada pada rentang target inflasi nasional 3,0 ± 1% dengan tekanan yang cenderung menurun dari tahun 2019. Menurunnya tekanan inflasi disebabkan oleh adanya penurunan daya beli masyarakat

sebagai dampak adanya wabah Covid-19 yang mempengaruhi seluruh aktivitas ekonomi masyarakat. Pada tahun 2021, tekanan inflasi diproyeksikan akan meningkat dibandingkan tahun 2020 sejalan dengan pemulihan ekonomi pasca Covid-19 ditahun 2020. Laju inflasi Laju Inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana grafik dibawah ini:

Gambar III.3
Laju Inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016-2021



Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2016-2021)
**) Tahun 2020-2021 (Proyeksi Bank Indonesia)*

3.1.1.7 Tingkat Investasi

Investasi di daerah diharapkan dapat memacu pertumbuhan perekonomian daerah sekaligus pemerataan pendapatan masyarakat. Dengan banyaknya investasi yang ditanamkan oleh dunia usaha di daerah maka diharapkan semakin bertambahnya lapangan kerja yang dapat menampung angkatan kerja. Sejalan dengan kewenangan daerah berdasarkan kebijakan Otonomi Daerah, maka Pemerintah Daerah juga berkewajiban untuk membina dan mengembangkan dunia usaha daerah sebagai pilar pertumbuhan perekonomian di daerah. Untuk itu langkah utama yang harus dilakukan adalah pemberdayaan investasi daerah.

Pemberdayaan investasi daerah adalah suatu upaya yang harus dilakukan secara sistematis untuk mendorong peningkatan investasi di daerah. Realisasi investasi PMA di Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp 1.330,93 juta dibanding pada tahun 2018 sebesar Rp 620,12 juta sedangkan investasi PMDN pada tahun 2019 mengalami penurunan yaitu Rp 2.915,15 Juta dibanding pada tahun 2018 sebesar Rp 3.112,92 juta.

Pada Tahun 2020 dan 2021 diperkirakan investasi di Kepulauan Bangka Belitung terus mengalami peningkatan, namun harus diikuti dengan langkah kebijakan diversifikasi dan penyebaran investasi harus secara intensif dilakukan, disesuaikan dengan potensi atau sumber daya spesifik yang dimiliki daerah atau industri. Hal tersebut sebagaimana yang tergambar pada Tabel III.9.

Tabel III.9
Perkembangan Realisasi Investasi
Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014–2019

Investasi		2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)		*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
PMA	Jumlah Proyek	47	76	93	141	105	183
	Nilai (Rp juta)	1.123,90	1.033,29	726,66	2.046,28	620,12	1.330,93
PMDN	Jumlah Proyek	8	28	63	94	161	418
	Nilai (Rp juta)	615,41	1.023,74	2.201,96	1.734,73	3.112,92	2.915,15
Total Investasi		**1.739,31**	**2.057,03**	**2.928,62**	**3.781,01**	**3.733,04**	**4.246,08**

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2020)

Pada Tahun 2020 dan 2021 diperkirakan investasi di Kepulauan Bangka Belitung terus mengalami peningkatan, namun harus diikuti dengan langkah kebijakan diversifikasi dan penyebaran investasi harus secara intensif dilakukan, disesuaikan dengan potensi atau sumber daya spesifik yang dimiliki daerah atau industri.

Beberapa kebijakan strategis yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka meningkatkan penanaman modal di Bangka Belitung antara lain adalah; peningkatan kapasitas kelembagaan, menjaga stabilitas sosial dan politik, menjaga stabilitas perekonomian daerah, pengembangan Sumber Daya Manusia dan pembangunan/pengembangan infrastruktur fisik. Selain hal tersebut, upaya dalam rangka menarik investor yang terkait dengan sektor produksi yang menjadi unggulan daerah harus terus dilakukan. Hilirisasi dan industrialisasi terhadap sektor pertambangan, pertanian, perikanan dan pariwisata merupakan hal yang menjadi prioritas utama.

3.1.1.8 Ekspor dan Impor

Ekspor yang dilakukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagian besar merupakan ekspor logam timah. Pada Tahun 2019 ekspor timah mengalami kenaikan, dimana pada Tahun 2018 nilai ekspor timah sebesar US$ 1.373,4 juta dan mengalami kenaikan menjadi sebesar US$ 1.373,4 juta. Selanjutnya, ekspor barang-barang non timah adanya mengalami peningkatan, yaitu dari sebesar US$ 393,2 juta pada Tahun 2017 menjadi sebesar US$ 413,8 juta pada Tahun 2018, akan tetapi pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar US$ 262,2 juta. Secara umum total ekspor Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menurun dari Tahun 2017-2019 yaitu dari US$1.784,1 juta menjadi US$ 1.775,0 juta dan US$ 1.635,6 juta.

Ringkasan mengenai perkembangan ekspor Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 s.d. 2019 dan proyeksi ekspor pada Tahun 2020 dan 2021, sebagaimana tersaji pada tabel berikut ini:

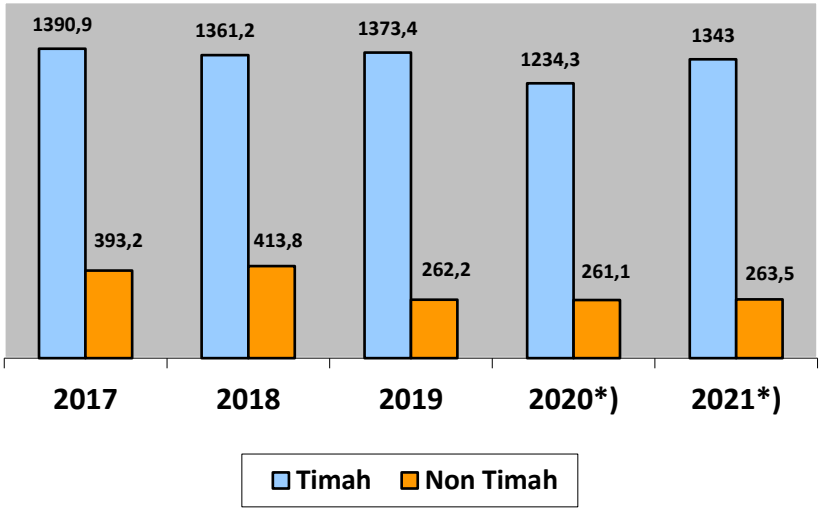
Tabel III.10

Perkembangan Ekspor Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2017- 2020 (dalam juta US$)

Kelompok Komoditi	Nilai Value (US$)				
	2017	2018	2019	2020*)	2021*)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
Timah	1.390,9	1.361,2	1.373,4	1.234,3	1.343,0
Non Timah	393,2	413,8	262,2	261,1	263,5
Total Ekspor	**1.784,1**	**1.775,0**	**1.635,6**	**1.495,4**	**1.606,5**

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2017-2019)
**) Tahun 2020-2021 (Proyeksi)*

Gambar III.4
Perkembangan Ekspor Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2017- 2019 (dalam juta US$)



Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2016-2019)

Sebaliknya, untuk impor Provinsi Kepulauan Bangka sepanjang Tahun 2017-2019 cenderung menurun untuk komoditas migas, yaitu dari sebesar US$56,0 juta pada Tahun 2017 menurun menjadi sebesar US$11,2 juta pada Tahun 2019. Sedangkan impor untuk komoditas non migas mengalami penurunan yang cukup besar yaitu dari sebesar US$128,06 juta pada Tahun 2018 menjadi sebesar US$4,86 juta pada Tahun 2019. Secara rinci perkembangan impor Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2019 dan proyeksi Tahun 2020-2021 dapat dilihat pada gambar III.11 di bawah ini.

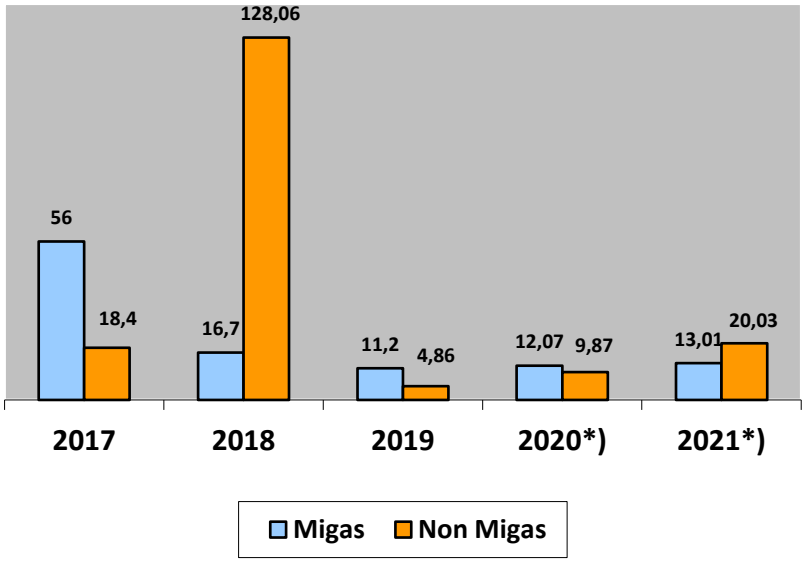
Tabel III.11
Perkembangan Impor Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017- 2019 (dalam juta US$)

Kelompok Komoditi	Nilai Value (US$)				
	2017	2018	2019	2020*)	2021*)
Migas	56,0	16,7	11,2	12,07	13,01
Non Migas	18,4	128,06	4,86	9,87	20,03
Total Impor	**74,4**	**144,76**	**16,06**	**21,94**	**33,03**

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2017-2019)
**) Tahun 2020-2021 (Proyeksi)*

Gambar III.5

Perkembangan Impor Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016-2019 (dalam juta US$)



Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2016-2019)

3.1.2 Indikator Pembangunan Bidang Kesejahteraan

3.1.2.1 Pengangguran

Persentase tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 0,03 persen dibandingkan tahun 2018 yaitu semula berada di angka 3,65 pada tahun 2018 menjadi 3,62 pada tahun 2019. Hal ini dapat diartikan pada tahun 2019, dari 100 angkatan kerja terdapat 3 sampai dengan 4 orang sebagai pengangguran yaitu mereka yang tidak bekerja atau tidak mempunyai usaha yang aktif mencari kerja atau mempersiapkan usaha.

Tabel III.12
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015–2019 (dalam persen)

Kegiatan Utama	2015	2016	2017	2018	2019	2020*)	2021*)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
Tingkat Pengangguran Terbuka	6,29	2,60	3,78	3,65	3,62	5,42	5,50

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2015-2019)
**) Tahun 2020-2021 (Proyeksi)*

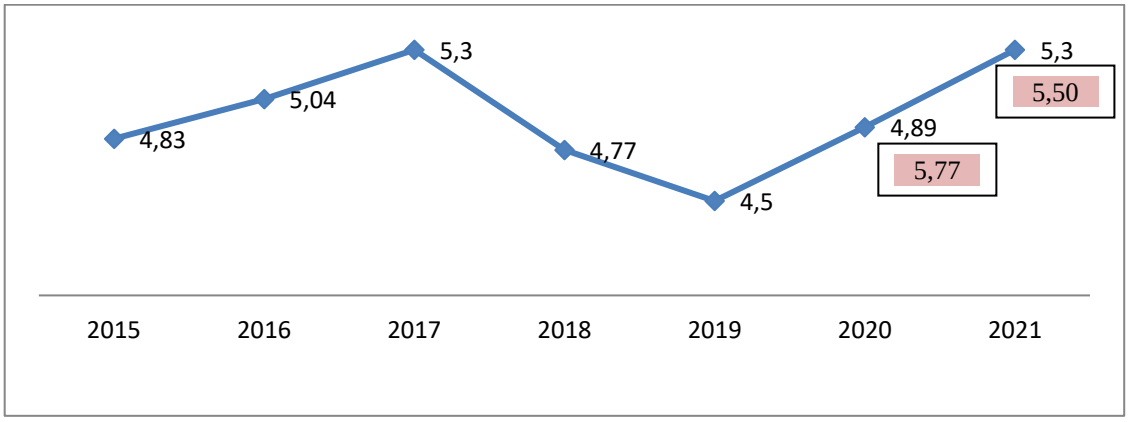
Angka pengangguran diperkirakan akan naik seiring dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kondisi ini disebabkan adanya pandemi Covid 19 yang mengakibatkan perlambatan pertumbuhan ekonomi sehingga berdampak pada berkurangnya lapangan kerja dan penyerapan angkatan kerja. Memperhatikan kondisi tersebut dan kebijakan pasca pandemi Covid 19 maka tahun 2020 diproyeksikan TPT sebesar 5,42 persen. Sedangkan di tahun 2021 naik yaitu sebesar 5,50 persen.

3.1.2.2 Kemiskinan

Dengan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*), kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Garis kemiskinan adalah nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori per kapita per hari ditambah kebutuhan minimum non makanan yang mencakup perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Dengan pendekatan ini, dapat dihitung penduduk yang hidup di bawah Garis Kemiskinan dinyatakan sebagai penduduk miskin atau persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan.

Penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sepanjang periode tahun 2015-2019 cenderung mengalami penurunan. Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019 sebesar 67,37 ribu jiwa menurun dibandingkan tahun 2018 sebesar 69,93 ribu jiwa.

Gambar III.6
Penduduk Miskin Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 – 2019 (dalam persen)



Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2015-2019)
**) Tahun 2020-2021 (Proyeksi)*

Sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi daerah yang melambat, diperkirakan angka kemiskinan pada tahun 2020 dan 2021 terus mengalami peningkatan yaitu sebesar 5,77 dan 5,50 persen. Kondisi ini terjadi akibat dampak dari pandemi Covid-19 yang mempengaruhi banyak sektor ekonomi yang mengalami kontraksi. Upaya penguatan sektor-sektor ekonomi dan program-program pemerintah pasca pandemi dalam penanggulangan masalah kemiskinan diharapkan dapat mengatasi pengentasan kemiskinan yang difokuskan pada daerah perdesaan mengingat angka kemiskinan tertinggi di Kepulauan Bangka Belitung terjadi di daerah perdesaan.

3.1.2.3 Ketimpangan Regional

Tingkat ketimpangan antara daerah yang diukur dengan menggunakan pendekatan indeks ketimpangan Williamson, dimana semakin besar angka indeks tersebut berarti ketimpangan antar daerah semakin tinggi. Adapun Interpretasi dari indeks ketimpangan Williamson adalah:

Besarnya IW adalah 0 < IW < 1
Jika IW = 0, maka pembangunan wilayah sangat merata,
Jika IW = 1, maka pembangunan wilayah sangat tidak merata (kesenjangan merata,
IW mendekati 0, berarti pembangunan wilayah semakin mendekati merata,

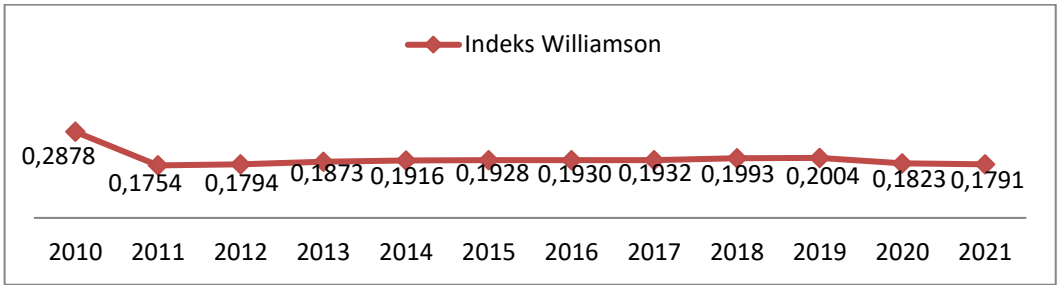
IW mendekati 1 berarti pembangunan wilayah semakin mendekati tidak merata.

Ketimpangan regional di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2001-2019 yang diukur menggunakan perhitungan Indeks Williamson menunjukkan angka yang fluktuatif. Pada tahun 2019 angka indeks sebesar 0,2004 meningkat bila dibandingkan tahun 2018 hanya sebesar 0,1993. Hal ini mengindikasikan bahwa angka indeks ketimpangan Williamson Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung mendekati 0, hal ini berarti bahwa pembangunan wilayah semakin mendekati merata atau dengan kata lain menunjukkan bahwa adanya peningkatan pemerataan pembangunan regional antar kabupaten/kota se-provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Selanjutnya berdasarkan proyeksi yang dilakukan diketahui bahwa ketimpangan regional di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sepanjang dua tahun ke depan kecenderungan menurun. Diperkirakan pada tahun 2020 angka indeks sebesar 0,1823 dan tahun 2021 sebesar 0,1791 yang diupayakan melalui kebijakan pemerintah dengan melakukan pembangunan secara merata antar kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagimana tersaji pada Gambar III.7

Gambar III.7

Indeks Williamson Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010-2021



Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2017-2019)
**) Tahun 2020-2021 (Proyeksi)*

3.1.2.4 Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Koefisien Gini adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan pendapatan agregat yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Apabila Koefisien Gini mendekati nol menunjukkkan adanya ketimpangan yang rendah dan bila Koefisien Gini mendekati satu menunjukkan ketimpangan yang tinggi. Pada prakteknya, angka ketimpangan untuk daerah-daerah yang ketimpangan distribusi pendapatannya tajam berkisar antara 0,50 hingga 0,70. Sedangkan untuk daerah-daerah yang distribusi pendapatannya relatif paling merata berkisar antara 0,20 sampai 0,35.

Pada tahun 2019 koefisien gini Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 0,262 angka tersebut merupakan yang paling rendah sepanjang sepuluh tahun terakhir. Artinya angka tersebut menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung relatif rendah. Selanjutnya, koefisien Gini untuk tahun 2020 dan 2021 diperkirakan akan cenderung mengalami penurunan. Hal ini mengindikasikan bahwa distribusi pendapatan masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan semakin merata sebagaimana tersaji pada Tabel III.13.

Tabel III.13

Koefisien Gini Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010-2021

Tahun	Koefisien Gini
(1)	*(2)*
2010	0,296
2011	0,320
2013	0,311
2013	0,307
2014	0,296
2015	0,275
2016	0,288
2017	0,276
2018	0,272
2019	0,262
2020*	0,260
2021*	0,258

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2010-2019)
**) Tahun 2020-2021 (Proyeksi)*

3.1.3 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2020 dan 2021

3.1.3.1 Tantangan Perekonomian Global dan Nasional 2020 dan 2021

Tantangan perekonomian global diperkirakan akan menurun seiring dengan adaya pandemi C*ovid-19* yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi domestik. Perlambatan seiring dengan penurunan prospek pertumbuhan ekspor barang Indonesia akibat perlambatan perekonomian global. Diperkirakan ekspor jasa terutama sektor pariwisata akan turun diakibatkan terhambatnya proses mobilitas antar negara untuk memitigasi resiko penularan virus corona (*Covid- 19).* Investasi non bangunan juga berisiko melambat dipengaruhi menurunnya prospek ekspor barang dan jasa serta terganggunya rantai produksi.

Perlambatan ekspor terjadi lantaran melambatnya prospek pertumbuhan ekonomi dunia. Bank Indonesia memperkirakan ekonomi global 2020 hanya tumbuh 2,5% yaitu lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi 2019 sebesar 2,9% dan juga proyeksi sebelumnya sebesar 3%. Prospek pertumbuhan ekonomi dunia yang menurun terjadi akibat terganggunya rantai penawaran global, turunnya permintaan, dan melemahnya keyakinan pelaku ekonomi. Penyebaran virus corona dibanyak negara diluar Negara Tiongkok dengan sangat cepat memberikan tekanan kepada perekonomian dunia. Saat ini pandemi ini telah menyebar hampir diseluruh benua termasuk Eropa dan Amerika. Perkembangan ini penyebabkan ketidakpastian yang sangat tinggi, menurunkan kinerja pasar keuangan global, menekan banyak mata uang dunia, serta memicu pembalikan modal kepada aset keuangan yang dianggap aman.

Meskipun demikian, diperkirakan perekonomian global akan kembali bergairah pada 2021 dan tumbuh 3,7% lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya 3,4%. Pertumbuhan tersebut merupakan proyeksi jika pandemi corona telah berakhir. Sejalan dengan

peningkatan pertumbuhan perekonomian global ekonomi nasional tahun 2021 akan meningkat. Bank Indonesia memprediksi pada 2021 ekonomi Indonesia 5,2-5,6%, salah satunya juga di dorong upaya pemerintah memperbaiki iklim investasi.

3.1.3.2 Tantangan Perekonomian Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 dan 2021

Pertumbuhan ekonomi global yang sebelumnya diperkirakan akan kembali pulih pada tahun 2020, tertahan dengan adanya wabah virus corona yang merebak di berbagai negara termasuk Indonesia sehingga akan menurunkan permintaan dan harga komoditas dunia pada 2020. Sejalan dengan perkembangan ekonomi global dan nasional, menyebabkan terganggunya kinerja sektor unggulan Babel, yakni industri pengolahan logam timah, CPO, perikanan tangkap, serta pariwisata. Pada tahun 2021 pasca pemulihan Covid-19, perekonomian Bangka Belitung diperkirakan mampu tumbuh sebesar 4 persen sampai dengan 4,45 persen.

Konsumsi rumah tangga diperkirakan masih dapat tumbuh positif pada triwulan I 2020 didukung oleh masih terjaganya keyakinan konsumen terhadap kondisi perekonomian meskipun dibayangi adanya tekanan perlambatan akibat mewabahnya virus Covid-19 yang dapat mempengaruhi pendapatan masyarakat karena menurunnya aktivitas ekonomi. Hal ini pun terjadi pada anggaran pendapatan maupun belanja dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota diprediksi mengalami penurunan pada tahun 2020, sehingga akan membatasi laju pertumbuhan konsumsi pemerintah di Bangka Belitung. Oleh karena itu, stimulus fiskal yang dilakukan oleh pemerintah pusat diharapkan dapat lebih mendorong konsumsi masyarakat Bangka Belitung.

Terdapat beberapa isu yang menjadi perhatian dalam pembangunan perekonomian Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 dan 2021, yaitu:

1. belum pulihnya perekonomian global akibat pandemi Covid-19;
2. harga beberapa komoditas unggulan yang masih belum membaik;
3. inflasi Bangka Belitung pada Tahun 2020 diproyeksikan masih berada pada rentang target inflasi Nasional 3,0 ± 1 persen dengan tekanan yang cenderung menurun dari 2019;
4. menurunnya tekanan inflasi disebabkan oleh melemahnya permintaan sebagai dampak adanya wabah Covid-19, tercukupinya pasokan barang termasuk pangan, dan tetap lancarnya jalur distribusi;
5. pada tahun 2021, tekanan inflasi diperkirakan akan meningkat dari tahun 2020 sejalan dengan pemulihan ekonomi pasca Covid-19 di tahun 2020;
6. dalam menghadapi tantangan dalam 2020, telah dilakukan sinergi yang kuat antara Pemerintah, Bank Indonesia, OJK, dan LPS yang lebih menekankan kepada kesehatan, jaring pengaman sosial, stimulus pajak dan KUR serta program pemulihan ekonomi nasional.

3.1.3.3 Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2021

Mulai pulihnya perekonomian di tahun 2021 secara global diharapkan akan terus mampu untuk mendorong meningkatnya permintaan dunia terhadap komoditas primer.

Kondisi ini berdampak positif terhadap peningkatan ekspor Kepulauan Bangka Belitung dan meningkatkan pendapatan masyarakat dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Momentum terbukanya pasar regional dapat memberikan prospek yang cerah bagi pembangunan ekonomi Kepulauan Bangka Belitung. Beberapa peluang yang dapat dioptimalkan dalam rangka pembangunan ekonomi di Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2021 antara lain adalah:

1. peningkatan konsumsi rumah tangga dan ekspor luar negeri. Hal ini disebabkan kedua sektor ini pada tahun 2020 mengalami peningkatan dan cukup stabil. Untuk itu, diharapkan pada tahun 2021 kedua sektor ini dapat terus tumbuh stabil untuk mengatasi perlambatan ekonomi akibat Covid-19;
2. peningkatan investasi daerah yang terkontraksi pada tahun 2020 dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif agar meningkatkan jumlah investor baik dalam dan luar negeri.
3. Kepulauan Bangka Belitung harus mampu memanfaatkan momentum beralihnya fokus investor ke negara-negara Asia dan dapat menyerap aliran modal menyusul krisis yang melanda kawasan Eropa dan Amerika. Beberapa kawasan dengan daya dukung infrastruktur yang memadai masih akan menjadi tujuan utama arus modal. Serapan investasi ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berpeluang lebih besar jika daya dukung infrastruktur diperkuat;
4. liberalisasi perdagangan ASEAN menyebabkan arus keluar masuk barang untuk pasokan bahan baku maupun bahan jadi. Kondisi pasar bebas dapat menyebabkan produsen untuk memproduksi barang yang berkualitas dan mampu bersaing dengan produk dari daerah/negara lain.

Kinerja perekonomian daerah pada triwulan I tahun 2020 mengalami pertumbuhan positif pada angka 1,35 persen (yoy) dan mengalami perlambatan dibandingkan pada triwulan sebelumnya yang tumbuh pada 3,99 persen (yoy). Hal ini disebabkan oleh adanya penyebaran virus Covid-19 yang menyebabkan penurunan laju pertumbuhan ekonomi pada sisi harga dan ekspor komoditas. Selain itu, penurunan pada laju pertumbuhan ini tidak diikuti oleh konsumsi rumah tangga dan ekspor luar negeri. Pada triwulan I tahun 2020, konsumsi rumah tangga dan ekspor luar negeri mengalami peningkatan dan terkontraksi. Untuk itu, pada tahun 2021, sektor konsumsi dan ekspor ini diharapkan dapat tumbuh stabil dan meningkatkan roda perekonomian Bangka Belitung secara signifikan. Hal ini untuk mengatasi penurunan dan mendukung tema pemerintah pusat dalam pemulihan ekonomi yang terdampak oleh Covid-19. .

3.1.4 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis yang terjadi dan berkembang serta memperhatikan kerangka ekonomi makro pada kurun waktu 2014-2018, kebijakan ekonomi

pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2021 akan difokuskan pada tujuan meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi dengan sasaran, antara lain :

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan indikator kinerja tujuan yaitu laju pertumbuhan ekonomi yang diintervensi dengan sasaran :
    a. meningkatkan PDRB sub sektor pertanian, yang keberhasilan pencapaiannya diukur dengan indikator laju pertumbuhan PDRB sub sektor pertanian;
    b. meningkatkan PDRB sub sektor perikanan, yang keberhasilan pencapaiannya diukur dengan indikator laju pertumbuhan PDRB sub sektor perikanan;
    c. meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB, yang keberhasilan pencapaiannya diukur dengan indikator persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB;
    d. meningkatkan PDRB sektor pertambangan dan energi, yang keberhasilan pencapaiannya diukur dengan indikator laju pertumbuhan PDRB sektor pertambangan dan energi;
    e. meningkatkan PDRB sektor industri pengolahan dan perdagangan, yang keberhasilan pencapaiannya diukur dengan indikator laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan dan perdagangan.
2. Meningkatnya pemerataan pendapatan yang diukur dengan indikator kinerja tujuan indeks gini yang diintervensi dengan sasaran :
    a. menurunkan tingkat pengangguran, yang keberhasilan pencapaiannya diukur dengan indikator tingkat pengangguran terbuka;
    b. meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, yang keberhasilan pencapaiannya diukur dengan indikator indeks pembangunan ketenagakerjaan;
    c. menurunkan tingkat kemiskinan, yang keberhasilan pencapaiannya diukur dengan indikator angka kemiskinan;
    d. meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, yang keberhasilan pencapaiannya diukur dengan indikator pendapatan perkapita masyarakat desa.

Untuk mencapai indikator tujuan tersebut dapat dilaksanakan melalui pengutan pertumbuhan ekonomi, yaitu :

1. realokasi dan *refocusing* penggunaan anggaran untuk penanganan Covid-19 sehingga memiliki fasilitas yang memenuhi standar penanggulangan Covid-19;
2. optimalisasi Belanja Fiskal di daerah melalui Front Loading realisasi belanja fiskal di daerah supaya memberikan dampak yang lebih cepat bagi masyarakat, realisasi proyek pemerintah bersifat padat karya, Efisiensi/realokasi penggunaan anggaran terhadap kegiatan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat seperti bantuan langsung tunai bagi keluarga yang kehilangan pendapatan;
3. stimulus sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dengan cara memberikan pelonggaran pembayaran pajak kepada UMKM, berkoordinasi dengan BMPD dan OJK terkait relaksasi pembayaran Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun kredit umum, mendorong UMKM *go digital* untuk memanfaatkan layanan penjualan *online* maupun sistem pembayaran non tunai;

4. optimalisasi akses kredit bagi pelaku usaha melalui peningkatan akses UMKM antara lain KUR ke sektor produktif bagi petani, peternak, nelayan melalui *business matching*.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, dengan komponen pokoknya adalah pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Meningkatnya tuntutan kebutuhan dana sebagai konsekuensi penyerahan wewenang pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Melalui otonomi daerah, menuntut berbagai upaya penyesuaian manajemen keuangan daerah termasuk arah pengelolaan pendapatan dan belanja daerah. Penyusunan APBD sesuai dengan peraturan perundangan diawali dengan proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang hasilnya dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), selanjutnya dipergunakan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

APBD adalah salah satu wujud dari pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab serta sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Penyusunan APBD harus disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah yang dinamis diseimbangkan dengan prioritas pembangunan yang relevan berdasarkan kemampuan keuangan daerah, sinkronisasi dan integrasi kebijakan pemerintah pusat, provinsi sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

Kebijakan dalam pengelolaan APBD memegang peranan yang sangat strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah karena APBD merupakan salah satu instrumen penting kebijakan fiskal daerah. Kebijakan desentralisasi fiskal daerah mengandung tiga misi utama yaitu:

1. menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumberdaya;
2. meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat; dan
3. memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan.

Sedangkan tiga fungsi utama kebijakan fiskal yaitu sebagai alat stabilisasi ekonomi, alat distribusi pendapatan, dan alat alokasi anggaran. Sebagai alat stabilisasi ekonomi, kebijakan fiskal memainkan perannya dalam menjaga stabilitas nilai tukar dan laju inflasi yang pada gilirannya berpengaruh positif dalam pencapaian ekspansi ekonomi tinggi. Sebagai alat distribusi pendapatan, fungsi kebijakan fiskal tercermin sebagai media dalam penarikan pajak dari masyarakat di mana orang kaya akan membayar pajak lebih tinggi dibandingkan orang miskin. Sedangkan, fungsi kebijakan fiskal sebagai alat alokasi anggaran tercermin dari kualitas anggaran dalam APBD.

Selain memprioritaskan pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal, pemerintah hendaknya juga mendukung dan melaksanakan kebijakan reformasi dalam administrasi

keuangan daerah, antara lain tercermin dari penyusunan anggaran berbasis kinerja, sebagai salah satu langkah perubahan dalam upaya membangun sebuah pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, pengelolaan APBD harus melalui tiga tahapan penting yaitu mulai dari penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan/pengendalian. Dalam paradigma baru dalam manajemen pengelolaan keuangan daerah, perencanaan harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:

1. berorientasi pada kepentingan publik/masyarakat luas;
2. disusun berdasarkan pendekatan kinerja;
3. mempunyai keterkaitan yang erat antara pengambil kebijakan (*decisionmaker*) di DPRD dengan perencanaan operasional oleh pemerintah daerah dan penganggaran pada unit kerja Perangkat Daerah (PD); dan
4. terdapat upaya-upaya untuk mensinergikan hubungan antara APBD, sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, lembaga pengelola keuangan daerah dan unit-unit pengelola layanan publik dalam pengambilan keputusan.

Pengelolaan keuangan di daerah meliputi mobilisasi pendapatan, penetapan alokasi belanja daerah, dan mobilisasi pembiayaan. Untuk memenuhi *sufficient condition* bagi pengelolaan keuangan daerah yang baik, maka daerah perlu memahami dan menggali potensi/keunggulan daerah serta mengidentifikasi pokok-pokok permasalahan yang ada. Daerah juga perlu menentukan arah pembangunannya dalam rencana tahunan, jangka menengah hingga jangka panjang yang masing-masing dituangkan ke dalam RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah), RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), dan RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah). Selain ketersediaan sumber-sumber pembiayaan yang ideal, alokasi belanja daerah sangat ditentukan oleh prioritas-prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam ketiga dokumen perencanaan tersebut.

Dalam upaya untuk mencapai seluruh rencana yang ada pada dokumen perencanaan lima tahunan dan satu tahunan, perlu ditetapkan arah pengelolaan keuangan daerah. Pada tahun 2020, pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan *refocusing* pembiayaan program dan kegiatan dalam mendukung kebijakan pusat dalam penanganan penyebaran virus corona di Indonesia.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kebijakan keuangan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2021 diarahkan mendukung tema RKP nasional yaitu pemulihan ekonomi dan reformasi sosial yang berfokus pada:

1. pemulihan industri, pariwisata dan investasi;
2. reformasi sistem kesehatan nasional;
3. reformasi sistem perlindungan sosial; dan
4. reformasi sistem ketahanan bencana.

Tema RKP nasional ini memuat 7 (tujuh) agenda nasional yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim, serta stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Tema dan prioritas nasional ini

mendukung percepatan ekonomi nasional dan daerah yang terdampak oleh virus corona pada tahun 2020.

3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Pendapatan daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 Ayat 13 merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun terkait.

Berdasarkan ketentuan di atas, dijelaskan bahwa sumber pendapatan daerah provinsi terdiri atas:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari pajak daerah retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, pendapatan asli daerah yang sah dan lain-lain;
2) dana perimbangan yang meliputi: dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus;
3) lain-lain pendapatan daerah yang sah, meliputi: hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus, dana bantuan keuangan dari provinsi/kabupaten/kota lainnya, lain-lain penerimaan, dana transfer pusat dan dana insentif daerah. Sedangkan penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran daerah tahun sebelumnya (SILPA), penerimaan pinjaman daerah, Dana Cadangan Daerah (DCD), dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pendapatan daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan dikelompokkan atas:

a) PAD, yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD pada umumnya terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah;
b) dana perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari dana penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus;
c) lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi hibah, dana darurat, DBH pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota, dana penyesuaian dan otonomi khusus, serta bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemda lainnya.

Dari berbagai komponen pendapatan daerah, sumber utama penerimaan daerah adalah pajak kendaraan bermotor dan pajak rokok. Hal ini sebagai pertanda bahwa perlu segera dilakukan upaya-upaya terobosan untuk mencari sumber-sumber alternatif pendapatan lainnya yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi sumber penerimaan daerah, sehingga mengurangi ketergantungan terhadap penerimaan dari pajak daerah yang bersifat "*limitative*". Hal yang sama juga terjadi pada penerimaan dana perimbangan yang menunjukkan kecenderungan menurun. Hal ini, antara lain disebabkan oleh hilangnya

potensi komponen dana bagi hasil pajak bersumber dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan pajak bumi dan bangunan yang diserahkan kepada kabupaten/kota.

Berdasarkan hasil analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan serta prospek perekonomian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana telah diuraikan pada subbab sebelumnya, maka dapat disajikan analisa dan proyeksi sumber-sumber pendapatan daerah sebagaimana tertuang di dalam tabel realisasi dan proyeksi/target pendapatan daerah pada Tabel III.14 berikut ini:

Tabel III.14
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2018 s.d. Tahun 2021

No	Uraian	Jumlah			
		Realisasi tahun 2018 (N-2)	Realisasi tahun 2019 (N-1)	Proyeksi/Target 2020 (N)	Proyeksi Target 2021 (N+1)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**850.479.397.331,35**	**826.810.199.101,62**	**748.055.044.035,47**	**749.455.044.038,45**
1.1.1	Pajak Daerah	787.235.420.038,83	750.814.242.494,42	634.727.812.959,02	634.727.812.959,00
1.1.2	Retribusi Daerah	7.604.027.047,00	8.726.344.417,00	16.194.191.546,00	20.094.191.546,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.114.092.291,88	5.442.309.381,71	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00
1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	50.525.857.953,64	61.827.302.808,49	91.633.039.530,45	89.133.039.533,45
1.2	**Dana Perimbangan**	**1.701.620.949.552,00**	**1.743.152.363.799,00**	**1.654.482.814.000,00**	**1.221.457.213.000,00**
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/bagi Hasil bukan Pajak	215.555.879.603,00	204.413.867.656,00	159.079.497.000,00	169.079.497.000,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1.018.435.174.809,00	960.343.039.000,00	943.982.191.000,00	1.052.377.716.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	467.629.895.140,00	578.395.457.143,00	551.421.126.000,00	-
1.2.4	Dana Insentif Daerah	-	-	**1.654.482.814.000,00**	-
1.3	**Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**	**12.317.177.850,00**	**125.071.000.474,00**	**148.970.781.560,00**	**137.500.000.000,00**
1.3.1	Hibah	-	99.585.198.474,00	96.150.736.560,00	94.500.000.000
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-	
1.3.3	Dana Penyusunan dan Otonomi Khusus	-	25.485.802.000,00	52.820.045.000,00	43.000.000.000,00
1.3.4	Sumbangan Pihak Ketiga	12.317.177.850,00	-	-	-
1.3.5	Pendapatan Lainnya (Sumbangan Pihak Ketiga)	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan Daerah		**2.564.417.524.733,35**	**2.695.033.563.374,62**	**2.551.508.639.595,47**	**2.108.412.257.038,45**

3.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan daerah meliputi kebijakan peningkatan pendapatan daerah dan kebijakan belanja daerah. Dalam rangka meningkatkan kinerja pendapatan daerah, kinerja belanja daerah dan kinerja pembiayaan daerah, kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana diuraikan berikut ini:

3.2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Dalam rangka menggali dan menghimpun potensi pendapatan daerah, kebijakan pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2021 diarahkan melalui optimalisasi sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti pajak dan retribusi daerah, pendayagunaan aset daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; peningkatan dana perimbangan dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan bagi hasil pajak, bukan pajak serta peningkatan kerjasama pemerintah dan swasta.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan pendapatan asli daerah dilakukan dengan cara:

1. memperluas basis penerimaan antara lain yaitu dengan mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan;
2. memperkuat proses pemungutan dengan mempercepat penyusunan peraturan-peraturan daerah, mengubah tarif, khususnya tarif retribusi dan peningkatan sumber daya manusia yang melaksanakan pemungutan dan pengelolaan pajak dan retribusi tersebut;
3. meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya peningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah;
4. meningkatkan pengawasan dengan melakukan pemeriksaan secara insidentil dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pembayar pajak;
5. meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan dengan memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan;
6. meningkatkan peran dan fungsi UPT, UPPD dan balai penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan; dan
7. meningkatkan pengelolaan asset dan keuangan daerah.

Adapun kebijakan untuk meningkatkan dana perimbangan sebagai upaya memperkuat kapasitas fiskal daerah dilakukan dengan cara:

1. mengoptimalkan penerimaan dari: Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21, pajak ekspor, dan PPh Badan;
2. meningkatkan akurasi data sumber daya alam sebagai dasar perhitungan bagi hasil dalam dana perimbangan; dan
3. meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota.

Dalam rangka pencapaian upaya peningkatan pendapatan daerah tersebut, beberapa strategi yang harus diimplementasikan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antara lain sebagai berikut:

1. Strategi pencapaian target peningkatan PAD:
    a. penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan;
    b. pelaksanaan pemungutan atas objek pajak/retribusi baru dan pengembangan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya;
    c. pemenuhan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran;
    d. melaksanakan pelayanan secara khusus untuk lebih memperhatikan masyarakat pembayar pajak, serta memberikan kemudahan masyarakat dalam membayar pajak melalui *drivethru*, gerai samsat dan samsat *mobile*, layanan SMS, dan pengembangan samsat *outlet*;
    e. mengembangkan penerapan standar pelayanan kepuasan publik di beberapa kantor bersama;
    f. penyebarluasan informasi dan program sosialisasi di bidang pendapatan daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat;
    g. revitalisasi BUMD melalui berbagai upaya agar dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah, serta mengoptimalkan peran badan pengawas, agar BUMD berjalan sesuai dengan peraturan;
    h. optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan pendapatan asli daerah;
    i. melakukan pembinaan secara teknis fungsional dalam upaya peningkatan fungsi dan peran PD sebagai unit kerja penghasil di bidang pendapatan daerah; dan
    j. melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan pada tataran kebijakan, dengan POLRI dan kabupaten/kota termasuk dengan daerah perbatasan, dalam operasional pemungutan dan pelayanan pendapatan daerah, serta mengembangkan sinergitas pelaksanaan tugas dengan PD penghasil.

2. Strategi pencapaian target dana perimbangan:
    a. sosialisasi secara terus menerus mengenai pungutan pajak penghasilan dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak;
    b. peningkatan akurasi data potensi baik potensi pajak maupun potensi sumber daya alam bekerja sama dengan Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pajak sebagai dasar perhitungan bagi hasil.
    c. peningkatan keterlibatan Pemerintah Daerah dalam perhitungan *lifting* migas dan perhitungan sumber daya alam lainnya agar memperoleh proporsi pembagian yang sesuai dengan potensi;
    d. peningkatan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, kementerian teknis, Badan Anggaran DPR RI dan DPD RI untuk mengupayakan peningkatan besaran dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, DAU, dan DAK.

3.2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah terlebih dahulu memprioritaskan alokasi belanja untuk pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain meliputi: belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, serta belanja barang dan jasa pada tahun yang bersangkutan. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat diberikan sebagai pagu indikatif kepada setiap Perangkat Daerah (PD). Belanja penyelenggaraan pembangunan diprioritaskan untuk memenuhi kewajiban daerah dalam upaya melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja yang diukur berdasarkan pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Struktur belanja dalam APBD mengalami perubahan yang sebelumnya dikelompokkan menurut belanja aparatur dan belanja pelayanan publik (berdasarkan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002) berubah menjadi kelompok belanja tidak langsung dan belanja langsung (berdasaran Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan juga Permendagri Nomor 59 Tahun 2007) dengan uraian sebagai berikut.

1. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja:
    a. belanja pegawai berupa penyediaan gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
    b. belanja bunga digunakan untuk pembayaran atas pinjaman pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Dalam pemenuhan pendanaan sejalan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah, khususnya pengalokasian anggaran dalam APBD;
    c. belanja hibah digunakan untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka pemerintah daerah dapat melakukan pemberian hibah kepada instansi vertikal (seperti untuk kegiatan TMMD dan penyelenggaraan pemilukada yang dilaksanakan KPUD), dan instansi semi pemerintah (PMI, KONI, dan Pramuka), pemberian hibah kepada pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, sepanjang dianggarkan dalam APBD. Pemberian hibah harus dilakukan secara selektif sesuai dengan urgensi dan kepentingan daerah serta kemampuan keuangan daerah, sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan urusan wajib dan tugas-tugas pemerintahan daerah lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat;
    d. belanja bantuan sosial digunakan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, bantuan sosial diberikan kepada kelompok/anggota masyarakat yang dilakukan secara selektif/tidak mengikat dan jumlahnya dibatasi;
    e. belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kota atau pendapatan kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya yang disesuaikan dengan kemampuan belanja daerah yang dimiliki;

f. belanja bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum diberikan dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan bagi penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus dapat dianggarkan dalam rangka untuk membantu capaian program prioritas pemerintah daerah yang dilaksanakan sesuai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah;
g. belanja tidak terduga ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun anggaran sebelumnya dan perkiraan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta sifatnya tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program/kegiatan.

2. Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari:

   a. belanja pegawai merupakan pengeluaran untuk honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan perangkat daerah;

   b. belanja barang dan jasa merupakan pengeluaran untuk pembelian/pengadaan barang yang dinilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan perangkat daerah;

   c. belanja modal merupakan pengeluaran untuk pengadaan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan membutuhkan biaya pemeliharaan untuk digunakan dalam kegiatan belanja investasi daerah.

Berdasarkan analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah, maka arah kebijakan yang terkait dengan belanja daerah adalah sebagaimana tertuang pada Tabel III.15.

Tabel III.15

Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 s.d. Tahun 2021

No	Uraian	Jumlah			
		Realisasi tahun 2018 (N-2)	Realisasi Tahun 2019 (N-1)	Proyeksi/Target 2020 (N)	Proyeksi Target 2021 (N+1)
1	2	3	4	5	6
2.1	**Belanja tidak Langsung**	**1.360.271.599.568,02**	**1.578.026.530.537,28**	**1.589.095.259.704,58**	**1.299.522.270.144**
2.1.1	Belanja Pegawai	659.776.062.379,62	769.910.380.379,01	787.216.292.226,58	804.434.568.657
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa				813.012.807.726
2.1.3	Belanja Bunga	-	-	-	-
2.1.4	Belanja Subsidi	-	-	3.000.000.000,00	-
2.1.5	Belanja Hibah	268.038.087.969,00	295.620.904.060,00	322.304.645.000,00	68.926.794.172,00
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	479.075.000,00	441.515.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00
2.1.7	Belanja Bagi Hasil	261.064.334.164,64	423.625.933.450,93	365.400.268.245,95	365.400.268.246,00
2.1.8	Belanja Bantuan Keuangan	170.854.282.754,76	88.427.797.647,34	45.295.745.482,00	36.432.400.000,00
2.1.9	Belanja Tidak Terduga	59.757.300,00	-	65.128.308.750,00	15.000.000.000,00
2.1.10	Belanja Modal				544.816.327.048,00
2.1.11	Belanja Transfer				
2.2	**Belanja Langsung**	**1.010.184.299.315,78**	**1.207.025.225.846,30**	**1.182.813.337.371,00**	**1.349.350.895.705**
Jumlah Belanja Daerah		**2.370.440.159.091,80**	**2.785.051.756.383,58**	**2.771.908.597.075,58**	**2.648.773.165.849**
Defisit murni / (surplus)		**193.977.365.641,55**	**(90.018.193.008,96)**	**(220.399.957.480,11)**	**(540.360.908.811)**

Kebijakan belanja daerah tahun 2021 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, dengan melalui sebagai berikut.

1. meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan sosial. Esensi utama penggunaan dana APBD adalah untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan sosial oleh karena itu akan terus dilakukan peningkatan program-program yang berorientasi pada masyarakat dan berupaya melaksanakan realisasi belanja daerah tepat waktu dengan mendorong proses penetapan Perda APBD secara tepat waktu pula.
2. meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan tematik pembangunan yang disertai sistem pelaporan yang makin akuntabel.
3. mengalokasikan anggaran untuk pendidikan sebesar 20% dari total belanja daerah (APBD) tahun 2021 dalam rangka peningkatan indeks pendidikan meliputi Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah (AMH dan RLS). Sesuai dengan UUD Tahun 1945 Pasal 31 Ayat (4) menyatakan "negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional". Selain itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 49 Ayat (1) menyatakan "dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)".
4. mengalokasikan anggaran untuk kesehatan sebesar 10% sesuai perintah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 171 Ayat (2) menyatakan: "besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji", guna peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan.
5. mengalokasikan kebutuhan belanja *fixed cost, regular cost*, dan *variable cost* secara terukur dan terarah, yaitu:
    a. pemenuhan kebutuhan dasar dalam menjamin keberlangsungan operasional kantor (biaya listrik, telepon, air bersih, BBM, internet, dan perawatan mobil);
    b. pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai pelaksanaan TUPOKSI Perangkat Daerah, yang meliputi kegiatan koordinasi, fasilitasi, konsultasi, sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian & evaluasi;
    c. pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang mendukung program-program pembangunan yang menjadi prioritas dan unggulan Perangkat Daerah;
    d. program/kegiatan yang telah menjadi komitmen Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (*committed budget*).
6. meningkatkan alokasi anggaran yang makin diorientasikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
7. penggunaan anggaran berbasis pada prioritas pembangunan dalam penentuan anggaran belanja dengan visi dan misi 2017-2022, serta anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran tetap terukur.

3.2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah, yang perlu dibayar atau yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pencairan sisa lebih perhitungan tahun yang lalu, dari pinjaman, dan dari hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain dapat digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah. Pembiayaan merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Kebijakan penerimaan pembiayaan melalui, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA). Pengeluaran pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Arah kebijakan penerimaan pembiayaan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 sebagaimana yang tergambar pada Tabel III.16, diarahkan pada:

1. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari Retribusi Daerah;
2. meningkatkan pembentukan tak terduga untuk mengantisipasi apabila terjadi kejadian luar biasa pada tahun 2021;
3. menggunakan Dana insentif Daerah (DID) dalam meningkatkan stimulus ekonomi untuk pemulihan akibat Covid-19;
4. meningkatkan pembiayaan yang bersumber dari pinjaman daerah.

Tabel III.16
Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Tahun 2018 s.d. Tahun 2021

No	Uraian	Jumlah			
		Realisasi tahun 2018 (N-2)	Realisasi tahun 2019 (N-1)	Proyeksi/Target 2020 (N)	Proyeksi Target 2021 (N+1)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
3.1	**Penerimaan Pembiayaan**	**109.638.518.332,24**	**302.308.282.366,62**	**220.399.957.480,11**	**540.360.908.811,00**
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	**109.638.518.332,24**	**302.308.282.366,62**	**220.399.957.480,11**	**295.064.908.811,00**
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-	-
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	**245.296.000.000,00**
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	-
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-
3.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	-	-	-	-
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi Daerah)	-	-	-	-
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-
Jumlah Pembiayaan Netto		**109.638.518.332,24**	**302.308.282.366,62**	**220.399.957.480,11**	**540.360.908.811,00**
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)		**303.615.880.973,79**	**212.290.089.357,66**	-	-

Kemudian dalam pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah pusat menerbitkan Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah untuk menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005. Seiring dengan perubahan peraturan tersebut maka, uraian dalam postur keuangan daerah berubah sesuai dengan Peraturan Pengelolaan Keuangan daerah yang baru seperti yang tertera dalam table III.15. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 terdapat perubahan dalam uraian belanja daerah. Perubahan uraian tersebut yaitu belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer. Uraian perubahan tersebut untuk mengganti uraian pada Peraturan Pemnerintah Nomor 58 Tahun 2005 yaitu belanja langsung dan tidak langsung.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, belanja bunga dan belanja subsidi dimasukkan dalam belanja operasi. Untuk belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan dimasukkan dalam belanja transfer. Sedangkan untuk belanja modal dan belanja tidak terduga menjadi uraian belanja sendiri.

Dalam melaksanakan program Perangkat Daerah kita senantiasa mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah. Dengan demikian maka program yang disusun memberi keyakinan akan dapat dibiayai sehingga mampu mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya gambaran realisasi dan proyeksi kerangka pendanaan Tahun 2018 sampai dengan 2021 sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 disajikan pada Tabel III.17 dibawah ini:

Tabel III.17

Realisasi Dan Proyeksi Kerangka Pendanaan Tahun 2018 Sampai Dengan 2021 Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

No	Uraian	Realisasi		Proyeksi	
		2018	2019	2020	2021
2	**BELANJA**				
2.1	Belanja Operasi	1.938.521.542.172,40	2.272.998.025.285,31	1.166.975.111.458,00	**1.687.124.170.555,00**
2.1.1	Belanja Pegawai	697.562.238.937,62	834.647.896.587,01	787.216.292.226,58	804.434.568.657,00
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	656.285.232.195,14	700.956.706.797,44	1.182.813.337.371,00	813.012.807.726,00
2.1.3	Belanja Bunga	0	0	0	0
2.1.4	Belanja Subsidi	0	0	3.000.000.000,00	0
2.1.5	Belanja Hibah	268.038.087.969,00	295.620.904.060,00	322.304.645.000,00	68.926.794.172,00
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	479.075.000,00	441.515.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00
2.2	Belanja Modal	316.097.150.770,64	441.331.002.840,86		544.816.327.048,00
2.3	Belanja Tidak Terduga	59.757.300,00	0	65.128.308.750,00	15.000.000.000,00
2.4	Belanja Transfer	431.918.616.919,40	512.053.731.098,27	410.696.013.728,00	401.832.668.246,00
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	261.064.334.164,64	423.625.933.450,93	365.400.268.246,00	365.400.268.246,00
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	170.854.282.754,76	88.427.797.647,34	45.295.745.482,00	36.432.400.000,00

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tema, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

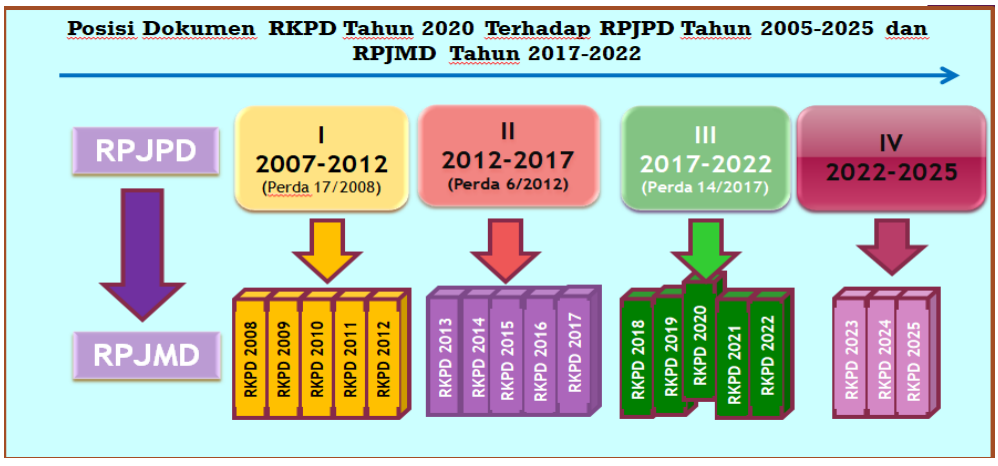
4.1.1 Tema Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2021

Tema Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 ditentukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025

   Pembangunan Daerah Tahun 2021 adalah bagian dari tahap ke III (2017–2022) Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025. Prioritas pembangunan pada tahap ke III ini adalah **"Meningkatnya Ekonomi Daerah Dan Terpenuhinya Kapasitas Dan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)".**

Gambar IV.1
Posisi Dokumen RKPD Tahun 2021 Terhadap RPJPD Tahun 2005 – 2025
dan Perubahan RPJMD Tahun 2017 – 2022



2. Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi (RTRWP) Tahun 2014-2034

   Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034, tujuan penataan ruang provinsi yaitu **"Mewujudkan Tata Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Terpadu, Berimbang dan Berkeadilan berbasis Agro-Bahari untuk menunjang Pariwisata serta Pengendalian Wilayah Pertambangan untuk menjamin Pembangunan yang Berkelanjutan"** maka pembangunan Daerah tahun 2021 dilaksanakan dalam rangka:

   a. pemantapan Sistem Perkotaan;

b. perwujudan Sistem Prasarana Wilayah;
c. perwujudan Rencana Pola Ruang;
d. perwujudan Kawasan Strategis.

3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022

Tahun 2021 merupakan tahun keempat dari RPJMD Tahun 2017-2022 atau merupakan tahun pertama dari Perubahan RPJMD Tahun 2017-2022. Sebagaimana ditetapkan dalam Perubahan RPJMD 2017-2022, tema RKPD Tahun 2021 adalah **"Percepatan Pemulihan Ekonomi Melalui Pengembangan Potensi Daerah Berbasis Masyarakat Dan Peningkatan Pelayanan Dasar".**

Gambar IV.1
Posisi Dokumen RKPD Tahun 2021 Terhadap RPJMD Tahun 2017-2022



4. Dinamika dan Realita Kondisi Umum Daerah

Dinamika dan realita kondisi umum daerah tercakup dalam hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2020 dan capaian kinerja tahun-tahun yang direncanakan dalam RPJMD periode sebelumnya (sebagaimana diuraikan pada bab II). Kesenjangan antara realita, capaian dan target kinerja menjadi permasalahan yang kemudian dirumuskan sebagai isu strategis dan masalah mendesak yang harus segera ditangani pada tahun 2021 sebagai pertimbangan dalam penentuan tema RKPD tahun 2021. Adapun isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

Gambar IV.3
Isu Strategis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021



Justifikasi Isu Strategis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai berikut :

1. Percepatan pemulihan ekonomi melalui sektor pertanian, kelautan, pariwisata, perdagangan dan UMKM
   a. Pertumbuhan Ekonomi terkontraksi (tumbuh negatif) akibat dari Covid-19, dimana pada TW 2 2020 (- 4,98) sedangkan pada TW 3 2020 (– 4,38).
   b. Produksi dan nilai tambah komoditias unggulan belum optimal, terlihat dari masih tergantungnya pada ekspor timah sebesar 80 % dari total ekspor.
   c. Jumlah kunjungan wisatawan dalam dan luar negeri menurun tajam akibat pandemic Covid-19.
   d. Sektor transportasi dan perdagangan yang terkontraksi sangat besar seiring dengan kebijakan pembatasan penerbangan dan *personal distancing* karena pandemic Covid-19
   e. Memaksimalkan peran UMKM melalui skema online untuk meningkatkan perekonomian masyarakat
2. Peningkatan Kesejahteraan masyarakat
   a. Tingkat Pengangguran yang cenderung meningkat dimana tahun 2020 sebesar 5,25 % meningkat dari tahun 2019 sebesar 3,58
   b. Angka kemiskinan yang meningkat pada tahun 2020 sebesar 4,53 akibat menurunnya pendapatan masyarakat
3. Peningkatan Sumberdaya manusia yang berkualitas
   a. Tingkat pendidikan SDM masih rendah, terlihat dari 60 % pendidikan tenaga kerja babel lulusan SMP ke bawah
   b. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) masih rendah, dimana tahun 2019 RLS sebesar 8,32 Tahun dan merupakan terendah se-Sumatera
   c. IPM masih di bawah rata-rata Nasional, dimana IPM Prov. Babel tahun 2019 sebesar 71,30 sedangkan capaian Nasional sebesar 71,92
4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat

a. Jumlah korban terpapar akibat pandemi Covid – 19 yang cenderung meningkat
b. Angka Kematian Ibu (AKI) yang masih tinggi pada tahun 2018 sebesar 167,24/100.000 KH
c. Angka Stunting yang masih tinggi, walaupun dalam 5 (lima) tahun terakhir memiliki tren menurun

5. Optimalisasi reformasi birokrasi dan pelayanan publik

a. Pelayanan publik belum maksimal.
b. Reformasi Birokrasi belum berjalan optimal.

6. Peningkatan kualitas lingkungan dan penanggulangan bencana

a. Kualitas Lingkungan Hidup yang masih Rendah ini terlihat dari lahan kritis di babel yang cukup luas yaitu 216.108 Ha atau 12,98 %
b. Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Masih rendah, terlihat dari indeks kapasitas bencana daerah tahun 2019 sebesar 0,39 jauh dari target provinsi sebesar 0,63

5. Rencana Kerja Pemerintah RI Tahun 2021

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun merupakan penjabaran tahun kedua dalam pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan. Penyusunan RKP merupakan upaya menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan terutama, oleh Pemerintah, dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel untuk mewujudkan visi misi Presiden Republik Indonesia.

Pada awal tahun 2020, seluruh dunia dikejutkan oleh munculnya virus Corona atau Covid-19, yang mulai merebak di kota Wuhan negara RRC dan berkembang terus hingga ke seluruh dunia dan tidak terkecuali di Indonesia. Sebagai akibat dari penyebaran Covid-19 maka Rancangan RKP 2021 mengangkat tema **"Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial".**

Penyusunan RKP dengan prinsip *money follows programme* menggunakan pendekatan Holistik-Tematik, Integratif, dan Spasial dengan penajaman substansi perencanaan dan penganggaran yang terintegras, dimana arah pembangunan RKP Tahun 2021 difokuskan pada :

1. pemulihan industri, pariwisata, dan investasi;
2. reformasi sistem kesehatan nasional;
3. reformasi sistem perlindungan sosial;
4. reformasi sistem ketahanan bencana;

Dengan mempertimbangan hal-hal di atas dan terutama untuk menyesuaikan dengan Tema dan arah kebijakan pembangunan dalam RKP Tahun 2021 serta sasaran pembangunan Daerah yang termuat dalam Perubahan RPJMD 2017-2022 maka ditetapkan tema pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2021 adalah **"Percepatan Pemulihan Ekonomi melalui Pengembangan Potensi Daerah Berbasis Masyarakat dan Peningkatan Pelayanan Dasar".** Makna tema adalah:

1. **Percepatan** dimaknai memaksimalkan instrumen pembangunan dengan waktu seefisien mungkin untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang ideal.

2. **Pemulihan Ekonomi** dimaknai serangkaian kegiatan untuk mengembalikan keadaan dan memperbaiki kondisi ekonomi akibat pandemi Covid-19 melalui kegiatan yang memiliki daya ungkit yang tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi dan berdampak langsung ke masyarakat.
3. **Pengembangan Potensi Daerah** dimaknai memaksimalkan pengembangan sumber daya dan potensi daerah untuk kesejahteraan masyarakat.
4. **Peningkatan Pelayanan Dasar** dimaknai peningkatan belanja daerah yang dialokasikan untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) terutama terkait pasca pendemi Covid-19 seperti Pendidikan, Kesehatan, Sosial dan Trantibunlinmas.

4.1.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2021

Sebagai upaya untuk mewujudkan tercapainya visi misi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung periode 2017-2022 dan percepatan pemulihan ekonomi akibat perlambatan ekonomi dan keberlanjutan program jaringan pengaman sosial sebagai dampak dari penyebaran Covid-19, maka pembangunan daerah tahun 2021 difokuskan untuk mencapai tujuan pembangunan: "**Percepatan Pemulihan Ekonomi melalui Pengembangan Potensi Daerah Berbasis Masyarakat dan Peningkatan Pelayanan Dasar"**. Hubungan antara visi-misi dan tujuan-sasaran pembangunan 2017-2022 disajikan pada Tabel IV.1.

Tabel IV.1
Hubungan Visi-Misi dan Tujuan-Sasaran Pembangunan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022

Visi RPJMD 2017-2022:
"Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi"

NO.	TUJUAN	SASARAN	
1	*2*	*3*	
Misi I. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah			
1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	1	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Pertanian
		2	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan
		3	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan
		4	Meningkatkan PDRB Sektor Pertambangan Dan Energi
		5	Meningkatkan PDRB Sektor Industri Pengolahan Dan Perdagangan
2	Meningkatnya Pemerataan Pendapatan	6	Menurunkan Tingkat Pengangguran
		7	Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja
		8	Menurunkan Tingkat Kemiskinan

NO.	TUJUAN	SASARAN	
1	*2*	*3*	
		9	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa
Misi II. Mewujudkan Infrastruktur Dan Konektivitas Daerah Yang Berkualitas			
3	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur	10	Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Pekerjaan Umum
		11	Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Dasar
		12	Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Perhubungan
Misi III. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Unggul Dan Handal			
4	Meningkatnya Pendidikan Masyarakat	13	Meningkatkan Kesempatan Pendidikan
		14	Meningkatkan Kualitas Pendidikan
5	Meningkatnya Pembangunan Sosial Masyarakat	15	Meningkatkan Kesejahteraan Anak
		16	Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk
		17	Meningkatkan Pembangunan Resposif Gender
		18	Meningkatkan Kualitas Pemuda
		19	Meningkatkan Pembangunan Olahraga
		20	Meningkatkan Kesejahteran Sosial
Misi IV. Meningkatkan Kesehatan Masyarakat			
6	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	21	Meningkatkan Kesehatan Masyarakat
Misi V. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Pembangunan Demokrasi			
7	Terwujudnya Reformasi Birokrasi	22	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
8	Meningkatnya Demokrasi	23	Meningkatkan Kebebasan Sipil
		24	Meningkatkan Hak-Hak Politik
		25	Meningkatkan Peran Lembaga Demokrasi
Misi VI . Pengendalian Bencana Dan Kualitas Lingkungan Hidup			
9	Menurunnya Resiko Bencana	26	Meningkatkan Kapasitas Daerah Terhadap Penanggulangan Bencana
10	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	27	Meningkatkan Pengendalian Lingkungan Hidup

Berdasarkan Tabel IV.1 di atas, diketahui bahwa untuk mewujudkan visi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung periode 2017-2022 akan dilaksanakan melalui 6 (enam) misi yang diharapkan dapat mencapai 10 (sepuluh) tujuan yang ditandai dengan 27 (dua puluh tujuh) sasaran. Indikasi keberhasilan dari pelaksanaan misi dapat dilihat dari target capaian indikator sasaran pembangunan. Adapun target sasaran makro pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disandingkan dengan target Nasional yang akan dicapai pada Tahun 2020 dan 2021 dapat dilihat pada Tabel IV.2.

Tabel IV.2
Target Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Nasional dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 dan 2021

INDIKATOR MAKRO	Target Tahun 2020		Target Tahun 2021		
	RKP	RKPD	RKP	RPJMD Prov. Babel	RKPD
Pertumbuhan Ekonomi	5,3	1,65	4,5-5,5%	3,25%	3,25%
Kemiskinan	8,5-9,5 %	5,20	9,2-9,7%	5,50	5,50%
Pengangguran	4,8-5,2%	5,60	7,5-8,2%	5,50%	5,50%
Gini Ratio	0,380-0,385	0,275	0,377-0,379	0,258	0,258
IPM	71,98	>70	72,78-72,90	71,35	71,35
Inflasi	*2,5-4,6*	*6,31*	3,01%	3,50-4,00%	3,50-4,00%

Sumber: RPJMN 2020-2024, Perubahan RPJMD 2017-2022 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Permendagri 40/2020-Pedoman Penyusunan RKPD 2021

Target tujuan dan sasaran makro tersebut lebih lanjut diturunkan menjadi sasaran-sasaran prioritas daerah sebagaimana yang dijabarkan dalam dokumen RPJMD tahun 2017-2022. Dari dokumen RPJMD diketahui tujuan dan target tujuan tahun 2021 yang akan dicapai, sebagaimana disajikan pada Tabel IV.3 sebagai berikut:

Tabel IV.3
Target Tujuan Tahun 2021

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET TAHUN 2021
1	2	3	4
1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	3,25
2	Meningkatnya pemerataan pendapatan	Indeks Gini	0,258
3	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur	Indeks ketersediaan Infrastruktur	42%
4	Meningkatnya Pendidikan masyarakat	Rata-rata lama sekolah, (Rata-rata lama sekolah laki-laki, rata-rata lama sekolah	7,92 L = 7,98 P = 7,00
5	Meningkatnya pembangunan sosial masyarakat	Indeks Pembangunan Sosial	64
6	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup, (Angka Usia Harapan Hidup Laki-laki, Angka Usia Harapan Hidup Perempuan)	70,36 L = 68,50 P = 72,30
7	Terwujudnya reformasi birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	68,43
8	Terwujudnya pembangunan demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi	75,83
9	Menurunya Resiko Bencana	Indeks Resiko Bencana	150
10	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	75,74

Target tujuan tersebut lebih lanjut diturunkan menjadi sasaran-sasaran prioritas daerah tahun 2021 yang akan dicapai, sebagaimana disajikan pada Tabel IV.4 sebagai berikut:

Tabel IV.4
Target Sasaran Tahun 2021

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN		TARGET 2021
1	*2*	*3*		*5*
1	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Pertanian	1	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian	5,97
2	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan	2	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan	4,42
3	Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	3	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	21,05%
4	Meningkatkan PDRB Sektor Pertambangan Dan Energi	4	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertambangan dan Energi	1,74
5	Meningkatkan PDRB Sektor Industri Pengolahan Dan Perdagangan	5	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan dan Perdagangan	2,70

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN		TARGET 2021
1	*2*	*3*		*5*
6	Meningkatkan Kesempatan Kerja	6	Tingkat Pengangguran Terbuka	5.50
7	Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja	7	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	64,00
8	Menurunkan Tingkat Kemiskinan	8	Persentase Angka Kemiskinan	5,50
9	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa	9	Pendapatan Perkapita Masyarakat Desa	1.409.026
10	Meningkatkan Ketersedian Infrastruktur Pekerjaan Umum	10	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	86%
11	Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Dasar	11	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Dasar	54
12	Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Perhubungan	12	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Perhubungan	69,45
13	Meningkatkan Kesempatan Pendidikan	13	Angka Harapan Lama Sekolah , (Angka Harapan Lama Sekolah Laki-Laki, Angka Harapan Lama Sekolah Perempuan)	12,5 L=11,81 P=12,15
14	Meningkatkan Kualitas Pendidikan	14	Persentase Sekolah terakreditasi A	44.30
15	Meningkatkan Kesejahteraan Anak	15	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	68,1
16	Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk	16	Laju Pertumbuhan Penduduk	2,08
17	Meningkatkan Pembangunan Resposif Gender	17	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	52,58
18	Meningkatkan Kualitas Pemuda	18	Indeks Pembangunan Pemuda	54%
19	Meningkatkan Pembangunan Olah Raga	19	Indeks Pembangunan Olah Raga	0,30
20	Meningkatkan Kesejahteran Sosial	20	Persentase PMKS Sejahtera	65,92%
21	Meningkatkan Kesehatan Masyarakat	21	Angka Kesehatan Masyarakat	85,92
22	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	22	Indeks Reformasi Birokrasi	45
23	Meningkatkan Kebebasan Sipil	23	Nilai Kebebasan Sipil	87,79
24	Meningkatkan Hak-Hak Politik	24	Nilai Hak-Hak Politik	81,79
25	Meningkatkan Peran Lembaga Demokrasi	25	Nilai Lembaga Demokrasi	80,36

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN		TARGET 2021
1	*2*	*3*		*5*
26	Meningkatkan Kapasitas Daerah Terhadap Penanggulangan Bencana	26	Indeks Kapasitas Bencana Daerah	0,30
27	Meningkatnya Pengendalian Lingkungan Hidup	27	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	75,74

Sumber: Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022

4.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2021

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan serta menjadi rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Strategi pembangunan dalam RPJMD ini telah didahului oleh analisis yang cermat atas kondisi makro ekonomi yang ada di daerah dan nasional serta kondisi mikro di daerah. Sebelum masuk pada strategi pembangunan, telah diidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dimiliki oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dengan menggunakan analisis, akhirnya ditetapkan Strategi dan Arah Kebijakan untuk mencapai setiap sasaran pembangunan lengkap dengan indikator kinerja sasaran sebagai alat ukur keberhasilan pencapain sasaran. Disamping itu beberapa langkah yang dilakukan dalam penentuan strategi dan arah kebijakan tahun 2021 antara lain :

1. Mengevaluasi dan menganalisis capaian Tujuan dan Sasaran pembangunan pada periode sebelumnya atau N-1.
2. Mengevaluasi dan menganalisis capaian program dan kegiatan pembangunan pada periode sebelumnya atau N-1 serta permasalahan dan isu strategis yang sedang dihadapi
3. Memperhatikan arah kebijakan dan saran pembangunan nasional.
4. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (*key success factors*) dan pengembangan berbagai kerangka kebijakandari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya.

Untuk mencapai sasaran pembangunan tahun 2021 maka Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2021 disusun dengan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah seperti yang disajikan pada Tabel IV.5 berikut ini:

Tabel IV.5
Hubungan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
1	*2*	*3*		*4*		*5*
1	Meningkatkan PDRB Sub Sektor	1	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor	1	Peningkatan sarana prasarana produksi	Peningkatan sarana prasarana produksi

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
1	*2*	*3*		*4*		*5*
	Pertanian		Pertanian		pertanian	pertanian, perkebunan, dan perternakan
				2	Peningkatan Produksi dan Pengelolaan Hasil Produksi Pertanian	Peningkatan Produkasi dan Pengelolaan Hasil Produksi Pertanian, Per-kebunan dan Peternakan
				3	Peningkatan kualitas sumber daya manusia pertanian	Peningkatan kualitas sumber daya manusia pertanian, perkebunan dan peternakan
				4	Pengembangan Kawasan Agropolitan dan Teknopark Lada Air Gegas	Pengembangan Kawasan Agropolitan dan Tekno-park Lada Air Gegas
2	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan	1	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan	1	Meningkatan pengendalian dan pengawasan terhadap wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil	Meningkatan pengendali-an dan pengawasan terhadap wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil
				2	Peningkatan Kualitas Sumber daya Manusia Perikanan Tangkap dan Perikanan Budi daya	Peningkatan Kualitas Sumber daya Manusia Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya
				3	Peningkatan produksi dan Pengelolaan Hasil Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya	Peningkatan produksi dan Pengelolaan Hasil Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya
				4	Peningkatan sarana prasarana produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya	Peningkatan sarana pra-sarana produksi per-ikanan tangkap dan perikanan budidaya
				5	Peningkatan Promosi, koordinasi, kerjasama, dan investasi dalam peningkatan produksi dan nilai Tambah hasil produksi perikanan tangkap dan per-ikanan budidaya	Peningkatan Promosi, koordinasi, kerjasama, dan investasi dalam peningkatan produksi dan nilai Tambah hasil produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya
3	Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	1	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	1	Peningkatan peran serta masyarakat dan kelembagaan pari-wisata serta Pengem-bangan ekonomi kreatif	Peningkatan peran serta masyarakat dan kelembagaan pariwisata serta Pengembangan ekonomi kreatif
				2	Peningkatan insfra-struktur, sarana dan prasarana destinasi pariwisata	Peningkatan insfra-struktur, sarana dan prasarana destinasi pariwisata
				3	Peningkatan kualitas sumber daya manusia pariwisata	Peningkatan kualitas sumber daya manusia pariwisata

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
1	*2*	*3*		*4*		*5*
				4	Peningkatan peran serta kepemudaan dan olah raga serta kebudayaan dalam pengembangan pariwisata	Peningkatan peran serta kepemudaan dan olah raga serta kebudayaan dalam pengembangan pariwisata
				5	Pengembangan hinter-land dan kawasan peruntukan pariwisata Tanjung Gunung	Pengembangan hinter-land dan kawasan peruntukan pariwisata Tanjung Gunung
				6	Pengembangan hinter-land dan Kawasan Peruntukan Pariwisata lintas timur Pulau Bangka	Pengembangan hinter-land dan Kawasan Peruntukan Pariwisata lintas timur Pulau Bangka
				7	Pengembangan hinter-land dan kawasan peruntukan pariwisata Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Kelayang	Pengembangan hinter-land dan kawasan peruntukan pariwisata Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Kelayang
				8	Pengembangan kawasan peruntukan pariwisata Pulau Punai	Pengembangan kawasan peruntukan pariwisata Pulau Punai
				9	Pengembangan pintu masuk wisatawan kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Sumatera	Pengembangan pintu masuk wisatawan kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Sumatera
				10	Pengembangan kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil pendukung pariwisata	Pengembangan kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil pendukung pariwisata
4	Meningkatkan PDRB Sektor Pertambangan Dan Energi	1	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertambangan Dan Energi	1	Meningkatkan produk-si dan nilai tambah sumber daya mineral yang berwawasan lingkungan	Meningkatkan produksi dan nilai tambah sumber daya mineral yang berwawasan lingkungan
				2	Peningkatan ketersedia-an energi listrik masyarakat	Peningkatan ketersedian energi listrik masyarakat
5	Meningkatkan PDRB Sektor Industri Pengolahan Dan Perdagangan	1	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Dan Perdagangan	1	Pengembangan Kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu (KIPT) Tanjung Ular	Pengembangan Kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu (KIPT) Tanjung Ular
				2	Pengembangan Kawasan Strategis Industri Sadai	Pengembangan Kawasan Strategis Industri Sadai
				3	Peningkatan tata kelola industri	Peningkatan tata kelola industri

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
1	*2*	*3*		*4*		*5*
				4	Peningkatan tata kelola perdagangan	Peningkatan tata kelola perdagangan
6	Menurunkan Tingkat Pengangguran	1	Tingkat Pengangguran Terbuka	1	Peningkatan kesempatan kerja	Peningkatan kesempatan kerja
				2	Peningkatkan peran KUKM dalam mening-katkan kesempatan kerja	Peningkatkan peran KUKM dalam mening-katkan kesempatan kerja
				3	Peningkatan Promosi, koordinasi, kerjasama, dan investasi dalam peningkatan lapangan pekerjaan	Peningkatan Promosi, koordinasi, kerjasama, dan investasi dalam peningkatan lapangan pekerjaan
7	Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja	1	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	1	Peningkatan kompeten-si, hubungan industrial dan keselamatan tenaga kerja	Peningkatan kompetensi, hubungan industrial dan keselamatan tenaga kerja
8	Menurunkan Tingkat Kemiskinan	1	Angka Kemiskinan	1	Mengurangi beban pengeluaran masya-rakat miskin	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin
				2	Peningkatkan pen-dapatan masyarakat miskin	Peningkatkan pendapatan masyarakat miskin
9	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa	1	Pendapatan Perkapita Masyarakat Desa	1	Peningkatan pen-dapatan masyarakat desa	Peningkatan pendapatan masyarakat desa
10	Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	1	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	1	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum
				2	Peningkatan kese-suaian pembangunan infrastruktur dengan tata ruang	Peningkatan kesesuaian pembangunan infrastruktur dengan tata ruang
				3	Peningkatan ketersediaan dan kapasitas SDM Konstruksi	Peningkatan ketersediaan dan kapasitas SDM Konstruksi
11	Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Dasar	1	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Dasar	1	Peningkatan, pemeli-haraan dan pembangunan infra-struktur perumahan dan permukiman	Peningkatan, pemeli-haraan dan pembangunan infrastruktur perumahan dan permukiman
12	Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Perhubungan	1	Indeks Ketersediaan Infrastruktur Perhubungan	1	Peningkatan, pemeli-haraan dan pem-bangunan sarana pra-sarana perhubungan	Peningkatan, pemelihara-an dan pembangunan sarana prasarana per-hubungan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
1	*2*	*3*		*4*		*5*
13	Meningkatkan Kesempatan Pendidikan	1	Angka Harapan Lama Sekolah , (Angka Harapan Lama Sekolah Laki-Laki, Angka Harapan Lama Sekolah Perempuan)	1	Peningkatan akses pelayanan pendidikan	Peningkatan akses pelayanan pendidikan
14	Meningkatkan Kualitas Pendidikan	1	Persentase Sekolah Terakreditasi A	1	Peningkatan mutu layanan pendidikan	Peningkatan mutu layanan pendidikan
15	Meningkatkan Kesejahteraan Anak	1	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	1	Peningkatan pelayanan terhadap pemberian hak-hak anak	Peningkatan pelayanan terhadap pemberian hak-hak anak
16	Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk	1	Laju Pertumbuhan Penduduk	1	Pengendalian tingkat kelahiran penduduk dan perpindahan penduduk untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang	Pengendalian tingkat kelahiran penduduk dan perpindahan penduduk untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang
17	Meningkatkan Pembangunan Resposif Gender	1	Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)	1	Menekan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak	Menekan tingkat ke-kerasan terhadap perempuan dan anak
				2	Peningkatan keadilan dan kesetaraan gender	Peningkatan keadilan dan kesetaraan gender
18	Meningkatkan Kualitas Pemuda	1	Indeks Pembangunan Pemuda	1	Peningkatan insan pemuda yang mandiri dan berprestasi	Peningkatan insan pemuda yang mandiri dan berprestasi
19	Meningkatkan Pembangunan Olah Raga	1	Indeks Pembangunan Olah Raga	1	Peningkatan prestasi dan peran serta masyarakat dalam berolah raga	Peningkatan prestasi dan peran serta masyarakat dalam berolah raga
20	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	1	Angka Kesehatan Masyarakat	1	Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat	Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat
				2	Peningkatan pelayan-an kesehatan masya-rakat	Peningkatan pelayanaan kesehatan masyarakat
				3	Penurunan Angka Stunting	Penurunan Angka Stunting
				4	Peningkatan pelaksanaan Germas	Peningkatan pelaksanaan Germas
21	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	1	Indeks Reformasi Birokrasi	1	Meningkatkan tata kelola aset dan laporan keuangan daerah	Meningkatkan tata kelola aset dan laporan keuangan daerah
				2	Meningkatkan Tata kelola pengawasan	Meningkatkan Tata kelola pengawasan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
1	*2*	*3*		*4*		*5*
				3	Peningkatan kese-larasan antar dokumen perencana-an, penganggaran dan pelaporan	Peningkatan keselarasan antar dokumen peren-canaan, pengang-garan dan pelaporan
				4	Peningkatan tata lakasana dan kinerja pemerintah daerah	Peningkatan tata lakasana dan kinerja pemerintah daerah
				5	Pengembangan Daerah Otonomi Baru (DOB)	Pengembangan Daerah Otonomi Baru (DOB)
				6	Peningkatan penataan peraturan perundang-an dan kebijakan daerah	Peningkatan penataan peraturan perundangan dan kebijakan daerah
				7	Peningkatan transpa-ransi pengadaan barang dan jasa	Peningkatan transparansi pengadaan barang dan jasa
				8	Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik
				9	Peningkatan kualitas pelayanaan publik dengan memberikan pelayanan yang cepat, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi	Peningkatan kualitas pelayanaan publik dengan memberikan pelayanan yang cepat, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi
				10	Peningkatan kompe-tensi dan profesional ASN	Peningkatan kompetensi dan profesional ASN
22	Meningkatkan Kebebasan Sipil	1	Nilai Kebebasan Sipil	1	Peningkatan peran serta masyarakat dalam berdemokrasi	Peningkatan peran serta masyarakat dalam berdemokrasi
23	Meningkatkan Hak-Hak Politik	1	Nilai Hak-Hak Politik	1	Peningkatan pelaya-nan terhadap hak-hak politik masyarakat	Peningkatan pelayanaan terhadap hak-hak politik masyarakat
				2	Peningkatan penye-lenggaraan ketertiban umum & ketentraman masyarakat, penegak-an perda serta perlindungan masyarakat (Linmas)	Peningkatan penye-lenggaraan ketertiban umum & ketentraman masyarakat, penegakan perda serta perlindungan masyarakat (Linmas)
24	Meningkatkan Peran Lembaga Demokrasi	1	Nilai Kelembagaan Demokrasi	1	Peningkatan pengem-bangan lembaga-lembaga demokrasi	Peningkatan pengem-bangan lembaga-lembaga demokrasi
25	Meningkatkan Kapasitas Daerah Terhadap Penanggulangan Bencana	1	Indeks Kapasitas Bencana Daerah	1	Peningkatan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana	Peningkatan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana
				2	Peningkatan Pengelo-laan kawasan rawan bencana alam	Peningkatan Pengelolaan kawasan rawan bencana alam

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
1	*2*	*3*		*4*		*5*
				3	Peningkatan penataan hilir dan hulu daerah rawan bencana Teluk Bayur	Peningkatan penataan hilir dan hulu daerah rawan bencana Teluk Bayur
27	Meningkatkan Pengendalian Lingkungan Hidup	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	1	Peningkatan pengen-dalian terhadap kualitas air sungai	Peningkatan pengen-dalian terhadap kualitas air sungai
				2	Peningkatan pengen-dalian terhadap kualitas udara	Peningkatan pengen-dalian terhadap kualitas udara
				3	Peningkatan pengen-dalian dan penga-wasan hutan	Peningkatan pengen-dalian dan pengawasan hutan
				4	Peningkatan tata kelola kehutanan	Peningkatan tata kelola kehutanan
				5	Peningkatan peman-faatan kawasan hutan	Peningkatan pemanfaatan kawasan hutan
				6	Peningkatan penge-lolaan lingkungan yang berkelanjutan	Peningkatan pengelolaan lingkungan yang ber-kelanjutan

Sumber: Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022

4.2 Prioritas Pembangunan Daerah dan Sasaran Pembangunan

4.2.1 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021, disusun dengan memperhatikan Visi dan Misi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung yang termuat dalam RPJMD Tahun 2017-2022 serta Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021. Agar tercapainya Visi dan Misi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, diperlukan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan.

Prioritas pembangunan daerah merupakan rumusan yang disusun sebagai upaya untuk mencapai target sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Perumusan prioritas pembangunan didasari dari: 1) hasil evaluasi capaian pembangunan sampai dengan tahun sebelumnya dan tahun berjalan, 2) isu strategis global/nasional/daerah, 3) arahan pemerintah pusat yang relevan dengan kondisi daerah dan, 4) arahan RPJMD 2017-2022 untuk tahun 2021.

Penyusunan prioritas dilakukan dengan memperhatikan beberapa kriteria, terutama yang berkorelasi dengan upaya untuk:

1. pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, seperti terhadap SDG's, Standar Pelayanan Minimal (SPM), pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan pekerjaan dan sasaran pembangunan nasional;
2. pencapaian visi dan misi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tertuang dalam Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022;

3. pengembangan sektor/bidang yang terkait dengan prioritas dan keunggulan kompetitif daerah; dan
4. penyelesaian isu-isu strategis daerah.

Prioritas daerah tersebut diselesaikan melalui program dan kegiatan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

1. memenuhi kriteria holistik-tematik, integratif dan spasial;
2. program/kegiatan harus merupakan kewenangan Provinsi dan Pemerintah Pusat, serta sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah bersangkutan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
3. memiliki korelasi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD 2017-2022;
4. merupakan respon relevan terhadap isu stategis dan masalah yang mendesak dan faktual yang dihadapi pada tahun 2021;
5. program dan kegiatan terpilih merupakan program/kegiatan yang menyentuh secara langsung bagi usaha pemecahan masalah mendasar yang dihadapi oleh masyarakat;
6. selaras dan konsisten dengan kebijakan pemerintah pusat untuk mengantisipasi dan penyelesaian target-target pembangunan nasional serta sesuai dengan pagu anggaran indikatif sementara.

Prioritas pembangunan daerah untuk tahun 2021 terdiri dari 2 kriteria yaitu:

1). prioritas Pembangunan Daerah I (Utama); berisi program-program unggulan yang yang berkorelasi dan sesuai tema pembangunan tahun 2021;

2). prioritas Pembangunan daerah II (Penunjang) berisi program-program unggulan yang tidak berkorelasi secara langsung dengan tema pembangunan, namun mendukung tercapainya target sasaran pembangunan daerah pada tahun 2021.

Dalam penentuan prioritas pembangunan I dan II, telah diidentifikasi beberapa permasalahan pembangunan daerah yang bersifat internal dan eksternal, sebagaimana telah diuraikan pada Bab II, dengan demikian suatu program pembangunan daerah merupakan program atau kumpulan program unggulan sebagaimana tertuang dalam Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2022 yang didasarkan pada hasil perumusan secara teknokratis.

Prioritas pembangunan daerah I (Utama) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021, sebagai berikut:

Gambar IV.2
Prioritas Pembangunan Daerah I (Utama) Tahun 2021



1. PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN AGROPOLITAN

Fokus kegiatan pada: 1). memperluas lahan produksi lada di Bangka Belitung dalam rangka mengembalikan lada sebagai produk agrobisnis andalan Bangka Belitung sehingga kejayaan Babel sebagai-Provinsi Lada bisa dicapai kembali; 2). membangun pusat penelitian dan pengembangan rekayasa lada maupun produk perkebunan lainnya seperti karet dan sawit di Provinsi Bangka Belitung; 3). memberikan pelatihan agrobisnis profesional kepada petani-petani di Bangka Belitung sehingga petani mampu memproduksi produk pertanian (khususnya lada) dengan kualitas unggul; 4).memberikan bantuan bibit dan sarana pendukung pengembangan agrobisnis lainnya agar petani memperoleh hasil optimal.

2. PEMBANGUNAN BAHARI

Fokus kegiatan pada : 1). memberikan dukungan berupa pemberian alat-alat yang modern dan pendampingan proses hilir hasil perikanan terhadap nelayan-nelayan Babel, demi peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk; 2). mendukung pelaku usaha sektor bahari untuk mengembangkan sektor usaha yang ramah lingkungan.

3. PENGEMBANGAN PARIWISATA

Fokus kegiatan pada: 1). menjadikan Bangka Belitung sebagai destinasi pariwisata bertaraf internasional melalui event-event seni - budaya atau olahraga bernuansa bahari level nasional/internasional seperti, Festival Budaya Melayu, Festival Kuliner Bangka-Belitung, Karnaval Budaya serumpun Sebalai, Triathlon, Maraton, dll; 2). rebranding pantai-pantai di Babel melalui desain PR yang menarik seperti cerita atau sejarah keunggulan pantai tersebut dibanding lainnya; 3). memberikan insentif kepada investor pariwisata untuk membangun bisnis pariwisatanya di Bangka Belitung melalui pembangunan infrastruktur (jalan, listrik, air, internet, dll) secara memadai demi pengembangan konsep *waterfront city.*

4. PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT

Fokus kegiatan pada: 1). mengembangkan bisnis UMKM di Bangka Belitung agar tetap kompetitif di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) melalui bantuan promosi (Gelar Pameran UMKM), temu investor atau buyer (*Business Gathering*), dan pendampingan pelatihan kapasitas UMKM (*Training*); 2). memberikan kemudahan bagi UMKM untuk mengakses kredit pengembangan usaha; 3). melakukan revitalisasi pasar-pasar tradisional di Bangka Belitung menjadi pasar yang bersih sehingga bisa bersaing dengan pasar swalayan modern; 4). pendirian dan optimalisasi peran koperasi untuk membantu para petani dan pedagang kecil untuk mencegah penghisapan para tengkulak dan rentenir.

5. PEMBANGUNAN PENDIDIKAN

Pembangunan pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat ini masih difokuskan kepada pemerataan pendidikan melalui peningkatan akses, peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan, untuk meningkatkan cakupan pendidikan sampai pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi, mulai dari pendidikan anak usia dini, penuntasan dan peningkatan kualitas pendidikan dasar dan menengah, hingga memberikan kesempatan pendidikan tinggi bagi masyarakat. Pemenuhan akses layanan pendidikan berkualitas ini juga diharapkan dapat menurunkan kesenjangan tingkat pendidikan antar kelompok masyarakat, antar wilayah, dan antar jenis kelamin (*gender*). Sementara itu, khusus pembangunan pendidikan menengah difokuskan pada dua hal yaitu meningkatkan rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas dan meningkatkan relevansi lulusan pendidikan menengah (vokasi) terhadap dunia kerja, terutama dalam upaya mendukung capaian prioritas unggulan daerah.

6. PEMBANGUNAN KESEHATAN

Pembangunan kesehatan difokuskan pada upaya untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat, dan meningkatnya daya tanggap dan perlindungan masyarakat terhadap resiko sosial dan finansial di bidang kesehatan. Peningkatan status kesehatan masyarakat dilakukan pada semua kontinum siklus kehidupan (*life cycle*), yaitu bayi, balita, anak usia sekolah, remaja, kelompok usia kerja, hingga lansia. Target sasaran yang telah dilaksanakan antara lain upaya peningkatan dan pemenuhan terhadap: percepatan penurunan *stunting* melalui status kesehatan dan gizi ibu dan anak; pengendalian penyakit; akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama di daerah terpencil/pedesaan/pulau-pulau; cakupan pelayanan kesehatan universal melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan kualitas pengelolaan SJSN Kesehatan; kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan vaksin; serta responsivitas sistem kesehatan.

Keselarasan antara Prioritas Pembangunan daerah I (Utama) dengan Strategi serta dukungan program Perangkat Daerah untuk tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel IV.6 di bawah ini.

Tabel IV.6
Strategi dan Program Prioritas
Yang Mendukung Prioritas Pembangunan I (Utama) RKPD 2021

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI
1	*2*	*3*	*4*

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN		STRATEGI	
1	*2*	*3*		*4*	
1	Pengembangan Pembangunan Agropolitan	1	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian	1	Peningkatan sarana prasarana produksi pertanian
				2	Peningkatan Produksi dan Pengelolaan Hasil Produksi Pertanian
				3	Peningkatan kualitas sumber daya manusia pertanian
				4	Pengembangan Kawasan Agropolitan dan Teknopark Lada Air Gegas
2	**PEMBANGUNAN BAHARI**	1	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan	1	Meningkatan pengendalian dan pengawasan terhadap wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil
				2	Peningkatan Kualitas Sumber daya Manusia Perikanan Tangkap dan Perikanan Budi daya
				3	Peningkatan produksi dan Pengelolaan Hasil Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya
				4	Peningkatan sarana prasarana produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya
				5	Peningkatan Promosi, koordinasi, kerjasama, dan investasi dalam peningkatan produksi dan nilai Tambah hasil produksi perikanan tangkap dan per-ikanan budidaya
3	**PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN PARIWISATA**	1	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	1	Peningkatan peran serta masyarakat dan kelembagaan pari-wisata serta Pengem-bangan ekonomi kreatif
				2	Peningkatan insfra-struktur, sarana dan prasarana destinasi pariwisata
				3	Peningkatan kualitas sumber daya manusia pariwisata
				4	Peningkatan peran serta kepemudaan dan olah raga serta kebudayaan dalam pengembangan pariwisata
				5	Pengembangan hinter-land dan kawasan peruntukan pariwisata Tanjung Gunung

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN		STRATEGI	
1	*2*	*3*		*4*	
				6	Pengembangan hinter-land dan Kawasan Peruntukan Pariwisata lintas timur Pulau Bangka
				7	Pengembangan hinter-land dan kawasan peruntukan pariwisata Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Kelayang
				8	Pengembangan kawasan peruntukan pariwisata Pulau Punai
				9	Pengembangan pintu masuk wisatawan kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Sumatera
				10	Pengembangan kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil pendukung pariwisata
4	**PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT**	1	Tingkat Pengangguran Terbuka	1	Peningkatan kesempatan kerja
				2	Peningkatkan peran KUKM dalam mening-katkan kesempatan kerja
				3	Peningkatan Promosi, koordinasi, kerjasama, dan investasi dalam peningkatan lapangan pekerjaan
		1	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	1	Peningkatan kompeten-si, hubungan industrial dan keselamatan tenaga kerja
		1	Angka Kemiskinan	1	Mengurangi beban pengeluaran masya-rakat miskin
				2	Peningkatkan pen-dapatan masyarakat miskin
		1	Pendapatan Perkapita Masyarakat Desa	1	Peningkatan pen-dapatan masyarakat desa
5	**PEMBANGUNAN PENDIDIKAN**	1	Angka Harapan Lama Sekolah , (Angka Harapan Lama Sekolah Laki-Laki, Angka Harapan Lama Sekolah Perempuan)	1	Peningkatan akses pelayanan pendidikan
		1	Persentase Sekolah Terakreditasi A	1	Peningkatan mutu layanan pendidikan
6	**Pembangunan Kesehatan**	1	Angka Kesehatan Masyarakat	1	Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat
				2	Peningkatan pelayan-an kesehatan masya-rakat
				3	Penurunan Angka Stunting

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN		STRATEGI	
1	*2*	*3*		*4*	
				4	Peningkatan pelaksanaan Germas

Keselarasan antara Prioritas Pembangunan daerah I (Utama) dengan Strategi serta dukungan program Perangkat Daerah untuk tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel IV.6 di bawah ini.

Tabel IV.6
Strategi dan Program Prioritas
Yang Mendukung Prioritas Pembangunan I (Utama) RKPD 2021

NO	RKPD 2021								
	Prioritas Pembangunan	Strategi		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah		Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*		*4*		*5*	*6*	*7*
1	**PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN AGROPOLITAN**	**1**	Peningkatan Produksi dan Pengelolaan Hasil Produksi Pertanian, Per-kebunan dan Peternakan	**1**	**Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**Persentase penurun-an kasus penyakit hewan menular**	**75%**	**Dinas Pertanian**
					Kegiatan : Penjaminan Kesehat-an Hewan, Penutup-an dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terkendalinya keamanan 7 Kab/Kota di wilayah Babel terhadap penyakit-penyakit zoonosis (Rabies dan AI)	7 Kab/Kota	Dinas Pertanian
					Pengendalian Resiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah pelaksanaan Pengendalian Resiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	2 zoonosis	Dinas Pertanian
					Pembebasan Penya-kit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pembebasan Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	7 Kab/Kota	Dinas Pertanian
					Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Ter-dampak Wabah Penyakit Hewan Menular yang ditanggulangi	1 Lokasi	Dinas Pertanian
					Kegiatan: Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Tersertifikasinya 1 unit usaha produk peternakan di Bangka Belitung (ber NKV/ Nomor Kontrol Veteriner) serta terujinya 210 sample produk peternakan pada unit-unit usaha/kios-kios produk peternakan	1 NKV(Nomor Kontrol Veteriner) dan 210 sample	Dinas Pertanian
					Pemenuhan Per-syaratan Teknis Sertifikasi Zona/ Kompartemen Bebas Penyakit	Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/ Kompartemen Bebas Penyakit yang dipenuhi	1 unit usaha	Dinas Pertanian
					Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha	Tingkat (persentase) Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis	4 unit usaha	Dinas Pertanian

NO	RKPD 2021							
	Prioritas Pembangunan	Strategi		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah		Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*		*4*		*5*	*6*	*7*
					Produk Hewan	Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan		
					Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan kesehatan Masyarakat Veteriner	210 sampel	Dinas Pertanian
						Unit Lab Keswan dan kesmavet yang terpelihara	1	Dinas Pertanian
				2	**Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian**	**Dokumen Laporan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian**		**Dinas Pertanian**
					Kegiatan: Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Dokumen Pengendalian dan Penamggulangan Bencana Pertanian Provinsi	4 Dokumen	Dinas Pertanian
					Pengendalian Organisme Peng-ganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Rasio luas areal pengendalian OPT terhadap luas pertanaman	3	Dinas Pertanian
						Jumlah paket belanja bahan obat-obatan (Pestisida)	1	Dinas Pertanian
						Jumlah Koordinasi dan Monev Perlindungan Tanaman	15	Dinas Pertanian
						Jumlah Kegiatan Brigade Proteksi Tanaman	1	Dinas Pertanian
					Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Rasio luas areal pengendalianDPI terhadap luas pertanaman	2	Dinas Pertanian
						Polis Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)	6000	Dinas Pertanian
					Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Dokumen Pencegahan, Penanganan Kebakaran dan Gangguan Usaha	1	Dinas Pertanian
					Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Polis Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS)	3500	Dinas Pertanian
				3	**Program Perizinan Usaha Pertanian**	**Dokumen Perizinan usaha pertanian**	**1**	**Dinas Pertanian**
					Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usaha-nya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Usaha pertanian yang diterbitkan izin usaha pertanian	10	Dinas Pertanian
					Pembinaan dan Pengawasan Pene-rapan Izin Usaha Pertanian	Laporan Hasil Pem-binaan dan penga-wasan penerapan izin usaha pertanian	10	Dinas Pertanian
2	**PEMBANGUNAN BAHARI**	**1**	**Peningkatan produksi dan Pengelolaan**	**1**	**Program Pengembangan Perikanan Tangkap**	**Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap (%)**	**1,85%**	**Dinas Kelautan & Perikanan**

NO	RKPD 2021							
	Prioritas Pembangunan	Strategi		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah		Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*		*4*		*5*	*6*	*7*
		Hasil Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya						
					Pengelolaan Penang-kapan Ikan di Wilayah laut sampai dengan 12 mil	Jumlah Data Statistik Perikanan Tangkap	1 Dokumen	Dinas Kelautan & Perikanan
						Jumlah sarana dan prasarana usaha perikanan tangkap	0 Unit	Dinas Kelautan & Perikanan
					Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Perikanan Tangkap	1 Dokumen	Dinas Kelautan & Perikanan
					Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap (Alat bantu Penangkapan, Rumpon/Rumah Ikan/Fish Apartemen, Mesin, dll)	Jumlah Mesin Tempel	20 Unit/ Tahun	Dinas Kelautan & Perikanan
						Jumlah ALat Bantu Penangkapan/Navigasi	30 Unit/ Tahun	Dinas Kelautan & Perikanan
						Rumpon/Rumah Ikan/Fish Apartemen	3 Paket/ Tahun	Dinas Kelautan & Perikanan
						Jumlah Tambat Labuh yang dibangun/ direhab	1 Unit	Dinas Kelautan & Perikanan
					Penjaminan Keter-sediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap (kapal dan API)	Jumlah Kapal Perikanan	10 Unit/ Tahun	Dinas Kelautan & Perikanan
						Jumlah Alat Penangkapan Ikan	1 Paket/ Tahun	Dinas Kelautan & Perikanan
						Jumlah Kawat Bubu	500 Gulung/ Tahun	Dinas Kelautan & Perikanan
						Jumlah Jaring	750 Piece/ Tahun	Dinas Kelautan & Perikanan
					Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT Sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Teknis Perizinan usaha Perikanan Tangkap	350 Rekomendasi	Dinas Kelautan & Perikanan
					Penetapan Per-syaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah SOP Penerbitan Izin Usaha Penangkapan Ikan	1 Dokumen	Dinas Kelautan & Perikanan
						Jumlah Kegiatan Sosialisasi SOP Penerbitan Izin Usaha Penangkapan Ikan	7 Kegiatan	Dinas Kelautan & Perikanan
					Penerbitan Rekomen-dasi Izin Usaha Per-ikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Ber-ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap	350 Rekomendasi	Dinas Kelautan & Perikanan
						Jumlah Kegiatan Gerai Perizinan	7 Kegiatan	Dinas Kelautan & Perikanan
					Penyediaan Data dan Informasi Usaha Per-ikanan Tangkap untuk	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap	1 Dokumen	Dinas Kelautan & Perikanan

NO	RKPD 2021					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
			Kapal Perikan-an Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT			
			Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabu-han Perikanan Provinsi	Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	7 Lokasi Pelabuhan Perikanan	Dinas Kelautan & Perikanan
			Penentuan Lokasi Pembangunan Pela-buhan Perikanan	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pelabuhan Perikanan	1 Dokumen	Dinas Kelautan & Perikanan
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Pelabuhan Perikanan yang dibangun/rehabilitasi berupa Fasilitas Pokok, Fungsional dan Fasilitas Penunjang	4 Pelabuhan Perikanan	Dinas Kelautan & Perikanan
			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabu-han Perikanan	Jumlah pelaku usaha perikanan tangkap yang dilayani	7 Pelaku Usaha	Dinas Kelautan & Perikanan
			2 Program Pengembangan Perikanan Budidaya	**Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap (%)**		Dinas Kelautan & Perikanan
			Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudi-dayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil Serta Tidak Meng-gunakan Modal Asing dan/atau Tenaga kerja Asing	Jumlah rekomendasi Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil (rekomendasi)		Dinas Kelautan & Perikanan
			Penetapan Persya-ratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudi-dayaan Ikan	Jumlah SOP Pener-bitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	1 Dokumen	Dinas Kelautan & Perikanan
				Jumlah Kegiatan Sosialisasi SOP Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	7 Kegiatan	Dinas Kelautan & Perikanan
			Penerbitan Rekomen-dasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidaya-an Ikan yang dikeluarkan	5 Rekomendasi	Dinas Kelautan & Perikanan
			Pengelolaan Pembu-didayaan Ikan Di Laut	Produksi Perikanan budidaya Laut	13.120 Ton/ Tahun	Dinas Kelautan & Perikanan
			Penyediaan Data dan Informasi Pembudi-dayaan Ikan di Laut dan Lintas daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen data dan Informasi Pem-budidayaan Ikan di Laut dan Lintas daerah Kabupaten/ Kota	7 Dokumen	Dinas Kelautan & Perikanan
			Penyediaan Pra-sarana Pembudi-dayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana budidaya yang diserahkan kepada	2 Paket	Dinas Kelautan & Perikanan

NO	RKPD 2021						
	Prioritas Pembangunan	Strategi		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	2	3		4	5	6	7
					masyarakat		
					Jumlah paket benih ikan laut yang diserahkan ke masyarakat	4 Paket	Dinas Kelautan & Perikanan
					Jumlah Paket Peralatan Budidaya yang diadakan	1 Paket/ Tahun	Dinas Kelautan & Perikanan
					Jumlah Paket Pengadaan Peralatan Laboratorium	1 Paket/ Tahun	Dinas Kelautan & Perikanan
				Penyediaan Prasa-rana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Peng-gunaan Sumber daya-nya Lebih Efisien Apabila dila-kukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatif-nya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Paket benih yang diserahkan ke masyarakat	2 Paket/ Tahun	Dinas Kelautan & Perikanan
					Jumlah Paket Pengadaan Peralatan Budidaya	2 Paket/ Tahun	Dinas Kelautan & Perikanan
					Jumlah Paket Pengadaan Peralatan Laboratorium	2 Paket/ Tahun	Dinas Kelautan & Perikanan
					Jumlah produksi benih	32000 Juta/ekor	Dinas Kelautan & Perikanan
					Jumlah Produksi Ikan Konsumsi	1200 Ton/ Tahun	Dinas Kelautan & Perikanan
				Penjaminan Keterse-diaan Sarana Pembu-didayaan Ikan di Laut	Jumlah Unit Pembangunan Hatchery	1 Unit/ Tahun	Dinas Kelautan & Perikanan
					Jumlah Unit Hatchery yang direhab	1 Unit/ Tahun	Dinas Kelautan & Perikanan
					Jumlah Unit Pembangunan Kolam/Tambak Pembesaran	2 Unit/ Tahun	Dinas Kelautan & Perikanan
					Jumlah Unit Kolam Pembesaran yang di rehab	1 Unit/ Tahun	Dinas Kelautan & Perikanan
					Jumlah Sarana Prasarana Balai yang diadakan	1 Paket/ Tahun	Dinas Kelautan & Perikanan
				Penyediaan sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber dayanya Lebih Efisien Apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/ atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten Kota	Jumlah sarana yang diserahkan ke masyarakat	0 Paket	Dinas Kelautan & Perikanan
					Jumlah Unit Pembangunan Hatchery	0 Unit/ Tahun	Dinas Kelautan & Perikanan

NO	RKPD 2021						
	Prioritas Pembangunan	Strategi		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah		Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*		*4*		*5*	*6*	*7*
						Jumlah Unit Hatchery yang direhab	1 Unit/ Tahun	Dinas Kelautan & Perikanan
						Jumlah Unit Tambak Pembesaran yang dibangun	1 Unit/ Tahun	Dinas Kelautan & Perikanan
						Jumlah Sarana dan prasarana yang direhab	1 Unit/ Tahun	Dinas Kelautan & Perikanan
						Jumlah Sarana Prasarana Balai yang diadakan	6 Paket/ Tahun	Dinas Kelautan & Perikanan
					Pengelolaan Keseha-tan Ikan dan Lingku-ngan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pembudidaya yang dibantu Vaksinasi Perikanan	100	Dinas Kelautan & Perikanan
						Jumlah pelaksanaan monev kesehatan ikan dan lingkungan budidaya (bulan)	8	Dinas Kelautan & Perikanan
						Tingkat Survival Rate (%)	85	Dinas Kelautan & Perikanan
						Jumlah verifikasi kesehatan dan lingkungan budidaya yang telah memenuhi INDOGAP		Dinas Kelautan & Perikanan
					Pembinaan dan Pemantauan Pem-budidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang di-kelola Oleh Pemerin-tah Daerah Provinsi	Jumlah Pembudidaya Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola Oleh Pemerintah Daerah Provinsi (pembudidaya)	100	Dinas Kelautan & Perikanan
					Pengembangan, Pe-manfaatan dan Per-lindungan Lahan Untuk Pembudida-yaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah pembudidaya yang difasilitasi dalam penerbitan Sertifikasi tanah pembudidaya ikan (pembudidaya)	30	Dinas Kelautan & Perikanan
				3	**Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**	**Persentase Pelaku Usaha yang Taat Aturan (%)**	**75**	Dinas Kelautan & Perikanan
					Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah pelaku usaha kelautan dan perikan-an sampai dengan 12 mil yang diawasi (pelaku usaha)	0	Dinas Kelautan & Perikanan

NO	RKPD 2021							
	Prioritas Pembangunan	Strategi		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah		Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*		*4*		*5*	*6*	*7*
3	**PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN PARIWISATA**	**1**	**Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dan Kelem-bagaan Pari-wisata Serta Pengembang-an Ekonomi Kreatif**	**1**	**Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak kekayaan Intelektual**	**Persentase kabupaten/kota yang terindentifikasi untuk pengembang-an kabupaten/kota kreatif, ruang kreasi dan jaringan orang kreatif**	**42,85%**	**Dinas Kebudayaan & Pariwisata**
						Persentase produk kreatif yang potensial untuk perluasan pasar	1,94%	Dinas Kebudayaan & Pariwisata
					Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Jumlah kabupaten/ kota yang terinden-tifikasi untuk pengem-bangan sebagai kabu-paten/kota kreatif	3 Kab/Kota	Dinas Kebudayaan & Pariwisata
						Jumlah produk kreatif yang potensial perluasan pasar	35 produk	Dinas Kebudayaan & Pariwisata
						Jumlah peserta yang mengikuti koordinasi dan sinkronisasi pengembngan ruang kreasi dan ruang kreatif	70 orang	Dinas Kebudayaan & Pariwisata
						Jumlah unit usaha kreatif pemula yang terindentifikasi potensial dalam usaha	35 unit usaha kreatif pemula	Dinas Kebudayaan & Pariwisata
					Sub Kegiatan Layanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Jumlah kabupaten/ kota yang terinden-tifikasi untuk pengem-bangan kabupaten/ kota kreatif	3 Kab/Kota	Dinas Kebudayaan & Pariwisata
					Sub Kegiatan Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar ekspor maupun Pasar Domestik Kota Kreatif	Jumlah produk kreatif yang potensial untuk perluasan pasar	35 Produk	Dinas Kebudayaan & Pariwisata
					Sub Kegiatan Koodinasi dan Sin-kronisasi Pengem-bangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Jumlah peserta yang mengikuti koordinasi dan sinkronisasi pengembangan ruang kreasi dan jaringan orang kreatif	35 Orang	Dinas Kebudayaan & Pariwisata
					Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Ke Pasar	Jumlah peserta yang mengikuti koordinasi dan sinkronisasi peningkatan usaha kreatif	35 Orang	Dinas Kebudayaan & Pariwisata

NO	RKPD 2021							
	Prioritas Pembangunan	Strategi		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah		Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*		*4*		*5*	*6*	*7*
					Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama Bagi Usaha Pemula	Jumlah unit usaha kreatif pemula yang mengikuti koordinasi dan sinkronisasi	35 unit usaha kreatif pemula	Dinas Kebudayaan & Pariwisata
4	**PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT**	**1**	**Peningkatan kesempatan kerja**	**1**	**Program Pelatihan Kerja Dan Produk-tivitas Tenaga Kerja**	**Persentase Pencari Kerja yang men-dapatkan pelatihan berdasarkan klaster kompetensi**		**Disnaker**
						Persentase Pelatihan Kerjasama dengan sektor swasta dan instansi pemerintah lainnya untuk penyedia instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja		Disnaker
						Meningkatnya Kompe-tensi dan Produk-tivitas		Disnaker
					Kegiatan : Pelaksanaan Pelatihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pe-latihan Kerja Serti-fikasi Kompetensi dan Mengikuti Pemagang-an	484 Orang	Disnaker
						Jumlah Pencari Kerja Yang Mendapakan Informasi Program Pelatihan UPTD Balai Latihan Kerja dan Jumlah Perusahaan yang Menjalain Kerja sama Pelatihan, Serifikasi dan pemagangan	224 Orang	Disnaker
					Kegiatan : Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah UMKM dan perusahaan menengah yang produktif	15 UMKM	Disnaker
				2	**Program Penempat-an Tenaga Kerja**	**Persentase Tenaga Kerja Menurunnya Angka Pencari Kerja**		**Disnaker**
					Kegiatan Pelayanan Antar kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Pelayanan Antar Kerja	100 Orang	Disnaker
					Kegiatan : Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Data Pencari Kerja	1 Kegiatan	Disnaker
					Kegiatan : Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah RPTK Perpanjangan Yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA dan Lokasi Kerja dalam 1(satu) Daerah Provinsi		Disnaker
		2	**Peningkatkan Peran KUKM Dalam Mening-katkan Kesem-patan Kerja**	**1**	**Program Pelayanan Izin Simpan Pinjam**	**Persentase rekomen-dasi izin Usaha Simpan Pinjam yang dikeluarkan**	**20%**	**Dinas KUKM**
					Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu)	Jumlah rekomendasi /Verifikasi ijin Usaha yang dikeluarkan	5 Koperasi	Dinas KUKM

NO	RKPD 2021						
	Prioritas Pembangunan	Strategi		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah		Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*		*4*		*5*	*6*	*7*
					Daerah Provinsi			
					Sub Kegiatan 1: Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah rekomendasi Izin Usaha Simpan Pinjam	5 Koperasi	Dinas KUKM
						Jumlah Peserta Diseminasi Pembentukan Koperasi	210 Orang	Dinas KUKM
						Jumlah Akta Notaris bagi Koperasi	14 Koperasi	Dinas KUKM
				2	**Program Pengawas-an Dan Pemerik-saan Koperasi**	**Persentase Koperasi Aktif**	**70%**	**Dinas KUKM**
					Kegiatan Pemeriksaan dan Pe-ngawasan Koperasi yang Wilayah Keang-gotaannya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang diawasi	50 Koperasi	Dinas KUKM
						Jumlah Koperasi yang melaksanakan RAT	20 Koperasi	Dinas KUKM
						Jumlah Koperasi yang membayar Pajak	10 Koperasi	Dinas KUKM
						Jumlah Koperasi yang mampu menyusun Laporan Keuangan	50 Koperasi	Dinas KUKM
						Jumlah Koperasi yang menerapkan Sistem Pengendalian Intern (SPI)	10 Koperasi	Dinas KUKM
						Jumlah Koperasi yang dibubarkan	5 Koperasi	Dinas KUKM
					Sub Kegiatan: Meningkatkan Akun-tabilitas, kepercaya-an, Kepatuhan Kesi-nambungan, dan memberikan manfaat yang sebesar-besar-nya kepada anggota dan Masyarakat	Jumlah Peserta yang mengikuti Bimtek Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT)	40 Orang	Dinas KUKM
						Jumlah Peserta Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Koperasi	60 Orang	Dinas KUKM
						Jumlah Peserta yang mengikuti Bimtek Sistem Pengendalian Intern (SPI)	50 Orang	Dinas KUKM

NO	RKPD 2021							
	Prioritas Pembangunan	Strategi		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah		Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*		*4*		*5*	*6*	*7*
					Sub Kegiatan : Meningkatkan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-undangan dan terbentuknya Koperasi yang kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh serta akuntabel	Jumlah Koperasi yang mematuhi Peraturan Perundang-undangan	50 Koperasi	Dinas KUKM
						Jumlah Koperasi yang akan dibubarkan	5 Koperasi	Dinas KUKM
				3	**Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi**	**Persentase Koperasi berkualitas**	**50%**	**Dinas KUKM**
					Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggota-annya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Sehat	5 Koperasi	Dinas KUKM
					Sub Kegiatan: Penilaian Permo-dalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manaje-men, Efisiensi, Likui-ditas, Jati diri Kopera-si, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	Jumlah Koperasi yang dinilai kesehatannya	10 Koperasi	Dinas KUKM
					Sub Kegiatan: Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi	Jumlah Koperasi ber-prestasi	5 Koperasi	Dinas KUKM
				4	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase SDM Koperasi yang terlatih	30%	Dinas KUKM
					Kegiatan Pendidikan dan Lati-han Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kab/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah pengurus dan anggota Koperasi yang tersertifikasi pelatihan	1000 Peserta	Dinas KUKM
						Jumlah Pendamping/ Penyuluh/Konsultan PLUT yang diberdaya-kan	70 Orang	Dinas KUKM
						Jumlah Kajian Mutu Pelatihan yang ter-sedia	1 Dok	Dinas KUKM
					Sub Kegiatan: Peningkatan Pema-haman dan Penge-tahuan Perkoperasi-an serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah Anggota Koperasi yang dilatih	1000 Peserta	Dinas KUKM
						Jumlah pembina/ Pen-damping/ Penyuluh/ Konsultan PLUT yang mengikuti Bimbingan teknis peningkatan kapasitas	80 Orang	Dinas KUKM
						Jumlah Kajian Mutu Pelatihan yang di-susun	1 Dok	Dinas KUKM

NO	RKPD 2021							
	Prioritas Pembangunan	Strategi		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah		Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*		*4*		*5*	*6*	*7*
						Operasional Balatkop	1 Tahun	Dinas KUKM
				5	**Program Pember-dayaan Dan Per-lindungan Koperasi**	**Persentase Koperasi yang diberdayakan**	**20%**	**Dinas KUKM**
					Kegiatan : Pemberdayaan dan Perlindungan Kope-rasi yang Keanggota-annya Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang usahanya meningkat	10 Koperasi	Dinas KUKM
						Jumlah Koperasi yang mendapatkan akses Pembiayaan	10 Koperasi	Dinas KUKM
						Jumlah Koperasi yang bermitra	10 Koperasi	Dinas KUKM
					Sub Kegiatan: Perluasan Akses Pasar, Akses Pem-biayaan, Penataan Manajemen, Stan-darisasi dan Re-strukturisasi Usaha	Jumlah Peserta yang mengikuti Fasilitasi Akses Pembiayaan	100 Orang	Dinas KUKM
					Sub Kegiatan : Peningkatan Produk-tivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, penguat an Kelembagaan, Pe-nataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Koperasi yang mendapatkan Akses Pasar (Pameran/ Promosi Koperasi)	5 Koperasi	Dinas KUKM
						Jumlah Peserta yang mendapatkan fasilitasi Kemitraan	10 koperasi	Dinas KUKM
						Jumlah Peserta yang mendapatkan Fasili-tasi Pengembangan Usaha	120 Orang	Dinas KUKM
				6	**Program Pemberdayaan Usa-ha Menengah, Usa-ha Kecil, Dan Usaha Mikro (UKM)**	**Persentase UMKM yang diberdayakan**	**1%**	**Dinas KUKM**
					Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemuda-han Perijinan, Pengu-atan Kelembagaan dan Koordinasi deng-an Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Usaha Kecil yang melakukan pe-nguatan kelembagaan	1100 Orang	Dinas KUKM
						Jumlah UMKM yang bermitra	6 Orang	Dinas KUKM
					Sub Kegiatan 1: Menumbuhkembang-kan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Me-ningkatkan Pencipta-an Lapangan Kerja, Pemerataan Penda-patan, Pertumbuhan Ekonomi dan Peng-entasan Kemiskinan	Jumlah Wirausaha Pemula yang mengikuti Magang	100 Orang	Dinas KUKM

NO	RKPD 2021							
	Prioritas Pembangunan	Strategi		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah		Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*		*4*		*5*	*6*	*7*
						Jumlah Peserta yang mengikuti Gerakan Kewirausahaan	1000 Orang	Dinas KUKM
						Jumlah Database UMKM	1 Dok	Dinas KUKM
						Jumlah Peserta Forum Koordinasi UMKM	100 Orang	Dinas KUKM
						Jumlah UMKM yang mendapatkan fasilitasi Kemitraan	30 Orang	Dinas KUKM
				7	**Program Pengembangan UKM**	**Persentase UMKM yang dikembangkan**	**1%**	**Dinas KUKM**
					Kegiatan Pengembangan Usa-ha Kecil Dengan Orientasi Peningka-tan Skala Usaha Men-jadi Usaha Menengah	Jumlah UMKM yang meningkat volume usahanya	100 Orang	Dinas KUKM
						Jumlah Produk yang tersertifikasi dan terstandarisasi	500 Orang	Dinas KUKM
						Jumlah UMKM yang mendapatkan akses pembiayaan	1000 Orang	Dinas KUKM
					Sub Kegiatan: Produksi dan Peng-olahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi	Jumlah UMKM yang mengikuti Diseminasi Standarisasi dan Sertifikasi Produk	1000 Orang	Dinas KUKM
						Jumlah UMKM yang mendapatkan Bimtek Peningkatan Kapasitas Usaha	420 Orang	Dinas KUKM
						Jumlah UMKM yang mengikuti Promosi dan Pemasaran Produk	100 Orang	Dinas KUKM
						Jumlah UMKM yang mendapatkan Fasili-tasi Pembiayaan Usaha	2000 Orang	Dinas KUKM
		3	**Peningkatan Promosi, koordinasi, kerjasama, dan investasi dalam peningkatan lapangan pekerjaan**	**1**	**Program Pengem-bangan Iklim Penanaman Modal**	**Jumlah Kebijakan Daerah Yang Mendukung Investasi**	**1 Kebijakan**	**DMPTSP**
					Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif di bidang Penanaman Modal yan Menjadi Kewena-ngan Daerah Provinsi	Jumlah UKM Yang Bermitra Dengan Investor	2 UKM	DMPTSP
					Sub Kegiatan : Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemu-dahan Penanaman Modal	Jumlah UKM Yang Memenuhi Syarat Kemitraan	8 UKM	DMPTSP
					Kegiatan : Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah Peta Potensi Investasi Provinsi	1 Peta	DMPTSP
					Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Evaluasi RUPM	1 Dok	DMPTSP

NO	RKPD 2021							
	Prioritas Pembangunan	Strategi		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah		Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*		*4*		*5*	*6*	*7*
						Jumlah Peta Potensi Investasi	1 Dok	DMPTSP
				2	**Program Promosi Penanaman Modal**	**Jumlah Realisasi Investasi**	**1,9 Trilyun**	**DMPTSP**
					Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan Promosi Yang Ter-laksana	4 Pameran Promosi	DMPTSP
					Sub Kegiatan: Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Laporan Strategi Promosi Penanaman Modal	1 Laporan	DMPTSP
					Sub Kegiatan: Pelaksanaan Kegiat-an Promosi Penana-man Modal Kewe-nangan Provinsi	Promosi Penanaman Modal Yang Ter-laksana	4 Pameran Promosi	DMPTSP
				3	**Program Pelayanan Penanaman Modal**	**Persentase Pelayan-an Perizinan dan Non Perizinan Sesuai SOP**	**100%**	**DMPTSP**
					Kegiatan Penanaman Modal Yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Rapat Forum PTSP se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 Laporan	DMPTSP
					Sub Kegiatan: Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Forum	50 Peserta (35 Laki-Laki, 15 Perempuan)	DMPTSP
						Terlaksananya Rapat Koordinasi Forum PTSP se Provinsi Kep. Bangka Belitung	1 Rakor Forum	DMPTSP
					Kegiatan Penanaman Modal Yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang Dikeluarkan Sesuai dengan SOP	1200 Izin	DMPTSP
					Sub Kegiatan: Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Yang Terintegrasi OSS	1200 Izin	DMPTSP
					Sub Kegiatan: Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Peng-aduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	2 Laporan SKM	DMPTSP
						Jumlah Pengaduan dan Layanan Konsultasi	12 Pengaduan	DMPTSP
				4	**Program Pengenda-lian Pelaksanaan Penanaman Modal**	**Persentase capaian realisasi investasi**	**15%**	**DMPTSP**

NO	RKPD 2021							
	Prioritas Pembangunan	Strategi		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah		Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*		*4*		*5*	*6*	*7*
					Kegiatan Pengendalian Pelak-sanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase realisasi pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	50%	DMPTSP
					Sub Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Peman-tauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang akan dilakukan koordinasi dan sinkronisasi peman-tauan pelaksanaan penanaman modal	60 Perusahaan	DMPTSP
					Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sin-kronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penana-man Modal	Jumlah perusahaan dan Aparatur yang mengikuti Koordinasi dan sinkronisasi pem-binaan pelaksanaan PM	110 Perusahaan dan 40 aparatur	DMPTSP
					Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sin-kronisasi Penga-wasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah kasus/ per-masalahan yang akan dilakukan koordinasi dan sinkronisasi peng-awasan pelaksanaan penanaman modal	6 kasus / permasalaha n	DMPTSP
				5	**Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal**	**Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP**	**100%**	**DMPTSP**
					Kegiatan Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang Terintegrasi	1 Dok	DMPTSP
					Sub Kegiatan : Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang Terintegrasi	1 Dok	DMPTSP
		4	**Peningkatan Kompetensi, hubungan industrial dan keselamatan tenaga kerja**		**Program Hubungan Industrial**	**Persentase perusahaan yang telah memiliki sarana hubungan industrial**		**Disnaker**
					Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusa-haan dan Pendafta-ran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mem-punyai Wilayah Kerja lebih dari satu Kabupaten/ Kota	Persentase Perusahaan yang membuat Peraturan Perusahaan dan Pen-daftaran Perjanjian Kerja Bersama		Disnaker

NO	RKPD 2021							
	Prioritas Pembangunan	Strategi		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah		Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*		*4*		*5*	*6*	*7*
					Kegiatan: Pencegahan dan Penyelesaian Perseli-sihan Hubungan In-dustrial, Mogok Ker-ja, dan Penutupan Perusahaan yang Ber akibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Permasalahan Hubungan Industrial yang Terselesaikan	55 Perusahaan	Disnaker
					Kegiatan: Penetapan Upah Mi-nimum Provinsi (UMP), Upah Mini-mum Sektoral Pro-vinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupa-ten/ Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/ Kota (UMSK)	Persentase Per-tumbuhan kenaikan UMP dan Pembahasan masalah upah		Disnaker
		5	**Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin**	**1**	**Program Pemberdayaan Sosial**	**Prosentase PMKS/PSKS yang terberdayakan**		**Dinas Sosial**
					Kegiatan Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penyelenggara Dunia Usaha/ lembaga /masyarakat yang diterbitkan Izin dan berpartispasi menyelenggarakan Pengumpulan Uang/ Barang dan Undian Gratis berhadiah sesuai dengan aturan yang berlaku.		Dinas Sosial
					Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah penyelenggara; Dunia Usaha/ lembaga/masyarakat yang berpartispasi menyelenggarakan Pengumpulan Uang/Barang dan Undian Gratis ber-hadiah sesuai dengan aturan yang berlaku.	2 Penyelenggara; lembaga/ dunia usaha/masyarakat	Dinas Sosial
					Kegiatan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Jumlah PSKS yang diberdayakan		Dinas Sosial
					Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejah-teraan Sosial Kelem-bagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Kelembagaan masyarakat yang di tingkatkan kemampuannya	203 Orang	Dinas Sosial
				3	**Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan**	**Prosentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang di ditangani**		**Dinas Sosial**

NO	RKPD 2021						
	Prioritas Pembangunan	Strategi		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah		Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*		*4*		*5*	*6*	*7*
					Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk di-pulangkan Ke Daerah Kabupa-ten/ Kota Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi yang di-pulangkan Ke Daerah Kabupaten/ Kota Asal		Dinas Sosial
						Jumlah Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal yang difasilitasi	7 Orang	Dinas Sosial
				4	**Program Rehabilitasi Sosial**	**Prosentase PMKS yang di Rehabilitasi sosial di Dalam Panti Non Pemerintah**		**Dinas Sosial**
					Kegiatan: Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Dis-abilitas Terlantar di dalam Panti	Jumlah penyandang disabilitas yang direhab sosial di Dalam Panti Non Pemerintah		Dinas Sosial
					Penyediaan Alat Bantu	Jumlah disabilitas dalam panti non pemerintah yang mendapatkan alat bantu	5 Orang	Dinas Sosial
					Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial dalam panti non pemerintah	10 Orang	Dinas Sosial
						Jumlah tenaga profesional pekerja sosial yang memberi bimbingan sosial disabilitas di dalam panti non pemerintah yang mendapatkan peningkatan kapasitas	5 Orang	Dinas Sosial
						Jumlah panti disabilitas non pemerintah yang men-dapatkan bimbingan pelayanan kepada penyandang dis-abilitas	1 Panti	Dinas Sosial
					Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah disabilitas terlantar yang men-dapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga dalam panti non pemerintah	10 Orang	Dinas Sosial
					Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	Jumlah lanjut usia terlantar yang direhab sosial di Dalam Panti Non Pemerintah		Dinas Sosial
					Penyediaan Alat Bantu	Jumlah lanjut usia dalam panti yang mendapatkan alat bantu	5 Orang	Dinas Sosial

NO	RKPD 2021					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti Sosial	Jumlah lanjut usia yang mendapatkan perbekalan kesehatan di dalam panti	10 Orang	Dinas Sosial
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah lanjut usia yang mendapatkan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	20 Orang	Dinas Sosial
				Jumlah tenaga profesional pekerja sosial yang memberi bimbingan sosial lanjut usia di dalam panti yang mendapatkan peningkatan kapasitas	5 Orang	Dinas Sosial
				Jumlah panti lanjut usia yang mendapat-kan bimbingan pelayanan kepada lanjut usia	1 Panti	Dinas Sosial
			Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	Jumlah anak terlantar yang direhab sosial di Dalam Panti Non Pemerintah		Dinas Sosial
			Pengasuhan	Jumlah Pengasuh anak di dalam panti non pemerintah yang men-dapat bimtek pem-bekalan standar nasional pengasuhan anak	27 Orang	Dinas Sosial
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah tenaga pelayanan sosial didalam panti non pemerintah yang mendapat bimbingan keterampilan psikososial	25 Orang	Dinas Sosial
			Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah anak di dalam panti non pemerintah mendapatkan fasilitasi pembuatan akta kelahiran, NIK dan KIA	10 Orang	Dinas Sosial
			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah klien anak di dalam panti non pemerintah yang men-dapat akses layanan pendidikan	20 Orang	Dinas Sosial
				Jumlah klien anak di dalam panti non pemerintah yang men-dapat akses layanan kesehatan dasar	20 Orang	Dinas Sosial
			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah klien anak di dalam panti non pemerintah yang mendapat pelayanan penelusuran keluarga	10 Orang	Dinas Sosial
			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah anak di dalam panti non pemerintah yang mendapat pelayanan reunifikasi keluarga	10 Orang	Dinas Sosial

NO	RKPD 2021							
	Prioritas Pembangunan	Strategi		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah		Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*		*4*		*5*	*6*	*7*
					Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Penganti	Jumlah anak yang mendapat akses laya-nan pengasuhan kepada keluarga pengganti	10 Orang	Dinas Sosial
					Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelan-dangan dan Pengemis di Dalam Panti	Jumlah Gelandangan dan pengemis yang direhab sosial		Dinas Sosial
					Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumlah gelandangan dan pengemis yang diberikan bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	8 Orang	Dinas Sosial
					Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kepen-dudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	Jumlah gelandangan dan pengemis yang difasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kepen-dudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kela-hiran, Surat Nikah, dan /atau Identitas Anak	8 Orang	Dinas Sosial
					Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapat akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	8 Orang	Dinas Sosial
					Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah gelandangan dan pengemis yang di-pulangkan ke daerah asal	8 Orang	Dinas Sosial
					Kegiatan Rehabilitasi Sosial bagi Penyan-dang Masalah Kese-jahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA didalam Panti	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahtera-an Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/ AIDS dan NAPZA yang di rehab sosial		Dinas Sosial
					Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumlah PMKS lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang diberikan bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	10 Orang	Dinas Sosial
					Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kepen-dudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	Jumlah PMKS lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang di fasili-tasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Pendu-duk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	10 Orang	Dinas Sosial
					Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah PMKS lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapat akses kelayanan pendidikan dan kesehatan dasar	10 Orang	Dinas Sosial
					Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah PMKS lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang di pulang-kan ke daerah asal	10 Orang	Dinas Sosial
				5	**Program Rehabilitasi Sosial**	**Prosentase PMKS yang di Rehabilitasi sosial di PSBL**		**Dinas Sosial**

NO	RKPD 2021						
	Prioritas Pembangunan	Strategi		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*
				Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyan-dang Disabilitas Ter-lantar di dalam Panti	Jumlah penyandang disabilitasi yang direhab sosial dalam Panti Pemerintah		Dinas Sosial
				Penyediaan Permakanan	Jumlah kebutuhan permakanan yang di sediakan dalam Panti Pemerintah	20 Orang	Dinas Sosial
				Penyediaan Sandang	Jumlah kebutuhan sandang yang di sediakan dalam Panti Pemerintah	20 Orang	Dinas Sosial
				Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Jumlah perbekalan kesehatan yang di sediakan dalam Panti Pemerintah	20 Orang	Dinas Sosial
				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah sarana prasarana penunjang Kegiatan Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial yang disediakan dalam Panti Pemerintah	20 Orang	Dinas Sosial
				Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Jasa Tenaga Teknis Lainnya yang disediakan dalam panti pemerintah	5 Orang	Dinas Sosial
					Jumlah Jasa Tenaga Perawat yang di sediakan panti pemerintah	4 Orang	Dinas Sosial
					Jumlah Penerima Manfaat yang mendapat akses ke layanan kesehatan dasar dalam panti pemerintah	20 Orang	Dinas Sosial
				Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	Jumlah lanjut usia terlantar yang direhab sosial didalam panti pemerintah		Dinas Sosial
				Penyediaan Sandang	Jumlah sandang yang disediakan dalam panti pemerintah	10 Klien	Dinas Sosial
				Penyediaan Alat Bantu	Jumlah alat bantu yang disediakan dalam panti pemerintah	10 Klien	Dinas Sosial

NO	RKPD 2021							
	Prioritas Pembangunan	Strategi		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah		Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*		*4*		*5*	*6*	*7*
					Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti Sosial	Jumlah klien yang mendapatkan layanan Perbekalan Kesehatan yang disediakan dalam panti pemerintah	10 Llien	Dinas Sosial
					Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah klien yang mendapatkan layanan Bimbingan fisik, mental Spiritual dan Sosial dalam panti pemerintah	10 Klien	Dinas Sosial
					Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah klien yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga dalam panti pemerintah	10 Klien	Dinas Sosial
					Pemulasaran	Jumlah klien yang meninggal dunia dalam panti pemerintah	10 Klien	Dinas Sosial
				10	**Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**	**Presentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial**		**Dinas Sosial**
					Kegiatan Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Jumlah anak yang mendapatkan perlin-dungan sosial		Dinas Sosial
					Pengangkatan Anak antar WNI	Jumlah anak yang di angkat (adopsi) dan memperoleh perlin-dungan sosial	5 Orang	Dinas Sosial
					Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Jumlah calon orang tua angkat (COTA) yang mendapatkan perizinan	5 Orang	Dinas Sosial
					Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah data Fakir Miskin yang dikelola dengan baik		Dinas Sosial
					Pendataan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang didata/di-update	7 kab/kota	Dinas Sosial
					Pengelolaan Data Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Data Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang dikelola	7 kab/kota	Dinas Sosial
						Jumlah Fakir Miskin yang ditangani	170 KK	Dinas Sosial

NO	RKPD 2021							
	Prioritas Pembangunan	Strategi		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah		Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	2	3		4		5	6	7
						Jumlah Keluarga Miskin yang diberikan Pendampingan Jaminan Sosial	43749 KK	Dinas Sosial
		6	**Peningkatan Pendapatan Masyarakat Desa**	**1**	**Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Tingkat Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa**		**Dinas Pemdes**
					Kegiatan Penataan Desa	Jumlah Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa yang tersusun	309 Desa	Dinas Pemdes
					Sub Kegiatan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan	Jumlah desa dan kelurahan yang di evaluasi	6 Desa/ 6 Kel	Dinas Pemdes
					Sub Kegiatan Pembinaan Profil Desa dan Kelurahan	Jumlah desa dan kelurahan yang dibina profilnya	7 Kabupaten	Dinas Pemdes
					Sub Kegiatan Penataan Kewenangan Desa	Jumlah desa yang dibina untuk menyusun perdes tentang kewenangan desa	6 Kabupaten	Dinas Pemdes
					Sub Kegiatan Pembinaan, Moni-toring dan Evaluasi Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa	Jumlah desa yang dibina bantuan keuangannya	309 Desa	Dinas Pemdes
					Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Jumlah aparatur desa yang meningkat kapasitasnya	309 Aparatur Desa	Dinas Pemdes
					Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Revolusi Mental	Jumlah aparatur desa yang meningkat kapasitasnya dalam pemahaman nilai-nilai pelayanan kepada masyarakat	65 Orang	Dinas Pemdes
					Sub Kegiatan Peningkatan Kapasi-tas Bendahara Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Melalui Siskeudes	Jumlah aparatur desa yang meningkat kapasitasnya dalam pengoperasian aplikasi Siskeudes	46 Aparatur Desa	Dinas Pemdes
					Sub Kegiatan Peningkatan Kapasi-tas Aparatur Desa dalam Pengelolaan Aset Desa Berbasis SIPADES	Jumlah aparatur desa yang meningkat kapasitasnya dalam pengoperasian aplikasi SIPADES	40 Orang	Dinas Pemdes
					Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	Jumlah ketua dan anggota BPD yang meningkat kapasitas-nya	40 BPD	Dinas Pemdes
				2	**Program Pemberdayaan Lembaga Kemasya-rakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat**	**Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif. Persentase lembaga adat desa yang aktif**		**Dinas Pemdes**

NO	RKPD 2021						
	Prioritas Pembangunan	Strategi		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*
				Kegiatan Pemberdayaan Lembaga kemasya-rakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pem-berdayaan Masyara-kat Hukum Adat yang Masyarakat Pelaku-nya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah lembaga kemasyarakatan, lembaga adat yang terbina	309 Desa	Dinas Pemdes
				Sub Kegiatan Kelembagaan masya-rakat desa dan masyarakat hukum adat	Jumlah LKD yang di Evaluasi	7 Kab/kota	Dinas Pemdes
				Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas elembagaan	Jumlah Pokjanal Posyandu yang dibina, Jumlah PKK Provinsi, Kab, Kecamatan dan Desa yang dibina, Jumlah Lembaga Adat yang dibina, Jumlah Lembaga CPPD yang dibentuk, Jumlah sekolah yang PMTASnya dikelola oleh PKK Desa	35 Pokjanal Posyandu 7 Kab/Kota 10 Lembaga Adat 10 lembaga CPPD 1.232 Siswa	Dinas Pemdes
				Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyakat	Jumlah BUMDESA yang aktif, Jumlah Produk unggulan Desa Yang dikelola, jumlah berkah mart yang difasilitasi dan didampingi pengem-bangannya,	20 BUMDES 20 Prudes, 230 Berkah Mart	Dinas Pemdes
				Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyakat	Jumlah Kader Pem-berdayaan Masyarakat yang terampil, Jumlah Kelompok Masyarakat Desa yang aktif dalam Kewira-usahaan	40 Orang,, 40 Orang	Dinas Pemdes
				Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah desa yang memiliki Pusat Informasi Teknologi (Posyantek atau Wartek) dan yang dapat mengelola SDA dan TTG, Jumlah kelompok Masyarakat Pengelola	7 Kab/Kota	Dinas Pemdes

NO	RKPD 2021							
	Prioritas Pembangunan	Strategi		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah		Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*		*4*		*5*	*6*	*7*
						Sumber Daya Alam (SDA) yang terbentuk, Jumlah Desa yang Berinovasi		
						Jumlah Lokasi penera-pan Teknologi Tepat Guna Sektor Pertanian	7 Kab/Kota	Dinas Pemdes
						Jumlah Lokasi penerapan Teknologi Tepat Guna Sektor Perikanan	7 Kab/Kota	Dinas Pemdes
				3	**Program Peningkatan Kerjasama Desa**	**Persentase kerjasama Desa yang dilaksanakan**		**Dinas Pemdes**
					Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama antardesa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Rakor yang terlaksana.	1 Kali Rakor,	Dinas Pemdes
						Identifikasi Pru kades Lintas Kabupaten,	1 Laporan	
					Sub Kegiatan Fasilitasi Kerjasama antardesa lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Rakor yang terlaksana.	1 Kali Rakor,	Dinas Pemdes
						Jumlah Laporan Identifikasi Pru kades Lintas Kabupaten,	1 Laporan	
					Sub Kegiatan Fasilitasi Kerjasama desa dengan pihak ketiga	Jumlah Aparatur Desa dan Pengurus Bum-desma yang meningkat kapasitas-nya di Kawasan Perdesaan	60 Orang	Dinas Pemdes
						Jumlah Produk Unggulan yang dikembangkan	3 Produk	
5	**PEMBANGUNAN PENDIDIKAN**	**1**	**Peningkatan akses pelayanan pendidikan**	**1**	**Program Pengelolaan Pendidikan**	**Persentase GTK Bersertifikasi**	**80**	**Dinas Pendidikan**
						Nilai rata-rata UK GTK SMA	60	Dinas Pendidikan
						Jumlah medali siswa dalam kompetisi nasional/ Internasional	4	Dinas Pendidikan
						APK SMA	43,43	Dinas Pendidikan
					Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah guru SMA yang mengikuti PPG	25 Orang	Dinas Pendidikan
						Jumlah guru SMA yang mendapat pengem-bangan kompetensi	165 Orang	Dinas Pendidikan
						Jumlah lomba kesis-waan SMA	12 Jenis	Dinas Pendidikan
						Jumlah sarana prasarana yang di bangun	7 Lokasi	Dinas Pendidikan
						Jumlah siswa/ mahasiswa yang mendapat beasiswa	1894 Orang	Dinas Pendidikan

NO	RKPD 2021					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
			Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Atas	Jumlah guru yang mengikuti PPG	25 Orang	Dinas Pendidikan
				Jumlah guru yang berkualifikasi S1 dan S2	15 Orang	Dinas Pendidikan
				Jumlah Guru mengikuti Diklat Kompetensi	150 Orang	Dinas Pendidikan
			Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah siswa SMA yang dibina minat, bakat dan kreativitas	2000	Dinas Pendidikan
			Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru yang dibangun	3 paket	Dinas Pendidikan
			Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang dibangun	2 paket	Dinas Pendidikan
			Sub Kegiatan Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah Kantin yang dibangun	2 paket	Dinas Pendidikan
			Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang direhab	4 ruang	Dinas Pendidikan
			Sub Kegiatan Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang direhab	3 ruang	Dinas Pendidikan
			Sub Kegiatan Pengadaan Meubeleur Sekolah	Jumlah Meubeleur	380 SET	Dinas Pendidikan
			Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	1 paket	Dinas Pendidikan
			Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	Jumlah siswa/ mahasiswa yang mendapat beasiswa	1894 orang	Dinas Pendidikan
			Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah guru SMK yang mengikuti PPG	20 Orang	Dinas Pendidikan
				Jumlah guru SMK yang mendapat pengem-bangan kompetensi	160 Orang	Dinas Pendidikan
				jumlah Kontingen guru berprestasi ke tingkat Nasional	1 Tim	Dinas Pendidikan
				Jumlah lomba kesis-waan SMK	5 jenis	Dinas Pendidikan
				jumlah sarana prasarana SMK yang direhab	4 lokasi	Dinas Pendidikan
				jumlah sarana prasarana SMK yang bangun	7 ruang	Dinas Pendidikan
				Jumlah Pengadaan sarana prasarana SMK	1 paket	Dinas Pendidikan
				Jumlah siswa yang mendapat beasiswa	1000 Orang	Dinas Pendidikan
			Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga	Jumlah guru yang mengikuti PPG	20 Orang	Dinas Pendidikan

NO	RKPD 2021					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
			Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Kejuruan			
				Jumlah guru yang berkualifikasi S1 dan S2	10 Orang	Dinas Pendidikan
				Jumlah Guru mengikuti Diklat Kompetensi	150 Orang	Dinas Pendidikan
				Terseleksinya Kontingen guru berprestasi ke tingkat Nasional	1 kali	Dinas Pendidikan
			Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah lomba kesiswaan SMK	5 jenis	Dinas Pendidikan
			Sub Kegiatan Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	jumlah Ruang Kelas yang direhab	3 lokasi	Dinas Pendidikan
			Sub Kegiatan Rehabilitasi Ruang Praktik	jumlah ruang praktik yang direhab	1 lokasi	Dinas Pendidikan
			Sub Kegiatan Pembangunan ruang kelas baru	jumlah RKB yang dibangun	6 ruang	Dinas Pendidikan
			Sub Kegiatan Pembangunan ruang praktik	jumlah ruang praktik yang dibangun	1 ruang	Dinas Pendidikan
			Sub Kegiatan Pengadaan Perleng-kapan Peserta Didik	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	1 paket	Dinas Pendidikan
			Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah siswa yang mendapat beasiswa	1000 Orang	Dinas Pendidikan
			Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Khusus	Jumlah Guru SMA yang mengikuti PPG	10 Orang	Dinas Pendidikan
				Jumlah Guru SMA yang mendapat pengem-bangan kompetensi	102 Orang	Dinas Pendidikan
				Jumlah lomba kesiswaan	8 jenis	Dinas Pendidikan
				Jumlah Pengadaaan Sarana prasarana pendidikan khusus	2 unit	Dinas Pendidikan
				Jumlah Sarana, Prasarana pendidikan khusus yang dibangun	3 lokasi	Dinas Pendidikan
				Jumlah penyediaan Biaya Operasional PLA	12 bulan	Dinas Pendidikan
			Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan khusus	Jumlah Guru yang mengikuti PPG	10 Orang	Dinas Pendidikan
				Jumlah Guru yang berkualifikasi S1 dan S2	2 Orang	Dinas Pendidikan
				Jumlah Guru mengikuti Diklat Kompetensi	100 Orang	Dinas Pendidikan

NO	RKPD 2021							
	Prioritas Pembangunan	Strategi		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah		Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*		*4*		*5*	*6*	*7*
					Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah tim lomba kesiswaan	10 Tim	Dinas Pendidikan
						Jumlah sekolah kesiswaan pendidikan khusus yang dibina	9 Sekolah	Dinas Pendidikan
					Sub Kegiatan Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah	Jumlah Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah	2 Unit	Dinas Pendidikan
					Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang dibangun	3 lokasi	Dinas Pendidikan
					Sub Kegiatan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Tersedianya Biaya Operasional PLA	12 bulan	Dinas Pendidikan
		2	**Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan**	**1**	**Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan**	**Persentase guru yang mengajar sesuai dengan kompetensi**	**80%**	**Dinas Pendidikan**
					Kegiatan Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Jumlah dokumen analisis GTK	1 dokumen	Dinas Pendidikan
					Sub Kegiatan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah dokumen pemetaan dan mutasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	1 dok	Dinas Pendidikan
				2	Program Pengembangan Kurikulum Dan Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase dokumen kurikulum yg terintegrasi dengan kurikulum nasional	75%	Dinas Pendidikan
					Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah dokumen Penyusunan Muatan Lokal Pendidikan Menengah	2 dok	Dinas Pendidikan
					Sub Kegiatan Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah peserta Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal SMA	44	Dinas Pendidikan
						Jumlah peserta Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal SMK	36	Dinas Pendidikan
					Kegiatan Penetapan Kuri-kulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah dokumen Penyusunan Muatan Lokal Pendidikan khusus	1 dok	Dinas Pendidikan

NO	RKPD 2021							
	Prioritas Pembangunan	Strategi		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah		Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*		*4*		*5*	*6*	*7*
					Sub Kegiatan Pelatihan Penyusu-nan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah dokumen Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus	1	Dinas Pendidikan
				3	**Program Bahasa Dan Sastra**	**Persentase minat siswa terhadap bahasa dan sastra**	**70%**	**Dinas Pendidikan**
					Kegiatan pembinaan, pengembangan dan perlindungan bahasa dan sastra yang penuturannya lintas daerah kab/kota dalam satu daerah provinsi	Jumlah buku/kamus yang disusun	2 jenis	Dinas Pendidikan
					Sub Kegiatan koordinasi penyusunan kamus bahasa daerah	Jumlah / jenis buku yang dicetak dan distribusi	2 jenis	Dinas Pendidikan
					Kegiatan pembinaan, pengembangan dan perlindungan bahasa dan sastra yang penuturannya lintas daerah kab/kota dalam satu daerah provinsi	Jumlah siswa yang berminat mengikuti lomba	50 Orang	Dinas Pendidikan
					Sub Kegiatan peningkatan apresiasi siswa terhadap bahasa dan sastra daerah kewenangan provinsi	Jumlah / jenis buku yang dicetak dan distribusi	4 judul	Dinas Pendidikan
						Jumlah siswa yang mengikuti lomba	50 Orang	Dinas Pendidikan
6	**PEMBANGUNAN KESEHATAN**	**1**	**Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat**	**1**	**Program: Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	**Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi Minimal Utama**	**30 %**	**Dinas Kesehatan**
						Persentase Peningka-tan Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan	10 %	Dinas Kesehatan
						Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Memakai Sistem Informasi Kesehatan yang Dipersyaratkan	50 %	Dinas Kesehatan
						Persentase Pencegah-an dan Pengendalian Penyakit	80 %	Dinas Kesehatan
						Persentase Status Kesehatan Masyarakat	76,45 %	Dinas Kesehatan
						Persentase Pelaksana-an Sinkronisasi Pene-rapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	100 %	Dinas Kesehatan
						Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Menggunakan Sistem Informasi Kesehatan yang Dipersyaratkan	50 %	Dinas Kesehatan
					Kegiatan: Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana untuk UKM Rujukan	64 %	Dinas Kesehatan

NO	RKPD 2021							
	Prioritas Pembangunan	Strategi		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah		Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*		*4*		*5*	*6*	*7*
						Persentase penyedia-an sarana dan prasarana labora-torium kesehatan		Dinas Kesehatan
						Jumlah Kabupaten/ Kota yang Menyediakan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	4 Kabupaten/ Kota	Dinas Kesehatan
						Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat dan Vaksin Essensial	90 %	Dinas Kesehatan
						Prevalensi Kekuran-gan Gizi pada Anak Balita		Dinas Kesehatan
						Persentase kabupaten /kota yang menjalankan kesehat-an kerja dan olahraga	73 %	Dinas Kesehatan
						persentase kabupaten /kota yang memiliki kualitas lingkungan sehat	75 %	Dinas Kesehatan
						Persentase Kab/kota yang melaksanakan minimal 3 Tema Kompanye Germas	65 %	Dinas Kesehatan
						Jumlah Kecamatan yang Memiliki Minimal 1 Puskesmas yang Ter-sertifikasi Akreditasi	47 Kecamatan	Dinas Kesehatan
						Persentase Puskesmas yang Melakukan Pelayanan Penyakit Menular dan Tidak Menular	80 %	Dinas Kesehatan
						Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza	60 %	Dinas Kesehatan
						Persentase Kepeserta-an JKN	81 %	Dinas Kesehatan
						Persentase pelaksana-an sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/ Kota	100 %	Dinas Kesehatan
						Jumlah Penerbitan Rekomendasi Perijin-an Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	10 Rekomendasi	Dinas Kesehatan
						Jumlah fasilitas kesehatan yang terakreditasi	89	Dinas Kesehatan
						Persentase pelaksana-an penelitian kesehatan	100 %	Dinas Kesehatan
					Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan	Jumlah Kabupaten yang dilayani Pelayanan Kesehatan Bergerak	2 Kabupa-ten	Dinas Kesehatan

NO	RKPD 2021					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
			Berbasis Telemedicine, dll)			
			Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan alat kalibrasi	4 paket	Dinas Kesehatan
			Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	Jumlah Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	5 paket	Dinas Kesehatan
			Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/ Peralatan Laboratorium Kesehatan	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	1 paket	Dinas Kesehatan
			Penyediaan Tele-medicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan Pelayanan Telemedicine	5 fasilitas pelayanan kesehatan	Dinas Kesehatan
			Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman Serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman Serta Fasilitas Kesehatan Lainnya ke kabupaten/kota	7 kabupaten/ kota	Dinas Kesehatan
			Kegiatan: Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Pelaksana-an Kegiatan Surveilans, Imunisasi dan Krisis Kesehatan	80 %	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelaya-nan Kesehatan bagi Penduduk Ter-dampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/ Atau Berpotensi Bencana	Persentase Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	100 %	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persentase Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	100 %	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayan-an Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Kab/Kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan Ibu dan Anak	3 kabupaten/kota	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayan-an Kesehatan Usia Produktif	Jumlah Kab/Kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan usia reproduksi	3 kota	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Jumlah Kab/Kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan usia lansia	4 kab/kota	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Kab/Kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan Gizi Masyarakat	4 kab/kota	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah dokumen laporan Kegiatan	2 dok	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelaya-nan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen laporan Kegiatan	4 dok	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelaya-nan Promosi Kesehatan	Jumlah bahan informasi kesehatan untuk upaya promotif dan preventif	4 paket	Dinas Kesehatan

NO	RKPD 2021						
	Prioritas Pembangunan	Strategi		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	2	3		4	5	6	7
				Pengelolaan Pelaya-nan Kesehatan Tradi-sional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya Tidak Menular	Kabupaten/kota yang melaksanakan pelaya-nan kesehatan tradisional.	7 kabupaten/kota	Dinas Kesehatan
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Kab/ kota yang melakukan pelayanan pengen-dalian penyakit menular dan tidak menular	6 kabupaten/kota	Dinas Kesehatan
					Jumlah pelayanan pemeriksaan labora-torium kesehatan yang terlayani	2600 sampel	Dinas Kesehatan
				Pengelolaan Pelaya-nan Kesehatan Haji	Persentase Kab/Kota yang melaksanakan pemeriksaan & pembinaan pelayanan kesehatan haji sesuai standar	100 %	Dinas Kesehatan
				Pengelolaan Pelaya-nan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	85 %	Dinas Kesehatan
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	Jumlah Puskesmas yang melakukan upaya pencegahan dan pengendalian masalah NAPZA	10 Puskesmas	Dinas Kesehatan
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Jumlah Puskesmas, UTDRS dan Kab/ Kota Yang melakukan kerja sama Program pelayanan Darah	64 Puskesmas	Dinas Kesehatan
				Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentase masyarakat yang mempunyai jaminan kesehatan baik mandiri maupun yang dibiayai oleh pemerintah	81 %	Dinas Kesehatan
				Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase kewaspa-daan dini dengan sinyal alert pada sistem SKDR yang direspon	85 %	Dinas Kesehatan
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/ Kota	Jumlah dok kesepakatan koor-dinasi dan sinkronisasi penerapan SPM Kab/kota	7 dok	Dinas Kesehatan
				Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah PKM yang melakukan upaya perubahan Indeks Keluarga Sehat pada Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK), Puskesmas Ramah Anak	64 puskesmas	Dinas Kesehatan
				Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi	Jumlah Kabupaten/ Kota yang mengajukan Kelayakan, Registrasi dan	7 kabupaten/kota	Dinas Kesehatan

NO	RKPD 2021					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
			Puskesmas	Registrasi Ulang Puskesmas		
			Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Persentase investigasi yang dilakukan terhadap kasus Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi yang muncul di kabupaten/ kota	90 %	Dinas Kesehatan
			Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Persentase pasien yang terlayani pelayanan kegawat daruratan	80 %	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan Pengelolaan Rujuk dan Rujuk Balik melalui Sisrute yang berbasis Kompetensi	6 rumah sakit	Dinas Kesehatan
			Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Persentase Pengam-bilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) yang diambil dan dikirim ke Lab Rujukan/Nasional untuk konfirmasi laboratorium	95 %	Dinas Kesehatan
			Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	Persentase Kegiatan Upaya pengurangan risiko Krisis Kesehatan Akibat Bencana /dan atau Berpotensi Bencana	80 %	Dinas Kesehatan
			Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah kabupaten/ kota yang dilakukan pendampingan	5 kabupaten/kota	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Jumlah laporan penelitian kesehatan	1 laporan	Dinas Kesehatan
			Penilaian/Appraisal Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Pasca Bencana	Persentase Penilaian /Appraisal Sarana Prasarana alat Kesehatan Pasca Bencana	70 %	Dinas Kesehatan
			Kegiatan: Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Kabupaten/kota yang melaksanakan SIK	42,9 %	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah laporan data dan informasi yang dihasilkan	3 dokumen	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah kabupaten/ kota yang fasyankesnya melaksanakan Sistem Informasi Kesehatan yang disyaratkan	3 kabupaten/kota	Dinas Kesehatan
			Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah paket Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	1 paket	Dinas Kesehatan
			Kegiatan: Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Penerbitan Rekomendasi Perijinan Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	10 Rekomendasi	Dinas Kesehatan
				Jumlah fasilitas kesehatan yang ter-akreditasi	890	Dinas Kesehatan

NO	RKPD 2021							
	Prioritas Pembangunan	Strategi		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah		Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*		*4*		*5*	*6*	*7*
					Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Rumah Sakit yang dilakukan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak lanjut Perizinan Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	12 fasilitas pelayanan kesehatan	Dinas Kesehatan
					Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang mengimplementasikan Tata Kelola RS Sesuai standart Akreditasi	19 rumah sakit	Dinas Kesehatan
					Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Persentase fasilitas kesehatan (Klinik Pratama, puskesmas dan RS) yang terakreditasi minimal tingkat utama	35 %	Dinas Kesehatan
				2	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan**	**Persentase Tenaga Kesehatan yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi**	**80 %**	**Dinas Kesehatan**
					Kegiatan: Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Jumlah SDMK yang terpenuhi kebutuhan kompetensinya	120 Orang	Dinas Kesehatan
					Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah SDM Kesehatan yang terpenuhi kebutuhan kompetensinya melalui Pendidikan dan Pelatihan	120 Orang	Dinas Kesehatan
					Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Data Kebutuhan SDM kesehatan di Provinsi dan 7 Kabupaten/ Kota	17 Dokumen	Dinas Kesehatan
					Kegiatan: Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	292 Orang	Dinas Kesehatan
					Peningkatan Kompe-tensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	jumlah SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya melalui pendidikan tugas belajar dan uji kompetensi	257 Orang	Dinas Kesehatan
					Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah SDM Kesehatan yang mengikuti pemilihan tenaga kesehatan teladan, monitoring dan evaluasi tenaga kesehatan peserta PIDI, Nusantara Sehat	35 Orang	Dinas Kesehatan
				3	**Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman**	**Persentase Sediaan Farasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman yang Memenuhi Syarat**	**45 %**	**Dinas Kesehatan**
					Kegiatan: Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	Persentase PBF cabang dan cabang PAK yang memenuhi persyaratan	50 %	Dinas Kesehatan
					Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengaku-an PBF Cabang dan Cabang Pak	Jumlah PBF cabang dan cabang PAK yang dilakukan pengendalian dan pengawasan	1000	Dinas Kesehatan

NO	RKPD 2021							
	Prioritas Pembangunan	Strategi		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah		Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*		*4*		*5*	*6*	*7*
					Penyediaan dan pengelolaan Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK Berbasis Elektronik	Jumlah perizinan PBFcabang dan cabang PAK berbasis elektronik	1000	Dinas Kesehatan
					Kegiatan: Penerbitan izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Persentase Usaha Kecil Obat Tradisional yang dilakukan pengendalian dan pengawasan	42,9 %	Dinas Kesehatan
					Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pener-bitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang dilakukan pengenda-lian dan pengawasan	3	Dinas Kesehatan
					Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin UKOT Berbasis Elektronik	Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang dilakukan pengendalian dan pengawasan	2	Dinas Kesehatan
				4	**Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan**	**Persentase Posyandu Aktif**	**63 %**	**Dinas Kesehatan**
					Advokasi, Pemberdayaan, Ke-mitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Persentase kebijakan yang mendukung Germas di Kab/kota	45 %	Dinas Kesehatan
					Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Peserta Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Peng-galangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	440 Orang	Dinas Kesehatan
					Kegiatan: Pelaksanaan Komu-nikasi Informasi dan Edukasi (KIE) perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Kab/kota yang melaksanakan survey PHBS	65 %	Dinas Kesehatan
					Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah peserta Kegiatan Penyeleng-garaan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1590 Orang	Dinas Kesehatan
					Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Ber-sumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	Persentase kab/kota yang meleksanakan pembinaan posyandu aktif	60 %	Dinas Kesehatan
					Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Persentase kab/kota yang meleksanakan pembinaan posyandu aktif	60 %	Dinas Kesehatan
						Jumlah peserta yang mengikuti Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	100 Orang	Dinas Kesehatan
		2	**Peningkatan Pelayanaan Kesehatan Masyarakat**	**1**	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	**Persentase Pelaya-nan, sarana dan prasarana yang tersedia di rumah Sakit**	**80 %**	**RSUP**
					Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat	Jumlah Fasilitas Pelayanan,Sarana,Prasar ana dan Alat Kesehatan	1 Paket	RSUP

NO	RKPD 2021					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
			Kesehatan untuk UKP Rujukan,UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	di Rumah Sakit		
			Sub Kegiatan: Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Pengembangan Pelayanan Rumah Sakit	2 Paket	RSUP
				Jumlah Kemitraan Pelayanann Rumah Sakit	6 Kemitraan	RSUP
			Sub Kegiatan: Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik	Jumlah pengadaan alat kesehatan (DAK)	1 Paket	RSUP
				Jumlah pengadaan alat kesehatan	1 Paket	RSUP
			Sub Kegiatan: Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah sarana yang tersedia di Rumah sakit	5 Paket	RSUP
			Sub Kegiatan: Pengadaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Pengadaan Prasarana Keperawatan	2 Paket	RSUP
			Sub Kegiatan: Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Persentase Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	80 %	RSUP
			Sub Kegiatan: Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit (Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan)	Jumlah Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	3 Paket	RSUP
				Jumlah paket pengadaan loundry	1 Paket	RSUP
			Sub Kegiatan: Pemeliharaan Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan kesehatan	Persentase Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	80 %	RSUP
			Sub Kegiatan : Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Persentase Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan	80 %	RSUP
			Sub Kegiatan Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Persentase Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Rumah Sakit	80 %	RSUP
			Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan		RSUP
			Sub Kegiatan: Operasional Pelaya-nan Rumah Sakit (BLUD)	Jumlah operasional Pelayanan Rumah Sakit	3 Paket	RSUP
			Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan		RSUP
			Sub Kegiatan: Pengadaan Alat/ Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Aplikasi Asuhan Keperawatan Terintegrasi	2 Aplikasi Keperawatan	RSUP

NO	RKPD 2021						
	Prioritas Pembangunan	Strategi		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah		Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*		*4*		*5*	*6*	*7*
					Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan		RSUP
					Sub Kegiatan: Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah SOP Keperawatan	1 Paket,1 Laporan	RSUP
						Jumlah Standar Asuhan Keperawatan	1 Paket,1 Laporan	RSUP
						Jumlah Dokumen Evaluasi Standar Pelayanan Teknis Keperawatan	1 Paket,1 Laporan	RSUP
						Jumlah Dokumen Perencanaan perbaikan strategis (PPS) yang dihasilkan dibagi dengan total kebutuhan PPS	Perencananan Perbaikan Strategis (PPS) Survei Verifikasi Pertama 16 Dokumen	RSUP
				2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya manusia Kesehatan	80 %	RSUP
					Kegiatan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Jumlah Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Paket	RSUP
					Sub Kegiatan : Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terpenuhinya Sumber daya manusia kesehatan sesuai Kebutuhan	100 %	RSUP
					Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetisi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetisi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan		RSUP
					Sub Kegiatan: Peningkatan Kompetisi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Keperawatan	1 Paket	RSUP
						Jumlah Pengembangan Kepribadian Keperawatan	1 Paket	RSUP
						Jumlah In House Traning Keperawatan	1 Paket	RSUP
					Sub Kegiatan: Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Pembinaan Etika Keperawatan	1 Paket	RSUP
						Jumlah Audit Keperawatan	1 Paket	RSUP
						Jumlah Penilai Perawat dan Bidan Teladan	1 Paket	RSUP
				3	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat			**RSJ**

NO	RKPD 2021						
	Prioritas Pembangunan	Strategi		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*
				Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana Prasarana Dan A;At Kesehatan Untuk Ukp Rujukan, Ukm Dan Ukm Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			RSJ
				Sub Kegiatan: Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah ruang rawat inap yang dibangun		RSJ
				Sub Kegiatan: Pengembangan Rumah Sakit (DAK)	Jumlah gedung rawat jalan sesuai standar		RSJ
				Sub Kegiatan: Rehabilitasi dan Peme;iharaan Rumah Sakit	Jumlah bangunan rumah sakit yang direhabilitasi		RSJ
				Sub Kegiatan: Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang dibeli		RSJ
				Sub Kegiatan : Pengadaan Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan(DAK)	Jumlah alat CSSD yang dibeli		RSJ
				Sub Kegiatan: Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah alat kesehatan yang terkalibrasi		RSJ
				Sub Kegiatan : Pengadaan Bahan habis pakai lainnya (Sprei, Handuk dam habis pakai lainnya)	Jumlah sprei, handuk dan pakaian habis pakai yang dibeli		RSJ
				Sub Kegiatan : Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan /Peralatan Labora-torium Kesehatan	Jumlah alat kesehatan /Peralatan Laboratorium yang dibeli dan terpelihara		RSJ
				Sub Kegiatan : Pemeliharaan alat kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara		RSJ
				Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Pelayanan kesehatan terhadap Upaya Kesehatan Masyarakat ,Perorangan dan rujukan pada rumah sakit jiwa		RSJ
				Sub Kegiatan: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Limbah Rumah Sakit yang dikelola selama 1 tahun		RSJ

NO	RKPD 2021						
	Prioritas Pembangunan	Strategi		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah		Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*		*4*		*5*	*6*	*7*
					Sub Kegiatan: Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah sekolah mendapat penyuluhan		RSJ
					Sub Kegiatan: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan masalah kesehatan jiwa (ODMK)	Jumlah Standar Pelayanan medis dan penunjang medis, praktik klinis, penyusunan SOP, Penyusunan Standar Kepuasan Masyarakat, Jambore Nasional kesehata jiwa, dan Penjan gkauan bebas pasung yang dilaksanakan, discharge planning		RSJ
					Sub Kegiatan: Pengelolaan Pelayanan orang dengan kecanduan NAPZA	Jumlah Pasien yang mendapat Pelayanan Rehabilitasi Mental Sosial dan NAPZA		RSJ
					Sub Kegiatan : Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Pelayanan Rumah Sakit yang menggunakan Dana BLUD		RSJ
					Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B Dan Fasilitas Pelaya-nan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase peningkatan layanan rumah sakit		RSJ
					Sub Kegiatan : Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Pelayanan dengan fasilitas kesehatan		RSJ
				4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan			RSJ
					Kegiatan Pengembangan Mutu Dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi SDM kesehatan tingkat daerah provinsi		RSJ
					Sub Kegiatan: Peningkatan Kompetensi dan kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Kompetensi dan kualifikasi sumber daya manusia kesehatan yang dilasanakan		RSJ
					Sub Kegiatan : Pembinaan dan pengawasan Sumber Daya Manusia	Persentase pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi SDM kesehatan tingkat daerah provinsi		RSJ
					Kegiatan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk Ukm Dan Ukp Provinsi	Persentase sumber daya kesehatan untuk ukm dan ukp provinsi		RSJ
					Sub Kegiatan : Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan yang dibutuhkan sesuai standar rumah sakit kelas A		RSJ

Sedangkan Prioritas Pembangunan II (Penunjang) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021, yaitu:

Gambar IV.3
Prioritas Pembangunan Daerah II (Penunjang) Tahun 2021



1. PENGEMBANGAN TATA KELOLA PERTAMBANGAN

Fokus kegiatan pada zonasi atau wilayah khusus pengelolaan yang dibagi secara proporsional dan berkelanjutan. Menimbang Tambang konvensional dan Tambang Rakyat menjadi pemasukan utama bagi Babel. Maka, zonasi bagi Wilayah Penambangan Rakyat (WPR) perlu diwujudkan dan diawasi secara cermat; Pembayaran dan Pengelolaan CSR Timah secara terpadu dan berkeadilan bagi seluruh perusahaan timah yang beroperasi. Sehingga, pemanfaatannya lebih jelas terutama untuk rehabilitasi lahan yang rusak dan dana tanggap bencana.

2. PENGEMBANGAN ENERGI DAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN

Fokus kegiatan pada pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur secara rutin, jalan penghubung antar kabupaten yang menjadi tanggung jawab Gubernur harus dibangun dengan kondisi baik sehingga arus barang, jasa dan manusia bisa optimal; Pembangunan pelabuhan Batu Beriga dan jembatan penghubung antara pulau Bangka-Belitung untuk menyeimbangkan sektor pariwisata kedua daerah; Pembangunan Masjid Terapung sebagai ikon baru Bangka Belitung sekaligus implementasi masyarakat melayu religius dan pengembangan sektor wisata unggulan; Pembanguan Museum GMT di Bangka dan Belitung untuk mendokumentasikan peristiwa alam tersebut secara lengkap sekaligus menguatkan *brand* babel sebagai tempat GMT paling bersejarah; Meningkatkan status bandara Depati Amir (Bangka Tengah) dan HAS Hanandjoedin (Belitung) sebagai bandara udara internasional dalam rangka mendukung Provisi Bangka Belitung sebagai destinasi pariwisata level Internasional; Melakukan inisiasi koordinatif yang intensif antara Provinsi Babel, kementerian ESDM, PLN dan Investor swasta dalam membangun

PLTU sehingga PLTU di Babel bisa segera direalisasiskan untuk membangun kemandiriaan energi;

3. PEMBANGUNAN SOSIAL

Fokus kegiatan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin melalui pemberian bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Beasiswa miskin, Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-PBI); Peningkatkan pendapatan masyarakat miskin; Peningkatan keadilan dan kesetaraan gender; Peningkatan pelayanan terhadap pemberian hak-hak anak melalui program Provinsi Layak Anak (Provila); Pengendalian tingkat kelahiran penduduk dan perpindahan penduduk untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang; Peningkatan keadilan dan kesetaraan gender; Peningkatan prestasi dan peran serta masyarakat dalam berolah raga; Peningkatan Insan pemuda yang mandiri dan berprestasi melalui berbagai event olahraga baik tingkat Nasional maupun Regional.

4. PENINGKATAN TATA KELOLA BIROKRASI DAN PELAYANAAN PUBLIK

Fokus kegiatan dengan Nongkrong Bareng ("Nobar") program rutin bersama Perangkat Daerah, Wakil Gubernur, Bupati/Walikota untuk memudahkan komunikasi dan koordinasi yang sebelumnya tidak terjalin dengan baik. Melalui kumpul di dunia nyata (Kantor, Restoran, warung, dsb) dan maya (*WhatsApps Groups* atau BBM Groups); Babel sebagai provinsi dengan integrasi pelayanaan publik yang memberi kemudahan kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan teknologi (*smart city*); Mengutakan sistem pelayanaan publik yang mudah dan cepat, sehingga waktu pengurusan izin dan adminstrasi kependudukan menjadi lebih ringkas; Mempermudah pelayanaan dengan berbagi perangkat teknologi yang terintegrasi seperti email, website, sosial media, aplikasi dan lainnya; Reformasi birokrasi berbasis kompetensi (*meritokrasi*) yaitu dengan proses promosi jabatan di pemprov melalui *fit and proper test* dengan lelang jabatan.

5. PEMBANGUNAN BERDEMOKRASI

Fokus kegiatan mengoptimlakan pembutan perda inisiatif dewan; mendorong keterwakilan perempuan dalam lembaga politik; meningkatkan kebebasan sipil masyarakat; meningkatkan hak politik masyarakat; meningkatkan pembinaan lembaga demokrasi.

6. PENINGKATAN PEMBANGUNAN BIDANG KEBENCANAAN

Fokus kegiatan pengalokasian anggaran tanggap bencana utamanya kebakaran hutan dan banjir, agar pemerintah provinsi lebih baik dan bertanggung jawab dalam merespon dan menanggulanginya. Baik pada saat sebelum bencana, saat bencana dan pasca bencana.

7. PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP

Fokus kegiatan pengendalian terhadap kualitas air, udara serta tutupan lahah; pengendalian terhadap efek Gas Rumah Kaca.

Tabel IV.7
Keterkaitan antara Prioritas Pembangunan Daerah Penunjang dengan Indikator Sasaran dan Strategi Pembangunan pada RKPD 2021

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN		STRATEGI	
1	*2*	*3*		*4*	
1	Pengembangan Tata Kelola Pertambangan	1	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertambangan Dan Energi	1	Meningkatkan produk-si dan nilai tambah sumber daya mineral yang berwawasan lingkungan
				2	Peningkatan ketersedia-an energi listrik masyarakat
		1	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Dan Perdagangan	1	Pengembangan Kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu (KIPT) Tanjung Ular
				2	Pengembangan Kawasan Strategis Industri Sadai
				3	Peningkatan tata kelola industri
				4	Peningkatan tata kelola perdagangan
2	Pengembangan Energi Dan Infrastruktur Kewilayahan	1	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	1	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum
				2	Peningkatan kese-suaian pembangunan infrastruktur dengan tata ruang
				3	Peningkatan ketersediaan dan kapasitas SDM Konstruksi
		2	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Dasar	1	Peningkatan, pemeli-haraan dan pembangunan infra-struktur perumahan dan permukiman
		3	Indeks Ketersediaan Infrastruktur Perhubungan	1	Peningkatan, pemeli-haraan dan pem-bangunan sarana pra-sarana perhubungan
3	Pembangunan Sosial	1	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	1	Peningkatan pelayanan terhadap pemberian hak-hak anak
		2	Laju Pertumbuhan Penduduk	1	Pengendalian tingkat kelahiran penduduk dan perpindahan penduduk untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang
		3	Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)	1	Menekan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak
				2	Peningkatan keadilan dan kesetaraan gender
		4	Indeks Pembangunan Pemuda	1	Peningkatan insan pemuda yang mandiri dan berprestasi
		5	Indeks Pembangunan Olah Raga	1	Peningkatan prestasi dan peran serta masyarakat dalam berolah raga
4	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	1	Indeks Reformasi Birokrasi	1	Meningkatkan tata kelola aset dan laporan keuangan daerah
				2	Meningkatkan Tata kelola pengawasan
				3	Peningkatan kese-larasan antar dokumen perencana-an, penganggaran dan pelaporan

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN		STRATEGI	
1	*2*	*3*		*4*	
				4	Peningkatan tata lakasana dan kinerja pemerintah daerah
				5	Pengembangan Daerah Otonomi Baru (DOB)
				6	Peningkatan penataan peraturan perundang-an dan kebijakan daerah
				7	Peningkatan transpa-ransi pengadaan barang dan jasa
				8	Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik
				9	Peningkatan kualitas pelayanaan publik dengan memberikan pelayanan yang cepat, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi
				10	Peningkatan kompe-tensi dan profesional ASN
5	Pembangunaan Berdemokrasi	1	Nilai Kebebasan Sipil	1	Peningkatan peran serta masyarakat dalam berdemokrasi
		2	Nilai Hak-Hak Politik	1	Peningkatan pelaya-nan terhadap hak-hak politik masyarakat
				2	Peningkatan penye-lenggaraan ketertiban umum & ketentraman masyarakat, penegak-an perda serta perlindungan masyarakat (Linmas)
		3	Nilai Kelembagaan Demokrasi	1	Peningkatan pengem-bangan lembaga-lembaga demokrasi
6	Peningkatan Pembangunan Bidang Kebencanaan	1	Indeks Kapasitas Bencana Daerah	1	Peningkatan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana
				2	Peningkatan Pengelo-laan kawasan rawan bencana alam
				3	Peningkatan penataan hilir dan hulu daerah rawan bencana Teluk Bayur
7	Pengendalian Lingkungan Hidup	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	1	Peningkatan pengen-dalian terhadap kualitas air sungai
				2	Peningkatan pengen-dalian terhadap kualitas udara
				3	Peningkatan pengen-dalian dan penga-wasan hutan
				4	Peningkatan tata kelola kehutanan
				5	Peningkatan peman-faatan kawasan hutan
				6	Peningkatan penge-lolaan lingkungan yang berkelanjutan

Keselarasan antara Prioritas Pembangunan daerah II (penunjang) dengan arah kebijakan serta dukungan program perangkat daerah untuk tahun 2021 dapat dilihat pada tabel IV.7 di bawah ini.

Tabel IV.7
Arah Kebijakan dan Program Prioritas
yang mendukung Prioritas Pembangunan II (penunjang) RKPD 2021

NO	RKPD 2021							
	Prioritas Pembangunan	Strategi		Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah		Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*		*4*		*5*	*6*	*7*
1	**PENGEMBANGAN TATA KELOLA PERTAMBANGAN**	**1**	**Meningkatkan produksi dan nilai tambah sumber daya mineral yang berwawasan lingkungan**	**1**	**Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara**	**Penambangan yang baik**		**DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**
					Kegiatan 1. Penetapan Izin Usaha Pertam-bangan Mineral Logam, Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut	Jumlah Dokumen	3 Dokumen	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
					Kegiatan 2. Penatausahaan Izin Usaha Pertam-bangan Mineral Logam, Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut	Jumlah Dokumen	3 Dok	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
					Kegiatan 3. Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha	Jumlah WIUP	250 WIUP	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	RKPD 2021					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
			Pertam-bangan Mineral Logam dan Batubara dalam Rangka Penana-man Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah.			
			Kegiatan 4. Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut.	Jumlah IUP	250 IUP OP	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
			Kegiatan 5. Pengawasan Teknis kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut.	Jumlah IUP	250 IUP OP	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	RKPD 2021					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
			Kegiatan 1. Penetapan Prosedur dan Pesyaratan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat .	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
			Kegiatan 2. Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat.	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
			Kegiatan 3. Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Jumlah IPR	10 IPR	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
			Kegiatan 4. Pelaksanaan reklamasi dan pascatambang bersama pemegang Izin Pertambangan rakyat (IPR)	Jumlah Reklamasi IPR	10 IPR	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
			2 Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	**Penataan Pengelolaan Kegeologian**		**DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**
			Kegiatan 1. Penyusunan Rekomendasi	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA

NO	RKPD 2021							
	Prioritas Pembangunan	Strategi		Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah		Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*		*4*		*5*	*6*	*7*
					Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah.			MINERAL
					Kegiatan 2. Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah.	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
					Kegiatan 1. Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
				3	**Program Pengelolaan Energi Terbarukan**	**Persentase pembaruan**		**DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**
					Kegiatan 1. Pembinaan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun.	Jumlah Perusahaan	5 Perusahaan	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
					Kegiatan 2. Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun.	Jumlah Perusahaan	5 Perusahaan	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
		2	**Peningkatan ketersedian energi listrik masyarakat**	**1**	**Program Pengelolaan Ketenagalistrikan**	**Rasio elektrifikasi**		**DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

NO	RKPD 2021					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
			Kegiatan 1. Penetapan Prosedur dan Pesyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi.	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
			Kegiatan 2. Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi.	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
			Kegiatan 3. Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi.	Jumlah Perusahaan	30 Perusahaan	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
			Kegiatan 1. Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu.	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
			Kegiatan 2. Penetapan Penerima Manfaat Dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu.	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
			Kegiatan 3. Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran Untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu.	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
			Kegiatan 4. Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pem-bangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	RKPD 2021							
	Prioritas Pembangunan	Strategi		Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah		Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*		*4*		*5*	*6*	*7*
					Ber-kembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan.			
					Kegiatan 5. Koordinasi dan Sinkronisasi Pen-yediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan.	Jumlah Desa	10 Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
					Kegiatan 6. Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Ber-kembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan.	Jumlah Desa	10 Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
		3	**Peningkatan Tata Kelola Industri**	**1**	**Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri**	**Persentase pertumbuhan jumlah industri**	**5,24**	**DISPERINDAG**
					Penyusunan dan Evaluasi Rencana pembangunan Industri Provinsi	Persentase pertumbuhan tenaga kerja industri	2	DISPERINDAG
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pe-nyusunan Kebijak-an dalam Rangka Mendukung Pe-nguatan Industri Nasional dan Perwilayahan Industri	Dokumen Perencanaan pengembangan kawasan industri	1	DISPERINDAG
						Jumlah IKM OVOP yang dibina	26	DISPERINDAG
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pelak-sanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Produk Industri yang bersertifikat Uji Nutrisi dan HKI	150	DISPERINDAG
						Jumlah Tenaga Kerja berser-tifikat Penyulu-han Keamanan Pangan (PKP)	400	DISPERINDAG
						Jumlah Pelaku Industri yang terfasilitasi Kemasan Produk Industri	450	DISPERINDAG

NO	RKPD 2021						
	Prioritas Pembangunan	Strategi		Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah		Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*		*4*		*5*	*6*	*7*
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pelak-sanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Kelom-pok Industri yang terfasilitasi Teknologi Tepat Guna	3	DISPERINDAG
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pelak-sanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Pelaku Industri yang terfasilitasi Dekranasda	500	DISPERINDAG
						Jumlah SDM Indutsri yang terlatih	170	DISPERINDAG
					Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Laporan Evaluasi	1	DISPERINDAG
				2	**Program Pengen-dalian Izin Usaha Industri**	**Persentase Verifikasi Teknis**	**50**	**DISPERINDAG**
					Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI)Kewenangan Provinsi	Persentase Industri yang sesuai Izin Usaha Industri	33,33	DISPERINDAG
					Fasilitasi Peme-nuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Pro-vinsi dalam Sistem Pelayanan Per-izinan Ber-usaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah IUI, IPUI yang diawasi	55	DISPERINDAG
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan provinsi	Jumlah Industri yang diawasi	50	DISPERINDAG
				3	**Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional**	**Tersedianya informasi industri secara lengkap di SIINAS**	**2**	**DISPERINDAG**

NO	RKPD 2021							
	Prioritas Pembangunan	Strategi		Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah		Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*		*4*		*5*	*6*	*7*
					Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Persentase Industri yang menyampaikan informasi industri secara lengkap	60	DISPERINDAG
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah Industri Yang Terdaftar di SINAS	25	DISPERINDAG
		4	**Peningkatan Tata Kelola Perdagangan**	**1**	**Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan**	**Persentase Ketaatan Pelaku Usaha dalam tertib Niaga**	**2,14**	**DISPERINDAG**
					Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	Jumlah Pelaku Usaha Perdagangan B2 yang memiliki Perizinan Perdagangan	3	DISPERINDAG
					Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya	Jumlah Pemeriksaan	3	DISPERINDAG
					Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	Jumlah Pengawasan	7	DISPERINDAG
				2	**Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan**	**Jumlah DED**	**1**	**DISPERINDAG**
						Jumlah Sarana Perdagangan	0	DISPERINDAG
					Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta pasar lelang komoditas	Jumlah Dokumen	1	DISPERINDAG
						Jumlah Pusat Distribusi Provinsi	0	DISPERINDAG
					Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi	Jumlah Dokumen Rancangan DED	1	DISPERINDAG

NO	RKPD 2021						
	Prioritas Pembangunan	Strategi		Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah		Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*		*4*		*5*	*6*	*7*
					Provinsi			
						Tersedianya Bangunan	0	DISPERINDAG
					Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Pembinaan	5	DISPERINDAG
					Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	Jumlah Pelaksanaan Pasar Lelang	2	DISPERINDAG
				3	**Program Stabili-sasi Harga barang kebutuhan Pokok Dan Barang Penting**	**Tersedianya Bapokting**	**18**	**DISPERINDAG**
						Terkendalinya harga Bapokting	<11	DISPERINDAG
						Persentase Tersalurkannya Pupuk Bersubsidi	100	DISPERINDAG
					Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Ketersedian Barang Kebutuhan pokok dan barang Penting di gudang distributor	100	DISPERINDAG
					Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Koordinasi Barang Kebutuhan Pokok	4	DISPERINDAG
					Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Koordinasi Barang Kebutuhan Penting	4	DISPERINDAG
					Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kabupaten/ kota yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	Koevisien Variasi	<11	DISPERINDAG

NO	RKPD 2021						
	Prioritas Pembangunan	Strategi		Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah		Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*		*4*		*5*	*6*	*7*
					Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kab/Kota	Jumlah Pemantauan harga dan stok	84	DISPERINDAG
					Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Operasi Pasar	14	DISPERINDAG
					Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Jumlah Pelaku Usaha yang diawasi	11	DISPERINDAG
					Pemeriksaan Dokumen Perizinan Kegiatan Distribusi	Jumlah Pemeriksaan	11	DISPERINDAG
					Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Pengawasan	2	DISPERINDAG
					Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk bersubsidi	Jumlah Pengawasan	11	DISPERINDAG
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	Jumlah Koordinasi	4	DISPERINDAG
				4	**Program Pengembangan Ekspor**	**Nilai Ekspor Produk Non Migas (USD juta)**	**1800**	**DISPERINDAG**

NO	RKPD 2021					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
			Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Akses Pasar Ekspor	6	DISPERINDAG
				Jumlah SDM perdagangan yang terlatih	45	DISPERINDAG
			Pameran Dagang Internasional/ Nasional	Jumlah Partisipasi Pameran	3	DISPERINDAG
			Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pameran	1	DISPERINDAG
			Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Permintaan Dagang	2	DISPERINDAG
			Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Peserta Calon Eksportir	45	DISPERINDAG
			5 Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	**Indeks Keberdayaan Konsumen**	**40 (Mampu)**	**DISPERINDAG**
				Persentase Layanan Terstandarisasi	21,43	DISPERINDAG
			Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Konsumen yang teredukasi	640	DISPERINDAG
				Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen yang terbentuk	3	DISPERINDAG
			Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumlah Peserta	600	DISPERINDAG
			Peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen	Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen yang aktif	3	DISPERINDAG
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Jumlah Pengaduan	40	DISPERINDAG

NO	RKPD 2021					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
			Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota			DISPERINDAG
			Verifikasi Mutu Produk	Jumlah komoditi yang di verifikasi	3	DISPERINDAG
			Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah Produk yang di uji	200	DISPERINDAG
			Pengembangan Layanansertifikasi	Jumlah produk		DISPERINDAG
			Pengembangan Layanan Kalibrasi	Jumlah Alat yang dikalibrasi	25	DISPERINDAG
			Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Produk dan Peralatan yang tersertifikasi	90	DISPERINDAG
			Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa Sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah Peserta	150	DISPERINDAG
				Jumlah Pengawasan	14	DISPERINDAG
			Fasilitasi Penanganan Terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah fasilitasi penangan terhadap pelanggaran (kasus)	1	DISPERINDAG
			6 Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	**Persentase Pemasaran Produk Dalam Negeri**	**40**	**DISPERINDAG**
			Pelaksanaan Promosi Produk dalam Negeri	Jumlah Permintaan Dagang	2	DISPERINDAG
			Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah Fasilitasi	4	DISPERINDAG
			Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Produk yang Siap dipasarkan	50	DISPERINDAG

NO	RKPD 2021							
	Prioritas Pembangunan	Strategi		Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah		Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*		*4*		*5*	*6*	*7*
					Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah Fasilitasi Produk	200	DISPERINDAG
2	**PENGEMBANGAN ENERGI DAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN**	**1**	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum	**1**	**Program Penyelenggaraan Jalan**	**Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik**	**0,9656**	**DINAS PUPR**
					Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	96,56%	DINAS PUPR
					Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jaringan Jalan	Panjang Jalan yang terencana	1420 m	DINAS PUPR
					Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang terbangun	0,7 km	DINAS PUPR
					Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang dilebarkan	13 km	DINAS PUPR
					Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang jalan yang terpelihara	7,5 km	DINAS PUPR
					Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang fungsional jalan yang terpelihara	782,45 km	DINAS PUPR
					Penggantian Jembatan	Panjang jembatan yang diganti	10 m	DINAS PUPR
					Penggantian Jembatan Air Lanci		10 m	DINAS PUPR
					Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang jembatan yang terpelihara	3508,75 m	DINAS PUPR
				2	**Program Pengembangan Sumber Daya Air**	**Persentase peningkatan luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air**	**5,00**	**DINAS PUPR**
						Persentase Penyediaan Air Baku	1,60	DINAS PUPR
						Rasio Irigasi	50	DINAS PUPR
					Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air	5	DINAS PUPR
					Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir,	4 Dok	DINAS PUPR

NO	RKPD 2021					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
			Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai		
			Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang tanggul sungai yang terbangun (m)	6050	DINAS PUPR
			Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Bangunan Pengaman pantai yang terbangun	600 m	DINAS PUPR
			Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang bangunan pengaman pantai yang terehabilitasi	400 m	DINAS PUPR
			Rehabilitasi Pengaman pantai Desa Mentigi	Panjang bangunan pengaman pantai yang terehabilitasi	400 m	DINAS PUPR
			Normalisasi/Restorasi/Pemeliharaan Sungai	Panjang sungai/kanal banjir yang dinormalisasi	140 km	DINAS PUPR
			Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Air Baku	1,60%	DINAS PUPR
			Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	6 Dokumen	DINAS PUPR
			Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	DINAS PUPR
			Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA Wilayah Sungai Pulau Belitung	Jumlah Dokumen Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	1 Dok	DINAS PUPR

NO	RKPD 2021					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
			Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Luas Bangunan Penampung air	3,77Ha	DINAS PUPR
			Pembangunan Penampungan Sumber Air Baku Kolong Kerasak	Luas Bangunan Penampung air	3,77 Ha	DINAS PUPR
			Pembangunan Polder/Kolam Retensi	Luas bangunan polder/kolam retensi	6,15Ha	DINAS PUPR
			Penataan Kolong Retensi Grasi Sungailiat	Luas bangunan polder/kolam retensi	2,65 Ha	DINAS PUPR
			Pembangunan Kolam Retensi Sungai Muntok	Luas bangunan polder/kolam retensi	3,5 Ha	DINAS PUPR
			Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Irigasi	50%	DINAS PUPR
			Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	1 Dok	DINAS PUPR
			Perencanaan Dokumen Teknis Irigasi DI. Jeriji		1 Dok	DINAS PUPR
			Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang terbangun	2000 m	DINAS PUPR
			Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang irigasi rawa yang terbangun	1200 m	DINAS PUPR
			Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang di OP kan	13054 m	DINAS PUPR
			Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang jaringan irigasi rawa yang di OP kan	7400 m	DINAS PUPR
			Operasional Unit Pengelola Irigasi	Jumlah kelembagaan pengelola irigasi yang aktif	1 lembaga	DINAS PUPR
			Operasional Komisi Irigasi		1 Lembaga	DINAS PUPR

NO	RKPD 2021							
	Prioritas Pembangunan	Strategi		Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah		Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*		*4*		*5*	*6*	*7*
		2	**Peningkatan kesesuaian pembangunan infrastruktur dengan tata ruang**	**1**	**Program Penyelenggaraan Penataan Ruang**	**Persentase kesesuaian pengembangan infrastruktur wilayah dengan rencana tata ruang**	**83**	**DINAS PUPR**
					Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang provinsi			DINAS PUPR
					Pelaksanaan Per-setujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi	Jumlah rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan	1 RTRW	DINAS PUPR
					Pelaksanaan Per-setujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Provinsi	Jumlah rencana rinci tata ruang yang ditetapkan	2 RRTR	DINAS PUPR
					Sosialisasi Kebija-kan dan Peraturan Perundang-undang an Bidang Penataan ruang	Jumlah Sosialisasi Ke-bijakan dan Peraturan Per-undang-undang-an Bidang Penataan ruang	3 Sosialisasi	DINAS PUPR
					Kegiatan Koor-dinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi			DINAS PUPR
					Koordinasi dan sinkronisasi penertiban dan penegakan hukum bidang penataan ruang	Jumlah pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTRW Provinsi	35 Pelanggara n	DINAS PUPR
					Koordinasi pelaksanaan penataan ruang	Jumlah rekomendasi kesesuaian rencana tata ruang	16 Rekomend asi	DINAS PUPR
		3	**Peningkatan ketersediaan dan kapasitas SDM Konstruksi**	**1**	**Program Pengembangan Jasa Konstruksi**	**Rasio keterse-diaan penyeleng-garaan jasa konstruksi**	**96,09**	**DINAS PUPR**
					Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi	4 laporan	DINAS PUPR
					Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah tenaga konstruksi terlatih	150 orang	DINAS PUPR

NO	RKPD 2021							
	Prioritas Pembangunan	Strategi		Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah		Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*		*4*		*5*	*6*	*7*
					Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah tenaga konstruksi yang tersertifikat	90 orang	DINAS PUPR
					Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah asosiasi profesi dan badan usaha jasa konstruksi yang diberdayakan	20 lembaga	DINAS PUPR
					Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Kegiatan pelatihan tenaga ahli konstruksi yang ter-selenggara	7 Kegiatan	DINAS PUPR
					Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	2 Laporan	DINAS PUPR
					Penyelenggaraan pelatihan untuk peningkatan kapasitas administrator SIPJAKI	Jumlah administrator SIPJAKI yang terlatih	24 Orang	DINAS PUPR
					Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah data dan informasi Jasa Konstruksi yang tersedia	3 laporan	DINAS PUPR
		4	**Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur perumahan dan permukiman**	**1**	**Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum**	**persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak**	**74,65**	**DINAS PERKIM**
					Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga Yang terlayani akses air minum		DINAS PERKIM
					Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah dok perencanaan	1 Dok	DINAS PERKIM
				2	**Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional**	**persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan persampahan**	**15**	**DINAS PERKIM**

NO	RKPD 2021					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
			Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional			DINAS PERKIM
			Penyusunan Rencana,Kebijakan,Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Per-sampahan TPA/ TPST/SPA Kewe-nangan Provinsi			DINAS PERKIM
			3 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	**persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak**	**92,50**	**DINAS PERKIM**
			Kegiatan Pengelo-laan dan Pengem-bangan Sistem Air Limbah Domestik Regional			DINAS PERKIM
			Penyusunan Rencana,Kebijakan,Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik			DINAS PERKIM
			Penyediaan Tangki Septik			DINAS PERKIM
			Penyediaan Tangki Septik Individual (lokasi stunting)	Jumlah Rumah Tangga Terlayani	100 KK	DINAS PERKIM
			4 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Drainase	**Persentase panjang drainase dalam kondisi baik**	**28,50**	**DINAS PERKIM**
			Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai lintas Daerah kabupaten/Kota dan Kawasan strategis Provinsi			DINAS PERKIM
			Penyediaan Sistem Drainase perkotaan			DINAS PERKIM
			5 Program Pengembangan Permukiman	**Persentase Permukiman di KSP dalam kondisi baik**	**3,91**	**DINAS PERKIM**
			Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada			DINAS PERKIM

NO	RKPD 2021						
	Prioritas Pembangunan	Strategi		Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*
				Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi			
				Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi			DINAS PERKIM
				Perluasan Jaringan Perpipaan Distribusi KI Sadai	Jumlah Panjang Pipa Distribusi Terpasang	5000 m	DINAS PERKIM
				(Perluasan Jaringan Perpipaan di Kawasan KSPN)	Jumlah Panjang Pipa Distribusi Terpasang	8200 m	DINAS PERKIM
			6	**Program Penata-an Bangunan Dan Lingkungannya**	**Persentase Luas Kawasan yang Tertata**	**30**	**DINAS PERKIM**
				Kegiatan Penyele-nggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			DINAS PERKIM
				Penyusunan Rencana,Kebijakan,Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangun-an dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kab/Kota			DINAS PERKIM
				Penataan Bangunan dan Lingkungan			DINAS PERKIM
				Penataan Bangun-an dan Lingkungan Kota Muntok	Luas Kawasan yang tertata	2 Ha	DINAS PERKIM
				Penataan Bangun-an dan Lingkungan Monumen Pem-bentukan Provinsi	Luas Kawasan yang tertata	1 Ha	DINAS PERKIM
				Penataan RTH Kompleks per-kantoran Pemprov. Kep. Babel	Luas Kawasan yang tertata	0,4 Ha	DINAS PERKIM

NO	RKPD 2021							
	Prioritas Pembangunan	Strategi		Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah		Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*		*4*		*5*	*6*	*7*
				7	**Program Pengembangan Perumahan**	**Persentase rumah akibat bencana yang tertangani**	**100**	**DINAS PERKIM**
					Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi			DINAS PERKIM
					Indentifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi			DINAS PERKIM
				8	**Program Peningkatan Prasarana , Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)**	**Persentase Permukiman yang terfasiltasi oleh PSU**	**50**	**DINAS PERKIM**
					Penyediaan Prasarana ,Sarana,dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman			DINAS PERKIM
					Pembangunan Jalan Lingkungan	Panjang jalan lingkungan yang dibangun	2000 m	DINAS PERKIM
					Pembangunan Jalan Lingkungan	Panjang Jalan Lingkungan Yang dibangun	800 m	DINAS PERKIM
					Pembangunan Jalan Lingkungan	Panjang Jalan Lingkungan Yang dibangun	2500 m	DINAS PERKIM
					Pembangunan Drainase Permukiman	Panjang Drainase lingkungan yang terbangun	2000 m	DINAS PERKIM
					Pembangunan Jalan Lingkungan	Panjang Jalan Lingkungan Yang dibangun	700 m	DINAS PERKIM
					Pembangunan Drainase Permukiman	Panjang Drainase lingkungan yang terbangun	2000 m	DINAS PERKIM
					Pembangunan Drainase Permukiman	Panjang Drainase lingkungan yang terbangun	2000 m	DINAS PERKIM
		5	**Peningkatan, Pemeliharaan Dan Pembangunan Sarana Prasarana Perhubungan**	**1**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Prosentase Pemenuhan Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)**	**26,47**	**DINAS PERHUBUNGAN**

NO	RKPD 2021					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
			Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Prosentase Pemenuhan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	52,50	DINAS PERHUBUNGAN
			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Prosentase Perlengkapan yang tersedia	62	DINAS PERHUBUNGAN
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Prosentase Perlengkapan Jalan yang terehabililtas dan terpelihara	88	DINAS PERHUBUNGAN
			Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Persentase Pemenuhan Fasilitas terminal penumpang tipe B	1 unit	DINAS PERHUBUNGAN
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Terminal Type B	Persentase Pemenuhan kebutuhan Dokumen Perencanaan Pembangunan terminal Tipe B	1 dok	DINAS PERHUBUNGAN
			Pembangunan Gedung Terminal	Persentase Pemenuhn Gedung Terminal dan Fasilitas Terminal	100	DINAS PERHUBUNGAN
			Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Persentase Kinerja jaringan jalan provinsi.	85	DINAS PERHUBUNGAN
			Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Dokumen Manajemen Rekayasa Lalu Lintas	1 Dok	DINAS PERHUBUNGAN
			Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	Persentase bangkitan dan tarikan yang telah meiliki rekomendasi andalalin	60	DINAS PERHUBUNGAN
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Rekomendasi Penyelenggaraan Penilaian Analisis Dampak Lalu Lintas	4 Dok	DINAS PERHUBUNGAN
			Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Ruas Jalan Provinsi yang dilaksanakan audit dan inspeksi		DINAS PERHUBUNGAN
			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan	Prosentase Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang	85,71	DINAS PERHUBUNGAN

NO	RKPD 2021					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
			Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	terakreditasi		
			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Persentase penurunan pelanggaran lalu lintas	93	DINAS PERHUBUNGAN
				Persentase Angkutan Umum yang lulus ramp check	93	DINAS PERHUBUNGAN
				Persentase Angkutan yang laik jalan dalam rangka melayani Peringatan hari-hari daerah dan nasional	93	DINAS PERHUBUNGAN
				Persentase Balai Uji Kendaraan Bermotor yang telah memenuhi SOP Pengujian Kendaraan Bermotor	85	DINAS PERHUBUNGAN
				Persentase Awak Kendaraan Umum yang telah mengikuti AKUT tingkat Provinsi	35	DINAS PERHUBUNGAN
			Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa, Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Prosentase Ketersediaan Angkutan Umum	40	DINAS PERHUBUNGAN
			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pengadaan Bus Sekolah	2 unit	DINAS PERHUBUNGAN

NO	RKPD 2021						
	Prioritas Pembangunan	Strategi		Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah		Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*		*4*		*5*	*6*	*7*
					Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Jumlah Pengoperasian Bus Sekolah	2 unit	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah Rute/Trayek yang mendapatkan Subsidi aglomerasi	2 Trayek	DINAS PERHUBUNGAN
				2	**Program Pengelolaan Pelayaran**	**Prosentase Pemenuhan Infrastruktur Pelayaran**	**67**	**DINAS PERHUBUNGAN**
					Kegiatan Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Persentase Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	75	DINAS PERHUBUNGAN
					Pelaksanaan Penyusunan rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Persentase Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	1 dok	DINAS PERHUBUNGAN
						Persentase Penyusunan review Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabu-han Pengumpan Regional	1 dok	DINAS PERHUBUNGAN

NO	RKPD 2021						
	Prioritas Pembangunan	Strategi		Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah		Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*		*4*		*5*	*6*	*7*
					Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Persentase Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasi-an Pelabuhan Pengumpan Regional	75	DINAS PERHUBUNGAN
					Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengum-pan Regional	Persentase Pemenuhan Dokumen SID dan DED Pembangu-nan SBNP di Pelabuhan Peng-umpan Regional	75	DINAS PERHUBUNGAN
					Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Prosentase Pembangunan SBNP diPelabuhan Pengumpan Regional	50	DINAS PERHUBUNGAN
					Kegiatan Pener-bitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	Persentase Badan Usaha Pelabuhan yang memiliki Izin Usaha di Pelabuhan Peng-umpang Regional	95	DINAS PERHUBUNGAN
					Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Prosentase pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelaya-nan Perizinan Berusaha Ter-integrasi Secara Elektronik	95	DINAS PERHUBUNGAN
				3	**Program Pengelolaan Penerbangan**	**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana fasilitas bandara**	**20**	**DINAS PERHUBUNGAN**
					Kegiatan Penyelenggaraan Kebandarudaraan	Persentase Penyediaan Aksesibilitas dan Utilitas Kegiatan Bandara Udara	20	DINAS PERHUBUNGAN
					Pengawasan dan Pengendalaian Penyelenggaraan Kebandarudaraan yang menjadi kewenangan Provinsi	Persentase Pemenuhan Aksesibilitas dan Utilitas Penun-jang Kegiatan Bandar Udara	20	DINAS PERHUBUNGAN
						Prosentase beroperasinya	100	DINAS PERHUBUNGAN

NO	RKPD 2021							
	Prioritas Pembangunan	Strategi		Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah		Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*		*4*		*5*	*6*	*7*
						gedung VIP Bandara Depati Amir dalam kondisi optimal		
3	**PEMBANGUNAN SOSIAL**	**3**	**Peningkatan pelayanan terhadap pemberian hak-hak anak**	**1**	**Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)**	**Persentase SDM dalam Pemenuhan Partisipasi ANAK**	**90**	**DP3ACSKB**
					Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah Kegiatan yang Melibatkan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi		DP3ACSKB
					Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta advokasi dan KIE	2 Kegiatan	DP3ACSKB
						jumlah peserta rapat provinsi layak anak, menuju provinsi layak anak	150 Orang	DP3ACSKB
					Kegiatan Penguat-an dan Pengemba-ngan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah kab/kota yang dibina	7 kab/kota	DP3ACSKB
					Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Peserta FA Tingkat Provinsi	70 Orang	DP3ACSKB
						Peserta FA Tingkat Nasional	7 Orang	DP3ACSKB

NO	RKPD 2021					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
				jumlah peserta yang mengikuti HAN tingkat Provinsi	900 Orang	DP3ACSKB
			Sub Kegiatan Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah peserta bimtek forum anak sebagai Pelopor dan Pelapor	80 Orang	DP3ACSKB
				Jumlah peserta bimtek partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan	80 Orang	DP3ACSKB
				Jumlah peserta bimtek fasilitator anak	35 Orang	DP3ACSKB
			2 Program Perlindungan Khusus Anak	**Rasio ketersediaan SDM Perlindungan Anak**	**90,00%**	**DP3ACSKB**
			Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan	1 laporan	DP3ACSKB
			Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	jumlah aktivis yang mengikuti peningkatan kapasitas TOT bagi aktivis PATBM kab/kota	100 Orang	DP3ACSKB
			Kegiatan Penyediaan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus dan Memerlukan Koorodinasi Tingkat Daerah Provinsi dan	Jumlah Laporan		DP3ACSKB

NO	RKPD 2021						
	Prioritas Pembangunan	Strategi		Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah		Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*		*4*		*5*	*6*	*7*
					Daerah Kabupaten/Kota			
					Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan provinsi	Jumlah layanan penanganan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenanganan provinsi	1 laporan	DP3ACSKB
					Sub Kegiatan Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Kelancaran Fungsi KPAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	12 laporan	DP3ACSKB
					Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan		DP3ACSKB
					Sub Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	jumlah peserta rapat koordinasi pemenuhan hak anak yang memerlukan perlindungan khusus	7 kab/kota	DP3ACSKB
		4	**Pengendalian tingkat kelahiran penduduk dan perpindahan penduduk untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang**	**1**	**Program Pengendalian Penduduk**	**persentase kab/kota yang memiliki Dokumen pengendalian penduduk**	**71,42**	**DP3ACSKB**
					Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat	jumlah laporan pengendalian penduduk	1 Kebijakan	DP3ACSKB

NO	RKPD 2021					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
			dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk			
			Sub Kegiatan Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi			DP3ACSKB
			Sub Kegiatan Advokasi dan Sosialisasi GDPK	jumlah peserta sosialisasi		DP3ACSKB
			Sub Kegiatan Advokasi dan Sosialisasi Pelak-sanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Non Formal Dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok kegiatan Masyarakat	jumlah peserta advokasi dan sosialisasi		DP3ACSKB
			Sub Kegiatan Advokasi dan Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan	jumlah peserta advokasi dan sosialisasi		DP3ACSKB
			Sub Kegiatan Advokasi dan Sosialisasi Pem-bentukan Rumah Data Kependu-dukan Di Kampung KB Untuk Mem-perkuat Integrasi Program KKBPK Dan Sektor Lain	Jumlah peserta Kegiatan sosialisasi		DP3ACSKB
			Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan dan Pelaporan	jumlah kabupaten/kota yang dibina dalam pencatatan dan pelaporan	7 kab/kota	DP3ACSKB

NO	RKPD 2021						
	Prioritas Pembangunan	Strategi		Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah		Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*		*4*		*5*	*6*	*7*
					Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pe-ngendalian Penduduk cakupan Daerah Provinsi			DP3ACSKB
					Sub Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	jumlah profil KKBPK	1 Dokumen	DP3ACSKB
					Sub Kegiatan Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pendataan dan Pemutakhiran Data keluarga	jumlah peserta Kegiatan		DP3ACSKB
				2	**Program Pendaftaran Penduduk**	**Persentase masyarakat yang memiliki dokumen pendaftaran penduduk (KK, KTP, KIA)**	**78,33**	**DP3ACSKB**
					Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai target dokumen pendaftaran penduduk (KTP, KK, KIA)	2 Kab/Kota	DP3ACSKB
					Sub Kegiatan Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan LintasKabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Jumlah fasilitasi pendataan penduduk non permanen dan penduduk rentan administrasi kependudukan lintas kab/kota dalam satu provinsi		DP3ACSKB
					Sub Kegiatan Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	Jumlah peserta	90 Orang	DP3ACSKB
					Sub Kegiatan Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan	Jumlah peserta		DP3ACSKB
				3	**Program Pencatatan Sipil**	**Persentase masyarakat yang memiliki akta**	**98,33**	**DP3ACSKB**

NO	RKPD 2021					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
				pencatatan sipil (Akta Lahir, Akta Mati, Akta Perkawinan)		
			Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai target akta pencatatan sipil (akta lahit, akta kematian, akta perkawinan	2 Kab/Kota	DP3ACSKB
			Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil	Jumlah peserta		DP3ACSKB
			Sub Kegiatan Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	Jumlah peserta	60 Orang	DP3ACSKB
			Sub Kegiatan Pemanfaatan Data atas Peristiwa Penting	Jumlah peserta		DP3ACSKB
			4 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	**Persentase perangkat daerah dan lembaga lain yang mengadakan pejanjian kerjasama**	**37,84**	**DP3ACSKB**
			Kegiatan Penataan Administrasi Kependudukan	Jumlah kab/kota yang dibina	2 Kab/Kota	DP3ACSKB
			Sub Kegiatan Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Urusan Administrasi Kependudukan Di Provinsi	Jumlah peserta		DP3ACSKB
			Sub Kegiatan Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan Yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi Dan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta	56 Orang	DP3ACSKB
			Kegiatan Pe-nyelenggaraan urusan Adminis-trasi			DP3ACSKB

NO	RKPD 2021			
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
			Kependu-dukan Provinsi			
			Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan adminis-trasi Kependu-dukan	Jumlah peserta		DP3ACSKB
			Sub Kegiatan Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Adminis-trasi Kependu-dukan	Jumlah peserta		DP3ACSKB
			Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah peserta	50 Orang, 3 Media	DP3ACSKB
			Sub Kegiatan Koordinasi Berkala Antarlembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah	Jumlah peserta		DP3ACSKB
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah aplikasi pendukung pemanfaatan data kependudukan		DP3ACSKB
			Sub Kegiatan Kerjasama Dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Jumlah peserta		DP3ACSKB
			Sub KegiatanPembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Provinsi	Jumlah laporan		DP3ACSKB
			Sub Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan Pendokumentasian Urusan Administrasi Kependudukan	Jumlah peserta		DP3ACSKB
			Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Kependudukan, dan Pendayagunaan Data	Jumlah peserta		DP3ACSKB

NO	RKPD 2021							
	Prioritas Pembangunan	Strategi		Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah		Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*		*4*		*5*	*6*	*7*
					Kependudukan			
					Sub Kegiatan Supervisi Kegiatan Verifikasi dan Validasi Data Kependudukan Provinsi	Laporan supervisi verifikasi dan validasi data kependudukan		DP3ACSKB
					Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	Laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan adminduk	1 Laporan	DP3ACSKB
				5	**Program Pengelolaan Profil Kependudukan**	**Persentase penyediaan penyajian database kependudukan tingkat provinsi yang akurat**	**100**	**DP3ACSKB**
					Kegiatan Penyediaan Profil Kependudukan	Jumlah jenis profil	2 Profil	DP3ACSKB
					Sub Kegiatan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah pengembangan aplikasi	1 Aplikasi, 40 buku	DP3ACSKB
					Sub Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga			DP3ACSKB
					Sub Kegiatan Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pendataan dan Pemutakhiran Data keluarga			DP3ACSKB
		5	**Menekan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak**	**1**	**Program Perlindungan Perempuan**	**Rasio ketersediaan SDM Perlindungan Perempuan**	**90**	**DP3ACSKB**
					Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	jumlah laporan upaya pencegahan perlindungan perempuan dan para pihak yang terlibat dalam upaya perlindungan perempuan		DP3ACSKB

NO	RKPD 2021						
	Prioritas Pembangunan	Strategi		Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah		Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*		*4*		*5*	*6*	*7*
					Sub Kegiatan pelayanan korban kekerasan pada perempuan kewenangan provinsi	jumlah laporan pelayanan korban kekerasan pada perempuan korban kekerasan kewenangan provinsi	1 Laporan	DP3ACSKB
					Sub Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebijkan	1 Kebijakan	DP3ACSKB
						jumlah peserta sosialisasi pencegahan pelecehan sseksual bagi perempuan	100 Orang	DP3ACSKB
		6	**Peningkatan keadilan dan kesetaraan gender**	**1**	**Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan**	**Persentase Kegiatan yang responsif gender**	**80**	**DP3ACSKB**
					Kegiatan Pelembagaan Pengarus Utamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Jumlah kabupaten kota yang dibina	7 KAB/kota	DP3ACSKB
					Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta penguatan kapasitas pelaksanaan PUG dan PPRG	75 orang	DP3ACSKB
						Jumlah peserta Kegiatan Bangka Belitung Gender Award	0	DP3ACSKB
					Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta Advokasi dan KIE PUG dan PKHP	240 Orang	DP3ACSKB
					Sub Kegiatan Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termsauk PPRG Kewenangan	Jumlah peserta pengembangan materi dan Pelaksanaan KIE Kesetaraan dan	32 PD	DP3ACSKB

NO	RKPD 2021					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
			Provinsi	Keadilan Gender bagi institusi Media Massa		
			Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	Jumlah kab/kota yang dibina	7 kab/kota	DP3ACSKB
			Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta pelatihan keterampilan kerja bagi perempuan usia produktif	0	DP3ACSKB
				Jumlah peerta pelatihan keterampilan kerja bagi narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan	0	DP3ACSKB
			Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta Pembinaan Industri Rumahan	90 Orang	DP3ACSKB
				Jumlah peserta Pelatihan dan pembentukan fasilitator pendidikan politik untuk perempuan	75 Orang	DP3ACSKB
			Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah kab/kota yang dibina	7 kab/kota	DP3ACSKB

NO	RKPD 2021						
	Prioritas Pembangunan	Strategi		Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah		Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*		*4*		*5*	*6*	*7*
					Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta	45 Orang	DP3ACSKB
				2	**Program Peningkatan Kualitas Keluarga**	**Persentase Perempuan kepala Keluarga yang di berdayakan**	**12,66**	**DP3ACSKB**
					Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang di bina	7 Kab/Kota	DP3ACSKB
					Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	jumlah kab/kota yang mengikuti	7 Kab/Kota	DP3ACSKB
					Sub Kegiatan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta Kegiatan Peningkatan Nilai-nilai Kejuangan Perempuan Indonesia	500 Orang	DP3ACSKB
					Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang di bina	7 Kab/Kota	DP3ACSKB
					Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan	Jumlah peserta pembinaan organisasi	40 Orang	DP3ACSKB

NO	RKPD 2021							
	Prioritas Pembangunan	Strategi		Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah		Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*		*4*		*5*	*6*	*7*
					Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	perempuan		
					Sub Kegiatan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	45 Orang	DP3ACSKB
				3	**Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak**	**Persentase OPD yang menyediakan data pilah gender dan anak**	**78%**	**DP3ACSKB**
					Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam kelembagaan Data ditingkat Provinsi	Jumlah profil dan data gender dan anak yang tersedia	1 buku/dok	DP3ACSKB
					Sub Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah profil dan data gender dan anak yang tersedia	1 buku/dok	DP3ACSKB
		7	**Peningkatan Insan pemuda yang mandiri dan berprestasi**	**1**	**Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Pemuda**	**Persentase Pemuda Yang Berprestasi**	**0,1**	**DISKEPORA**
						Persentase Pemuda yang Memiliki Keterampilan	0,05	DISKEPORA
					Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengem-bangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pemuda yang ikut dalam Kegiatan Kepemudaan Provinsi	306	DISKEPORA

NO	RKPD 2021					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
				Jumlah pemuda yang mengikuti pelatihan kewirausahaan	35	DISKEPORA
			Sub Kegiatan Koordinasi , Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi	Jumlah Peserta Pemilihan Pemuda Pelopor	35	DISKEPORA
			Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	Jumlah Peserta Pemilihan Wirausaha Muda	35	DISKEPORA
			Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	Jumlah peserta pemilihan PPAN, KPN, PEPELINGASIH, AIESEC, JPD	136	DISKEPORA
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah peserta pemilihan Pasukan Pengibar Bendera dan jumlah peserta Pasukan Pengibar Bendera	90	DISKEPORA
			Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan Provinsi			DISKEPORA
			Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan kepada Pemuda dan Organisasi Pemuda Provinsi yang Berprestasi	Jumlah Pemuda yang diberikan penghargaan	10	DISKEPORA
			Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi			DISKEPORA
			Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan	Jumlah peserta Pelatihan Kewirausahaan Pemuda	35	DISKEPORA

NO	RKPD 2021						
	Prioritas Pembangunan	Strategi		Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*
				Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha			
				Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi			DISKEPORA
			2	**Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan**	**Persentase Organisasi Pemuda yang memiliki Standarisasi**	**0,1**	**DISKEPORA**
				Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah pemuda yang mengikuti Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	70	DISKEPORA
				Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	Jumlah Peserta Pelatihan Keorganisasian Kepramukaan	35	DISKEPORA
				Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Provinsi	Jumlah Peserta Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Kepramukaan	35	DISKEPORA
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik			DISKEPORA
				Sub Kegiatan Penyediaan Pusat Pendidikan dan Perlatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi/Kabupaten /Kota			DISKEPORA
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi			DISKEPORA
				Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan			DISKEPORA

NO	RKPD 2021							
	Prioritas Pembangunan	Strategi		Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah		Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*		*4*		*5*	*6*	*7*
					Provinsi			
					Sub Kegiatan Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Provinsi			DISKEPORA
					Sub Kegiatan Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan			DISKEPORA
		8	**Peningkatan prestasi dan peran serta masyarakat dalam berolah raga**	**1**	**Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan**	**Persentase atlet pelajar yang berprestasi**	**40,48**	**DISKEPORA**
					Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Jumlah cabang olahraga yang diselenggarakan dalam kejuaraan		DISKEPORA
						Jumlah Atlet yang mengikuti Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi	1160	DISKEPORA
						Jumlah pelaku olahraga yang diberikan penghargaan	30	DISKEPORA
						Jumlah atlet pelajar yang dibina	30.	DISKEPORA
						Jumlah sarana dan prasarana yang disediakan	2	DISKEPORA
					Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga multi Event dan Single event Tingkat Provinsi	Jumlah peserta yang ikut dalam Kegiatan kejuaraan	900	DISKEPORA
					Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi, dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi			DISKEPORA

NO	RKPD 2021			
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
			Sub Kegiatan Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan multi Event dan Single event	Jumlah peserta yang ikut dalam Kegiatan kejuaraan	126	DISKEPORA
			Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi	Jumlah Atlet yang mengikuti Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi	116	DISKEPORA
				Jumlah pelaku olahraga yang diberikan penghargaan	30	DISKEPORA
			Seleksi Atlet Daerah			DISKEPORA
			Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)			DISKEPORA
			Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi	Jumlah Atlet yang mengikuti Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi	1660	DISKEPORA
			Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan Olahraga Provinsi	Jumlah pelaku olahraga yang diberikan penghargaan	30	DISKEPORA
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga			DISKEPORA
			Kegiatan Pembi-naan dan Pengem-bangan Olahraga Pendidikan pada jenjang pendidikan kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah atlet pelajar yang dibina	1021	DISKEPORA
				Jumlah sarana dan prasarana yang disediakan	2	DISKEPORA
			Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkro-nisasi dan Pelaksa-naan Pemben-tukan	Jumlah atlet pelajar yang dibina	21	DISKEPORA

NO	RKPD 2021							
	Prioritas Pembangunan	Strategi		Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah		Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*		*4*		*5*	*6*	*7*
					dan pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselengga-rakan oleh masyarakat dan dunia usaha			
					Sub Kegiatan Koor-dinasi, Sinkro-nisasi dan Pelaksanaan Pem-berdayaan Per-kumpulan Olah raga dan Penye-lenggaraan Kom-petisi Oleh Satuan Pendidikan Me-nengah & Khusus	Jumlah atlet pelajar layanan khusus yang dibina	1000	DISKEPORA
					Sub Kegiatan Koor-dinasi, Sinkro-nisasi dan Pelaksa-naan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olah raga Provinsi	Jumlah sarana dan prasarana yang disediakan	2	DISKEPORA
					Kegiatan Pembi-naan dan Pengem-bangan Organisasi Olah raga	Jumlah tenaga keolahragaan yang mempunyai kompetensi	200	DISKEPORA
					Sub Kegiatan Standarisasi Orga-nisasi Keolah ragaan	Jumlah peserta yang mengikuti kompetensi tenaga keolah ragaan	200	DISKEPORA
4	**PENINGKATAN TATA KELOLA BIROKRASI DAN PELAYANAAN PUBLIK**	**1**	**Meningkatkan Tata kelola pengawasan**	**1**	**Program Penyelenggaraan Pengawasan**	**Nilai Materialitas Temuan Hasil Pemeriksaan**	**< 5%**	**INSPEKTORAT**
					Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Ob-yek Pemeriksaan yang dilakukan Audit Kinerja dan Keuangan Bidang Pemerin-tahan dan Aparatur	100	INSPEKTORAT
						Persentase Ob-yek Pemeriksaan yang dilakukan Audit Kinerja dan Keuangan Bidang Pengelo-laan Keuangan dan Aset Daerah	100	INSPEKTORAT

NO	RKPD 2021					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
				Persentase Ob-yek Pemeriksaan yang dilakukan Audit Kinerja dan Keuangan Bidang Pem-bangunan, Sosial, Ekonomi dan Budaya	100	INSPEKTORAT
			Audit Kinerja dan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksa-an (LHP) yang di hasilkan Bidang Pemerintahan dan Aparatur	40 Laporan	INSPEKTORAT
				Jumlah LHP yang dihasilkan wilayah Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	40 Laporan	INSPEKTORAT
				Jumlah LHP yang dihasilkan Bidang Pem-bangunan, Sosial, Ekonomi dan Budaya	40 Laporan	INSPEKTORAT
			Review Kinerja dan Keuangan	Jumlah LHR yang dihasilkan Bidang Pemerin-tahan dan Aparatur	34 Laporan	INSPEKTORAT
				Jumlah LHR yang dihasilkan bidang Pengelo-laan Keuangan dan Aset Daerah	34 Laporan	INSPEKTORAT
				Jumlah LHR yang dihasilkan Bidang Pembangunan, Sosial, Ekonomi dan Budaya	34 Laporan	INSPEKTORAT
			Pemantauan Kinerja dan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Pemantau-an yang dihasil-kan Bidang Pemerintahan dan Aparatur	20 Laporan	INSPEKTORAT
				Jumlah Laporan Hasil Pemantau-an yang di-hasilkan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset	20 Laporan	INSPEKTORAT

NO	RKPD 2021					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
				Daerah		
				Jumlah Laporan Hasil Pemantau-an yang dihasil-kan Bidang Pembangunan, Sosial, Ekonomi dan Budaya	20 Laporan	INSPEKTORAT
			Evaluasi Kinerja dan Keuangan	Jumlah LHE yang dihasilkan Bidang Pemerintahan dan Aparatur	12 Laporan	INSPEKTORAT
				Jumlah LHE yang dihasilkan Bidang Pengelo-laan Keuangan dan Aset Daerah	13 Laporan	INSPEKTORAT
				Jumlah LHE yang dihasilkan Bidang Pem-bangunan, Sosial, Ekonomi dan Budaya	13 Laporan	INSPEKTORAT
			Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase Ob-yek Pemeriksaan yang dilakukan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Bidang Investigatif	100	INSPEKTORAT
			Audit Kinerja dan Keuangan	Persentase LHP yang dihasilkan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Bidang Investigatif	100	INSPEKTORAT
				Persentase LHP yang dihasilkan Pengawasan Lainnya Bidang Investigatif	100	INSPEKTORAT
			2 Program Perumusan Kebijakan Pendampingan Dan Asistensi	**Persentase Perangkat Daerah yang tingkat maturitas SPIP-nya level 3**		**INSPEKTORAT**
				Indeks Reformasi Birokrasi Area Penguatan Pengawasan		INSPEKTORAT
			Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasan	Persentase Kebijakan Teknis di Bidang	100	INSPEKTORAT

NO	RKPD 2021					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
			Dan Fasilitasi Pengawasan	Pengawasan yang dirumuskan Bidang Pemerintahan dan Aparatur		
				Persentase Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang dirumuskan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	100	INSPEKTORAT
				Persentase Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang dirumuskan Bidang Pembangunan, Sosial, Ekonomi dan Budaya	100	INSPEKTORAT
				Persentase Kebijakan Teknis diBidang Pengawasan yang dirumuskan Bidang Investigatif	100	INSPEKTORAT
			Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang dirumuskan Bidang Pemerintahan dan Aparatur	2 Dokumen	INSPEKTORAT
				Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang dirumuskan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2 Dokumen	INSPEKTORAT
				Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang dirumuskan Bidang Pembangunan, Sosial, Ekonomi dan Budaya	2 Dokumen	INSPEKTORAT
				Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang dirumuskan Bidang Investigatif	2 Dokumen	INSPEKTORAT

NO	RKPD 2021					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
			Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Dokumen Peta Risiko Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Aparatur	12 Dokumen	INSPEKTORAT
				Jumlah Dokumen Peta Risiko Perangkat Daerah Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	12 Dokumen	INSPEKTORAT
				Jumlah Dokumen Peta Risiko Perangkat Daerah Bidang Pembangunan, Sosial, Ekonomi dan Budaya	12 Dokumen	INSPEKTORAT
				Jumlah Sistem Informasi Pengawasan	1 Aplikasi	INSPEKTORAT
			Kegiatan Asistensi dan Pendampingan	Persentase Asistensi dan Pendampingan yang dilaksanakan Bidang Investigatif	100	INSPEKTORAT
				Persentase Asistensi dan Pendampingan yang dilaksanakan	100	INSPEKTORAT
			Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	Persentase Pengaduan Masyarakat ditindak lanjuti	100	INSPEKTORAT
			Asistensi dan Pendampingan	Persentase Kepatuhan Laporan e-LHPKN	100	INSPEKTORAT
				Persentase Kepatuhan Laporan LHKASN	100	INSPEKTORAT
				Jumlah Laporan Tim Satgas Saber Pungli	2 Laporan	INSPEKTORAT
				Persentase Penyelesaian Laporan dalam Sistem Monitoring Center and Prevention Korsupgah KPK	100	INSPEKTORAT
				Persentase Penyelesaian Laporan dalam Strategi Nasional Pencengahan	100	INSPEKTORAT

NO	RKPD 2021							
	Prioritas Pembangunan	Strategi		Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah		Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*		*4*		*5*	*6*	*7*
						Korupsi (jaga.id)		
						Persentase Capaian Nilai PMPRB Area Penguatan Pengawasan	85	INSPEKTORAT
						Jumlah unit Kerja yang diusulkan untuk Zona Integritas	2 Unit	INSPEKTORAT
						Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP	34 PD	INSPEKTORAT
						Persentase Tindak Lanjut atas Pengaduan melalui Whistle Blowing System	100	INSPEKTORAT
						Jumlah Laporan Gratifikasi	4 Laporan	INSPEKTORAT
						Persentase penyelesaian Kerugian Daerah	20	INSPEKTORAT
		2	**Peningkatan keselarasan antar dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan**	**1**	**Program Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah**	**Persentase konsistensi program pembangunan di RKPD dengan RPJMD dan Renstra dengan RPJMD**	**95**	**BAPPEDA**
					Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tersusun (Dokumen)	2	BAPPEDA
					Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Provinsi	Jumlah laporan koordinasi rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah (Laporan)	1	BAPPEDA

NO	RKPD 2021					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
				Jumlah laporan koordinasi penyusunaan permbangunan daerah melalui aplikasi perencanaan (Laporan)	1	BAPPEDA
				Jumlah laporan hasil fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah	1	BAPPEDA
				Jumlah dokumen Perkada yang ditetapkan (dokumen)	2	BAPPEDA
			Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil fasilitasi/evaluasi perencanaan kabupaten/kota (Laporan)	7	BAPPEDA
			Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Berita Acara Musrenbang (Berita Acara)	1	BAPPEDA
			Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum PD/Forum Lintas/Trilateral Meeting PD (Berita Acara)	1	BAPPEDA
			Sub Kegiatan Pengintegrasian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Rencana Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Lainnya	Jumlah Berita Acara verifikasi perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	3	BAPPEDA
				Jumlah Berita Acara hasil pengintegrasian dalam Forum Konsultasi Publik Berita Acara)	3	BAPPEDA

NO	RKPD 2021					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
				Jumlah Berita Acara hasil pengintegrasian dalam Forum Tematik (Berita Acara)	3	BAPPEDA
				Jumlah Berita Acara pengintegrasian /sinkronisasi perencanaan pusat dan daerah (Berita Acara)	2	BAPPEDA
			Sub Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan data update dalam Aplikasi (Laporan)	1	BAPPEDA
			Sub Kegiatan Pengumpulan dan Analisis Data dan Informasi Pembangunan untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah data PD yang diverifikasi dan dianalisis	2000	BAPPEDA
			Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pendanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan hasil koordinasi perencanaan pendanaan pembangunan daerah	2	BAPPEDA
			Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Pagu Indikatif Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen analisis pagu indikatif (1 Dokumen)	1	BAPPEDA
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Penganggaran di daerah	Jumlah Laporan hasil koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan penganggaran (Laporan)	1	BAPPEDA
			Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan pengendaian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah	21	BAPPEDA
			Sub Kegiatan Evaluasi Capaian Program/Kegiatan terkait SPM	Jumlah laporan hasil evaluasi capaian program/Kegiatan SPM (Laporan)	4	BAPPEDA
			Sub Kegiatan Evaluasi Capaian	Jumlah laporan hasil evaluasi	4	BAPPEDA

NO	RKPD 2021					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
			Program/Kegiatan Perangkat Daerah	capaian program Perangkat Daerah (Laporan)		
			Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan Capaian Pembangunan Daerah	Jumlah laporan evaluasi hasil RKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota (Laporan)	8	BAPPEDA
				Jumlah laporan monitoring RKPD Kabupaten/Kota (Laporan)	4	BAPPEDA
				Jumlah laporan hasil evaluasi capaian program/Kegiatan SDGs (Laporan)	1	BAPPEDA
			2 Program Program Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	**Persentase kesesuaian dokumen perencanaan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**100**	**BAPPEDA**
			Kegiatan Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	Jumlah Laporan Hasil FasilitasiPenyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Lingkungan Hidup (Laporan)	2	BAPPEDA
			Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (Laporan)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Lingkungan Hidup (Laporan)	2	BAPPEDA
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	4	BAPPEDA

NO	RKPD 2021					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
			Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (Laporan)	Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Lingkungan Hidup (Laporan)		
			Kegiatan Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informasi, Statistik, Persandian (Laporan)	2	BAPPEDA
			Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan (Laporan)	Jumlah Laporan Koordinasi Hasil Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informasi, Statistik, Persandian (Laporan)	2	BAPPEDA
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan (Laporan)	Jumlah LaporanHasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informasi, Statistik, Persandian (Laporan)	4	BAPPEDA
			Kegiatan Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen	Jumlah laporan hasil fasilitasi dan monev dokumen perencanaan	2	BAPPEDA

NO	RKPD 2021					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
			Perencanaan Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan	Bidang BIna Marga, Sumber Daya Air, Tata Ruang , Jasa konstruksi,Kawasan Perumahan dan Permukiman dan Kewilayahan (Laporan)		
			Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan	Jumlah laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)Bidang BIna Marga, SUmber Daya Air, Tata Ruang , Jasa konstruksi,Kawasan Perumahan dan Permukiman dan Kewilayahan (Laporan)	2	BAPPEDA
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan	Jumlah LaporanHasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Bina Marga, Sumber Daya Air, Tata Ruang , Jasa konstruksi,Kawasan Perumahan dan Permukiman dan Kewilayahan (Laporan)	4	BAPPEDA

NO	RKPD 2021					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
			Program Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Pesentase kesesuaian dokumen perencanaan bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	100	BAPPEDA
			Kegiatan Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan urusan perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kebudayaan, tenaga kerja dan pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan urusan perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kebudayaan, tenaga kerja dan pariwisata (Laporan)	2	BAPPEDA
			Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) urusan perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kebudayaan, tenaga kerja dan pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) urusan perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kebudayaan, tenaga kerja dan pariwisata	2	BAPPEDA
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) urusan perdagangan,	Jumlah Lapoan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4	BAPPEDA

NO	RKPD 2021					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
			perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kebudayaan, tenaga kerja dan pariwisata	urusan perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kebudayaan, tenaga kerja dan pariwisata		
			Kegiatan Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif	1	BAPPEDA
			Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif	1	BAPPEDA
			Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif	0	BAPPEDA
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif	0	BAPPEDA
			Kegiatan Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan urusan pangan, kehutanan,	Jumlah laporan hasil Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan	2	BAPPEDA

NO	RKPD 2021					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
			energi dan sumber daya mineral, pertanian, serta kelautan dan perikanan	urusan pangan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pertanian, serta kelautan dan perikanan		
			Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) urusan pangan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pertanian, serta kelautan dan perikanan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) urusan pangan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pertanian, serta kelautan dan perikanan	2	BAPPEDA
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) urusan pangan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pertanian, serta kelautan dan perikanan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) urusan pangan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pertanian, serta kelautan dan perikanan	4	BAPPEDA
			Program Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Pesentase kesesuaian dokumen perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100	BAPPEDA
			Kegiatan Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia.	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia.	12	BAPPEDA

NO	RKPD 2021					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
			Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia	4	BAPPEDA
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksa-naan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pem-bangunan Manusia	4	BAPPEDA
			Kegiatan Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat.	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat.	12	BAPPEDA
			Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat	4	BAPPEDA
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejah-teraan Masyarakat	Jumlah laporan hasil Pelaksana-an Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bi-dang Kesejahte-raan masyarakat	4	BAPPEDA
			Kegiatan Fasilitasi dan Monev	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan	22	BAPPEDA

NO	RKPD 2021					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan	Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan		
			Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, Bidang Perpustakaan, Bidang Kearsipan, Bidang Sekretariat Daerah, Bidang Sekretariat DPRD, Bidang Perencanaan, Bidang Penelitian dan Pengembangan, Bidang Keuangan, Bidang Kepegawaian, Bidang Pendidikan dan Pelatihan, Bidang Penghubung, Bidang Inspektorat Daerah yang di koordinasikan	11	BAPPEDA
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, Bidang Perpustakaan, Bidang Kearsipan, Bidang Sekretariat Daerah, Bidang Sekretariat DPRD, Bidang Perencanaan, Bidang Penpanganelitian dan	11	BAPPEDA

NO	RKPD 2021					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
				Pengembangan, Bidang Keuangan, Bidang Kepegawaian, Bidang Pendidikan dan Pelatihan, Bidang Penghubung, Bidang Inspektorat Daerah yang di Moniroting dan evaluasi		
			Program Penelitian dan Pengembagan Daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang digunakan sebagai bahan perumusan kebijakan	80	BAPPEDA
				Persentase jumlah inovasi daerah yang dikembangkan	80	BAPPEDA
			Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah dokumen data penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan (Laporan)	7	BAPPEDA
			Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah laporan data penelitian dan pengembangan (Laporan)	7	BAPPEDA
			Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah lokumen penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan (Laporan)	3	BAPPEDA
			Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah penelitian dan pengembangan bidang aspek-aspek sosial (laporan)	1	BAPPEDA
			Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah laporan penelitian dan pengembangan pendidikan dan kebudayaan (laporan)	1	BAPPEDA
			Sub Kegiatan Penelitian dan	Jumlah penelitian dan	1	BAPPEDA

NO	RKPD 2021						
	Prioritas Pembangunan	Strategi		Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah		Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*		*4*		*5*	*6*	*7*
					Pengembangan Pariwisata	pengembangan pariwisata (laporan)		
					Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah penelitian dan pengembangan kesehatan (laporan)	1	BAPPEDA
					Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan	Jumlah laporan penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan (Laporan)	3	BAPPEDA
					Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan (Laporan)	1	BAPPEDA
					Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Laporan)	1	BAPPEDA
					Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral (Laporan)	0	BAPPEDA
					Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup (laporan)	1	BAPPEDA
					Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah laporan pengembagan Inovasi dan Teknologi (Laporan)	6	BAPPEDA
					Sub Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Laporan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (Laporan)	3	BAPPEDA
					Sub Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan (Laporan)	3	BAPPEDA
		3	Peningkatan tata lakasana dan kinerja pemerintah	**1**	**Program Perekonomian Dan PEMBANGUNAN**	**Persentase Capaian Kinerja Pembangunan**	**98**	**BIRO PEREKONOMIAN**

NO	RKPD 2021					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
		daerah		**Daerah**		
				Persentase Tata Kelola Penataan Administrasi Umum	95	BIRO PEREKONOMIAN
				Prosentase Pembinaan Mental Spiritual	100	BIRO PEREKONOMIAN
			Kegiatan Pengelolaan Kebijakan Perekonomian			BIRO PEREKONOMIAN
			Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah rekomendasi Terkait Kebijakan Ekonomi Makro	5 rekomendasi	BIRO PEREKONOMIAN
			Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah rekomendasi Terkait Kebijakan Ekonomi Mikro	6 rekomendasi	BIRO PEREKONOMIAN
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah rekomendasi Terkait Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	3 rekomendasi	BIRO PEREKONOMIAN
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah rekomendasi Terkait Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	2 rekomendasi	BIRO PEREKONOMIAN
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah rekomendasi Terkait Kebijakan Energi dan Air	2 rekomendasi	BIRO PEREKONOMIAN
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah rekomendasi Terkait Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	3 rekomendasi	BIRO PEREKONOMIAN
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Jumlah rekomendasi Terkait Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	1 rekomendasi	BIRO PEREKONOMIAN
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan	Jumlah rekomendasi Terkait Kebijakan Pengelolaan Badan	1 rekomendasi	BIRO PEREKONOMIAN

NO	RKPD 2021					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
			Layanan Umum Daerah	Layanan Umum Daerah		
			Kegiatan Evaluasi Administrasi Pembangunan	Persentase Capaian Realisasi Anggaran APBD	90	BIRO PEMBANGUNAN
			Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jumlah OPD yang melaporkan Realisasi Anggaran tepat waktu	42	BIRO PEMBANGUNAN
			Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Jumlah OPD yang telah sesuai perbandingan antara Capaian (realisasi) dan Rencana (target) pembangunan	42	BIRO PEMBANGUNAN
				Persentase Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan APBN	85	BIRO PEMBANGUNAN
			Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Jumlah Satker (APBN/Dekon/TP) yang melaporkan realisasi anggaran tepat waktu	54	BIRO PEMBANGUNAN
			Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Jumlah Tindaklanjut Perumusan Kebijakan Teknis pelaksanaan Pembangunan	4 Dokumen	BIRO PEMBANGUNAN
				Persentase Capaian Pengendalian Fisik Pembangunan	85	BIRO PEMBANGUNAN
			Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Jumlah Kabupaten/Kota yang menyampaikan laporan realisasi fisik pembangunan tepat waktu	7 Kabupaten / Kota	BIRO PEMBANGUNAN
			Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja pembangunan	4 Laporan	BIRO PEMBANGUNAN
			Kegiatan Penataan Organisasi	- Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah '- Draf Perubahan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja	2 Draf Peraturan	BIRO ORGANISASI

NO	RKPD 2021					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
				Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		
				Nilai Reformasi Birokrasi	A	BIRO ORGANISASI
				Tingkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	BB	BIRO ORGANISASI
				Tingkat budaya kerja perangkat daerah semakin baik	42 Perangkat Daerah	BIRO ORGANISASI
			Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang tertata sesuai dengan aturan yang berlaku	2 Perangkat Daerah	BIRO ORGANISASI
			Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/kota yang tersinkronisasi dengan kelembagaan Perangkat Daerah provinsi dengan aturan yang berlaku	7 Kabupaten /kota	BIRO ORGANISASI
			Sub Kegiatan Penataan Analisis Jabatan	Jumlah Perangkat Daerah yang tervalidasi dan tertata analisa jabatan dan analisa beban kerjanya ASNnya	1 Dokumen	BIRO ORGANISASI
			Sub Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan reformasi birokrasi	42 Perangkat Daerah	BIRO ORGANISASI
			Sub Kegiatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/kota yang terevaluasi akuntabilitasnya	42 PD dan 7 Kabupaten /Kota	BIRO ORGANISASI
			Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Perangkat Daerah yang terevaluasi budaya kerja	42 Perangkat Daerah	BIRO ORGANISASI
			Sub Kegiatan Pengelolaan Tatalaksana	Jumlah Perangkat Daerah Provinsi yang tertata SOP	42 Perangkat Daerah	BIRO ORGANISASI

NO	RKPD 2021						
	Prioritas Pembangunan	Strategi		Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah		Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*		*4*		*5*	*6*	*7*
					Pemerintahan			
					Sub Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Unit Layanan dan yang melaksanakan pelayanan publik dengan baik dan Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayananan publik	41 Perangkat Daerah	BIRO ORGANISASI
					Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat	Terseleksinya Petugas Haji Daerah dan Jumlah Jemaah Haji yang diberangkatkan		BIRO KESRA
						Prosentase Pembinaan Masyarakat dan Frekuensi Penyelenggaraan Safari Ramadhan	100	BIRO KESRA
						Jumlah Partisipasi Acara HUT Bangka Belitung	3.000 orang	BIRO KESRA
						Terlaksananya Evaluasi dan Analisis Proposal Bansos dan Hibah	520 proposal	BIRO KESRA
						Terlaksananya pelayanan yang optimal kepada masyarakat	7 Kabupaten /Kota	BIRO KESRA
					Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja Terkait Sosial	Jumlah Proposal Bansos dan Hibah yang di monitoring dan evaluasi	250 proposal	BIRO KESRA
					Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja Terkait Pendidikan	Jumlah Sekolah yang dinilai	28	BIRO KESRA
		4	**Pengembangan Daerah Otonomi Baru (DOB)**	**1**	**Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat**	**Terselenggaranya pengelolaan administrasi pemerintahan dan penataan wilayah**	**7 dokumen penataan**	**BIRO PEMERINTAHAN**
					Kegiatan Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Terselenggaranya pengelolaan administrasi pemerintahan dan penataan wilayah	7 dokumen penataan	BIRO PEMERINTAHAN

NO	RKPD 2021						
	Prioritas Pembangunan	Strategi		Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*
				Pengelolaan Administrasi Pemerintahan dan Fasilitasi Penataan Wilayah	Terselenggaranya pengelolaan administrasi pemerintahan dan penataan wilayah	7 dokumen penataan	BIRO PEMERINTAHAN
				Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Terlaksananya Kegiatan-Kegiatan pemerintahan umum	7 dokumen	BIRO PEMERINTAHAN
				Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Terselenggaranya pelayanan administrasi Kepala Daerah dan legislatif	5 dokumen	BIRO PEMERINTAHAN
				Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Terlaksananya pengelolaan dan penataan urusan/kewenangan pemerintah daerah	6 dokumen	BIRO PEMERINTAHAN
				Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Tersedianya laporan keterangan pertanggungjawaban akhir tahun serta tersedianya hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kab/Kota	1 laporan dan 7 dokumen kab/kota	BIRO PEMERINTAHAN
				Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah	Terlaksananya Kerjasama antar lembaga-lembaga pemerintah	5 proposal	BIRO PEMERINTAHAN
		5	**Peningkatan penataan peraturan perundangan dan kebijakan daerah**	**1** **Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat**	**Meningkatnya PHD yang tertata**	**90**	**BIRO HUKUM**
				Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Penataan Pergub	90	BIRO HUKUM
					Persentase Penataan Kep Gub	90	BIRO HUKUM
					Persentase Penataan Raperda	90	BIRO HUKUM
					Persentase Penataan Propemperda	100	BIRO HUKUM
				Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Pergub yg selesai disusun	70 Pergub	BIRO HUKUM

NO	RKPD 2021					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
				Jumlah Kep Gub yg selesai disusun	900 Kep Gub	BIRO HUKUM
				Jumlah Usulan Perda yg selesai disusun	10 raperda	BIRO HUKUM
				Jumlah Usulan Propemperda yg selesai disusun	1 propemperda	BIRO HUKUM
			Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat	Persentase PHD yg dipublikasikan melalui JDIH	90	BIRO HUKUM
				Persentase PHD yg dipublikasikan Di Media Massa	90	BIRO HUKUM
				Persentase PHD yg dipublikasikan Di Media Radio	90	BIRO HUKUM
				Persentase Publikasi Artikel	90	BIRO HUKUM
				Persentase Penataan abstraksi PHD	90	BIRO HUKUM
				Persentase Penataan Katalog dan Kompilasi PHD	90	BIRO HUKUM
				Persentase Pendokumentasian PHD	90	BIRO HUKUM
				Persentase Penataan NHL	90	BIRO HUKUM
			Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah Produk Hukum yg dipublikasikan melalui JDIH	100 PHD	BIRO HUKUM
				Jumlah Perda yg dipublikasikan di Media Massa	5 Perda	BIRO HUKUM
				Jumlah Perda yg dipublikasikan melaui Radio	3 Perda	BIRO HUKUM
				Jumlah Artikel yg dipublikasikan melalui Website	120 artikel	BIRO HUKUM
				Jumlah abstrak PHD yg disususn	250 abstrak	BIRO HUKUM
				Jumlah buku katalog dan kompilasi PHD yg disusun	150 buku	BIRO HUKUM
				Jumlah Produk Hukum Daerah yg didokumentasikan	1000 PHD	BIRO HUKUM

NO	RKPD 2021						
	Prioritas Pembangunan	Strategi		Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah		Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*		*4*		*5*	*6*	*7*
						Jumlah Naskah Hukum yg disusun	100 NHL	BIRO HUKUM
					Evaluasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Raperda Kab/Kota yg disusun	10 Raperda	BIRO HUKUM
						Jumlah Perka Kab/Kota yg disusun	30 Raperkada	BIRO HUKUM
					Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Kasus Sengketa Perdata yg melalui Tahapan Proses Penyelesaian	1 kasus	BIRO HUKUM
						Jumlah Kasus Sengketa TUN yg melalui Tahapan Prosese Penyelesaian	1 kasus	BIRO HUKUM
						Jumlah Laporan Pembinaan Penyelesaian Sengketa Kab/Kota	1 Laporan	BIRO HUKUM
					Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah Laporan Pembinaan Pelaksanaan HAM	1 Laporan	BIRO HUKUM
						Jumlah Masyarakat Miskin yg diberikan bantuan	45 Orang	BIRO HUKUM
		6	**Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik**	**1**	**Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik**			**DINAS KOMINFO**
					Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase informasi publik berkaitan dengan publikasi yang dapat diakses masyarakat	100	DINAS KOMINFO
					Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Mayarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi, kebijakan dan program pemerintah daerah serta Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat yang terkoneksi	200	DINAS KOMINFO
					Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Jumlah data/ informasi Publik Sektor Pariwisata,	6.000 berita/ informasi	DINAS KOMINFO

NO	RKPD 2021					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
				Pertanian, Perikanan, Pendidikan, Kesehatan Pemerintah Daerah yang terupdate		
			Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah saluran komunikasi pemda yang dikelola; Jumlah saluran komunikasi non Pemda yang difasilitasi	1 saluran dan 9 saluran	DINAS KOMINFO
			2 Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Teknologi Informasi			**DINAS KOMINFO**
			Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah terhubungnya interkoneksi jaringan internet OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan antar Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota	1	DINAS KOMINFO
			Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah OPD yang terlayani dengan layanan Data Center (Colocation, Beckup Data, Monitoring jaringan, Instalasi Virtual Server, Keamanan Sever) se Provinsi Bangka Belitung	1	DINAS KOMINFO
			Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Subdomain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi			DINAS KOMINFO
			Sub Kegiatan Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi	Jumlah Pendaftaran Nama Domain yang terlayani		DINAS KOMINFO

NO	RKPD 2021					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
			Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Nama Domain dan Sub Domain yang sesuai dengan standar Pemerintah		DINAS KOMINFO
			Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi			DINAS KOMINFO
			Sub Kegiatan Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Presentase realisisasi Kegiatan dan anggaran dengan Rencana Induk		DINAS KOMINFO
			Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikas dan Proses Bisnis Pemerintah Berbasis Elektronik		DINAS KOMINFO
			Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi			DINAS KOMINFO
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Indeks kematangan Keamanan informasi		DINAS KOMINFO
			Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Untuk Keamanan Informasi ada di Kemenkominfo, dan Persandian ada di BSSN, untuk SubKegiatan dilaksanakan oleh 2 seksi yang berbeda, output yang dihasilkan juga memiliki 2 output yang berbeda		DINAS KOMINFO
			Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Jumlah layanan keamanan informasi yang diterapkan oleh		DINAS KOMINFO

NO	RKPD 2021					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
			Provinsi	Pemda		
			3 Program Pengelolaan Aplikasi Informatika			**DINAS KOMINFO**
			Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi			DINAS KOMINFO
			Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Persentase layanan penyediaan data dan inormasi serta layanan persandian yang berkualitas	21 kali	DINAS KOMINFO
			4 Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral			**DINAS KOMINFO**
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Tersedianya jumlah kebutuhan data statistik sektoral dan jumlah SDM OPD Proinsi dan Kab/kota yang meningkat pengetahuan tentang mutu statistik daerah yang terintegrasi	60 Orang	DINAS KOMINFO
			Membangun Metadata Statistik Sektoral	Identifikasi kebutuhan Data Statistik Sektoral Provinsi dan Kabupaten Kota	100	DINAS KOMINFO
				Jumlah OPD Provinsi yang mampu menyediakan Metadata Statistik Sektoral	100	DINAS KOMINFO
			5 Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi			**DINAS KOMINFO**
			Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Provinsi	Presentase Keterhubungan Perangkat Daerah dalam Jaringan Komunikasi Sandi		DINAS KOMINFO

NO	RKPD 2021							
	Prioritas Pembangunan	Strategi		Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah		Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*		*4*		*5*	*6*	*7*
					Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Presentase Keterhubungan Perangkat Daerah dalam Jaringan Komunikasi Sandi	100	DINAS KOMINFO
			Peningkatan Kualitas Pelayanaan Publik dengan memberikan pelayanan yang cepat, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi					
		7	**Peningkatan kompetensi dan profesional ASN**	**1**	**Program Kepegawaian Daerah**	**Persentase Pemenuhan Pegawai ASN yang sesuai dengan formasi**	**73**	**BKPSDM**
						Persentase Penempatan Pegawai Sesuai Kompetensi Pegawai	5	BKPSDM
						Persentase ASN yang memiliki kinerja dan disiplin minimal baik	99,79	BKPSDM
					Kegiatan 1: Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Jumlah Data Pegawai yang dikelola	5587	BKPSDM
					Sub Kegiatan 1: Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Sistem Informasi Yang Di Kelola	100	BKPSDM
					Sub Kegiatan 2: Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Pegawai yang Dikelola Datanya	5587	BKPSDM
					Kegiatan 2: Administrasi Kepegawaian	Jumlah ASN yang lulus CASN/IPDN	146	BKPSDM
						Jumlah ASN yang ditempatkan sesuai kompetensi	300	BKPSDM
						Jumlah SK Pensiun dan Pangkat yg Diterbitkan Tepat Waktu	1241	BKPSDM
						Jumlah Pegawai Tenaga Kontrak yang dilakukan penataan	3650	BKPSDM
					Sub Kegiatan 1: Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi, dan Pelaksanaan	Jumlah Dokumen Analisis Kebutuhan dan Formasi ASN	100	BKPSDM

NO	RKPD 2021					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
			Pengadaan ASN			
				Jumlah CASN/IPDN yang Lulus Seleksi	146	BKPSDM
			Sub Kegiatan 2: Penyelesaian Pemberhentian dan Pemberian Pensiun	Jumlah PNS yang diterbitkan SK Pensiun	91	BKPSDM
			Sub Kegiatan 3: Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah PNS yang diterbitkan SK Kenaikan Pangkat	1150	BKPSDM
			Sub Kegiatan 3: Pengelolaan Penempatan Dalam Jabatan ASN	Jumlah ASN yang ditempatkan sesuai Kompetensi	300	BKPSDM
			Sub Kegiatan 4: Fasilitasi Pengadaan dan Pemberhentian	Jumlah Pegawai Tenaga Kontrak yang dilakukan penataan	3650	BKPSDM
			Kegiatan 3: Peningkatan Kapasitas ASN	Persentase pegawai yg terukur indeks profesionalitasnya di Lingkungan Inspektorat,Badan, Kantor, Satuan POLPP, Sekretariat Dewan dan Sekretariat Daerah Prov Babel	93	BKPSDM
				Persentase pegawai yg terukur indeks profesionalitasnya di Lingkungan Dinas Prov Babel	68	BKPSDM
				Jumlah Kelembagaan Profesi ASN	0	BKPSDM
				Jumlah ASN yang dikembangkan profesinya	925	BKPSDM
			Sub Kegiatan 1: Pengembangan Penilaian Kinerja ASN	Persentase pegawai yg terukur indeks profesionalitasnya di Lingkungan Inspektorat,Badan, Kantor, Satuan POLPP, Sekretariat Dewan dan Sekretariat Daerah Prov Babel	93	BKPSDM
				Persentase pegawai yg terukur indeks profesionalitasnya	68	BKPSDM

NO	RKPD 2021					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
				di Lingkungan Dinas Prov Babel		
			Sub Kegiatan 2: Fasilitasi Kelembagaan Profesi ASN (KORPRI dan lembaga profesi ASN lainnya)	Jumlah Kelembagaan Profesi ASN	1 Kepengurusan	BKPSDM
			Sub Kegiatan 3: Fasilitasi Profesi ASN	MTQ KORPRI Tk. Provinsi dan Tk. Nasional	-	BKPSDM
				Persemayaman bagi anggota KORPRI Prov. Kep. Bangka Belitung	27	BKPSDM
				Pekan Olahraga Antar Unit KORPRI Pemprov. Kep. Bangka Belitung	42 PD	BKPSDM
				PORPROV KORPRI IV se-Prov. Kep. Bangka Belitung	800	BKPSDM
				PORNAS KORPRI XVI	125	BKPSDM
				Penyegaran Rohani KORPRI		BKPSDM
			Kegiatan 4: Pengembangan Karir ASN	Jumlah ASN yang dipetakan kompetensinya	300	BKPSDM
				Jumlah ASN yang menerima beasiswa	26	BKPSDM
				Jumlah Pedoman pengembangan manajemen karir	1	BKPSDM
			Sub Kegiatan 1: Pengembangan Karir dan Promosi ASN	Jumlah ASN yang dipetakan kompetensinya	300	BKPSDM
				Jumlah ASN yang menerima beasiswa	26	BKPSDM
			Sub Kegiatan 2: Penyusunan Pedoman Pola Pengembangan Karir	Jumlah Pedoman Pengembangan Karir	1	BKPSDM
			Kegiatan 5: Pembinaan ASN			BKPSDM
			Sub Kegiatan 1: Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang dibina disiplin dan rohaninya	4300	BKPSDM
			Sub Kegiatan 2:Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin	Jumlah Kasus Pelanggaran Disiplin yang Ditangani	8	BKPSDM

NO	RKPD 2021					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
			ASN			
			Sub Kegiatan 3: Penegakkan Disiplin, Pemberian Penghargaan dan Perlindungan	Satya Lencana	100	BKPSDM
				ASN Berprestasi	700	BKPSDM
				Pemberian Bantuan Hukum	900	BKPSDM
			2 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	**Persentase ASN yang tersertifikasi**	**90**	**BKPSDM**
				Nilai Akreditasi Diklat	81	BKPSDM
				Persentase ASN yang memiliki sertifikat Kompetensi Teknis	17,18	BKPSDM
				Persentase Pejabat Pimpinan Daerah dan Pimpinan Tinggi yang memiliki sertifikat pengembangan kompetensi	89,29	BKPSDM
				Persentase ASN yang memiliki sertifikat kompetensi manajerial	26,06	BKPSDM
				Persentase ASN yang memiliki sertifikat kompetensi fungsional	63,46	BKPSDM
			Kegiatan 1: Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah Aparatur yang mengikuti Pengembangan kompetensi Umum dan Pilihan	640	BKPSDM
				Jumlah Aparatur yang mengikuti Pengembangan kompetensi Inti Jabatan Administrasi	200	BKPSDM
				Jumlah Aparatur yang mengikuti Pengembangan kompetensi Inti Jabatan Administrasi PD	120	BKPSDM

NO	RKPD 2021						
	Prioritas Pembangunan	Strategi		Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah		Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*		*4*		*5*	*6*	*7*
					Penunjang			
					Sub Kegiatan 1: Penyusunan Kebijakan Teknis Dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Konkuren, Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum	4	BKPSDM
						Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Inti Jabatan Administrasi	2	BKPSDM
						Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Inti Jabatan Administrasi PD Penunjang	2	BKPSDM
						Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Pilihan	4	BKPSDM
					Sub Kegiatan 2: Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum	4	BKPSDM
						Jumlah Dokumen Standar Perangkat Pembelajaran	3	BKPSDM

NO	RKPD 2021						
	Prioritas Pembangunan	Strategi		Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah		Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*		*4*		*5*	*6*	*7*
						Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Inti Jabatan Administrasi		
						Jumlah Dokumen Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Inti Jabatan Administrasi PD Penunjang	2	BKPSDM
						Jumlah Dokumen Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Pilihan	5	BKPSDM
					Sub Kegiatan 3: Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi Teknis Umum	360	BKPSDM
						Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi Teknis Inti Jabatan Administrasi	200	BKPSDM
						Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi Teknis Inti Jabatan Administrasi PD Penunjang	120	BKPSDM
						Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi Teknis Pilihan	280	BKPSDM
					Sub Kegiatan 3: Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan,	Jumlah Laporan Monev Pengembangan Kompetensi Teknis Umum	1	BKPSDM

NO	RKPD 2021					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
			Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum			
				Jumlah Laporan Monev Pengembangan Kompetensi Teknis Inti Jabatan Administrasi	1	BKPSDM
				Jumlah Laporan Monev Pengembangan Kompetensi Teknis Inti Jabatan Administrasi PD Penunjang	1	BKPSDM
				Jumlah Laporan Monev Pengembangan Kompetensi Teknis Pilihan	1	BKPSDM
			Kegiatan 2: Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah ASN yang Tersertifikasi	90	BKPSDM
				Nilai Akreditasi Lembaga Pelatihan	81	BKPSDM
				Jumlah dokumen Sumber Belajar dan Pelaksanaan Kerjasama	18	BKPSDM
				Jumlah Pimpinan Daerah dan Pimpinan Tinggi yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	125	BKPSDM
				Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi Kepemimpinan dan Prajabatan	240	BKPSDM

NO	RKPD 2021					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
				Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti Pengembangan Kompetensi	165	BKPSDM
			Sub Kegiatan 1: Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta jabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi	1	BKPSDM
				Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengelolaan Kelembagan	4	BKPSDM
				Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah dan Jabatan Pimpinan Tinggi	-	BKPSDM
				Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan dan Prajabatan	-	BKPSDM
				Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional	-	BKPSDM
			Sub Kegiatan 2: Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	Laporan Operasional LSP PDN Pemprov Kepulauan Bangka Belitung	1	BKPSDM

NO	RKPD 2021					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
			Sub Kegiatan 3: Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang tersertifikasi	90	BKPSDM
			Sub Kegiatan 4: Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Diklat	10	BKPSDM
				Nilai Akreditasi Diklat	-	BKPSDM
				Penerbitan Media Diklat/Profil Badan/Jurnal Badan	5	BKPSDM
				Jumlah Laporan Evaluasi Pasca Diklat	15	BKPSDM
				Dokumen Perencanaan Pengembangan Kompetensi	1	BKPSDM
				Pengembangan Aplikasi Pelatihan	1	BKPSDM
			Sub Kegiatan 5: Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	Laporan Hasil Kerjasama Antar Lembaga	1	BKPSDM
			Sub Kegiatan 6: Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Standar Perangkat Pemebelajaran Dalam Negeri Bagi Pimpinan Daerah	1	BKPSDM
				Jumlah Dokumen Standar Perangkat Pemebelajaran Dalam Negeri Bagi Jabatan Pimpinan Tinggi	2	BKPSDM
				Jumlah Dokumen Standar Perangkat Pembelajaran Dalam Negeri Bagi Jabatan Fungsional	6	BKPSDM
			Sub Kegiatan 7: Penyelenggaraan Pengembangan	Jumlah Pimpinan Daerah yang mengikuti	80	BKPSDM

NO	RKPD 2021					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
			Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	pengembangan kompetensi		
				Jumlah Pejabat Pimpinan Tinggi yang mengikuti pengembangan kompetensi	45	BKPSDM
				Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti pengembangan kompetensi	165	BKPSDM
				Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan	80	BKPSDM
				Jumlah CASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Prajabatan	160	BKPSDM
			Sub Kegiatan 8: Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, Serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Monev Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah dan Jabatan Pimpinan Tinggi	1	BKPSDM
				Jumlah Laporan Monev Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan dan Prajabatan	1	BKPSDM

NO	RKPD 2021						
	Prioritas Pembangunan	Strategi		Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah		Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*		*4*		*5*	*6*	*7*
						Jumlah Laporan Monev Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional	1	BKPSDM
4	**PEMBANGUNAAN BERDEMOKRASI**		**Peningkatan peran serta masyarakat dalam berdemokrasi**	**1**	**Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan.**	**Jumlah Kasus Penistaan terhadap simbol - simbol Negara.**	**0**	**BAKESBANG-POL**
					Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1 Dokumen	BAKESBANG-POL
					Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.	Jumlah Rekomendasi Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	4 Rekomendasi , 1 Dokumen	BAKESBANG-POL
						Jumlah Rekomendasi Bela Negara dan Karakter Bangsa	4 Rekomendasi	BAKESBANG-POL
					Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporandi Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, BelaNegara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.	Jumlah Laporan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	4 Laporan	BAKESBANG-POL
						Jumlah Laporan Bela Negara dan Karakter Bangsa	4 Laporan	BAKESBANG-POL
			Peningkatan pelayanaan terhadap Hak-hak politik masyarakat	**1**	**Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**Indeks Kinerja Ormas**		**BAKESBANG-POL**
					Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan	Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan	1 Dokumen	BAKESBANG-POL

NO	RKPD 2021					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
			Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.	Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.	Jumlah Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	4 Kebijakan	BAKESBANG-POL
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing Di Daerah.	Jumlah Laporan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	4 Laporan	BAKESBANG-POL
		Peningkatan Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan perda serta perlindungan masyarakat (Linmas)	**1 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial**			**BAKESBANG-POL**
			Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1 Dokumen	BAKESBANG-POL
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi	Jumlah Kebijakan Penanganan Konflik yang dilaksanakan	4 Kebijakan	BAKESBANG-POL

NO	RKPD 2021					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
			Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			
				Jumlah Kebijakan Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen yang dilaksanakan	4 Kebijakan	BAKESBANG-POL
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Rekomendasi Penanganan Konflik	4 Rekomendasi	BAKESBANG-POL
				Jumlah Rekomendasi Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen	4 Rekomendasi	BAKESBANG-POL
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Penanganan Konflik	4 Laporan	BAKESBANG-POL
				Jumlah Laporan Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen	4 Laporan	BAKESBANGPOL
			2 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Jumlah Angka Kriminalitas Menurun		BAKESBANGPOL

NO	RKPD 2021						
	Prioritas Pembangunan	Strategi		Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah		Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*		*4*		*5*	*6*	*7*
					Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1 Dokumen	BAKESBANGPOL
					Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.	Jumlah Kebijakan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan	4 Kebijakan	BAKESBANGPOL
					Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.	Jumlah Rekomendasi Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	4 Rekomendasi	BAKESBANGPOL
					Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporandi Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.	Jumlah Laporan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	4 Laporan	BAKESBANGPOL
				3	**Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum**	**Persentase pelanggaran Tibumtranmas yang ditindak**	**100%**	**SATPOL PP**

NO	RKPD 2021					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
				Persentase penegakan pelanggar perda	100%	SATPOL PP
				Persentase satlinmas yang terlatih dalam penyelenggaraan kantrantibnas dan membantu penanganan bencana dan kebakaran	44,78%	SATPOL PP
				Persentase personil Satpol pp yang berkompeten	83,75%	SATPOL PP
			Kegiatan Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Jumlah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat		SATPOL PP
			Sub Kegiatan 1: Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah pengawalan	50 kali	SATPOL PP
				Jumlah pengamanan demo	24 kali	SATPOL PP
				Jumlah pengamanan aset/piket	360 hari	SATPOL PP
				Jumlah patroli	1080 kali	SATPOL PP
				Jumlah peserta gelar pasukan	600 Orang	SATPOL PP
			Sub Kegiatan 2: Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkada	Jumlah penertiban pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	20 kali	SATPOL PP
			Sub Kegiatan 3: Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum tingkat provinsi	Jumlah dokumen kesepakatan rakor (Jumlah Kegiatan rakor)	1 Dokumen	SATPOL PP
			Sub Kegiatan 4: Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam	Jumlah peserta Satlinmas dalam penyelenggaraan kantrantibmas	50 Orang	SATPOL PP

NO	RKPD 2021			
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
			rangka ketentraman dan ketertiban umum			
				Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan bencana dan kebakaran bagi satlinmas	100 Orang	SATPOL PP
				Jumlah peserta satlinmas yang mampu mengamankan pemilu dan pemilukada	80 Orang	SATPOL PP
			Sub Kegiatan 5: Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia (HAM)	Jumlah peserta pembinaan mental dan spiritual	2 kali 100 orang	SATPOL PP
				Jumlah latihan fisik	22 kali	SATPOL PP
				Jumlah peserta pelatihan pelaksanaan tugas satpol pp	50 Orang	SATPOL PP
				Jumlah pelatihan instruktur upacara	44 kali	SATPOL PP
				Jumlah peserta yang ditingkatkan kompetensinya	15 Orang	SATPOL PP
			Sub Kegiatan 6: Pembinaan jabatan fungsional Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah pembinaan pejabat fungsional satpol pp	4 kali	SATPOL PP
				Jumlah rakor pembinaan Jabatan fungsional Satpol PP	2 kali	SATPOL PP
			Sub Kegiatan 7: Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum	Pengadaan motor patroli	5 motor	SATPOL PP
				Pengadaan HT	4 HT	SATPOL PP
				Pengadaan spy cam	2 unit	SATPOL PP

NO	RKPD 2021						
	Prioritas Pembangunan	Strategi		Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*
				Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Jumlah aktifitas penegakan perda dan perkada	52 kali	SATPOL PP
				Sub Kegiatan 1: Sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan gubernur	Jumlah peserta sosialisasi perda dan perkada	-	SATPOL PP
				Sub Kegiatan 2: Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan gubernur	Penindakan pelanggar perda secara non yustisial (masyarakat/badan hukum)	12 Orang	SATPOL PP
					Jumlah razia ASN	20 kali	SATPOL PP
				Sub Kegiatan 3: Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan gubernur	Penyelidikan pelanggar perda/perkada	10 kasus	SATPOL PP
					Penyidikan pelanggar perda/perkada	3 kasus	SATPOL PP
					Jumlah rapat koordinasi sekretariat PPNS	4 kali	SATPOL PP
				Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Jumlah PPNS yang mampu melakukan pemberkasan penyidikan	-	SATPOL PP
				Sub Kegiatan 1: Pengembangan kapasitas dan karir PPNS (PPNS)	Jumlah PPNS yang mampu melakukan pemberkasan penyidikan	-	SATPOL PP
			4	**Program Penanggulangan Kebakaran**	**Cakupan Relawan Pemadam Kebakaran di kabupaten dan kota**	**0,26**	**SATPOL PP**
				Kegiatan 1: Penyelanggaraan pemetaan rawan bencana kebakaran	Jumlah dokumen peta daerah rawan kebakaran	-	SATPOL PP
				Sub Kegiatan 1: Penyediaan dan pemutakhiran informasi daerah rawan kebakaran dan peta rawan kebakaran	Jumlah dokumen peta daerah rawan kebakaran	-	SATPOL PP

NO	RKPD 2021						
	Prioritas Pembangunan	Strategi		Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*
				Sub Kegiatan 2: Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Jumlah relawan kebakaran yang mampu menanggulangi kebakaran	100 Orang	SATPOL PP
				Sub Kegiatan 3: Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan kebakaran	Jumlah mobil suplai air mobil pemadam kebakaran	-	SATPOL PP
4	**PENINGKATAN PEMBANGUNAN BIDANG KEBENCANAAN**	**1**	**Peningkatan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**			**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**
				Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Jumlah Pelayanan Informasi Publikasi Rawan Bencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	10 Media cetak/elektronik	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
				Penyusunan Kajian Resiko Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan Kajian Kebencanaan di daerah rawan bencana di 7 Kabupaten/kota	1 Dokumen	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
				Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	100 Orang	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
				Pengembangan Sistem Peringatan Dini (Early Warning System) Bencana	Jumlah Pengembangan Sistem Peringatan Dini (Early Warning System) Bencana	1 Unit	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
				Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Di 7 Kab/Kota	Di 7 Kab/Kota	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
				Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Tersusunnya Rencana Penanggulangan Bencana,	1 Laporan	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	RKPD 2021					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
			Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah Orang Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	100 Orang	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1 Pengendalian Operasi Pusdalops	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	4 item peralatan	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			Pengelolaan Risiko Bencana	Jumlah Pengelolaan Risiko Bencana Di 7 Kab/Kota Prov.Kep.Bangka Belitung	7 Kab/Kota Prov.Kep.Bangka Belitung	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Orang Dalam Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	100 Orang	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			Penanganan Pascabencana	Jumlah Penanganan Pasca Bencana di 7 Kab/Kota Prov.Kep.Bangka Belitung	7 Kab/Kota Prov.Kep.Bangka Belitung	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Jumlah Orang Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	100 Orang	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Di 7 Kab/Kota Prov.Kep.Bangka Belitung	7 Kab/Kota Prov.Kep.Bangka Belitung	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Waktu Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	1 Bulan	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Waktu Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	1 Bulan	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA

NO	RKPD 2021							
	Prioritas Pembangunan	Strategi		Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah		Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*		*4*		*5*	*6*	*7*
								DAERAH
					Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Pengerahan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Di 7 Kab/Kota Prov.Kep.Bangka Belitung	37 Orang	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
					Penyediaan Logistik Penyelatam dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Item Penyediaan Logistik Penyelatam dan Evakuasi Korban Bencana	10 Jenis	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
					Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Prioritas Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	7 Prioritas Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
					Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	1 Dokumen	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
					Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	Jumlah Kabupaten Kota Dalam Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	7 Kabupaten Kota	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
					Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah Kerjasama Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	3 Mitra	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
5	**PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP**	**1**	**Peningkatan pengendalian terhadap kualitas air sungai**	**1**	**PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)**	**Persentase DAS yang dikelola**	**1,64**	**DINAS KEHUTANAN**
					Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Luas DAS yang dikelola		DINAS KEHUTANAN
					Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS	Jumlah dokumen RP DAS yang direview	6	DINAS KEHUTANAN

NO	RKPD 2021							
	Prioritas Pembangunan	Strategi		Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah		Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*		*4*		*5*	*6*	*7*
					Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Luas DAS yang dioptimalisasi daya dukung wilayah DAS		DINAS KEHUTANAN
					Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	Jumlah pemegang IPPKH yang menerapkan teknik kta	6	DINAS KEHUTANAN
					Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah kelompok pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan DAS	5	DINAS KEHUTANAN
					Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	Jumlah kelembagaan pengelolaan DAS provinsi	1	DINAS KEHUTANAN
					Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan DAS	6	DINAS KEHUTANAN
		2	**Peningkatan pengendalian terhadap kualitas udara**	**1**	**Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**	**Persentase Titik Pantau Kualitas Air yang memenuhi status mutu Air dengan kategori baik**	**30**	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**
						Persentase Titik Pantau Kualitas Udara yang memenuhi status mutu udara	50	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						Persentase Parameter Kualitas Lingkungan yang terakreditasi	100	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						Persentase Titik Pantau Kualitas Air laut yang Memenuhi Baku Mutu	25	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						Jumlah Rekomendasi Hasil Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca yang diterbitkan	1 Rekomendasi	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						Persentase Data dan Informasi Lingkungan Hidup yang terpublikasi	100	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
					Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	Jumlah Sungai yang dipantau status mutu airnya	11 Sungai	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						Jumlah Kota yang dipantau status Mutu udaranya	7 Kota	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	RKPD 2021					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
				Jumlah Titik Pantau Kualitas Air Laut yang memenuhi Baku Mutu	20 Titik Pantau	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				Jumlah Usulan Parameter Kualitas Lingkungan untuk diakreditasi	37 Parameter	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				Jumlah Rekomendasi hasil Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca	1 Rekomendasi	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah Titik Pantau Kualitas Air	81 Titik Pantau	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				Dokumen Daya dukung dan Daya Tampung Beban Pencemaran Air	1 Dokumen	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				Laporan Implementasi Rencana Aksi Daerah Peningkatan Kualitas Lingkungan	1 Laporan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				Jumlah Titik Pantau Kualitas Udara	28 Titik Pantau	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				Jumlah Titik Pantau Kualitas Air laut	20 Titik Pantau	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				Jumlah Dokumen Prasyarat Akreditasi Laboratorium yang tersusun	4 Dokumen	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				Jumlah Titik Sampling Parameter Kualitas Lingkungan yang terlayani	75 Titik Sampling	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				Jumlah Tenaga Analis Laboratorium	23 Orang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi	Jumlah komponen Data Emisi Gas Rumah Kaca yang terolah	4 Komponen Data	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	RKPD 2021							
	Prioritas Pembangunan	Strategi		Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah		Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*		*4*		*5*	*6*	*7*
					Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim			
					Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen data dan Informasi Lingkungan Hidup yang disusun	2 Dokumen	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
					Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah	1 Dokumen	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						Buku Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi	1 Dokumen	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		3	**Peningkatan tata kelola kehutanan**	**1**	**Program Pengelolaan Hutan**	**Persentase Pengelolaan Hutan**	**90**	**DINAS KEHUTANAN**
					Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen rencana tata hutan kph	7	DINAS KEHUTANAN
					Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah rancang bangun tata hutan KPHP		DINAS KEHUTANAN
						Jumlah rancang bangun tata hutan UPTD KPHP Rambat Menduyung	1	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah rancang bangun tata hutan UPTD KPHP Bubus Panca	1	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah rancang bangun tata hutan KPHP Sigambir Kotawaringin	1	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah rancang bangun tata hutan KPHP Sungai Sembulan	1	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah rancang bangun tata hutan KPHP Gunung Duren	1	DINAS KEHUTANAN
					Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah dokumen pembagian blok/petak pengelolaan hutan KPH		DINAS KEHUTANAN

NO	RKPD 2021					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
				Jumlah dokumen pembagian blok/petak pengelolaan hutan UPTD KPHP Rambat Menduyung	1	DINAS KEHUTANAN
				Jumlah dokumen pembagian blok/petak pengelolaan hutan UPTD KPHP Bubus Panca	1	DINAS KEHUTANAN
				Jumlah dokumen pembagian blok/petak pengelolaan hutan KPHP Muntai Palas	1	DINAS KEHUTANAN
				Jumlah dokumen pembagian blok/petak pengelolaan hutan KPHP Unit IX-Sungai Balar (Muntai Palas)	1	DINAS KEHUTANAN
				Jumlah dokumen pembagian blok/petak pengelolaan hutan KPHL Belantu Mendanau	1	DINAS KEHUTANAN
				Jumlah dokumen pembagian blok/petak pengelolaan hutan KPHP Unit XI - Gunung Tajam (Belantu Mendanau)	1	DINAS KEHUTANAN
			Kegiatan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah dokumen pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan	8	DINAS KEHUTANAN
			Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah dokumen rencana pengelolaan UPTD KPHP Rambat Menduyung	1	DINAS KEHUTANAN
				Jumlah dokumen rencana pengelolaan UPTD KPHP Jebu Bembang Antan	1	DINAS KEHUTANAN

NO	RKPD 2021					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
				Jumlah dokumen rencana pengelolaan UPTD KPHP Bubus Panca	1	DINAS KEHUTANAN
				Jumlah dokumen rencana pengelolaan UPTD KPHP Sigambir Kotawaringin	1	DINAS KEHUTANAN
				Jumlah dokumen rencana pengelolaan UPTD KPHP Sungai Sembulan	1	DINAS KEHUTANAN
				Jumlah dokumen rencana pengelolaan UPTD KPHP Muntai Palas	1	DINAS KEHUTANAN
				Jumlah dokumen rencana pengelolaan UPTD KPHP Belantu Mendanau	1	DINAS KEHUTANAN
				Jumlah dokumen rencana pengelolaan UPTD KPHP Gunung Duren	1	DINAS KEHUTANAN
			Kegiatan Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah izin pemanfaatan HP dan HL		DINAS KEHUTANAN
			Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah data dan informasi wilayah usaha di kawasan hutan produksi	1	DINAS KEHUTANAN
				Jumlah Honorer Operator GIS	1	DINAS KEHUTANAN
			Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah data dan informasi wilayah usaha di kawasan hutan lindung	1	DINAS KEHUTANAN
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah koordinasi dan sinkrinisasi pengendalian izin usaha atau kerjasama pemanfaatan di kawasan hutan produksi	2	DINAS KEHUTANAN
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di	Jumlah koordinasi dan sinkrinisasi pengendalian izin usaha atau kerjasama pemanfaatan di	1	DINAS KEHUTANAN

NO	RKPD 2021					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
			Kawasan Hutan Lindung	kawasan hutan lindung		
			Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah penilaian rencana pengelolaan di kawasan hutan produksi	2	DINAS KEHUTANAN
			Pelaksanaan Pengelolaan Hutan Dengan Tujuan Khusus (HDTK) Untuk Kepentingan Religi	Jumlah izin KHDTK		DINAS KEHUTANAN
			Penetapan Rencana Pengelolaan Tempat Ibadah dan Wisata Rohani di Kawasan Hutan	Jumlah Rencana Pengelolaan	1	DINAS KEHUTANAN
			Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan KHDTK untuk Tempat Ibadah dan Wisata Rohani	Jumlah Pengawasan dan Pengendalian	1	DINAS KEHUTANAN
			Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi hutan dan lahan	42	DINAS KEHUTANAN
			Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah dokumen RTn RL	1	DINAS KEHUTANAN
			Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas hutan rakyat UPTD KPHP Muntai Palas		DINAS KEHUTANAN
				Luas hutan rakyat UPTD KPHP Muntai Palas	10	DINAS KEHUTANAN
			Pembangunan Hutan Kota di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas hutan kota yang dibangun	2	DINAS KEHUTANAN
			Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas penghijauan lingkungan	20	DINAS KEHUTANAN
				Luas penghijauan lingkungan di UPTD KPHP Rambat Menduyung	2	DINAS KEHUTANAN
				Luas penghijauan lingkungan di UPTD KPHP Jebu Bembang Antan	2	DINAS KEHUTANAN

NO	RKPD 2021					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
				Luas penghijauan lingkungan di UPTD KPHP Bubus Panca	4	DINAS KEHUTANAN
				Luas penghijauan lingkungan di UPTD KPHP Sigambir Kotawaringin	2	DINAS KEHUTANAN
				Luas penghijauan lingkungan di UPTD KPHP Sungai Sembulan	4	DINAS KEHUTANAN
				Luas penghijauan lingkungana di UPTD KPHP Muntai Palas	2	DINAS KEHUTANAN
				Luas penghijauan lingkungana di UPTD KPHP Belantu Mendanau	2	DINAS KEHUTANAN
				Luas penghijauan lingkungana di UPTD KPHP Gunung Duren	2	DINAS KEHUTANAN
			Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Jumlah persemaian sederhana		DINAS KEHUTANAN
				Jumlah persemaian sederhana UPTD KPHP Rambat Menduyung	1	DINAS KEHUTANAN
				Jumlah persemaian sederhana UPTD KPHP Jebu Bembang Antan	1	DINAS KEHUTANAN
				Jumlah persemaian sederhana UPTD KPHP Bubus Panca	1	DINAS KEHUTANAN
				Jumlah persemaian sederhana UPTD KPHP Sigambir Kotawaringin	1	DINAS KEHUTANAN
				Jumlah persemaian sederhana UPTD KPHP Sungai Sembulan	1	DINAS KEHUTANAN
				Jumlah persemaian sederhana UPTD KPHP Muntai Palas	1	DINAS KEHUTANAN
				Jumlah persemaian sederhana UPTD KPHL Belantu Mendanau	1	DINAS KEHUTANAN
				Jumlah persemaian sederhana UPTD KPHP Gunung	1	DINAS KEHUTANAN

NO	RKPD 2021					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
				Duren		
			Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Luas kaji terap teknologi RHL	2	DINAS KEHUTANAN
			Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pengembangan RHL	1	DINAS KEHUTANAN
			Kegiatan Perbenihan Tanaman Hutan	Luas sumber benih	20	DINAS KEHUTANAN
			Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	Jumlah pengada dan pengedar benih dan/atau bibit tanaman hutan terdaftar	3	DINAS KEHUTANAN
			Sertifikasi Sumber Benih	Luas sumber benih yang disertifikasi	20	DINAS KEHUTANAN
			Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	Jumlah dokumen pengawasan peredaran benih dan/atau bibit	1	DINAS KEHUTANAN
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Luas penurunan kebakaran hutan dan lahan	1582	DINAS KEHUTANAN
			Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah penanganan perkara pidana kehutanan	2	DINAS KEHUTANAN
			Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Jumlah penanganan aktivas perusakan hutan	2	DINAS KEHUTANAN
				Jumlah honorer pembantu Polhut	30	DINAS KEHUTANAN
			Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Jumlah pengendalian kerusakan kawasan hutan	6	DINAS KEHUTANAN
			Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	Jumlah penanganan aktifitas ilegal pemanfaatan hasil hutan	6	DINAS KEHUTANAN
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan	Jumlah pelaksanaan koordinasi	1	DINAS KEHUTANAN

NO	RKPD 2021						
	Prioritas Pembangunan	Strategi		Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*
				Perlindungan Hutan	perlindungan hutan		
				Kegiatan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Jumlah hasil hutan bukan kayu yang dikembangkan		DINAS KEHUTANAN
				Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	Jumlah alat pengolah bahan baku hasil hutan bukan kayu	4	DINAS KEHUTANAN
				Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK) Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah izin usaha hasil hutan bukan kayu	1	DINAS KEHUTANAN
				Pembudidayaan Hasil Hutan bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Luas pembudidayaan hasil hutan bukan kayu	4	DINAS KEHUTANAN
				Kegiatan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah izin pengolahan hasil hutan kayu		DINAS KEHUTANAN
				Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah pembinaan	1	DINAS KEHUTANAN
				Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah fasilitasi	1	DINAS KEHUTANAN
		4	**Peningkatan pemanfaatan kawasan hutan**	**KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**	**Persentase Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya**	**20**	**DINAS KEHUTANAN**

NO	RKPD 2021							
	Prioritas Pembangunan	Strategi		Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah		Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*		*4*		*5*	*6*	*7*
					Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah tumbuhan dan satwa liar tidak dilindungi yang di konservasi	5	DINAS KEHUTANAN
					Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Jumlah tumbuhan dan satwa liar tidak dilindungi yang dikendalikan dan diawasi	5	DINAS KEHUTANAN
					Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Jumlah kawasan yang meimiliki nilai ekosistem penting	2	DINAS KEHUTANAN
					Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah kelompok masyarakat yang dikuatkan kapasitas dan keberdayaannya	1	DINAS KEHUTANAN
					Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah daerah penyangga yang dikelola	1	DINAS KEHUTANAN
		5	**Peningkatan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan**	**1**	**Program Peningkatan Tata Kelola Lingkungan Hidup**	**Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup**	**0,75**	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**
					Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Jumlah Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	2 Kali Penyelenggaraan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
					Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Beserta turunannya yang tersusun	1 Dokumen	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	RKPD 2021						
	Prioritas Pembangunan	Strategi		Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah		Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*		*4*		*5*	*6*	*7*
						Jumlah Rekomendasi Hasil Validasi KLHS Kabupaten/Kota	7 Rekomendasi	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				2	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Peningkatan Ketatan Usaha/Kegiatan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	0,4	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
					Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan atau izin PPLH yang terfasilitasi	1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						Jumlah Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diawasi	100 Usaha/Kegiatan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
					Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH yang terfasilitasi	18 Izin Lingkungan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						Jumlah Rekomendasi Hasil Kinerja KPA Kabupaten/Kota	7 Rekomendasi	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
					Pengawasan usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Usaha/Kegiatan yang diawasi	100 Usaha/Kegaitan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				3	**Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup**	**Persentase Aduan Masyarakat yang diverifikasi**	**1**	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**
					Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Persentase Aduan Masyarakati yang diverifikasi	1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
					Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap	Persentase Aduan Masyarakat yang diverifikasi	1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	RKPD 2021					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
			PPLH Provinsi			
			Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Peningkatan Kelompok Swadaya Masyarakat yang terbina	0,25	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapat Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	7 Kabupaten /Kota	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Kelompok swadaya Masyarakat yang Terbina	35 Kelompok Masyarakat	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Gerakan Peduli Lingkungan Hidup yang diselenggarakan	5 Kali	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase Penerima Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup Tingkat Provinsi	0,8	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Jenis Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi yang diberikan	3 Jenis Penghargaan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Sekolah yang mendapatkan penghargaan Adiwiyata Tingkat Provinsi	14 Sekolah Adiwiyata	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				Jumlah Bank Sampah yang mendapatkan	3 Bank Sampah	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	RKPD 2021					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
				penghargaan Tingkat Provinsi		
				Jumlah Kota calon Penerima Adipura yag dibina	7 Kota	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Laporan Rencana Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional yang Tersusun	1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Laporan Rencana Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional	1 Laporan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	Laporan Rencana Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional	1 Laporan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

4.2.2 Penyelarasan Permasalahan Pembangunan, Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan Daerah

Tabel IV.8
Keselarasan Antara Prioritas Nasional, Prioritas Dan Sasaran Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021

No.	Permasalahan	Isu Strategis		Prioritas Daerah	
1	*2*	*3*		*4*	
1	Rendahnya harga komoditi pertanian seperti sawit, Karet. Dan lada	1	Percepatan pemulihan ekonomi melalui sektor pertanian, kelautan, pariwisata, perdagangan dan UMKM	1	Pengembangan Pembangunan Agropolitan
2	Masih rendahnya kesejahteraan petani yang terlihat dari nilai tukar petani				
3	Produktivitas bahan pangan terutama padi masih jauh di bawah konsumsi masyarakat				
4	Tingginya ketergantungan daerah terhadap produkproduk dan bahan baku yang berasal dari luar daerah untuk kebutuhan konsumsi baik kamoditas pangan mau pun komoditas non pangan				
5	Brlum optimalnya produktivitas perikanan baik dari perikanan tangkap maupun perikanan budidaya			2	Pembangunan Bahari
6	Belum optimalnya penerapatan teknologi budidaya ikan di daerah pantai, tambak, dan air tawar				
7	Objek dan destinasi wisata belum dikelola dengan baik			3	Pembangunan Pariwisata
8	Belum memadainya sarana dan prasana penunjang untuk pengembangan sektor pariwisata				

No.	Permasalahan	Isu Strategis		Prioritas Daerah	
1	*2*	*3*		*4*	
9	Rendahnya kualitas Sumber daya manusia dalam bidang kepariwisataan				
10	Rendahnya Daya Saing produk UMKM				
12	Belum optimalnya penyediaan data konsep potensi dan peluang investasi yang siap ditawarkan.	2	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	4	Peningkatan Ekonomi Masyarakat
13	Belum optimalnya pengembangan sistem informasi pelayanan perizinan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.				
14	Belum optimalnya pemberian insentif dan kemudahan bagi para investor dalam berinvestasi di provinsi Kepulauan Bangka Belitung				
15	Belum memadainya ketersediaan infrastruktur strategis (energi, pelabuhan, air bersih)				
16	Angka Rata-rata lama sekolah yang masih rendah dimana tahun 2017 sebesar 7,78 tahun	3	Peningkatan Sumberdaya manusia yang berkualitas	5	Pembangunan Pendidikan
17	Tingginya angka anak putus sekolah (Drop Out) khususnya pendidikan menengah				
18	Usia harapan hidup yang masih rendah dimana tahun 2017 sebesar 69,99 tahun	4	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	6	Pembangunan Kesehatan
19	Angka kematian ibu yang masih tinggi				
20	Kurangnya penerapan perda yang diterbitkan.	5	Reformasi birokrasi dan pelayanan publik belum optimal	7	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik
21	Kurangnya penerapan Pergub dan Keputusan Gubernur yang diterbitkan				
22	Rendahnya tingkat pelayanan publik				
23	Rendahnya pengawasan terhadap pelaksanaan APBD				
24	Kurangnya pemahaman pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan alam, yang ditunjukkan dengan masih maraknya kegiatan penambangan liar/TI dan penebangan liar (ilegalloging)	6	Peningkatan kualitas lingkungan dan penanggulangan bencana	8	Pengendalian Lingkungan Hidup

No.	Permasalahan	Isu Strategis	Prioritas Daerah
1	*2*	*3*	*4*
25	Kurangnya koordinasi dan kerjasama dalam menangani masalah-masalah perusakan alam yang lintas sektoral dan lintas wilayah		
26	Masih lemahnya koordinasi dalam penanganan bidang kebencanaan baik pra, saat terjadi bencana maupun pasca bencana		

4.2.3 Prioritas Pembangunan Daerah Dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Nasional

Berdasarkan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2020 dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021 secara daring, melalui *video conference*. Dibuka Presiden RI Joko Widodo dan dihadiri Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin, para pimpinan lembaga tinggi negara, menteri dan kepala lembaga pemerintah non-kementerian, Gubernur seluruh Indonesia, pimpinan BUMN dan KADIN, serta dan Bupati/Walikota kandidat penerima Penghargaan Pembangunan Daerah, Musrenbangnas 2020 membahas pertimbangan asumsi pandemi Covid-19 selesai di 2020 dan skenario agenda pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19 sebagai bagian penting dalam Kerangka Ekonomi Makro RKP 2021 dengan mengusung 7 (tujuh) Prioritas Nasional Tahun 2021

Gambar IV.1
Posisi Dokumen RKPD Tahun 2021 Terhadap RPJPD Tahun 2005 – 2025
dan Perubahan RPJMD Tahun 2017 – 2022



Prioritas nasional tersebut dijabarkan lebih lanjut dengan program prioritas, kegiatan prioritas dan proyek prioritas nasional sebagaimana Tabel IV.8. Matrik ini menjadi salah satu acuan bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menetap program dan kegiatan yang selaras dengan rencana pembangunan nasional tahun 2021.

Penyusunan sasaran dan prioritas Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2021 harus diselaraskan untuk mendukung pencapaian 7 (tujuh) prioritas pembangunan nasional sebagai berikut:

1. memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan dengan sasaran antara lain: a) meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi; b) meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian;
2. mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan antara lain: a) meningkatnya pemerataan antar wilayah (antara KBI – KTI dan jawa dan luar jawa); b) meningkatnya keunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan wilayah; c) meningkatnya kualitas dan akses pelayanan dasar, daya saing serta kemandirian daerah; d) meningkatnya sinergi pemanfaatan ruang dan wilayah;
3. meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing dengan sasaran pembangunan antara lain: a) pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan; b) perlindungan sosial bagi seluruh penduduk; c) pemenuhan layanan dasar; d) peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda; e) pengentasan kemiskinan; f) peningkatan produktivitas dan daya saing;
4. revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, dengan sasaran pembangunan antara lain: a) menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya; b) meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan ; c) meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial; d) menguatnya modernisasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat; e) meningkatnya ketahanan keluarga untuk

memperkukuh karakter bangsa; (f) meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif dan kreatif.

5. memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, dengan sasaran pembangunan antara lain: a) meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar; b) meningkatnya konektivitas wilayah; c) meningkatnya layanan angkutan umum masal di 6 (enam) kota metropolitan; (d) meningkatnya akses dan pasokan energi dan tenaga listrik yang merata, andal dan efisien; (e) meningkatnya pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi.
6. membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim, dengan sasaran pembangunan antara lain: (a) peningkatan kualitas lingkungan hidup; (b) peningkatan ketahanan bencana dan iklim; (c) pembangunan rendah karbon.
7. memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik, dengan sasaran pembangunan antara lain: (a) konsolidasi demokrasi; (b) optimalisasi kebijakan luar negeri; (c) penegakan hukum nasional yang mantap; (d) reformasi birokrasi dan tata kelola; (e) menjaga stabilitas keamanan nasional.

Untuk mencapai 7 (tujuh) prioritas pembangunan nasional, diperlukan kondisi yang kondusif yang terkait pembangunan politik, hukum, pertahanan dan keamanan. penyelarasan 5 (lima) prioritas pembangunan nasional dengan 13 (tiga belas) prioritas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut sebagaimana disajikan dalam Tabel IV.8.

Tabel IV.8
Keselarasan Antara Prioritas Nasional, Prioritas Dan Sasaran Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021

No	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional 2021	Prioritas Daerah I (utama)		Prioritas Daerah II (Penunjang)		Sasaran Daerah	
1	2	3		4		5	
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	1	Peningkatan Ekonomi Masyarakat			1	Menurunkan tingkat pengangguran
						2	Meningkatkan kesejahteraan Tenaga Kerja
						3	Menurunkan tingkat kemiskinan
						4	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	1	Pengembangan Pembangunan Agropolitan			1	Meningkatkan nilai tambah sektor pertanian
		2	Pembangunan Bahari			2	Meningkatkan nilai tambah sektor perikanan
		3	Pengembangan Pariwisata			3	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata
3	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	1	Pembangunan Pendidikan			1	Meningkatkan kesempatan pendidikan

No	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional 2021	Prioritas Daerah I (utama)		Prioritas Daerah II (Penunjang)		Sasaran Daerah	
1	2	3		4		5	
						2	Meningkatkan kualitas pendidikan
				1	Pembangunan Sosial	3	Meningkatkan kesejahteraan anak
						4	Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk
						5	Meningkatkan pembangunan resposif gender
						6	Meningkatkan kualitas pemuda
						7	Meningkatkan pembanguna olah raga
						8	Meningkatkan kesejahteran sosial
		2	Pembangunan Kesehatan			1	Meningkatnya kesehatan masyarakat
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan			1	Pembangunaan Berdemokrasi	1	Meningkatkan kebebasan sipil
						2	Meningkatkan hak-hak politik
						3	Meningkatkan peran lembaga demokrasi
5	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar			1	Pengembangan Energi Dan Infrastruktur Kewilayahan	1	Meningkatkan ketersedian infrastruktur pekerjaan Umum
						2	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar
						3	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur perhubungan
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim			1	Peningkatan Pembangunan Bidang Kebencanaan	1	Meningkatkan Kapasitas daerah terhadap penanggulangan bencana
				2	Pengendalian Lingkungan Hidup	1	Meningkatkan pengendalian lingkungan hidup
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik			1	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	1	Meningkatkan Tata kelola pemerintahan

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2021 (RPJMN 2020-2024): **"Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial"**, maka sasaran yang harus dicapai pada akhir tahun 2021, sesuai dengan Rancangan Awal RKP 2021, antara lain:

1. Pencapaian target pertumbuhan ekonomi se besar 4,5–5,5 persen (*); dengan sasaran per wilayah; Sumatera sebesar 5,0 persen; Jawa-bali sebesar 5,7 persen; Nusa Tenggara sebesar 3,2

persen; Kalimantan sebesar 4,2 persen; Sulawesi sebesar 6,6 persen; Maluku sebesar 6,1 persen dan Papua sebesar 5,6 persen;

2. Pencapaian target tingkat kemiskinan sebesar 9,2-9,7 persen (*); dengan sasaran Tingkat Kemiskinan Per Wilayah: Sumatera sebesar 7,9 persen; Jawa-bali sebesar 7,73 persen; Nusa Tenggara sebesar 16,85 persen; Kalimantan sebesar 4,06 persen; Sulawesi sebesar 9,65 persen; Maluku sebesar 11,49 persen dan Papua sebesar 23,28 persen;
3. Pencapaian target tingkat pengangguran sebesar 7,5-8,2 persen (*); dengan sasaran Tingkat Pengangguran Per Wilayah: Sumatera sebesar 4,7 persen; Jawa-bali sebesar 5,5 persen; Nusa Tenggara sebesar 2,9 persen; Kalimantan sebesar 4,7 persen; Sulawesi sebesar 3,9 persen; Maluku sebesar 6,1 persen dan Papua sebesar 2,8 persen; dan
4. Sasaran laju inflasi 2,0-4,0.

Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Prioritas Nasional dapat dilihat dari kesamaan indikator makro yang digunakan untuk menjadi target pembangunan secara makro baik di tingkat nasional, regional dan daerah yang tertuang dalam tabel IV.7 dibawah.

Tabel IV.7
Keselarasan target indikator pembangunan makro antara target Nasional, Regional Sumatera dan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021

Indikator	Tahun 2021		
	Nasional	Sumatera	Babel
(1)	(2)	(3)	(4)
Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,5-5,5%	5,0	3,25
Tingkat Kemiskinan %	9,2-9,7%	7,9	5,15
Tingkat Pengangguran %	7,5-8,2%	4,7	5,50
Laju Inflasi (%)	3,01%	5,3	3,5-4,0

**) data tidak tersedia*
Sumber: Ranwal RKP 2021, RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2022

4.2.4 Prioritas Pembangunan Nasional, Program Prioritas dan Program Pembangunan Daerah

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Tabel IV.9

Keselarasan Prioritas Nasional, Arah Kebijakan Nasional dan Program Pembangunan Daerah Tahun 2021

No	RKP 2021			RKPD 2021						
	Prioritas Nasional	Program Prioritas		Strategi		Program		Kinerja Program		Perangkat Daerah
								Indikator	Target	
1	*2*	*3*		*4*		*5*		*6*	*7*	*8*
1	**MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS DAN BERKEADILAN**	**P P 6**	**Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi**	**1**	**Peningkatan kesempatan kerja**	**1**	**Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja**	Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan pelatihan berdasarkan klaster kompetensi	4%	DISNAKER
								Persentase Pelatihan Kerjasama dengan sektor swasta dan instansi pemerintah lainnya untuk penyedia instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja	20%	DISNAKER
								Meningkatnya Kompetensi dan Produktivitas	15 Perusahaan	DISNAKER
						2	**Program Penempatan Tenaga Kerja**	Persentase Tenga Kerja Menurunnya Angka Pencari Kerja	5%	DISNAKER

No	RKP 2021			RKPD 2021						
	Prioritas Nasional	Program Prioritas		Strategi		Program		Kinerja Program		Perangkat Daerah
								Indikator	Target	
1	*2*	*3*		*4*		*5*		*6*	*7*	*8*
		PP 5	**Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan koperas**	**2**	**Peningkatkan peran KUKM dalam meningkatkan kesempatan kerja**	**1**	**Program Pelayanan Izin Simpan Pinjam**	Persentase rekomendasi izin Usaha Simpan Pinjam yang dikeluarkan	20%	DINAS KUKM
						2	**Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi**	Persentase Koperasi Aktif	70%	DINAS KUKM
						3	**Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi**	Persentase Koperasi berkualitas	50%	DINAS KUKM
						4	**Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian**	Persentase SDM Koperasi yang terlatih	30%	DINAS KUKM
						5	**Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi**	Persentase Koperasi yang diberdayakan	20%	DINAS KUKM
						6	**Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UKM)**	Persentase UMKM yang diberdayakan	1%	DINAS KUKM

No	RKP 2021		RKPD 2021					
	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Strategi		Program		Kinerja Program		Perangkat Daerah
							Indikator	Target	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*	*7*	*8*
					7	**Program Pengembangan UKM**	Persentase UMKM yang dikembangkan	1%	DINAS KUKM
			3	**Peningkatan Promosi, koordinasi, kerjasama, dan investasi dalam peningkatan lapangan pekerjaan**	**1**	**Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**	Jumlah Kebijakan Daerah Yang Mendukung Investasi	1 Kebijakan	DINAS PMPTSP
					2	**Program Promosi Penanaman Modal**	Jumlah Realisasi Investasi	1,9 Trilyun	DINAS PMPTSP
					3	**Program Pelayanan Penanaman Modal**	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sesuai SOP	100%	DINAS PMPTSP
					4	**Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**	Meningkatnya persentase capaian realisasi investasi	15%	DINAS PMPTSP
					5	**Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal**	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP	100%	DINAS PMPTSP
			4	**Peningkatan Kompetensi, hubungan industrial dan keselamatan tenaga kerja**	**1**	**Program Hubungan Industrial**	Persentase perusahaan yang telah memiliki sarana hubungan industrial		DISNAKER

No	RKP 2021				RKPD 2021						
	Prioritas Nasional		Program Prioritas		Strategi		Program		Kinerja Program		Perangkat Daerah
									Indikator	Target	
1	*2*		*3*		*4*		*5*		*6*	*7*	*8*
							2	**Program Pengawasan Ketenagakerjaan**	Persentase pengawasan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan		DISNAKER
				5	**Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin**	**1**	**Program Pemberdayaan Sosial**	Persentase PMKS/PSKS yg terberdayakan		DINAS SOSIAL
						2	**Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan**	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang di ditangani		DINAS SOSIAL
						3	**Program Rehabilitasi Sosial**	Persentase PMKS yang di Rehabilitasi sosial di Dalam Panti Non Pemerintah		DINAS SOSIAL
						4	**Program Rehabilitasi Sosial**	Persentase PMKS yang di Rehabilitasi sosial di PSBL		DINAS SOSIAL
						5	**Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**	Prosentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial		DINAS SOSIAL
				6	**Peningkatan pendapatan masyarakat desa**	**1**	**Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Tingkat Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa		DINAS PEMDES

No	RKP 2021			RKPD 2021						
	Prioritas Nasional	Program Prioritas		Strategi		Program		Kinerja Program		Perangkat Daerah
								Indikator	Target	
1	*2*	*3*		*4*		*5*		*6*	*7*	*8*
						2	**Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat**	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif. Persentase lembaga adat desa yang aktif		DINAS PEMDES
						3	**Program Peningkatan Kerjasama Desa**	Persentase kerjasama Desa yang dilaksanakan		DINAS PEMDES
		P P 3	**Peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan**	**1**	**Peningkatan sarana prasarana produksi pertanian, perkebunan, dan perternakan**	**1**	**Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian**	Persentase ketersediaan saprodi pertanian	15%	DINAS PERTANIAN
								Persentase peningkatan luas tanam Tanaman Pangan	69,58	DINAS PERTANIAN
								Persentase peningkatan luas tanam Hortikultura	14,21	DINAS PERTANIAN
								Persentase peningkatan luas tanam perkebunan	10,17	DINAS PERTANIAN
								Persent	50%	DINAS PERTANIAN

No	RKP 2021		RKPD 2021					
	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Strategi	Program		Kinerja Program		Perangkat Daerah
						Indikator	Target	
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*	*7*	*8*
						ase Ketersediaan benih/bibit pertanian tingkat lapang (daerah)		
						Persentase benih/bibit pertanian berlabel dan bersertifikat	5%	DINAS PERTANIAN
						Persentase Pertambahan Angka Kelahiran Ternak	356,32	DINAS PERTANIAN
						Persentase penurunan kasus penyakit hewan menular	100	DINAS PERTANIAN
						Peningkatan unit usaha yang bersertifikasi NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	90	DINAS PERTANIAN
						Persentase ketersediaan pakan ternak	90	DINAS PERTANIAN
				2	**Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian**	Rasio Ketersediaan Prasarana Pertanian	15	DINAS PERTANIAN

No	RKP 2021			RKPD 2021						
	Prioritas Nasional	Program Prioritas		Strategi		Program		Kinerja Program		Perangkat Daerah
								Indikator	Target	
1	*2*	*3*		*4*		*5*		*6*	*7*	*8*
						1	**Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**	Persentase penurunan kasus penyakit hewan menular	75	DINAS PERTANIAN
						2	**Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian**	Dokumen Laporan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	4	DINAS PERTANIAN
						3	**Program Perizinan Usaha Pertanian**	Dokumen Perizinan usaha pertanian	1	DINAS PERTANIAN
						1	**Program Penyuluhan Pertanian**	Persentase peningkatan kelas kelompok tani	80	DINAS PERTANIAN
		P P 4	**Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan**	**4**	**Peningkatan Kualitas Sumber daya Manusia Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya**	**1**	**Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil**	Luasan ruang laut, pesisir dan pulau pulau kecil yang termanfaatkan (Ha)		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
						1	**Program Pengembangan perikanan Tangkap**	Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap (%)	1,85%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
						2	**Program Pengembangan Perikanan Budidaya**	Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap (%)		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
						3	**Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**	Persentase Pelaku Usaha yang Taat Aturan (%)	75	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	RKP 2021			RKPD 2021						
	Prioritas Nasional	Program Prioritas		Strategi		Program		Kinerja Program		Perangkat Daerah
								Indikator	Target	
1	*2*	*3*		*4*		*5*		*6*	*7*	*8*
						1	**Program Pengembangan Usaha Pengolahan Hasil Perikanan**	Pertumbuhan Produksi Usaha Pengolahan Hasil Perikanan (%)	3,30%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		P P 7	**Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri**	**7**	**Peningkatan peran serta masyarakat dan kelembagaan pariwisata serta Pengembangan ekonomi kreatif**	**1**	**PROGRAM 2: Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak kekayaan Intelektual**	Persentase kabupaten/kota yang terindentifikasi untuk pengembangan kabupaten/kota kreatif, ruang kreasi dan jaringan orang kreatif	42,85%	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
						1	**Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata**	Persentase Destinasi Pariwisata yang memenuhi standar	70%	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
						1	**Program Pembinaan Sejarah**	Persentase Pembinaan Sejarah	35%	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
						2	**Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**	Persentase SDM pariwisata dan ekonomi kreatif terlatih dan terserfikasi	29,14%	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
								Persentase Kemitraan Pariwisata yang terbentuk	82,85%	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

No	RKP 2021			RKPD 2021					
	Prioritas Nasional	Program Prioritas		Strategi		Program		Kinerja Program		Perangkat Daerah
								Indikator	Target	
1	*2*	*3*		*4*		*5*		*6*	*7*	*8*
								Persentase Assesor bidang yang terlatih	50%	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
						1	**Program Pengembangan Kebudayaan**	Persentase Kebudayaan yang dikelola	55%	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
						2	**Program Pengembangan Kesenian Tradisional**	Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan	55%	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	**MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN**	**pp 1**	**Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Sumatera**		**Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum**		**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	Persentase Penyediaan Air Baku	0,12 persen	DNAS PEKERJAAN UMUM
							PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Tenaga Ahli Konstruksi yang bersertifikat	20 persen	DNAS PEKERJAAN UMUM
							PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap	91,50 %	DNAS PEKERJAAN UMUM
							PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	persentase peningkatan luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air	0,32 persen	DNAS PEKERJAAN UMUM
								Rasio Jaringan Irigasi	18,70%	DNAS PEKERJAAN UMUM

No	RKP 2021				RKPD 2021						
	Prioritas Nasional		Program Prioritas		Strategi		Program		Kinerja Program		Perangkat Daerah
									Indikator	Target	
1	*2*		*3*		*4*		*5*		*6*	*7*	*8*
								PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Ketaatan terhadap RTRW	50 nilai	DNAS PEKERJAAN UMUM
						Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan sarana prasarana perhubungan		**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	Persentase Rute Pelayaran yang terfasilitasi	67 persen	DINAS PERHUBUNGAN
									Prosentase Pemenuhan Infrastruktur Kepelabuhanan	67 persen	DINAS PERHUBUNGAN
								PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	26,47 persen	DINAS PERHUBUNGAN
3	**MENINGKATKAN SDM BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING**	**P P 4**	**Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas**	**1**	**Peningkatan akses pelayanan pendidikan**	**1**	**Program Pengelolaan Pendidikan**		Persentase GTK Bersertifikasi	80	DINAS PENDIDIKAN
									Nilai rata-rata UK GTK SMA	60	DINAS PENDIDIKAN

No	RKP 2021			RKPD 2021						
	Prioritas Nasional	Program Prioritas		Strategi		Program		Kinerja Program		Perangkat Daerah
								Indikator	Target	
1	*2*	*3*		*4*		*5*		*6*	*7*	*8*
								jumlah medali siswa dalam kompetisi nasional /Internasional	4	DINAS PENDIDIKAN
								APK SMA	43,43	DINAS PENDIDIKAN
				2	**Peningkatan mutu layanan pendidikan**	**1**	**Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan**	persentase guru yang mengajar sesuai dengan kompetensi	80%	DINAS PENDIDIKAN
						2	**Program Pengembangan Kurikulum Dan Pengendalian Perizinan Pendidikan**	Persentase dokumen kurikulum yg terintegrasi dengan kurikulum nasional	75%	DINAS PENDIDIKAN
						3	**Program Bahasa Dan Sastra**	persentase minat siswa terhadap bahasa dan sastra	70%	DINAS PENDIDIKAN
		PP 5	**Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda**	**3**	**Peningkatan pelayanan terhadap pemberian hak-hak anak**	**1**	**Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)**	Persentase SDM dalam Pemenuhan Partisipasi ANAK	90,00%	DP3ACSKB
						2	**Program Perlindungan Khusus Anak**	Rasio ketersediaan SDM Perlindungan Anak	90,00%	DP3ACSKB
		PP 1	**Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan**	**4**	**Pengendalian tingkat kelahiran penduduk dan perpindahan penduduk untuk mencapai penduduk**	**1**	**Program Pengendalian Penduduk**	persentase kab/kota yang memiliki Dokumen pengendalian penduduk	71,42%	DP3ACSKB

No	RKP 2021		RKPD 2021					
	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Strategi	Program	Kinerja Program		Perangkat Daerah
					Indikator	Target	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
			tumbuh seimbang				
				2 Program Pendaftaran Penduduk	Persentase masyarakat yang memiliki dokumen pendaftaran penduduk (KK, KTP, KIA)	78,33%	DP3ACSKB
				3 Program Pencatatan Sipil	Persentase masyarakat yang memiliki akta pencatatan sipil (Akta Lahir, Akta Mati, Akta Perkawinan)	98,33%	DP3ACSKB
				4 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase perangkat daerah dan lembaga lain yang mengadakan pejanjian kerjasama	37,84%	DP3ACSKB
				5 Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase penyediaan penyajian database kependudukan tingkat provinsi yang akurat	100%	DP3ACSKB
			5 Menekan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan	**1 Program Perlindungan Perempuan**	Rasio ketersediaan SDM Perlindungan Perempuan	90,00%	DP3ACSKB

No	RKP 2021				RKPD 2021						
	Prioritas Nasional		Program Prioritas		Strategi		Program		Kinerja Program		Perangkat Daerah
									Indikator	Target	
1	*2*		*3*		*4*		*5*		*6*	*7*	*8*
						anak					
					6	**Peningkatan keadilan dan kesetaraan gender**	**1**	**Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan**	Persentase Kegiatan yang responsif gender	80%	DP3ACSKB
							2	**Program Peningkatan Kualitas Keluarga**	Persentase Perempuan kepala Keluarga yang di berdayakan	12,66%	DP3ACSKB
							3	**Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak**	Persentase OPD yang menyediakan data pilah gender dan anak	78&	DP3ACSKB
					7	**Peningkatan Insan pemuda yang mandiri dan berprestasi**	**1**	**Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Pemuda**	Persentase Pemuda Yang Berprestasi	0,1	DISKEPORA
									Persentase Pemuda yang Memiliki Keterampilan	0,05	DISKEPORA
							2	**Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan**	Persentase Organisasi Pemuda yang memiliki Standarisasi	0,1	DISKEPORA
					8	**Peningkatan prestasi dan peran serta masyarakat dalam berolah**	**1**	**Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan**	Persentase atlet pelajar yang berprestasi	40,48	DISKEPORA

No	RKP 2021			RKPD 2021						
	Prioritas Nasional	Program Prioritas		Strategi		Program		Kinerja Program		Perangkat Daerah
								Indikator	Target	
1	*2*	*3*		*4*		*5*		*6*	*7*	*8*
					raga					
		pp 2	**Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial**	**9**	**Peningkatan rehabilitasi, jaminan dan perlindungan sosial**		**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	Prosentase PMKS yang di Rehabilitasi sosial di Dalam Panti Non Pemerintah	50%	
							PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Prosentase korban bencana yg mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	50%	
							PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Prosentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	0.5	
		pp 3	**Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan**	**9**	**Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat**	**1**	**Program: Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi Minimal Utama	30 persen	DINAS KESEHATAN
								Persentase Peningkatan Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan	10 persen	DINAS KESEHATAN
								Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Memakai Sistem Informasi Kesehatan yang Dipersyaratkan	50 persen	DINAS KESEHATAN

No	RKP 2021		RKPD 2021					
	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Strategi	Program		Kinerja Program		Perangkat Daerah
						Indikator	Target	
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*	*7*	*8*
						Persentase Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	80 persen	DINAS KESEHATAN
						Persentase Status Kesehatan Masyarakat	76,45 persen	DINAS KESEHATAN
						Persentase Pelaksanaan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	100 persen	DINAS KESEHATAN
						Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Menggunakan Sistem Iinformasi Kesehatan yang Dipersyaratkan	50 persen	DINAS KESEHATAN
				2	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan**	Persentase Tenaga Kesehatan yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi	80 persen	DINAS KESEHATAN
				3	**Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman**	Persentase Sediaan Farasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman yang Memenuhi Syarat	45 persen	DINAS KESEHATAN

No	RKP 2021			RKPD 2021						
	Prioritas Nasional	Program Prioritas		Strategi		Program		Kinerja Program		Perangkat Daerah
								Indikator	Target	
1	*2*	*3*		*4*		*5*		*6*	*7*	*8*
						4	**Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan**	Persentase Posyandu Aktif	63 persen	DINAS KESEHATAN
				10	**Peningkatan pelayanaan kesehatan masyarakat**	**1**	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	Persentase Pelayanan,sarana dan prasarana yang tersedia di rumah Sakit	80%	RSUP
						2	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan**	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya manusia Kesehatan	80%	RSUP
						3	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat**			RSJ
						4	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan**			RSJ
4	**REVOLUSI MENTAL DAN PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN**	**PP 1**	**Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter**	**1**	**Peningkatan peran serta masyarakat dalam berdemokrasi**	**1**	**Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan.**	Jumlah Kasus Penistaan terhadap simbol - simbol Negara.	0	BAKESBANGPOL

No	RKP 2021		RKPD 2021						
	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Strategi		Program		Kinerja Program		Perangkat Daerah
							Indikator	Target	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*	*7*	*8*
			2	**Peningkatan pelayanaan terhadap Hak-hak politik masyarakat**	**1**	**Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	Indeks Kinerja Ormas		BAKESBANGPOL
			3	**Peningkatan Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan perda serta perlindungan masyarakat (Linmas)**	**1**	**Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial**			BAKESBANGPOL
					2	**Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya**	Jumlah Angka Kriminalitas Menurun		BAKESBANGPOL
					3	**Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum**	Persentase pelanggaran Tibumtranmas yang ditindak	100%	SATPOL PP
							Persentase penegakan pelanggar perda	100%	SATPOL PP

No	RKP 2021		RKPD 2021					
	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Strategi		Program		Kinerja Program	Perangkat Daerah
							Indikator / Target	
1	2	3	4		5		6 / 7	8
							Persentase satlinmas yang terlatih dalam penyelenggaraan kantrantibnas dan membantu penanganan bencana dan kebakaran	44,78%	SATPOL PP
							Persentase personil Satpol pp yang berkompeten	83,75%	SATPOL PP
					4	**Program Penanggulangan Kebakaran**	Cakupan Relawan Pemadam Kebakaran di kabupaten dan kota	0,26	SATPOL PP
			4	**Peningkatan pengembangan Lembaga-Lembaga Demokrasi**	**1**	**Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik**	Persentase Ketidakhadiran Masyarakat dalam Pemilu/Pemilu Kada	15%	BAKESBANGPOL
					2	**Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik**			BAKESBANGPOL

No	RKP 2021			RKPD 2021						
	Prioritas Nasional	Program Prioritas		Strategi		Program		Kinerja Program		Perangkat Daerah
								Indikator	Target	
1	*2*	*3*		*4*		*5*		*6*	*7*	*8*
		P P 2	**Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia**	**5**	**Peningkatan Tata Kelola pelestarian Kebudayaan**	**1**	**Program Pengembangan Kebudayaan**	Persentase Kebudayaan yang dikelola	55%	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
						2	**Program Pengembangan Kesenian Tradisional**	Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan	55%	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
5	**MEMPERKUAT INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PENGEMBANGAN EKONOMI DAN PELAYANAN DASAR**	**P P 1**	**Infrastruktur Pelayanan Dasar**	**1**	**Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum**	**1**	**Program Penyelenggaraan Jalan**	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	96,56%	DINAS PUPR
						2	**Program Pengembangan Sumber Daya Air**	Persentase peningkatan luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air	5%	DINAS PUPR

No	RKP 2021		RKPD 2021						
	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Strategi		Program		Kinerja Program		Perangkat Daerah
							Indikator	Target	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*	*7*	*8*
							Persentase Penyediaan Air Baku	2%	DINAS PUPR
							Rasio Irigasi	50%	DINAS PUPR
			2	**Peningkatan kesesuaian pembangunan infrastruktur dengan tata ruang**	**1**	**Program Penyelenggaraan Penataan Ruang**	Persentase kesesuaian pengembangan infrastruktur wilayah dengan rencana tata ruang	83%	DINAS PUPR
			3	**Peningkatan ketersediaan dan kapasitas SDM Konstruksi**	**1**	**Program Pengembangan Jasa Konstruksi**	Rasio ketersediaan penyelenggaraan jasa konstruksi	96,09%	DINAS PUPR
			4	**Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur perumahan dan permukiman**	**1**	**Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum**	persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak	74,65%	DINAS PERKIM
					2	**Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional**	persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan persampahan	15%	DINAS PERKIM
					3	**Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah**	persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak	92,50%	DINAS PERKIM

No	RKP 2021			RKPD 2021						
	Prioritas Nasional	Program Prioritas		Strategi		Program		Kinerja Program		Perangkat Daerah
								Indikator	Target	
1	*2*	*3*		*4*		*5*		*6*	*7*	*8*
						4	**Program Pengelolaan Dan Pengembangan Drainase**	Persentase panjang drainase dalam kondisi baik	28,50%	DINAS PERKIM
						5	**Program Pengembangan Permukiman**	Persentase Permukiman di KSP dalam kondisi baik	3,91%	DINAS PERKIM
						6	**Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya**	Persentase Luas Kawasan yang Tertata	30%	DINAS PERKIM
						7	**Program Pengembangan Perumahan**	persentase rumah akibat bencana yang tertangani	100%	DINAS PERKIM
						8	**Program Peningkatan Prasarana , Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)**	Persentase Permukiman yang terfasiltasi oleh PSU	50%	DINAS PERKIM
		P P 2	**Infrastruktur Ekonomi**	**5**	**Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan sarana prasarana perhubungan**	**1**	**Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)**	Prosentase Pemenuhan Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	26,47	DINAS PERHUBUNGAN
						2	**Program Pengelolaan Pelayaran**	Prosentase Pemenuhan Infrastruktur Pelayaran	67%	DINAS PERHUBUNGAN

No	RKP 2021			RKPD 2021						
	Prioritas Nasional	Program Prioritas		Strategi		Program		Kinerja Program		Perangkat Daerah
								Indikator	Target	
1	*2*	*3*		*4*		*5*		*6*	*7*	*8*
						3	**Program Pengelolaan Penerbangan**	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana fasilitas bandara	20%	DINAS PERHUBUNGAN
6	**MEMBANGUN LINGKUNGAN HIDUP, MENINGKATKAN KETAHANAN BENCANA, DAN PERUBAHAN IKLIM**	**PP 2**	**Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim**	**1**	**Peningkatan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana**	**1**	**Program Penanggulangan Bencana**			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		PP 1	**Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup**	**2**	**Peningkatan pengendalian terhadap kualitas air sungai**	**1**	**Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)**	Persentase DAS yang dikelola	1,64	DINAS KEHUTANAN
				3	**Peningkatan pengendalian terhadap kualitas udara**	**1**	**Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**	Persentase Titik Pantau Kualitas Air yang memenuhi status mutu Air dengan kategori baik	30%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
								Persentase Titik Pantau Kualitas Udara yang memenuhi status mutu udara	50%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
								Persentase Parameter Kualitas Lingkungan yang terakreditasi	100%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	RKP 2021			RKPD 2021						
	Prioritas Nasional	Program Prioritas		Strategi		Program		Kinerja Program		Perangkat Daerah
								Indikator	Target	
1	*2*	*3*		*4*		*5*		*6*	*7*	*8*
								Persentase Titik Pantau Kualitas Air laut yang Memenuhi Baku Mutu	25%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
								Jumlah Rekomendasi Hasil Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca yang diterbitkan	1 Rekomendasi	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
								Persentase Data dan Informasi Lingkungan Hidup yang terpublikasi	100%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				4	**Peningkatan tata kelola kehutanan**	**1**	**Program Pengelolaan Hutan**	Persentase Pengelolaan Hutan	90	DINAS KEHUTANAN
				5	**Peningkatan pemanfaatan kawasan hutan**	**1**	**Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya**	Persentase Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	20	DINAS KEHUTANAN
		PP3	**Pembangunan Rendah Karbon**	**6**	**Peningkatan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan**	**1**	**Program Peningkatan Tata Kelola Lingkungan Hidup**	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	75%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	RKP 2021			RKPD 2021						
	Prioritas Nasional	Program Prioritas		Strategi		Program		Kinerja Program		Perangkat Daerah
								Indikator	Target	
1	*2*	*3*		*4*		*5*		*6*	*7*	*8*
						2	**Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**	Persentase Peningkatan Ketatan Usaha/Kegiatan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	40%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						3	**Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup**	Persentase Aduan Masyarakat yang diverifikasi	100%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
							Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Laporan Rencana Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional yang Tersusun	100%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7	**MEMPERKUAT STABILITAS POLHUKHANKAM DAN TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK**	**P P 3**	**Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola**	**1**	**Meningkatkan Tata kelola pengawasan**	**1**	**Program Penyelenggaraan Pengawasan**	Nilai Materialitas Temuan Hasil Pemeriksaan	< 5~~%~~	INSPEKTORAT
						2	**Program Perumusan Kebijakan Pendampingan Dan Asistensi**	Persentase Perangkat Daerah yang tingkat maturitas SPIP-nya level 3		INSPEKTORAT

No	RKP 2021			RKPD 2021						
	Prioritas Nasional	Program Prioritas		Strategi		Program		Kinerja Program		Perangkat Daerah
								Indikator	Target	
1	*2*	*3*		*4*		*5*		*6*	*7*	*8*
		PP 4	**Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola**	**2**	**Peningkatan keselarasan antar dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan**	**1**	**Program Perencanaan, Evaluasi Dan Informasi Pembangunan Daerah**	Persentase konsistensi program pembangunan di RKPD dengan RPJMD dan Renstra dengan RPJMD	95	BAPPEDA
						2	**Program Program Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan**	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100	BAPPEDA
						3	**Program Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam**	Pesentase kesesuaian dokumen perencanaan bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	100	BAPPEDA
				3	**Peningkatan tata lakasana dan kinerja pemerintah daerah**	**1**	**Program Perekonomian Dan Pembangunan**	Persentase Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	98	BIRO PEREKONOMIAN
								Persentase Tata Kelola Penataan Administrasi Umum	95%	BIRO PEREKONOMIAN
								Prosentase Pembinaan Mental Spiritual	100%	BIRO PEREKONOMIAN

No	RKP 2021			RKPD 2021						
	Prioritas Nasional	Program Prioritas		Strategi		Program		Kinerja Program		Perangkat Daerah
								Indikator	Target	
1	*2*	*3*		*4*		*5*		*6*	*7*	*8*
				4	**Pengembangan daerah otonomi baru (DOB)**	**1**	**Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat**	Terselenggaranya pengelolaan administrasi pemerintahan dan penataan wilayah	7 dokumen penataan	BIRO PEMERINTAHAN
				5	**Peningkatan penataan peraturan perundangan dan kebijakan daerah**	**1**	**Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat**	Meningkatnya PHD yang tertata	90%	BIRO HUKUM
		PP 1	**Konsolidasi Demokrasi**	**6**	**Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik**	**1**	**Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik**			DINAS KOMINFO
						2	**Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Teknologi Informasi**			DINAS KOMINFO
						3	**Program Pengelolaan Aplikasi Informatika**			DINAS KOMINFO
						4	**Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral**			DINAS KOMINFO

No	RKP 2021		RKPD 2021						
	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Strategi		Program		Kinerja Program		Perangkat Daerah
							Indikator	Target	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*	*7*	*8*
					5	**Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi**			DINAS KOMINFO
			7	**Peningkatan kompetensi dan profesional ASN**	**1**	**Program Kepegawaian Daerah**	Persentase Pemenuhan Pegawai ASN yang sesuai dengan formasi	73%	BKPSDM
							Persentase Penempatan Pegawai Sesuai Kompetensi Pegawai	5%	BKPSDM
							Persentase ASN yang memiliki kinerja dan disiplin minimal baik	100%	BKPSDM
					2	**Program Pengembangan Sumber Daya Manusia**	Persentase ASN yang tersertifikasi	90%	BKPSDM
							Nilai Akreditasi Diklat	81	BKPSDM
							Persentase ASN yang memiliki sertifikat Kompetensi Teknis	17,18%	BKPSDM

No	RKP 2021		RKPD 2021			
	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Strategi	Program	Kinerja Program	Perangkat Daerah
					Indikator / Target	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6* / *7*	*8*
					Persentase Pejabat Pimpinan Daerah dan Pimpinan Tinggi yang memiliki sertifikat pengembangan kompetensi — 89,29%	BKPSDM
					Persentase ASN yang memiliki sertifikat kompetensi manajerial — 26,06%	BKPSDM
					Persentase ASN yang memiliki sertifikat kompetensi fungsional — 63,46%	BKPSDM

4.2.5 Penyelarasan Program Pembangunan dengan Penanganan Covid-19

Pada tahun 2020 perekonomian global dihadapkan pada kondisi ketidakpastian pasca merebaknya virus Covid-19. Penyebaran virus ini bermula dari kota Wuhan di Tiongkok yang kemudian menyebar secara masif ke seluruh dunia termasuk Indonesia, sehingga WHO menetapkannya menjadi pandemo global. Akibat dari mewabahnya virus Covid-19 sangat mempengaruhi kinerja perekonomian global dan menurunnya pertumbuhan ekonomi di berbagai negara seperti amerika serikat, Tiongkok, negara-negara di eropa dan asia dan Indonesia terkontraksi sebesar – 3,45% pada Triwulan III tahun 2020. Dan diproyeksikan akan terus terkontrasi sampai dengan triwulan II tahun 2021. Sedangkan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pandemi covid-19 menyebabkan penurunan pada beberapa sektor ekonomi utama seperti transportasi dan angkutan, industri pengolahan dan sektor pariwisata dimana jumlah kunjungan wisatawan turun sebesar 80% pada tahun 2020, sedangkan pertumbuhan ekonomi pada triwulan III tahun 2020 terkontraksi sebesar -4,35%.

Untuk menghadapi permasalahan ini Pemerintah pusat telah menyiapkan beberapa kebijakan yang fokus pada 3 hal yaitu kesehatan masyarakat, jaring pengaman sosial dan pemulihan ekonomi. Stimulus fiskal telah dilaksanakan untuk menjaga daya beli masyarakat dan khusus untuk pemerintah daerah telah melakukan refocusing anggaran seperi yang diamanatkan melalui Inpres No 4 tahun 2020. Selain itu pemerintah juga telah melaksanakan program pemulihan ekonomi Nasional yang diatur dalam PP No 23 tahun 2020 yang bertujuan untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi.

Tabel IV.10
Strategi dan Program Prioritas RKPD 2021
Dalam Rangka Mendukung Penanganan Covid-19

NO	Arah Kebijakan Penanganan Covid-19		Arah Kebijakan		Program/Kegiatan /Sub kegiatan	Kinerja Program		Perangkat Daerah
						Indikator Kinerja	Target	
1	*2*		*3*		*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Penanganan korban yang terpapar virus Covid-19	1	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase status kesehatan masyarakat	76,5	DINAS KESEHATAN
					Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase penyediaan sarana dan prasarana labkes;	100%	DINAS KESEHATAN
						Persentase Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan	64%	DINAS KESEHATAN

NO	Arah Kebijakan Penanganan Covid-19		Arah Kebijakan		Program/Kegiatan /Sub kegiatan	Kinerja Program		Perangkat Daerah
						Indikator Kinerja	Target	
1	*2*		*3*		*4*	*5*	*6*	*7*
						Persentase Pkm dengan ketersediaan obat dan vaksin essensial	57%	DINAS KESEHATAN
					Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	Jumlah penduduk yang dilayani Pelayanan Kesehatan Bergerak	10300 orang	DINAS KESEHATAN
					Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan	90 unit	DINAS KESEHATAN
				2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan Kesehatan Rumah Sakit Terakreditasi Paripurna	80 persen	RUMAH SAKIT UMUM
					Kegiatan : Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Pelayanan Kesehatan RS	4 0	RUMAH SAKIT UMUM
					Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Persentase pemeliharaan Alat Kesehatan/Penunjang Medik Kesehatan	80 0	RUMAH SAKIT UMUM
2	Jaring Pengaman sosial			1	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Prosentase korban bencana yg mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	50%	DINAS SOSIAL
					Kegiatan : Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Jumlah korban Bencana Alam yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial ;	57 KK	DINAS SOSIAL
						Jumlah korban Bencana Sosial yang mendapatkan perlindungan	100 KK	DINAS SOSIAL

NO	Arah Kebijakan Penanganan Covid-19		Arah Kebijakan		Program/Kegiatan /Sub kegiatan	Kinerja Program		Perangkat Daerah
						Indikator Kinerja	Target	
1	*2*		*3*		*4*	*5*	*6*	*7*
						dan jaminan sosial		
					Penyediaan Permakanan	Jumlah korban bencana alam yang mendapat bantuan permakanan ;	57 orang	DINAS SOSIAL
						Jumlah petugas posko dan bencana yang mengelola posko dan gudang logistik bencana ;	208 orang	DINAS SOSIAL
						Jumlah kebutuhan kepada client konflik sosial yang tersedia	100 jiwa	DINAS SOSIAL
3	Stimulus ekonomi	1	Menekan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak	**1**	Program Pengembangan UKM	Persentase UMKM yang dikembangkan	1%	DINAS UMKM
					Kegiatan Pengembangan Usa-ha Kecil Dengan Orientasi Peningka-tan Skala Usaha Men-jadi Usaha Menengah	Jumlah UMKM yang mendapatkan akses pembiayaan	1000 Orang	DINAS UMKM
				2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Pertambahan Angka Kelahiran Ternak	3.5632	DINAS UMKM
					Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah bantuan bibit ternak	**80 EKOR**	DINAS UMKM
					Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Pengadaan bibit ternak	80 EKOR	DINAS UMKM
						Persentase Ketersediaan benih/bibit pertanian tingkat lapang (daerah)	50%	DINAS UMKM

NO	Arah Kebijakan Penanganan Covid-19		Arah Kebijakan		Program/Kegiatan /Sub kegiatan	Kinerja Program		Perangkat Daerah
						Indikator Kinerja	Target	
1	*2*		*3*		*4*	*5*	*6*	*7*
					Kegiatan Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Kualitas Mutu pakan ternak (%)	100%	DINAS UMKM
					Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Ketersediaan pakan ternak (Sapi dan Ayam) (paket)	1 PAKET	DINAS UMKM
				3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi benih ikan yang unggul	11 Juta Ekor	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Kegiatan : Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya laut	13120 Ton	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Benih yang diserahkan ke masyarakat	13 Paket	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah	Jumlah Peralatan Budidaya	13 Paket	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	Arah Kebijakan Penanganan Covid-19		Arah Kebijakan		Program/Kegiatan /Sub kegiatan	Kinerja Program		Perangkat Daerah
						Indikator Kinerja	Target	
1	*2*		*3*		*4*	*5*	*6*	*7*
					Kabupaten/Kota			
					Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana budidaya yang diserahkan kepada masyarakat	2 Paket	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Tersedianya benih ikan laut yang diserahkan ke masyarakat	4 Paket	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
				4	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap	1.85	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Kegiatan : Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah Sarana dan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	1254 Unit	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jaring Kepiting	2000 piece	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jaring Udang	1500 piece	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Kawat Bubu	850 gulung	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Alat Bantu Penangkapan/Navigasi yang diadakan	**50 Unit**	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

4.2.6 Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDG's)



Setelah pelaksanaan *Millenium Development Goals (MDGs)* periode 2010-2015 yang berfokus pada aspek pembangunan manusia dan dalam penyusunannya bersifat top down, saat ini perumusan target berkelanjutan yaitu *SustainabilityDevelopment Goals (SDGs)*sedang digagas untuk melengkapi kekurangan yang belum dapat dicapai oleh *MDGs*.*SDGs*memiliki ruang lingkup lebih luas dan lebih kompleks. Prinsip penjabaran konkrit pelaksanaan *SDGs* untuk agenda paska 2015, yaitu: (1) *SDGs* tidak melemahkan komitmen internasional terhadap pencapaian *MDGs* pada tahun 2015, namun bahkan akan memperbarui komitmen dan melanjutkan komitmen MDGs yang masih belum selesai, dengan penyesuaian selaras dengan dinamika yang terjadi; (2) *SDGs* akan dilaksanakan berdasarkan Agenda 21, *Johannesburg Plan of Implementation* dan *Rio Principles*, serta mempertimbangkan perbedaan kondisi, kapasitas dan prioritas nasional; (3) *SDGs* akan difokuskan pada pencapaian tiga dimensi pembangunan berkelanjutan, yaitu dimensi pembangunan manusia (*human development*), dimensi ekonomi (*economic development*) dan dimensi lingkungan (*environtment development*). Sampai dengan saat ini, konsep *SDGs* akan meliputi 17 goal, 169 target, dan lebih dari 300 indikator yang saat ini masih dalam proses perumusan akhir. Berikut ini tabel IV.10 yang menyajikan keterkaitan antara prioritas pembangunan provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam upaya untuk mendukung pencapaian tujuan *SDGs.*

Tabel IV.10
Strategi dan Program Prioritas RKPD 2021
Dalam Rangka Mendukung Penanganan Covid-19

No	Tujuan Pembangunan SDGs	RKPD 2021					
		Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah		Kinerja Program		Perangkat Daerah
					Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4		5	6	7
1	Mengentaskan segala bentuk kemiskinan	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin	1	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Prosentase PMKS/PSKS yang terberdayakan	50%	DINSOS
				Kegiatan : Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Jumlah PSKS yang diberdayakan	203 orang	DINSOS
				Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Potensi Pekerja Sosial Masyarakat yang di tingkatkan kemampuannya	416 PSM	DINSOS

No	Tujuan Pembangunan SDGs	RKPD 2021					
		Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah		Kinerja Program		Perangkat Daerah
					Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4		5	6	7
				Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Kelembagaan masyarakat yang di tingkatkan kemampuannya	1000 orang	DINSOS
				Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga yang di tingkatkan kemampuannya	11 LK3	DINSOS
				Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Jumlah Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang di tingkatkan kemampuannya	47 TKSK	DINSOS
			2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMA (Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas)	41 Angka	DINAS PENDIDIKAN
				Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	APK SMA	41 persen	DINAS PENDIDIKAN
				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah siswa/mahasiswa yang mendapat beasiswa	2000 orang	DINAS PENDIDIKAN
			3	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase siswa SMK miskin yang mendapatkan beasiswa miskin	100	DINAS PENDIDIKAN
				Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	APK SMK	36 persen	DINAS PENDIDIKAN
				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah siswa yang mendapat beasiswa	900 orang	DINAS PENDIDIKAN
			4	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memakai sistem informasi kesehatan yang dipersyaratkan	50	DINAS KESEHATAN

No	Tujuan Pembangunan SDGs	RKPD 2021					
		Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah		Kinerja Program		Perangkat Daerah
					Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4		5	6	7
				Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana	0.8	DINAS KESEHATAN
				Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah masyarakat yang mempunyai jaminan kesehatan baik mandiri maupun yang dibiayai oleh pemerintah	1130000 jiwa	DINAS KESEHATAN
		Meningkatkan pendapatan masyarakat miskin	1	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Prosentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	0.5	DINSOS
				Kegiatan : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah data Fakir Miskin yang dikelola dengan baik	80000 KK	DINSOS
				Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Fakir Miskin yang di Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	220 KK	DINSOS
				Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Fakir Miskin yang mendapatkan bantuan ;	660 Orang	DINSOS
					Jumlah Keluarga Miskin yang diberikan Pendampingan Jaminan Sosial	530 KK	DINSOS
				Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten Kota yang dikelola ;Jumlah Fakir Miskin yang ditangani ; Jumlah Keluarga Miskin yang diberikan Pendampingan Jaminan Sosial	220/43749 KK	DINSOS

No	Tujuan Pembangunan SDGs	RKPD 2021					
		Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah		Kinerja Program		Perangkat Daerah
					Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4		5	6	7
			2	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase ketersedian Bapokting	80 persen	DISPERINDAG
				Kegiatan : Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kabupaten/ kota yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	Koevisien Variasi	<11 %	DISPERINDAG
				Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Operasi Pasar	14 Lokasi	DISPERINDAG
					Persentase Tersalurkannya Pupuk Bersubsidi	70%	DISPERINDAG
				Kegiatan : Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Jumlah Pelaku Usaha yang diawasi	11 Pelaku Usaha	DISPERINDAG
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	Jumlah Pengawasan	2 Laporan	DISPERINDAG
				Pemeriksaan Dokumen Perizinan Kegiatan Distribusi	Jumlah Pemeriksaan	11 Dokumen	DISPERINDAG
				Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Pengawasan	2 Laporan	DISPERINDAG

No	Tujuan Pembangunan SDGs	RKPD 2021					
		Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah		Kinerja Program		Perangkat Daerah
					Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4		5	6	7
				Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Jumlah Distributor/pengecer Pupuk bersubsidi yang diawasi	11 Distributor atau Pengecer	DISPERINDAG
2	Mengentaskan kelaparan ketahanan pangan dan meningkatkan gizi serta mempromosikan *agriculture* berkelanjutan	Peningkatan ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi bahan pangan	1	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Jumlah orang Tertanganinya masyarakat rawan pangan	1700 orang	DINAS PANGAN
				Kegiatan : Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Jumlah orang yang terfasilitasi di daerah rentan rawan pangan	1700 orang	DINAS PANGAN
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	Jumlah orang yang difasilitasi dan yang mengikuti gerahan 100- HPK	1700 orang	DINAS PANGAN
				Kegiatan : Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Kerentanan dan Ketahanan Pangan	3 Dokumen	DINAS PANGAN
				Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen	3 Dokumen	DINAS PANGAN
			2	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan yang aman dikonsumsi	0.86	DINAS PANGAN
				Kegiatan : Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produk PSAT yang terawasi	80 Produk	DINAS PANGAN
				Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	Jumlah pertemuan/rakor OKKPD	0 kali	DINAS PANGAN

No	Tujuan Pembangunan SDGs	RKPD 2021					
		Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah		Kinerja Program		Perangkat Daerah
					Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4		5	6	7
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah paket rafid test kit	0 paket	DINAS PANGAN
				Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sertifikat register PSAT	5 Register	DINAS PANGAN
				Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produk PSAT yang terawasi	21 Produk	DINAS PANGAN
				Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikat Prima 3	25 Sertifikat	DINAS PANGAN
		Peningkatan Produkasi dan Pengelolaan Hasil Produksi Pertanian, Perkebunaan dan Peternakan	**1**	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Ketersediaan Pangan Pokok	0 Persentase	DINAS PANGAN
				Kegiatan : Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada Berbagai Sektor Sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Ketersediaan Pangan Utama	1 Jenis	DINAS PANGAN
				Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Dokumen Rekomendasi tentang peningkatan ketahanan pangan	1 Dokumen	DINAS PANGAN
				Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	1 kelompok	DINAS PANGAN
			2	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Meningkatnya konsumsi pangan yang beragam pada kelompok Pangan a) Umbi-umbian, b) Kacang-kacangan c) nuah dan sayur	a) 27,9 b) 7,9 c) 21,6 Persentase	DINAS PANGAN

No	Tujuan Pembangunan SDGs	RKPD 2021					
		Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah		Kinerja Program		Perangkat Daerah
					Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4		5	6	7
				Kegiatan : Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	Persentase meningkatnya pemahaman masyarakat akan pola pangan yang B2SA	100 persen	DINAS PANGAN
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Jumlah peserta pertemuan sosialisasi B2SA (TP. PKK Kab/Kota dan Kelompok masyaraka	0 orang	DINAS PANGAN
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Dokumen Konsumsi perkapita pertahun	1 Dokumen	DINAS PANGAN
				Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Event	0 Event	DINAS PANGAN
				Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah orang yang mengikuti event	120 orang	DINAS PANGAN
3	Menjamin hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan untuk semua dan segala usia	Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat	1	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase posyandu aktif	63	DINKES
				Kegiatan : Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah kebijakan baru yang mendukung gerakan masyarakat hidup sehat di Kabupaten/Kota	5 kebijakan	DINKES
				Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah peserta kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) " Sehat Bersama Bunda Germas "	300 orang	DINKES

No	Tujuan Pembangunan SDGs	RKPD 2021					
		Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah		Kinerja Program		Perangkat Daerah
					Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4		5	6	7
				Kegiatan : Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah pelaksanaan KIE PHBS di masyarakat	6 tema	DINKES
				Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Pelaksanaan Edukasi Adaptasi Kebiasaan Baru, Jumlah Informasi Promosi Kesehatan Melalui Media KIE	3/4 tatanan/ media informasi kesehatan	DINKES
				Kegiatan : Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pembinaan posyandu aktif	0.7	DINKES
				Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Jumlah peserta asistensi pengintegrasian pengembangan posyandu	450 orang	DINKES
			2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase status kesehatan masyarakat	76,5	DINKES
				Kegiatan : Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Penerbitan Rekomendasi Perijinan Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	10 dokumen	DINKES
				Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah rumah sakit yang dilakukan pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut perizinan rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan	19 rumah sakit	DINKES
				Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah puskesmas yang melakukan simulasi survei akreditasi	7 puskesmas	DINKES

No	Tujuan Pembangunan SDGs	RKPD 2021					
		Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah		Kinerja Program		Perangkat Daerah
					Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4		5	6	7
				Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase penyediaan sarana dan prasarana labkes; Persentase Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan di Pkm; Persentase Kab/Kota yang menyediakan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat daerah prov; Persentase Pkm dengan ketersediaan obat dan vaksin essensial	100/64/57 %/%/%/%	DINKES
				Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman Serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah puskesmas yang memiliki ketersediaan obat dan vaksin esensial; Jumlah pembelian obat buffer stock; Jumlah puskesmas yang memiliki ketersediaan obat dan vaksin esensial; Jumlah bangunan yang direhabilitasi	64/3/64/1 puskesmas/jenis/puskesmas/bangunan	DINKES
				Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan	90 unit	DINKES
				Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	Jumlah jenis pengadaan bahan habis pakai lainnya (sprei, handuk dan habis pakai lainnya)	7 jenis	DINKES
				Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah pengadaan alat kesehatan; Jumlah jenis alat kesehatan yang dikalibrasi	13/10 unit/unit	DINKES
				Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan	Jumlah pemeliharaan alat-alat	10 unit	DINKES

No	Tujuan Pembangunan SDGs	RKPD 2021				
		Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4	5	6	7
			Laboratorium Kesehatan	kesehatan/peralatan laboratorium kesehatan		
			Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah pengadaan sarana di fasilitas layanan kesehatan; Jumlah lembaga yang diberikan bantuan; Jumlah instalasi air bersih	4/1/1 unit/lembaga/unit	DINKES
			Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana Prasarana yang dibangun	1 sarana	DINKES
			Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	Jumlah penduduk yang dilayani Pelayanan Kesehatan Bergerak	10300 orang	DINKES
			Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelayanan Telemedicine; Peserta pertemuan evaluasi pelaksanaan telemedicine	8/21 fasyankes/orang	DINKES
			Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana	80%	DINKES
			Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Jumlah investigasi kasus KIPI yang dilakukan	6 kali	DINKES
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kegiatan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) kabupaten/kota	1 dokumen	DINKES

No	Tujuan Pembangunan SDGs	RKPD 2021				
		Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4	5	6	7
			Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah puskesmas yang melakukan upaya perubahan Indeks Keluarga Sehat (IKS) pada Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK), Puskesmas Ramah Anak; Jumlah lembaga yang diberikan bantuan	64/1 puskesmas/lembaga	DINKES
			Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah peserta Penguatan Dinas Kesehatan Kab/Kota sebagai Tim PPMI (Pengawasan Pemantauan Mutu Internal)	24 orang	DINKES
			Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Jumlah pengiriman spesimen penyakit potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke laboratorium rujukan/nasional untuk konfirmasi laboratorium	20 spesimen	DINKES
			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah masyarakat yang mempunyai jaminan kesehatan baik mandiri maupun yang dibiayai oleh pemerintah	1130000 jiwa	DINKES
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Kejadian Luar Biasa (KLB) yang dapat ditanggulangi	15 kejadian	DINKES
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana	Jumlah pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	6 kali	DINKES
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah peserta pencanangan bulan timbang; Jumlah puskesmas yang	400/64/525 orang/puskesmas/balita	DINKES

No	Tujuan Pembangunan SDGs	RKPD 2021					
		Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah		Kinerja Program		Perangkat Daerah
					Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4		5	6	7
				mendapatkan pendampingan pelaksanaan surveilans gizi melalui e-PPGBM; Jumlah balita terkonfirmasi masalah gizi yang mendapatkan makanan tambahan lokal			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah jemaah Haji yang mendapatkan pemeriksaan dan pembinaan kesehatan haji	500 orang	DINKES
			3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga kesehatan yang mendapatkan peningkatan kompetensi	80	DINKES
				Kegiatan : Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	258 orang	DINKES
				Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah sumber daya manusia kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya melalui pendidikan tugas belajar, Jumlah sumber daya manusia kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya melalui uji kompetensi	8/250 orang/orang	DINKES
				Kegiatan : Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Persentase tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	0.85	DINKES
				Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah sumber daya manusia kesehatan yang mengikuti bimtek kebutuhan sumber daya manusia kesehatan	30 orang	DINKES

No	Tujuan Pembangunan SDGs	RKPD 2021					
		Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah		Kinerja Program		Perangkat Daerah
					Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4		5	6	7
				Kegiatan : Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Persentase tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	0.85	DINKES
				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah sumber daya manusia kesehatan yang terpenuhi kebutuhan kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan	30 orang	DINKES
			4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi syarat	45	DINKES
				Kegiatan : Penerbitan izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Persentase usaha kecil obat tradisional yang dapat diawasi serta memenuhi syarat dan memiliki izin edar	0.8	DINKES
				Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) yang dilakukan pengendalian dan pengawasan	100 UMKM	DINKES
				Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin UKOT Berbasis Elektronik	Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) yang dilakukan pengendalian dan pengawasan	100 UMKM	DINKES
			5	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan Kesehatan Rumah Sakit Terakreditasi Paripurna	80 persen	RUMAH SAKIT UMUM
				Kegiatan : Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Pelayanan Kesehatan RS	4 0	RUMAH SAKIT UMUM
				Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah SOP Keperawatan,Jumlah Standar Asuhan	4 0	RUMAH SAKIT UMUM

No	Tujuan Pembangunan SDGs	RKPD 2021				
		Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4	5	6	7
				Keperawatan, Jumlah Dokumen Evaluasi Standar Pelayanan Teknis Keperawatan,Jumlah Dokumen Perencanaan Perbaikan Strategis		
			Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Pelayanan Sarpras dan Alkes untuk RS Rujukan	80 0	RUMAH SAKIT UMUM
			Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Gedung,Jumlah gedung Jenazah RS,Jumlah gedung B RS Lanjutan,	3 0	RUMAH SAKIT UMUM
			Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Persentase pemeliharaan Alat Kesehatan/Penunjang Medik Kesehatan	80 0	RUMAH SAKIT UMUM
			Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Persentase Pemeliharaan Prasarana RS	80 0	RUMAH SAKIT UMUM
			Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Persentase Pemeliharaan sarana RS	80 0	RUMAH SAKIT UMUM
			Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Keperawatan	1 0	RUMAH SAKIT UMUM
			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan (DAK),Jumlah Alat Kesehatan/Penunjang Medik, Jumlah Alat Kesehatan	885,10,975 0	RUMAH SAKIT UMUM
			Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Jumlah Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	3 0	RUMAH SAKIT UMUM
			Kegiatan : Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Jumlah Aplikasi Asuhan Keperawatan Terintegrasi	1 0	RUMAH SAKIT UMUM
			Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Aplikasi Asuhan Keperawatan Terintegrasi	1 0	RUMAH SAKIT UMUM

No	Tujuan Pembangunan SDGs	RKPD 2021					
		Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah		Kinerja Program		Perangkat Daerah
					Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4		5	6	7
			6	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase masyarakat/perorangan yang mendapat upaya kesehatan	80 persen	RUMAH SAKIT JIWA
				Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	persentase fasilitas pelayanan sarana dan prasarana dan alkes yang disediakan di RS.Jiwa	85 persen	RUMAH SAKIT JIWA
				Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah alat Kesehatan/alat medik fasilitas kesehatan yang terpelihara	14 alat	RUMAH SAKIT JIWA
				Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	Jumlah sprei, handuk dan pakaian habis pakai yang dibeli	5 jenis	RUMAH SAKIT JIWA
				Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah alat Kesehatan yang terkalibrasi	10 unit	RUMAH SAKIT JIWA
				Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Peralatan Lab yang telah di pelihara	10 jenis	RUMAH SAKIT JIWA
				Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah gedung rawat inap yang dibangun	1 gedung	RUMAH SAKIT JIWA
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah bangunan Rumah Sakit yang direhabilitasi	8 bangunan	RUMAH SAKIT JIWA
4	Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan adil serta mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup bagi semua	Peningkatan akses pelayanan pendidikan	1	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase guru yang mengajar sesuai dengan kompetensi	80 persen	DINAS PENDIDIKAN
				Kegiatan : Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	jumlah dokumen analisis GTK	1 dokumen	DINAS PENDIDIKAN

No	Tujuan Pembangunan SDGs	RKPD 2021					
		Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah		Kinerja Program		Perangkat Daerah
					Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4		5	6	7
				Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	jumlah dokumen penataan pendistribusian GTK	1 dokumen	DINAS PENDIDIKAN
			2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PENDIDIKAN KHUSUS (Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Khusus)	86 Angka	DINAS PENDIDIKAN
				Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Khusus	jumlah sarana prasarana PK yang dibangun;Jjumlah sarana prasarana PK yang direhab;Jumlah Pengadaan sarana prasarana PK;Jumlah lomba kesiswaan ;Jumlah guru PK yang mengikuti PPG;Jumlah guru PK yang mendapat pengembangan kompetensi;Jumlah penyediaan Operasional PLA;Jumlah SLB SWASTA terlayani	379 unit	DINAS PENDIDIKAN
				Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah asrama terbangun beserta perabotnya	1 unit	DINAS PENDIDIKAN
				Pembangunan Kantin Sekolah	jumlah kantin terbangun	0 unit	DINAS PENDIDIKAN
				Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	jumlah rumah terbangun	0 unit	DINAS PENDIDIKAN
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah pagar terbangun;Jumlah taman sensori yang dibangun;Jumlah mushola terbangun;jumlah pantry terbangun;jumlah tampat parkir dibangun;jumlah talud terbangun	6 unit	DINAS PENDIDIKAN

No	Tujuan Pembangunan SDGs	RKPD 2021					
		Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah		Kinerja Program		Perangkat Daerah
					Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4		5	6	7
				Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah USB terbangun	0 unit	DINAS PENDIDIKAN
				Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah lomba kesiswaan Tk.Provinsi	6 jenis	DINAS PENDIDIKAN
				Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah	Jumlah Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah	2 unit	DINAS PENDIDIKAN
				Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Pengadaaan alat dengar	196 unit	DINAS PENDIDIKAN
				Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Pengadaaan ipad;Jumlah Pengadaaan alat dengar	367 unit	DINAS PENDIDIKAN
				Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah assesment	1 kali	DINAS PENDIDIKAN
				Rehabilitasi Asrama Sekolah	Jumlah asrama yang direhab	1 unit	DINAS PENDIDIKAN
				Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah bangunan (gedung) direhab;jumlah mushola yang direhab	2 unit	DINAS PENDIDIKAN
					APK SMA (Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas)	41 Angka	DINAS PENDIDIKAN
				Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	APK SMA	41 persen	DINAS PENDIDIKAN
				Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah rumah asrama sekolah dibangun	2 unit	DINAS PENDIDIKAN

No	Tujuan Pembangunan SDGs	RKPD 2021				
		Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4	5	6	7
			Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah kantin yang dibangun	6 unit	DINAS PENDIDIKAN
			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	jumlah Ruang Guru yang dibangun	4 ruang	DINAS PENDIDIKAN
			Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi	jumlah Ruang lab biologi yang dibangun	0 ruang	DINAS PENDIDIKAN
			Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika	jumlah Ruang lab fisika yang dibangun	0 ruang	DINAS PENDIDIKAN
			Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	jumlah Ruang lab kimia yang dibangun	0 ruang	DINAS PENDIDIKAN
			Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	jumlah Ruang Laboratorium Komputer yang dibangun	2 ruang	DINAS PENDIDIKAN
			Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	jumlah rumah dinas yang dibangun	6 unit	DINAS PENDIDIKAN
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	jumlah sapras utilitas yang dibangun	13 unit	DINAS PENDIDIKAN
			Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru dibangun	14 ruang	DINAS PENDIDIKAN
			Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	jumlah Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	160 paket	DINAS PENDIDIKAN
			Pengadaan Mebel Sekolah	jumlah pengadaan meubeler sekolah	2704 unit	DINAS PENDIDIKAN
			Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	1 paket	DINAS PENDIDIKAN

No	Tujuan Pembangunan SDGs	RKPD 2021				
		Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4	5	6	7
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Siswa SMAS terlayani	4301 orang	DINAS PENDIDIKAN
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah siswa/mahasiswa yang mendapat beasiswa	2000 orang	DINAS PENDIDIKAN
			Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	jumlah guru yang mengikuti pelatihan	62 orang	DINAS PENDIDIKAN
			Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	jumlah sapras utilitas yang direhab	2 unit	DINAS PENDIDIKAN
			Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	jumlah Perpustakaan Sekolah yang direhab	1 ruang	DINAS PENDIDIKAN
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang direhab	2 ruang	DINAS PENDIDIKAN
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	jumlah Ruang Kelas Sekolah yang direhab	15 ruang	DINAS PENDIDIKAN
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium IPA	jumlah Ruang Laboratorium IPA yang direhab	6 ruang	DINAS PENDIDIKAN
				APK SMK (Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan)	36 Angka	DINAS PENDIDIKAN
			Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	APK SMK	36 persen	DINAS PENDIDIKAN
			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	jumlah Ruang guru/kepala sekolah yang dibangun	1 unit	DINAS PENDIDIKAN
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	jumlah sapras dan utilitas yang dibangun	13 unit	DINAS PENDIDIKAN
			Penambahan Ruang Kelas Sekolah	jumlah RKB yang dibangun	18 unit	DINAS PENDIDIKAN

No	Tujuan Pembangunan SDGs	RKPD 2021				
		Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4	5	6	7
			Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	jumlah pengadaan alat praktik	1 paket	DINAS PENDIDIKAN
			Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Pengadaan Mebeluer Sekolah	520 set	DINAS PENDIDIKAN
			Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	1 paket	DINAS PENDIDIKAN
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Siswa SMKS terlayani	5955 siswa	DINAS PENDIDIKAN
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah siswa yang mendapat beasiswa	900 orang	DINAS PENDIDIKAN
			Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa	jumlah ruang praktik yang direhab	1 ruang	DINAS PENDIDIKAN
			Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	jumlah sapras utilitas yang direhab	1 unit	DINAS PENDIDIKAN
				JUMLAH LULUSAN SMK YANG MEMILIKI SERTIFIKAT KOMPETENSI	700 orang	DINAS PENDIDIKAN
			Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	jumlah pelaksanaan workshop dan pelatihan	3 kali	DINAS PENDIDIKAN
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	jumlah peserta worksop, TO dan assesor	250 orang	DINAS PENDIDIKAN
				jumlah medali siswa SMA dalam kompetisi nasional /Internasional	4 buah	DINAS PENDIDIKAN
			Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah lomba kesiswaan SMA	4 jenis	DINAS PENDIDIKAN

No	Tujuan Pembangunan SDGs	RKPD 2021				
		Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4	5	6	7
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	jumlah lomba kesiswaan sma	4 jenis	DINAS PENDIDIKAN
				Jumlah medali siswa SMK dalam kompetisi nasional /Internasional	4 buah	DINAS PENDIDIKAN
			Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah lomba kesiswaan SMK	3 jenis	DINAS PENDIDIKAN
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Lomba kesiswaan SMK	3 jenis	DINAS PENDIDIKAN
				Persentase GTK pada jenjang satuan pendidikan SMA Bersertifikasi	80 persen	DINAS PENDIDIKAN
			Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah guru SMA yang mendapat pengembangan kompetensi;Jumlah guru SMA yang mendapat pengembangan kualifikasi	700/14 orang/orang	DINAS PENDIDIKAN
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah kepala sekolah, guru, pengawas yg mengikuti Diklat Kompetensi;Jumlah guru yang berkualifikasi S2;jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mendapatkan penilaian angka kredit	700/14 orang/orang	DINAS PENDIDIKAN
				Persentase GTK pada satuan pendidikan Pendidikan Khusus Bersertifikasi	80 persen	DINAS PENDIDIKAN
			Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Khusus	Jumlah guru PK yang mendapat pengembangan kompetensi;Jumlah guru PK yang mengikuti PPG	10/64 orang/orang	DINAS PENDIDIKAN

No	Tujuan Pembangunan SDGs	RKPD 2021					
		Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah		Kinerja Program		Perangkat Daerah
					Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4		5	6	7
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Guru mengikuti Diklat Kompetensi;Jumlah guru yang mengikuti PPG	10/64 orang/orang	DINAS PENDIDIKAN
		Peningkatan mutu layanan pendidikan	**1**	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase dokumen kurikulum yg terintegrasi dengan kurikulum nasional	75 persen	DINAS PENDIDIKAN
				Kegiatan : Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah dokumen Muatan Lokal Pendidikan khusus	1 dokumen	DINAS PENDIDIKAN
				Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah dokumen Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus;terlaksananya pelatihan penilaian hasil belajar kurikulum 2013;terlaksananya pelatihan kurikulum	2 dokumen	DINAS PENDIDIKAN
			2	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	kebijakan pengembangan bahasa dan sastra	1 0	DINAS PENDIDIKAN
				Kegiatan : Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	jumlah siswa yang berminat mengikuti lomba;jumlah kamus tersusun	50 orang	DINAS PENDIDIKAN
				Peningkatan Apresiasi Siswa terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi	jumlah / jenis buku yang dicetak dan distribusi;jumlah siswa yang berminat mengikuti lomba;jumlah kamus tersusun	4/50 orang	DINAS PENDIDIKAN
5	Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak.	Peningkatan pelayanan terhadap pemberian hak-hak anak	1	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Peningkatan SDM dalam Pemenuhan Partisipasi Anak	18,3 persen	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB

No	Tujuan Pembangunan SDGs	RKPD 2021					
		Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah		Kinerja Program		Perangkat Daerah
					Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4		5	6	7
				Kegiatan : Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang di bina	7 Kab/Kota	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi dan media publikasi	160 Orang	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
				Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang di bina	7 Kab/Kota	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
				Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta FA tingkat provinsi dan tingkat nasional dan peserta HAN	977 Orang	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
		Peningkatan keadilan dan kesetaraan gender	**1**	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Perangkat Daerah yang Responsif Gender	84,37 persen	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
				Kegiatan : Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Jumlah kabupaten kota yang dibina	7 Kab/Kota	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta Advokasi dan KIE PUG dan PKHP	240 Orang	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta penguatan kapasitas pelaksanaanPUG dan PPRG	75 Orang	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB

No	Tujuan Pembangunan SDGs	RKPD 2021					
		Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah		Kinerja Program		Perangkat Daerah
					Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4		5	6	7
				Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Jumlah OPD peserta pengembangan materi danPelaksanaan KIE Kesetaraan dan Keadilan Genderbagi institusi Media Massa	32 OPD	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
				Kegiatan : Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	Jumlah kabupaten kota yang dibina	7 Kab/Kota	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	1. Jumlah peserta Pelatihan dan pembentukanfasilitator pendidikan politik untuk perempuan; 2. Jumlah peserta Pembinaan Industri Rumahan	75; 90 Orang; Orang	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
				Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah kabupaten kota yang dibina	7 Kab/Kota	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
				Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta	45 Orang	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
			2	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase IR yang di bina	0,71 persen	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
				Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang di bina	7 Kab/Kota	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan	Jumlah peserta pembinaan	40 Orang	DINAS PPA, DUKCAPIL,

No	Tujuan Pembangunan SDGs	RKPD 2021					
		Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah		Kinerja Program		Perangkat Daerah
					Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4		5	6	7
				Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	organisasi perempuan		PENGENDALIAN PENDUDUK KB
				Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Penguatan dan Pengembangan LembagaPenyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluargadalam Mewujudkan KG dan Hak Anak	40 Orang	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
				Kegiatan : Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang di bina	7 Kab/Kota	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah peserta sekolah perempuan	200 Orang	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
				Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta kegiatan Peningkatan Nilai-nilai Kejuangan Perempuan Indonesia	500 Orang	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
			3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Peningkatan SDM Perlindungan Perempuan	0,039 persen	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
				Kegiatan : Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan upaya pencegahan perlindungan perempuan dan para pihak yang terlibat dalam upaya perlindungan perempuan	1 Laporan	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah kebijkan; Jumlah peserta sosialisasi pencegahan pelecehans seksual bagi perempuan	1; 100 Kebijakan ; Orang	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB

No	Tujuan Pembangunan SDGs	RKPD 2021					
		Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah		Kinerja Program		Perangkat Daerah
					Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4		5	6	7
				Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Persentase Layanan Perempuan Korban Kekerasan yang ditangani	1	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen layanan pengaduan masyarakatyang ditangani	1 Dokumen	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
				Kegiatan : Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Perempuan Korban Kekerasan yang ditangani	1	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
				Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen layanan pengaduuan masyarakatyang ditangani	1 Dokumen	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
6	Menjamin ketersediaan dan manajemen air serta sanitasi yang berkelanjutan untuk semua	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum	1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	83,85 persentase	DINAS PRKP
				Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Jumlah rumah tangga yang terlayani sistem air limbah domestik	65 KK	DINAS PRKP
				Pemicuan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Dan Pembinaan Penyediaan Prasarana Cubluk	Jumlah rumah tangga yang terbangun tangki septik individual	65 KK	DINAS PRKP
7	Menjamin akses energy yang terjangkau, handal, berkelanjuta	Peningkatan ketersedian energi listrik masyarakat	1	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Persentase bauran energi baru terbarukan	10,68 %	DINAS ESDM

No	Tujuan Pembangunan SDGs	RKPD 2021					
		Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah		Kinerja Program		Perangkat Daerah
					Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4		5	6	7
	n dan modern untuk semua						
				Kegiatan : Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Konservasi Energi	2 Dokumen	DINAS ESDM
				Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi	1 Laporan	DINAS ESDM
				Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi	Jumlah Rapergub yang dibuat	1 Pergub	DINAS ESDM
			2	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase rasio elektrifikasi	99,90 %	DINAS ESDM
				Kegiatan : Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah badan usaha yang diawasi	40 Badan Usaha	DINAS ESDM
				Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Operasi Ketenagalistrikan	40 Laporan	DINAS ESDM
				Kegiatan : Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Desa yang di datra	25 Desa	DINAS ESDM
				Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Dokumen Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) yangb tersusun	0 Dokumen	DINAS ESDM

No	Tujuan Pembangunan SDGs	RKPD 2021					
		Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah		Kinerja Program		Perangkat Daerah
					Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4		5	6	7
				Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Laporan Pengumpulan dan Pengolahan Data	1 Laporan	DINAS ESDM
8	Mempromosikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi yang inclusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang menyeluruh produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua	Peningkatan Promosi , Koordinasi, Kerjasama dan Investasi dalam Peningkatan Lapangan Pekerjaan	1	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sesuai SOP	100 persentase	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
				Kegiatan : Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang Diterbitkan Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Menjadi Kewenangan Provinsi, Jumlah Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Jumlah Laporan Pengaduan Yang di Tindak Lanjuti	1200, 2, 2 Izin laporan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
				Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Yang Diterbitkan	1200 izin	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
				Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Jumlah Pengaduan dan Layanan Konsultasi	2, 2 laporan SKM dan Pengaduan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Tujuan Pembangunan SDGs	RKPD 2021					
		Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah		Kinerja Program		Perangkat Daerah
					Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4		5	6	7
				Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Aplikasi Pendukung Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi Secara Elektronik	1 aplikasi	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
				Kegiatan : Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Rapat Forum PTSP se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 Laporan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
				Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Forum, Jumlah Rapat Koordinasi Forum PTSP se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	50,1 peserta dan rakor forum	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			2	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang Valid dan Up to date	100 persentase	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
				Kegiatan : Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan	1 Dokumen	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
				Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			3	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Kerjasama Mitra Kerja Dengan Investor	80 persentase	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
				Kegiatan : Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah Peta Potensi Investasi Provinsi	1 Peta	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Tujuan Pembangunan SDGs	RKPD 2021					
		Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah		Kinerja Program		Perangkat Daerah
					Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4		5	6	7
				Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Jumlah Peta Potensi Investasi	1 Dokumen	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
				Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Evaluasi RUPM	1 Dokumen	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
				Kegiatan : Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah UKM Yang Bermitra Dengan Investor	1 UKM	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
				Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah UKM Yang Memenuhi Syarat Kemitraan	8 UKM	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			4	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Investor Yang Berinvestasi	65 persentase	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
				Kegiatan : Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan Promosi Yang Terlaksana	3 pameran promosi	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
				Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Promosi Penanaman Modal Yang Terlaksana	3 pameran promosi	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
				Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Strategi Promosi Penanaman Modal	1 Laporan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Peningkatan kesempatan kerja	**1**	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Meningkatnya Kompetensi dan Produktivitas	15 Perusahaan	DISNAKER
				Kegiatan : Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	Pengukuran Kinerja Perusahaan dan	15 perusahaan	DISNAKER

No	Tujuan Pembangunan SDGs	RKPD 2021					
		Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah		Kinerja Program		Perangkat Daerah
					Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4		5	6	7
				Kompetensi SDM			
				Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pengukuran Kinerja Perusahaan dan Kompetensi SDM	15 perusahaan	DISNAKER
					Persentase Pelatihan Kerjasama dengan sektor swasta dan instansi pemerintah lainnya untuk penyedia instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja	20 Persentase	DISNAKER
				Kegiatan : Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah pencri kerja yang mendapatkan informasi program	5 kerjasama	DISNAKER
				Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah kerjasama dengan sektor swasta	5 kerjasam	DISNAKER
					Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan pelatihan berdasarkan klaster kompetensi	4 Persentase	DISNAKER
				Kegiatan : Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Pedidikan dan pelatihan bagi pencari kerja berdasarkan klaster Kompetensi	20 paket	DISNAKER
				Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Pedidikan dan pelatihan bagi pencari kerja berdasarkan klaster Kompetensi	20 paket	DISNAKER
			2	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang di tempatkan	5 Persentase	DISNAKER

No	Tujuan Pembangunan SDGs	RKPD 2021					
		Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah		Kinerja Program		Perangkat Daerah
					Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4		5	6	7
				Kegiatan : Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan antar kerja	100 Orang	DISNAKER
				Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan Antar Kerja	30 Orang	DISNAKER
				Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencarikerja Yang Mendapatkan Penyuluhan dan Binaan	70 Orang	DISNAKER
				Kegiatan : Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Laporan	7 Kab/Kota	DISNAKER
				Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	jumlah data pencari kerja secara online	200 Orang	DISNAKER
				Kegiatan : Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah laporan	7 Kab/Kota	DISNAKER
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah RPTKA ,Jumlah TKA dan Lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah provinsi	80/7 Orang/Lokasi	DISNAKER
			3	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase kepatuhan perusaaan yang melaksanakan norma ketenagakerjaan	635 Persen	DISNAKER
				Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	persentase pengawasan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan	61 persen	DISNAKER
				Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Persentase Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di UMKM	85 Persen	DISNAKER
				Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	persentase penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan yang inkrah di	80 persen	DISNAKER

No	Tujuan Pembangunan SDGs	RKPD 2021					
		Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah		Kinerja Program		Perangkat Daerah
					Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4		5	6	7
				pengadilan			
				Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	persentase pengawasan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan	19 persen	DISNAKER
9	Membangun infrastruktur yang tangguh, mempromosikan industry yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum	1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Penyediaan Air Baku	0,11 persen	DINAS PUPR
				Kegiatan : Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Air Baku	1,6 %	DINAS PUPR
				Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Bangunan penampung air yang terbangun	350 m	DINAS PUPR
				Pembangunan Polder/Kolam Retensi	Luas bangunan polder/kolam retensi	3 Ha	DINAS PUPR
				Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	DINAS PUPR
				Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	4 Dokumen	DINAS PUPR
			2	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap	91,50 %	DINAS PUPR

No	Tujuan Pembangunan SDGs	RKPD 2021					
		Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah		Kinerja Program		Perangkat Daerah
					Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4		5	6	7
				Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap	91,50 %	DINAS PUPR
				Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang dilebarkan Panjang jalan yang menuju standar	28 Km	DINAS PUPR
				Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang dibangun	10 km	DINAS PUPR
				Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang jalan yang terpelihara	14.88 Km	DINAS PUPR
				Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang fungsional jalan yang terpelihara	752,65 Km	DINAS PUPR
				Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang jembatan yang terpelihara	3508.75 m	DINAS PUPR
				Penggantian Jembatan	Panjang jembatan yang diganti	28 m	DINAS PUPR
				Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Panjang Jalan yang terencana	251 km	DINAS PUPR
				Rehabilitasi Jalan	Panjang jalan yang direhabilitasi	5,47 Km	DINAS PUPR
				Survey Kondisi Jalan/Jembatan	kondisi jalan dan jembatan yang disurvey	850,99 Km	DINAS PUPR
		Menjamin Keberlangsungan Usaha Industri	1	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase data informasi industri di SIINAS	70 persen	DISPERINDAG
				Kegiatan : Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Persentase Industri yang menyampaikan informasi industri secara lengkap	60%	DISPERINDAG
				Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri	Jumlah Industri Yang Terdaftar di SINAS	25 Industri	DISPERINDAG

No	Tujuan Pembangunan SDGs	RKPD 2021					
		Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah		Kinerja Program		Perangkat Daerah
					Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4		5	6	7
				Nasional (SIINas)			
			2	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Industri yang sesuai Izin Usaha Industri	30 persen	DISPERINDAG
				Kegiatan : Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Jumlah industri yg dipantau	55 Industri	DISPERINDAG
				Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah komitmen IUI, IUPI yang dipantau	5 Komitmen	DISPERINDAG
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi	Jumlah IUI yang diawasi	50 IUI	DISPERINDAG
		Menumbuh-kembangkan industri pengolahan sumberdaya unggulan dengan struktur industri yang kuat dan berdaya saing	1	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pertumbuhan jumlah industri	5 persen	DISPERINDAG
				Kegiatan : Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Persentase pertumbuhan tenaga kerja industri	2%	DISPERINDAG

No	Tujuan Pembangunan SDGs	RKPD 2021					
		Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah		Kinerja Program		Perangkat Daerah
					Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4		5	6	7
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah IKM OVOP yang dibina	26 IKM	DISPERINDAG
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Kelompok Industri yang terfasilitasi Teknologi Tepat Guna	2 Kelompok	DISPERINDAG
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Produk Industri yang bersertifikat Uji Product dan HKI	200 Produk	DISPERINDAG
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Pelaku Industri yang terfasilitasi Dekranasda ; Jumlah SDM Indutsri yang terlatih	350 ; 80 Pelaku Industri ; SDM Industri	DISPERINDAG
					Persentase pertumbuhan jumlah industri	5 persen	DISPERINDAG
				Kegiatan : Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Persentase pertumbuhan tenaga kerja industri	2%	DISPERINDAG
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Fasilitasi Produk	200 Fasilitasi	DISPERINDAG
10	Mengurangi kesenjangan di dalam dan luar negeri						
11	Membuat kota dan pemukiman yang inklusif, aman,	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur perumahan dan	**1**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Persentase Rumah akibat bencana yang tertangani**	**100%**	**DINAS PRKP**

No	Tujuan Pembangunan SDGs	RKPD 2021					
		Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah		Kinerja Program		Perangkat Daerah
					Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4		5	6	7
	tangguh dan berkelanjutan	permukiman					
				Kegiatan : Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah dokumen pendataan yang tersusun	1 Dokumen	DINAS PRKP
				Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Laporan indentifikasi perumahan di lokarawan bencana atau terkena program provinsi yang tersususnsi	1 0	DINAS PRKP
				Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Laporan indentifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan yang tersusun	0 dokumen	DINAS PRKP
			2	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase permukiman yang terpasilitasi oleh PSU	50%	DINAS PRKP
				Kegiatan : Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Jumlah Permukiman yang terfasilitasi oleh PSU	3 lokasi	DINAS PRKP
				Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersusun	0 dokumen	DINAS PRKP
				Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah RTLH yang terbangun	100 Unit	DINAS PRKP
		Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum	1	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Jumlah bangunan gedung yang tertata	15 Persentase	DINAS PRKP

No	Tujuan Pembangunan SDGs	RKPD 2021					
		Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah		Kinerja Program		Perangkat Daerah
					Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4		5	6	7
				Kegiatan : Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung yang terselenggara dan tertata	2 Unit	DINAS PRKP
				Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung yang terbangun dan tertata	2 Unit	DINAS PRKP
			2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	83,85 persentase	DINAS PRKP
				Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Jumlah rumah tangga yang terlayani sistem air limbah domestik	65 KK	DINAS PRKP
				Pemicuan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Dan Pembinaan Penyediaan Prasarana Cubluk	Jumlah rumah tangga yang terbangun tangki septik individual	65 KK	DINAS PRKP
			3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga berakses air minum layak	69,90 persentase	DINAS PRKP
				Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tangga yang terlayani akses air minum	144 KK	DINAS PRKP
				Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Tersedianya dokumen studi kelayakan dan rencana teknis terinci SPAM Lintas Kab/Kota	1 Dokumen	DINAS PRKP
				Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan	Panjang pipa distribusi air minum	1500 meter	DINAS PRKP

No	Tujuan Pembangunan SDGs	RKPD 2021					
		Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah		Kinerja Program		Perangkat Daerah
					Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4		5	6	7
12	Menjamin pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan	Peningkatan ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi bahan pangan	1	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Jumlah orang Tertanganinya masyarakat rawan pangan	1700 orang	DINAS PANGAN
				Kegiatan : Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Jumlah orang yang terfasilitasi di daerah rentan rawan pangan	1700 orang	DINAS PANGAN
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	Jumlah orang yang difasilitasi dan yang mengikuti gerahan 100- HPK	1700 orang	DINAS PANGAN
				Kegiatan : Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Kerentanan dan Ketahanan Pangan	3 Dokumen	DINAS PANGAN
				Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen	3 Dokumen	DINAS PANGAN
			2	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan yang aman dikonsumsi	86%	DINAS PANGAN
				Kegiatan : Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produk PSAT yang terawasi	80 Produk	DINAS PANGAN
				Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	Jumlah pertemuan/rakor OKKPD	0 kali	DINAS PANGAN
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah paket rafid test kit	0 paket	DINAS PANGAN
				Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sertifikat register PSAT	5 Register	DINAS PANGAN

No	Tujuan Pembangunan SDGs	RKPD 2021					
		Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah		Kinerja Program		Perangkat Daerah
					Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4		5	6	7
				Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produk PSAT yang terawasi	21 Produk	DINAS PANGAN
				Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikat Prima 3	25 Sertifikat	DINAS PANGAN
		Peningkatan Produkasi dan Pengelolaan Hasil Produksi Pertanian, Perkebunaan dan Peternakan	1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Ketersediaan Pangan Pokok	0 Persentase	DINAS PANGAN
				Kegiatan : Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada Berbagai Sektor Sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Ketersediaan Pangan Utama	1 Jenis	DINAS PANGAN
				Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Dokumen Rekomendasi tentang peningkatan ketahanan pangan	1 Dokumen	DINAS PANGAN
				Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	1 kelompok	DINAS PANGAN
			2	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Meningkatnya konsumsi pangan yang beragam pada kelompok Pangan a) Umbi-umbian, b) Kacang-kacangan c) nuah dan sayur	a) 27,9 b) 7,9 c) 21,6 Persentase	DINAS PANGAN
				Kegiatan : Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	Persentase meningkatnya pemahaman masyarakat akan pola pangan yang B2SA	100 persen	DINAS PANGAN
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan	Jumlah peserta pertemuan sosialisasi B2SA (TP. PKK Kab/Kota dan Kelompok masyaraka	0 orang	DINAS PANGAN

No	Tujuan Pembangunan SDGs	RKPD 2021					
		Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah		Kinerja Program		Perangkat Daerah
					Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4		5	6	7
				Aman (B2SA)			
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Dokumen Konsumsi perkapita pertahun	1 Dokumen	DINAS PANGAN
				Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Event	0 Event	DINAS PANGAN
				Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah orang yang mengikuti event	120 orang	DINAS PANGAN
13	Membuat langkah aksi untuk menghadapi perubahan iklim dan dampaknya	Peningkatan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan	1	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Parameter Kualitas Lingkungan yang terakreditasi	80 Persentase	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				Kegiatan : Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	Jumlah Usulan Parameter Kualitas Lingkungan untuk diakreditasi	38 Parameter Usulan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah Analis laboratorium	23 Orang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah Dokumen Prasyarat Akreditasi Laboratorium	4 Dokumen	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah Sampel Parameter Kualktas Lingkungan yang terlayani	1200 Sampel	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah Titik Sampling Parameter Kualitas Lingkungan yang terlayani	40 Titik Sampling	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
					Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Limbah	8,23 Persentase	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Tujuan Pembangunan SDGs	RKPD 2021					
		Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah		Kinerja Program		Perangkat Daerah
					Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4		5	6	7
				Kegiatan : Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	Jumlah Rekomendasi Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca	4 Rekomendasi	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Inventarisasi Emisi Gas Rumah kaca yang tersusun	1 Dokumen	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Peningkatan pengendalian terhadap kualitas air sungai	**1**	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Titik Pantau Kualitas Air Laut yang memenuhi baku mutu dengan kriteria baik	50 Persentase	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				Kegiatan : Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	Jumlah Titik Pantau Kualitas Air Laut	25 Titik Pantau	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Titik Pantau Kualitas Air Laut	25 Titik Pantau	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
					Persentase Titik Pantau Kualitas Air Sungai yang memenuhi baku mutu dengan kriteria baik	50 Persentase	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				Kegiatan : Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Informasi Kinerja pengelolaan Lingkungan Hidup yang tersusun	1 Dokumen	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Dokumen Informasi Kinerja pengelolaan Lingkungan Hidup yang tersusun	1 Dokumen	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				Kegiatan : Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	Jumlah Titik Pantau Kualitas Air Sungai	81 Titik Pantau	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Tujuan Pembangunan SDGs	RKPD 2021					
		Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah		Kinerja Program		Perangkat Daerah
					Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4		5	6	7
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Identifikasi sumber sumber pencemar	0 Dokumen	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Perhitungan Beban Pencemaran air sungai	0 Dokumen	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Titik Pantau Kualitas Air Sungai	81 Titik Pantau	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase tersusunnya Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	75 Persentase	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				Kegiatan : Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Jumlah Jenis Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis	2 Jenis Dokumen	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang yang Tersusun	1 Dokumen	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Rekomendasi Hasil Validasi KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota	7 Rekomendasi	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJMD yang tersusun	0 Dokumen	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Rekomendasi Hasil Validasi KLHS RPJMD Kab/Kota	0 Rekomendasi	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Tujuan Pembangunan SDGs	RKPD 2021					
		Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah		Kinerja Program		Perangkat Daerah
					Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4		5	6	7
				Kegiatan : Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Jumlah Dokumen Penunjang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	0 Dokumen	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi	Jumlah Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	0 Dokumen	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi	Jumlah Dokumen Penetapan RPPLH Provinsi	0 Dokumen	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			3	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Persentase DAS yang dikelola	1,64 Persentase	DINAS KEHUTANAN
				Kegiatan : Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Luas DAS yang dikelola	27000 Ha	DINAS KEHUTANAN
				Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Luas DAS yang dioptimalisasi daya dukung wilayah DAS	27000 Ha	DINAS KEHUTANAN
				Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah kelompok pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan DAS	5 Kelompok	DINAS KEHUTANAN
				Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	Jumlah pemegang IPPKH yang menerapkan teknik KTA	6 pemegang IPPKH	DINAS KEHUTANAN
				Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	Jumlah kelembagaan pengelolaan DAS provinsi	1 Forum	DINAS KEHUTANAN
				Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan DAS	1 Kali	DINAS KEHUTANAN
				Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS	Jumlah dokumen RP DAS yang direview	4 Dokumen	DINAS KEHUTANAN
			4	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN	Persentase Titik Pantau Kualitas Udara yang memenuhi baku mutu dengan	80 Persentase	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Tujuan Pembangunan SDGs	RKPD 2021					
		Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah		Kinerja Program		Perangkat Daerah
					Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4		5	6	7
				LINGKUNGAN HIDUP	kriteria baik		
				Kegiatan : Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	Jumlah Titik Pantau Kualitas Udara	28 Titik Pantau	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Titik Pantau Kualitas Udara	28 Titik Pantau	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Peningkatan pengendalian dan pengawasan hutan	**1**	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Persentase konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	20 Persentase	DINAS KEHUTANAN
				Kegiatan : Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Jumlah kawasan Esensial	200%	DINAS KEHUTANAN
				Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah kawasan bernilai ekosistem penting	2 kawasan	DINAS KEHUTANAN
				Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	h penguatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat	2 Kelompok	DINAS KEHUTANAN
				Kegiatan : Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah tumbuhan dan satwa liar tidak dilindungi yang di konservasi	5 jenis	DINAS KEHUTANAN

No	Tujuan Pembangunan SDGs	RKPD 2021					
		Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah		Kinerja Program		Perangkat Daerah
					Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4		5	6	7
				Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Jumlah tumbuhan dan satwa liar tidak dilindungi yang di konservasi	5 jenis	DINAS KEHUTANAN
		Peningkatan pemanfaatan kawasan hutan	**1**	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase Kelompok Tani Hutan yang terbina	62,5 Persentase	DINAS KEHUTANAN
				Kegiatan : Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Terbentuknya/meningkatnya kelas Kelompok Tani Hutan	24 KTH	DINAS KEHUTANAN
				Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Terbentuknya/meningkatnya kelas Kelompok Tani Hutan	0 KTH	DINAS KEHUTANAN
				Kegiatan : Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	luas areal perhutanan sosial	41219 Ha	DINAS KEHUTANAN
				Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas perhutanan sosial	41219 Ha	DINAS KEHUTANAN
				Kegiatan : Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Terlaksananya penyuluhan kehutanan dan pemberdayaan masyarakat bidang Kehutanan di Provinsi Kep. Bangka Belitung	32 Penyuluh	DINAS KEHUTANAN
				Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	32 penyuluh	DINAS KEHUTANAN
14	Melakukan konservasi dan pemanfaatan laut samudra	Pengelolaan dan pemanfaatan tata ruang laut serta penegakan perundang-	1	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Luasan ruang laut, pesisir dan pulau pulau kecil yang termanfaatkan	1.050.000 Ha	DKP

No	Tujuan Pembangunan SDGs	RKPD 2021				
		Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4	5	6	7
	dan sumberdaya maritimyang berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan.	undangan kelautan dan perikanan.				
			Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat Pesisir yang diberdayakan dan dilakukan Pembinaan	13 Kelompok	DKP
			Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat Pesisir yang dilakukan pembinaan	3 Kelompok Masyarakat	DKP
			Kegiatan : Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Rekomendasi dan SOP yang diterbitkan	10 Rekomendasi	DKP
			Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil	10 Rekomendasi	DISHUB
			Kegiatan : Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Alokasi Pengelolaan Ruang Laut	7 Lokasi	DKP
			Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Layanan operasional Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau kecil	12 bulan	DKP
			Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Jumlah Kawasan Konservasi yang terkelola	2 Kawasan	DKP
			Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kawasan Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil	1 Dokumen	DLH

No	Tujuan Pembangunan SDGs	RKPD 2021					
		Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah		Kinerja Program		Perangkat Daerah
					Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4		5	6	7
			2	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Pelaku Usaha yang Taat Aturan	75%	DISHUB
				Kegiatan : Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah pelaku usaha kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil yang diawasi	115 Pelaku Usaha	DINAS PUPR
				Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Pelaku Usaha Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 mil yang diawasi	10 Pelaku Usaha	DKP
				Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 mil yang diawasi	100 Pelaku Usaha	DISHUB
				Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 mil yang dibina	14 Pelaku Usaha	DINAS PUPR
				Kegiatan : Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan Genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kebupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diawasi	50 Pelaku Usaha	DKP
				Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelaku Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Yang diawasi	50 Pelaku Usaha	DINAS PUPR

No	Tujuan Pembangunan SDGs	RKPD 2021					
		Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah		Kinerja Program		Perangkat Daerah
					Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4		5	6	7
15	Melindungi, mengembalikan, dan mempromosikan pemanfaatan ekosistem darat yang berkelanjutan, manajemen hutan yang lestari, memerangi kekeringan, menghentikan dan mengembalikan degradasi lahan serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati	Peningkatan tata kelola kehutanan	1	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase hasil hutan yang dikelola	90 Persentase	DINAS KEHUTANAAN
				Kegiatan : Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Jumlah hasil hutan bukan kayu yang dikembangkan	1 unit	DINAS KEHUTANAAN
				Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK) melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Masyarakat dan Aparatur yang memiliki komptensi PUHHBK	2500%	DINAS KEHUTANAAN
				Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Luas pembudidayaan hasil hutan bukan kayu	0 Ha	DINAS KEHUTANAAN
				Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	Jumlah alat pengolah bahan baku hasil hutan bukan kayu	0 unit	DINAS KEHUTANAAN
				Kegiatan : Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah izin pengolahan hasil hutan kayu	1 unit	DINAS KEHUTANAAN

No	Tujuan Pembangunan SDGs	RKPD 2021				
		Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4	5	6	7
			Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi IUIPHHK	1 unit	DINAS KEHUTANAAN
			Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	jumlah pembinaan dan pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu	1 kali	DINAS KEHUTANAAN
				Persentase pengelolaan hutan		DINAS KEHUTANAAN
			Kegiatan : Pelaksanaan Pengelolaan KHDTK untuk Kepentingan Religi	Jumlah Izin HDTK	2 dokumen	DINAS KEHUTANAAN
			Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan KHDTK untuk Tempat Ibadah dan Wisata Rohani	Jumlah pengawasan dan pengendalian	1 kali	DINAS KEHUTANAAN
			Kegiatan : Pelaksanaan Pengelolaan KHDTK untuk Kepentingan Religi	Jumlah Izin HDTK	2 dokumen	DINAS KEHUTANAAN
			Penetapan Rencana Pengelolaan Tempat Ibadah dan Wisata Rohani di Kawasan Hutan	Jumlah Rencana Pengelolaan tempat ibadah dan wisata rohani	2 Dokumen	DINAS KEHUTANAAN
			Kegiatan : Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah izin pemanfaatan HP dan HL	8 izin	DINAS KEHUTANAAN
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah koordinasi dan sinkrinisasi pengendalian izin usaha atau kerjasama pemanfaatan di kawasan hutan	1 kali	DINAS KEHUTANAAN

No	Tujuan Pembangunan SDGs	RKPD 2021				
		Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4	5	6	7
				lindung		
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah koordinasi dan sinkrinisasi pengendalian izin usaha atau kerjasama pemanfaatan di kawasan hutan produksi	1 kali	DINAS KEHUTANAAN
			Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah penilaian rencana pengelolaan di kawasan hutan produksi	2 Dokumen	DINAS KEHUTANAAN
			Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah data dan informasi wilayah usaha di kawasan hutan lindung	1 Basdata	DINAS KEHUTANAAN
			Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah data dan informasi wilayah usaha di kawasan hutan produksi dan Jumlah tenaga GIS	1 Basdata	DINAS KEHUTANAAN
				Persentase penurunan kabakaran hutan dan lahan		DINAS KEHUTANAAN
			Kegiatan : Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah penanganan perkara pidana kehutanan	200%	DINAS KEHUTANAAN
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Luas Penurunan kebakaran hutan dan lahan	158200%	DINAS KEHUTANAAN
				Persentase perkara kehutanan yang ditindaklanjuti		DINAS KEHUTANAAN

No	Tujuan Pembangunan SDGs	RKPD 2021				
		Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4	5	6	7
			Kegiatan : Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah penanganan perkara pidana kehutanan	200%	DINAS KEHUTANAAN
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah pelaksanaan koordinasi perlindungan hutan	1 kali	DINAS KEHUTANAAN
			Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	Jumlah penanganan aktifitas ilegal pemanfaatan hasil hutan	2 perkara	DINAS KEHUTANAAN
			Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Jumlah penanganan aktivitas perusakan hutan dan jumlah tenaga pembantu polhut	200%	DINAS KEHUTANAAN
			Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Jumlah pengendalian kerusakan kawasan hutan	2 perkara	DINAS KEHUTANAAN
				Persentase Rehabilitasi Hutan dan Lahan		DINAS KEHUTANAAN
			Kegiatan : Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi Hutan dan Lahan	80 Ha	DINAS KEHUTANAAN
			Pembangunan Hutan Kota di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Kota dan DED	0 Ha	DINAS KEHUTANAAN
			Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas pembangunan hutan rakyat di luar kawasan hutan	0 Ha	DINAS KEHUTANAAN
			Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Penghijauan lingkungan di luar kawan hutan	0 Ha	DINAS KEHUTANAAN

No	Tujuan Pembangunan SDGs	RKPD 2021					
		Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah		Kinerja Program		Perangkat Daerah
					Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4		5	6	7
				Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pengembangan RHL	1 Laporan	DINAS KEHUTANAAN
				Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Luas kaji terap teknologi RHL	2 Ha	DINAS KEHUTANAAN
				Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah dokumen RTnRL	1 Dokumen	DINAS KEHUTANAAN
16	Melindungi kedamaian dan masyarakat yang inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif untuk semua tingkatan.	Peningkatan pelayanan terhadap pemberian hak-hak anak	1	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Peningkatan SDM dalam Pemenuhan Partisipasi Anak	18,3 persen	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
				Kegiatan : Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang di bina	7 Kab/Kota	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi dan media publikasi	160 Orang	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
				Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan	Jumlah Kab/Kota yang di bina	7 Kab/Kota	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN

No	Tujuan Pembangunan SDGs	RKPD 2021					
		Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah		Kinerja Program		Perangkat Daerah
					Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4		5	6	7
				Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi			PENDUDUK KB
				Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta FA tingkat provinsi dan tingkat nasional dan peserta HAN	977 Orang	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
		Peningkatan keadilan dan kesetaraan gender	**1**	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Perangkat Daerah yang Responsif Gender	84,37 persen	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
				Kegiatan : Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Jumlah kabupaten kota yang dibina	7 Kab/Kota	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta Advokasi dan KIE PUG dan PKHP	240 Orang	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta penguatan kapasitas pelaksanaanPUG dan PPRG	75 Orang	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
				Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Jumlah OPD peserta pengembangan materi danPelaksanaan KIE Kesetaraan dan Keadilan Genderbagi institusi Media Massa	32 OPD	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
				Kegiatan : Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	Jumlah kabupaten kota yang dibina	7 Kab/Kota	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB

No	Tujuan Pembangunan SDGs	RKPD 2021					
		Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah		Kinerja Program		Perangkat Daerah
					Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4		5	6	7
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	1. Jumlah peserta Pelatihan dan pembentukanfasilitator pendidikan politik untuk perempuan; 2. Jumlah peserta Pembinaan Industri Rumahan	75; 90 Orang; Orang	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
				Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah kabupaten kota yang dibina	7 Kab/Kota	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
				Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta	45 Orang	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
			2	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase IR yang di bina	0,71 persen	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
				Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang di bina	7 Kab/Kota	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta pembinaan organisasi perempuan	40 Orang	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
				Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Penguatan dan Pengembangan LembagaPenyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluargadalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	40 Orang	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB

No	Tujuan Pembangunan SDGs	RKPD 2021					
		Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah		Kinerja Program		Perangkat Daerah
					Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4		5	6	7
				Kegiatan : Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang di bina	7 Kab/Kota	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah peserta sekolah perempuan	200 Orang	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
				Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta kegiatan Peningkatan Nilai-nilai Kejuangan Perempuan Indonesia	500 Orang	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
			3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Peningkatan SDM Perlindungan Perempuan	0,039 persen	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
				Kegiatan : Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan upaya pencegahan perlindungan perempuan dan para pihak yang terlibat dalam upaya perlindungan perempuan	1 Laporan	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah kebijkan; Jumlah peserta sosialisasi pencegahan pelecehans seksual bagi perempuan	1; 100 Kebijakan ; Orang	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
				Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Persentase Layanan Perempuan Korban Kekerasan yang ditangani	1	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen layanan pengaduan masyarakatyang ditangani	1 Dokumen	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB

No	Tujuan Pembangunan SDGs	RKPD 2021					
		Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah		Kinerja Program		Perangkat Daerah
					Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4		5	6	7
				Kegiatan : Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Perempuan Korban Kekerasan yang ditangani	1	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
				Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen layanan pengaduuan masyarakatyang ditangani	1 Dokumen	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
		Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin	1	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Prosentase PMKS/PSKS yang terberdayakan	50%	DINSOS
				Kegiatan : Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Jumlah PSKS yang diberdayakan	203 orang	DINSOS
				Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Potensi Pekerja Sosial Masyarakat yang di tingkatkan kemampuannya	416 PSM	DINSOS
				Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Kelembagaan masyarakat yang di tingkatkan kemampuannya	1000 orang	DINSOS
				Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga yang di tingkatkan kemampuannya	11 LK3	DINSOS
				Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Jumlah Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang di tingkatkan kemampuannya	47 TKSK	DINSOS
17	Penguatan moi dan revitalisasi kerjasama global untuk pembangunan						

No	Tujuan Pembangunan SDGs	RKPD 2021				
		Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4	5	6	7
	berkelanjutan					

4.2.7 Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM)

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2021 disusun berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional. Arah kebijakan pembangunan daerah tersebut berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan sosial serta beberapa prioritas lainnya. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 menggunakan target dan capaian SPM 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar disesuaikan dengan rencana capaian target sasaran terukur dari output kegiatan, sebagai berikut:

1. Penyelarasan prioritas pembangunan daerah dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Pendidikan yaitu: 1). Pendidikan menengah; setiap Warga Negara Indonesia usia 16 s.d. 18 tahun berhak mendapatkan pendidikan menengah sesuai dengan standar nasional pendidikan. 2). Pendidikan Khusus; setiap Warga Negara Indonesia usia 4 s.d. 18 tahun yang berkebutuhan khusus berhak mendapatkan pendidikan khusus sesuai dengan standar nasional pendidikan.

Tabel IV.10
Strategi dan Program Prioritas RKPD 2021
Dalam Rangka Mendukung Pencapaian SPM 2021 Bidang Pendidikan

No	Standar	RKPD 2021

	Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan	Strategi	Program/ Kegiatan PD	Kinerja Program		
				Indikator (out come)	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Pendidikan Menengah	Peningkatan akses pelayanan pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase GTK Bersertifikasi	80	DINAS PENDIDIKAN
				Nilai rata-rata UK GTK SMA	60	DINAS PENDIDIKAN
				Jumlah Medali Siswa Dalam Kompetisi Nasional /Internasional	4	DINAS PENDIDIKAN
				APK SMA	43	DINAS PENDIDIKAN
			Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah guru SMA yang mengikuti PPG	25 Orang	DINAS PENDIDIKAN
				Jumlah guru SMA yang mendapat pengembangan kompetensi	165 Orang	DINAS PENDIDIKAN
				Jumlah lomba kesiswaan SMA	12 jenis	DINAS PENDIDIKAN
				Jumlah sarana prasarana yang dibangun	7 lokasi	DINAS PENDIDIKAN
				Jumlah siswa/mahasiswa yang mendapat beasiswa	1894 Orang	DINAS PENDIDIKAN
			Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah guru SMK yang mengikuti PPG	20 Orang	DINAS PENDIDIKAN
				Jumlah guru SMK yang mendapat pengembangan kompetensi	160 Orang	DINAS PENDIDIKAN
				jumlah Kontingen guru berprestasi ke tingkat Nasional	1 Tim	DINAS PENDIDIKAN
				Jumlah lomba kesiswaan SMK	5 jenis	DINAS PENDIDIKAN
				jumlah sarana prasarana SMK yang direhab	4 lokasi	DINAS PENDIDIKAN
				jumlah sarana prasarana SMK yang bangun	7 ruang	DINAS PENDIDIKAN
				Jumlah Pengadaan sarana prasarana SMK	1 paket	DINAS PENDIDIKAN
				Jumlah siswa yang mendapat beasiswa	1000 Orang	DINAS PENDIDIKAN
2	Pendidikan Khusus		Kegiatan Pengelolaan	Jumlah guru SMA yang mengikuti	10 Orang	DINAS PENDIDIKAN

No	Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan	RKPD 2021				
		Strategi	Program/ Kegiatan PD	Kinerja Program		
				Indikator (out come)	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
			Pendidikan Khusus	PPG		
				Jumlah guru SMA yang mendapat pengembangan kompetensi	102 Orang	DINAS PENDIDIKAN
				Jumlah lomba kesiswaan	8 jenis	DINAS PENDIDIKAN
				Jumlah Pengadaaan Sarana prasarana pendidikan khusus	2 unit	DINAS PENDIDIKAN
				Jumlah Sarana, Prasarana pendidikan khusus yang dibangun	3 lokasi	DINAS PENDIDIKAN
				Tersedianya Biaya Operasional PLA	12 bulan	DINAS PENDIDIKAN
		peningkatan mutu layanan pendidikan.	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	persentase guru yang mengajar sesuai dengan kompetensi	0,8	DINAS PENDIDIKAN
			Kegiatan Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	jumlah dokumen analisis GTK	1 Dokumen	DINAS PENDIDIKAN
			Program Pengembangan Kurikulum Dan Pengendalian Perizinan Pendidikan	persentase dokumen kurikulum yg terintegrasi dengan kurikulum nasional	0,75	DINAS PENDIDIKAN
			Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah dokumen Penyusunan Muatan Lokal Pendidikan Menengah	2 Dokumen	DINAS PENDIDIKAN
			Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah dokumen Penyusunan Muatan Lokal Pendidikan khusus	1 Dokumen	DINAS PENDIDIKAN
			PROGRAM BAHASA DAN SASTRA	persentase minat siswa terhadap bahasa dan sastra	0,7	DINAS PENDIDIKAN
			Kegiatan pembinaan, pengembangan dan perlindungan	jumlah buku/kamus yang disusun	2 Buku	DINAS PENDIDIKAN

No	Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan	RKPD 2021				
		Strategi	Program/ Kegiatan PD	Kinerja Program		
				Indikator (out come)	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
			bahasa dan sastra yang penuturannya lintas daerah kab/kota dalam satu daerah provinsi			
			Kegiatan pembinaan, pengembangan dan perlindungan bahasa dan sastra yang penuturannya lintas daerah kab/kota dalam satu daerah provinsi	jumlah siswa yang berminat mengikuti lomba	50 Orang	DINAS PENDIDIKAN

2. Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota antara lain: 1) Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar. 2) Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar. 3) Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. 4) Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. 5) Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar. 6) Setiap warga negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar. 7) Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar. 8) Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. 9) Setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. 10) Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar. 11) Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar. 12) Setiap orang di satuan pendidikan dasar mendapatkan pelayanan higiene sanitasi pangan sesuai standar. Sedangkan SPM bidang kesehatan untuk Provinsi antara lain, 1. Kejadian luar biasa (KLB), 2. Kebencanaan

Tabel IV.11
Strategi dan Program Prioritas RKPD 2021
Dalam Rangka Mendukung Pencapaian SPM 2021 Bidang Kesehatan

No	Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	RKPD 2021				
		Strategi	Program /Kegiatan PD	Kinerja Program		
				Indikator (out come)	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*

No	Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	RKPD 2021				
		Strategi	Program /Kegiatan PD	Kinerja Program		
				Indikator (out come)	Target	Perangkat Daerah
1	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi	Peningkatan pelayanaan kesehatan masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Pelaksanaan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	100%	DINKES
			Kegiatan: Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Surveilans, Imunisasi dan Krisis Kesehatan	100%	DINKES
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana	Persentase Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	100%	DINKES
2	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi	Peningkatan penyelenggaraan penanggulangan bencana	Kegiatan: Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Surveilans, Imunisasi dan Krisis Kesehatan	100%	DINKES
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persentase Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	100%	DINKES
			Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Persentase Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) yang diambil dan dikirim ke Lab Rujukan/Nasional untuk konfirmasi laboratorium	95%	DINKES
			Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	Persentase Kegiatan Upaya pengurangan risiko Krisis Kesehatan Akibat Bencana /dan atau Berpotensi Bencana	80%	DINKES

3. Penyelarasan prioritas pembangunan daerah dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1) Setiap warga negara berhak memperoleh air bersih untuk kebutuhan rumah tangga sesuai dengan standar air bersih 2) Setiap warga negara berhak memperoleh pengelolaan air limbah rumah tangga sesuai dengan standar.

Tabel IV.12
Strategi dan Program Prioritas RKPD 2021 Dalam Rangka Mendukung Pencapaian SPM 2021 Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	RKPD 2021				
		Strategi	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4	5	6	7
1	Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum	Program Pengembangan Sumber Daya Air	Persentase peningkatan luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air	5%	DINAS PUPR
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota			Persentase Penyediaan Air Baku	0,016	DINAS PUPR
			Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Luas Bangunan Penampung air	3,77Ha	DINAS PUPR
			Pembangunan Penampungan Sumber Air Baku Kolong Kerasak	Luas Bangunan Penampung air	3,77 Ha	DINAS PUPR
			Pembangunan Polder/Kolam Retensi	Luas bangunan polder/kolam retensi	6,15Ha	DINAS PUPR
			Penataan Kolong Retensi Grasi Sungailiat	Luas bangunan polder/kolam retensi	2,65 Ha	DINAS PUPR
			Pembangunan Kolam Retensi Sungai Muntok	Luas bangunan polder/kolam retensi	3,5 Ha	DINAS PUPR
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota					

4. Penyelarasan prioritas pembangunan daerah dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana yang punya rumah; setiap korban bencana berhak memperoleh rumah sesuai dengan standar rumah layak huni. Selain itu, beberapa kegiatan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang perlu diperhatikan tahun 2021 antara lain sebagai berikut: 1) Penanganan kawasan permukiman kumuh perkotaan dengan fokus tersedianya dokumen perencanaan penanganan kawasan permukiman kumuh daerah yang mengacu pada Pedoman Umum Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Nasional, dengan luasan kawasan kumuh yang mengacu pada SK kawasan permukiman kumuh yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota. Penanganan kawasan permukiman kumuh akan fokus pada: a) Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat b) penguatan kelembagaan di level nasional dan daerah terkaitperumahan dan permukiman 2) Data dan profil perumahan di daerah; 3) Penyediaan layanan sanitasi untuk mencapai universal access melalui Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP), yaitu pembagian 85% penduduk dengan akses layak yang terdiri dari sistem setempat dan terpusat dan 15% akses dasar untuk penduduk di kawasan berkepadatan rendah dan kawasan dengan tingkat resiko sanitasi rendah.

Tabel IV.13
Strategi dan Program Prioritas RKPD 2021 Dalam Rangka Mendukung Pencapaian SPM 2021 Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	RKPD 2021				
		Strategi	Program / Kegiatan PD	Kinerja Program		
				Indikator (out come)	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Provinsi	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur perumahan dan permukiman	Program Pengembangan Perumahan	Persentase rumah akibat bencana yang tertangani	100%	DINAS PERKIM
			Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi			DINAS PERKIM
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi		Indentifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi			DINAS PERKIM

5. Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 1) Setiap warga negara yang menjadi korban dan terdampak kebakaran menerima layanan sesuai standar. 2) Setiap warga negara yang menjadi korban dan terdampak kebakaran memerlukan pertolongan. 3) Setiap warga negara yang menjadi korban dan terdampak bencana menerima layanan sesuai standar. 4) Setiap warga negara korban bencana berhak mendapatkan layanan pemenuhan kebutuhan dasar (sandang, pangan dan papan). 5) Setiap warga negara berhak mendapatkan layanan akibat gangguan trantibum. 6) Setiap warga negara berhak mendapatkan layanan trantibum dalam semua aktivitas.

Tabel IV.14
Strategi dan Program Prioritas RKPD 2021 Dalam Rangka Mendukung Pencapaian SPM 2021 Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	RKPD 2021				
		Strategi	Program/ Kegiatan PD	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4	5	6	7
1	Pelayanan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Provinsi	Peningkatan Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan perda serta perlindungan masyarakat (Linmas)	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial			BAKESBANG POL
			Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1 Dokumen	BAKESBANG POL
			Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Jumlah Angka Kriminalitas Menurun		BAKESBANG POL
			Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1 Dokumen	BAKESBANG POL
			Program Peningkatan	Persentase pelanggaran	1	SATPOL PP

No	SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	RKPD 2021				
		Strategi	Program/ Kegiatan PD	Kinerja Program		
				Indikator (out come)	Target	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
			Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Tibumtranmas yang ditindak		
				Persentase penegakan pelanggar perda	100%	SATPOL PP
			Kegiatan Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Jumlah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat		SATPOL PP
			Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Jumlah aktifitas penegakan perda dan perkada	52 kali	SATPOL PP

6. Penyelarasan prioritas pembangunan daerah dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Sosial (Pemerintah Provinsi) 1) Rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dalam panti dan/atau lembaga; setiap penyandang disabilitas berhak mendapatkan rehabilitasi sosial dalam panti dan/atau lembaga sesuai standar. 2) Rehabilitasi sosial anak dalam panti dan/atau lembaga; setiap anak berhak mendapatkan rehabilitasi sosial dalam panti dan/atau lembaga sesuai standar. 3) Rehabilitasi sosial lanjut usia dalam panti dan/atau lembaga;setiap lanjut usia berhak mendapatkan rehabilitasi sosial dalam panti dan/atau lembaga sesuai standar. 4) Rehabilitasi sosial tuna sosial dalam panti dan/atau lembaga; setiap tuna sosial berhak mendapatkan rehabilitasi sosial dalam panti dan/atau lembaga. 5) Pemenuhan kebutuhan dasar dan layanan dukungan psikososial korban bencana pada saat tanggap darurat dan pasca bencana; setiap korban bencana berhak mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar dan layanan dukungan psikososial sesuai standar pada saat tanggap darurat dan pasca bencana.

Tabel IV.15
Strategi dan Program Prioritas RKPD 2021
Dalam Rangka Mendukung Pencapaian SPM 2021 Bidang Sosial

No	SPM Bidang Sosial	RKPD 2021				
		Strategi	Program/ Kegiatan PD	Kinerja Program		
				Indikator (out come)	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*

No	SPM Bidang Sosial	RKPD 2021				
		Strategi	Program/ Kegiatan PD	Kinerja Program		
				Indikator (out come)	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar Di Dalam Panti	Pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan pada peningkatan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas,	Program Rehabilitasi Sosial	Prosentase PMKS yang di Rehabilitasi sosial di Dalam Panti Non Pemerintah		DINSOS
			Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Jumlah penyandang disabilitasi yang direhab sosial di Dalam Panti Non Pemerintah		DINSOS
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar Di Dalam Panti		Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	Jumlah anak terlantar yang direhab sosial di Dalam Panti Non Pemerintah		DINSOS
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar Di Dalam Panti		Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	Jumlah lanjut usia terlantar yang direhab sosial di Dalam Panti Non Pemerintah		DINSOS
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan Dan Pengemis Di Dalam Panti		Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti	Jumlah Gelandangan dan pengemis yang direhab sosial		DINSOS
			Program Rehabilitasi Sosial	Prosentase PMKS yang di Rehabilitasi sosial di PSBL		DINSOS
			Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Jumlah penyandang disabilitasi yang direhab sosial dalam Panti Pemerintah	18,28	DINSOS
			Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	Jumlah lanjut usia terlantar yang direhab sosial didalam panti pemerintah	80,62	DINSOS

No	SPM Bidang Sosial	RKPD 2021				
		Strategi	Program/ Kegiatan PD	Kinerja Program		
				Indikator (out come)	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
5	perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	Peningkatan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana	Program Penanganan Bencana	Prosentase korban bencana yg mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial		DINSOS
			Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Jumlah korban Bencana Alam yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial		DINSOS

4.2.8 Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Pengentasan Kemiskinan

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Pengentasan Kemiskinan merupakan upaya untuk mengubah suatu keadaan atau kondisi masyarakat yang standar hidupnya sangat rendah pada kondisi yang lebih baik dalam arti ekonomi, sosial budaya dan politik. Upaya pengentasan kemiskinan mencakup banyak bidang, seperti *trend* kemiskinan, bantuan sosial, jaminan sosial, program berbasis masyarakat, serta penciptaan lapangan kerja yang lebih banyak dan lebih baik. Untuk itu pengentasan kemiskinan menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang perlu diselaraskan dengan arah kebijakan, program dan kegiatan, seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel IV.16
Strategi, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas RKPD 2021 Dalam Rangka Mendukung Arah Kebijakan Pengentasan Kemiskinan RKP 2021

NO	Arah Kebijakan Pengentasan Kemiskinan		Arah Kebijakan		Program / Kegiatan PD	Kinerja Program		Perangkat Daerah
						Indikator (*out come*)	Target	
1	*2*		*3*		*4*	*5*	*6*	*7*
			Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin	1	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PMKS/PSKS yang terberdayakan		DINAS SOSIAL

NO	Arah Kebijakan Pengentasan Kemiskinan		Arah Kebijakan		Program / Kegiatan PD	Kinerja Program		Perangkat Daerah
						Indikator (*out come*)	Target	
1	*2*		*3*		*4*	*5*	*6*	*7*
					Kegiatan Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penyelenggara Dunia Usaha / lembaga / masyarakat yang diterbitkan Izin dan berpartisipasi menyelenggarakan Pengumpulan Uang/Barang dan Undian Gratis berhadiah sesuai dengan aturan yang berlaku.		DINAS SOSIAL
					Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah penyelenggara; Dunia Usaha / lembaga / masyarakat yang berpartisipasi menyelenggarakan Pengumpulan Uang/Barang dan Undian Gratis berhadiah sesuai dengan aturan yang berlaku.	2 Penyelenggara ; lembaga/ dunia usaha/masyarakat	DINAS SOSIAL
					Kegiatan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Jumlah PSKS yang diberdayakan		DINAS SOSIAL
					Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Kelembagaan masyarakat yang di tingkatkan kemampuannya	203 orang	DINAS SOSIAL
				3	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Prosentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang di ditangani		DINAS SOSIAL

NO	Arah Kebijakan Pengentasan Kemiskinan		Arah Kebijakan		Program / Kegiatan PD	Kinerja Program		Perangkat Daerah
						Indikator (*out come*)	Target	
1	*2*		*3*		*4*	*5*	*6*	*7*
					Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi yang dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal		DINAS SOSIAL
						Jumlah Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal yang difasilitasi	7 Orang	DINAS SOSIAL
				4	Program Rehabilitasi Sosial	Prosentase PMKS yang di Rehabilitasi sosial di Dalam Panti Non Pemerintah		DINAS SOSIAL
					Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Jumlah penyandang disabilitasi yang direhab sosial di Dalam Panti Non Pemerintah		DINAS SOSIAL
					Penyediaan Alat Bantu	Jumlah disabilitas dalam panti non pemerintah yang mendapatkan alat bantu	5 Orang	DINAS SOSIAL
					Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	1. Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial dalam panti non pemerintah	10 Orang	DINAS SOSIAL

NO	Arah Kebijakan Pengentasan Kemiskinan		Arah Kebijakan		Program / Kegiatan PD	Kinerja Program		Perangkat Daerah
						Indikator (*out come*)	Target	
1	*2*		*3*		*4*	*5*	*6*	*7*
						2. Jumlah tenaga profesional pekerja sosial yang memberi bimbingan sosial disabilitas di dalam panti non pemerintah yang mendapatkan peningkatan kapasitas	5 Orang	DINAS SOSIAL
						3. Jumlah panti disabilitas non pemerintah yang mendapatkan bimbingan pelayanan kepada penyandang disabilitas	1 Panti	DINAS SOSIAL
					Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah disabilitas terlantar yang mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga dalam panti non pemerintah	10 Orang	DINAS SOSIAL
					Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	Jumlah lanjut usia terlantar yang direhab sosial di Dalam Panti Non Pemerintah		DINAS SOSIAL
					Penyediaan Alat Bantu	Jumlah lanjut usia dalam panti yang mendapatkan alat bantu	5 Orang	DINAS SOSIAL
					Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti Sosial	Jumlah lanjut usia yang mendapatkan perbekalan kesehatan di dalam panti	10 Orang	DINAS SOSIAL
					Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	1. Jumlah lanjut usia yang mendapatkan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	20 Orang	DINAS SOSIAL

NO	Arah Kebijakan Pengentasan Kemiskinan		Arah Kebijakan		Program / Kegiatan PD	Kinerja Program		Perangkat Daerah
						Indikator (*out come*)	Target	
1	*2*		*3*		*4*	*5*	*6*	*7*
						2. Jumlah tenaga profesional pekerja sosial yang memberi bimbingan sosial lanjut usia di dalam panti yang mendapatkan peningkatan kapasitas	5 Orang	DINAS SOSIAL
						3. Jumlah panti lanjut usia yang mendapatkan bimbingan pelayanan kepada lanjut usia	1 Panti	DINAS SOSIAL
					Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	Jumlah anak terlantar yang direhab sosial di Dalam Panti Non Pemerintah		DINAS SOSIAL
					Pengasuhan	Jumlah Pengasuh anak di dalam panti non pemerintah yang mendapat bimtek pembekalan standar nasional pengasuhan anak	27 orang	DINAS SOSIAL
					Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah tenaga pelayanan sosial didalam panti non pemerintah yang mendapat bimbingan keterampilan psikososial	25 orang	DINAS SOSIAL
					Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah anak di dalam panti non pemerintah mendapatkan fasilitasi pembuatan akta kelahiran, NIK dan KIA	10 orang	DINAS SOSIAL
					Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah klien anak di dalam panti non pemerintah yang mendapat akses layanan pendidikan	20 orang	DINAS SOSIAL
						Jumlah klien anak di dalam panti non pemerintah yang mendapat akses layanan kesehatan dasar	20 orang	DINAS SOSIAL

NO	Arah Kebijakan Pengentasan Kemiskinan		Arah Kebijakan		Program / Kegiatan PD	Kinerja Program		Perangkat Daerah
						Indikator (*out come*)	Target	
1	*2*		*3*		*4*	*5*	*6*	*7*
					Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah klien anak di dalam panti non pemerintah yang mendapat pelayanan penelusuran keluarga	10 orang	DINAS SOSIAL
					Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah anak di dalam panti non pemerintah yang mendapat pelayanan reunifikasi keluarga	10 orang	DINAS SOSIAL
					Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Penganti	Jumlah anak yang mendapat akses layanan pengasuhan kepada keluarga pengganti	10 orang	DINAS SOSIAL
					Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti	Jumlah Gelandangan dan pengemis yang direhab sosial		DINAS SOSIAL
					Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumlah gelandangan dan pengemis yang diberikan bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	8 orang	DINAS SOSIAL
					Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	Jumlah gelandangan dan pengemis yang difasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	8 orang	DINAS SOSIAL
					Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapat akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	8 orang	DINAS SOSIAL
					Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah gelandangan dan pengemis yang dipulangkan ke daerah asal	8 orang	DINAS SOSIAL

NO	Arah Kebijakan Pengentasan Kemiskinan		Arah Kebijakan		Program / Kegiatan PD	Kinerja Program		Perangkat Daerah
						Indikator (*out come*)	Target	
1	*2*		*3*		*4*	*5*	*6*	*7*
					Kegiatan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang di rehab sosial		DINAS SOSIAL
					Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumlah PMKS lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang diberikan bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	10 orang	DINAS SOSIAL
					Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	Jumlah PMKS lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang difasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	10 orang	DINAS SOSIAL
					Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah PMKS lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapat akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	10 orang	DINAS SOSIAL
					Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah PMKS lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang dipulangkan ke daerah asal	10 orang	DINAS SOSIAL
				5	Program Rehabilitasi Sosial	Prosentase PMKS yang di Rehabilitasi sosial di PSBL		DINAS SOSIAL
					Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Jumlah penyandang disabilitasi yang direhab sosial dalam Panti Pemerintah		DINAS SOSIAL
					Penyediaan Permakanan	Jumlah kebutuhan permakanan yang disediakan dalam Panti Pemerintah	20 orang	DINAS SOSIAL

NO	Arah Kebijakan Pengentasan Kemiskinan		Arah Kebijakan		Program / Kegiatan PD	Kinerja Program		Perangkat Daerah
						Indikator (*out come*)	Target	
1	*2*		*3*		*4*	*5*	*6*	*7*
					Penyediaan Sandang	Jumlah kebutuhan sandang yang disediakan dalam Panti Pemerintah	20 orang	DINAS SOSIAL
					Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan dalam Panti Pemerintah	20 orang	DINAS SOSIAL
					Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah sarana prasarana penunjang Kegiatan Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial yang disediakan dalam Panti Pemerintah	20 orang	DINAS SOSIAL
					Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Jasa Tenaga Teknis Lainnya yang disediakan dalam panti pemerintah	5 orang	DINAS SOSIAL
						Jumlah Jasa Tenaga Perawat yang disediakan panti pemerintah	4 orang	DINAS SOSIAL
						Jumlah Penerima Manfaat yang mendapat akses ke layanan kesehatan dasar dalam panti pemerintah	20 orang	DINAS SOSIAL
					Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	Jumlah lanjut usia terlantar yang direhab sosial didalam panti pemerintah		DINAS SOSIAL
					Penyediaan Sandang	Jumlah sandang yang disediakan dalam panti pemerintah	10 klien	DINAS SOSIAL
					Penyediaan Alat Bantu	jumlah alat bantu yang disediakan dalam panti pemerintah	10 klien	DINAS SOSIAL
					Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti Sosial	Jumlah klien yang mendapatkan layanan Perbekalan Kesehatan yang disediakan dalam panti pemerintah	10 klien	DINAS SOSIAL
					Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah klien yang mendapatkan layanan Bimbingan fisik, mental Spiritual dan Sosial dalam panti pemerintah	10 klien	DINAS SOSIAL

NO	Arah Kebijakan Pengentasan Kemiskinan		Arah Kebijakan		Program / Kegiatan PD	Kinerja Program		Perangkat Daerah
						Indikator (*out come*)	Target	
1	*2*		*3*		*4*	*5*	*6*	*7*
					Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah klien yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga dalam panti pemerintah	10 klien	DINAS SOSIAL
					Pemulasaraan	Jumlah klien yang meninggal dunia dalam panti pemerintah	10 klien	DINAS SOSIAL
				10	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Prosentase PMKSyang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial		DINAS SOSIAL
					Kegiatan Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Jumlah anak yang mendapatkan perlindungan sosial		DINAS SOSIAL
					Pengangkatan Anak antar WNI	Jumlah anak yang di angkat (adopsi) dan memperoleh perlindungan sosial	5 oarang	DINAS SOSIAL
					Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Jumlah calon orang tua angkat (COTA) yang mendapatkan perizinan	5 oarang	DINAS SOSIAL
					Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah data Fakir Miskin yang dikelola dengan baik		DINAS SOSIAL
					Pendataan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang didata/di-update	7 kab/kota	DINAS SOSIAL
					Pengelolaan Data Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang dikelola	7 kab/kota	DINAS SOSIAL
						Jumlah Fakir Miskin yang ditangani	170 KK	DINAS SOSIAL
						Jumlah Keluarga Miskin yang diberikan Pendampingan Jaminan Sosial	43749 KK	DINAS SOSIAL
			Peningkatan pendapatan masyarakat desa	1	Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tingkat Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa		DINAS PEMDES

NO	Arah Kebijakan Pengentasan Kemiskinan		Arah Kebijakan		Program / Kegiatan PD	Kinerja Program		Perangkat Daerah
						Indikator (*out come*)	Target	
1	*2*		*3*		*4*	*5*	*6*	*7*
					Kegiatan Penataan Desa	Jumlah Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa yang tersusun	309 Desa	DINAS PEMDES
					Sub Kegiatan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan	Jumlah desa dan kelurahan yang dievaluasi	6 Desa/ 6 Kelurahan	DINAS PEMDES
					Sub Kegiatan Pembinaan Profil Desa dan Kelurahan	Jumlah desa dan kelurahan yang dibina profilnya	7 Kabupaten	DINAS PEMDES
					Sub Kegiatan Penataan Kewenangan Desa	Jumlahdesa yang dibina untuk menyusun perdes tentang kewenangan desa	6 Kabupaten	DINAS PEMDES
					Sub Kegiatan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa	Jumlahdesa yang dibina bantuan keuangannya	309 Desa	DINAS PEMDES
					Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Jumlah aparatur desa yang meningkat kapasitasnya	309 Aparatur Desa	DINAS PEMDES
					Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Revolusi Mental	Jumlah aparatur desa yang meningkat kapasitasnya dalam pemahaman nilai-nilai pelayanan kepada masyarakat	65 orang	DINAS PEMDES
					Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Bendahara Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Malalui Siskeudes	Jumlah aparatur desa yang meningkat kapasitasnya dalam pengoperasian aplikasi Siskeudes	46 Aparatur Desa	DINAS PEMDES
					Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dalam Pengelolaan Aset Desa Berbasis SIPADES	Jumlah aparatur desa yang meningkat kapasitasnya dalam pengoperasian aplikasi SIPADES	40 Orang	DINAS PEMDES
					Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	Jumlah ketua dan anggota BPD yang meningkat kapasitasnya	40 BPD	DINAS PEMDES

NO	Arah Kebijakan Pengentasan Kemiskinan		Arah Kebijakan		Program / Kegiatan PD	Kinerja Program		Perangkat Daerah
						Indikator (*out come*)	Target	
1	*2*		*3*		*4*	*5*	*6*	*7*
				2	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif. Persentase lembaga adat desa yang aktif		DINAS PEMDES
					Kegiatan Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga kemasyarakatan, lembaga adat yang terbina	309 desa	DINAS PEMDES
					Sub Kegiatan Kelembagaan masyarakat desa dan masyarakat hukum adat	jumlah LKD yang di Evaluasi	7 Kab/kota	DINAS PEMDES
					Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	-1. jumlah Pokjanal Posyandu yang dibina, '- 2. Jumlah PKK Provinsi, Kab, Kecamatan dan Desa yang dibina, '- 3. Jumlah Lembaga Adat yang dibina, 4. Jumlah Lembaga CPPD yang dibentuk, 5. Jumlah sekolah yang PMTASnya dikelola oleh PKK Desa	1, 35 Pokjanal Posyandu 2,7 Kab./Kota, 3, 10 Lembaga Adat 4, 10 lembaga CPPD 5, 1.232 Siswa	DINAS PEMDES
					Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyakat	1. Jumlah BUMDESA yang aktif, 2. Jumlah Produk unggulan Desa Yang dikelola, 3. jumlah berkah mart yang difasilitasi dan didampingi pengembangannya,	20 BUMDESA, 20 Prudes, 230 Berkah Mart	DINAS PEMDES

NO	Arah Kebijakan Pengentasan Kemiskinan		Arah Kebijakan		Program / Kegiatan PD	Kinerja Program		Perangkat Daerah
						Indikator (*out come*)	Target	
1	*2*		*3*		*4*	*5*	*6*	*7*
					Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyakat	- 1. Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat yang terampil, - 2. Jumlah Kelompok Masyarakat Desa yang aktif dalam Kewirausahaan	40 Orang,,40 orang	DINAS PEMDES
					Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1. Jumlah desa yang memiliki Pusat Informasi Teknologi (Posyantek atau Wartek) dan yang dapat mengelola SDA dan TTG, - 2. Jumlah kelompok Masyarakat Pengelola Sumber Daya Alam (SDA) yg terbentuk, - 3. Jumlah Desa yang Berinovasi .	7 Kab/Kota	DINAS PEMDES
						Meningkatnya Teknologi Tepat Guna Sektor Pertanian	7 Kab/Kota	DINAS PEMDES
						Meningkatnya Teknologi Tepat Guna Sektor Perikanan	7 Kab/Kota	DINAS PEMDES
				3	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase kerjasama Desa yang dilaksanakan		DINAS PEMDES
					Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama antardesa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	1. Jumlah Rakor yang terlaksana.	1 Kali Rakor,	DINAS PEMDES
						2. Identifikasi Pru kades Lintas Kabupaten,	1 Laporan	
					Sub Kegiatan Fasilitasi Kerjasama antardesa lintas Kabupaten/Kota	1. Jumlah Rakor yang terlaksana.	1 Kali Rakor,	DINAS PEMDES
						2. Identifikasi Pru kades Lintas Kabupaten,	1 Laporan	
					Sub Kegiatan Fasilitasi Kerjasama desa dengan pihak ketiga	1. Jumlah Aparatur Desa dan Pengurus Bumdesma yang meningkat kapasitasnya di Kawasan Perdesaan ,	60 Orang,	DINAS PEMDES
						2. Jumlah Produk Unggulan yang dikembangkan	3 Produk	

4.2.9 Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah Dengan Penciptaan Lapangan Pekerjaan

Semakin meningkatnya angka penganguran menjadi salah satu masalah sosial yang membutuhkan penyelesaian. Sedikinya lapangan pekerjaan yang ada saat ini menjadi alasan utama bertambahnya angka pengangguran. Kondisi ini dapat dikurangi jika kita berusaha menciptakan lapangan pekerjaan. Untuk itu penciptaan lapangan pekerjaan menjadi prioritas pembangunan daerah sehingga perlu penyelarasan arah kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021, seperti yang ditampilkan dalam tabel berikut ini:

Tabel IV.17
Strategi, Program Prioritas, Dan Kegiatan Prioritas RKPD 2021 Dalam Rangka Mendukung Arah Kebijakan Penciptaan Lapangan Pekerjaan RKP 2021

NO	Arah Kebijakan Penciptaan Lapangan Pekerjaan		Arah Kebijakan		Program / Kegiatan PD	Kinerja Program		Perangkat Daerah
						Indikator (out come)	Target	
1	*2*		*3*		*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Penciptaan Lapangan Kerja	1	Peningkatan kesempatan kerja		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan pelatihan berdasarkan klaster kompetensi		DISNAKER
						Persentase Pelatihan Kerjasama dengan sektor swasta dan instansi pemerintah lainnya untuk penyedia instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja		DISNAKER
						Meningkatnya Kompetensi dan Produktivitas		DISNAKER
					Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kerja Sertifikasi Kompetensi dan Mengikuti Pemagangan	484 Orang	DISNAKER
					Kegiatan 2: Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah UMKM dan perusahaan menengah yang produktif	15 UMKM	DISNAKER
					Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenga Kerja Menurunnya Angka Pencari Kerja		DISNAKER

NO	Arah Kebijakan Penciptaan Lapangan Pekerjaan		Arah Kebijakan		Program / Kegiatan PD	Kinerja Program		Perangkat Daerah
						Indikator (out come)	Target	
1	*2*		*3*		*4*	*5*	*6*	*7*
					Kegiatan Pelayanan Antar kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Pelayanan Antar Kerja	100 Orang	DISNAKER
					Kegiatan 2: Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Data Pencari Kerja	1 Kegiatan	DISNAKER
					Kegiatan 2: Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah RPTK Perpanjangan Yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA dan Lokasi Kerja dalam 1(satu) Daerah Provinsi		DISNAKER
		2	Peningkatkan peran KUKM dalam meningkatkan kesempatan kerja	1	Program Pelayanan Izin Simpan Pinjam	Persentase rekomendasi izin Usaha Simpan Pinjam yang dikeluarkan	20%	DINAS KUKM
					Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah rekomendasi /Verifikasi ijin Usaha yang dikeluarkan	5 Koperasi	DINAS KUKM
					Sub Kegiatan 1: Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah rekomendasi Izin Usaha Simpan Pinjam	5 Koperasi	DINAS KUKM
						Jumlah Peserta Diseminasi Pembentukan Koperasi	210 Orang	DINAS KUKM

NO	Arah Kebijakan Penciptaan Lapangan Pekerjaan		Arah Kebijakan		Program / Kegiatan PD	Kinerja Program		Perangkat Daerah
						Indikator (out come)	Target	
1	*2*		*3*		*4*	*5*	*6*	*7*
						Jumlah Akta Notaris bagi Koperasi	14 Koperasi	DINAS KUKM
				2	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	70%	DINAS KUKM
					Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang diawasi	50 Koperasi	DINAS KUKM
						Jumlah Koperasi yang melaksanakan RAT	20 Koperasi	DINAS KUKM
						Jumlah Koperasi yang membayar Pajak	10 Koperasi	DINAS KUKM
						Jumlah Koperasi yang mampu menyusun Laporan Keuangan	50 Koperasi	DINAS KUKM
						Jumlah Koperasi yang menerapkan Sistem Pengendalian Intern (SPI)	10 Koperasi	DINAS KUKM
						Jumlah Koperasi yang dibubarkan	5 Koperasi	DINAS KUKM
					Sub Kegiatan 1: Meningkatkan Akuntabilitas, kepercayaan , Kepatuhan Kesinambungan, dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan Masyarakat	Jumlah Peserta yang mengikuti Bimtek Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT)	40 Orang	DINAS KUKM
						Jumlah Peserta Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Koperasi	60 Orang	DINAS KUKM
						Jumlah Peserta yang mengikuti Bimtek Sistem Pengendalian Intern (SPI)	50 Orang	DINAS KUKM

NO	Arah Kebijakan Penciptaan Lapangan Pekerjaan		Arah Kebijakan		Program / Kegiatan PD	Kinerja Program		Perangkat Daerah
						Indikator (out come)	Target	
1	*2*		*3*		*4*	*5*	*6*	*7*
					Sub Kegiatan 2: Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-undangan dan terbentuknya Koperasi yang kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh serta akuntabel	Jumlah Koperasi yang mematuhi Peraturan Perundang-undangan	50 Koperasi	DINAS KUKM
						Jumlah Koperasi yang akan dibubarkan	5 Koperasi	DINAS KUKM
				3	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Koperasi berkualitas	50%	DINAS KUKM
					Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Sehat	5 Koperasi	DINAS KUKM
					Sub Kegiatan 1: Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	Jumlah Koperasi yang dinilai kesehatannya	10 Koperasi	DINAS KUKM
					Sub Kegiatan 2 ; Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi	Jumlah Koperasi berprestasi	5 Koperasi	DINAS KUKM
				4	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase SDM Koperasi yang terlatih	30%	DINAS KUKM

NO	Arah Kebijakan Penciptaan Lapangan Pekerjaan		Arah Kebijakan		Program / Kegiatan PD	Kinerja Program		Perangkat Daerah
						Indikator (out come)	Target	
1	*2*		*3*		*4*	*5*	*6*	*7*
					Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah pengurus dan anggota Koperasi yang tersertifikasi pelatihan	1000 peserta	DINAS KUKM
						Jumlah Pendamping/ Penyuluh/ Konsultan PLUT yang diberdayakan	70 Orang	DINAS KUKM
						Jumlah Kajian Mutu Pelatihan yang tersedia	1 Dokumen	DINAS KUKM
					Sub Kegiatan 1: Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah Anggota Koperasi yang dilatih	1000 peserta	DINAS KUKM
						Jumlah pembina/ Pendamping/ Penyuluh/ Konsultan PLUT yang mengikuti Bimbingan teknis peningkatan kapasitas	80 Orang	DINAS KUKM
						Jumlah Kajian Mutu Pelatihan yang disusun	1 Dokumen	DINAS KUKM
						Operasional Balatkop	1 Tahun	DINAS KUKM
				5	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi yang diberdayakan	20%	DINAS KUKM
					Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang usahanya meningkat	10 Koperasi	DINAS KUKM
						Jumlah Koperasi yang mendapatkan akses Pembiayaan	10 Koperasi	DINAS KUKM
						Jumlah Koperasi yang bermitra	10 Koperasi	DINAS KUKM

NO	Arah Kebijakan Penciptaan Lapangan Pekerjaan		Arah Kebijakan		Program / Kegiatan PD	Kinerja Program		Perangkat Daerah
						Indikator (out come)	Target	
1	*2*		*3*		*4*	*5*	*6*	*7*
					Sub Kegiatan 1: Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Peserta yang mengikuti Fasilitasi Akses Pembiayaan	100 Orang	DINAS KUKM
					Sub Kegiatan 2: Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Koperasi yang mendapatkan Akses Pasar (Pameran/Promosi Koperasi)	5 Koperasi	DINAS KUKM
						Jumlah Peserta yang mendapatkan fasilitasi Kemitraan	10 koperasi	DINAS KUKM
						Jumlah Peserta yang mendapatkan Fasilitasi Pengembangan Usaha	120 Orang	DINAS KUKM
				6	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UKM)	Persentase UMKM yang diberdayakan	1%	DINAS KUKM
					Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Usaha Kecil yang melakukan penguatan kelembagaan	1100 Orang	DINAS KUKM
						Jumlah UMKM yang bermitra	6 Orang	DINAS KUKM

NO	Arah Kebijakan Penciptaan Lapangan Pekerjaan		Arah Kebijakan		Program / Kegiatan PD	Kinerja Program		Perangkat Daerah
						Indikator (out come)	Target	
1	*2*		*3*		*4*	*5*	*6*	*7*
					Sub Kegiatan 1: Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Wirausaha Pemula yang mengikuti Magang	100 Orang	DINAS KUKM
						Jumlah Peserta yang mengikuti Gerakan Kewirausahaan	1000 Orang	DINAS KUKM
						Jumlah Database UMKM	1 Dokumen	DINAS KUKM
						Jumlah Peserta Forum Koordinasi UMKM	100 Orang	DINAS KUKM
						Jumlah UMKM yang mendapatkan fasilitasi Kemitraan	30 Orang	DINAS KUKM
				7	Program Pengembangan UKM	Persentase UMKM yang dikembangkan	1%	DINAS KUKM
					Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Jumlah UMKM yang meningkat volume usahanya	100 Orang	DINAS KUKM
						Jumlah Produk yang tersertifikasi dan terstandarisasi	500 Orang	DINAS KUKM
						Jumlah UMKM yang mendapatkan akses pembiayaan	1000 Orang	DINAS KUKM
					Sub Kegiatan 1: Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi	Jumlah UMKM yang mengikuti Diseminasi Standarisasi dan Sertifikasi Produk	1000 Orang	DINAS KUKM
						Jumlah UMKM yang mendapatkan Bimtek Peningkatan Kapasitas Usaha	420 Orang	DINAS KUKM

NO	Arah Kebijakan Penciptaan Lapangan Pekerjaan		Arah Kebijakan		Program / Kegiatan PD	Kinerja Program		Perangkat Daerah
						Indikator (out come)	Target	
1	*2*		*3*		*4*	*5*	*6*	*7*
						Jumlah UMKM yang mengikuti Promosi dan Pemasaran Produk	100 Orang	DINAS KUKM
						Jumlah UMKM yang mendapatkan Fasilitasi Pembiayaan Usaha	2000 Orang	DINAS KUKM
		3	Peningkatan Promosi, koordinasi, kerjasama, dan investasi dalam peningkatan lapangan pekerjaan	1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Kebijakan Daerah Yang Mendukung Investasi	1 Kebijakan	DINAS PMPTSP
					Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif di bidang Penanaman Modal yan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah UKM Yang Bermitra Dengan Investor	2 UKM	DINAS PMPTSP
					Sub Kegiatan 2: Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah UKM Yang Memenuhi Syarat Kemitraan	8 UKM	DINAS PMPTSP
					Kegiatan 2: Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah Peta Potensi Investasi Provinsi	1 Peta	DINAS PMPTSP
					Sub Kegiatan 1: Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Evaluasi RUPM	1 Dokumen	DINAS PMPTSP
						Jumlah Peta Potensi Investasi	1 Dokumen	DINAS PMPTSP
				2	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Realisasi Investasi	1,9 TRILYUN	DINAS PMPTSP

NO	Arah Kebijakan Penciptaan Lapangan Pekerjaan		Arah Kebijakan		Program / Kegiatan PD	Kinerja Program		Perangkat Daerah
						Indikator (out come)	Target	
1	*2*		*3*		*4*	*5*	*6*	*7*
					Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan Promosi Yang Terlaksana	4 Pameran Promosi	DINAS PMPTSP
					Sub Kegiatan 1: Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Laporan Strategi Promosi Penanaman Modal	1 Laporan	DINAS PMPTSP
					Sub Kegiatan 2: Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Promosi Penanaman Modal Yang Terlaksana	4 Pameran Promosi	DINAS PMPTSP
				3	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sesuai SOP	100,00%	DINAS PMPTSP
					Kegiatan Penanaman Modal Yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Rapat Forum PTSP se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 Laporan	DINAS PMPTSP
					Sub Kegiatan 1: Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Forum	50 Peserta (35 Laki-Laki, 15 Perempuan)	DINAS PMPTSP
						Terlaksananya Rapat Koordinasi Forum PTSP se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 Rakor Forum	DINAS PMPTSP

NO	Arah Kebijakan Penciptaan Lapangan Pekerjaan		Arah Kebijakan		Program / Kegiatan PD	Kinerja Program		Perangkat Daerah
						Indikator (out come)	Target	
1	*2*		*3*		*4*	*5*	*6*	*7*
					Kegiatan Penanaman Modal Yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang Dikeluarkan Sesuai dengan SOP	1200 Izin	DINAS PMPTSP
					Sub Kegiatan 2: Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Yang Terintegrasi OSS	1200 Izin	DINAS PMPTSP
					Sub Kegiatan 3: Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	2 Laporan SKM	DINAS PMPTSP
						Jumlah Pengaduan dan Layanan Konsultasi	12 Pengaduan	DINAS PMPTSP
				4	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Meningkatnya persentase capaian realisasi investasi	15 %	DINAS PMPTSP
					Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase realisasi pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	50%	DINAS PMPTSP
					Sub Kegiatan 1: Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang akan dilakukan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal	60 Perusahaan	DINAS PMPTSP

NO	Arah Kebijakan Penciptaan Lapangan Pekerjaan		Arah Kebijakan		Program / Kegiatan PD	Kinerja Program		Perangkat Daerah
						Indikator (out come)	Target	
1	*2*		*3*		*4*	*5*	*6*	*7*
					Sub Kegiatan 2: Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan dan Aparatur yang mengikuti Koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan PM	110 Perusahaan dan 40 aparatur	DINAS PMPTSP
					Sub Kegiatan 3: Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah kasus/permasalahan yang akan dilakukan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal	6 kasus / permasalahan	DINAS PMPTSP
				5	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP	100,00%	DINAS PMPTSP
					Kegiatan Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang Terintegrasi	1 dokumen	DINAS PMPTSP
					Sub Kegiatan 1: Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang Terintegrasi	1 dokumen	DINAS PMPTSP
		4	Peningkatan Kompetensi, hubungan industrial dan keselamatan tenaga kerja		Program Hubungan Industrial	Persentase perusahaan yang telah memiliki sarana hubungan industrial	35%	DISNAKER

NO	Arah Kebijakan Penciptaan Lapangan Pekerjaan		Arah Kebijakan		Program / Kegiatan PD	Kinerja Program		Perangkat Daerah
						Indikator (out come)	Target	
1	*2*		*3*		*4*	*5*	*6*	*7*
					Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Persentase Perusahaan yang membuat Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama		DISNAKER
					Sub Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial	Jumlah peraturan terkait hubungan industrial yang disyahkan	2 peraturan	DISNAKER
					Sub Kegiatan 2: Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang Terkait dengan Hubungan Industrial	Jumlah perjanjian kerja sama yang lakukan terkait hubungan industrial	5 perjanjian	DISNAKER
					Sub Kegiatan Penetapan Upah Minimum Provinsi	Penetapan upah minuman provinsi	1 kali	DISNAKER

4.2.9. Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan suatu strategi yang digunakan untuk mencapaitujuan pembangunan nasional terkait keadilan dan kesetaraan gender. PUG dilaksanakandengan mengintegrasikan perspektif gender menjadi bagian integral dari proses perencanaan,penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan programpembangunan. Secara umum kesetaraan gender di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung semakin membaik ataukesenjangan pencapaian pembangunan manusia berbasis gender semakin mengecil. Hal iniditunjukkan oleh meningkatnya Indeks Pembangunan Gender (IPG) dari 88,37 pada tahun 2015 menjadi 88,90 pada tahun 2016 dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) meningkat dari 56,12pada tahun 2014 menjadi 56,29 pada tahun 2015. Untuk itu Pembangunan Pengarusutamaan Gender (PUG) menjadi prioritas pembangunan daerah sehingga perlu penyelarasan arah kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2020. Seperti yang ditampilkan dalam tabel berikut ini :

Tabel IV.17

Strategi, Program Prioritas, Dan Kegiatan Prioritas RKPD 2021 Dalam Rangka Mendukung Arah Kebijakan Pembangunan Pengarusutamaan Gender RKP 2021

NO	Arah Kebijakan Penciptaan Lapangan Pekerjaan	Arah Kebijakan		Program /Kegiatan/Sub Kegiatan		Kinerja Program		Perangkat Daerah
						Indikator (outcome)	Target	
1	*2*	*3*		*4*		*5*	*6*	*7*
1.	Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan	1	Peningkatan keadilan dan kesetaraan gender	1	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Persentase Perangkat Daerah yang Responsif Gender**	**84,37 persen**	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
					Kegiatan : Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Jumlah kabupaten kota yang dibina	7 Kab/Kota	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
					Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta Advokasi dan KIE PUG dan PKHP	240 Orang	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta penguatan kapasitas pelaksanaanPUG dan PPRG	75 Orang	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
					Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Jumlah OPD peserta pengembangan materi danPelaksanaan KIE Kesetaraan dan Keadilan Genderbagi institusi Media Massa	32 OPD	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
					Kegiatan : Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	Jumlah kabupaten kota yang dibina	7 Kab/Kota	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB

NO	Arah Kebijakan Penciptaan Lapangan Pekerjaan	Arah Kebijakan		Program /Kegiatan/Sub Kegiatan		Kinerja Program		Perangkat Daerah
						Indikator (outcome)	Target	
1	*2*	*3*		*4*		*5*	*6*	*7*
					Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	1. Jumlah peserta Pelatihan dan pembentukanfasilitator pendidikan politik untuk perempuan; 2. Jumlah peserta Pembinaan Industri Rumahan	75; 90 Orang; Orang	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
					Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah kabupaten kota yang dibina	7 Kab/Kota	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
					Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta	45 Orang	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
				2	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**Persentase IR yang di bina**	**0,71 persen**	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
					Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang di bina	7 Kab/Kota	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
					Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta pembinaan organisasi perempuan	40 Orang	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB

NO	Arah Kebijakan Penciptaan Lapangan Pekerjaan	Arah Kebijakan		Program /Kegiatan/Sub Kegiatan		Kinerja Program		Perangkat Daerah
						Indikator (outcome)	Target	
1	*2*	*3*		*4*		*5*	*6*	*7*
					Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Penguatan dan Pengembangan LembagaPenyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluargadalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	40 Orang	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
					Kegiatan : Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang di bina	7 Kab/Kota	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
					Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah peserta sekolah perempuan	200 Orang	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
					Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta kegiatan Peningkatan Nilai-nilai Kejuangan Perempuan Indonesia	500 Orang	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
2	Meningkatkan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk TPPO	1	Menekan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak	**1**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**Persentase Capaian OPD yang Menyediakan Data Pilah Gender dan Anak**	**84,37 persen**	**DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB**
					Kegiatan : Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data	Jumlah profil dan data gender dan anak yang tersedia	0 Dokumen	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB

NO	Arah Kebijakan Penciptaan Lapangan Pekerjaan	Arah Kebijakan	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (outcome)	Target	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
			di Tingkat Daerah Provinsi			
			Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah dokumen profil dan data gender dan anak yang tersedia	1 Profil	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
			2 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	**Persentase SDM Perlindungan Anak**	**0,20 persen**	**DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB**
			Kegiatan : Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan	1 Laporan	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta TOT bagi aktivis PATBM kab/kota	100 Orang	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
			Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus	1	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
			Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan	Jumlah dokumen peningkatan SDM PenyediaLayanan Anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan provinsi	1 Dokumen	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB

NO	Arah Kebijakan Penciptaan Lapangan Pekerjaan	Arah Kebijakan	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (outcome)	Target	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
			Provinsi			
			Kegiatan : Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Layanan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus	1	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
			Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Kelembagaan KPAD yang difasilitasi	1 Lembaga	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
			Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan provi	1 Dokumen	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
			3 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	**Persentase Peningkatan SDM Perlindungan Perempuan**	**3,9 persen**	**DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB**
			Kegiatan : Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan upaya pencegahan perlindungan perempuan dan para pihak yang terlibat dalam upaya perlindungan perempuan	1 Laporan	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah kebijkan;	1 Kebijakan	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB

NO	Arah Kebijakan Penciptaan Lapangan Pekerjaan	Arah Kebijakan		Program /Kegiatan/Sub Kegiatan		Kinerja Program		Perangkat Daerah
						Indikator (outcome)	Target	
1	*2*	*3*		*4*		*5*	*6*	*7*
						Jumlah peserta sosialisasi pencegahan pelecehans seksual bagi perempuan	100 orang	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
					Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Persentase Layanan Perempuan Korban Kekerasan yang ditangani	100%	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
					Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen layanan pengaduan masyarakatyang ditangani	1 Dokumen	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
					Kegiatan : Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Perempuan Korban Kekerasan yang ditangani	100%	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
					Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen layanan pengaduuan masyarakatyang ditangani	1 Dokumen	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
		2	Peningkatan pelayanan terhadap pemberian hak-hak anak	**1**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Persentase Peningkatan SDM dalam Pemenuhan Partisipasi Anak**	**0,183 persen**	**DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB**
					Kegiatan : Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan	Jumlah Kab/Kota yang di bina	7 Kab/Kota	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB

NO	Arah Kebijakan Penciptaan Lapangan Pekerjaan	Arah Kebijakan	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (outcome)	Target	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
			Dunia Usaha Kewenangan Provinsi			
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi dan media publikasi	160 Orang	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
			Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang di bina	7 Kab/Kota	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
			Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta FA tingkat provinsi dan tingkat nasional dan peserta HAN	977 Orang	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB

4.2.10. Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah Dengan Perubahan Iklim dan Penurunan Emisi GRK

Perubahan iklim merupakan fenomena global yang dipicu oleh kegiatan manusia terutama yang berkaitan dengan penggunaan bahan bakar fosil dan pembakaran hutan, yang berakibat menumpuknya gas-gas seperti koarbon dioksida (CO2), Metana (CH4) dan nitro Oksida (N2O) pada atmosfir. Hal ini menyebabkan suhu permukaan bumi semakin panas atau lebih dikenal dengan istilah Gas Rumah Kaca. Untuk menurunkan efek dari gas rumah kaca, pemerintah provinsi focus pada penurunan gas rumah kaca dengan arah kebijakan Peningkatan penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Program dan kegiatan yang diarahkan untuk menurunkan efek gas rumah kaca dapat dilihat pada table di bawah ini.

Tabel IV.17

Strategi, Program Prioritas, Dan Kegiatan Prioritas RKPD 2021 Dalam Rangka Mendukung Arah Kebijakan Perubahan Iklim dan Penurunana Emisi GRK

NO	Arah Kebijakan Perubahan Iklim dan Penurunan GRK		Arah Kebijakan		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja Program		Perangkat Daerah
						Indikator (Outcome)	Target	
1	*2*		*3*		*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Mengintegrasikan upaya penurunan emisi GRK ke dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah	1	Peningkatan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan		**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**Persentase Ketaatan Usaha/Kegiatan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**	**60 Persentase**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
					Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang dibina dan dibina	100 Usaha/Kegiatan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
					Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang dibina dan dibina	100 Usaha/Kegiatan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Rekomendasi dari Izin Lingkungan yang diterbitkan	85 Persentase	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
					Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Permohonan pertimbangan teknis Izin Lingkungan yang terfasilitasi	25 Permohonan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
					Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan	Jumlah Permohonan pertimbangan teknis Izin Lingkungan yang terfasilitasi	25 Permohonan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	Arah Kebijakan Perubahan Iklim dan Penurunan GRK		Arah Kebijakan		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja Program		Perangkat Daerah
						Indikator (Outcome)	Target	
1	*2*		*3*		*4*	*5*	*6*	*7*
					dan/atau Izin PPLH			
					PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Aduan Masyarakat yang diverifikasi	100 Persentase	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
					Kegiatan : Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Persentase Aduan Masyarakati yang diverifikasi	100%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
					Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	Persentase Aduan Masyarakati yang diverifikasi	100%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
					PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	**Persentase Parameter Kualitas Lingkungan yang terakreditasi**	**80 Persentase**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
					Kegiatan : Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	Jumlah Usulan Parameter Kualitas Lingkungan untuk diakreditasi	38 Parameter Usulan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
					Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah Analis laboratorium	23 Orang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
					Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah Dokumen Prasyarat Akreditasi Laboratorium	4 Dokumen	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
					Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah Sampel Parameter Kualktas Lingkungan yang terlayani	1200 Sampel	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
					Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah Titik Sampling Parameter Kualitas Lingkungan yang terlayani	40 Titik Sampling	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
					PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Limbah	8,23 Persentase	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	Arah Kebijakan Perubahan Iklim dan Penurunan GRK		Arah Kebijakan		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja Program		Perangkat Daerah
						Indikator (Outcome)	Target	
1	*2*		*3*		*4*	*5*	*6*	*7*
					KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			
					Kegiatan : Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	Jumlah Rekomendasi Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca	4 Rekomendasi	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
					Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Inventarisasi Emisi Gas Rumah kaca yang tersusun	1 Dokumen	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
					PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	**Persentase Penerima Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup Tingkat Provinsi**	**80 Persentase**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
					Kegiatan : Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Jenis Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi yang diberikan	3 Jenis Penghargaan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
					Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Bank Sampah yang mendapatkan Penilaian Tingkat Provinsi	3 Bank Sampah	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
					Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Kota yang Mendapat Penilaian adipura	7 Kota	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
					Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam	Jumlah Sekolah yang mendapatkan Penilaian Adiwiyata Tingkat Provinsi	14 Sekolah	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	Arah Kebijakan Perubahan Iklim dan Penurunan GRK		Arah Kebijakan		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja Program		Perangkat Daerah
						Indikator (Outcome)	Target	
1	*2*		*3*		*4*	*5*	*6*	*7*
					Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup			
2	Menurunkan emisi GRK dan intensitas emisi melalui bidang-bidang utama dalam Pembangunan Rendah Karbon	1	Peningkatan pengendalian terhadap kualitas air sungai	1	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	Persentase Titik Pantau Kualitas Air Laut yang memenuhi baku mutu dengan kriteria baik	50 Persentase	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
					Kegiatan : Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	Jumlah Titik Pantau Kualitas Air Laut	25 Titik Pantau	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
					Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Titik Pantau Kualitas Air Laut	25 Titik Pantau	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						Persentase Titik Pantau Kualitas Air Sungai yang memenuhi baku mutu dengan kriteria baik	**50 Persentase**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
					Kegiatan : Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Informasi Kinerja pengelolaan Lingkungan Hidup yang tersusun	1 Dokumen	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
					Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Dokumen Informasi Kinerja pengelolaan Lingkungan Hidup yang tersusun	1 Dokumen	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	Arah Kebijakan Perubahan Iklim dan Penurunan GRK		Arah Kebijakan		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja Program		Perangkat Daerah
						Indikator (Outcome)	Target	
1	*2*		*3*		*4*	*5*	*6*	*7*
					Kegiatan : Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	Jumlah Titik Pantau Kualitas Air Sungai	81 Titik Pantau	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
					Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Identifikasi sumber sumber pencemar	0 Dokumen	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
					Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Perhitungan Beban Pencemaran air sungai	0 Dokumen	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
					Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Titik Pantau Kualitas Air Sungai	81 Titik Pantau	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				2	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	Persentase tersusunnya Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	75 Persentase	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
					Kegiatan : Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Jumlah Jenis Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis	2 Jenis Dokumen	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
					Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang yang Tersusun	1 Dokumen	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
					Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Rekomendasi Hasil Validasi KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota	7 Rekomendasi	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	Arah Kebijakan Perubahan Iklim dan Penurunan GRK		Arah Kebijakan		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja Program		Perangkat Daerah
						Indikator (Outcome)	Target	
1	*2*		*3*		*4*	*5*	*6*	*7*
					Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJMD yang tersusun	0 Dokumen	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
					Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Rekomendasi Hasil Validasi KLHS RPJMD Kab/Kota	0 Rekomendasi	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
					Kegiatan : Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Jumlah Dokumen Penunjang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	0 Dokumen	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
					Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi	Jumlah Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	0 Dokumen	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
					Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi	Jumlah Dokumen Penetapan RPPLH Provinsi	0 Dokumen	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				3	**PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)**	Persentase DAS yang dikelola	1,64 Persentase	DINAS KEHUTANAN
					Kegiatan : Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Luas DAS yang dikelola	27000 Ha	DINAS KEHUTANAN
					Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Luas DAS yang dioptimalisasi daya dukung wilayah DAS	27000 Ha	DINAS KEHUTANAN
					Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah kelompok pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan DAS	5 Kelompok	DINAS KEHUTANAN
					Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	Jumlah pemegang IPPKH yang menerapkan teknik KTA	6 pemegang IPPKH	DINAS KEHUTANAN
					Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	Jumlah kelembagaan pengelolaan DAS provinsi	1 Forum	DINAS KEHUTANAN
					Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan DAS	1 Kali	DINAS KEHUTANAN

NO	Arah Kebijakan Perubahan Iklim dan Penurunan GRK		Arah Kebijakan		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja Program		Perangkat Daerah
						Indikator (Outcome)	Target	
1	*2*		*3*		*4*	*5*	*6*	*7*
					Pengelolaan DAS			
					Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS	Jumlah dokumen RP DAS yang direview	4 Dokumen	DINAS KEHUTANAN
		2	Peningkatan pengendalian terhadap kualitas udara		**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase Titik Pantau Kualitas Udara yang memenuhi baku mutu dengan kriteria baik**	**80 Persentase**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
					Kegiatan : Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	Jumlah Titik Pantau Kualitas Udara	28 Titik Pantau	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
					Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Titik Pantau Kualitas Udara	28 Titik Pantau	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		3	Peningkatan pemanfaatan kawasan hutan		**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**Persentase Kelompok Tani Hutan yang terbina**	**62,5 Persentase**	DINAS KEHUTANAN
					Kegiatan : Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Terbentuknya/meningkatnya kelas Kelompok Tani Hutan	24 KTH	DINAS KEHUTANAN
					Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Terbentuknya/meningkatnya kelas Kelompok Tani Hutan	0 KTH	DINAS KEHUTANAN

NO	Arah Kebijakan Perubahan Iklim dan Penurunan GRK		Arah Kebijakan		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja Program		Perangkat Daerah
						Indikator (Outcome)	Target	
1	*2*		*3*		*4*	*5*	*6*	*7*
						Persentase Luas Perhutanan Sosial	80 Persentase	DINAS KEHUTANAN
					Kegiatan : Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	luas areal perhutanan sosial	41219 Ha	DINAS KEHUTANAN
					Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas perhutanan sosial	41219 Ha	DINAS KEHUTANAN
						Persentase Penyuluh Kehutanan yang meningkat kapasitasnya	100 Persentase	DINAS KEHUTANAN
					Kegiatan : Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Terlaksananya penyuluhan kehutanan dan pemberdayaan masyarakat bidang Kehutanan di Provinsi Kep. Bangka Belitung	32 Penyuluh	DINAS KEHUTANAN
					Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	32 penyuluh	DINAS KEHUTANAN
		4	Peningkatan pengendalian dan pengawasan hutan		**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**	Persentase konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	20 Persentase	DINAS KEHUTANAN
					Kegiatan : Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Jumlah kawasan Esensial	2	DINAS KEHUTANAN

NO	Arah Kebijakan Perubahan Iklim dan Penurunan GRK		Arah Kebijakan		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja Program		Perangkat Daerah
						Indikator (Outcome)	Target	
1	*2*		*3*		*4*	*5*	*6*	*7*
					Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah kawasan bernilai ekosistem penting	2 kawasan	DINAS KEHUTANAN
					Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	h penguatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat	2 Kelompok	DINAS KEHUTANAN
					Kegiatan : Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah tumbuhan dan satwa liar tidak dilindungi yang di konservasi	5 jenis	DINAS KEHUTANAN
					Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Jumlah tumbuhan dan satwa liar tidak dilindungi yang di konservasi	5 jenis	DINAS KEHUTANAN

4.3. Strategi dan Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan Pembangunan Lintas Bidang melalui Pendekatan Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial.

Dengan adanya perubahan paradigma penganggaran dari prinsip money follow fuction menjadi money follow priority programme dan upaya percepatan pencapaian tujuan pembangunan melalui Pembangunan Lintas Bidang 2017-2022, maka pada tahun 2021 dilakukan pendekatan pendekatan holistik – tematik, Integratif dan spasial dalam proses perencanaan.

Dalam hal mengimplementasikan pendekatan holistik – tematik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadikan 6 prioritas Lintas Bidang provinsi menjadi fokus. Sementara itu, pada pendekatan integratif, telah dilakukan proses identifikasi sasaran dan indikator sasaran pembangunan yang mendukung setiap prioritas tersebut yang diikuti

dengan proses identifikasi dan inventarisasi program dan Perangkat Daerah penanggungjawab program sebagai fokus pendekatan.
Selanjutnya pada pendekatan spasial, telah dilakukan identifikasi terhadap lokasi dari pelaksanaan aktivitas/kegiatan dari program yang dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah guna mencapai sasaran pembangunan sebagaimana dimaksud.
Adapun poses dan tahapan implementasi pendekatan holistik – tematik, Integratif dan spasial yang dilakukan didalam perumusan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020, adalah sebagaimana yang diuraikan sebagai berikut:

1. Pengembangan Pembangunan Agropolitan

Sasaran yang ingin diwujudkan pada prioritas ini adalah Meningkatnya produksi sub sector pertanian, peternakan dan jasa perkebunan. Selanjutnya sasaran, target sasaran, strategi dan arah kebijakan disajikan pada tabel IV.33 berikut:

Tabel IV.33
Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Lintas Bidang Pengembangan Pembangunan Agropolitan

Sasaran		Indikator Sasaran		Target	Strategi dan Arah Kebijakan	
1		2		3	4	
1	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Pertanian	1	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian	4,9	1	Peningkatan sarana prasarana produksi pertanian, perkebunan, dan perternakan
					2	Peningkatan Produkasi dan Pengelolaan Hasil Produksi Pertanian, Perkebunaan dan Peternakan
					3	Peningkatan Kualitas Sumber daya Manusia Pertanian, Perkebunan dan Peternakan
					4	Pengembangan Kawasan Agropolitan dan Teknopark Lada Air Gegas

Upaya pencapaian target kinerja sasaran tahun 2020 untuk prioritas ini dilakukan melalui koordinasi beberapa Perangkat Daerah secara menyeluruh dari berbagai sektor pembangunan guna meningkatkan manfaat dan daya ungkit pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat dengan rencana program pembangunan dan target indikator kinerja program baik yang prioritas maupun program pendukung sebagaimana disajikan pada tabel IV.34 berikut:

Tabel IV.34
Program Pembangunan Perangkat Daerah Yang Mendukung Prioritas Pengembangan Pembangunan Agropolitan

NO	RPJMD 2017-2022		RKPD 2021				
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2021	Lokasi	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6		7

NO	RPJMD 2017-2022		RKPD 2021				
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2021	Lokasi	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6		7
1	PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN AGROPOLITAN	Peningkatan sarana prasarana produksi pertanian, perkebunan, dan perternakan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	persentase luas pertanian	26 persen	7 Kabupaten/ Kota	DINAS PERTANIAN
			Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Dokumen pengawasan dan peredaran pupuk, pestisida, alsintan dan sarana pendukung peningkatan produksi	1 DOKUMEN	7 Kabupaten/ Kota	DINAS PERTANIAN
			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung	Jumlah Laporan/Database/Dokumen Pengawasan Pupuk, Pestisida dan Alat Mesin Pertanian	1 LAPORAN	7 Kabupaten/ Kota	DINAS PERTANIAN
			Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah Luasan Benih/Bibit Tanaman Pangan dan Hortikultura yang tersedia (Ha)	120 HA	7 Kabupaten/ Kota	DINAS PERTANIAN
				Jumlah Luasan Bibit Perkebunan yang tersedia (Lada, Sawit, Karet, Kopi) (Ha)	185 HA	Kab. Bangka Selatan, Bangka Tengah dan Bangka	DINAS PERTANIAN
				Jumlah sertifikasi bibit Pertanian yang dikeluarkan	3.075.000 bibit	7 Kabupaten/ Kota	DINAS PERTANIAN
				Persentase benih/bibit pertanian berlabel dan bersertifikat	5%	7 Kabupaten/ Kota	DINAS PERTANIAN
			Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Jumlah Kultivar/ varietas yang dinilai	4 VARIETAS	7 Kabupaten/ Kota	DINAS PERTANIAN

NO	RPJMD 2017-2022		RKPD 2021				
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2021	Lokasi	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6		7
				Persentase Ketersediaan benih/bibit pertanian tingkat lapang (daerah)	50%	7 Kabupaten/ Kota	DINAS PERTANIAN
			Kegiatan Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Kualitas Mutu pakan ternak (%)	100%	Kab. Bangka Tengah	DINAS PERTANIAN
			Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Ketersediaan pakan ternak (Sapi dan Ayam) (paket)	1 PAKET	Kab. Bangka Selatan, Bangka Tengah dan Bangka	DINAS PERTANIAN
				Persentase Pertambahan Angka Kelahiran Ternak	3.5632	7 Kabupaten/ Kota	DINAS PERTANIAN
			Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah bantuan bibit ternak	80 EKOR	7 Kabupaten/ Kota	DINAS PERTANIAN
			Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Pengadaan bibit ternak	80 EKOR	7 Kabupaten/ Kota	DINAS PERTANIAN
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Penyediaan Air Baku	11.00%	7 Kabupaten/ Kota	DINAS PUPR

NO	RPJMD 2017-2022		RKPD 2021				
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2021	Lokasi	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6		7
			Kegiatan : Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Air Baku	1,6 %	Ka. Bangka Tengah dan Kab. Bangka Selatan	DINAS PUPR
			Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Bangunan penampung air yang terbangun	350 m	7 Kabupaten/ Kota	DINAS PUPR
						7 Kabupaten/ Kota	
		Peningkatan Produksi dan Pengelolaan Hasil Produksi Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase penurun-an kasus penyakit hewan menular	0.75	7 Kabupaten/ Kota	DINAS PERTANIAN
			Kegiatan : Penjaminan Kesehat-an Hewan, Penutup-an dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terkendalinya keamanan 7 Kab/Kota di wilayah Babel terhadap penyakit-penyakit zoonosis (Rabies dan AI)	7 Kab/Kota	7 Kabupaten/ Kota	DINAS PERTANIAN
			Pengendalian Resiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah pelaksanaan Pengendalian Resiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	2 zoonosis	7 Kabupaten/ Kota	DINAS PERTANIAN
			Pembebasan Penya-kit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pembebasan Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota	7 Kab/Kota	7 Kabupaten/ Kota	DINAS PERTANIAN

NO	RPJMD 2017-2022		RKPD 2021				
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2021	Lokasi	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6		7
			Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Ter-dampak Wabah Penyakit Hewan Menular yang ditanggulangi	1 Lokasi	7 Kabupaten/ Kota	DINAS PERTANIAN
			Kegiatan: Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Tersertifikasinya 1 unit usaha produk peternakan di Bangka Belitung (ber NKV/ Nomor Kontrol Veteriner) serta terujinya 210 sample produk peternakan pada unit-unit usaha/kios-kios produk peternakan	1 NKV(Nomor Kontrol Veteriner) dan 210 sample	7 Kabupaten/ Kota	DINAS PERTANIAN
			Pemenuhan Per-syaratan Teknis Sertifikasi Zona/ Kompartemen Bebas Penyakit	Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/ Kompartemen Bebas Penyakit yang dipenuhi	1 unit usaha	7 Kabupaten/ Kota	DINAS PERTANIAN
			Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan	Tingkat (persentase) Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan	4 unit usaha	7 Kabupaten/ Kota	DINAS PERTANIAN
			Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan kesehatan Masyarakat Veteriner	210 sampel	7 Kabupaten/ Kota	DINAS PERTANIAN
				Unit Lab Keswan dan kesmavet yang terpelihara	1	Provinsi	DINAS PERTANIAN

NO	RPJMD 2017-2022		RKPD 2021				
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2021	Lokasi	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6		7
			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase lembaga adat desa yang aktif	0 persen	7 Kabupaten/ Kota	DINAS PEMDES
			Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah adat yang terbina	0 LAD	7 Kabupaten/ Kota	DINAS PEMDES
			Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Meningkatnya Teknologi Tepat Guna Sektor pertanian	7 Kab./Kota	7 Kabupaten/ Kota	DINAS PEMDES
		Peningkatan Kualitas Sumber daya Manusia Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase peningkatan kelas kelompok tani	80%	7 Kabupaten/ Kota	DINAS PERTANIAN
			Kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah petani dan penyuluh yang dilatih	1000 ORANG	7 Kabupaten/ Kota	DINAS PERTANIAN
			Pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan petani	JUmlah peningkatan kapabilitas penyuluhan	204 ORANG	7 Kabupaten/ Kota	DINAS PERTANIAN

NO	RPJMD 2017-2022		RKPD 2021				
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2021	Lokasi	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6		7
			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan pelatihan berdasarkan klaster kompetensi	4 Persentase	7 Kabupaten/ Kota	DINAS TENAGA KERJA
			Kegiatan : Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Pedidikan dan pelatihan bagi pencari kerja berdasarkan klaster Kompetensi	20 paket	7 Kabupaten/ Kota	DINAS TENAGA KERJA
			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Pedidikan dan pelatihan bagi pencari kerja berdasarkan klaster Kompetensi	20 paket	7 Kabupaten/ Kota	DINAS TENAGA KERJA
		Peningkatan ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi bahan pangan	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Meningkatnya konsumsi pangan yang beragam pada kelompok Pangan a) Umbi-umbian, b) Kacang-kacangan c) nuah dan sayur	a) 27,9 b) 7,9 c) 21,6 Persentase	7 Kabupaten/ Kota	DINAS PANGAN
			Kegiatan : Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Coefisien varian harga pangan (a. pokok/beras, b. hortikultura/cabe merah, c.hewani/ayam)	5 Persentase	7 Kabupaten/ Kota	DINAS PANGAN
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah dokumen stok dan pasokan	3 Dokumen	7 Kabupaten/ Kota	DINAS PANGAN

NO	RPJMD 2017-2022		RKPD 2021				
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2021	Lokasi	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6		7
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok Dan Pangan Lainnya	Jumlah Gapoktan yang difasilitasi	5 Gapoktan	Kab. Bangka Barat, Bangka dan Ka. Belitung	DINAS PANGAN
			Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah lembaga distribusi pangan masyarakat	42 kelompok	7 Kabupaten/ Kota	DINAS PANGAN
			Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	7 Kabupaten/ Kota	DINAS PANGAN

Upaya pencapaian target kinerja sasaran tahun 2021 untuk prioritas ini dilakukan juga melalui intervensi lintas sektor melibatkan para steakholder secara menyeluruh dari berbagai sektor pembangunan guna meningkatkan manfaat dan daya ungkit pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat sebagaimana disajikan pada tabel IV.35 berikut:

Tabel IV.35
Stakeholder Yang Mendukung Pengembangan Pembangunan Agropolitan

Sasaran		Indikator Sasaran		Terget		Strategi yang perlu Dukungan dari Stakeholder	Stakeholder
1		2		3		4	5
1	Meningkatnya produksi sub sektor pertanian, peternakan, dan pekerbunaan	1	Persentase Pertumbuhan Produksi sub sektor pertanian, peternakan, dan jasa perkebunaan	4,9	1	Meningkatan pengendalian dan pengawasan terhadap wilyah pertanian berkelanjutan	Lembaga Swadaya Pemberdayaan Ekonomi Rakyat
					2	Meningkatkan produksi dan pengelolaan hasil pertanian, perkebunaan, peternakan dan Kehutanan	Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), KADIN, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI)
					3	Pengembangan kawasan berbasis pertanian, perkebunaan dan perternakan	Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Ikatan Konsultan Indonesia, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi

2. Pembangunan Bahari

Sasaran yang ingin diwujudkan pada prioritas ini adalah Meningkatnya produksi Sub Sektor perikanan. Selanjutnya sasaran, target sasaran, strategi dan arah kebijakan disajikan pada tabel IV.36 berikut:

Tabel IV.36
Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Lintas Bidang
Pembangunan bahari

Sasaran		Indikator Sasaran		Target	Strategi dan Arah Kebijakan	
1		2		3	4	
1	Meningkatnya produksi Sub Sektor perikanan	1	Persentase Pertumbuhan Produksi sub sektor perikanan	4.1	1	Meningkatan pengendalian dan pengawasan terhadap wilyah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil
					a	Pengelolaan dan pemanfaatan tata ruang laut serta penegakan perundang-undangan kelautan dan perikanan.
					2	Meningkatkan produksi dan pengelolaan hasil perikanan tangkap serta perikanan budidaya
					a	Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing sektor Kelautan dan Perikanaan
					b	Peningkatan Produksi, Kualitas dan produktifitas tenaga kerja sektor Kelautan dan perikanaan
					c	Pembinaan hubungan industri dan kesehatan kerja sektor kelautan dan perikanaan
					d	Peningkatan standarisasi Produk dan jasa KUKM dalam meningkatakan daya saing sektor kelautan dan perikanaan
					e	Pengembangan produk Kelautan dan perikanaan, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di sektor kelautan dan perikanaan
					3	Mengembangakan kawasan sentra Kelautan dan Perikanaan
					a	Pengembangan Kawasan Strategis Minapolitan Lepar Pongok
					b	Pengembangan Kawasan Strategis etalase Perikanan Selat Nasik
					c	Pengembangan Kawasan Strategis Industri Perikanan Tanjung Binga
					d	Pengembangan Kawasan Pedesaan Minapolitan Manggar

Upaya pencapaian target kinerja sasaran tahun 2021 untuk prioritas ini dilakukan melalui koordinasi beberapa Perangkat Daerah secara menyeluruh dari berbagai sektor

pembangunan guna meningkatkan manfaat dan daya ungkit pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat dengan rencana program pembangunan dan target indikator kinerja program baik yang prioritas maupun program pendukung sebagaimana disajikan pada tabel IV.37 berikut:

Tabel IV.37
Program Pembangunan Perangkat Daerah Yang Mendukung Prioritas Pembangunan Bahari

NO	RPJMD 2017-2022		RKPD 2021				
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact /outcome)	Target 2021	Lokasi	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PEMBANGUNAN BAHARI	Peningkatan Kualitas Sumber daya Manusia Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persentase Pelaku Usaha yang Taat Aturan (%)	75%	7 Kabupaten/ Kota	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah pelaku usaha kelautan dan perikan-an sampai dengan 12 mil yang diawasi (pelaku usaha)	16	7 Kabupaten/ Kota	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan pelatihan berdasarkan klaster kompetensi	4%	7 Kabupaten/ Kota	DINAS TENAGA KERJA
			Kegiatan : Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Pedidikan dan pelatihan bagi pencari kerja berdasarkan klaster Kompetensi	20 paket	7 Kabupaten/ Kota	DINAS TENAGA KERJA
			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Pedidikan dan pelatihan bagi pencari kerja berdasarkan klaster Kompetensi	20 paket	7 Kabupaten/ Kota	DINAS TENAGA KERJA
			Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi yang diberdayakan	20 persen	7 Kabupaten/ Kota	DINAS UMKM

NO	RPJMD 2017-2022		RKPD 2021				
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact /outcome)	Target 2021	Lokasi	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8
			Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah tenaga penyuluh yang diberdayakan	35 orang	7 Kabupaten/ Kota	DINAS UMKM
		Peningkatan produksi dan Pengelolaan Hasil Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap (%)	1,85%	7 Kabupaten/ Kota	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Pengelolaan Penang-kapan Ikan di Wilayah laut sampai dengan 12 mil	Jumlah Data Statistik Perikanan Tangkap	1 Dok	7 Kabupaten/ Kota	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
				Jumlah sarana dan prasarana usaha perikanan tangkap	5 unit	Kab. Bangka dan Kab. Belitung Timur	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Perikanan Tangkap	1 dok	7 Kabupaten/ Kota	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap (Alat bantu Penangkapan, Rumpon/Rumah Ikan/Fish Apartemen, Mesin, dll)	Jumlah Mesin Tempel	20 unit/th	7 Kabupaten/ Kota	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
				Jumlah ALat Bantu Penangkapan/Navigasi	30 unit/th	7 Kabupaten/ Kota	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	RPJMD 2017-2022		RKPD 2021				
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact /outcome)	Target 2021	Lokasi	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8
				Rumpon/Rumah Ikan/Fish Apartemen	3 paket/tahun	7 Kabupaten/ Kota	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
				Jumlah Tambat Labuh yang dibangun/ direhab	1 unit	7 Kabupaten/ Kota	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi benih ikan yang unggul	11 Juta Ekor	7 Kabupaten/ Kota	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Kegiatan : Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah rekomendasi Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut sampai dengan 12 mil	5 Rekomendasi	7 Kabupaten/ Kota	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi izin usaha perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang dikeluarkan	5 Rekomendasi	7 Kabupaten/ Kota	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Kegiatan : Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya laut	13120 Ton	7 Kabupaten/ Kota	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas daerah Kabupaten/Kota	7 Buku	7 Kabupaten/ Kota	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	RPJMD 2017-2022		RKPD 2021				
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact /outcome)	Target 2021	Lokasi	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8
			Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Benih yang diserahkan ke masyarakat	13 Paket	7 Kabupaten/ Kota	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peralatan Budidaya	13 Paket	7 Kabupaten/ Kota	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana budidaya yang diserahkan kepada masyarakat	2 Paket	7 Kabupaten/ Kota	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Tersedianya benih ikan laut yang diserahkan ke masyarakat	4 Paket	7 Kabupaten/ Kota	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	RPJMD 2017-2022		RKPD 2021				
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact /outcome)	Target 2021	Lokasi	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8
			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase UPI yang dibina memenuhi standar mutu dan keamanan pangan	90%	7 Kabupaten/ Kota	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Kegiatan : Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Persentase UPI yang dibina memenuhi standar mutu dan keamanan pangan	0.9	7 Kabupaten/ Kota	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Pelaku Usaha yang dibina dalam penerapan persyaratan/standar usaha pengolahan hasil perikanan skala menengah dan besar	15 Pelaku Usaha	7 Kabupaten/ Kota	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan untuk mendapatkan SKP bagi usaha pengolahan hasil perikanan skala menengah besar atau lintas daerah kab/kota dalam 1 daerah provinsi	5 Pelaku Usaha	Provinsi	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Peningkatan Promosi, koordinasi, kerjasama, dan investasi dalam peningkatan produksi dan nilai Tambah hasil produksi perikanan tangkap dan	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sesuai SOP	100 persentase	7 Kabupaten/ Kota	DINAS PENANAMAN MODAL

NO	RPJMD 2017-2022		RKPD 2021				
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact /outcome)	Target 2021	Lokasi	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8
		perikanan budidaya					
			Kegiatan : Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang Diterbitkan Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Menjadi Kewenangan Provinsi, Jumlah Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Jumlah Laporan Pengaduan Yang di Tindak Lanjuti	1200, 2, 2 Izin laporan	7 Kabupaten/ Kota	DINAS PENANAMAN MODAL
			Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Yang Diterbitkan	1200 izin	7 Kabupaten/ Kota	DINAS PENANAMAN MODAL
			Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Jumlah Pengaduan dan Layanan Konsultasi	2, 2 laporan SKM dan Pengaduan	7 Kabupaten/ Kota	DINAS PENANAMAN MODAL
			Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Aplikasi Pendukung Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi Secara Elektronik	1 aplikasi	7 Kabupaten/ Kota	DINAS PENANAMAN MODAL

NO	RPJMD 2017-2022		RKPD 2021				
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact /outcome)	Target 2021	Lokasi	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8
			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Kerjasama Mitra Kerja Dengan Investor	80 persentase	7 Kabupaten/ Kota	DINAS PENANAMAN MODAL
			Kegiatan : Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah Peta Potensi Investasi Provinsi	1 Peta	Provinsi	DINAS PENANAMAN MODAL
			Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Jumlah Peta Potensi Investasi	1 Dokumen	7 Kabupaten/ Kota	DINAS PENANAMAN MODAL
			Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Evaluasi RUPM	1 Dokumen	Provinsi	DINAS PENANAMAN MODAL
			Kegiatan : Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah UKM Yang Bermitra Dengan Investor	1 UKM	7 Kabupaten/ Kota	DINAS PENANAMAN MODAL
			Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah UKM Yang Memenuhi Syarat Kemitraan	8 UKM	7 Kabupaten/ Kota	DINAS PENANAMAN MODAL

Upaya pencapaian target kinerja sasaran tahun 2021 untuk prioritas ini dilakukan juga melalui intervensi lintas sektor melibatkan para steakholder secara menyeluruh dari berbagai sektor pembangunan guna meningkatkan manfaat dan daya ungkit pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat sebagaimana disajikan pada tabel IV.38 berikut:

Tabel IV.38
Stakeholder Yang Mendukung Pembangunan Lintas Bidang
Pembangunan bahari

Sasaran		Indikator Sasaran		Target		Strategi Yang Perlu Dukungan Stakeholder	Stakeholder
1		2		3		4	5
1	Meningkatnya produksi Sub Sektor perikanan	1	Persentase Pertumbuhan Produksi sub sektor perikanan	4.1	1	Meningkatan pengendalian dan pengawasan terhadap wilyah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil	Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Lembaga Swadaya Masyarakat
					2	Meningkatkan produksi dan pengelolaan hasil perikanan tangkap serta perikanan budidaya	Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), KADIN, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI)
					3	Mengembangakan kawasan sentra Kelautan dan Perikanaan	Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Ikatan Konsultan Indonesia, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi

3. Pengembangan Pariwisata

Sasaran yang ingin diwujudkan pada prioritas ini adalah Meningkatnya Kunjungan Wisatawan. Selanjutnya sasaran, target sasaran, strategi dan arah kebijakan disajikan pada tabel IV.39 berikut:

Tabel IV. 39
Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Prioritas Pengembangan Pariwisata

Sasaran		Indikator Sasaran		Tahun 2021		Strategi
1		2		3		4
1	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	1	Pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara)	389.009	1	Meningkatkan sinergisitas pembangunan lintas sektor dalam mengembangkan pembangunaan pariwisata
					a	Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, ekonomi kreatif, peran serta masyarakat dan kelembagaan pariwisata
					b	Peningkatan insfrastruktur, sarana dan prasarana pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata.
					c	Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing kepariwisataan daerah
					d	Peningkatan kualitas, partisipasi dan prestasi pemuda di berbagai bidang pembangunan, dan peningkatan pengelolaan ke olah raga serta mengembangkan peran serta kebudayaan dalam mendukung pembangunaan kepariwisataan
					e	Pembinaan hubungan industri dan kesehatan kerja disektor

Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun 2021	Strategi
1	2	3	4
			pariwisata
		f	Peningkatan standarisasi Produk dan jasa KUKM dalam meningkatakan daya saing kepariwisataan
		g	Pengembangan pariwisata daerah, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antar sektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di bidang pariwisata.
		1	Mengembangkan kawasan pendukung pembangunan pariwisata
		a	Pengembangan Kawasan pelabuhan penyeberangan Tanjung Kalian
		b	Pengembangan Kawasan strategis Pelabuhan ASDP Manggar – Ketapang
		c	Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Tanjung gunung dan kawasan lintas timur Pulau Bangka
		d	Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan ekonomi khusus (KEK) Tanjung kelayang
		e	Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan Kota Tua Mentok
		f	Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan gunung Permisan Simpang Rimba
		g	Pengembangan Kawasan peruntukan Pariwisata Museum Nasional Maritim Belitung
		h	Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Gunung Menumbing
		3	Pengembangan pulau-pulau kecil dan daerah perbatasan
		a	Pengembangan kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan pulau sumatera
		b	Pengembangan kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil

Upaya pencapaian target kinerja sasaran tahun 2021 untuk prioritas ini dilakukan melalui koordinasi beberapa Perangkat Daerah secara menyeluruh dari berbagai sektor

pembangunan guna meningkatkan manfaat dan daya ungkit pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat dengan rencana program pembangunan dan target indikator kinerja program baik yang prioritas maupun program pendukung sebagaimana disajikan pada tabel IV.40 berikut:

Tabel. IV. 40
Program Pembangunan Perangkat Daerah Yang Mendukung Pembangunan Lintas Bidang Pengembangan Pariwisata

NO	RPJMD 2017-2022		RKPD 2021				
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Target 2021	Lokasi	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PEMBANGUNAN PARIWISATA	Peningkatan peran serta masyarakat dan kelembagaan pariwisata serta Pengembangan ekonomi kreatif	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Pangsa Pasar Pariwisata Derah	45%	Provinsi	DINAS PARIWISATA
			Kegiatan : Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah media promosi pariwisata provinsi dalam dan luar negeri	17 media	Provinsi	DINAS PARIWISATA
			Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah fasilitasi promosi pariwisata bagi industri pariwisata provinsi	8 event	Provinsi	DINAS PARIWISATA
			Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah media promosi pariwisata	1 media	Provinsi	DINAS PARIWISATA
			Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah bahan promosi pariwisata	3 bahan promosi	7 Kabupaten / Kota	DINAS PARIWISATA
			Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi	Jumlah data dan sebaran informasi pariwisata	2 website	7 Kabupaten / Kota	DINAS PARIWISATA

NO	RPJMD 2017-2022		RKPD 2021				
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Target 2021	Lokasi	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8
			Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri				
			Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah kajian pariwisata	1 dokumen	Provinsi	DINAS PARIWISATA
			Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Pusat informasi Destinasi Pariwisata Bangka Belitung	2 TIC	Kab. Belitung dan Belitung Timur	DINAS PARIWISATA
		Peningkatan insfrastruktur, sarana dan prasarana destinasi pariwisata	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase sarana dan prasarana Destinasi Pariwisata yang Memenuhi Standar di Kawasan Peruntukan Pariwisata Tanjung Gunung	46%	Kab. Bangka Tengah	DINAS PARIWISATA
			Kegiatan : Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Daya Tarik wisata provinsi yang di kelola	2 kawasan	Ka. Belitung dan Kab Bangka Tengah	DINAS PARIWISATA
			Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah dokumen pengembangan daya tarik wisata unggulan	1 dokumen	7 Kabupaten / Kota	DINAS PARIWISATA
			Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah DTW yang dikembangkan	4 DTW	Kab. Belitung, Belitung Timu, Kab. Bangka dan Kab. Bangka Barat	DINAS PARIWISATA

NO	RPJMD 2017-2022		RKPD 2021				
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Target 2021	Lokasi	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8
			Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah dokumen rencana dan rancangan daya tarik wisata unggulan	1 dokumen	7 Kabupaten / Kota	DINAS PARIWISATA
			Kegiatan : Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi yang dikelola	1 destinasi	Kab, Belitung	DINAS PARIWISATA
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	40 orang	7 Kabupaten / Kota	DINAS PARIWISATA
			Kegiatan : Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Kawasan Strategis Provinsi yang dikelola	1 kawasan	Kab, Belitung	DINAS PARIWISATA
			Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah dokumen rencana kawasan strategis pariwisata provinsi yang ditetapkan	1 dokumen	7 Kabupaten / Kota	DINAS PARIWISATA
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap	91,50 %	7 Kabupaten / Kota	DINAS PUPR
			Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap	91,50 %	7 Kabupaten / Kota	DINAS PUPR
			Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang dibangun	10 km	7 Kabupaten / Kota	DINAS PUPR
			Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang jalan yang terpelihara	14.88 Km	7 Kabupaten / Kota	DINAS PUPR
			Rehabilitasi Jalan	Panjang jalan yang direhabilitasi	5,47 Km	7 Kabupaten / Kota	DINAS PUPR

NO	RPJMD 2017-2022		RKPD 2021				
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Target 2021	Lokasi	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8
			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Rute Pelayaran yang terfasilitasi	67 persen	8 Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN
			Kegiatan : Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Badan Usaha Pelabuhan yang memiliki izin usaha di pelabuhan pengumpan regional	60 perusahaan	Kab. Bangka Tengah dan Kab. Belitung	DINAS PERHUBUNGAN
			Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah perusahaan angkutan laut pelayaran rakyat kewenangan provinsi dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang difasilitasi	60 perusahaan	7 Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN
				Prosentase Pemenuhan Infrastruktur Kepelabuhanan	67 persen	7 Kabupaten / Kota	DINAS PERHUBUNGAN
			Kegiatan : Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah pembangunan dan penerbitan izin pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Provinsi	6 unit	Kota Pangkalpinang	DINAS PERHUBUNGAN
			Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1	Jumlah Dermaga SDP yang dibangun	6 unit	Kab Bangka, Kab. Belitung, Kab. Bangka Tengah, Kab. Bangka	DINAS PERHUBUNGAN

NO	RPJMD 2017-2022		RKPD 2021				
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Target 2021	Lokasi	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8
			(satu) Daerah Provinsi			selatan	
			Kegiatan : Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	2 unit sbnp-pelabuhan	Kab. Bangka dan Kab. Belitung	DINAS PERHUBUNGAN
			Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah sbnp-pelabuhan-fasilitas pelabuhan yang dibangun	0 unit sbnp-pelabuhan	Kab. Bangka dan Kab. Belitung	DINAS PERHUBUNGAN
			Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah fasilitas pengoperasian pelabuhan pengumpang regional yang dipelihara	2 unit sbnp-pelabuhan	Kab. Bangka dan Kab. Belitung	DINAS PERHUBUNGAN
		Peningkatan Kualitas Sumber daya Manusia pariwisata	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM pariwisata dan ekonomi kreatif terlatih dan terserfikasi	29,14 Persen	7 Kabupaten / Kota	DINAS PARIWISATA
			Kegiatan : Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah SDM pariwisata dan ekonomi kreatif terlatih dan tersertifikasi	140 orang	7 Kabupaten / Kota	DINAS PARIWISATA
			Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM ekonomi kreatif yang terlatih	50 orang	7 Kabupaten / Kota	DINAS PARIWISATA
			Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan	Jumlah SDM bidang Homestay yang terlatih	40 orang	7 Kabupaten / Kota	DINAS PARIWISATA

NO	RPJMD 2017-2022		RKPD 2021				
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Target 2021	Lokasi	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8
			Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan	Jumlah SDM bidang spa yang terlatih	0 orang	7 Kabupaten / Kota	DINAS PARIWISATA
			Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan	Jumlah SDM pemandu wisata yang terlatih	0 orang	7 Kabupaten / Kota	DINAS PARIWISATA
			Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan	Jumlah SDM perhotelan yang terlatih	0 orang	7 Kabupaten / Kota	DINAS PARIWISATA
			Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah peserta yang telah mengikuti peningkatan pengembangan kemitraan pariwisata	50 orang	7 Kabupaten / Kota	DINAS PARIWISATA
		Peningkatan Peran serta kepemudaan dan olah raga serta kebudayaan dalam pengembangan pariwisata	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Kebudayan yang dikelolah	55 Persen		DINAS PARIWISATA
			Kegiatan : Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah lembaga adat yang dibina	1 lembaga	Kota Pangkalpinang	DINAS PARIWISATA

NO	RPJMD 2017-2022		RKPD 2021				
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Target 2021	Lokasi	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8
			Kegiatan : Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah budaya melayu dilestarikan	1 jenis	Kab. Bangka	DINAS PARIWISATA
			Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah lembaga dan pranata adat yang dibina	1 lembaga	Kab. Bangka	DINAS PARIWISATA
			Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	1 jenis	Kab. Bangka	DINAS PARIWISATA
			Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah lembaga kebudayaan yang dibina	0 lembaga	7 Kabupaten / Kota	DINAS PARIWISATA
			PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase pertumbuhan komunitas olahraga	1429 persen	7 Kabupaten / Kota	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
			Kegiatan : Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Jumlah atlet pelajar yang dibina	550 atlet	7 Kabupaten / Kota	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
			Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event	Jumlah peserta yang ikut dalam pengiriman kontingen	208 peserta	7 Kabupaten / Kota	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
			Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	Jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan dalam kejuaraan	10 cabor	7 Kabupaten / Kota	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	RPJMD 2017-2022		RKPD 2021				
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Target 2021	Lokasi	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8
			Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi	Jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan dalam kejuaraan	0 cabor	7 Kabupaten / Kota	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Upaya pencapaian target kinerja sasaran tahun 2021 untuk prioritas ini dilakukan juga melalui intervensi lintas sektor melibatkan para steakholder secara menyeluruh dari berbagai sektor pembangunan guna meningkatkan manfaat dan daya ungkit pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat sebagaimana disajikan pada tabel IV.41 berikut:

Tabel IV.41
Stakeholder yang mendukung Prioritas Pengembangan Pariwisata

Sasaran		Indikator Sasaran		Tahun 2021	Strategi Yang Perlu Dukungan Stakeholder		Stakeholder
1		2		3	4		5
1	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	1	jumlah kunjungan wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara)	389.009	1	Meningkatkan sinergisitas pembangunan lintas sektor dalam mengembangkan pembangunaan pariwisata	PHRI, ASITA, Dewan Kerajinan, Forum Wirausaha Melayu, KADIN, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI)
					2	Mengembangkan kawasan pendukung pembangunan pariwisata	PHRI, ASITA, Dewan Kerajinan, Forum Wirausaha Melayu, KADIN, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Ikatan Konsultan Indonesia, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
					3	Pengembangan pulau-pulau kecil dan daerah perbatasan	PHRI, ASITA, Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Ikatan Konsultan Indonesia, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi

4. Peningkatan Ekonomi Masyarakat

Sasaran yang ingin diwujudkan pada prioritas ini adalah Menurunnya angka Pengangguran, Menurunnya angka kemiskinan, Menurunnya angka Inflasi dan Terkendalinya Laju

Pertumbuhan Penduduk. Selanjutnya sasaran, target sasaran, strategi dan arah kebijakan disajikan pada tabel IV.48 berikut:

Tabel IV. 48
Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Lintas Bidang
Peningkatan Ekonomi Masyarakat

Sasaran		Indikator Sasaran		Tahun 2021	Strategi dan Arah Kebijakan	
1		2		3	4	
1	Menurunnya angka Pengangguran	1	Persentase Angka Pengangguran	5.6	1	Meningkatkan pembangunaan yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan
					a	Penciptaan peluang kesempatan kerja bagi pencari kerja
					b	Peningkatan kualitas hidup dan peran serta perempuan
2	Menurunnya angka kemiskinan	2	Persentase Angka Kemiskinan	5.15	2	Penanggulangan kemiskinan diarahkan pada penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar penduduk miskin secara bertahap dengan mengutamakan prinsip demokrasi, partisipasi, kesetaraan dan non diskriminasi serta peningkatan pendapatan penduduk miskin dan pengendalian tingkat harga komoditas pangan dan non pangan dalam menurunkan angka kemiskinan.
					a	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin
					b	Meningkatkan pendapatan masyarakat miskin
3	Menurunnya angka Inflasi	3	Angka Inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	6.31	3	Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap komoditas penyumbang inflasi
					a	Pengendalian Tingkat harga-harga komoditas penyumbang inflasi
					b	Mengurangi ketergantungan pasokan dari luar terhadap komoditas penyumbang inflasi
4	Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	4	Laju pertumbuhan penduduk	2,09	4	Mengendalikan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk
					a	Pengendalian tingkat kelahiran penduduk dan perpindahan penduduk untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang

Upaya pencapaian target kinerja sasaran tahun 2021 untuk prioritas ini dilakukan melalui koordinasi beberapa Perangkat Daerah secara menyeluruh dari berbagai sektor pembangunan guna meningkatkan manfaat dan daya ungkit pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat dengan rencana program pembangunan dan target indikator kinerja

program baik yang prioritas maupun program pendukung sebagaimana disajikan pada tabel IV.49 berikut:

Tabel. IV.49
Program Pembangunan Daerah Yang Mendukung Pembangunan Lintas Bidang Peningkatan Ekonomi Masyarakat

NO	RPJMD 2017-2022		RKPD 2021				
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Target 2021	Lokasi	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Peningkatan kesempatan kerja	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Meningkatnya Kompetensi dan Produktivitas	15 Perusahaan	7 Kabupaten/ Kota	DISNAKER
			Kegiatan : Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	Pengukuran Kinerja Perusahaan dan Kompetensi SDM	15 perusahaan	7 Kabupaten/ Kota	DISNAKER
			Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pengukuran Kinerja Perusahaan dan Kompetensi SDM	15 perusahaan	7 Kabupaten/ Kota	DISNAKER
				Persentase Pelatihan Kerjasama dengan sektor swasta dan instansi pemerintah lainnya untuk penyedia instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja	20 Persentase	7 Kabupaten/ Kota	DISNAKER
			Kegiatan : Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah pencri kerja yang mendapatkan informasi program	5 kerjasama	7 Kabupaten/ Kota	DISNAKER
			Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah kerjasama dengan sektor swasta	5 kerjasam	7 Kabupaten/ Kota	DISNAKER

NO	RPJMD 2017-2022		RKPD 2021				
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Target 2021	Lokasi	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan pelatihan berdasarkan klaster kompetensi	4 Persentase	7 Kabupaten/ Kota	DISNAKER
			Kegiatan : Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Pedidikan dan pelatihan bagi pencari kerja berdasarkan klaster Kompetensi	20 paket	7 Kabupaten/ Kota	DISNAKER
			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Pedidikan dan pelatihan bagi pencari kerja berdasarkan klaster Kompetensi	20 paket	7 Kabupaten/ Kota	DISNAKER
			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang di tempatkan	5 Persentase	7 Kabupaten/ Kota	DISNAKER
			Kegiatan : Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan antar kerja	100 Orang	7 Kabupaten/ Kota	DISNAKER
			Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan Antar Kerja	30 Orang	7 Kabupaten/ Kota	DISNAKER
			Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencarikerja Yang Mendapatkan Penyuluhan dan Binaan	70 Orang	7 Kabupaten/ Kota	DISNAKER
			Kegiatan : Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Laporan	7 Kab/Kota	7 Kabupaten/ Kota	DISNAKER
			Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	jumlah data pencari kerja secara online	200 Orang	7 Kabupaten/ Kota	DISNAKER

NO	RPJMD 2017-2022		RKPD 2021				
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Target 2021	Lokasi	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8
			Kegiatan : Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah laporan	7 Kab/Kota	7 Kabupaten/ Kota	DISNAKER
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah RPTKA ,Jumlah TKA dan Lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah provinsi	80/7 Orang/Lokasi	7 Kabupaten/ Kota	DISNAKER
			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pertumbuhan jumlah industri	5 persen	7 Kabupaten/ Kota	DISPERINDAG
			Kegiatan : Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Persentase pertumbuhan tenaga kerja industri	0.02	7 Kabupaten/ Kota	DISPERINDAG
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Fasilitasi Produk	200 Fasilitasi	7 Kabupaten/ Kota	DISPERINDAG
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pemuda Yang Berprestasi,	0,15 persen	7 Kabupaten/ Kota	DISKEPORA
			Kegiatan : Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan	Jumlah Pemuda yang berprestasi	153 pemuda	7 Kabupaten/ Kota	DISKEPORA

NO	RPJMD 2017-2022		RKPD 2021				
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Target 2021	Lokasi	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8
			Kepemudaan Kewenangan Provinsi				
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi	Jumlah peserta	0 pemuda	7 Kabupaten/ Kota	DISKEPORA
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	Jumlah peserta	0 pemuda	7 Kabupaten/ Kota	DISKEPORA
		Peningkatkan peran KUKM dalam meningkatkan kesempatan kerja	Program Pelayanan Izin Simpan Pinjam	Persentase rekomen-dasi izin Usaha Simpan Pinjam yang dikeluarkan	0.2	7 Kabupaten/ Kota	Dinas KUKM
			Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah rekomendasi /Verifikasi ijin Usaha yang dikeluarkan	5 Koperasi	7 Kabupaten/ Kota	Dinas KUKM
			Sub Kegiatan 1: Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah rekomendasi Izin Usaha Simpan Pinjam	5 Koperasi	7 Kabupaten/ Kota	Dinas KUKM
				Jumlah Peserta Diseminasi Pembentukan Koperasi	210 Orang	7 Kabupaten/ Kota	Dinas KUKM

NO	RPJMD 2017-2022		RKPD 2021				
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Target 2021	Lokasi	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8
				Jumlah Akta Notaris bagi Koperasi	14 Koperasi	7 Kabupaten/ Kota	Dinas KUKM
			Program Pemberdayaan Usa-ha Menengah, Usa-ha Kecil, Dan Usaha Mikro (UKM)	Persentase UMKM yang diberdayakan	0.01	7 Kabupaten/ Kota	Dinas KUKM
			Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemuda-han Perijinan, Pengu-atan Kelembagaan dan Koordinasi deng-an Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Usaha Kecil yang melakukan pe-nguatan kelembagaan	1100 Orang	7 Kabupaten/ Kota	Dinas KUKM
				Jumlah UMKM yang bermitra	6	7 Kabupaten/ Kota	Dinas KUKM
			Sub Kegiatan 1: Menumbuhkembang-kan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Me-ningkatkan Pencipta-an Lapangan Kerja, Pemerataan Penda-patan, Pertumbuhan Ekonomi dan Peng-entasan Kemiskinan	Jumlah Wirausaha Pemula yang mengikuti Magang	100 Orang	7 Kabupaten/ Kota	Dinas KUKM
				Jumlah Peserta yang mengikuti Gerakan Kewirausahaan	1000 Orang	7 Kabupaten/ Kota	Dinas KUKM
				Jumlah Database UMKM	1 Dok	7 Kabupaten/ Kota	Dinas KUKM

NO	RPJMD 2017-2022		RKPD 2021				
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Target 2021	Lokasi	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8
				Jumlah Peserta Forum Koordinasi UMKM	100 Orang	7 Kabupaten/ Kota	Dinas KUKM
				Jumlah UMKM yang mendapatkan fasilitasi Kemitraan	30 Orang	7 Kabupaten/ Kota	Dinas KUKM
			Program Pengembangan UKM	Persentase UMKM yang dikembangkan	0.01	7 Kabupaten/ Kota	Dinas KUKM
			Kegiatan Pengembangan Usa-ha Kecil Dengan Orientasi Peningka-tan Skala Usaha Men-jadi Usaha Menengah	Jumlah UMKM yang meningkat volume usahanya	100 Orang	7 Kabupaten/ Kota	Dinas KUKM
				Jumlah Produk yang tersertifikasi dan terstandarisasi	500 Orang	7 Kabupaten/ Kota	Dinas KUKM
				Jumlah UMKM yang mendapatkan akses pembiayaan	1000 Orang	7 Kabupaten/ Kota	Dinas KUKM
		Peningkatan Promosi, koordinasi, kerjasama, dan investasi dalam peningkatan lapangan pekerjaan	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sesuai SOP	100 persentase	7 Kabupaten/ Kota	DINAS PENANAMAN MODAL
			Kegiatan : Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang Diterbitkan Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Menjadi Kewenangan Provinsi, Jumlah Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Jumlah Laporan Pengaduan Yang di Tindak Lanjuti	1200, 2, 2 Izin laporan	7 Kabupaten/ Kota	DINAS PENANAMAN MODAL

NO	RPJMD 2017-2022		RKPD 2021				
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Target 2021	Lokasi	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8
			Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Yang Diterbitkan	1200 izin	7 Kabupaten/ Kota	DINAS PENANAMAN MODAL
			Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Jumlah Pengaduan dan Layanan Konsultasi	2, 2 laporan SKM dan Pengaduan	7 Kabupaten/ Kota	DINAS PENANAMAN MODAL
			Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Aplikasi Pendukung Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi Secara Elektronik	1 aplikasi	7 Kabupaten/ Kota	DINAS PENANAMAN MODAL
			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Kerjasama Mitra Kerja Dengan Investor	80 persentase	7 Kabupaten/ Kota	DINAS PENANAMAN MODAL
			Kegiatan : Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah Peta Potensi Investasi Provinsi	1 Peta	7 Kabupaten/ Kota	DINAS PENANAMAN MODAL
			Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Jumlah Peta Potensi Investasi	1 Dokumen	7 Kabupaten/ Kota	DINAS PENANAMAN MODAL
			Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Evaluasi RUPM	1 Dokumen	7 Kabupaten/ Kota	DINAS PENANAMAN MODAL
			Kegiatan : Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang	Jumlah UKM Yang Bermitra Dengan Investor	1 UKM	7 Kabupaten/ Kota	DINAS PENANAMAN MODAL

NO	RPJMD 2017-2022		RKPD 2021				
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Target 2021	Lokasi	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8
			Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi				
			Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah UKM Yang Memenuhi Syarat Kemitraan	8 UKM	7 Kabupaten/ Kota	DINAS PENANAMAN MODAL
		Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Prosentase PMKS/PSKS yang terberdayakan	0.5	7 Kabupaten/ Kota	DINSOS
			Kegiatan : Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Jumlah PSKS yang diberdayakan	203 orang	7 Kabupaten/ Kota	DINSOS
			Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Potensi Pekerja Sosial Masyarakat yang di tingkatkan kemampuannya	416 PSM	7 Kabupaten/ Kota	DINSOS
			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Kelembagaan masyarakat yang di tingkatkan kemampuannya	1000 orang	7 Kabupaten/ Kota	DINSOS
			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga yang di tingkatkan kemampuannya	11 LK3	7 Kabupaten/ Kota	DINSOS
			Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Jumlah Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang di tingkatkan kemampuannya	47 TKSK	7 Kabupaten/ Kota	DINSOS

NO	RPJMD 2017-2022		RKPD 2021				
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Target 2021	Lokasi	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMA (Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas)	41 Angka	7 Kabupaten/ Kota	DINAS PENDIDIKAN
			Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	APK SMA	41 persen	7 Kabupaten/ Kota	DINAS PENDIDIKAN
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah siswa/mahasiswa yang mendapat beasiswa	2000 orang	7 Kabupaten/ Kota	DINAS PENDIDIKAN
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase siswa SMK miskin yang mendapatkan beasiswa miskin	100	7 Kabupaten/ Kota	DINAS PENDIDIKAN
			Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	APK SMK	36 persen	7 Kabupaten/ Kota	DINAS PENDIDIKAN
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah siswa yang mendapat beasiswa	900 orang	7 Kabupaten/ Kota	DINAS PENDIDIKAN
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memakai sistem informasi kesehatan yang dipersyaratkan	50	7 Kabupaten/ Kota	DINAS KESEHATAN
			Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana	0.8	7 Kabupaten/ Kota	DINAS KESEHATAN
			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah masyarakat yang mempunyai jaminan kesehatan baik mandiri	1130000 jiwa	7 Kabupaten/ Kota	DINAS KESEHATAN

NO	RPJMD 2017-2022		RKPD 2021				
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Target 2021	Lokasi	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Prosentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	0.5	7 Kabupaten/ Kota	DINSOS
			Kegiatan : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah data Fakir Miskin yang dikelola dengan baik	80000 KK	7 Kabupaten/ Kota	DINSOS
			Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Fakir Miskin yang di Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	220 KK	7 Kabupaten/ Kota	DINSOS
			Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Fakir Miskin yang mendapatkan bantuan ;	660 Orang	7 Kabupaten/ Kota	DINSOS
				Jumlah Keluarga Miskin yang diberikan Pendampingan Jaminan Sosial	530 KK	7 Kabupaten/ Kota	DINSOS
			Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten Kota yang dikelola ;Jumlah Fakir Miskin yang ditangani ; Jumlah Keluarga Miskin yang diberikan Pendampingan Jaminan Sosial	220/43749 KK	7 Kabupaten/ Kota	DINSOS
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase ketersedian Bapokting	80 persen	7 Kabupaten/ Kota	DISPERINDAG
			Kegiatan : Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pelaku usaha	Koevisien Variasi	<11 %	7 Kabupaten/ Kota	DISPERINDAG

NO	RPJMD 2017-2022		RKPD 2021				
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Target 2021	Lokasi	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8
			distribusi barang lintas kabupaten/ kota yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan				
			Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Operasi Pasar	14 Lokasi	7 Kabupaten/ Kota	DISPERINDAG
				Persentase Tersalurkannya Pupuk Bersubsidi	0.7	7 Kabupaten/ Kota	DISPERINDAG
			Kegiatan : Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Jumlah Pelaku Usaha yang diawasi	11 Pelaku Usaha	7 Kabupaten/ Kota	DISPERINDAG
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	Jumlah Pengawasan	2 Laporan	7 Kabupaten/ Kota	DISPERINDAG
			Pemeriksaan Dokumen Perizinan Kegiatan Distribusi	Jumlah Pemeriksaan	11 Dokumen	7 Kabupaten/ Kota	DISPERINDAG
			Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Pengawasan	2 Laporan	7 Kabupaten/ Kota	DISPERINDAG

NO	RPJMD 2017-2022		RKPD 2021				
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Target 2021	Lokasi	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8
			Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Jumlah Distributor/pengecer Pupuk bersubsidi yang diawasi	11 Distributor atau Pengecer	7 Kabupaten/ Kota	DISPERINDAG

Upaya pencapaian target kinerja sasaran tahun 2021 untuk prioritas ini dilakukan juga melalui intervensi lintas sektor melibatkan para steakholder secara menyeluruh dari berbagai sektor pembangunan guna meningkatkan manfaat dan daya ungkit pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat sebagaimana disajikan pada tabel IV.50 berikut:

Tabel. IV.50
Stakeholder Yang Mendukung Pembangunan Lintas Bidang
Peningkatan Ekonomi Masyarakat

Sasaran		Indikator Sasaran		Tahun 2021	Strategi Yang Perlu Dukungan Stakeholder		Stakeholder
1		2		3	4		5
1	Menurunnya angka Pengangguran	1	Persentase Angka Pengangguran	5.6	1	Meningkatkan pembangunaan yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan	KADIN, Dunia Usaha, Persatuan Wartawan Indonesia (PW
2	Menurunnya angka kemiskinan	2	Persentase Angka Kemiskinan	5.15	2	Penanggulangan kemiskinan diarahkan pada penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar penduduk miskin secara bertahap dengan mengutamakan prinsip demokrasi, partisipasi, kesetaraan dan non diskriminasi serta peningkatan pendapatan penduduk miskin dan pengendalian tingkat harga komoditas pangan dan non pangan dalam menurunkan angka kemiskinan.	Lembaga Swadaya Masyarakat, Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BKKKS), Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)
3	Menurunnya angka Inflasi	3	Angka Inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	6.31	3	Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap komoditas penyumbang inflasi	Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen, KADIN
4	Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	4	Laju pertumbuhan penduduk	2,09	4	Mengendalikan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk	Yayasan Babel peduli Dukungan Sebaya, Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Ikatan Dokter Indonesia (IDI)

5. Pembangunan Pendidikan

Sasaran yang ingin diwujudkan pada prioritas ini adalah Meningkatnya kesempatan pendidikan bagi masyarakat. Selanjutnya sasaran, target sasaran, strategi dan arah kebijakan disajikan pada tabel IV.54 berikut:

Tabel IV. 54
Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Lintas Bidang Pembangunan Pendidikan

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2021	Strategi dan Arah Kebijakan
1	2	3	4
Meningkatnya kesempatan pendidikan bagi masyarakat	Angka harapan lama sekolah , (Angka harapan lama sekolah laki-laki, Angka harapan lama sekolah perempuaan)	11,89; L: 12,37; P:12,46	1. Meningkatkan partisipasi sekolah masyarakat dengan arah kebijakan peningkatan akses pelayanan pendidikan
			2. Meningkatkan Kualitas pelayanan pendidikan bagi masyarakat dengan arah kebijakan sebagai berikut : a. Peningkatan mutu layanan pendidikan.
			b. Peningkatan relevansi pendidikan vokasi dalam mendukung pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal
			c. Peningkataan Pembangunan kultur masyarakat yang bertaqwa dan bermoral

Upaya pencapaian target kinerja sasaran tahun 2021 untuk prioritas ini dilakukan melalui koordinasi beberapa Perangkat Daerah secara menyeluruh dari berbagai sektor pembangunan guna meningkatkan manfaat dan daya ungkit pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat dengan rencana program pembangunan dan target indikator kinerja program baik yang prioritas maupun program pendukung sebagaimana disajikan pada tabel IV.55 berikut:

Tabel. IV.55
Program Pembangunan Daerah Yang Mendukung Pembangunan Lintas Bidang Pembangunan Pendidikan

NO	RPJMD 2017-2022		RKPD 2021				
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Target 2021	Lokasi	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PEMBANGUNAN PENDIDIKAN	Peningkatan akses pelayanan pendidikan	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase guru yang mengajar sesuai dengan kompetensi	80 persen	7 Kabupaten/ Kota	DINAS PENDIDIKAN
			Kegiatan : Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/K	jumlah dokumen analisis GTK	1 dokumen	7 Kabupaten/ Kota	DINAS PENDIDIKAN

NO	RPJMD 2017-2022		RKPD 2021				
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Target 2021	Lokasi	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8
			ota dalam 1 (satu) Provinsi				
			Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	jumlah dokumen penataan pendistribusian GTK	1 dokumen	7 Kabupaten/ Kota	DINAS PENDIDIKAN
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PENDIDIKAN KHUSUS (Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Khusus)	86 Angka	7 Kabupaten/ Kota	DINAS PENDIDIKAN
			Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Khusus	jumlah sarana prasarana PK yang dibangun;Jjumlah sarana prasarana PK yang direhab;Jumlah Pengadaan sarana prasarana PK;Jumlah lomba kesiswaan ;Jumlah guru PK yang mengikuti PPG;Jumlah guru PK yang mendapat pengembangan kompetensi;Jumlah penyediaan Operasional PLA;Jumlah SLB SWASTA terlayani	379 unit	7 Kabupaten/ Kota	DINAS PENDIDIKAN
			Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah asrama terbangun beserta perabotnya	1 unit	7 Kabupaten/ Kota	DINAS PENDIDIKAN
			Pembangunan Kantin Sekolah	jumlah kantin terbangun	0 unit	7 Kabupaten/ Kota	DINAS PENDIDIKAN

NO	RPJMD 2017-2022		RKPD 2021				
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Target 2021	Lokasi	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8
			Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	jumlah rumah terbangun	0 unit	7 Kabupaten/ Kota	DINAS PENDIDIKAN
			Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	APK SMA	41 persen	7 Kabupaten/ Kota	DINAS PENDIDIKAN
			Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah rumah asrama sekolah dibangun	2 unit	7 Kabupaten/ Kota	DINAS PENDIDIKAN
			Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah kantin yang dibangun	6 unit	7 Kabupaten/ Kota	DINAS PENDIDIKAN
			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	jumlah Ruang Guru yang dibangun	4 ruang	7 Kabupaten/ Kota	DINAS PENDIDIKAN
			Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi	jumlah Ruang lab biologi yang dibangun	0 ruang	7 Kabupaten/ Kota	DINAS PENDIDIKAN
			Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	APK SMK	36 persen	7 Kabupaten/ Kota	DINAS PENDIDIKAN
			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	jumlah Ruang guru/kepala sekolah yang dibangun	1 unit	7 Kabupaten/ Kota	DINAS PENDIDIKAN
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	jumlah sapras dan utilitas yang dibangun	13 unit	7 Kabupaten/ Kota	DINAS PENDIDIKAN
			Penambahan Ruang Kelas Sekolah	jumlah RKB yang dibangun	18 unit	7 Kabupaten/ Kota	DINAS PENDIDIKAN
			Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	jumlah pengadaan alat praktik	1 paket	7 Kabupaten/ Kota	DINAS PENDIDIKAN
			Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Pengadaan Mebeluer Sekolah	520 set	7 Kabupaten/ Kota	DINAS PENDIDIKAN

NO	RPJMD 2017-2022		RKPD 2021				
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Target 2021	Lokasi	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8
		Peningkatan mutu layanan pendidikan	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase dokumen kurikulum yg terintegrasi dengan kurikulum nasional	75 persen	7 Kabupaten/ Kota	DINAS PENDIDIKAN
			Kegiatan : Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah dokumen Muatan Lokal Pendidikan khusus	1 dokumen	7 Kabupaten/ Kota	DINAS PENDIDIKAN
			Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah dokumen Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus;terlaksanya pelatihan penilaian hasil belajar kurikulum 2013;terlaksanya pelatihan kurikulum	2 dokumen	7 Kabupaten/ Kota	DINAS PENDIDIKAN
			PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	kebijakan pengembangan bahasa dan sastra	1 0	7 Kabupaten/ Kota	DINAS PENDIDIKAN
			Kegiatan : Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	jumlah siswa yang berminat mengikuti lomba;jumlah kamus tersusun	50 orang	7 Kabupaten/ Kota	DINAS PENDIDIKAN
			Peningkatan Apresiasi Siswa terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi	jumlah / jenis buku yang dicetak dan distribusi;jumlah siswa yang berminat mengikuti lomba;jumlah kamus tersusun	4/50 orang	7 Kabupaten/ Kota	DINAS PENDIDIKAN
			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAK	Persentase Perpustakaan yang dibina	60%	7 Kabupaten/ Kota	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAK

NO	RPJMD 2017-2022		RKPD 2021				
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Target 2021	Lokasi	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8
			AAN				AAN
			Kegiatan : Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	persentase peningkatan pengelolaan perpustakaan tingkat daerah provinsi	60 persentase	7 Kabupaten/ Kota	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
			Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	jumlah bahan pustaka	42 judul buku	7 Kabupaten/ Kota	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
			Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	jumlah buku yang tersedia dalam layanan perpustakaan elektronik	0 Judul Buku Elektronik	7 Kabupaten/ Kota	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
			Pengembangan Perpustakaan Deposit	tersedianya kelengkapan perpustakaan deposit	0 paket	7 Kabupaten/ Kota	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
			Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	jumlah perpustakaan yang memenuhi standart nasional;jumlah perputakaan terakreditasi	7 perpustakaan	7 Kabupaten/ Kota	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
			Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	jumlah pustakawan dan pengelola perpustakaan yang berprestasi	8 pustakawan /pengelola perpustakaan	7 Kabupaten/ Kota	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
			Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	jumlah profil perpustakaan	12 buku	7 Kabupaten/ Kota	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

Upaya pencapaian target kinerja sasaran tahun 2021 untuk prioritas ini dilakukan juga melalui intervensi lintas sektor melibatkan para steakholder secara menyeluruh dari

berbagai sektor pembangunan guna meningkatkan manfaat dan daya ungkit pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat sebagaimana disajikan pada tabel IV.56 berikut:

Tabel. IV.56
Stakeholder Yang Mendukung Pembangunan Lintas Bidang
Pembangunan Pendidikan

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2021	Strategi Yang Perlu Dukungan Stakeholder	Stakeholder
1	2	3	4	5
Meningkatnya kesempatan pendidikan bagi masyarakat	Angka harapan lama sekolah , (Angka harapan lama sekolah laki-laki, Angka harapan lama sekolah perempuaan)	11,89; L: 12,37; P:12,46	Meningkatkan partisipasi sekolah masyarakat dengan arah kebijakan peningkatan akses pelayanan pendidikan	Dewan Pendidikan, Lembaga Pendidikan, Badan Akreditasi sekolah, PGRI
			Meningkatkan Kualitas pelayanan pendidikan bagi masyarakat dengan arah kebijakan sebagai berikut :	Dewan Pendidikan, Lembaga Pendidikan, Badan Akreditasi sekolah, PGRI

6. Pembangunan Kesehatan

Sasaran yang ingin diwujudkan pada prioritas ini adalah Peningkatan pembangunan kesehatan masyarakat. Selanjutnya sasaran, target sasaran, strategi dan arah kebijakan disajikan pada tabel IV.57 berikut:

Tabel IV.57
Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Lintas Bidang
Pembangunan Kesehatan

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)
Peningkatan pembangunan kesehatan masyarakat	Angka Kesehatan Masyarakat	Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dengan arah kebijakan sebagai berikut: Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan peningkatan pelayanaan kesehatan masyarakat Pemenuhan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan Meningkatkan Pengendaliaan Penyalahgunaan Napza

Upaya pencapaian target kinerja sasaran tahun 2021 untuk prioritas ini dilakukan melalui koordinasi beberapa Perangkat Daerah secara menyeluruh dari berbagai sektor pembangunan guna meningkatkan manfaat dan daya ungkit pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat dengan rencana program pembangunan dan target indikator kinerja program baik yang prioritas maupun program pendukung sebagaimana disajikan pada tabel IV.58 berikut:

Tabel. IV.58
Program Pembangunan Perangkat Daerah Yang Mendukung Pembangunan Lintas Bidang
Pembangunan Kesehatan

NO	RPJMD 2017-2022		RKPD 2021				
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Target 2021	Lokasi	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PEMBANGUNAN KESEHATAN	Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase posyandu aktif	63%	7 Kabupaten/ Kota	DINKES
			Kegiatan : Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah kebijakan baru yang mendukung gerakan masyarakat hidup sehat di Kabupaten/Kota	5 kebijakan	7 Kabupaten/ Kota	DINKES
			Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah peserta kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) " Sehat Bersama Bunda Germas "	300 orang	7 Kabupaten/ Kota	DINKES
			Kegiatan : Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah pelaksanaan KIE PHBS di masyarakat	6 tema	7 Kabupaten/ Kota	DINKES
			Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Pelaksanaan Edukasi Adaptasi Kebiasaan Baru, Jumlah Informasi Promosi Kesehatan Melalui Media KIE	3/4 tatanan/media informasi kesehatan	7 Kabupaten/ Kota	DINKES
			Kegiatan : Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pembinaan posyandu aktif	0.7	7 Kabupaten/ Kota	DINKES
			Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Jumlah peserta asistensi pengintegrasian pengembangan posyandu	450 orang	7 Kabupaten/ Kota	DINKES

NO	RPJMD 2017-2022		RKPD 2021				
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Target 2021	Lokasi	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase status kesehatan masyarakat	76,5	7 Kabupaten/ Kota	DINKES
			Kegiatan : Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Penerbitan Rekomendasi Perijinan Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	10 dokumen	7 Kabupaten/ Kota	DINKES
			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah rumah sakit yang dilakukan pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut perizinan rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan	19 rumah sakit	7 Kabupaten/ Kota	DINKES
			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah puskesmas yang melakukan simulasi survei akreditasi	7 puskesmas	7 Kabupaten/ Kota	DINKES
			Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase penyediaan sarana dan prasarana labkes; Persentase Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan di Pkm; Persentase Kab/Kota yang menyediakan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat	100/64/57 %/%/%/%	7 Kabupaten/ Kota	DINKES

NO	RPJMD 2017-2022		RKPD 2021				
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Target 2021	Lokasi	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8
				daerah prov; Persentase Pkm dengan ketersediaan obat dan vaksin essensial			
			Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman Serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah puskesmas yang memiliki ketersediaan obat dan vaksin esensial; Jumlah pembelian obat buffer stock; Jumlah puskesmas yang memiliki ketersediaan obat dan vaksin esensial; Jumlah bangunan yang direhabilitasi	64/3/64/1 puskesmas/jenis/puskesmas/bangunan	7 Kabupaten/ Kota	DINKES
			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan	90 unit	7 Kabupaten/ Kota	DINKES
			Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	Jumlah jenis pengadaan bahan habis pakai lainnya (sprei, handuk dan habis pakai lainnya)	7 jenis	7 Kabupaten/ Kota	DINKES
			Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah pengadaan alat kesehatan; Jumlah jenis alat kesehatan yang dikalibrasi	13/10 unit/unit	7 Kabupaten/ Kota	DINKES
			Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	Jumlah pemeliharaan alat-alat kesehatan/peralatan laboratorium kesehatan	10 unit	7 Kabupaten/ Kota	DINKES
			Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah pengadaan sarana di fasilitas layanan kesehatan; Jumlah lembaga yang diberikan bantuan; Jumlah instalasi	4/1/1 unit/lembaga/unit	7 Kabupaten/ Kota	DINKES

NO	RPJMD 2017-2022		RKPD 2021				
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Target 2021	Lokasi	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8
			Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana Prasarana yang dibangun	1 sarana	7 Kabupaten/ Kota	DINKES
			Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	Jumlah penduduk yang dilayani Pelayanan Kesehatan Bergerak	10300 orang	7 Kabupaten/ Kota	DINKES
			Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelayanan Telemedicine; Peserta pertemuan evaluasi pelaksanaan telemedicine	8/21 fasyankes/ orang	7 Kabupaten/ Kota	DINKES
			Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana	0.8	7 Kabupaten/ Kota	DINKES
			Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Jumlah investigasi kasus KIPI yang dilakukan	6 kali	7 Kabupaten/ Kota	DINKES
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kegiatan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) kabupaten/kota	1 dokumen	7 Kabupaten/ Kota	DINKES

NO	RPJMD 2017-2022		RKPD 2021				
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Target 2021	Lokasi	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8
			Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah puskesmas yang melakukan upaya perubahan Indeks Keluarga Sehat (IKS) pada Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK), Puskesmas Ramah Anak; Jumlah lembaga yang diberikan bantuan	64/1 puskesmas /lembaga	7 Kabupaten/ Kota	DINKES
			Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah peserta Penguatan Dinas Kesehatan Kab/Kota sebagai Tim PPMI (Pengawasan Pemantauan Mutu Internal)	24 orang	7 Kabupaten/ Kota	DINKES
			Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Jumlah pengiriman spesimen penyakit potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke laboratorium rujukan/nasional untuk konfirmasi laboratorium	20 spesimen	7 Kabupaten/ Kota	DINKES
			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah masyarakat yang mempunyai jaminan kesehatan baik mandiri maupun yang dibiayai oleh pemerintah	1130000 jiwa	7 Kabupaten/ Kota	DINKES
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Kejadian Luar Biasa (KLB) yang dapat ditanggulangi	15 kejadian	7 Kabupaten/ Kota	DINKES
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau	Jumlah pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana	6 kali	7 Kabupaten/ Kota	DINKES

NO	RPJMD 2017-2022		RKPD 2021				
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Target 2021	Lokasi	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8
			Berpotensi Bencana	dan/atau berpotensi bencana			
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah peserta pencanangan bulan timbang; Jumlah puskesmas yang mendapatkan pendampingan pelaksanaan surveilans gizi melalui e-PPGBM; Jumlah balita terkonfirmasi masalah gizi yang mendapatkan makanan tambahan lokal	400/64/525 orang/puskesmas/balita	7 Kabupaten/ Kota	DINKES
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah jemaah Haji yang mendapatkan pemeriksaan dan pembinaan kesehatan haji	500 orang	7 Kabupaten/ Kota	DINKES
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air mimum layak	74.65	7 Kabupaten/ Kota	DINAS PERKIM
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga Yang terlayani akses air minum	144 KK	7 Kabupaten/ Kota	DINAS PERKIM
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah dok perencanaan yang tersusun	1 Dokumen	7 Kabupaten/ Kota	DINAS PERKIM
			Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan	Panjang Pipa distribusi Air Minum	1500 m	7 Kabupaten/ Kota	DINAS PERKIM
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak	0.925	7 Kabupaten/ Kota	DINAS PERKIM

NO	RPJMD 2017-2022		RKPD 2021				
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Target 2021	Lokasi	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8
			Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Jumlah Rumah Tangga Terlayani sitem air limbah domestik	140 KK	7 Kabupaten/ Kota	DINAS PERKIM
			Sub Kegiatan Penyediaan Tangki Septik	Jumlah Rumah Tangga yang terbangun Tangki Septik	140 KK	7 Kabupaten/ Kota	
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Meningkatnya konsumsi pangan yang beragam pada kelompok Pangan a) Umbi-umbian, b) Kacang-kacangan c) nuah dan sayur	a) 27,9 b) 7,9 c) 21,6 Persentase	7 Kabupaten/ Kota	DINAS PANGAN
			Kegiatan : Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	Persentase meningkatnya pemahaman masyarakat akan pola pangan yang B2SA	100 persen	7 Kabupaten/ Kota	DINAS PANGAN
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Jumlah peserta pertemuan sosialisasi B2SA (TP. PKK Kab/Kota dan Kelompok masyaraka	0 orang	7 Kabupaten/ Kota	DINAS PANGAN
		Peningkatan pelayanaan kesehatan masyarakat	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan Kesehatan Rumah Sakit Terakreditasi Paripurna	80 persen	7 Kabupaten/ Kota	RUMAH SAKIT UMUM
			Kegiatan : Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Pelayanan Kesehatan RS	4 0	7 Kabupaten/ Kota	RUMAH SAKIT UMUM

NO	RPJMD 2017-2022		RKPD 2021				
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Target 2021	Lokasi	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8
			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah SOP Keperawatan,Jumlah Standar Asuhan Keperawatan, Jumlah Dokumen Evaluasi Standar Pelayanan Teknis Keperawatan,Jumlah Dokumen Perencanaan Perbaikan Strategis	4 0	7 Kabupaten/ Kota	RUMAH SAKIT UMUM
			Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Pelayanan Sarpras dan Alkes untuk RS Rujukan	80 0	7 Kabupaten/ Kota	RUMAH SAKIT UMUM
			Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Gedung,Jumlah gedung Jenazah RS,Jumlah gedung B RS Lanjutan,	3 0	7 Kabupaten/ Kota	RUMAH SAKIT UMUM
			Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Persentase pemeliharaan Alat Kesehatan/Penunjang Medik Kesehatan	80 0	7 Kabupaten/ Kota	RUMAH SAKIT UMUM
			Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Persentase Pemeliharaan Prasarana RS	80 0	7 Kabupaten/ Kota	RUMAH SAKIT UMUM
			Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Persentase Pemeliharaan sarana RS	80 0	7 Kabupaten/ Kota	RUMAH SAKIT UMUM
			Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Keperawatan	1 0	7 Kabupaten/ Kota	RUMAH SAKIT UMUM
			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan (DAK),Jumlah Alat Kesehatan/Penunjang Medik,	885,10,9750	7 Kabupaten/ Kota	RUMAH SAKIT UMUM

NO	RPJMD 2017-2022		RKPD 2021				
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Target 2021	Lokasi	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8
				Jumlah Alat Kesehatan			
			Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Jumlah Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	3 0	7 Kabupaten/ Kota	RUMAH SAKIT UMUM
			Kegiatan : Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Jumlah Aplikasi Asuhan Keperawatan Terintegrasi	1 0	7 Kabupaten/ Kota	RUMAH SAKIT UMUM
			Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Aplikasi Asuhan Keperawatan Terintegrasi	1 0	7 Kabupaten/ Kota	RUMAH SAKIT UMUM
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase masyarakat/perorangan yang mendapat upaya kesehatan	80 persen	7 Kabupaten/ Kota	RUMAH SAKIT JIWA
			Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	persentase fasilitas pelayanan sarana dan prasarana dan alkes yang disediakan di RS.Jiwa	85 persen	7 Kabupaten/ Kota	RUMAH SAKIT JIWA
		Peningkatan pendapatan masyarakat desa	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah alat Kesehatan/alat medik fasilitas kesehatan yang terpelihara	14 alat	7 Kabupaten/ Kota	RUMAH SAKIT JIWA
			Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	Jumlah sprei, handuk dan pakaian habis pakai yang dibeli	5 jenis	7 Kabupaten/ Kota	RUMAH SAKIT JIWA
			Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah alat Kesehatan yang terkalibrasi	10 unit	7 Kabupaten/ Kota	RUMAH SAKIT JIWA
			Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Peralatan Lab yang telah di pelihara	10 jenis	7 Kabupaten/ Kota	RUMAH SAKIT JIWA

NO	RPJMD 2017-2022		RKPD 2021				
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Target 2021	Lokasi	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8
			Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah gedung rawat inap yang dibangun	1 gedung	7 Kabupaten/ Kota	RUMAH SAKIT JIWA
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah bangunan Rumah Sakit yang direhabilitasi	8 bangunan	7 Kabupaten/ Kota	RUMAH SAKIT JIWA

Upaya pencapaian target kinerja sasaran tahun 2021 untuk prioritas ini dilakukan juga melalui intervensi lintas sektor melibatkan para steakholder secara menyeluruh dari berbagai sektor pembangunan guna meningkatkan manfaat dan daya ungkit pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat sebagaimana disajikan pada tabel IV.59 berikut:

Tabel. IV.59
Stakeholder Yang Mendukung Pembangunan Lintas Bidang Pembangunan Kesehatan

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Strategi Yang Perlu Dukungan Stakeholde	Stakeholder
(1)	(2)	(3)	(4)
Peningkatan pembangunan kesehatan masyarakat	Angka Kesehatan Masyarakat	Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat Pemenuhan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan	IDI, IBI, Badan Pengawas RS

4.3 Pagu Indikatif Per Prioritas Daerah Tahun 2021

Pagu Indikatif merupakan batasan anggaran yang telah ditentukan untuk masing-masing Prioritas Pembangunan yang mencakup program dan kegiatan yang ada di Perangkat daerah untuk tahun 2021 dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Penentuan pagu indikatif untuk masing-masing Prioritas Pembangunan Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel IV.60 di bawah ini:

Tabel. IV.60

Pagu Indikatif Per Prioritas Daerah Tahun 2021

	Prioritas Pembangunan Daerah		Strategi		Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja Program		Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
						Indikator (*Out Come*)	Target		
1	*2*		*3*	*4*		*5*	*6*	*7*	*8*
1	**PEMBANGUNAN PENGEMBANGAN AGROPOLITAN**							**30.930.488.109**	
		1	Peningkatan sarana prasarana produksi pertanian, perkebunan, dan perternakan	1	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase ketersediaan saprodi pertanian	15	10.161.085.000	DINAS PERTANIAN
						Persentase peningkatan luas tanam Tanaman Pangan	69,58		DINAS PERTANIAN
						Persentase peningkatan luas tanam Hortikultura	14,21		DINAS PERTANIAN
						Persentase peningkatan luas tanam perkebunan	10,17		DINAS PERTANIAN
						Persentase Ketersediaan benih/bibit pertanian tingkat lapang (daerah)	50		DINAS PERTANIAN
						Persentase benih/bibit pertanian berlabel dan bersertifikat	5		DINAS PERTANIAN
						Persentase Pertambahan Angka Kelahiran Ternak	356,32		DINAS PERTANIAN
						Persentase penurunan kasus penyakit hewan menular	100		DINAS PERTANIAN
						Peningkatan unit usaha yang bersertifikasi NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	90		DINAS PERTANIAN
						Persentase ketersediaan pakan ternak	90		DINAS PERTANIAN
					Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Dokumen pengawasan dan peredaran pupuk, pestisida, alsintan dan sarana pendukung peningkatan produksi	4		DINAS PERTANIAN
					Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung	Jumlah Pupuk Subsidi	101571		DINAS PERTANIAN

	Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja Program		Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
				Indikator (*Out Come*)	Target		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
				Laporan Peredaran Pestisida	2		DINAS PERTANIAN
				Jumlah Alat Mesin Pertanian	100		DINAS PERTANIAN
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah pertemuan komisi pengawasan pupuk dan pestisida / KP3	2		DINAS PERTANIAN
				Jumlah Pertemuan UPJA Alat Mesin Pertanian	2		DINAS PERTANIAN
				Jumlah Laporan/Database/Dokumen Pengawasan Pupuk, Pestisida dan Alat Mesin Pertanian	2		DINAS PERTANIAN
			Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah Luasan Benih/Bibit Hortikultura yang tersedia	65		DINAS PERTANIAN
				Jumlah Luasan Benih/Bibit Tanaman Pangan yang tersedia	120		DINAS PERTANIAN
				Jumlah Luasan Bibit Perkebunan yang tersedia (Lada, Sawit, Karet, Kopi)	3250		DINAS PERTANIAN
				Jumlah benih/bibit sumber dan sebar Hortikultura	4000		DINAS PERTANIAN
				Jumlah benih/bibit sumber dan sebar Tan. Pangan	100		DINAS PERTANIAN
				Jumlah Bibit sumber dan sebar Perkebunan	40000		DINAS PERTANIAN
				Jumlah sertifikasi benih/bibit Hortikultura yang dikeluarkan	75.000 bibit		DINAS PERTANIAN
				Jumlah sertifikasi benih/bibit Tan. Pangan yang dikeluarkan	143 Ton		DINAS PERTANIAN
				Jumlah sertifikasi bibit Perkebunan yang dikeluarkan	3.000.000 bibit		DINAS PERTANIAN
				Jumlah laporan pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit pertanian	3 Laporan		DINAS PERTANIAN

	Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja Program		Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
				Indikator (*Out Come*)	Target		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
			Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Jumlah luasan Benih/Bibit Hortikultura yang tersedia			DINAS PERTANIAN
				Cabai	13		DINAS PERTANIAN
				Bawang Merah	7		DINAS PERTANIAN
				Durian	45		DINAS PERTANIAN
				Jumlah benih sumber dan benih sebar Hortikultura	100		DINAS PERTANIAN
				Jumlah sertifikasi benih/bibit Hortikultura yang dikeluarkan	75.000 bibit		DINAS PERTANIAN
				Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura	7 kab/kota		DINAS PERTANIAN
			Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Jumlah Luasan Benih/Bibit Tanaman Pangan yang tersedia			DINAS PERTANIAN
				Padi	100		DINAS PERTANIAN
				Jagung	20		DINAS PERTANIAN
				Jumlah benih sumber dan benih sebar Tan. Pangan	4000		DINAS PERTANIAN
				Jumlah sertifikasi benih/bibit Tan. Pangan yang dikeluarkan	143 Ton		DINAS PERTANIAN
				Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Pangan	7 kab/kota		DINAS PERTANIAN
			Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Jumlah Luasan Bantuan bibit dan/atau saprodi tanaman Semusim & Rempah (Lada)	3200		DINAS PERTANIAN
				Jumlah Luasan Bantuan bibit dan/atau saprodi tanaman Tahunan & Penyegar (Sawit, Karet, Kopi)	50		DINAS PERTANIAN

	Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja Program		Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
				Indikator (*Out Come*)	Target		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
				Jumlah benih sumber dan benih sebar Perkebunan	40000		DINAS PERTANIAN
				Jumlah sertifikasi bibit Perkebunan yang dikeluarkan	3000000 bibit		DINAS PERTANIAN
				Pengawasan Mutu dan Peredaran Bibit Perkebunan	7 kab/kota		DINAS PERTANIAN
			Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Jumlah Kultivar/ varietas yang dinilai	4		DINAS PERTANIAN
			Penilaian Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah varietas unggul yang didaftarkan	2		DINAS PERTANIAN
			Kegiatan Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah keterdiaan benih/bibit ternak			DINAS PERTANIAN
				Kualitas Mutu pakan ternak			DINAS PERTANIAN
			Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Bimtek teknis produksi peternakan yang terlaksana	1		DINAS PERTANIAN
			Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah bimtek bibit dan pakan untuk peternak/kelompok ternak/pelaku usaha yang terlaksana	1		DINAS PERTANIAN

	Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja Program		Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
				Indikator (*Out Come*)	Target		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
			Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Bimtek fungsional wasbitnak dan wastukan yang terlaksana	2		DINAS PERTANIAN
			Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah bibit ternak ayam	15000		DINAS PERTANIAN
				Jumlah bibit ternak sapi	30		DINAS PERTANIAN
				Jumlah pakan	300		DINAS PERTANIAN
			Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Bibit Sapi			DINAS PERTANIAN
				Jumlah Bibit Ayam			DINAS PERTANIAN
			Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	Jumlah Pakan			DINAS PERTANIAN
			Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak				DINAS PERTANIAN
			Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah bantuan bibit ternak	130		DINAS PERTANIAN
				Jumlah ketersediaan pakan ternak			DINAS PERTANIAN

	Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja Program		Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
				Indikator (*Out Come*)	Target		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
			Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Pengadaan bibit ternak	130		DINAS PERTANIAN
			Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Pengadaan HPT			DINAS PERTANIAN
			2 Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rasio Ketersediaan Prasarana Pertanian	15	18.563.728.109	DINAS PERTANIAN
			Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian	Rasio Ketersediaan PraSarana Pertanian	15		DINAS PERTANIAN
				Jumlah Dokumen Akses Informasi Benih	1		DINAS PERTANIAN
				Jumlah Prasarana Perbibitan/Perbenihan serta prasarana pendukung yang tersedia	1		DINAS PERTANIAN
				Jumlah Prasarana Pengendalian dan Penangulangan yang tersedia	1		DINAS PERTANIAN
			Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas tanaman pangan dan hortikultura			DINAS PERTANIAN
				Jumlah sarana prasarana pasca panen komoditi pangan dan hortikultura			DINAS PERTANIAN
				Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas perkebunan			DINAS PERTANIAN
				Jumlah sarana prasarana pasca panen komoditi perkebunan			DINAS PERTANIAN
				Unit pengolahan pupuk organik berbasis limbah ternak	1 unit		DINAS PERTANIAN

	Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja Program		Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
				Indikator (*Out Come*)	Target		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
				Indikator Optimasi Lahan (Ha)	3500		DINAS PERTANIAN
				Indikator Pemetaan Lahan pertanian Pangan Berkelanjutan dan Spasial Kawasan Pertanian (Dok)	1		DINAS PERTANIAN
				Indikator Rencana Penataan Jaringan Irigasi Tersier (m3)	3000		DINAS PERTANIAN
				Indikator Rencana Jalan Produksi Pertanian (Km)	40		DINAS PERTANIAN
				Indikator Rencana Pengembangan Pertanian Lahan Kering (Ha)	100		DINAS PERTANIAN
				Indikator Pembangunan gudang dan Bengkel alsintan (Unit)	13		DINAS PERTANIAN
				Jumlah Dokumen Akses Informasi Benih	1		DINAS PERTANIAN
				Jumlah Prasarana Perbibitan/Perbenihan serta prasarana pendukung yang tersedia	1		DINAS PERTANIAN
			Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Luasan Lahan yang dioptimalkan	3500		DINAS PERTANIAN
				Luasan Jaringan yang direview atau dikendalikan/dimanfaatkan	3000		DINAS PERTANIAN
				Review Penataan Kawasan Pertanian Berkelanjutan dan Terintegrasi	2		DINAS PERTANIAN
				pupuk anorganik yang tersedia			DINAS PERTANIAN
				pupuk organik yang tersedia			DINAS PERTANIAN
				tajar hidup yang tersedia			DINAS PERTANIAN

	Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja Program		Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
				Indikator (*Out Come*)	Target		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	jumlah Luasan Jalan Usaha Tani (Km)	40		DINAS PERTANIAN
				jumlah Pertemuan Pelaksanaan JUT	4		DINAS PERTANIAN
			Koordinasi , Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Tersier atau Jaringan Tingkat Usaha Tani yang terbangun (m3)	3000		DINAS PERTANIAN
				Jumlah Sumber Air Pertanian yang dibangun (Unit)	4		DINAS PERTANIAN
				jumlah Pertemuan Jaringan Irigasi Tersier atau Jitut (Forum Irigasi Pertanian)	4		DINAS PERTANIAN
			Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian	Jumlah Paket Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian			DINAS PERTANIAN
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah promosi produk pangan dan hortikultura			DINAS PERTANIAN
				Jumlah informasi pasar strategis yang dipublikasikan			DINAS PERTANIAN
				jumlah alat-alat peternakan mendukung produksi benih/bibit pakan ternak bagi kelompok/pelaku usaha yang tersedia	1 paket		DINAS PERTANIAN
				Jumlah promosi komoditi peternakan	1 komoditi		DINAS PERTANIAN
				Jumlah pertemuan terkait koordinasi, sinkronisasi dan penataan prasarana pendukung pertanian lainnya	2		DINAS PERTANIAN

	Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Kinerja Program		Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
					Indikator (*Out Come*)	Target		
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*	*8*
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Paket Pembangunan dan Pemeliharaan Gedung UPTD serta sarana pendukung	3		DINAS PERTANIAN
		Peningkatan Produksi dan Pengelolaan Hasil Produksi Pertanian, Perkebunaan dan Peternakan	1	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase penurunan kasus penyakit hewan menular	75	449.025.000	DINAS PERTANIAN
				Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terkendalinya keamanan 7 Kab/Kota di wilayah Babel terhadap penyakit-penyakit zoonosis (Rabies dan AI)	7 Kab/Kota		DINAS PERTANIAN
				Pengendalian Resiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah pelaksanaan Pengendalian Resiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	2 zoonosis		DINAS PERTANIAN
				Pembebasan Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pembebasan Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	7 Kab/Kota		DINAS PERTANIAN
				Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular yang ditanggulangi	1 Lokasi		DINAS PERTANIAN
				Kegiatan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Tersertifikasinya 1 unit usaha produk peternakan di Bangka Belitung (ber NKV/Nomor Kontrol Veteriner)serta terujinya 210 sample produk peternakan pada unit-unit usaha/kios-kios produk peternakan	1 NKV(Nomor Kontrol Veteriner) dan 210 sample		DINAS PERTANIAN

	Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Kinerja Program		Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
					Indikator (*Out Come*)	Target		
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*	*8*
				Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit yang dipenuhi	1 unit usaha		DINAS PERTANIAN
				Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan	tingkat (persentase) Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan	4 unit usaha		DINAS PERTANIAN
				Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan kesehatan Masyarakat Veteriner	jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan kesehatan Masyarakat Veteriner	210 sampel		DINAS PERTANIAN
					Unit Lab Keswan dan kesmavet yang terpelihara	1		DINAS PERTANIAN
			2	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Dokumen Laporan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	4	693.625.000	DINAS PERTANIAN
				Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Dokumen Pengendalian dan Penamggulangan Bencana Pertanian Provinsi	4		DINAS PERTANIAN
				Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	rasio luas areal pengendalian OPT terhadap luas pertanaman	3		DINAS PERTANIAN
					Jumlah paket belanja bahan obat-obatan (pestisida)	1		DINAS PERTANIAN
					Jumlah Koordinasi dan Monev Perlindungan Tanaman	15		DINAS PERTANIAN
					Jumlah Kegiatan Brigade Proteksi Tanaman	1		DINAS PERTANIAN

	Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Kinerja Program		Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
					Indikator (*Out Come*)	Target		
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*	*8*
				Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	rasio luas areal pengendalianDPI terhadap luas pertanaman	2		DINAS PERTANIAN
					Polis Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)	6000		DINAS PERTANIAN
				Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Dokumen Pencegahan, Penanganan Kebakaran dan Gangguan Usaha	1		DINAS PERTANIAN
				Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Polis Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS)	3500		DINAS PERTANIAN
			3	Program Perizinan Usaha Pertanian	Dokumen Perizinan usaha pertanian	1	63.025.000	DINAS PERTANIAN
				Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	usaha pertanian yang diterbitkan izin usaha pertanian	10		DINAS PERTANIAN
				Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Laporan Hasil Pembinaan dan pengawasan penerapan izin usaha pertanian	10		DINAS PERTANIAN
		Peningkatan Kualitas Sumber daya Manusia Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	1	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase peningkatan kelas kelompok tani	80	1.000.000.000	DINAS PERTANIAN
				Kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah inovasi/teknologi/informasi yang diterapkan	2		DINAS PERTANIAN
					Jumlah petani dan penyuluh yang dilatih	1000		DINAS PERTANIAN

	Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Kinerja Program		Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
					Indikator (*Out Come*)	Target		
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*	*8*
					Jumlah kelembagaan petani dan penyuluh yang dibina	14		DINAS PERTANIAN
				Diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian	Rembuk Tani Nasional (PENAS)	1		DINAS PERTANIAN
				Pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan petani	JUmlah peningkatan kapabilitas penyuluhan	204		DINAS PERTANIAN
2	**PEMBANGUNAN BAHARI**						**7.543.515.145**	
		Peningkatan Kualitas Sumber daya Manusia Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya	1	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Luasan ruang laut, pesisir dan pulau pulau kecil yang termanfaatkan (Ha)		700.000.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
				Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat Pesisir Yang Diberdayakan dan Dilakukan Pembinaan	13		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
				Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat Pesisir Yang Dilakukan Pembinaan (Kelompok Masyarakat Pesisir)	3		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
				Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat Pesisir Yang Dilakukan Pembinaan (Kelompok Masyarakat Pesisir)	3		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
				Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat Pesisir Yang Diberdayakan (Kelompok Masyarakat Pesisir)	4		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

	Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Kinerja Program		Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
					Indikator (*Out Come*)	Target		
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*	*8*
				Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaran Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Masyarakat Pesisir Yang dilakukan pendampingan (Kelompok Masyarakat Pesisir)	3		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Peningkatan produksi dan Pengelolaan Hasil Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya	1	Program Pengembangan perikanan Tangkap	Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap (%)	1,85%	3.193.515.145	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
				Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah laut sampai dengan 12 mil	1. Tersedianya Data Statistik Perikanan Tangkap(Dokumen)	1		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					2. Tersedianya sarana dan prasarana usaha perikanan tangkap (unit)	-		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
				Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	1. Tersedianya Data dan Informasi Perikanan Tangkap(Dokumen)	1		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
				Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap (Alat bantu Penangkapan, Rumpon/Rumah Ikan/Fish Apartemen, Mesin, dll)	1. Jumlah Mesin Tempel (Unit/Tahun)	20		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					2. Jumlah ALat Bantu Penangkapan/Navigasi (Unit/Tahun)	30		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					3. Rumpon/Rumah Ikan/Fish Apartemen (Paket/Tahun)	3		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					4. Jumlah Tambat Labuh yang dibangun/direhab (unit)	1		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
				Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap (kapal dan API)	1. Jumlah Kapal Perikanan (Unit/Tahun)	10		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					2. Jumlah Alat Penangkapan Ikan (Paket/Tahun)	1		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

	Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja Program		Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
				Indikator (*Out Come*)	Target		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
				3 Jumlah Kawat Bubu (Gulung/Tahun)	500		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
				4. Jumlah Jaring (Piece/Tahun)	750		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT Sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Teknis Perizinan usaha Perikanan Tangkap (rekomendasi)	350		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	1. Tersedianya SOP Penerbitan Izin Usaha Penangkapan Ikan (Dokumen)			DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
				2. Tersosialisasinya SOP Penerbitan Izin Usaha Penangkapan Ikan (Kegiatan)	7		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	1. Jumlah rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap (Rekomendasi)	350		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
				2. Gerai Perizinan (Kegiatan)	7		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	1. Tersedianya Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap			DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Kegiatan Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	1. Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan (pelabuhan Perikanan)	7		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
				2. Meningkatnya Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi (Pelabuhan Perikanan)			DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

	Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Kinerja Program		Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
					Indikator (*Out Come*)	Target		
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*	*8*
				Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	1. Jumlah Rencana Induk Pelabuhan Perikanan (dokumen)	1		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	1. Jumlah Pelabuhan Perikanan yang dibangun/rehabilitasi berupa Fasilitas Pokok, Fungsional dan Fasilitas Penunjang (Pelabuhan Perikanan)	4		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
				Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	1. Jumlah pelaku usaha perikanan tangkap yang dilayani (pelaku usaha)	7		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			2	Program Pengembangan Perikanan Budidaya	Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap (%)		1.750.000.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
				Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga kerja Asing	Jumlah rekomendasi Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil (rekomendasi)			DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
				Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	1. Tersedianya SOP Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan (Dokumen)	1		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					2. Tersosialisasinya SOP Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan (Kegiatan)	7		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
				Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang dikeluarkan (rekomendasi)	5		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

	Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja Program		Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
				Indikator (*Out Come*)	Target		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
			Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Di Laut	Produksi Perikanan budidaya Laut (ton/tahun)	13.120		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas daerah Kabupaten/Kota (buku)	7		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	1. Jumlah Prasarana budidaya yang diserahkan kepada masyarakat (paket)	2		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
				2. Tersedianya benih ikan laut yang diserahkan ke masyarakat (paket)	4		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
				3. Jumlah Peralatan Budidaya yang diadakan (Paket/Tahun)	1		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
				4. Pengadaan Peralatan Laboratorium (Paket/tahun)	1		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumberdayanya Lebih Efisien Apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten Kota	1.Tersedianya benih yang diserahkan ke masyarakat (paket)	2		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
				2. Pengadaan Peralatan Budidaya (Paket/Tahun)	2		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
				3. Pengadaan Peralatan Laboratorium (Paket/tahun)	2		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
				4. Jumlah produksi benih (juta/ekor)	32.000		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
				5. Jumlah Produksi Ikan Konsumsi (Ton/Tahun)	1.200		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	1. Pembangunan Hatchery (Unit/Tahun)	1		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
				2. Jumlah Hatchery yang direhab (Unit/Tahun)	1		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

	Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja Program		Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
				Indikator (*Out Come*)	Target		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
				3. Pembangunan Kolam/Tambak Pembesaran (Unit/Tahun)	2		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
				4. Rehab Kolam Pembesaran (Unit/Tahun)	1		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
				5. Jumlah Sarana Prasarana Balai yang diadakan (Paket/Tahun)	1		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Penyediaan sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumberdayanya Lebih Efisien Apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten Kota	1. Tersedianya sarana yang diserahkan ke masyarakat (paket)	-		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
				2. Pembangunan Hatchery (Unit/Tahun)	-		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
				3. Jumlah Hatchery yang direhab (Unit/Tahun)	1		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
				4. Jumlah Tambak Pembesaran yang dibangun (Unit/Tahun)	1		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
				5. Jumlah Sarana dan prasarana yang direhab (unit/tahun)	1		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
				6. Jumlah Sarana Prasarana Balai yang diadakan (Paket/Tahun)	6		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	1. Jumlah Pembudidaya yang dibantu Vaksinasi Perikanan	100		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
				2. Jumlah pelaksanaan monev kesehatan ikan dan lingkungan budidaya (bulan)	8		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
				3. Tingkat Survival Rate (%)	85		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
				4. Jumlah verifikasi kesehatan dan lingkungan budidaya yang telah memenuhi INDOGAP			DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

	Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Kinerja Program		Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
					Indikator (*Out Come*)	Target		
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*	*8*
				Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola Oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Pembudidaya Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola Oleh Pemerintah Daerah Provinsi (pembudidaya)	100		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
				Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah pembudidaya yang difasilitasi dalam penerbitan Sertifikasi tanah pembudidaya ikan (pembudidaya)	30		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			3	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persentase Pelaku Usaha yang Taat Aturan (%)	75	900.000.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
				Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah pelaku usaha kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil yang diawasi (pelaku usaha)	0		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
				Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah pelaku usaha Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 mil yang diawasi (pelaku usaha)	0		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
				Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah pelaku usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 mil yang diawasi (pelaku usaha)	0		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
				Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah pelaku usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 mil yang diawasi (pelaku usaha)	0		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

	Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja Program		Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
				Indikator (*Out Come*)	Target		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
			Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu)Daerah Provinsi	Jumlah pelaku usaha kelautan dan perikanan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu)Daerah Provinsi yang diawasi (pelaku usaha)			DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya	Jumlah pelaku usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya yang diawasi (pelaku usaha)	0		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Pengawasan Usaha Perikanana Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danua, Waduk, Rawa, dan Genaangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten / Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Jumlah pelaku usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten / Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya yang diawasi (pelaku usaha)	0		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah pelaku usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang diawasi (pelaku usaha)	0		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

	Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Kinerja Program		Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
					Indikator (*Out Come*)	Target		
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*	*8*
		Peningkatan Promosi, koordinasi, kerjasama, dan investasi dalam peningkatan produksi dan nilai Tambah hasil produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya	1	Program Pengembangan Usaha Pengolahan Hasil Perikanan	Pertumbuhan Produksi Usaha Pengolahan Hasil Perikanan (%)	3,30%	1.000.000.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
				Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (rekomendasi)	25		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
				Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1. Tersedianya SOP Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (Dokumen)	1		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					2. Tersosialisasinya SOP Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (Kegiatan)	1		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
				Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan untuk mendapatkan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas daerah Kab/Kota dalam 1 daerah Provinsi (rekomendasi)	25		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

	Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja Program		Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
				Indikator (*Out Come*)	Target		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
			Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1. Jumlah Produk Hasil Kelautan dan Perikanan serta pelaku usaha kelautan dan perikanan yang di informasikan atau dipromosikan (Kegiatan)	3		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
				2. Jumlah pasar hasil perikanan se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dilakukan pembinaan dan yang didata (Pasar Hasil Perikanan)	7		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
				3. Jumlah Data Informasi Pasar Hasil Perikanan se Provini Kepulauan Bangka Belitung (data)	7		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
				4. Jumlah Promosi serta Kerjasama Pemasaran Hasil Perikanan yang dilakukan (Kegiatan)	56		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
				5. Pengembangan dan Pembinaan Promosi serta Kerjasama Pemasaran Hasil Perikanan (Kegiatan)	4		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
				6. Jumlah data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi (dokumen)	1		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Persentase UPI yang dibina memenuhi standar mutu dan keamanan pangan (persentase)	90		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

	Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja Program		Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
				Indikator (*Out Come*)	Target		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
			Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	1. Jumlah pelaku usaha yang dibina dalam penerapan persyaratan/standar usaha pengolahan hasil perikanan skala menengah dan besar (pelaku usaha)	15		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
				2. Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan untuk mendapatkan SKP bagi usaha pengolahan hasil perikanan skala menengah besar atau lintas daerah Kab/Kota dalam 1 daerah Provinsi (rekomendasi)	5		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
				3. Jumlah pelaksanaan Bimbingan dalam penerapan standar mutu dan keamanan pangan pada UPI (Kegiatan)	1		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
				4. Jumlah rekomendasi penerapan standar mutu dan keamanan pangan pada UPI (rekomendasi)			DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman Untuk dikonsumsi Atau digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah sampel di uji dlm rangka pelaksanaan bimbingan, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi thd mutu dan keamanan hasil perikanan (jml sampel)	750		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
				Jumlah Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Verifikasi dalam penerapan standar mutu dan keamanan pangan di pelaku usaha hasil perikanan (Kegiatan)	12		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

	Prioritas Pembangunan Daerah		Strategi		Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja Program		Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
						Indikator (*Out Come*)	Target		
1	*2*		*3*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
					Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah fasilitas yang tersedia dalam rangka mendukung ketersediaan bahan baku usaha pengolahan hasil perikanan	1		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Jasa Konsultansi Perencanaan (DED) Cold Storage yang tersedia untuk menampung serta menjaga kualitas bahan baku usaha pengolahan perikanan (DED/ Kegiatan)	1		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
						Jumlah Cold Storage yang tersedia untuk menampung serta menjaga kualitas bahan baku usaha pengolahan perikanan (Coldstorage)	1		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
						Jumlah Pemantauan Pasokan, Stok dan Harga Ikan Bulanan (bulan)	12		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
						Jumlah Laporan Pemantauan Kebutuhan dan Ketersediaan Ikan Menjelang HBKN (laporan)	2		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	**PENGEMBANGAN PARIWISATA**							23.995.646.784	
		1	Peningkatan peran serta masyarakat dan kelembagaan pariwisata serta Pengembangan ekonomi kreatif	1	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak kekayaan Intelektual	Persentase kabupaten/kota yang terindentifikasi untuk pengembangan kabupaten/kota kreatif, ruang kreasi dan jaringan orang kreatif	42,85%	150.000.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
						Persentase produk kreatif yang potensial untuk perluasan pasar	1,94%	640.000.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

	Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja Program		Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
				Indikator (*Out Come*)	Target		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
			Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Jumlah kabupaten/kota yang terindentifikasi untuk pengembangan sebagai kabupaten/kota kreatif	3 kab/kota		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
				Jumlah produk kreatif yang potensial perluasan pasar	35 produk		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
				Jumlah peserta yang mengikuti koordinasi dan sinkronisasi pengembngan ruang kreasi dan ruang kreatif	70 orang		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
				Jumlah unit usaha kreatif pemula yang terindentifikasi potensial dalam usaha	35 unit usaha kreatif pemula		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
			Sub Kegiatan 1. Layanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Jumlah kabupaten/kota yang terindentifikasi untuk pengembangan kabupaten/kota kreatif	3 kab/kota		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
			Sub Kegiatan 2. Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar ekspor maupun Pasar Domestik Kota Kreatif	Jumlah produk kreatif yang potensial untuk perluasan pasar	35 produk		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
			Sub Kegiatan 3. Koodinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Jumlah peserta yang mengikuti koordinasi dan sinkronisasi pengembangan ruang kreasi dan jaringan orang kreatif	35 orang		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
			Sub Kegiatan 4. Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Ke Pasar	Jumlah peserta yang mengikuti koordinasi dan sinkronisasi peningkatan usaha kreatif	35 orang		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

	Prioritas Pembangunan Daerah		Strategi		Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja Program		Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
						Indikator (*Out Come*)	Target		
1	*2*		*3*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
					Sub Kegiatan 5. Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama Bagi Usaha Pemula	Jumlah unit usaha kreatif pemula yang mengikuti koordinasi dan sinkronisasi	35 unit usaha kreatif pemula		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
				2	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Pangsa Pasar Wisatawan Daerah	9,7%	5.952.994.784	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
					Kegiatan 1. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah media promosi pariwisata	10 media		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
					Sub Kegiatan 1.Penguatan Promosi Melaui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah media promosi pariwisata	10 Media		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
					Sub Kegiatan 2. Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Provinsi	Jumlah fasilitasi promosi pariwisata	25 event		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
					Sub Kegiatan 3. Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah data dan sebaran informasi pariwisata	5 media		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
					Sub Kegiatan 4. Peningkatan Kerjasama dan Kemitraaan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah kerjasama dan kemitraan pariwisata	5 kerjasama		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		2	Peningkatan insfrastruktur, sarana dan prasarana destinasi pariwisata	1	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Destinasi Pariwisata yang memenuhi standar	70%	7.600.000.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

	Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja Program		Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
				Indikator (*Out Come*)	Target		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
			Kegiatan 1. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Daya Tarik wisata provinsi yang di kelola	27 DTW		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
			Sub Kegiatan 1. Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah dokumen rencana dan rancangan daya tarik wisata unggulan	5 dokumen		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
			Sub Kegiatan 2. Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah daya tarik unggulan yang dikembangkan	5 DTW		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
			Kegiatan 2. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Kawasan Strategis Provinsi yang di Kelola	3 kawasan		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
			Sub Kegiatan 1. Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah dokumen rencana kawasan strategis pariwisata provinsi yang ditetapkan	7 dokumen		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
			Sub Kegiatan 2. Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah kawasan strategis pariwisata provinsi yang dikembangkan	2 kawasan		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
			Sub Kegiatan 3. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah sarana prasarana yang dikelola	68 sarpras		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
			Kegiatan 3. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi yang dikelola	2 destinasi		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
			Sub Kegiatan 1. Perencanan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah forum perencanaan destinasi pariwisata provinsi yang dilaksanakan	7 dokumen		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

	Prioritas Pembangunan Daerah		Strategi		Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja Program		Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
						Indikator (*Out Come*)	Target		
1	*2*		*3*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
					Sub Kegiatan 2. Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah pengelola kepariwisataan yang ditingkatkan kapasitasnya	160 orang		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
					Sub Kegiatan 3. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi destinasi pariwisata provinsi	2 laporan		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
					Sub Kegiatan 4. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	160 orang		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
					Sub Kegiatan 5. Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Desa wisata yang dibina	2 desa		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
					Kegiatan 4. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Daftar Usaha Pariwisata	1 kawasan		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
					Sub Kegiatan 1. Pengelolaan Investasi Pariwisata	Jumlah Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata yang difasilitasi	1 kawasan		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		3	Peningkatan Kualitas Sumber daya Manusia pariwisata	1	Program Pembinaan Sejarah	Persentase Pembinaan Sejarah	35%	715.000.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
					Kegiatan 1. Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah sejarah lokal yang diberdayakan	30 sejarah		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
					Sub Kegiatan 1. Pemberdayaan Sumber Daya manusia dan Lembaga sejarah Lokal Provinsi	Jumlah SDM dan lembaga sejarah yang diberdayakan	75 orang		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

	Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Kinerja Program		Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
					Indikator (*Out Come*)	Target		
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*	*8*
				Sub Kegiatan 2. Penyediaan Sarana dan Prasaraana Pembinaan Sejarah	Jumlah sarana dan prasarana pembinaan sejarah yang disediakan	1 unit		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
				Sub Kegiatan 3. Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah data dan informasi sejarah yang dapat diakses oleh masyarakat	2 akses		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
			2	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase SDM pariwisata dan ekonomi kreatif terlatih dan terserfikasi	29,14%	1.795.000.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
					Persentase Kemitraan Pariwisata yang terbentuk	82,85%	325.000.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
					Persentase Assesor bidang yang terlatih	50%	180.000.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
				Kegiatan 1. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah SDM pariwisata dan ekonomi kreatif terlatih dan terserfikasi	1.735 orang		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
					Jumlah Assesor pariwisata terlatih dan terserfikasi	100 orag		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
					Jumlah kemitraan yang terbentuk	3 kemitraan		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
				Sub Kegiatan 1. Pengembangan Kompensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah SDM ekraf yang terlatih	120 orang		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
					Jumlah SDM Ekonomi kreatif yang terserfikasi	130 orang		DINAS KEBUDAYAAN DAN

	Prioritas Pembangunan Daerah		Strategi		Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja Program		Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
						Indikator (*Out Come*)	Target		
1	*2*		*3*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
									PARIWISATA
					Sub Kegiatan 2. Peningkatan Peran serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah peserta yang telah mengikuti peningkatan pengembangan kemitraan pariwisata	124 orang		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
					Sub Kegiatan 3. Pelatihan Berbasis Kompetensi Berbasi Homestay dan Pemandu Wisata (Toutr Guide) Tingkat Lanjutan	Jumlah SDM bidang Homestay dan Tour guide yang terlatih	240 orang		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
					Sub Kegiatan 4. Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah SDM bidang pariwisata terserfikasi	120 orang		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
					Sub Kegiatan 5. Pelatihan Assesor Kompetensi/Worksplace Aessesor (WPA)	Jumlah SDM bidang Assesor Kompetensi Workplace assesor terlatih	50 orang		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
					Sub Kegiatan 6. Pelatihan Perpanjangan Lisenci Assesor (Recogntion Current Competencies (RCC)	Jumlah Assesor/RCC (Recognition Current Competencies) yang mengikuti pelatihan perpanjangan lisensi	50 orang		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
					Sub Kegiatan 7. Fasilitasi Pengembangan Kopetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM ekonomi kreatif yang terlatih	120 orang		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		4	Peningkatan Peran serta kepemudaan dan olah raga serta kebudayaan dalam pengembangan pariwisata	1	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Kebudayaan yang dikelola	55%	1.240.250.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
					Kegiatan 1. Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1	Jumlah budaya melayu dilestarikan	2 jenis		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

	Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja Program		Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
				Indikator (*Out Come*)	Target		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
			(satu) Daerah Provinsi				
			Sub Kegiatan 1. Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	2 jenis		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
			Sub Kegiatan 2. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan	Jumlah SDM,lembaga dan pranata yang dibina	200 orang		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
			Kegiatan 2. Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah tradisi budaya yang dilestarikan	30 tradisi		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
			Sub Kegiatan 1. Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah tradisi budaya yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	30 tradisi		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
			Sub Kegiatan 2. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Tradisional	Jumlah SDM, lembaga dan pranata tradisi yang dibina	40 orang		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
			Sub Kegiatan 3. Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah pihak yang diberikan penghargaan dalam pemajuan kebudayaan	5 penghargaan		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
			Kegiatan 3. Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah lembaga adat yang dibina	1 lembaga		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

	Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Kinerja Program		Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
					Indikator (*Out Come*)	Target		
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*	*8*
				Sub Kegiatan 1. Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah objek lembaga adat yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	1 objek		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
				Sub Kegiatan 2. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Adat	Jumlah lembaga dan pranata adat yang dibina	1 sarana		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
				Sub Kegiatan 3. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah saran dan prasana adat yang disediakan	1 unit		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
			2	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan	55%	3.497.402.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
				Kegiatan 1. Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kesenian tradisional yang dibina	30 kesenian		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
				Sub Kegiatan 1. Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumberdaya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah SDM kesenian tradisional yang dilatih	210 orang		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
					Jumlah SDM Rampak gendang, marching band dan gita bahana yang dibina	371 orang		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
				Sub Kegiatan 2. Standarisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah SDM kesenian tradisional yang disertifikasi	42 orang		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
				Sub Kegiatan 3. Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah lembaga kesenian yang dibina	30 lembaga		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
					Jumlah festival kesenian	45 festival		DINAS KEBUDAYAAN

	Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Kinerja Program		Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
					Indikator (*Out Come*)	Target		
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*	*8*
					tradisional			DAN PARIWISATA
					Jumlah pengiriman misi kesenian	5 orang/grou p		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
			3	Program Pelestarian dan Pengelolaan Budaya	Persentase cagar budaya dilestarikan dan dikelola	50%	1.900.000.000	
				Kegiatan 1. Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi				
				Sub Kegiatan 1. Register Cagar Budaya				
				Kegiatan 2. Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi				
				Sub Kegiatan . Pencegahan dan Penanggulangan dari Kerusakan, Kehancuran atau Kemusnahan Cagar Budaya				
				Sub Kegiatan 2. Peningkatan Potensi Nilai, Informasi dan Promosi Cagar Budaya srta Pemanfaatannya				
				Sub Kegiatan 3. Pendayagunaan Cagar Budaya				
				Sub Kegiatan 4. Peningkatan Mutu dan Kapasitas Tenaga Cagar Budaya				
				Kegiatan 3. Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Provinsi				
				Sub Kegiatan 1. Register Cagar Budaya				
4	**PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT**						**16.558.816.100**	

	Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi		Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Kinerja Program		Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
						Indikator (*Out Come*)	Target		
1	*2*	*3*		*4*		*5*	*6*	*7*	*8*
		1	Peningkatan kesempatan kerja	1	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	1. Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan pelatihan berdasarkan klaster kompetensi		1.217.619.938	DISNAKER
						2. Persentase Pelatihan Kerjasama dengan sektor swasta dan instansi pemerintah lainnya untuk penyedia instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja			DISNAKER
						3. Meningkatnya Kompetensi dan Produktivitas			DISNAKER
					Kegiatan 1: Pelaksanaan Pelatihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kerja Sertifikasi Kompetensi dan Mengikuti Pemagangan	484 orang		DISNAKER
					Kegiatan 2: Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah UMKM dan perusahaan menengah yang produktif	15 UMKM		DISNAKER
				2	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenga Kerja Menurunnya Angka Pencari Kerja		250.775.000	DISNAKER
					Kegiatan 1: Pelayanan Antar kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Pelayanan Antar Kerja	100 Orang		DISNAKER
					Kegiatan 2: Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Data Pencari Kerja	1 Kegiatan		DISNAKER
					Kegiatan 2: Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah RPTK Perpanjangan Yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA dan Lokasi Kerja dalam 1(satu) Daerah Provinsi			DISNAKER

	Prioritas Pembangunan Daerah		Strategi		Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja Program		Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
						Indikator (*Out Come*)	Target		
1	*2*		*3*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
		2	Peningkatkan peran KUKM dalam meningkatkan kesempatan kerja	1	Program Pelayanan Izin Simpan Pinjam	Persentase rekomendasi izin Usaha Simpan Pinjam yang dikeluarkan	20%	226.650.000	DINAS KUKM
					Kegiatan 1: Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah rekomendasi /Verifikasi ijin Usaha yang dikeluarkan	5 Koperasi		DINAS KUKM
					Sub Kegiatan 1: Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah rekomendasi Izin Usaha Simpan Pinjam	5 Koperasi		DINAS KUKM
						Jumlah Peserta Diseminasi Pembentukan Koperasi	210 Orang		DINAS KUKM
						Jumlah Akta Notaris bagi Koperasi	14 Koperasi		DINAS KUKM
					Kegiatan 2: Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				DINAS KUKM

	Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Kinerja Program		Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
					Indikator (*Out Come*)	Target		
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*	*8*
				Sub Kegiatan 1: Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				DINAS KUKM
				Sub Kegiatan 2: Sistem Pelayanan perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				DINAS KUKM
			2	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	70%	367.662.000	DINAS KUKM
				Kegiatan 1: Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang diawasi	50 Koperasi		DINAS KUKM
					Jumlah Koperasi yang melaksanakan RAT	20 Koperasi		DINAS KUKM
					Jumlah Koperasi yang membayar Pajak	10 Koperasi		DINAS KUKM
					Jumlah Koperasi yang mampu menyusun Laporan Keuangan	50 Koperasi		DINAS KUKM
					Jumlah Koperasi yang menerapkan Sistem Pengendalian Intern (SPI)	10 Koperasi		DINAS KUKM
					Jumlah Koperasi yang dibubarkan	5 Koperasi		DINAS KUKM

	Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja Program		Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
				Indikator (*Out Come*)	Target		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
			Sub Kegiatan 1: Meningkatkan Akuntabilitas, kepercayaan , Kepatuhan Kesinambungan, dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan Masyarakat	Jumlah Peserta yang mengikuti Bimtek Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT)	40 Orang		DINAS KUKM
				Jumlah Peserta Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Koperasi	60 Orang		DINAS KUKM
				Jumlah Peserta yang mengikuti Bimtek Sistem Pengendalian Intern (SPI)	50 Orang		DINAS KUKM
			Sub Kegiatan 2: Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-undangan dan terbentuknya Koperasi yang kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh serta akuntabel	Jumlah Koperasi yang mematuhi Peraturan Perundang-undangan	50 Koperasi		DINAS KUKM
				Jumlah Koperasi yang akan dibubarkan	5 Koperasi		DINAS KUKM
			Kegiatan 2: Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				DINAS KUKM
			Sub Kegiatan 1: Meningkatkan Akuntabilitas, kepercayaan , Kepatuhan Kesinambungan, dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan Masyarakat				DINAS KUKM

	Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Kinerja Program		Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
					Indikator (*Out Come*)	Target		
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*	*8*
			3	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	Persentase Koperasi berkualitas	50%	182.797.500	DINAS KUKM
				Kegiatan 1: Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Sehat	5 Koperasi		DINAS KUKM
				Sub Kegiatan 1: Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	Jumlah Koperasi yang dinilai kesehatannya	10 Koperasi		DINAS KUKM
				Sub Kegiatan 2 ; Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi	Jumlah Koperasi berprestasi	5 Koperasi		DINAS KUKM
			4	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase SDM Koperasi yang terlatih	30%	450.000.000	DINAS KUKM
				Kegiatan 1: Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah pengurus dan anggota Koperasi yang tersertifikasi pelatihan	1000 peserta		DINAS KUKM
					Jumlah Pendamping/ Penyuluh/ Konsultan PLUT yang diberdayakan	70 Orang		DINAS KUKM
					Jumlah Kajian Mutu Pelatihan yang tersedia	1 Dokumen		DINAS KUKM
				Sub Kegiatan 1: Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah Anggota Koperasi yang dilatih	1000 peserta		DINAS KUKM

	Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Kinerja Program		Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
					Indikator (*Out Come*)	Target		
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*	*8*
					Jumlah pembina/ Pendamping/ Penyuluh/ Konsultan PLUT yang mengikuti Bimbingan teknis peningkatan kapasitas	80 Orang		DINAS KUKM
					Jumlah Kajian Mutu Pelatihan yang disusun	1 Dokumen		DINAS KUKM
					Operasional Balatkop	1 Tahun		DINAS KUKM
			5	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi yang diberdayakan	20%	755.148.000	DINAS KUKM
				Kegiatan 1: Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang usahanya meningkat	10 Koperasi		DINAS KUKM
					Jumlah Koperasi yang mendapatkan akses Pembiayaan	10 Koperasi		DINAS KUKM
					Jumlah Koperasi yang bermitra	10 Koperasi		DINAS KUKM
				Sub Kegiatan 1: Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Peserta yang mengikuti Fasilitasi Akses Pembiayaan	100 Orang		DINAS KUKM
				Sub Kegiatan 2: Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Koperasi yang mendapatkan Akses Pasar (Pameran/Promosi Koperasi)	5 Koperasi		DINAS KUKM
					Jumlah Peserta yang mendapatkan fasilitasi Kemitraan	10 koperasi		DINAS KUKM
					Jumlah Peserta yang mendapatkan Fasilitasi Pengembangan Usaha	120 Orang		DINAS KUKM

	Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Kinerja Program		Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
					Indikator (*Out Come*)	Target		
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*	*8*
			6	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UKM)	Persentase UMKM yang diberdayakan	1%	2.217.568.624	DINAS KUKM
				Kegiatan 1: Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Usaha Kecil yang melakukan penguatan kelembagaan	1100 Orang		DINAS KUKM
					Jumlah UMKM yang bermitra	6 Orang		DINAS KUKM
				Sub Kegiatan 1: Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Wirausaha Pemula yang mengikuti Magang	100 Orang		DINAS KUKM
					Jumlah Peserta yang mengikuti Gerakan Kewirausahaan	1000 Orang		DINAS KUKM
					Jumlah Database UMKM	1 Dokumen		DINAS KUKM
					Jumlah Peserta Forum Koordinasi UMKM	100 Orang		DINAS KUKM
					Jumlah UMKM yang mendapatkan fasilitasi Kemitraan	30 Orang		DINAS KUKM
			7	Program Pengembangan UKM	Persentase UMKM yang dikembangkan	1%	2.203.342.000	DINAS KUKM

	Prioritas Pembangunan Daerah		Strategi		Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja Program		Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
						Indikator (*Out Come*)	Target		
1	*2*		*3*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
					Kegiatan 1: Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Jumlah UMKM yang meningkat volume usahanya	100 Orang		DINAS KUKM
						Jumlah Produk yang tersertifikasi dan terstandarisasi	500 Orang		DINAS KUKM
						Jumlah UMKM yang mendapatkan akses pembiayaan	1000 Orang		DINAS KUKM
					Sub Kegiatan 1: Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi	Jumlah UMKM yang mengikuti Diseminasi Standarisasi dan Sertifikasi Produk	1000 Orang		DINAS KUKM
						Jumlah UMKM yang mendapatkan Bimtek Peningkatan Kapasitas Usaha	420 Orang		DINAS KUKM
						Jumlah UMKM yang mengikuti Promosi dan Pemasaran Produk	100 Orang		DINAS KUKM
						Jumlah UMKM yang mendapatkan Fasilitasi Pembiayaan Usaha	2000 Orang		DINAS KUKM
		3	Peningkatan Promosi, koordinasi, kerjasama, dan investasi dalam peningkatan lapangan pekerjaan	1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Kebijakan Daerah Yang Mendukung Investasi	1 Kebijakan	472.751.000	DINAS PMPTSP
					Kegiatan 1: Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif di bidang Penanaman Modal yan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah UKM Yang Bermitra Dengan Investor	2 UKM		DINAS PMPTSP

	Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Kinerja Program		Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
					Indikator (*Out Come*)	Target		
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*	*8*
				Sub Kegiatan 2: Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah UKM Yang Memenuhi Syarat Kemitraan	8 UKM		DINAS PMPTSP
				Kegiatan 2: Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah Peta Potensi Investasi Provinsi	1 Peta		DINAS PMPTSP
				Sub Kegiatan 1: Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Evaluasi RUPM	1 Dokumen		DINAS PMPTSP
					Jumlah Peta Potensi Investasi	1 Dokumen		DINAS PMPTSP
			2	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Realisasi Investasi	1,9 TRILYUN	393.675.000	DINAS PMPTSP
				Kegiatan 1: Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan Promosi Yang Terlaksana	4 Pameran Promosi		DINAS PMPTSP
				Sub Kegiatan 1: Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Laporan Strategi Promosi Penanaman Modal	1 Laporan		DINAS PMPTSP
				Sub Kegiatan 2: Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Promosi Penanaman Modal Yang Terlaksana	4 Pameran Promosi		DINAS PMPTSP
			3	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sesuai SOP	100,00%	419.800.000	DINAS PMPTSP
				Kegiatan 1: Penanaman Modal Yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Rapat Forum PTSP se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 Laporan		DINAS PMPTSP

	Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja Program		Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
				Indikator (*Out Come*)	Target		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
			Sub Kegiatan 1: Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Forum	50 Peserta (35 Laki-Laki, 15 Perempuan)		DINAS PMPTSP
				Terlaksananya Rapat Koordinasi Forum PTSP se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 Rakor Forum		DINAS PMPTSP
			Kegiatan 2: Penanaman Modal Yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang Dikeluarkan Sesuai dengan SOP	1200 Izin		DINAS PMPTSP
			Sub Kegiatan 2: Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Yang Terintegrasi OSS	1200 Izin		DINAS PMPTSP
			Sub Kegiatan 3: Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	2 Laporan SKM		DINAS PMPTSP
				Jumlah Pengaduan dan Layanan Konsultasi	12 Pengaduan		DINAS PMPTSP
			4 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Meningkatnya persentase capaian realisasi investasi	15,00%	319.246.800	DINAS PMPTSP
			Kegiatan 1: Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase realisasi pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	50,00%		DINAS PMPTSP

	Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Kinerja Program		Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
					Indikator (*Out Come*)	Target		
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*	*8*
				Sub Kegiatan 1: Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang akan dilakukan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal	60 perusahaan		DINAS PMPTSP
				Sub Kegiatan 2: Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan dan Aparatur yang mengikuti Koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan PM	110 Perusahaan dan 40 aparatur		DINAS PMPTSP
				Sub Kegiatan 3: Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah kasus/permasalahan yang akan dilakukan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal	6 kasus / permasalahan		DINAS PMPTSP
			5	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP	100,00%	71.886.000	DINAS PMPTSP
				Kegiatan 1: Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang Terintegrasi	1 dokumen		DINAS PMPTSP
				Sub Kegiatan 1: Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang Terintegrasi	1 dokumen		DINAS PMPTSP

	Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Kinerja Program		Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
					Indikator (*Out Come*)	Target		
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*	*8*
		Peningkatan Kompetensi, hubungan industrial dan keselamatan tenaga kerja	1	Program Hubungan Industrial	Persentase perusahaan yang telah memiliki sarana hubungan industrial		454.685.000	DISNAKER
				Kegiatan 1: Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Persentase Perusahaan yang membuat Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama			DISNAKER
				Kegiatan 2: Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Permasalahan Hubungan Industrial yang Terselesaikan	55 Perusahaan		DISNAKER
				Kegiatan 3: Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	persentase Pertumbuhan kenaikan UMP dan Pembahasan masalah upah			DISNAKER
			2	Program Pengawasan Ketenagakerjaan			498.000.000	DISNAKER
				Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	persentase pengawasan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan			DISNAKER
		Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin	1	Program Pemberdayaan Sosial	Prosentase PMKS/PSKS yg terberdayakan	50%	500.000.000	DINAS SOSIAL

	Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Kinerja Program		Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
					Indikator (*Out Come*)	Target		
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*	*8*
				Kegiatan Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penyelenggara Dunia Usaha / lembaga / masyarakat yang diterbitkan Izin dan berpartispasi menyelenggarakan Pengumpulan Uang/Barang dan Undian Gratis berhadiah sesuai dengan aturan yang berlaku.	2 lembaga		DINAS SOSIAL
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah penyelenggara; Dunia Usaha / lembaga / masyarakat yang berpartispasi menyelenggarakan Pengumpulan Uang/Barang dan Undian Gratis berhadiah sesuai dengan aturan yang berlaku.	2 Penyelenggara; lembaga/ dunia usaha/masyarakat		DINAS SOSIAL
				Kegiatan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Jumlah PSKS yang diberdayakan	203 orang		DINAS SOSIAL
				Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Kelembagaan masyarakat yang di tingkatkan kemampuannya	203 orang		DINAS SOSIAL
			3	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Prosentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang di ditangani	50%	75.000.000	DINAS SOSIAL
				Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi yang dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	7 Orang		DINAS SOSIAL
					Jumlah Pemulangan Warga Negar Migran Korban Tindak Kekerasan Ke Daerah Kabupaten/ Kota Asal yang difasilitasi	7 Orang		DINAS SOSIAL

	Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Kinerja Program		Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
					Indikator (*Out Come*)	Target		
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*	*8*
			4	Program Rehabilitasi Sosial	Prosentase PMKS yang di Rehabilitasi sosial di Dalam Panti Non Pemerintah	50%	800.000.000	DINAS SOSIAL
				Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Jumlah penyandang disabilitasi yang direhab sosial di Dalam Panti Non Pemerintah	20 orang		DINAS SOSIAL
				Penyediaan Alat Bantu	Jumlah disabilitas dalam panti non pemerintah yang mendapatkan alat bantu	5 Orang		DINAS SOSIAL
				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	1. Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial dalam panti non pemerintah	10 Orang		DINAS SOSIAL
					2. Jumlah tenaga profesional pekerja sosial yang memberi bimbingan sosial disabilitas di dalam panti non pemerintah yang mendapatkan peningkatan kapasitas	5 Orang		DINAS SOSIAL
					3. Jumlah panti disabilitas non pemerintah yang mendapatkan bimbingan pelayanan kepada penyandang disabilitas	1 Panti		DINAS SOSIAL
				Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah disabilitas terlantar yang mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga dalam panti non pemerintah	10 Orang		DINAS SOSIAL
				Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	Jumlah lanjut usia terlantar yang direhab sosial di Dalam Panti Non Pemerintah			DINAS SOSIAL
				Penyediaan Alat Bantu	Jumlah lanjut usia dalam panti yang mendapatkan alat bantu	5 Orang		DINAS SOSIAL
				Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti Sosial	Jumlah lanjut usia yang mendapatkan perbekalan kesehatan di dalam panti	10 Orang		DINAS SOSIAL

	Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja Program		Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
				Indikator (*Out Come*)	Target		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	1. Jumlah lanjut usia yang mendapatkan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	20 Orang		DINAS SOSIAL
				2. Jumlah tenaga profesional pekerja sosial yang memberi bimbingan sosial lanjut usia di dalam panti yang mendapatkan peningkatan kapasitas	5 Orang		DINAS SOSIAL
				3. Jumlah panti lanjut usia yang mendapatkan bimbingan pelayanan kepada lanjut usia	1 Panti		DINAS SOSIAL
			Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	Jumlah anak terlantar yang direhab sosial di Dalam Panti Non Pemerintah	10 orang		DINAS SOSIAL
			Pengasuhan	Jumlah Pengasuh anak di dalam panti non pemerintah yang mendapat bimtek pembekalan standar nasional pengasuhan anak	27 orang		DINAS SOSIAL
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah tenaga pelayanan sosial didalam panti non pemerintah yang mendapat bimbingan keterampilan psikososial	25 orang		DINAS SOSIAL
			Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah anak di dalam panti non pemerintah mendapatkan fasilitasi pembuatan akta kelahiran, NIK dan KIA	10 orang		DINAS SOSIAL
			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah klien anak di dalam panti non pemerintah yang mendapat akses layanan pendidikan	20 orang		DINAS SOSIAL
				Jumlah klien anak di dalam panti non pemerintah yang mendapat akses layanan kesehatan dasar	20 orang		DINAS SOSIAL

	Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja Program		Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
				Indikator (*Out Come*)	Target		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah klien anak di dalam panti non pemerintah yang mendapat pelayanan penelusuran keluarga	10 orang		DINAS SOSIAL
			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah anak di dalam panti non pemerintah yang mendapat pelayanan reunifikasi keluarga	10 orang		DINAS SOSIAL
			Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Penganti	Jumlah anak yang mendapat akses layanan pengasuhan kepada keluarga pengganti	10 orang		DINAS SOSIAL
			Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti	Jumlah Gelandangan dan pengemis yang direhab sosial	8 orang		DINAS SOSIAL
			Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumlah gelandangan dan pengemis yang diberikan bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	8 orang		DINAS SOSIAL
			Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	Jumlah gelandangan dan pengemis yang difasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	8 orang		DINAS SOSIAL
			Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapat akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	8 orang		DINAS SOSIAL
			Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah gelandangan dan pengemis yang dipulangkan ke daerah asal	8 orang		DINAS SOSIAL
			Kegiatan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang di rehab sosial	10 orang		DINAS SOSIAL

	Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Kinerja Program		Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
					Indikator (*Out Come*)	Target		
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*	*8*
				Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumlah PMKS lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang diberikan bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	10 orang		DINAS SOSIAL
				Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	Jumlah PMKS lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang difasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	10 orang		DINAS SOSIAL
				Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah PMKS lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapat akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	10 orang		DINAS SOSIAL
				Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah PMKS lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang dipulangkan ke daerah asal	10 orang		DINAS SOSIAL
			5	Program Rehabilitasi Sosial	Prosentase PMKS yang di Rehabilitasi sosial di PSBL	50%	656.550.000	DINAS SOSIAL
				Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Jumlah penyandang disabilitasi yang direhab sosial dalam Panti Pemerintah	20 orang		DINAS SOSIAL
				Penyediaan Permakanan	Jumlah kebutuhan permakanan yang disediakan dalam Panti Pemerintah	20 orang		DINAS SOSIAL
				Penyediaan Sandang	Jumlah kebutuhan sandang yang disediakan dalam Panti Pemerintah	20 orang		DINAS SOSIAL
				Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan dalam Panti Pemerintah	20 orang		DINAS SOSIAL

	Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Kinerja Program		Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
					Indikator (*Out Come*)	Target		
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*	*8*
				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah sarana prasarana penunjang Kegiatan Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial yang disediakan dalam Panti Pemerintah	20 orang		DINAS SOSIAL
				Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Jasa Tenaga Teknis Lainnya yang disediakan dalam panti pemerintah	5 orang		DINAS SOSIAL
					Jumlah Jasa Tenaga Perawat yang disediakan panti pemerintah	4 orang		DINAS SOSIAL
					Jumlah Penerima Manfaat yang mendapat akses ke layanan kesehatan dasar dalam panti pemerintah	20 orang		DINAS SOSIAL
			7	Program Rehabilitasi Sosial	Prosentase PMKS yang di Rehabilitasi sosial didalam panti pemerintah	50%	98.900.000	DINAS SOSIAL
				Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	Jumlah anak terlantar yang direhab sosial didalam panti pemerintah	30 klien		DINAS SOSIAL
				Penyediaan Sandang	Jumlah Sandang yang disediakan dalam panti pemerintah	30 lien		DINAS SOSIAL
				Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Jumlah klien yang mendapatkan layanan Perbekalan Kesehatan yang disediakan dalam panti pemerintah	30klien		DINAS SOSIAL
				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah klien yang mendapatkan layanan bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial yang disediakan dalam panti pemerintah	30klien		DINAS SOSIAL
				Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	Jumlah klien yang mendapatkan bimbingan Kegiatan aktivitas hidup sehari-hari yang disediakan dalam panti	30klien		DINAS SOSIAL

	Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Kinerja Program		Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
					Indikator (*Out Come*)	Target		
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*	*8*
					pemerintah			
				Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah klien yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga dalam panti pemerintah	30klien		DINAS SOSIAL
				Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	Jumlah lanjut usia terlantar yang direhab sosial didalam panti pemerintah	10 klien		DINAS SOSIAL
				Penyediaan Sandang	Jumlah sandang yang disediakan dalam panti pemerintah	10 klien		DINAS SOSIAL
				Penyediaan Alat Bantu	jumlah alat bantu yang disediakan dalam panti pemerintah	10 klien		DINAS SOSIAL
				Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti Sosial	Jumlah klien yang mendapatkan layanan Perbekalan Kesehatan yang disediakan dalam panti pemerintah	10 klien		DINAS SOSIAL
				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah klien yang mendapatkan layanan Bimbingan fisik, mental Spiritual dan Sosial dalam panti pemerintah	10 klien		DINAS SOSIAL
				Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah klien yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga dalam panti pemerintah	10 klien		DINAS SOSIAL
				Pemulasaraan	Jumlah klien yang meninggal dunia dalam panti pemerintah	10 klien		DINAS SOSIAL
			10	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Prosentase PMKSyang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	50,00 %	1.276.759.238	DINAS SOSIAL
				Kegiatan Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Jumlah anak yang mendapatkan perlindungan sosial	5 orang		DINAS SOSIAL
				Pengangkatan Anak antar WNI	Jumlah anak yang di angkat (adopsi) dan memperoleh perlindungan sosial	5 oarang		DINAS SOSIAL

	Prioritas Pembangunan Daerah		Strategi		Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja Program		Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
						Indikator (*Out Come*)	Target		
1	*2*		*3*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
					Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Jumlah calon orang tua angkat (COTA) yang mendapatkan perizinan	5 oarang		DINAS SOSIAL
					Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah data Fakir Miskin yang dikelola dengan baik	80.000 KK		DINAS SOSIAL
					Pendataan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang didata/di-update	7 kab/kota		DINAS SOSIAL
					Pengelolaan Data Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang dikelola	7 kab/kota		DINAS SOSIAL
						Jumlah Fakir Miskin yang ditangani	170 KK		DINAS SOSIAL
						Jumlah Keluarga Miskin yang diberikan Pendampingan Jaminan Sosial	43749 KK		DINAS SOSIAL
		4	Peningkatan pendapatan masyarakat desa	1	Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tingkat Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa		1.600.000.000	DINAS PEMDES
					Kegiatan Penataan Desa	Jumlah Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa yang tersusun	309 Desa		DINAS PEMDES
					Sub Kegiatan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan	Jumlah desa dan kelurahan yang dievaluasi	6 Desa/ 6 Kelurahan		DINAS PEMDES
					Sub Kegiatan Pembinaan Profil Desa dan Kelurahan	Jumlah desa dan kelurahan yang dibina profilnya	7 Kabupaten		DINAS PEMDES
					Sub Kegiatan Penataan Kewenangan Desa	Jumlahdesa yang dibina untuk menyusun perdes tentang kewenangan desa	6 Kabupaten		DINAS PEMDES
					Sub Kegiatan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa	Jumlahdesa yang dibina bantuan keuangannya	309 Desa		DINAS PEMDES

	Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Kinerja Program		Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
					Indikator (*Out Come*)	Target		
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*	*8*
				Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Jumlah aparatur desa yang meningkat kapasitasnya	309 Aparatur Desa		DINAS PEMDES
				Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Revolusi Mental	Jumlah aparatur desa yang meningkat kapasitasnya dalam pemahaman nilai-nilai pelayanan kepada masyarakat	65 orang		DINAS PEMDES
				Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Bendahara Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Malalui Siskeudes	Jumlah aparatur desa yang meningkat kapasitasnya dalam pengoperasian aplikasi Siskeudes	46 Aparatur Desa		DINAS PEMDES
				Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dalam Pengelolaan Aset Desa Berbasis SIPADES	Jumlah aparatur desa yang meningkat kapasitasnya dalam pengoperasian aplikasi SIPADES	40 Orang		DINAS PEMDES
				Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	Jumlah ketua dan anggota BPD yang meningkat kapasitasnya	40 BPD		DINAS PEMDES
			2	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif. Persentase lembaga adat desa yang aktif		800.000.000	DINAS PEMDES
				Kegiatan Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga kemasyarakatan, lembaga adat yang terbina	309 desa		DINAS PEMDES
				Sub Kegiatan Kelembagaan masyarakat desa dan	jumlah LKD yang di Evaluasi	7 Kab/kota		DINAS PEMDES

	Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja Program		Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
				Indikator (*Out Come*)	Target		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
			masyarakat hukum adat				
			Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	-1. jumlah Pokjanal Posyandu yang dibina, '- 2. Jumlah PKK Provinsi, Kab, Kecamatan dan Desa yang dibina, '- 3. Jumlah Lembaga Adat yang dibina, 4. Jumlah Lembaga CPPD yang dibentuk, 5. Jumlah sekolah yang PMTASnya dikelola oleh PKK Desa	1, 35 Pokjanal Posyandu 2,7 Kab./Kota, 3, 10 Lembaga Adat 4, 10 lembaga CPPD 5, 1.232 Siswa		DINAS PEMDES
			Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyakat	1. Jumlah BUMDESA yang aktif, 2. Jumlah Produk unggulan Desa Yang dikelola, 3. jumlah berkah mart yang difasilitasi dan didampingi pengembangannya,	20 BUMDESA, 20 Prudes, 230 Berkah Mart		DINAS PEMDES
			Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyakat	- 1. Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat yang terampil, - 2. Jumlah Kelompok Masyarakat Desa yang aktif dalam Kewirausahaan	40 Orang,,40 orang		DINAS PEMDES
			Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1. Jumlah desa yang memiliki Pusat Informasi Teknologi (Posyantek atau Wartek) dan yang dapat mengelola SDA dan TTG, - 2. Jumlah kelompok Masyarakat Pengelola Sumber Daya Alam (SDA) yg terbentuk, - 3. Jumlah Desa yang Berinovasi .	7 Kab/Kota		DINAS PEMDES
				Meningkatnya Teknologi Tepat Guna Sektor Pertanian	7 Kab/Kota		DINAS PEMDES

	Prioritas Pembangunan Daerah		Strategi		Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja Program		Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
						Indikator (*Out Come*)	Target		
1	*2*		*3*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
						Meningkatnya Teknologi Tepat Guna Sektor Perikanan	7 Kab/Kota		DINAS PEMDES
				3	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase kerjasama Desa yang dilaksanakan		250.000.000	DINAS PEMDES
					Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama antardesa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	1. Jumlah Rakor yang terlaksana.	1 Kali Rakor,		DINAS PEMDES
						2. Identifikasi Pru kades Lintas Kabupaten,	1 Laporan		
					Sub Kegiatan Fasilitasi Kerjasama antardesa lintas Kabupaten/Kota	1. Jumlah Rakor yang terlaksana.	1 Kali Rakor,		DINAS PEMDES
						2. Identifikasi Pru kades Lintas Kabupaten,	1 Laporan		
					Sub Kegiatan Fasilitasi Kerjasama desa dengan pihak ketiga	1. Jumlah Aparatur Desa dan Pengurus Bumdesma yang meningkat kapasitasnya di Kawasan Perdesaan ,	60 Orang,		DINAS PEMDES
						2. Jumlah Produk Unggulan yang dikembangkan	3 Produk		
5	**PEMBANGUNAN PENDIDIKAN**							138.035.270.000	
		1	Peningkatan akses pelayanan pendidikan	1	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase GTK Bersertifikasi	80	26.172.121.400	DINAS PENDIDIKAN
						Nilai rata-rata UK GTK SMA	60		DINAS PENDIDIKAN
						jumlah medali siswa dalam kompetisi nasional /Internasional	4		DINAS PENDIDIKAN
						APK SMA	43,43		DINAS PENDIDIKAN
					Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah guru SMA yang mengikuti PPG	25 orang		DINAS PENDIDIKAN
						Jumlah guru SMA yang mendapat pengembangan kompetensi	165 orang		DINAS PENDIDIKAN

	Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja Program		Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
				Indikator (*Out Come*)	Target		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
				Jumlah lomba kesiswaan SMA	12 jenis		DINAS PENDIDIKAN
				Jumlah sarana prasarana yang dibangun	7 lokasi		DINAS PENDIDIKAN
				Jumlah siswa/mahasiswa yang mendapat beasiswa	1894 orang		DINAS PENDIDIKAN
			Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Atas	Jumlah guru yang mengikuti PPG	25 orang		DINAS PENDIDIKAN
				Jumlah guru yang berkualifikasi S1 dan S2	15 orang		DINAS PENDIDIKAN
				Jumlah Guru mengikuti Diklat Kompetensi	150 orang		DINAS PENDIDIKAN
			Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah siswa SMA yang dibina minat, bakat dan kreativitas	2000		DINAS PENDIDIKAN
			Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru yang dibangun	3 PAKET		DINAS PENDIDIKAN
			Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang dibangun	2 paket		DINAS PENDIDIKAN
			Sub Kegiatan Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah Kantin yang dibangun	2 PAKET		DINAS PENDIDIKAN
			Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang direhab	4 ruang		DINAS PENDIDIKAN
			Sub Kegiatan Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang direhab	3 ruang		DINAS PENDIDIKAN
			Sub Kegiatan Pengadaan Meubeleur Sekolah	Jumlah MEUBELEUR	380 SET		DINAS PENDIDIKAN
			Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	1 paket		DINAS PENDIDIKAN

	Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja Program		Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
				Indikator (*Out Come*)	Target		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
			Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	Jumlah siswa/mahasiswa yang mendapat beasiswa	1894 orang		DINAS PENDIDIKAN
			Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah guru SMK yang mengikuti PPG	20 orang		DINAS PENDIDIKAN
				Jumlah guru SMK yang mendapat pengembangan kompetensi	160 orang		DINAS PENDIDIKAN
				jumlah Kontingen guru berprestasi ke tingkat Nasional	1 Tim		DINAS PENDIDIKAN
				Jumlah lomba kesiswaan SMK	5 jenis		DINAS PENDIDIKAN
				jumlah sarana prasarana SMK yang direhab	4 lokasi		DINAS PENDIDIKAN
				jumlah sarana prasarana SMK yang bangun	7 ruang		DINAS PENDIDIKAN
				Jumlah Pengadaan sarana prasarana SMK	1 paket		DINAS PENDIDIKAN
				Jumlah siswa yang mendapat beasiswa	1000 orang		DINAS PENDIDIKAN
			Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Kejuruan	Jumlah guru yang mengikuti PPG	20 orang		DINAS PENDIDIKAN
				Jumlah guru yang berkualifikasi S1 dan S2	10 orang		DINAS PENDIDIKAN
				Jumlah Guru mengikuti Diklat Kompetensi	150 orang		DINAS PENDIDIKAN
				Terseleksinya Kontingen guru berprestasi ke tingkat Nasional	1 kali		DINAS PENDIDIKAN
			Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah lomba kesiswaan SMK	5 jenis		DINAS PENDIDIKAN
			Sub Kegiatan Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	jumlah Ruang Kelas yang direhab	3 lokasi		DINAS PENDIDIKAN

	Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja Program		Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
				Indikator (*Out Come*)	Target		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
			Sub Kegiatan Rehabilitasi Ruang Praktik	jumlah ruang praktik yang direhab	1 lokasi		DINAS PENDIDIKAN
			Sub Kegiatan pembangunan ruang kelas baru	jumlah RKB yang dibangun	6 ruang		DINAS PENDIDIKAN
			Sub Kegiatan Pembangunan ruang praktik	jumlah ruang praktik yang dibangun	1 ruang		DINAS PENDIDIKAN
			Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	1 paket		DINAS PENDIDIKAN
			Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah siswa yang mendapat beasiswa	1000 orang		DINAS PENDIDIKAN
			Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Khusus	Jumlah guru SMA yang mengikuti PPG	10 orang		DINAS PENDIDIKAN
				Jumlah guru SMA yang mendapat pengembangan kompetensi	102 orang		DINAS PENDIDIKAN
				Jumlah lomba kesiswaan	8 jenis		DINAS PENDIDIKAN
				Jumlah Pengadaaan Sarana prasarana pendidikan khusus	2 unit		DINAS PENDIDIKAN
				Jumlah Sarana, Prasarana pendidikan khusus yang dibangun	3 lokasi		DINAS PENDIDIKAN
				Tersedianya Biaya Operasional PLA	12 bulan		DINAS PENDIDIKAN
			Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan khusus	Jumlah guru yang mengikuti PPG	10 orang		DINAS PENDIDIKAN
				Jumlah guru yang berkualifikasi S1 dan S2	2 orang		DINAS PENDIDIKAN
				Jumlah Guru mengikuti Diklat Kompetensi	100 orang		DINAS PENDIDIKAN
			Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah tim lomba kesiswaan	10 Tim		DINAS PENDIDIKAN

	Prioritas Pembangunan Daerah		Strategi		Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja Program		Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
						Indikator (*Out Come*)	Target		
1	*2*		*3*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
					Terlaksananya pembinaan kesiswaan pendidikan khusus	9 sekolah		DINAS PENDIDIKAN
					Sub Kegiatan Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah	Jumlah Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah	2 unit		DINAS PENDIDIKAN
					Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang dibangun	3 lokasi		DINAS PENDIDIKAN
					Sub Kegiatan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Tersedianya Biaya Operasional PLA	12 bulan		DINAS PENDIDIKAN
				2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cabdin Wil. Pangkalpinang Bangka Tengah	survey kepuasan pelayanan internal (angka)	95	462.895.000	DINAS PENDIDIKAN
					Program Pengelolaan Pendidikan	APK Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Cabang Dinas Wilayah Pangkalpinang Bangka Tengah	87,75	18.808.880.000	DINAS PENDIDIKAN
						jumlah medali siswa dalam kompetisi nasional /Internasional	4	1.183.613.000	DINAS PENDIDIKAN
						Rata-rata nilai ujian akhir di Cabang Dinas	6.5	15.483.900.000	DINAS PENDIDIKAN
				3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cabdin Wil. Bangka	survey kepuasan pelayanan internal (angka)	95	486.700.000	DINAS PENDIDIKAN
					Program Pengelolaan Pendidikan	APK Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Cabang Dinas Wilayah Bangka	87,75	13.041.308.000	DINAS PENDIDIKAN
						jumlah medali siswa dalam kompetisi nasional /Internasional	4	690.000.000	DINAS PENDIDIKAN
						Rata-rata nilai ujian akhir di Cabang Dinas	6.5	4.407.300.000	DINAS PENDIDIKAN
				4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cabdin Wil. Bangka Barat	survey kepuasan pelayanan internal (angka)	95	530.770.000	DINAS PENDIDIKAN

	Prioritas Pembangunan Daerah		Strategi		Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja Program		Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
						Indikator (*Out Come*)	Target		
1	*2*		*3*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
					Program Pengelolaan Pendidikan	APK Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Cabang Dinas Wilayah Bangka Barat	87,75	10.130.827.600	DINAS PENDIDIKAN
						jumlah medali siswa dalam kompetisi nasional /Internasional	4	572.251.000	DINAS PENDIDIKAN
						Rata-rata nilai ujian akhir di Cabang Dinas	6.5	3.366.200.000	DINAS PENDIDIKAN
				5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cabdin Wil. Bangka Selatan	survey kepuasan pelayanan internal (angka)	95	563.910.000	DINAS PENDIDIKAN
					Program Pengelolaan Pendidikan	APK Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Cabang Dinas Wilayah Bangka Selatan	87,75	13.796.856.000	DINAS PENDIDIKAN
						jumlah medali siswa dalam kompetisi nasional /Internasional	4	683.719.000	DINAS PENDIDIKAN
						Rata-rata nilai ujian akhir di Cabang Dinas	6.5	2.959.000.000	DINAS PENDIDIKAN
				6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cabdin Wil. Belitung dan Belitung Timur	survey kepuasan pelayanan internal (angka)	95	541.330.000	DINAS PENDIDIKAN
					Program Pengelolaan Pendidikan	APK Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Cabang Dinas WilayahBelitung dan Belitung Timur	87,75	14.992.256.000	DINAS PENDIDIKAN
						jumlah medali siswa dalam kompetisi nasional /Internasional	4	1.310.676.000	DINAS PENDIDIKAN
						Rata-rata nilai ujian akhir di Cabang Dinas	6.5	7.361.000.000	DINAS PENDIDIKAN
		2	Peningkatan mutu layanan pendidikan	1	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	persentase guru yang mengajar sesuai dengan kompetensi	80%		DINAS PENDIDIKAN
					Kegiatan Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas	jumlah dokumen analisis GTK	1 dokumen		DINAS PENDIDIKAN

	Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Kinerja Program		Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
					Indikator (*Out Come*)	Target		
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*	*8*
				Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi				
				Sub Kegiatan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Tersedianya dokumen pemetaan dan mutasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	1 dokumen		DINAS PENDIDIKAN
			2	Program Pengembangan Kurikulum dan Pengendalian Perizinan pendidikan	persentase dokumen kurikulum yg terintegrasi dengan kurikulum nasional	75%	489.757.000	DINAS PENDIDIKAN
				Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah dokumen Penyusunan Muatan Lokal Pendidikan Menengah	2 dokumen		DINAS PENDIDIKAN
				Sub Kegiatan Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah peserta Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal SMA	44		DINAS PENDIDIKAN
					Jumlah peserta Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal SMK	36		DINAS PENDIDIKAN
				Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah dokumen Penyusunan Muatan Lokal Pendidikan khusus	1 dokumen		DINAS PENDIDIKAN
				Sub Kegiatan Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah dokumen Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus	1		DINAS PENDIDIKAN
			3	Program Bahasa dan Sastra	persentase minat siswa terhadap bahasa dan sastra	70%		DINAS PENDIDIKAN
				Kegiatan pembinaan, pengembangan dan perlindungan bahasa dan sastra yang penuturannya lintas daerah kab/kota dalam satu daerah provinsi	jumlah buku/kamus yang disusun	2 jenis		DINAS PENDIDIKAN

	Prioritas Pembangunan Daerah		Strategi		Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja Program		Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
						Indikator (*Out Come*)	Target		
1	*2*		*3*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
					Sub Kegiatan koordinasi penyusunan kamus bahasa daerah	jumlah / jenis buku yang dicetak dan distribusi	2 jenis		DINAS PENDIDIKAN
					Kegiatan pembinaan, pengembangan dan perlindungan bahasa dan sastra yang penuturannya lintas daerah kab/kota dalam satu daerah provinsi	jumlah siswa yang berminat mengikuti lomba	50 orang		DINAS PENDIDIKAN
					Sub Kegiatan peningkatan apresiasi siswa terhadap bahasa dan sastra daerah kewenangan provinsi	jumlah / jenis buku yang dicetak dan distribusi	4 judul		DINAS PENDIDIKAN
						jumlah siswa yang mengikuti lomba	50 orang		DINAS PENDIDIKAN
6	**PEMBANGUNAN KESEHATAN**							120.228.627.703	
		1	Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat	1	Program: Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi Minimal Utama	30 persen	26.860.011.526	DINAS KESEHATAN
						Persentase Peningkatan Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan	10 persen	796.000.000	DINAS KESEHATAN
						Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Memakai Sistem Informasi Kesehatan yang Dipersyaratkan	50 persen	313.178.000	DINAS KESEHATAN
						Persentase Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	80 persen	2.639.692.188	DINAS KESEHATAN
						Persentase Status Kesehatan Masyarakat	76,45 persen	1.780.000.000	DINAS KESEHATAN
						Persentase Pelaksanaan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	100 persen	61.000.000	DINAS KESEHATAN
						Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Menggunakan	50 persen		DINAS KESEHATAN

	Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja Program		Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
				Indikator (*Out Come*)	Target		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
				Sistem Iinformasi Kesehatan yang Dipersyaratkan			
			Kegiatan: Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana untuk UKM Rujukan	64 persen		DINAS KESEHATAN
				Persentase penyediaan sarana dan prasarana laboratorium kesehatan			DINAS KESEHATAN
				Jumlah Kabupaten/Kota yang Menyediakan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	4 Kabupaten /Kota		DINAS KESEHATAN
				Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat dan Vaksin Essensial	90 persen		DINAS KESEHATAN
				Prevalensi Kekurangan Gizi pada Anak Balita			DINAS KESEHATAN
				Persentase kabupaten/kota yang menjalankan kesehatan kerjaa dan olahraga	73 persen		DINAS KESEHATAN
				persentase kabupaten/kota yang memiliki kualitas lingkungan sehat	75 persen		DINAS KESEHATAN
				Persentase Kab/kota yang melaksanakan minimal 3 Tema Kompanye Germas	65 persen		DINAS KESEHATAN
				Jumlah Kecamatan yang Memiliki Minimal 1 Puskesmas yang Tersertifikasi Akreditasi	47 kecamatan		DINAS KESEHATAN

	Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja Program		Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
				Indikator (*Out Come*)	Target		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
				Persentase Puskesmas yang Melakukan Pelayanan Penyakit Menular dan Tidak Menular	80 persen		DINAS KESEHATAN
				Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza	60 persen		DINAS KESEHATAN
				Persentase Kepesertaan JKN	81 persen		DINAS KESEHATAN
				Persentase pelaksanaan sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	100 persen		DINAS KESEHATAN
				Jumlah Penerbitan Rekomendasi Perijinan Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	10 rekomendasi		DINAS KESEHATAN
				Jumlah fasilitas kesehatan yang terakreditasi	89		DINAS KESEHATAN
				Persentase pelaksanaan penelitian kesehatan	100 persen		DINAS KESEHATAN
			Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	Jumlah Kabupaten yang dilayani Pelayanan Kesehatan Bergerak	2 kabupaten		DINAS KESEHATAN
			Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan alat kalibrasi	4 paket		DINAS KESEHATAN
			Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	Jumlah Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	5 paket		DINAS KESEHATAN
			Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan	1 paket		DINAS KESEHATAN

	Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja Program		Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
				Indikator (*Out Come*)	Target		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
			Laboratorium Kesehatan	Laboratorium Kesehatan			
			Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan Pelayanan Telemedicine	5 fasilitas pelayanan kesehatan		DINAS KESEHATAN
			Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman Serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman Serta Fasilitas Kesehatan Lainnya ke kabupaten/kota	7 kabupaten/ kota		DINAS KESEHATAN
			Kegiatan: Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Surveilans, Imunisasi dan Krisis Kesehatan	80 persen		DINAS KESEHATAN
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana	Persentase Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	100 persen		DINAS KESEHATAN
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persentase Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	100 persen		DINAS KESEHATAN
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Kab/Kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan Ibu dan Anak	3 kabupaten/ kota		DINAS KESEHATAN
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Jumlah Kab/Kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan usia reproduksi	3 kabupaten/ kota		DINAS KESEHATAN
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Jumlah Kab/Kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan usia lansia	4 kabupaten/ kota		DINAS KESEHATAN
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Kab/Kota yang menyelenggarakan pelayanan	4 kabupaten/		DINAS KESEHATAN

	Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja Program		Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
				Indikator (*Out Come*)	Target		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
				kesehatan Gizi Masyarakat	kota		
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah dokumen laporan Kegiatan	2 dokumen		DINAS KESEHATAN
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	jumlah dokumen laporan Kegiatan	4 dokumen		DINAS KESEHATAN
			Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah bahan informasi kesehatan untuk upaya promotif dan preventif	4 paket		DINAS KESEHATAN
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya Tidak Menular	Kabupaten/kota yang melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional.	7 kabupaten/ kota		DINAS KESEHATAN
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Kabupaten/kota yang melakukan pelayanan pengendalian penyakit menular dan tidak menular	6 kabupaten/ kota		DINAS KESEHATAN
				Jumlah pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan yang terlayani	2600 sampel		DINAS KESEHATAN
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Persentase Kab/Kota yang melaksanakan pemeriksaan & pembinaan pelayanan kesehatan haji sesuai standar	100 persen		DINAS KESEHATAN
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Persentase ODGJ berat yg mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	85 persen		DINAS KESEHATAN
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	Jumlah Puskesmas yang melakukan upaya pencegahan dan pengendalian masalah NAPZA	10 puskesmas		DINAS KESEHATAN
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Jumlah Puskesmas, UTDRS dan Kabupaten/Kota Yang melakukan kerja sama Program pelayanan Darah	64 puskesmas		DINAS KESEHATAN

	Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja Program		Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
				Indikator (*Out Come*)	Target		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentase masyarakat yang mempunyai jaminan kesehatan baik mandiri maupun yang dibiayai oleh pemerintah	81 persen		DINAS KESEHATAN
			Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase kewaspadaan dini dengan sinyal alert pada sistem SKDR yang direspon	85 persen		DINAS KESEHATAN
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah dok kesepakatan koordinasi dan sinkronisasi penerapan SPM Kab/kota	7 dokumen		DINAS KESEHATAN
			Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah PKM yang melakukan upaya perubahan Indeks Keluarga Sehat pada Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK), Puskesmas Ramah Anak	64 puskesmas		DINAS KESEHATAN
			Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Jumlah Kabupaten/Kota yang mengajukan Kelayakan, Registrasi dan Registrasi Ulang Puskesmas	7 kabupaten/ kota		DINAS KESEHATAN
			Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Persentase investigasi yang dilakukan terhadap kasus Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi yang muncul di kabupaten/kota	90 persen		DINAS KESEHATAN
			Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Persentase pasien yang terlayani pelayanan kegawatdaruratan	80 persen		DINAS KESEHATAN
			Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan Pengelolaan Rujuk dan Rujuk Balik melalui Sisrute yang berbasis Kompetensi	6 rumah sakit		DINAS KESEHATAN
			Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke	Persentase Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa	95 persen		DINAS KESEHATAN

	Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja Program		Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
				Indikator (*Out Come*)	Target		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
			Lab Rujukan/Nasional	(KLB) yang diambil dan dikirim ke Lab Rujukan/Nasional untuk konfirmasi laboratorium			
			Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	Persentase Kegiatan Upaya pengurangan risiko Krisis Kesehatan Akibat Bencana /dan atau Berpotensi Bencana	80 persen		DINAS KESEHATAN
			Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah kabupaten/kota yang dilakukan pendampingan	5 kabupaten/ kota		DINAS KESEHATAN
			Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Jumlah laporan penelitian kesehatan	1 laporan		DINAS KESEHATAN
			Penilaian/Appraisal Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Pasca Bencana	Persentase Penilaian /Appraisal Sarana Prasarana alat Kesehatan Pasca Bencana	70 persen		DINAS KESEHATAN
			Kegiatan: Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Kabupaten/kota yang melaksanakan SIK	42,9 persen		DINAS KESEHATAN
			Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah laporan data dan informasi yang dihasilkan	3 dokumen		DINAS KESEHATAN
			Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah kabupaten/kota yang fasyankesnya melaksanakan Sistem Informasi Kesehatan yang disyaratkan	3 kabupaten/ kota		DINAS KESEHATAN
			Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah paket Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	1 paket		DINAS KESEHATAN
			Kegiatan: Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Penerbitan Rekomendasi Perijinan Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	10 rekomendasi		DINAS KESEHATAN
				Jumlah fasilitas kesehatan yang terakreditasi	89		DINAS KESEHATAN
			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak	Jumlah Rumah Sakit yang dilakukan Pengendalian dan	12 fasilitas pelayanan		DINAS KESEHATAN

	Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Kinerja Program		Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
					Indikator (*Out Come*)	Target		
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*	*8*
				lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pengawasan serta Tindak lanjut Perizinan Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	kesehatan		
				Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang mengimplementasikan Tata Kelola RS Sesuai standart Akreditasi	19 rumah sakit		DINAS KESEHATAN
				Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Persentase fasilitas kesehatan (Klinik Pratama, puskesmas dan RS) yang terakreditasi minimal tingkat utama	35 persen		DINAS KESEHATAN
			2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Tenaga Kesehatan yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi	80 persen	1.475.410.000	DINAS KESEHATAN
				Kegiatan: Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Jumlah SDMK yang terpenuhi kebutuhan kompetensinya	120 orang		DINAS KESEHATAN
				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah SDM Kesehatan yang terpenuhi kebutuhan kompetensinya melalui Pendidikan dan Pelatihan	120 orang		DINAS KESEHATAN
				Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Data Kebutuhan SDM kesehatan di Provinsi dan 7 Kabupaten / Kota	17 dokumen		DINAS KESEHATAN
				Kegiatan: Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	292 orang		DINAS KESEHATAN
				Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	jumlah SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya melalui pendidikan tugas belajar dan uji kompetensi	257 orang		DINAS KESEHATAN
				Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah SDM Kesehatan yang mengikuti pemilihan tenaga kesehatan teladan, monitoring	35 orang		DINAS KESEHATAN

	Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Kinerja Program		Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
					Indikator (*Out Come*)	Target		
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*	*8*
					dan evaluasi tenaga kesehatan peserta PIDI, Nusantara Sehat			
			3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Sediaan Farasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman yang Memenuhi Syarat	45 persen	170.000.000	DINAS KESEHATAN
				Kegiatan: Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	Persentase PBF cabang dan cabang PAK yang memenuhi persyaratan	50 persen		DINAS KESEHATAN
				Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang Pak	Jumlah PBF cabang dan cabang PAK yang dilakukan pengendalian dan pengawasan	10		DINAS KESEHATAN
				Penyediaan dan pengelolaan Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK Berbasis Elektronik	jumlah perizinan PBFcabang dan cabang PAK berbasis elektronik	10		DINAS KESEHATAN
				Kegiatan: Penerbitan izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Persentase Usaha Kecil Obat Tradisional yang dilakukan pengendalian dan pengawasan	42,9 persen		DINAS KESEHATAN
				Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang dilakukan pengendalian dan pengawasan	3		DINAS KESEHATAN
				Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin UKOT Berbasis Elektronik	Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang dilakukan pengendalian dan pengawasan	3		DINAS KESEHATAN
			4	Program: Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Posyandu Aktif	63 persen	400.000.000	DINAS KESEHATAN

	Prioritas Pembangunan Daerah		Strategi		Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja Program		Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
						Indikator (*Out Come*)	Target		
1	*2*		*3*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
					Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Persentase kebijakan yang mendukung Germas di Kab/kota	45 persen		DINAS KESEHATAN
					Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Peserta Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	440 orang		DINAS KESEHATAN
					Kegiatan: Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Kab/kota yang melaksanakan survey PHBS	65 persen		DINAS KESEHATAN
					Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah peserta Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1590 orang		DINAS KESEHATAN
					Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	Persentase kab/kota yang meleksanakan pembinaan posyandu aktif	60 persen		DINAS KESEHATAN
					Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Persentase kab/kota yang meleksanakan pembinaan posyandu aktif	60 persen		DINAS KESEHATAN
						Jumlah peserta yang mengikuti Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	100 orang		DINAS KESEHATAN
		2	Peningkatan pelayanaan kesehatan masyarakat	1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Pemenuhan kesehatan rumah sakit terakreditasi paripurna	80%	31.001.451.809	RSUP

	Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja Program		Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
				Indikator (*Out Come*)	Target		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
			Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan,UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Fasilitas Pelayanan,Sarana,Prasarana dan Alat Kesehatan di Rumah Sakit	1 Paket		RSUP
			Sub Kegiatan 3: Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Pengembangan Pelayanan Rumah Sakit	2 paket		RSUP
				Jumlah Kemitraan Pelayanann Rumah Sakit	6 Kemitraan		RSUP
			Sub Kegiatan 10: Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik	Jumlah pengadaan alat kesehatan (DAK)	1 Paket		RSUP
				Jumlah pengadaan alat kesehatan	1 Paket		RSUP
			Sub Kegiatan 11: Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah sarana yang tersedia di Rumah sakit	5 Paket		RSUP
			Sub Kegiatan 12: Pengadaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Pengadaan Prasarana Keperawatan	2 Paket		RSUP
			Sub Kegiatan 13: Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Persentase Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	80%		RSUP
			Sub Kegiatan 16: Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit (Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan)	Jumlah Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	3 Paket		RSUP
				Jumlah paket pengadaan loundry	1 Paket		RSUP
			Sub Kegiatan 17: Pemeliharaan Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan kesehatan	Persentase Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	80%		RSUP

	Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja Program		Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
				Indikator (*Out Come*)	Target		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
			Sub Kegiatan 18: Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Persentase Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan	80%		RSUP
			Sub Kegiatan 19: Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Persentase Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Rumah Sakit	80%		RSUP
			Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan			RSUP
			Sub Kegiatan 22: Operasional Pelayanan Rumah Sakit (BLUD)	Jumlah operasional Pelayanan Rumah Sakit	3 Paket		RSUP
			Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan			RSUP
			Sub Kegiatan 3: Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Aplikasi Asuhan Keperawatan Terintegrasi	2 Aplikasi Keperawatan		RSUP
			Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan			RSUP
			Sub Kegiatan 3: Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah SOP Keperawatan	1 Paket,1 Laporan		RSUP
				Jumlah Standar Asuhan Keperawatan	1 Paket,1 Laporan		RSUP
				Jumlah Dokumen Evaluasi Standar Pelayanan Teknis Keperawatan	1 Paket,1 Laporan		RSUP
				Jumlah Dokumen Perencanaan perbaikan strategis (PPS) yang dihasilkan dibagi dengan total kebutuhan PPS	Perencanaan Perbaikan Strategis		RSUP

	Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Kinerja Program		Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
					Indikator (*Out Come*)	Target		
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*	*8*
						(PPS) Survei Verifikasi Pertama 16 Dokumen		
			2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya manusia Kesehatan	80%	14.431.812.000	RSUP
				Kegiatan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Jumlah Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Paket		RSUP
				Sub Kegiatan 1: Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terpenuhinya Sumber daya manusia kesehatan sesuai Kebutuhan	100%		RSUP
								RSUP
				Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetisi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetisi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan			RSUP
				Sub Kegiatan 1: Peningkatan Kompetisi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Keperawatan	1 Paket		RSUP
					Jumlah Pengembangan Kepribadian Keperawatan	1 Paket		RSUP
					Jumlah In House Traning Keperawatan	1 Paket		RSUP
				Sub Kegiatan 2: Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Pembinaan Etika Keperawatan	1 Paket		RSUP
					Jumlah Audit Keperawatan	1 Paket		RSUP
					Jumlah Penilai Perawat dan Bidan Teladan	1 Paket		RSUP
			3	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan	Persentase Sarana dan Prasarana yang Tersedia di	85%	31.087.000.000	RSJ

	Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja Program		Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
				Indikator (*Out Come*)	Target		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
			Upaya Kesehatan Masyarakat	Rumah Sakit			
			Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana Prasarana Dan A;At Kesehatan Untuk Ukp Rujukan, Ukm Dan Ukm Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				RSJ
			Sub Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah ruang rawat inap yang dibangun			RSJ
			Sub Kegiata Pengembangan Rumah Sakit (DAK)	Jumlah gedung rawat jalan sesuai standar			RSJ
			Sub Kegiatan 3: Rehabilitasi dan Peme;iharaan Rumah Sakit	Jumlah bangunan rumah sakit yang direhabilitasi			RSJ
			Sub Kegiatan 4: Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang dibeli			RSJ
			Sub Kegiatan 5: Pengadaan Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan(DAK)	Jumlah alat CSSD yang dibeli			RSJ
			Sub Kegiatan 6: Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah alat kesehatan yang terkalibrasi			RSJ
			Sub Kegiatan 7: Pengadaan Bahan habis pakai lainnya (Sprei, Handuk dam habis pakai lainnya)	Jumlah sprei, handuk dan pakaian habis pakai yang dibeli			RSJ
			Sub Kegiatan 8: Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan /Peralatan Laboratorium Kesehatan	Jumlah alat kesehatan /Peralatan Laboratorium yang dibeli dan terpelihara			RSJ
			4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya	75%	9.213.072.180	RSJ

	Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja Program		Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
				Indikator (*Out Come*)	Target		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
			Manusia Kesehatan	Manusia Kesehatan			
			Kegiatan Pengembangan Mutu Dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi SDM kesehatan tingkat daerah provinsi			RSJ
			Kegiatan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Keshatan Untuk UKM Dan UKP Provinsi	Persentase sumber daya kesehatan untuk ukm dan ukp provinsi			RSJ

BAB V

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

5.1. Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan

Pembangunan kewilayahan Kabupaten/Kota tahun 2021 bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan kawasan terutama untuk daerah yang terpencil dan jauh. Percepatan pertumbuhan ekonomi di fokuskan pada pengembangan sektor-sektor unggulan seperti pertanian, perikanan dan pariwisata yang dapat meningkatkan nilai tambah dan pendapatan, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan nilai perdagangan wilayah serta meningkatkan daya saing daerah. Fokus percepatan pertumbuhan kewilayahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilakukan dengan mengembangkan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Kelayang di Kabupaten Belitung, Kawasan Industri (KI) Sadai di Kabupaten Bangka Selatan dan Kawasan Industri (KI) Tanjung Ular di Kabupaten Bangka Barat serta Kawasan Peruntukan Pariwisata Tanjung Gunung di Kaabupaten Bangka Tengah dan Lintas Timur Pulau Bangka Di Kabupaten Bangka.

Gambar V.I
Perkembangan indikator Makro Pembangunan Kabupaten/Kota
Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018/2019



Sumber: Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, (diolah)

Di samping Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) di atas, Prioritas pengembangan wilayah sesuai dengan Tema Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 yaitu "**Percepatan Pemulihan Ekonomi melalui Pengembangan Potensi Daerah Berbasis Masyarakat dan Peningkatan Pelayanan Dasar"** yang diarahkan pada pemulihan ekonomi dampak dari penyebaran virus Covid-19 melalui pengembangan potensi lokal yang dimiliki oleh masing-masing kabupaten/kota dan peningkatan pelaksanaan pelayanan dasar seperti penyaluran bantuan sosial dan jaringan pengaman nasional. Disamping fokus terhadap pemulihan ekonomi akibat Covid-19, capaian pembangunan Kabupaten/Kota tahun 2018-2019 yang tercermin dari pencapaian indikator makro juga menjadi pertimbangan dalam penentuan

arah kebijakan pembangunan kewilayahan seperti Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka, Tingkat Kemiskinan dan Indeks Gini. Berikut ini capaian indikator makro Kabupaten/Kota tahun 2018/2019.

Tabel V.1
Sasaran Pemerataan Pembangunan Antar Kabupaten/Kota, Kontribusi Wilayah Terhadap Perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015-2019

Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018	2019
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Kab. Bangka	18,28	18,18	18,25	18,11	18,03
Kab. Belitung	12,18	12,36	12,45	12,68	12,9
Kab. Bangka Barat	19,07	18,92	18,84	18,81	18,25
Kab. Bangka Tengah	11,73	11,53	11,36	11,18	11,21
Kab. Bangka Selatan	11,55	11,65	11,64	11,49	11,34
Kab. Belitung Timur	10,18	10,20	10,19	10,07	10,1
Kota Pangkalpinang	17,01	17,17	17,26	17,66	17,91

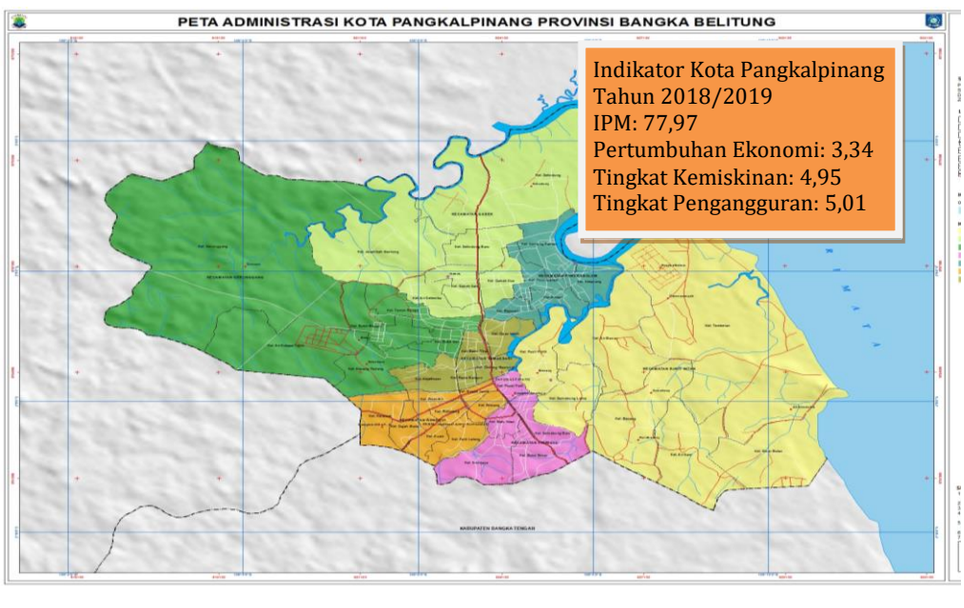
Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (diolah)

Berdasarkan gambar V.I dan tabel V.1 maka uraian tentang prioritas dan fokus pembangunan wilayah pada masing-masing kabupaten/kota tahun 2021 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun dijabarkan pada pembahasan di bawah ini.

5.1.1. Arah Kebijakan Pembangunan Kota Pangkalpinang

Pembangunan Kota Pangkalpinang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan sasaran penurunan angka pengangguran dengan indikator tingkat pengangguran terbuka dan penurunan angka kemiskinan dengan indikator angka kemiskinan. Untuk menurunkan angka pengangguran, strategi yang digunakan antara lain: (1) Peningkatan kesempatan kerja, (2) Peningkatan peran KUKM dalam perluasan kesempatan kerja, (3) Peningkatan promosi, koordinasi, kerjasama dan investasi dalam perluasan kesempatan kerja. Sedangkan untuk sasaran penurunan angka kemiskinan, strategi yang digunakan antara lain: (1) Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dan (2) Meningkatkan pendapatan masyarakat miskin.

Gambar V.2
Perkembangan Indikator Makro Kota Pangkalpinang Tahun 2018/2019



Gambar V.3
Sasaran Pembangunan Kota Pangkalpinang Tahun 2021



Tabel V.2
Sasaran. Arah Kebijakan dan Program Prioritas di Kota Pangkalpinang Tahun 2021

NO	RKPD 2021								
	Sasaran Pembangunan	Strategi		Program			Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	2	3		4			5	6	7
1	**MENURUNKAN TINGKAT PENGANGGURAN**	**1**	Peningkatan Kesempatan Kerja	**1**	**Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja**		Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berdasarkan klaster kompetensi	4%	DISNAKER
							Persentase pelatihan kerjasama dengan sektor swasta dan instansi pemerintah lainnya untuk penyedia instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja	20%	DISNAKER
							Meningkatnya kompetensi dan produktivitas	15 perusahaan	DISNAKER
				2	**Program Penempatan Tenaga Kerja**		Persentase tenaga kerja yang di tempatkan	5 %	DISNAKER
		2	Peningkatkan Peran KUKM Dalam Meningkatkan Kesempatan Kerja	**1**	**Program Pelayanan Izin Simpan Pinjam**		Persentase Rekomendasi Izin Usaha Simpan Pinjam Yang Dikeluarkan	20%	DINAS KUKM
				2	**Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi**		Persentase koperasi aktif	70%	DINAS KUKM
				3	**Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi**		Persentase koperasi berkualitas	50%	DINAS KUKM
				4	**Program Pendidikan**		Persentase SDM	30%	DINAS

NO	RKPD 2021							
	Sasaran Pembangunan	Strategi		Program		Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	2	3		4		5	6	7
					Dan Latihan Perkoperasian	koperasi yang terlatih		KUKM
				5	**Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi**	Persentase Koperasi yang diberdayakan	20%	DINAS KUKM
				6	**Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UKM)**	Persentase UMKM yang diberdayakan	1%	DINAS KUKM
				7	**Program Pengembangan UKM**	Persentase UMKM yang dikembangkan	1%	DINAS KUKM
		3	Peningkatan Promosi, Koordinasi, Kerjasama, Dan Investasi Dalam Peningkatan Lapangan Pekerjaan	**1**	**Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**	Jumlah kebijakan daerah yang mendukung investasi	1 Kebijakan	DINAS PMPTSP
				2	**Program Promosi Penanaman Modal**	Jumlah realisasi investasi	1,9 Trilyun	DINAS PMPTSP
				3	**Program Pelayanan Penanaman Modal**	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai SOP	100%	DINAS PMPTSP
						Jumlah pengaduan dan layanan konsultasi	12 Pengaduan	DINAS PMPTSP
				4	**Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**	Meningkatnya persentase capaian realisasi investasi	15%	DINAS PMPTSP
				5	**Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal**	Persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan sesuai SOP	100%	DINAS PMPTSP
		4	Peningkatan Kompetensi, hubungan industrial dan keselamatan tenaga kerja	**1**	**Program Hubungan Industrial**	Persentase perusahaan yang telah memiliki sarana hubungan industrial		DISNAKER
2	**MENURUNKAN TINGKAT KEMISKINAN**	1	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin	**1**	**Program Pemberdayaan Sosial**	Prosentase PMKS/PSKS yang terberdayakan		DINAS SOSIAL
				3	**Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan**	Prosentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang ditangani		DINAS SOSIAL
				4	**Program Rehabilitasi Sosial**	Prosentase PMKS yang di rehabilitasi sosial di dalam panti non pemerintah		DINAS SOSIAL
				5	**Program Rehabilitasi Sosial**	Prosentase PMKS yang di rehabilitasi sosial di PSBL		DINAS SOSIAL

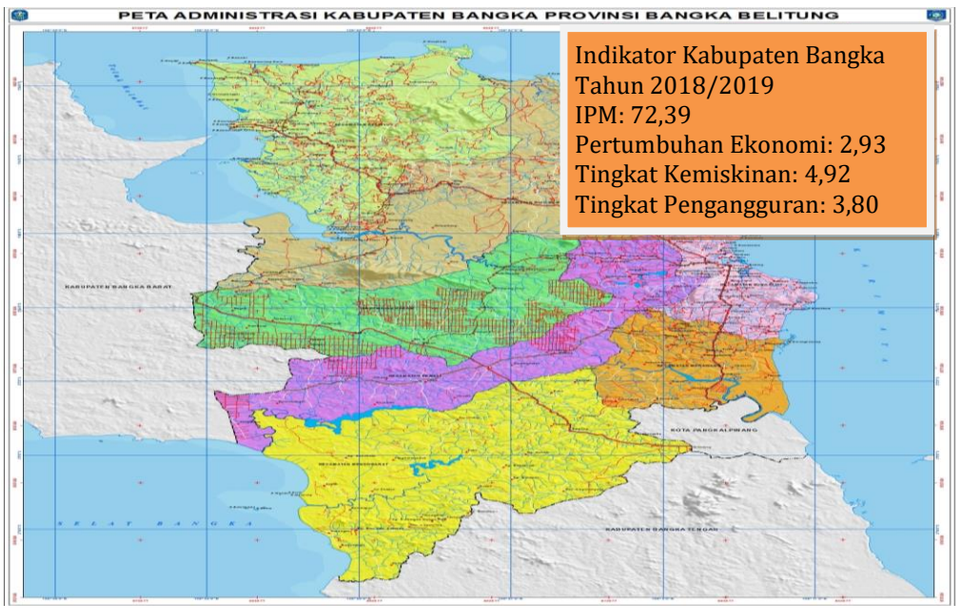
NO	RKPD 2021							
	Sasaran Pembangunan	Strategi		Program		Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	2	3		4		5	6	7
				6	**Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**	Prosentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial		DINAS SOSIAL
3	**MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA**	1	Peningkatan Pendapatan Masyarakat Desa	**1**	**Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Tingkat kualitas tata kelola pemerintahan desa		DINAS PEMDES
				2	**Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat**	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif. Persentase lembaga adat desa yang aktif		DINAS PEMDES
				3	**Program Peningkatan Kerjasama Desa**	Persentase kerjasama desa yang dilaksanakan		DINAS PEMDES

5.1.2. Arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Bangka

Pembangunan Kabupaten Bangka difokuskan pada dua sasaran utama yaitu meningkatnya ekonomi daerah melalui peningkatan sub sektor pertanian dengan indikator laju pertumbuhan PDRB sub sektor pertanian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan sasaran penurunan angka pengangguran dengan indikator tingkat pengangguran terbuka dan penurunan angka kemiskinan dengan indikator angka kemiskinan. Strategi yang digunakan untuk meningkatkan PDRB sub sektor pertanian antara lain: (1) Peningkatan sarana prasarana produksi pertanian, perkebunan, dan perternakan; (2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia pertanian, perkebunan dan peternakan. Sedangkan Pencapaian sasaran untuk menurunkan angka pengangguran, strategi yang digunakan antara lain: (1) Peningkatan kesempatan kerja, (2) Peningkatan peran KUKM dalam perluasan kesempatan kerja, (3) Peningkatan promosi, koordinasi, kerjasama dan investasi dalam perluasan kesempatan kerja. Sedangkan untuk sasaran penurunan angka kemiskinan, strategi yang digunakan antara lain: (1) Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dan (2) Meningkatkan pendapatan masyarakat miskin.

Gambar V.4

Perkembangan Indikator Makro Kabupaten Bangka Tahun 2018/2019



Gambar V.5
Sasaran Pembangunan Kabupaten Bangka Tahun 2021



Tabel V.3
Sasaran. Arah Kebijakan dan Program Prioritas di Kabupaten Bangka Tahun 2021

NO	RKPD 2021							
	Sasaran Pembangunan	Strategi		Program		Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*		*4*		*5*	*6*	*7*
1	**PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN AGROPOLITAN**	1	Peningkatan Sarana Prasarana Produksi Pertanian, Perkebunan, Dan Perternakan	**1**	**Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian**	Persentase ketersediaan saprodi pertanian	15%	DINAS PERTANIAN
						Persentase peningkatan luas tanam Tanaman Pangan	69,58%	DINAS PERTANIAN
						Persentase peningkatan luas tanam Hortikultura	14,21 %	DINAS PERTANIAN
						Persentase peningkatan luas tanam perkebunan	10,17%	DINAS PERTANIAN
						Persentase Ketersediaan benih/bibit pertanian tingkat lapang (daerah)	50%	DINAS PERTANIAN
						Persentase benih/bibit pertanian berlabel dan bersertifikat	5%	DINAS PERTANIAN
						Persentase Pertambahan Angka Kelahiran Ternak	356,32%	DINAS PERTANIAN

NO	RKPD 2021							
	Sasaran Pembangunan	Strategi		Program		Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*		*4*		*5*	*6*	*7*
						Persentase penurunan kasus penyakit hewan menular	100%	DINAS PERTANIAN
						Peningkatan unit usaha yang bersertifikasi NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	90	DINAS PERTANIAN
						Persentase ketersediaan pakan ternak	90%	DINAS PERTANIAN
				2	**Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian**	Rasio ketersediaan prasarana pertanian	15	DINAS PERTANIAN
		2	Peningkatan Produksi dan Pengelolaan Hasil Produksi Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	**1**	**Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**	Persentase penurunan kasus penyakit hewan menular	75%	DINAS PERTANIAN
				2	**Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian**	Dokumen laporan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	4 Dokumen	DINAS PERTANIAN
				3	**Program Perizinan Usaha Pertanian**	Dokumen perizinan usaha pertanian	1 Dokumen	DINAS PERTANIAN
		3	Peningkatan Kualitas Sumber daya Manusia Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	**1**	**Program Penyuluhan Pertanian**	Persentase peningkatan kelas kelompok tani	80%	DINAS PERTANIAN
2	**MENURUNKAN TINGKAT PENGANGGURAN**	1	Peningkatan Kesempatan Kerja	**1**	**Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja**	Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berdasarkan klaster kompetensi		DISNAKER
						Persentase pelatihan kerjasama dengan sektor swasta dan instansi pemerintah lainnya untuk penyedia instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja		DISNAKER
						Meningkatnya kompetensi dan produktivitas		DISNAKER
				2	**Program Penempatan Tenaga Kerja**			DISNAKER
		2	Peningkatkan Peran KUKM Dalam Meningkatkan Kesempatan	**1**	**Program Pelayanan Izin Simpan Pinjam**	Persentase rekomendasi izin Usaha Simpan Pinjam yang dikeluarkan	20%	DINAS KUKM

NO	RKPD 2021							
	Sasaran Pembangunan	Strategi		Program		Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*		*4*		*5*	*6*	*7*
			Kerja					
				2	**Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi**	Persentase koperasi aktif	70%	DINAS KUKM
				3	**Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi**	Persentase koperasi berkualitas	50%	DINAS KUKM
				4	**Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian**	Persentase SDM Koperasi yang terlatih	30%	DINAS KUKM
				5	**Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi**	Persentase Koperasi yang diberdayakan	20%	DINAS KUKM
				6	**Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UKM)**	Persentase UMKM yang diberdayakan	1%	DINAS KUKM
				7	**Program Pengembangan UKM**	Persentase UMKM yang dikembangkan	1%	DINAS KUKM
		3	Peningkatan Promosi, koordinasi, kerjasama, dan investasi dalam peningkatan lapangan pekerjaan	**1**	**Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**	Jumlah kebijakan daerah yang mendukung investasi	1 Kebijakan	DINAS PMPTSP
				2	**Program Promosi Penanaman Modal**	Jumlah realisasi investasi	1,9 Trilyun	DINAS PMPTSP
				3	**Program Pelayanan Penanaman Modal**	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai SOP	100%	DINAS PMPTSP
						Jumlah Pengaduan dan Layanan Konsultasi	12 Pengaduan	DINAS PMPTSP
				4	**Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**	Meningkatnya persentase capaian realisasi investasi	15%	DINAS PMPTSP
				5	**Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**	Persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan sesuai SOP	100%	DINAS PMPTSP
		4	Peningkatan Kompetensi, Hubungan Industrial Dan Keselamatan Tenaga Kerja	**1**	**Program Hubungan Industrial**	Persentase perusahaan yang telah memiliki sarana hubungan industrial		DISNAKER
3	**MENURUNKAN TINGKAT KEMISKINAN**	1	Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin	**1**	**Program Pemberdayaan Sosial**	Prosentase PMKS/PSKS yang terberdayakan		DINAS SOSIAL
				2	**Program Penanganan Warga Negara**	Prosentase warga negara migran korban tindak		DINAS SOSIAL

NO	RKPD 2021							
	Sasaran Pembangunan	Strategi		Program		Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*		*4*		*5*	*6*	*7*
					Migran Korban Tindak Kekerasan	kekerasan yang ditangani		
				3	**Program Rehabilitasi Sosial**	Prosentase PMKS yang di rehabilitasi sosial di dalam panti non pemerintah		DINAS SOSIAL
				4	**Program Rehabilitasi Sosial**	Prosentase PMKS yang di Rehabilitasi sosial di PSBL		DINAS SOSIAL
				5	**Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**	Prosentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial		DINAS SOSIAL
4	**MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA**	1	Peningkatan pendapatan masyarakat desa	**1**	**Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Tingkat kualitas tata kelola pemerintahan desa		DINAS PEMDES
				2	**Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat**	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif. Persentase lembaga adat desa yang aktif		DINAS PEMDES
				3	**Program Peningkatan Kerjasama Desa**	Persentase kerjasama Desa yang dilaksanakan		DINAS PEMDES

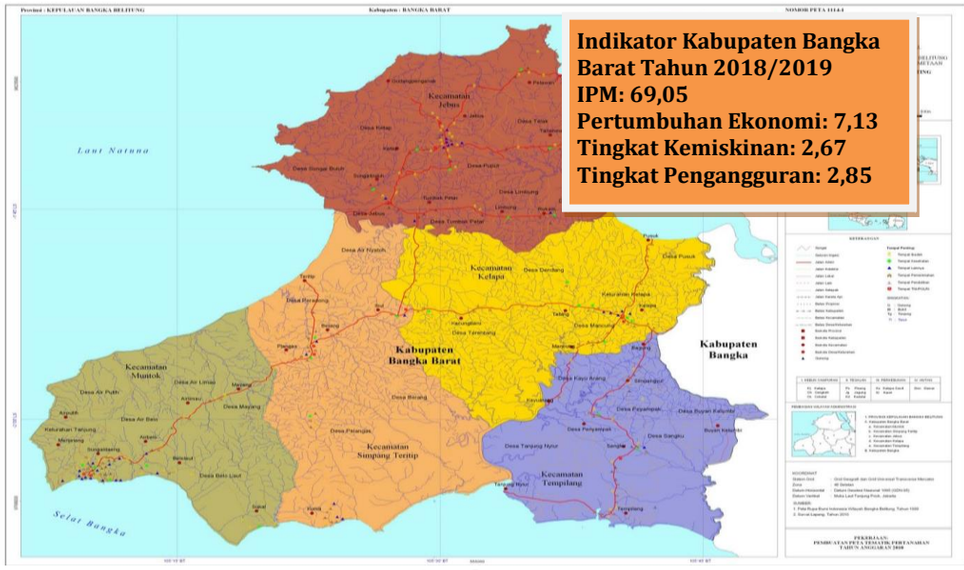
5.1.3. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bangka Barat

Pembangunan Kabupaten Bangka Barat difokuskan pada dua sasaran utama yaitu meningkatnya kesehatan masyarakat dengan fokus penurunan stunting, peningkatan Germas (Gerakan Hidup Masyarakat), Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Penurunan Angka Kematian Bayi (AKB) dengan indikator angka kesehatan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan sasaran penurunan angka pengangguran dengan indikator tingkat pengangguran terbuka dan penurunan angka kemiskinan dengan indikator angka kemiskinan.

Strategi yang digunakan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat antara lain: (1) peningkatan kualitas kesehatan masyarakat; (2) Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat. Sedangkan Pencapaian sasaran untuk menurunkan angka pengangguran, strategi yang digunakan antara lain: (1) Peningkatan kesempatan kerja, (2) Peningkatan peran KUKM dalam perluasan kesempatan kerja, (3) Peningkatan promosi, koordinasi, kerjasama dan investasi dalam perluasan kesempatan kerja. Sedangkan untuk sasaran penurunan angka kemiskinan, strategi yang digunakan antara lain: (1) Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dan (2) Meningkatkan pendapatan masyarakat miskin.

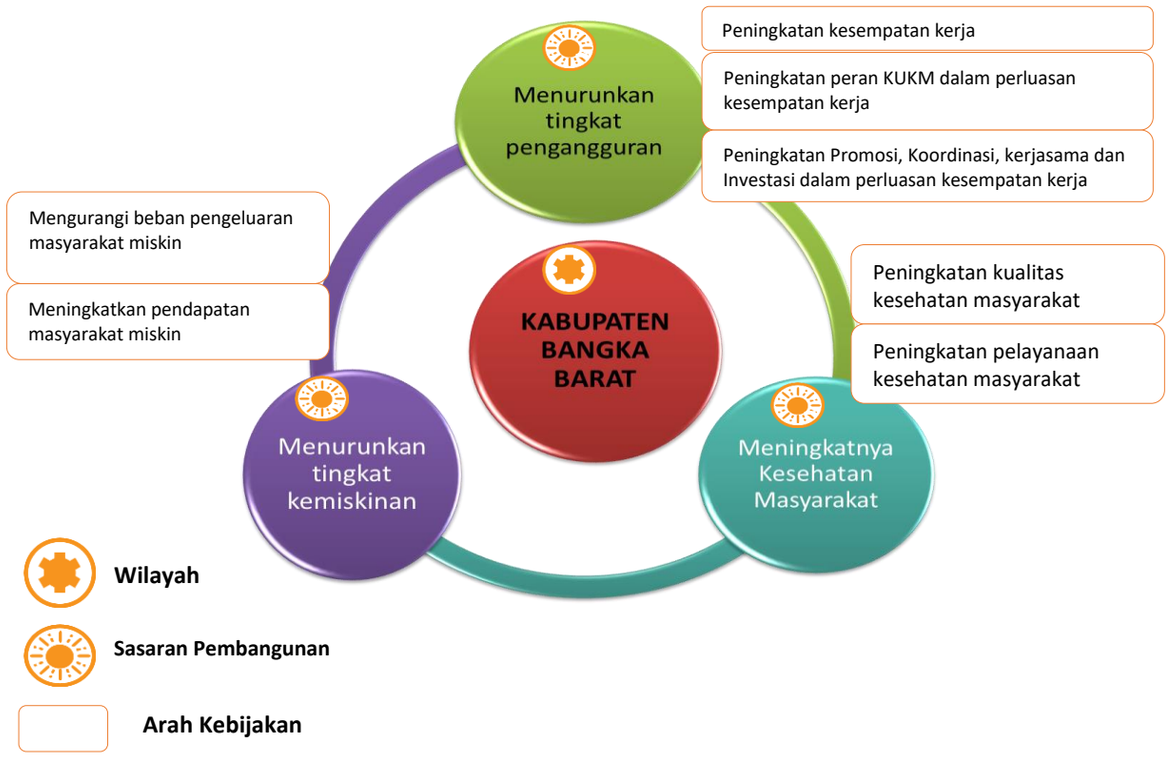
Gambar V.6

Perkembangan Indikator Makro Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018/2019



Gambar V.7

Sasaran Pembangunan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021



Tabel V.4

Sasaran Arah Kebijakan dan Program Prioritas di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021

NO	RKPD 2021							
	Sasaran Pembangunan	Strategi		Program		Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	2	3		4		5	6	7
1	**MENURUNKAN TINGKAT PENGANGGURAN**	1	Peningkatan kesempatan kerja	**1**	**Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja**	Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berdasarkan klaster kompetensi		DISNAKER
						Meningkatnya kompetensi dan produktivitas		DISNAKER
				2	**Program Penempatan Tenaga Kerja**			DISNAKER

NO	RKPD 2021							
	Sasaran Pembangunan	Strategi		Program		Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	2	3		4		5	6	7
		2	Peningkatkan Peran KUKM Dalam Meningkatkan Kesempatan Kerja	**1**	**Program Pelayanan Izin Simpan Pinjam**	Persentase rekomendasi izin usaha simpan pinjam yang dikeluarkan	20%	DINAS KUKM
				2	**Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi**	Persentase koperasi aktif	70%	DINAS KUKM
				3	**Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi**	Persentase koperasi berkualitas	50%	DINAS KUKM
				4	**Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian**	Persentase SDM koperasi yang terlatih	30 %	DINAS KUKM
				5	**Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi**	Persentase koperasi yang diberdayakan	20%	DINAS KUKM
				6	**Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UKM)**	Persentase UMKM yang diberdayakan	1%	DINAS KUKM
				7	**Program Pengembangan UKM**	Persentase UMKM yan dikembangkan	1%	DINAS KUKM
		3	Peningkatan Promosi, Koordinasi, Kerjasama, Dan Investasi Dalam Peningkatan Lapangan Pekerjaan	**1**	**Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**	Jumlah kebijakan daerah yang mendukung investasi	1 Kebijakan	DINAS PMPTSP
				2	**Program Promosi Penanaman Modal**	Jumlah realisasi investasi	1,9 Trilyun	DINAS PMPTSP
				3	**Program Pelayanan Penanaman Modal**	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai SOP	100%	DINAS PMPTSP
						Jumlah pengaduan dan layanan konsultasi	12 Pengaduan	DINAS PMPTSP
				4	**Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**	Meningkatnya persentase capaian realisasi investasi	15%	DINAS PMPTSP
				5	**Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal**	Persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan sesuai SOP	100%	DINAS PMPTSP
		4	Peningkatan kompetensi, hubungan industrial dan keselamatan	**1**	**Program Hubungan Industrial**	Persentase perusahaan yang telah memiliki sarana hubungan industrial		DISNAKER

NO	RKPD 2021							
	Sasaran Pembangunan	Strategi		Program		Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	2	3		4		5	6	7
			tenaga kerja					
2	**MENURUNKAN TINGKAT KEMISKINAN**	1	Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin	**1**	**Program Pemberdayaan Sosial**	Prosentase PMKS/PSKS yang terberdayakan		DINAS SOSIAL
				2	**Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan**	Prosentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang ditangani		DINAS SOSIAL
				3	**Program Rehabilitasi Sosial**	Prosentase PMKS yang di rehabilitasi sosial di dalam panti non pemerintah		DINAS SOSIAL
				4	**Program Rehabilitasi Sosial**	Prosentase PMKS yang di rehabilitasi sosial di PSBL		DINAS SOSIAL
				5	**Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial**	Prosentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial		DINAS SOSIAL
3	**MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA**	1	Peningkatan Pendapatan Masyarakat Desa	**1**	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Tingkat kualitas tata kelola pemerintahan desa		DINAS PEMDES
				2	**Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat**	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif. persentase lembaga adat desa yang aktif		DINAS PEMDES
				3	**Program Peningkatan Kerjasama Desa**	Persentase kerjasama desa yang dilaksanakan		DINAS PEMDES
4	**PEMBANGUNAN KESEHATAN**	**1**	Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat	**1**	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi minimal utama	0,3	DINAS KESEHATAN
						Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memakai sistem informasi kesehatan yang dipersyaratkan	50%	DINAS KESEHATAN
						Persentase pencegahan dan pengendalian penyakit	80%	DINAS KESEHATAN
						Persentase status kesehatan masyarakat	76,45%	DINAS KESEHATAN
						Persentase pelaksanaan sinkronisasi penerapan SPM bidang kesehatan lintas	100%	DINAS KESEHATAN

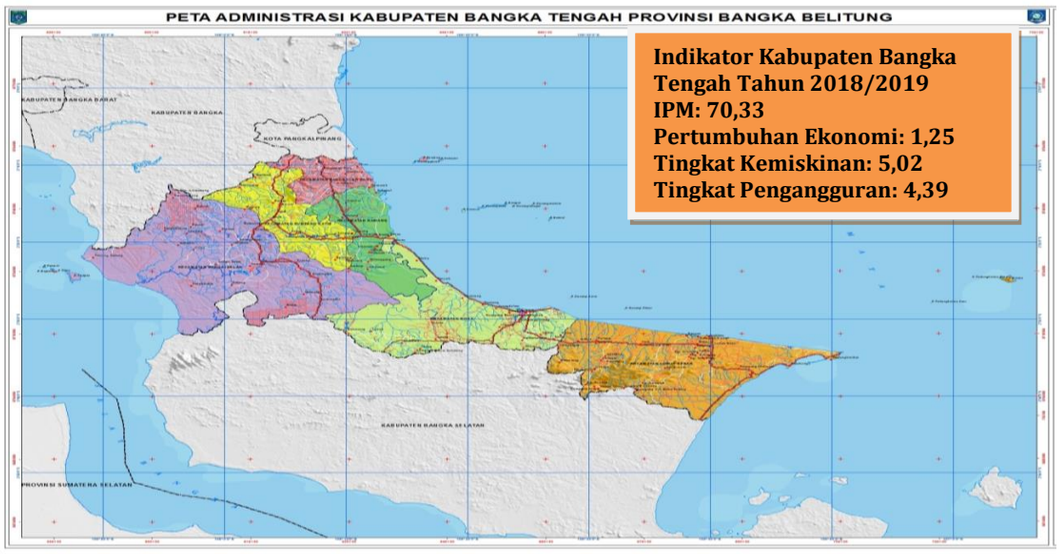
NO	RKPD 2021							
	Sasaran Pembangunan	Strategi		Program		Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	2	3		4		5	6	7
						kabupaten/kota		
						Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menggunakan sistem informasi kesehatan yang dipersyaratkan	50%	DINAS KESEHATAN
				2	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan**	Persentase tenaga kesehatan yang mendapatkan peningkatan kompetensi	80%	DINAS KESEHATAN
				3	**Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman**	Persentase sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi syarat	45 %	DINAS KESEHATAN
				4	**Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan**	Persentase posyandu aktif	63%	DINAS KESEHATAN
		2	Peningkatan pelayanaan kesehatan masyarakat	**1**	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	Persentase peningkatan pemeriksaan laboratorium kesehatan	10%	DINAS KESEHATAN
				2	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	Persentase pelayanan,sarana dan prasarana yang tersedia di rumah sakit	80%	RSUP
				3	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan**	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	80 %	RSUP
				4	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat**			RSJ
				5	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan**			RSJ

5.1.4. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bangka Tengah

Pembangunan Kabupaten Bangka Tengah difokuskan pada dua sasaran utama yaitu meningkatnya ekonomi daerah melalui peningkatan sub sektor pertanian dengan indikator laju pertumbuhan PDRB sub sektor pertanian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan sasaran penurunan angka pengangguran dengan indikator tingkat pengangguran terbuka dan penurunan angka kemiskinan dengan indikator angka kemiskinan.

Strategi yang digunakan untuk meningkatkan PDRB sub sektor pertanian antara lain: (1) Peningkatan sarana prasarana produksi pertanian, perkebunan, dan perternakan; (2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia pertanian, perkebunan dan peternakan. Sedangkan Pencapaian sasaran untuk menurunkan angka pengangguran, strategi yang digunakan antara lain: (1) Peningkatan kesempatan kerja, (2) Peningkatan peran KUKM dalam perluasan kesempatan kerja, (3) Peningkatan promosi, koordinasi, kerjasama dan investasi dalam perluasan kesempatan kerja. Sedangkan untuk sasaran penurunan angka kemiskinan, strategi yang digunakan antara lain: (1) Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dan (2) Meningkatkan pendapatan masyarakat miskin.

Gambar V.8
Perkembangan Indikator Makro Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2018/2019



Gambar V.9
Sasaran Pembangunan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021



Tabel V.5

Sasaran. Arah Kebijakan dan Program Prioritas di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021

NO	RKPD 2021							
	Sasaran Pembangunan	Strategi		Program		Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	2	3		4		5	6	7
1	**PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN AGROPOLITAN**	**1**	Peningkatan Sarana Prasarana Produksi Pertanian, Perkebunan, Dan Perternakan	**1**	**Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian**	Persentase ketersediaan Saprodi pertanian	15%	DINAS PERTANIAN
						Persentase peningkatan luas tanam tanaman pangan	69,58%	DINAS PERTANIAN
						Persentase peningkatan luas tanam Hortikultura	14,21%	DINAS PERTANIAN
						Persentase peningkatan luas tanam perkebunan	10,17%	DINAS PERTANIAN
						Persentase ketersediaan benih/bibit pertanian tingkat lapang (daerah)	50%	DINAS PERTANIAN
						Persentase benih/bibit pertanian berlabel dan bersertifikat	5%	DINAS PERTANIAN
						Persentase pertambahan angka kelahiran ternak	356,32%	DINAS PERTANIAN
						Persentase penurunan kasus penyakit hewan menular	100%	DINAS PERTANIAN
						Peningkatan unit usaha yang bersertifikasi NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	90	DINAS PERTANIAN
						Persentase ketersediaan pakan ternak	90%	DINAS PERTANIAN
				2	**Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian**	Rasio ketersediaan prasarana pertanian	15	DINAS PERTANIAN
		2	Peningkatan Produkasi Dan Pengelolaan Hasil Produksi Pertanian, Per-kebunaan Dan Peternakan	**1**	**Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**	Persentase penurunan kasus penyakit hewan menular	75%	DINAS PERTANIAN
				2	**Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian**	Dokumen laporan pengen-dalian dan penanggulangan bencana pertanian	4 Dokumen	DINAS PERTANIAN
				3	**Program Perizinan Usaha Pertanian**	Dokumen perizinan usaha	1 Dokumen	DINAS PERTANIAN

NO	RKPD 2021							
	Sasaran Pembangunan	Strategi		Program		Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	2	3		4		5	6	7
						pertanian		
		3	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pertanian, Perkebunan Dan Peternakan	**1**	**Program penyuluhan pertanian**	Persentase peningkatan kelas kelompok tani	80%	DINAS PERTANIAN
2	**MENURUNKAN TINGKAT PENGANGGURAN**	**1**	Peningkatan kesempatan kerja	**1**	**Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja**	Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berdasarkan klaster kompetensi		DISNAKER
						Persentase pelatihan kerjasama dengan sektor swasta dan instansi pemerintah lainnya untuk penyedia instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja		DISNAKER
						Meningkatnya kompetensi dan produktivitas		DISNAKER
				2	**Program Penempatan Tenaga Kerja**			DISNAKER
		2	Peningkatan Peran KUKM Dalam Meningkatkan Kesempatan Kerja	**1**	**Program Pelayanan Izin Simpan Pinjam**	Persentase rekomendasi izin usaha simpan pinjam yang dikeluarkan	20%	DINAS KUKM
				2	**Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi**	Persentase koperasi aktif	70%	DINAS KUKM
				3	**Program Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi**	Persentase koperasi berkualitas	50%	DINAS KUKM
				4	**Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian**	Persentase SDM koperasi yang terlatih	30%	DINAS KUKM
				5	**Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi**	Persentase koperasi yang diberdayakan	20%	DINAS KUKM
				6	**Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UKM)**	Persentase UMKM yang diberdayakan	1%	DINAS KUKM
				7	**Program Pengembangan UKM**	Persentase UMKM yang dikembangkan	1%	DINAS KUKM
		3	Peningkatan Promosi, Koordinasi, Kerjasama, Dan Investasi Dalam Peningkatan Lapangan Pekerjaan	**1**	**Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**	Jumlah kebijakan daerah yang mendukung investasi	1 Kebijakan	DINAS PMPTSP
				2	**Program Promosi Penanaman Modal**	Jumlah realisasi investasi	1,9 Trilyun	DINAS PMPTSP

NO	RKPD 2021							
	Sasaran Pembangunan	Strategi		Program		Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	2	3		4		5	6	7
				3	**Program Pelayanan Penanaman Modal**	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai SOP	100%	DINAS PMPTSP
						Jumlah pengaduan dan layanan konsultasi	12 Pengaduan	DINAS PMPTSP
				4	**Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**	Meningkatnya persentase capaian realisasi investasi	15%	DINAS PMPTSP
				5	**Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal**	Persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan sesuai SOP	100%	DINAS PMPTSP
		4	Peningkatan Kompetensi, Hubungan Industrial Dan Keselamatan Tenaga Kerja	**1**	**Program Hubungan Industrial**	Persentase perusahaan yang telah memiliki sarana hubungan industrial		DISNAKER
3	**MENURUNKAN TINGKAT KEMISKINAN**	1	Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin	**1**	**Program Pemberdayaan Sosial**	Prosentase PMKS/PSKS yang terberdayakan		DINAS SOSIAL
				2	**Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan**	Prosentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang ditangani		DINAS SOSIAL
				3	**Program Rehabilitasi Sosial**	Prosentase PMKS yang di rehabilitasi sosial di dalam panti non pemerintah		DINAS SOSIAL
				4	**Program Rehabilitasi Sosial**	Prosentase PMKS yang di rehabilitasi sosial di PSBL		DINAS SOSIAL
				5	**Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial**	Prosentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial		DINAS SOSIAL
4	**MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA**	1	Peningkatan pendapatan masyarakat desa	**1**	**Program Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	Tingkat kualitas tata kelola pemerintahan desa		DINAS PEMDES
				2	**Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat**	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif. Persentase lembaga adat desa yang aktif		DINAS PEMDES
				3	**Program peningkatan kerjasama desa**	Persentase kerjasama Desa yang dilaksanakan		DINAS PEMDES

5.1.5. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bangka Selatan

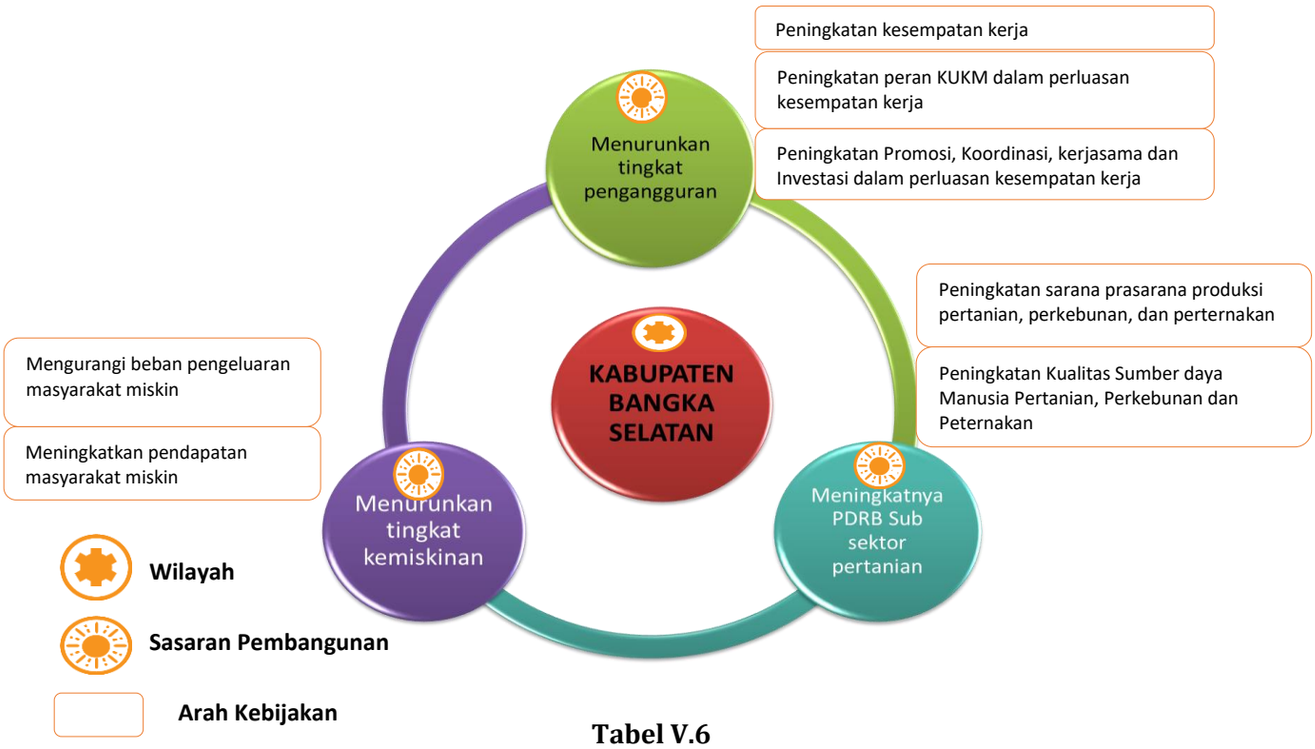
Pembangunan Kabupaten Bangka difokuskan pada dua sasaran utama yaitu meningkatnya ekonomi daerah melalui peningkatan sub sektor pertanian dengan indikator laju pertumbuhan PDRB sub sektor pertanian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan sasaran penurunan angka pengangguran dengan indikator tingkat pengangguran terbuka dan penurunan angka kemiskinan dengan indikator angka kemiskinan.

Strategi yang digunakan untuk meningkatkan PDRB sub sektor pertanian antara lain: (1) Peningkatan sarana prasarana produksi pertanian, perkebunan, dan perternakan; (2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia pertanian, perkebunan dan peternakan. sedangkan pencapaian sasaran untuk menurunkan angka pengangguran, strategi yang digunakan antara lain: (1) Peningkatan kesempatan kerja, (2) Peningkatan peran KUKM dalam perluasan kesempatan kerja, (3) Peningkatan promosi, koordinasi, kerjasama dan investasi dalam perluasan kesempatan kerja. Sedangkan untuk sasaran penurunan angka kemiskinan, strategi yang digunakan antara lain: (1) Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dan (2) Meningkatkan pendapatan masyarakat miskin.

Gambar V.10
Perkembangan Indikator Makro Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2018/2019



Gambar V.11
Sasaran Pembangunan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021



Tabel V.6
Sasaran. Arah Kebijakan dan Program Prioritas di Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021

NO	RKPD 2021							
	Sasaran Pembangunan	Strategi		Program		Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	2	3		4		5	6	7
1	**PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN AGROPOLITAN**	**1**	Peningkatan Sarana Prasarana Produksi Pertanian, Perkebunan, Dan Perternakan	**1**	**Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian**	Persentase ketersediaan saprodi pertanian	15%	DINAS PERTANIAN
						Persentase peningkatan luas tanam tanaman pangan	69,58%	DINAS PERTANIAN
						Persentase peningkatan luas tanam Hortikultura	14,21%	DINAS PERTANIAN
						Persentase peningkatan luas tanam perkebunan	10,17 %	DINAS PERTANIAN
						Persentase ketersediaan benih/bibit pertanian tingkat lapang (daerah)	50%	DINAS PERTANIAN
						Persentase benih/bibit pertanian berlabel dan bersertifikat	5%	DINAS PERTANIAN
						Persentase pertambahan angka kelahiran ternak	356,32%	DINAS PERTANIAN
						Persentase penurunan kasus penyakit hewan menular	100%	DINAS PERTANIAN
						Peningkatan unit usaha yang bersertifikasi NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	90	DINAS PERTANIAN
						Persentase ketersediaan pakan ternak	90%	DINAS PERTANIAN
				2	**Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian**	Rasio ketersediaan prasarana pertanian	15	DINAS PERTANIAN
		2	Peningkatan Produkasi dan Pengelolaan Hasil Produksi Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	**1**	**Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**	Persentase penurunan kasus penyakit hewan menular	75%	DINAS PERTANIAN
				2	**Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian**	Dokumen laporan pengendalian dan penanggulangan	4 Dokumen	DINAS PERTANIAN

NO	RKPD 2021							
	Sasaran Pembangunan	Strategi		Program		Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	2	3		4		5	6	7
						bencana pertanian		
				3	**Program Perizinan Usaha Pertanian**	Dokumen perizinan usaha pertanian	1 Dokumen	DINAS PERTANIAN
		3	Peningkatan Kualitas Sumber daya Manusia Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	**1**	**Program Penyuluhan Pertanian**	Persentase peningkatan kelas kelompok tani	80%	DINAS PERTANIAN
2	**MENURUNKAN TINGKAT PENGANGGURAN**	1	Peningkatan Kesempatan Kerja	**1**	**Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja**	Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berdasarkan klaster kompetensi		DISNAKER
						Persentase pelatihan kerjasama dengan sektor swasta dan instansi pemerintah lainnya untuk penyedia instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja		DISNAKER
						Meningkatnya kompetensi dan produktivitas		DISNAKER
				2	**Program Penempatan Tenaga Kerja**			DISNAKER
		2	Peningkatkan Peran KUKM Dalam Meningkatkan Kesempatan Kerja	**1**	**Program Pelayanan Izin Simpan Pinjam**	Persentase rekomendasi izin usaha simpan pinjam yang dikeluarkan	20%	DINAS KUKM
				2	**Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi**	Persentase koperasi aktif	70%	DINAS KUKM
				3	**Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi**	Persentase koperasi berkualitas	50%	DINAS KUKM
				4	**Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian**	Persentase SDM koperasi yang terlatih	30%	DINAS KUKM
				5	**Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi**	Persentase koperasi yang diberdayakan	20%	DINAS KUKM

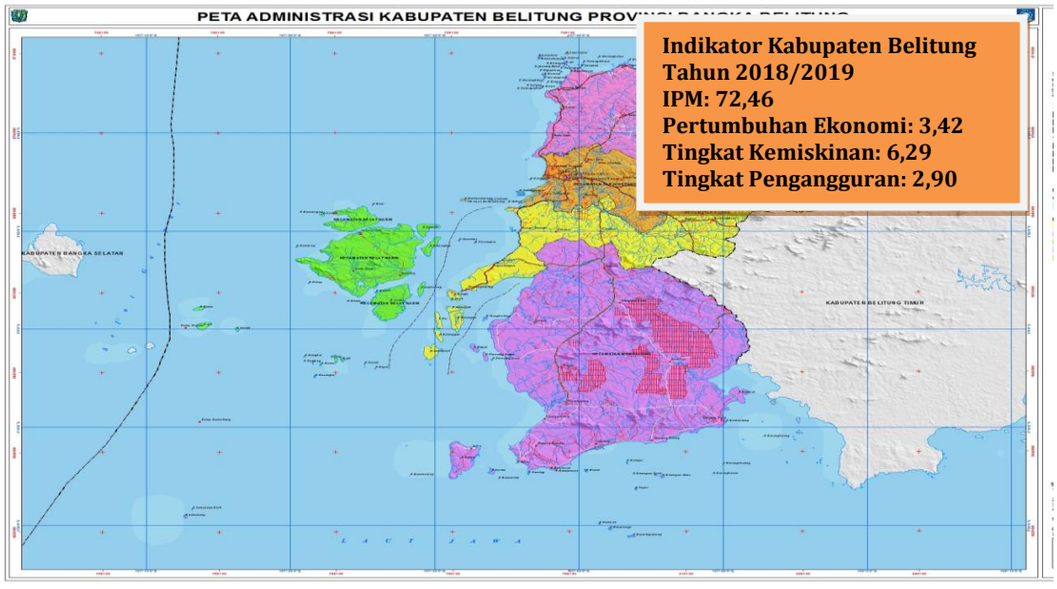
NO	RKPD 2021							
	Sasaran Pembangunan	Strategi		Program		Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	2	3		4		5	6	7
				6	**Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UKM)**	Persentase UMKM yang diberdayakan	1%	DINAS KUKM
				7	**Program Pengembangan UKM**	Persentase UMKM yang dikembangkan	1%	DINAS KUKM
		3	Peningkatan Promosi, koordinasi, kerjasama, dan investasi dalam peningkatan lapangan pekerjaan	**1**	**Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**	Jumlah kebijakan daerah yang mendukung investasi	1 Kebijakan	DINAS PMPTSP
				2	**Program Promosi Penanaman Modal**	Jumlah realisasi investasi	1,9 Trilyun	DINAS PMPTSP
				3	**Program Pelayanan Penanaman Modal**	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai SOP	100%	DINAS PMPTSP
						Jumlah pengaduan dan layanan konsultasi	12 Pengaduan	DINAS PMPTSP
				4	**Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**	Meningkatnya persentase capaian realisasi investasi	15%	DINAS PMPTSP
				5	**Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal**	Persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan sesuai SOP	100%	DINAS PMPTSP
		4	Peningkatan Kompetensi, hubungan industrial dan keselamatan tenaga kerja	**1**	**Program Hubungan Industrial**	Persentase perusahaan yang telah memiliki sarana hubungan industrial		DISNAKER
3	**MENURUNKAN TINGKAT KEMISKINAN**	1	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin	**1**	**Program Pemberdayaan Sosial**	Persentase PMKS/PSKS yang terberdayakan		DINAS SOSIAL
				2	**Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan**	Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang ditangani		DINAS SOSIAL
				3	**Program Rehabilitasi Sosial**	Persentase PMKS yang di rehabilitasi sosial di dalam panti non pemerintah		DINAS SOSIAL
				4	**Program Rehabilitasi Sosial**	Persentase PMKS yang di rehabilitasi sosial di PSBL		DINAS SOSIAL

NO	RKPD 2021							
	Sasaran Pembangunan	Strategi		Program		Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	2	3		4		5	6	7
				5	**Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**	Persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial		DINAS SOSIAL
4	**MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA**	1	Peningkatan pendapatan masyarakat desa	**1**	**Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Tingkat kualitas tata kelola pemerintahan desa		DINAS PEMDES
				2	**Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat**	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif. Persentase lembaga adat desa yang aktif		DINAS PEMDES
				3	**Program Peningkatan Kerjasama Desa**	Persentase kerjasama Desa yang dilaksanakan		DINAS PEMDES

5.1.6. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Belitung

Pembangunan Kabupaten Belitung difokuskan pada dua sasaran utama yaitu meningkatnya ekonomi daerah melalui peningkatan kontribusi sector pariwisata dengan tingkat kunjungan wisatawan dan besaran kontribusi sector pariwisata terhadap PDRB dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan sasaran penurunan angka pengangguran dengan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka dan penurunan angka kemiskinan dengan indikator angka kemiskinan.

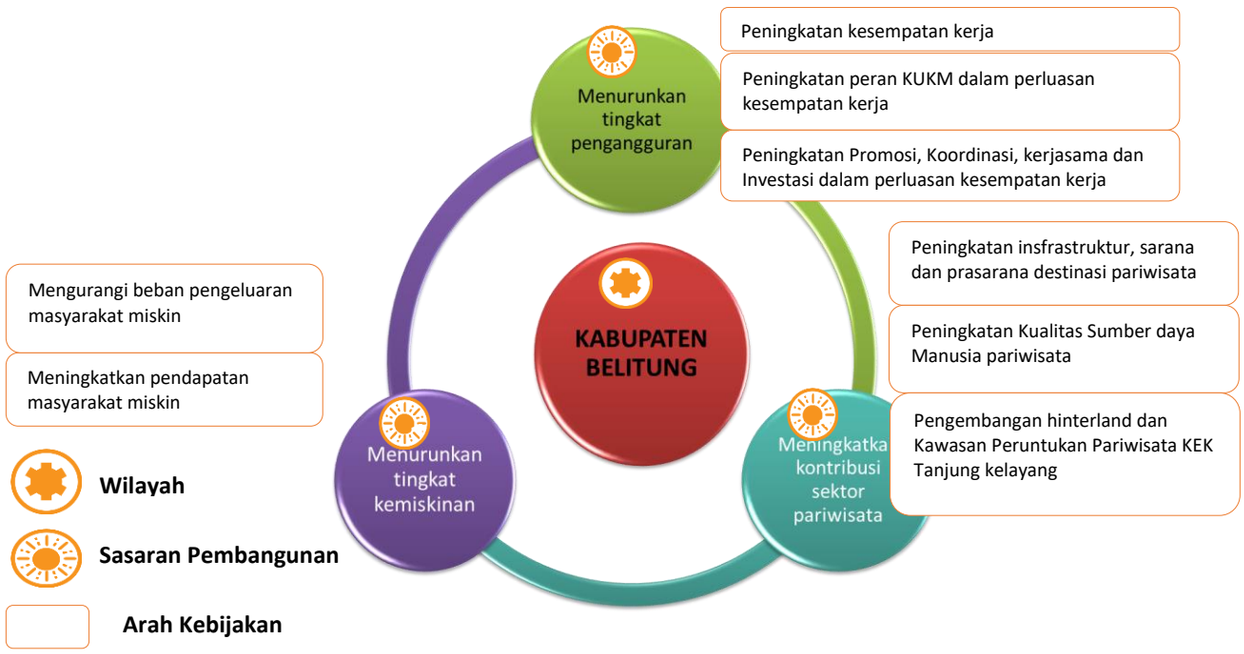
Gambar V.12
Perkembangan Indikator Makro Kabupaten Belitung Tahun 2018/2019



Strategi yang digunakan untuk meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB antara lain: (1) Peningkatan insfrastruktur, sarana dan prasarana destinasi pariwisata; (2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia pariwisata dan (3) Pengembangan hinterland dan kawasan peruntukan pariwisata Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Kelayang. Sedangkan

Pencapaian sasaran untuk menurunkan angka pengangguran, strategi yang digunakan antara lain: (1) Peningkatan kesempatan kerja, (2) Peningkatan peran KUKM dalam perluasan kesempatan kerja, (3) Peningkatan promosi, koordinasi, kerjasama dan investasi dalam perluasan kesempatan kerja. Sedangkan untuk sasaran penurunan angka kemiskinan, strategi yang digunakan antara lain: (1) Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dan (2) Meningkatkan pendapatan masyarakat miskin.

Gambar V.13
Sasaran Pembangunan Kabupaten Belitung Tahun 2021



Tabel V.7
Sasaran, Arah Kebijakan dan Program Prioritas di Kabupaten Belitung Tahun 2021

NO	RKPD 2021							
	Sasaran Pembangunan	Strategi		Program		Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*		*4*		*5*	*6*	*7*
1	**PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN PARIWISATA**	1	Peningkatan peran serta masyarakat dan kelembagaan pariwisata serta Pengembangan ekonomi kreatif	**1**	**Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak kekayaan Intelektual**	Persentase kabupaten/kota yang terindentifikasi untuk pengembangan kabupaten/kota kreatif, ruang kreasi dan jaringan orang kreatif	42,85%	DISBUDPAR
						Persentase produk kreatif yang potensial untuk perluasan pasar	1,94%	DISBUDPAR
		2	Peningkatan insfrastruktur, sarana dan prasarana destinasi pariwisata	**1**	**Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata**	Persentase destinasi pariwisata yang memenuhi standar	0,7%	DISBUDPAR

NO	RKPD 2021							
	Sasaran Pembangunan	Strategi		Program		Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*		*4*		*5*	*6*	*7*
		3	Peningkatan Kualitas Sumber daya Manusia pariwisata	**1**	**Program Pembinaan Sejarah**	Persentase Pembinaan Sejarah	0,35	DISBUDPAR
				2	**Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif**	Persentase SDM pariwisata dan ekonomi kreatif terlatih dan terserfikasi	29,14%	DISBUDPAR
						Persentase kemitraan pariwisata yang terbentuk	82,85%	DISBUDPAR
						Persentase Assesor bidang yang terlatih	0,5%	DISBUDPAR
		4	Peningkatan Peran serta kepemudaan dan olah raga serta kebudayaan dalam pengembangan pariwisata	**1**	**Program Pengembangan Kebudayaan**	Persentase kebudayaan yang dikelola	0,55%	DISBUDPAR
				2	**Program Pengembangan Kesenian Tradisional**	Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan	0,55%	DISBUDPAR
2	**MENURUNKAN TINGKAT PENGANGGURAN**	1	Peningkatan kesempatan kerja	**1**	**Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja**	Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berdasarkan klaster kompetensi		DISNAKER
						Persentase pelatihan kerjasama dengan sektor swasta dan instansi pemerintah lainnya untuk penyedia instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja		DISNAKER
						Meningkatnya kompetensi dan produktivitas		DISNAKER
				2	**Program Penempatan Tenaga Kerja**			DISNAKER
		2	Peningkatkan peran KUKM dalam meningkatkan kesempatan kerja	**1**	**Program Pelayanan Izin Simpan Pinjam**	Persentase rekomendasi izin Usaha Simpan Pinjam yang dikeluarkan	20%	DINAS KUKM

NO	RKPD 2021							
	Sasaran Pembangunan	Strategi		Program		Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*		*4*		*5*	*6*	*7*
				2	**Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi**	Persentase Koperasi Aktif	70%	DINAS KUKM
				3	**Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi**	Persentase Koperasi berkualitas	50%	DINAS KUKM
				4	**Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian**	Persentase SDM Koperasi yang terlatih	30%	DINAS KUKM
				5	**Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi**	Persentase Koperasi yang diberdayakan	20%	DINAS KUKM
				6	**Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UKM)**	Persentase UMKM yang diberdayakan	1%	DINAS KUKM
				7	**Program Pengembangan UKM**	Persentase UMKM yang dikembangkan	1%	DINAS KUKM
		3	Peningkatan Promosi, Koordinasi, Kerjasama, Dan Investasi Dalam Peningkatan Lapangan Pekerjaan	**1**	**Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**	Jumlah kebijakan daerah yang mendukung investasi	1 Kebijakan	DINAS PMPTSP
				2	**Program Promosi Penanaman Modal**	Jumlah Realisasi Investasi	1,9 Trilyun	DINAS PMPTSP
				3	**Program Pelayanan Penanaman Modal**	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sesuai SOP	100%	DINAS PMPTSP
						Jumlah Pengaduan dan Layanan Konsultasi	12 Pengaduan	DINAS PMPTSP
				4	**Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**	Meningkatnya persentase capaian realisasi investasi	15%	DINAS PMPTSP
				5	**Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal**	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP	100%	DINAS PMPTSP
		4	Peningkatan Kompetensi, Hubungan Industrial Dan Keselamatan Tenaga Kerja	**1**	**Program Hubungan Industrial**	Persentase perusahaan yang telah memiliki sarana hubungan industrial		DISNAKER

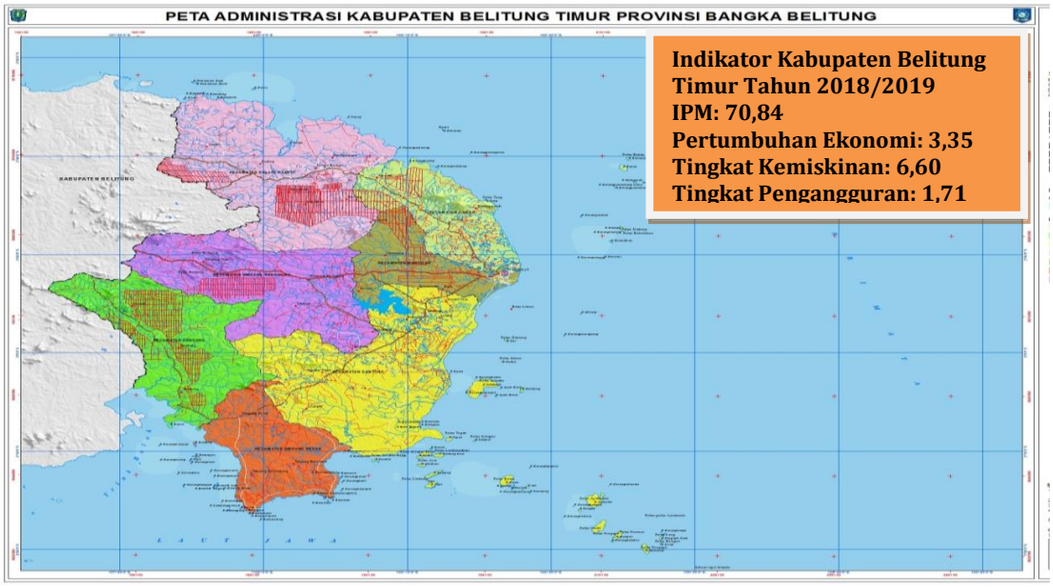
NO	RKPD 2021							
	Sasaran Pembangunan	Strategi		Program		Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*		*4*		*5*	*6*	*7*
3	**MENURUNKAN TINGKAT KEMISKINAN**	1	Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin	**1**	**Program Pemberdayaan Sosial**	Prosentase PMKS/PSKS yang terberdayakan		DINAS SOSIAL
				2	**Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan**	Prosentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang di ditangani		DINAS SOSIAL
				3	**Program Rehabilitasi Sosial**	Prosentase PMKS yang di rehabilitasi sosial di dalam panti non pemerintah		DINAS SOSIAL
				4	**Program Rehabilitasi Sosial**	Prosentase PMKS yang di Rehabilitasi sosial di PSBL		DINAS SOSIAL
				5	**Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial**	Prosentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial		DINAS SOSIAL
4	MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA	1	Peningkatan Pendapatan Masyarakat Desa	1	**Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Tingkat kualitas tata kelola pemerintahan desa		DINAS PEMDES
				2	**Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat**	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif. Persentase lembaga adat desa yang aktif		DINAS PEMDES
				3	**Program Peningkatan Kerjasama Desa**	Persentase kerjasama desa yang dilaksanakan		DINAS PEMDES

5.1.7. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Belitung Timur

Pembangunan Kabupaten Belitung difokuskan pada dua sasaran utama yaitu meningkatnya ekonomi daerah melalui peningkatan sub sector perikanan dengan indikator laju pertumbuhan PDRB sub sector perikanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan sasaran penurunan angka pengangguran dengan indikator tingkat pengangguran terbuka dan penurunan angka kemiskinan dengan indikator angka kemiskinan.

Gambar V.14

Perkembangan Indikator Makro Kabupaten Belitung Timur Tahun 2018/2019



Strategi yang digunakan untuk meningkatkan sub sektor perikanan antara lain: (1) Peningkatan sarana prasarana produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya; (2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Sedangkan pencapaian sasaran untuk menurunkan angka pengangguran, strategi yang digunakan antara lain: (1) Peningkatan kesempatan kerja, (2) Peningkatan peran KUKM dalam perluasan kesempatan kerja, (3) Peningkatan promosi, koordinasi, kerjasama dan investasi dalam perluasan kesempatan kerja. Sedangkan untuk sasaran penurunan angka kemiskinan, strategi yang digunakan antara lain: (1) Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dan (2) Meningkatkan pendapatan masyarakat miskin.

Gambar V.15
Sasaran Pembangunan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021



Tabel V.8
Sasaran. Arah Kebijakan dan Program Prioritas di Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021

NO	RKPD 2021							
	Sasaran Pembangunan	Strategi		Program		Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*		*4*		*5*	*6*	*7*
1	**PEMBANGUNAN BAHARI**	**1**	Meningkatan pengendalian dan pengawasan terhadap wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil	**1**	**Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil**	Luasan ruang laut, pesisir dan pulau pulau kecil yang termanfaatkan (Ha)		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		2	Peningkatan Produksi Dan Pengelolaan Hasil Produksi Perikanan Tangkap Dan Perikanan Budidaya	**1**	**Program Pengembangan Perikanan Tangkap**	Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap (%)	1,85%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
				2	**Program Pengembangan Perikanan Budidaya**	Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap (%)		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
				3	**Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan**	Persentase Pelaku Usaha yang Taat Aturan (%)	75%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		3	Peningkatan Promosi, Koordinasi, Kerjasama, Dan Investasi Dalam Peningkatan Produksi Dan Nilai Tambah Hasil Produksi Perikanan Tangkap Dan Perikanan Budidaya	**1**	**Program Pengembangan Usaha Pengolahan Hasil Perikanan**	Pertumbuhan produksi usaha pengolahan hasil perikanan (%)	3,30%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
2	**MENURUNKAN TINGKAT PENGANGGURAN**	1	Peningkatan kesempatan kerja	**1**	**Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja**	Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berdasarkan klaster kompetensi		Disnaker
						Persentase pelatihan kerjasama dengan sektor swasta dan instansi pemerintah lainnya untuk penyedia instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja		Disnaker
						Meningkatnya kompetensi dan produktivitas		Disnaker
				2	**Program Penempatan Tenaga Kerja**			Disnaker
		2	Peningkatkan Peran KUKM Dalam Meningkatkan Kesempatan Kerja	**1**	**Program Pelayanan Izin Simpan Pinjam**	Persentase rekomendasi izin usaha simpan pinjam yang dikeluarkan	20%	DINAS KUKM

NO	RKPD 2021							
	Sasaran Pembangunan	Strategi		Program		Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*		*4*		*5*	*6*	*7*
				2	**Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi**	Persentase koperasi aktif	70%	DINAS KUKM
				3	**Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi**	Persentase koperasi berkualitas	50%	DINAS KUKM
				4	**Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian**	Persentase SDM koperasi yang terlatih	30%	DINAS KUKM
				5	**Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi**	Persentase koperasi yang diberdayakan	20%	DINAS KUKM
				6	**Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UKM)**	Persentase UMKM yang diberdayakan	1%	DINAS KUKM
				7	**Program Pengembangan UKM**	Persentase UMKM yang dikembangkan	1%	DINAS KUKM
		3	Peningkatan Promosi, Koordinasi, Kerjasama, Dan Investasi Dalam Peningkatan Lapangan Pekerjaan	**1**	**Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**	Jumlah kebijakan daerah yang mendukung investasi	1 Kebijakan	DINAS PMPTSP
				2	**Program Promosi Penanaman Modal**	Jumlah realisasi investasi	1,9 Trilyun	DINAS PMPTSP
				3	**Program Pelayanan Penanaman Modal**	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sesuai SOP	100 %	DINAS PMPTSP
						Jumlah Pengaduan dan Layanan Konsultasi	12 Pengaduan	DINAS PMPTSP
				4	**Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**	Meningkatnya persentase capaian realisasi investasi	15%	DINAS PMPTSP
				5	**Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal**	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP	100%	DINAS PMPTSP
		4	Peningkatan Kompetensi, Hubungan Industrial Dan Keselamatan Tenaga Kerja	**6**	**Program Hubungan Industrial**	Persentase perusahaan yang telah memiliki sarana hubungan industrial		DISNAKER

NO	RKPD 2021							
	Sasaran Pembangunan	Strategi		Program		Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*		*4*		*5*	*6*	*7*
3	**MENURUNKAN TINGKAT KEMISKINAN**	1	Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin	**1**	**Program Pemberdayaan Sosial**	Prosentase PMKS/PSKS yang terberdayakan		DINAS SOSIAL
				2	**Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan**	Prosentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang di ditangani		DINAS SOSIAL
				3	**Program Rehabilitasi Sosial**	Prosentase PMKS yang di rehabilitasi sosial di dalam panti non pemerintah		DINAS SOSIAL
				4	**Program Rehabilitasi Sosial**	Prosentase PMKS yang di rehabilitasi sosial di PSBL		DINAS SOSIAL
				5	**Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial**	Prosentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial		DINAS SOSIAL
4	**MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA**	1	Peningkatan Pendapatan Masyarakat Desa	**1**	**Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Tingkat kualitas tata kelola pemerintahan desa		DINAS PEMDES
				2	**Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat**	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif. Persentase lembaga adat desa yang aktif		DINAS PEMDES
				3	**Program Peningkatan Kerjasama Desa**	Persentase kerjasama Desa yang dilaksanakan		DINAS PEMDES

5.2. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan pedoman perencanaan yang harus diacu dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Di dalam dokumen RTRW telah ditetapkan Rencana Pola Ruang, Rencana Struktur Ruang, serta Rencana Kawasan Strategis.

1. Rencana Pola Ruang

a. Kawasan Lindung;
b. Kawasan Budidaya.

Di dalam rencana pola ruang telah ditetapkan rencana pengembangan kawasan lindung yang meliputi:

a. Kawasan hutan lindung;
b. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya;
c. Kawasan perlindungan setempat;
d. kawasan suaka alam;
e. pelestarian alam, situs dan kawasan cagar budaya;

f. kawasan rawan bencana alam.

2. Rencana Struktur Ruang Wilayah

a. Rencana Sistem Perkotaan;
b. Rencana Sistem Jaringan Transportasi;
c. Rencana Sistem Jaringan Energi;
d. Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi;
e. Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air;
f. Sistem Prasarana Lingkungan.

3. Rencana Kawasan Strategis

a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya;
c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

5.2.1 Indikasi Program Utama Lima Tahunan RTRW Kepulauan Bangka Belitung

Tujuan penataan ruang wilayah provinsi merupakan arahan perwujudan ruang wilayah provinsi yang ingin dicapai pada masa yang akan datang. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disusun pada Tahun 2011 dan pemberlakuannya sampai dengan Tahun 2034 sehingga saat ini tahapan tersebut telah memasuki tahapan 5 (lima) tahun kedua yang berarti diperlukan kolaborasi atau penyesuaian terhadap visi dan misi kepala daerah.

Tahapan RTRW yang kedua ini juga masih merujuk pada indikasi program utama yang ditetapkan pada saat penyusunan dan penetapan terhadap Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034 dikarenakan belum ada peninjauan kembali maupun revisi terhadap RTRW tersebut.

Indikasi program utama pada tahun tahapan kedua (Tahun 2017-2022) dimaksud mencakup :

A. Pemantapan Sistem Perkotaan
   - A.1 Perwujudan PKNp Pangkal Pinang
   - A.2 Perwujudan PKW Muntok
   - A.3 Perwujudan PKW Tanjung Pandan
   - A.4 Perwujudan PKW Manggar
   - A.5 Perwujudan PKL Kelapa
   - A.6 Perwujudan PKL Puding Besar
   - A.7 Perwujudan PKL Sungai Selan
   - A.8 Perwujudan PKL Payung
   - A.9 Perwujudan PKL Sungailiat
   - A.10 Perwujudan PKWp Koba
   - A.11 Perwujudan PKWp Toboali

B. Perwujudan Sistem Prasarana Wilayah
   - B.1 Perwujudan Sistem Transportasi
   - B.2 Perwujudan Sistem Jaringan Energi/Listrik
   - B.3 Perwujudan Sistem Telekomunikasi

B.4 Perwujudan Sistem Sumber Daya Air

B.5 Perwujudan Sistem Prasarana Permukiman

C. Perwujudan Pola Ruang

C.1 Perwujudan Kawasan Lindung

C.2 Perwujudan Kawasan Budidaya

D. Perwujudan Kawasan Strategis

D.1 Perwujudan Kawasan Tanjung Kalian

D.2 Perwujudan Kawasan Industri Perikanan Terpadu di Teluk Klabat Belinyu

D.3 Perwujudan Pelabuhan dan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Berikat

D.4 Perwujudan KTM Batu Betumpang

D.5 Perwujudan Kawasan Minapolitan Lepar Pongok

D.6 Perwujudan Kawasan etalase Perikanan Selat Nasik

D.7 Perwujudan Kawasan Industri Perikanan Tanjung Binga

D.8 Perwujduan Kawasan Kota Terpadu Mandiri

D.9 Perwujduan Kawasan Industri Terpadu Air Kelik (KIAK)

D.10 Perwujduan Pelabuhan ASDP Manggar – Kepang

D.11 Perwujduan Kota Tua Muntok

D.12 Perwujudan Kawasan Universitas Bangka Belitung (UBB)

D.13 Perwujudan PLTN (Bangka Barat & Bangka Selatan)

D.14 Pengelolaan Kawasan Gunung Lalang (Cagar Alam)

D.15 Perwujduan Kawasan Pertahanan dan Kemanan (Kawasan Latihan Tempur Militer Buding)

Penjabaran terhadap beberapa indikator utama tersebut dituangkan dalam beberapa kegiatan seperti yang terinci pada tabel berikut dibawah ini. Dalam perkembangannya seperti yang telah dikemukakan di atas maka diperlukan penyesuain mulai dari visi dan misi kepala daerah terbarukan (tahapan kedua RTRW), kemudian terhadap evaluasi dan (rencana revisi RTRW) serta penyesuaian terhadap aturan terbarukan dari nama program, kegiatan sampai dengan sub kegiatan sehingga pada sub bab ini bersifat mengulas Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034 berdasarkan tahapannya, yang berarti bahwa penyesuaian akan dijabarkan dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan pada bab dan sub bab berikutnya yang telah terbarukan (sesuai dengan kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta Organisasi Perangkat Daerah). Indikator Program Utama Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi 2014-2034 Tahapan 2021-2034 sebagaimana Tabel V.8 dibawah ini :

Tabel V.8

Indikator Program Utama Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi 2014-2034 Tahapan 2021-2034

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN				SUMBER DANA	PELAKSANA	KETERANGAN
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV			
				15-19	20-24	25-29	30-34			
(1)	(2)	(3)	(4)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
A	**Pemantapan Sistem Perkotaan**									
A1	**Perwujudan PKNP Pangkal Pinang**	Penyusunan RDTR Kota Pangkal Pinang	Dinas Pekerjaan Umum	√				APBD Kab/Kota	Dinas Pekerjaan Umum	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Pengembangan kantor Provinsi dan permukiman di Bukit Intan	Dinas Pekerjaan Umum	√				APBD Prov	Dinas Pekerjaan Umum	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Pembangunan Kawasan Industri di Pangkalbalam	Dinas Perindag	√				APBD Kab/Kota	Dinas Perindag	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Pengembangan inner ringroad dan outer ring road	Dinas Pekerjaan Umum	√				APBD Prov	Dinas Pekerjaan Umum	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Pengembangan taman kota	Dinas Pekerjaan Umum					APBD Kab/Kota	Dinas Pekerjaan Umum	Merupakan lanjutan dari Tahap I
		Pemanfaatan kolong dan lahan genangan secara lebih bermanfaat	Badan Lingkhungan Hidup Daerah (DLHD)					APBD Kab/Kota	Badan Lingkhungan Hidup Daerah (DLHD)	Merupakan lanjutan dari Tahap I
		Mengembangkan Pelabuhan Pangkalbalam	Dinas Perhubungan					APBD Prov	Dinas Perhubungan	Merupakan lanjutan dari Tahap I
		Pengembangan kawasan wisata kota di Pasirpadi	Dinas Budpar	√				APBD Kab/Kota	Dinas Budpar	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Peningkatan terminal	Dinas Perhubungan	√				APBD Prov	Dinas Perhubungan	(seharusnya) selesai pada tahap I
A2	**Perwujudan PKW Muntok**	Pemantapan tata batas kawasan kota tua	BPN	√					BPN	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Penyusunan RDTR Kota tua	Dinas Pekerjaan Umum	√				APBD Kab/Kota	Dinas Pekerjaan Umum	(seharusnya) selesai pada tahap I

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN				SUMBER DANA	PELAKSANA	KETERANGAN
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV			
				15-19	20-24	25-29	30-34			
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
		Melakukan restorasi dan revitalisasi bangunan bersejarah	Dinas Pekerjaan Umum					APBN/APBD	Dinas Pekerjaan Umum	Merupakan lanjutan dari Tahap I
		Perbaikan dan pembangunan jalan antar pusat kegiatan	Dinas Pekerjaan Umum					APBD Kab/Kota	Dinas Pekerjaan Umum	Merupakan lanjutan dari Tahap I
		Pembangunan sistem penyediaan air minum	Dinas Pekerjaan Umum	√				APBD Kab/Kota	Dinas Pekerjaan Umum	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Pembangunan fasiltias kesehatan rumah sakit tipe B	Dinas Kesehatan	√				APBD Prov	Dinas Kesehatan	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Pembangunan IPAL pada pusat perdagangan, fasilitas sosial/umum dan kawasan wisata	Badan Lingkhungan Hidup Daerah	√				APBD Kab/Kota	Badan Lingkhungan Hidup Daerah	(seharusnya) selesai pada tahap I
A3	**Perwujudan PKW Tanjung Pandan**	Pembangunan kawasan ekonomi khusus Tanjung Batu	Disperindag	√				APBD Prov	Disperindag	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Pengembangan kawasan wisata	Disbudpar	√				APBD Kab/Kota	Disbudpar	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Pembangunan infrastruktur pendukung wisata bahari	Dinas Pekerjaan Umum	√				APBD Kab/Kota	Dinas Pekerjaan Umum	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Pembangunan fasilitas perdagangan berskala regional (pulau)	Disperindag	√				APBD Prov	Disperindag	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Pembangunan museum bahari	Disbudpar	√				APBD Prov	Disbudpar	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Pembangunan terminal tipe B	Dinas Pekerjaan Umum	√				APBD Prov	Dinas Pekerjaan Umum	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Pembangunan sistem penyediaan air minum	Dinas Pekerjaan Umum	√				APBD Kab/Kota	Dinas Pekerjaan Umum	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Pembangunan fasiltias kesehatan rumah sakit tipe B	Dinas Kesehatan	√				APBD Prov	Dinas Kesehatan	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Pembangunan IPAL pada pusat perdagangan, fasilitas sosial/umum dan kawasan wisata	DLHD	√				APBD Kab/Kota	DLHD	(seharusnya) selesai pada tahap I

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN				SUMBER DANA	PELAKSANA	KETERANGAN
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV			
				15-19	20-24	25-29	30-34			
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
A4	Perwujudan **PKW Manggar**	Penyusunan RDTR kawasan perkotaan Manggar	Dinas Pekerjaan Umum	√				APBD Kab/Kota	Dinas Pekerjaan Umum	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Rehabilitasi dan Refungsionalisasi Kolong	DLHD	√				APBD Prov/ APBD Kab/Kota	DLHD	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Pembangunan fasilitas pendukung pelabuhan Manggar	Dinas Perhubungan	√				APBN/ APBD Prov	Dinas Perhubungan	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Pembangunan terminal tipe B Pembangunan sistem penyediaan ari minum	Dinas Perhubungan	√				APBD Prov	Dinas Perhubungan	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Pembangunan fasiltias kesehatan rumah sakit tipe B	Dinas Kesehatan	√				APBD Prov	Dinas Kesehatan	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Pembangunan IPAL pada pusat perdagangan, fasilitas sosial/umum dan kawasan wisata	Dinas PU	√				APBD Kab/Kota	Dinas PU	(seharusnya) selesai pada tahap I
A5	Perwujudan **PKL Kelapa**	Penetapan kawasan permukiman dan kelengkapan fasilitas pendukung	Dinas PU	√				APBD Kab/Kota	Dinas PU	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Penyusunan masterplan kawasan perdagangan	Disperindag	√				APBD Kab/Kota	Disperindag	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Pembangunan fasilitas wisata air panas	Disbudpar	√				APBD Kab/Kota	Disbudpar	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Pembangunan industri pengolahan sawit	Diperindag					APBD Prov/ APBD Kab/Kota	Diperindag	Merupakan lanjutan dari Tahap I
		Perbaikan dan peningkatan jalan ke pusat permukiman perdesaan	Dinas PU					APBD Kab/Kota	Dinas PU	Merupakan lanjutan dari Tahap I
		Pembangunan IPAL pada pusat perdagangan, fasilitas sosial/umum dan kawasan wisata	DLHD	√				APBD Prov/ APBD Kab/Kota	DLHD	(seharusnya) selesai pada tahap I
A6	**Perwujudan PKL Puding Besar**	Pembangunan fasilitas rest area	Dinas Perhubungan	√				APBD Kab/Kota	Dinas Perhubungan	(seharusnya) selesai pada tahap I

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN				SUMBER DANA	PELAKSANA	KETERANGAN
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV			
				15-19	20-24	25-29	30-34			
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
		Rehabilitasi dan Refungsionalisasi Kolong	DLHD					APBD Kab/Kota	DLHD	Merupakan lanjutan dari Tahap I
		Pembangunan fasilitas perdagangan	Disperindag	√				APBD Kab/Kota	Disperindag	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Perbaikan dan peningkatan jalan ke pusat permukiman perdesaan	Dinas PU					APBD Kab/Kota	Dinas PU	Merupakan lanjutan dari Tahap I
		Perbaikan lingkungan kawasan permukiman	Dinas PU					APBD Kab/Kota	Dinas PU	Merupakan lanjutan dari Tahap I
		Peningkatan daya layan fasilitas kesehatan dan pendidikan	Dinas Kesehatan Dinas Pendidikan					APBD Kab/Kota	Dinas Kesehatan Dinas Pendidikan	Merupakan lanjutan dari Tahap I
A7	Perwujudan **PKL Sungai Selan**	Perbaikan dan peningkatan jalan ke pusat permukiman perdesaan	Dinas PU					APBD Kab/Kota	Dinas PU	Merupakan lanjutan dari Tahap I
		Perbaikan lingkungan kawasan permukiman	Dinas PU						Dinas PU	Merupakan lanjutan dari Tahap I
		Peningkatan daya layan fasilitas kesehatan dan pendidikan	Dinas Kesehatan Dinas Pendidikan					APBD Kab/Kota	Dinas Kesehatan Dinas Pendidikan	Merupakan lanjutan dari Tahap I
A8	Perwujudan **PKL Payung**	Perbaikan dan peningkatan jalan ke pusat permukiman perdesaan	Dinas PU					APBD Kab/Kota	Dinas PU	Merupakan lanjutan dari Tahap I
		Rehabilitasi dan Refungsionalisasi Kolong	DLHD					APBD Kab/Kota	DLHD	Merupakan lanjutan dari Tahap I
		Pembangunan fasilitas perdagangan	Disperindag	√				APBD Kab/Kota	Disperindag	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Perbaikan dan peningkatan jalan ke pusat permukiman perdesaan	Dinas PU					APBD Kab/Kota	Dinas PU	Merupakan lanjutan dari Tahap I
		Perbaikan lingkungan kawasan permukiman	Dinas PU					APBN/APBD Prov/ APBD Kab/Kota	Dinas PU	Merupakan lanjutan dari Tahap I
		Peningkatan daya layan fasilitas kesehatan dan pendidikan	Dinas Kesehatan Dinas Pendidikan					APBN/APBD Prov/ APBD Kab/Kota	Dinas Kesehatan Dinas Pendidikan	Merupakan lanjutan dari Tahap I

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN				SUMBER DANA	PELAKSANA	KETERANGAN
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV			
				15-19	20-24	25-29	30-34			
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
A9	Perwujudan **PKL Sungailiat**	Penyusunan RDTR kawasan perkotaan Sungailiat	Dinas PU	√				APBD Kab/Kota	Dinas PU	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Rehabilitasi dan Refungsionalisasi Kolong	DLHD					APBN/APBD Prov/ APBD Kab/Kota	DLHD	Merupakan lanjutan dari Tahap I
		Pembangunan terminal tipe C	Dishub	√				APBD Kab/Kota	Dishub	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Pembangunan fasilitas pelayanan wisatawan	Dibudpar					APBD Kab/Kota	Dibudpar	Merupakan lanjutan dari Tahap I
		Peningkatan penyediaan sistem air bersih	Dinas PU						Dinas PU	Merupakan lanjutan dari Tahap I
		Pembangunan IPAL pada pusat perdagangan, fasilitas sosial/umum dan kawasan wisata	DLHD	√				APBN/APBD Prov/ APBD Kab/Kota	DLHD	(seharusnya) selesai pada tahap I
A10	Perwujudan **PKWp Koba**	Penyusunan RDTR kawasan perkotaan Koba	Dinas PU	√				APBD Kab/Kota	Dinas PU	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Rehabilitasi dan Refungsionalisasi Kolong	DLHD					APBN/APBD Prov/ APBD Kab/Kota	DLHD	Merupakan lanjutan dari Tahap I
		Pembangunan Pembangunan terminal tipe C	Dishub	√				APBD Kab/Kota	Dishub	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Pembangunan fasilitas pelayanan wisatawan	Disbudpar					APBD Kab/Kota	Disbudpar	Merupakan lanjutan dari Tahap I
		Peningkatan penyediaan sistem air bersih	Dinas PU					APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	Dinas PU	Merupakan lanjutan dari Tahap I
		Pembangunan IPAL pada pusat perdagangan, fasilitas sosial/umum dan kawasan wisata	DLHD					APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	DLHD	Merupakan lanjutan dari Tahap I
A11	Perwujudan **PKWp Toboali**	Penyusunan RDTR kawasan perkotaan Toboali	Dinas PU	√				APBD Kab/Kota	Dinas PU	(seharusnya) selesai pada tahap I

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN				SUMBER DANA	PELAKSANA	KETERANGAN
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV			
				15-19	20-24	25-29	30-34			
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
		Rehabilitasi dan Refungsionalisasi Kolong	DLHD					APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	DLHD	Merupakan lanjutan dari Tahap I
		Pembangunan Pembangunan terminal tipe C	Dinas Perhubungan	√				APBD Kab/Kota	Dinas Perhubungan	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Pembangunan fasilitas pelayanan wisatawan	Disbudpar					APBD Kab/Kota	Disbudpar	Merupakan lanjutan dari Tahap I
		Peningkatan penyediaan sistem air bersih	Dinas PU	√				APBD Kab/Kota	Dinas PU	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Pembangunan IPAL pada pusat perdagangan, fasilitas sosial/umum dan kawasan wisata	DLHD	√				APBD Kab/Kota	DLHD	(seharusnya) selesai pada tahap I
B	**Perwujudan Sistem Prasarana Wilayah**									
B1	**Perwujudan Sistem Transportasi**									
a	**Sistem Transportasi Darat**	Peningkatan kondisi dan daya layan jalan kolektor primer	Dinas PU					APBN	Dinas PU	Merupakan lanjutan dari Tahap I
		Pembangunan jalan kolektor dan lokal primer yang menghubungkan PKL dengan PPK di seluruh wilayah kota/kabupaten	Dinas PU					APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	Dinas PU	Merupakan lanjutan dari Tahap I
		Peningkatan dan pembangunan terminal B di Muntok, Sungailiat, Tanjung Pandan dan Manggar.	Dinas PU	√				APBD Prov	Dinas PU	(seharusnya) selesai pada tahap I
b	**Sistem Transportasi Laut**	Percepatan penyelesaian pembangunan fasilitas penunjang pelabuhan utama Tanjung Batu	Dinas Perhubungan	√				APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	Dinas Perhubungan	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Perbaikan dan peningkatan daya layan pelabuhan Tanjung Gudang	Dinas Perhubungan					APBN/APBD Prov/APBD	Dinas Perhubungan	Merupakan lanjutan dari Tahap I

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN				SUMBER DANA	PELAKSANA	KETERANGAN
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV			
				15-19	20-24	25-29	30-34			
(1)	(2)	(3)	(4)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		(Belinyu), Tanjung Kelian (Muntok), Pangkal Balam (Pangkal Pinang), Tanjung Pandan (Tanjung Pandan), Pelabuhan Pangkal Sadai (Toboali) dan Pelabuhan Manggar (Manggar)						Kab/Kota		
		Pembangunan fasilitas dan infrastruktur penunjang pelabuhan laut	Dinas Perhubungan	√				APBN/APBD Prov/ APBD Kab/Kota	Dinas Perhubungan	(seharusnya) selesai pada tahap I
c	**Sistem Transportasi Udara**	Peningkatan daya dan kualitas layanan bandara Depati Amir	Dinas Perhubungan	√				APBN/APBD Prov	Dinas Perhubungan	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Peningkatan daya dan kualitas layanan H. AS Hanandjoeddin	Dinas Perhubungan	√				APBN/APBD Prov	Dinas Perhubungan	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Pengembangan fasilitas pendukung bandara	Dinas Perhubungan	√				APBN/APBD Prov	Dinas Perhubungan	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Penetapan dan sosialisasi kawasan keamanan operasi penerbangan (KKOP) setiap bandara	Dinas Perhubungan	√				APBN/APBD Prov	Dinas Perhubungan	(seharusnya) selesai pada tahap I
B2	**Perwujudan Sistem Jaringan Energi/Listrik**	Pengembangan jaringan sampai pada kawasan perdesaan yang belum terlayani aliran listrik	PLN					APBN/APBD Prov/Masyarakat	PLN	Merupakan lanjutan dari Tahap I
		Pengembangan sumber pembangkit listrik tenaga batubara, mikrohidro dan nuklir	Dinas Pertambangan dan Energi					APBN/APBD Prov/Masyarakat	Dinas Pertambangan dan Energi	Merupakan lanjutan dari Tahap I
		Peningkatan pelayanan dan penyediaan gardu induk di seluruh PKW dan PKL	Dinas Pertambangan dan Energi					APBN/APBD Prov/Masyarakat	Dinas Pertambangan dan Energi	Merupakan lanjutan dari Tahap I
		Mendorong pengembangan energi terbarukan dengan sumber tenaga yang berasal dari angin, udara dan sinar matahari	Dinas Pertambangan dan Energi					APBN/APBD Prov/Masyarakat	Dinas Pertambangan dan Energi	Merupakan lanjutan dari Tahap I
		Penyediaan sumber energi listrik	Dinas					APBN/APBD	Dinas	Merupakan lanjutan

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN				SUMBER DANA	PELAKSANA	KETERANGAN
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV			
				15-19	20-24	25-29	30-34			
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
		secara memadai untuk kawasan pariwisata, industri, bandara, pelabuhan laut dan rumah sakit	Pertambangan dan Energi					Prov/Masyarakat	Pertambangan dan Energi	dari Tahap I
B3	**Perwujudan Sistem Telekomunikasi**	Pemanfaatan jaringan optik secara optimal, karena provinsi Kep. Bangka Belitung dilintasi jaringan telekomunikasi serat optik internasional	Dinas Kominfo					APBN/APBD Prov/Swasta	Dinas Kominfo	Merupakan lanjutan dari Tahap I
		pengaturan penempatan menara telekomunikasi secara efektif dan efisien dengan mendorong pengguanaan menara bersama antara operator (*join operation*)	Dinas Kominfo	√				Swasta	Dinas Kominfo	(seharusnya) selesai pada tahap I
		pengembangan jaringan dan pelayanan informasi dan telekomunikasi sampai pada kawasan perdesaan.	Dinas Kominfo					APBN/Swasta	Dinas Kominfo	Merupakan lanjutan dari Tahap I
		Pengembangan dan peningkatan pelayanan telekomunikasi dan informasi untuk pelayanan publik dan usaha	Dinas Kominfo					APBN/ Swasta	Dinas Kominfo	Merupakan lanjutan dari Tahap I
B4	**Perwujudan Sistem Sumber Daya Air**	Pemanfaatan sumber daya air untuk; pembangkit tenaga listrik mikrohidro	Dinas PU					APBN/APBD Prov	Dinas PU	Merupakan lanjutan dari Tahap I
		Pemanfaatan sumber daya air untuk; bahan baku air mimun	Dinas PU					APBN/APBD Prov	Dinas PU	Merupakan lanjutan dari Tahap I
		Pemanfaatan sumber daya air untuk; bahan baku pengarian sawah (irigasi) dan industri	Dinas PU					APBN/APBD Prov	Dinas PU	Merupakan lanjutan dari Tahap I
		Pemanfaatan sumber daya air untuk; air baku pelabuhan laut	Dinas PU						Dinas PU	Merupakan lanjutan dari Tahap I

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN				SUMBER DANA	PELAKSANA	KETERANGAN
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV			
				15-19	20-24	25-29	30-34			
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
		Pemanfaatan sumber daya air untuk; budidaya perikanan air tawar Pembangunan sistem drainase pada kawasan permukiman, areal rawan banjir dan sepanjang sisi jalan	Dinas PU					APBN/APBD Prov	Dinas PU	Merupakan lanjutan dari Tahap I
		Pembangunan cekdam pada hulu sungai	Dinas PU	√				APBN/APBD Prov	Dinas PU	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Sistem pengamanan pantai dari abrasi dilakukan melalui pendekatan struktur dan non struktur	Dinas PU					APBN/APBD Prov	Dinas PU	Merupakan lanjutan dari Tahap I
B5	**Perwujudan Sistem Prasarana Permukiman**	Penyusunan masterplan dan pembangunan sistem drainase pada seluruh wilayah perkotaan (PKNp, PKW dan PKL)	Dinas PU	√				APBN/APBD Prov	Dinas PU	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) untuk kawasan perkotaan Pangkalpinang, Muntok, Tanjung Pandan dan Manggar	Dinas PU	√				APBN/APBD Prov	Dinas PU	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Pembangunan IPAL pada kawasan perkotaan Pangkalpinang, Muntok, Tanjung Pandan dan Manggar, kawasan wisata, komersial dan kawasan industri (IPAL industri) serta instalasi pengolah limbah beracun dan berbahaya (B3)	DLHD	√				APBN/APBD Prov	DLHD	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Penyediaan air bersih untuk setiap pusat permukiman, kawasan wisata, industri dan pelabuhan.	Dinas PU	√				APBN/APBD Prov	Dinas PU	(seharusnya) selesai pada tahap I
C	**Perwujudan Rencana Pola Ruang**									

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN				SUMBER DANA	PELAKSANA	KETERANGAN
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV			
				15-19	20-24	25-29	30-34			
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
C1	**Perwujudan Kawasan Lindung**									
	Perwujudan Kawasan Hutan Lindung	Rehabilitasi dan konservasi lahan di kawasan lindung guna mengembalikan/ meningkatkan fungsi lindung;	Dinas Kerhutanan	√				APBN/APBD Prov	Dinas Kerhutanan	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan lindung;	Dinas Kerhutanan					APBN/APBD Prov/LSM	Dinas Kerhutanan	Merupakan lanjutan dari Tahap I
		Peningkatan pemanfaatan potensi sumberdaya hutan;	Dinas Kerhutanan					APBN/APBD Prov/LSM	Dinas Kerhutanan	Merupakan lanjutan dari Tahap I
		Pengembangan pola insentif dan disinsentif pengelolaan kawasan lindung;	Dinas Kerhutanan					APBN/APBD Prov/LSM	Dinas Kerhutanan	Merupakan lanjutan dari Tahap I
		Pengawasan kawasan lindung.	Dinas Kerhutanan					APBN/APBD Prov/LSM	Dinas Kerhutanan	Merupakan lanjutan dari Tahap I
		Pengamanan kawasan lindung	Dinas Kerhutanan					APBN/APBD Prov/LSM	Dinas Kerhutanan	Merupakan lanjutan dari Tahap I
	Pengelolaan kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya	Mencegah timbulnya erosi, bencana banjir, sedimentasi, dan menjaga fungsi hidrologis tanah di kawasan hutan lindung;	Dinas PU					APBN/APBD Prov/LSM	Dinas PU	Merupakan lanjutan dari Tahap I
		Memberikan ruang yang cukup bagi resapan air hujan pada kawasan resapan air untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir.	Dinas PU					APBD Prov	Dinas PU	Merupakan lanjutan dari Tahap I
	Pengelolaan kawasan perlindungan setempat	Sosialisasi batas sempadan dan manfaat serta resiko kerusakan sempadan	DLHD	√				APBN/APBD Prov/LSM	DLHD	(seharusnya) selesai pada tahap I

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN				SUMBER DANA	PELAKSANA	KETERANGAN
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV			
				15-19	20-24	25-29	30-34			
(1)	(2)	(3)	(4)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Rehabilitasi dan penghijauan sempadan	DLHD					APBN/APBD Prov/LSM	DLHD	Merupakan lanjutan dari Tahap I
		Pengembangan sempadan sebagai jalur hijau produktif sehingga mempunyai nilai tambah	DLHD					APBN/APBD Prov/LSM	DLHD	Merupakan lanjutan dari Tahap I
		Penguatan legalitas sempadan melalui peraturan daerah	DLHD	√				APBN/APBD Prov/LSM	DLHD	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Pengembangan kerjasama penguatan fungsi sempadan dengan lembaga usaha dan atau lembaga masyarakat	DLHD					APBN/APBD Prov/LSM	DLHD	Merupakan lanjutan dari Tahap I
		Pemasangan batas fisik pemelihara sempadan	DLHD					APBN/APBD Prov/ Masyarakat	DLHD	Merupakan lanjutan dari Tahap I
	Pengelolaan kawasan cagar budaya	(penjelasan pada kawasan strategis Kota Tua Muntok)	-					-	-	
	Pengelolaan kawasan rawan bencana alam	Menginventarisir kawasan rawan bencana alam di Kepulauan Bangka Belitung secara lebih akurat	DLHD	√				APBN/APBD Prov/LSM	DLHD	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Pengaturan kegiatan manusia di kawasan rawan bencana alam untuk melindungi manusia dari bencana yang disebabkan oleh alam maupun secara tidak langsung oleh perbuatan manusia	DLHD					APBN/APBD	DLHD	Merupakan lanjutan dari Tahap I
		Melakukan upaya untuk mengurangi/ meniadakan resiko bencana alam seperti melakukan penghijauan pada lahan kritis	DLHD					APBN/APBD /LSM	DLHD	Merupakan lanjutan dari Tahap I

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN				SUMBER DANA	PELAKSANA	KETERANGAN
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV			
				15-19	20-24	25-29	30-34			
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
		Melakukan sosialisasi bencana alam pada masyarakat, terutama masyarakat yang berada pada/dekat dengan daerah rawan bencana alam	DLHD					APBN/APBD /LSM	DLHD	Merupakan lanjutan dari Tahap I
	Pengelolaan kawasan lindung lainnya	pengembangan dan pemeliharaan kawasan konservasi laut daerah (KKLD) yang berlokasi di Kabupaten Bangka Tengah.	DLHD					APBN/APBD /LSM	DLHD	Merupakan lanjutan dari Tahap I
C2	**Perwujudan Kawasan Budidaya**									
a	**Perwujudan Kawasan Hutan Produksi**	Pemantapan tata batas hutan produksi sehingga terdapat kepastian dalam pengelolaan dan investasi jangka panjang	Dinas Kehutanan	√				APBN	Dinas Kehutanan	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Penyusunan pemetakan (siteplan) hutan dan rencana usaha (business plan)	Dinas Kehutanan	√				APBN	Dinas Kehutanan	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Pembangunan jalan produksi	Dinas Kehutanan	√				APBN/APBD Prov	Dinas Kehutanan	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (seperti komoditi rotan, tanaman obat, atau sutera alam)	Dinas Kehutanan					APBN	Dinas Kehutanan	Merupakan lanjutan dari Tahap I
		Pengembangan tanaman hutan atau tanaman obat-obatan pada lahan hutan rakyat	Dinas Kehutanan	√				APBN	Dinas Kehutanan	(seharusnya) selesai pada tahap I
b	**Perwujudan Kawasan Hutan Rakyat**	Pemantapan tata batas hutan rakyat sehingga terdapat kepastian dalam pengelolaan dan investasi jangka panjang	Dinas Kehutanan	√				APBD Prov	Dinas Kehutanan	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Melakukan rehabilitasi hutan yang	Dinas Kehutanan	√				APBD Prov	Dinas Kehutanan	(seharusnya) selesai

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN				SUMBER DANA	PELAKSANA	KETERANGAN
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV			
				15-19	20-24	25-29	30-34			
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
		mengalami kerusakan								pada tahap I
		Penyusunan pemetakan (siteplan) hutan dan rencana usaha (business plan)	Dinas Kehutanan	√				APBD Prov	Dinas Kehutanan	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Pembangunan jalan produksi dean inspeksi	Dinas Kehutanan	√				APBD Prov	Dinas Kehutanan	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (seperti komoditi rotan, tanaman obat, atau sutera alam)	Dinas Kehutanan					APBD Prov	Dinas Kehutanan	Merupakan lanjutan dari Tahap I
		Pengembangan tanaman hutan atau tanaman obat-obatan pada lahan hutan rakyat	Dinas Kehutanan					APBD Prov	Dinas Kehutanan	Merupakan lanjutan dari Tahap I
c	**Perwujudan Kawasan Peruntukan Pertanian**	Menetapkan kawasan pertanian pangan berkelanjutan sebagai bagian dari pertahanan pangan nasional	Dinas Pertanian, Perkebunan & Peternakan	√				APBD Kab/Kota	Dinas Pertanian, Perkebunan & Peternakan	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Meningkatkan pemanfaatan lahan kering kurang produktif sebagai lahan pertanian pangan dan pertanian hortikultur	Dinas Pertanian, Perkebunan & Peternakan	√				APBD Kab/Kota	Dinas Pertanian, Perkebunan & Peternakan	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Pengembangan pertanian dapat dilakukan dengan pendekatan agropolitan	Dinas Pertanian, Perkebunan & Peternakan	√				APBN/APBD Prov/ APBD Kab/Kota	Dinas Pertanian, Perkebunan & Peternakan	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Menetapkan tata batas kawasan perkebunan komoditas unggulan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan	Dinas Pertanian, Perkebunan & Peternakan	√				APBD Kab/Kota	Dinas Pertanian, Perkebunan & Peternakan	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Mengembangkan bibit unggul komoditas unggulan pertanian dan atau perkebunan dan melakukan peremajaan secara berkala	Dinas Pertanian, Perkebunan & Peternakan					APBN/APBD Prov/ APBD Kab/Kota	Dinas Pertanian, Perkebunan & Peternakan	Merupakan lanjutan dari Tahap I

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN				SUMBER DANA	PELAKSANA	KETERANGAN
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV			
				15-19	20-24	25-29	30-34			
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
		Menetapkan kawasan sentra peternakan ternak besar, kecil dan unggas secara integratif dengan kegaitan pertanian hortikultur dan atau perkebunan	Dinas Pertanian, Perkebunan & Peternakan	√				APBD Kab/Kota	Dinas Pertanian, Perkebunan & Peternakan	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Membangun prasarana dan sarana pertanian/perkebunan guna peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk	Dinas Pertanian, Perkebunan & Peternakan					APBD Kab/Kota	Dinas Pertanian, Perkebunan & Peternakan	Merupakan lanjutan dari Tahap I
d	Perwujudan Sentra Perikanan	Menetapkan kawasan sentra perikanan budidaya dan perikanan tangkap dengan pendekatan minapolitan	Dinas Kelautan dan Perikanan	√				APBD Kab/Kota	Dinas Kelautan dan Perikanan	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Menyusun masterplan minapolitan perikanan budidaya dan perikanan tangkap	Dinas Kelautan dan Perikanan	√				APBD Kab/Kota	Dinas Kelautan dan Perikanan	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Pengelolaan sumber daya air secara optimal bagi pengembangan perikanan budidaya	Dinas Kelautan dan Perikanan					APBN/APBD Prov/ APBD Kab/Kota	Dinas Kelautan dan Perikanan	Merupakan lanjutan dari Tahap I
		Pembangunan sarana dan prasarana peningkatan produktivitas perikanan budidaya	Dinas Kelautan dan Perikanan	√				APBN/APBD Prov/ APBD Kab/Kota	Dinas Kelautan dan Perikanan	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Penyediaan perlengkapan dan prasarana penunjang untuk pengingkatan produktivitas perikanan tangkap	Dinas Kelautan dan Perikanan	√				APBN/APBD Prov/ APBD Kab/Kota	Dinas Kelautan dan Perikanan	(seharusnya) selesai pada tahap I

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN				SUMBER DANA	PELAKSANA	KETERANGAN
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV			
				15-19	20-24	25-29	30-34			
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
		Pengembangan kegiatan pengolahan (industri) perikanan terutama perikanan tangkap	Dinas Kelautan dan Perikanan	√				APBN/APBD Prov/ APBD Kab/Kota	Dinas Kelautan dan Perikanan	(seharusnya) selesai pada tahap I
e	Perwujudan Kawasan Peruntukan Pertambangan	Pemantapan tata batas wilayah pertambangan (WP) dan wilayah pertambangan rakyat (WPR)	Dinas Pertembangan dan Energi	√				APBN/APBD Prov/ APBD Kab/Kota	Dinas Pertembangan dan Energi	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Menyusun dan menyepakati pola dan teknik pertambangan timah yang ramah lingkungan	Dinas Pertembangan dan Energi	√				APBN/APBD Prov/ APBD Kab/Kota	Dinas Pertembangan dan Energi	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Mendorong bertumbuhnya industri rakyat pengolahan timah yang ramah lingkungan	Dinas Pertembangan dan Energi	√				APBN/APBD Prov/ APBD Kab/Kota	Dinas Pertembangan dan Energi	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Pembangunan prasarana dan sarana penunjang kegiatan pertambangan, terutama pertambangan rakyat	Dinas Pertembangan dan Energi	√				APBN/APBD Prov/ APBD Kab/Kota	Dinas Pertembangan dan Energi	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Mendorong pembangunan dan penyediaan peralatan pengolahan limbah yang ramah lingkungan	Dinas Pertembangan dan Energi					APBD Kab/Kota	Dinas Pertembangan dan Energi	Merupakan lanjutan dari Tahap I
		Mengembangkan seluruh bentuk kegiatan pertambangan dengan skenario hijau	Dinas Pertembangan dan Energi					APBN/APBD Prov/ APBD Kab/Kota	Dinas Pertembangan dan Energi	Merupakan lanjutan dari Tahap I
		Pemanfaatan kolong sebagai wahana budidaya perikanan dan wisata air	Dinas Pertembangan dan Energi					APBN/APBD Prov/ APBD Kab/Kota	Dinas Pertembangan dan Energi	Merupakan lanjutan dari Tahap I
f	**Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri**	Menetapkan dan menyepakati kawasan-kawasan industri di Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Perindag	√				APBD Kab/Kota	Dinas Perindag	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Membangun sistem transportasi terpadu antara darat dan laut untuk mendukung kegiatan industri	Dinas Perindag	√				APBN/APBD Prov/ APBD Kab/Kota	Dinas Perindag	(seharusnya) selesai pada tahap I

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN				SUMBER DANA	PELAKSANA	KETERANGAN
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV			
				15-19	20-24	25-29	30-34			
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
		Membangun instalasi penyediaan air bersih dan air baku untuk kebutuhan industri	Dinas Perindag	√				APBN/APBD Prov/ APBD Kab/Kota	Dinas Perindag	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Penyediaan sumber energi (listrik) dengan mengembangkan energi terbarukan	Dinas Perindag	√				APBN	Dinas Perindag	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Mendorong dan memastikan pembangunan atau penyediaan instalasi pengolahan limbah industri secara aman dan ramah lingkungan.	Dinas Perindag	√				APBD Prov/APBD Kab/Kota	Dinas Perindag	(seharusnya) selesai pada tahap I
g	**Perwujudan Kawasan Peruntukan Pariwisata**	Identifikasi kawasan potensial dan kawasan wisata yang sudah bertumbuh	Dinas Budaya dan Pariwisata	√				APBD Kab/Kota	Dinas Budaya dan Pariwisata	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Penyusunan masterplan (rencana induk pengembangan pariwisata daerah) Kepulauan Bangka Berlitung	Dinas Budaya dan Pariwisata	√				APBD Kab/Kota	Dinas Budaya dan Pariwisata	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Revitalisasi, restorasi dan perbaikan bangunan dan kawasan wisata yang ada	Dinas Budaya dan Pariwisata	√				APBN/ APBD Prov/APBD Kab/Kota/ Masyarakat	Dinas Budaya dan Pariwisata	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Pengembangan kawasan potensial menjadi kawasan wisata strategis provinsi	Dinas Budaya dan Pariwisata					APBD Kab/Kota	Dinas Budaya dan Pariwisata	Merupakan lanjutan dari Tahap I
		Peningkatan aksesibilitas pada kawasan-kawasan pariwisata yang potensial dalam satu kesatuan sistem perjalanan wisata (*trip*)	Dinas Budaya dan Pariwisata	√				APBN/ APBD Prov/APBD Kab/Kota/Masyarakat	Dinas Budaya dan Pariwisata	(seharusnya) selesai pada tahap I
h	**Perwujudan Kawasan Peruntukan**	Penetapan kawasan permukiman perkotaan maupun perdesaan	Dinas PU	√				APBD Kab/Kota	Dinas PU	(seharusnya) selesai pada tahap I

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN				SUMBER DANA	PELAKSANA	KETERANGAN
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV			
				15-19	20-24	25-29	30-34			
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Permukiman									
		Penyusunan rencana strategis dan pengembangan perumahan dan infrastruktur kota	Dinas PU	√				APBN/APBD Prov	Dinas PU	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Penyusunan masterpal perencanaa kota yang ditetapkan	Dinas PU	√				APBD Kab/Kota	Dinas PU	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Identifikasi dan perbaikan perumahan yang tidak layak huni	Dinas PU	√				APBD Kab/Kota	Dinas PU	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Peningaktan kualitas lingkungan permukiman (desa/kota)	Dinas PU	√				APBN/ APBD Prov/APBD Kab/Kota/ Masyarakat	Dinas PU	(seharusnya) selesai pada tahap I
D	**Perwujudan Kawasan Strategis**									
D1	**Perwujudan Kawasan Tanjung Kalian**	Penyusunan rencana rinci dan rencana teknis kawasan	Dinas PU	√				APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	Dinas PU	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Penyusunan masterplan dan businnes plan setiap komponen kegiatan	Dinas PU	√				APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	Dinas PU	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Pembangunan infrastruktur pendukung	Dinas PU	√				APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	Dinas PU	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Pembangunan komponen utama seperti PLTU, Stockpile, pelabuhan, terminal, kawasan wisata dan prasarana lainnya.	Dinas Pertambangan dan Energi; PU; Perhubungan; Perindag					APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	Dinas Pertambangan dan Energi; PU; Perhubungan; Perindag	Merupakan lanjutan dari Tahap I
D2	**Perwujudan Kawasan Industri Perikanan**	Penyusunan masterplan kawasan industri	Dinas Perindag					APBN/APBD Prov/APBD	Dinas Perindag	

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN				SUMBER DANA	PELAKSANA	KETERANGAN
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV			
				15-19	20-24	25-29	30-34			
(1)	(2)	(3)	(4)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Terpadu di Teluk Klabat Belinyu							Kab/Kota		
		Penyusunan masterplan pelabuhan Belinyu	Dinas Perhubungan	√				APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	Dinas Perhubungan	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Penguasaan lahan untuk lahan industri dan pelabuhan dan pengembangannya	Dinas Perhubungan	√				APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	Dinas Perhubungan	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Pembangunan prasarana dan sarana penunjang	Dinas Perhubungan	√				APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	Dinas Perhubungan	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Pembangunan jalan akses dari Belinyu ke pelabuhan	Dinas Perhubungan	√				APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	Dinas Perhubungan	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Pembangunan dermaga & terminal	Dinas Perhubungan	√				APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	Dinas Perhubungan	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Pembangunan pabrik pengolahan ikan	Dinas Kelautan dan Perikanan					APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	Dinas Kelautan dan Perikanan	Merupakan lanjutan dari Tahap I
D3	**Perwujudan Pelabuhan dan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Berikat**	Penyusunan masterplan kawasan	Dinas Perindag	√				APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	Dinas Perindag	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Penyusunan proposal dan syarat pembangunan kawasan ekonomi khusus	Dinas Perindag	√				APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	Dinas Perindag	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Pengusulan kawasan ekonomi khusus Tanjung Berikat	Dinas Perindag	√				APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	Dinas Perindag	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Legalisasi kawasan ekonomi khusus	Dinas Perindag	√				APBN/APBD	Dinas Perindag	(seharusnya) selesai

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN				SUMBER DANA	PELAKSANA	KETERANGAN
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV			
				15-19	20-24	25-29	30-34			
(1)	(2)	(3)	(4)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		tanjung Berikat						Prov/APBD Kab/Kota		pada tahap I
		Pembangunan jalan akses dari Koba – Tanjung Berikat	Dinas Perindag	√				APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	Dinas Perindag	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Pembangunan kawasan wisata	Dinas Perindag	√				APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	Dinas Perindag	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Pembangunan pelabuhan (dermaga dan terminal)	Dinas Perindag	√				APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	Dinas Perindag	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Pembagunan sub kawasan industri (pabrik pengolahan)	Dinas Perindag					APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	Dinas Perindag	Merupakan lanjutan dari Tahap I
D4	**Perwujudan KTM Batu Betumpang**	Penyusunan RDTR KTM Batu Betumpang	Dinas PU	√				APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	Dinas PU	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Penyusunan DED Infrastruktur dan permukiman kawasan	Dinas PU	√				APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	Dinas PU	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Pembangunan infrastruktur permukiman	Dinas PU	√				APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	Dinas PU	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Pembangunan sarana sosial budaya	Dinas PU	√				APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	Dinas PU	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Pengembangan kawasan pertanian	Dinas Pertanian, Perkebunan & Peternakan	√				APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	Dinas Pertanian, Perkebunan & Peternakan	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Pengembangan kawasan lindung dan RTH	DLHD					APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	DLHD	Merupakan lanjutan dari Tahap I

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN				SUMBER DANA	PELAKSANA	KETERANGAN
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV			
				15-19	20-24	25-29	30-34			
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
D5	**Perwujudan Kawasan Minapolitan Lepar Pongok**	Penyusunan masterplan Minapolitan Lepar Pongok	Dinas Kelautan & Perikanan	√				APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	Dinas Kelautan & Perikanan	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Penyiapan kelembagaan pengelola minapolitan	Dinas Kelautan & Perikanan	√				APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	Dinas Kelautan & Perikanan	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Pengesahan kawasan minapolitan	Dinas Kelautan & Perikanan	√				APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	Dinas Kelautan & Perikanan	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Pembangunan sarana penunjang utama kegaitan Minapolitan	Dinas Kelautan & Perikanan	√				APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	Dinas Kelautan & Perikanan	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Pembangunan infrastruktur pendukung	Dinas PU/ Dinas Kelautan & Perikanan					APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	Dinas PU/ Dinas Kelautan & Perikanan	Merupakan lanjutan dari Tahap I
		Pembangunan kawasan industri pengolahan ikan	Dinas Kelautan &Perikanan					APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	Dinas Kelautan &Perikanan	Merupakan lanjutan dari Tahap I
D6	**Perwujudan Kawasan etalase Perikanan Selat Nasik**	Penyusunan masterplan kawasan industri perikanan tangkap dan budidaya	Dinas Kelautan & Perikanan	√				APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	Dinas Kelautan & Perikanan	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Pembangunan pabrik pengolahan ikan	Dinas Kelautan & Perikanan	√				APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	Dinas Kelautan & Perikanan	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Pembangunan kawasan habitat ikan alami dengan mangrove	DLHD/ Dinas Kelautan & Perikanan	√				APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	DLHD/ Dinas Kelautan & Perikanan	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Pembangunan tambak ikan	Dinas Kelautan & Perikanan					APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	Dinas Kelautan & Perikanan	Merupakan lanjutan dari Tahap I

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN				SUMBER DANA	PELAKSANA	KETERANGAN
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV			
				15-19	20-24	25-29	30-34			
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
		Pembangunan rumah ikan (pengolahan, budidaya dan hias)	Dinas Kelautan & Perikanan	√				APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	Dinas Kelautan & Perikanan	(seharusnya) selesai pada tahap I
D7	**Perwujudan Kawasan Industri Perikanan Tanjung Binga**	Penyusunan masterplan kawasan industri	Dinas Perindag	√				APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	Dinas Perindag	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Penguasaan lahan untuk lahan industri dan pelabuhan dan pengembangannya	Dinas Perindag	√				APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	Dinas Perindag	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Pembangunan prasarana dan sarana penunjang	Dinas Perindag/PU	√				APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	Dinas Perindag/PU	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Pembangunan jalan akses ke Tanjung Binga (pabrik)	Dinas PU	√				APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	Dinas PU	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Pembangunan dermaga & terminal	Dinas PU					APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	Dinas PU	Merupakan lanjutan dari Tahap I
		Pembangunan pabrik pengolahan ikan	Dinas Kelautan dan Perikanan					APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	Dinas Kelautan dan Perikanan	Merupakan lanjutan dari Tahap I
D8	**Perwujduan Kawasan Kota Terpadu Mandiri**	Penyusunan RDTR KTM Gantung	Dinas PU	√				APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	Dinas PU	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Penyusunan DED Infrastruktur dan permukiman kawasan	Dinas PU	√				APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	Dinas PU	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Pembangunan infrastruktur permukiman	Dinas PU					APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	Dinas PU	Merupakan lanjutan dari Tahap I

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN				SUMBER DANA	PELAKSANA	KETERANGAN
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV			
				15-19	20-24	25-29	30-34			
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
		Pembangunan kampung budaya Laskar Pelangi	Dinas Budpar	√				APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	Dinas Budpar	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Pengembangan kawasan pertanian	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan					APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	Merupakan lanjutan dari Tahap I
		Pengembangan kawasan lindung dan RTH	DLHD					APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	DLHD	Merupakan lanjutan dari Tahap I
D9	**Perwujduan Kawasan Industri Terpadu Air Kelik (KIAK)**	Penyusunan masterplan kawasan	Dinas Perindag	√				APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	Dinas Perindag	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Penyiapan lahan	Dinas Perindag	√				APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	Dinas Perindag	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Pembangunan jalan askes	Dinas PU	√				APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	Dinas PU	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Pembangunan infrastruktur penunjang	Dinas PU	√				APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	Dinas PU	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Pembangunan sistem pengolahan ikan ekspor	Dinas Perindag	√				APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	Dinas Perindag	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Pembangunan dermaga dan terminal (pelabuhan)	Dinas Perhubungan					APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	Dinas Perhubungan	Merupakan lanjutan dari Tahap I
		Pembangunan kawasan wisata	Dinas Budpar					APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	Dinas Budpar	Merupakan lanjutan dari Tahap I

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN				SUMBER DANA	PELAKSANA	KETERANGAN
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV			
				15-19	20-24	25-29	30-34			
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
		Pembangunan prasarana penunjang lainnya	Dinas PU					APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	Dinas PU	Merupakan lanjutan dari Tahap I
D10	**Perwujduan Pelabuhan ASDP Manggar – Kepang**	Penyusunan masterplan pengembangan ASDP Manggar	Dinas Perhubungan	√				APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	Dinas Perhubungan	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Penyediaan lahan	Dinas Perhubungan	√				APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	Dinas Perhubungan	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Pembangunan infrastruktur pendukung Perbaikan dan peningkatan kapasitas dermaga dan terminal	Dinas PU					APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	Dinas PU	Merupakan lanjutan dari Tahap I
		Pengadaan kapal penumpang	Dinas Perhubungan	√				APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	Dinas Perhubungan	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Penyediaan sistem air baku dan air minum	Dinas PU	√				APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	Dinas PU	(seharusnya) selesai pada tahap I
D11	**Perwujduan Kota Tua Muntok**	Identifikasi dan klasifikasi lokasi dan jenis bangunan *heritage*	Dinas Budpar	√				APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	Dinas Budpar	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Penyusunan proposal pengajuan Kota Tua Muntok sebagai Kawasan Pusaka Nasional, *Asian Herritage* dan diupayakan menjadi *World Heritage*	Dinas Budpar	√				APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	Dinas Budpar	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Penataan kawasan dan restorasi bangunan	Dinas Budpar	√				APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	Dinas Budpar	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Pengesahan Kota Tua Muntok sebagai kawasan heritage (nasional/dunia)	Dinas Budpar	√				APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	Dinas Budpar	(seharusnya) selesai pada tahap I

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN				SUMBER DANA	PELAKSANA	KETERANGAN
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV			
				15-19	20-24	25-29	30-34			
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
		Penyusunan heritage map dan promosi kawasan	Dinas Budpar	√				APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	Dinas Budpar	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Penyusunan agenda tahunan	Dinas Budpar	√				APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	Dinas Budpar	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Penyelenggaraan atraksi budaya (reguler)	Dinas Budpar					APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	Dinas Budpar	Merupakan lanjutan dari Tahap I
		Pengembangan kota Muntok dengan banchmark kota tua	Dinas Budpar					APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	Dinas Budpar	Merupakan lanjutan dari Tahap I
		Pelestariaan dan pemeliharaan bangunan/kawasan tua	Dinas Budpar					APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	Dinas Budpar	Merupakan lanjutan dari Tahap I
D12	**Perwujudan Kawasan Universitas Bangka Belitung (UBB), STAIN, Kota Tua Muntok & Museum Nasional Maritim**	Pengembangan kawasan pendidikan	Dinas Pendidikan	√				APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	Dinas Pendidikan	
		penetapan kawasan sekitar UUB dan STAIN adalah kawasan (aglomerasi) pendidikan	Dinas Pendidikan	√				APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	Dinas Pendidikan	(seharusnya) selesai pada tahap I
		penyusunan masterplan kawasan pendidikan terpadu skala regional, masterplan kawasan Kota Tua Muntok, dan masterplan Museum Nasional Maritim	Dinas Pendidikan	√				APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	Dinas Pendidikan	(seharusnya) selesai pada tahap I
		pembangunan sarana penunjang pendidikan	Dinas PU	√				APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	Dinas PU	(seharusnya) selesai pada tahap I

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN				SUMBER DANA	PELAKSANA	KETERANGAN
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV			
				15-19	20-24	25-29	30-34			
(1)	(2)	(3)	(4)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		pembangunan kawasan wisata pendidikan dan laboratorium alam		√				APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota		(seharusnya) selesai pada tahap I
		pengembangan kerjasama pendidikan dengan universitas luar negeri	Dinas Pendidikan					APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	Dinas Pendidikan	Merupakan lanjutan dari Tahap I
		pembangunan infrastruktur pendukung kawasan pendidikan terpadu skala regional, kawasan Kota Tua Muntok, dan Museum Nasional Maritim	Dinas Pendidikan					APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	Dinas Pendidikan	Merupakan lanjutan dari Tahap I
D14	**Pengelolaan Cagar Alam Gunung Lalang (Belitung), Gunung Menumbing (Bangka Barat), Hutan Konservasi Gunung Maras (Bangka), Gunung Mangkol (Bangka Tengah), Gunung Permisan (Bangka Selatan), Jering Menduyung (Bangka Barat), Kota Kapur (Bangka), Kawasan Kepulauan Buku Limau (Belitung Timur), Taman Kehati (Belitung); dan Karantina Hewan (Pulau Nadu, Kabupaten Belitung)**	Pemantapan tata batas kawasan Cagar Alam & Hutan Konservasi	Dinas Kehutanan	√				APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	Dinas Kehutanan	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Identifikasi kawasan/areal kritis yang mengalami deforestasi dan kerusakan lingkungan	Dinas Kehutanan	√				APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	Dinas Kehutanan	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Rehabilitasi kawasan melalui reboisasi dan perbaikan tanah	Dinas Kehutanan	√				APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	Dinas Kehutanan	(seharusnya) selesai pada tahap I

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN				SUMBER DANA	PELAKSANA	KETERANGAN
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV			
				15-19	20-24	25-29	30-34			
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
		Perbaikan fasilitas penunjang	Dinas Kehutanan	√				APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	Dinas Kehutanan	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Penguatan perlindungan cagar alam, baik yang bersifat fisik maupun non fisik	Dinas Kehutanan					APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	Dinas Kehutanan	Merupakan lanjutan dari Tahap I
		Peningkatan fasilitas karantina hewan								Merupakan lanjutan dari Tahap I

Sumber: Hasil Analisis Tim RTRW 2010 (dibarukan oleh Bappeda, 2020

Berdasarkan indikasi program yang tertuang di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034 tentunya korelasi perencanaan kewilayahan yang tertuang pada periode 2014-2020 harus menjadi acuan khususnya dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2021. Indikasi program kegiatan yang mendukung Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah, sebagaimana yang disajikan pada Tabel V.9

Tabel V.10
Indikasi Program Pengembangan Pariwisata Daerah

NO	STRATEGI	PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	TAHUN PELAKSANAAN						PELAKSANA	
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
1	Menetapkan Kota Pangkalpinang dan Tanjungpandan sebagai pusat pelayanan primer pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta Muntok, Sungailiat, Toboali, dan Pulau Mendanau sebagai pusat pelayanan sekunder pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.	Program pembangunan perwilayahan pariwisata	a.Penyusunan dan pene-tapan rencana pengem-bangan pusat pelayanan primer dan sekunder pari-wisata Provinsi Kepulauan Babel.							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan	○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang perencanaan pembangunan, bidang tata ruang, dan bidang hukum dan peraturan perundangan; ○ PD Kabupaten/Kota bidang kepariwisataan dan bidang perencanaan pembangunan ○ Perguruan tinggi bidang perencanaan
			b.Sosialisasi dan sinkro-nisasi rencana pengem-bangan pusat pelayanan primer dan sekunder pari-wisata Provinsi Kepulauan Babel.							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan	○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang perencanaan pembangunan dan bidang tata ruang; ○ PD Kabupaten/Kota bidang kepariwisataan dan bidang perencanaan pembangunan
			c. Fasilitasi pengembang-an kemitraan dan kola-borasi program dalam pe-ngembangan pusat pela-yanan primer dan sekun-der pariwisata Provinsi Kepulauan Babel.							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan	○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang perencanaan pembangunan dan bidang tata ruang; ○ PD Kabupaten/Kota bidang kepariwisataan dan bidang perencanaan pembangunan
			d.Pelaksanaan pemantau-an dan evaluasi pelak-sanaan rencana pengem-bangan pusat pelayanan primer dan sekunder pari-wisata Provinsi Kepulauan Babel.							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan	○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang perencanaan pembangunan dan bidang tata ruang; ○ PD Kabupaten/Kota bidang kepariwisataan dan bidang perencanaan pembangunan

2	Pembangun Destinasi Pariwisata Provinsi (DPP) Wilayah Utara Kepulauan Bangka Belitung dan DPP Wilayah Selatan Kepulauan Bangka Belitung untuk mendorong pertumbuhan pariwisata yang seimbang dan terpadu antara wilayah utara dan selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.	Program pembangunan daya tarik wisata	a.Penyusunan jalur wisata tematik lokal (dalam DPP), provinsi, nasional, dan internasional sesuai dengan keunggulan daya tarik wisata di wilayah DPP dan tema pengembangan KSPP & KPPP.							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan	○ PD Kabupaten/Kota bidang kepariwisataan; ○ Asosiasi perjalanan wisata Provinsi Kep. Bangka Belitung; ○ Perguruan tinggi bidang kepariwisataan
			b.Sosialisasi dan sinkro-nisasi program dan kegia-tan pengembangan jalur wisata tematik di DPP.							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan	○ Kementerian bidang kepariwisataan; ○ Kabupaten/Kota bid. kepariwisataan; ○ Asosiasi perjalanan wisata Provinsi Babel; ○ Perguruan tinggi bid. kepariwisataan
			c.Pendampingan pengem-bangan produk pariwisata dan ujicoba jalur wisata tematik.							PD Provinsi Kep. Babel bidang kepariwisataan	○ Kementerian bidang kepariwisataan; ○ Kabupaten/Kota bid. kepariwisataan; ○ Asosiasi perjalanan wisata Provinsi Kep. Babel;
			d.Pelaksanaan pemantau-an dan evaluasi pelaksa-naan jalur wisata tematik lokal (dalam DPP), provinsi, nasional, dan internasional sesuai dengan keunggulan daya tarik wisata di wilayah DPP dan tema pengem-bangan KSPP dan KPPP.							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan	○ Kementerian bidang kepariwisataan; ○ PD Kabupaten/ Kota bidang kepariwisataan; ○ Asosiasi perjalanan wisata Provinsi Kep. Bangka Belitung; ○ Perguruan tinggi bidang kepariwisataan

3	Membangun Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP) Muntok dan sekitarnya, KSPP Belinyu- Sungailiat dan sekitarnya, KSPP Pangkalpinang- Mendo Barat- Bangka Tengah, serta KSPP Pulau Belitung dan sekitarnya untuk memberikan nilai tambah yang positif bagi identitas provinsi sebagai wilayah pertambangan timah dan penghasil lada di Indonesia, memberikan perlindungan terhadap sumber daya alam dan budaya, peningkatan kualitas ekosistem alam, serta pemulihan kerusakan lingkungan.	Program pembangunan perwilayahan pariwisata	a.Penyusunan dan penetapan Rencana Induk dan Rencana Aksi Multipihak Pembangunan KSPP Muntok dan sekitarnya.							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan	○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang perencanaan pembangunan, bidang tata ruang, dan bidang hukum dan peraturan perundangan;
			b.Penyusunan dan penetapan Rencana Induk dan Rencana Aksi Multipihak Pembangunan KSPP Belinyu- Sungailiat dan sekitarnya.							SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan	○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang perencanaan pembangunan, bidang tata ruang, dan bidang hukum dan peraturan perundangan; ○ PD Kabupaten/Kota bidang kepariwisataan dan bidang perencanaan pembangunan; ○ Perguruan tinggi bidang perencanaan
			c. Penyusunan dan penetapan Rencana Induk dan Rencana Aksi Multipihak Pembangunan KSPP Pangkalpinang- Mendo Barat- Bangka Tengah.							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan	○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang perencanaan pembangunan, bidang tata ruang, dan bidang hukum dan peraturan perundangan; ○ PD Kabupaten/Kota bidang kepariwisataan; ○ Perguruan tinggi Bid. Kepariwisataan
			d. Penyusunan dan penetapan Rencana Induk dan Rencana Aksi Multipihak Pembangunan KSPP Pulau Belitung dan sekitarnya.							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan	○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang perencanaan pembangunan, bidang tata ruang, dan bidang hukum dan peraturan perundangan; ○ PD Kabupaten/Kota bidang kepariwisataan; ○ Perguruan tinggi Bid. Kepariwisataan
			e. Sinkronisasi dan kola-borasi program dan kegiatan dalam Rencana Induk dan Rencana Aksi Multipihak KSPP Kepulauan Bangka Belitung.							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan	○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang perencanaan pembangunan, bidang tata ruang; ○ PD Kabupaten/Kota bidang kepariwisataan.
			f.Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Induk dan Rencana Aksi Multipihak Pembangunan KSPP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan	○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang perencanaan pembangunan, bidang tata ruang; ○ PD Kabupaten/Kota bidang perencanaam dan kepariwisataan; ○ Perguruan tinggi Bid. Kepariwisataan

4	Membangun Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi (KPPP) Toboali dan sekitarnya, KPPP Gugusan Pulau di Selat Gaspar untuk memperkuat citra sebagai destinasi pariwisata bahari & budaya khas, meningkatkan daya saing produk pariwisata secara internasional, menciptakan keterpaduan pembangunan & penyebaran perkembangan pariwisata yang lebih luas.	Program pembangunan perwilayahan pariwisata	a. Penyusunan dan penetapan Rencana Induk dan Rencana Aksi Multipihak Pembangunan KPPP Toboali dan sekitarnya.							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan	○ PD Provinsi bidang perencanaan pembangunan, bidang tata ruang; ○ PD Kabupaten/Kota bidang perencanaam dan kepariwisataan;
			b. Penyusunan dan penetapan Rencana Induk dan Rencana Aksi Multipihak Pembangunan KPPP Gugusan Pulau di Selat Gaspar.							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan	○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang perencanaan pembangunan, bidang tata ruang, dan bidang hukum dan peraturan perundangan; ○ PD Kabupaten/Kota bidang perencanaan dan Kepariwisataan
			c. Sinkronisasi dan kolaborasi program dan kegiatan dalam Rencana Induk dan Rencana Aksi Multipihak KSPP Babel.							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan	○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang perencanaan pembangunan, bidang tata ruang; ○ PD Kabupaten/Kota bid. perencanaan;
			d. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Induk dan Rencana Aksi Multipihak Pembangunan KPPP Prov. Kep. Babel.							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan	○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang perencanaan pembangunan, bidang tata ruang; ○ PD Kabupaten/Kota bidang perencanaan;
5	Memadukan pembangunan perwilayahan DPP, KPPP, dan KSPP Kep. Babel dengan DPN Palembang- Bangka Belitung, KSPN Tanjung Kelayang & sekitar-nya, KPPN Belinyu & sekitarnya, KPPN Pangkalpinang- Sungailiat dan sekitarnya, serta KPPN Punai-Belitung dan sekitarnya.	Program pembangunan perwilayahan pariwisata	a.Sosialisasi dan sinkronisasi program dan kegiatan dalam Rencana Induk dan Rencana Aksi Multipihak KSPP Pulau Belitung dengan Rencana Induk dan Rencana Detil KSPN TanjungKelayang & sekitarnya.							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan	○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang perencanaan pembangunan, bidang tata ruang; ○ PD Kabupaten/Kota bidang perencanaam dan kepariwisataan; ○ Perguruan tinggi Bid. Kepariwisataan
			b.Penandatangan naskah kesepakatan bersama pembagian peran dalam pembangunan KSPN Tanjung kelayang & KSPP Pulau Belitung.							Kementerian bidang kepariwisataan	○ PD Provinsi bid. perencanaan, bid. tata ruang, dan kepariwisataan; ○ PD Kabupaten/Kota bidang perencanaan dan kepariwisataan; ○ Perguruan tinggi Bid. Kepariwisataan;
			c.Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kesepakatan pembagian peran dalam pembangunan KSPN Tanjungkelayang dan KSPP Pulau Belitung.							Kementerian bidang kepariwisataan	○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang perencanaan pembangunan, bidang tata ruang, dan kepariwisataan;

6	Mengembangkan sistem mitigasi dan adaptasi terhadap bencana, kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan dan sektor lain di KSPP dan KPPP, serta dampak lingkungan akibat pariwisata di seluruh wilayah DPP.	Program pembangunan perwilayahan pariwisata	a.Penyusunan dan penetapan sistem mitigasi dan adaptasi pariwisata terhadap bencana.							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang penanggulangan bencana	○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang perencanaan, bidang Hukum, bidang lingkungan hidup, dan kepariwisataan; ○ PD Kabupaten/Kota bidang kepariwisataan;
			b.Penyusunan dan penetapan sistem mitigasi dan adaptasi terhadap kerusakan lingkungan di KSPP dan KPPP.							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang lingkungan hidup	○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang perencanaan, bidang Hukum, bidang lingkungan hidup; ○ PD Kabupaten/Kota bidang perencanaan;
			c. Sosialiasi dan sinkronisasi sistem mitigasi dan adaptasi dengan rencana sektor lain.							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang perencanaan pembangunan	○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang lingkungan hidup, Bencana, dan kepariwisataan; ○ PD Kabupaten/Kota bidang perencanaan;
			d.Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan mitigasi dan adaptasi bencana dan kerusakan							PD Provinsi Kep. Babel bidang perencanaan pembangunan	○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang Bencana, dan kepariwisataan;
7	Menetapkan dan mengembangkan daya tarik wisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berbasis pesisir, pantai, pulau- pulau kecil, formasi geologis batuan granit, perkebunan lada, adat-istiadat khas	Program pembangunan daya tarik wisata	a.Penyusunan dan penetapan standar pembangunan dan pengelolaan bagi daya tarik wisata provinsi.							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bid. kepariwisataan	○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang Pekerjaan Umum, Kebudayaan dan Hukum dan Peraturan
			b.Dukungan dan pendam-pingan penerapan standar pembangunan dan pengelo-laan daya tarik wisata provinsi.							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan	○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang Pekerjaan Umum, Kebudayaan; ○ Perguruan tinggi bidang perencanaan kepariwisataan
			c.Pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan standar pembangunan dan pengelo-laan daya tarik wisata provinsi.							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan	○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang Pekerjaan Umum dan kebudayaan; ○ Perguruan tinggi bidang perencanaan kepariwisataan
			d.Pemberian penghargaan/ insentif bagi daya tarik wisata provinsi berkinerja tinggi.							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan	○ PD Kabupaten/Kota bidang kepariwisataan; ○ Perguruan tinggi bidang perencanaan kepariwisataan

8	Mengembangkan keterpaduan pembangunan dengan daya tarik wisata nasional dan daya tarik wisata kab/kota yang terletak di sekitar daya tarik wisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.	Program pembangunan daya tarik wisata	a.Sinkronisasi program/ kegiatan pengembangan daya tarik wisata provinsi dengan daya tarik wisata nasional dan daya tarik wisata kabupaten/ kota di sekitarnya.							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan	○ Kementerian bidang kepariwisataan ○ PD Kabupaten/Kota bidang kepariwisataan
			b.Penyusunan paket wisata terpadu daya tarik wisata provinsi, daya tarik wisata nasional, daya tarik wisata kabupaten/kota.							Asosiasi perjalanan wisata Provinsi Kep. Bangka Belitung	○ Kementerian bidang kepariwisataan ○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan ○ PD Kabupaten/Kota bidang kepariwisataan
9	Mengembangkan interpretasi sesuai tema daya tarik dan jalur wisata tematik DPP Kepulauan Bangka Belitung.	Program pembangunan daya tarik wisata	a.Perencanaan interpretasi jalur wisata tematik.							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan	○ Kementerian bidang kepariwisataan; ○ PD Kabupaten/Kota bidang kepariwisataan; ○ Perguruan tinggi bidang kepariwisataan
			b.Perencanaan interpretasi di daya tarik wisata dalam jalur wisata tematik.							Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan	○ Kementerian bidang kepariwisataan; ○ PD Kabupaten/Kota bidang kepariwisataan; ○ Perguruan tinggi bidang kepariwisataan
			c.Pembuatan dan pemasangan papan interpretasi di daya tarik wisata dan di jalan dalam jalur wisata tematik.							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bid. kepariwisataan	○ PD Kabupaten/Kota bidang kepariwisataan dan Perhubungan; ○ Perguruan tinggi bidang kepariwisataan
			d.Pembuatan panduan bagi interpreter.							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bid. kepariwisataan	○ PD Kabupaten/Kota bidang kepariwisataan; ○ Perguruan tinggi bid. kepariwisataan
			e. Pembuatan brosur/leaflet interpretasi di daya tarik wisata.							Pengelola daya tarik wisata	○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan; ○ PD Kabupaten/Kota bidang kepariwisataan; ○ Perguruan tinggi bidang kepariwisataan
			f. Pelatihan interpretasi bagi para pemandu wisata.							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan	○ PD Kabupaten/Kota bidang kepariwisataan; ○ Perguruan tinggi bidang kepariwisataan

10	Merencanakan dan menerapkan pengelolaan pengunjung pada daya tarik wisata primer dan sekunder pada KSPP dan KPPP Kepulauan Bangka Belitung.	Program pembangunan daya tarik wisata	a.Penyusunan pedoman rencana pengelolaan pengunjung di daya tarik wisata.							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bid. kepariwisataan	○ Pengelola daya tarik wisata; ○ Perguruan tinggi bidang kepariwisataan
			b.Penyusunan rencana pengelolaan pengunjung di daya tarik wisata.							Pengelola daya tarik wisata	○ Perguruan tinggi bidang kepariwisataan
			c. Pemantauan dan evaluasi penerapan rencana pengelolaan pengunjung daya tarik wisata.							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan	○ PD Kabupaten/Kota bidang kepariwisataan; ○ Pengelola daya tarik wisata; ○ Perguruan tinggi bid.kepariwisataan
11	Merencanakan dan menerapkan informasi terpadu antara daya tarik wisata yang memiliki keterkaitan tema.	Program pembangunan daya tarik wisata	a.Penyusunan sistem informasi daya tarik wisata terpadu berbasis teknologi informasi							PD Provinsi bidang komunikasi dan infprmatika	○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kominfo, Bid. kepariwisataan; ○ PD Kabupaten/Kota bid. pariwisata;
			b.Penyediaan informasi tentang daya tarik wisata sekitar dan daya tarik wisata yang memilki keterkaitan tema dengan daya tarik wisata primer dan sekunder							Pengelola daya tarik wisata	○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan; ○ PD Kabupaten/Kota bidang kepariwisataan; ○ Perguruan tinggi bid. kepariwisataan
12	Mengembangkan program geowisata pada daya tarik wisata alam berbasis pesisir, pantai, pulau-pulau kecil, dan formasi geologis batuan granit.	Program pembangunan daya tarik wisata	a.Penyusunan interpretasi berbasis geowisata di daya tarik wisata.							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan	○ PD Provinsi bid. geologis/sumber daya mineral, kehutanan, pertanian, perkebunan., kebudayaan; ○ PD Kabupaten/Kota bid. pariwisata; ○ Perguruan tinggi bid. kepariwisataan
			b.Penyelenggaraan program wisata pendidikan geowisata didaya tarik wisata bagi wisatawan umum/pelajar/ mahasiswa							Pengelola daya tarik wisata	○ PD Provinsi bidang kepariwisataan; ○ PD Kabupaten/Kota bidang kepariwisataan; ○ Asosiasi usaha perjalanan wisata
			c.Penyusunan dan penyelenggaraan paket geowisata.							Asosiasi usaha perjalanan wisata	○ PD Provinsi bidang kepariwisataan; ○ PD Kabupaten/Kota bidang kepariwisataan; ○ Asosiasi usaha perjalanan wisata di Bandung

13	Mengembangkan program wisata minat khusus bahari (selam, *snorkeling*, memancing di tengah laut) pada daya tarik wisata berbasis pantai dan pulau-pulau kecil.	Program pembangunan daya tarik wisata	a.Penyusunan interpretasi berbasis ekowisata bahari di daya tarik wisata pantai dan pulau-pulau kecil							PDKabupaten/Kota bidang kepariwisataan	○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisata, bidang kelautan dan perikanan; ○ Perguruan tinggi bid. kepariwisataan
			b.Sosialisasi keselamatan dan keamanan penyelenggaraan wisata minat khusus bahari.							Daerah Provinsi	○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisata, bidang kelautan dan perikanan; ○ Perguruan tinggi bid. kepariwisataan
			c.Pembangunan dan pemeliharaan fasilitas dan pelayanan keselamatan dan keamanan penyelenggaraan wisata minat khusus bahari.							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kelautan dan perikanan	○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan; ○ PD Kabupaten/Kota bidang kepariwisataan; ○ Perguruan tinggi bid. kepariwisataan
14	Mengembangkan program wisata edukatif dan kreatif pada daya tarik wisata budaya berbasis pesisir, agrowisata lada dan lainnya, dan adat-istiadat khas Kepulauan Bangka Belitung, khususnya nanggung dan upacara adat perkawinan.	Program pembangunan daya tarik wisata	a.Penyusunan dan penyelenggaraan program wisata pendidikan dan wisata kreatif pada daya tarik agrowisata (lada dan lainnya).							-PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang pertanian dan perkebunan -Pengelola daya tarik wisata	○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan; ○ PD Kabupaten/Kota bid. kepariwisataan; ○ Perguruan tinggi bid. kepariwisataan
			b.Penyusunan dan penyeleng-garaan program wisata kreatif pada daya tarik wisata seni, budaya pesisir.							-PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kebudayaan -Pengelola daya tarik wisata	○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan; ○ PD Kabupaten/Kota bidang kepariwisataan; ○ Perguruan tinggi bid. kepariwisataan
			c.Penyusunan dan penyeleng-garaan paket wisata edukatif dan kreatif di desa wisata.							Pengelola desa wisata	○ PD Kabupaten/Kota bidang kepariwisataan; ○ Asosiasi perjalanan wisata Provinsi Kep. Bangka Belitung

15	15. Meningkatkan kualitas dan kapasitas pelayanan jaringan jalan menuju daya tarik wisata provinsi.	Program peningkatan aksesibilitas	a.Sinkronisasi kebutuhan peningkatan kualitas dan kapasitas jaringan jalan menuju daya tarik wisata provinsi dengan rencana pembangunan jaringan jalan provinsi dan kabupaten/kota.							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang pekerjaan umum	○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan; ○ PD Kabupaten/Kota bidang kepariwisataan, bidang pekerjaan umum; ○ Asosiasi perjalanan wisata Provinsi Kep. Bangka Belitung
			b.Perbaikan dan pemeliharaan jaringan jalan menuju daya tarik wisata provinsi							PD Provinsi Kep. Bangka	○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang PU
16	Membangun jaringan transportasi sungai untuk mendukung pariwisata.	Program peningkatan aksesibilitas	a.Studi kelayakan pembangunan jaringan transportasi sungai untuk mendukung pariwisata Kepulauan Bangka Belitung.							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang perhubungan	○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan; ○ PD Kabupaten/Kota bidang kepariwisataan,bid. perhubungan; ○ Perguruan tinggi bidang transportasi
			b.Penyusunan, penetapan, dan sosialisasi rencana pembangunan jaringan transportasi sungai untuk mendukung pariwisata Kepulauan Bangka Belitung.							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang perhubungan Belitung bidang pekerjaan umum	○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan
			c. Sinkronisasi program pembangunan jaringan transportasi sungai untuk mendukung pariwisata Kepulauan Bangka Belitung.							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang perhubungan	○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan; ○ PD Kabupaten/Kota bidang kepariwisataan; bidang perhubungan
			d.Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan jaringan transportasi sungai untuk mendukung pariwisata Kepulauan Bangka Belitung.							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang perhubungan	○ - SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan

17	Memadukan jaringan transportasi Daerah Provinsi dengan sistem transportasi lintas Sumatera untuk mendukung pariwisata.	Program peningkatan aksesibilitas	a.Sosialisasi program/kegiatan pembangunan keterpaduan jaringan transportasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan sistem transportasi lintas Sumatera.							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang perhubungan	○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan; ○ PD Kabupaten/Kota bidang kepariwisataan, bidang perhubungan
			b.Sinkronisasi program/kegiata n pembangunan sistem transportasi lintas Sumatera yang dapat mendukung pembangunan kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang perhubungan	○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan; ○ PD Kabupaten/Kota bid. Kepari wisataan, bidang perhubungan
			c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan pembangunan sistem transportasi lintas Sumatera yang dapat mendukung pembangunan kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang perhubungan	○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan; ○ PD Kabupaten/Kota bidang kepariwisataan,bidang perhubungan; ○ Perguruan tinggi bidang transportasi
18	Meningkatkan kualitas dan kapasitas pelayanan angkutan umum yang menghubungkan KSPP dan KPPP, serta pusat pelayanan pusat pelayanan primer dan sekunder pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Program peningkatan aksesibilitas	a.Sosialisasi kebutuhan peningkatan kualitas dan kapasitas pelayanan angkutan umum yang menghubungkan KSPP dan KPPP, serta pusat pelayanan primer dan sekunder.							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang perhubungan	○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan; ○ PD Kabupaten/Kota bidang kepariwisataan, bidang perhubungan
			b.Penambahan rute angkutan umum menuju daya tarik wisata primer dan sekunder di KSPP dan KPPP.							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang perhubungan	○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan; ○ PD Kabupaten/Kota bidang kepariwisataan, bidang perhubungan

19	19. Mengembangkan transportasi wisata untuk mendukung jalur wisata tematik di DPP.	Program peningkatan aksesibilitas	a.Sosialisasi dan sinkronisasi kebutuhan penyediaan transportasi wisata untuk memperkuat jalur wisata lokal & reg.							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan	○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan; ○ PD Kabupaten/Kota bidang kepariwisataan,Bidang perhubungan
			b.Penyediaan angkutan wisata dan kelengkapannya, rambu petunjuk arah, serta papan peta dan informasi menuju daya tarik wisata.							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang perhubungan	○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan; ○ PD Kabupaten/Kota bidang kepariwisataan; bidang perhubungan
			c.Perbaikan dan pemeliharaan angkutan wisata.							PD Provinsi bidang perhubungan	○ PD Provinsi bidang kepariwisataan; ○ PD Kabupaten/Kota bid. Pariwisata;
20	Mengembangkan transportasi terpadu yang menghubungkan bandara/ pelabuhan dengan pusat pelayanan primer dan sekunder pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.	Program peningkatan aksesibilitas	a.Penyediaan angkutan umum rute bandara/pelabuhan – TanjungPandan,bandara/ pelab .–Pangkalpinang, bandara/ pelab.–Sungailiat, bandara/pelabuhan–Muntok, band/pelab–Pulau Mendanau							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang perhubungan	○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan; ○ PD Kabupaten/Kota bidang kepariwisataan,bidang perhubungan
			b.Penyusunan dan penerapan standar pelayanan transportasi terpadu menghubungkan bandara/pelabuhan dengan pusat pelayanan primer /sekunder.							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang perhubungan	○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan; ○ PD Kabupaten/Kota bidang kepariwisataan bidang perhubungan; ○ Perguruan tinggi bidang transportasi
21	Mengembangkan rute dan frekuensi penerbangan langsung dari Jakarta, Palembang, Jawa Barat, Yogyakarta, Bali, Batam, Medan, dan Balikpapan.	Program peningkatan aksesibilitas	a.Koordinasi pengembangan rute dan frekuensi penerbangan langsung dari Jakarta, Palembang, Jawa Barat, Yogyakarta, Bali, Batam, Medan, dan Balikpapan.							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bid. perhubungan	○ Kementerian bidang kepariwisataan; ○ Kementerian bidang perhubungan ○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan
			b.Penyusunan dan penerapan sistem pengelolaan penerbangan Babel							-PD Provinsi bid. perhubungan -Pengelola bandara	○ Kementerian bidang perhubungan
			c. Penyusunan dan penerapan standar pelayanan di bandara.							PD Provinsi bid. perhubungan -Pengelola bandara	○ Kementerian bidang perhubungan; ○ Perguruan tinggi bidang transportasi

22	Mengembangkan rute dan frekuensi penerbangan dari Malaysia dan Singapura, dan negara sumber pasar wisatawan mancanegara lainnya.	Program peningkatan aksesibilitas	a.Koordinasi pengembangan rute dan frekuensi penerbangan langsung dari Malaysia dan Singapura.							- PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bid. perhubungan	○ Kementerian bidang perhubungan; ○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang perencanaan pembangunan
			b.Studi penilaian kebutuhan pengembangan rute dan frekuensi penerbangan internasional untuk mendukung pariwisata.							- PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bid. perhubungan	○ Kementerian bidang perhubungan ○ Perguruan tinggi bidang transportasi
23	Mengembangkan rute dan frekuensi pelayaran dari Jakarta, Batam, dan daerah sumber pasar wisatawan nusantara lainnya.	Program peningkatan aksesibilitas	a.Koordinasi pengembangan rute dan frekuensi pelayaran dari Jakarta, Batam.							- PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bid. perhubungan	○ Kementerian bidang perhubungan; ○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang perencanaan pembangunan
			b.Studi penilaian kebutuhan pengembangan rute dan frekuensi pelayaran nasional untuk mendukung pariwisata.							- PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bid. perhubungan	○ Kementerian bidang perhubungan ○ Perguruan tinggi bidang transportasi
24	Menetapkan standar kenyamanan, keselamatan, dan keamanan bagi moda transportasi darat dan laut di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Program peningkatan aksesibilitas	a.Penyusunan dan penetapan standar kenyamanan, keselamatan, dan keamanan angkutan umum darat dan laut di Prov. Kep. Babel							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang perhubungan	○ PD Kabupaten/ Kota bidang perhubungan; ○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang hukum dan peraturan perundangan
			b.Pendampingan penerapan standar kenyamanan, keselamatan, dan keamanan angkutan umum darat dan laut di Prov. Kep. Babel							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang perhubungan	○ PD Kabupaten/ Kota bidang perhubungan; ○ Perguruan tinggi bidang transportasi
			c.Pemantauan dan evaluasi penerapan standar kenyamanan, keselamatan, dan keamanan angkutan umum darat dan laut di Prov. Kep. Babel							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang perhubungan	○ PD Kabupaten/ Kota bidang perhubungan; ○ Perguruan tinggi bidang transportasi

25	Meningkatkan kesadaran kolektif para pemangku kepentingan terhadap standar nasional dan internasional bagi penyediaan & pengelolaan prasarana umum dan fasilitas umum di daya tarik wisata provinsi, destinasi pariwisata provinsi, kawasan pengembangan pariwisata provinsi, dan kawasan strategis pariwisata provinsi.	Program pembangunan prasarana dan fasilitas umum	a.Sosialisasi standar nasional dan internasional bagi penyediaan dan pengelolaan prasarana umum dan fasilitas umum di daya tarik wisata provinsi, destinasi pariwisata provinsi, kawasan pengembangan pariwisata provinsi, dan kawasan strategis pariwisata provinsi.							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang pekerjaan umum	○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan; ○ PD Kabupaten/ Kota bidang kepariwisataan, bidang pekerjaan umum
			b.Pelatihan dan pendampingan penerapan standar nasional dan internasional bagi penyediaan dan pengelolaan prasarana umum dan fasilitas umum di daya tarik wisata provinsi, destinasi pariwisata provinsi, kawasan pengembangan pariwisata provinsi, dan kawasan							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang pekerjaan umum	○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan; ○ PD Kabupaten/ Kota bidang kepariwisataan ○ PD Kabupaten/ Kota bidang pekerjaan umum; ○ Perguruan tinggi bidang teknik sipil ○ Perguruan tinggi bidang kepariwisataan
			c. Pemantauan dan evaluasi penerapan standar nasional dan internasional bagi penyediaan dan pengelolaan prasarana umum dan fasilitas umum di daya tarik wisata provinsi, destinasi pariwisata provinsi, kawasan pengembangan pariwisata provinsi, dan kawasan strategis pariwisata provinsi.							SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang pekerjaan umum	○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan; ○ PD Kabupaten/ Kota bidang kepariwisataan; ○ PD Kabupaten/ Kota bidang pekerjaan umum; ○ Perguruan tinggi bidang teknik sipil

26	Mengembangkan kemitraan dengan pihak swasta, pengelola daya tarik wisata, dan masyarakat dalam pembangunan pra-sarana umum dan fasilitas umum berstandar nasional dan internasional di daya tarik wisata provinsi, destinasi pariwisata provinsi, kawasan pengem-bangan pariwisata provinsi, dan kawasan strategis pariwisata provinsi.	Program pembangunan prasarana dan fasilitas umum	a.Sosialisasi dan sinkronisasi kebutuhan pembangunan prasarana umum dan fasilitas umum berstandar nasional dan internasional kepada pihak swasta, pengelola daya tarik wisata, dan masyarakat.							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang pekerjaan umum	○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan; ○ PD Kabupaten/ Kota bidang kepariwisataan; ○ PD Kabupaten/ Kota bidang pekerjaan umum
			b.Fasilitasi pengembangan kerja sama pembangunan prasarana umum dan fasilitas umum berstandar nasional dan internasional.							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang pekerjaan umum	○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan; ○ PD Kabupaten/ Kota bidang kepariwisataan; ○ PD Kabupaten/ Kota bidang pekerjaan umum
										PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang pekerjaan umum	○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan, perhubungan; ○ PD Kabupaten/ Kota bidang kepariwisataan, perhubungan
27	Meningkatkan kesadaran kolektif para pemangku kepentingan terhadap standar nasional dan internasional bagi penyediaan dan pengelolaan fasilitas pariwisata.	Program pembangunan fasilitas pariwisata	a.Sosialisasi standar nasional dan internasional bagi penyediaan dan pengelolaan fasilitas pariwisata.							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan	○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang pekerjaan umum; ○ PD Kabupaten/ Kota bidang kepariwisataan;bid. pekerjaan umum
			b.Pelatihan dan pendampingan penerapan standar nasional dan internasional bagi penyediaan dan pengelolaan fasilitas pariwisata							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan	○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang pekerjaan umum; ○ PD Kabupaten/ Kota bidang kepariwisataan,bid. pekerjaan umum; ○ Perguruan tinggi bidang kepariwisataan
			c. Pemantauan dan evaluasi penerapan standar nasional dan internasional bagi penyediaan dan pengelolaan fasilitas pariwisata.							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan	○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang pekerjaan umum; ○ PD Kabupaten/ Kota bidang kepariwisataan; bidang pekerjaan umum; ○ Perguruan tinggi bidang kepariwisataan

28	Menyusun dan menetapkan standar bangunan berciri khas lokal dan pelayanan berkarakter budaya dan nilai-nilai agama yang berlaku di masyarakat Kepulauan Bangka Belitung.	Program pembangunan fasilitas pariwisata	a.Penyusunan dan penetapan pedoman bangunan fasilitas pariwisata berciri khas budaya Kepulauan Bangka Belitung.							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang pekerjaan umum	○ PD Provinsi bid. kepariwisataan; bid. hukum dan peraturan perundangan; ○ PD Kabupaten/ Kota bid. kepariwisataan, pekerjaan umum ○ Perguruan tinggi bid kepariwisataan
			b.Penyusunan dan penetapan pedoman pelayanan berkarakter budaya dan nilai-nilai agama yang berlaku di masyarakat Babel							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan	○ PD Provinsi bid. kebudayaan, hukum & peraturan perundangan; ○ PD Kabupaten/Kota bid. pariwisata; ○ Perguruan tinggi bidang kepariwisataan & bid. kebudayaan
			c. Penyusunan dan penetapan regulasi waktu operasional fasilitas hiburan dan rekreasi di Kepulauan Bangka Belitung							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bid. kepariwisataan	○ PD Kabupaten/Kota bid.pariwisata; ○ PD Provinsi bidang hukum dan peraturan perundangan
			d.Sosialisasi standar bangunan berciri pelayanan berkarakter budaya dan nilai-nilai agama yang berlaku di masyarakat Kepulauan Bangka Belitung (khas lokal)							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan	○ PD Kabupaten/ Kota bidang kepariwisataan
			e. Pelatihan dan pendampingan penerapan standar pelayanan berkarakter budaya dan nilai-nilai agama yang berlaku di masyarakat.							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan	○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kebudayaan, bidang hukum dan peraturan perundangan; ○ PD Kabupaten/ Kota bidang kepariwisataan; ○ Perguruan tinggi bidang kepariwisataan; bidang kebudayaan
			f. Pemantauan dan evaluasi penerapan regulasi waktu operasional fasilitas hiburan dan rekreasi di Kepulauan Bangka Belitung.							PD Kabupaten/ Kota bidang kesatuan polisi pamong praja	○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan; ○ PD Kabupaten/ Kota bidang kepariwisataan

29	Membangun fasilitas akomodasi, fasilitas makan dan minum, fasilitas perjalanan wisata, dan fasilitas informasi yang berstandar internasional dan ramah lingkungan di Kota Pangkalpinang dan Tanjungpandan sebagai pusat pelayanan primer.	Program pembangunan fasilitas pariwisata	a.Sosialisasi standar pelayanan dan pengelolaan ramah lingkungan untuk fasilitas akomodasi, fasilitas makan minum, fasilitas perjalanan wisata, dan fasilitas informasi.							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan	○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang lingkungan hidup; ○ PD Kabupaten/ Kota bidang kepariwisataan
			b.Pemantauan dan evaluasi penerapan standar internasi-onal dan ramah lingkungan bagi fasilitas akomodasi.							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan	○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang lingkungan hidup; ○ PD Kabupaten/ Kota bidang kepariwisataan;
			c. Pemantauan dan evaluasi penerapan standar internasional dan ramah lingkungan bagi fasilitas makan dan minum.							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kesehatan	○ PD Provinsi bid. kepariwisataan, bid. lingkungan hidup; ○ PD Kabupaten/Kota bid. pariwisata; ○ Perguruan tinggi bidang kepariwisataan, bidang lingkungan
			d.Pemantauan dan evaluasi penerapan standar internasional dan ramah lingkungan bagi fasilitas perjalanan wisata.							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan	○ PD Provinsi bid. lingkungan hidup; ○ PD Kabupaten/ Kota bidang kepariwisataan; ○ Perguruan tinggi bidang kepariwisataan, bidang lingkungan
			e. Pemantauan dan evaluasi penerapan standar internasional dan ramah lingkungan bagi fasilitas informasi.							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan	○ PD Provinsi bid.g komunikasi dan informatika, bid. lingkungan hidup; ○ PD Kabupaten/Kota bid. pariwisata; ○ Perguruan tinggi bidang kepariwisataan, bidang lingkungan
			f. Pemberian insentif bagi fasilitas akomodasi, fasilitas makan dan minum, fasilitas perjalanan wisata, dan fasilitas informasi berstandar internasional yang menerapkan prinsip-prinsip ramah lingkungan.							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan	○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang lingkungan hidup ○ PD Kabupaten/ Kota bidang kepariwisataan; ○ Perguruan tinggi bidang kepariwisataan; ○ Perguruan tinggi bidang lingkungan

30	Mempercepat peningkatan pembangunan fasilitas akomodasi berkelas bintang di Kota Pangkalpinang dan Tanjungpandan sebagai pusat pelayanan primer pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.	Program pembangunan fasilitas pariwisata	a.Penelitian kuota dan lokasi fasilitas akomodasi kelas bintang di Kota Pangkalpinang dan Tanjungpandan.							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan	○ PD Kota Pangkalpinang bidang kepariwisataan; ○ PD Kabupaten Belitung bidang kepariwisataan; ○ PD Kota Pangkalpinang bidang tata ruang; ○ PD Kabupaten Belitung bidang tata ruang; ○ Perguruan tinggi bidang kepariwisataan
			b.Penyusunan, penetapan, dan sosialisasi mekanisme percepatan pengurusan perizinan pembangunan hotel bintang di Kepulauan Bangka Belitung.							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang perizinan terpadu	○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan; ○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang hukum dan peraturan perundangan; ○ PD Kabupaten/ Kota bidang kepariwisataan; ○ PD Kabupaten/ Kota bidang perizinan terpadu
			c. Fasilitasi konsultasi pembangunan hotel bintang dengan para pakar arsitektur, struktur bangunan, dan perhotelan.							SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan	○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang pekerjaan umum; ○ Perguruan tinggi bidang arsitektur
			d.Sosialisasi persyaratan fasilitas dan pelayanan hotel bintang kepada hotel nonbintang dalam rangka peningkatan kelas hotel.							SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan	○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang pekerjaan umum; ○ PD Kabupaten/ Kota bidang kepariwisataan
			e. Fasilitasi peningkatan kelas hotel dari hotel nonbintang ke hotel bintang.							SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan	○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang pekerjaan umum; ○ PD Kabupaten/ Kota bidang kepariwisataan

31	Mempercepat peningkatan pembangunan fasilitas akomodasi berkelas nonbintang dan pondok wisata (*homestay*) berstandar nasional dan internasional di Muntok, Sungailiat, Toboali, dan Pulau Mendanau sebagai pusat pelayanan sekunder pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.	Program pembangunan fasilitas pariwisata	a.Penelitian kuota dan lokasi fasilitas akomodasi kelas nonbintang di Muntok, Sungailiat, Toboali, dan Pulau Mendanau.							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan	○ PD Kota Pangkalpinang bidang Kepariwisataan; ○ PD Kabupaten Belitung bidang kepariwisataan; ○ PD Kota Pangkalpinang bidang tata
			b.Penyusunan, penetapan, dan sosialisasi mekanisme percepatan pengurusan perizinan pembangunan hotel nonbintang di Babel							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang perizinan terpadu	○ PD Provinsi bid kepariwisataan; Bid. Hukum & peraturan perundangan; ○ PD Kabupaten/ Kota bidang kepariwisataan;bid perizinan
			c. Pembinaan pengembangan pondok wisata (*homestay*) di Muntok, Sungailiat, Toboali, dan Pulau Mendanau.							PD Kabupaten/Kota bidang kepariwisataan	○ Kementerian bidang kepariwisataan; ○ PD Provinsi bidang kepariwisataan; ○ Perguruan tinggi bidang
			d.Dukungan pengembangan pondok wisata (*homestay*) di Muntok, Sungailiat, Toboali, dan Pulau Mendanau.							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan	○ Kementerian bidang kepariwisataan; ○ PD Kabupaten/ Kota bidang kepariwisataan
32	Mengendalikan pembangunan fasilitas pariwisata di daerah sempadan pantai dan sempadan lainnya dengan memperhatikan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan;	Program pembangunan fasilitas pariwisata	a.Kajian pelanggaran daerah sempadan (pantai, sungai, dll) oleh fasilitas pariwisata dan tindakan penanganannya.							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang tata ruang	○ PD Provinsi bid. perencanaan pemb; bidang kepariwisataan; ○ Perguruan tinggi bidang perencanaan wilayah dan kota.
			b.Sosialisasi daerah sempadan (pantai, sungai, dll) kepada seluruh pemangku kepentingan pariwisata, termasuk pengelola usaha							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang tata ruang	○ PD Provinsi bidang perencanaan pembangunan, bidang kepariwisataan
			c.Sosialisasi sanksi pelanggaran daerah sem-padan oleh fasilitas pariwisata.							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang tata ruang	○ PD Provinsi bidang perencanaan pembangunan; bidang kepariwisataan
			d.Penandatangan kesepakatan tindakan penanganan pelanggaran daerah sempadan oleh fasilitas pariwisata berdasarkan hasil kajian.							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang tata ruang	○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang perencanaan pembangunan; bidang kepariwisataan; ○ Asosiasi usaha pariwisata

33	Mengembangkan pondok wisata (*homestay*) di KSPP dan KPPP Kepulauan Bangka Belitung.	Program pembangunan fasilitas pariwisata	a.Sosialisasi pondok wisata (*homestay*) kepada masyarakat di KSPP dan KPPP Kepulauan Bangka Belitung.							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan	○ PD Kabupaten/ Kota bidang kepariwisataan ○ Kecamatan/Kelurahan
			b.Penyusunan dan pemutakhiran basis data dan penilaian kesiapan pondok wisata (homestay) di KSPP dan KPPP Babel							SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang	○ PD Kabupaten/ Kota bidang
			c. Pembinaan pengembangan pondok wisata (*homestay*) di KSPP dan KPPP Kepulauan Bangka Belitung.							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan	○ PD Kabupaten/ Kota bidang kepariwisataan; ○ Kecamatan/ Kelurahan/ Desa; ○ Perguruan tinggi bidang kepariwisataan
			d.Dukungan pengembangan pondok wisata (*homestay*) di KSPP dan KPPP Kepulauan Bangka Belitung.							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan	○ PD Kabupaten/ Kota bidang kepariwisataan; ○ Kecamatan/ Kelurahan/ Desa
34	Meningkatkan kesadaran kolektif masyarakat terhadap pembangunan destinasi pariwisata berdaya saing global dan berkelanjutan.	Program peningkatan peran masyarakat	a.Sosialisasi kualitas pelayanan dan pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat bagi destinasi pariwisata berdaya saing global dan berkelanjutan.							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan	○ PD Kabupaten/ Kota bidang kepariwisataan; ○ Perguruan tinggi bidang kepariwisataan; ○ Asosiasi usaha pariwisata
			b.Pelatihan dan pembinaan kapasitas masyarakat dalam mendukung pembangunan destinasi pariwisata berdaya saing global dan berkelanjutan.							PD Kabupaten/ Kota bidang kepariwisataan	○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan; ○ Perguruan tinggi bidang kepariwisataan; ○ Asosiasi usaha pariwisata

35	Meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan berstandar nasional dan internasional di daya tarik wisata provinsi.	Program peningkatan peran masyarakat	a.Identifikasi potensi dan kelembagaan masyarakat di sekitar daya tarik wisata provinsi.							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan	○ PD Kabupaten/ Kota bidang kepariwisataan; ○ Perguruan tinggi bidang kepariwisataan; ○ Asosiasi usaha pariwisata
			b.Fasilitasi pertemuan masya-rakat dengan pengelola daya tarik wisata provinsi untuk sinkronisasi kebutuhan daya tarik wisata berstandar nasional dan internasional dengan potensi masyarakat.							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan	○ PD Kabupaten/ Kota bidang kepariwisataan; ○ Kecamatan/Kelurahan/ desa
			c.Pembentukan dan pengembangan lembaga masyarakat sebagai mitra pengelola dan atau pengelola daya tarik wisata provinsi.							SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang	○ PD Kabupaten/ Kota bidang
			d.Pemantauan dan evaluasi keberhasilan program pening-katan peran masyarakat dalam pengelolaan berstandar nasional dan internasional di daya tarik wisata provinsi.							SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan	○ PD Kabupaten/ Kota bidang kepariwisataan; ○ Kecamatan/Kelurahan/ desa
36	Meningkatkan peran Pokdarwis untuk mendukung pengelolaan KSPP dan KPPP Kepulauan Bangka Belitung yang berdaya saing global.	Program peningkatan peran masyarakat	a.Penguatan organisasi Pokdarwis yang sudah ada.							SKPD Kabupaten/ Kota bidang kepariwisataan	○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan; ○ Kecamatan/Kelurahan/ desa
			b.Pembentukan dan pengembangan Pokdarwis di KSPP dan KPPP Kepulauan Bangka Belitung.							SKPD Kabupaten/ Kota bidang kepariwisataan	○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan; ○ Kecamatan/Kelurahan/ desa

37	Menguatkan peran masyarakat dalam pengembangan tata kelola destinasi pariwisata berkelanjutan di KSPN Tanjungkelayang dan sekitarnya.	Program peningkatan peran masyarakat	a.Dukungan terhadap penguatan organisasi tata kelola destinasi pariwisata berbasis masyarakat di KSPN Tanjung Kelayang & sekitarnya							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang pariwisata	○ Kementerian bid. kepariwisataan; ○ PD Kabupaten Belitung bidang kepariwisataan; ○ Kelompok Kerja Lokal Pariwisata DMO Belitung
			b.Penguatan kelembagaan masyarakat dalam mendukung pengelolaan KSPN Tanjung Kelayang dan sekitarnya.							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan	○ Kementerian bidan kepariwisataan; ○ PD Kab. Belitung bid. pariwisata; ○ Kelompok Kerja Lokal Pariwisata DMO Belitung
			c.Penguatan lembaga koperasi pariwisata sebagai lembaga bisnis pariwisata yang dikelola masyarakat.							PDK Kabupaten Belitung bidang koperasi	○ Kementerian bidang koperasi; ○ PD Provinsi bidang kepariwisataan; ○ PD Kab. Belitung bid. pariwisata; ○ Kelompok Kerja Lokal Pariwisata DMO Belitung
38	Mengembangkan mekanisme keterpaduan investasi pariwisata, perdagangan, dan bidang lainnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Program peningkatan investasi pariwisata	a.Penyusunan dan sosialisasi profil investasi terpadu Kepulauan Bangka Belitung berbasis teknologi informasi.							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang investasi	○ PD Provinsi bidang kepariwisataan; ○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang perdagangan
			b.Penyusunan dan penetapan mekanisme investasi terpadu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang investasi	○ PD Provinsi bid. kepariwisataan; bid. Perdagangan, bid. hukum dan peraturan perundangan; ○ Perguruan tinggi bidang ekonomi
			c.Penyelenggaraan forum komunikasi dan koordinasi investasi terpadu Prov.i Babel							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang investasi	○ PD Provinsi bidang kepariwisataan, bidang perdagangan, dan bidang terkait lainnya
			d.Penyepakatan program prioritas bersama pengembangan investasi terpadu Provinsi Babel.							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang investasi	○ PD Provinsi bidang kepariwisataan bid. Perdagangan dan bidang terkait lainnya
			e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program program prioritas bersama pengembangan investasi terpadu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang investasi	○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan; bid. perdagangan & bid. terkait lainnya; ○ Perguruan tinggi bidang ekonomi

39	Menetapkan dan mengembangkan regulasi investasi yang berorientasi pada pengembangan masyarakat, perlindungan lingkungan alam, pelestarian budaya, dan percepatan pembangunan daerah.	Program peningkatan investasi Pariwisata	a.Penyusunan dan penetapan regulasi investasi pariwisata yang berorientasi pada pengembangan masyarakat, perlindungan lingkungan alam, pelestarian budaya, dan percepatan pembangunan daerah.							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang Investasi	○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan, bidang lingkungan hidup, bidang kebudayaan, bidang pemberdayaan masyarakat; bidang hukum dan peraturan perundangan; ○ Perguruan tinggi bidang ekonomi
			b.Sosialisasi regulasi investasi pariwisata yang berorientasi pada pengembangan masyarakat, perlindungan lingkungan alam, pelestarian budaya, dan percepatan pembangunan daerah.							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang investasi	○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan, bidang lingkungan hidup, bidang kebudayaan, bidang pemberdayaan masyarakat; ○ Perguruan tinggi bidang ekonomi dan bidang kepariwisataan
			c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan regulasi investasi pariwisata yang berorientasi pada pengembangan masyarakat, perlindungan lingkungan alam, pelestarian budaya, dan percepatan pembangunan daerah.							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang investasi	○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan; bidang lingkungan hidup; bidang kebudayaan, dan bidang pemberdayaan
40	Mengembangkan mekanisme pengendalian investasi pariwisata berbasiskan penelitian untuk membangun iklim usaha yang sehat dan berdaya saing, serta berwawasan lingkungan alam dan budaya.	Program peningkatan investasi pariwisata	a.Penelitian kebutuhan investasi pariwisata dan pendukungnya untuk me-wujudkan destinasi pariwisata berdaya saing global.							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan	○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang investasi; ○ Perguruan tinggi bidang ekonomi ○ Perguruan tinggi bidang kepariwisataan
			b.Penelitian dampak investasi pariwisata dan pendukung-nya terhadap perwujudan Kepulauan Bangka Belitung sebagai destinasi pariwisata berdaya saing global.							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan	○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang investasi; ○ Perguruan tinggi bidang ekonomi; ○ Perguruan tinggi bidang kepariwisataan
			c. Penelitian dampak investasi							PD Provinsi Kep.	○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung

			pariwisata terhadap lingkungan alam, sosial, dan budaya Kep. Babel							Bangka Belitung bidang kepariwisataan	bidang investasi; ○ Perguruan tinggi bidang kepariwisataan
			d.Penelitian dampak investasi pariwisata terhadap peningkatan peran masyarakat dalam pariwisata dan kesejahteraan masyarakat.							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan	○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang investasi; ○ Perguruan tinggi bidang ekonomi; ○ Perguruan tinggi bidang kepariwisataan
			e. Perumusan dan penetapan mekanisme pengendalian investasi pariwisata berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan.							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang investasi	○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan; bidang lingkungan hidup, bidang kebudayaan, bidang pemberdayaan masyarakat, bidang hukum dan peraturan perundangan ○ Perguruan tinggi bidang ekonomi ○ Perguruan tinggi bidang kepariwisataan
			f. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan mekanisme pengendalian investasi pariwisata.							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang investasi	○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan, bidang lingkungan hidup, bidang kebudayaan, bidang pemberdayaan masyarakat; ○ Perguruan tinggi bidang ekonomi; ○ Perguruan tinggi bidang kepariwisataan

BAB VI

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

6.1. Rencana Program Prioritas

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJMD, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program prioritas daerah. Adapun program prioritas untuk tahun 2021 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena untuk program prioritas tahun tahun 2021 disusun dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dengan sesuai urusan sebagai berikut :

A. Program yang dilaksanakan setiap Perangkat Daerah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

B. Urusan Wajib Yan Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Program Prioritas Pembangunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Urusan Pendidikan
   a. Program Pengelolaan Pendidikan
   b. Program Pengembangan Kurikulum
   c. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
   d. Dan Pengendalian Perizinan Pendidikan
   e. Program Pengembangan Bahasa dan Sastra
2. Urusan Kesehatan
   a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
   b. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
   c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
   d. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
   a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air

b. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
c. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
d. Program Penyelenggaraan Jalan

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
   a. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
   b. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
   c. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
   d. Program Pengembangan Perumahan
   e. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
   a. Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum
   b. Program Penanggulangan Kebakaran
   c. Program Penanggulangan Bencana
6. Urusan Sosial
   a. Program Pemberdayaan Sosial
   b. Program Pengelolaan TMP
   c. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
   d. Program Rehabilitasi Sosial
   e. Program Penanganan Bencana
   f. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

C. Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Program Prioritas Pembangunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Urusan Ketenagakerjaan
   a. Program Perencanaan Tenaga Kerja
   b. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
   c. Program Penempatan Tenaga Kerja
   d. Program Hubungan Industrial
   e. Program Pengawasan Ketenagakerjaan
2. Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
   a. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
   b. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak

c. Program Perlindungan Perempuan

d. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

e. Program Perlindungan Khusus Anak

3. Urusan Pangan

a. Program Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan

b. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat

c. Program Penanganan Kerawanan Pangan

d. Program Pengawasan Keamanan Pangan

4. Urusan Pertanahan

a. Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

b. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

c. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan

d. Program Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee

5. Urusan Lingkungan Hidup

a. Program Peningkatan Tata Kelola Lingkungan Hidup

b. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

c. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

d. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

e. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

f. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

g. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

h. Program Pengelolaan Persampahan

6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

a. Program Pendaftaran Penduduk

b. Program Pencatatan Sipil

c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

d. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

a. Program Pembinaan Pemerintah Desa

b. Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

c. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
d. Program Peningkatan Kerjasama Desa

8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
   a. Program Pengendalian Penduduk
   b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
   c. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
9. Urusan Perhubungan
   a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
   b. Program Pengelolaan Pelayaran
   c. Program Pengelolaan Penerbangan
10. Urusuan Komunikasi dan Informatika
   a. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
   b. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
11. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
   a. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
   b. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
   c. Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi
   d. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
   e. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
   f. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
   g. Program Pengembangan UMKM
12. Urusan Penanaman Modal
   a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
   b. Program Promosi Penanaman Modal
   c. Program Pelayanan Penanaman Modal
   d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
   e. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal
13. Urusan Kepemudaan dan Olahraga
   a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Pemuda
   b. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
   c. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan

14. Urusan Statistik
    a. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
15. Urusan Persandian
    1. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
16. Urusan Kebudayaan
    1. Program Pengembangan Kebudayaan
    2. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
    3. Program Pembinaan Sejarah
    4. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Budaya
    5. Program Pengelolaan Permuseuman
17. Urusan Perpustakaan
    a. Program Pembinaan Perpustakaan
    b. Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno
18. Urusan Kearsipan
    a. Program Pengelolaan Arsip
    b. Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip
    c. Program Perizinan Penggunaan Arsip

D. Urusan Pilihan

Program Prioritas Pembangunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2021 untuk urusan pilihan adalah sebagai berikut :

1. Urusan Kelautan dan Perikanan
    a. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
    b. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan
    c. Program Pengembangan Perikanan Tangkap
    d. Program Pengembangan Perikanan Budidaya
    e. Program Pengembangan Usaha Pengolahan Hasil Perikanan
2. Urusan Pariwisata
    a. Program Pemasaran Pariwisata
    b. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
    c. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
    d. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

3. Urusan Pertanian
    a. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
    b. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
    c. Program Perizinan Usaha Pertanian
    d. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
    e. Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pengembangan Benih Pertanian
    f. Program Penyuluhan Pertania
4. Urusan Kehutanan
    a. Program Perencanaan Hutan
    b. Program Pengelolaan Hutan
    c. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya
    d. Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan
    e. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
5. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral
    a. Program Pengelolaan Aspek Geologi
    b. Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara
    c. Program Pengelolaan Energi Terbarukan
    d. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
6. Urusan Perdagangan
    a. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
    b. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
    c. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
    d. Program Pengembangan Ekspor
    e. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
    f. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
7. Urusan Perindustrian
    a. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
    b. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
    c. Program Pengendalian Izin Usaha Industri
8. Urusan Transmigrasi
    a. Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi

E. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan;

a. Urusan Sekretariat Daerah

   a. Program Penataan Administrasi Umum
   b. Program Perekonomian dan Pembangunan
   c. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

b. Urusan Sekretariat DPRD

   a. Program Dukungan pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
   b. Program Layanan dan Administrasi Keuangan

F. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan;

1. Urusan Perencanaan
   a. Program Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah
   b. Program Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam
   c. Program Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan
   d. Program Perencanaan Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia
2. Urusan Keuangan
   a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
   b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
   c. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
3. Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
   a. Program Kepegawaian Daerah
   b. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
4. Urusan Penelitian dan Pengembangan
   a. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
5. Urusan Penghubung
   a. Program Pelayanan Penghubung

G. Unsur pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

1. Inspektorat Daerah
   a. Program Penyelenggaraan Pengawasan
   b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

H. Unsur pemerintahan umum;

1. Urusan Bakesbangpol

a. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan.

b. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

c. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya

d. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

e. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.

6.2. Pagu Indikatif

Pagu Indikatif merupakan batasan anggaran yang diberikan kepada masing-masing perangkat daerah untuk merencanakan program/kegiatan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Berdasarkan Tabel VI.1 penentuan pagu indikatif tidak lagi menganut "*money follow function*" akan tetapi berasaskan "*money follow priority programme*".

Tabel VI.1
Pagu Indikatif Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021

NO.	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF 2021 (TANPA DAK/DID)
1	DINAS PENDIDIKAN	509,566,521,715
2	DINAS KESEHATAN	91,947,853,650
3	RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI	150,502,424,895
4	RUMAH SAKIT JIWA	51,105,099,036
5	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	464,541,902,924
6	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	27,931,978,496
7	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	11,452,082,135
8	DINAS SOSIAL	21,401,323,642
9	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	17,425,492,604
10	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	95,703,978,555
11	DINAS PERHUBUNGAN	32,798,344,696
12	DINAS PERTANIAN	55,569,926,632

13	DINAS KEHUTANAN	35,546,520,776
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	16,614,739,443
15	DINAS PANGAN	8,738,408,031
16	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	18,802,762,886
17	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	22,337,304,592
18	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	20,394,811,553
19	DINAS TENAGA KERJA	20,778,753,246
20	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	11,512,547,950
21	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	47,199,404,351
22	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	25,432,049,531
23	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA	11,997,682,240
24	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	11,530,754,402
25	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	13,506,232,722
26	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	16,953,731,363
27	INSPEKTORAT DAERAH	19,888,216,979
28	BADAN KEUANGAN DAERAH	75,577,871,465
29	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH	21,824,242,200
30	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	29,407,845,368
31	SEKRETARIAT DAERAH	135,067,453,415
32	SEKRETARIAT DPRD	107,625,108,692
33	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	22,136,757,708
34	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI	9,120,369,709
TOTAL		**2,231,940,497,603**

6.3. Rencana Pendanaan Melalui Pinjaman Dari PT.SMI

Seiring dengan merebaknya virus corona di seluruh Indonesia, tidak terkecuali Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka Pemerintah Daerah menyiapkan strategi penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi pasca dampak Covid-19 serta mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi melalui skema pinjaman daerah ke PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dengan Program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional).

Sektor-sektor infrastruktur yang dapat dibiayai melalui PT. SMI antara lain :

1. Ketenagalistrikan
2. Transportasi
3. Jalan dan Jembatan
4. Pasokan Air
5. Energi Efisiensi
6. Telekomunikasi
7. Manajemen Air Limbah dan Persampahan
8. Minyak dan Gas
9. Rolling Stock Kereta Api
10. Irigasi
11. Rumah sakit
12. Pasar
13. Sekolah
14. Infrastruktur Wilayah dan Infrastruktur Pariwisata
15. Lembaga Permasyarakatan

Usulan Kegiatan yang diajukan melalui PT. SMI antara lain:

Tabel VI.2
Usulan Kegiatan Skema Pinjaman Daerah melalui PT. SMI Tahun 2021

NO	URAIAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
1	*2*	*3*	*4*
1	Pembangunan Gedung Jenazah	2,400,000,000.00	RSUP
2	Pembangunan Gedung Kedokteran Nuklir	27,000,000,000.00	RSUP
3	Pengadaan UPS	2,200,000,000.00	RSUP
4	Pembelian alat kesehatan (Radio Terapi)	58,800,000,000.00	RSUP
5	Pembangunan Sarana dan Prasarana di PPP Muara Sungai Baturusa	33,896,000,000.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
6	Pelebaran Jalan Rebo-Tanjung Pesona-Jelitik-Simpang Perahu	49,500,000,000.00	DINAS PUPR
7	Pelebaran Jalan Ibul-Parit Tiga	21,000,000,000.00	DINAS PUPR
8	Pelebaran Jalan Pangkalpinang-Simpang Katis-Sungai Selan	28,000,000,000.00	DINAS PUPR
9	Pelebaran Jalan Air Gegas-Bedengung-Batu Betumpang	22,500,000,000.00	DINAS PUPR
	Jumlah	**245,296,000,000.00**	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

7.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Berkenaan dengan penerapan akuntabilitas di daerah, ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pemerintahan di daerah diselenggarakan berdasarkan sejumlah asas, dimana salah satunya adalah asas akuntabilitas. Dengan demikian, Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah harus mampu menerapkan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Pembangunan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan semaksimal mungkin dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut lembaga pemerintah harus mampu menerapkan sistem yang kondusif bagi berlangsungnya pembangunan sejak dari perencanaan, pelaksanaan, hingga proses evaluasi. Prinsip *Good Governance* atau kepemerintahan yang baik merupakan sebuah komitmen yang mutlak dalam penyelenggaraan kepemerintahan dengan bercirikan profesionalisme, transparan, efektif, dan berorientasi hasil. Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja maka setiap instansi pemerintah dituntut untuk menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilingkungan instansi masing-masing. Tuntutan demikian sangat beralasan karena sering kali terjadi ketidakselarasan dalam penetapan indikator kinerja sehingga menyebabkan hasil yang disajikan tidak sesuai dengan perencanaan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan dan menetapkan indikator kinerja utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD.

Tujuan perumusan dan penetapan IKU adalah:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2021 sebagaimana disajikan pada Tabel VII.1.

Tabel VII.1
Indikator Kinerja Utama
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN		KONDISI AWAL RPJMD	TARGET 2021	KONDISI AKHIR RPJMD
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*
1	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Pertanian	1	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian	4,76	5,97	5,98
2	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan	2	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan	3,74	4,42	4,59
3	Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	3	Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	4,00	4,50	4,55
4	Meningkatkan PDRB Sektor Pertambangan Dan Energi	4	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertambangan dan Energi	1,52	1,74	1,76
5	Meningkatkan PDRB Sektor Industri Pengolahan Dan Perdagangan	5	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan dan Perdagangan	2,62	2,70	2,75
6	Meningkatkan Kesempatan Kerja	6	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,30	4,78	4,50
7	Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja	7	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	58,83	64,00	64,80
8	Menurunkan Tingkat Kemiskinan	8	Persentase Angka Kemiskinan	5,20	5,30	5,00
9	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa	9	Pendapatan Perkapita Masyarakat Desa	1.120.353	1.409.026	1.479.389
10	Meningkatkan Ketersedian Infrastruktur Pekerjaan Umum	10	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	9	86	100
11	Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Dasar	11	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Dasar	25	54	80
12	Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Perhubungan	12	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Perhubungan	50	69,45	71,84

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN		KONDISI AWAL RPJMD	TARGET 2021	KONDISI AKHIR RPJMD
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*
13	Meningkatkan Kesempatan Pendidikan	13	Angka Harapan Lama Sekolah , (Angka Harapan Lama Sekolah Laki-Laki, Angka Harapan Lama Sekolah Perempuan)	11,71 L=11,35 P=12,07	12,32 L=11,81 P=12,15	12,45 L=11,83 P=12,17
14	Meningkatkan Kualitas Pendidikan	14	Nilai Ujian Akhir	5,3	5,5	5,8
15	Meningkatkan Kesejahteraan Anak	15	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	60	68,1	68,5
16	Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk	16	Laju Pertumbuhan Penduduk	2,02	2,08	2,08
17	Meningkatkan Pembangunan Resposif Gender	17	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	50	52,58	52,70
18	Meningkatkan Kualitas Pemuda	18	Indeks Pembangunan Pemuda	40	54	54,5
19	Meningkatkan Pembangunan Olah Raga	19	Indeks Pembangunan Olah Raga	0,10	0,30	0,35
20	Meningkatkan Kesejahteran Sosial	20	Persentase PMKS Sejahtera	35	65,92	67,00
21	Meningkatkan Kesehatan Masyarakat	21	Angka Kesehatan Masyarakat	79	85,92	89,98
22	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	22	Indeks Reformasi Birokrasi	30	45	50
23	Meningkatkan Kebebasan Sipil	23	Nilai Kebebasan Sipil	81,70	87,79	87,82
24	Meningkatkan Hak-Hak Politik	24	Nilai Hak-Hak Politik	80,25	81,79	81,85
25	Meningkatkan Peran Lembaga Demokrasi	25	Nilai Lembaga Demokrasi	80,10	80,36	80,54
26	Meningkatkan Kapasitas Daerah Terhadap Penanggulangan Bencana	26	Indeks Kapasitas Bencana Daerah	0,10	0,30	0,35
27	Meningkatnya Pengendalian Lingkungan Hidup	27	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	67,85	75,74	75,99

7.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator kinerja utama yang mencerminkan keberhasilan atas penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Indikator Kinerja Kunci disusun oleh Tim Nasional Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) berdasarkan usulan Indikator Kinerja Kunci yang diterima dari menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non departemen yang dilakukan setiap bulan Desember. IKK disusun untuk menilai aspek pada tataran pengambil kebijakan daerah dan aspek pada tataran pelaksana kebijakan daerah untuk masing-masing urusan pemerintahan.

Penetapan Indikator Kinerja Kunci Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 sebagaimana disajikan pada Tabel VII.2.

Tabel VII.2
Penetapan Indikator Kinerja Kunci
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021

NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI / IKK	RENCANA CAPAIAN KINERJA KUNCI TAHUN 2021
1	*2*	*3*	*4*
Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar			
1	Pendidikan	Angka melek huruf	98, 19
		Angka rata-rata lama sekolah	8,0
		Angka partisipasi kasar	87,75
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA	43,43
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMK	44,32
		Harapan Lama Sekolah	12,32
		Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C	58,0
2	Kesehatan	Angka kelangsungan hidup bayi	
		Angka Kematian Bayi (per 1000 kelahiran hidup)	7,14
		Angka Kematian Balita (per 1000 kelahiran hidup)	7,14
		Angka usia harapan hidup	70,7
		Prevalensi Kurang Gizi anak balita	14,2
		Kematian ibu (per 100.000 orang)	20
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Capaian Luas Kawasan Lindung Terhadap Luas Wilayah Bangka Belitung (%)	43%
		Ketaatan terhadap RTRW	**83%**

NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI / IKK	RENCANA CAPAIAN KINERJA KUNCI TAHUN 2021
1	*2*	*3*	*4*
		Persentase Kawasan Strategis yang dikembangkan	20%
		Jumlah Kawasan Ekonomi Khusus yang dikembangkan	1
		Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	N/A (Kab/kot)
		Panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap	**96,56**
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Persentase cakupan perbaikan perumahan akibat bencana (%)	100%
		Persentase Rumah Tangga bersanitasi layak	90,44%
		Persentase Rumah Tangga berakses air minum layak	87,63%
		Persentase Rumah layak huni	22,56%
		Persentase Permukiman yang terfasilitasi oleh Prasarana, sarana dan utilitas (PSU)	50%
5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Polisi Pamong Praja	1.501,15
		Jumlah penduduk	1.458.809,45
		Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per-10.000 Penduduk	10,42
		Jumlah Siskamling	1.570,85
		Jumlah Desa	309
		Rasio Jumlah siskamling	5,09
		Persentase kasus konflik sara yg dapat diantisipasi	1
		Tingkat kerawanan konflik kabupaten/kota	7
		Persentase menurunnya kasus konflik sosial	60,80%
		Persentase partisipasi pemilih	71%
6	Sosial	PMKS yg memperoleh bantuan sosial	44.459
		Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	67.446
Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar			
7	Ketenagakerjaan	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan	5,59%
		Persentase perusahaan yang menjalankan norma K3 dan norma kerja	21%
		Persentase Perusahaan yang patuh terhadap peraturan ketenagakerjaan	6,67%

NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI / IKK	RENCANA CAPAIAN KINERJA KUNCI TAHUN 2021
1	*2*	*3*	*4*
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	52,59
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	89,02
		Jumlah KDRT	80 kasus
		Jumlah Rumah Tangga	331.490,50
		Persentase Capaian Provinsi Layak Anak	57,14
		Rasio KDRT	0,009
		Persentase Penurunan Kekerasan terhadap perempuan di tingkat provinsi	1,9
		Persentase Penurunan Kekerasan terhadap anak di tingkat provinsi	0,3
		Persentase partisipasi perempuan di lembaga legislatif	25%
		Angka Fertilitas Total (TFR)	2,54%
9	Ketahanan Pangan	Regulasi ketahanan pangan	1
		Peningkatan Skor PPH konsumsi jadi 87	85
		Persentase pangan yang aman dikonsumsi	89
		Kenaikan Skor PPH Ketersediaan	86
		Persentase tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	100%
10	Pertanahan	Luas Lahan (m2) Berdasarkan Sertifikat	N/A
		Penyelesaian kasus tanah Negara	N/A
11	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	75,74
		Perkembangan Persentase Keluarga Yang Memiliki Akses Terhadap air bersih	81
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan KTP	99
		Persentase Kepemilikan akta kelahiran	90
		Persentase penyajian database kependudukan skala provinsi	100
		Jumlah pemanfaatan NIK, database kependudukan dan KTP-el oleh OPD Provinsi	10 OPD
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kelompok LPM	5.885,25
		Kelompok PKK	14.774,25
		Jumlah jenis Teknologi Tepat Guna yang berkualitas	7 alat
		Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)	50
		Jumlah kewirausahaan	100 lembaga

NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI / IKK	RENCANA CAPAIAN KINERJA KUNCI TAHUN 2021
1	*2*	*3*	*4*
		Jumlah Pokjanal Posyandu dipedesaan	75
		Jumlah PKK aktif di pedesaan	12 Pokja
		Jumlah kelembagaan ekonomi dan keuangan di perdesaan	30 BUMDesa
		Jumlah Kawasan pedesaan yang dibangun	2 kawasan
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,9
		Jumlah akseptor KB	194.249
		Jumlah pasangan usia subur	236.888
		Rasio akseptor KB	0,82
		Persentase *Grand Design* Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1
		Jumlah keluarga pra sejahtera	21.097
		Jumlah keluarga sejahtera I	156.004
		Jumlah keluarga sejahtera I +	-
		Jumlah keluarga	331967
15	Perhubungan	Terminal Bus/Angkot/Angdes	13
		Pelabuhan Udara	2
		Pelabuhan Laut (Pelabuhan pengumpan, Pelabuhan Penyeberangan dan Pelabuhan Khusus)	90,96
		Jumlah ijin trayek	28,41
		Persentase peningkatan jumlah penumpang angkutan umum	7%
		Persentase peningkatan jumlah angkutan barang	16%
		persentase penurunan jumlah angka kecelakaan lalu lintas di wilayah provinsi kepulauan bangka belitung	18%
		Persentase angkutan umum penumpang dan angkutan barang yang laik jalan	100%
		persentase penurunan pelanggaran oleh pengemudi angkutan umum penumpang dan angkutan barang	20%
16	Komunikasi dan Informatika	*Website* milik pemerintah daerah	4
		Pameran/Expo	0
17	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	32,88 %
		Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	0 %

NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI / IKK	RENCANA CAPAIAN KINERJA KUNCI TAHUN 2021
1	*2*	*3*	*4*
		Persentase jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	1.136 %
		Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	19,72 %
		Koperasi aktif	62,5%
18	Penanaman Modal	Jumlah Investor	11
		Nilai Investasi (Trillin Rp)	1,9
19	Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Organisasi Pemuda	270
		Jumlah Kegiatan Kepemudaan	7,41
		Klub/Organisasi Olahraga	595
20	Statistik	Buku daerah dalam angka	1
		Buku PDRB prov/kabupaten/kota	1
		Kebudayaan	
21	Kebudayaan	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	0
		Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	0
		Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	16
		Cakupan pelestarian dan pemanfaatan nilai budaya	14
22	Perpustakaan	Jumlah Pengunjung	3.800
		Perpustakaan Milik Pemda	12
		Perpustakaan Non Pemda	1.369
23	Kearsipan	Pengelolaan arsip secara baku	59
		Peningkatan SDM pengelola kearsipan	19
Urusan Pilihan			
24	Kelautan dan Perikanan	Potensi perikanaan Tangkap	1.059.000,00
		Potensi perikanaan budidaya	1.316.000,00
		Produksi perikanaan tangkap	223.300
		Produksi perikanaan budidaya	13.120
		Nilai Tukar Nelayan (NTN)	111
		Angka Konsumsi Ikan (Kg/Org/Tahun)	56
		Produksi olahan ikan (Ton)	22.110
		Jumlah Produksi Benih Ikan air payau (Juta Ekor)	11,65

NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI / IKK	RENCANA CAPAIAN KINERJA KUNCI TAHUN 2021
1	*2*	*3*	*4*
		Jumlah Produksi Benih Ikan air Laut (Juta Ekor)	0,08
		Jumlah Produksi Benih Ikan air Tawar (Juta Ekor)	-
		Luas kawasan konservasi yang dicadangkan (Ha)	830.077
25	Pariwisata	Jumlah Wisatawan DalamNegeri	508.030
		Jumlah Wisatawan Luar Negeri	9.772
		Persentase pelaku ekonomi kreatif yang aktif	35%
		Pertumbuhan lembaga kepariwisataan yang difasilitasi	7%
26	Pertanian	Distribusi Persentase PDRB Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	15,07
		Distribusi Persentase PDRB Tanaman Pangan	0,47
		Distribusi Persentase PDRB Tanaman Hortikultura	2,13
		Distribusi Persentase PDRB Tanaman Perkebunan	11,24
		Distribusi Persentase PDRB Peternakan	1,01
		Distribusi Persentase PDRB Jasa Pertanian dan Perburuan	0,25
27	Kehutanan	Luas Hutan Konservasi	35.760
		Luas Hutan Lindung	184.276
		Luas Hutan Produksi	436.647
		Luas Hutan Produksi Konversi	692
28	Energi dan Sumber Daya Mineral	Potensi bahan galian Pasir Kwarsa	1.482.301 ton
		Potensi bahan galian Pasir Bangunan	666.188,06 ton
		Potensi bahan galian Kaolin	205.487,50 ton
		Potensi bahan galian Granit	55.508,29 m8
		Potensi bahan galian Diabas	89.551,12 m8
29	Perdagangan	Ekspor (US Dollar)	849.885.054,29
		Timah	664.921.909,80
		Non Timah	184.963.144,49
		Impor (US Dollar)	123.029.620,50
		Migas	36.908.886,15
		Non Migas	86.120.734,35
30	Perindustrian	Jumlah Industri Kecil	19.165
		Laju pertumbuhan	0,03
		Industri Menengah	101
		Laju pertumbuhan	0,01

NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI / IKK	RENCANA CAPAIAN KINERJA KUNCI TAHUN 2021
1	*2*	*3*	*4*
31	Transmigrasi	Persentase Peningkatan Produktivitas Kawasan Transmigrasi	14%
Urusan Penunjang			
32	Perencanaan	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dengan PERDA	Ada
		Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada
		Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada
33	Fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Pajak Kendaraan Bermotor	217.423,57
		Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	121.729,27
		Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	207.733,79
		Pajak Air Permukaan	13.944,32
		Pajak Rokok	93.215,06
		Rasio Ketergantungan (3)/(4)	46,31
		Pajak Kendaraan Bermotor	217.423,57

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 merupakan Dokumen Perencanaan tahunan dengan prioritas pembangunan terarah dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 Tahap III dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022. Disamping itu, prioritas pembangunan daerah secara prinsip tetap mengacu pada sasaran-sasaran pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034, memperhatikan Program Pembangunan Nasional 9 Agenda Nawa Cita, serta percepatan pencapaian target Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan kesepakatan-kesepakatan pembangunan SDG's. Rencana Kerja Pemerintah Daerah memuat arah kebijakan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan. Oleh karena itu, untuk implementasinya diperlukan koordinasi antar instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan partisipasi masyarakat serta seluruh pelaku pembangunan (*stakeholder*) melalui forum gabungan perangkat daerah serta musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan terutama sinkronisasi dan penyelarasan rencana program dan kegiatan yang telah ditentukan.

Dokumen RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2021 ini, dimaksudkan sebagai acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dan juga sebagai acuan dan pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan baik urusan wajib maupun urusan pilihan, sekaligus mendorong masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya, serta dijadikan pedoman dalam rangka melakukan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dimaksud. Keberhasilan dalam pencapaian prioritas pembangunan nasional, diantaranya sangat tergantung dengan sinergitas kebijakan antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah pusat. Sinkronisasi kebijakan diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan sesuai kewenangan masing-masing yang diorientasikan melalui pencapaian strategi pembangunan dengan prinsip *money follow program.* Dengan demikian usulan kegiatan yang diajukan telah mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, sehingga selain kerangka pendanaannya diusulkan ke APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun ke Pemerintah Pusat melalui APBN baik dalam bentuk usulan Dana Alokasi Khusus (DAK), Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Dalam kerangka pendanaan program dan kegiatan melalui APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka Dokumen RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun 2021 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Keberhasilan pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selain dilaksanakan jajaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pemerintah Kabupaten/Kota juga ditentukan oleh dukungan masyarakat untuk menjawab tantangan dan mengurangi permasalahan yang ada. Adapun Kaidah pelaksanaannya adalah sebagai berikut.

1. RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021, tidak hanya memuat kegiatan-kegiatan dalam kerangka investasi pemerintah dan pelayanan publik, tetapi juga memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
2. Perangkat Daerah dan seluruh *stakeholder* pembangunan termasuk masyarakat luas, dunia usaha, berkewajiban dan berperan serta untuk melaksanakan program-program RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 dengan sebaik-baiknya
3. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergisitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maupun dari APBN, maka setiap Perangkat Daerah perlu membuat Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2021 sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) dengan mempedomani RKPD ini.
4. Pelaksanaan Forum SKPD serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD ditujukan untuk mengakomodasi aspirasi dan kepentingan masyarakat serta merupakan wujud partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan.
5. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021, Badan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Penelitian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkewajiban untuk melakukan pemantauan dan menganalisa terhadap penjabaran dan sinergisitas RKPD tahun 2021 ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja–PD) dan Kebijakan Umum APBD 2021 serta Prioritas dan Pagu Indikatif PD Tahun 2021.

Pangkalpinang, Juli 2020

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

ERZALDI ROSMAN

LAMPIRAN

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2021

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2021

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Bangka Belitung
Tahun 2021

Unit Organisasi : DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Sub Unit Organisasi :

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif 2021 (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kabupaten/Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
					URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR													**509.566.521.715**	**436.431.863.400**		
					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH													**388.512.557.715**	**361.558.099.400**		
1	01	01			**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**													**294.345.379.315**	**302.584.721.000**		
									Nilai Sakip PD	**80**								**321.000.000**	**321.000.000**		
1	01	01	1.01		**Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**													**321.000.000**	**321.000.000**		
											Jumlah dok perencanaan dan evaluasi	**12 dokumen**						**321.000.000**	**321.000.000**		
1	01	01	1.01	01	Sub Kegiatan Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah													64.510.000	64.510.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
						pembangunan Reformasi Biroktasi	peningkatan tata kelola pemerintahan	Pangkal pinang	bukit intan	air itam			Jumlah dok perencanaan Renstra/Renja PD	2 dokumen				64.510.000	64.510.000		
1	01	01	1.01	02	Sub Kegiatan Penyusunan Program dan kegiatan perangkat daerah dalam dokumen perencanaan													79.930.000	79.930.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
						pembangunan Reformasi Biroktasi	peningkatan tata kelola pemerintahan	Pangkal pinang	bukit intan	air itam			Jumlah dokumen DPA/DPPA yang tersusun	2 dokumen				79.930.000	79.930.000		
1	01	01	1.01	03	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah													10.142.000	10.142.000		
						pembangunan Reformasi Biroktasi	peningkatan tata kelola pemerintahan	Pangkal pinang	bukit intan	air itam			Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi PD	4 dokumen				10.142.000	10.142.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
1	01	01	1.01	04	Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah													113.428.000	113.428.000		
						pembangunan Reformasi Biroktasi	peningkatan tata kelola pemerintahan	Pangkal pinang	bukit intan	air itam			jumlah Dokumen kesepakatan Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan PD	1 dokumen				113.428.000	113.428.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
1	01	01	1.01	05	Sub Kegiatan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah													52.990.000	52.990.000		
						pembangunan Reformasi Biroktasi	peningkatan tata kelola pemerintahan	Pangkal pinang	bukit intan	air itam			Jumlah dokumen Evalusi kinerja PD	3 dokumen				52.990.000	52.990.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
									survey kepuasan pelayanan internal (angka)	**90**								294.024.379.315	302.253.721.000		
1	01	01	1.02		**Kegiatan Administrasi Keuangan**													278.829.349.315	289.398.691.000		
											Survey kepuasan pelayanan keuangan	**90**						**278.829.349.315**	**289.398.691.000**		
1	01	01	1.02	01	Sub Kegiatan Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN													**278.513.849.315**	**289.083.191.000**		
						pembangunan Reformasi Biroktasi	peningkatan tata kelola pemerintahan	Pangkal pinang	bukit intan	air itam			jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	2192 orang				278.513.849.315	289.083.191.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif 2021 (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kabupaten/Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	01	01	1.02	07	Sub Kegiatan Penyusunan laporan keuangan bulanan/semesteran												315.500.000	315.500.000		
						pembangunan Reformasi Birokrasi	peningkatan tata kelola pemerintahan	Pangkal pinang	bukit intan	air itam			Jumlah laporan keuangan bulanan/	14 laporan			315.500.000	315.500.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
1	01	01	1.03		**Kegiatan Administrasi umum**												15.195.030.000	12.865.030.000		
											survey kepuasan pelayanan umum	**90**					**15.195.030.000**	**12.855.030.000**		
1	01	01	1.03	01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa surat menyurat												**659.050.000**	**659.050.000**		
						pembangunan Reformasi Birokrasi	peningkatan tata kelola pemerintahan	Pangkal pinang	bukit intan	air itam			Jumlah surat dan barang yang dikirim	320 surat/barang			9.600.000	9.600.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
													Jumlah Materai	1600 lembar			8.550.000	8.550.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
													Jumlah pramu bakti	17 orang			640.900.000	640.900.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
1	01	01	1.03	02	Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik												129.600.000	129.600.000		
						pembangunan Reformasi Biroktasi	peningkatan tata kelola pemerintahan	Pangkal pinang	bukit intan	air itam			jumlah Tagihan rekening listrik, air, telepon/fax, tv kabel, virtual meeting yang dibayarkan	12 bulan			129.600.000	129.600.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
1	01	01	1.03	03	Sub Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor												113.100.000	113.100.000		
						pembangunan Reformasi Biroktasi	peningkatan tata kelola pemerintahan	Pangkal pinang	bukit intan	air itam			Jumlah tenaga keamanan/satpam kantor yang dipekerjakan	3 orang			113.100.000	113.100.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
1	01	01	1.03	06	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/oprasional												89.990.000	89.990.000		
						pembangunan Reformasi Biroktasi	peningkatan tata kelola pemerintahan	Pangkal pinang	bukit intan	air itam			jumlah kendaraan operasional yang dipelihara	3 unit			14.590.000	14.590.000		
													Jumlah tenaga sopir yang dipekerjakan	2 orang			75.400.000	75.400.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
1	01	01	1.03	07	Sub Kegiatan Penyediaan jasa Administrasi keuangan												441.850.000	303.350.000		
						pembangunan Reformasi Birokrasi	peningkatan tata kelola pemerintahan	Pangkal pinang	bukit intan	air itam			Jumlah pengelola administrasi keuangan	26 orang			441.850.000	303.350.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
1	01	01	1.03	08	Sub Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor												160.800.000	160.800.000		
						pembangunan Reformasi Biroktasi	peningkatan tata kelola pemerintahan	Pangkal pinang	bukit intan	air itam			Jumlah tenaga kebersihan yang dipekerjakan	4 orang			150.800.000	150.800.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
						pembangunan Reformasi Biroktasi	peningkatan tata kelola pemerintahan	Pangkal pinang	bukit intan	air itam			Jumlah jenis bahan dan Peralatan kebersihan kantor	15 jenis			10.000.000	10.000.000		
1	01	01	1.03	09	Sub Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja												25.000.000	25.000.000		
						pembangunan Reformasi Biroktasi	peningkatan tata kelola pemerintahan	Pangkal pinang	bukit intan	air itam			jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	10 jenis			25.000.000	25.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
1	01	01	1.03	10	Sub Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor												100.000.000	100.000.000		
						pembangunan Reformasi Biroktasi	peningkatan tata kelola pemerintahan	Pangkal pinang	bukit intan	air itam			jumlah jenis ATK yang dibeli	30 jenis			100.000.000	100.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif 2021 (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kabupaten/Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	01	01	1.03	11	Sub Kegiatan Penyediaan barang cetak dan penggandaan												837.920.000	746.700.000		
						pembangunan Reformasi Biroktasi	peningkatan tata kelola pemerintahan	Pangkal pinang	bukit intan	air itam			Jumlah spanduk yg dicetak	96 meter				4.800.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
						pembangunan Reformasi Biroktasi	peningkatan tata kelola pemerintahan	Pangkal pinang	bukit intan	air itam			Jumlah baleho yang di cetak	108 meter				5.400.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
						pembangunan Reformasi Biroktasi	peningkatan tata kelola pemerintahan	Pangkal pinang	bukit intan	air itam			Jumlah majalah yang dicetak	40000 eksemplar				660.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
						pembangunan Reformasi Biroktasi	peningkatan tata kelola pemerintahan	Pangkal pinang	bukit intan	air itam			Jumlah penggandaan	110000 lembar				38.500.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
						pembangunan Reformasi Biroktasi	peningkatan tata kelola pemerintahan	Pangkal pinang	bukit intan	air itam			Jumlah penjilidan	600 bh				3.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
						pembangunan Reformasi Biroktasi	peningkatan tata kelola pemerintahan	Pangkal pinang	bukit intan	air itam			Jumlah spanduk, baleho PPDB yang di cetak	300 meter				15.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
						pembangunan Reformasi Biroktasi	peningkatan tata kelola pemerintahan	Pangkal pinang	bukit intan	air itam			Jumlah publikasi PPDB di media	10 kali				20.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
1	01	01	1.03	12	Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor												30.000.000	30.000.000		
						pembangunan Reformasi Biroktasi	peningkatan tata kelola pemerintahan	Pangkal pinang	bukit intan	air itam			jumlah komponen instalasi listrik	15 jenis			30.000.000	30.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
1	01	01	1.03	13	Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor												6.568.550.000	5.506.000.000		
						pembangunan Reformasi Biroktasi	peningkatan tata kelola pemerintahan	Pangkal pinang	bukit intan	air itam			jumlah perlengkapan kantor yang tersedia	1 jenis			11.000.000	6.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
													jumlah peralatan kantor yang tersedia	10 jenis			6.557.550.000	5.500.000.000		
1	01	01	1.03	14	Sub Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga												20.000.000	20.000.000		
						pembangunan Reformasi Biroktasi	peningkatan tata kelola pemerintahan	Pangkal pinang	bukit intan	air itam			Jumlah peralatan rumah tangga	20 jenis			20.000.000	20.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
1	01	01	1.03	15	Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan												14.400.000	14.400.000		
						pembangunan Reformasi Biroktasi	peningkatan tata kelola pemerintahan	Pangkal pinang	bukit intan	air itam			Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan	4 jenis			14.400.000	14.400.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
1	01	01	1.03	16	Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor												-	5.000.000		
						pembangunan Reformasi Biroktasi	peningkatan tata kelola pemerintahan	Pangkal pinang	bukit intan	air itam			jumlah bahan logistik kantor	12 bulan			-	5.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
1	01	01	1.03	17	Sub Kegiatan Penyediaan makan dan minum												135.000.000	135.000.000		
						pembangunan Reformasi Biroktasi	peningkatan tata kelola pemerintahan	Pangkal pinang	bukit intan	air itam			Jumlah makan dan minum Tamu	500 pax			25.000.000	25.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
						pembangunan Reformasi Biroktasi	peningkatan tata kelola pemerintahan	Pangkal pinang	bukit intan	air itam			Jumlah makan dan minum rapat	5500 pax			110.000.000	110.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
1	01	01	1.03	18	Sub Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah												550.000.000	550.000.000		
						pembangunan Reformasi Biroktasi	peningkatan tata kelola pemerintahan	Pangkal pinang	bukit intan	air itam			jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	50 kali			250.000.000	250.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
													Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah	500 kali			300.000.000	300.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
1	01	01	1.03	29	Sub Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor												5.148.530.000	4.105.800.000		
						pembangunan Reformasi Biroktasi	peningkatan tata kelola pemerintahan	Pangkal pinang	bukit intan	air itam			jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 unit			175.000.000	405.800.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
						pembangunan Reformasi Biroktasi	peningkatan tata kelola pemerintahan	Pangkal pinang	bukit intan	air itam			jumlah gedung yang direhab	1 unit			4.173.530.000	3.700.000.000		
						pembangunan Reformasi Biroktasi	peningkatan tata kelola pemerintahan	Pangkal pinang	bukit intan	air itam			jumlah gedung yang dibangun	2 unit			800.000.000	3.700.000.000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif 2021 (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kabupaten/Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	01	01	1.03	30	Sub Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan												44.800.000	44.800.000		
						pembangunan Reformasi Birokrasi	peningkatan tata kelola pemerintahan	Pangkal pinang	bukit intan	air itam			Jumlah kendaraan dinas mobil jabatan yang dipelihara	1 unit			44.800.000	44.800.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
1	01	01	1.03	31	Sub Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/Operasional												101.440.000	101.440.000		
						pembangunan Reformasi Birokrasi	peningkatan tata kelola pemerintahan	Pangkal pinang	bukit intan	air itam			Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	5 unit			101.440.000	101.440.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
1	01	01	1.03	33	Sub Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor												25.000.000	25.000.000		
						pembangunan Reformasi Birokrasi	peningkatan tata kelola pemerintahan	Pangkal pinang	bukit intan	air itam			Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	10 jenis			25.000.000	25.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
1	01	02			**Program Pengelolaan Pendidikan**												**93.040.931.400**	**57.633.621.400**		
									APK SMA	44,43							19.168.322.500	20.392.802.500		
1	01	02	1.01		**Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**												45.650.837.500	26.289.637.500		(9.620.200.000)
											Jumlah sarana prasarana yang dibangun	43 unit					7.596.920.000	7.592.500.000		
1	01	02	1.01	02	Sub Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Baru												4.553.860.000	2.232.500.000		
						Pembangunan Pendidikan	Peningkatan kesempatan pendidikan	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA			Jumlah Ruang Kelas Baru dibangun	14 ruang			4.553.860.000	2.232.500.000	Peningkatan kesempatan pendidikan	Pemerataan layanan pendidikan berkualitas
1	01	02	1.01	03	sub kegiatan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU												1.981.360.000	822.500.000	Peningkatan kesempatan pendidikan	Pemerataan layanan pendidikan berkualitas
						Pembangunan Pendidikan	Peningkatan kesempatan pendidikan	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA			jumlah Ruang Guru yang dibangun	4 ruang			1.981.360.000	822.500.000		
						Pembangunan Pendidikan	Peningkatan kesempatan pendidikan	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA			jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang dibangun (DAK REGULER)	42 ruang						
1	01	02	1.01	04	sub kegiatan Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi	Pembangunan Pendidikan	Peningkatan kesempatan pendidikan	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA			Jumlah Ruang Laboratorium Biologi yang dibangun (DAK REGULER)	4 ruang			-	-	Peningkatan kesempatan pendidikan	Pemerataan layanan pendidikan berkualitas
1	01	02	1.01	05	sub kegiatan Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika	Pembangunan Pendidikan	Peningkatan kesempatan pendidikan	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA			Jumlah Ruang Laboratorium Fisika yang dibangun (DAK REGULER)	5 ruang			-	-	Peningkatan kesempatan pendidikan	Pemerataan layanan pendidikan berkualitas
1	01	02	1.01	06	sub kegiatan Pembangunan Ruang Laboratorium kimia	Pembangunan Pendidikan	Peningkatan kesempatan pendidikan	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA			jumlah Ruang Laboratorium kimia yang dibangun (DAK REGULER)	4 ruang			-	-	Peningkatan kesempatan pendidikan	Pemerataan layanan pendidikan berkualitas
1	01	02	1.01	07	sub kegiatan Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer												270.960.000			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif 2021 (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kabupaten/Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
						Pembangunan Pendidikan	Peningkatan kesempatan pendidikan	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA			Jumlah Ruang Laboratorium Komputer yang	2 ruang			270.960.000	-	Peningkatan kesempatan pendidikan	Pemerataan layanan pendidikan berkualitas
						Pembangunan Pendidikan	Peningkatan kesempatan pendidikan	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA			Jumlah Ruang Laboratorium Komputer yang	24 ruang			-	-	Peningkatan kesempatan pendidikan	Pemerataan layanan pendidikan berkualitas
1	01	02	1.01	08	sub kegiatan Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa	Pembangunan Pendidikan	Peningkatan kesempatan pendidikan	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA			Jumlah Ruang Laboratorium Bahasa yang dibangun (DAK	13 ruang			-	-	Peningkatan kesempatan pendidikan	Pemerataan layanan pendidikan berkualitas
1	01	02	1.01	10	sub kegiatan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Pembangunan Pendidikan	Peningkatan kesempatan pendidikan	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang dibangun (DAK	3 ruang			-	-	Peningkatan kesempatan pendidikan	Pemerataan layanan pendidikan berkualitas
1	01	02	1.01	11	sub kegiatan Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Pembangunan Pendidikan	Peningkatan kesempatan pendidikan	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA			jumlah ruang Perpustakaan Sekolah yang dibangun (DAK REGULER)	3 ruang			-	-	Peningkatan kesempatan pendidikan	Pemerataan layanan pendidikan berkualitas
1	01	02	1.01	13	sub kegiatan Pembangunan Asrama Sekolah												1.061.700.000	1.050.000.000		
						Pembangunan Pendidikan	Peningkatan kesempatan pendidikan	Bangka Selatan	Kep. Pongok	SMAN 1 Kep Pongok			Jumlah rumah asrama sekolah dibangun	2 unit			1.061.700.000	1.050.000.000	Peningkatan kesempatan pendidikan	Pemerataan layanan pendidikan berkualitas
1	01	02	1.01	14	sub kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah												1.865.740.000	1.695.000.000		
						Pembangunan Pendidikan	Peningkatan kesempatan pendidikan	Bangka Selatan	Kep. Pongok, lepar pongok, toboali	SMAN 1 Kep Pongok, lepar pongok, sma 2 toboali			Jumlah pagar sekolah dibangun	3 unit				1.380.000.000		
						Pembangunan Pendidikan	Peningkatan kesempatan pendidikan	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA			Jumlah toilet yang dibangun	10 unit				315.000.000		
		02	1.01	16	sub kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah												605.000.000	3.172.500.000		
						Pembangunan Pendidikan	Peningkatan kesempatan pendidikan	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA			Jumlah kantin yang dibangun	6 unit			605.000.000	1.380.000.000		
1	01	02	1.01	17	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah												2.224.940.000	1.792.500.000		
						Pembangunan Pendidikan	Peningkatan kesempatan pendidikan	Bangka Selatan	Kep. Pongok	SMAN 1 Kep Pongok			Jumlah rumah dinas guru dibangun	5 unit				1.530.000.000	Peningkatan kesempatan pendidikan	Pemerataan layanan pendidikan berkualitas
						Pembangunan Pendidikan	Peningkatan kesempatan pendidikan	Bangka Selatan	Kep. Pongok	SMAN 1 Kep Pongok			Jumlah rumah dinas kepala sekolah dibangun	1 unit				262.500.000		
											Jumlah sarana prasarana yang direhab	27 ruang					1.806.580.000	1.337.500.000		
1	01	02	1.01	19	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah												1.806.580.000	1.337.500.000	Peningkatan kesempatan pendidikan	Pemerataan layanan pendidikan berkualitas
						Pembangunan Pendidikan	Peningkatan kesempatan pendidikan	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA			jumlah Ruang Kelas Sekolah yang direhab	15 ruang			1.806.580.000	1.337.500.000		
						Pembangunan Pendidikan	Peningkatan kesempatan pendidikan	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA			jumlah Ruang Kelas Sekolah yang direhab (DAK REGULER)	163						
1	01	02	1.01	20	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Pembangunan Pendidikan	Peningkatan kesempatan pendidikan	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA			jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang	40						
						Pembangunan Pendidikan	Peningkatan kesempatan pendidikan	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA			jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang direhab	2 ruang			645.020.000	-	Peningkatan kesempatan pendidikan	Pemerataan layanan pendidikan berkualitas

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif 2021 (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kabupaten/Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
						Pembangunan Pendidikan	Peningkatan kesempatan pendidikan	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA			jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang direhab (DAK	40							
1	01	02	1.01	21	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi	Pembangunan Pendidikan	Peningkatan kesempatan pendidikan	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA			jumlah Ruang Laboratorium Biologi yang direhab (DAK	13			-	-	Peningkatan kesempatan pendidikan	Pemerataan layanan pendidikan berkualitas
1	01	02	1.01	22	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika	Pembangunan Pendidikan	Peningkatan kesempatan pendidikan	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA			jumlah Ruang Laboratorium Fisika yang direhab (DAK	10			-	-	Peningkatan kesempatan pendidikan	Pemerataan layanan pendidikan berkualitas
1	01	02	1.01	23	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia	Pembangunan Pendidikan	Peningkatan kesempatan pendidikan	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA			jumlah Ruang Laboratorium Kimia yang direhab (DAK	12			-	-	Peningkatan kesempatan pendidikan	Pemerataan layanan pendidikan berkualitas
1	01	02	1.01	24	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	Pembangunan Pendidikan	Peningkatan kesempatan pendidikan	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA			jumlah Ruang Laboratorium Komputer yang direhab (DAK	5			-	-	Peningkatan kesempatan pendidikan	Pemerataan layanan pendidikan berkualitas
1	01	02	1.01	25	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa	Pembangunan Pendidikan	Peningkatan kesempatan pendidikan	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA			jumlah Ruang Laboratorium Bahasa yang direhab (DAK	6			-	-	Peningkatan kesempatan pendidikan	Pemerataan layanan pendidikan berkualitas
1	01	02	1.01	26	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium IPA	Pembangunan Pendidikan	Peningkatan kesempatan pendidikan	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA			jumlah Ruang Laboratorium IPA yang direhab	6						
						Pembangunan Pendidikan	Peningkatan kesempatan pendidikan	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA			jumlah Ruang Laboratorium IPA yang direhab	6			533.460.000	-	Peningkatan kesempatan pendidikan	Pemerataan layanan pendidikan berkualitas
1	01	02	1.01	27	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Pembangunan Pendidikan	Peningkatan kesempatan pendidikan	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA			jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang direhab (DAK	10			-	-	Peningkatan kesempatan pendidikan	Pemerataan layanan pendidikan berkualitas
1	01	02	1.01	28	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Pembangunan Pendidikan	Peningkatan kesempatan pendidikan	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA			jumlah Perpustakaan Sekolah yang direhab	9						
						Pembangunan Pendidikan	Peningkatan kesempatan pendidikan	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA			jumlah Perpustakaan Sekolah yang direhab	1			115.260.000	-	Peningkatan kesempatan pendidikan	Pemerataan layanan pendidikan berkualitas
1	01	02	1.01	31	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pembangunan Pendidikan	Peningkatan kesempatan pendidikan	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA			jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang direhab (DAK REGULER)	68						
						Pembangunan Pendidikan	Peningkatan kesempatan pendidikan	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA			jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang direhab	2			108.500.000	-	Peningkatan kesempatan pendidikan	Pemerataan layanan pendidikan berkualitas
											Jumlah pengadaan sarana prasarana SMA	2705 paket					2.169.020.000	3.867.000.000		
1	01	02	1.01	36	Sub Kegiatan Pengadaan Meubelair sekolah												3.484.300.000	3.692.000.000		
						Pembangunan Pendidikan	Peningkatan kesempatan pendidikan	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA			Jumlah meubelair siswa dan guru	2568 unit				2.529.000.000	Peningkatan kesempatan pendidikan	Pemerataan layanan pendidikan berkualitas
						Pembangunan Pendidikan	Peningkatan kesempatan pendidikan	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA			Jumlah meubelair lab bahasa	4 sekolah				600.000.000		
						Pembangunan Pendidikan	Peningkatan kesempatan pendidikan	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA			jumlah pengadaan papan tulis	130 unit				195.000.000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif 2021 (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kabupaten/Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
						Pembangunan Pendidikan	Peningkatan kesempatan pendidikan	Bangka Selatan	Kep. Pongok	SMAN1 Kep Pongok			Jumlah meubelair asrama sekolah	2 paket				368.000.000		
1	01	02	1.01	39	Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik												2.169.020.000	175.000.000		
						Pembangunan Pendidikan	Peningkatan kesempatan pendidikan	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA			Jumlah Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	1 paket			2.169.020.000	175.000.000	Peningkatan kesempatan pendidikan	Pemerataan layanan pendidikan berkualitas
1	01	02	1.01	41	Sub Kegiatan Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Pembangunan Pendidikan	Peningkatan kesempatan pendidikan	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA			jumlah Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	160 paket			792.300.000	-	Peningkatan kesempatan pendidikan	Pemerataan layanan pendidikan berkualitas
						Pembangunan Pendidikan	Peningkatan kesempatan pendidikan	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA			jumlah Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik (DAK REGULER)	160 paket			-	175.000.000	Peningkatan kesempatan pendidikan	Pemerataan layanan pendidikan berkualitas
						Pembangunan Pendidikan	Peningkatan kesempatan pendidikan	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA			Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik (DAK REGULER)	160 paket			-	-	Peningkatan kesempatan pendidikan	Pemerataan layanan pendidikan berkualitas
											Jumlah siswa/mahasiswa yang mendapat beasiswa	2500 orang					7.595.802.500	7.595.802.500		
1	01	02	1.01	45	Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik												7.595.802.500	7.595.802.500		
						Pembangunan Pendidikan	Peningkatan kesempatan pendidikan	7 kab/kota	7 kab/kota	7 kab/kota			Jumlah siswa/mahasiswa yang mendapat	2500 orang			7.595.802.500	7.595.802.500	Peningkatan kesempatan pendidikan	Pemerataan layanan pendidikan berkualitas
1	01	02	1.01	47	Sub Kegiatan Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik												250.000.000	250.000.000		
						Pembangunan Pendidikan	Peningkatan kesempatan pendidikan	7 kab/kota	7 kab/kota	7 kab/kota			jumlah guru yang mengikuti pelatihan	63 orang			250.000.000	250.000.000	Peningkatan kesempatan pendidikan	Pemerataan layanan pendidikan berkualitas
									jumlah medali siswa dalam kompetisi nasional (Internasional	1 buah							2.214.960.000	2.214.960.000		
											Jumlah lomba kesiswaan SMA	4 jenis					2.214.960.000	2.214.960.000		
1	01	02	1.01	49	Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa												2.214.960.000	2.214.960.000		
						Pembangunan Pendidikan	Meningkatkan kualitas pendidikan	Pangkalpinang	bukit intan	air itam			jumlah lomba kesiswaan sma	4 jenis			2.214.960.000	2.214.960.000	Peningkatan kualitas pendidikan	Pemerataan layanan pendidikan berkualitas
									Persentase GTK Bersertifikasi	80%							5.731.875.000	3.431.875.000		
											Jumlah guru SMA yang mengikuti	20 orang					200.000.000	200.000.000		
1	01	02	1.01	51	Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Atas												5.731.875.000	3.431.875.000		
						Pembangunan Pendidikan	Peningkatan kualitas pendidikan	Bandung, Sleman, makasar	Sukasari, Depok, Tamalanrea	Isola, Caturtunggal, Borongloe			Jumlah guru yang mengikuti PPG	20 orang			200.000.000	200.000.000	Peningkatan kualitas pendidikan	Pemerataan layanan pendidikan berkualitas
											Jumlah guru SMA yang mendapat pengembangan kompetensi	154 orang					2.896.275.000	1.296.275.000		
						Pembangunan Pendidikan	Peningkatan kualitas pendidikan	Pangkalpinang	bukit intan	air itam			Jumlah kepala sekolah, guru, pengawas yg	104 orang			2.571.075.000	971.075.000	Peningkatan kualitas pendidikan	Pemerataan layanan pendidikan berkualitas
						Pembangunan Pendidikan	Peningkatan kualitas pendidikan	Pangkalpinang	bukit intan	air itam			Jumlah Guru SMA mengikuti lomba	50 orang			325.200.000	325.200.000	Peningkatan kualitas pendidikan	Pemerataan layanan pendidikan berkualitas
											Jumlah guru SMA yang mendapat pengembangan kualifikasi	15 orang					2.335.600.000	1.635.600.000		
						Pembangunan Pendidikan	Peningkatan kualitas pendidikan	Bandung, Sleman, makasar	Sukasari, Depok, Tamalanrea	Isola, Caturtunggal, Borongloe			Jumlah guru yang berkualifikasi S2	15 orang			2.335.600.000	1.635.600.000	Peningkatan kualitas pendidikan	Pemerataan layanan pendidikan berkualitas

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif 2021 (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kabupaten/Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
											jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mendapatkan	560 orang					300.000.000	300.000.000		
						Pembangunan Pendidikan	Peningkatan kualitas pendidikan	Pangkalpinang	bukit intan	air itam			Jumlah tim Penilai Angka Kredit	34 orang			300.000.000	300.000.000	Peningkatan kualitas pendidikan	Pemerataan layanan pendidikan berkualitas
									APK SMA	44,43							7.640.200.000	-		
											Jumlah SMAS terlayani	53 sekolah					7.640.200.000			
1	01	02	1.01	52	Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas												7.640.200.000	23.415.022.900		
													Jumlah Siswa SMAS terlayani	4301 siswa			7.640.200.000	5.955.000.000		
									APK SMK	42,8							20.507.490.000	10.702.674.360		
1	01	02	1.02		**Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**												30.565.022.900	17.460.022.900		
											jumlah sarana prasarana SMK yang bangun	20 unit					5.798.500.000	5.800.000.000		
1	01	02	1.02	02	Sub Kegiatan penambahan ruang kelas sekolah												5.398.500.000			
						Pembangunan Pendidikan	Peningkatan kesempatan pendidikan	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA			jumlah RKB yang dibangun	18 unit			5.398.500.000	5.400.000.000	Peningkatan kesempatan pendidikan	Pemerataan layanan pendidikan berkualitas
1	01	02	1.02	03	Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Guru/kepala sekolah/TU	Pembangunan Pendidikan	Peningkatan kesempatan pendidikan	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA							2.500.000.000	-	Peningkatan kesempatan pendidikan	Pemerataan layanan pendidikan berkualitas
						Pembangunan Pendidikan	Peningkatan kesempatan pendidikan	BANGKA	SUNGAILIAT	SUNGAILIAT			jumlah Ruang guru/kepala sekolah yang dibangun	1 UNIT			2.500.000.000	5.400.000.000	Peningkatan kesempatan pendidikan	Pemerataan layanan pendidikan berkualitas
1	01	02	1.02	04	Sub KegiatanPembangunan Ruang Praktik Siswa	Pembangunan Pendidikan	Peningkatan kesempatan pendidikan	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA			Siswa yang dibangun (DAK REGULER)				-	-	Peningkatan kesempatan pendidikan	Pemerataan layanan pendidikan berkualitas
1	01	02	1.02	05	Sub KegiatanPembangunan Ruang Laboratorium	Pembangunan Pendidikan	Peningkatan kesempatan pendidikan	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA			Laboratorium yang dibangun (DAK				-	-	Peningkatan kesempatan pendidikan	Pemerataan layanan pendidikan berkualitas
1	01	02	1.02	06	Sub KegiatanPembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Pembangunan Pendidikan	Peningkatan kesempatan pendidikan	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA			Kesehatan Sekolah yang dibangun (DAK				-	-	Peningkatan kesempatan pendidikan	Pemerataan layanan pendidikan berkualitas
1	01	02	1.02	07	Sub KegiatanPembangunan Perpustakaan Sekolah	Pembangunan Pendidikan	Peningkatan kesempatan pendidikan	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA			Sekolah yang dibangun (DAK				-	-	Peningkatan kesempatan pendidikan	Pemerataan layanan pendidikan berkualitas
1	01	02	1.02	10	sarana, prasarana dan utilitas sekolah												500.000.000	400.000.000		
						Pembangunan Pendidikan	Peningkatan kesempatan pendidikan	BANGKA SELATAN, BANGKA BARAT	Simpang Rimba, Simpang Teritif	SMK 1 Simpang Rimba, SMK 1 Simpang Teritif			Jumlah Musholla dibangun	2 unit			400.000.000	400.000.000	Peningkatan kesempatan pendidikan	Pemerataan layanan pendidikan berkualitas
						Pembangunan Pendidikan	Peningkatan kesempatan pendidikan	BANGKA SELATAN	Tukak Sadai	SMK 1 Tukak Sadai			Jumlah selasar yang dibangun	1 unit			100.000.000	400.000.000	Peningkatan kesempatan pendidikan	Pemerataan layanan pendidikan berkualitas
						Pembangunan Pendidikan	Peningkatan kesempatan pendidikan	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA			jumlah sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang dibangun (DAK				-	-	Peningkatan kesempatan pendidikan	Pemerataan layanan pendidikan berkualitas
											jumlah sarana prasarana SMK yang direhab	2 ruang					451.500.000	200.000.000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif 2021 (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kabupaten/Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	01	02	1.02	15	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Pembangunan Pendidikan	Peningkatan kesempatan pendidikan	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang direhab (DAK REGULER)				-	-	Peningkatan kesempatan pendidikan	Pemerataan layanan pendidikan berkualitas
1	01	02	1.02	16	Sub Kegiatan Rehabilitasi Ruang Guru/kepala sekolah/TU	Pembangunan Pendidikan	Peningkatan kesempatan pendidikan	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang direhab (DAK REGULER)				-	-	Peningkatan kesempatan pendidikan	Pemerataan layanan pendidikan berkualitas
1	01	02	1.02	17	Sub Kegiatan Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa												201.500.000	200.000.000		
						Pembangunan Pendidikan	Peningkatan kesempatan pendidikan	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA			jumlah ruang praktik yang direhab	1 ruang			201.500.000	200.000.000	Peningkatan kesempatan pendidikan	Pemerataan layanan pendidikan berkualitas
						Pembangunan Pendidikan	Peningkatan kesempatan pendidikan	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA			jumlah ruang praktik yang direhab (DAK REGULER)				-	-	Peningkatan kesempatan pendidikan	Pemerataan layanan pendidikan berkualitas
1	01	02	1.02	23	Prasarana dan Utilitas Sekolah												250.000.000	400.000.000		
						Pembangunan Pendidikan	Peningkatan kesempatan pendidikan	BANGKA SELATAN	Tukak Sadai	SMK 1 Tukak Sadai			Jumlah selasar mushola yang direhab	1 unit			250.000.000	400.000.000	Peningkatan kesempatan pendidikan	Pemerataan layanan pendidikan berkualitas
											Jumlah Pengadaan sarana prasarana SMK	2 paket					5.719.000.000	2.119.000.000		
1	01	02	1.02	28	Sub Kegiatan Pengadaan Meubeleur Sekolah												3.444.000.000	1.944.000.000		
						Pembangunan Pendidikan	Peningkatan kesempatan pendidikan	BANGKA TENGAH, BELITUNG, PANGKALPINANG, BANGKA BARAT	LUBUK BESAR, SIJUK, PANGKAPINANG, kelapa, simpang teritip, sungaiselan	SMK 1LUBUK BESAR, SMK 1 SIJUK, SMK 1 PANGKAPINANG, SMK 1 kelapa, simpang teritip, sungaiselan			Jumlah Pengadaan Mebeluer Sekolah	29 sekolah			3.444.000.000	1.944.000.000	Peningkatan kesempatan pendidikan	Pemerataan layanan pendidikan berkualitas
1	01	02	1.02	31	Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik												2.275.000.000	175.000.000		
						Pembangunan Pendidikan	Peningkatan kesempatan pendidikan	7 kab/kota	7 kab/kota	7 kab/kota			Jumlah Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	2 paket			2.275.000.000	175.000.000	Peningkatan kesempatan pendidikan	Pemerataan layanan pendidikan berkualitas
1	01	02	1.02	33	Sub Kegiatan Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta didik	Pembangunan Pendidikan	Peningkatan kesempatan pendidikan	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA			Alat Praktik dan Peraga Peserta didik (DAK REGULER)						Peningkatan kesempatan pendidikan	Pemerataan layanan pendidikan berkualitas
											Jumlah siswa yang mendapat beasiswa	900 orang					987.000.000	987.184.360		
1	01	02	1.02	37	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan												987.000.000	987.184.360		
						Pembangunan Pendidikan	Peningkatan kesempatan pendidikan	7 kab/kota	7 kab/kota	7 kab/kota			Jumlah siswa yang mendapat beasiswa	900 orang			987.000.000	987.184.360	Peningkatan kesempatan pendidikan	Pemerataan layanan pendidikan berkualitas
									Jumlah medali siswa dalam kompetisi	1							2.853.133.900	2.852.949.540		
											Jumlah lomba kesiswaan SMK	3 jenis					2.853.133.900	2.852.949.540		
1	01	02	1.02	41	Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa												2.853.133.900	2.852.949.540		
						Pembangunan Pendidikan	Peningkatan kualitas pendidikan	Pangkalpinang	bukit intan	air itam			Jumlah lomba kesiswaan SMK	3 jenis			2.853.133.900	2.852.949.540	Peningkatan kualitas pendidikan	Pemerataan layanan pendidikan berkualitas
									Persentase GTK Bersertifikasi	80%							4.604.399.000	3.904.399.000		
											Jumlah guru SMK yang mengikuti	10 orang					500.000.000	200.000.000		
1	01	02	1.02	43	Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Kejuruan												4.604.399.000	3.904.399.000		
						Pembangunan Pendidikan	Peningkatan kualitas pendidikan	Bandung, Sleman, makasar	Sukasari, Depok, Tamalanrea	Isola, Caturtunggal, Berongloe			Jumlah guru yang mengikuti PPG	10 orang			500.000.000	200.000.000	Peningkatan kualitas pendidikan	Pemerataan layanan pendidikan berkualitas

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif 2021 (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kabupaten/Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
											Jumlah guru SMK yang mendapat pengembangan	325					2.642.999.000	2.242.999.000		
						Pembangunan Pendidikan	Meningkatkan kualitas pendidikan	Pangkalpinang	bukit intan	air itam			mengikuti Diklat Kompetensi	150 orang			1.658.576.000	1.258.576.000	Peningkatan kualitas pendidikan	Pemerataan layanan pendidikan berkualitas
						Pembangunan Pendidikan	Meningkatkan kualitas pendidikan	Pangkalpinang	bukit intan	air itam			Jumlah Guru SMK mengikuti lomba	135 ORANG			984.423.000	984.423.000	Peningkatan kualitas pendidikan	Pemerataan layanan pendidikan berkualitas
											Jumlah guru SMK yang mendapat pengembangan kualifikasi	**16 orang**					1.461.400.000	1.461.400.000	Peningkatan kualitas pendidikan	Pemerataan layanan pendidikan berkualitas
						Pembangunan Pendidikan	Meningkatkan kualitas pendidikan	Sleman, Bandung	Depok, Coblong	Caturtunggal, Lebak Siliwangi			berkualifikasi S1 dan S2	10 orang			1.461.400.000	1.461.400.000		
									JUMLAH LULUSAN SMK YANG MEMILIKI SERTIFIKAT KOMPETENSI	400							7.551.490.000	1.596.490.000		
											jumlah pelaksanaan workshop dan	3 kali					1.596.490.000	1.596.490.000		
											Jumlah SMKS terlayani	22 sekolah					5.955.000.000			
1	01	02	1.02	45	manajemen Sekolah menengah kejuruan												7.551.490.000	1.596.490.000		
						Pembangunan Pendidikan	Meningkatkan kualitas pendidikan	Pangkalpinang	bukit intan	air itam			jumlah peserta worksop, TO dan asesor	250 orang			1.596.490.000	1.596.490.000	Peningkatan kualitas pendidikan	Pemerataan layanan pendidikan berkualitas
													Jumlah Siswa SMKS terlayani	5955 siswa			5.955.000.000	5.955.000.000		
									APK PENDIDIKAN KHUSUS	86							7.754.500.000	7.420.500.000		
1	01	02	1.03		**Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Khusus**												16.825.071.000	13.883.961.000		
											jumlah sarana prasarana PK yang dibangun	7 unit					4.945.000.000	4.984.000.000		
1	01	02	1.03	02	sub kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Pembangunan Pendidikan	Peningkatan kesempatan pendidikan	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA			jumlah Ruang Sekolah yang dibangun (DAK	1 paket			-	-	Peningkatan kesempatan pendidikan	Pemerataan layanan pendidikan berkualitas
1	01	02	1.03	03	sub kegiatan Pembangunan Ruang Guru/kepala sekolah/TU	Pembangunan Pendidikan	Peningkatan kesempatan pendidikan	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA			jumlah Ruang Guru/kepala sekolah/TU yang dibangun (DAK	1 paket			-	-	Peningkatan kesempatan pendidikan	Pemerataan layanan pendidikan berkualitas
1	01	02	1.03	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Pembangunan Pendidikan	Peningkatan kesempatan pendidikan	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA			jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang dibangun (DAK REGULER)	1 paket			-	-	Peningkatan kesempatan pendidikan	Pemerataan layanan pendidikan berkualitas
1	01	02	1.03	05	sub kegiatan Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Pembangunan Pendidikan	Peningkatan kesempatan pendidikan	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA			jumlah Perpustakaan Sekolah yang dibangun (DAK	1 paket			-	-	Peningkatan kesempatan pendidikan	Pemerataan layanan pendidikan berkualitas
1	01	02	1.03	07	Sub Kegiatan Pembangunan Asrama Sekolah												1.120.000.000	1.120.000.000		
						Pembangunan Pendidikan	Peningkatan kesempatan pendidikan	Belitung	Tanjungpandan	SLB Tanjung Pandan			Jumlah asrama terbangun beserta perabotnya	1 unit			1.120.000.000	1.120.000.000		
1	01	02	1.03	08	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana, dan utilitas sekolah												3.825.000.000	3.864.000.000		
						Pembangunan Pendidikan	Peningkatan kesempatan pendidikan	Pangkalpinang	bukit intan	air itam			Jumlah pagar terbangun	2 unit			3.055.000.000	3.014.000.000	Peningkatan kesempatan pendidikan	Pemerataan layanan pendidikan berkualitas
						Pembangunan Pendidikan	Peningkatan kesempatan pendidikan	Pangkalpinang	bukit intan	air itam			Jumlah taman sensori yang dibangun	1 unit			200.000.000	250.000.000		
						Pembangunan Pendidikan	Peningkatan kesempatan pendidikan	Bangka, Bangka Selatan dan Belitung	Sungailiat, Toboali ,Tanjung Pandan	SLB Sungailiat, SLB Toboali , SLBTanjung Pandan			Jumlah mushola terbangun	3 unit			570.000.000	600.000.000		
											jumlah sarana prasarana PK yang direhab	3 unit					1.331.000.000	1.331.000.000		
1	01	02	1.03	18	sub kegiatan Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Pembangunan Pendidikan	Peningkatan kesempatan pendidikan	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA			jumlah Ruang Sekolah yang direhab (DAK REGULER)	1 paket			-	-	Peningkatan kesempatan pendidikan	Pemerataan layanan pendidikan berkualitas

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif 2021 (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kabupaten/Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	01	02	1.03	21	sub kegiatan Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah	Pembangunan Pendidikan	Peningkatan kesempatan pendidikan	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang direhab (DAK REGULER)	1 paket			-	-	Peningkatan kesempatan pendidikan	Pemerataan layanan pendidikan berkualitas
1	01	02	1.03	23	sub kegiatan Rehabilitasi Asrama Sekolah												400.000.000	400.000.000		
						Pembangunan Pendidikan	Peningkatan kesempatan pendidikan	Bangka Selatan	Toboali	SLB Toboali			Jumlah asrama yang direhab	1 unit			400.000.000	400.000.000		
1	01	02	1.03	24	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sarana, Prasarana, dan utilitas sekolah												931.000.000	931.000.000		
						Pembangunan Pendidikan	Peningkatan kesempatan pendidikan	Pangkalpinang	bukit intan	air itam			Jumlah bangunan (gedung) direhab	1 unit			846.000.000	846.000.000	Peningkatan kesempatan pendidikan	Pemerataan layanan pendidikan berkualitas
						Pembangunan Pendidikan	Peningkatan kesempatan pendidikan	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA			Jumlah sapras dan utilitas sekolah yang direhab (DAK REGULER)	1 paket			-	-	Peningkatan kesempatan pendidikan	Pemerataan layanan pendidikan berkualitas
						Pembangunan Pendidikan	Peningkatan kesempatan pendidikan	Bangka Tengah	Koba	SLB Koba			jumlah mushola yang direhab	1 unit			85.000.000	85.000.000		
											Jumlah Pengadaan sarana prasarana	173 unit					1.478.500.000	1.105.500.000		
1	01	02	1.03	38	Sub Kegiatan Pengadaaan Perlengkapan peserta didik												2.058.600.000	1.105.500.000		
						Pembangunan Pendidikan	Peningkatan kesempatan pendidikan	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA			Jumlah Pengadaaan ipad	171 unit			373.000.000	1.105.500.000	Peningkatan kesempatan pendidikan	Pemerataan layanan pendidikan berkualitas
													Jumlah Pengadaaan alat dengar	196 unit			1.685.600.000			
1	01	02	1.03	39	Sub Kegiatan Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah												1.105.500.000	1.105.500.000		
						Pembangunan Pendidikan	Peningkatan kesempatan pendidikan	BANGKA BARAT, BANGKA SELATAN	MUNTOK, TOBOALI	SLB MUNTOK, SLB TOBOALI			Jumlah Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah	2 unit			1.105.500.000	1.105.500.000	Peningkatan kesempatan pendidikan	Pemerataan layanan pendidikan berkualitas
1	01	02	1.03	40	Sub Kegiatan Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga peserta didik															
						Pembangunan Pendidikan	Peningkatan kesempatan pendidikan	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA			Alat Praktik dan Peraga peserta didik (DAK REGULER)	1 paket			-	-	Peningkatan kesempatan pendidikan	Pemerataan layanan pendidikan berkualitas
1	01	02	1.03	46	Sub Kegiatan Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik												39.200.000			
						Pembangunan Pendidikan	Peningkatan kesempatan pendidikan	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA			Jumlah assesment	1 kali			39.200.000	-	Peningkatan kesempatan pendidikan	Pemerataan layanan pendidikan berkualitas
									jumlah medali siswa dalam kompetisi nasional /Internasional	2 buah							4.408.571.000	4.408.571.000		
											Jumlah lomba kesiswaan	6 jenis					4.408.571.000	4.408.571.000		
1	01	02	1.03	48	Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa												4.408.571.000	4.408.571.000		
						Pembangunan Pendidikan	Meningkatkan kualitas pendidikan	Pangkalpinang	bukit intan	air itam			Jumlah lomba kesiswaan Tk.Provinsi	6 jenis			4.408.571.000	4.408.571.000	Peningkatan kualitas pendidikan	Pemerataan layanan pendidikan berkualitas
									Persentase GTK Bersertifikasi	80%							455.390.000	455.390.000		
											Jumlah guru PK yang mengikuti	10 orang					85.000.000	85.000.000		
1	01	02	1.03	50	Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan khusus												455.390.000	455.390.000		
						Pembangunan Pendidikan	Peningkatan kualitas pendidikan	Bandung, Sleman, makasar	Sukasari, Depok, Tamalanrea	Isola, Caturtunggal, Borongloe			Jumlah guru yang mengikuti PPG	10 orang			85.000.000	85.000.000	Peningkatan kualitas pendidikan	Pemerataan layanan pendidikan berkualitas
											Jumlah guru PK yang mendapat pengembangan kompetensi	64 orang					220.390.000	220.390.000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif 2021 (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kabupaten/Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
						Pembangunan Pendidikan	Peningkatan kualitas pendidikan	Pangkalpinang	bukit intan	air itam			mengikuti Diklat Kompetensi	62 orang			220.390.000	220.390.000		
											Jumlah guru PK yang mendapat pengembangan kualifikasi	2 orang					150.000.000	150.000.000		
						Pembangunan Pendidikan	Peningkatan kualitas pendidikan	Sleman, Bandung	Depok, Coblong	Caturtunggal, Lebak Silivangi			berkualifikasi S1 dan S2	2 orang			150.000.000	150.000.000		
									APK PENDIDIKAN KHUSUS	86							2.481.810.000	1.599.500.000		
											Jumlah penyediaan Operasional PLA	12 bulan					2.077.010.000	1.599.500.000		
											Jumlah SLB SWASTA terlayani	2 sekolah					404.800.000	1.039.757.000		
1	01	02	1.03	51	Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus												2.481.810.000	1.599.500.000		
						Pembangunan Pendidikan	Peningkatan kesempatan pendidikan	Pangkalpinang	bukit intan	air itam			Jumlah penyediaan Operasional PLA	12 bulan			2.077.010.000	1.599.500.000	Peningkatan kesempatan pendidikan	Pemerataan layanan pendidikan berkualitas
													Jumlah siswa SLBS YPAC terlayani	122 siswa			268.400.000			
													Jumlah siswa SLBS YPN Belinyu terlayani	62 siswa			136.400.000			
1	01	03			**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**												826.247.000	1.039.757.000		
									persentase dokumen kurikulum yg terintegrasi dengan kurikulum	75%							826.247.000	1.039.757.000		
1	01	03	1.01		**Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah**												441.687.000	441.687.000		
											Jumlah dokumen Penyusunan	1 dokumen					441.687.000	441.687.000		
1	01	03	1.01	04	Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah												441.687.000	441.687.000		
						Pembangunan Pendidikan	Peningkatan kualitas pendidikan	Pangkalpinang	bukit intan	air itam			Jumlah peserta Pelatihan Penyusunan	44 orang			441.687.000,00	441.687.000,00	Peningkatan kualitas pendidikan	Pemerataan layanan pendidikan berkualitas
1	01	03	1.02		**Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus**												384.560.000,00	598.070.000,00		
											Jumlah dokumen Muatan Lokal	1 dokumen					384.560.000	598.070.000		
1	01	03	1.02	04	Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus												598.070.000	598.070.000		
						Pembangunan Pendidikan	Peningkatan kualitas pendidikan	Pangkalpinang	bukit intan	air itam			Jumlah dokumen Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus	2dokumen			598.070.000	598.070.000	Peningkatan kualitas pendidikan	Pemerataan layanan pendidikan berkualitas
1	01	04			**Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan**												100.000.000	100.000.000		
									persentase guru yang mengajar sesuai dengan	80%							100.000.000	100.000.000		
1	01	04	1.01		**Kegiatan Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi**												100.000.000	100.000.000		
											jumlah dokumen analisis GTK	1 dokumen					100.000.000	100.000.000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif 2021 (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kabupaten/Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	01	04	1.01	02	Sub Kegiatan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus												100.000.000	100.000.000		
						Pembangunan Pendidikan	Peningkatan kualitas pendidikan	Pangkalpinang	bukit intan	air itam			jumlah dokumen penataan pendistribusian GTK	1 dokumen			100.000.000,00	100.000.000,00	Peningkatan kualitas pendidikan	Pemerataan layanan pendidikan berkualitas
1	01	06			**PROGRAM BAHASA DAN SASTRA**												200.000.000	200.000.000		
									persentase minat siswa terhadap bahasa dan	70%							200.000.000	200.000.000		
1	01	06	1.01		**Kegiatan pembinaan, pengembangan dan perlindungan bahasa dan sastra yang penuturannya lintas daerah kab/kota dalam satu daerah provinsi**												200.000.000	200.000.000		
											jumlah siswa yang berminat mengikuti lomba	50 orang					200.000.000	200.000.000		
1	01	06	1.01	06	Sub Kegiatan peningkatan apresiasi siswa terhadap bahasa dan sastra daerah kewenangan provinsi												200.000.000	200.000.000		
						Pembangunan Pendidikan	Peningkatan kualitas pendidikan	Pangkalpinang	bukit intan	air itam			jumlah / jenis buku yang dicetak dan distribusi	4 judul			75.000.000	75.000.000	Peningkatan kualitas pendidikan	Pemerataan layanan pendidikan berkualitas
													jumlah siswa yang mengikuti lomba	50 orang			125.000.000	125.000.000		
					CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I KOTA PANGKALPINANG DAN KABUPATEN BANGKA TENGAH												**20.200.808.000**	**20.200.808.000**		
X	XX	01			**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**												**412.772.000**	**462.895.000**		
									survey kepuasan pelayanan internal (angka)	**90**							412.772.000	462.895.000		
X	XX	01	1.03		**Kegiatan Administrasi umum**												397.772.000	447.895.000		
											survey kepuasan pelayanan umum	90					397.772.000	447.895.000		
X	XX	01	1.03	01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa surat menyurat												1.500.000	1.500.000		
						pembangunan Reformasi Biroktasi	peningkatan tata kelola pemerintahan	BANGKA TENGAH	PANGKALAN BARU				Jumlah Materai	400 lembar			1.500.000	1.500.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
X	XX	01	1.03	02	Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik												24.000.000	39.000.000		
						pembangunan Reformasi Biroktasi	peningkatan tata kelola pemerintahan	BANGKA TENGAH	PANGKALAN BARU				jumlah Tagihan rekening listrik, air, telepon/fax, tv kabel, virtual meeting yang dibayarkan	12 bulan			24.000.000	39.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
X	XX	01	1.03	03	Sub Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor												30.000.000	30.000.000		
						pembangunan Reformasi Biroktasi	peningkatan tata kelola pemerintahan	BANGKA TENGAH	PANGKALAN BARU				jumlah gedung kantor yang disewa	1 unit			30.000.000	30.000.000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif 2021 (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kabupaten/Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
X	XX	01	1.03	07	Sub Kegiatan Penyediaan jasa Administrasi keuangan												67.600.000	67.495.000		
						pembangunan Reformasi Biroktasi	peningkatan tata kelola pemerintahan	BANGKA TENGAH	PANGKALAN BARU				Jumlah pengelola administrasi keuangan	10 orang			67.600.000	67.495.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
X	XX	01	1.03	08	Sub Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor												116.100.000	118.100.000		
						pembangunan Reformasi Biroktasi	peningkatan tata kelola pemerintahan	BANGKA TENGAH	PANGKALAN BARU				jumlah tenaga kebersihan	3 orang			113.100.000	113.100.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
													Jumlah jenis bahan dan Peralatan kebersihan kantor yang tersedia	10 jenis			3.000.000	5.000.000		
X	XX	01	1.03	09	Sub Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja												-	10.000.000		
						pembangunan Reformasi Biroktasi	peningkatan tata kelola pemerintahan	BANGKA TENGAH	PANGKALAN BARU				jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	10 jenis			-	10.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
X	XX	01	1.03	10	Sub Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor												11.512.000	12.000.000		
						pembangunan Reformasi Biroktasi	peningkatan tata kelola pemerintahan	BANGKA TENGAH	PANGKALAN BARU				jumlah jenis ATK yang dibeli	30 jenis			11.512.000	12.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
X	XX	01	1.03	11	Sub Kegiatan Penyediaan barang cetak dan penggandaan												12.000.000	12.000.000		
						pembangunan Reformasi Biroktasi	peningkatan tata kelola pemerintahan	BANGKA TENGAH	PANGKALAN BARU				Jumlah barang yg dicetak	240 bh			5.000.000	5.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
													Jumlah penggandaan	20000 lembar			7.000.000	7.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
X	XX	01	1.03	12	Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor												-	2.000.000		
						pembangunan Reformasi Biroktasi	peningkatan tata kelola pemerintahan	BANGKA TENGAH	PANGKALAN BARU				Jumlah komponen instalasi listrik	10 jenis			-	2.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
X	XX	01	1.03	13	Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor												-	20.000.000		
						pembangunan Reformasi Biroktasi	peningkatan tata kelola pemerintahan	BANGKA TENGAH	PANGKALAN BARU				jumlah/jenis peralatan kantor	10 jenis			-	10.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
													jumlah /jenis perlengkapan kantor	10 jenis			-	10.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
X	XX	01	1.03	15	Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan												1.800.000	1.800.000		
						pembangunan Reformasi Biroktasi	peningkatan tata kelola pemerintahan	BANGKA TENGAH	PANGKALAN BARU				Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan	24 eksemplar			1.800.000	1.800.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
X	XX	01	1.03	17	Sub Kegiatan Penyediaan makan dan minum												15.000.000	15.000.000		
						pembangunan Reformasi Biroktasi	peningkatan tata kelola pemerintahan	BANGKA TENGAH	PANGKALAN BARU				Jumlah makan dan minum Tamu	100 pax			5.000.000	5.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
													Jumlah makan dan minum rapat	400 pax			10.000.000	10.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
X	XX	01	1.03	18	Sub Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah												65.000.000	65.000.000		
						pembangunan Reformasi Biroktasi	peningkatan tata kelola pemerintahan	BANGKA TENGAH	PANGKALAN BARU				jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	7 kali			35.000.000	35.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
													Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah	60 kali			30.000.000	30.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
X	XX	01	1.03	31	Sub Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/Operasional												53.260.000	44.000.000		
						pembangunan Reformasi Biroktasi	peningkatan tata kelola pemerintahan	BANGKA TENGAH	PANGKALAN BARU				Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	3 unit			53.260.000	44.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
X	XX	01	1.03	32	Sub Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor												-	10.000.000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif 2021 (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kabupaten/Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
						pembangunan Reformasi Birokrasi	peningkatan tata kelola pemerintahan	BANGKA TENGAH	PANGKALAN BARU				Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	5 jenis			-	10.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
X	XX	01	1.04		**Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**												15.000.000	15.000.000		
															survey kepuasan pelayanan kepegawaian	90	15.000.000	15.000.000		
X	XX	01	1.04	01	Sub Kegiatan Pengadaan mesin/kartu absensi												15.000.000	15.000.000		
						pembangunan Reformasi Birokrasi	peningkatan tata kelola pemerintahan	BANGKA TENGAH	PANGKALAN BARU				Jumlah mesin/kartu absensi yang diadakan	1 unit			15.000.000	15.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
1	01	02			**Program Pengelolaan Pendidikan**												**19.788.036.000**	**19.737.913.000**		
									RATA-RATA NILAI ASSESMENT di Cabang Dinas pendidikan	**415**							**8.647.609.000**	**8.676.086.000**		
1	01	02	1.01		**Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**												**8.647.609.000**	**8.676.086.000**		
											Jumlah SMA di CABANG DINAS	11 sekolah					8.647.609.000	8.676.086.000		
1	01	02	1.01	49	Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa												682.409.000	710.886.000		
						Pembangunan Pendidikan	Peningkatan kualitas pendidikan	BANGKA TENGAH	PANGKALAN BARU				Jumlah Lomba kesiswaan SMA	3 jenis			682.409.000	710.886.000	Peningkatan kualitas pendidikan	Pemerataan layanan pendidikan berkualitas
1	01	02	1.01	50	Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Menengah Atas												7.965.200.000	7.965.200.000		
						Pembangunan Pendidikan	Peningkatan kesempatan pendidikan	BANGKA TENGAH	PANGKALAN BARU				Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan	201 orang			7.965.200.000	7.965.200.000	Peningkatan kesempatan pendidikan	Pemerataan layanan pendidikan berkualitas
1	01	02	1.02		**Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**												9.690.427.000	9.611.827.000		
											Jumlah SMK di CABANG DINAS PANGKALPINAN	10 sekolah					9.690.427.000	9.611.827.000		
1	01	02	1.02	41	Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa												551.327.000	472.727.000		
						Pembangunan Pendidikan	Peningkatan kesempatan pendidikan	BANGKA TENGAH	PANGKALAN BARU				Jumlah Lomba kesiswaan SMK	3 jenis			551.327.000	472.727.000	Peningkatan kualitas pendidikan	Pemerataan layanan pendidikan berkualitas
1	01	02	1.02	42	Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Menengah												9.139.100.000	9.139.100.000		
						Pembangunan Pendidikan	Peningkatan kesempatan pendidikan	BANGKA TENGAH	PANGKALAN BARU				Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan	240 orang			9.139.100.000	9.139.100.000	Peningkatan kesempatan pendidikan	Pemerataan layanan pendidikan berkualitas

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Bangka Belitung
Tahun 2021

Unit Organisasi : Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
				Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/ Indikator Program		Keluaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/ Indikator Kegiatan				Program Juara/ Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	**Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**															
1 02	**Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan**												**84.918.603.650**	**#REF!**		
1 02 01	**Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**												**24.375.011.208**	**26.804.512.329**		
							Nilai Sakip PD	76					200.000.000	220.000.000		
1 02 01 1.01	**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**												**200.000.000**	**220.000.000**		
											Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	11 dokumen	200.000.000	220.000.000		
1 02 01 1.01 01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah												25.000.000	27.500.000		
		Pembangunan Kesehatan	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah dokumen perencanaan Renstra/Renja PD	4 Dokumen			25.000.000	27.500.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	
1 02 01 1.01 02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan												25.000.000	27.500.000		
		Pembangunan Kesehatan	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah dokumen DPA/DPPA yang tersusun	2 Dokumen			25.000.000	27.500.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	
1 02 01 1.01 03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah												30.000.000	33.000.000		
		Pembangunan Kesehatan	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi PD	1 dokumen			30.000.000	33.000.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	
1 02 01 1.01 04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah												70.000.000	77.000.000		
		Pembangunan Kesehatan	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			jumlah kesepakatan Koordinasi dan sinkronisasi	1 dokumen			70.000.000	77.000.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	
1 02 01 1.01 05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												50.000.000	55.000.000		
		Pembangunan Kesehatan	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah dokumen Evalusi kinerja PD	3 dokumen			50.000.000	55.000.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	
							Survey Kepuasan Pelayanan Internal	75 persen					24.175.011.208	26.583.467.329		
1 02 01 1.02	**Administrasi Keuangan**												**20.446.602.250**	**22.491.262.475**		
											Survey kepuasan pelayanan keuangan	75	20.446.602.250	22.491.262.475		- 66.995.955.250
1 02 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												20.391.602.250	22.430.762.475		
		Pembangunan Kesehatan	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	140 orang			20.391.602.250	22.430.762.475	Meningkatkan tata kelola keuangan daerah	
1 02 01 1.02 07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran												25.000.000	27.500.000		
		Pembangunan Kesehatan	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah laporan keuangan bulanan/ Semesteran	14 laporan			25.000.000	27.500.000	Meningkatkan tata kelola keuangan daerah	
1 02 01 1.02 09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun												30.000.000	33.000.000		
		Pembangunan Kesehatan	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 laporan			30.000.000	33.000.000	Meningkatkan tata kelola keuangan daerah	
1 02 01 1.03	**Administrasi Umum**												**3.713.408.958**	**4.076.749.854**		
											Survey Kepuasan Pelayanan Umum	75	3.713.408.958	4.075.704.854		
1 02 01 1.03 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat												615.150.000	676.665.000		
		Pembangunan Kesehatan	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah Surat/Barang yang dikirim	410 surat/barang yang dikirim			8.200.000	9.020.000	Meningkatkan tata kelola keuangan daerah	
		Pembangunan Kesehatan	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah Materai	400 lembar			1.800.000	1.980.000	Meningkatkan tata kelola keuangan daerah	
		Pembangunan Kesehatan	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah Surat/Barang yang dikirim	40 surat/barang yang dikirim			1.000.000	1.100.000	Meningkatkan tata kelola keuangan daerah	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/ Indikator Program		Keluaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/ Indikator Kegiatan				Program Juara/ Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
						Pembangunan Kesehatan	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah Materai	150 lembar			950.000	1.045.000	Meningkatkan tata kelola keuangan daerah	
						Pembangunan Kesehatan	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah tenaga pramubakti yang dipekerjakan	16 orang			603.200.000	663.520.000	Meningkatkan tata kelola keuangan daerah	
1	02	01	1.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												498.692.672	548.561.939		
						Pembangunan Kesehatan	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Tagihan rekening listrik, telepon/fax, virtual meeting yang dibayarkan	12 bulan			302.692.672	332.961.939	Meningkatkan tata kelola keuangan daerah	
						Pembangunan Kesehatan	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Tagihan rekening listrik, telepon/fax yang dibayarkan	12 bulan			196.000.000	215.600.000	Meningkatkan tata kelola keuangan daerah	
1	02	01	1.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor												420.500.000	462.550.000		
						Pembangunan Kesehatan	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor	20 kali			43.500.000	47.850.000	Meningkatkan tata kelola keuangan daerah	
						Pembangunan Kesehatan	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah tenaga keamanan/satpam kantor yang dipekerjakan	10 orang			377.000.000	414.700.000	Meningkatkan tata kelola keuangan daerah	
1	02	01	1.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional												276.450.000	304.095.000		
						Pembangunan Kesehatan	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah kendaraan operasional yang dipelihara	6 unit			10.900.000	11.990.000	Meningkatkan tata kelola keuangan daerah	
						Pembangunan Kesehatan	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah kendaraan operasional yang dipelihara	2 unit			1.650.000	1.815.000	Meningkatkan tata kelola keuangan daerah	
						Pembangunan Kesehatan	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah tenaga sopir yang dipekerjakan	7 orang			263.900.000	290.290.000	Meningkatkan tata kelola keuangan daerah	
1	02	01	1.03	07	Penyediaan jasa Administrasi keuangan												173.670.000	191.037.000		
						Pembangunan Kesehatan	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah pengelola administrasi keuangan yang bekerja	27 orang			173.670.000	191.037.000	Meningkatkan tata kelola keuangan daerah	
1	02	01	1.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor												501.450.000	551.595.000		
						Pembangunan Kesehatan	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah jenis bahan dan Peralatan kebersihan kantor yang tersedia	20 jenis			49.050.000	53.955.000	Meningkatkan tata kelola keuangan daerah	
						Pembangunan Kesehatan	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah tenaga kebersihan yang dipekerjakan	12 orang			452.400.000	497.640.000	Meningkatkan tata kelola keuangan daerah	
1	02	01	1.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor												75.000.000	82.500.000		
						Pembangunan Kesehatan	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah jenis ATK yang dibeli	30 jenis			55.000.000	60.500.000	Meningkatkan tata kelola keuangan daerah	
						Pembangunan Kesehatan	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah jenis ATK yang dibeli	15 jenis			20.000.000	22.000.000	Meningkatkan tata kelola keuangan daerah	
1	02	01	1.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan												48.784.800	53.663.280		
						Pembangunan Kesehatan	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah barang cetak	2.802 eksemplar			16.785.000	18.463.500	Meningkatkan tata kelola keuangan daerah	
						Pembangunan Kesehatan	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah penggandaan	71.428 lembar			24.999.800	27.499.780	Meningkatkan tata kelola keuangan daerah	
						Pembangunan Kesehatan	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah penggandaan	14.000 lembar			7.000.000	7.700.000	Meningkatkan tata kelola keuangan daerah	
1	02	01	1.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor												12.000.000	13.200.000		
						Pembangunan Kesehatan	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia	10 jenis			8.000.000	8.800.000	Meningkatkan tata kelola keuangan daerah	
						Pembangunan Kesehatan	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia	5 jenis			4.000.000	4.400.000	Meningkatkan tata kelola keuangan daerah	
1	02	01	1.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga												34.000.000	37.400.000		
						Pembangunan Kesehatan	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	21 unit			25.000.000	27.500.000	Meningkatkan tata kelola keuangan daerah	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/ Indikator Program		Keluaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/ Indikator Kegiatan				Program Juara/ Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
						Pembangunan Kesehatan	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	10 jenis			9.000.000	9.900.000	Meningkatkan tata kelola keuangan daerah	
1	02	01	1.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan												12.360.000	13.596.000		
						Pembangunan Kesehatan	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan yang tersedia	96 eksemplar			12.360.000	13.596.000	Meningkatkan tata kelola keuangan daerah	
1	02	01	1.03	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												20.180.000	22.198.000		
						Pembangunan Kesehatan	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	11 unit			14.880.000	16.368.000	Meningkatkan tata kelola keuangan daerah	
						Pembangunan Kesehatan	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	7 unit			5.300.000	5.830.000	Meningkatkan tata kelola keuangan daerah	
1	02	01	1.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman												27.000.000	29.700.000		
						Pembangunan Kesehatan	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah makan dan minum Tamu yang tersedia	480 pax			7.200.000	7.920.000	Meningkatkan tata kelola keuangan daerah	
						Pembangunan Kesehatan	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah makan dan minum rapat yang tersedia	480 pax			16.800.000	18.480.000	Meningkatkan tata kelola keuangan daerah	
						Pembangunan Kesehatan	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah makan dan minum rapat yang tersedia	200 pax			3.000.000	3.300.000	Meningkatkan tata kelola keuangan daerah	
1	02	01	1.03	18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah												244.995.200	269.494.720		
						Pembangunan Kesehatan	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang dilaksanakan	53 kali			83.153.200	91.468.520	Meningkatkan tata kelola keuangan daerah	
						Pembangunan Kesehatan	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah koordinasi dan konsultasi luar daerah dilaksanakan	18 kali			135.342.000	148.876.200	Meningkatkan tata kelola keuangan daerah	
						Pembangunan Kesehatan	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang dilaksanakan	5 kali			5.500.000	6.050.000	Meningkatkan tata kelola keuangan daerah	
						Pembangunan Kesehatan	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah koordinasi dan konsultasi luar daerah dilaksanakan	3 kali			21.000.000	23.100.000	Meningkatkan tata kelola keuangan daerah	
1	02	01	1.03	25	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor												200.000.000	220.000.000		
						Pembangunan Kesehatan	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	32 unit			200.000.000	220.000.000	Meningkatkan tata kelola keuangan daerah	
1	02	01	1.03	26	Pengadaan Mebeleur												111.366.286	122.502.915		
						Pembangunan Kesehatan	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah mebelair yang diadakan	73 unit			111.366.286	122.502.915	Meningkatkan tata kelola keuangan daerah	
1	02	01	1.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor												150.000.000	165.000.000		
						Pembangunan Kesehatan	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 unit			100.000.000	110.000.000	Meningkatkan tata kelola keuangan daerah	
						Pembangunan Kesehatan	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 unit			50.000.000	55.000.000	Meningkatkan tata kelola keuangan daerah	
1	02	01	1.03	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional												211.810.000	232.991.000		
						Pembangunan Kesehatan	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah kendaraan operasional yang dipelihara	7 unit			180.100.000	198.110.000	Meningkatkan tata kelola keuangan daerah	
						Pembangunan Kesehatan	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah kendaraan operasional yang dipelihara	2 unit			31.710.000	34.881.000	Meningkatkan tata kelola keuangan daerah	
1	02	01	1.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor												80.000.000	80.000.000		
						Pembangunan Kesehatan	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	130 unit			79.020.000	78.922.000	Meningkatkan tata kelola keuangan daerah	
						Pembangunan Kesehatan	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah BBM Genset	100 liter			980.000	1.078.000	Meningkatkan tata kelola keuangan daerah	
1	**02**	**01**	**1.04**		**Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**												**15.000.000**	**16.500.000**		
															Survey kepuasan pelayanan kepegawaian	75	15.000.000	16.500.000		
1	02	01	1.04	01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi												15.000.000	16.500.000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/ Indikator Program		Keluaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/ Indikator Kegiatan				Program Juara/ Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
						Pembangunan Kesehatan	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah mesin/kartu absensi yang diadakan	1 unit			15.000.000	16.500.000	Meningkatkan tata kelola keuangan daerah	
1	02	02			**Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**												**58.542.492.442**	**62.473.010.936**		
											Persentase peningkatan pemeriksaan laboratorium kesehatan	90 persen					180.000.000	-		
1	02	02	1.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**												**7.748.822.800**	**8.230.705.080**		
															Persentase penyediaan sarana dan prasarana laboratorium kesehatan	100 persen	**180.000.000**	-		
1	02	02	1.01	04	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya												180.000.000	-		
					DAK FISIK															
						Pembangunan Kesehatan	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan	1 unit			180.000.000	-	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	
											Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi minimal madya	82 persen					50.000.000	55.000.000		
															Persentase Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan alat kesehatan	64 persen	50.000.000	55.000.000		
1	02	02	1.01	06	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)												50.000.000	55.000.000		
						Pembangunan Kesehatan	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah penduduk yang dilayani Pelayanan Kesehatan Bergerak	10.300 orang			50.000.000	55.000.000	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	
											Persentase peningkatan pemeriksaan laboratorium kesehatan	90 persen					7.348.822.800	7.988.705.080		
															Persentase penyediaan sarana dan prasarana laboratorium kesehatan	100 persen	7.348.822.800	7.988.705.080		
1	02	02	1.01	10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan												2.000.000.000	2.530.000.000		
						Pembangunan Kesehatan	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan	90 unit			2.000.000.000	2.530.000.000	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	
1	02	02	1.01	11	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan												1.250.000.000	1.100.000.000		
						Pembangunan Kesehatan	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah pengadaan sarana di fasilitas layanan kesehatan	4 unit			1.000.000.000	1.100.000.000	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	
					DAK FISIK															
						Pembangunan Kesehatan	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah instalasi air bersih	1 unit			250.000.000	-	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	
1	02	02	1.01	13	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi												1.550.000.000	1.555.000.000		
						Pembangunan Kesehatan	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah pengadaan alat kesehatan	13 unit			1.500.000.000	1.500.000.000	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	
						Pembangunan Kesehatan	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah jenis alat kesehatan yang dikalibrasi	10 unit			50.000.000	55.000.000	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	
1	02	02	1.01	14	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)												2.498.822.800	2.748.705.080		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/ Indikator Program		Keluaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/ Indikator Kegiatan				Program Juara/ Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
						Pembangunan Kesehatan	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah jenis pengadaan bahan habis pakai lainnya (sprei, handuk dan habis pakai lainnya)	7 jenis			2.498.822.800	2.748.705.080	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	
1	02	02	1.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan												50.000.000	55.000.000		
						Pembangunan Kesehatan	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah pemeliharaan alat-alat kesehatan/peralatan laboratorium kesehatan	10 unit			50.000.000	55.000.000	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	
											Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi minimal madya	82 persen					75.000.000	82.500.000		
															Jumlah Kabupaten/Kota yang Menyediakan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	4 Kabupaten/ Kota	75.000.000	82.500.000		
1	02	02	1.01	20	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan												75.000.000	82.500.000		
						Pembangunan Kesehatan	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelayanan Telemedicine	8 fasilitas pelayanan kesehatan			11.948.000	13.142.800	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	
						Pembangunan Kesehatan	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Peserta pertemuan evaluasi pelaksanaan telemedicine	21 orang			63.052.000	69.357.200	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	
											Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Menggunakan Sistem Informasi Kesehatan	80 persen					95.000.000	104.500.000		
															Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat dan Vaksin Essensial	95 persen	95.000.000	104.500.000		
1	02	02	1.01	21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman Serta Fasilitas Kesehatan Lainnya												95.000.000	104.500.000		
						Pembangunan Kesehatan	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah puskesmas yang memiliki ketersediaan obat dan vaksin esensial	64 puskesmas			95.000.000	104.500.000	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	
					DAK NON FISIK															
						Pembangunan Kesehatan	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah puskesmas yang memiliki ketersediaan obat dan vaksin esensial	64 puskesmas			-	-	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	
					DAK FISIK															
						Pembangunan Kesehatan	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah bangunan yang direhabilitasi	1 bangunan			-	-	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	
											Persentase pencegahan dan pengendalian penyakit	80 persen					5.385.787.500	5.924.366.250		
1	**02**	**02**	**1.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**												**50.283.239.975**	**53.680.833.223**		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/ Indikator Program		Keluaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/ Indikator Kegiatan				Program Juara/ Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
															Persentase Layanan Kesehatan yang Melaksanakan Kewaspadaan Dini dan Respon	80 persen	5.385.787.500	5.924.366.250		
1	02	02	1.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana												100.000.000	110.000.000		
						Pembangunan Kesehatan	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	6 kali			100.000.000	110.000.000	Meningkatnya Kapasitas Daerah Terhadap Bencana	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
1	02	02	1.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)												5.285.787.500	5.814.366.250		
						Pembangunan Kesehatan	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah Kejadian Luar Biasa (KLB) yang dapat ditanggulangi	15 kejadian			5.285.787.500	5.814.366.250	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	
											Persentase Peningkatan Kesehatan Masyarakat	80 persen					1.296.900.000	1.426.590.000		
															Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan keluarga dan gizi masyarakat	71 persen	850.000.000	935.000.000		
1	02	02	1.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak												375.000.000	412.500.000		
						Pembangunan Kesehatan	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah peserta tersosialisasi dan terkoordinasi dalam LP/LS dan organisasi profesi kesehatan dalam rangka Penurunan AKI dan AKB	80 orang			73.112.000	80.423.200	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	
						Pembangunan Kesehatan	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah Peserta yg tersosialisasi Program Inovasi dalam rangka Penurunan AKI dan AKB	144 orang			132.318.000	145.549.800	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	
						Pembangunan Kesehatan	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah fasilitas kesehatan yang dikuatkan dalam Penyeliaan Fasilitatif kesehatan ibu dan bayi baru lahir	7 puskesmas			22.840.000	25.124.000	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	
						Pembangunan Kesehatan	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah petugas kesehatan yang terorientasi MTBS	40 orang			116.210.000	127.831.000	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	
						Pembangunan Kesehatan	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah Kasus Kematian Ibu dan Bayi yg teridentifikasi penyebab kematian	36 kasus kematian ibu, 188 kasus kematian bayi			30.520.000	33.572.000	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	
					DAK NON FISIK															
						Pembangunan Kesehatan	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah petugas kesehatan yang terorientasi dalam ANC Terpadu dan Post Natal Care (PNC)	385 orang			-	-	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	
						Pembangunan Kesehatan	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah petugas kesehatan yang terorientasi kohort	380 orang			-	-	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/ Indikator Program		Keluaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/ Indikator Kegiatan				Program Juara/ Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
						Pembangunan Kesehatan	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah peserta yang mendapatkan penguatan kapasitas dalam penggunaan buku KIA	375 orang			-	-	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	
						Pembangunan Kesehatan	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah petugas kesehatan yang terorientasi MTBS	150 orang			-	-	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	
						Pembangunan Kesehatan	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah peserta yang mendapatkan penguatan kapasitas dalam penguatan posyandu remaja	315 orang			-	-	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	
						Pembangunan Kesehatan	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah peserta yang mendapatkan penguatan kapasitas dalam program UKS / Madrasah di pesantren	455 orang			-	-	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	
						Pembangunan Kesehatan	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah peserta yang terevaluasi Program Kespro Catin	385 orang			-	-	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	
						Pembangunan Kesehatan	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah peserta yang tersosialisasi dalam program lanjut usia	200 orang			-	-	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	
1	02	02	1.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif												50.000.000	55.000.000		
						Pembangunan Kesehatan	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah usia reproduksi yang mendapatkan penguatan kesehatan reproduksi masa sebelum hamil	240 Orang			50.000.000	55.000.000	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	
1	02	02	1.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut												50.000.000	55.000.000		
						Pembangunan Kesehatan	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah kader kesehatan dan petugas kesehatan yang tersosialisasi dalam pemberdayaan lansia dalam Meningkatkan Status Kesehatan Lansia	70 orang			50.000.000	55.000.000	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	
1	02	02	1.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat												375.000.000	412.500.000		
						Pembangunan Kesehatan	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah peserta Workshop Percepatan Penurunan Stunting dalam Rangka Peringatan Hari Gizi Nasional (HGN)	250 orang			72.490.000	79.739.000	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat (Penanganan Stunting)	Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing
						Pembangunan Kesehatan	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah peserta Peningkatan Pemberian IMD dan ASI Eksklusif dalam Upaya Pencegahan Stunting	250 orang			81.020.000	89.122.000	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	
						Pembangunan Kesehatan	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah Peserta Peningkatan Program Balita Sehat	80 orang			221.490.000	243.639.000	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	
					DAK NON FISIK															
						Pembangunan Kesehatan	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah peserta yang tersosialisasi pelaksanaan suplementasi gizi	786 orang			-	-	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	
						Pembangunan Kesehatan	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah peserta yang tersosialisasi dalam pendidikan gizi melalui pemberian makanan tambahan lokal	962 orang			-	-	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	
						Pembangunan Kesehatan	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah peserta yang ditingkatkan pengetahuannya dalam pelaksanaan pedoman gizi seimbang dan isi piringku	910 orang			-	-	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/ Indikator Program		Keluaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/ Indikator Kegiatan				Program Juara/ Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
						Pembangunan Kesehatan	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah puskesmas yang mendapatkan pendampingan pelaksanaan surveilans gizi melalui e-PPGBM	64 puskesmas			-	-	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	
						Pembangunan Kesehatan	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah balita terkonfirmasi masalah gizi yang mendapatkan makanan tambahan lokal	525 balita			-	-	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	
					DAK FISIK															
						Pembangunan Kesehatan	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah ibu hamil KEK yang mendapatkan makanan tambahan	6.529 ibu hamil			-	-	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	
						Pembangunan Kesehatan	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah balita gizi kurang yang mendapat makanan tambahan	13.748 balita			-	-	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	
															Persentase kabupaten/kota yang menjalankan kesehatan kerja dan olahraga	71 persen	130.000.000	143.000.000		
1	02	02	1.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga												130.000.000	143.000.000		
						Pembangunan Kesehatan	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah siswa yang dilakukan pengukuran kebugaran	630 siswa			50.505.000	55.555.500	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	
						Pembangunan Kesehatan	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah peserta pertemuan lintas sektor dan koordinasi lintas program dan lintas sektor	50 orang			36.515.000	40.166.500	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	
						Pembangunan Kesehatan	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah perusahaan yang dilakukan penilaian Gerakan Pekerja Perempuan	7 perusahaan			42.980.000	47.278.000	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	
															Persentase kabupaten/kota yang memiliki kualitas lingkungan sehat	71 persen	300.000.000	330.000.000		
1	02	02	1.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan												300.000.000	330.000.000		
						Pembangunan Kesehatan	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah sampel makanan, sampel limbah, sampel air yang diperiksa	510 sampel			166.250.000	182.875.000	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat (Peningkatan Kabupaten/Kota Sehat)	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
						Pembangunan Kesehatan	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah peserta Seminar Kesehatan Lingkungan	300 orang			133.750.000	147.125.000	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat (Peningkatan Kabupaten/Kota Sehat)	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
															Persentase Kab/kota yang melaksanakan minimal 3 Tema Kompanye Germas	57 persen	16.900.000	18.590.000		
1	02	02	1.02	09	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan												16.900.000	18.590.000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/ Indikator Program		Keluaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/ Indikator Kegiatan				Program Juara/ Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
						Pembangunan Kesehatan	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah bahan informasi kesehatan untuk upaya promotif dan preventif	1 pameran			16.900.000	18.590.000	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat (Peningkatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)	
											Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi minimal madya	82 persen					40.000.000	44.000.000		
															Persentase Layanan Kesehatan di Puskesmas	64 persen	40.000.000	44.000.000		
1	02	02	1.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya												40.000.000	44.000.000		
						Pembangunan Kesehatan	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah kelompok Asuhan Mandiri Taman Obat Keluarga (ASMAN TOGA) yang dibentuk dan dibina	7 kelompok			40.000.000	44.000.000	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	
											Persentase pencegahan dan pengendalian penyakit	80 persen					800.000.000	880.000.000		
															Persentase Puskesmas yang Melakukan Pelayanan Penyakit Menular dan Tidak Menular	80 persen	800.000.000	880.000.000		
1	02	02	1.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular												1.106.177.200	1.216.794.920		
						Pembangunan Kesehatan	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah peserta workshop dalam rangka peringatan Hari Tuberculosis Sedunia (HTBS)	200 orang			150.000.000	165.000.000	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	
						Pembangunan Kesehatan	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah peserta seminar HAS (Hari AIDS Sedunia)	100 orang			92.405.000	101.645.500	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	
						Pembangunan Kesehatan	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah peserta workshop dan deteksi dini kanker dalam rangka peringatan Hari Kanker Sedunia	400 orang			200.000.000	220.000.000	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	
						Pembangunan Kesehatan	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah puskesmas yang dibina penyakit menular dan tidak menular	64 puskesmas			154.095.000	169.504.500	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	
						Pembangunan Kesehatan	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah bahan habis pakai penyakit	2.983 test			203.500.000	223.850.000	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	
											Persentase peningkatan pemeriksaan laboratorium kesehatan	90 persen					306.177.200	336.794.920		
															Persentase Pemeriksaan Laboratorium Mendukung Pengendalian Penyakit	80 persen	306.177.200	336.794.920		
						Pembangunan Kesehatan	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan yang terlayani	2600 sampel			149.000.000	163.900.000	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	
						Pembangunan Kesehatan	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah Parameter layanan laboratorium yang Terakreditasi	13 Parameter			121.177.200	133.294.920	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/ Indikator Program		Keluaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/ Indikator Kegiatan				Program Juara/ Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
						Pembangunan Kesehatan	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah tenaga kesehatan	1 orang			36.000.000	39.600.000	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	
					DAK NON FISIK															
						Pembangunan Kesehatan	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular	58 puskesmas			-	-	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	
						Pembangunan Kesehatan	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah laboratorium yang dibina	4 laboratorium			-	-	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	
											Persentase pencegahan dan pengendalian penyakit	80 persen					#REF!	#REF!		
															Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza	65 persen	#REF!	#REF!		
1	02	02	1.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji												205.220.000	225.742.000		
						Pembangunan Kesehatan	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah jemaah Haji yang mendapatkan pemeriksaan dan pembinaan kesehatan haji	500 orang			205.220.000	225.742.000	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	
1	02	02	1.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)												159.747.500	175.722.250		
						Pembangunan Kesehatan	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah siswa yang dilakukan screening kesehatan jiwa (mobile keswa) dengan 50 orang per kabupaten/kota	350 siswa			159.747.500	175.722.250	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	
1	02	02	1.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA												140.252.500	154.277.750		
						Pembangunan Kesehatan	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah masyarakat yang mendapatkan edukasi bahaya Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA)	100 orang			140.252.500	154.277.750	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	
											Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi minimal madya	82 persen					38.334.254.900	42.167.680.390		
															Persentase layanan kesehatan di puskesmas	64 persen	59.500.000	65.450.000		
1	02	02	1.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus												59.500.000	65.450.000		
						Pembangunan Kesehatan	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah puskesmas, Unit Transfusi Darah Rumah Sakit (UTDRS) dan kabupaten/kota yang melakukan kerja sama program pelayanan darah	64 puskesmas			59.500.000	65.450.000	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	
															Persentase kepesertaan JKN	81 persen	38.274.754.900	42.102.230.390		
1	02	02	1.02	16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat												38.274.754.900	42.102.230.390		
						Pembangunan Kesehatan	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah masyarakat yang mempunyai jaminan kesehatan baik mandiri maupun yang dibiayai oleh pemerintah	1.130.000 jiwa			38.274.754.900	42.102.230.390	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/ Indikator Program		Keluaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/ Indikator Kegiatan				Program Juara/ Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
											Persentase pencegahan dan pengendalian penyakit	80 persen					105.215.000	115.736.500		
															Persentase layanan kesehatan yang melaksanakan kewaspadaan dini dan respon	80 persen	105.215.000	115.736.500		
1	02	02	1.02	17	Pengelolaan Surveilans Kesehatan												105.215.000	115.736.500		
						Pembangunan Kesehatan	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah kasus (Penyakit yang dapat Dicegah dengan Imunisasi) PD3I dan penyakit potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) lainnya	15 kasus			105.215.000	115.736.500	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	
					DAK NON FISIK															
						Pembangunan Kesehatan	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah puskesmas yang melaksanakan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) 80 persen	58 puskesmas			-	-	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	
											Persentase pelaksanaan sinkronisasi penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	90 persen					61.000.000	67.100.000		
															Jumlah kesepakatan koordinasi dan sinkronisasi penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) kabupaten/kota	7 dokumen	61.000.000	67.100.000		
1	02	02	1.02	18	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota												61.000.000	67.100.000		
						Pembangunan Kesehatan	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah dokumen kegiatan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) kabupaten/kota	1 dokumen			61.000.000	67.100.000	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	
											Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi minimal madya	82 persen					130.000.000	143.000.000		
															Persentase layanan kesehatan di puskesmas	64 persen	130.000.000	143.000.000		
1	02	02	1.02	19	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan												100.000.000	110.000.000		
						Pembangunan Kesehatan	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah puskesmas yang melakukan upaya perubahan Indeks Keluarga Sehat (IKS) pada Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK), Puskesmas Ramah Anak	64 puskesmas			100.000.000	110.000.000	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	
1	02	02	1.02	20	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas												30.000.000	33.000.000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/ Indikator Program		Keluaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/ Indikator Kegiatan				Program Juara/ Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
						Pembangunan Kesehatan	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah puskesmas yang teregistrasi secara nasional	64 puskesmas			30.000.000	33.000.000	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	
											Persentase pencegahan dan pengendalian penyakit	80 persen					20.000.000	22.000.000		
															Persentase layanan kesehatan yang melaksanakan kewaspadaan dini dan respon	80 persen	20.000.000	22.000.000		
1	02	02	1.02	21	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota												20.000.000	22.000.000		
						Pembangunan Kesehatan	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah investigasi kasus KIPI yang dilakukan	6 kali			20.000.000	22.000.000	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	
											Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi minimal madya	82 persen					2.657.982.500	1.458.050.000		
															Jumlah penerbitan rekomendasi perijinan rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah	10 rekomendasi	1.175.500.000	1.293.050.000		
1	02	02	1.02	23	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)												2.657.982.500	1.293.050.000		
						Pembangunan Kesehatan	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah pasien yang dilayani di klinik kesehatan	1200 orang			415.000.000	456.500.000	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	
						Pembangunan Kesehatan	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah tenaga kesehatan	17 orang			760.500.000	836.550.000	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	
															Jumlah Kab/kota yang menerapkan Sistem Rujukan Terintegrasi (Sisrute) berbasis Kompetensi	7 kabupaten/kota	1.482.482.500	165.000.000		
1	02	02	1.02	24	Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik												150.000.000	165.000.000		
						Pembangunan Kesehatan	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang melaksanakan pengelolaan rujuk dan rujuk balik melalui Sisrute yang berbasis	6 rumah sakit			28.900.000	31.790.000	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	
						Pembangunan Kesehatan	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah petugas yang ditingkatkan pengetahuan tentang rujukan dan rujuk balik	55 orang			121.100.000	133.210.000	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	
											Persentase pencegahan dan pengendalian penyakit	80 persen					415.000.000	456.500.000		
															Persentase layanan kesehatan yang melaksanakan kewaspadaan dini dan respon	80 persen	415.000.000	456.500.000		
1	02	02	1.02	25	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional												15.000.000	16.500.000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/ Indikator Program		Keluaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/ Indikator Kegiatan				Program Juara/ Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
						Pembangunan Kesehatan	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah pengiriman spesimen penyakit potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke laboratorium rujukan/nasional untuk konfirmasi laboratorium	20 spesimen			15.000.000	16.500.000	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	
1	02	02	1.02	26	Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan												400.000.000	440.000.000		
						Pembangunan Kesehatan	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah peserta Pemberdayaan masyarakat daerah bencana dan atau berpotensi bencana	640 orang			400.000.000	440.000.000	Meningkatnya Kapasitas Daerah Terhadap Bencana	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
											Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi minimal madya	82 persen					40.000.000	44.000.000		
															Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang meningkat status mutunya	35 persen	40.000.000	44.000.000		
1	02	02	1.02	27	Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan												40.000.000	44.000.000		
						Pembangunan Kesehatan	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah peserta Penguatan Dinas Kesehatan Kab/Kota sebagai Tim PPMI (Pengawasan Pemantauan Mutu	24 orang			40.000.000	44.000.000	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	
											Persentase pencegahan dan pengendalian penyakit	80 persen					35.702.875	39.273.163		
															Persentase layanan kesehatan yang melaksanakan kewaspadaan dini dan respon	80 persen	35.702.875	39.273.163		
1	02	02	1.02	29	Penilaian/Appraisal Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Pasca Bencana												35.702.875	39.273.163		
						Pembangunan Kesehatan	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah penilaian terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang terdampak krisis kesehatan	5 kali			35.702.875	39.273.163	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	
											Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menggunakan Sistem Informasi Kesehatan (SIK)	80 persen					133.178.000	146.495.800		
1	**02**	**02**	**1.03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**												**133.178.000**	**146.495.800**		
															Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan Sistem Informasi Kesehatan (SIK)	42 persen	133.178.000	146.495.800		
1	02	02	1.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan												58.178.000	63.995.800		
						Pembangunan Kesehatan	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah laporan data dan informasi yang dihasilkan	3 dokumen			58.178.000	63.995.800	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	
1	02	02	1.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan												75.000.000	82.500.000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/ Indikator Program		Keluaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/ Indikator Kegiatan				Program Juara/ Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
						Pembangunan Kesehatan	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah kabupaten/kota yang fasilitas pelayanan kesehatannya melaksanakan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) yang disyaratkan	3 kabupaten/kota			75.000.000	82.500.000	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	
											Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi minimal madya	82 persen					377.251.667	414.976.834		
1	02	02	1.04		**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**												**377.251.667**	**414.976.834**		
															Jumlah penerbitan rekomendasi perijinan rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah	10 rekomendasi	325.000.000	357.500.000		
1	02	02	1.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan												25.000.000	27.500.000		
						Pembangunan Kesehatan	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah rumah sakit yang dilakukan pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut perizinan rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan	19 rumah sakit			25.000.000	27.500.000	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	
1	02	02	1.04	02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit												300.000.000	330.000.000		
						Pembangunan Kesehatan	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah rumah sakit yang mengimplementasikan tata kelola rumah sakit sesuai standar akreditasi	19 rumah sakit			249.388.000	274.326.800	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	
						Pembangunan Kesehatan	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah peserta pertemuan Penguatan Peran BPRS dalam Pengawasan RS	56 orang			50.612.000	55.673.200	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	
															Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang meningkat status mutunya	35 persen	52.251.667	57.476.834		
1	02	02	1.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan												52.251.667	57.476.834		
						Pembangunan Kesehatan	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah puskesmas yang melakukan simulasi survei akreditasi	7 puskesmas			52.251.667	57.476.834	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	
1	02	03			**Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan**												**1.373.000.000**	**1.510.300.000**		
											Persentase tenaga kesehatan yang mendapatkan peningkatan kompetensi	80 persen					1.373.000.000	1.510.300.000		
1	02	03	1.01		**Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi**												**255.000.000**	**280.500.000**		
															Jumlah sumber daya manusia kesehatan yang terpenuhi kebutuhan kompetensinya	60 orang	255.000.000	280.500.000		
1	02	03	1.01	01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan												205.000.000	225.500.000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/ Indikator Program		Keluaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/ Indikator Kegiatan				Program Juara/ Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
						Pembangunan Kesehatan	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah sumber daya manusia kesehatan yang terpenuhi kebutuhan kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan	30 orang			205.000.000	225.500.000	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing
1	02	03	1.01	02	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan												50.000.000	55.000.000		
						Pembangunan Kesehatan	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah sumber daya manusia kesehatan yang mengikuti bimtek kebutuhan sumber daya manusia kesehatan	30 orang			50.000.000	55.000.000	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing
1	**02**	**03**	**1.02**		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**												**1.118.000.000**	**1.229.800.000**		
															Jumlah sumber daya manusia kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	292 orang	1.118.000.000	1.229.800.000		
1	02	03	1.02	01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan												1.118.000.000	1.229.800.000		
						Pembangunan Kesehatan	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah sumber daya manusia kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya melalui pendidikan tugas belajar	8 orang			1.072.375.000	1.179.612.500	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing
						Pembangunan Kesehatan	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah sumber daya manusia kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya melalui uji kompetensi	250 orang			45.625.000	50.187.500	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing
1	02	03	1.02	02	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan												-	-		
						Pembangunan Kesehatan	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Kab. Belitung, Belitung Timur, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah dan Kota pangkalpinang	Tj.Pandan, Manggar, Sungailiat, Muntok, Toboali, Koba dan Bukit Intan	Bangka: Kelurahan Parit padang, Belitung : Kelurahan Pangkallalang , Bangka Barat : Bangka Tengah : Kelurahan Padang Mulia' Bangka Selatan : , Belitung Timur : Desa Padang,Pangkalpinang : Kelurahan Sriwijaya			Jumlah sumber daya manusia kesehatan yang mengikuti pemilihan tenaga kesehatan teladan, monitoring dan evaluasi tenaga kesehatan peserta PIDI, Nusantara Sehat	0 orang			-	-	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing
1	**02**	**04**			**Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman**												**220.000.000**	**242.000.000**		
											Persentase sarana sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi syarat	85 persen					220.000.000	242.000.000		
1	**02**	**04**	**101**		**Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)**												**100.000.000**	**110.000.000**		
															Persentase PBF cabang dan cabang PAK yang memenuhi persyaratan	85 persen	100.000.000	110.000.000		
1	02	04	101	01	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)												78.580.000	86.438.000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/ Indikator Program		Keluaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/ Indikator Kegiatan				Program Juara/ Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
						Pembangunan Kesehatan	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah Pedagang Besar Farmasi (PBF) cabang dan cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) yang dilakukan pengendalian dan pengawasan	14 sarana			78.580.000	86.438.000	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	
1	02	04	1.01	02	Penyediaan dan pengelolaan Data Perizinan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) Berbasis Elektronik												21.420.000	23.562.000		
						Pembangunan Kesehatan	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah perizinan Pedagang Besar Farmasi (PBF) cabang dan cabang Penyalur AlatKesehatan (PAK) berbasis elektronik	14 sarana			21.420.000	23.562.000	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	
1	02	04	1.02		**Penerbitan izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)**												**120.000.000**	**132.000.000**		
															Persentase Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) yang dilakukan pengendalian dan pengawasan	85 persen	120.000.000	132.000.000		
1	02	04	1.02	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional												103.000.000	113.300.000		
						Pembangunan Kesehatan	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) yang dilakukan pengendalian dan pengawasan	100 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) obat tradisional			103.000.000	113.300.000	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	
1	02	04	1.02	02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin UKOT Berbasis Elektronik												17.000.000	18.700.000		
						Pembangunan Kesehatan	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) yang dilakukan pengendalian dan pengawasan	100 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) obat tradisional			17.000.000	18.700.000	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	
1	02	05			**Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan**												**408.100.000**	**#REF!**		
											Persentase kabupaten/kota yang memiliki kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	85 persen					408.100.000	#REF!		
1	02	05	1.01		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi**												**54.999.000**	**#REF!**		
															Jumlah kebijakan baru yang mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) di kabupaten/kota	5 kebijakan	54.999.000	#REF!		
1	02	05	1.01	01	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi												54.999.000	#REF!		
						Pembangunan Kesehatan	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah peserta kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) : Sehat Bersama Bunda Germas	300 orang			45.457.000	50.002.700	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	
						Pembangunan Kesehatan	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah peserta Advokasi Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) bersama Bunda Germas	50 orang			9.542.000	10.496.200	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	
					DAK NON FISIK												-	-		
						Pembangunan Kesehatan	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah kebijakan yang mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) di kabupaten/kota	5 kebijakan			-	-	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/ Indikator Program		Keluaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/ Indikator Kegiatan				Program Juara/ Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	02	05	1.02		**Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi**												**138.811.000**	**152.692.100**		
															Persentase Kab/kota yang melaksanakan promosi kesehatan minimal di 3 tatanan (Tempat Tempat Umum, Tempat Kerja, Rumah Tangga)	57 persen	138.811.000	152.692.100		
1	02	05	1.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat												138.811.000	152.692.100		
						Pembangunan Kesehatan	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah Informasi Promosi Kesehatan melalui Media KIE	5 Media KIE			138.811.000	152.692.100	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	
1	02	05	1.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi**												**214.290.000**	**235.719.000**		
															Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan pembinaan	57 persen	214.290.000	235.719.000		
1	02	05	1.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM												214.290.000	235.719.000		
						Pembangunan Kesehatan	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah peserta peningkatan kapasitas Instruktur Saka Bhakti Husada (SBH)	175 orang			99.043.000	108.947.300	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	
						Pembangunan Kesehatan	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah peserta pertemuan Rapat Koordinasi Pengelola Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan	100 orang			115.247.000	126.771.700	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Bangka Belitung
Tahun 2021

Unit Organisasi : RSUD Dr.(H.C)Ir.SOEKARNO
Sub Unit Organisasi : RSUD Dr.SOEKARNO

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Keterangan
								Kabupaten/Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan			
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
					PROGRAM/KEGIATAN RUTIN													
1	02	01			**Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**												44.793.716.905	
											Nilai Sakip PD (pakai angka)	76					44.793.716.905	
1	02	01	1.01		**Kegiatan : Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**												50.000.000	
															Jumlah dok perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	13	50.000.000	
1	02	01	1.01	01	Sub Kegiatan : Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah												10.500.000	
													Jumlah dok perencanaan Renstra/Renja PD	3			10.500.000	
1	02	01	1.01	02	Sub Kegiatan : Penyusunan Program dan kegiatan perangkat daerah dalam dokumen perencanaanan												10.500.000	
													Jumlah RKA/DPA yang tersusun	3			10.500.000	
1	02	01	1.01	03	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah												5.500.000	
													Jumlah dok evaluasi PD (DALEV)	4			5.500.000	
1	02	01	1.01	04	Sub Kegiatan : Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah												18.000.000	
													jumlah kesepakatan Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan PD	1			18.000.000	
1	02	01	1.01	05	Sub Kegiatan : Evaluasi kinerja Perangkat Daerah												5.500.000	
													Jumlah dok Evalusi kinerja PD (LKPJ, LAKIP, LPPD)	3			5.500.000	
1	02	01	1.02		**Kegiatan : Administrasi Keuangan**												38.655.734.405	
											Survey kepuasan pelayanan internal	80%			Survey kepuasan pelayanan keuangan	85%	-	
		02	1.03	01	Sub Keg:Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												38.655.734.405	
													jumlah ASN yang terima gaji dan tunjangan	1			-	
1	02	01	1.02	05	Sub Keg:Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan												-	
													Jumlah laporan pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemerikasaan	1			-	
1	02	01	1.02	07	Sub Keg:Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran												-	
													Jumlah laporan keuangan bulanan Semesteran	1			-	
1	02	01	1.03		**Kegiatan 3 : Administrasi umum**												6.087.982.500	
											survey kepuasan pelayanan internal (angka)	85%			survey kepuasan pelayanan umum (angka)	95%	-	
1	02	01	1.03	01	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa surat menyurat												-	
																	-	
													Jumlah Surat/Barang yang dikirim (tahun)	12 bulan				
													Jumlah Materai	12 bulan				
1	02	01	1.03	02	Sub Kegiatan :Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik												1.870.000.000	
													Jumlah tagihan listrik (tahun)	12 bulan			1.620.000.000	
													Jumlah tagihan komunikasi (tahun)	12 bulan			250.000.000	
1	02	01	1.03	03	Sub Kegiatan : Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor												980.200.000	
													jum lah jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1 paket			-	
													jumlah tenaga keamanan/satpam kantor (tahun)	26 orang			980.200.000	
1	02	01	1.03	06	Sub Kegiatan : Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/oprasional												565.500.000	
													jumlah kendaraan operasional yang dipelihara (unit)	.6 R4 ,1 R3, 2 R			-	
													Jumlah tenaga sopir (orang)	15 orang			565.500.000	
1	02	01	1.03	07	Sub Kegiatan : Penyediaan jasa Administrasi keuangan												2.420.270.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Keterangan
								Kabupaten/Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan			
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
													Jumlah pengelola administrasi keuangan (bulan)	42 orang			271.370.000	
													Jumlah pramubakti	57 orang			2.148.900.000	
1	02	01	1.03	08	Sub Kegiatan : Penyediaan jasa kebersihan kantor												-	
													Jumlah pengelola jasa kebersihan kantor	1 paket				
1				09	Penyedian jasa perbaikan peralatan kantor												-	
													jumlah peralatan kerja yg diperbaiki	1 paket				
1	02	01	1.03	10	Sub Kegiatan : Penyediaan alat tulis kantor												-	
													jumlah jenis ATK yang dibeli	1 paket				
1	02	01	1.03	11	Sub Kegiatan : Penyediaan barang cetak dan penggandaan												-	
													jumlah barang cetak	1 paket				
													Jumlah penggandaan	1 paket				
1	02	01	1.03	12	Sub Kegiatan : Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor												-	
													Jumlah komponen instalasi listrik	1 paket				
1	02	01	1.03	13	Sub Kegiatan : Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor												-	
													jumlah peralatan kantor	1 paket				
													jumlah perlengkapan kantor	1 paket				
1	02	01	1.03	14	Sub Kegiatan : Penyediaan peralatan rumah tangga												-	
													Jumlah peralatan rumah tangga	1 paket				
1	02	01	1.03	16	Sub Kegiatan : Penyediaan bahan logistik kantor												-	
													jumlah bahan logistik kantor (tahun)	1 paket				
1	02	01	1.03	17	Sub Kegiatan : Penyediaan makan dan minum												-	
													Jumlah makan dan minum Tamu rapat (tahun)	1 paket				
													Jumlah makan dan minum tamu (tahun)	1 paket				
1	02	01	1.03	18	Sub Kegiatan : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah												252.012.500	
													jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah (tahun)	12 bulan			200.000.000	
													Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah (tahun)	12 bulan			52.012.500	
1	02	01	1.03	23	Sub Kegiatan : Pengadaan perlengkapan gedung kantor												-	
													jumlah perlengkapan gedung kantor	6 unit				
1	02	01	1.03	25	Sub Kegiatan : Pengadaan peralatan gedung kantor												-	
													Jumlah peralatan gedung kantor	8 unit				
1	02	01	1.03	26	Sub Kegiatan : Pengadaan mebeluer												-	
													jumlah mebeleur	10 unit				
1	02	01	1.03	31	Sub Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/Oprasional												-	
													Jumlah mobil oprasional yang dipelihara	16 R4,1 R3,2 R2				
													Jumlah BBM kendaraan	16 R4,1 R3,2 R2				
1	02	01	1.03	35	Sub Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor												-	
													jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	1 paket				
													Jumlah BBM Genset dan incinerator	2 paket				
1	**02**	**01**	**1.04**		**Kegiatan : Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**												-	
															survey kepuasan pelayanan kepegawaian (angka)	**78%**		
1	02	01	1.04	09	Sub Kegiatan : Pendidikan dan pelatihan formal												-	
													jumlah pegawai yang ikut pendidikan dan pelatihan formal	1 paket			-	
1	**02**	**02**			**Program Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat**												**91.276.895.990**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Keterangan
								Kabupaten/Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan			
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
											Persentase Pemenuhan kesehatan rumah sakirt terakreditasi paripurna	80%						
1	02	02	1.01		Kegiatan Peyediaan fasilitas pelayanan,sarana,Prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan,UKM dan UKM Rujukan tingkat daerah Provinsi												63.700.254.190	
															persentase pelayanan kesehatan rumah sakit rujukan	80%	53.924.810.009	
1	02	02	1.02	02	Pembangunan fasilitas kesehatan lainya												9.244.709.300	PT.SMI + APBD
													Jumlah gedung	1 gedung			3.244.709.300	
													Jumlah gedung jenazah B RS	1 gedung			2.400.000.000	
													Jumlah gedung jenazah B RS Lanjutan	I gedung			3.600.000.000	
1	02	02	1.02	03	Pengembangan Rumah Sakit												1.900.000.000	
													Jumlah Kemitraan Pelayanan Rumah Sakit	4 Kemitraan			1.200.000.000	
													jumlah dokumen	1 dokumen			700.000.000	PT.SMI
1	2	02	1,01	10	Sub Keg: Pengadaaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik												41.512.500.000	
													Jumlah Pengadaan alat kesehatan	1 Paket			162.500.000	
													Jumlah pengadaan alat kesehatan (DAK)	1 Paket			350.000.000	
													Jumlah pengadaan alat kesehatan	1 Paket			41.000.000.000	PT.SMI
1	02	02	1,01	11	Sub Keg:Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan												2.300.000.000	
													Jumlah sarana yang tersedia di rumah sakit	1 Paket			-	
													Jumlah pengadaan furniture gedung C	1 Paket			2.300.000.000	PT.SMI
1	02	02	1,01	12	Sub Keg :Pengadaan prasarana fasilitas layanan kesehatan												50.000.000	
													Jumlah pengadaaan prasarana Keperawatan	1 Paket			50.000.000	
													Jumlah Pakaian Kerja Dokter	1 Paket			-	
1	02	02	1,01	13	Sub Keg: Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi												167.500.000	
													Jumlah pemeliharaan alat kalibrasi	1 paket			167.500.000	
													Jumlah Pengadaan alat kalibrasi	1 paket			350.000.000	
1	02	02	1,01	16	Sub Keg :Pengadaaan Barang Penunjang operasional Rumah Sakit												7.000.000.000	
													Jumlah Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	1 Paket			7.000.000.000	
													Jumlah paket pengadaan laundry	1 Paket				
1	02	02	1,01	17	Sub Keg :Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan												717.500.000	
													Persentase Pemeliharaan alat kesehatan/penunjang Medik kesehatan	1 Paket			717.500.000	
1	02	02	1,01	18	Sub Keg:Pemeliharaan sarana fasilitas layanan kesehatan												324.150.000	
													persentase pemeliharaan sarana rumah sakit	1 Paket			324.150.000	
1	02	02	1,01	19	Sub Keg:Pemeliharaan Prasarana fasilitas layanan kesehatan												483.894.890	
													persentase pemeliharaan prasarana rumah sakit	1 Paket			483.894.890	
1	02	02	1.02		Keg : Penyediaan layanan kesehatan untuk UKP rujukan,UKM rujukan tingkat daerah provinsi												27.000.000.000	
															persentase pelayanan kesehatan rumah sakit rujukan	80%	27.000.000.000	
1	02	02	1.02	22	Sub Keg:Operasional pelayanan rumah sakit												27.000.000.000	
													Jumlah pegawai yang dibiayai dana BLUD	92 orang			2.883.726.400	
													Jumlah operasional RS yang dibiayai dana BLUD	6 Paket			20.937.473.600	
													Jumlah sarana dan prasarana dana BLUD	2 Paket			3.178.800.000	
1	02	02	1.03		Keg: Penyelenggaraaan sistem informasi kesehatan secara Terintegrasi												50.991.800	
															persentase pelayanan kesehatan rumah sakit rujukan	80%	50.991.800	
1	02	02	1.03	03	Sub Keg:Pengadaaan alat/perangkat sistem informasi kesehatan dan jaringan internet												50.991.800	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Keterangan
								Kabupaten/Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan			
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
													Jumlah Aplikasi Asuhan kweperawatan terintegrasi	1 Aplikasi				
1	02	02	1.04		**Keg: Penertiban izin rumah sakit kelas B dan Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah Provinsi**												**525.650.000**	
															persentase pelayanan kesehatan rumah sakit rujukan	**80%**	**525.650.000**	
1	02	02	1.04	03	Sub Keg:Peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan												525.650.000	
													Jumlah SOP Keperawatan	1 Paket			9.800.000	
													jumalah standar asuhan keperawatan	1 Paket			8.700.000	
													Jumlah dokumen evaluasi standar pelayanan teknis keperawatan	1 Paket			7.150.000	
													Jumlah dokumenperencanaan perbaikan strategis (PPS) yang dibagi dengan total kebutuhan PPS	1 dokumen			500.000.000	
1	**02**	**03**			**Prog :Peningkatan kapasitas sumberdaya Manusia Kesehatan**												**14.431.812.000**	
											persentase kapasitas sumber daya manusia kesehatan	80%					14.431.812.000	
1	02	03	1.01		**Keg:Perencanaan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi**												**14.398.787.000**	
															persentase SDM Kesehatan UKM dan UKP Provinsi	**80%**	14.398.787.000	
1	02	03	1.01	1	Sub Keg:Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan												14.398.787.000	
													jumlah sumber daya manusia kesehatan	213 orang			14.398.787.000	
					Keg: Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah provinsi												**33.025.000**	
															jumlah mutu dan kompetensi sumber daya manusia keperawatan	**3 Paket**	33.025.000	
1	02	03	1.01	01	Sub Keg:Peningkatan kompetisi dan kualifikasi sumberdaya Manusia											170 orang	-	
													Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan	6 orang		6 orang		
													Jumlah peserta pengembangan kepribadian keperawatan	129 orang		129 orang	-	
													Jumlah peserta in house training keperawatan	35 orang		35 orang	-	
1	02	03	1.01	02	Sub Keg:Pembinaaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan											3 Paket	33.025.000	
													Jumlah pembinaan etika keperawatan	1 paket		1 Paket	10.000.000	
													Jumlah pelaksanaan Audit keperawatan	1 Paket		1 Paket	10.000.000	
													Jumlah penilaian perawat dan bidan teladan	1 paket		1 Paket	13.025.000	
																	150.502.424.895	

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2021

PERANGKAT DAERAH :UPTD RSJD DINAS KESEHATAN

KODE					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi					Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
						Prioritas Daerah	Sasaran daerah	Kabupaten	Kota	Kelurahan	Hasil Program/ Indikator Program		Hasil Kegiatan/ Indikator Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan/ Indikator Sub kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1					**Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**															
1	02				**Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan**												**51.650.099.036**	**90.482.558.238**		
1	02	01			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**												**30.533.099.036**	**69.365.558.238**		
											Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76					**60.000.000**	**60.000.000**		
1	02	01	1		Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												**60.000.000**	**60.000.000**		
													Jumlah dok perencanaan dan evaluasi	10 dokumen			**60.000.000**	**60.000.000**		
1	02	01	1	01	Sub Kegiatan Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah												20.000.000	20.000.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Bangka	Sungailiat	Paritpadang					Jumlah dok perencanaan Renstra/Renja PD	4 Dokumen	20.000.000	20.000.000		
1	02	01	1	02	Sub Kegiatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan												20.000.000	20.000.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Bangka	Sungailiat	Paritpadang					Jumlah RKA/DPA yang tersusun	2 Dokumen	20.000.000	20.000.000		
1	02	01	1	03	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah												10.000.000	10.000.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Bangka	Sungailiat	Paritpadang					Jumlah dok evaluasi PD	1 dokumen	10.000.000	10.000.000		
1	02	01	1	05	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												10.000.000	10.000.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Bangka	Sungailiat	Paritpadang					Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah (LAKIP,LKPJ,LPPD)	3 Dokumen	10.000.000	10.000.000		
1	02	01									Survey Kepuasan Pelayanan Internal	80					30.473.099.036	69.305.558.238		
1	02	01	1		Kegiatan Administrasi Keuangan												24.810.703.345	63.060.586.547		
								Bangka	Sungailiat	Paritpadang			Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	1 Dokumen						
1	02	01	1	01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												24.775.703.345	63.025.586.547		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Bangka	Sungailiat	Paritpadang					jumlah ASN yang terima gaji dan tunjangan	230 orang	24.775.703.345	63.025.586.547		
1	02	01	1	07	Sub Kegiatan Penyusunan laporan keuangan bulanan/semesteran												25.000.000	25.000.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Bangka	Sungailiat	Paritpadang					Jumlah laporan keuangan bulanan/ Semesteran	14 laporan	25.000.000	25.000.000		
1	02	01	1	09	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun												10.000.000	10.000.000		

						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Bangka	Sungailiat	Paritpadang					Jumlah Laporan keuangan akhir tahun yang dibuat	1 laporan	10.000.000	10.000.000		
1	02	01	1		Kegiatan Administrasi Umum												5.662.395.691	6.244.971.691		
													Survey kepuasan pelayanan umum	77						
1	02	01	1	01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat												726.300.000	727.376.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Bangka	Sungailiat	Paritpadang					Jumlah barang/surat yang dikirim	12 bulan	1.924.000	3.000.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Bangka	Sungailiat	Paritpadang					Jumlah Materai	12 bulan	8.076.000	8.076.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Bangka	Sungailiat	Paritpadang					Jumlah Tenaga Pramubakti	19 orang	716.300.000	716.300.000		
1	02	01	1	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikai Sumber Daya Air dan Listrik												600.000.000	600.000.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Bangka	Sungailiat	Paritpadang					Jumlah bulan tagihan rekening listrik, air, telepon/fax, internet,tv kabel, virtual meeting yang	12 Bulan	600.000.000	600.000.000		
1	02	01	1	03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor												595.500.000	595.500.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Bangka	Sungailiat	Paritpadang					Jumlah jasa peralatan dan perlenggkapan kantor	12 bulan	30.000.000	30.000.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Bangka	Sungailiat	Paritpadang					Jumlah tenaga keamanan/satpam kantor	15 orang	565.500.000	565.500.000		
1	02	01	1	06	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/operasional												196.000.000	197.500.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Bangka	Sungailiat	Paritpadang					Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	18 unit	7.500.000	9.000.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Bangka	Sungailiat	Paritpadang					Jumlah Tenaga Sopir	5 orang	188.500.000	188.500.000		
1	02	01	1	07	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan												329.595.691	329.595.691		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Bangka	Sungailiat	Paritpadang					Jumlah pengelola administrasi keuangan yang	25 orang	329.595.691	329.595.691		
1	02	01	1	08	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor												1.200.000.000	1.600.000.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Bangka	Sungailiat	Paritpadang					Jumlah pengelola jasa kebersihan kantor	1 tahun	1.200.000.000	1.600.000.000		
1	02	01	1	09	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan peralatan kerja												90.000.000	150.000.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Bangka	Sungailiat	Paritpadang					jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	12 bulan	90.000.000	150.000.000		
1	02	01	1	10	Sub Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor												200.000.000	200.000.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Bangka	Sungailiat	Paritpadang					Jumlah jenis Alat Tulis Kantor yang dibeli	38 jenis	200.000.000	200.000.000		
1	02	01	1	11	Sub Kegiatan Penyediaan barang cetak dan penggandaan												230.000.000	230.000.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Bangka	Sungailiat	Paritpadang					Jumlah barang cetak	1500 eksemplar	150.000.000	150.000.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Bangka	Sungailiat	Paritpadang					Jumlah penggandaan	229000 eksemplar	80.000.000	80.000.000		
1	02	01	1	12	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor												80.000.000	80.000.000		

						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Bangka	Sungailiat	Paritpadang					Jumlah Komponen instalasi listrik yang tersedia	20 jenis	80.000.000	80.000.000		
1	02	01	1	13	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor												150.000.000	150.000.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Bangka	Sungailiat	Paritpadang					jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	8 jenis	150.000.000	150.000.000		
1	02	01	1	14	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga												90.000.000	90.000.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Bangka	Sungailiat	Paritpadang					Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	30 unit	90.000.000	90.000.000		
1	02	01	1	15	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang Undangan												30.000.000	30.000.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Bangka	Sungailiat	Paritpadang					Jumlah Bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang	2570 eksemplar	30.000.000	30.000.000		
1	02	01	1	16	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor												80.000.000	80.000.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Bangka	Sungailiat	Paritpadang					Jumlah Bahan Logistik kantor yang tersedia	600 unit	80.000.000	80.000.000		
1	02	01	1	17	Sub Kegiatan Penyediaan Makanan dan minuman												55.000.000	105.000.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Bangka	Sungailiat	Paritpadang					Jumlah Makanan dan minuman tamu yang tersedia	200 pax	15.000.000	55.000.000		
															Jumlah Makanan dan minuman rapat yang tersedia	2600 pax	40.000.000	50.000.000		
1	02	01	1	18	Sub KegiatanRapat rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah												310.000.000	410.000.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Bangka	Sungailiat	Paritpadang					Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang tersedia	60 kali	210.000.000	310.000.000		
															Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang tersedia	116 kali	100.000.000	100.000.000		
1	02	01	1	23	Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan gedung kantor												75.000.000	75.000.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Bangka	Sungailiat	Paritpadang					Jumlah Perlengkapan gedung kantor yang diadakan	5 jenis	75.000.000	75.000.000		
1	02	01	1	25	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan gedung kantor												75.000.000	75.000.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Bangka	Sungailiat	Paritpadang					Jumlah Peralatan gedung kantor yang diadakan	2 jenis	75.000.000	75.000.000		
1	02	01	1	26	Sub Kegiatan Pengadaan Meubelair												65.000.000	65.000.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Bangka	Sungailiat	Paritpadang					Jumlah Meubelair yang diadakan	5 jenis	65.000.000	65.000.000		
1	02	01	1	29	Sub Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor												150.000.000	150.000.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Bangka	Sungailiat	Paritpadang					Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 Unit	150.000.000	150.000.000		
1	02	01	1	31	Sub Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional												230.000.000	230.000.000		

						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Bangka	Sungailiat	Paritpadang					Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara selama 12 bulan	18 Unit	230.000.000	230.000.000		
1	02	01	1	33	Sub Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor												30.000.000	30.000.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Bangka	Sungailiat	Paritpadang					Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	3 jenis	30.000.000	30.000.000		
1	02	01	1	35	Sub Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor												75.000.000	75.000.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Bangka	Sungailiat	Paritpadang					Jumlah BBM Genset	6800 liter	75.000.000	75.000.000		
1	02	02			**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**												**12.572.000.000**	**12.572.000.000**		
						Pembangunan Kesehatan	Peningkatan pelayanaan kesehatan masyarakat				Persentase masyarakat/perorangan yang mendapat upaya pelayanan kesehatan	80					**12.572.000.000**	**12.572.000.000**		
1	02	02	1		Kegiatan PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN, SARANA PRASARANA DAN A;AT KESEHATAN UNTUK UKP RUJUKAN, UKM DAN UKM RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI												**1.055.000.000**	**1.055.000.000**		
													Persentase Fasilitas pelayanan,sarana prasarana dan alat kesehatan yang disediakan	85			**1.055.000.000**	**1.055.000.000**		
1	02	02	1	03	Sub Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit												500.000.000	500.000.000		
						Pembangunan Kesehatan	Peningkatan pelayanaan kesehatan masyarakat	Bangka	Sungailiat	Paritpadang					Jumlah gedung rawat inap yang dibangun	1 gedung rawat inap	500.000.000	500.000.000		
1	02	02	1	03	Sub Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit (DAK)												0	0		
						Pembangunan Kesehatan	Peningkatan pelayanaan kesehatan masyarakat	Bangka	Sungailiat	Paritpadang					Jumlah gedung rawat jalan sesuai standar	1 Gedung rawat jalan	0	0		
1	02	02	1	09	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Peme;iharaan Rumah Sakit												150.000.000	150.000.000		
						Pembangunan Kesehatan	Peningkatan pelayanaan kesehatan masyarakat	Bangka	Sungailiat	Paritpadang					Jumlah bangunan rumah sakit yang direhabilitasi	8 bangunan rumah sakit	150.000.000	150.000.000		
1	02	02	1	10	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan												0	0		
						Pembangunan Kesehatan	Peningkatan pelayanaan kesehatan masyarakat	Bangka	Sungailiat	Paritpadang					Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang	1 unit alat kedokteran	0	0		
1	02	02	1	10	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan(DAK)												-	-		
						Pembangunan Kesehatan	Peningkatan pelayanaan kesehatan masyarakat	Bangka	Sungailiat	Paritpadang					Jumlah alat CSSD yang dibeli	1 unit	-	-		
						Pembangunan Kesehatan	Peningkatan pelayanaan kesehatan masyarakat	Bangka	Sungailiat	Paritpadang					Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang	7 jenis alat kedokteran	-	-		
1	02	02	1	13	Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi												100.000.000	100.000.000		
						Pembangunan Kesehatan	Peningkatan pelayanaan kesehatan masyarakat	Bangka	Sungailiat	Paritpadang					Jumlah alat kesehatan yang terkalibrasi	10 unit	100.000.000	100.000.000		
1	02	02	1	14	Sub Kegiatan Pengadaan Bahan habis pakai lainnya (Sprei, Handuk dam habis pakai lainnya)												150.000.000	150.000.000		

						Pembangunan Kesehatan	Peningkatan pelayanaan kesehatan masyarakat	Bangka	Sungailiat	Paritpadang					Jumlah sprei, handuk dan pakaian habis pakai yang dibeli	5 jenis	150.000.000	150.000.000		
1	02	02	1	15	Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan /Peralatan Laboratorium Kesehatan												80.000.000	80.000.000		
						Pembangunan Kesehatan	Peningkatan pelayanaan kesehatan masyarakat	Bangka	Sungailiat	Paritpadang					Jumlah alat kesehatan /Peralatan Laboratorium yang dibeli dan	10 jenis alat yang dibeli dan dipelihara	80.000.000	80.000.000		
1	02	02	1	17	Sub Kegiatan Pemeliharaan alat kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan												75.000.000	75.000.000		
						Pembangunan Kesehatan	Peningkatan pelayanaan kesehatan masyarakat	Bangka	Sungailiat	Paritpadang					Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara	14 jenis alat yang dipelihara	75.000.000	75.000.000		
1	02	02	1		Kegiatan PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKP RUJUKAN, UKM DAN UKM RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI												**11.105.000.000**	**11.105.000.000**		
													Persentase Pelayanan kesehatan terhadap Upaya Kesehatan Masyarakat ,Perorangan dan	80			**11.105.000.000**	**11.105.000.000**		
1	02	02	1	08	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan												130.000.000	130.000.000		
						Pembangunan Kesehatan	Peningkatan pelayanaan kesehatan masyarakat	Bangka	Sungailiat	Paritpadang					Jumlah Limbah Rumah Sakit yang dikelola selama 1 tahun	1 tahun	130.000.000	130.000.000		
1	02	02	1	09	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan												150.000.000	150.000.000		
						Pembangunan Kesehatan	Peningkatan pelayanaan kesehatan masyarakat	Bangka	Sungailiat	Paritpadang					Jumlah sekolah mendapat penyuluhan	60 sekolah	100.000.000	100.000.000		
						Pembangunan Kesehatan	Peningkatan pelayanaan kesehatan masyarakat	Bangka	Sungailiat	Paritpadang					jumlah terapi supportif pada keluarga pasien	40 kali	50.000.000	50.000.000		
1	02	02	1	13	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan masalah kesehatan jiwa (ODMK)												625.000.000	625.000.000		
						Pembangunan Kesehatan	Peningkatan pelayanaan kesehatan masyarakat	Bangka	Sungailiat	Paritpadang					Jumlah kunjungan ke keluarga pasien sebelum pasien pulang (discarge planning)	20 kali	25.000.000	25.000.000		
						Pembangunan Kesehatan	Peningkatan pelayanaan kesehatan masyarakat	Bangka	Sungailiat	Paritpadang					jumlah pasien dengan bebas pasung	15 psien	25.000.000	25.000.000		
						Pembangunan Kesehatan	Peningkatan pelayanaan kesehatan masyarakat	Bangka	Sungailiat	Paritpadang					jumlah kunjungan ke keluarga pasien (home visite)	20 kali	25.000.000	25.000.000		
						Pembangunan Kesehatan	Peningkatan pelayanaan kesehatan masyarakat	Bangka	Sungailiat	Paritpadang					jumlah rehabilitan dan pendamping yang ikut serta	40 orang	550.000.000	550.000.000		
1	02	02	1	14	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan orang dengan kecanduan NAPZA												200.000.000	200.000.000		
						Pembangunan Kesehatan	Peningkatan pelayanaan kesehatan masyarakat	Bangka	Sungailiat	Paritpadang					Jumlah Pasien yang mendapat Pelayanan Rehabilitasi mental sosial dan NAPZA	4800 orang	200.000.000	200.000.000		
1	02	02	1	22	Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit												10.000.000.000	10.000.000.000		
						Pembangunan Kesehatan	Peningkatan pelayanaan kesehatan masyarakat	Bangka	Sungailiat	Paritpadang					CRR (cost recovery rate) parsial	20%	10.000.000.000	10.000.000.000		
1	02	02	1		Kegiatan PENERBITAN IZIN RUMAH SAKIT KELAS B DAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT DAERAH PROVINSI												**412.000.000**	**412.000.000**		

													Persentase peningkatan layanan rumah sakit	83			**412.000.000**	**412.000.000**		
1	02	02	1	03	Sub Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan												412.000.000	412.000.000		
						Pembangunan Kesehatan	Peningkatan pelayanaan kesehatan masyarakat	Bangka	Sungailiat	Paritpadang					Jumlah sertifikat akreditasi yang diperolah	1 sertifikat akreditasi	282.000.000	282.000.000		
						Pembangunan Kesehatan	Peningkatan pelayanaan kesehatan masyarakat	Bangka	Sungailiat	Paritpadang					Jumlah Dokumen SOP	3 dokumen	30.000.000	30.000.000		
						Pembangunan Kesehatan	Peningkatan pelayanaan kesehatan masyarakat	Bangka	Sungailiat	Paritpadang					Jumlah dokumen panduan asuhan keperawatan	1 dokumen	20.000.000	20.000.000		
						Pembangunan Kesehatan	Peningkatan pelayanaan kesehatan masyarakat	Bangka	Sungailiat	Paritpadang					Jumlah dokumen panduan praktik klinis	1 dokumen	20.000.000	20.000.000		
						Pembangunan Kesehatan	Peningkatan pelayanaan kesehatan masyarakat	Bangka	Sungailiat	Paritpadang					Jumlah dokumen clinical pathway	1 dokumen	20.000.000	20.000.000		
						Pembangunan Kesehatan	Peningkatan pelayanaan kesehatan masyarakat	Bangka	Sungailiat	Paritpadang					Jumlah dokumen Survei Kepuasan Masyarakat	1 dokumen	20.000.000	20.000.000		
						Pembangunan Kesehatan	Peningkatan pelayanaan kesehatan masyarakat	Bangka	Sungailiat	Paritpadang					Jumlah dokumen standar pelayanan minimum	1 dokumen	20.000.000	20.000.000		
1	02	03			**Program PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**												**8.545.000.000**	**8.545.000.000**		
											Persentase peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	85					**8.545.000.000**	**8.545.000.000**		
1	02	03	1		Kegiatan PERENCANAAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESHATAN UNTUK UKM DAN UKP PROVINSI												**8.000.000.000**	**8.000.000.000**		
													Persentase sumber daya kesehatan yang tersedia untuk ukm	90			**8.000.000.000**	**8.000.000.000**		
1	02	03	1	01	Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan												8.000.000.000	8.000.000.000		
						Pembangunan Kesehatan	Peningkatan pelayanaan kesehatan masyarakat	Bangka	Sungailiat	Paritpadang					Jumlah tenaga kesehatan yang dibutuhkan sesuai standar rumah sakit kelas A	160 orang	8.000.000.000	8.000.000.000		
1	02	03	1		Kegiatan PENGEMBANGAN MUTU DAN PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TINGKAT DAERAH PROVINSI												**545.000.000**	**545.000.000**		
													Persentase pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi SDM	85			**545.000.000**	**545.000.000**		
1	02	03	1	01	Sub Kegiatan Peningkatan Kompetensi dan kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan												525.000.000	525.000.000		
						Pembangunan Kesehatan	Peningkatan pelayanaan kesehatan masyarakat	Bangka	Sungailiat	Paritpadang					Jumlah Kompetensi dan kualifikasi sumber daya manusia kesehatan yang dilasanakan	100 kali	317.000.000	317.000.000		
						Pembangunan Kesehatan	Peningkatan pelayanaan kesehatan masyarakat	Bangka	Sungailiat	Paritpadang					jumlah perawat yang di assesment	170 orang	20.000.000	20.000.000		
						Pembangunan Kesehatan	Peningkatan pelayanaan kesehatan masyarakat	Bangka	Sungailiat	Paritpadang					umlah perawat yang mendapat pelatihan BTCLS	36 orang	108.000.000	108.000.000		
						Pembangunan Kesehatan	Peningkatan pelayanaan kesehatan masyarakat	Bangka	Sungailiat	Paritpadang					Jumlah perawat yang mendapat pelatihan assesor keperawatan	25 orang	80.000.000	80.000.000		
1	02	03	1	02	Sub Kegiatan Pembinaan dan pengawasan Sumber Daya Manusia												20.000.000	20.000.000		
						Pembangunan Kesehatan	Peningkatan pelayanaan kesehatan masyarakat	Bangka	Sungailiat	Paritpadang					jumlah laporan audit keperawatan	1 laporan	20.000.000	20.000.000		

Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2021

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1					URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												464.541.902.924	510.996.093.216		
1	3				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG												464.541.902.924	510.996.093.216		
1	3	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH												26.390.015.000	29.029.016.500		
											Nilai SAKIP PD	80					750.000.000	825.000.000		
1	3	1	1.01		Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												750.000.000	825.000.000		
								Provinsi					Jumlah dok perencanaan dan evaluasi	17 DOKUMEN			750.000.000	825.000.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
1	3	1	1.01	1	Subkegiatan Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah												57.800.000	63.580.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Provinsi							Jumlah dok perencanaan Renstra/Renja PD	3 DOKUMEN	57.800.000	63.580.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
1	3	1	1.01	2	Subkegiatan Penyusunan Program dan kegiatan perangkat daerah dalam dokumen perencananan												60.800.000	66.880.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Provinsi							Jumlah RKA/DPA yang tersusun	4 DOKUMEN	60.800.000	66.880.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
1	3	1	1.01	3	Subkegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah												185.760.000	204.336.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Provinsi							Jumlah dok evaluasi PD (DALEV)	4 DOKUMEN	185.760.000	204.336.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
1	3	1	1.01	4	Subkegiatan Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah												354.540.000	389.994.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Provinsi							jumlah kesepakatan Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan PD	2 DOKUMEN	354.540.000	389.994.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
1	3	1	1.01	5	Subkegiatan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah												91.100.000	100.210.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Provinsi							Jumlah dok Evalusi kinerja PD (LKPJ, LAKIP, LPPD dan ATA)	4 DOKUMEN	91.100.000	100.210.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
											Survey Kepuasan Pelayanan Internal	80					25.640.015.000	28.204.016.500		
1	3	1	1.02		Kegiatan Administrasi Keuangan												19.788.980.000	21.767.878.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Provinsi					Survey kepuasan pelayanan keuangan (angka)	80			19.788.980.000	21.767.878.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
1	3	1	1.02	1	Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												19.750.000.000	21.725.000.000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Provinsi								jumlah ASN yang terima gaji dan tunjangan	170 orang	19.750.000.000	21.725.000.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
1	3	1	1.02	7	Subkegiatan Penyusunan laporan keuangan bulanan/semesteran												24.350.000	26.785.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Provinsi								Jumlah laporan keuangan bulanan Semesteran	14 Laporan	24.350.000	26.785.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
1	3	1	1.02	8	Subkegiatan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun												14.630.000	16.093.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Provinsi								jumlah laporan keuangan akhir tahun	2 laporan	14.630.000	16.093.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
1	3	1	1.03		Kegiatan Administrasi umum												5.697.775.000	6.267.552.500		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Provinsi					survey kepuasan pelayanan umum (angka)	80				5.697.775.000	6.267.552.500	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
1	3	1	1.03	1	Subkegiatan Penyediaan Jasa surat menyurat												24.300.000	26.730.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Provinsi								Jumlah Materai	4800 lembar	24.300.000	26.730.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
1	3	1	1.03	2	Subkegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik												404.400.000	444.840.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Provinsi								Tagihan rekening listrik, air, telepon/fax, tv kabel, virtual meeting yang dibayarkan	12 bulan	404.400.000	444.840.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
1	3	1	1.03	3	Subkegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor												226.200.000	248.820.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Provinsi								Jumlah tenaga keamanan/satpam kantor	6 orang	226.200.000	248.820.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
1	3	1	1.03	6	Subkegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/oprasional												715.700.000	787.270.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Provinsi								jumlah kendaraan operasional yang dipelihara	19 unit	112.500.000	123.750.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Provinsi								Jumlah tenaga sopir	16 orang	603.200.000	663.520.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
1	3	1	1.03	7	Subkegiatan Penyediaan jasa Administrasi keuangan												262.710.000	288.981.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Provinsi								Jumlah pengelola administrasi keuangan	24 orang	262.710.000	288.981.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
1	3	1	1.03	8	Subkegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor												244.200.000	268.620.000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Provinsi							Jumlah tenaga kebersihan/pramubakti	6 orang	226.200.000	248.820.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
															Jumlah jenis bahan dan peralatan kebersihan	10 jenis	18.000.000	19.800.000		
1	3	1	1.03	9	Subkegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja												15.000.000	16.500.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Provinsi							jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	5 jenis	15.000.000	16.500.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
1	3	1	1.03	10	Subkegiatan Penyediaan alat tulis kantor												62.500.000	68.750.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Provinsi							jumlah jenis ATK yang dibeli	20 jenis	62.500.000	68.750.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
1	3	1	1.03	11	Subkegiatan Penyediaan barang cetak dan penggandaan												69.000.000	75.900.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Provinsi							jumlah barang cetak	eksemplar	34.000.000	37.400.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Provinsi							Jumlah penggandaan	1 paket	35.000.000	38.500.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
1	3	1	1.03	12	Subkegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor												88.000.000	96.800.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Provinsi							Jumlah komponen instalasi listrik	10 jenis	88.000.000	96.800.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
1	3	1	1.03	13	Subkegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor												743.000.000	817.300.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Provinsi							jumlah jenis peralatan kantor	10 jenis	743.000.000	817.300.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
1	3	1	1.03	15	Subkegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan												25.000.000	27.500.000		
															jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5000 eksemplar	25.000.000	27.500.000		
1	3	1	1.03	16	Subkegiatan Penyediaan bahan logistik kantor												20.350.000	22.385.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Provinsi							jumlah bahan logistik kantor	673 unit	20.350.000	22.385.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
1	3	1	1.03	17	Subkegiatan Penyediaan makan dan minum												72.000.000	79.200.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Provinsi							Jumlah makan dan minum Tamu	20 pax	34.500.000	37.950.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Provinsi							Jumlah makan dan minum rapat	1400 pax	37.500.000	41.250.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
1	3	1	1.03	18	Subkegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah												479.955.000	527.950.500		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Provinsi							jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah	200 kali	240.025.000	264.027.500	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Provinsi							Jumlah koordinasi dan konsultasi luar daerah	36 kali	239.930.000	263.923.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
1	3	1	1.03	23	Subkegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor												600.000.000	660.000.000		
					Pagar kantor Dinas PUPR										Jumlah perlengkapan gedung kantor yang tersedia	1 paket	600.000.000	660.000.000		
1	3	1	1.03	26	Subkegiatan Pengadaan mebeleur												35.000.000	38.500.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Provinsi							Jumlah mebelair	10 unit	35.000.000	38.500.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
1	3	1	1.03	29	Subkegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor												1.254.000.000	1.379.400.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Provinsi							jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 unit	500.000.000	550.000.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
															jumlah operator jembatan	20 orang	754.000.000	829.400.000		
1	3	1	1.03	31	Subkegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/Oprasional												149.960.000	164.956.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Provinsi							Jumlah mobil oprasional yang dipelihara	12 unit	149.960.000	164.956.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
1	3	1	1.03	33	Subkegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor												61.000.000	67.100.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Provinsi							Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	1 paket	61.000.000	67.100.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
1	3	1	1.03	35	Subkegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor												22.000.000	24.200.000		
															jumlah bbm genset	2000 liter	22.000.000	24.200.000		
1	3	1	1.03	41	Subkegiatan Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional												123.500.000	135.850.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Provinsi							jumlah kendaraan dinas/operasional yang direhabilitasi	10 unit	123.500.000	135.850.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
1	3	1	1.04		Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur												153.260.000	168.586.000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Provinsi					survey kepuasan pelayanan kepegawaian (angka)	80			153.260.000	168.586.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
1	3	1	1.04	9	Subkegiatan Pendidikan dan pelatihan formal												90.000.000	99.000.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Provinsi							jumlah pegawai yang ikut pendidikan dan pelatihan formal	50 orang	90.000.000	99.000.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
1	3	1	1.04	11	Subkegiatan Bimbingan teknis Implementasi Peraturan perudang-undangan												63.260.000	69.586.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Provinsi							jumlah peserta bimbingan teknis peraturan perundang-undangan	50 orang	63.260.000	69.586.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
1	3	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI												399.985.000	439.983.500		
											Rasio ketersediaan penyelenggaraan jasa konstruksi	96,09%					399.985.000	439.983.500		
1	3	11	1.01		Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi												289.135.000	318.048.500		
						Pengembangan Energi dan Infrastruktur Kewilayahan	Meningkatkan ketersedian infrastruktur pekerjaan Umum	Provinsi					Jumlah penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi	1 penyelenggaraan			289.135.000	318.048.500	Meningkatkan ketersedian infrastruktur pekerjaan Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
1	3	11	1.01	4	Subkegiatan Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi												289.135.000	318.048.500		
						Pengembangan Energi dan Infrastruktur Kewilayahan	Meningkatkan ketersedian infrastruktur pekerjaan Umum	Provinsi							Jumlah Pelaksanaan Optimalisasi Mobile Training Unit (MTU)	7 sesi	289.135.000	318.048.500	Meningkatkan ketersedian infrastruktur pekerjaan Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
1	3	11	1.02		Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi												110.850.000	121.935.000		
						Pengembangan Energi dan Infrastruktur Kewilayahan	Meningkatkan ketersedian infrastruktur pekerjaan Umum	Provinsi					Jumlah Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	1 penyelenggaraan			110.850.000	121.935.000	Meningkatkan ketersedian infrastruktur pekerjaan Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
1	3	11	1.02	5	Subkegiatan Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi												110.850.000	121.935.000		
						Pengembangan Energi dan Infrastruktur Kewilayahan	Meningkatkan ketersedian infrastruktur pekerjaan Umum	Provinsi							Jumlah data dan informasi Jasa Konstruksi yang tersedia	1 layanan	110.850.000	121.935.000	Meningkatkan ketersedian infrastruktur pekerjaan Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
1	3	2			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR												29.700.000.000	32.670.000.000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
											Persentase peningkatan luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air	1%					8.554.762.500	9.410.238.750		
1	3	2	1.01		Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota												26.170.830.000	28.787.913.000		
						Pengembangan Energi dan Infrastruktur Kewilayahan	Meningkatkan ketersedian infrastruktur pekerjaan Umum	Provinsi					Persentase peningkatan luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air	1%			26.170.830.000	28.787.913.000	Meningkatkan ketersedian infrastruktur pekerjaan Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
1	3	2	1.01	3	Subkegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama												774.730.000	852.203.000		
						Pengembangan Energi dan Infrastruktur Kewilayahan	Meningkatkan ketersedian infrastruktur pekerjaan Umum								Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	4 dokumen	774.730.000	852.203.000	Meningkatkan ketersedian infrastruktur pekerjaan Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
					Pemutakhiran data Sistem Infomasi Sungai Pantai Bangka Belitung			Provinsi							jumlah rencana pemuiktahiran data pengaman pantai bangka	1 Dokumen	91.310.000	100.441.000		
					penyusunan DED pengaman pantai burung mandi			Belitung Timur							jumlah dokumen teknis pengaman pantai burung mandi	1 Dokumen	291.060.000	320.166.000		
					Peyusunan Dokumen Lingkungan Kolam Retensi Sungai Muntok			Bangka Barat	Muntok						jumlah dokling kolam retensi sungai muntok	1 Dokumen	92.360.000	101.596.000		
					Perencanaan Teknik Talud Sungai Lenggang			Belitung Timur							jumlah rencana teknin talud sungai sungai lenggang	1 Dokumen	300.000.000	330.000.000		
1	3	2	1.01	9	Subkegiatan Pembangunan Tanggul Sungai												3.742.992.500	4.117.291.750		
						Pengembangan Energi dan Infrastruktur Kewilayahan	Meningkatkan ketersedian infrastruktur pekerjaan Umum								Panjang tanggul sungai yang terbangun (m)	2000 m	3.742.992.500	4.117.291.750	Meningkatkan ketersedian infrastruktur pekerjaan Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
					Pembangunan Tanggul sungai/drainase Primer Desa Kurnia Jaya			Belitung Timur		Desa Kurnia Jaya					panjang tanggul desa kurnia jaya yang terbangun	1000 m	1.446.360.000	1.590.996.000		
					Pembangunan Talud Sungai Air Rayak			Belitung		Desa Air Rayak					panjang talud sungai air rayak yang terbangun	500 m	1.450.272.500	1.595.299.750		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
					Pembangunan Drainase Kampung Seberang Toboali			Bangka Selatan	Toboali						panjang drainase kampung seberang toboali yang terbangun	500 m	846.360.000	930.996.000		
1	3	2	1.01	46	Subkegiatan Normalisasi/Restorasi/Pemeliharaan Sungai												3.892.040.000	4.281.244.000		
						Pengembangan Energi dan Infrastruktur Kewilayahan	Meningkatkan ketersedian infrastruktur pekerjaan Umum								Panjang sungai/kanal banjir yang dinormalisasi	84 km	3.892.040.000	4.281.244.000	Meningkatkan ketersedian infrastruktur pekerjaan Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
					Pemeliharaan Rutin Sungai se Kabupaten Belitung			Belitung							Panjang sungai/kanal banjir yang dinormalisasi se kab belitung	12 km	562.220.000	618.442.000		
					Pemeliharaan Rutin Sungai se Kabupaten Belitung Timur			Belitung Timur							Panjang sungai/kanal banjir yang dinormalisasi se kab. Beltim	12 km	562.220.000	618.442.000		
					Pemeliharaan Rutin Sungai se Kabupaten Bangka			Bangka							Panjang sungai/kanal banjir yang dinormalisasi se kab bangka	12 km	554.720.000	610.192.000		
					Pemeliharaan Rutin Sungai se Kota Pangkalpinang			Pangkalpinang							Panjang sungai/kanal banjir yang dinormalisasi se kota pangkalpinang	12 km	539.720.000	593.692.000		
					Pemeliharaan Rutin Sungai se Kabupaten Bangka Selatan			Bangka Selatan							Panjang sungai/kanal banjir yang dinormalisasi se kab. Basel	12 km	559.220.000	615.142.000		
					Pemeliharaan Rutin Sungai se Kabupaten Bangka Tengah			Bangka Tengah							Panjang sungai/kanal banjir yang dinormalisasi se kab. Bateng	12 km	554.720.000	610.192.000		
					Pemeliharaan Rutin Sungai se Kabupaten Bangka Barat			Bangka Barat							Panjang sungai/kanal banjir yang dinormalisasi se kab. Babar	12 km	559.220.000	615.142.000		
1	3	2	1.01	61	Subkegiatan Pemolaan dan Pengelolaan sumberdaya air												145.000.000	159.500.000		
					Operasional Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Belitung										1	Lembaga	70.000.000	77.000.000	Meningkatkan ketersedian infrastruktur pekerjaan Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
					Penyusunan Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air										1	Dokumen	75.000.000	82.500.000		
1	3	2	1.01								Persentase Penyediaan Air Baku	1,60%					17.616.067.500	19.377.674.250		
1	3	2	1.01	1	Subkegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan												457.230.000	502.953.000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
						Pengembangan Energi dan Infrastruktur Kewilayahan	Meningkatkan ketersedian infrastruktur pekerjaan Umum								Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	4 Dokumen	457.230.000	502.953.000	Meningkatkan ketersedian infrastruktur pekerjaan Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
					Pemuktahiran sistem informasi air baku bangka belitung			Provinsi							jumlah rencana Pemuktahiran sistem informasi air baku bangka belitung	1 dokumen	100.810.000	110.891.000		
					Penyusunan Dokumen Lingkungan Embung Ekaguna Selindung			Pangkalpinang	selindung						jumlah dokling embung ekaguna selindung	1 Dokumen	264.060.000	290.466.000		
					Penyusunan Dokumen Lingkungan Prasarana Air Baku Bukit Pading			Bangka Selatan							jumlah dokling prasarana air baku bukit pading	1 Dokumen	92.360.000	101.596.000		
1	3	2	1.01	4	Subkegiatan Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi												827.060.000	909.766.000		
						Pengembangan Energi dan Infrastruktur Kewilayahan	Meningkatkan ketersedian infrastruktur pekerjaan Umum								Jumlah Dokumen Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	827.060.000	909.766.000	Meningkatkan ketersedian infrastruktur pekerjaan Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
					Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA Wilayah Sungai Pulau Belitung			Belitung dan Belitung Timur							Jumlah Dokumen Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	827.060.000	909.766.000		
1	3	2	1.01	6	Sub Kegiatan Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya					Kab. Bangka & Bangka Tengah					Luas Bangunan Penampung air		3.831.097.500	4.214.207.250		
					Pembangunan Penampungan Sumber Air Baku Kolong Kerasak					Bangka Tengah					Luas Bangunan Penampung air	3,5 ha	3.831.097.500	4.214.207.250		
1	3	2	1.01	14	Subkegiatan Pembangunan Polder/Kolam Retensi												12.500.680.000	13.750.748.000		
						Pengembangan Energi dan Infrastruktur Kewilayahan	Meningkatkan ketersedian infrastruktur pekerjaan Umum								Luas bangunan polder/kolam retensi	3,5 ha	12.500.680.000	13.750.748.000	Meningkatkan ketersedian infrastruktur pekerjaan Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
					Pembangunan Kolam Retensi Sungai Muntok			Bangka Barat	Muntok	Kampung Ulu					Luas bangunan polder/kolam retensi	3,5 Ha	12.500.680.000	13.750.748.000		
											Rasio Irigasi	0,1					3.529.170.000	3.882.087.000		
1	3	2	1.02		Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota												3.529.170.000	3.882.087.000		
													Rasio Irigasi	0,1			3.529.170.000	3.882.087.000	Meningkatkan ketersedian infrastruktur pekerjaan Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	3	2	1.02	1	Subkegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa												2.506.337.500	2.756.971.250		
						Pengembangan Energi dan Infrastruktur Kewilayahan	Meningkatkan ketersedian infrastruktur pekerjaan Umum								Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	1 Dokumen	2.506.337.500	2.756.971.250	Meningkatkan ketersedian infrastruktur pekerjaan Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
					Perencanaan Dokumen Teknis Irigasi DI. Buleng			Bangka & Bangka Barat							jumlah rencana teknis irigasi DI Buleng	1 Dokumen	400.000.000	440.000.000		
					Perencanaan Dokumen Teknis Irigasi DI. Sungai Jeruk			Bangka							jumlah rencana teknis irigasi DI sungai jeruk	1 Dokumen	800.000.000	880.000.000		
					Perencanaan Dokumen Teknis Irigasi DI. Jeriji			Bangka Selatan							jumlah rencana teknis irigasi DI jeriji	1 Dokumen	200.000.000	220.000.000		
					DED Irigasi Jelutung II - Sukajaya												1.106.337.500	1.216.971.250		
1	3	2	1.02	21	Subkegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan												457.225.000	502.947.500		
						Pengembangan Energi dan Infrastruktur Kewilayahan	Meningkatkan ketersedian infrastruktur pekerjaan Umum								Panjang jaringan irigasi permukaan yang di OP kan	14554 m	457.225.000	502.947.500	Meningkatkan ketersedian infrastruktur pekerjaan Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
1	3	2	1.02	23	Subkegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa												250.112.500	275.123.750		
						Pengembangan Energi dan Infrastruktur Kewilayahan	Meningkatkan ketersedian infrastruktur pekerjaan Umum								Panjang jaringan irigasi rawa yang di OP kan	7000 m	250.112.500	275.123.750	Meningkatkan ketersedian infrastruktur pekerjaan Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
					Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa DI Serdang Pergam Kab.Bangka Selatan			Bangka Selatan							Panjang jaringan irigasi rawa yang di OP kan	7000 m	250.112.500	275.123.750		
1	3	2	1.02	27	Subkegiatan Operasional Unit Pengelola Irigasi												315.495.000	347.044.500		
						Pengembangan Energi dan Infrastruktur Kewilayahan	Meningkatkan ketersedian infrastruktur pekerjaan Umum								Jumlah kelembagaan pengelola irigasi yang aktif	1 lembaga	315.495.000	347.044.500	Meningkatkan ketersedian infrastruktur pekerjaan Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
					Operasional Komisi Irigasi			Provinsi							Jumlah kelembagaan pengelola irigasi yang aktif	1 Lembaga	315.495.000	347.044.500		
1	3	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN												405.091.902.924	445.601.093.216		
											Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	96,56%					405.091.902.924	445.601.093.216		
1	3	10	1.01		Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi												405.091.902.924	445.601.093.216		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
						Pengembangan Energi dan Infrastruktur Kewilayahan	Meningkatkan ketersedian infrastruktur pekerjaan Umum						Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	96,56%			405.091.902.924	445.601.093.216	Meningkatkan ketersedian infrastruktur pekerjaan Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
1	3	10	1.01	1	Subkegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jaringan Jalan												536.832.500	590.515.750		
						Pengembangan Energi dan Infrastruktur Kewilayahan	Meningkatkan ketersedian infrastruktur pekerjaan Umum								Panjang Jalan yang terencana	30,31 km	536.832.500	590.515.750	Meningkatkan ketersedian infrastruktur pekerjaan Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
					DED Jalan Perawas - Buding			Belitung							Panjang Jalan perawas-buding yang terencana	30,31 km	536.832.500	590.515.750		
																		-		
1	3	10	1.01	4	Subkegiatan Survey Kondisi Jalan Jembatan												1.280.887.000	1.408.975.700		
						Pengembangan Energi dan Infrastruktur Kewilayahan	Meningkatkan ketersedian infrastruktur pekerjaan Umum								Kondisi Jalan Jembatan dalam Kondisi Mantap	854,498 Km	1.280.887.000	1.408.975.700	Meningkatkan ketersedian infrastruktur pekerjaan Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
					Inspeksi Kondisi Jalan			Provinsi							Kondisi Jalan dalam Kondisi Mantap	850,99 Km	651.680.000	716.848.000		
					Inspeksi Kondisi Jembatan			Provinsi							Kondisi Jembatan dalam Kondisi Mantap	3,508 Km	629.207.000	692.127.700		
1	3	10	1.01	5	Pembangunan Jalan					Kota Pangkalpinang							94.500.000.000	103.950.000.000		
															Panjang Jalan yang terbangun		94.500.000.000	103.950.000.000		
					Pembangunan jalan PHNJD										panjang jalan phnjd yang terbangun	10 km	94.500.000.000	103.950.000.000		
1	3	10	1.01	6	Subkegiatan Pelebaran Jalan Menuju Standar												203.263.457.524	223.589.803.276		
						Pengembangan Energi dan Infrastruktur Kewilayahan	Meningkatkan ketersedian infrastruktur pekerjaan Umum								Panjang Jalan yang dilebarkan	10,6 Km	203.263.457.524	223.589.803.276	Meningkatkan ketersedian infrastruktur pekerjaan Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
					Pelebaran Jalan Sp. Renggiang - Gantung			Belitung Timur							Panjang Jalan sp.renggiang gantung yang dilebarkan	2 Km	9.200.000.000	10.120.000.000		
					Pelebaran Jalan Puding Besar - Saing - Kota Waringin			Bangka							Panjang Jalan puding besar saing kota waringain yang dilebarkan	2 Km	9.307.922.500	10.238.714.750		
					Pelebaran Jalan Parit Tiga - Tanjung Ru			Bangka Barat							Panjang Jalan parit tiga tanjung ruyang dilebarkan	3,6 Km	12.800.000.000	14.080.000.000		
					Pelebaran Jalan Sp. Gedong - Payung			Bangka Selatan							Panjang Jalan sp. Gedong payung yang dilebarkan	3 Km	9.307.922.500	10.238.714.750		
					Pelebaran Jalan Payung - Air Bara										Panjang Jalan yang dilebarkan	5 Km	25.000.000.000	27.500.000.000		
					Pelebaran Jalan Sp. Gedong - Payung										Panjang Jalan yang dilebarkan	4 Km	20.000.000.000	22.000.000.000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
					Pelebaran Jalan Sungai Selan - Lampur - Sp. Gedong										Panjang Jalan yang dilebarkan	3 Km	15.000.000.000	16.500.000.000		
					Pelebaran Jalan Sangku - Sp. Tempilang										Panjang Jalan yang dilebarkan	3 Km	15.000.000.000	16.500.000.000		
					Pelebaran Jalan Koba - Lubuk Besar; Lubuk Besar - Tanjung Berikat										Panjang Jalan yang dilebarkan	3 Km	15.000.000.000	16.500.000.000		
					Pelebaran Jalan Parit Tiga - Tanjung Ru										Panjang Jalan yang dilebarkan	3 km	15.000.000.000	16.500.000.000		
					Pelebaran Jalan Air Gegas - Bedengung										Panjang Jalan yang dilebarkan	2 Km	10.000.000.000	11.000.000.000		
					Peningkatan Jalan Badau-Dendang										-	-	1.873.040.387	2.060.344.425		
					Peningkatan Jalan Dalam Komplek (Asrama Haji)										-	-	3.534.639.200	3.888.103.120		
					Peningkatan Jalan Dendang-Gantung										-	-	1.875.181.187	2.062.699.305		
					Peningkatan Jalan Koba - Lubuk Besar										-	-	3.486.176.800	3.834.794.480		
					Peningkatan Jalan Parit Tiga-Tanjung Ru										-	-	5.516.006.400	6.067.607.040		
					Peningkatan Jalan Pasir Garam - Penagan - Kota Kapur; Penagan - Tanjung Tedung										-	-	7.931.526.400	8.724.679.040		
					Peningkatan Jalan Perawas-Buding; Buding-Manggar										-	-	4.240.240.550	4.664.264.605		
					Peningkatan Jalan Puding Besar - Saing - Kotawaringin (Paket 2)										-	-	3.903.420.800	4.293.762.880		
					Peningkatan Jalan Puding Besar - Saing - Kota Waringin										-	-	4.410.037.600	4.851.041.360		
					Peningkatan Jalan Sangku - Simpang Tempilang										-	-	7.467.732.000	8.214.505.200		
					Peningkatan Jalan Sp. Gedong - Payung										-	-	3.409.611.200	3.750.572.320		
1	3	10	1.01	9	Rehabilitasi jalan					Pangkalpinang, bangka, babar, bateng, basel					Panjang jalan yang terpelihara		48.000.000.000	52.800.000.000		
						Pengembangan Energi dan Infrastruktur Kewilayahan	Meningkatkan ketersedian infrastruktur pekerjaan Umum								Panjang jalan yang direhabilitasi	1,5 km	48.000.000.000	52.800.000.000	Meningkatkan ketersedian infrastruktur pekerjaan Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
					Rehabilitasi jalan sungailiat-puding besar			Bangka							Panjang jalan sungailiat-puding besar yang direhabilitasi	1,5 km	12.000.000.000	13.200.000.000		
					Rehabilitasi Jalan Sumberjo			Pangkalpinang							Panjang jalan sumberejo yang direhabilitasi	1 km	1.000.000.000	1.100.000.000		
					Rehabilitasi Jalan Pangkalpinang - Sp. Katis			Pangkalpinang, Bangka Tengah							Panjang jalan yang direhabilitasi	3 Km	10.500.000.000	11.550.000.000		
					Rehabilitasi Jalan Sp. Katis - Sungai Selan			Bangka tengah							Panjang jalan yang direhabilitasi	3 Km	10.500.000.000	11.550.000.000		
					Pedestrian Jalan Sungailiat - Puding Besar			bangka							Panjang jalan yang direhabilitasi	1,7 Km	14.000.000.000	15.400.000.000		
1	3	10	1.01	11	Subkegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan												25.498.990.500	28.048.889.550		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
						Pengembangan Energi dan Infrastruktur Kewilayahan	Meningkatkan ketersedian infrastruktur pekerjaan Umum								Panjang fungsional jalan yang terpelihara	784,65 Km	25.498.990.500	28.048.889.550	Meningkatkan ketersedian infrastruktur pekerjaan Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
					Pemeliharaan Rutin Jalan Pangkalpinang-Batas Kota (Sp. Katis); A. Yani; Sp. Semabung-Sampur; Trem; RE. Martadinata; Sumberejo; Sp. Pasir Padi - Alexander; PPI; Sp. Alexander - Sp. Lingkar Timur; Sp. Pulau Bangka - Sampur			Pangkalpinang							Panjang fungsional jalan yang terpelihara	29,28 km	950.645.000	1.045.709.500		
					Pemeliharaan Rutin Jalan Dalam Kompleks Perkantoran Perkantoran Prov. Kep. Babel			Pangkalpinang							Panjang fungsional jalan yang terpelihara	15,71 km	1.105.500.000	1.216.050.000		
					Pemeliharaan Rutin Jalan Sungailiat - Puding Besar			bangka							Panjang fungsional jalan yang terpelihara	27,27 km	899.275.000	989.202.500		
					Pemeliharaan Rutin Jalan Lingkar Timur; Rebo - Tg. Pesona - Jeliti - Sp. Perahu			bangka							Panjang fungsional jalan yang terpelihara	36,03 km	1.157.290.000	1.273.019.000		
					Pemeliharaan Rutin Jalan Puding Besar - Saing - Kota Waringin			bangka							Panjang fungsional jalan yang terpelihara	23,1 km	778.345.000	856.179.500		
					Pemeliharaan Rutin Jalan Jalan Pasir Garam - Penagan - Kota Kapur			bangka							Panjang fungsional jalan yang terpelihara	35,94 km	1.154.680.000	1.270.148.000		
					Pemeliharaan Rutin jalan Ibul - Parit Tiga			Bangka Barat							Panjang fungsional jalan yang terpelihara	26,38 km	886.385.000	975.023.500		
					Pemeliharaan Rutin Jalan Parit Tiga - Tanjung Ru			Bangka Barat							Panjang fungsional jalan yang terpelihara	27,06 km	906.105.000	996.715.500		
					Pemeliharaan Rutin Jalan Kelapa - Kayu Arang			Bangka Barat							Panjang fungsional jalan yang terpelihara	16,65 km	599.415.000	659.356.500		
					Pemeliharaan Rutin Jalan Jalan Sungai Dua - Dam III - Sangku; Sangku - Simpang Tempilang			bangka barat							Panjang fungsional jalan yang terpelihara	30,09 km	997.950.000	1.097.745.000		
					Pemeliharaan Rutin Jalan Pangkalpinang - Sp. Katis			Pangkalpinang, bangka tengah							Panjang fungsional jalan yang terpelihara	15,97 km	574.995.000	632.494.500		
					Pemeliharaan Rutin Jalan Sp. Katis - Sungai Selan			bangka tengah							Panjang fungsional jalan yang terpelihara	12,88 km	534.010.500	587.411.550		
					Pemeliharaan Rutin Jalan Namang - Puput; Puput - Sp. Katis			bangka tengah							Panjang fungsional jalan yang terpelihara	16,63 km	589.335.000	648.268.500		
					Pemeliharaan Rutin Jalan Puput - Sp. Gedong; Sungai Selan - Lampur - Sp. Gedong			bangka tengah							Panjang fungsional jalan yang terpelihara	17,03 km	605.735.000	666.308.500		
					Pemeliharaan Rutin Jalan Penagan - Tanjung Tedung			bangka tengah							Panjang fungsional jalan yang terpelihara	16,55 km	587.015.000	645.716.500		
					Pemeliharaan Rutin Jalan Koba - Lubuk Besar			bangka tengah							Panjang fungsional jalan yang terpelihara	24,4 km	819.465.000	901.411.500		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
					Pemeliharaan Rutin Jalan Lubuk Besar - Tg. Berikat			bangka tengah							Panjang fungsional jalan yang terpelihara	24,24 km	814.825.000	896.307.500		
					Pemeliharaan Rutin Jalan Sp. Gedong - Payung			Bangka Selatan							Panjang fungsional jalan yang terpelihara	33,5 km	1.092.865.000	1.202.151.500		
					Pemeliharaan Rutin Jalan Payung - Air Bara			Bangka Selatan							Panjang fungsional jalan yang terpelihara	29 km	962.365.000	1.058.601.500		
					Pemeliharaan Rutin Jalan Payung - Bedengung; Bedengung - Batu Betumpang			Bangka Selatan							Panjang fungsional jalan yang terpelihara	32,65 km	1.072.190.000	1.179.409.000		
					Pemeliharaan Rutin Jalan Air Gegas - Bedengung			Bangka Selatan							Panjang fungsional jalan yang terpelihara	23,2 km	794.165.000	873.581.500		
					Pemeliharaan Rutin Jalan Dalam Kota Tanjung Pandan; Tanjungpandan - Simpang Empat (Sijuk)			belitung							Panjang fungsional jalan yang terpelihara	30,45 km	959.575.000	1.055.532.500		
					Pemeliharaan Rutin Jalan Simpang Empat (Sijuk) -Buding			belitung							Panjang fungsional jalan yang terpelihara	25,85 km	839.475.000	923.422.500		
					Pemeliharaan Rutin Jalan Perawas - Buding			Belitung Timur							Panjang fungsional jalan yang terpelihara	26,41 km	855.715.000	941.286.500		
					Pemeliharaan Rutin Jalan Badau - Dendang; Bantan - Pelulusan			Belitung Timur							Panjang fungsional jalan yang terpelihara	45,39 km	1.337.822.500	1.471.604.750		
					Pemeliharaan Rutin Jalan Dendang - Gantung			Belitung Timur							Panjang fungsional jalan yang terpelihara	34,26 km	1.087.340.000	1.196.074.000		
					Pemeliharaan Rutin Jalan Simpang Renggiang - Gantung; Gantung - Simpang Padang			Belitung Timur							Panjang fungsional jalan yang terpelihara	32,88 km	1.043.345.000	1.147.679.500		
					Pemeliharaan Rutin Jalan Buding - Manggar			Belitung Timur							Panjang fungsional jalan yang terpelihara	43,85 km	1.293.162.500	1.422.478.750		
					Pemeliharaan Alat-alat Laboratorium Kebinamargaan										Peralatan lab yang terpelihara	1 paket	200.000.000	220.000.000		
																		-		
1	3	10	1.01	16	Subkegiatan Penggantian Jembatan												8.170.260.000	8.987.286.000		
						Pengembangan Energi dan Infrastruktur Kewilayahan	Meningkatkan ketersedian infrastruktur pekerjaan Umum								Panjang jembatan yang diganti	23 m	8.170.260.000	8.987.286.000	Meningkatkan ketersedian infrastruktur pekerjaan Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
					Penggantian Jembatan Air Limau II										panjang jembatan air limau yang diganti	13 m	4.560.555.000	5.016.610.500		
					Penggantian Jembatan Air Delas			Bangka Selatan							panjang jembatan air delas yang diganti	15 meter	3.609.705.000	3.970.675.500		
1	3	10	1.01	19	Subkegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan												3.397.185.000	3.736.903.500		
						Pengembangan Energi dan Infrastruktur Kewilayahan	Meningkatkan ketersedian infrastruktur pekerjaan Umum								Panjang jembatan yang terpelihara	3508,75 m	3.397.185.000	3.736.903.500	Meningkatkan ketersedian infrastruktur pekerjaan Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
					Pemeliharaan Rutin Jembatan Provinsi di Pulau Bangka			Pulau Bangka								Panjang jembatan di pulau bangka yang terpelihara	1523,35 m	894.400.000	983.840.000		
					Pemeliharaan Rutin Jembatan Provinsi di Pulau Belitung			Pulau Belitung								Panjang jembatan di pulau belitung yang terpelihara	1200,9 m	713.975.000	785.372.500		
					Rehabilitasi/Pemeliharaan Operasional Jembatan baturusa II			Pangkalpinang								Panjang jembatan baturusa II yang terpelihara	784,5 m	1.788.810.000	1.967.691.000		
1	3	10	1.01	10	Subkegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan													20.444.290.400	22.488.719.440		
																		20.444.290.400	22.488.719.440		
					Pemeliharaan Berkala Jalan Air Gegas - Bedengung; Bedengung - Batu Betumpang													2.759.500.800	3.035.450.880		
					Pemeliharaan Berkala Jalan Lubuk Besar - Tanjung Berikat													2.975.021.600	3.272.523.760		
					Pemeliharaan Berkala Jalan Namang - Puput; Puput - Simpang Katis													1.980.559.200	2.178.615.120		
					Pemeliharaan Berkala Jalan Pangkalpinang - Sp. Katis; Sp. Katis - Sungaiselan													3.454.470.400	3.799.917.440		
					Pemeliharaan Berkala Jalan Payung - Air Bara													1.951.160.000	2.146.276.000		
					Pemeliharaan Berkala Jalan Puding Besar - Saing - Kota Waringin													1.983.392.800	2.181.732.080		
					Pemeliharaan Berkala Jalan Sungai Dua - Dam III - Sangku; Sangku - Simpang Tempilang													2.958.465.600	3.254.312.160		
					Pemeliharaan Berkala Jalan Sungailiat - Puding Besar													2.381.720.000	2.619.892.000		
1	3	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH (UPTD PUPR)													800.000.000	880.000.000		
											survey kepuasan pelayanan umum	80						800.000.000	880.000.000		
1	3	1	1.03		Kegiatan Administrasi umum													800.000.000	880.000.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan						survey kepuasan pelayanan umum (angka)	80				800.000.000	880.000.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
1	3	1	1.03	1	Subkegiatan Penyediaan Jasa surat menyurat													25.000.000	27.500.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Provnisi								Jumlah Surat/Barang yang dikirim	Jumlah Surat/Barang yang dikirim	15.000.000	16.500.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Provnisi								Jumlah Materai	1500 Lbr	10.000.000	11.000.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
1	3	1	1.03	2	Subkegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik													134.000.000	147.400.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Provnisi								Tagihan rekening listrik, air, telepon/fax, tv kabel, virtual meeting yang dibayarkan	12 Bln	134.000.000	147.400.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
1	3	1	1.03	3	Subkegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor													150.800.000	165.880.000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Provnisi							Jumlah tenaga keamanan/satpam kantor yang dipekerjakan	4 orang	150.800.000	165.880.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
1	3	1	1.03	6	Subkegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/oprasional												57.700.000	63.470.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Provnisi							Jumlah tenaga sopir	1 Orang	37.700.000	41.470.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Provnisi							jumlah kendaraan operasional yang dipelihara	5 unit	20.000.000	22.000.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
1	3	1	1.03	7	Subkegiatan Penyediaan jasa Administrasi keuangan												32.775.000	36.052.500		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Provnisi							Jumlah pengelola administrasi keuangan	5 Orang	32.775.000	36.052.500	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
1	3	1	1.03	8	Subkegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor												198.500.000	218.350.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Provnisi							Jumlah jenis bahan dan Peralatan kebersihan kantor yang tersedia	Jenis	10.000.000	11.000.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Provnisi							Jumlah tenaga kebersihan yang dipekerjakan	5 Orang	188.500.000	207.350.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
1	3	1	1.03	10	Subkegiatan Penyediaan alat tulis kantor												20.000.000	22.000.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Provnisi							jumlah jenis ATK yang dibeli	jenis	20.000.000	22.000.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
1	3	1	1.03	11	Subkegiatan Penyediaan barang cetak dan penggandaan												7.500.000	8.250.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Provnisi							Jumlah penggandaan	10000 Lbr	3.500.000	3.850.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Provnisi							jumlah barang cetak	40 eksemplar	4.000.000	4.400.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
1	3	1	1.03	13	Subkegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor												16.000.000	17.600.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Provnisi							jumlah peralatan kantor	1 Paket	16.000.000	17.600.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
1	3	1	1.03	14	Subkegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga												5.000.000	5.500.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Provnisi							Jumlah peralatan rumah tangga	unit	5.000.000	5.500.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
1	3	1	1.03	15	Subkegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan												3.000.000	3.300.000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Provnisi								Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan	600 eksemplar	3.000.000	3.300.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
1	3	1	1.03	16	Subkegiatan Penyediaan bahan logistik kantor												34.725.000	38.197.500		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Provnisi								jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	unit	34.725.000	38.197.500	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
1	3	1	1.03	17	Subkegiatan Penyediaan makan dan minum												45.000.000	49.500.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Provnisi								Jumlah makan dan minum rapat yang tersedia	pax	25.000.000	27.500.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Provnisi								Jumlah makan dan minum Tamu yang tersedia	pax	20.000.000	22.000.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
1	3	1	1.03	18	Subkegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah												70.000.000	77.000.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Provnisi								jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	kali	20.000.000	22.000.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Provnisi								Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah	kali	50.000.000	55.000.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
1	3	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG												2.160.000.000	2.376.000.000		
											Persentase kesesuaian pengembangan infrastruktur wilayah dengan rencana tata ruang	83%					2.160.000.000	2.376.000.000		
1	3	12	1.01		Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang provinsi												950.000.000	1.045.000.000		
						Pengembangan Energi dan Infrastruktur Kewilayahan	Meningkatkan ketersedian infrastruktur pekerjaan Umum	Provnisi					Jumlah perencanaan tata ruang yang ditetapkan	2 perencanaan tata ruang			250.000.000	275.000.000	Meningkatkan ketersedian infrastruktur pekerjaan Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
1	3	12	1.01	01	Subkegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi												850.000.000	935.000.000		
						Pengembangan Energi dan Infrastruktur Kewilayahan	Meningkatkan ketersedian infrastruktur pekerjaan Umum	Provnisi								Jumlah rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan	1 RTRW	850.000.000	935.000.000	Meningkatkan ketersedian infrastruktur pekerjaan Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
1	3	12	1.01	02	Subkegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Provinsi												50.000.000	55.000.000		
						Pengembangan Energi dan Infrastruktur Kewilayahan	Meningkatkan ketersedian infrastruktur pekerjaan Umum	Provnisi								Jumlah rencana rinci tata ruang yang ditetapkan	1 RRTR	50.000.000	55.000.000	Meningkatkan ketersedian infrastruktur pekerjaan Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	3	12	1.01	04	Subkegiatan Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundangundangan Bidang Penataan ruang												50.000.000	55.000.000		
						Pengembangan Energi dan Infrastruktur Kewilayahan	Meningkatkan ketersedian infrastruktur pekerjaan Umum	Provnisi							Jumlah Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundangundangan Bidang Penataan ruang	1 Sosialisasi	50.000.000	55.000.000	Meningkatkan ketersedian infrastruktur pekerjaan Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
1	3	12	1.04		Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi												630.000.000	693.000.000		
						Pengembangan Energi dan Infrastruktur Kewilayahan	Meningkatkan ketersedian infrastruktur pekerjaan Umum	Provnisi					Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi	15 pertemuan			630.000.000	693.000.000	Meningkatkan ketersedian infrastruktur pekerjaan Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
1	3	12	1.04	2	Subkegiatan Koordinasi dan sinkronisasi penertiban dan penegakan hukum bidang penataan ruang												275.000.000	302.500.000		
						Pengembangan Energi dan Infrastruktur Kewilayahan	Meningkatkan ketersedian infrastruktur pekerjaan Umum	Provnisi							Jumlah pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTRW Provinsi	21 Pelanggaran	275.000.000	302.500.000	Meningkatkan ketersedian infrastruktur pekerjaan Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
1	3	12	1.04	4	Subkegiatan Koordinasi pelaksanaan penataan ruang												355.000.000	390.500.000		
						Pengembangan Energi dan Infrastruktur Kewilayahan	Meningkatkan ketersedian infrastruktur pekerjaan Umum	Provnisi							Jumlah rekomendasi kesesuaian rencana tata ruang	16 Rekomendasi Teknis kesesuaian rencana tata ruang	355.000.000	390.500.000	Meningkatkan ketersedian infrastruktur pekerjaan Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
2	10	3			PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM															
2	10	3	1.01		Kegiatan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi												30.000.000	33.000.000		
						Pengembangan Energi dan Infrastruktur Kewilayahan	Meningkatkan ketersedian infrastruktur pekerjaan Umum	Provnisi					Jumlah Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi yang ditetapkan	1 Lokasi			30.000.000	33.000.000	Meningkatkan ketersedian infrastruktur pekerjaan Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
2	10	3	1.01	01	Subkegiatan Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum												30.000.000	33.000.000		
						Pengembangan Energi dan Infrastruktur Kewilayahan	Meningkatkan ketersedian infrastruktur pekerjaan Umum	Provnisi							Luas lokasi pengadaan tanah	5 Hektar	30.000.000	33.000.000	Meningkatkan ketersedian infrastruktur pekerjaan Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
2	10	4			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN															
2	10	4	1.01		Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi												50.000.000	55.000.000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
						Pengembangan Energi dan Infrastruktur Kewilayahan	Meningkatkan ketersedian infrastruktur pekerjaan Umum	Provnisi					Jumlah Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang	1 penyelesaian sengketa			50.000.000	55.000.000	Meningkatkan ketersedian infrastruktur pekerjaan Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
2	10	4	1.01	01	Subkegiatan Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi												20.000.000	22.000.000		
						Pengembangan Energi dan Infrastruktur Kewilayahan	Meningkatkan ketersedian infrastruktur pekerjaan Umum	Provnisi							Jumlah Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2 Sengketa	20.000.000	22.000.000	Meningkatkan ketersedian infrastruktur pekerjaan Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
2	10	4	1.01	02	Subkegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi												30.000.000	33.000.000		
						Pengembangan Energi dan Infrastruktur Kewilayahan	Meningkatkan ketersedian infrastruktur pekerjaan Umum	Provnisi							Jumlah penyelesaian sengketa tanah kewenangan provinsi	2 Sengketa	30.000.000	33.000.000	Meningkatkan ketersedian infrastruktur pekerjaan Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
2	10	5			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN			Provnisi												
2	10	5	1.01		Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi												170.000.000	187.000.000		
													Jumlah Penyelesaian Masalah Ganti	1 penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan			170.000.000	187.000.000		
2	10	5	1.01	01	Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah												50.000.000	55.000.000		
						Pengembangan Energi dan Infrastruktur Kewilayahan	Meningkatkan ketersedian infrastruktur pekerjaan Umum	Provnisi							Jumlah titik lokasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	1 Lokasi	50.000.000	55.000.000	Meningkatkan ketersedian infrastruktur pekerjaan Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
2	10	5	1.01	02	Subkegiatan Penyelesaian Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi												120.000.000	132.000.000	Meningkatkan ketersedian infrastruktur pekerjaan Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
					Lahan jalan Lintas Timur	Pengembangan Energi dan Infrastruktur Kewilayahan	Meningkatkan ketersedian infrastruktur pekerjaan Umum	Provnisi							Jumlah luas tanah yang diberikan santunan untuk pembangunan oleh pemerintah daerah provinsi	0,5 ha	120.000.000	132.000.000		
2	10	6			PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE															

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2	10	6	1.01		Kegiatan Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi												50.000.000	55.000.000		
						Pengembangan Energi dan Infrastruktur Kewilayahan	Meningkatkan ketersedian infrastruktur pekerjaan Umum	Provnisi					Jumlah Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang ditetapkan	1 lokasi			50.000.000	55.000.000	Meningkatkan ketersedian infrastruktur pekerjaan Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
2	10	6	1.01	01	Subkegiatan Inventarisasi Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah												50.000.000	55.000.000		
						Pengembangan Energi dan Infrastruktur Kewilayahan	Meningkatkan ketersedian infrastruktur pekerjaan Umum	Provnisi							Luas redistribusi tanah yang di inventarisir	50 Hektar	50.000.000	55.000.000	Meningkatkan ketersedian infrastruktur pekerjaan Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
2	10	10			PROGRAM PENATAAGUNAAN TANAH															
2	10	10	1.01		Kegiatan Perencanaan Penggunaan Tanah yang hamparannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 daerah Provinsi												280.000.000	308.000.000		
						Pengembangan Energi dan Infrastruktur Kewilayahan	Meningkatkan ketersedian infrastruktur pekerjaan Umum	Provnisi					Jumlah Perencanaan Penggunaan Tanah yang hamparannya lintas daerah	1 dokumen perencanaan penggunaan tanah			280.000.000	308.000.000	Meningkatkan ketersedian infrastruktur pekerjaan Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
2	10	10	1.01	01	Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah												280.000.000	308.000.000		
						Pengembangan Energi dan Infrastruktur Kewilayahan	Meningkatkan ketersedian infrastruktur pekerjaan Umum	Provnisi							Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan penggunaan tanah	1 Dokumen	280.000.000	308.000.000	Meningkatkan ketersedian infrastruktur pekerjaan Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2021

Sub Unit Organisasi : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan/ Desa	Hasil Program/Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Kegiatan		Keluaran SubKegiatan/Indikator Sub Kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
					URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN												**27.931.978.496**	**26.851.883.638**		
1	**04**	**1**		**0**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**												**8.715.859.147**	**2.460.383.638**		
											Nilai Sakip PD	**80**					**235.000.000**	**258.500.000**		
1	04	1	1.01		**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**												**235.000.000**	**258.500.000**		
													Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi	**14 Dokumen**			**235.000.000**	**258.500.000**		
1	04	1	1.01	1	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah												75.000.000	82.500.000		
						Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah dok perencanaan Renstra/Renja PD	2 dokumen	75.000.000	82.500.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan
1	04	1	1.01	2	Penyusunan Program dan Kegiatan perangkat daerah												25.000.000	27.500.000		
						Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah dokumen DPA/DPPA yang tersusun	2 dokumen	25.000.000	27.500.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan
1	04	1	1.01	3	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah												25.000.000	27.500.000		
						Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah Dok pengendalian dan evaluasi PD	4 dokumen	25.000.000	27.500.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan
1	04	1	1.01	4	Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah												35.000.000	38.500.000		
						Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah dokumen kesepakatan koordinasi dan sinkronisasi	2 dokumen	35.000.000	38.500.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan
1	04	1	1.01	5	Evaluasi kinerja Perangkat Daerah												75.000.000	82.500.000		
						Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah Dok Evaluasi Kinerja PD	4 dokumen	75.000.000	82.500.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam
											Survey Kepuasan Pelayanan Internal	70					8.480.859.147	2.201.883.638		
1	04	1	1.02		**Administrasi Keuangan**												6.560.055.840	100.000.000		
1	04	1	1.02	1	Peneyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												6.500.305.840	100.000.000		
															Survey kepuasan pelayanan keuangan	70	6.500.305.840	100.000.000		
1	04	1	1.02	7	Penyusunan laporan keuangan bulanan/semesteran												59.750.000	65.725.000		
						Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah laporan keuangan bulanan/semeste	14 laporan	59.750.000	65.725.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Memperkuat Stabilitas
1	04	1	1.03		**Administrasi Umum**												1.810.803.307	1.991.883.638		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan/ Desa	Hasil Program/Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Kegiatan		Keluaran SubKegiatan/Indikator Sub Kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
													survey kepuasan pelayanan umum	70			1.810.803.307	1.991.883.638	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Memperkuat Stabilitas
1	04	1	1.03	1	Penyediaan Jasa surat menyurat												94.850.000	9.375.000		
						Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah surat/barang yang dikirim	100 surat/barang yang dikirim	7.500.000	9.375.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Memperkuat Stabilitas
															Jumlah meterai	1500 Lembar	6.750.000	8.437.500	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam
															Jumlah tenaga pramubakti yang dipekerjakan	2 orang	80.600.000	8.250.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam
1	04	1	1.03	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik												114.600.000	126.060.000		
						Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah bulan tagihan rekening listrik, air,	12 bulan	114.600.000	126.060.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam
1	04	1	1.03	3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor												161.200.000	177.320.000		
						Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah Tenaga Keamanan/Satpam kantor	4 Orang	161.200.000	177.320.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi
1	04	1	1.03	6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional												126.000.000	138.600.000		
						Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah kendaraan operasional yang	4 unit	5.100.000	5.610.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam
															Jumlah tenaga sopir	3 orang	120.900.000	132.990.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam
1	04	1	1.03	7	Penyediaan jasa Administrasi keuangan												109.200.000	120.120.000		
						Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah pengelola administrasi	11 Orang	109.200.000	120.120.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Memperkuat Stabilitas
1	04	1	1.03	8	Penyediaan jasa kebersihan kantor												374.700.000	412.170.000		
						Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah tenaga kebersihan yang dipekerjakan	9 Orang	362.700.000	398.970.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Memperkuat Stabilitas
															Jumlah jenis bahan dan Peralatan kebersihan	10 Jenis	12.000.000	15.000.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam
1	04	1	1.03	10	Penyediaan alat tulis kantor												45.000.000	49.500.000		
						Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah Jenis ATK yang di beli	80 Jenis	45.000.000	49.500.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Memperkuat Stabilitas
1	04	1	1.03	11	Penyediaan barang cetak dan penggandaan												8.500.000	9.350.000		
						Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					jumlah barang yang di cetak/digandaka	50 Eksemplar	8.500.000	9.350.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Memperkuat Stabilitas
1	04	1	1.03	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan												50.000.000	55.000.000		
						Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah Komponen instalasi listrik	40 Jenis	50.000.000	55.000.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Memperkuat Stabilitas
1	04	1	1.03	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor												41.875.000	52.343.750		
						Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					jumlah peralatan dan perlengkapan	25 Jenis	41.875.000	52.343.750	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Memperkuat Stabilitas
1	04	1	1.03	14	Penyediaan peralatan rumah tangga												5.000.000	16.500.000		
						Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					jumlah peralatan rumah tangga	15 Jenis	5.000.000	16.500.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Memperkuat Stabilitas
1	04	1	1.03	17	Penyediaan makan dan minum												39.950.000	49.937.500		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan/ Desa	Hasil Program/Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Kegiatan		Keluaran SubKegiatan/Indikator Sub Kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
						Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah makan minum tamu	30 Pax	39.950.000	49.937.500	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
1	04	1	1.03	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah												221.268.307	243.395.138		
						Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	42 kali	221.268.307	243.395.138	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
1	04	1	1.03	19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah												126.500.000	123.750.000		
						Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah	120 Kali	126.500.000	123.750.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
1	04	1	1.03	23	Pengadaan perlengkapan gedung kantor												14.000.000	20.000.000		
						Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan	15 Jenis	14.000.000	20.000.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
1	04	1	1.03	25	Pengadaan peralatan gedung kantor												20.000.000	22.500.000		
						Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	10 Jenis	20.000.000	22.500.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
1	04	1	1.03	29	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor												115.000.000	126.500.000		
						Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 Unit	115.000.000	126.500.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
1	04	1	1.03	31	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/Operasional												84.160.000	104.145.800		
						Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah Kendaraan operasional yang di pelihara	4 Unit	84.160.000	104.145.800	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
1	04	1	1.03	33	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor												-	-		
1	04	1	1.03	35	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor												59.000.000	75.000.000		
						Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	10 Jenis	59.000.000	75.000.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan/ Desa	Hasil Program/Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Kegiatan		Keluaran SubKegiatan/Indikator Sub Kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	04	**1**	**1.04**		**Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**												**110.000.000**	**110.000.000**		
													survey kepuasan pelayanan kepegawaian	70			**110.000.000**	**110.000.000**		
1	04	1	1.04	1	Pengadaan mesin/kartu absensi												10.000.000	-		
						Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah mesin/kartu absensi	1 Unit	10.000.000	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
1	04	1	1.04	9	Pendidikan dan pelatihan formal												66.250.000	71.500.000		
						Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah ASN yang ikut pendidikan dan pelatihan formal	20 Org	66.250.000	71.500.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
1	04	1	1.04	11	Bimbingan teknis Implementasi Peraturan perudang-undangan												33.750.000	38.500.000		
						Pembangunan Reformasi Birokrasi	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah ASN yang ikut bimtek peraturan perundang-undangan	10 Org	33.750.000	38.500.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
					Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang												**15.955.119.349**	**19.750.000.000**		
1	03	03			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**												**1.355.119.349**	**1.750.000.000**		
											persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak	74,65%					**1.355.119.349**	**1.750.000.000**		
1	**03**	**03**	**1.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota**												1.355.119.349	1.750.000.000		
													Jumlah Rumah Tangga Yang terlayani akses air minum	144 KK			**1.355.119.349**	**1.750.000.000**		
1	03	03	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM												616.945.000	750.000.000		
						Pengembangan Konektivitas dan Infrastruktur	**Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar**	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah dok perencanaan yang tersusun	1 Dokumen	616.945.000	750.000.000	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
1	03	03	1.01	07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan												738.174.349	1.000.000.000		
						Pengembangan Konektivitas dan Infrastruktur	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar	Belitung Timur	Gantung	Selinsing/Trans Meranteh					Panjang Pipa distribusi Air Minum	1500 m	738.174.349	1.000.000.000	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
1	03	05			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**												**700.000.000**	**1.000.000.000**		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan/ Desa	Hasil Program/Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Kegiatan		Keluaran SubKegiatan/Indikator Sub Kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
											persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak	**92,50%**								
1	03	05	1.01		**Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional**												700.000.000	1.000.000.000		
													Jumlah Rumah Tangga Terlayani sitem air limbah domestik	140 KK			700.000.000	1.000.000.000		
1	03	05	1.01	03	Sub Kegiatan Penyediaan Tangki Septik												700.000.000	1.000.000.000		
						Pengembangan Konektivitas dan Infrastruktur	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar								Jumlah Rumah Tangga yang terbangun Tangki Septik	140 KK				
					Penyediaan Tangki Septik Individual untuk penanganan stunting			Kab. Bangka,Kab. Bangka Barat dan Kab. Bangka Selatan							Jumlah Rumah Tangga yang terbangun Tangki Septik Individual	140 KK	700.000.000	1.000.000.000	Penanganan stunting	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan
1	03	08			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**												**12.500.000.000**	**15.000.000.000**		
											Persentase jumlah bangunan gedung yang terselenggara	**50%**								
1	03	08	1.01		**Kegiatan Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi**												12.500.000.000	15.000.000.000		
													Jumlah bangunan Gedung yang terselenggara dan tertata	4 Unit						
1	03	08	1.01	01	Sub Kegiatan Perencanaan ,Pembangunan ,Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis												12.500.000.000	15.000.000.000		
															Jumlah Bangunan Gedung yang terbanguan dan tertata	4 Unit	12.500.000.000	15.000.000.000		
					Pembangunan Gedung Kejati Babel (Hibah)										Jumlah bangunan gedung yang terbangun	1 Unit	7.000.000.000			
					Pembangunan Gedung Kominda Babel (Hibah)										Jumlah bangunan gedung yang terbangun	1 Unit	3.000.000.000			
					Pembangunan Depo Arsip Dinas PUPR										Jumlah bangunan gedung yang terbangun	1 Unit	1.200.000.000			
					Pembangunan Pagar Workshop										Jumlah bangunan Gedung Yang tertata	1 Unit	1.300.000.000			
1	03	09			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**												**1.400.000.000**	**2.000.000.000**		
											Persentase Luas Kawasan yang Tertata	**30%**								

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan/ Desa	Hasil Program/Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Kegiatan		Keluaran SubKegiatan/Indikator Sub Kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	03	09	1.01		**Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**												1.400.000.000	2.000.000.000		
													Luas Kawasan yang tertata	7,4 Ha						
1	03	09	1.01	02	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana,Kebijakan,Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten /Kota												300.000.000	500.000.000		
						Pengembangan Konektivitas dan Infrastruktur	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar								Jumlah Dokumen Perencanaan PBL Yang tersusun	1 Dokumen	300.000.000	500.000.000		
					DED Perencanaan RTH Kolong Kace										Jumlah Dokumen RTH yang tersusun	1 Dokumen	300.000.000		Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
1	03	09	1.01	03	Sub Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan												1.100.000.000	2.000.000.000		
						Pengembangan Konektivitas dan Infrastruktur	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar								Jumlah Kawasan yang tertata	1 Lokasi	1.100.000.000	2.000.000.000		
					Penataan RTH Kompleks perkantoran Pemprov. Kep. Babel			Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah RTH yang terbangun dan tertata	1 Lokasi	1.100.000.000		Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan
					Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman												**3.261.000.000**	**4.641.500.000**		
1	04	02			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**												**500.000.000**	**500.000.000**		
						Pengembangan Konektivitas dan Infrastruktur	**Meningkatkan ketersediaan infrastruktur**				**persentase rumah akibat bencana yang tertangani**	**100%**								
1	04	02	1.01		**Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi**												500.000.000	500.000.000		
													Jumlah Dokumen laporan pendataan yang tersusun	1 Dokumen			500.000.000	500.000.000		
1	04	02	1.01	01	Sub Kegiatan Indentifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi												500.000.000	500.000.000		
								Provinsi							Jumlah Laporan indentifikasi perumahan dilokasi rawan bencana atau terkena relokasi	1 Dokumen	500.000.000	500.000.000	Meningkatnya Kapasitas daerah terhadap bencana	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan
1	04	04			**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA , SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**												**2.761.000.000**	**4.141.500.000**		
						Pengembangan Konektivitas dan Infrastruktur	**Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar**				**Persentase Permukiman yang terfasiltasi oleh PSU**	**50%**					**2.761.000.000**	**4.141.500.000**	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan/ Desa	Hasil Program/Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Kegiatan		Keluaran SubKegiatan/Indikator Sub Kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	04	04	1.01		**Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman**												2.761.000.000	4.141.500.000		
													Jumlah Permukiman yang terfasiltasi PSU	3 Lokasi			2.761.000.000	4.141.500.000		
1	04	02	1.01	02	Penyediaan Prasarana ,Sarana,dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman												**2.761.000.000**	**4.141.500.000**		
															Panjang Jalan Lingkungan Yang dibangun	2900 m	**2.761.000.000**	-		
					Pembangunan Jalan Lingkungan			Bangka	Sungailiat	Kudai					Panjang Jalan Lingkungan Yang dibangun	1000 m	1.039.800.000	-	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
					Pembangunan Jalan Lingkungan			Belitung	Tanjung Pandan	Air Ketekok					Panjang Jalan Lingkungan Yang dibangun	700 m	551.200.000		Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
					Pembangunan Jalan Lingkungan			Belitung Timur	Gantung	Meranteh/Selinsing					Panjang Jalan Lingkungan Yang dibangun	1200 m	1.170.000.000		Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2021

PERANGKAT DAERAH : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
				Kabupaten/Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/ Indikator Program		Hasil Kegiatan/ Indikator Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan/ Indikator Sub kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
	Urusan Pemerintahan Umum															
	Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik												**11.452.082.135**	**12.597.290.349**		
8. 01 01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**												**7.143.897.063**	**7.858.286.769**		
		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	**Meningkatkan tata kelola pemerintahan**				Nilai SAKIP Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi	80					**195.084.800**	**214.593.280**		
8. 01 01 1.01	Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												**195.084.800**	**214.593.280**		
		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah dok perencanaan dan evaluasi	9 Dokumen			**195.084.800**	214.593.280	Meningkatkan tata kelola Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
8. 01 01 1.01 01	Sub Kegiatan Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah												21.250.000	23.375.000		
		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah dokumen perencanaan Renstra/Renja PD	2 Dokumen	21.250.000	23.375.000	Meningkatkan tata kelola Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
8. 01 01 1.01 02	Sub Kegiatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan												9.250.000	10.175.000		
		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah dokumen DPA/DPPA yang tersusun	2 Dokumen	9.250.000	10.175.000	Meningkatkan tata kelola Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
8. 01 01 1.01 03	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah												68.634.800	75.498.280		
		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi PD	1 dokumen	68.634.800	75.498.280	Meningkatkan tata kelola Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
8. 01 01 1.01 04	Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah												49.750.000	54.725.000		
		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					jumlah dokumen kesepakatan Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan PD	1 Dokumen	49.750.000	54.725.000	Meningkatkan tata kelola Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
8. 01 01 1.01 05	Sub Kegiatan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah												46.200.000	50.820.000		
		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah dokumen Evalusi kinerja PD	3 Dokumen	46.200.000	50.820.000	Meningkatkan tata kelola Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
				Kabupaten/Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/ Indikator Program		Hasil Kegiatan/ Indikator Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan/ Indikator Sub kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
							Survey Kepuasan Pelayanan Internal	80					**5.469.482.761**	**6.016.431.037**		
8. 01 01 1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan												**5.469.482.761**	**6.016.431.037**		
		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	1 Dokumen			5.469.482.761	6.016.431.037	Meningkatkan tata kelola Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
8. 01 01 1.02 01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												5.469.482.761	6.016.431.037		
		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	40 orang	5.469.482.761	6.016.431.037	Meningkatkan tata kelola Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
8. 01 01 1.03	Kegiatan Administrasi umum												**1.479.329.502**	**1.627.262.452**		
		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah Laporan Administrasi Umum	1 Dokumen			1.479.329.502	1.627.262.452	Meningkatkan tata kelola Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
8. 01 01 1.03 01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa surat menyurat												161.600.000	177.760.000		
		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah Materai	1300 Lembar	10.800.000	11.880.000	Meningkatkan tata kelola Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah tenaga pramubakti yang dipekerjakan	4 Orang	150.800.000	165.880.000	Meningkatkan tata kelola Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
8. 01 01 1.03 02	Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik												145.500.000	160.050.000		
		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Tagihan rekening listrik, air, telepon/fax, tv kabel, virtual meeting yang dibayarkan	12 Bulan	145.500.000	160.050.000	Meningkatkan tata kelola Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
8. 01 01 1.03 03	Sub Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor												188.500.000	207.350.000		
		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah tenaga keamanan/satpam kantor yang dipekerjakan	5 Orang	188.500.000	207.350.000	Meningkatkan tata kelola Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
8. 01 01 1.03 06	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional												82.400.000	90.640.000		
		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					jumlah kendaraan operasional yang dipelihara	2 Unit Mobil, 2 Unit Motor2 Orang	7.000.000	7.700.000	Meningkatkan tata kelola Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah tenaga sopir yang dipekerjakan	2 Orang	75.400.000	82.940.000	Meningkatkan tata kelola Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
8. 01 01 1.03 07	Sub Kegiatan Penyediaan jasa Administrasi keuangan												120.012.000	132.013.200		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
				Kabupaten/Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/ Indikator Program		Hasil Kegiatan/ Indikator Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan/ Indikator Sub kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah pengelola administrasi keuangan	13 orang	120.012.000	132.013.200	Meningkatkan tata kelola Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
8. 01 01 1.03 08	Sub Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor												283.900.000	312.290.000		
		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah tenaga kebersihan yang dipekerjakan	7 Orang	263.900.000	290.290.000	Meningkatkan tata kelola Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah jenis bahan dan Peralatan kebersihan kantor yang tersedia	50 Jenis	20.000.000	22.000.000	Meningkatkan tata kelola Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
8. 01 01 1.03 10	Sub Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor												65.622.502	72.184.752		
		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					jumlah jenis ATK yang dibeli	50 jenis	65.622.502	72.184.752	Meningkatkan tata kelola Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
8. 01 01 1.03 11	Sub Kegiatan Penyediaan barang cetak dan penggandaan												39.004.000	42.904.400		
		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					jumlah barang cetak	158 eksamplar	6.004.000	6.604.400	Meningkatkan tata kelola Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah penggandaan	80000 Lembar	28.000.000	30.800.000	Meningkatkan tata kelola Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah penjilidan	100 Buku	5.000.000	5.500.000	Meningkatkan tata kelola Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
8. 01 01 1.03 12	Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor												5.000.000	5.500.000		
		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah komponen instalasi listrik	20 jenis	5.000.000	5.500.000	Meningkatkan tata kelola Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
8. 01 01 1.03 15	Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan												43.704.000	48.074.400		
		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan	4320 Exemplar	43.704.000	48.074.400	Meningkatkan tata kelola Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
8. 01 01 1.03 16	Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor												14.992.000	16.491.200		
		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					jumlah bahan logistik kantor	5 Jenis	14.992.000	16.491.200	Meningkatkan tata kelola Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
8. 01 01 1.03 17	Sub Kegiatan Penyediaan makan dan minum												40.000.000	44.000.000		
		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah makan dan minum Tamu	300 pax	15.000.000	16.500.000	Meningkatkan tata kelola Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
				Kabupaten/Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/ Indikator Program		Hasil Kegiatan/ Indikator Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan/ Indikator Sub kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah makan dan minum rapat	500 pax	25.000.000	27.500.000	Meningkatkan tata kelola Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
8. 01 01 1.03 18	Sub Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah												124.255.000	136.680.500		
		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	15 kali	92.295.000	101.524.500	Meningkatkan tata kelola Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah	10 kali	31.960.000	35.156.000	Meningkatkan tata kelola Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
8. 01 01 1.03 23	Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor												5.000.000	5.500.000		
		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan	1 Jenis	5.000.000	5.500.000	Meningkatkan tata kelola Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
8. 01 01 1.03 29	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor												30.000.000	33.000.000		
		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 unit	30.000.000	33.000.000	Meningkatkan tata kelola Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
8. 01 01 1.03 31	Sub Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/Oprasional												79.940.000	87.934.000		
		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					jumlah kendaraan oprasional yang dipelihara	2 Unit Mobil, 2 Unit Motor	79.940.000	87.934.000	Meningkatkan tata kelola Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
8. 01 01 1.03 33	Sub Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor												20.000.000	22.000.000		
		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	10 Jenis	20.000.000	22.000.000	Meningkatkan tata kelola Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
8. 01 01 1.03 35	Sub Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor												29.900.000	32.890.000		
		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	10 Jenis	20.000.000	22.000.000	Meningkatkan tata kelola Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah BBM Genset	900 liter	9.900.000	10.890.000	Meningkatkan tata kelola Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
				Kabupaten/Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/ Indikator Program		Hasil Kegiatan/ Indikator Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan/ Indikator Sub kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
8. 01 02	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN.**												**2.285.136.200**	**2.513.649.820**		
		Pembangunan Demokrasi	**Meningkatnya Kebebasan sipil**				Jumlah Kasus Penistaan terhadap simbol - simbol Negara.	0 Kasus					**2.285.136.200**	**2.513.649.820**		
8. 01 02 1.01	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan												**2.285.136.200**	**2.513.649.820**		
		Pembangunan Demokrasi	Meningkatnya Kebebasan sipil	Pangkalpinang, Kab. Bangka, Kab. Bangka Barat, Kab. Bangka Tengah, Kab. Bangka Selatan, Kab. Belitung, Kab. Belitung Timur.					jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	2 Dokumen			2.285.136.200	2.513.649.820	Meningkatnya Kebebasan sipil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
8. 01 02 1.01 **03**	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan,												123.047.700	135.352.470		
		Pembangunan Demokrasi	Meningkatnya Kebebasan sipil	Pangkalpinang, Kab. Bangka, Kab. Bangka Barat, Kab. Bangka Tengah, Kab. Bangka Selatan, Kab. Belitung, Kab. Belitung Timur.							jumlah Rekomendasi Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	2 Rekomendasi	61.523.850	67.676.235	Meningkatnya Kebebasan sipil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
		Pembangunan Demokrasi	Meningkatnya Kebebasan sipil	Pangkalpinang, Kab. Bangka, Kab. Bangka Barat, Kab. Bangka Tengah, Kab. Bangka Selatan, Kab. Belitung, Kab. Belitung Timur.							jumlah Rekomendasi BelaNegara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.	2 Rekomendasi	61.523.850	67.676.235	Meningkatnya Kebebasan sipil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
8. 01 02 1.01 **04**	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, BelaNegara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka												73.745.000	81.119.500		
		Pembangunan Demokrasi	Meningkatnya Kebebasan sipil	Pangkalpinang, Kab. Bangka, Kab. Bangka Barat, Kab. Bangka Tengah, Kab. Bangka Selatan, Kab. Belitung, Kab. Belitung Timur.							Jumlah Laporan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	4 Laporan	36.872.500	40.559.750	Meningkatnya Kebebasan sipil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
		Pembangunan Demokrasi	Meningkatnya Kebebasan sipil	Pangkalpinang, Kab. Bangka, Kab. Bangka Barat, Kab. Bangka Tengah, Kab. Bangka Selatan, Kab. Belitung, Kab. Belitung Timur.							Jumlah Laporan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di bidang BelaNegara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.	4 Laporan	36.872.500	40.559.750	Meningkatnya Kebebasan sipil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
8. 01 02 1.01 **05**	Sub Kegiatan Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh Pimpinan												2.088.343.500	2.297.177.850		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
				Kabupaten/Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/ Indikator Program		Hasil Kegiatan/ Indikator Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan/ Indikator Sub kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
		Pembangunan Demokrasi	Meningkatnya Kebebasan sipil	Pangkalpinang, Kab. Bangka, Kab. Bangka Barat, Kab. Bangka Tengah, Kab. Bangka Selatan, Kab. Belitung, Kab. Belitung Timur							Jumlah Laporan pelaksanaan Kegiatan	1 Laporan	2.088.343.500	2.297.177.850	Meningkatnya Kebebasan sipil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
8. 01 03	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA**												**1.198.044.172**	**1.317.848.589**		
		Pembangunan Demokrasi	**Meningkatnya partisipasi politik masyarakat**				Persentase Ketidakhadiran Masyarakat dalam Pemilu/Pemilu Kada	15%					**75.000.000**	**82.500.000**		
		Pembangunan Demokrasi	**Meningkatnya Peran lembaga demokrasi masyarakat**				Persentase Rekomendasi yang ditinjaklanjuti	100%					**1.123.044.172**	**1.235.348.589**		
8. 01 03 1.01	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Partai Politik, Pemilihan												**1.198.044.172**	**1.317.848.589**		
		Pembangunan Demokrasi	Meningkatnya partisipasi politik masyarakat	Pangkalpinang, Kab. Bangka, Kab. Bangka Barat, Kab. Bangka Tengah, Kab. Bangka Selatan, Kab. Belitung, Kab. Belitung Timur.					Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Pemilihan	2 Dokumen			**75.000.000**	82.500.000	Meningkatnya partisipasi politik masyarakat	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
		Pembangunan Demokrasi	Meningkatnya Peran lembaga demokrasi masyarakat	Pangkalpinang, Kab. Bangka, Kab. Bangka Barat, Kab. Bangka Tengah, Kab. Bangka Selatan, Kab. Belitung, Kab.					Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,	2 Dokumen			**1.123.044.172**	1.235.348.589	Meningkatnya Peran lembaga demokrasi masyarakat	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
8. 01 03 1.01 **04**	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta												62.720.000	68.992.000		
		Pembangunan Demokrasi	Meningkatnya partisipasi politik masyarakat	Pangkalpinang, Kab. Bangka, Kab. Bangka Barat, Kab. Bangka Tengah, Kab. Bangka Selatan, Kab. Belitung, Kab. Belitung Timur.							Jumlah Rekomendasi Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Perwakilan dan Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik	2 Rekomendasi	31.360.000	34.496.000	Meningkatnya partisipasi politik masyarakat	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
		Pembangunan Demokrasi	Meningkatnya Peran lembaga demokrasi masyarakat	Pangkalpinang, Kab. Bangka, Kab. Bangka Barat, Kab. Bangka Tengah, Kab. Bangka Selatan, Kab.							Jumlah Rekomendasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik.	2 Rekomendasi	31.360.000	34.496.000	Meningkatnya Peran lembaga demokrasi masyarakat	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
				Kabupaten/Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/ Indikator Program		Hasil Kegiatan/ Indikator Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan/ Indikator Sub kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
8. 01 03 1.01 05	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,												87.280.000	96.008.000		
		Pembangunan Demokrasi	Meningkatnya partisipasi politik masyarakat	Pangkalpinang, Kab. Bangka, Kab. Bangka Barat, Kab. Bangka Tengah, Kab. Bangka Selatan, Kab. Belitung, Kab. Belitung Timur.							Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	4 Laporan	43.640.000	48.004.000	Meningkatnya partisipasi politik masyarakat	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
		Pembangunan Demokrasi	Meningkatnya Peran lembaga demokrasi masyarakat	Pangkalpinang, Kab. Bangka, Kab. Bangka Barat, Kab. Bangka Tengah, Kab. Bangka Selatan, Kab. Belitung, Kab. Belitung Timur.							Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik	4 Laporan	43.640.000	48.004.000	Meningkatnya Peran lembaga demokrasi masyarakat	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
8. 01 03 1.01 06	Sub Kegiatan Pelaksanaan Fungsi Lain yang Diberikan Oleh Pimpinan												1.048.044.172	1.152.848.589		
		Pembangunan Demokrasi	Meningkatnya partisipasi politik masyarakat	Pangkalpinang, Kab. Bangka, Kab. Bangka Barat, Kab. Bangka Tengah, Kab. Bangka Selatan, Kab. Belitung, Kab. Belitung Timur.							Jumlah suara partai yg mendapatkan bantuan	618715 suara	1.048.044.172	1.152.848.589	Meningkatnya partisipasi politik masyarakat	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
8. 01 04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**												**60.000.000**	**66.000.000**		
		Pembangunan Demokrasi	**Meningkatnya Kebebasan sipil**				Indeks Kinerja Ormas	180 Skor					**60.000.000**	**66.000.000**		
8. 01 04 1.01	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.												**60.000.000**	**66.000.000**		
		Pembangunan Demokrasi	Meningkatnya Kebebasan sipil	Pangkalpinang, Kab. Bangka, Kab. Bangka Barat, Kab. Bangka Tengah, Kab. Bangka Selatan, Kab. Belitung, Kab.					Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan	2 Dokumen			**60.000.000**	66.000.000	Meningkatnya Kebebasan sipil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
8. 01 04 1.01 03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan												10.000.000	11.000.000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
				Kabupaten/Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/ Indikator Program		Hasil Kegiatan/ Indikator Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan/ Indikator Sub kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
		Pembangunan Demokrasi	Meningkatnya Kebebasan sipil	Pangkalpinang, Kab. Bangka, Kab. Bangka Barat, Kab. Bangka Tengah, Kab. Bangka Selatan, Kab. Belitung, Kab. Belitung Timur.							Jumlah Dokumen Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	2 Dokumen	10.000.000	11.000.000	Meningkatnya Kebebasan sipil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
8. 01 04 1.01 **04**	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas												50.000.000	55.000.000		
		Pembangunan Demokrasi	Meningkatnya Kebebasan sipil	Pangkalpinang, Kab. Bangka, Kab. Bangka Barat, Kab. Bangka Tengah, Kab. Bangka Selatan, Kab. Belitung, Kab. Belitung Timur.							Jumlah Laporan Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas	4 Laporan	50.000.000	55.000.000	Meningkatnya Kebebasan sipil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
8. 01 05	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**												**120.005.000**	132.005.500		
		Pembangunan Demokrasi	**Meningkatnya Kebebasan sipil**				Jumlah Angka Kriminalitas Menurun	150 Kasus					**120.005.000**	132.005.500		
8. 01 05 1.01	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya												**120.005.000**	132.005.500		
		Pembangunan Demokrasi	Meningkatnya Kebebasan sipil	Pangkalpinang, Kab. Bangka, Kab. Bangka Barat, Kab. Bangka Tengah, Kab. Bangka Selatan, Kab. Belitung, Kab.					Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	2 Dokumen			**120.005.000**	132.005.500	Meningkatnya Kebebasan sipil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
8. 01 05 1.01 **04**	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan												**51.945.000**	57.139.500		
		Pembangunan Demokrasi	Meningkatnya Kebebasan sipil	Pangkalpinang, Kab. Bangka, Kab. Bangka Barat, Kab. Bangka Tengah, Kab. Bangka Selatan, Kab. Belitung, Kab. Belitung Timur.							Jumlah Rekomendasi Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat	4 Rekomendasi	51.945.000	57.139.500	Meningkatnya Kebebasan sipil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
8. 01 05 1.01 **05**	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi												68.060.000	74.866.000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
				Kabupaten/Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/ Indikator Program		Hasil Kegiatan/ Indikator Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan/ Indikator Sub kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
		Pembangunan Demokrasi	Meningkatnya Kebebasan sipil	Pangkalpinang, Kab. Bangka, Kab. Bangka Barat, Kab. Bangka Tengah, Kab. Bangka Selatan, Kab. Belitung, Kab. Belitung Timur.							Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di	4 Laporan	68.060.000	74.866.000	Meningkatnya Kebebasan sipil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
8. 01 06	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK**												**644.999.700**	**709.499.670**		
		Pembangunan Demokrasi	**Meningkatnya Kebebasan sipil**				Jumlah Konflik Sosial menurun	10 Kasus					**644.999.700**	**709.499.670**		
8. 01 06 1.01	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial												**644.999.700**	**709.499.670**		
		Pembangunan Demokrasi	Meningkatnya Kebebasan sipil	Pangkalpinang, Kab. Bangka, Kab. Bangka Barat, Kab. Bangka Tengah, Kab. Bangka Selatan, Kab. Belitung, Kab.					Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan	2 Dokumen			**644.999.700**	709.499.670	Meningkatnya Kebebasan sipil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
8. 01 06 1.01 **04**	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi												509.519.900	560.471.890		
		Pembangunan Demokrasi	Meningkatnya Kebebasan sipil	Pangkalpinang, Kab. Bangka, Kab. Bangka Barat, Kab. Bangka Tengah, Kab. Bangka Selatan, Kab. Belitung, Kab. Belitung Timur.							Jumlah Rekomendasi Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan	2 Rekomendasi	468.369.900	515.206.890	Meningkatnya Kebebasan sipil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
		Pembangunan Demokrasi	Meningkatnya Kebebasan sipil	Pangkalpinang, Kab. Bangka, Kab. Bangka Barat, Kab. Bangka Tengah, Kab. Bangka Selatan, Kab. Belitung, Kab.							Jumlah Rekomendasi Penanganan Konflik di Daerah	2 Rekomendasi	41.150.000	45.265.000	Meningkatnya Kebebasan sipil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
8. 01 06 1.01 **05**	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang												135.479.800	149.027.780		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
				Kabupaten/Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/ Indikator Program		Hasil Kegiatan/ Indikator Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan/ Indikator Sub kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
		Pembangunan Demokrasi	Meningkatnya Kebebasan sipil	Pangkalpinang, Kab. Bangka, Kab. Bangka Barat, Kab. Bangka Tengah, Kab. Bangka Selatan, Kab. Belitung, Kab. Belitung Timur.							Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang	4 Laporan	67.739.900	74.513.890	Meningkatnya Kebebasan sipil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
		Pembangunan Demokrasi	Meningkatnya Kebebasan sipil	Pangkalpinang, Kab. Bangka, Kab. Bangka Barat, Kab. Bangka Tengah, Kab. Bangka Selatan, Kab.							Jumlah Laporan Penanganan Konflik di Daerah	4 Laporan	67.739.900	74.513.890	Meningkatnya Kebebasan sipil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Keterangan : Untuk lokasi kecamatan dan kelurahan dalam ruang lingkup global mengacu pada lokus kab dan kota
dikarenakan belum dapat ditentukan karena berdasarkan pada temuan kasus, program , kegiatan dan sub kegiatan bukan bersifat sosialisasi

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2021

PERANGKAT DAERAH : DINAS SOSIAL PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Hasil Kegiatan/Indikator Kegiatan		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
					URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
					URUSAN PEMERINTAH BIDANG SOSIAL															
1	**06**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**												**14.705.628.053**	**16.299.201.558**	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
											Nilai SAKIP Perangkat Daerah	**77,70 %**					**195.475.000**	**323.500.000**		
1	**06**	**01**	**1.01**		**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**												**195.475.000**	**323.500.000**		
													Jumlah dok perencanaan dan evaluasi	**7 dokumen**			**195.475.000**	**323.500.000**		
1	06	01	1.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah												19.100.000	21.000.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah dokumen perencanaan PD	4 dokumen	19.100.000	21.000.000		
1	06	01	1.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan												57.310.000	22.000.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen	2 dokumen	57.310.000	22.000.000		
1	06	01	1.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah												59.715.000	59.000.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah dokumen evaluasi PD (DALEV)	4 dokumen	59.715.000	59.000.000		
1	06	01	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah												20.000.000	119.683.521		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah kesepakatan Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan PD	1 dokumen	20.000.000	119.683.521		
1	06	01	1.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												39.350.000	101.816.479		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah dok Evalusi kinerja PD (LKPJ, LAKIP, LPPD)	3 dokumen	39.350.000	101.816.479		
											Survey Kepuasan Pelayanan Internal	**90,00 %**					**14.510.153.053**	**15.975.701.558**		
1	**06**	**01**	**1.01**		**Administrasi Keuangan**												**11.568.060.686**	**12.792.031.558**		
													Survey Kepuasan Pelayanan Keuangan	**90,00 %**			**11.568.060.686**	**12.792.031.558**		
1	06	01	1.02	**04**	**Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**												11.481.060.686	12.704.031.558		
															Jumlah Pegawai ASN Yang Menerima Gaji dan Tunjangan	**93 orang**	11.481.060.686	12.704.031.558		
1	06	01	1.02	07	Penyusunan laporan keuangan bulanan/semesteran												40.000.000	44.000.000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Hasil Kegiatan/Indikator Kegiatan		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah laporan keuangan bulanan Semesteran	1 Laporan	40.000.000	44.000.000		
1	06	01	1.02	09	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun												47.000.000	44.000.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 Laporan	47.000.000	44.000.000		
1	**06**	**01**	**1.03**		**Administrasi Umum**												**2.907.092.367**	**3.183.670.000**		
													Survey Kepuasan Pelayanan Umum	**90,00 %**			**2.907.092.367**	**3.183.670.000**		
1	06	01	1.03	01	Penyediaan Jasa surat menyurat												1.110.800.000	1.110.800.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah Surat/Barang yang dikirim	2500 Pcs	10.000.000	10.000.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah Materai	12.500 Lembar	7.500.000	7.500.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah tenaga pramubakti yang dipekerjakan	29 Orang	1.093.300.000	1.093.300.000		
1	06	01	1.03	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik												150.000.000	222.750.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah bulan Tagihan rekening listrik, air, telepon/fax, tv kabel, virtual meeting yang dibayarkan	12 bulan	150.000.000	222.750.000		
1	06	01	1.03	03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor												188.500.000	188.500.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah tenaga keamanan/satpam kantor yang dipekerjakan	5 Orang	188.500.000	188.500.000		
1	06	01	1.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional												134.438.367	134.438.367		
															Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional yang disediakan	7 unit	134.438.367	134.438.367		
1	06	01	1.03	07	Penyediaan jasa Administrasi keuangan												212.694.000	133.920.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah pengelola administrasi keuangan yang bekerja	20 Orang	212.694.000	133.920.000		
1	06	01	1.03	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor												279.800.000	226.200.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah tenaga kebersihan yang dipekerjakan	6 Orang	279.800.000	226.200.000		
1	06	01	1.03	10	Penyediaan alat tulis kantor												110.000.000	144.000.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					jumlah jenis ATK yang dibeli	37 jenis	110.000.000	144.000.000		
1	06	01	1.03	11	Penyediaan barang cetak dan penggandaan												11.000.000	12.500.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					jumlah barang cetak	180 eksemplar	11.000.000	12.500.000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Hasil Kegiatan/Indikator Kegiatan		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	06	01	1.03	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor												40.000.000	60.000.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah komponen instalasi listrik	15 Jenis	40.000.000	60.000.000		
1	06	01	1.03	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan												12.000.000	12.000.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan	800 eksemplar	12.000.000	12.000.000		
1	06	01	1.03	16	Penyediaan bahan logistik kantor												21.390.000	18.000.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					jumlah bahan logistik kantor	8 Jenis	21.390.000	18.000.000		
1	06	01	1.03	17	Penyediaan makan dan minum												54.050.000	60.000.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah makan dan minum Tamu	500 Pax	21.550.000	25.000.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah makan dan minum rapat	700 pax	32.500.000	35.000.000		
1	06	01	1.03	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah												265.000.000	475.000.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	22 kali	100.000.000	275.000.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah	33 Kali	165.000.000	200.000.000		
1	06	01	1.03	29	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor												50.000.000	355.000.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 Unit	50.000.000	355.000.000		
1	06	01	1.03	30	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan												35.600.000	35.000.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					jumlah mobil jabatan yang dipelihara	1 Unit	35.600.000	35.000.000		
1	06	01	1.03	31	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/Oprasional												190.320.000	315.000.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah mobil oprasional yang dipelihara	12 Unit	190.320.000	315.000.000		
1	06	01	1.03	34	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor												41.500.000	50.000.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	6 jenis	41.500.000	50.000.000		
1	**06**	**01**	**1.04**		**Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**												**35.000.000**	-		
													Survey kepuasan pelayan kepegawaian	**90,00 %**			**35.000.000**	-		
1	06	01	1.04	01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi												35.000.000			
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah mesin/kartu absensi yang diadakan	3 unit	35.000.000	-		
1	**06**	**02**			**Program Pemberdayaan Sosial**												**1.176.563.000**	**1.538.190.913**	Pembangunan Sosial	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Hasil Kegiatan/Indikator Kegiatan		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
											Prosentase PMKS/PSKS yg terberdayakan	**50,00 %**					**1.176.563.000**	**1.538.190.913**		
1	**06**	**02**	**1.01**		**Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah**												**100.000.000**	**150.000.000**		
													Jumlah Penyelenggara Dunia Usaha / lembaga / masyarakat yang diterbitkan Izin dan berpartisipasi menyelenggarakan Pengumpulan Uang/Barang dan Undian Gratis berhadiah sesuai dengan aturan yang	**2 lembaga**			**100.000.000**	**150.000.000**		
1	06	02	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang												100.000.000	150.000.000		
						Pembangunan Sosial	Meningkatkan kesejahteran sosial	3 Kab/kota							Jumlah penyelenggara; Dunia Usaha / lembaga / masyarakat yang berpartispasi menyelenggarakan Pengumpulan Uang/Barang dan Undian Gratis berhadiah sesuai dengan aturan yang	2 Penyelenggara ; lembaga/ dunia usaha/masyarakat	100.000.000	150.000.000		
1	**06**	**02**	**1.02**		**Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi**												**1.076.563.000**	**1.388.190.913**		
													Jumlah PSKS yang diberdayakan	**203 orang**			**1.076.563.000**	**1.388.190.913**		
1	06	02	1.02	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi												306.220.600	306.220.600		
						Pembangunan Sosial	Meningkatkan kesejahteran sosial	Prov. Kep. Babel							Jumlah Potensi Pekerja Sosial Masyarakat yang di tingkatkan	416 PSM	306.220.600	306.220.600		
1	06	02	1.02	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi												315.385.000	315.385.000		
						Pembangunan Sosial	Meningkatkan kesejahteran sosial	Prov. Kep. Babel							Jumlah Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang di tingkatkan	47 TKSK	315.385.000	315.385.000		
1	06	02	1.02	03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi												118.372.087	430.000.000		
						Pembangunan Sosial	Meningkatkan kesejahteran sosial	Prov. Kep. Babel							Jumlah Kelembagaan masyarakat yang di tingkatkan kemampuannya	3 lembaga/ 268 PSKS	118.372.087	430.000.000		
1	06	02	1.02	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi												336.585.313	336.585.313		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Hasil Kegiatan/Indikator Kegiatan		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
						Pembangunan Sosial	Meningkatkan kesejahteran sosial	Prov. Kep. Babel								Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga yang di tingkatkan kemampuannya	11 LK3	336.585.313	336.585.313		
1	**06**	**03**			**Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan**												**75.000.000**	**100.000.000**	Pembangunan Sosial	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
											Prosentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang di tanganj	**50,00 %**					**75.000.000**	**100.000.000**		
1	**06**	**03**	**1.01**		**Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal**												**75.000.000**	**100.000.000**		
													Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi yang	7 Orang			**75.000.000**	**100.000.000**		
1	06	03	1.01	01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal												75.000.000	100.000.000		
						Pembangunan Sosial	Meningkatkan kesejahteran sosial	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal yang difasilitasi	7 Orang	75.000.000	100.000.000		
1	**06**	**04**			**Program Rehabilitasi Sosial**												**800.000.000**	**1.050.000.000**	Pembangunan Sosial	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
											Prosentase PMKS yang di Rehabilitasi sosial di Dalam Panti Non Pemerintah	**50,00 %**					**800.000.000**	**1.050.000.000**		
1	**06**	**04**	**1.01**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti**												**250.000.000**	**300.000.000**		
													Jumlah penyandang disabilitasi yang direhab sosial di Dalam Panti Non	**20 orang**			**250.000.000**	**300.000.000**		
1	06	04	1.01	04	Penyediaan Alat Bantu												50.000.000	60.000.000		
						Pembangunan Sosial	Meningkatkan kesejahteran sosial	Pangkalpinang							Jumlah disabilitas dalam panti non pemerintah yang mendapatkan alat bantu	5 Orang	50.000.000	60.000.000		
1	06	04	1.01	06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial												150.000.000	190.000.000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Hasil Kegiatan/Indikator Kegiatan		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
						Pembangunan Sosial	Meningkatkan kesejahteran sosial	Pangkalpinang							1. Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial dalam panti non	10 Orang	75.000.000	115.000.000		
						Pembangunan Sosial	Meningkatkan kesejahteran sosial	Pangkalpinang							2. Jumlah tenaga profesional pekerja sosial yang memberi bimbingan sosial disabilitas di dalam panti non pemerintah yang mendapatkan peningkatan kapasitas	5 Orang	25.000.000	25.000.000		
						Pembangunan Sosial	Meningkatkan kesejahteran sosial	Pangkalpinang							3. Jumlah panti disabilitas non pemerintah yang mendapatkan bimbingan	1 Panti	50.000.000	50.000.000		
1	06	04	1.01	10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga												50.000.000	50.000.000		
						Pembangunan Sosial	Meningkatkan kesejahteran sosial	Pangkalpinang							Jumlah disabilitas terlantar yang mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga dalam	10 Orang	50.000.000	50.000.000		
1	**06**	**04**	**1.03**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti**												**150.000.000**	**200.000.000**		
													Jumlah lanjut usia terlantar yang direhab sosial di	**10 orang**			**150.000.000**	**200.000.000**		
1	06	04	1.03	04	Penyediaan Alat Bantu												40.000.000	100.000.000		
						Pembangunan Sosial	Meningkatkan kesejahteran sosial	7 kab/kota							Jumlah lanjut usia dalam panti yang mendapatkan alat bantu	5 Orang	40.000.000	100.000.000		
1	06	04	1.03	05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti Sosial												4.000.000	5.000.000		
						Pembangunan Sosial	Meningkatkan kesejahteran sosial	7 kab/kota							Jumlah lanjut usia yang mendapatkan perbekalan	10 Orang	4.000.000	5.000.000		
1	06	04	1.03	06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial												106.000.000	95.000.000		
						Pembangunan Sosial	Meningkatkan kesejahteran sosial	7 kab/kota							1. Jumlah lanjut usia yang mendapatkan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	20 Orang	75.000.000	60.000.000		
						Pembangunan Sosial	Meningkatkan kesejahteran sosial	7 kab/kota							2. Jumlah tenaga profesional pekerja sosial yang memberi bimbingan sosial lanjut usia di dalam panti yang mendapatkan	5 Orang	25.000.000	25.000.000		
						Pembangunan Sosial	Meningkatkan kesejahteran sosial	7 kab/kota							3. Jumlah panti lanjut usia yang mendapatkan bimbingan pelayanan kepada	1 Panti	6.000.000	10.000.000		
1	**06**	**04**	**1.02**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti**												**200.000.000**	**250.000.000**		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Hasil Kegiatan/Indikator Kegiatan		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
													Jumlah anak terlantar yang direhab sosial di Dalam Panti Non	**10 orang**			**200.000.000**	**250.000.000**		
1	06	04	1.02	01	Pengasuhan												45.000.000	60.000.000		
						Pembangunan Sosial	Meningkatkan kesejahteran sosial	7 Kab/Kota							Jumlah Pengasuh anak di dalam panti non pemerintah yang mendapat bimtek pembekalan standar nasional pengasuhan anak	27 orang	45.000.000	60.000.000		
1	06	04	1.02	06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial												35.000.000	40.000.000		
						Pembangunan Sosial	Meningkatkan kesejahteran sosial	7 kab/kota							Jumlah tenaga pelayanan sosial didalam panti non pemerintah yang mendapat bimbingan keterampilan	25 orang	35.000.000	40.000.000		
1	06	04	1.02	08	Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak												15.000.000	25.000.000		
						Pembangunan Sosial	Meningkatkan kesejahteran sosial	7 Kab/Kota							Jumlah anak di dalam panti non pemerintah mendapatkan fasilitasi pembuatan akta kelahiran, NIK dan KIA	10 orang	15.000.000	25.000.000		
1	06	04	1.02	09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar												40.000.000	50.000.000		
						Pembangunan Sosial	Meningkatkan kesejahteran sosial	7 Kab/Kota							Jumlah klien anak di dalam panti non pemerintah yang mendapat akses layanan pendidikan	20 orang	20.000.000	25.000.000		
						Pembangunan Sosial	Meningkatkan kesejahteran sosial	7 Kab/Kota							Jumlah klien anak di dalam panti non pemerintah yang mendapat akses layanan kesehatan dasar	20 orang	20.000.000	25.000.000		
1	06	04	1.02	10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga												20.000.000	30.000.000		
						Pembangunan Sosial	Meningkatkan kesejahteran sosial	7 Kab/Kota							Jumlah klien anak di dalam panti non pemerintah yang mendapat pelayanan penelusuran keluarga	10 orang	20.000.000	30.000.000		
1	06	04	1.02	11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga												20.000.000	20.000.000		
						Pembangunan Sosial	Meningkatkan kesejahteran sosial	7 Kab/Kota							Jumlah anak di dalam panti non pemerintah yang mendapat pelayanan reunifikasi keluarga	10 orang	20.000.000	20.000.000		
1	06	04	1.02	12	Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Penganti												25.000.000	25.000.000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Hasil Kegiatan/Indikator Kegiatan		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
						Pembangunan Sosial	Meningkatkan kesejahteran sosial	7 Kab/Kota							Jumlah anak yang mendapat akses layanan pengasuhan kepada keluarga pengganti	10 orang	25.000.000	25.000.000		
1	**06**	**04**	**1.04**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti**												**100.000.000**	**150.000.000**		
													Jumlah Gelandangan dan pengemis yang direhab sosial	**8 orang**			**100.000.000**	**150.000.000**		
1	06	04	1.04	07	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar												50.000.000	80.000.000		
						Pembangunan Sosial	Meningkatkan kesejahteran sosial	Pangkalpinang							Jumlah gelandangan dan pengemis yang diberikan bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	8 orang	50.000.000	80.000.000		
1	06	04	1.04	08	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak												5.000.000	7.000.000		
						Pembangunan Sosial	Meningkatkan kesejahteran sosial	Kab/Kota							Jumlah gelandangan dan pengemis yang difasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	8 orang	5.000.000	7.000.000		
1	06	04	1.04	09	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar												10.000.000	18.000.000		
						Pembangunan Sosial	Meningkatkan kesejahteran sosial	Kab/Kota							Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapat akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	8 orang	10.000.000	18.000.000		
1	06	04	1.04	10	Pemulangan ke Daerah Asal												35.000.000	45.000.000		
						Pembangunan Sosial	Meningkatkan kesejahteran sosial	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah gelandangan dan pengemis yang dipulangkan ke daerah asal	8 orang	35.000.000	45.000.000		
1	**06**	**04**	**1.05**		**Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti**												**100.000.000**	**150.000.000**		
													Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan	**10 orang**			**100.000.000**	**150.000.000**		
1	06	04	1.05	07	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar												40.000.000	65.000.000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Hasil Kegiatan/Indikator Kegiatan		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
						Pembangunan Sosial	Meningkatkan kesejahteran sosial	Pangkalpinang							Jumlah PMKS lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang diberikan bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	10 orang	40.000.000	65.000.000		
1	06	04	1.05	08	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak												5.000.000	10.000.000		
						Pembangunan Sosial	Meningkatkan kesejahteran sosial	Kab/Kota							Jumlah PMKS lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang difasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau	10 orang	5.000.000	10.000.000		
1	06	04	1.05	09	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar												10.000.000	20.000.000		
						Pembangunan Sosial	Meningkatkan kesejahteran sosial	Kab/Kota							Jumlah PMKS lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapat akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	10 orang	10.000.000	20.000.000		
1	06	04	1.05	10	Pemulangan ke Daerah Asal												45.000.000	55.000.000		
						Pembangunan Sosial	Meningkatkan kesejahteran sosial	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah PMKS lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang dipulangkan ke daerah asal	10 orang	45.000.000	55.000.000		
1	**06**	**05**			**Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**												**1.276.759.238**	**1.475.000.000**	Pembangunan Sosial	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
											Prosentase PMKSyang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	**50,00 %**					**1.276.759.238**	**1.475.000.000**		
1	**06**	**05**	**1.01**		**Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal**												**75.000.000**	**150.000.000**		
													Jumlah anak yang mendapatkan perlindungan sosial	**5 orang**			**75.000.000**	**150.000.000**		
1	06	05	1.01	01	Pengangkatan Anak antar WNI												37.500.000	75.000.000		
						Pembangunan Sosial	Meningkatkan kesejahteran sosial	7 kab/kota							Jumlah anak yang di angkat (adopsi) dan memperoleh perlindungan sosial	5 orang	37.500.000	75.000.000		
1	06	05	1.01	02	Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal												37.500.000	75.000.000		
						Pembangunan Sosial	Meningkatkan kesejahteran sosial	7 kab/kota							Jumlah calon orang tua angkat (COTA) yang mendapatkan perizinan	5 orang	37.500.000	75.000.000		
1	**06**	**05**	**1.02**		**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi**												**1.201.759.238**	**1.325.000.000**		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Hasil Kegiatan/Indikator Kegiatan		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
													Jumlah data Fakir Miskin yang dikelola dengan baik	**80.000 KK**			**1.201.759.238**	**1.325.000.000**		
1	06	05	1.02	01	Pendataan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota												320.000.000	450.000.000		
						Pembangunan Sosial	Meningkatkan kesejahteran sosial	7 kab/kota							Jumlah Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang didata/di-*update*	7 kab/kota	320.000.000	450.000.000		
1	06	05	1.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota												881.759.238	875.000.000		
						Pembangunan Sosial	Meningkatkan kesejahteran sosial	7 kab/kota							Jumlah Data Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang dikelola	7 kab/kota	75.000.000	75.000.000		
						Pembangunan Sosial	Meningkatkan kesejahteran sosial	7 Kab/Kota							Jumlah Fakir Miskin yang ditangani	220 KK	556.759.238	500.000.000		
						Pembangunan Sosial	Meningkatkan kesejahteran sosial	7 kab/kota							Jumlah Keluarga Miskin yang diberikan Pendampingan Jaminan Sosial	43749 KK	250.000.000	300.000.000		
1	**06**	**06**			**Program Penanganan Bencana**												**940.000.000**	**1.000.000.000**	Peningkatan Pembangunan Bidang Kebencanaan	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
											Prosentase korban bencana yg mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	**50,00 %**					**940.000.000**	**1.000.000.000**		
1	**06**	**06**	**1.01**		**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi**												**690.000.000**	**700.000.000**		
													Jumlah korban Bencana Alam yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	**57 orang**			**690.000.000**	**700.000.000**		
1	06	06	1.01	01	Penyediaan Permakananan												625.550.000	633.550.000		
						Peningkatan Pembangunan Bidang Kebencanaan	Meningkatkan Kapasitas daerah terhadap penanggulangan bencana	7 Kab/Kota							Jumlah korban bencana alam yang mendapat bantuan permakanan	57 orang	22.350.000	30.350.000		
						Peningkatan Pembangunan Bidang Kebencanaan	Meningkatkan Kapasitas daerah terhadap penanggulangan bencana	7 Kab/Kota							Jumlah petugas posko dan bencana yang mengelola posko dan gudang logistik bencana	208 orang	603.200.000	603.200.000		
1	06	06	1.01	03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi												64.450.000	66.450.000		
						Peningkatan Pembangunan Bidang Kebencanaan	Meningkatkan Kapasitas daerah terhadap penanggulangan bencana	7 Kab/Kota							Jumlah korban bencana alam yang mendapat BBR	10 orang	50.000.000	50.000.000		
						Peningkatan Pembangunan Bidang Kebencanaan	Meningkatkan Kapasitas daerah terhadap penanggulangan bencana	7 Kab/Kota							Jumlah petugas yang melaksanakan assement BBR	7 orang	14.450.000	16.450.000		
																	250.000.000	**300.000.000**		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Hasil Kegiatan/Indikator Kegiatan		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
													Jumlah korban Bencana Sosial yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	**100 jiwa**			**250.000.000**	**300.000.000**		
1	06	06	1.01	01	Penyediaan Permakananan												30.000.000	30.000.000		
						Peningkatan Pembangunan Bidang Kebencanaan	Meningkatkan Kapasitas daerah terhadap penanggulangan bencana	7 Kab/Kota							Jumlah kebutuhan kepada client konflik sosial yang tersedia	100 jiwa	30.000.000	30.000.000		
1	06	06	1.01	02	Penyediaan Sandang												70.000.000	80.000.000		
						Peningkatan Pembangunan Bidang Kebencanaan	Meningkatkan Kapasitas daerah terhadap penanggulangan bencana	7 Kab/Kota							Jumlah Bahan Bangunan Rumah kepada korban kebakaran yang tersedia	1 Tahun	70.000.000	80.000.000		
1	06	06	1.01	04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan												150.000.000	190.000.000		
						Peningkatan Pembangunan Bidang Kebencanaan	Meningkatkan Kapasitas daerah terhadap penanggulangan bencana	7 Kab/Kota							Jumlah pemulangan keluarga rentan tempat asalnya luar dan dalam daerah yang tersedia	20 jiwa	150.000.000	190.000.000		
1	**06**	**07**			**Program Pengelolaan TMP**												**500.000.000**	**520.000.000**	Pembangunan Sosial	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
											Prosentase TMP yang dikelola	**100,00 %**								
1	**06**	**07**	**1.01**		**Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi**												**500.000.000**	**520.000.000**		
													Jumlah TMP yang dikelola	**1 TMP**			**500.000.000**	**520.000.000**		
1	06	07	1.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsil												500.000.000	520.000.000		
						Pembangunan Sosial	Meningkatkan kesejahteran sosial	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1 TMP	500.000.000	520.000.000		
1-6	**0-0**	**0-0**	**01**	**01**	**UPTD. PANTI SOSIAL BINA SERUMPUN (PSBS)**												**1.089.773.351**	**1.150.000.000**		
1	**06**	**04**			**Program Rehabilitasi Sosial**												**98.900.000**	**110.900.000**	Pembangunan Sosial	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
											Prosentase PMKS yang di Rehabilitasi sosial didalam panti pemerintah	**50,00 %**					**98.900.000**	**110.900.000**		
1	**06**	**04**	**1.02**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti**												**58.800.000**	**60.800.000**		
													Jumlah anak terlantar yang direhab sosial didalam panti pemerintah	**30 klien**			**58.800.000**	**60.800.000**		
1	06	04	1.02	03	Penyediaan Sandang												6.000.000	6.000.000		
						Pembangunan Sosial	Meningkatkan kesejahteran sosial	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah Sandang yang disediakan dalam panti pemerintah	30 klien	6.000.000	6.000.000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Hasil Kegiatan/Indikator Kegiatan		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	06	04	1.02	03\5	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti												5.000.000	5.000.000		
						Pembangunan Sosial	Meningkatkan kesejahteran sosial	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah klien yang mendapatkan layanan Perbekalan Kesehatan yang disediakan dalam panti pemerintah	30 klien	5.000.000	5.000.000		
1	06	04	1.02	06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial												12.800.000	12.800.000		
						Pembangunan Sosial	Meningkatkan kesejahteran sosial	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah klien yang mendapatkan layanan bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial yang disediakan dalam panti	30 klien	12.800.000	12.800.000		
1	06	04	1.02	07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari												20.000.000	20.000.000		
						Pembangunan Sosial	Meningkatkan kesejahteran sosial	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah klien yang mendapatkan bimbingan kegiatan aktivitas hidup sehari-hari yang disedikan dalam panti pemerintah	30 klien	20.000.000	20.000.000		
1	06	04	1.02	10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga												15.000.000	17.000.000		
						Pembangunan Sosial	Meningkatkan kesejahteran sosial	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah klien yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga dalam	30 klien	15.000.000	17.000.000		
1	**06**	**04**	**1.03**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti**												**40.100.000**	**50.100.000**		
											Prosentase PMKS yang di Rehabilitasi sosial didalam panti pemerintah		**Jumlah lanjut usia terlantar yang direhab sosial didalam panti**	**10 klien**			**40.100.000**	**50.100.000**		
1	06	04	1.03	02	Penyediaan Sandang												2.500.000	2.500.000		
						Pembangunan Sosial	Meningkatkan kesejahteran sosial	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah sandang yang disediakan dalam panti pemerintah	10 klien	2.500.000	2.500.000		
1	06	04	1.03	04	Penyediaan Alat Bantu												3.000.000	3.000.000		
						Pembangunan Sosial	Meningkatkan kesejahteran sosial	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					jumlah alat bantu yang disediakan dalam panti pemerintah	10 klien	3.000.000	3.000.000		
1	06	04	1.03	05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti Sosial												10.000.000	15.000.000		
						Pembangunan Sosial	Meningkatkan kesejahteran sosial	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah klien yang mendapatkan layanan Perbekalan Kesehatan yang disediakan dalam panti pemerintah	10 klien	10.000.000	15.000.000		
1	06	04	1.03	06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial												9.600.000	9.600.000		
						Pembangunan Sosial	Meningkatkan kesejahteran sosial	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah klien yang mendapatkan layanan Bimbingan fisik, mental Spiritual dan Sosial dalam panti	10 klien	9.600.000	9.600.000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Hasil Kegiatan/Indikator Kegiatan		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	06	04	1.03	10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga												12.000.000	15.000.000		
						Pembangunan Sosial	Meningkatkan kesejahteran sosial	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah klien yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga dalam	10 klien	12.000.000	15.000.000		
1	06	04	1.03	12	Pemulasaraan												3.000.000	5.000.000		
						Pembangunan Sosial	Meningkatkan kesejahteran sosial	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah klien yang meninggal dunia dalam panti	10 klien	3.000.000	5.000.000		
1	**06**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**												**990.873.351**	**1.039.100.000**	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
											Survey kepuasan pelayanan internal di PSBS	**90,00 %**					**990.873.351**	**1.039.100.000**		
1	**06**	**01**	**1.03**		**Administrasi Umum**												**990.873.351**	**1.039.100.000**		
1	06	01	1.03	01	Penyediaan Jasa surat menyurat												416.400.000	416.700.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah Surat/Barang yang dikirim	5 Surat/barang yang dikirim	200.000	200.000		
															Jumlah materai yang disediakan dalam panti	300 Lembar	1.500.000	1.800.000		
															Jumlah tenaga pramubakti yang dipekerjakan dalam	11 orang	414.700.000	414.700.000		
1	06	01	1.03	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik												36.439.992	35.000.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					JTagihan rekening listrik, air, telepon/fax, tv kabel, virtual meeting yang dibayarkan dalam panti pemerintah	12 bulan	36.439.992	35.000.000		
1	06	01	1.03	03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor												113.100.000	113.100.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah tenaga keamanan/satpam kantor yang dipekerjakan dalam panti pemerintah	3 orang	113.100.000	113.100.000		
1	06	01	1.03	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja												5.000.000	5.000.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jjumlah peralatan kerja yang diperbaiki dalam	7 unit	5.000.000	5.000.000		
1	06	01	1.03	10	Penyediaan alat tulis kantor												18.000.000	20.000.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					jumlah jenis ATK yang dibeli dalam panti pemerintah	35 jenis	18.000.000	20.000.000		
1	06	01	1.03	11	Penyediaan barang cetak dan penggandaan												2.000.000	2.000.000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Hasil Kegiatan/Indikator Kegiatan		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					jumlah barang cetak dalam panti pemerintah jumlah barang penggandaan	1 eksamplar 100 lembar 1 dokumen	2.000.000	2.000.000		
1	06	01	1.03	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor												5.000.000	8.000.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia dalam panti pemerintah	10 jenis	5.000.000	8.000.000		
1	06	01	1.03	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor												19.070.000	33.300.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia dalam panti pemerintah	20 jenis	19.070.000	33.300.000		
1	06	01	1.03	14	Penyediaan peralatan rumah tangga												17.500.000	15.500.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia dalam panti pemerintah	20 unit	17.500.000	15.500.000		
1	06	01	1.03	16	Penyediaan bahan logistik kantor												183.803.359	200.000.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					jumlah bahan logistik kantor yang tersedia dalam panti pemerintah	35 unit	183.803.359	200.000.000		
1	06	01	1.03	17	Penyediaan makan dan minum												5.000.000	8.000.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah makan dan minum Tamu yang tersedia dalam panti pemerintah	10 pax	5.000.000	8.000.000		
1	06	01	1.03	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah												29.700.000	31.500.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dilaksanakan	7 kali	29.700.000	31.500.000		
1	06	01	1.03	23	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor												10.500.000	10.500.000		
															Jumlah Perlengkapan	3 unit	10.500.000	10.500.000		
1	06	01	1.03	26	Pengadaan mebeleur												10.000.000	10.000.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah mebelair yang diadakan dalam panti pemerintah	1 unit	10.000.000	10.000.000		
1	06	01	1.03	29	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor												75.000.000	100.000.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					jumlah gedung kantor yang dipelihara dalam panti pemerintah	3 unit	75.000.000	100.000.000		
1	06	01	1.03	31	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/Oprasional												32.360.000	28.000.000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Hasil Kegiatan/Indikator Kegiatan		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah kendaraan operasional yang dipelihara dalam panti pemerintah	3 unit	32.360.000	28.000.000		
1	06	01	1.03	33	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor												9.000.000	10.000.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara dalam panti pemerintah	3 unit	9.000.000	10.000.000		
1	06	01	1.03	36	Pemeliharaan rutin/berkala mebeler												3.000.000	3.000.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					umlah meubelair yang dipelihara dalam panti pemerintah	2 set	3.000.000	3.000.000		
1-6	**0-0**	**0-0**	**01**	**02**	**UPTD. PANTI SOSIAL BINA LARAS "HIJRAH" (PSBL)**												**1.337.600.000**	**1.500.000.000**		
1	**06**	**04**			**Program Rehabilitasi Sosial**												**656.550.000**	**656.550.000**	Pembangunan Sosial	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
											Prosentase PMKS yang di Rehabilitasi sosial di PSBL	**50,00 %**					**656.550.000**	**656.550.000**		
1	**06**	**04**	**1.01**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti**												**656.550.000**	**656.550.000**		
													Jumlah penyandang disabilitasi yang direhab sosial dalam Panti	**20 orang**			**656.550.000**	**656.550.000**		
1	06	04	1.01	01	Penyediaan Permakanan												232.450.000	232.450.000		
						Pembangunan Sosial	Meningkatkan kesejahteran sosial	Kabupaten Belitung Timur							Jumlah kebutuhan permakanan yang disediakan dalam Panti Pemerintah	20 orang	232.450.000	232.450.000		
1	06	04	1.01	02	Penyediaan Sandang												30.000.000	30.000.000		
						Pembangunan Sosial	Meningkatkan kesejahteran sosial	Kabupaten Belitung Timur							Jumlah kebutuhan sandang yang disediakan dalam Panti Pemerintah	20 orang	30.000.000	30.000.000		
1	06	04	1.01	05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti												10.000.000	10.000.000		
						Pembangunan Sosial	Meningkatkan kesejahteran sosial	Kabupaten Belitung Timur							Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan dalam Panti Pemerintah	20 orang	10.000.000	10.000.000		
1	06	04	1.01	06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial												40.000.000	40.000.000		
						Pembangunan Sosial	Meningkatkan kesejahteran sosial	Kabupaten Belitung Timur							Jumlah sarana prasarana penunjang kegiatan Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial yang disediakan dalam Panti Pemerintah	20 orang	40.000.000	40.000.000		
1	06	04	1.01	09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar												344.100.000	344.100.000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Hasil Kegiatan/Indikator Kegiatan		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
						Pembangunan Sosial	Meningkatkan kesejahteran sosial	Kabupaten Belitung Timur								Jumlah Jasa Tenaga Teknis Lainnya yang disediakan dalam panti pemerintah	5 orang	188.500.000	188.500.000		
						Pembangunan Sosial	Meningkatkan kesejahteran sosial	Kabupaten Belitung Timur								Jumlah Jasa Tenaga Perawat yang disediakan panti pemerintah	4 orang	150.800.000	150.800.000		
						Pembangunan Sosial	Meningkatkan kesejahteran sosial	Kabupaten Belitung Timur								Jumlah Penerima Manfaat yang mendapat akses ke layanan kesehatan dasar dalam panti pemerintah	20 orang	4.800.000	4.800.000		
					Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													**681.050.000**	**843.450.000**	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi
											Survey kepuasan pelayanan internal di PSBL	**90,00 %**					**621.050.000**	**843.450.000**		
1	**06**	**01**	**1.03**		**Administrasi Umum**													**621.050.000**	**783.450.000**		
													Survey kepuasan pelayanan umum di PSBL	**90,00 %**				**621.050.000**	**783.450.000**		
1	06	01	1.03	01	Penyediaan Jasa surat menyurat													7.500.000	7.500.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Kabupaten Belitung Timur								Jumlah jasa surat menyurat yang disediakan di PSBL	552 berkas	7.500.000	7.500.000		
1	06	01	1.03	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik													23.800.000	23.800.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Kabupaten Belitung Timur								Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia di PSBL	9 gedung	23.800.000	23.800.000		
1	06	01	1.03	03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor													160.800.000	160.800.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Kabupaten Belitung Timur								Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia di PSBL	9 gedung	10.000.000	10.000.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Kabupaten Belitung Timur								Jumlah jasa tenaga security yang disediakan di PSBL	4 orang	150.800.000	150.800.000		
1	06	01	1.03	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor													226.200.000	226.200.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Kabupaten Belitung Timur								Jumlah jasa pramusaji yang tersedia di PSBL	2 orang	75.400.000	75.400.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Kabupaten Belitung Timur								Jumlah jasa pramubakti yang tersedia di PSBL	4 orang	150.800.000	150.800.000		
1	06	01	1.03	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja													7.000.000	7.000.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Kabupaten Belitung Timur								Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja yang tersedia di PSBL	9 gedung	7.000.000	7.000.000		
1	06	01	1.03	10	Penyediaan alat tulis kantor													10.000.000	10.000.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Kabupaten Belitung Timur								Jumlah ATK yang tersedia di PSBL	12 bulan	10.000.000	10.000.000		
1	06	01	1.03	11	Penyediaan barang cetak dan penggandaan													2.250.000	2.250.000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Hasil Kegiatan/Indikator Kegiatan		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Kabupaten Belitung Timur								Jumlah barang cetak dan penggandaan yang tersedia di PSBL	12 bulan	2.250.000	2.250.000		
1	06	01	1.03	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor												7.500.000	7.500.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Kabupaten Belitung Timur								Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan di PSBL	12 bulan	7.500.000	7.500.000		
1	06	01	1.03	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor												60.000.000	60.000.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Kabupaten Belitung Timur								Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yg disediakan di PSBL	9 gedung	60.000.000	60.000.000		
1	06	01	1.03	14	Penyediaan peralatan rumah tangga												15.000.000	15.000.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Kabupaten Belitung Timur								Jumlah peralatan rumh tangga yg disediakan di PSBL	12 bulan	15.000.000	15.000.000		
1	06	01	1.03	16	Penyediaan bahan logistik kantor												10.000.000	10.000.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Kabupaten Belitung Timur								Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	12 bulan	10.000.000	10.000.000		
1	06	01	1.03	17	Penyediaan makan dan minum												14.000.000	14.000.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Kabupaten Belitung Timur								Jumlah makan minum rapat yang disediakan di PSBL	27 orang	14.000.000	14.000.000		
1	06	01	1.03	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah												25.000.000	170.000.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Kabupaten Belitung Timur								Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar	12 bulan	25.000.000	170.000.000		
1	06	01	1.03	29	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor												22.000.000	22.000.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Kabupaten Belitung Timur								Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara	12 bulan	22.000.000	22.000.000		
1	06	01	1.03	31	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/Oprasional												20.000.000	37.400.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Kabupaten Belitung Timur								Jumlah kendaraan dinas/ oerasional yang diservis di PSBL	12 bulan	20.000.000	37.400.000		
1	06	01	1.03	41	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional												10.000.000	10.000.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Kabupaten Belitung Timur								Jumlah rehabilitasi kendaraa dinas yang disediakan di PSBL	12 bulan	10.000.000	10.000.000		
1	**06**	**01**	**1.01**		**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**												**60.000.000**	**60.000.000**		
											Nilai SAKIP Perangkat Daerah	**77,70 %**	**Jumlah dokumen Perencanaan perangkat daerah yang tersusun dan terevaluasi di PSBL**	**10 orang**			**60.000.000**	**60.000.000**		
1	06	01	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah												60.000.000	60.000.000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Hasil Kegiatan/Indikator Kegiatan		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Kabupaten Belitung Timur								Jumlah kesepakatan Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan d PSBL	10 orang	60.000.000	60.000.000		
					JUMLAH												21.901.323.642	24.632.392.471		

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2021

PERANGKAT DAERAH : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/ Indikator Program		Hasil Kegiatan/ Indikator Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan/ Indikator Sub kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
					Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Non Pelayanan Dasar												**17.425.492.604**	**36.655.250.288**		
					UNSUR PENUNJANG URUSAN EMERINTAHAN												**11.463.822.924**	**26.190.100.000**		
2	**22**	**1**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**												**11.463.822.924**	**26.190.100.000**		
						Pengembangan Pariwisata	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81					**219.022.627**	**12.918.750.000**	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
2	**22**	**1**	**1**		Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												219.022.627	229.000.000		
						Pengembangan Pariwisata	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	12 dokumen			219.022.627	229.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
2	22	1	1	1	Sub Kegiatan Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah												13.000.000	15.000.000		
						Pengembangan Pariwisata	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah dokumen perencanaan Renstra/Renja PD	2 dokumen	13.000.000	15.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
2	22	1	1	2	Sub Kegiatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan												13.000.000	15.000.000		
						Pengembangan Pariwisata	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah dokumen DPA/DPPA yang tersusun	2 dokumen	13.000.000	15.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
2	22	1	1	3	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah												23.000.000	25.000.000		
						Pengembangan Pariwisata	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi PD	4 dokumen	23.000.000	25.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
2	22	1	1	4	Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah												152.772.627	155.000.000		
						Pengembangan Pariwisata	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					jumlah dokumen kesepakatan Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan PD	1 dokumen	152.772.627	155.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
2	22	1	1	5	Sub Kegiatan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah												17.250.000	19.000.000		
						Pengembangan Pariwisata	Meningkatkan kontribusi sektor	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah dokumen Evalusi kinerja PD	3 dokumen	17.250.000	19.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
											Survey Kepuasan Pelayanan Internal	80					**11.244.800.297**	**13.271.350.000**		
2	**22**	**1**	**1**		Kegiatan Administrasi Keuangan												8.724.627.797	10.321.000.000		
						Pengembangan Pariwisata	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Survey Kepuasan Pelayanan Keuangan	80			8.724.627.797	10.321.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
2	22	1	1	1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												8.705.027.797	10.300.000.000		
						Pengembangan Pariwisata	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	66 ASN	8.705.027.797	10.300.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
2	22	1	1	4	Sub Kegiatan Penyusunan Akutansi dan Pelaporan Keuangan												5.950.000	6.500.000		
						Pengembangan Pariwisata	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah laporan akuntansi keuangan	1 laporan	5.950.000	6.500.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/ Indikator Program		Hasil Kegiatan/ Indikator Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan/ Indikator Sub kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2	22	1	1	7	Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran												5.950.000	6.500.000		
						Pengembangan Pariwisata	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah laporan keuangan bulanan/ Semesteran	1 laporan	5.950.000	6.500.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
2	22	1	1	9	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan Kuangan Akhir Tahun												7.700.000	8.000.000		
						Pengembangan Pariwisata	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 laporan	7.700.000	8.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
5	**05**	**01**	**1.03**		Kegiatan Administrasi umum												2.455.172.500	2.531.500.000		
						Pengembangan Pariwisata	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Survey Kepuasan Pelayanan Umum	80			1.983.052.820	1.949.900.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
2	22	1	1	1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat												296.900.000	441.600.000		
						Pengembangan Pariwisata	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah Surat/Barang yang dikirim	75 Surat/barang yang dikirim	24.000.000	45.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
															Jumlah Materai	1500 lembar	9.000.000	19.600.000		
															Jumlah tenaga pramubakti yang dipekerjakan	7 orang	263.900.000	377.000.000		
2	22	1	1	2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												203.400.000	210.000.000		
						Pengembangan Pariwisata	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah bulan tagihan rekening listrik, air, telepon/fax, tv kabel, virtual meeting yang dibayarkan	12 bulan	203.400.000	210.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
2	22	1	1	3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor												150.800.000	150.800.000		
															Jumlah tenaga keamanan/satpam kantor yang	4 orang	150.800.000	150.800.000		
2	22	1	1	7	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan												135.802.500	137.000.000		
						Pengembangan Pariwisata	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah pengelola administrasi keuangan yang bekerja	12 orang	135.802.500	137.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
2	22	1	1	6	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/oprasional												129.300.000	129.300.000		
						Pengembangan Pariwisata	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					jumlah kendaraan operasional yang dipelihara	3 unit	16.200.000	16.200.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
						Pengembangan Pariwisata	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah tenaga sopir yang dipekerjakan	3 orang	113.100.000	113.100.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
2	22	1	1	8	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor												168.800.000	170.800.000		
						Pengembangan Pariwisata	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah tenaga kebersihan yang dipekerjakan	4 orang	150.800.000	150.800.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
						Pengembangan Pariwisata	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah jenis bahan dan Peralatan kebersihan kantor yang tersedia	24 jenis	18.000.000	20.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
2	22	1	1	10	Sub Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor												46.000.000	70.000.000		
						Pengembangan Pariwisata	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					jumlah jenis ATK yang dibeli	40 jenis	46.000.000	70.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/ Indikator Program		Hasil Kegiatan/ Indikator Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan/ Indikator Sub kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2	22	1	1	11	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan												45.750.000	121.000.000		
						Pengembangan Pariwisata	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah barang cetak	6 eksamplar	16.000.000	90.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
						Pengembangan Pariwisata	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah penggandaan	90.000 lembar	19.750.000	31.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
															Jumlah penjilidan	10 buku/dokumen/laporan	10.000.000	12.000.000		
2	22	1	1	12	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor												14.000.000	26.000.000		
						Pengembangan Pariwisata	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia	10 jenis	14.000.000	26.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
2	22	1	1	13	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												9.000.000	9.500.000		
						Pengembangan Pariwisata	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang	1 jenis	9.000.000	9.500.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
2	22	1	1	15	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan												7.200.000	8.000.000		
						Pengembangan Pariwisata	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah bahan bacaan dan perundang-	12 eksamplar	7.200.000	8.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
2	22	1	1	16	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor												7.320.000	7.500.000		
						Pengembangan Pariwisata	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah penyediaan bahan logistik kantor	3 unit	7.320.000	7.500.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
2	22	1	1	17	Sub Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman												108.780.320	205.000.000		
						Pengembangan Pariwisata	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah makan dan minum Tamu yang tersedia	2.285 pax	80.000.000	120.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
															Jumlah makan dan minum rapat yang tersedia	1919 pax	28.780.320	85.000.000		
2	22	1	1	18	Sub Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultansi ke Luar Daerah												370.000.000	550.000.000		
						Pengembangan Pariwisata	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dilaksanakan	46 kali	290.000.000	450.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
															Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah	77 kali	80.000.000	100.000.000		
2	22	1	1	29	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor												150.000.000	175.000.000		
						Pengembangan Pariwisata	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					jumlah gedung kantor yang dipelihara	2 unit	150.000.000	175.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
2	22	1	1	31	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Kendaraan Dinas/Operasional												90.000.000	55.000.000		
						Pengembangan Pariwisata	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah kendaraan operasional yang dipelihara	3 unit	90.000.000	55.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
2	22	1	1	35	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor												50.000.000	65.000.000		
						Pengembangan Pariwisata	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	10 unit	50.000.000	65.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
													Survey Kepuasan Pelayanan Umum UPT Disbudpar	80			472.119.680	293.850.000		
2	22	1	1	1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat												205.300.000	255.500.000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/ Indikator Program		Hasil Kegiatan/ Indikator Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan/ Indikator Sub kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
						Pengembangan Pariwisata	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata	Belitung	Tanjungpandan	Lesung Batang					Jumlah Surat/Barang yang dikirim UPT	25 Surat/barang	15.000.000	27.500.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
															Jumlah Materai	300 lembar	1.800.000	1.800.000		
															Jumlah tenaga pramubakti yang dipekerjakan di UPT	5 orang	188.500.000	226.200.000		
2	22	1	1	8	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor												62.700.000	75.000.000		
						Pengembangan Pariwisata	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata	Belitung	Tanjungpandan	Lesung Batang					Jumlah tenaga kebersihan yang dipekerjakan di UPT	1 orang	37.700.000	45.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
															Jumlah jenis bahan dan Peralatan kebersihan kantor yang tersedia di UPT	20 jenis	25.000.000	30.000.000		
2	22	1	1	10	Sub Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor												20.000.000	25.000.000		
						Pengembangan Pariwisata	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata	Belitung	Tanjungpandan	Lesung Batang					jumlah jenis ATK yang dibeli di UPT	30 Jenis	20.000.000	25.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
2	22	1	1	11	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan												9.300.000	10.300.000		
						Pengembangan Pariwisata	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata	Belitung	Tanjungpandan	Lesung Batang					jumlah barang cetak di UPT	6 jenis	4.500.000	5.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
						Pengembangan Pariwisata	Meningkatkan kontribusi sektor	Belitung	Tanjungpandan	Lesung Batang					Jumlah penggandaan di	12.000 lembar	4.200.000	4.500.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
															Jumlah penjilidan di UPT	4 buku/dokumen/laporan	600.000	800.000		
2	22	1	1	12	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor												5.000.000	7.000.000		
						Pengembangan Pariwisata	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata	Belitung	Tanjungpandan	Lesung Batang					Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia di UPT	2 jenis	5.000.000	7.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
2	22	1	1	13	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												15.000.000	17.500.000		
						Pengembangan Pariwisata	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata	Belitung	Tanjungpandan	Lesung Batang					jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang	3 jenis	15.000.000	17.500.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
2	22	1	1	15	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan												3.600.000	3.850.000		
						Pengembangan Pariwisata	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata	Belitung	Tanjungpandan	Lesung Batang					Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan yang tersedia di UPT	1 eksamplar	3.600.000	3.850.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
2	22	1	1	16	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor												15.000.000	75.000.000		
						Pengembangan Pariwisata	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata	Belitung	Tanjungpandan	Lesung Batang					jumlah bahan logistik kantor yang tersedia di UPT	2 unit	15.000.000	75.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
2	22	1	1	17	Sub Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman												71.219.680	47.500.000		
						Pengembangan Pariwisata	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata	Belitung	Tanjungpandan	Lesung Batang					Jumlah makan dan minum Tamu yang tersedia di UPT	1357pax	47.500.000	47.500.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
															Jumlah makan dan minum rapat yang tersedia di UPT	1582pax	23.719.680	21.000.000		
2	22	1	1	18	Sub Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultansi ke Luar Daerah												65.000.000	96.000.000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/ Indikator Program		Hasil Kegiatan/ Indikator Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan/ Indikator Sub kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
						Pengembangan Pariwisata	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata	Belitung	Tanjungpandan	Lesung Batang					jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dilaksanakan di UPT	5 kali	25.000.000	36.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
															Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah dilaksanakan di UPT	8 kali	40.000.000	60.000.000		
2	**22**	**1**	**2**		Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur												65.000.000	125.000.000		
						Pengembangan Pariwisata	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Survey Kepuasan Pelayanan Kepegawaian	80			65.000.000	125.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
2	22	1	2	1	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal												65.000.000	125.000.000		
						Pengembangan Pariwisata	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah pegawai ASN yang ikut pendidikan dan pelatihan formal	10 orang	65.000.000	125.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
2	**22**				**Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan**												**2.100.000.000**	**4.158.525.000**		
2	**22**	**2**			**Program Pengembangan Kebudayaan**												**350.000.000**	**150.250.000**		
						Pengembangan Pariwisata	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam	Persentase Kebudayaan yang dikelola	55%					350.000.000	150.250.000	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
2	**22**	**2**	**1**		Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi												200.000.000	150.250.000		
						Pengembangan Pariwisata	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah budaya melayu dilestarikan	1 jenis			200.000.000	150.250.000	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
2	22	2	1	1	Sub Kegiatan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan												200.000.000	150.250.000		
						Pengembangan Pariwisata	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan	1 jenis	200.000.000	150.250.000	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
2	22	2	1		Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi												150.000.000	160.000.000		
						Pengembangan Pariwisata	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah lembaga adat yang dibina	1 lembaga			150.000.000	160.000.000	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
2	22	2	1	2	Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Adat												150.000.000	160.000.000		
						Pengembangan Pariwisata	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah lembaga dan pranata adat yang dibina	1 lembaga	150.000.000	160.000.000	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
2	22	3			**Program Pengembangan Kesenian Tradisional**												**550.000.000**	**2.733.275.000**		
						Pengembangan Pariwisata	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam	Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan	55%					550.000.000	2.733.275.000	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
2	**22**	**3**	**1**		Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota												550.000.000	2.733.275.000		
						Pengembangan Pariwisata	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah kesenian tradisional yang dibina	5 kesenian			550.000.000	2.733.275.000	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
2	22	3	1	1	Sub Kegiatan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumberdaya Manusia Kesenian Tradisional												350.000.000	2.300.000.000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/ Indikator Program		Hasil Kegiatan/ Indikator Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan/ Indikator Sub kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
						Pengembangan Pariwisata	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah SDM Rampak gendang dan gita bahana	104 orang	200.000.000	1.300.000.000	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
															Jumlah SDM marching band yang dibina	30 Orang	150.000.000	1.000.000.000		
2	22	3	1	3	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional												200.000.000	433.275.000		
						Pengembangan Pariwisata	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah lembaga kesenian yang dibina	29 lembaga	200.000.000	158.275.000	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
						Pengembangan Pariwisata	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah pengiriman misi kesenian			275.000.000	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
2	22	4			**Program Pembinaan Sejarah**												250.000.000	375.000.000		
						Pengembangan Pariwisata	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam	Persentase Pembinaan Sejarah	35%					250.000.000	375.000.000	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
2	22	4	1		Kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi												250.000.000	375.000.000		
						Pengembangan Pariwisata	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah sejarah lokal yang diberdayakan	3 sejarah			250.000.000	375.000.000	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
2	22	4	1	1	Sub Kegiatan Pemberdayaan Sumber Daya manusia dan Lembaga sejarah Lokal Provinsi												250.000.000	225.000.000		
						Pengembangan Pariwisata	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah SDM dan lembaga sejarah yang diberdayakan	50 orang	200.000.000	225.000.000	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
																1 lembaga	50.000.000			
2	22	4	1	3	Sub Kegiatan Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah												0	150.000.000		
						Pengembangan Pariwisata	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah data dan informasi sejarah yang dapat diakses oleh masyarakat			150.000.000	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
2	22	5			**Program Pelestarian dan Pengelolaan Budaya**												250.000.000	600.000.000		
						Pengembangan Pariwisata	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam	Persentase cagar budaya dilestarikan dan dikelola	50%					250.000.000	600.000.000	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
2	22	5	1		Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi												250.000.000	600.000.000		
						Pengembangan Pariwisata	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah cagar budaya yang ditetapkan sebagai peringkat provinsi	12 cagar budaya			250.000.000	600.000.000	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
2	22	5	1	1	Sub Kegiatan Register Cagar Budaya												250.000.000	600.000.000		
						Pengembangan Pariwisata	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah cagar budaya yang diregistrasi	12 cagar budaya	250.000.000	600.000.000	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
2	22	6			**Program Pengelolaan Permuseuman**												700.000.000	300.000.000		
						Pengembangan Pariwisata	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam	Persentase museum provinsi yang dikelola	100%					700.000.000	300.000.000	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
2	22	6	1		Kegiatan Pengelolaan Museum Provinsi												700.000.000	300.000.000		
						Pengembangan Pariwisata	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah museum provinsi yang dikelola	1 museum			700.000.000	300.000.000	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/ Indikator Program		Hasil Kegiatan/ Indikator Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan/ Indikator Sub kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2	22	6	1	1	Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu												700.000.000	300.000.000		
						Pengembangan Pariwisata	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah koleksi museum Wisma Ranggam	20 jenis	700.000.000	300.000.000	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
3	**26**				**Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata**												**3.861.669.680**	**6.306.625.288**		
3	26	3			**Program Pemasaran Pariwisata**												**1.600.000.000**	**6.306.625.288**		
						Pengembangan Pariwisata	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam	Persentase Pangsa Pasar Wisatawan Daerah	9,70%					1.600.000.000	6.306.625.288	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
3	26	3	1		Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi												1.600.000.000	6.306.625.288		
						Pengembangan Pariwisata	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah media promosi pariwisata	16 Media			1.600.000.000	6.306.625.288	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
3	26	3	1	1	Sub Kegiatan Penguatan Promosi Melaui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri												150.000.000	2.766.625.288		
						Pengembangan Pariwisata	Meningkatkan kontribusi sektor	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah media promosi pariwisata	1 Media	150.000.000	2.766.625.288	Meningkatkan kontribusi sektor	Memperkuat Ketahanan
3	26	3	1	2	Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Provinsi												850.000.000	1.800.000.000		
						Pengembangan Pariwisata	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah fasilitasi promosi pariwisata bagi industri pariwisata provinsi	7 event	850.000.000	1.800.000.000	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan
3	26	3	1	3	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi Baik Dalam dan Luar Negeri												600.000.000	1.740.000.000		
						Pengembangan Pariwisata	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah bahan promosi pariwisata	3 bahan promosi	350.000.000	615.000.000	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan
						Pengembangan Pariwisata	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah Pusat informasi Pariwisata Bangka	2 TIC	100.000.000	600.000.000	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk
						Pengembangan Pariwisata	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah buku profil pariwisata	1 dokumen	100.000.000	250.000.000	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan
						Pengembangan Pariwisata	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah data dan sebaran informasi pariwisata	2 Website	50.000.000	275.000.000	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan
3	**26**	**5**			**Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**												**600.000.000**	**1.150.000.000**		
						Pengembangan Pariwisata	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam	Persentase SDM pariwisata dan ekonomi kreatif terlatih dan	6,75%					600.000.000	1.150.000.000	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan
3	**26**	**5**	**1**		Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan												600.000.000	1.150.000.000		
						Pengembangan Pariwisata	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah SDM pariwisata dan ekonomi kreatif terlatih dan	140 orang			600.000.000	1.150.000.000	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan
3	26	5	1	2	Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kepariwisataan												200.000.000	400.000.000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/ Indikator Program		Hasil Kegiatan/ Indikator Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan/ Indikator Sub kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
						Pengembangan Pariwisata	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah peserta yang telah mengikuti peningkatan	50 orang	200.000.000	400.000.000	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan
3	26	6	1	3	Sub Kegiatan Pelatihan Berbasis Kompetensi Berbasi Homestay dan Pemandu Wisata (Toutr Guide) Tingkat Lanjutan												200.000.000	400.000.000		
						Pengembangan Pariwisata	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah SDM bidang Homestay yang terlatih	40 orang	200.000.000	400.000.000	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan
3	26	7	1	8	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kopetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif												200.000.000	350.000.000		
						Pengembangan Pariwisata	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah SDM ekonomi kreatif yang terlatih	50 orang	200.000.000	350.000.000	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk
3	**26**	**2**			**Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata**												**1.661.669.680**	**1.950.000.000**		
						Pengembangan Pariwisata	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam		0,7					1.661.669.680	1.950.000.000	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan
3	26	2	1		Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi												633.769.680	800.000.000		
						Pengembangan Pariwisata	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah Daya Tarik wisata provinsi yang di kelola	1 kawasan			633.769.680	800.000.000		
3	26	2	1	1	Sub Kegiatan Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi												633.769.680	800.000.000		
						Pengembangan Pariwisata	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah dokumen rencana dan rancangan daya tarik wisata	1 dokumen	633.769.680	800.000.000	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk
3	26	2	1		Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi												400.000.000	750.000.000		
						Pengembangan Pariwisata	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah Kawasan Strategis Provinsi yang di Kelola	1 kawasan			400.000.000	750.000.000	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk
3	26	2	1	1	Sub Kegiatan Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi												400.000.000	750.000.000		
						Pengembangan Pariwisata	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah dokumen rencana kawasan strategis pariwisata provinsi yang	1 dokumen	400.000.000	750.000.000	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan
3	26	2	1		Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi												627.900.000	400.000.000		
						Pengembangan Pariwisata	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata	7 Kab/Kota	7 Kab/Kota	7 Kab/Kota			Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi yang dikelola	1 destinasi			627.900.000	400.000.000	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan
3	26	2	1	6	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi												627.900.000	400.000.000		
						Pengembangan Pariwisata	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	40 orang	627.900.000	400.000.000	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2021

PERANGKAT DAERAH : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

KODE REKENING					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
URUSAN	BID. URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB				Kab/Kota	Kec	Kelurahan	Hasil Program/ Indikator Program		Hasil Kegiatan/ Indikator Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan/ Indikator Sub kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
					URUSAN PILIHAN												**95.703.978.555**	**58.244.899.654**		
					BIDANG URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN												**95.703.978.555**	**58.244.899.654**		
3	**25**	**01**			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah												17.627.047.410	19.479.899.654		
								Pangkalpinang			Nilai Sakip PD	82					500.000.000	566.580.000		
3	**35**	**01**	**1.01**		Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												500.000.000	566.580.000		
						Pembangunan Bahari	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah dok perencanaan dan evaluasi	10 Dokumen			500.000.000	566.580.000	Pembangunan Bahari	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3	25	01	1.01	01	Sub Kegiatan Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah												161.580.000	161.580.000		
						Pembangunan Bahari	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah dokumen perencanaan PD	2 Dokumen	161.580.000	161.580.000	Pembangunan Bahari	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3	25	01	1.01	02	Sub Kegiatan Penyusunan Program dan kegiatan perangkat daerah dalam dokumen perencanaan												32.675.000	55.000.000		
						Pembangunan Bahari	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah Dokumen RKA/DPA yang tersusun	2 Dokumen	32.675.000	55.000.000	Pembangunan Bahari	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3	25	01	1.01	03	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen												92.987.000	75.000.000		
						Pembangunan Bahari	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah dok evaluasi PD (DALEV)	1 Dokumen	92.987.000	75.000.000	Pembangunan Bahari	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3	25	01	1.01	04	Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah												100.630.000	150.000.000		
						Pembangunan Bahari	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					jumlah dokumen kesepakatan Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan PD	2 Dokumen	100.630.000	150.000.000	Pembangunan Bahari	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3	25	01	1.01	05	Sub Kegiatan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah												112.128.000	125.000.000		
						Pembangunan Bahari	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah dok Evalusi kinerja PD (LKPJ, LAKIP, LPPD dan ATA)	3 Dokumen	112.128.000	125.000.000	Pembangunan Bahari	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
								Pangkalpinang			Survey Kepuasan pelayanan internal	90%					15.499.463.410	16.305.959.654		
3	**25**	**01**	**1.02**		Kegiatan Administrasi Keuangan												12.743.463.410	12.601.659.654		
						Pembangunan Bahari	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			survey kepuasan pelayanan keuangan	100%			12.743.463.410	44.000.000	Pembangunan Bahari	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

KODE REKENING					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
URUSAN	BID. URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB				Kab/Kota	Kec	Kelurahan	Hasil Program/ Indikator Program		Hasil Kegiatan/ Indikator Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan/ Indikator Sub kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
3	25	01	1.02	01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												12.699.463.410	12.557.659.654		
						Pembangunan Bahari	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah ASN ynag menerima Gaji dan Tunjangan	93 Orang	12.699.463.410,00	12.557.659.654	Pembangunan Bahari	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3	25	01	1.02	09	Sub Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun												44.000.000	44.000.000		
						Pembangunan Bahari	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah laporan keuangan akhir tahun	2 Laporan	44.000.000	44.000.000	Pembangunan Bahari	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
2	**25**	**01**	**1.03**		Kegaiatan Administrasi umum											-	2.656.000.000	3.504.300.000		
						Pembangunan Bahari	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			survey kepuasan pelayanan umum	100%			2.656.000.000	3.504.300.000	Pembangunan Bahari	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3	25	**01**	1.03	01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa surat menyurat												464.700.000	464.700.000		
						Pembangunan Bahari	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah Surat/Barang y	50 Surat/Barang yang dikirim	3.000.000	3.000.000	Pembangunan Bahari	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
						Pembangunan Bahari	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah Materai	1900 Lembar	9.300.000	9.300.000	Pembangunan Bahari	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
						Pembangunan Bahari	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah tenaga pramubakti	12 Orang	452.400.000	452.400.000	Pembangunan Bahari	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3	25	01	1.03	02	Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik												147.300.000	167.300.000		
						Pembangunan Bahari	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Tagihan rekening listrik, air, telepon/fax, tv kabel, virtual meeting yang dibayarkan	12 Bulan	147.300.000	167.300.000	Pembangunan Bahari	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3	25	01	1.03	03	Sub Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor												113.100.000	150.800.000		
						Pembangunan Bahari	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah tenaga keamanan/satpam kantor	3 orang	113.100.000	150.800.000	Pembangunan Bahari	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3	25	01	1.03	06	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/oprasional												95.400.000	95.400.000		
						Pembangunan Bahari	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					jumlah kendaraan operasional yang dipelihara	30 Unit	20.000.000	20.000.000	Pembangunan Bahari	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

KODE REKENING					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
URUSAN	BID. URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB				Kab/Kota	Kec	Kelurahan	Hasil Program/ Indikator Program		Hasil Kegiatan/ Indikator Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan/ Indikator Sub kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
						Pembangunan Bahari	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah tenaga sopir	2 Orang	75.400.000	75.400.000	Pembangunan Bahari	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3	25	01	1.03	07	Sub Kegiatan Penyediaan jasa Administrasi keuangan												230.000.000	230.000.000		
						Pembangunan Bahari	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah pengelola administrasi keuangan	18 orang	230.000.000	230.000.000	Pembangunan Bahari	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3	25	01	1.03	08	Sub Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor												162.800.000	652.900.000		
						Pembangunan Bahari	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah tenaga kebersihan	4 orang	150.800.000	640.900.000	Pembangunan Bahari	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
						Pembangunan Bahari	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah jenis bahan dan Peralatan kebersihan kantor yang tersedia	25 jenis	12.000.000	12.000.000	Pembangunan Bahari	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3	25	01	1.03	09	Sub Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja												38.720.000	60.000.000		
						Pembangunan Bahari	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	10 unit/jenis	38.720.000	60.000.000	Pembangunan Bahari	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3	25	01	1.03	10	Sub Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor												150.000.000	200.000.000		
						Pembangunan Bahari	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					jumlah jenis ATK yang dibeli	100 jenis	150.000.000	200.000.000	Pembangunan Bahari	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3	25	01	1.03	11	Sub Kegiatan Penyediaan barang cetak dan penggandaan												29.000.000	41.800.000		
						Pembangunan Bahari	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					jumlah barang cetak	500 Eksemplar	15.000.000	25.000.000	Pembangunan Bahari	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
						Pembangunan Bahari	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah penggandaan	40.000 lembar	14.000.000	16.800.000	Pembangunan Bahari	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3	25	01	1.03	12	Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor												15.000.000	20.000.000		
						Pembangunan Bahari	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah komponen inst	10 jenis	15.000.000	20.000.000	Pembangunan Bahari	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3	25	01	1.03	13	Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor												20.000.000	17.000.000		

KODE REKENING					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
URUSAN	BID. URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB				Kab/Kota	Kec	Kelurahan	Hasil Program/ Indikator Program		Hasil Kegiatan/ Indikator Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan/ Indikator Sub kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
						Pembangunan Bahari	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					jumlah peralatan kantor dan perlengkapan kantor yang tersedia	10 unit	20.000.000	17.000.000	Pembangunan Bahari	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3	25	01	1.03	15	Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan												5.400.000	5.400.000		
						Pembangunan Bahari	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan	1400 eksemplar	5.400.000	5.400.000	Pembangunan Bahari	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3	25	01	1.03	16	Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor												6.000.000	10.000.000		
						Pembangunan Bahari	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					jumlah bahan logistik kantor	500 unit	6.000.000	10.000.000	Pembangunan Bahari	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3	25	01	1.03	17	Sub Kegiatan Penyediaan makan dan minum												75.000.000	75.000.000		
						Pembangunan Bahari	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah makan dan minum Tamu	200 pax	25.000.000	25.000.000	Pembangunan Bahari	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
						Pembangunan Bahari	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah makan dan minum rapat	1000 pax	50.000.000	50.000.000	Pembangunan Bahari	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3	25	01	1.03	18	Sub Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah												470.000.000	490.000.000		
						Pembangunan Bahari	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	40 kali	210.000.000	250.000.000	Pembangunan Bahari	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
						Pembangunan Bahari	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah	100 kali	260.000.000	240.000.000	Pembangunan Bahari	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3	25	01	1.03	23	Sub Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor												20.000.000	50.000.000		
						Pembangunan Bahari	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					jumlah jenis perlengkapan gedung kantor	5 unit/jenis	20.000.000	50.000.000	Pembangunan Bahari	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3	25	01	1.03	25	Sub Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor												20.000.000	30.000.000		
						Pembangunan Bahari	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah peralatan gedung kantor	5 unit/jenis	20.000.000	30.000.000	Pembangunan Bahari	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3	25	01	1.03	31	Sub Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/Oprasional												568.580.000	719.000.000		

KODE REKENING					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
URUSAN	BID. URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB				Kab/Kota	Kec	Kelurahan	Hasil Program/ Indikator Program		Hasil Kegiatan/ Indikator Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan/ Indikator Sub kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
						Pembangunan Bahari	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah mobil oprasional yang dipelihara	30 unit	401.580.000	575.000.000	Pembangunan Bahari	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
						Pembangunan Bahari	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah BBM kendaraan	18000 Liter	167.000.000	144.000.000	Pembangunan Bahari	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3	25	01	1.03	33	Sub Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor												25.000.000	25.000.000		
						Pembangunan Bahari	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	1 unit	25.000.000	25.000.000	Pembangunan Bahari	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3	**25**	**01**	**1.04**		**Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**												**100.000.000**	**200.000.000**		
						Pembangunan Bahari	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan		Bukit Intan	Air Itam			**survey kepuasan pelayanan kepegawaian (%)**	**100%**			**100.000.000**	**200.000.000**	Pembangunan Bahari	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3	25	01	1.04	01	Sub Kegiatan Pengadaan mesin/kartu absensi												20.000.000	-		
						Pembangunan Bahari	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah mesin/kartu absensi yang diadakan	1 unit	20.000.000	-	Pembangunan Bahari	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3	25	01	1.04	09	Sub Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal												80.000.000	200.000.000		
						Pembangunan Bahari	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					jumlah pegawai yang ikut pendidikan dan pelatihan formal	15 Orang	80.000.000	200.000.000	Pembangunan Bahari	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3	**25**	**00**	**00**	**01.0**	**UPTD LPPMHP**												**650.000.000**	**712.160.000**		
								Pangkalpinang			**survey kepuasan pelayanan internal UPTD LPPMHP (%)**	**100**					**650.000.000**	**712.160.000**		
3	**25**	**01**	**1.03**		Administrasi umum												650.000.000	712.160.000		
						Pembangunan Bahari	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Temberan			survey kepuasan pelayanan umum (%)	100%			461.500.000	523.660.000	Pembangunan Bahari	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3	25	01	1.03	01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa surat menyurat												190.680.000	190.680.000		
						Pembangunan Bahari	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Temberan					Jumlah Surat/Barang y	1 Tahun	500.000	500.000	Pembangunan Bahari	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
						Pembangunan Bahari	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Temberan					Jumlah Materai	300 lembar	1.680.000	1.680.000	Pembangunan Bahari	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
						Pembangunan Bahari	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan	Pangkalpinang							Jumlah tenaga pramubakti	5 Orang	188.500.000	188.500.000	Pembangunan Bahari	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

KODE REKENING					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
URUSAN	BID. URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB				Kab/Kota	Kec	Kelurahan	Hasil Program/ Indikator Program		Hasil Kegiatan/ Indikator Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan/ Indikator Sub kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
3	25	01	1.03	02	Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik												75.300.000	84.000.000		
						Pembangunan Bahari	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Temberan					Tagihan rekening listrik, air, telepon/fax, tv kabel, virtual meeting yang dibayarkan	12 Bulan	75.300.000	84.000.000	Pembangunan Bahari	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3	25	01	1.03	06	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/oprasional												2.500.000	2.500.000		
						Pembangunan Bahari	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Temberan					jumlah kendaraan operasional yang dipelihara	2 unit	2.500.000	2.500.000	Pembangunan Bahari	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3	25	01	1.03	07	Sub Kegiatan Penyediaan jasa Administrasi keuangan												97.670.000	97.670.000		
						Pembangunan Bahari	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Temberan					Jumlah pengelola administrasi keuangan	12 Bulan	97.670.000	97.670.000	Pembangunan Bahari	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3	25	01	1.03	08	PSub Kegiatan enyediaan jasa kebersihan kantor												*4.410.000*	*5.500.000*		
						Pembangunan Bahari	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Temberan					Jumlah jenis Peralatan kebersihan kantor	5 unit	4.410.000	5.500.000	Pembangunan Bahari	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3	25	01	1.03	09	Sub Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja												39.000.000	39.000.000		
						Pembangunan Bahari	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Temberan					jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	50 unit	39.000.000	39.000.000	Pembangunan Bahari	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3	25	01	1.03	10	Sub Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor												8.000.000	8.000.000		
						Pembangunan Bahari	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Temberan					jumlah jenis ATK yang dibeli	50 jenis	8.000.000	8.000.000	Pembangunan Bahari	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3	25	01	1.03	11	Sub Kegiatan Penyediaan barang cetak dan penggandaan												6.400.000	6.400.000		
						Pembangunan Bahari	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Temberan					jumlah barang cetak	25 Eksemplar	5.000.000	5.000.000	Pembangunan Bahari	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
						Pembangunan Bahari	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Temberan					Jumlah penggandaan	4000 lembar	1.400.000	1.400.000	Pembangunan Bahari	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3	25	01	1.03	12	Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor												2.000.000	2.000.000		
						Pembangunan Bahari	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Temberan					Jumlah komponen instalasi listrik	5 jenis	2.000.000	2.000.000	Pembangunan Bahari	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

KODE REKENING					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
URUSAN	BID. URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB				Kab/Kota	Kec	Kelurahan	Hasil Program/ Indikator Program		Hasil Kegiatan/ Indikator Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan/ Indikator Sub kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
3	25	01	1.03	13	Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor												4.570.000	5.000.000		
						Pembangunan Bahari	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Temberan					jumlah perlengkapan kantor	1 unit	4.570.000	5.000.000	Pembangunan Bahari	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3	25	01	1.03	14	Sub Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga												3.700.000	3.700.000		
						Pembangunan Bahari	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Temberan					Jumlah peralatan rumah tangga	4 unit	3.700.000	3.700.000	Pembangunan Bahari	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3	25	01	1.03	15	Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan												1.800.000	1.800.000		
						Pembangunan Bahari	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Temberan					Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan	9 Eksemplar	1.800.000	1.800.000	Pembangunan Bahari	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3	25	01	1.03	16	Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor												18.235.000	18.235.000		
						Pembangunan Bahari	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Temberan					jumlah bahan logistik kantor	10 jenis	18.235.000	18.235.000	Pembangunan Bahari	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3	25	01	1.03	17	Sub Kegiatan Penyediaan makan dan minum												10.775.000	10.775.000		
						Pembangunan Bahari	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Temberan					Jumlah makan dan minum Tamu	80 pax	3.000.000	3.000.000	Pembangunan Bahari	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
						Pembangunan Bahari	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Temberan					Jumlah makan dan minum rapat	200 pax	7.775.000	7.775.000	Pembangunan Bahari	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3	25	01	1.03	18	Sub Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah												148.560.000	200.000.000		
						Pembangunan Bahari	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Temberan					jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	5 Kali	48.000.000	100.000.000	Pembangunan Bahari	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
						Pembangunan Bahari	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Temberan					Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah	30 Kali	100.560.000	100.000.000	Pembangunan Bahari	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3	25	01	1.03	31	Sub Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/Oprasional												34.200.000	34.700.000		
						Pembangunan Bahari	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Temberan					Jumlah mobil operasional yang dipelihara	1 Unit	15.000.000	15.500.000	Pembangunan Bahari	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

KODE REKENING					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
URUSAN	BID. URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB				Kab/Kota	Kec	Kelurahan	Hasil Program/ Indikator Program		Hasil Kegiatan/ Indikator Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan/ Indikator Sub kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
						Pembangunan Bahari	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Temberan					Jumlah BBM kendaraan	2133 liter	19.200.000	19.200.000	Pembangunan Bahari	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3	25	01	1.03	33	Sub Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor												2.200.000	2.200.000		
						Pembangunan Bahari	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Temberan					Jumlah BBM Genset	244 liter	2.200.000	2.200.000	Pembangunan Bahari	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3	**25**	**0**	**00**	**01.0**	**UPTD BALAI PEMULIAAN IKAN**												**977.584.000**	**1.895.200.000**		
								Belitung, Bangka Selatan	**Membalong, Tukak Sadai**	**Tanjung Rusa, Tanjung Kerasak**	**survey kepuasan pelayanan Internal UPTD Balai Pemuliaan Ikan (%)**	**100**					**977.584.000**	**1.895.200.000**		
3	**25**	**01**	**1.03**		**Administrasi umum**												**977.584.000**	**1.895.200.000**		
						Pembangunan Bahari	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan	Belitung, Bangka Selatan	Membalong, Tukak Sadai	Tanjungrusa, Tanjung Kerasak			survey kepuasan pelayanan umum (%)	100%			977.584.000	1.895.200.000	Pembangunan Bahari	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3	25	01	1.03	01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa surat menyurat												81.530.000	119.230.000		
						Pembangunan Bahari	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan	Belitung, Bangka Selatan	Membalong, Tukak Sadai	Tanjungrusa, Tanjung Kerasak					Jumlah Surat/Barang y	50 Surat/Barang yang dikirim	4.000.000	4.000.000	Pembangunan Bahari	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
						Pembangunan Bahari	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan	Belitung, Bangka Selatan	Membalong, Tukak Sadai	Tanjungrusa, Tanjung Kerasak					Jumlah Materai	430 lembar	2.130.000	2.130.000	Pembangunan Bahari	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
						Pembangunan Bahari	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan	Pangkalpinang							Jumlah tenaga pramubakti	2 Orang	75.400.000	113.100.000	Pembangunan Bahari	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3	25	01	1.03	02	Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik												214.800.000	214.800.000		
						Pembangunan Bahari	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan	Belitung, Bangka Selatan	Membalong, Tukak Sadai	Tanjungrusa, Tanjung Kerasak					Tagihan rekening listrik, air, telepon/fax, tv kabel, virtual meeting yang dibayarkan	12 Bulan	214.800.000	214.800.000	Pembangunan Bahari	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3	25	01	1.03	07	Sub Kegiatan Penyediaan jasa Administrasi keuangan												82.140.000	46.260.000		
						Pembangunan Bahari	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan	Belitung, Bangka Selatan	Membalong, Tukak Sadai	Tanjungrusa, Tanjung Kerasak					Jumlah pengelola administrasi keuangan	12 Bulan	82.140.000,00	46.260.000	Pembangunan Bahari	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3	25	01	1.03	08	Sub Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor												15.000.000	16.640.000		
						Pembangunan Bahari	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan	Belitung, Bangka Selatan	Membalong, Tukak Sadai	Tanjungrusa, Tanjung Kerasak					Jumlah jenis Peralatan kebersihan kantor	5 unit	15.000.000	16.640.000	Pembangunan Bahari	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3	25	01	1.03	10	Sub Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor												13.000.000	13.000.000		

KODE REKENING					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
URUSAN	BID. URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB				Kab/Kota	Kec	Kelurahan	Hasil Program/ Indikator Program		Hasil Kegiatan/ Indikator Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan/ Indikator Sub kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
						Pembangunan Bahari	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan	Belitung, Bangka Selatan	Membalong, Tukak Sadai	Tanjungrusa, Tanjung Kerasak					jumlah jenis ATK yang dibeli	50 jenis	13.000.000	13.000.000	Pembangunan Bahari	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3	25	01	1.03	11	Sub Kegiatan Penyediaan barang cetak dan penggandaan												5.750.000	5.750.000		
						Pembangunan Bahari	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan	Belitung, Bangka Selatan	Membalong, Tukak Sadai	Tanjungrusa, Tanjung Kerasak					jumlah barang cetak	15 Eksemplar	3.000.000	3.000.000	Pembangunan Bahari	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
						Pembangunan Bahari	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan	Belitung, Bangka Selatan	Membalong, Tukak Sadai	Tanjungrusa, Tanjung Kerasak					Jumlah penggandaan	7850 Lembar	2.750.000	2.750.000	Pembangunan Bahari	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3	25	01	1.03	12	Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor												25.000.000	39.190.000		
						Pembangunan Bahari	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan	Belitung, Bangka Selatan	Membalong, Tukak Sadai	Tanjungrusa, Tanjung Kerasak					Jumlah komponen inst	5 Jenis	25.000.000	39.190.000	Pembangunan Bahari	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3	25	01	1.03	13	Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor												34.500.000	35.500.000		
						Pembangunan Bahari	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan	Belitung, Bangka Selatan	Membalong, Tukak Sadai	Tanjungrusa, Tanjung Kerasak					jumlah peralatan kantor	3 Jenis	19.500.000	19.500.000	Pembangunan Bahari	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
						Pembangunan Bahari	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan	Belitung, Bangka Selatan	Membalong, Tukak Sadai	Tanjungrusa, Tanjung Kerasak					jumlah perlengkapan k	3 Jenis	15.000.000	16.000.000	Pembangunan Bahari	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3	25	01	1.03	14	Sub Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga												30.000.000	51.100.000		
						Pembangunan Bahari	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan	Belitung, Bangka Selatan	Membalong, Tukak Sadai	Tanjungrusa, Tanjung Kerasak					Jumlah peralatan rum	10 unit	30.000.000	51.100.000	Pembangunan Bahari	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3	25	01	1.03	16	Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor												-	325.890.000		
						Pembangunan Bahari	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan	Belitung, Bangka Selatan	Membalong, Tukak Sadai	Tanjungrusa, Tanjung Kerasak					jumlah bahan logistik kantor	10 unit		325.890.000	Pembangunan Bahari	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3	25	01	1.03	17	Sub Kegiatan Penyediaan makan dan minum												55.070.000	28.300.000		
						Pembangunan Bahari	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan	Belitung, Bangka Selatan	Membalong, Tukak Sadai	Tanjungrusa, Tanjung Kerasak					Jumlah makan dan minum Tamu	230 Pax	25.000.000	17.500.000	Pembangunan Bahari	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
						Pembangunan Bahari	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan	Belitung, Bangka Selatan	Membalong, Tukak Sadai	Tanjungrusa, Tanjung Kerasak					Jumlah makan dan minum rapat	150 Pax	30.070.000	10.800.000	Pembangunan Bahari	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

KODE REKENING					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
URUSAN	BID. URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB				Kab/Kota	Kec	Kelurahan	Hasil Program/ Indikator Program		Hasil Kegiatan/ Indikator Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan/ Indikator Sub kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
3	25	01	1.03	18	Sub Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah												135.815.000	230.755.000		
						Pembangunan Bahari	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan	Belitung, Bangka Selatan	Membalong, Tukak Sadai	Tanjungrusa, Tanjung Kerasak					jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	10 Kali	35.815.000	76.755.000	Pembangunan Bahari	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
						Pembangunan Bahari	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan	Belitung, Bangka Selatan	Membalong, Tukak Sadai	Tanjungrusa, Tanjung Kerasak					Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah	50 Kali	100.000.000	154.000.000	Pembangunan Bahari	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3	25	01	1.03	23	Sub Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor												83.360.000	295.085.000		
						Pembangunan Bahari	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan	Belitung, Bangka Selatan	Membalong, Tukak Sadai	Tanjungrusa, Tanjung Kerasak					jumlah jenis perlengkapan gedung kantor	4 Jenis	83.360.000	295.085.000	Pembangunan Bahari	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3	25	01	1.03	29	Sub Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor												60.439.000	258.360.000		
						Pembangunan Bahari	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan	Belitung, Bangka Selatan	Membalong, Tukak Sadai	Tanjungrusa, Tanjung Kerasak					jumlah gedung kantor yang dipelihara	4 Unit	60.439.000	258.360.000	Pembangunan Bahari	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3	25	01	1.03	31	Sub Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/Oprasional												141.180.000	215.340.000		
						Pembangunan Bahari	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan	Belitung, Bangka Selatan	Membalong, Tukak Sadai	Tanjungrusa, Tanjung Kerasak					Jumlah mobil oprasional yang dipelihara	1 Tahun	141.180.000	215.340.000	Pembangunan Bahari	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3	**25**	**02**			**Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil**			Bangka Belitung									700.000.000	1.522.500.000		
											Luasan ruang laut, pesisir dan pulau pulau kecil yang termanfaatkan	1.050.000 Ha					700.000.000	1.522.500.000		
3	**25**	**02**	**1.01**		Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi												300.000.000	822.500.000		
						Pembangunan Bahari	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan	Pangkalpinang, Bangka, Belitung, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung timur					Jumlah Alokasi Pengelolaan Ruang Laut	7 Lokasi			300.000.000	822.500.000	Pembangunan Bahari	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3	25	02	1.01	01	Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil												80.000.000	500.000.000		
						Pembangunan Bahari	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan	Pangkalpinang, Bangka, Belitung, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung timur							Jumlah Kawasan Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (Dokumen)	1 Dokumen	80.000.000	500.000.000	Pembangunan Bahari	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3	25	02	1.01	02	Sub Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat												120.000.000	222.500.000		
						Pembangunan Bahari	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan	Bangka Tengah							Jumlah Kawasan Konservasi yang terkelola (kawasan)	2 Kawasan	120.000.000	222.500.000	Pembangunan Bahari	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

KODE REKENING					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
URUSAN	BID. URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB				Kab/Kota	Kec	Kelurahan	Hasil Program/ Indikator Program		Hasil Kegiatan/ Indikator Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan/ Indikator Sub kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
3	25	02	1.01	04	Sub Kegiatan Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil												100.000.000	100.000.000		
						Pembangunan Bahari	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan	Pangkalpinang							Layanan Operasional Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil	12 Bulan	100.000.000	100.000.000	Pembangunan Bahari	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3	**25**	**02**	**1.02**		Kegiatan Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi												200.000.000	200.000.000		
						Pembangunan Bahari	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan						Jumlah Rekomendasi dan SOP Yang Diterbitkan	10 Rekomendasi			200.000.000	200.000.000	Pembangunan Bahari	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3	25	02	1.02	02	Sub Kegiatan Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Iin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi												200.000.000	200.000.000		
						Pembangunan Bahari	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan	Pangkalpinang, Bangka, Belitung, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung timur							Jumlah rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil	10 Rekomendasi	200.000.000	200.000.000	Pembangunan Bahari	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3	**25**	**02**	**1.03**		Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil												200.000.000	500.000.000		
						Pembangunan Bahari	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan	Belitung Timur, Pangkalpinang, Bangka Tengah					Jumlah Kelompok Masyarakat Pesisir Yang Diberdayakan dan Dilakukan Pembinaan	13 Kelompok			200.000.000	500.000.000	Pembangunan Bahari	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3	25	02	1.03	02	Sub Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil												200.000.000	500.000.000		
						Pembangunan Bahari	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan	Belitung TImur							Jumlah Kelompok Masyarakat Pesisir Yang Dilakukan Pembinaan	3 Kelompok Masyarakat	200.000.000	500.000.000	Pembangunan Bahari	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3	**25**	**05**			**Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**			Bangka Belitung									900.000.000	1.300.000.000		
											Persentase Pelaku Usaha yang Taat Aturan (%)	75%					900.000.000	1.300.000.000		
3	**25**	**05**	**1.01**		Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil												850.000.000	1.200.000.000		
						Pembangunan Bahari	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan	Pangkalpinang, Bangka, Belitung, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung timur					Jumlah pelaku usaha kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil yang diawasi	115 Pelaku Usaha			750.000.000	1.100.000.000	Pembangunan Bahari	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
						Pembangunan Bahari	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan	Pangkalpinang, Bangka, Belitung, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung timur					Jumlah pelaku usaha kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil yang dibina	14 Pelaku Usaha			100.000.000	100.000.000	Pembangunan Bahari	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3	25	05	1.01	01	Sub Kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil												50.000.000	100.000.000		

KODE REKENING					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
URUSAN	BID. URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB				Kab/Kota	Kec	Kelurahan	Hasil Program/ Indikator Program		Hasil Kegiatan/ Indikator Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan/ Indikator Sub kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
						Pembangunan Bahari	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan	Pangkalpinang, Bangka, Belitung, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung timur							Jumlah pelaku usaha Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 mil yang diawasi	10 pelaku usah	50.000.000	100.000.000	Pembangunan Bahari	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3	25	05	1.01	02	Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap Sampai Dengan 12 Mil												800.000.000	1.100.000.000		
						Pembangunan Bahari	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan	Pangkalpinang, Bangka, Belitung, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung timur							Jumlah pelaku usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 mil yang diawasi	100 pelaku usa	700.000.000	1.000.000.000	Pembangunan Bahari	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
						Pembangunan Bahari	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan	Pangkalpinang, Bangka, Belitung, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung timur							Jumlah pelaku usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 mil yang dibina	14 pelaku usah	100.000.000	100.000.000	Pembangunan Bahari	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3	**25**	**05**	**1.02**		Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu)Daerah Provinsi												50.000.000	100.000.000		
						Pembangunan Bahari	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan	Pangkalpinang, Bangka, Belitung, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung timur							Jumlah pelaku usaha kelautan dan perikanan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu)Daerah Provinsi yang diawasi	50 pelaku usah	50.000.000	100.000.000	Pembangunan Bahari	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3	25	05	1.02	03	Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi												50.000.000	100.000.000		
						Pembangunan Bahari	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan	Pangkalpinang, Bangka, Belitung, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung timur							Jumlah pelaku usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang	50 pelaku usah	50.000.000	100.000.000	Pembangunan Bahari	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3	**25**	**03**			**Program Pengelolaan Perikanan Tangkap**												**71.404.515.145**	**30.100.000.000**		
								Pangkalpinang, Bangka, Belitung, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung Timur			**Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap**	**1,85%**				**70.204.515.145**	**30.100.000.000**		
3	**25**	**03**	**1.01**		**Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah laut sampai dengan 12 mil**												**18.600.000.000**	**21.500.000.000**		
						Pembangunan Bahari	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan	Pangkalpinang, Bangka, Belitung, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung timur					**2. Jumlah sarana dan prasarana usaha perikanan tangkap**	1254 unit			17.400.000.000	21.500.000.000	Pembangunan Bahari	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3	25	03	1.01	02	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap (Alat bantu Penangkapan, Rumpon/Rumah Ikan/Fish Apartemen, Mesin, dll)												17.100.000.000	20.000.000.000		

KODE REKENING					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
URUSAN	BID. URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB				Kab/Kota	Kec	Kelurahan	Hasil Program/ Indikator Program		Hasil Kegiatan/ Indikator Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan/ Indikator Sub kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
															2. Jumlah ALat Bantu Penangkapan/Navigasi yang diadakan	50 Unit	900.000.000	2.000.000.000	Pembangunan Bahari	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
						Pembangunan Bahari	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan	Pangkalpinang, Bangka, Belitung, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung timur							4. Jumlah Tambat Labuh yang dibangun/direhab	4 Unit	16.200.000.000	20.000.000.000	Pembangunan Bahari	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3	25	03	1.01	03	Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap (kapal dan API)												1.500.000.000	1.500.000.000		
						Pembangunan Bahari	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan	Pangkalpinang, Bangka, Belitung, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung timur							Kawat Bubu	850	1.000.000.000	500.000.000	Pembangunan Bahari	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
						Pembangunan Bahari	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan	Pangkalpinang, Bangka, Belitung, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung timur							Jaring kepiting	2000	200.000.000	1.000.000.000	Pembangunan Bahari	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
															Jaring udang	1.500	300.000.000			
3	**25**	**03**	**1.03**		**Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT Sampai dengan 30 GT**												51.515.145	350.000.000		
						Pembangunan Bahari	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan						**Jumlah Rekomendasi Teknis Perizinan usaha Perikanan Tangkap**	**350 rekomendasi**				51.515.145	350.000.000	Pembangunan Bahari	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3	25	03	1.03	02	Sub Kegiatan Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT												51.515.145	350.000.000		
						Pembangunan Bahari	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan	Pangkalpinang, Bangka, Belitung, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung timur							2. Gerai Perizinan (Kegiatan)	7 Kegiatan	51.515.145	350.000.000	Pembangunan Bahari	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3	**25**	**03**	**1.06**		**Kegiatan Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi**												**52.753.000.000**	**8.250.000.000**		
						Pembangunan Bahari	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan						**1. Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan (pelabuhan Perikanan)**	**7 pelabuhan perikanan**			**50.496.000.000**	**5.750.000.000**	Pembangunan Bahari	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
						Pembangunan Bahari	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan						2. Jumlah Pelabuhan Perikanan Provinsi yng meningkat pengelolaannya(Pelabuhan Perikanan)	**7 Pelabuhan Perikanan**			**2.257.000.000**	**2.500.000.000**	Pembangunan Bahari	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3	25	03	1.06	01	Sub Kegiatan Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan												**300.000.000**	**750.000.000**		
						Pembangunan Bahari	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan	Pangkalpinang, Belitung, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung Timur							1. Jumlah Rencana Induk Pelabuhan Perikanan (dokumen)	1 dokumen	300.000.000	750.000.000	Pembangunan Bahari	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

KODE REKENING					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
URUSAN	BID. URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB				Kab/Kota	Kec	Kelurahan	Hasil Program/ Indikator Program		Hasil Kegiatan/ Indikator Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan/ Indikator Sub kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
3	25	03	1.06	02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan												50.196.000.000	5.000.000.000		
						Pembangunan Bahari	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan	Pangkalpinang, Belitung, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung Timur							1. Jumlah Pelabuhan Perikanan yang dibangun/rehabilitasi berupa Fasilitas Pokok, Fungsional dan Fasilitas Penunjang (Pelabuhan Perikanan)	4 Pelabuhan P	50.196.000.000	5.000.000.000	Pembangunan Bahari	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3	25	03	1.06	03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan												2.257.000.000	2.500.000.000		
						Pembangunan Bahari	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan	Pangkalpinang, Belitung, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung Timur							1. Jumlah pelaku usaha perikanan tangkap yang dilayani	7 pelaku usah	2.257.000.000	2.500.000.000	Pembangunan Bahari	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3	**25**	**04**			**Program Pengembangan Perikanan Budidaya**			Pangkalpinang, Bangka, Belitung, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung Timur									**4.072.416.000**	**3.817.500.000**		
						Pembangunan Bahari	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan	Pangkalpinang, Bangka, Belitung, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung Timur			**Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya (%)**	4,20%					825.000.000	1.225.000.000		
3	**25**	**04**	**1.02**		**Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau**												**100.000.000**	**100.000.000**		
						Pembangunan Bahari	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan	**Pangkalpinang**					**Jumlah rekomendasi Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil**	**5 rekomendasi**			**100.000.000**	**100.000.000**		
3	25	04	1.02	02	Sub Kegiatan Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan												100.000.000	100.000.000		
						Pembangunan Bahari	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan	Pangkalpinang							Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang dikeluarkan	5 rekomendasi	100.000.000	100.000.000	Pembangunan Bahari	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3	**25**	**04**	**1.05**		**Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Di Laut**												**725.000.000**	**13.135.100.000**		
						Pembangunan Bahari	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan						**Jumlah Produksi Perikanan budidaya Laut (ton/tahun)**	**13.120 Ton**			**725.000.000**	**1.125.000.000**		
3	25	04	1.05	01	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas daerah Kabupaten/Kota												50.000.000	75.000.000		
						Pembangunan Bahari	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan	Pangkalpinang, Bangka, Belitung, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung timur							Tersedianya data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas daerah Kabupaten/Kota	7 buku	50.000.000	75.000.000	Pembangunan Bahari	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

KODE REKENING					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
URUSAN	BID. URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB				Kab/Kota	Kec	Kelurahan	Hasil Program/ Indikator Program		Hasil Kegiatan/ Indikator Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan/ Indikator Sub kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
3	25	04	1.05	02	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut												300.000.000	12.560.100.000		
						Pembangunan Bahari	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan	Pangkalpinang, Bangka, Belitung, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung timur								1. Jumlah Prasarana budidaya yang diserahkan kepada masyarakat	2 paket	100.000.000	250.000.000	Pembangunan Bahari	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
						Pembangunan Bahari	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan	Pangkalpinang, Bangka, Belitung, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung timur								2. Tersedianya benih ikan laut yang diserahkan ke masyarakat	4 paket	200.000.000	300.000.000	Pembangunan Bahari	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3	25	04	1.05	02	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumberdayanya Lebih Efisien Apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten												375.000.000	500.000.000		
						Pembangunan Bahari	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan	Pangkalpinang, Bangka, Belitung, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung timur								1.Jumlah benih yang diserahkan ke masyarakat	13 paket	225.000.000	300.000.000	Pembangunan Bahari	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
						Pembangunan Bahari	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan	Pangkalpinang, Bangka, Belitung, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung timur								2. Jumlah Peralatan Budidaya	13 paket	150.000.000	200.000.000	Pembangunan Bahari	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
						Pembangunan Bahari	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan	Bangka Selatan, Belitung	Tukak Sadai, Membalong	Tanjung Kerasak, Tanjung Rusa	**Jumlah Produksi Benih Ikan yang unggul (Juta Ekor)**	11					3.122.416.000	2.392.500.000		
					Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Di Laut												**3.122.416.000**	**2.392.500.000**		
						Pembangunan Bahari	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan						**Jumlah Sarana Prasarana Balai Benih yang di Adakan**	**11 Paket**			**3.122.416.000**	**2.392.500.000**		
3	25	04	1.05	03	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut												100.000.000	3.632.600.000		
						Pembangunan Bahari	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan	Pangkalpinang, Bangka, Belitung, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung timur								3. Jumlah Peralatan Budidaya yang diadakan (Paket/Tahun)	1 paket	100.000.000	200.000.000	Pembangunan Bahari	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3	25	04	1.05	04	Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut												1.250.100.000	940.100.000		
						Pembangunan Bahari	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan	Belitung	Membalong	Tanjung Rusa					2. Jumlah Hatchery yang direhab	1 unit	362.300.000	200.000.000	Pembangunan Bahari	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
						Pembangunan Bahari	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan	Belitung	Membalong	Tanjung Rusa					5. Jumlah Sarana Prasarana Balai yang diadakan	1 unit	360.000.000	250.000.000	Pembangunan Bahari	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
						Pembangunan Bahari	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan	Belitung, Bangka Selatan	Membalong, Tukak Sadai	Tanjungrusa, Tanjung Kerasak					6. Jumlah Tenaga Teknis Pembenihan Ikan Air Laut	14 Orang	527.800.000	490.100.000	Pembangunan Bahari	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

KODE REKENING					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
URUSAN	BID. URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB				Kab/Kota	Kec	Kelurahan	Hasil Program/ Indikator Program		Hasil Kegiatan/ Indikator Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan/ Indikator Sub kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
3	25	04	1.05	05	Sub Kegiatan Penyediaan sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumberdayanya Lebih Efisien Apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten												1.772.316.000	1.252.400.000		
						Pembangunan Bahari	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan	Bangka Selatan	Tukak Sadai	Tanjung Kerasak					3. Jumlah Hatchery yang direhab	1 unit	450.000.000	100.000.000	Pembangunan Bahari	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
						Pembangunan Bahari	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan	Pangkalpinang, Bangka, Belitung, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung timur							4. Jumlah Tambak Pembesaran yang dibangun	1 unit	487.616.000	200.000.000	Pembangunan Bahari	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
						Pembangunan Bahari	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan	Bangka Selatan	Tukak Sadai	Tanjung Kerasak					6. Jumlah Sarana Prasarana Balai yang diadakan	6 paket	420.000.000	500.000.000	Pembangunan Bahari	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
						Pembangunan Bahari	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan	Belitung, Bangka Selatan	Membalong, Tukak Sadai	Tanjungrusa, Tanjung Kerasak					Jumlah Tenaga Teknis Pembenihan Ikan Air Payau	11 Orang	414.700.000	452.400.000	Pembangunan Bahari	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
								Pangkalpinang, Bangka, Belitung, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung Timur			**Persentase pembudidaya yang dibantu vaksinasi dan dibina tentang pengelolaan kesehatan lingkungan budidaya**	10%					125.000.000	200.000.000		
					Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Di Laut	Pembangunan Bahari	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan						**Jumlah pembudidaya yang dibina dalam penanganan kesehatan lingkungan budidaya**	**100 pembudidaya**			**125.000.000**	**200.000.000**		
3	25	04	1.05	06	Sub Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota												125.000.000	200.000.000		
						Pembangunan Bahari	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Temberan					1. Jumlah Pembudidaya yang dibantu Vaksinasi Perikanan	100 pembudid	75.000.000	150.000.000	Pembangunan Bahari	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
						Pembangunan Bahari	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Temberan					4. Jumlah verifikasi kesehatan dan lingkungan budidaya yang telah memenuhi INDOGAP	10 pelaku usaha	50.000.000	50.000.000	Pembangunan Bahari	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3	**25**	**06**			**Program Pengembangan Usaha Pengolahan Hasil Perikanan**												1.000.000.000	2.025.000.000		
						Pembangunan Bahari	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan	Pangkalpinang			**Pertumbuhan Produksi Usaha Pengolahan Hasil Perikanan (%)**	**3,30%**					**900.000.000**	**1.575.000.000**		
3	**25**	**06**	**1.01**		**Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**												**675.000.000**	**1.300.000.000**		

KODE REKENING					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
URUSAN	BID. URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB				Kab/Kota	Kec	Kelurahan	Hasil Program/ Indikator Program		Hasil Kegiatan/ Indikator Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan/ Indikator Sub kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
						Pembangunan Bahari	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan	Pangkalpinang					Jumlah Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)	25 rekomendasi				675.000.000	1.300.000.000		
3	25	06	1.01	02	Sub Kegiatan Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi												75.000.000	200.000.000		
						Pembangunan Bahari	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan	Pangkalpinang							Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan untuk mendapatkan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas daerah Kab/Kota dalam 1 daerah Provinsi	25 rekomendas	75.000.000	200.000.000	Pembangunan Bahari	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3	25	06	1.01	03	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi												600.000.000	1.100.000.000		
						Pembangunan Bahari	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan	Pangkalpinang							1. Jumlah Produk Hasil Kelautan dan Perikanan serta pelaku usaha kelautan dan perikanan yang di informasikan atau	3 kegiatan	150.000.000	300.000.000	Pembangunan Bahari	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
						Pembangunan Bahari	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan	Pangkalpinang							2. Jumlah pasar hasil perikanan se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dilakukan pembinaan dan yang didata	7 Pasar Hasil Perikanan	50.000.000	100.000.000	Pembangunan Bahari	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
						Pembangunan Bahari	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan	Pangkalpinang							4. Jumlah Promosi serta Kerjasama Pemasaran Hasil Perikanan yang dilakukan	5 kegiatan	400.000.000	700.000.000	Pembangunan Bahari	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3	**25**	**06**	**1.02**		Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar												225.000.000	275.000.000		
						Pembangunan Bahari	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan	Pangkalpinang					Persentase UPI yang dibina memenuhi standar mutu dan keamanan pangan (persentase)	90%			225.000.000	275.000.000		
3	25	06	1.02	01	Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar												225.000.000	275.000.000		
						Pembangunan Bahari	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan	Pangkalpinang, Bangka, Belitung, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung timur							1. Jumlah pelaku usaha yang dibina dalam penerapan persyaratan/standar usaha pengolahan hasil perikanan skala menengah dan besar	15 pelaku usaha	125.000.000	175.000.000	Pembangunan Bahari	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

KODE REKENING					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
URUSAN	BID. URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB				Kab/Kota	Kec	Kelurahan	Hasil Program/ Indikator Program		Hasil Kegiatan/ Indikator Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan/ Indikator Sub kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
						Pembangunan Bahari	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan	Pangkalpinang, Bangka, Belitung, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung timur							2. Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan untuk mendapatkan SKP bagi usaha pengolahan hasil perikanan skala menengah besar atau lintas daerah Kab/Kota dalam 1	5 pelaku usaha	100.000.000	100.000.000	Pembangunan Bahari	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
								Pangkalpinang	Bukit Intan	Temberan	**Persentase UPI yang dibina memenuhi standar mutu dan keamanan pangan (persentase)**	**90%**					**100.000.000**	**450.000.000**		
					Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Pembangunan Bahari	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan						Jumlah UPI yang dibina dalam rangka memenuhi standar sertifikasi mutu dan keamanan pangan hasil produk kelautan dan perikanan (UPI)	125 Unit Pengolahan Ikan			100.000.000	450.000.000		
3	25	06	1.02	02	Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman Untuk dikonsumsi Atau digunakan, dan Berdaya Saing											100.000.000	450.000.000		
						Pembangunan Bahari	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan	Pangkalpinang	bukit Intan	Temberan					Jumlah sampel di uji dlm rangka pelaksanaan bimbingan, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi thd mutu dan keamanan hasil perikanan (jml sampel)	750 sampel	50.000.000	350.000.000	Pembangunan Bahari	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
						Pembangunan Bahari	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan	Pangkalpinang, Bangka, Belitung, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung timur							Jumlah Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Verifikasi dalam penerapan standar mutu dan keamanan pangan di pelaku usaha hasil perikanan (kegiatan)	12 kegiatan	50.000.000	100.000.000	Pembangunan Bahari	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Bangka Belitung
Tahun 2021

Unit Organisasi : Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : Dinas Perhubungan

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.) RANKHIR	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
									Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
												Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
						UNSUR PENUNJANG URUSAN																
						URUSAN PERHUBUNGAN												**32.798.344.696**	**23.466.135.900**		
						Urusan Rutin												**11.434.311.348**	**3.837.651.800**		
2	**15**					**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**												**11.434.311.348**	**3.837.651.800**		
												Nilai Sakip PD	80					**11.434.311.348**	**3.837.651.800**		
2	**15**					**Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**												**417.219.000**	**418.000.000**		
																Jumlah dok perencanaan dan evaluasi	**16 dokumen**	**417.219.000**	**418.000.000**	**Meningkatkan tata kelola pemerintahan**	**Reformasi Birokrasi**
2	15	01	1.01	01		***Sub Kegiatan Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah***												***30.000.000***	***55.000.000***		
							pembangunan Reformasi Biroktasi	peningkatan tata kelola pemerintahan	Pangkal pinang	bukit intan	air itam			Jumlah dok perencanaan Renstra/Renja PD	3 DOKUMEN			30.000.000	55.000.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
2	15	01	1.01	02		***Sub Kegiatan Penyusunan Program dan kegiatan perangkat daerah dalam dokumen perencanaan***												***15.000.000***	***55.000.000***		
							pembangunan Reformasi Biroktasi	peningkatan tata kelola pemerintahan	Pangkal pinang	bukit intan	air itam			Jumlah RKA/DPA yang tersusun	4 DOKUMEN			15.000.000	55.000.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
2	15	01	1.01	03		***Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah***												***26.000.000***	***88.000.000***		
							pembangunan Reformasi Biroktasi	peningkatan tata kelola pemerintahan	Pangkal pinang	bukit intan	air itam			Jumlah dok evaluasi PD (DALEV)	4 LAPORAN			26.000.000	88.000.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
2	15	01	1.01	04		***Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan***												***266.219.000***	***132.000.000***		
							pembangunan Reformasi Biroktasi	peningkatan tata kelola pemerintahan	Pangkal pinang	bukit intan	air itam			jumlah kesepakatan Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan PD	1 DOKUMEN			266.219.000	132.000.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
2	15	01	1.01	05		***Sub Kegiatan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah***												***80.000.000***	***88.000.000***		
							pembangunan Reformasi Biroktasi	peningkatan tata kelola pemerintahan	Pangkal pinang	bukit intan	air itam			Jumlah dok Evalusi kinerja PD (LKPJ, LAKIP, LPPD dan ATA)	4 dokumen			30.000.000	88.000.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
														Jumlah Dokumen Survey Kepuasan Masyarakat	1 DOKUMEN			50.000.000			
2	**15**					**Kegiatan Administrasi Keuangan**												**8.122.004.348**	**42.775.000**		
																Survey kepuasan pelayanan keuangan (angka)	**100%**	**8.122.004.348**	**42.775.000**	**Meningkatkan tata kelola pemerintahan**	**Reformasi Birokrasi**
2	15	01	1.02	01		***Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN***												***8.099.004.348***	***3.795.000***		
							pembangunan Reformasi Biroktasi	peningkatan tata kelola pemerintahan	Pangkal pinang	bukit intan	air itam			jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	74 orang			8.099.004.348	3.795.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
2	15	01	1.02	07		***Sub Kegiatan Penyusunan laporan keuangan bulanan/semesteran***												***13.000.000***	***24.350.000***		
							pembangunan Reformasi Biroktasi	peningkatan tata kelola pemerintahan	Pangkal pinang	bukit intan	air itam			Jumlah laporan keuangan bulanan Semesteran	12 laporan/ 2 laporan			13.000.000	24.350.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
2	15	01	1.02	09		***Sub Kegiatan Penyusunan pelaporan prognosis realisasi***												***10.000.000***	***14.630.000***		
							pembangunan Reformasi Biroktasi	peningkatan tata kelola pemerintahan	Pangkal pinang	bukit intan	air itam			jumlah laporan prognosis realisasi anggaran	2 laporan			10.000.000	14.630.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
2	15					**Kegiatan Administrasi Umum**												**2.635.088.000**	**3.211.876.800**		
																survey kepuasan pelayanan umum (angka)	**85%**	**2.635.088.000**	**3.211.876.800**	**Meningkatkan tata kelola pemerintahan**	**Reformasi Birokrasi**

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.) RANKHIR	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
									Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
												Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2	15	01	1.03	01		***Sub Kegiatan Penyediaan Jasa surat menyurat***												***120.600.000***	***8.250.000***		
							pembangunan Reformasi Biroktasi	peningkatan tata kelola pemerintahan	Pangkal pinang	bukit intan	air itam			Jumlah Materai	750 buah			120.600.000	8.250.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
2	15	01	1.03	02		***Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan***												***240.000.000***	***415.800.000***		
							pembangunan Reformasi Biroktasi	peningkatan tata kelola pemerintahan	Pangkal pinang	bukit intan	air itam			Jumlah tagihan listrik	12 bulan			216.000.000	356.400.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
							pembangunan Reformasi Biroktasi	peningkatan tata kelola pemerintahan	Pangkal pinang	bukit intan	air itam			Jumlah tagihan komunikasi	12 bulan			24.000.000	59.400.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
2	15	01	1.03	03		***Sub Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan***												***175.800.000***	***165.880.000***		
							pembangunan Reformasi Biroktasi	peningkatan tata kelola pemerintahan	Pangkal pinang	bukit intan	air itam			Jumlah tenaga keamanan/satpam kantor	4 orang			175.800.000	165.880.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
2	15	01	1.03	04		***Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan***												***563.500.000***	***660.946.000***		
							pembangunan Reformasi Biroktasi	peningkatan tata kelola pemerintahan	Pangkal pinang	bukit intan	air itam			jumlah kendaraan operasional yang dipelihara	17 kendaraan			375.000.000	453.596.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
							pembangunan Reformasi Biroktasi	peningkatan tata kelola pemerintahan	Pangkal pinang	bukit intan	air itam			Jumlah tenaga sopir	5 orang			188.500.000	207.350.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
2	15	01	1.03	07		***Sub Kegiatan Penyediaan jasa Administrasi keuangan***												**152.640.000**	**158.994.000**		
							pembangunan Reformasi Biroktasi	peningkatan tata kelola pemerintahan	Pangkal pinang	bukit intan	air itam			Jumlah pengelola administrasi keuangan	11 orang			152.640.000	158.994.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
2	15	01	1.03	08		***Sub Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor***												**248.500.000**	**155.540.000**		
							pembangunan Reformasi Biroktasi	peningkatan tata kelola pemerintahan	Pangkal pinang	bukit intan	air itam			Jumlah tenaga kebersihan/pramubakti	5 orang			188.500.000	82.940.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
							pembangunan Reformasi Biroktasi	peningkatan tata kelola pemerintahan	Pangkal pinang	bukit intan	air itam			Jumlah Jenis Bahan dan Peralatan kebersihan kantor	1 tahun			60.000.000	72.600.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
2	15	01	1.03	09		***Sub Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja***												***140.000.000***	***217.800.000***		
							pembangunan Reformasi Biroktasi	peningkatan tata kelola pemerintahan	Pangkal pinang	bukit intan	air itam			jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	1 paket			140.000.000	217.800.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
2	15	01	1.03	10		***Sub Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor***												***91.000.000***	***100.100.000***		
							pembangunan Reformasi Biroktasi	peningkatan tata kelola pemerintahan	Pangkal pinang	bukit intan	air itam			jumlah jenis ATK yang dibeli	1 paket			91.000.000	100.100.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
2	15	01	1.03	11		***Sub Kegiatan Penyediaan barang cetak dan penggandaan***												***34.200.000***	***102.894.000***		
							pembangunan Reformasi Biroktasi	peningkatan tata kelola pemerintahan	Pangkal pinang	bukit intan	air itam			jumlah barang cetak	1 paket			30.000.000	98.274.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
							pembangunan Reformasi Biroktasi	peningkatan tata kelola pemerintahan	Pangkal pinang	bukit intan	air itam			Jumlah penggandaan	1 paket			4.200.000	4.620.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
2	15	01	1.03	12		***Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi***												***15.000.000***	***24.200.000***		
							pembangunan Reformasi Biroktasi	peningkatan tata kelola pemerintahan	Pangkal pinang	bukit intan	air itam			Jumlah komponen instalasi listrik	1 paket			15.000.000	24.200.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
2	15	01	1.03	13		***Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan***												***50.000.000***	***85.800.000***		
							pembangunan Reformasi Biroktasi	peningkatan tata kelola pemerintahan	Pangkal pinang	bukit intan	air itam			jumlah jenis perlengkapan kantor	4 Jenis (8 dispenser, 1 set cctv, 1 vacum cleaner,)			50.000.000	85.800.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
2	15	01	1.03	16		***Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor***												***178.848.000***	***196.732.800***		
							pembangunan Reformasi Biroktasi	peningkatan tata kelola pemerintahan	Pangkal pinang	bukit intan	air itam			jumlah bahan logistik kantor	1 paket			178.848.000	196.732.800	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
2	15	01	1.03	17		***Sub Kegiatan Penyediaan makan dan minum***												***125.000.000***	***203.940.000***		

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.) RANKHIR	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
									Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
												Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
							pembangunan Reformasi Biroktasi	peningkatan tata kelola pemerintahan	Pangkal pinang	bukit intan	air itam			Jumlah makan dan minum Tamu	1 paket			50.000.000	82.500.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
2							pembangunan Reformasi Biroktasi	peningkatan tata kelola pemerintahan	Pangkal pinang	bukit intan	air itam			Jumlah makan dan minum rapat	1 paket			75.000.000	121.440.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
2	15	01	1.03	18		***Sub Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar***												***250.000.000***	***385.000.000***		
							pembangunan Reformasi Biroktasi	peningkatan tata kelola pemerintahan	Pangkal pinang	bukit intan	air itam			jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1 paket			250.000.000	385.000.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
2	15	01	1.03	19		***Sub Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam***												***200.000.000***	***220.000.000***		
							pembangunan Reformasi Biroktasi	peningkatan tata kelola pemerintahan	Pangkal pinang	bukit intan	air itam			Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah	1 paket			200.000.000	220.000.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
2	15	01	1.03	29		***Sub Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***												***50.000.000***	***110.000.000***		
							pembangunan Reformasi Biroktasi	peningkatan tata kelola pemerintahan	Pangkal pinang	bukit intan	air itam			jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 paket			50.000.000	110.000.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
2	**15**					**Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**												**260.000.000**	**165.000.000**		
																survey kepuasan pelayanan kepegawaian (angka)	**100%**	**260.000.000**	**165.000.000**	**Meningkatkan tata kelola pemerintahan**	**Reformasi Birokrasi**
2	15	01	1.03			***Sub Kegiatan Pengadaan pakaian Dinas beserta perlengkapannya***												***200.000.000***	***330.000.000***		
							pembangunan Reformasi Biroktasi	peningkatan tata kelola pemerintahan	Pangkal pinang	bukit intan	air itam			jumlah pakaian dinas	70 pns dan 17 honorer			200.000.000	165.000.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
2	15					***Sub Kegiatan Pendidikan dan***												***60.000.000***	***165.000.000***		
							pembangunan Reformasi Biroktasi	peningkatan tata kelola pemerintahan	Pangkal pinang	bukit intan	air itam			jumlah pegawai yang ikut pendidikan dan pelatihan formal	50 (30 pria, 20 wanita)			60.000.000	165.000.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
						Urusan Wajib												**21.364.033.348**	**19.628.484.100**		
2	**15**	**02**	**1**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**												**6.632.281.000**	**18.092.859.100**		
												Prosentase Pemenuhan Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	**26,47%**					**6.632.281.000**	**18.092.859.100**		
2	**15**	**02**	**1**	**02**		**Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan**												**3.523.500.000**	**8.200.000.000**		
																Prosentase Pemenuhan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	**52,50%**	**3.523.500.000**	**8.200.000.000**		**Level Keselamatan Transportasi**
2	15	02	1	02	02	***Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan***												***2.000.000.000***	***4.500.000.000***		
							Pengembangan konektivitas dan infrastruktur	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur perhubungan	Wilayah Povinsi Kepulauan Bangka Belitung					Prosentase Perlengkapan yang tersedia	31%			2.000.000.000	4.500.000.000	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata	
2	15	02	1	02	03	***Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan***												***1.523.500.000***	***1.850.000.000***		
							Pengembangan konektivitas dan infrastruktur	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur perhubungan	Wilayah Povinsi Kepulauan Bangka Belitung					Prosentase Perlengkapan Jalan yang terehabililtas dan terpelihara	88%			1.523.500.000	1.850.000.000		
2	**15**	**02**	**1**	**03**		**Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B**												**1.440.781.000**	**1.584.859.100**		
																Persentase Pemenuhan Fasilitas terminal penumpang tipe B	**1 unit**	**1.440.781.000**	**1.584.859.100**		**Rasio Konektivitas dan Aksesibilitas Nasional**
2	***#***	***02***	***1***	***03***	***05***	***Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe -B***												***1.440.781.000***	*1.584.859.100*		

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.) RANKHIR	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
									Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
												Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
							Pengembangan konektivitas dan infrastruktur	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur perhubungan	PTDI STTD					Jumlah taruna/i Sekolah tinggi di lingkungan Kementerian Perhubungan dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang	24 Orang					1.440.781.000	1.584.859.100		-
2	**15**	**02**	**1**	**05**		**Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk**														**110.000.000**	**85.000.000**		
																Persentase Kinerja jaringan jalan provinsi.	**85%**			**110.000.000**	**85.000.000**		**Indeks Kinerja Pelayanan Perhubungan**
2	***#***	***02***	***1***	***05***	***03***	***Sub Kegiatan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen***														***110.000.000***	*85.000.000*		
							Pengembangan konektivitas dan infrastruktur	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur perhubungan	Wilayah Povinsi Kepulauan Bangka Belitung					Jumlah Dokumen Manajemen Rekayasa Lalu Lintas	1 Dokumen					110.000.000	85.000.000		Indeks Kinerja Pelayanan Perhubungan
2	**15**	**02**	**1**	**06**		**Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas**														**54.000.000**	**90.000.000**		
																Persentase bangkitan dan tarikan yang telah meiliki rekomendasi	**60%**			**54.000.000**	**90.000.000**		**Indeks Kinerja Pelayanan Perhubungan**
2	***#***	***02***	***1***	***06***	***03***	***Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil***														***54.000.000***	*90.000.000*		
							Pengembangan konektivitas dan infrastruktur	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur perhubungan	Wilayah Povinsi Kepulauan Bangka Belitung					Jumlah Rekomendasi Penyelenggaraan Penilaian Analisis Dampak Lalu Lintas	3 Dokumen					54.000.000	90.000.000		Indeks Kinerja Pelayanan Perhubungan
2	15	02	1	07		**Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**														**504.000.000**	**1.733.000.000**		
																Persentase Ruas Jalan Provinsi yang dilaksanakan audit dan inspeksi				**504.000.000**	**1.733.000.000**		**Level Keselamatan Transportasi**
2	***#***	***02***	***1***	***07***	***05***	***Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan***														***504.000.000***	***1.733.000.000***		
							Pengembangan konektivitas dan infrastruktur	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur perhubungan	**Wilayah Povinsi Kepulauan Bangka Belitung**					Persentase penurunan pelanggaran lalu lintas	93%					130.000.000	175.000.000		Level Keselamatan Transportasi
							Pengembangan konektivitas dan infrastruktur	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur perhubungan	**Wilayah Povinsi Kepulauan Bangka Belitung**					Persentase Angkutan Umum yang lulus ramp check	93%					150.000.000	265.000.000		Level Keselamatan Transportasi
							Pengembangan konektivitas dan infrastruktur	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur perhubungan	**Wilayah Povinsi Kepulauan Bangka Belitung**					Persentase Angkutan yang laik jalan dalam rangka melayani Peringatan hari-hari daerah dan nasional	93%					150.000.000	1.200.000.000		Level Keselamatan Transportasi
							Pengembangan konektivitas dan infrastruktur	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur perhubungan	**Wilayah Povinsi Kepulauan Bangka Belitung**					Persentase Balai Uji Kendaraan Bermotor yang telah memenuhi SOP Pengujian Kendaraan	85%					-	85.000.000		Level Keselamatan Transportasi
							Pengembangan konektivitas dan infrastruktur	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur perhubungan	**Pangkalpinang**	**Bukit Intan**	**Air Itam**			Persentase Awak Kendaraan Umum yang telah mengikuti AKUT tingkat Provinsi	35%					74.000.000	8.000.000		Level Keselamatan Transportasi
2	**15**	**02**	**1**	**08**		**Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota**														**1.000.000.000**	**6.400.000.000**		
																Prosentase Ketersediaan Angkutan Umum	**40%**			**1.000.000.000**	**6.400.000.000**		**Indeks Kinerja Pelayanan Perhubungan**

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.) RANKHIR	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
									Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
												Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2	15	02	1	08	02	***Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu)***												**1.000.000.000**	**3.200.000.000**		
							Pengembangan konektivitas dan infrastruktur	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur perhubungan	Wilayah Povinsi Kepulauan Bangka Belitung					Jumlah Rute/Trayek yang mendapatkan subsidi aglomerasi	2 Trayek			1.000.000.000	3.200.000.000		Indeks Kinerja Pelayanan Perhubungan
2	**15**	**03**	**1**			**PROGRAM PENGELOLAAN**												**12.211.752.348**	**-**		
												Prosentase Pemenuhan Infrastruktur Pelayaran	**67%**					**12.211.752.348**	**-**		
2	**15**	**03**	**1**	**08**		**Kegiatan Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan**												**300.000.000**	**-**		
																Persentase Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan	**75%**	**300.000.000**	**-**		**Rasio Konektivitas dan Aksesibilitas Nasional**
2	***#***	***03***	***1***	***08***	***01***	***Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan***												***300.000.000***	**-**		
							Pengembangan konektivitas dan infrastruktur	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur perhubungan	Kab. Bangka Tengah	Sungaiselan				Persentase Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP)	1 dokumen			300.000.000			Rasio Konektivitas dan Aksesibilitas Nasional
2	**15**	**03**	**1**	**09**		**Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan**												**220.000.000**	**-**		
																Persentase Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan	**75%**	**220.000.000**	**-**		**Rasio Konektivitas dan Aksesibilitas Nasional**
2	***#***	***03***	***1***	***09***	***01***	***Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan***												***220.000.000***	**-**		
							Pengembangan konektivitas dan infrastruktur	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur perhubungan	Kab. Bangka Barat	Muntok				Persentase Pemenuhan Dokumen SID dan DED Pembangunan SBNP di Pelabuhan Pengumpan Regional	75%			220.000.000			Rasio Konektivitas dan Aksesibilitas Nasional
2	**15**	**03**	**1**	**10**		**Kegiatan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota**												**11.600.000.000**	**-**		
																Persentase Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	**75%**	**11.600.000.000**	**-**		**Rasio Konektivitas dan Aksesibilitas Nasional**

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.) RANKHIR	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
									Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
												Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2	*#*	*03*	*1*	*10*	*01*	***Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek***													***600.000.000***	-		
							Pengembangan konektivitas dan infrastruktur	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur perhubungan	Kab. Bangka Barat dan Kab. Bangka	Parit Tiga dan Belinyu	Bakit dan Mantung			Jumlah Rencana Induk Pelabuhan	1 dokumen			600.000.000	-		Rasio Konektivitas dan Aksesibilitas Nasional
2	*#*	*03*	*1*	*10*	*02*	***Sub Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau Yang Melayani Trayek Lintas***													***11.000.000.000***	-		
							Pengembangan konektivitas dan infrastruktur	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur perhubungan	Kab. Bangka Barat dan Kab. Bangka	Parit Tiga dan Belinyu	Bakit dan Mantung			Jumlah Dermaga penyeberangan yang dibangun	4 unit			11.000.000.000	-		Rasio Konektivitas dan Aksesibilitas Nasional
2	**15**	**03**	**1**	**11**		**Kegiatan Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional**													**91.752.348**	-		
																Persentase Badan Usaha Pelabuhan yang memiliki Izin Usaha di Pelabuhan	**95%**	**91.752.348**	-		**Indeks Kinerja Pelayanan Perhubungan**
						Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan												***91.752.348***	-		
							Pengembangan konektivitas dan infrastruktur	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur perhubungan	Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Bangka Tengah	Muntok dan Sungaiselan				Prosentase pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem	95%			91.752.348	-		Indeks Kinerja Pelayanan Perhubungan
2	**15**	**04**	**1**			**PROGRAM PENGELOLAAN**												**2.520.000.000**	**1.535.625.000**		
												Persentase pemenuhan sarana dan prasarana fasilitas bandara	**20%**					**2.520.000.000**	**1.535.625.000**		
2	**15**	**04**	**1**	**01**		**Kegiatan Penyelenggaraan**												**2.520.000.000**	**1.535.625.000**		
																Prosentase Penyediaan Aksesibilitas dan Utilitas Kegiatan	**20%**	**2.520.000.000**	**1.535.625.000**		**Indeks Kinerja Pelayanan Perhubungan**
2	*#*	*04*	*1*	*01*	*05*	***Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kebandarudaraan yang menajdi***													***2.520.000.000***	***1.535.625.000***		
							Pengembangan konektivitas dan infrastruktur	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur perhubungan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Prosentase Pemenuhan Aksesibilitas dan Utilitas Penunjang	20%			1.520.000.000	-		Indeks Kinerja Pelayanan Perhubungan
							Pengembangan konektivitas dan infrastruktur	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur perhubungan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Prosentase beroperasinya gedung VIP Bandara Depati Amir dalam	100%			1.000.000.000	1.535.625.000		Indeks Kinerja Pelayanan Perhubungan

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Bangka Belitung
Tahun 2021

Unit Organisasi : Dinas Pertanian

Sub Unit Organisasi : Dinas Pertanian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Kegiatan		Hasil SubKegiatan/Indikator subkegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN												55.569.926.632			
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN												55.569.926.632			
3	27	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH (SEKRETARIAT)			Pangkalpinang									27.873.446.632			
											Nilai Sakip PD	79,89					477.000.000			
3	27	1	02:01		Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												477.000.000			
													Jumlah dok perencanaan dan evaluasi kinerja	14 DOKUMEN			477.000.000			
3	27	1	02:01	1	penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah												45.290.000			
															Jumlah dok perencanaan Renstra/Renja PD	1 DOKUMEN	45.290.000			
3	27	1	02:01	2	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan												22.790.000			
															Jumlah Dokumen DPA/DPPA yang tersusun	2 DOKUMEN	22.790.000			
3	27	1	02:01	3	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah												57.055.500			
															Jumlah dok evaluasi PD (DALEV)	4 DOKUMEN	57.055.500			
3	27	1	02:01	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah												123.838.500			
															jumlah dokumen kesepakatan Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan PD	1 DOKUMEN	123.838.500			
3	27	1	02:01	5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												228.026.000			
															Jumlah dok Evalusi kinerja PD (LKPJ, LAKIP, LPPD dan Statistik)	4 DOKUMEN	228.026.000			
											Survey Kepuasan Pelayanan Internal	80					**27.396.446.632**			
3	27	1	02:02		Kegiatan Administrasi Keuangan												17.976.882.461			
													Survey kepuasan pelayanan keuangan	80			17.976.882.461			
3	27	1	02:02	1	Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN												17.916.132.461			
															Jumlah ASN yang terima gaji dan tunjangan	135 ORANG	17.916.132.461			
3	27	1	02:02	7	Penyusunan laporan keuangan bulanan/semesteran												56.940.000			
															Jumlah laporan keuangan bulanan/Semesteran	14 Laporan	56.940.000			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Kegiatan		Hasil SubKegiatan/Indikator subkegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
3	27	1	02:02	9	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun												3.810.000			
															Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 Laporan	3.810.000			
3	27	1	02:03		Kegiatan Adiministrasi Umum												9.142.884.171			
													survey kepuasan pelayanan umum	81			9.142.884.171			
3	27	1	02:03	1	Penyediaan Jasa surat menyurat												3.739.800.000			
															Jumlah Materai	2000 Lembar	7.500.000			
															Jumlah tenaga pramubakti yang dipekerjakan	99 Orang	3.732.300.000			
3	27	1	02:03	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik												400.200.000			
															Jumlah Tagihan rekening listrik, air, telepon/fax, internet, virtual meeting yang dibayarkan	12 bulan	400.200.000			
3	27	1	02:03	3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor												579.650.000			
															jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor	20 kali	127.250.000			
															Jumlah tenaga keamanan/satpam kantor yang dipekerjakan	12 org	452.400.000			
3	27	1	02:03	6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional												335.060.000			
															jumlah kendaraan operasional yang dipelihara	32 unit	108.860.000			
															Jumlah tenaga sopir yang dipekerjakan	6 org	226.200.000			
3	27	1	02:03	7	Penyediaan jasa Administrasi keuangan												234.100.000			
															Jumlah pengelola administrasi keuangan	29 org	234.100.000			
3	27	1	02:03	8	Penyediaan jasa kebersihan kantor												640.900.000			
															Jumlah tenaga kebersihan yang dipekerjakan	17 org	640.900.000			
3	27	1	02:03	9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja												115.500.000			
															jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	34 unit	115.500.000			
3	27	1	02:03	10	Penyediaan alat tulis kantor												117.152.091			
															Jumlah jenis ATK yang dibeli	50 jenis	117.152.091			
3	27	1	02:03	11	Penyediaan barang cetak dan penggandaan												44.000.000			
															jumlah barang cetak	300 eksemplar	20.000.000			
															Jumlah barang penggandaan	57.143 lembar	20.000.000			
															jumlah barang penjilidan	80 buku	4.000.000			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Kegiatan		Hasil SubKegiatan/Indikator subkegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
3	27	1	02:03	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor												130.000.000			
															Jumlah komponen instalasi listrik	15 jenis	130.000.000			
3	27	1	02:03	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor												90.160.000			
															jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	20 jenis	90.160.000			
3	27	1	02:03	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan												14.000.000			
															Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan	132 eksemplar	14.000.000			
3	27	1	02:03	16	Penyediaan bahan logistik kantor												22.160.000			
															jumlah bahan logistik kantor	4 unit	22.160.000			
3	27	1	02:03	17	Penyediaan makan dan minum												60.000.000			
															Jumlah makan dan minum Tamu	1260 pax	20.000.000			
															Jumlah makan dan minum rapat	1500 pax	40.000.000			
3	27	1	02:03	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah												793.249.000			
															jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	83 kali	504.889.000			
															Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah	143 kali	288.360.000			
3	27	1	02:03	24	Pengadaan peralatan gedung kantor												550.835.180			
															Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	10 jenis	550.835.180			
3	27	1	02:03	25	Pengadaan meubelair												123.000.000			
															Jumlah mebelair	4 unit	123.000.000			
3	27	1	02:03	28	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor												693.117.900			
															jumlah gedung kantor yang dipelihara	4 unit	693.117.900			
3	27	1	02:03	29	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan												260.000.000			
															jumlah mobil jabatan yang dipelihara	9 unit	260.000.000			
3	27	1	02:03	31	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/Oprasional												200.000.000			
															Jumlah kendaraan oprasional yang dipelihara	4 unit	200.000.000			
3	27	1	02:04		Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur												276.680.000			
													survey kepuasan pelayanan kepegawaian	81			276.680.000			
3	27	1	02:04	9	Pendidikan dan Pelatihan Formal												237.100.000			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Kegiatan		Hasil SubKegiatan/Indikator subkegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
															Jumlah pegawai yang ikut pendidikan dan	70 orang	237.100.000			
3	27	1	02:04	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan												39.580.000			
															Jumlah peserta sosialisasi peraturan	135 orang	39.580.000			
3	27	2			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	**Pengembangan Pembangunan Agropolitan.**	**Meningkatkan nilai tambah sektor pertanian**	**7 Kab/Kota**									22.958.980.000			
											Persentase terawasinya peredaran pupuk, pestisida, alsintan dan sarana pendukung peningkatan produksi	100%					150.000.000			
3	27	2	1,01		Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian												150.000.000			
													Dokumen pengawasan dan peredaran pupuk, pestisida, alsintan dan sarana pendukung peningkatan produksi	1 DOKUMEN			150.000.000			
3	27	2	1,01	1	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung												150.000.000			
															Jumlah Laporan/Database/Dokumen Pengawasan Pupuk, Pestisida dan Alat Mesin Pertanian	1 LAPORAN	150.000.000			
											Persentase peningkatan luas tanam Tanaman Pangan & Hortikultura	69,58%					1.025.000.000			
											Persentase peningkatan luas tanam perkebunan	10,17%					19.221.730.000			
											Persentase benih/bibit pertanian berlabel dan bersertifikat	5,00%					320.000.000			
3	27	2	1,02		Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman												20.566.730.000			
													Jumlah Luasan Benih/Bibit Tanaman Pangan dan Hortikultura yang tersedia (Ha)	120 HA			1.025.000.000			
													Jumlah Luasan Bibit Perkebunan yang tersedia (Lada, Sawit, Karet, Kopi) (Ha)	185 HA			19.221.730.000			
													Jumlah sertifikasi bibit Pertanian yang dikeluarkan	3.075.000 bibit			320.000.000			
	27	2	1,02	1	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih												120.000.000			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Kegiatan		Hasil SubKegiatan/Indikator subkegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
															Jumlah sertifikasi benih/bibit Tan. Hortikultura yang dikeluarkan	47 SERTIFIKAT	60.000.000			
															Jumlah sertifikasi benih/bibit Tan. Perkebunan yang dikeluarkan	47 SERTIFIKAT	60.000.000			
3	27	2	1,02	2	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura												900.000.000			
															Jumlah luasan Benih/Bibit Hortikultura yang tersedia					
															Cabai	12 HA	400.000.000			
															Bawang Merah	3 HA				
															Durian	35 HA	450.000.000			
															Jumlah/Luasan Benih Hortikultura yang diawasi Mutu dan Peredarannya	750 HA	50.000.000			
3	27	2	1,02	3	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan												225.000.000			
															Jumlah Luasan Benih/Bibit Tanaman Pangan yang tersedia					
															Padi	50 HA	175.000.000			
															Jagung	20 HA				
															Jumlah/Luasan Benih Tan. Pangan yang diawasi Mutu dan Peredarannya (Ton)	175 HA	50.000.000			
3	27	2	1,02	4	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit												19.321.730.000			
															Jumlah Luasan Bantuan bibit dan/atau saprodi					
															-Sawit/Lada	150 HA	18.651.730.000			
															-Kopi	35 HA	570.000.000			
															Pengawasan Mutu dan Peredaran Bibit Perkebunan	1570 BATANG	100.000.000			
											Persentase benih/bibit pertanian berlabel dan bersertifikat	5,00%					200.000.000			
3	**27**	**2**	**1,03**		Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi												200.000.000			
													Jumlah Kultivar/ varietas yang dinilai	4 VARIETAS			200.000.000			
3	27	2	1,03	2	Penilaian Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme												200.000.000			
															Jumlah varietas unggul yang dinilai	4 VARIETAS	200.000.000			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Kegiatan		Hasil SubKegiatan/Indikator subkegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
											Persentase Ketersediaan benih/bibit pertanian tingkat lapang (daerah)	50,00%					642.250.000			
3	**27**	**2**	**1,04**		Kegiatan Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi												642.250.000			
													Kualitas Mutu pakan ternak (%)	100%						
3	27	2	1,04	2	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi												642.250.000			
															Ketersediaan pakan ternak (Sapi dan Ayam) (paket)	1 PAKET	642.250.000			
											Persentase Pertambahan Angka Kelahiran Ternak	356,32%					1.400.000.000			
3	**27**	**2**	**1,07**		Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain												1.400.000.000			
													Jumlah bantuan bibit ternak	80 EKOR			1.400.000.000			
3	27	2	1,07	1	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain												1.400.000.000			
															Jumlah Pengadaan bibit ternak	80 EKOR	1.400.000.000			
3	**27**	**3**			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	**Pengembangan Pembangunan Agropolitan.**	**Meningkatkan nilai tambah sektor pertanian**	**7 Kab/Kota**									2.800.000.000			
											Rasio Ketersediaan Prasarana Prapanen Pertanian (%)	15%					2.000.000.000			
											Rasio Ketersediaan Prasarana Pascapanen Pertanian (%)	5%					800.000.000			
3	**27**	**3**	**1,01**		Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian												2.800.000.000			
													Rasio Ketersediaan Prasarana Prapanen Pertanian	15%			2.000.000.000			
													Rasio Ketersediaan Prasarana Pascapanen Pertanian	5%			800.000.000			
3	27	3	1,01	3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani												1.500.000.000			
															Jumlah Luasan Jalan Usaha Tani (Km)	5,6 Km	1.500.000.000			
3	27	3	1,01	4	Koordinasi , Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani												500.000.000			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Kegiatan		Hasil SubKegiatan/Indikator subkegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
															Jumlah Jaringan Irigasi Tersier atau Jaringan Tingkat Usaha Tani yang terbangun (m3)	670 m3	500.000.000			
3	27	3	1,01	9	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian lainnya												800.000.000			
															Jumlah Unit Pengolahan Hasil Perkebunan (UPH Lada) (Unit)	2 UNIT	800.000.000			
3	**27**	**4**			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	**Pengembangan Pembangunan Agropolitan.**	**Meningkatkan nilai tambah sektor pertanian**	**7 Kab/Kota**									600.000.000			
											Persentase penurunan kasus penyakit hewan	75%					388.000.000			
3	**27**	**4**	**1,01**		Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi												388.000.000			
													Terkendalinya keamanan 7 Kab/Kota di wilayah Babel terhadap penyakit-penyakit zoonosis (Rabies dan AI)	7 Kab/Kota			388.000.000			
3	27	4	1,01	1	Pengendalian Resiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis												388.000.000			
															Jumlah pelaksanaan Pengendalian Resiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	2 zoonosis	388.000.000			
3	27	4	1,01	2	Pembebasan Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi															
															Jumlah Pembebasan Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	7 Kab/Kota				
3	27	4	1,01	3	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular															
															Jumlah Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular yang ditanggulangi	1 Lokasi				
											Persentase penurunan kasus penyakit hewan menular	75%					212.000.000			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Kegiatan		Hasil SubKegiatan/Indikator subkegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
3	**27**	**4**	**1,03**		Kegiatan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan												212.000.000			
													Tersertifikasinya 1 unit usaha produk peternakan di Bangka Belitung (ber NKV/Nomor Kontrol Veteriner)serta terujinya 210 sample produk peternakan pada unit-unit usaha/kios-kios produk peternakan	1 NKV(Nomor Kontrol Veteriner) dan 210 sample			212.000.000			
3	27	4	1,03	1	Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit												212.000.000			
															Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit yang dipenuhi	1 unit usaha	212.000.000			
3	**27**	**5**			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	**Pengembangan Pembangunan Agropolitan.**	**Meningkatkan nilai tambah sektor pertanian**	**7 Kab/Kota**									362.500.000			
											Dokumen Laporan Pengendalian dan Penanggulangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)	1 DOKUMEN					237.500.000			
											Dokumen Laporan Pengendalian dan Penanggulangan Dampak Perubahan Iklim	1 DOKUMEN					125.000.000			
3	**27**	**5**	**1,01**		Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi												362.500.000			
													Dokumen Pengendalian dan Penamggulangan Bencana Pertanian Provinsi	4 DOKUMEN			362.500.000			
3	27	5	1,01	1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan												237.500.000			
															rasio luas areal pengendalian OPT terhadap luas pertanaman	3%	237.500.000			
3	27	5	1,01	2	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan												77.849.600			
															Polis Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)	3500 HA	77.849.600			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Kegiatan		Hasil SubKegiatan/Indikator subkegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
3	27	5	1,01	4	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan												47.150.400			
															Polis Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS)	2010 EKOR	47.150.400			
3	**27**	**7**			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	**Pengembangan Pembangunan Agropolitan,**	**Meningkatkan nilai tambah sektor pertanian**	**7 Kab/Kota**									975.000.000			
											Persentase peningkatan kelas kelompok tani	80%					975.000.000			
3	**27**	**7**	**1,02**		Kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian												975.000.000			
													Jumlah petani dan penyuluh yang dilatih	1000 ORANG			975.000.000			
3	27	7	1,02	1	Diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian												475.000.000			
															Jumlah Event Rembuk Tani Nasional (PENAS)	1 EVENT	475.000.000			
3	27	7	1,02	2	Pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan petani												500.000.000			
															JUmlah peningkatan kapabilitas penyuluhan	204 ORANG	500.000.000			
																	55.569.926.632		-	-

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2021

Unit Organisasi : **DINAS KEHUTANAN**
Sub Unit Organisasi : **DINAS KEHUTANAN**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)-2021	Prakiraan Maju (Rp.)-2022	Keterangan	
								Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Hasil Kegiatan/ Indikator Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	10	11	14	15	16	17
															selisih (pagu bl-bl ...)		-	-		
															bl riil (total-btl)		10.250.226.221	15.718.756.815		
															hitungan btl		25.296.294.555	23.945.000.000		
															pagu bl		10.250.226.221	15.718.756.815		
3					URUSAN PILIHAN															
3	28				DINAS KEHUTANAN												35.546.520.776	39.663.756.815		
3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Ket: AA=(>90-100); A=(>80-90); BB=(>70-90); B=(>60-70); CC=(>50-60); C=(>30-50);	100		100			29.215.660.736	29.091.628.735		
											Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Ket: AA=(>90-100); A=(>80-90); BB=(>70-90); B=(>60-70); CC=(>50-60); C=(>30-50);	83					25.471.294.555	23.740.000.000		
3	28	01	1.01		Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pengendalian Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas tutupan lahan	Pangkalpinang	Rangkui	Pintu Air Atas			Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi	10			150.000.000	210.000.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	
3	28	01	1.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah										Jumlah dokumen perencanaan PD	2	20.000.000	30.000.000		
3	28	01	1.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah										Jumlah Dokumen evaluasi PD (Dalev)	4	30.000.000	30.000.000		
3	28	01	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah										Jumlah dokumen pelaksanaan koordinasi dan	1	75.000.000	100.000.000		
3	28	01	1.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										Jumlah dokumen evalusi kinerja PD	3	25.000.000	50.000.000		
3	28	01	1.02		Kegiatan 1.02: Administrasi Keuangan	Pengendalian Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas tutupan lahan	Pangkalpinang	Rangkui	Pintu Air Atas			Survey kepuasan pelayanan keuangan				25.321.294.555	23.530.000.000	Meningkatkan tata kelola keuangan daerah	
3	28	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										Jumlah PNS yang terima gaji dan	183	25.296.294.555	23.500.000.000		
3	28	01	1.02	04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan										Jumlah laporan akuntasi keuangan	1	5.000.000	5.000.000		
3	28	01	1.02	05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan										Jumlah laporan pengelolaan dan	2	5.000.000	5.000.000		
3	28	01	1.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran										Jumlah laporan keuangan bulanan	12	5.000.000	5.000.000		
3	28	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran										Jumlah laporan prognosis realisasi	1	0	5.000.000		
3	28	01	1.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun										Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1	10.000.000	10.000.000		
											Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap	100					3.744.366.181	5.351.628.735		
3	28	01	1.03		Kegiatan 1.03: Administrasi Umum	Pengendalian Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas tutupan	Pangkalpinang	Rangkui	Pintu Air Atas			Survey kepuasan pelayanan umum	100			3.724.366.181	5.026.628.735	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	
3	28	01	1.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										Jumlah jasa surat menyurat		23.100.000	20.038.735		
															Jumlah surat/barang yang dikirim		8.400.000	6.538.735		
								Pangkalpinang	Rangkui	Pintu Air Atas					Jumlah barang yang dikirim Dinas	48	2.400.000	2.538.735		
								Bangka Barat	Muntok	Belo Laut					Jumlah barang yang dikirim di UPTD KPHP	12	750.000	500.000		
								Bangka Barat	Parit Tiga	Puput					Jumlah barang yang dikirim di UPTD KPHP	12	750.000	500.000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)-2021	Prakiraan Maju (Rp.)-2022	Keterangan	
								Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Hasil Kegiatan/ Indikator Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	10	11	14	15	16	17
								Bangka	Riau Silip	Cit					Jumlah barang yang dikirim di UPTD KPHP	12	750.000	500.000		
								Bangka	Merawang	Rebo					Jumlah barang yang dikirim di UPTD KPHP Sigambir Kota Waringin	12	750.000	500.000		
								Bangka Tengah	Pangkalan Baru	Mangkol					Jumlah barang yang dikirim di UPTD KPHP	12	750.000	500.000		
								Bangka Selatan	Toboali	Keposang					Jumlah barang yang dikirim di UPTD KPHP	12	750.000	500.000		
								Belitung	Tanjung pandan	Air Merbau					Jumlah barang yang dikirim di UPTD KPHL	12	750.000	500.000		
								Belitung Timur	Gantung	Limbongan					Jumlah barang yang dikirim di UPTD KPHP	12	750.000	500.000		
															Jumlah materai		**14.700.000**	**13.500.000**		
								Pangkalpinang	Rangkui	Pintu Air Atas					Jumlah materai di Dinas Kehutanan	1.500	7.500.000	7.500.000		
								Bangka Barat	Muntok	Belo Laut					Jumlah materai di UPTD KPHP Rambat	175	900.000	750.000		
								Bangka Barat	Parit Tiga	Puput					Jumlah materai di UPTD KPHP Jebu	175	900.000	750.000		
								Bangka	Riau Silip	Cit					Jumlah materai di UPTD KPHP Bubus	175	900.000	750.000		
								Bangka	Merawang	Rebo					Jumlah materai di UPTD KPHP Sigambir	175	900.000	750.000		
								Bangka Tengah	Pangkalan Baru	Mangkol					Jumlah materai di UPTD KPHP Sungai	175	900.000	750.000		
								Bangka Selatan	Toboali	Keposang					Jumlah materai di UPTD KPHP Munai	175	900.000	750.000		
								Belitung	Tanjung pandan	Air Merbau					Jumlah materai di UPTD KPHL Belantu	175	900.000	750.000		
								Belitung Timur	Gantung	Limbongan					Jumlah materai di UPTD KPHP Gunung	175	900.000	750.000		
3	**28**	**01**	**1.03**	**02**	**Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**										**Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan**		**249.900.000**	**338.000.000**		
															Jumlah tagihan listrik		**189.900.000**	**260.000.000**		
								Pangkalpinang	Rangkui	Pintu Air Atas					Jumlah tagihan listrik di dinas kehutanan	12	100.000.000	100.000.000		
								Bangka Barat	Muntok	Belo Laut					Jumlah tagihan listrik di UPTD KPHP Rambat	12	9.400.000	20.000.000		
								Bangka Barat	Parit Tiga	Puput					Jumlah tagihan listrik di UPTD KPHP Jebu	12	12.000.000	20.000.000		
								Bangka	Riau Silip	Cit					Jumlah tagihan listrik di UPTD KPHP Bubus	12	12.000.000	20.000.000		
								Bangka	Merawang	Rebo					Jumlah tagihan listrik di UPTD KPHP Sigambir	12	10.000.000	20.000.000		
								Bangka Tengah	Pangkalan Baru	Mangkol					Jumlah tagihan listrik di UPTD KPHP Sungai	12	13.000.000	20.000.000		
								Bangka Selatan	Toboali	Keposang					Jumlah tagihan listrik di UPTD KPHP Munai	12	10.000.000	20.000.000		
								Belitung	Tanjung pandan	Air Merbau					Jumlah tagihan listrik di UPTD KPHL Belantu	12	10.000.000	20.000.000		
								Belitung Timur	Gantung	Limbongan					Jumlah tagihan listrik di UPTD KPHP Gunung	12	13.500.000	20.000.000		
															Jumlah tagihan komunikasi		**60.000.000**	**78.000.000**		
								Pangkalpinang	Rangkui	Pintu Air Atas					Jumlah tagihan komunikasi di Dinas	12	36.000.000	30.000.000		
								Bangka Barat	Muntok	Belo Laut					Jumlah tagihan komunikasi di UPTD	12	3.000.000	6.000.000		
								Bangka Barat	Parit Tiga	Puput					Jumlah tagihan komunikasi di UPTD	12	3.000.000	6.000.000		
								Bangka	Riau Silip	Cit					Jumlah tagihan komunikasi di UPTD	12	3.000.000	6.000.000		
								Bangka	Merawang	Rebo					Jumlah tagihan komunikasi di UPTD	12	3.000.000	6.000.000		
								Bangka Tengah	Pangkalan Baru	Mangkol					Jumlah tagihan komunikasi di UPTD	12	3.000.000	6.000.000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)-2021	Prakiraan Maju (Rp.)-2022	Keterangan	
								Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Hasil Kegiatan/ Indikator Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	10	11	14	15	16	17
								Bangka Selatan	Toboali	Keposang					Jumlah tagihan komunikasi di UPTD	12	3.000.000	6.000.000		
								Belitung	Tanjung pandan	Air Merbau					Jumlah tagihan komunikasi di UPTD	12	3.000.000	6.000.000		
								Belitung Timur	Gantung	Limbongan					Jumlah tagihan komunikasi di UPTD	12	3.000.000	6.000.000		
3	28	01	1.03	04	**Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS**										**Jumlah pegawai PNS yang dijamin**	**185**	**0**	**365.000.000**		
3	28	01	1.03	xx	Penyediaan jasa jaminan ketenagakerjaan non PNS										Jumlah pegawai non PNS yang memiliki	60	0	80.000.000		
3	28	01	1.03	06	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional**										**Jumlsh Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan**		**77.650.000**	**77.650.000**		
															Jumlah kendaraan operasional yang	9	2.250.000	2.250.000		
								Pangkalpinang	Rangkui	Pintu Air Atas					Jumlah tenaga sopir	2	75.400.000	75.400.000		
3	28	01	1.03	07	**Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan**										**Jumlah pengelola administrasi keuangan**		**282.000.000**	**279.000.000**		
								Pangkalpinang	Rangkui	Pintu Air Atas					Jumlah pengelola administrasi keuangan	11	150.000.000	150.000.000		
								Bangka Barat	Muntok	Belo Laut					Jumlah pengelola administrasi keuangan UPTD KPHP Rambat	4	16.500.000	16.125.000		
								Bangka Barat	Parit Tiga	Puput					Jumlah pengelola administrasi keuangan UPTD KPHP Jebu	4	16.500.000	16.125.000		
								Bangka	Riau Silip	Cit					Jumlah pengelola administrasi keuangan dinas UPTD KPHP	4	16.500.000	16.125.000		
								Bangka	Merawang	Rebo					Jumlah pengelola administrasi keuangan UPTD KPHP Sigambir	4	16.500.000	16.125.000		
								Bangka Tengah	Pangkalan Baru	Mangkol					Jumlah pengelola administrasi keuangan UPTD KPHP Sungai	4	16.500.000	16.125.000		
								Bangka Selatan	Toboali	Keposang					Jumlah pengelola administrasi keuangan UPTD KPHP Muntai	4	16.500.000	16.125.000		
								Belitung	Tanjung pandan	Air Merbau					Jumlah pengelola administrasi keuangan UPTD KPHL Belantu	4	16.500.000	16.125.000		
								Belitung Timur	Gantung	Limbongan					Jumlah pengelola administrasi keuangan UPTD KPHP Gunung	4	16.500.000	16.125.000		
3	28	01	1.03	08	**Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor**												**488.400.000**	**521.400.000**		
3	28	01	1.03												**Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan**		**36.000.000**	**69.000.000**		
								Pangkalpinang	Rangkui	Pintu Air Atas					Jumlah penyediaan jasa kebersihan Kantor Dinas Kehutanan	12	12.000.000	13.000.000		
								Bangka Barat	Muntok	Belo Laut					Jumlah penyediaan jasa kebersihan Kantor UPTD KPHP Rambat	12	3.000.000	7.000.000		
								Bangka Barat	Parit Tiga	Puput					Jumlah penyediaan jasa kebersihan Kantor UPTD KPHP Jebu	12	3.000.000	7.000.000		
								Bangka	Riau Silip	Cit					Jumlah penyediaan jasa kebersihan Kantor UPTD KPHP Bubus	12	3.000.000	7.000.000		
								Bangka	Merawang	Rebo					Jumlah penyediaan jasa kebersihan Kantor UPTD KPHP Sigambir	12	3.000.000	7.000.000		
								Bangka Tengah	Pangkalan Baru	Mangkol					Jumlah penyediaan jasa kebersihan Kantor UPTD KPHP Sungai	12	3.000.000	7.000.000		
								Bangka Selatan	Toboali	Keposang					Jumlah penyediaan jasa kebersihan Kantor UPTD KPHP Muntai	12	3.000.000	7.000.000		
								Belitung	Tanjung pandan	Air Merbau					Jumlah penyediaan jasa kebersihan Kantor UPTD KPHL Belantu	12	3.000.000	7.000.000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)-2021	Prakiraan Maju (Rp.)-2022	Keterangan	
								Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Hasil Kegiatan/ Indikator Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	10	11	14	15	16	17
								Belitung Timur	Gantung	Limbongan					Jumlah penyediaan jasa kebersihan Kantor UPTD KPHP Gunung	12	3.000.000	7.000.000		
3	28	01	1.03	08	**Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor**										**Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan**		**452.400.000**	**452.400.000**		
															Jumlah Honorer Pramu Kebersihan	11	414.700.000	414.700.000		
								Pangkalpinang	Rangkui	Pintu Air Atas					Jumlah Honorer Pramu	1	37.700.000	37.700.000		
3	28	01	1.03	09	**Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja**										**Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki**	**15**	**15.000.000**	**15.000.000**		
3	28	01	1.03	10	**Penyediaan Alat Tulis Kantor**										**Jumlah bulan penyediaan**		**137.250.000**	**183.000.000**		
								Pangkalpinang	Rangkui	Pintu Air Atas					Jumlah bulan penyediaan kelengkapan alat tulis	69	51.750.000	69.000.000		
								Bangka Barat	Muntok	Belo Laut					Jumlah bulan penyediaan kelengkapan alat tulis	11	8.250.000	11.000.000		
								Bangka Barat	Parit Tiga	Puput					Jumlah bulan penyediaan kelengkapan alat tulis	9	6.750.000	9.000.000		
								Bangka	Riau Silip	Cit					Jumlah bulan penyediaan kelengkapan alat tulis	12	9.000.000	12.000.000		
								Bangka	Merawang	Rebo					Jumlah bulan penyediaan kelengkapan alat tulis kantor UPTD KPHP	14	10.500.000	14.000.000		
								Bangka Tengah	Pangkalan Baru	Mangkol					Jumlah bulan penyediaan kelengkapan alat tulis	14	10.500.000	14.000.000		
								Bangka Selatan	Toboali	Keposang					Jumlah bulan penyediaan kelengkapan alat tulis	12	9.000.000	12.000.000		
								Belitung	Tanjung pandan	Air Merbau					Jumlah bulan penyediaan kelengkapan alat tulis	21	15.750.000	21.000.000		
								Belitung Timur	Gantung	Limbongan					Jumlah bulan penyediaan kelengkapan alat tulis	21	15.750.000	21.000.000		
3	28	01	1.03	11	**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**										**Penyediaan Barang Cetakan dan**		**38.746.000**	**45.200.000**		
															Jumlah barang cetak		**6.000.000**	**6.000.000**		
								Pangkalpinang	Rangkui	Pintu Air Atas					Jumlah barang cetak di Dinas Kehutanan	6	6.000.000	6.000.000		
															Jumlah penggandaan		**32.746.000**	**39.200.000**		
								Pangkalpinang	Rangkui	Pintu Air Atas					Jumlah penggandaan di Dinas Kehutanan	32.000	8.750.000	11.200.000		
								Bangka Barat	Muntok	Belo Laut					Jumlah penggandaan di UPTD KPHP Rambat	10.000	2.999.500	3.500.000		
								Bangka Barat	Parit Tiga	Puput					Jumlah penggandaan di UPTD KPHP Jebu	10.000	2.999.500	3.500.000		
								Bangka	Riau Silip	Cit					Jumlah penggandaan di UPTD KPHP Bubus	10.000	2.999.500	3.500.000		
								Bangka	Merawang	Rebo					Jumlah penggandaan di UPTD KPHP Sigambir	10.000	2.999.500	3.500.000		
								Bangka Tengah	Pangkalan Baru	Mangkol					Jumlah penggandaan di UPTD KPHP Sungai	10.000	2.999.500	3.500.000		
								Bangka Selatan	Toboali	Keposang					Jumlah penggandaan di UPTD KPHP Muntai	10.000	2.999.500	3.500.000		
								Belitung	Tanjung pandan	Air Merbau					Jumlah penggandaan di UPTD KPHL Belantu	10.000	2.999.500	3.500.000		
								Belitung Timur	Gantung	Limbongan					Jumlah penggandaan di UPTD KPHP Gunung	10.000	2.999.500	3.500.000		
3	28	01	1.03	12	**Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan**										**Jumlah komponen instalasi listrik**	**2**	**5.000.000**	**5.000.000**		
3	28	01	1.03	13	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**										**Jumlah Penyediaan Peralatan dan**		**728.200.000**	**987.000.000**		
															Jumlah peralatan	**41**	**75.000.000**	**200.000.000**		
															Jumlah perlengkapan	**50**	**50.000.000**	**146.100.000**		
															Jumlah tenaga keamanan/satpam	**17**	**603.200.000**	**640.900.000**		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)-2021	Prakiraan Maju (Rp.)-2022	Keterangan	
								Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Hasil Kegiatan/ Indikator Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	10	11	14	15	16	17
3	**28**	**01**	**1.03**	**16**	**Penyediaan Bahan Logistik Kantor**										**Jumlah bahan logistik**	**12**	**0**	**12.000.000**		
3	**28**	**01**	**1.03**	**17**	**Penyediaan Makanan dan Minuman**										**Jumlah makanan dan**		**17.500.000**	**87.500.000**		
															Jumlah makan dan minum tamu		**5.000.000**	**32.500.000**		
								Pangkalpinang	Rangkui	Pintu Air Atas					Jumlah makan dan minum tamu di Dinas	250	5.000.000	12.500.000		
								Bangka Barat	Muntok	Belo Laut					Jumlah makan dan minum tamu di UPTD KPHP Rambat	50	0	2.500.000		
								Bangka Barat	Parit Tiga	Puput					Jumlah makan dan minum tamu di UPTD KPHP Jebu Bembang	50	0	2.500.000		
								Bangka	Riau Silip	Cit					Jumlah makan dan minum tamu di UPTD	50	0	2.500.000		
								Bangka	Merawang	Rebo					Jumlah makan dan minum tamu di UPTD KPHP Sigambir	50	0	2.500.000		
								Bangka Tengah	Pangkalan Baru	Mangkol					Jumlah makan dan minum tamu di UPTD	50	0	2.500.000		
								Bangka Selatan	Toboali	Keposang					Jumlah makan dan minum tamun di UPTD	50	0	2.500.000		
								Belitung	Tanjung pandan	Air Merbau					Jumlah makan dan minum tamu di UPTD	50	0	2.500.000		
								Belitung Timur	Gantung	Limbongan					Jumlah makan dan minum tamun di UPTD	50	0	2.500.000		
															Jumlah makan dan minum rapat		**12.500.000**	**55.000.000**		
								Pangkalpinang	Rangkui	Pintu Air Atas					Jumlah makan dan minum rapat di Dinas	500	12.500.000	25.000.000		
								Bangka Barat	Muntok	Belo Laut					Jumlah makan dan minum rapatn di UPTD KPHP Rambat	75	0	3.750.000		
								Bangka Barat	Parit Tiga	Puput					Jumlah makan dan minum rapat di UPTD KPHP Jebu Bembang	75	0	3.750.000		
								Bangka	Riau Silip	Cit					Jumlah makan dan minum rapat di UPTD	75	0	3.750.000		
								Bangka	Merawang	Rebo					Jumlah makan dan minum rapat di UPTD KPHP Sigambir	75	0	3.750.000		
								Bangka Tengah	Pangkalan Baru	Mangkol					Jumlah penggandaan di UPTD KPHP Sungai	75	0	3.750.000		
								Bangka Selatan	Toboali	Keposang					Jumlah makan dan minum rapat di UPTD	75	0	3.750.000		
								Belitung	Tanjung pandan	Air Merbau					Jumlah makan dan minum rapat di UPTD	75	0	3.750.000		
								Belitung Timur	Gantung	Limbongan					Jumlah makan dan minum rapat di UPTD	75	0	3.750.000		
3	**28**	**01**	**1.03**	**18**	**Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah**										**Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar**		**808.100.181**	**980.000.000**		
															Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar		**438.100.181**	**540.000.000**		
								Pangkalpinang	Rangkui	Pintu Air Atas					Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar	1	198.100.181	300.000.000		
								Bangka Barat	Muntok	Belo Laut					Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah di UPTD KPHP	1	25.000.000	25.000.000		
								Bangka Barat	Parit Tiga	Puput					Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah di UPTD KPHP	1	25.000.000	25.000.000		
								Bangka	Riau Silip	Cit					Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah di UPTD KPHP	1	25.000.000	25.000.000		
								Bangka	Merawang	Rebo					Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah di UPTD KPHP	1	25.000.000	25.000.000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)-2021	Prakiraan Maju (Rp.)-2022	Keterangan	
								Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Hasil Kegiatan/ Indikator Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	10	11	14	15	16	17
								Bangka Tengah	Pangkalan Baru	Mangkol					Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah di UPTD KPHP	1	35.000.000	35.000.000		
								Bangka Selatan	Toboali	Keposang					Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah di UPTD KPHP	1	35.000.000	35.000.000		
								Belitung	Tanjung pandan	Air Merbau					Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah di UPTD KPHP	1	35.000.000	35.000.000		
								Belitung Timur	Gantung	Limbongan					Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah di UPTD KPHP	1	35.000.000	35.000.000		
															Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam		**370.000.000**	**440.000.000**		
								Pangkalpinang	Rangkui	Pintu Air Atas					Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah pada Dinas	1	150.000.000	200.000.000		
								Bangka Barat	Muntok	Belo Laut					Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah di UPTD KPHP	1	25.000.000	25.000.000		
								Bangka Barat	Parit Tiga	Puput					Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah di UPTD KPHP	1	25.000.000	25.000.000		
								Bangka	Riau Silip	Cit					Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah di UPTD KPHP	1	25.000.000	25.000.000		
								Bangka	Merawang	Rebo					Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah di UPTD KPHP	1	25.000.000	25.000.000		
								Bangka Tengah	Pangkalan Baru	Mangkol					Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah di UPTD KPHP	1	30.000.000	35.000.000		
								Bangka Selatan	Toboali	Keposang					Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah di UPTD KPHP	1	30.000.000	35.000.000		
								Belitung	Tanjung pandan	Air Merbau					Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah di UPTD KPHP	1	30.000.000	35.000.000		
								Belitung Timur	Gantung	Limbongan					Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah di UPTD KPHP	1	30.000.000	35.000.000		
3	**28**	**01**	**1.03**	**26**	**Pengadaan Mebeleur**										**Jumlah mebeleur**		**25.000.000**	**50.000.000**		
								Pangkalpinang	Rangkui	Pintu Air Atas					Jumlah mebeleur dinas	2	25.000.000	50.000.000		
3	**28**	**01**	**1.03**	**29**	**Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor**										**Jumlah gedung kantor yang dipelihara**	**4**	**85.000.000**	**200.000.000**		
3	**28**	**01**	**1.03**	**31**	**Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional**										**Jumlah Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/**		**688.520.000**	**682.840.000**		
															Jumlah mobil operasional yang		**430.120.000**	**503.500.000**		
								Pangkalpinang	Rangkui	Pintu Air Atas					Jumlah kendaraan operasional Roda 4 yang dipelihara di dinas	1	41.620.000	47.500.000		
								Pangkalpinang	Rangkui	Pintu Air Atas					Jumlah kendaraan operasional Roda 4 yang dipelihara di dinas	3	100.500.000	114.000.000		
								Bangka Barat	Muntok	Belo Laut					Jumlah kendaraan operasional Roda 4 yang dipelihara di	1	36.000.000	38.000.000		
								Bangka Barat	Parit Tiga	Puput					Jumlah kendaraan operasional Roda 4 yang dipelihara di	1	36.000.000	38.000.000		
								Bangka	Riau Silip	Cit					Jumlah kendaraan operasional Roda 4 yang dipelihara di	1	36.000.000	38.000.000		
								Bangka	Merawang	Rebo					Jumlah kendaraan operasional Roda 4 yang dipelihara di	1	36.000.000	38.000.000		
								Bangka Tengah	Pangkalan Baru	Mangkol					Jumlah kendaraan operasional Roda 4 yang dipelihara di	1	36.000.000	38.000.000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)-2021	Prakiraan Maju (Rp.)-2022	Keterangan	
								Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Hasil Kegiatan/ Indikator Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	10	11	14	15	16	17
								Bangka Selatan	Toboali	Keposang					Jumlah kendaraan operasional Roda 4 yang dipelihara di	1	36.000.000	38.000.000		
								Belitung	Tanjung pandan	Air Merbau					Jumlah kendaraan operasional Roda 4 yang dipelihara di	1	36.000.000	38.000.000		
								Belitung Timur	Gantung	Limbongan					Jumlah kendaraan operasional Roda 4 yang dipelihara di	2	36.000.000	76.000.000		
															Jumlah kendaraan operasional Roda 2		**258.400.000**	**179.340.000**		
								Pangkalpinang	Rangkui	Pintu Air Atas					Jumlah kendaraan operasional Roda 2 yang dipelihara di dinas	2	7.600.000	8.540.000		
								Bangka Barat	Muntok	Belo Laut					Jumlah kendaraan operasional Roda 2 yang dipelihara di	5	26.600.000	21.350.000		
								Bangka Barat	Parit Tiga	Puput					Jumlah kendaraan operasional Roda 2 yang dipelihara di	5	22.800.000	21.350.000		
								Bangka	Riau Silip	Cit					Jumlah kendaraan operasional Roda 2 yang dipelihara di	5	22.800.000	21.350.000		
								Bangka	Merawang	Rebo					Jumlah kendaraan operasional Roda 2 yang dipelihara di	5	22.800.000	21.350.000		
								Bangka Tengah	Pangkalan Baru	Mangkol					Jumlah kendaraan operasional Roda 2 yang dipelihara di	5	26.600.000	21.350.000		
								Bangka Selatan	Toboali	Keposang					Jumlah kendaraan operasional Roda 2 yang dipelihara di	5	30.400.000	21.350.000		
								Belitung	Tanjung pandan	Air Merbau					Jumlah kendaraan operasional Roda 2 yang dipelihara di	5	49.400.000	21.350.000		
								Belitung Timur	Gantung	Limbongan					Jumlah kendaraan operasional Roda 2 yang dipelihara di	5	49.400.000	21.350.000		
3	**28**	**01**	**1.03**	**33**	**Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor**										**Jumlah perlengkapan gedung kantor yang**	**12**	**0**	**12.000.000**		
3	**28**	**01**	**1.03**	**35**	**Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor**										**Jumlah peralatan gedung kantor yang**	**25**	**50.000.000**	**50.000.000**		
3	**28**	**01**	**1.03**	**36**	**Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur**										**Jumlah mebeler yang dipelihara**	**1**	**5.000.000**	**5.000.000**		
3	**28**	**01**	**1.03**	**41**	**Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional**										**Jumlah kendaraan dinas yang**	**1**	**0**	**100.000.000**		
3	**28**	**01**	**1.04**		**Kegiatan 1.04: Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya**	**Pengendalian Lingkungan Hidup**	**Meningkatnya kualitas tutupan**	**Pangkalpinang**	**Rangkui**	**Pintu Air Atas**			**Survey kepuasan pelayanan**				**20.000.000**	**325.000.000**	**Meningkatkan tata kelola pemerintahan**	
3	**28**	**01**	**1.04**	**01**	**Pengadaan Mesin/Kartu Absensi**										**Jumlah mesin/kartu**	**2**	**0**	**50.000.000**		
3	**28**	**01**	**1.04**	**02**	**Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya**										**Jumlah Pakaian dinas**	**-**	**-**	**-**		
3	**28**	**01**	**1.04**	**04**	**Pengadaan Pakaian Korpri**										**Jumlah pakaian kopri**	**-**	**-**	**-**		
3	**28**	**01**	**1.04**	**05**	**Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu**										**Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu**	**-**	**-**	**100.000.000**		
3	**28**	**01**	**1.04**	**07**	**Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas**										**Jumlah pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas**	**1**	**0**	**25.000.000**		
3	**28**	**01**	**1.04**	**09**	**Pendidikan dan Pelatihan Formal**										**Jumlah pegawai yang ikut pendidikan dan**	**25**	**20.000.000**	**150.000.000**		
3	**28**	**01**	**1.04**	**10**	**Sosialisasi Peraturan Perundang-**										**Jumlah peserta**	**-**	**-**	**-**		
3	**28**	**01**	**1.04**	**11**	**Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan**										**Jumlah peserta bimbingan teknis**	**-**	**-**	**-**		
3	**28**	**03**			**PENGELOLAAN HUTAN**						**Persentase Pengelolaan Hutan**	**90**					**4.951.696.000**	**7.875.800.000**		
											Persentase Pengelolaan	**90**					**2.140.700.000**	**2.581.800.000**		
3	**28**	**03**	**1.01**		**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) kewenangan Provinsi**	**Pengendalian Lingkungan Hidup**	**Meningkatnya kualitas tutupan lahan**						**Jumlah dokumen rencana tata hutan kph**	**7**			**125.000.000**	**150.000.000**	**Meningkatnya kualitas tutupan lahan**	**Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim**
3	**28**	**01**	**1.01**	**01**	**Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan**										**Jumlah rancang bangun tata hutan**		**75.000.000**	**100.000.000**		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)-2021	Prakiraan Maju (Rp.)-2022	Keterangan	
								Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Hasil Kegiatan/ Indikator Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	10	11	14	15	16	17
								Bangka Barat	Muntok	Belo Laut					Jumlah rancang bangun tata hutan UPTD KPHP Rambat Menduyung	1	-	50.000.000		
								Bangka	Riau Silip	Cit					Jumlah rancang bangun tata hutan UPTD KPHP	1	-	50.000.000		
								Bangka	Merawang	Rebo					Jumlah rancang bangun tata hutan KPHP Sigambir Kotawaringin	1	25.000.000	-		
								Bangka Tengah	Pangkalan Baru	Mangkol					Jumlah rancang bangun tata hutan KPHP Sungai	1	25.000.000	-		
								Belitung Timur	Gantung	Limbongan					Jumlah rancang bangun tata hutan KPHP	1	25.000.000	-		
3	**28**	**01**	**1.01**	**02**	**Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan**										**Jumlah dokumen pembagian blok/petak pengelolaan hutan**		**50.000.000**	**50.000.000**		
								Bangka Barat	Muntok	Belo Laut					Jumlah dokumen pembagian blok/petak pengelolaan hutan	1	-	25.000.000		
								Bangka	Riau Silip	Cit					Jumlah dokumen pembagian blok/petak pengelolaan hutan	1	-	25.000.000		
								Bangka Selatan	Tukak Sadai	Keposang					Jumlah dokumen pembagian blok/petak pengelolaan hutan	1	25.000.000	-		
								Bangka Selatan	Simpang Rimba	Terentang II					Jumlah dokumen pembagian blok/petak pengelolaan hutan KPHP Unit IX-Sungai	1	0	-		
								Belitung	Tanjung pandan	Air Merbau					Jumlah dokumen pembagian blok/petak pengelolaan hutan	1	25.000.000	-		
								Belitung	Sijuk	Kacang Botor					Jumlah dokumen pembagian blok/petak pengelolaan hutan KPHP Unit XI -Gunung	1	0	-		
3	**28**	**03**	**1.02**		**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**	**Pengendalian Lingkungan Hidup**	**Meningkatnya kualitas tutupan lahan**						**Jumlah dokumen pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan**	**8**			**1.708.000.000**	**1.644.100.000**	**Meningkatnya kualitas tutupan lahan**	**Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim**
3	**28**	**03**	**1.02**	**01**	**Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan**												**1.708.000.000**	**1.644.100.000**		
								Bangka Barat	Muntok	Belo Laut					Jumlah dokumen rencana pengelolaan UPTD KPHP Rambat	1	25.000.000	50.000.000		
								Bangka Barat	Muntok	Belo Laut					Jumlah dokumen rencana pengelolaan UPTD KPHP Rambat	1	188.500.000	188.500.000		
								Bangka Barat	Parit Tiga	Puput					Jumlah dokumen rencana pengelolaan UPTD KPHP Jebu	1	25.000.000	50.000.000		
								Bangka Barat	Parit Tiga	Puput					Jumlah dokumen rencana pengelolaan UPTD KPHP Jebu	1	150.800.000	150.800.000		
								Bangka	Riau Silip	Cit					Jumlah dokumen rencana pengelolaan UPTD KPHP Bubus	1	25.000.000	50.000.000		
								Bangka	Riau Silip	Cit					Jumlah dokumen rencana pengelolaan UPTD KPHP Bubus	1	188.500.000	188.500.000		
								Bangka	Merawang	Rebo					Jumlah dokumen rencana pengelolaan UPTD KPHP Sigambir	1	25.000.000	50.000.000		
								Bangka	Merawang	Rebo					Jumlah dokumen rencana pengelolaan UPTD KPHP Sigambir	1	113.100.000	113.100.000		
								Bangka Tengah	Pangkalan Baru	Mangkol					Jumlah dokumen rencana pengelolaan UPTD KPHP Sungai	1	25.000.000	50.000.000		
								Bangka Tengah	Pangkalan Baru	Mangkol					Jumlah dokumen rencana pengelolaan UPTD KPHP Sungai	1	339.300.000	339.300.000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)-2021	Prakiraan Maju (Rp.)-2022	Keterangan	
								Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Hasil Kegiatan/ Indikator Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	10	11	14	15	16	17
								Bangka Selatan	Tukak Sadai	Keposang					Jumlah dokumen rencana pengelolaan UPTD KPHP Muntai	1	25.000.000	50.000.000		
								Bangka Selatan	Tukak Sadai	Keposang					Jumlah dokumen rencana pengelolaan UPTD KPHP Muntai	1	150.800.000	150.800.000		
								Belitung	Tanjung pandan	Air Merbau					Jumlah dokumen rencana pengelolaan UPTD KPHP Belantu	1	25.000.000	50.000.000		
								Belitung	Tanjung pandan	Air Merbau					Jumlah dokumen rencana pengelolaan UPTD KPHP Belantu	1	113.100.000	113.100.000		
								Belitung Timur	Gantung	Limbongan					Jumlah dokumen rencana pengelolaan UPTD KPHP Gunung	1	25.000.000	50.000.000		
								Belitung Timur	Gantung	Limbongan					Jumlah dokumen rencana pengelolaan UPTD KPHP Gunung	1	263.900.000	263.900.000		
3	**28**	**03**	**1.03**		**Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**	**Pengendalian Lingkungan Hidup**	**Meningkatnya kualitas tutupan lahan**						**Jumlah izin pemanfaatan HP dan HL**				**257.700.000**	**687.700.000**	**Meningkatnya kualitas tutupan lahan**	**Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim**
3	**28**	**03**	**1.03**	**01**	**Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan**										**Jumlah data dan informasi wilayah**	**1**	**50.000.000**	**100.000.000**		
															Jumlah Honorer	**1**	**37.700.000**	**37.700.000**		
3	**28**	**03**	**1.03**	**02**	**Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan**										**Jumlah data dan informasi wilayah**	**1**	**35.000.000**	**100.000.000**		
3	**28**	**03**	**1.03**	**04**	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi**										**Jumlah koordinasi dan sinkrinisasi pengendalian izin usaha atau kerjasama**	**2**	**35.000.000**	**250.000.000**		
3	**28**	**03**	**1.03**	**05**	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung**										**Jumlah koordinasi dan sinkrinisasi pengendalian izin usaha atau kerjasama**	**1**	**50.000.000**	**150.000.000**		
3	**28**	**03**	**1.03**	**06**	**Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi**										**Jumlah penilaian rencana pengelolaan di kawasan hutan**	**2**	**50.000.000**	**50.000.000**		
3	**28**	**03**	**1.08**		**Pelaksanaan Pengelolaan Hutan Dengan Tujuan Khusus (HDTK) Untuk Kepentingan Religi**	**Pengendalian Lingkungan Hidup**	**Meningkatnya kualitas tutupan lahan**						**Jumlah izin KHDTK**				**50.000.000**	**100.000.000**	**Meningkatnya kualitas tutupan lahan**	**Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim**
3	**28**	**03**	**1.08**	**01**	**Penetapan Rencana Pengelolaan Tempat Ibadah dan Wisata Rohani di**										**Jumlah Rencana Pengelolaan**	**1**	**25.000.000**	**50.000.000**		
3	**28**	**03**	**1.08**	**02**	**Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan KHDTK untuk Tempat**										**Jumlah Pengawasan dan Pengendalian**	**1**	**25.000.000**	**50.000.000**		
											Persentase Rehabilitasi Hutan dan Lahan						**794.996.000**	**2.163.000.000**		
3	**28**	**03**	**1.04**		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	**Pengendalian Lingkungan Hidup**	**Meningkatnya kualitas tutupan lahan**						**Luas rehabilitasi hutan dan lahan**	**42**			**709.996.000**	**1.883.000.000**	**Meningkatnya kualitas tutupan lahan**	**Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim**
3	**28**	**03**	**1.04**	**01**	**Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)**										**Jumlah dokumen RTn RL**	**1**	**50.000.000**	**50.000.000**		
3	**28**	**03**	**1.04**	**02**	**Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara**										**Luas hutan rakyat UPTD KPHP Muntai**		**59.996.000**	**370.000.000**		
															Luas hutan rakyat UPTD KPHP Muntai Palas	10	59.996.000	370.000.000		
3	**28**	**03**	**1.04**	**03**	**Pembangunan Hutan Kota di Luar Kawasan Hutan Negara**										**Luas hutan kota yang dibangun**	**2**	**0**	**100.000.000**		
3	**28**	**03**	**1.04**	**04**	**Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan**										**Luas penghijauan lingkungan**	**20**	**-**	**840.000.000**		
								Bangka Barat	Muntok	Belo Laut					Luas penghijauan lingkungan di UPTD	2	-	105.000.000		
								Bangka Barat	Parit Tiga	Puput					Luas penghijauan lingkungan di UPTD	2	-	105.000.000		
								Bangka	Riau Silip	Cit					Luas penghijauan lingkungan di UPTD	4	-	105.000.000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)-2021	Prakiraan Maju (Rp.)-2022	Keterangan	
								Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Hasil Kegiatan/ Indikator Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	10	11	14	15	16	17
								Bangka	Merawang	Rebo					Luas penghijauan lingkungan di UPTD KPHP Sigambir	2	-	105.000.000		
								Bangka Tengah	Pangkalan Baru	Mangkol					Luas penghijauan lingkungan di UPTD	4	-	105.000.000		
								Bangka Selatan	Toboali	Keposang					Luas penghijauan lingkungana di UPTD	2	-	105.000.000		
								Belitung	Tanjung pandan	Air Merbau					Luas penghijauan lingkungana di UPTD	2	-	105.000.000		
								Belitung Timur	Gantung	Limbongan					Luas penghijauan lingkungana di UPTD	2	-	105.000.000		
3	28	03	1.04	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan										Jumlah persemaian sederhana		400.000.000	348.000.000		
															Jumlah persemaian sederhana UPTD KPHP	1	50.000.000	43.500.000		
															Jumlah persemaian sederhana UPTD KPHP	1	50.000.000	43.500.000		
															Jumlah persemaian sederhana UPTD KPHP	1	50.000.000	43.500.000		
															Jumlah persemaian sederhana UPTD KPHP Sigambir Kotawaringin	1	50.000.000	43.500.000		
															Jumlah persemaian sederhana UPTD KPHP	1	50.000.000	43.500.000		
															Jumlah persemaian sederhana UPTD KPHP	1	50.000.000	43.500.000		
															Jumlah persemaian sederhana UPTD KPHL	1	50.000.000	43.500.000		
															Jumlah persemaian sederhana UPTD KPHP	1	50.000.000	43.500.000		
3	28	03	1.04	07	Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan										Luas kaji terap teknologi RHL	2	75.000.000	75.000.000		
3	28	03	1.04	09	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan										Jumlah laporan pembinaan dan	1	125.000.000	100.000.000		
3	28	03	1.09		Perbenihan Tanaman Hutan	Pengendalian Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas tutupan lahan						Luas sumber benih	20			85.000.000	280.000.000	Meningkatnya kualitas tutupan lahan	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
3	28	03	1.09	01	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar										Jumlah pengada dan pengedar benih dan/atau bibit	3	25.000.000	80.000.000		
3	28	03	1.09	02	Sertifikasi Sumber Benih										Luas sumber benih yang disertifikasi	20	25.000.000	125.000.000		
3	28	03	1.09	03	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit										Jumlah dokumen pengawasan	1	35.000.000	75.000.000		
											Persentase penurunan kebakaran hutan dan	45					350.000.000	300.000.000		
3	28	03	1.04	08	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan										Luas penurunan kebakaran hutan dan lahan	1.582	350.000.000	300.000.000		
											Persentase perkara kehutanan yang ditindaklanjuti	90					1.506.000.000	2.481.000.000		
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Pengendalian Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas tutupan lahan						Jumlah penanganan perkara pidana kehutanan	2			1.506.000.000	2.481.000.000	Meningkatnya kualitas tutupan lahan	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan										Jumlah penanganan aktivas perusakan	2	100.000.000	500.000.000		
															Jumlah honorer	30	1.131.000.000	1.131.000.000		
3	28	03	1.05	02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan										Jumlah pengendalian kerusakan kawasan	6	100.000.000	450.000.000		
3	28	03	1.05	03	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan										Jumlah penanganan aktifitas ilegal	6	75.000.000	100.000.000		
3	28	03	1.05	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan										Jumlah pelaksanaan koordinasi	1	100.000.000	300.000.000		
											Persentase hasil hutan yang dikelola	33					160.000.000	350.000.000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)-2021	Prakiraan Maju (Rp.)-2022	Keterangan	
								Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Hasil Kegiatan/ Indikator Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	10	11	14	15	16	17
3	28	03	1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Pengendalian Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas tutupan lahan						Jumlah hasil hutan bukan kayu yang dikembangkan				100.000.000	225.000.000	Meningkatnya kualitas tutupan lahan	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
3	28	03	1.06	01	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati										Jumlah alat pengolah bahan baku hasil	4	0	125.000.000		
3	28	03	1.06	02	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK) Melalui Sistem										Jumlah izin usaha hasil hutan bukan kayu	1	100.000.000	50.000.000		
3	28	03	1.06	03	Pembudidayaan Hasil Hutan bukan Kayu dengan tidak Mengurangi										Luas pembudidayaan hasil hutan bukan	4	0	50.000.000		
3	28	03	1.07		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Pengendalian Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas tutupan lahan						Jumlah izin pengolahan hasil hutan kayu				60.000.000	125.000.000	Meningkatnya kualitas tutupan lahan	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
3	28	03	1.07	02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000										Jumlah pembinaan	1	35.000.000	50.000.000		
3	28	03	1.07	03	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha										Jumlah fasilitasi	1	25.000.000	75.000.000		
3	28	04			KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA												250.000.000	400.000.000		
											Persentase Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	20					250.000.000	400.000.000		
3	28	04	1,02		Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Pengendalian Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas tutupan lahan						Jumlah tumbuhan dan satwa liar tidak dilindungi yang di konservasi	5			75.000.000	150.000.000	Meningkatnya kualitas tutupan lahan	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
3	28	04	1,02	01	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak										Jumlah tumbuhan dan satwa liar tidak dilindungi yang	5	75.000.000	150.000.000		
3	28	04	1,03	03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Pengendalian Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas tutupan lahan						Jumlah kawasan yang meimiliki nilai ekosistem penting	2			175.000.000	250.000.000	Meningkatnya kualitas tutupan lahan	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
3	28	04	1,03	05	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting										Jumlah kelompok masyarakat yang dikuatkan kapasitas	1	75.000.000	100.000.000		
3	28	04	1,03	06	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi										Jumlah daerah penyangga yang dikelola	1	100.000.000	150.000.000		
3	28	05			PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN						Persentase Penyuluh Kehutanan yang meningkat Kapasitasnya dan terbinanya KTH	100					754.164.040	1.796.328.080		
											Persentase Penyuluh Kehutanan yang meningkat Kapasitasnya	100					150.000.000	350.000.000		
3	28	05	1,01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Pengendalian Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas tutupan lahan						Jumlah penyuluh kehutanan	32			150.000.000	350.000.000	Meningkatnya kualitas tutupan lahan	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
3	28	05	1,01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan										Jumlah Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh		150.000.000	350.000.000		
															Jumlah penyuluh yang meningkat	32	150.000.000	250.000.000		
															Jumlah katagori peserta lomba wana		0	100.000.000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)-2021	Prakiraan Maju (Rp.)-2022	Keterangan	
								Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Hasil Kegiatan/ Indikator Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	10	11	14	15	16	17
								Pangkalpinang	Rangkui	Pintu Air Atas					Jumlah katagori peserta lomba wana lestari oleh Dinas	7	0	60.000.000		
								Bangka Barat	Muntok	Belo Laut					Jumlah katagori peserta lomba wana lestari UPTD KPHP	7	0	5.000.000		
								Bangka Barat	Parit Tiga	Puput					Jumlah katagori peserta lomba wana lestari UPTD KPHP	7	0	5.000.000		
								Bangka	Riau Silip	Cit					Jumlah katagori peserta lomba wana lestari UPTD KPHP Jebu	7	0	5.000.000		
								Bangka	Merawang	Rebo					Jumlah katagori peserta lomba wana lestari UPTD KPHP	7	0	5.000.000		
								Bangka Tengah	Pangkalan Baru	Mangkol					Jumlah katagori peserta lomba wana lestari UPTD KPHP	7	0	5.000.000		
								Bangka Selatan	Toboali	Keposang					Jumlah katagori peserta lomba wana lestari UPTD KPHP	7	0	5.000.000		
								Belitung	Tanjung pandan	Air Merbau					Jumlah katagori peserta lomba wana lestari UPTD KPHL	7	0	5.000.000		
								Belitung Timur	Gantung	Limbongan					Jumlah katagori peserta lomba wana lestari UPTD KPHP	7	0	5.000.000		
											Persentase Kelompok Tani Hutan yang terbina	62,5					413.164.040	946.328.080		
3	**28**	**05**	**1,01**	**02**	**Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan**										**Jumlah Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan**		**413.164.040**	**946.328.080**		
															Jumlah kelompok tani hutan yang terbentuk dan/atau meningkat	**110**	**40.000.000**	**573.164.040**		
								Pangkalpinang	Rangkui	Pintu Air Atas					Jumlah kelompok tani hutan yang terbentuk dan/atau meningkat	-	-	50.000.000		
								Bangka Barat	Muntok	Belo Laut					Jumlah kelompok tani hutan yang terbentuk dan/atau meningkat kelasnyah di UPTD	13	5.000.000	17.700.000		
								Bangka Barat	Parit Tiga	Puput					Jumlah kelompok tani hutan yang terbentuk dan/atau meningkat kelasnyah di UPTD	4	5.000.000	5.500.000		
								Bangka	Riau Silip	Cit					Jumlah kelompok tani hutan yang terbentuk dan/atau meningkat kelasnya di UPTD KPHP	9	5.000.000	12.300.000		
								Bangka	Merawang	Rebo					Jumlah kelompok tani hutan yang terbentuk dan/atau meningkat kelasnya di UPTD KPHP	7	5.000.000	9.600.000		
								Bangka Tengah	Pangkalan Baru	Mangkol					Jumlah kelompok tani hutan yang terbentuk dan/atau meningkat kelasnya di UPTD KPHP	14	5.000.000	19.000.000		
								Bangka Selatan	Toboali	Keposang					Jumlah kelompok tani hutan yang terbentuk dan/atau meningkat kelasnya di UPTD KPHP	4	5.000.000	5.500.000		
								Belitung	Tanjung pandan	Air Merbau					Jumlah kelompok tani hutan yang terbentuk dan/atau meningkat kelasnya di UPTD KPHP	27	5.000.000	36.800.000		
								Belitung Timur	Gantung	Limbongan					Jumlah kelompok tani hutan yang terbentuk dan/atau meningkat kelasnya di UPTD KPHP	32	5.000.000	43.600.000		
															Jumlah kelompok tani hutan penerima		**373.164.040**	**373.164.040**		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)-2021	Prakiraan Maju (Rp.)-2022	Keterangan	
								Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Hasil Kegiatan/ Indikator Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	10	11	14	15	16	17
								Bangka Barat	Muntok	Belo Laut					Jumlah kelompok tani hutan penerima manfaat di UPTD KPHP	1	25.000.000	25.000.000		
								Bangka Barat	Muntok	Belo Laut					Jumlah kelompok tani hutan penerima manfaat di UPTD KPHP	1	6.664.000	6.664.000		
								Bangka Barat	Parit Tiga	Puput					Jumlah kelompok tani hutan penerima manfaat di UPTD KPHP	1	25.000.000	25.000.000		
								Bangka Barat	Parit Tiga	Puput					Jumlah kelompok tani hutan penerima manfaat di UPTD KPHP	1	6.664.000	6.664.000		
								Bangka	Riau Silip	Cit					Jumlah kelompok tani hutan penerima manfaat di UPTD KPHP	1	25.000.000	25.000.000		
								Bangka	Riau Silip	Cit					Jumlah kelompok tani hutan penerima manfaat di UPTD KPHP	1	106.343.800	106.343.800		
								Bangka	Merawang	Rebo					Jumlah kelompok tani hutan penerima manfaat di UPTD KPHP	1	25.000.000	25.000.000		
								Bangka	Merawang	Rebo					Jumlah kelompok tani hutan penerima manfaat di UPTD KPHP	1	10.639.080	10.639.080		
								Bangka Tengah	Pangkalan Baru	Mangkol					Jumlah kelompok tani hutan penerima manfaata di UPTD	1	25.000.000	25.000.000		
								Bangka Tengah	Pangkalan Baru	Mangkol					Jumlah kelompok tani hutan penerima manfaata di UPTD	1	6.664.000	6.664.000		
								Bangka Selatan	Toboali	Keposang					Jumlah kelompok tani hutan penerima manfaat di UPTD KPHP	1	25.000.000	25.000.000		
								Bangka Selatan	Toboali	Keposang					Jumlah kelompok tani hutan penerima manfaat di UPTD KPHP	1	7.950.160	7.950.160		
								Belitung	Tanjung pandan	Air Merbau					Jumlah kelompok tani hutan penerima manfaat di UPTD KPHP	1	25.000.000	25.000.000		
								Belitung	Tanjung pandan	Air Merbau					Jumlah kelompok tani hutan penerima manfaat di UPTD KPHP	1	21.575.000	21.575.000		
								Belitung Timur	Gantung	Limbongan					Jumlah kelompok tani hutan penerima manfaat di UPTD KPHP	1	25.000.000	25.000.000		
								Belitung Timur	Gantung	Limbongan					Jumlah kelompok tani hutan penerima manfaat di UPTD KPHP	1	6.664.000	6.664.000		
											Persentase Luas Perhutanan Sosial	80					191.000.000	500.000.000		
3	28	05	1,01	03	**Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial**												**191.000.000**	**500.000.000**		
															Luas perhutanan sosial		**141.000.000**	**300.000.000**		
								Pangkalpinang	Rangkui	Pintu Air Atas					Luas perhutanan sosial di Dinas Kehutanan	99.392	75.000.000	100.000.000		
								Bangka Barat	Muntok	Belo Laut					Luas perhutanan sosial di UPTD KPHP Rambat	682	3.000.000	4.200.000		
								Bangka Barat	Parit Tiga	Puput					Luas perhutanan sosial di UPTD KPHP Jebu	1.141	4.000.000	6.800.000		
								Bangka	Riau Silip	Cit					Luas perhutanan sosial di UPTD KPHP Bubus	1.498	5.000.000	8.250.000		
								Bangka	Merawang	Rebo					Luas perhutanan sosial di UPTD KPHP Sigambir	1.129	4.000.000	6.700.000		
								Bangka Tengah	Pangkalan Baru	Mangkol					Luas perhutanan sosial di UPTD KPHP Sungai	5.844	10.000.000	28.500.000		
								Bangka Selatan	Toboali	Keposang					Luas perhutanan sosial di UPTD KPHP Muntai	3.008	10.000.000	14.600.000		
								Belitung	Tanjung pandan	Air Merbau					Luas perhutanan sosial di UPTD KPHL Belantu	20.641	20.000.000	91.350.000		
								Belitung Timur	Gantung	Limbongan					Luas perhutanan sosial di UPTD KPHP Gunung	8.641	10.000.000	39.600.000		
															Jumlah kelompok usaha perhutanan sosial penerima	**2**	**50.000.000**	**200.000.000**		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)-2021	Prakiraan Maju (Rp.)-2022	Keterangan	
								Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Hasil Kegiatan/ Indikator Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	10	11	14	15	16	17
3	28	06			PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN						Persentase DAS yang	1,64					375.000.000	500.000.000		
											Persentase DAS yang dikelola	1,64					375.000.000	500.000.000		
3	28	06	1.01		Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pengendalian Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas tutupan lahan	Bangka, Pangkalpinang, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka Barat, Belitung, Belitung Timur					Luas DAS yang dikel	27.000			375.000.000	500.000.000	Meningkatnya kualitas tutupan lahan	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
3	28	06	1.01	01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS										Jumlah dokumen RP DAS yang direview	4	50.000.000	-		
3	28	06	1.01	02	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS			Bangka, Pangkalpinang, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka Barat, Belitung, Belitung Timur							Luas DAS yang dioptimalisasi daya dukung wilayah DAS	27.000	50.000.000	75.000.000		
3	28	06	1.01	03	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS										Jumlah pemegang IPPKH yang	6	50.000.000	100.000.000		
3	28	06	1.01	04	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kegiatan Pengelolaan DAS										Jumlah kelompok pemberdayaan masyarakat dalam	5	75.000.000	100.000.000		
3	28	06	1.01	05	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS										Jumlah kelembagaan pengelolaan DAS	1	75.000.000	100.000.000		
3	28	06	1.01	06	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS										Jumlah koordinasi dan sinkronisasi	6	75.000.000	125.000.000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Bangka Belitung
Tahun 2021

Unit Organisasi : Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : Dinas Lingkungan Hidup

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif 2021 (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kabupaten/Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
					URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR																
					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH																
1.	01.				**Dinas Lingkungan Hidup**												**16.614.739.443**	**10.521.160.970**		
1.	01.	01			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**Nilai Sakip Perangkat Daerah**	**70 - 80**					**13.092.251.644**	**8.935.485.810**		
1.	**01.**	**01**	**1.01**		**Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah**	**13 Dokumen**	**171.369.144**	**188.506.058**		
1.	01.	01	1.01	01	Sub Kegiatan Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah			Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah Dokumen Renja Dinas Lingkungan Hidup yang tersusun yang tersusun	2 Dokumen			78.598.500	86.458.350		
1.	01.	01	1.01	02	Sub Kegiatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan			Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah dokumen DPA/DPPA, RKA/RKPA yang tersusun	4 Dokumen			34.237.500	37.661.250		
1.	01.	01	1.01	03	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah			Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah dokumen pengendalian dan Evaluasi Dinas Lingkungan Hidup	4 Dokumen			28.256.000	31.081.600		
1.	01.	01	1.01	05	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah dokumen Evalusi kinerja Dinas Lingkungan Hidup	3 Laporan			30.277.144	33.304.858		
											Survey Kepuasan Pelayanan Internal	**100%**								
2	**11**	**01**	**1.02**		**Kegiatan Administrasi Keuangan**										**Survey kepuasan pelayanan keuangan**	**80%**	**7.601.543.774**	**8.361.698.151**		
2	11	01	1.02	01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	55 Orang			7.601.543.774	8.361.698.151		
2	**11**	**01**	**1.03**		**Kegiatan Administrasi Umum**										**Survey Kepuasan Pelayanan Umum**	**80%**	**5.319.338.726**	**385.281.600**		
2	11	01	1,03	01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat												350.256.000	385.281.600		
								Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah Surat/Barang yang dikirim	Surat/Barang yang dikirim			600.000	660.000		
								Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah Materai	1901 Lembar			10.356.000	11.391.600		
								Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah tenaga pramubakti yang dipekerjakan	9 Orang			339.300.000	373.230.000		
2	11	01	1,03	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah Bulan Tagihan rekening listrik, air, telepon/fax, tv kabel, virtual meeting yang dibayarkan	12 Bulan			277.000.000	304.700.000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif 2021 (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kabupaten/Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2	11	01	1,03	03	Sub Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor			Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah tenaga keamanan/satpam kantor yang dipekerjakan	5 Orang			188.500.000	207.350.000		
2	11	01	1,03	6	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional												88.600.000	97.460.000		
								Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			jumlah kendaraan operasional yang dipelihara	8 Unit			13.200.000	14.520.000		
								Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah tenaga sopir yang dipekerjakan	2 Orang			75.400.000	82.940.000		
2	11	01	1,03	07	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah Pengelola administrasi Keuangan yang bekerja	16 orang			178.575.000	196.432.500		
2	11	01	1,03	08	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor												199.912.500	219.903.750		
								Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah tenaga kebersihan yang dipekerjakan	5 Orang			188.500.000	207.350.000		
								Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah jenis bahan dan Peralatan kebersihan kantor	10 Jenis			11.412.500	12.553.750		
2	11	01	1,03	09	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja			Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah Jenis Peralatan kerja yang diperbaiki	2 Jenis			54.000.000	59.400.000		
2	11	01	1,03	10	Sub Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor			Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			jumlah jenis ATK yang dibeli	40 Jenis			104.920.000	115.412.000		
2	11	01	1,03	11	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan												37.380.875	41.118.963		
								Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah Barang Cetak	.... Eksamplar			19.800.000	21.780.000		
								Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah penjilidan	..... Buku/Dokumen/ Laporan			4.000.000	4.400.000		
								Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah Penggandaan	80000 Lembar			13.580.875	14.938.963		
2	11	01	1,03	12	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia	5 Jenis			4.026.330	4.428.963		
2	11	1	1,03	13	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	3 Jenis			54.780.000	60.258.000		
2	11	1	1,03	15	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan yang tersedia	2520 Eksamplar			10.499.500	11.549.450		
2	11	15	1,03	16	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor												410.040.000	451.044.000		
								Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumah Paket Logistik Rutin	2 Paket			12.040.000	13.244.000		
								Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumah Paket Logistik Laboratorium	3 Paket Kegiatan			398.000.000	437.800.000		
2	11	16	1,03	17	Sub Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman												213.059.850	234.365.835		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif 2021 (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kabupaten/Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
								Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Makan Minum Rapat	1 Paket			29.347.500	32.282.250		
								Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Makan Minum Tamu	1 Paket			20.760.000	22.836.000		
								Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Makan Minum Laboratorium	3 Paket Kegiatan			162.952.350	179.247.585		
2	11	01	1,03	18	Sub Kegiatan Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah												615.705.096	677.275.605		
								Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah yang dilaksankaan	35 Kali			385.588.728	424.147.601		
								Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah Koordinasi dan Konsultasi kedalam daerah yang dilaksankaan	75Kali			230.116.368	253.128.004		
2	11	01	1,03	29	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	2 Unit			60.000.000	66.000.000		
2	11	01	1,03	31	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional												183.376.575	201.714.233		
								Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah Kendaraan Dinas operasional Roda Empat yang Terpelihara	4 Unit			80.256.575	88.282.233		
								Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah Kendaraan Dinas operasional Roda Dua yang Terpelihara	4 Unit			9.040.000	9.944.000		
								Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah BBM Kendaraan Dinas/ Operasional	11760 Liter			94.080.000	103.488.000		
2	11	1	1,03	33	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	1 Unit/Jenis/Set			60.000.000	66.000.000		
2	11	1	1,03	35	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor												218.707.000	240.577.700		
								Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	1 unit/jenis/set			45.650.000	50.215.000		
								Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah Jenis Peralatan laboratorium yang terkalibrasi	29 Jenis			172.357.000	189.592.700		
								Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah BBM Genset	100 Liter			700.000	770.000		
2	11	1	1,03	39	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor			Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah Gedung Kantor yang terehabilitasi	1 Unit			2.000.000.000			
2	11	1	1,03	41	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional			Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah Kendaraan Dinas operasional Roda Empat yang terehabilitasi	1 Unit			10.000.000	11.000.000		
2	**11**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**						**Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup**	**75%**					**531.522.873**	**584.675.160**		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif 2021 (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kabupaten/Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2	**11**	**02**	**1.02**		**Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi**										**Jumlah Dokumen KLHS yang tersusun**	**1 Dokumen**	**531.522.873**	**584.675.160**		
															Jumlah Rekomendasi Hasil Validasi KLHS Kabupaten/Kota	**7 Rekomendasi**				
2	11	02	1.02	01	Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang			Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah Dokumen KLHS yang tersusun	2 Dokumen			531.522.873	584.675.160		
								Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah Rekomendasi Hasil Validasi KLHS Kabupaten/Kota	7 Rekomendasi						
2	**11**	**03**			**Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**												**2.260.622.573**	**550.000.000**		
											Persentase Titik Pantau Air Sungai yang memenuhi baku mutu	**50%**								
											Persentase Titik Pantau Air Laut yang memenuhi baku mutu	**50%**								
											Persentase Titik Pantau Udara yang memenuhi baku mutu	**80%**								
2	**11**	**03**	**1.01**		**Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup**										**Jumlah titik pantau kualitas air sungai**	**81 Titik Pantau**	**500.000.000**	**550.000.000**		
															Jumlah titik pantau kualitas air laut	**25 Titik Pantau**				
															Jumlah titik pantau kualitas udara	**28 Titik Pantau**				
2	11	03	1.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut			Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah titik pantau kualitas air sungai	81 Titik Pantau			500.000.000	550.000.000		
								Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah titik pantau kualitas air laut	25 Titik Pantau				-		
								Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah titik pantau kualitas udara	28 Titik Pantau				-		
											Persentase Parameter Kualitas Lingkungan Yang Terakreditasi									
															Jumlah Usulan Parameter Untuk diakreditasi	**37 Parameter Usulan**	**1.685.622.573**	**1.854.184.830**		
2	11	03	1.01	03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi			Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah Dokumen Persyaratan Akreditasi Laboratorium	4 Dokumen			1.685.622.573	1.854.184.830		
													Jumlah Sampel Parameter Kualitas lingkungan yang terlayani	12000 Sampel						
													Jumlah Titik Sampling Parameter Kualitas Lingkungan Yang Terlayani	40 Titik Sampling						
2	**11**	**03**	**1.02**		**Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup**										**Jumlah Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah yang tersusun**	**1 Dokumen**	**75.000.000**	**82.500.000**		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif 2021 (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kabupaten/Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2	11	03	1.02	01	Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat			Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah yang	(1 Dokumen)			75.000.000	82.500.000		
2	**11**	**06**			**Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**						**Persentase Rekomendasi Izin Lingkungan yang diterbitkan**	**80%**					**320.342.353**			
2	**11**	**06**	**1.01**		**Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi**										**Jumlah Permohonan pertimbangan teknis Izin Lingkungan yang terfasilitasi**	**25 Permohonan**	**120.342.353**	**132.376.588**		
2	11	06	1,01	01	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH								Jumlah Permohonan pertimbangan teknis Izin Lingkungan yang terfasilitasi	25 Permohonan			120.342.353	132.376.588		
											Persentase Peningkatan Ketaatan Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	**40%**								
															Jumlah Usaha/Kegiatan yang diawasi	**100 Usaha/Keg**	**200.000.000**	**220.000.000**		
2	11	06	1,01	01	Sub Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi								Jumlah Usaha/Kegiatan yang diawasi	100 Usaha/Kegiatan			200.000.000	220.000.000		
2	**11**	**08**			**Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**						**Persentase Penerima Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup Tingkat Provinsi**	**80%**					**150.000.000**	**165.000.000**		
2	**11**	**08**	**1,01**		**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi**										**Jumlah Kelompok Swdaya Masyarakat Peduli Lingkungan yang Terbina**	**3 KSM**	**150.000.000**	**165.000.000**		
															Jumlah Lokus Sosialisasi Bidang Lingkungan Hidup Kepada Masyarakat	**3 Lokasi**				
2	11	08	1,01	02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup			Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah Kelompok Swdaya Masyarakat Peduli Lingkungan yang Terbina	3 KSM			150.000.000	165.000.000		
								Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah Lokus Sosialisasi Bidang Lingkungan Hidup Kepada Masyarakat	3 Lokasi						
2	**11**	**10**			**Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup**						**Persentase Aduan Masyarakat yang diverifikasi**	**100%**					**110.000.000**	**121.000.000**		
2	**11**	**10**	**1,01**		**Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi**										**Persentase Aduan Masyarakati yang diverifikasi**	**100%**	110.000.000	121.000.000		
2	11	10	1,01	01	Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi								Persentase Aduan Masyarakat yang diverifikasi	100%			110.000.000	121.000.000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif 2021 (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kabupaten/Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2	**11**	**09**			**Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat**						**Persentase Penerima Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup Tingkat Provinsi**	**80%**					**150.000.000**	**165.000.000**		
2	**11**	**09**	**1,01**		**Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi**										**Jumlah Jenis Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi yang diberikan**	**3 Jenis Penghargaan**	150.000.000	165.000.000		
2	11	09	1,01	01	Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup								Jumlah Sekolah yang mendapatkan penghargaan Adiwiyata Tingkat Provinsi	14 Sekolah					150.000.000	165.000.000		
													Jumlah Bank Sampah yang mendapatkan penghargaan Tingkat Provinsi	3 Bank Sampah							
													Jumlah Kota yang mendapat penilaian Adipura	7 Kota				-		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Bangka Belitung

Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.09. DINAS PANGAN

Sub Unit Organisasi : 2.09. DINAS PANGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2	**09**				**PROGRAM/KEGIATAN RUTIN**												**7.357.070.531**	**9.241.830.000**		
2	**09**	**01**			**Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**												**7.357.070.531**	**9.241.830.000**		
											Nilai Sakip PD (pakai angka)	**88**								
2	**09**	**01**	**1.01**		**Kegiatan : Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**												**116.000.000**	**160.000.000**		
															Jumlah dok perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	**6**	**116.000.000**	**160.000.000**		
2	**09**	01	1.01	01	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												67.744.000	85.000.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah dok perencanaan Renstra/Renja PD	2					peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah RKA/DPA yang tersusun	2					peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			jumlah kesepakatan Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan PD	1					peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
2	**09**	01	1.01	02	Sub Kegiatan : Evaluasi kinerja Perangkat Daerah												48.256.000	75.000.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah dok Evalusi kinerja PD (LKPJ, LAKIP, LPPD dan ATA)	3					peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
2	**09**	01	1.01	03	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah								Jumlah dok evaluasi PD (DALEV)	4						
											survey kepuasan pelayanan internal (angka)	**95**					**7.241.070.531**	**9.081.830.000**		
2	**09**	**01**	**1.02**		**Kegiatan 2 : Administrasi Keuangan**												**6.377.070.531**	**6.800.000.000**		
2	09	01	1.02	01	Sub Kegaiatan : Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN										Survey kepuasan pelayanan keuangan (angka)	95	6.377.070.531	6.800.000.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			jumlah ASN yang terima gaji dan tunjangan	44			6.377.070.531	7.300.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
2	**09**	**01**	**1.03**		**Kegiatan 3 : Administrasi umum**												**864.000.000**	**1.431.830.000**		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	**Meningkatkan tata kelola pemerintahan**								**Survey kepuasan pelayanan keuangan (angka)**	**95**	**864.000.000**	**1.431.830.000**	**peningkatan tata kelola pemerintahan**	**Reformasi Birokrasi**
2	09	01	1.03	01	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa surat menyurat												20.000.000	25.000.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah Surat/Barang yang dikirim (tahun)	12			5.000.000	5.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan						Jumlah Materai	3000			15.000.000	20.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2	09	01	1.03	02	Sub Kegiatan :Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik												59.570.000	77.000.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah tagihan listrik (	1			55.970.000	70.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
													Jumlah tagihan komur	1			-	1.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
													Jumlah sewa housting layanan paket meeting online	1			3.600.000	6.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
2	09	01	1.03	03	Sub Kegiatan : Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor												10.000.000	15.000.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor (tahun)	1			10.000.000	15.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
2	09	01	1.03	04	Sub Kegiatan : Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS												75.400.000	75.400.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah pegawai non PNS yang memiliki jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan (orang)	9			-	-		
2	09												Jumlah pegawai non PNS yang memiliki jaminan ketenagakerjaan (orang)	9			-	-		
2	09												Jumlah tenaga keamanan/satpam kantor (orang)	2			75.400.000	75.400.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
2	09	01	1.03	06	Sub Kegiatan : Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/oprasional												59.000.000	107.400.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			jumlah kendaraan operasional yang dipelihara (unit)	3			15.000.000	25.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
2	09												Jumlah tenaga sopir (orang)	1			37.700.000	75.400.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
													Bayar Pajak Kendaraan	3			6.300.000	7.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
2	09	01	1.03	07	Sub Kegiatan : Penyediaan jasa Administrasi keuangan												91.330.000	91.330.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah pengelola administrasi keuangan (bulan)	10			91.330.000	91.330.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
2	09	01	1.03	08	Sub Kegiatan : Penyediaan jasa kebersihan kantor												236.200.000	246.200.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah pengelola jasa kebersihan kantor	0			-	-		
													Jumlah tenaga kebersihan/pramubakti	6			226.200.000	226.200.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
													Jumlah penyediaan peralatan dan bahan kebersihan (tahun)	1			10.000.000	20.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
2	09	01	1.03	10	Sub Kegiatan : Penyediaan alat tulis kantor												30.000.000	50.000.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			jumlah jenis ATK yang dibeli	1			30.000.000	50.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
2	09	01	1.03	11	Sub Kegiatan : Penyediaan barang cetak dan penggandaan												18.000.000	27.500.000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			jumlah barang cetak	1			4.000.000	10.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
2	09												Jumlah penggandaan	1			14.000.000	17.500.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
2	09	01	1.03	12	Sub Kegiatan : Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor												4.000.000	2.000.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah komponen inst	1			4.000.000	2.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
2	09	01	1.03	15	Sub Kegiatan : Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan												7.500.000	15.000.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan (tahun)	1			7.500.000	15.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
2	09	01	1.03	17	Sub Kegiatan : Penyediaan makan dan minum												8.000.000	25.000.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah makan dan minum Tamu (tahun)	1			3.000.000	10.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
2	09												Jumlah makan dan minum rapat (tahun)	1			5.000.000	15.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
2	09	01	1.03	18	Sub Kegiatan : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah												125.000.000	400.000.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah (tahun)	1			75.000.000	250.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
2	09												Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah (tahun)	1			50.000.000	150.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
2	09	01	1.03	29	Sub Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor												30.000.000	100.000.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			jumlah gedung kantor yang dipelihara	1			30.000.000	100.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
2	09	01	1.03	31	Sub Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/Oprasional												50.000.000	75.000.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah mobil oprasional yang dipelihara	3			20.000.000	25.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
													Jumlah BBM kendaraan	1			30.000.000	50.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
2	09	01	1.03	33	Sub Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor												20.000.000	50.000.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	1			20.000.000	50.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
2	09	01	1.03	35	Sub Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor												20.000.000	50.000.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	1			20.000.000	50.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
2	09												Jumlah BBM Genset	0			-	-		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2	**09**	**01**	**1.04**		**Kegiatan : Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**												-	**850.000.000**		
															survey kepuasan pelayanan kepegawaian (angka)	**95**	-	**850.000.000**	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
2	09	01	1.04	01	Sub Kegiatan : Pengadaan mesin/kartu absensi												-	30.000.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah mesin/kartu absensi yang diadakan	1			-	30.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
2	09	01	1.04	02	Sub Kegiatan : Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapanya												-	150.000.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah Pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	55			-	150.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
2	09	01	1.04	04	Sub Kegiatan : Pengadaan pakaian kopri												-	150.000.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			jumlah pakaian kopri yang diadakan	45			-	150.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
2	09	01	1.04	05	Sub Kegiatan : Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu												-	150.000.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			jumlah pakaian khusus hari2 tertentu yang diadakan	54			-	150.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
2	09	01	1.04	09	Sub Kegiatan : Pendidikan dan pelatihan formal												-	250.000.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			jumlah pegawai yang ikut pendidikan dan pelatihan formal	45			-	250.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
2	09	01	1.04	10	Sub Kegiatan : Sosialisasi peraturan perundang-undangan												-	120.000.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan	45			-	120.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
2					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN												1.520.000.000	4.330.000.000		
2	**09**				**(URUSAN) PANGAN**												**1.520.000.000**	**4.330.000.000**		
2	**09**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN**												**250.000.000**	**458.000.000**		
						PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN AGROPOLITAN	Meningkatnya nilai tambah sektor pertanian				**Persentase meningkatnya ketersediaan pangan utama (beras)**	**15%**					**250.000.000**	**458.000.000**		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2	**09**	**02**	**1.01**		**Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada Berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi**			**Pangkalpinang**	**Bukit Intan**	**Air Itam**							**250.000.000**	**458.000.000**		
													Jumlah Ketersediaan Pangan Utama				**250.000.000**	**458.000.000**		
2	**09**	02	1,01	03	Subkegiatan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya			Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam							**200.000.000**	**208.000.000**	....	....
													Jumlah Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	5			**200.000.000**	**208.000.000**		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2	09	02	1,01	04	Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik			Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam							50.000.000	175.000.000		
													Jumlah Dokumen Rekomendasi tentang peningkatan ketahanan pangan	1			50.000.000	175.000.000		
2	09	02	1,01	05	Subkegiatan Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan			Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam							-	75.000.000		
													Jumlah Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	1			-	75.000.000		
2	**09**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**												610.000.000	1.346.000.000		
						PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN AGROPOLITAN		Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan a) Kelompok Pangan Padi- Padian, b) Kelompok Pangan Kacang-kacangan, c) Kelompok Pangan buah dan sayur	a)23,9; b) 9,9; c) 25,6					610.000.000	139.000.000		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2	**09**	**03**	**1.01**		**Kegiatan 1. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau pangan Lainnya Sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**												**250.000.000**	**906.000.000**		
							Menurunkan tingkat kemiskinan	**Pangkalpinang**	**Bukit Intan**	**Air Itam**			**Coefisien varian harga pangan (a. pokok/beras, b. hortikultura/cabe merah, c.hewani/ayam)**	**a. 5%, b. 25%, c. 10%**			**250.000.000**	**967.000.000**	**Menurunkan tingkat kemiskinan**	
2	**09**	**03**	**1.01**	01	Subkegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan												60.000.000	79.000.000		
								Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah dokumen Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	2			60.000.000	79.000.000		
2	**09**	**03**	**1.01**	03	Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya												160.000.000	150.000.000		
								Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah Gapoktan yang difasilitasi	5			160.000.000	150.000.000		
2	**09**	**03**	**1.01**	04	Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan												30.000.000	154.000.000		
								Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah dokumen stok dan pasokan	3			30.000.000	154.000.000		
2	**09**	**03**	**1.01**	05	Subkegiatan Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan												-	140.000.000		
								Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah lembaga distribusi pangan masyarakat	**1**			-	140.000.000		
2	**09**	**03**	**1.02**		**Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi**												**360.000.000**	**440.000.000**		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
							Meningkatnya Kapasitas daerah terhadap bencana	**Pangkalpinang**	**Bukit Intan**	**Air Itam**			**Persentase tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi**	**80%**			**360.000.000**	**700.000.000**	**Meningkatnya Kapasitas daerah terhadap bencana**	
2	**09**	**03**	**1.02**	01	Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi												**40.000.000**	**60.000.000**		
								Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah koordinasi dan sikronisasi pengendalian Cadangan Pangan Provinsi	**4**			**40.000.000**	**60.000.000**		
2	**09**	**03**	1.02	03	SUbkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengadaan Cadangan Pangan Provinsi												**320.000.000**	**320.000.000**		
								Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	**25 ton**			**320.000.000**	**320.000.000**		
2	**09**	**04**			**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**												**160.000.000**	**1.776.000.000**		
						PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN AGROPOLITAN					**Menurunnya jumlah daerah rentan rawan pangan**	**19**					**160.000.000**	**1.776.000.000**		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2	**09**	**04**	1.01		**Kegiatan 1. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kewenangan Provinsi**												**160.000.000**	**1.244.000.000**		
							Meningkatnya kesehatan masyarakat						Jumlah Dokumen Kerentanan dan Ketahanan Pangan	**3**			**160.000.000**	**1.244.000.000**	Penanganan stunting	
2	**09**	**04**	1.01	01	Subkegiatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kab/Kota												160.000.000	180.000.000		
								Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah Peta FSVA, Dokumen SKPG dan AKses Pangan	**3**			160.000.000	180.000.000		
2	**09**	**04**	1.02		**Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi**												-	**532.000.000**		
							Meningkatnya kesehatan masyarakat						Jumlah orang yang terfasilitasi di daerah rentan rawan pangan	**1700**			-	**532.000.000**	Penanganan stunting	
2	**09**	**04**	1.02	01	Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi												-	**532.000.000**		
								Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah orang yang terfasilitasi	**1200**			-	**322.000.000**		
																		210.000.000		
													Jumlah orang yang mengikuti gerakan pemenuhan gizi 1000 HPK	**500**			-	**210.000.000**		
2	**09**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**												**225.000.000**	**225.000.000**		
						PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN AGROPOLITAN					**Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi pangan pada a) kelompok Pangan Umbi-umbian, b) kelompok Pangan Kacang-kacangan dan c) kelompok Pangan buang dan sayur**	**a. 2; b. 4; c. 21,8**		**a. 2; b. 4; c. 21,8**			**225.000.000**	**225.000.000**		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2	**09**	**03**	1.04		**Kegiatan Promosi Pencapaian Target Konsumsi Panga Per Kapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi**												**225.000.000**	**225.000.000**		
							Meningkatnya kesehatan masyarakat						**Persentase meningkatnya pemahaman masyarakat akan pola pangan yang B2SA**	**100%**			**225.000.000**	**225.000.000**	Penanganan stunting dan Peningkatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	
2	**09**	**03**	1.04	01	Subkegiatan Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal												**150.000.000**	**150.000.000**		
								Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah orang yang mengikuti event	**120**			**150.000.000**	**150.000.000**		
																	-	**400.000.000**		
													Jumlah Event	**3**			-	**400.000.000**		
2	**09**	**03**	1.04	02	Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)												-	**100.000.000**		
								Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah peserta pertemuan sosialisasi B2SA (TP. PKK Kab/Kota dan Kelompok masyarakat	**75**			-	**100.000.000**		
																	-	**200.000.000**		
													Jumlah peserta sekolah lapang P2KP				-	**200.000.000**		
2	**09**	**03**	1.04	03	Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun												**75.000.000**	**75.000.000**		
								Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah Dokumen Konsumsi perkapita pertahun	**1**			**75.000.000**	**75.000.000**		
2	**09**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**												**275.000.000**	**525.000.000**		
											Persentase pangan yang aman dikonsumsi	**80**		**80**			**275.000.000**	**525.000.000**		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2	**09**	**05**	1.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota												**275.000.000**	**525.000.000**		
							Meningkatnya kesehatan masyarakat	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah Produk PSAT yang terawasi	**80**			**275.000.000**	**525.000.000**	Meningkatnya kesehatan masyarakat	
2	**09**	**05**	1.01	01	Subkegiatan Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi												-	**75.000.000**		
								Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah pertemuan/rakor OKKPD	**1**			-	**75.000.000**		
2	**09**	**05**	1.01	02	Subkegiatan Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota												**100.000.000**	**175.000.000**		
								Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah Sertifikat Prima 3	**25**			**100.000.000**	**175.000.000**		
2	**09**	**05**	1.01	03	Subkegiatan Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota												**50.000.000**	**75.000.000**		
								Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah sertifikat register PSAT	**5**			**50.000.000**	**75.000.000**		
2	**09**	**05**	1.01	04	Subkegiatan Rekomendasi keamanan pangan segar asal tumbuhan lintasdaerah kabupaten/kota												**125.000.000**	**75.000.000**		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
								Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah Produk PSAT yang terawasi	**21**			**125.000.000**	**75.000.000**		
2	**09**	**05**	1.01	05	Subkegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan												-	**200.000.000**		
								Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah paket rafid test kit	**5**			-	**200.000.000**		
TOTAL																	**8.877.070.531**	**13.571.830.000**		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Bangka Belitung
Tahun 2021

Unit Organisasi : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Sub Unit Organisasi : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/ Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/ Indikator kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2					**Urusan Pelayanan Tidak Terkait dengan Pelayanan Dasar**															
2	**17**				**Urusan Pemerintah Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**												**18.802.762.886**	**20.427.839.175**		
2	**17**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**												**13.611.052.064**	**14.964.457.270**		
											Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80					**153.775.000**	**169.152.500**		
2	**17**	**01**	**1.01**		**Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**												**153.775.000**	**169.152.500**		
															Jumlah dok perencanaan dan evaluasi	5 dokumen	**153.775.000**	**169.152.500**		
2	**17**	01	1.01	01	Sub Kegiatan Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah												25.825.000	28.407.500		
						A					Predikat Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Provinsi	76								
						B									Jumlah dok perencanaan dan evaluasi	18 dokumen				
						Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah dok perencanaan Renstra/Renja PD	2 Dokumen			25.825.000	28.407.500	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	
2	**17**	01	1.01	02	Sub Kegiatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan												27.850.000	30.635.000		
											Predikat Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Provinsi	76								
															Jumlah dok perencanaan dan evaluasi	18 dokumen				
						Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Menurunkan Tingkat Pengangguran	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah RKA/DPA yang tersusun	2 Dokumen			27.850.000	30.635.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	
2	**17**	01	1.01	03	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah												825.000	907.500		
											Predikat Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Provinsi	76								
															Jumlah dok perencanaan dan evaluasi	18 dokumen				
						Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Menurunkan Tingkat Pengangguran	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah dok evaluasi PD	4 dokumen			825.000	907.500	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	
2	**17**	01	1.01	04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah												98.525.000	108.377.500		
						Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Menurunkan Tingkat Pengangguran	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			jumlah kesepakatan Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan PD	1 dokumen			98.525.000	108.377.500	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/ Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/ Indikator kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2	17	01	1.01	05	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												750.000	825.000		
						Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Menurunkan Tingkat Pengangguran	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah dok Evalusi kinerja PD	3 dokumen			750.000	825.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	
											Survei Kepuasan Pelayanan Internal	90 persen					**13.457.277.064**	**14.795.304.770**		
2	**17**	**01**	**1.02**		**Kegiatan Administrasi Keuangan**												**8.902.496.064**	**9.792.745.670**		
															Survey kepuasan pelayanan keuangan	**90**				
2	17	01	1.02	01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												8.902.496.064	9.792.745.670		
											Predikat Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Provinsi	76								
															Survey kepuasan pelayanan keuangan (angka)	75				
						Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Menurunkan Tingkat Pengangguran	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			jumlah ASN yang terima gaji dan tunjangan	50 orang			8.902.496.064	9.792.745.670	Meningkatkan tata kelola keuangan daerah	
2	**17**	**01**	**1.03**		**Administrasi Umum**												**4.347.401.000**	**4.774.441.100**		
															Survey kepuasan pelayanan umum (angka)	**90**	**4.347.401.000**	**4.774.441.100**		
2	17	01	1.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat												32.040.000	35.244.000		
						Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Menurunkan Tingkat Pengangguran	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah Surat/Barang yang dikirim	120 buah			0	0	Meningkatkan tata kelola keuangan daerah	
						Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Menurunkan Tingkat Pengangguran	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah Materai	3840 lembar			0	0	Meningkatkan tata kelola keuangan daerah	
						Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Menurunkan Tingkat Pengangguran	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah Tenaga Pramubakti	21 orang			0	0	Meningkatkan tata kelola keuangan daerah	
2	17	01	1.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												308.232.000	339.055.200		
											Persentase Tingkat Kepuasan Aparatur Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	75 persen								
															Survey kepuasan pelayanan umum (angka)	75				
						Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Menurunkan Tingkat Pengangguran	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah tagihan listrik	12 bulan				0	Meningkatkan tata kelola keuangan daerah	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/ Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/ Indikator kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
						Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Menurunkan Tingkat Pengangguran	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah tagihan komunikasi	12 bulan				0	Meningkatkan tata kelola keuangan daerah	
													Jumlah Cetak/Penggandaan	12 bulan				0	Meningkatkan tata kelola keuangan daerah	
						Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Menurunkan Tingkat Pengangguran	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah jasa publikasi	2 Jenis				0	Meningkatkan tata kelola keuangan daerah	
2	17	01	1.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor												377.000.000	414.700.000		
						Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Menurunkan Tingkat Pengangguran	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah tenaga keamanan/satpam kantor	10 orang			377.000.000	414.700.000	Meningkatkan tata kelola keuangan daerah	
						Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Menurunkan Tingkat Pengangguran	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah paket Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0 paket			0	0	Meningkatkan tata kelola keuangan daerah	
2	17	01	1.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional												66.200.000	72.820.000		
						Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Menurunkan Tingkat Pengangguran	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			jumlah Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	3 kendaraaan roda 4, 3 kendaraan roda 2			0	0	Meningkatkan tata kelola keuangan daerah	
						Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Menurunkan Tingkat Pengangguran	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			jumlahJasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan melalui Perjanjian/Perikatan	3 kendaraaan roda 4, 3 kendaraan roda 2			0	0	Meningkatkan tata kelola keuangan daerah	
						Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Menurunkan Tingkat Pengangguran	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah tenaga sopir	1 orang			0	0	Meningkatkan tata kelola keuangan daerah	
2	17	01	1.03	07	Penyediaan jasa Administrasi keuangan												966.660.000	1.063.326.000		
						Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Menurunkan Tingkat Pengangguran	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah pengelola administrasi keuangan	12 bulan			0	0	Meningkatkan tata kelola keuangan daerah	
						Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Menurunkan Tingkat Pengangguran	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah Pramubakti	21 orang			0	0	Meningkatkan tata kelola keuangan daerah	
2	17	01	1.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor												386.600.000	425.260.000		
						Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Menurunkan Tingkat Pengangguran	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah jenis bahan dan Peralatan kebersihan kantor	12 bulan			0	0	Meningkatkan tata kelola keuangan daerah	
						Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Menurunkan Tingkat Pengangguran	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah jenis Peralatan kantor yang dilaundry	960 Kg			0	0	Meningkatkan tata kelola keuangan daerah	
						Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Menurunkan Tingkat Pengangguran	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah tenaga kebersihan	8 orang			0	0	Meningkatkan tata kelola keuangan daerah	
2	17	01	1.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja												60.000.000	66.000.000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/ Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/ Indikator kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
						Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Menurunkan Tingkat Pengangguran	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	6 jenis			60.000.000	66.000.000	Meningkatkan tata kelola keuangan daerah	
2	17	01	1.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor												85.000.000	93.500.000		
						Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Menurunkan Tingkat Pengangguran	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			jumlah jenis ATK yang dibeli	5 Jenis			0	0	Meningkatkan tata kelola keuangan daerah	
2	17	01	1.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan												143.524.000	157.876.400		
						Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Menurunkan Tingkat Pengangguran	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah barang cetak	35 buah			0	0	Meningkatkan tata kelola keuangan daerah	
						Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Menurunkan Tingkat Pengangguran	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah penggandaan	228000 Lembar			0	0	Meningkatkan tata kelola keuangan daerah	
						Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Menurunkan Tingkat Pengangguran	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah Penjilidan	33 buah			0	0	Meningkatkan tata kelola keuangan daerah	
2	17	01	1.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor												49.845.000	54.829.500		
						Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Menurunkan Tingkat Pengangguran	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah komponen instalasi listrik	12 bulan			49.845.000	54.829.500	Meningkatkan tata kelola keuangan daerah	
2	17	01	1.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor												0	0		
						Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Menurunkan Tingkat Pengangguran	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah peralatan dan Perlengkapan Kantor	11 Unit			0	0	Meningkatkan tata kelola keuangan daerah	
2	17	01	1.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga												7.000.000	7.700.000		
						Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Menurunkan Tingkat Pengangguran	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah peralatan rumah tangga	1 buah			7.000.000	7.700.000	Meningkatkan tata kelola keuangan daerah	
2	17	01	1.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan												21.640.000	23.804.000		
						Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Menurunkan Tingkat Pengangguran	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan	3 Jenis			21.640.000	23.804.000	Meningkatkan tata kelola keuangan daerah	
2	17	01	1.03	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												22.160.000	24.376.000		
						Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Menurunkan Tingkat Pengangguran	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			jumlah bahan logistik kantor	5 jenis			22.160.000	24.376.000	Meningkatkan tata kelola keuangan daerah	
2	17	01	1.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman												130.000.000	143.000.000		
						Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Menurunkan Tingkat Pengangguran	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah makanan dan minuman Tamu	933 Kotak			0	0	Meningkatkan tata kelola keuangan daerah	
						Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Menurunkan Tingkat Pengangguran	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah makanan dan minuman Rapat	2000 Kotak			0	0	Meningkatkan tata kelola keuangan daerah	
2	17	01	1.03	18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah												432.490.000	475.739.000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/ Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/ Indikator kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
						Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Menurunkan Tingkat Pengangguran	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	50 Kali			0	0	Meningkatkan tata kelola keuangan daerah	
						Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Menurunkan Tingkat Pengangguran	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	200 Kali			0	0	Meningkatkan tata kelola keuangan daerah	
2	17	01	1.03	23	Pengadaan perlengkapan gedung kantor												838.000.000	921.800.000		
						Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Menurunkan Tingkat Pengangguran	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			jumlah jenis perlengkapan gedung kantor	10 Jenis			838.000.000	921.800.000	Meningkatkan tata kelola keuangan daerah	
2	17	01	1.03	26	Pengadaan Meubeleur												0	0		
						Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Menurunkan Tingkat Pengangguran	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			jumlah pengadaan Meubeleur	1 Jenis			0	0	Meningkatkan tata kelola keuangan daerah	
2	17	01	1.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor												250.000.000	275.000.000		
						Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Menurunkan Tingkat Pengangguran	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			jumlah gedung kantor yang dipelihara	3 Gedung			250.000.000	275.000.000	Meningkatkan tata kelola keuangan daerah	
2	17	01	1.03	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional												101.010.000	111.111.000		
						Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Menurunkan Tingkat Pengangguran	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah kendaraan oprasional yang dipelihara	3 kendaraaan roda 4, 3 kendaraan roda 2			0	0	Meningkatkan tata kelola keuangan daerah	
						Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Menurunkan Tingkat Pengangguran	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah BBM kendaraan	7920 Liter			0	0	Meningkatkan tata kelola keuangan daerah	
2	17	01	1.03	33	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor												70.000.000	77.000.000		
						Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Menurunkan Tingkat Pengangguran	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	1 Paket			70.000.000	77.000.000	Meningkatkan tata kelola keuangan daerah	
2	17	01	1.03	35	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor												0	0		
						Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Menurunkan Tingkat Pengangguran	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	1 Paket			0	0	Meningkatkan tata kelola keuangan daerah	
2	**17**	**01**	**1.04**		**Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**												**207.380.000**	**228.118.000**		
															Survey kepuasan pelayanan kepegawaian (angka)	**90**	**207.380.000**	**228.118.000**		
2	17	01	1.04	9	Pendidikan dan Pelatihan Formal												103.690.000	114.059.000		
						Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Menurunkan Tingkat Pengangguran	Luar Daerah					Jumlah Pegawai yang ikut pendidikan dan pelatihan formal	12 Orang			103.690.000	114.059.000		
2	17	01	1.04	11	Bimbingan teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan												103.690.000	114.059.000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/ Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/ Indikator kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
						Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Menurunkan Tingkat Pengangguran	Luar Daerah					jumlah peserta bimbingan teknis	12 Orang			103.690.000	114.059.000		

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2021

Unit Organisasi : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
			Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
Urusan															
PROGRAM : 3.29.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH												**21.032.554.592**	**27.200.700.000**	**Meningkatnya Kualitas ASN**	
						Predikat nilai Sakip PD	**80**								
KEGIATAN : 3.29.01.1.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH												**194.500.000**	**325.000.000**		
										Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	**13 Dokumen**			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
Sub Kegiatan : 3.29.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												95.000.000	150.000.000		
	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatnya kualitas ASN	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun (RKA, DPA, RKA Perubahan, DPPA, Renja, Renja Perubahan)	6 Dokumen			95.000.000	150.000.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
Sub Kegiatan : 3.29.01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												99.500.000	175.000.000		
	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatnya kualitas ASN	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah dok Evalusi kinerja PD (LKPJ, LAKIP, LPPD dan	7 Dokumen			99.500.000	175.000.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
KEGIATAN : 3.29.01.1.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH												**16.365.294.592**	**20.085.000.000**		
						Survey kepuasan pelayanan internal	**95**								
										Survey kepuasan pelayanan keuangan	**95**			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
Sub Kegiatan : **3.29.01.1.02.01** Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												16.316.059.592	20.000.000.000		
	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatnya kualitas ASN	Pangkalpinang	Bukit Intan	Ait Itam			Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan	125 Orang			16.316.059.592	20.000.000.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
Sub Kegiatan : **3.29.01.1.02.07** Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD												49.235.000	85.000.000		
	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatnya kualitas ASN	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah laporan keuangan bulanan/semesteran	2 Laporan			49.235.000	85.000.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
KEGIATAN : 3.29.01.1.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH												**125.850.000**	**300.000.000**		
										survey kepuasan pelayanan kepegawaian	**95**				
Sub Kegiatan : 3.29.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi												125.850.000	300.000.000		

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
			Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatnya kualitas ASN	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah pegawai yang mengkuti pendidikan dan pelatihan	20 Pegawai			125.850.000	300.000.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
KEGIATAN : 3.29.01.1.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH												**754.000.000**	**1.265.000.000**		
										survey kepuasan pelayanan umum	**95**				
Sub Kegiatan : 3.29.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor												15.000.000	20.000.000		
	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatnya kualitas ASN	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah jenis komponen instalasi listrik	8 Jenis			15.000.000	20.000.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
Sub Kegiatan : 3.29.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor												25.000.000	35.000.000		
	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatnya kualitas ASN	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah Bahan logistik kantor	3 Jenis			25.000.000	35.000.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
Sub Kegiatan : 3.29.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan												25.000.000	30.000.000		
	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatnya kualitas ASN	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah Spanduk /Baliho/Backdrop/Umbul-umbul	200 Meter			8.000.000	10.000.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
								Jumlah jenis barang cetak	2 buah			17.000.000	20.000.000		
Sub Kegiatan : 3.29.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan												20.000.000	25.000.000		
	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatnya kualitas ASN	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah jenis bahan bacaan dan perundang-undangan	2 buah			20.000.000	25.000.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
Sub Kegiatan : 3.29.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material												135.000.000	150.000.000		
	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatnya kualitas ASN	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah jenis ATK yang dibeli	5 jenis			135.000.000	150.000.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
Sub Kegiatan : 3.29.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu												20.000.000	30.000.000		
	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatnya kualitas ASN	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah penyediaan makan dan minum Tamu	1 Thn			20.000.000	30.000.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
Sub Kegiatan : 3.29.01.1.06.09 Penyelanggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												514.000.000	975.000.000		
								Jumlah penyediaan makan dan minum Rapat	3000 pax			65.000.000	75.000.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatnya kualitas ASN	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah / bln	12 bln			149.000.000	300.000.000		
			Luar Daerah	-	-			Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah / bln	12 bln			300.000.000	600.000.000		
KEGIATAN : 3.29.01.1.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH												**475.000.000**	**1.300.000.000**		
										Jumlah pengadaan kendaraan Dinas	**1 unit**				

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/sub Kegiatan			Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
Sub Kegiatan :	3.29.01.1.07.01	Pengadaan kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												475.000.000	1.300.000.000		
			Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan	Meningkatnya kualitas ASN	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah pengadaan kendaraan Dinas Ess	1 unit			475.000.000	1.300.000.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
KEGIATAN :	**3.29.01.1.08**	**PENYEDIA JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**												**998.900.000**	**1.051.300.000**		
Sub Kegiatan :	3.29.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat												21.000.000	30.000.000		
			Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas ASN	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah Materai	1500 Lembar			15.000.000	20.000.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
										Jumlah surat/barang yang tekirim	12 Bulan			6.000.000	10.000.000		
Sub Kegiatan :	3.29.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												237.600.000	275.000.000		
			Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatnya kualitas ASN	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah tagihan paket telepon	12 Bulan			12.600.000	15.000.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
										Jumlah tagihan listrik	12 Bulan			180.000.000	210.000.000		
										Jumlah tagihan langganan komukasi/TV	12 Bulan			45.000.000	50.000.000		
Sub Kegiatan :	3.29.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor												-	-		
Sub Kegiatan :	3.29.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												740.300.000	746.300.000		
			Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatnya kualitas ASN						Jumlah tenaga Pramubakti yang dipekerjakan	10 Orang			377.000.000	377.000.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
										Jumlah Tenaga Keamanan	4 Orang			150.800.000	150.800.000		
										Jumlah Cleaning Services	3 Orang			113.100.000	113.100.000		
			Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatnya kualitas ASN	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah tenaga supir	2 orang			75.400.000	75.400.000		
										Jumlah pembelian bahan Kebersihan kantor / bln	12 Bulan			24.000.000	30.000.000		
KEGIATAN :	**3.29.01.1.09**	**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**												**191.140.000**	**350.000.000**		
Sub Kegiatan :	3.29.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												41.750.000	45.000.000		
			Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatnya kualitas ASN	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah Jasa dan biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas jabatan	1 unit			41.750.000	45.000.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
Sub Kegiatan :	3.29.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												44.590.000	50.000.000		
			Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatnya kualitas ASN	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah Jasa dan biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional	3 unit			44.590.000	50.000.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
Sub Kegiatan :	3.29.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya												54.800.000	55.000.000		

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
			Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatnya kualitas ASN	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah jenis peralatan kerja yang dipelihara dan diperbaiki	20 Peralatan			54.800.000	55.000.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
Sub Kegiatan : 3.29.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												50.000.000	200.000.000		
	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatnya kualitas ASN	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara	1 gedung			50.000.000	200.000.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
CABANG DINAS ESDM WILAYAH BANGKA	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatnya kualitas ASN	**Bangka**	**Sungailiat**	**Sungailiat**	**Survey kepuasan pelayanan Cabang Dinas ESDM Wilayah Bangka**	**95**					**373.718.000**	**499.100.000**		
KEGIATAN : 3.29.01.1.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH												**138.818.000**	**221.500.000**		
										survey kepuasan pelayanan umum	**95**				
Sub Kegiatan : 3.29.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor												3.328.000	10.000.000		
	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatnya kualitas ASN	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah jenis komponen instalasi listrik	8 buah			3.328.000	10.000.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
Sub Kegiatan : 3.29.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor												2.500.000	5.000.000		
	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatnya kualitas ASN	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah Bahan logistik kantor	5 buah			2.500.000	5.000.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
Sub Kegiatan : 3.29.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan												6.600.000	9.000.000		
	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatnya kualitas ASN	Bangka	Sungailiat	Sungailiat			Jumlah jenis barang cetak	2 buah			2.100.000	2.500.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
								Jumlah fotocopy	20.000 lmbr			3.500.000	5.000.000		
								Jumlah penjilidan	200 buah			1.000.000	1.500.000		
Sub Kegiatan : 3.29.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan												6.000.000	6.000.000		
	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatnya kualitas ASN	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah jenis bahan bacaan dan perundang-undangan	12 bln			6.000.000	6.000.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
Sub Kegiatan : 3.29.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material												12.000.000	30.000.000		
	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatnya kualitas ASN	Bangka	Sungailiat	Sungailiat			Jumlah jenis ATK yang dibeli	5 Jenis			12.000.000	30.000.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
Sub Kegiatan : 3.29.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu												5.000.000	7.500.000		

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
			Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas ASN	Bangka	Sungailiat	Sungailiat			Jumlah penyediaan makan dan minum Tamu	200 pax			5.000.000	7.500.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
Sub Kegiatan : 3.29.01.1.06.09 Penyelanggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												103.390.000	160.000.000		
								Jumlah penyediaan makan dan minum Rapat	200 pax			8.250.000	10.000.000		
	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas ASN	Bangka	-	-			Jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah / bln	12 bln			73.840.000	100.000.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
			Luar Daerah	-	-			Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah / bln	12 bln			21.300.000	50.000.000		
KEGIATAN : 3.29.01.1.08 PENYEDIA JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH												**172.350.000**	**183.100.000**		
Sub Kegiatan : 3.29.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat												2.250.000	5.000.000		
	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas ASN	Bangka	Sungailiat	sungailiat			Jumlah Materai	500 Lembar			2.250.000	5.000.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
Sub Kegiatan : 3.29.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												51.000.000	55.000.000		
	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas ASN	Bangka	Sungailiat	Sungailiat			Jumlah tagihan listrik	12 Bulan			33.000.000	35.000.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
								Jumlah tagihan langganan internet	12 Bulan			18.000.000	20.000.000		
Sub Kegiatan : 3.29.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor												-	-		
Sub Kegiatan : 3.29.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												119.100.000	123.100.000		
	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas ASN	Bangka	Sungailiat	sungailiat			Jumlah tenaga Pramubakti yang dipekerjakan	2 Orang			75.400.000	75.400.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas ASN	Bangka	Sungailiat	Sungailiat			Jumlah Tenaga Keamanan	1 Orang			37.700.000	37.700.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
								Jumlah pembelian bahan Kebersihan kantor / bln	12 Bulan			6.000.000	10.000.000		
KEGIATAN : 3.29.01.1.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH												**62.550.000**	**94.500.000**		
Sub Kegiatan : 3.29.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												45.050.000	54.500.000		
	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas ASN	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah Jasa dan biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional	3 unit			45.050.000	54.500.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
Sub Kegiatan : 3.29.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya												7.500.000	20.000.000		
	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas ASN	Bangka	Sungailiat	Sungailiat			Jumlah jenis peralatan kerja yang diperbaiki	20 Peralatan			7.500.000	20.000.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
Sub Kegiatan : 3.29.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												10.000.000	20.000.000		
	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas ASN	Bangka	Sungailiat	Sungailiat			Jumlah gedung yang terpelihara	1 gedung			10.000.000	20.000.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja							Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
			Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan			Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target				
CABANG DINAS ESDM WILAYAH BANGKA BARAT	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatnya kualitas ASN	**Bangka Barat**	**Muntok**	-	**Survey kepuasan pelayanan Cabang Dinas ESDM Wilayah Bangka Barat**	**95**						**447.048.000**	**598.700.000**		
KEGIATAN : 3.29.01.1.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH													**127.848.000**	**223.500.000**		
											survey kepuasan pelayanan umum	**95**				
Sub Kegiatan : 3.29.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													2.500.000	10.000.000		
	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatnya kualitas ASN	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah jenis komponen instalasi listrik	8	buah			2.500.000	10.000.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
Sub Kegiatan : 3.29.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor													2.500.000	5.000.000		
	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatnya kualitas ASN	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah Bahan logistik kantor	5	buah			2.500.000	5.000.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
Sub Kegiatan : 3.29.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													4.000.000	11.000.000		
	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatnya kualitas ASN	Bangka Barat	Mentok	-			Jumlah jenis barang cetak	5	Eksemplar			1.250.000	5.000.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
								Jumlah fotocopy	14.000	lmbr			1.750.000	5.000.000		
								Jumlah penjilidan	200	buah			1.000.000	1.000.000		
Sub Kegiatan : 3.29.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material													18.000.000	30.000.000		
	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatnya kualitas ASN	Bangka	Sungailiat	Sungailiat			Jumlah jenis ATK yang dibeli	5	Jenis			18.000.000	30.000.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
Sub Kegiatan : 3.29.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu													5.000.000	7.500.000		
	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatnya kualitas ASN	Bangka Barat	Mentok	-			Jumlah penyediaan makan dan minum Tamu	200	pax			5.000.000	7.500.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
Sub Kegiatan : 3.29.01.1.06.09 Penyelanggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													95.848.000	160.000.000		
								Jumlah penyediaan makan dan minum Rapat	330	pax			5.000.000	10.000.000		
	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatnya kualitas ASN	Bangka Barat	-	-			Jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah / bln	12	bln			80.848.000	100.000.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
			Luar Daerah	-	-			Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah / bln	12	bln			10.000.000	50.000.000		
KEGIATAN : 3.29.01.1.08 PENYEDIA JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH													**270.150.000**	**280.700.000**		
Sub Kegiatan : 3.29.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat													3.750.000	5.000.000		
	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatnya kualitas ASN	Bangka Barat	Mentok	-			Jumlah Materai	750	Lembar			3.750.000	5.000.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
			Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
Sub Kegiatan : 3.29.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												34.200.000	39.500.000		
	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatnya kualitas ASN	Bangka Barat	Mentok				Jumlah tagihan listrik	12 Bulan			12.000.000	12.000.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
								Jumlah tagihan PDAM	12 Bulan			7.200.000	7.500.000		
								Jumlah tagihan langganan Internet	12 Bulan			15.000.000	20.000.000		
Sub Kegiatan : 3.29.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor												-	-		
Sub Kegiatan : 3.29.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												232.200.000	236.200.000		
	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatnya kualitas ASN	Bangka Barat	Mentok				Jumlah pembelian bahan Kebersihan kantor / bln	12 Bulan			6.000.000	10.000.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatnya kualitas ASN	Bangka Barat	Mentok	-			Jumlah tenaga Pramubakti yang dipekerjakan	2 Orang			75.400.000	75.400.000		
	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatnya kualitas ASN	Bangka Barat	Mentok	-			Jumlah Tenaga Keamanan	2 Orang			75.400.000	75.400.000		
	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatnya kualitas ASN	Bangka Barat	Mentok				Jumlah tenaga Cleaning services	1 Orang			37.700.000	37.700.000		
								Jumlah tenaga supir	1 orang			37.700.000	37.700.000		
KEGIATAN : 3.29.01.1.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH												**49.050.000**	**94.500.000**		
Sub Kegiatan : 3.29.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												45.050.000	54.500.000		
	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatnya kualitas ASN	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah Jasa dan biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional	3 unit			45.050.000	54.500.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
Sub Kegiatan : 3.29.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya												4.000.000	20.000.000		
	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatnya kualitas ASN	Bangka	Sungailiat	Sungailiat			Jumlah jenis peralatan kerja yang diperbaiki	20 Peralatan			4.000.000	20.000.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
Sub Kegiatan : 3.29.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												-	20.000.000		
	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatnya kualitas ASN	Bangka	Sungailiat	Sungailiat			Jumlah gedung yang terpelihara	1 gedung			-	20.000.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
CABANG DINAS ESDM WILAYAH BANGKA TENGAH DAN BANGKA SELATAN	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatnya kualitas ASN	**Bangka Tengah**	**Koba**	-	**Survey kepuasan pelayanan Cabang Dinas ESDM Wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan**	**95**					**428.968.000**	**548.800.000**		
KEGIATAN : 3.29.01.1.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH												**148.868.000**	**224.500.000**		
										survey kepuasan pelayanan umum	**95**				

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
			Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
Sub Kegiatan : 3.29.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor												3.000.000	10.000.000		
	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatnya kualitas ASN	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah jenis komponen instalasi listrik	8 buah			3.000.000	10.000.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
Sub Kegiatan : 3.29.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor												2.000.000	5.000.000		
	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatnya kualitas ASN	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah Bahan logistik kantor	5 buah			2.000.000	5.000.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
Sub Kegiatan : 3.29.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan												8.000.000	12.000.000		
	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatnya kualitas ASN	Bangka Barat	Mentok	-			Jumlah jenis barang cetak	5 Eksemplar			2.100.000	5.000.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
								Jumlah fotocopy	14.000 lmbr			4.900.000	5.000.000		
								Jumlah penjilidan	200 buah			1.000.000	2.000.000		
Sub Kegiatan : 3.29.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan												6.000.000	6.000.000		
	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatnya kualitas ASN	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah jenis bahan bacaan dan perundang-undangan	12 bln			6.000.000	6.000.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
Sub Kegiatan : 3.29.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material												18.000.000	30.000.000		
	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatnya kualitas ASN	Bangka	Sungailiat	Sungailiat			Jumlah jenis ATK yang dibeli	5 Jenis			18.000.000	30.000.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
Sub Kegiatan : 3.29.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu												5.000.000	7.500.000		
	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatnya kualitas ASN	Bangka Barat	Mentok	-			Jumlah penyediaan makan dan minum Tamu	200 pax			5.000.000	7.500.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
Sub Kegiatan : 3.29.01.1.06.09 Penyelanggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												112.868.000	160.000.000		
								Jumlah penyediaan makan dan minum Rapat	330 pax			8.250.000	10.000.000		
	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatnya kualitas ASN	Bangka Tengah dan Bangka Selatan	-	-			Jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah / bln	12 bln			84.618.000	100.000.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
			Luar Daerah	-	-			Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah / bln	12 bln			20.000.000	50.000.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
KEGIATAN : 3.29.01.1.08 PENYEDIA JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH												**187.550.000**	**209.800.000**		
Sub Kegiatan : 3.29.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat												3.750.000	5.000.000		
	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatnya kualitas ASN	Bangka Barat	Mentok	-			Jumlah Materai	750 Lembar			3.750.000	5.000.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
Sub Kegiatan : 3.29.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												27.000.000	44.000.000		
	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatnya kualitas ASN	Bangka Barat	Mentok				Jumlah tagihan listrik	12 Bulan			12.000.000	24.000.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
								Jumlah tagihan langganan Internet	12 Bulan			15.000.000	20.000.000		

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
			Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
Sub Kegiatan : 3.29.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor												-	-		
Sub Kegiatan : 3.29.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												156.800.000	160.800.000		
	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatnya kualitas ASN	Bangka Barat	Mentok				Jumlah pembelian bahan Kebersihan kantor / bln	12 Bulan			6.000.000	10.000.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatnya kualitas ASN	Bangka Barat	Mentok				Jumlah tenaga Cleaning services	1 Orang			37.700.000	37.700.000		
	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatnya kualitas ASN	Bangka Barat	Mentok	-			Jumlah tenaga Pramubakti yang dipekerjakan	2 Orang			75.400.000	75.400.000		
	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatnya kualitas ASN	Bangka Tengah	Koba	-			Jumlah Tenaga Keamanan	1 Orang			37.700.000	37.700.000		
KEGIATAN : 3.29.01.1.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH												**92.550.000**	**114.500.000**		
Sub Kegiatan : 3.29.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												45.050.000	54.500.000		
	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatnya kualitas ASN	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah Jasa dan biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional	3 unit			45.050.000	54.500.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
Sub Kegiatan : 3.29.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya												7.500.000	20.000.000		
	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatnya kualitas ASN	Bangka	Sungailiat	Sungailiat			Jumlah jenis peralatan kerja yang diperbaiki	20 Peralatan			7.500.000	20.000.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
Sub Kegiatan : 3.29.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												40.000.000	40.000.000		
	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatnya kualitas ASN	Bangka Tengah	Koba	-			Jumlah gedung yang terpelihara	1 gedung			40.000.000	40.000.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
CABANG DINAS ESDM WILAYAH BELITUNG	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatnya kualitas ASN	**Belitung**	**Tanjungpandan**	**-**	**Survey kepuasan pelayanan Cabang Dinas ESDM Wilayah Belitung**	**95**					**349.268.000**	**447.100.000**		
KEGIATAN : 3.29.01.1.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH												**158.868.000**	**224.500.000**		
										survey kepuasan pelayanan umum	**95**				
Sub Kegiatan : 3.29.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor												3.000.000	10.000.000		
	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatnya kualitas ASN	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah jenis komponen instalasi listrik	8 buah			3.000.000	10.000.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
Sub Kegiatan : 3.29.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor												2.500.000	5.000.000		
	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatnya kualitas ASN	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah Bahan logistik kantor	5 buah			2.500.000	5.000.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/sub Kegiatan			Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
Sub Kegiatan :	3.29.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan												8.000.000	12.000.000		
			Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatnya kualitas ASN	Bangka Barat	Mentok	-			Jumlah jenis barang cetak	5 Eksemplar			2.100.000	5.000.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
										Jumlah fotocopy	14.000 lmbr			4.900.000	5.000.000		
										Jumlah penjilidan	200 buah			1.000.000	2.000.000		
Sub Kegiatan :	3.29.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material												18.000.000	30.000.000		
			Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatnya kualitas ASN	Bangka	Sungailiat	Sungailiat			Jumlah jenis ATK yang dibeli	5 Jenis			18.000.000	30.000.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
Sub Kegiatan :	3.29.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu												5.000.000	7.500.000		
			Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatnya kualitas ASN	Bangka Barat	Mentok	-									Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
										Jumlah penyediaan makan dan minum Tamu	200 pax			5.000.000	7.500.000		
Sub Kegiatan :	3.29.01.1.06.09	Penyelanggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												122.368.000	160.000.000		
										Jumlah penyediaan makan dan minum Rapat	330 pax			8.250.000	10.000.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
			Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatnya kualitas ASN	Belitung	Tanjungpandan	-			Jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah / bln	12 bln			94.118.000	100.000.000		
					Luar Daerah	-	-			Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah / bln	12 bln			20.000.000	50.000.000		
KEGIATAN :	**3.29.01.1.08**	**PENYEDIA JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**												**137.850.000**	**148.100.000**		
Sub Kegiatan :	3.29.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat												3.750.000	5.000.000		
			Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatnya kualitas ASN	Bangka Barat	Mentok	-			Jumlah Materai	750 Lembar			3.750.000	5.000.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
Sub Kegiatan :	3.29.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												15.000.000	20.000.000		
										Jumlah tagihan langganan Internet	12 Bulan			15.000.000	20.000.000		
Sub Kegiatan :	3.29.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												119.100.000	123.100.000		
			Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatnya kualitas ASN	Bangka Barat	Mentok				Jumlah pembelian bahan Kebersihan kantor / bln	12 Bulan			6.000.000	10.000.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
			Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatnya kualitas ASN	Bangka Barat	Mentok				Jumlah tenaga Cleaning services	1 Orang			37.700.000	37.700.000		
			Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatnya kualitas ASN	Bangka Barat	Mentok	-			Jumlah tenaga Pramubakti yang dipekerjakan	2 Orang			75.400.000	75.400.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
KEGIATAN :	**3.29.01.1.09**	**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**												**52.550.000**	**74.500.000**		
Sub Kegiatan :	3.29.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												45.050.000	54.500.000		

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
			Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatnya kualitas ASN	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah Jasa dan biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional	3 unit			45.050.000	54.500.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
Sub Kegiatan : 3.29.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya												7.500.000	20.000.000		
	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatnya kualitas ASN	Bangka	Sungailiat	Sungailiat			Jumlah jenis peralatan kerja yang diperbaiki	20 Peralatan			7.500.000	20.000.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
CABANG DINAS ESDM WILAYAH BELITUNG TIMUR	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatnya kualitas ASN	**Belitung Timur**	**Manggar**	**-**	**Survey kepuasan pelayanan Cabang Dinas ESDM Wilayah Belitung Timur**	**95**					**328.868.000**	**430.700.000**		
KEGIATAN : 3.29.01.1.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH												**158.868.000**	**223.500.000**		
										survey kepuasan pelayanan umum	**95**				
Sub Kegiatan : 3.29.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor												3.000.000	10.000.000		
	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatnya kualitas ASN	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah jenis komponen instalasi listrik	8 buah			3.000.000	10.000.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
Sub Kegiatan : 3.29.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor												2.500.000	5.000.000		
	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatnya kualitas ASN	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah Bahan logistik kantor	5 buah			2.500.000	5.000.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
Sub Kegiatan : 3.29.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan												8.000.000	11.000.000		
	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatnya kualitas ASN	Bangka Barat	Mentok	-			Jumlah jenis barang cetak	5 Eksemplar			2.100.000	5.000.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
								Jumlah fotocopy	14.000 lmbr			4.900.000	5.000.000		
								Jumlah penjilidan	200 buah			1.000.000	1.000.000		
Sub Kegiatan : 3.29.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material												18.000.000	30.000.000		
	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatnya kualitas ASN	Bangka	Sungailiat	Sungailiat			Jumlah jenis ATK yang dibeli	5 Jenis			18.000.000	30.000.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
Sub Kegiatan : 3.29.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu												5.000.000	7.500.000		
	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatnya kualitas ASN	Bangka Barat	Mentok	-			Jumlah penyediaan makan dan minum Tamu	200 pax			5.000.000	7.500.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
Sub Kegiatan : 3.29.01.1.06.09 Penyelanggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												122.368.000	160.000.000		
								Jumlah penyediaan makan dan minum Rapat	330 pax			8.250.000	10.000.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan	Meningkatnya	Belitung	Tanjungpandan	-			Jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah / bln	12 bln			94.118.000	100.000.000		

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/sub Kegiatan			Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
			Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	kualitas ASN	Luar Daerah	-	-			Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah / bln	12 bln			20.000.000	50.000.000		
KEGIATAN :	**3.29.01.1.08**	**PENYEDIA JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**												**77.450.000**	**92.700.000**		
Sub Kegiatan :	3.29.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat												3.750.000	5.000.000		
			Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatnya kualitas ASN	Bangka Barat	Mentok	-			Jumlah Materai	750 Lembar			3.750.000	5.000.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
Sub Kegiatan :	3.29.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												30.000.000	40.000.000		
			Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatnya kualitas ASN	BELTIM	Manggar				Jumlah tagihan listrik	12 Bulan			15.000.000	20.000.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
										Jumlah tagihan langganan Internet	12 Bulan			15.000.000	20.000.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
Sub Kegiatan :	3.29.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												43.700.000	47.700.000		
			Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatnya kualitas ASN	Bangka Barat	Mentok				Jumlah pembelian bahan Kebersihan kantor / bln	12 Bulan			6.000.000	10.000.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
			Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatnya kualitas ASN	Bangka Barat	Mentok	-			Jumlah tenaga Pramubakti yang dipekerjakan	1 Orang			37.700.000	37.700.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
KEGIATAN :	**3.29.01.1.09**	**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**												**92.550.000**	**114.500.000**		
Sub Kegiatan :	3.29.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												45.050.000	54.500.000		
			Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatnya kualitas ASN	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah Jasa dan biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional	3 unit			45.050.000	54.500.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
Sub Kegiatan :	3.29.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya												7.500.000	20.000.000		
			Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatnya kualitas ASN	Bangka	Sungailiat	Sungailiat			Jumlah jenis peralatan kerja yang diperbaiki	20 Peralatan			7.500.000	20.000.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
Sub Kegiatan :	3.29.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												40.000.000	40.000.000		
			Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatnya kualitas ASN	Bangka	Sungailiat	Sungailiat			Jumlah gedung yang terpelihara	1 gedung			40.000.000	40.000.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
PROGRAM :	**3.29.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN**												**234.500.000**	**350.000.000**		
								Penataan pengelolaan kegeologian									
KEGIATAN :	**3.29.02.1.02**	**PENATAUSAHAAN IZIN PENGEBORAN, IZIN PENGGALIAN, IZIN PEMAKAIAN, DAN PENGUSAHAAN AIR TANAH DALAM DAERAH PROVINSI**												**234.500.000**	**350.000.000**		
												Jumlah Rekomtek perizinan air tanah dan laporan pengawasan perizinan air tanah	15 Dokumen dan 1 laporan				
Sub Kegiatan :	3.29.02.1.02.02	Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah												100.000.000	200.000.000		

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
			Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
			Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah Rekomendasi teknis perizinan air tanah	15 Rekom			100.000.000	200.000.000		
Sub Kegiatan : 3.29.02.1.02.03 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah												134.500.000	150.000.000		
			Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			jumlah laporan pembendalian dan pengawasan perizinan air tanah	1 Laporan			134.500.000	150.000.000		
PROGRAM : 3.29.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA												**482.000.000**	**850.000.000**	**Meningkatnya nilai tambah sektor pertambangan dan**	
						Persentase pertambangan yang "good mining practices"	**70 persen;**								
KEGIATAN : 3.29.03.1.01 Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mneral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil												**482.000.000**	**850.000.000**		
										Jumlah Rekon PNBP, Jumlah Peta yang dicetak dan jumlah WIUP aktif yang diawasi	4 kali REKON, 100 lembar peta dan 250 WIUP				
Sub Kegiatan : 3.29.03.1.01.01 Pengumpulan dan Pengolahan Data Dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah laut sampai dengan 12 Mil												200.000.000	350.000.000		
	Peningkatan nilai tambah sektor pertambangan	Meningaktnya PAD dari sektor Pertambangan	Dalam dan Luar Daerah	-	-			Jumlah Rekon PNBP MINERBA	4 kali			100.000.000	200.000.000	Peningkatan nilai tambah sektor pertambangan	Peningkatan Nilai tambah Energi dan Mineral
			Bangka Belitung	-	-			Jumlah peta yang dicetak	100 lembar			100.000.000	150.000.000	Peningkatan nilai tambah sektor pertambangan	Peningkatan Nilai tambah Energi dan Mineral
Sub Kegiatan : 3.29.03.1.01.03 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah laut sampai dengan 12 Mil												282.000.000	500.000.000		
	Pertambangan yang berwawasan lingkungan	Pertambangan yang good mining practices	7 Kab/Kota	-	-			Jumlah WIUP yang dikendalikan dan diawasi	250 WIUP			282.000.000	500.000.000	Pertambangan yang baik	Pertambangan yang berwawasan Lingkungan
PROGRAM : 3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN												**334.500.000**	**700.000.000**		
						Persentase Bauran Energi Baru Terbarukan	**10 persen**								
KEGIATAN : 3.29.05.1.04 PELAKSANAAN KONSERVASI ENERGI DI WILAYAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG												**334.500.000**	**700.000.000**		

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/sub Kegiatan			Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
												Jumlah Dokumen pelaksanaan konservasi energi	2 Dokumen				
Sub Kegiatan :	3.29.05.1.04.01	Perumusan Dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi.												150.000.000	350.000.000		
			Ketahan Energi	Meningkatkan penggunaan Energi Baru Terbarukan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah Rapergub	1 Rapergub			150.000.000	350.000.000	persentase penggunaan Energi Baru Terbarukan	Konservasi Energi
Sub Kegiatan :	3.29.05.1.04.07	Pembinaan Dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi.												184.500.000	350.000.000		
			Ketahan Energi	Meningkatkan penggunaan Energi Baru Terbarukan	7 Kab/Kota	-	-			Jumlah Laporan pembinaan dan pengawasan konservasi energi	1 Laporan			184.500.000	350.000.000	persentase penggunaan Energi Baru Terbarukan	Konservasi Energi
PROGRAM :	**3.29.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN**												**253.750.000**	**500.000.000**		
								Rasio elektrifikasi	**98 persen**								
KEGIATAN	**3.29.06.1.02**	**PENATAUSAHAAN IZIN OPERASI YANG FASILITAS INSTALASI DALAM PROVINSI**												**187.500.000**	**300.000.000**		
												Jumlah badan usaha yang diawasi	40 Badan Usaha			Ratio Elektrifikasi	Ratio Elektrifikasi
Sub Kegiatan :	3.29.06.1.02.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi Yang Fasilitas Instansinya Dalam Daerah Provinsi.												187.500.000	300.000.000		
			Ketahan Energi	Ratio Elektrifikasi	7 Kab/Kota	-	-			Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan izin operasi ketenagalistrikan	40 Laporan			187.500.000	300.000.000	Ratio Elektrifikasi	Ratio Elektrifikasi
KEGIATAN	**3.29.06.1.06**	**PENGANGGARAN UNTUK KELOMPOK MASYARAKAT TIDAK MAMPU, PEMBANGUNAN SARANA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK BELUM BERKEMBANG, DAERAH TERPENCIL DAN PERDESAAN**												**66.250.000**	**200.000.000**		
												Jumlah Desa yang di data	10 Desa				
Sub Kegiatan :	3.29.06.1.06.01	Pengumpulan Dan Pengolahan Data Dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan.												66.250.000	200.000.000		
			Ketahan Energi	Ratio Elektrifikasi	7 Kab/Kota	-	-			Jumlah Laporan pengumpulan dan pengolahan data	1 Laporan			66.250.000	200.000.000	Ratio Elektrifikasi	Ratio Elektrifikasi
														22.337.304.592	**29.600.700.000**		

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2021

PERANGKAT DAERAH : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN.

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
			Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
URUSAN PEMERINTAHAN PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN												**20.394.811.553**	**22.388.076.208**		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH												**15.147.816.848**	**16.616.382.033**		
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam	Nilai SAKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi	80					**213.007.000**	**234.307.700**		
Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												**213.007.000**	**234.307.700**		
								Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi	**11**			**213.007.000**	**234.307.700**		
Sub Kegiatan Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah												106.618.000	117.279.800		
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah dokumen perencanaan Renstra/Renja PD	2	106.618.000	117.279.800	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	
Sub Kegiatan Penyusunan Program dan kegiatan perangkat daerah dalam dokumen perencanaanan												10.000.000	11.000.000		
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah dokumen DPA/DPPA yang tersusun	2	10.000.000	11.000.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah												6.200.000	6.820.000		
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah dokumen Pengendalian dan evaluasi PD	4	6.200.000	6.820.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	
Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah												76.389.000	84.027.900		
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah dokumen kesepakatan Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan PD	1	76.389.000	84.027.900	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	
Sub Kegiatan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah												13.800.000	15.180.000		
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah dokumen Evalusi kinerja PD	3	13.800.000	15.180.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	
						Survey Kepuasan Pelayanan Internal	80					**14.934.809.848**	**16.382.074.333**		
Kegiatan Administrasi Keuangan												**12.164.520.417**	**13.380.972.459**		
								Survey Kepuasan Pelayanan Keuangan	80			12.164.520.417	13.380.972.459		
Sub Kegiatan Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN												12.164.520.417	13.380.972.459		
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	95	12.164.520.417	13.380.972.459	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	
Kegiatan Administrasi umum												**2.089.875.000**	**2.298.862.500**		
								survey kepuasan pelayanan umum (angka)	80			2.089.875.000	2.298.862.500		
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa surat menyurat												648.200.000	713.020.000		
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah Surat/Barang yang dikirim	75	2.500.000	2.750.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah Materai	800	4.800.000	5.280.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah tenaga Pramubakti yang dipekerjakan	17	640.900.000	704.990.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
			Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik												128.000.000	140.800.000		
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Tagihan rekening listrik, air, telepon/fax, tv kabel, virtual meeting yang dibayarkan	12	128.000.000	140.800.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	
Sub Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor												316.600.000	348.260.000		
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12	15.000.000	16.500.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah tenaga keamanan/satpam kantor yang dipekerjakan	8	301.600.000	331.760.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	
Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/oprasional												121.600.000	133.760.000		
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah kendaraan oprasional yang dipelihara	12	8.500.000	9.350.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah tenaga sopir yang dipekerjakan	3	113.100.000	124.410.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	
Sub Kegiatan Penyediaan jasa Administrasi Keuangan												137.895.000	151.684.500		
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah pengelola administrasi keuangan yang bekerja	18	137.895.000	151.684.500	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	
Sub Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor												355.800.000	391.380.000		
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah tenaga kebersihan yang dipekerjakan	9	339.300.000	373.230.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah jenis bahan dan Peralatan kebersihan kantor yang tersedia	10	16.500.000	18.150.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	
Sub Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor												35.240.000	38.764.000		
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah jenis ATK yang dibeli	10	35.240.000	38.764.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	
Sub Kegiatan Penyediaan barang cetak dan penggandaan												15.000.000	16.500.000		
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					jumlah barang cetak	50	4.500.000	4.950.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					jumlah penggandaan	30000	9.000.000	9.900.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					jumlah penjilidan	20	1.500.000	1.650.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	
Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor												5.000.000	5.500.000		
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia	10	5.000.000	5.500.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	
Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan												7.000.000	7.700.000		
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan yang tersedia	108	7.000.000	7.700.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	
Sub Kegiatan Penyediaan makan dan minum												26.000.000	28.600.000		

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
			Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah makan dan minum Tamu yang tersedia	100	10.000.000	11.000.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah makan dan minum rapat yang tersedia	800	16.000.000	17.600.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	
Sub Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah												170.000.000	187.000.000		
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dilaksanakan	19	100.000.000	110.000.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah dilaksanakan	48	70.000.000	77.000.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	
Sub Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor												10.000.000	11.000.000		
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan	1	10.000.000	11.000.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	
Sub Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor												24.000.000	26.400.000		
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1	24.000.000	26.400.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	
Sub Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/Oprasional												85.140.000	93.654.000		
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah Kendaraan oprasional yang dipelihara	4	85.140.000	93.654.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	
Sub Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor												2.900.000	3.190.000		
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	2	2.900.000	3.190.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	
Sub Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor												1.500.000	1.650.000		
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	1	500.000	550.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah BBM Genset	125	1.000.000	1.100.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	
Kegiatan Administrasi umum (BPSMB)												**176.336.516**	**193.970.168**		
												176.336.516	193.970.168		
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa surat menyurat												1.000.000	1.100.000		
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah Surat/Barang yang dikirim	30	400.000	440.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah Materai	100	600.000	660.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	
Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik												58.800.000	64.680.000		
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Tagihan rekening listrik, air, telepon/fax, tv kabel, virtual meeting yang dibayarkan	12	58.800.000	64.680.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	
Sub Kegiatan Penyediaan jasa Administrasi keuangan												20.035.000	22.038.500		
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah pengelola administrasi keuangan yang bekerja	5	20.035.000	22.038.500	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
			Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
Sub Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja												2.000.000	2.200.000		
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	1	2.000.000	2.200.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	
Sub Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor												8.500.000	9.350.000		
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah jenis ATK yang dibeli	10	8.500.000	9.350.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	
Sub Kegiatan Penyediaan barang cetak dan penggandaan												5.600.000	6.160.000		
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					jumlah barang cetak	2	2.000.000	2.200.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah penggandaan	30.000	3.600.000	3.960.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	
Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor												1.500.000	1.650.000		
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia	10	1.500.000	1.650.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	
Sub Kegiatan Penyediaan makan dan minum												6.000.000	6.600.000		
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah makan dan minum Tamu yang tersedia	20	2.000.000	2.200.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah makan dan minum rapat yang tersedia	80	4.000.000	4.400.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	
Sub Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah												30.611.516	33.672.668		
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dilaksanakan	3	15.570.000	17.127.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah dilaksanakan	12	15.041.516	16.545.668	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	
Sub Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/Oprasional												37.340.000	41.074.000		
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah kendaraan oprasional yang dipelihara	3	37.340.000	41.074.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor												4.950.000	5.445.000		
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan								Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	7	4.950.000	5.445.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	
Kegiatan Administrasi umum (RPK)												**430.897.612**	**473.987.373**		
												430.897.612	473.987.373		
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa surat menyurat												6.750.000	7.425.000		
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah Surat/Barang yang dikirim	200	5.550.000	6.105.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah Materai	200	1.200.000	1.320.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	
Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik												75.600.000	83.160.000		
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Tagihan rekening listrik, air, telepon/fax, tv kabel, virtual meeting yang dibayarkan	12	75.600.000	83.160.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	
Sub Kegiatan Penyediaan jasa Administrasi keuangan												15.750.000	17.325.000		

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
			Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah pengelola administrasi keuangan yang bekerja	5	15.750.000	17.325.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor												2.500.000	2.750.000		
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah jenis bahan dan Peralatan kebersihan kantor yang tersedia	10	2.500.000	2.750.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	
Sub Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor												15.000.000	16.500.000		
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah jenis ATK yang dibeli	10	15.000.000	16.500.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	
Sub Kegiatan Penyediaan barang cetak dan penggandaan												8.000.000	8.800.000		
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					jumlah barang cetak	5	5.000.000	5.500.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah penggandaan	10000	3.000.000	3.300.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	
Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor												5.000.000	5.500.000		
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia	10	5.000.000	5.500.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	
Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor												129.300.000	142.230.000		
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	7	129.300.000	142.230.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	
Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan												750.000	825.000		
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan yang tersedia	24	750.000	825.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	
Sub Kegiatan Penyediaan makan dan minum												4.500.000	4.950.000		
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah makan dan minum Tamu yang tersedia	25	2.500.000	2.750.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah makan dan minum rapat yang tersedia	80	2.000.000	2.200.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	
Sub Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah												90.938.000	100.031.800		
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dilaksanakan	10	52.850.000	58.135.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah dilaksanakan	24	38.088.000	41.896.800	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	
Sub Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor												44.259.612	48.685.573		
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					jumlah gedung kantor yang dipelihara	1	44.259.612	48.685.573	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	
Sub Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/oprasional												27.400.000	30.140.000		

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
			Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah kendaraan oprasional yang dipelihara	1	27.400.000	30.140.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor												5.150.000	5.665.000		
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	4	5.150.000	5.665.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	
Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (BPSMB)												**31.165.303**	**34.281.833**		
												31.165.303	34.281.833		
Sub Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal												31.165.303	34.281.833		
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan								jumlah pegawai ASN yang ikut pendidikan dan pelatihan formal	18	31.165.303	34.281.833	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	
Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (RPK)												**42.015.000**	**46.216.500**		
												42.015.000	46.216.500		
Sub Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal												42.015.000	46.216.500		
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan								jumlah pegawai ASN yang ikut pendidikan dan pelatihan formal	4	42.015.000	46.216.500	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN												**84.678.000**	**93.145.800**		
						Persentase Ketaatan Perdagangan Bahan Berbahaya	**1,00**					**84.678.000**	**93.145.800**		
Kegiatan Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar												**84.678.000**	**93.145.800**		
								Jumlah Pelaku Usaha Perdagangan B2 yang memiliki Perizinan Perdagangan	3			84.678.000	93.145.800		
Sub Kegiatan Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya												44.114.000	48.525.400		
		Meningkatkan nilai tambah sektor industri pengolahan dan perdagangan	Pangkalpinang, Bangka dan Belitung	Gabek, Sungailiat dan Tanjung Pandan	Air Salemba, Srimenanti, Tanjung Pandan					Jumlah Distributor/ Pengecer	3	44.114.000	48.525.400	Meningkatkan nilai tambah sektor industri pengolahan dan perdagangan	
Sub Kegiatan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya												40.564.000	44.620.400		
		Meningkatkan nilai tambah sektor industri pengolahan dan perdagangan	Pangkalpinang, Bangka, Bateng, Babar, Basel, Belitung dan Beltim	Girimaya, Sungailiat, Koba, Muntok, Toboali, Tanjungpandan, Manggar	Pasir Padi,Nelayan,Sungai Daeng, Koba, Sukadamai, Tanjung Pandan, Padang					Jumlah Produk bahan berbahaya	1	40.564.000	44.620.400	Meningkatkan nilai tambah sektor industri pengolahan dan perdagangan	
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN												**247.846.000**	**272.630.600**		
						Persentase Barang terdistribusi	**60**					**247.846.000**	**272.630.600**		
Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta pasar lelang komoditas												**247.846.000**	**272.630.600**		
								Jumlah Komoditas yang dikelola (TON)	200			247.846.000	272.630.600		
Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi												247.846.000	272.630.600		
	Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Menurunkan tingkat kemiskinan	Bangka,Tengah, Bangka, Bangka Selatan	Pangkalan Baru, Puding , Toboali	Mangkol, Puding Besar, Toboali					Jumlah pengelolaan yang dibina (lokasi)	3	247.846.000	272.630.600	Menurunkan tingkat kemiskinan	

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
			Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING												**543.625.000**	**597.987.500**		
						Persentase ketersedian Bapokting	**80**					**392.199.000**	**431.418.900**		
Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi												**127.966.000**	**140.762.600**		
								Jumlah Ketersediaan Barang Kebutuhan pokok dan barang Penting (jenis)	18			127.966.000	140.762.600		
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor												69.408.000	76.348.800		
		Meningkatkan nilai tambah sektor industri pengolahan dan perdagangan	pangkalpinang, bangka tengah,bangka, bangka selatan,bangka barat, belitung, belitung timur	bukit intan, koba, sungailiat, toboali, mentok, tanjung pandan, manggar	air itam, koba, sungailiat, toboali, sungai baru, tanjung pendam, manggar					Jumlah Distributor/ Sub Distributor Barang Kebutuhan Pokok	8	69.408.000	76.348.800	Meningkatkan nilai tambah sektor industri pengolahan dan perdagangan	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor												58.558.000	64.413.800		
		Meningkatkan nilai tambah sektor industri pengolahan dan perdagangan	pangkalpinang, bangka tengah,bangka, bangka selatan,bangka barat, belitung, belitung timur	bukit intan, koba, sungailiat, toboali, mentok, tanjung pandan, manggar	air itam, koba, sungailiat, toboali, sungai baru, tanjung pendam, manggar					Jumlah Distributor/ Sub Distributor Barang Penting	6	58.558.000	64.413.800	Meningkatkan nilai tambah sektor industri pengolahan dan perdagangan	
Kegiatan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kabupaten/ kota yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan												**264.233.000**	**290.656.300**		
								Koevisien Variasi	<11			264.233.000	290.656.300		
Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota												82.983.000	91.281.300		
	Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Menurunkan tingkat kemiskinan	pangkalpinang, bangka tengah,bangka, bangka selatan,bangka barat, belitung, belitung timur	bukit intan, koba, sungailiat, toboali, mentok, tanjung pandan, manggar	air itam, koba, sungailiat, toboali, sungai baru, tanjung pendam, manggar					Jumlah Pemantauan harga dan stok	84	82.983.000	91.281.300	Menurunkan tingkat kemiskinan	
Sub Kegiatan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi												181.250.000	199.375.000		
	Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Menurunkan tingkat kemiskinan	pangkalpinang, bangka tengah,bangka, bangka selatan,bangka barat, belitung, belitung timur	bukit intan, koba, sungailiat, toboali, mentok, tanjung pandan, manggar	air itam, koba, sungailiat, toboali, sungai baru, tanjung pendam, manggar					Jumlah Operasi Pasar	14	181.250.000	199.375.000	Menurunkan tingkat kemiskinan	
						Persentase Tersalurkannya Pupuk Bersubsidi	**70%**					**151.426.000**	**166.568.600**		
Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya												**151.426.000**	**166.568.600**		
								Jumlah Pelaku Usaha yang diawasi	11			151.426.000	166.568.600		
Sub Kegiatan Pemeriksaan Dokumen Perizinan Kegiatan Distribusi												41.809.000	45.989.900		

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
			Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
		Meningkatkan nilai tambah sektor industri pengolahan dan perdagangan	pangkalpinang, bangka tengah,bangka, bangka selatan,bangka barat, belitung, belitung timur	bukit intan, koba, sungailiat, toboali, mentok, tanjung pandan, manggar	air itam, koba, sungailiat, toboali, sungai baru, tanjung pendam, manggar					Jumlah Pemeriksaan (dokumen)	11	41.809.000	45.989.900	Meningkatkan nilai tambah sektor industri pengolahan dan perdagangan	
Sub Kegiatan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi												37.589.000	41.347.900		
		Meningkatkan nilai tambah sektor industri pengolahan dan perdagangan	pangkalpinang, bangka tengah,bangka, bangka selatan,bangka barat, belitung, belitung timur	bukit intan, koba, sungailiat, toboali, mentok, tanjung pandan, manggar	air itam, koba, sungailiat, toboali, sungai baru, tanjung pendam, manggar					Jumlah Pengawasan (laporan)	2	37.589.000	41.347.900	Meningkatkan nilai tambah sektor industri pengolahan dan perdagangan	
Sub Kegiatan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk bersubsidi												35.589.000	39.147.900		
		Meningkatkan nilai tambah sektor industri pengolahan dan perdagangan	pangkalpinang, bangka tengah,bangka, bangka selatan,bangka barat, belitung, belitung timur	bukit intan, koba, sungailiat, toboali, mentok, tanjung pandan, manggar	air itam, koba, sungailiat, toboali, sungai baru, tanjung pendam, manggar					Jumlah Distributor/pengecer Pupuk bersubsidi yang diawasi	11	35.589.000	39.147.900	Meningkatkan nilai tambah sektor industri pengolahan dan perdagangan	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida												36.439.000	40.082.900		
		Meningkatkan nilai tambah sektor industri pengolahan dan perdagangan	pangkalpinang, bangka tengah,bangka, bangka selatan,bangka barat, belitung, belitung timur	bukit intan, koba, sungailiat, toboali, mentok, tanjung pandan, manggar	air itam, koba, sungailiat, toboali, sungai baru, tanjung pendam, manggar					Jumlah Pengawasan (laporan)	2	36.439.000	40.082.900	Meningkatkan nilai tambah sektor industri pengolahan dan perdagangan	
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR												**580.338.672**	**638.372.539**		
						Nilai Ekspor Produk Non Migas (USD juta)	**900**					**580.338.672**	**638.372.539**		
Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota												**416.306.500**	**457.937.150**		
			Jakarta, Asia, Eropa	Jakarta, Asia, Eropa	Jakarta, Asia, Eropa			Jumlah Akses Pasar Ekspor	3			416.306.500	457.937.150		
Sub Kegiatan Pameran Dagang Lokal												67.990.000	74.789.000		
		Meningkatkan nilai tambah sektor industri pengolahan dan perdagangan	Pangkalpinang, Bangka Tengah	Pangkalpinang, Bangka Tengah	Pangkalpinang, Bangka Tengah					Jumlah Produk Siap Ekspor yang dipamerkan	2	67.990.000	74.789.000	Meningkatkan nilai tambah sektor industri pengolahan dan perdagangan	
Sub Kegiatan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan												348.316.500	383.148.150		
		Meningkatkan nilai tambah sektor industri pengolahan dan perdagangan	Jakarta, Asia	Jakarta, Asia	Jakarta, Asia					Jumlah Permintaan Produk Dagang	6	348.316.500	383.148.150	Meningkatkan nilai tambah sektor industri pengolahan dan perdagangan	
												164.032.172	**180.435.389**		
			Pangkalpinang, Belitung	Pangkalpinang, Belitung	Pangkalpinang, Belitung			Jumlah SDM perdagangan yang terlatih	45			164.032.172	180.435.389		
Sub Kegiatan Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor												164.032.172	180.435.389		
		Meningkatkan nilai tambah sektor industri pengolahan dan perdagangan	Pangkalpinang, Belitung	Pangkalpinang, Belitung	Pangkalpinang, Belitung					Jumlah Eksportir/Calon Eksportir	45	164.032.172	180.435.389	Meningkatkan nilai tambah sektor industri pengolahan dan perdagangan	
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN												**813.191.533**	**894.510.686**		
						Indeks Keberdayaan Konsumen	**40 (Mampu)**					**501.038.500**	**551.142.350**		
Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota												**96.550.000**	**106.205.000**		

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
			Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
								Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen yang terbentuk	3			96.550.000	106.205.000		
Sub Kegiatan Peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen												96.550.000	106.205.000		
		Meningkatkan nilai tambah sektor industri pengolahan dan perdagangan	Bangka, Belitung, Belitung Timur	Sungailiat, Tanjungpandan, Manggar	Bukit Betung, Kota, Desa Padang					Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen yang beroperasional	3	96.550.000	106.205.000	Meningkatkan nilai tambah sektor industri pengolahan dan perdagangan	
Kegiatan Pengembangan Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen												**215.353.500**	**236.888.850**		
								Jumlah Konsumen yang teredukasi	440			215.353.500	236.888.850		
Sub Kegiatan Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen												120.801.500	132.881.650		
		Meningkatkan nilai tambah sektor industri pengolahan dan perdagangan	Pangkalpinang, Bangka, Bangka Tengah, Bangka Barat, Bangka Selatan, Belitung, Belitung Timur	Girimaya, Gerunggang, Taman Sari, Sungailiat, Pangkalan Baru, Koba, Muntok, Toboali, Tanjungpandan, Manggar	Pasar Padi, Taman Bunga, Genas, Sungailiat, Dul, Berok, Tanjung, Toboali, Kota, Desa Baru					Jumlah Responden	400	120.801.500	132.881.650	Meningkatkan nilai tambah sektor industri pengolahan dan perdagangan	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen												94.552.000	104.007.200		
		Meningkatkan nilai tambah sektor industri pengolahan dan perdagangan	Pangkalpinang, Bangka, Bangka Tengah, Bangka Barat, Bangka Selatan, Belitung, Belitung Timur	Girimaya, Gerunggang, Taman Sari, Sungailiat, Pangkalan Baru, Koba, Muntok, Toboali, Tanjungpandan, Manggar	Pasar Padi, Taman Bunga, Genas, Sungailiat, Dul, Berok, Tanjung, Toboali, Kota, Desa Baru					Jumlah Pengaduan (Informasi, Pertanyaan dan Pengaduan)	40	94.552.000	104.007.200	Meningkatkan nilai tambah sektor industri pengolahan dan perdagangan	
Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota												**189.135.000**	**208.048.500**		
								Persentase Barang Beredar dan Jasa yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan	78%			189.135.000	208.048.500		
Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa Sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen												189.135.000	208.048.500		
		Meningkatkan nilai tambah sektor industri pengolahan dan perdagangan	Pangkalpinang	Taman Sari	Rawa Bangun					Jumlah Jenis Barang yang diawasi	10	189.135.000	208.048.500	Meningkatkan nilai tambah sektor industri pengolahan dan perdagangan	
Kegiatan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota						**Persentase Layanan Terstandarisasi**	**75%**					**312.153.033**	**343.368.336**		
								Persentase Produk dan Peralatan yang tersertifikasi	90			312.153.033	343.368.336		
Sub Kegiatan Verifikasi Mutu Produk												124.701.213	137.171.334		
		Meningkatkan nilai tambah sektor industri pengolahan dan perdagangan	Kota Pangkalpinang	Rangkui	Keramat					Jumlah komoditi yang di verifikasi	3	124.701.213	137.171.334	Meningkatkan nilai tambah sektor industri pengolahan dan perdagangan	
Sub Kegiatan Pengembangan Layanan Pengujian												93.525.910	102.878.501		
		Meningkatkan nilai tambah sektor industri pengolahan dan perdagangan	Kota Pangkalpinang	Rangkui	Keramat					Jumlah Sample yang di uji	200	93.525.910	102.878.501	Meningkatkan nilai tambah sektor industri pengolahan dan perdagangan	
Sub Kegiatan Pengembangan Layanan Kalibrasi												93.925.910	103.318.501		

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
			Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
		Meningkatkan nilai tambah sektor industri pengolahan dan perdagangan	Kota Pangkalpinang	Rangkui	Keramat					Jumlah Alat yang dikalibrasi	5	93.925.910	103.318.501	Meningkatkan nilai tambah sektor industri pengolahan dan perdagangan	
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI												**247.846.000**	**272.630.600**		
						Persentase Pemasaran Produk Dalam Negeri	**40**					**247.846.000**	**272.630.600**		
Kegiatan Pelaksanaan Promosi Produk dalam Negeri												**141.051.000**	**155.156.100**		
			1.Tangerang	1. Kec.Pagedangan Serpong Tangerang, Prov. Banten	1. Kel. Pagedangan Kec.Pagedangan Serpong Tangerang, Prov. Banten			Jumlah Permintaan Dagang	4			141.051.000	155.156.100		
Sub Kegiatan Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Provinsi												141.051.000	155.156.100		
		Meningkatkan nilai tambah sektor industri pengolahan dan perdagangan	1.Tangerang	1. Kec.Pagedangan Serpong Tangerang, Prov. Banten	1. Kel. Pagedangan Kec.Pagedangan Serpong Tangerang, Prov. Banten					Jumlah Produk yang dipromosikan melalui permintaan dagang	8	141.051.000	155.156.100	Meningkatkan nilai tambah sektor industri pengolahan dan perdagangan	
Kegiatan Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri												**106.795.000**	**117.474.500**		
			Pangkalpinang	Rangkui	Keramat			Jumlah Produk yang Siap dipasarkan	20			106.795.000	117.474.500		
Sub Kegiatan Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Provinsi												106.795.000	117.474.500		
		Meningkatkan nilai tambah sektor industri pengolahan dan perdagangan	Pangkalpinang	Rangkui	Keramat					Jumlah Fasilitasi Produk	20	106.795.000	117.474.500	Meningkatkan nilai tambah sektor industri pengolahan dan perdagangan	
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI												**2.469.794.500**	**2.716.773.950**		
						Persentase pertumbuhan jumlah industri	**5%**					**2.469.794.500**	**2.716.773.950**		
Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana pembangunan Industri Provinsi												**2.469.794.500**	**2.716.773.950**		
								Persentase pertumbuhan tenaga kerja industri	2%			2.469.794.500	2.716.773.950		
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan dalam Rangka Mendukung Penguatan Industri Nasional dan Perwilayahan Industri												152.120.500	167.332.550		
	Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Meningkatkan nilai tambah sektor industri pengolahan dan perdagangan	- Pangkalpinang, Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Belitung, Kabupaten	-Taman Sari, Sungailiat, Koba, Mentok, Toboali, Tanjung Pandan, Manggar	- Gedung Nasional, Sungailiat, Koba, Sungai Daeng, Toboali, Tanjung Pandan, Buku Limau					Jumlah IKM OVOP yang dibina	26	152.120.500	167.332.550	Meningkatkan nilai tambah sektor industri pengolahan dan perdagangan	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri												447.832.000	492.615.200		
	Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Meningkatkan nilai tambah sektor industri pengolahan dan perdagangan	- Uji Product : Bogor, HKI: Jakarta	- Uji Product : Bogor, HKI: Jakarta	- Uji Product : Bogor, HKI: Jakarta					Jumlah Produk Industri yang bersertifikat Uji Product dan HKI	200	447.832.000	492.615.200	Meningkatkan nilai tambah sektor industri pengolahan dan perdagangan	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri												188.538.000	207.391.800		
	Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Meningkatkan nilai tambah sektor industri pengolahan dan perdagangan	- Bangka, Bangka Tengah, Belitung Timur	- Sungailiat, Koba, Manggar	- Sungailiat, Koba, Baru					Jumlah Kelompok Industri yang terfasilitasi Teknologi Tepat Guna	2	188.538.000	207.391.800	Meningkatkan nilai tambah sektor industri pengolahan dan perdagangan	

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
			Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat												1.035.834.000	1.139.417.400		
	Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Meningkatkan nilai tambah sektor industri pengolahan dan perdagangan	- Pangkalpinang, Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Belitung, Kabupaten Belitung Timur, -	-Taman Sari, Sungailiat, Koba, Mentok, Toboali, Tanjung Pandan, Manggar, Jakarta	- Gedung Nasional, Sungailiat, Koba, Sungai Daeng, Toboali, Tanjung Pandan, Buku Limau, Jakarta					Jumlah Pelaku Industri yang terfasilitasi Dekranasda	350	760.702.000	836.772.200	Meningkatkan nilai tambah sektor industri pengolahan dan perdagangan	
	Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Meningkatkan nilai tambah sektor industri pengolahan dan perdagangan	- Pangkalpinang, Bangka, Bangka Tengah, YogyaKarta, Jawa Tengah.	-Taman Sari, Sungailiat, Koba, Yogyakarta, Jawa Tengah	-Taman Sari, Sungailiat, Koba.Yogyakarta, Jawa Tengah					Jumlah SDM Indutsri yang terlatih	80	275.132.000	302.645.200	Meningkatkan nilai tambah sektor industri pengolahan dan perdagangan	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Rumah												645.470.000	710.017.000		
	Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Meningkatkan nilai tambah sektor industri pengolahan dan perdagangan	Pangkalpinang	Rangkui	Keramat					Jumlah Fasilitasi Produk	200	645.470.000	710.017.000	Meningkatkan nilai tambah sektor industri pengolahan dan perdagangan	
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI												**190.111.000**	**209.122.100**		
						Persentase Industri yang sesuai Izin Usaha Industri	**30%**					**190.111.000**	**209.122.100**		
Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi												**190.111.000**	**209.122.100**		
								Jumlah industri yg dipantau	55			190.111.000	209.122.100		
Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik												89.013.000	97.914.300		
			Bangka, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Bangka Barat, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpinang	Sungai liat (Bangka), Lubuk Besar (Bangka Tengah), Tukak Sadai (Bangka Selatan), Muntok (Bangka Barat), Badau (Belitung), Manggar (Belitung Timur), Pangkal balam (Pangkalpinang)	Sungai liat (Sungai liat), Batu Beriga (Lubuk Besar), Sadai (Tukak Sadai), Air Putih (Muntok), Pengantungan (Badau), Air Kelik (Manggar), Ketapang (Pangkal balam)					Jumlah komitmen IUI, IUPI yang dipantau	5	89.013.000	97.914.300		
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan provinsi												101.098.000	111.207.800		

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
			Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
			Bangka, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Bangka Barat, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpinang	Bakam, Belinyu, Puding, Mendo Barat,Sungai liat (Bangka), Pangkalan Baru, Koba (Bangka Tengah), Simpang Rimba (Bangka Selatan), Simpang Teritip, Tempilang, Kelapa, Muntok (Bangka Barat), Membalong, Badau, Sijuk, (Belitung), Manggar, Dendang, Kelapa Kampit (Belitung Timur), Pangkal balam, Bukit Intan (Pangkalpinang)	Mabat (Bakam), Gunung Muda (Belinyu), Puding (Puding Besar), Cekong Abang (Mendo Barat),Sungai liat (Sungai liat), Air Mesu (Pangkalan Baru), Arung Dalam (Koba), Malik (Simpang Rimba), Terentang (Simpang Teritip), Tempilang (Tempilang), Dendang (Kelapa), air Belo (Muntok), Kembiri (Membalong),Sungai Samak, Air Batu Buding (Badau), air Kelik (Manggar), Jangkang (Dendang), Buding, Senyubuk (Kelapa Kampit), Ketapang (Pangkal balam), Semabung lama(Bukit Intan)					Jumlah IUI yang diawasi	50	101.098.000	111.207.800		
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL												**69.564.000**	**76.520.400**		
						Persentase data informasi industri di SIINAS	**70**					**69.564.000**	**76.520.400**		
Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)												**69.564.000**	**76.520.400**		
								Persentase Industri yang menyampaikan informasi industri secara lengkap	60			69.564.000	76.520.400		
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Sistem Informasi Industri												69.564.000	76.520.400		
		Meningkatkan nilai tambah sektor industri pengolahan dan perdagangan	Bangka, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Bangka Barat, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpinang	Sungai liat (Bangka), Lubuk Besar (Bangka Tengah), Tukak Sadai (Bangka Selatan), Muntok (Bangka Barat), Badau (Belitung), Manggar (Belitung Timur), Pangkal balam (Pangkalpinang)	Sungai liat (Sungai liat), Batu Beriga (Lubuk Besar), Sadai (Tukak Sadai), Air Putih (Muntok), Pengantungan (Badau), Air Kelik (Manggar), Ketapang (Pangkal balam)					Jumlah Industri Yang Terdaftar di SINAS	25	69.564.000	76.520.400	Meningkatkan nilai tambah sektor industri pengolahan dan perdagangan	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Bangka Belitung
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.07.0.00.0.00.00.00 DINAS TENAGA KERJA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Sub Unit Organisasi : 2.07.0.00.0.00.00.00 DINAS TENGA KERJA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kabupaten/Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
					PROGRAM/KEGIATAN RUTIN												18.254.673.308	41.755.748.608		
5	05	01			Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Nilai Sakip PD (pakai angka)	77					18.254.673.308	20.992.874.304		
5	05	01	1.01		Kegiatan : Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
															Jumlah dok perencanaan dan evaluasi kinerja	2 dokumen	200.000.000	230.000.000		
5	05	01	1.01	01	Sub Kegiatan : Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah															
													Jumlah dok perencanaan Renstra/Renja PD	2 dokumen			39.750.000	200.000.000		
5	05	01	1.01	02	Sub Kegiatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan															
													Jumlah RKA/DPA yang tersusun	2 dokumen			11.250.000	35.000.000		
5	05	01	1.01	03	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah															
													Jumlah dok evaluasi PD (dalev)	4 dokumen			27.000.000	150.000.000		
5	05	01	1.01	04	Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah															
													jumlah kesepakatan Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan PD	1 laporan			107.450.000	150.000.000		
5	05	01	1.01	05	Sub Kegiatan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah															
5	05	01	1.01	06														120.000.000		
5	05	01	1.01	07														120.000.000		
5	05	01	1.01	08														120.000.000		
													Jumlah dokumen Evalusi kinerja PD	3 dokumen			14.550.000	120.000.000		
																		20.762.874.304		
5	05	01	1.02		Kegiatan 2 : Administrasi Keuangan							95			Survey kepuasan pelayanan keuangan	100	14.154.673.308	16.277.874.304		
5	05	01	1.02	01	Sub Kegaiatan : Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN															
													jumlah ASN yang terima gaji dan tunjangan				14.154.673.308	11.000.000.000		
5	05	01	1.03		Kegiatan 3 : Administrasi umum										survey kepuasan pelayanan umum	100	3.900.000.000	4.485.000.000		
5	05	01	1.03	01	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa surat menyurat															
													Jumlah Surat/Barang yang dikirim (tahun)				2.447.957			
													Jumlah Materai				4.950.000	5.692.500		
5	05	01	1.03	02	Sub Kegiatan :Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik															
													Jumlah tagihan listrik (tahun)				640.000.000	736.000.000		
													Jumlah tagihan komunikasi (tahun)				48.000.000	55.200.000		
													Jumlah tagihan PUBLIKASI				4.765.000	5.479.750		
5	05	01	1.03	03	Sub Kegiatan : Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor													-		
													jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor (tahun)				38.000.000	43.700.000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kabupaten/Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
													Jumlah tenaga keamanan/satpam kantor (orang)				527.800.000	606.970.000		
5	05	01	1.03	04	Sub Kegiatan : Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS								Jumlah pegawai non PNS yang memiliki jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan (orang)					-		
													Jumlah pegawai non PNS yang memiliki jaminan ketenagakerjaan (orang)					-		
													Jumlah tenaga keamanan/satpam kantor (orang)					-		
5	05	01	1.03	06	Sub Kegiatan : Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/oprasional													-		
													Jumlah tenaga sopir (orang)				75.400.000	86.710.000		
5	05	01	1.03	07	Sub Kegiatan : Penyediaan jasa Administrasi keuangan													-		
													Jumlah pengelola administrasi keuangan (bulan)				73.080.000	84.042.000		
													Jumlah Pramubakti				1.168.700.000	1.344.005.000		
5	05	01	1.03		Sub Kegiatan : Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran								Jumlah pelayanan administrasi perkantoran					-		
5	05	01	1.03	08	Sub Kegiatan : Penyediaan jasa kebersihan kantor													-		
													Jumlah tenaga kebersihan/pramubakti				640.900.000	737.035.000		
													Jumlah jenis bahan dan peralatan kebersihan kantor				36.000.000	41.400.000		
5	05	01	1.03	10	Sub Kegiatan : Penyediaan alat tulis kantor															
													jumlah jenis ATK yang dibeli				60.000.000	69.000.000		
5	05	01	1.03	11	Sub Kegiatan : Penyediaan barang cetak dan penggandaan															
													jumlah barang cetak				12.000.000	13.800.000		
													Jumlah penggandaan				20.000.000	23.000.000		
5	05	01	1.03	12	Sub Kegiatan : Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor															
													Jumlah komponen instalasi listrik				22.882.500	26.314.875		
5	05	01	1.03	13	Sub Kegiatan : Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor													-		
													jumlah jenis peralatan kantor					-		
													jumlah jenis perlengkapan kantor					-		
													jumlah komputer/laptop					-		
													jumlah printer					-		
													jumlah scanner					-		
5	05	01	1.03	14	Sub Kegiatan : Penyediaan peralatan rumah tangga															
													Jumlah peralatan rumah tangga					-		
5	05	01	1.03	15	Sub Kegiatan : Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan													-		
													Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan				12.592.500	14.481.375		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kabupaten/Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
5	05	01	1.03	16	Sub Kegiatan : Penyediaan bahan logistik kantor								jumlah bahan logistik kantor (tahun)				14.350.000	16.502.500		
5	05	01	1.03	17	Sub Kegiatan : Penyediaan makan dan minum															
													Jumlah makan dan minum Tamu (tahun)				5.000.000	5.750.000		
													Jumlah makan dan minum rapat (tahun)				10.000.000	11.500.000		
5	05	01	1.03	18	Sub Kegiatan : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah													-		
													jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah (tahun)				180.000.000	207.000.000		
													Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah (tahun)				85.452.500	98.270.375		
5	05	01	1.03	23	Sub Kegiatan : Pengadaan perlengkapan gedung kantor													-		
													jumlah perlengkapan gedung kantor					-		
5	05	01	1.03	25	Sub Kegiatan : Pengadaan peralatan gedung kantor															
													Jumlah peralatan gedung kantor					-		
5	05	01	1.03	29	Sub Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor													-		
													jumlah gedung kantor yang dipelihara				30.669.543	35.269.974		
5	05	01	1.03	31	Sub Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/Oprasional													-		
													Jumlah kendaraan oprasional yang				116.090.000	133.503.500		
													Jumlah BBM kendaraan				30.720.000	35.328.000		
5	05	01	1.03	33	Sub Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor															
													Jumlah perlengkapan gedung kantor yang					-		
5	05	01	1.03	35	Sub Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor													-		
5	05		1.03	35	Sub Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor															
													jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara				40.200.000	46.230.000		
													Jumlah BBM Genset					-		
5	**05**	**01**	**1.04**		**Kegiatan : Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**												**survey kepuasan pelayanan kepegawaian (angka)**	**95**	**-**	**-**		
5	05	01	1.04	01	Sub Kegiatan : Pengadaan mesin/kartu absensi								Jumlah mesin/kartu absensi yang diadakan	2				-		
5	05	01	1.04	02	Sub Kegiatan : Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapanya								Jumlah Pakaian dinas beserta perlengkapannya yang	200				-		
5	05	01	1.04	04	Sub Kegiatan : Pengadaan pakaian kopri								jumlah pakaian kopri yang diadakan	100				-		
5	05	01	1.04	05	Sub Kegiatan : Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu								jumlah pakaian khusus hari2 tertentu yang diadakan	100				-		
5	05	01	1.04	09	Sub Kegiatan : Pendidikan dan pelatihan formal								jumlah pegawai yang ikut pendidikan dan pelatihan formal	60				250.000.000		
5	05	01	1.04	10	Sub Kegiatan : Sosialisasi peraturan perundang-undangan								Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan	100				120.000.000		
2					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**												**2.524.079.938**	**2.784.241.929**		
2					**(URUSAN) Tenaga Kerja**												**2.421.079.938**	**2.784.241.929**		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kabupaten/Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2	**07**	**03**			**PROGRAM PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**						**1). Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan pelatihan berdasarkan**	**4%**					**1.217.619.938**	**1.400.262.929**		
											2). Persentase Pelatihan Kerjasama dengan sektor swasta dan instansi pemerintah lainnya untuk penyedia instruktur serta sarana dan prasarana lembaga	**20%**								
											3). Meningkatnya Kompetensi dan Produktivitas	**15 Perusahaan**								
2	**07**	**03**	**1.01**		**Kegiatan 1 : Pelaksanaan Pelatihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi**										1. Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kerja		**1.067.619.938**	**1.227.762.929**		
															2. Jumlah Pencari Kerja Yang Mendapakan Informasi Program					
2	**07**	**03**	**1.01**	**01**	Sub Kegiatan : Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi															
													Jumlah Pedidikan dan pelatihan bagi pencari kerja berdasarkan klaster Kompetensi	20 paket			917.619.938	1.055.262.929		
2	**07**	**03**	**1.01**	**02**	Sub Kegiatan : Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta Untuk Penyediaan Instruktur Serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja															
													Jumlah Kerjasama dengan sektor swasta	5 Kerjasama			150.000.000	172.500.000		
2	**07**	**03**	**1.04**		**Kegiatan :Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi**										**Pengukuran Kinerja Perusahaan dan Kompetensi SDM**	**15 Perusahaan**	**150.000.000**	**172.500.000**		
2	**07**	**03**	**1.04**	01	Sub Kegiatan : Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja															
													Pengukuran Kinerja Perusahaan dan Kompetensi SDM	15 Perusahaan			150.000.000	172.500.000		
																		-		
2	**07**	**04**			**PROGRAM 2: PENEMPATAN TENAGA KERJA**						**Persentase Tenga Kerja Yang Ditempatkan**	**5%**					**250.775.000**	288.391.250		
2	**07**	**04**	1.01		Kegiatan 1: Pelayanan Antar kerja di Daerah Kabupaten/Kota															
															Jumlah SDM Pelayanan Antar Kerja	100 org	130.775.000	150.391.250		
2	**07**	**04**	1.01	01	Sub Kegiatan 1: Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja															
													Jumlah SDM Pelayanan Antar Kerja	30 org			80.775.000	92.891.250		
2	**07**	**04**	1.01	03	Sub Kegiatan 2 : Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja															
													Jumlah Pencarikerja Yang Mendapatkan Penyuluhan dan Binaan	70 org			50.000.000	57.500.000		
2	**07**	04	1.03		Kegiatan 2 : Pengelolaan Informasi Pasar Kerja															
															Jumlah Laporan	7 kab/kota	50.000.000	57.500.000		
2	**07**	04	1.03	02	Sub Kegiatan 2 : Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online															
													jumlah data pencari kerja secara online	2000 org			50.000.000	57.500.000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kabupaten/Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2	07	04	1.50		Kegiatan 2 : Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi															
															Jumlah laporan	7 kab/kota	70.000.000	80.500.000		
2	07	04	1.50	01	Sub Kegiatan 3 : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi															
													Jumlah RPTKA ,Jumlah TKA dan Lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah	80 orang dan 7 Lokasi			70.000.000	80.500.000		
2	07				**Program 3 : HUBUNGAN INDUSTRIAL**						**Persentase perusahaan yang telah memiliki sarana hubungan industrial**	**41,31%**						**454.685.000**	**522.887.750**		
2	07	05			Kegiatan 1 : Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (Satu) Kabupaten/Kota															
2	07	05	1.01	01	Sub kegiatan 1 : Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial								Jumlah Pengesahan Peraturan Perusahaan Yang Terkait dengan Hubungan Industri	42 Perusahaan				-		
2	07	05	1.01	02	Sub kegiatan 2 : Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang Terkait dengan Hubungan Industrial								Jumlah Pendaptaran PKB yang Terkait dengan Hubungan Industri	18 Perusahaab						
															Persentase Perusahaan yang membuat Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja	55 Perusahaan	125.000.000	143.750.000		
2	07	05	1.01	03	Sub Kegiatan 3 : Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja															
													Jumlah Penyelenggaraan Pedataan dan Iformasi Sarana Hubungan Hindusrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	12 Perusahaan			125.000.000			
2	07	05	1.02		Kegiatan 2 : Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi															
2	07	05	1.02	02	sub Kegiatan 1 : Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi								Jumlah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1	49 Perselisihan HI				-		
2	07	05	1.02	03	Sub Kegiatan 2 : Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta non afiliasi								Jumlah Penyelengaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat	5 kpsi / 1 apindo				-		
															Jumlah Permasalahan Hubungan Industrial yang Terselesaikan	55 Perusahaan	159.685.000	183.637.750		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kabupaten/Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2	07	05	1.02	04	Sub Kegiatan 3 : Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi															
													Jumlah Rekomendasi Terkait Permasalahan Ketenagakerjaan di Provinsi Kepulauan	8 Laporan			159.685.000	183.637.750		
2	07	05	1.03		Kegiatan 3 : Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)															
											persentase Pertumbuhan kenaikan UMP dan Pembahasan masalah upah				Penetapan Upah Minimun Provisni	1 Rekomendasi	170.000.000	195.500.000		
2	07	05	1.03	01	Sub Kegiatan 1 : Penetapan Upah Minimum Provinsi															
													Jumlah Rekaomendasi Penetapan Upah Minimun Provinsi (UMP)	1 Rekomendasi			170.000.000	195.500.000		
2	**07**	**06**			**PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**						**Persentase perusahaan yang dilakukan pengawasan ketenagakerjaan**	**61%**					**498.000.000**	**572.700.000**		
2	07	06	1.01		Kegiatan 1 : Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan										persentase pengawasan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan	**16%**	**498.000.000**	**572.700.000**		
2	07	06	1.01	01	Sub Kegiatan 1 : Pengawasan Pelaksana Norma Kerja di Perusahaan															
													Persentase kepatuhan terhadap Norma Kerja di Perusahaan	19%			150.000.000	172.500.000		
2	07	06	1.01	02	Sub Kegiatan 2 : Penegakan Hukum Ketenagakerjaan diperusahaan															
													persentase penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan yang inkrah di pengadilan	80%			186.600.000	214.590.000		
2	07	06	1.01	03	Sub Kegiatan 3 : Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan kerja di perusahaan															
													Persentase Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di	85%			161.400.000	185.610.000		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI																				
3	**32**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**												**103.000.000**			
3	**32**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI**						**Berkembangnya Satuan Kawasan Transmigrasi**	**1 kawasan**					**103.000.000**	**118.450.000**		
3	32	04			Kegiatan 1 : Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan										jumlah SDM dalam rangak pemantapan satuan pemukiman	30 orang	103.000.000	118.450.000		
3	32	04	1.01	01	Sub Kegiatan 1 : Penguatan SDM dalam Rangka Pemantapan Satuan Pemukiman															
													terlaksananya Peningkatan SDM di kawasan transmigrasi	30 orang			103.000.000	118.450.000		
TOTAL																	**20.778.753.246**	**54.534.241.929**		

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2021

Unit Organisasi : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Sub Unit Organisasi : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kabupaten/Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL												11.512.547.950	5.409.032.688		
2	18	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH												9.780.189.150	3.480.070.068		
2	18	1	01:01		KEGIATAN 1 : Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												96.000.000	110.400.000		
2	18	1	01:01	1	SUB KEGIATAN 1 : Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah												15.650.000	17.997.500		
								Pangkalpinang, Belitung dan Luar Daerah	-	-	Nilai Sakip PD	76					1.308.360.000	2.287.118.920		
															Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Dokumen	96.000.000	110.400.000		
													Jumlah Dokumen Perencanaan Renstra/Renja PD	2 Dokumen			15.650.000	17.997.500		
2	18	1	01:01	2	SUB KEGIATAN 2 : Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Dalam Dokumen Perencanaan												8.030.000	9.234.500		
													Jumlah Dokumen DPA/DPPA Yang Tersusun	2 Dokumen			8.030.000	9.234.500		
2	18	1	01:01	3	SUB KEGIATAN 3 : Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah												2.960.000	3.404.000		
													Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi PD	4 Dokumen			2.960.000	3.404.000		
2	18	1	01:01	4	SUB KEGIATAN 4 : Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah												60.075.000	69.086.250		
													Jumlah Dokumen Kesepakatan Koordinasi dan Sinkronisasi	1 Dokumen			60.075.000	69.086.250		
2	18	1	01:01	5	SUB KEGIATAN 5 : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												9.285.000	10.677.750		
													Jumlah Dokumen Evalusi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen			9.285.000	10.677.750		
2	18	1	01:02		KEGIATAN 2 : Adiministrasi Keuangan												7.345.967.282	9.669.053.491		
2	18	1	01:02	1	SUB KEGIATAN 1 : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												7.345.967.282	9.669.053.491		
								Pangkalpinang, Belitung dan Luar Daerah	-	-	Survey Kepuasan Pelayanan Internal	85%								
															Survey Kepuasan Pelayanan Keuangan	85%	7.345.967.282	9.669.053.491		
													Jumlah ASN Yang Menerima Gaji dan Tunjangan	60 Orang			7.345.967.282	9.669.053.491		
2	18	1	01:03		KEGIATAN 3 : Adiministrasi Umum												2.338.221.868	3.099.742.068		
2	18	1	01:03	1	SUB KEGIATAN 1 : Penyediaan Jasa Surat Menyurat												358.800.000	361.725.000		
								Pangkalpinang, Belitung dan Luar Daerah	-	-	Survey Kepuasan Pelayanan Internal	85%								

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kabupaten/Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
															Survey Kepuasan Pelayanan Umum	85%	1.212.360.000	1.906.790.920		
													Jumlah Surat/Barang Yang Dikirim	500 surat/barang			13.200.000	15.180.000		
													Jumlah Materai	1300 lembar			6.300.000	7.245.000		
													Jumlah Tenaga Pramubakti Yang Dipekerjakan	9 orang			339.300.000	339.300.000		
2	18	1	01:03	2	**SUB KEGIATAN 2 : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**												187.200.000	215.280.000		
													Jumlah Bulan Tagihan Rekening Listrik, Air, Telepon/Fax, Tv Kabel, Virtual Meeting Yang Dibayarkan	12 bulan			187.200.000	215.280.000		
2	18	1	01:03	3	**SUB KEGIATAN 3 : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor**												226.200.000	392.683.200		
													Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25 Jenis				166.483.200		
													Jumlah Tenaga Keamanan/Satpam Kantor	6 orang			226.200.000	226200000		
2	18	1	01:03	6	**SUB KEGIATAN 6 : Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional**												119.000.000	119.885.000		
													Jumlah Kendaraan Operasional Yang Dipelihara	7 Unit			5.900.000	6.785.000		
													Jumlah Tenaga Sopir Yang Dipekerjakan	3 orang			113.100.000	113.100.000		
2	18	1	01:03	7	**SUB KEGIATAN 7 : Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan**												122.650.000	141.047.500		
													Jumlah Pengelola Administrasi Keuangan Yang Bekerja	22 orang			122.650.000	141.047.500		
2	18	1	01:03	8	**SUB KEGIATAN 8 : Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor**												314.400.000	321.975.000		
													Jumlah Tenaga Kebersihan Yang Dipekerjakan	7 orang			263.900.000	263.900.000		
													Jumlah Jenis Bahan dan Peralatan Kebersihan Kantor Yang Tersedia	100 jenis			50.500.000	58.075.000		
2	18	1	01:03	9	**SUB KEGIATAN 9 : Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja**												45.000.000	51.750.000		
													Jumlah Peralatan Kerja Yang Diperbaiki	25 unit/jenis			45.000.000	51.750.000		
2	18	1	01:03	10	**SUB KEGIATAN 10 : Penyediaan Alat Tulis Kantor**												102.750.000	118.162.500		
													Jumlah Jenis ATK Yang Dibeli	70 jenis			102.750.000	118.162.500		
2	18	1	01:03	11	**SUB KEGIATAN 11 : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**												72.000.000	82.800.000		
													Jumlah Barang Cetak	20000 Eksemplar			33.000.000	37.950.000		
													Jumlah Penggandaan	190000 Lembar			39.000.000	44850000		
													Jumlah Penjilidan							
2	18	1	01:03	12	**SUB KEGIATAN 12 : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor**												27.000.000	31.050.000		
													Jumlah Komponen Instalasi Listrik Yang Tersedia	100 jenis			27.000.000	31.050.000		
2	18	1	01:03	13	**SUB KEGIATAN 13 : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**												20.000.000	389.520.000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kabupaten/Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
													Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Tersedia	109 unit			20.000.000	389.520.000		
2	18	1	01:03	14	**SUB KEGIATAN 14 : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga**												0	16.758.720		
													Jumlah Peralatan Rumah Tangga Yang Tersedia	10 Unit			0	16.758.720		
2	18	1	01:03	15	**SUB KEGIATAN 15 : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan**												38.000.000	43.700.000		
													Jumlah Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan Yang Tersedia	5040 Eksemplar			38.000.000	43.700.000		
2	18	1	01:03	16	**SUB KEGIATAN 16 : Penyediaan Bahan Logistik Kantor**												13.160.000	15.134.000		
													Jumlah Bahan Logistik Kantor Yang Tersedia	4 unit			13.160.000	15.134.000		
2	18	1	01:03	17	**SUB KEGIATAN 17 : Penyediaan Makanan dan Minuman**												59.000.000	67.850.000		
													Jumlah Makan dan Minum Tamu Yang Tersedia	1000 Pax			29.000.000	33.350.000		
													Jumlah Makan dan Minum Rapat Yang Tersedia	1000 Pax			30.000.000	34500000		
2	18	1	01:03	18	**SUB KEGIATAN 18 : Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah**												494.061.868	568.171.148		
													Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Yang Dilaksanakan	100 kali			175.000.000	201.250.000		
													Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Yang Dilaksanakan	100 kali			319.061.868	366921148		
2	18	1	01:03	21	**SUB KEGIATAN 21 : Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional**												0	0		
													Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang Diadakan	0 Unit			0	0		
2	18	1	01:03	29	**SUB KEGIATAN 29 : Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor**												20.000.000	23.000.000		
													Jumlah Gedung/Kantor Yang Dipelihara	3 unit			20.000.000	23.000.000		
2	18	1	01:03	31	**SUB KEGIATAN 31 : Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional**												116.600.000	134.090.000		
													Jumlah Kendaraan Operasional Yang Dipelihara	7 Unit			116.600.000	134.090.000		
2	18	1	01:03	35	**SUB KEGIATAN 35 : Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor**												2.400.000	5.160.000		
													Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang Dipelihara	1 unit/jenis/set			0	2.400.000		
													Jumlah BBM Genset	200 liter			2.400.000	2760000		
2	18	1	01:04		**KEGIATAN 4 : Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**												0	269.928.000		
2	18	1	01:04	2	**SUB KEGIATAN 2 : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya**												0	80.270.000		
								Pangkalpinag, Belitung dan Luar Daerah	-	-	Survey Kepuasan Pelayanan Internal	85%								
															Survey Kepuasan Pelayanan Kepegawaian	85%	0	269.928.000		
													Jumlah Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya Yang	60 Stel			0	80.270.000		
2	18	1	01:04	5	**SUB KEGIATAN 5 : Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu**												0	58.650.000		
													Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Yang Diadakan	60 Stel			0	58.650.000		
2	18	1	01:04	9	**SUB KEGIATAN 9 : Pendidikan dan Pelatihan Formal**												0	131.008.000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kabupaten/Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
													Jumlah Pegawai Yang Ikut Pendidikan Dan Pelatihan Formal	20 Orang			0	131.008.000		
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL															
2	18	2			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL												472.751.000	543.663.650		
2	18	2	01:01		KEGIATAN 1 : Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif di bidang Penanaman Modal yan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi												252.325.000	290.173.750		
2	18	2	01:01	2	SUB KEGIATAN 2 : Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal												252.325.000	290.173.750		
						Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Menurunkan tingkat pengangguran	7 Kabupaten / Kota	-	-	Persentase Peningkatan Kerjasama Mitra Kerja Dengan Investor	80%					472.751.000	543.663.650	Menurunkan tingkat pengangguran	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
															Jumlah UKM Yang Bermitra Dengan Investor	1 UKM	252.325.000	290.173.750		
													Jumlah UKM Yang Memenuhi Syarat Kemitraan	8 UKM			252.325.000	290.173.750		
2	18	2	01:02		KEGIATAN 2 : Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi												220.426.000	253.489.900		
2	18	2	01:02	1	SUB KEGIATAN 1 : Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi												46.046.000	52.952.900		
						Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Menurunkan tingkat pengangguran	Kabupaten Belitung	-	-	Persentase Peningkatan Kerjasama Mitra Kerja Dengan Investor	80%							Menurunkan tingkat pengangguran	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
															Jumlah Peta Potensi Investasi Provinsi	1 Peta	220.426.000	253.489.900		
													Jumlah Dokumen Evaluasi RUPM	1 Dokumen			46.046.000	52.952.900		
2	18	2	01:02	2	SUB KEGIATAN 2 : Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi												174.380.000	200.537.000		
						Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Menurunkan tingkat pengangguran	Kabupaten / Kota Pulau Bangka	-	-	Persentase Peningkatan Kerjasama Mitra Kerja Dengan Investor	80%							Menurunkan tingkat pengangguran	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
															Jumlah Peta Potensi Investasi Provinsi	1 Peta				
													Jumlah Peta Potensi Investasi	1 Dokumen			174.380.000	200.537.000		
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL															
2	18	3			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL												393.675.000	452.726.250		
2	18	3	01:01		KEGIATAN 1 : Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi												393.675.000	452.726.250		
2	18	3	01:01	1	SUB KEGIATAN 1 : Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi												31.210.000	35.891.500		
						Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Menurunkan tingkat pengangguran	Bangka Belitung	-	-	Persentase Investor Yang Berinvestasi	65%					393.675.000	452.726.250	Menurunkan tingkat pengangguran	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
															Jumlah Kegiatan Promosi Yang Terlaksana	3 Pameran Promosi	393.675.000	452.726.250		
													Jumlah Laporan Strategi Promosi Penanaman Modal	1 Laporan			31.210.000	35.891.500		
2	18	3	01:01	2	SUB KEGIATAN 2 : Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi												362.465.000	416.834.750		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kabupaten/Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
						Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Menurunkan tingkat pengangguran	Bangka Belitung	-	-	Persentase Investor Yang Berinvestasi	65%							Menurunkan tingkat pengangguran	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
															Jumlah Kegiatan Promosi Yang Terlaksana	3 Pameran Promosi				
													JumlahPromosi Penanaman Modal Yang Terlaksana	3 Pameran Promosi			362.465.000	416.834.750	54369750	416.834.750
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL															
2	18	4			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL												**474.800.000**	**482.770.000**		
2	18	4	01:01		KEGIATAN 1 : Penanaman Modal Yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota												**40.000.000**	**46.000.000**		
2	18	4	01:01	3	SUB KEGIATAN 3 : Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan												**40.000.000**	**46.000.000**		
						Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Menurunkan tingkat pengangguran	7 Kabupaten / Kota	-	-	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sesuai SOP	100%					**419.800.000**	**482.770.000**	Menurunkan tingkat pengangguran	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
															Jumlah Laporan Pelaksanaan Rapat Forum PTSP se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 Laporan	**419.800.000**	**482.770.000**		
													Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Forum	50 Peserta			40.000.000	46.000.000		
													Jumlah Rapat Koordinasi Forum PTSP se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 Rakor Forum						
2	18	4	01:02		KEGIATAN 2 : Penanaman Modal Yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi												434.800.000	436.770.000		
2	18	4	01:02	1	SUB KEGIATAN 1 : Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik												**55.000.000**	**0**		
						Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Menurunkan tingkat pengangguran	7 Kabupaten / Kota	-	-	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sesuai SOP	100%					**434.800.000**	**436.770.000**	Menurunkan tingkat pengangguran	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
															Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang Diterbitkan Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Menjadi	1200 Izin	**434.800.000**	**436.770.000**		
													Jumlah Aplikasi Pendukung Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	1 Aplikasi			55.000.000	0		
2	18	4	01:02	2	SUB KEGIATAN 2 : Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal												371.550.000	427.282.500		
						Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Menurunkan tingkat pengangguran	7 Kabupaten / Kota	-	-	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sesuai SOP	100%							Menurunkan tingkat pengangguran	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
															Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang Diterbitkan Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Menjadi	1200 Izin				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kabupaten/Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
													Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Yang Terintegrasi OSS	1200 Izin			371.550.000	427.282.500		
2	18	4	01:02	3	**SUB KEGIATAN 3 : Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan**												8.250.000	9.487.500		
						Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Menurunkan tingkat pengangguran	7 Kabupaten / Kota	-	-	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sesuai SOP	100%							Menurunkan tingkat pengangguran	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
															Jumlah SKM Yang Tersusun dan Jumlah Laporan Pengaduan Yang Ditindaklanjuti	2 Laporan				
													Jumlah Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	2 Laporan SKM			8.250.000	9.487.500		
													Jumlah Pengaduan dan Layanan Konsultasi	12 Pengaduan						
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
2	18				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**															
2	18	5			**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**												**319.246.800**	**367.133.820**		
2	18	5	01:01		**KEGIATAN 1 : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**												**319.246.800**	**367.133.820**		
2	18	5	01:01	1	**SUB KEGIATAN 1 : Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal**												**187.050.000**	**215.107.500**		
						Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Menurunkan tingkat pengangguran	7 kab/kota	-	-	Persentase Perusahaan Yang Patuh Terhadap Perundang-Undangan	15%					**319.246.800**	**367.133.820**	Menurunkan tingkat pengangguran	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
															Jumlah Perusahaan Yang Terpantau	50 Perusahaan	319.246.800	367.133.820		
													Jumlah Perusahaan Yang Dipantau	50 perusahaan			187.050.000	215.107.500		
2	18	5	01:01	2	**SUB KEGIATAN 2 : Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal**												85.471.800	98.292.570		
						Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Menurunkan tingkat pengangguran	7 kab/kota	-	-	Persentase Perusahaan Yang Patuh Terhadap Perundang-Undangan	15%							Menurunkan tingkat pengangguran	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
															Jumlah Perusahaan Yang Terpantau	50 Perusahaan				
													Jumlah Peserta Yang Mengikuti Workshop	75 Perusahaan dan Aparatur			85.471.800	98.292.570		
2	18	5	01:01	3	**SUB KEGIATAN 3 : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal**												46.725.000	53.733.750		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kabupaten/Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
						Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Menurunkan tingkat pengangguran	7 kab/kota	-	-	Persentase Perusahaan Yang Patuh Terhadap Perundang-Undangan	15%							Menurunkan tingkat pengangguran	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
															Jumlah Perusahaan Yang Terpantau	50 Perusahaan				
													Jumlah Kasus / Permasalahan Perusahaan Yang Terselesaikan	2 kasus/permasalahan			46.725.000	53.733.750		
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
2	18				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**															
2	18	6			**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**												**71.886.000**	**82.668.900**		
2	18	6	01:01		**KEGIATAN 1 : Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi**												**71.886.000**	**82.668.900**		
2	18	6	01:01	1	**SUB KEGIATAN 1 : Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik**												**71.886.000**	**82.668.900**		
						Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Menurunkan tingkat pengangguran	7 Kabupaten / Kota	-	-	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang Valid dan Update	100%					**71.886.000**	**82.668.900**	Menurunkan tingkat pengangguran	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
															Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan	1 dokumen	**71.886.000**	**82.668.900**		
													Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang Terintegrasi Secara Elektronik	1 dokumen			71.886.000	82.668.900		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Bangka Belitung
Tahun 2021

Unit Organisasi : DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Sub Unit Organisasi :

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)	Keterangan	
								Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
2	19				Urusan Kepemudaan dan Olahraga												47.199.404.350	35.419.344.785		
					Program Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah												8.674.642.587	9.542.106.846		
											Nilai Sakip PD	75					251.676.614	276.844.275		
					Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												251.676.614	276.844.275		
													Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	12 dokumen			251.676.614	276.844.275		
					Sub Kegiatan Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah												65.076.672	71.584.339		
						Peningkatan tata kelola birokrasi dan pelayanan publik	Meningkatkan tata kelola pemerintah	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah dokumen perencanaan Renstra/Renja PD	2 dokumen	65.076.672	71.584.339	Meningkatkan tata kelola pemerintah	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik
					Sub Kegiatan Penyusunan Program dan kegiatan perangkat daerah dalam dokumen perencanaan												15.725.000	17.297.500		
						Peningkatan tata kelola birokrasi dan pelayanan publik	Meningkatkan tata kelola pemerintah	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah dokumen DPA/DPPA yang tersusun	2 dokumen	15.725.000	17.297.500	Meningkatkan tata kelola pemerintah	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik
					Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah												49.700.000	54.670.000		
						Peningkatan tata kelola birokrasi dan pelayanan publik	Meningkatkan tata kelola pemerintah	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi PD	5 dokumen	49.700.000	54.670.000	Meningkatkan tata kelola pemerintah	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik
					Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah												97.474.942	107.222.436		
						Peningkatan tata kelola birokrasi dan pelayanan publik	Meningkatkan tata kelola pemerintah	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					jumlah dokumen kesepakatan Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan PD	1 dokumen	97.474.942	107.222.436	Meningkatkan tata kelola pemerintah	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik
					Sub Kegiatan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah												23.700.000	26.070.000		
						Peningkatan tata kelola birokrasi dan pelayanan publik	Meningkatkan tata kelola pemerintah	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah dokumen Evalusi kinerja PD	3 dokumen	23.700.000	26.070.000	Meningkatkan tata kelola pemerintah	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik
											survey kepuasan pelayanan internal	75					8.422.965.973	9.265.262.570		
					Kegiatan Administrasi Keuangan												5.685.744.861	6.254.319.347		
													Survey Kepuasan Pelayanan Keuangan	75			5.685.744.861	6.254.319.347		
					Sub Kegiatan Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN												5.675.720.000	6.243.292.000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)	Keterangan	
								Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
						Peningkatan tata kelola birokrasi dan pelayanan publik	Meningkatkan tata kelola pemerintah	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	45 orang	5.675.720.000	6.243.292.000	Meningkatkan tata kelola pemerintah	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik
					Sub Kegiatan Penyusunan laporan keuangan bulanan/semesteran												5.666.226	6.232.849		
						Peningkatan tata kelola birokrasi dan pelayanan publik	Meningkatkan tata kelola pemerintah	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah laporan keuangan bulanan/ Semesteran	14 laporan	5.666.226	6.232.849	Meningkatkan tata kelola pemerintah	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik
					Sub Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun												4.358.635	4.794.499		
						Peningkatan tata kelola birokrasi dan pelayanan publik	Meningkatkan tata kelola pemerintah	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 laporan	4.358.635	4.794.499	Meningkatkan tata kelola pemerintah	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik
					Kegiatan Administrasi umum												2.636.692.993	2.900.362.292		
													Survey Kepuasan Pelayanan Umum	75			2.636.692.993	2.900.362.292		
					Sub Kegiatan Penyediaan Jasa surat menyurat												309.712.520	340.683.772		
						Peningkatan tata kelola birokrasi dan pelayanan publik	Meningkatkan tata kelola pemerintah	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah Surat/Barang yang dikirim	100 Surat/barang yang dikirim	2.818.515	3.100.367	Meningkatkan tata kelola pemerintah	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik
															Jumlah Materai	1,582 lembar	5.294.005	5.823.406		
															jumlah pramubakti	8 orang	301.600.000	331.760.000		
					Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik												237.000.000	260.700.000		
						Peningkatan tata kelola birokrasi dan pelayanan publik	Meningkatkan tata kelola pemerintah	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Tagihan rekening listrik, air, telepon/fax, tv kabel, virtual meeting yang dibayarkan	12 bulan	237.000.000	260.700.000	Meningkatkan tata kelola pemerintah	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik
					Sub Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor												754.000.000	829.400.000		
						Peningkatan tata kelola birokrasi dan pelayanan publik	Meningkatkan tata kelola pemerintah	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah tenaga keamanan/satpam kantor	20 orang	754.000.000	829.400.000	Meningkatkan tata kelola pemerintah	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik
					Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/oprasional												154.300.000	169.730.000		
						Peningkatan tata kelola birokrasi dan pelayanan publik	Meningkatkan tata kelola pemerintah	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					jumlah kendaraan operasional yang dipelihara	5 buah	3.500.000	3.850.000	Meningkatkan tata kelola pemerintah	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik
															Jumlah tenaga supir	4 orang	150.800.000	165.880.000		
					Sub Kegiatan Penyediaan jasa Administrasi keuangan												85.237.055	93.760.761		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)	Keterangan	
								Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
						Peningkatan tata kelola birokrasi dan pelayanan publik	Meningkatkan tata kelola pemerintah	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah pengelola administrasi keuangan yang bekerja	11 orang/bulan	85.237.055	93.760.761	Meningkatkan tata kelola pemerintah	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik
					Sub Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor												645.200.000	709.720.000		
						Peningkatan tata kelola birokrasi dan pelayanan publik	Meningkatkan tata kelola pemerintah	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah jenis bahan dan Peralatan kebersihan kantor yang tersedia	110 jenis	42.000.000	46.200.000	Meningkatkan tata kelola pemerintah	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik
															Jumlah tenaga kebersihan yang dipekerjakan	16 orang	603.200.000	663.520.000		
					Sub Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja												10.000.000	11.000.000		
						Peningkatan tata kelola birokrasi dan pelayanan publik	Meningkatkan tata kelola pemerintah	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	24 unit/jenis	10.000.000	11.000.000	Meningkatkan tata kelola pemerintah	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik
					Sub Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor												68.000.000	74.800.000		
						Peningkatan tata kelola birokrasi dan pelayanan publik	Meningkatkan tata kelola pemerintah	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					jumlah jenis ATK yang dibeli	95 jenis	68.000.000	74.800.000	Meningkatkan tata kelola pemerintah	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik
					Sub Kegiatan Penyediaan barang cetak dan penggandaan												29.000.000	31.900.000		
						Peningkatan tata kelola birokrasi dan pelayanan publik	Meningkatkan tata kelola pemerintah	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					jumlah barang cetak	115 eksamplar	10.000.000	11.000.000	Meningkatkan tata kelola pemerintah	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik
															Jumlah penggandaan	54,286 lembar	19.000.000	20.900.000		
					Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor												10.000.000	11.000.000		
						Peningkatan tata kelola birokrasi dan pelayanan publik	Meningkatkan tata kelola pemerintah	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia	25 jenis	10.000.000	11.000.000	Meningkatkan tata kelola pemerintah	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik
					Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor												48.713.472	53.584.819		
						Peningkatan tata kelola birokrasi dan pelayanan publik	Meningkatkan tata kelola pemerintah	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	3 jenis	48.713.472	53.584.819	Meningkatkan tata kelola pemerintah	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik
					Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan												10.000.000	11.000.000		
						Peningkatan tata kelola birokrasi dan pelayanan publik	Meningkatkan tata kelola pemerintah	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan yang tersedia	2.000 eksamplar	10.000.000	11.000.000	Meningkatkan tata kelola pemerintah	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik
					Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor												12.000.000	13.200.000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)	Keterangan	
								Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
						Peningkatan tata kelola birokrasi dan pelayanan publik	Meningkatkan tata kelola pemerintah	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	6 unit	12.000.000	13.200.000	Meningkatkan tata kelola pemerintah	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik
					Sub Kegiatan Penyediaan makan dan minum												55.000.000	60.500.000		
						Peningkatan tata kelola birokrasi dan pelayanan publik	Meningkatkan tata kelola pemerintah	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah makan dan minum Tamu yang tersedia	400 pax	20.000.000	22.000.000	Meningkatkan tata kelola pemerintah	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik
															Jumlah makan dan minum rapat yang tersedia	700 pax	35.000.000	38.500.000		
					Sub Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah												120.551.304	132.606.434		
						Peningkatan tata kelola birokrasi dan pelayanan publik	Meningkatkan tata kelola pemerintah	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dilaksanakan	18 kali	77.685.596	85.454.156	Meningkatkan tata kelola pemerintah	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik
															Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah dilaksanakan	53 kali	42.865.708	47.152.279		
					Sub Kegiatan Pengadaan kendaraan dinas/oprasional												-	-		
						Peningkatan tata kelola birokrasi dan pelayanan publik	Meningkatkan tata kelola pemerintah											-	Meningkatkan tata kelola pemerintah	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik
					Sub Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor												12.275.771	13.503.348		
						Peningkatan tata kelola birokrasi dan pelayanan publik	Meningkatkan tata kelola pemerintah	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan	1 jenis	12.275.771	13.503.348	Meningkatkan tata kelola pemerintah	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik
					Sub Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor												12.130.389	13.343.428		
						Peningkatan tata kelola birokrasi dan pelayanan publik	Meningkatkan tata kelola pemerintah	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	1 unit/jenis	12.130.389	13.343.428	Meningkatkan tata kelola pemerintah	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik
					Sub Kegiatan Pengadaan mebeleur												-	-		
						Peningkatan tata kelola birokrasi dan pelayanan publik	Meningkatkan tata kelola pemerintah											-	Meningkatkan tata kelola pemerintah	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik
					Sub Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/Oprasional												43.572.482	47.929.730		
						Peningkatan tata kelola birokrasi dan pelayanan publik	Meningkatkan tata kelola pemerintah	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah kendaraan operasional yang dipelihara	6 unit	43.572.482	47.929.730	Meningkatkan tata kelola pemerintah	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik
					Sub Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor												10.000.000	11.000.000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)	Keterangan	
								Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
						Peningkatan tata kelola birokrasi dan pelayanan publik	Meningkatkan tata kelola pemerintah	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	50 unit/jenis/set	10.000.000	11.000.000	Meningkatkan tata kelola pemerintah	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik
					Sub Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor												10.000.000	11.000.000		
						Peningkatan tata kelola birokrasi dan pelayanan publik	Meningkatkan tata kelola pemerintah	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	20 unit/jenis/set	10.000.000	11.000.000	Meningkatkan tata kelola pemerintah	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik
					Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur												100.528.119	110.580.931		
													Survey Kepuasan Pelayanan Kepegawaian	75			100.528.119	110.580.931		
					Sub Kegiatan Pengadaan mesin/kartu absensi												35.000.000	38.500.000		
						Peningkatan tata kelola birokrasi dan pelayanan publik	Meningkatkan tata kelola pemerintah	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah mesin/kartu absensi yang diadakan	1 unit	35.000.000	38.500.000	Meningkatkan tata kelola pemerintah	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik
					Sub Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapanya												-	-		
						Peningkatan tata kelola birokrasi dan pelayanan publik	Meningkatkan tata kelola pemerintah											-	Meningkatkan tata kelola pemerintah	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik
					Sub Kegiatan Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu												-	-		
						Peningkatan tata kelola birokrasi dan pelayanan publik	Meningkatkan tata kelola pemerintah											-	Meningkatkan tata kelola pemerintah	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik
					Sub Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal												65.528.119	72.080.931		
						Peningkatan tata kelola birokrasi dan pelayanan publik	Meningkatkan tata kelola pemerintah	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					jumlah pegawai ASN yang ikut pendidikan dan pelatihan formal	8 orang	65.528.119	72.080.931	Meningkatkan tata kelola pemerintah	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik
2	19	0			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Pemuda												2.087.987.571	2.296.786.328		
											Persentase Pemuda Yang Berprestasi	0,15%					1.589.047.571	1.747.952.328		
2	19	0	1.0		Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi												1.589.047.571	1.747.952.328		
													Jumlah Pemuda yang berprestasi	153 pemuda			1.589.047.571	1.747.952.328		
2	19	0	1.0	0	Sub Kegiatan Koordinasi , Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi												-	-		
						Pembangunan Pendidikan	Meningkatkan kualitas pemuda											-	Meningkatkan kualitas pemuda	Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing
2	19	0	1.0	0	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi												-	-		
						Pembangunan Pendidikan	Meningkatkan kualitas pemuda											-	Meningkatkan kualitas pemuda	Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing
2	19	0	1.0	0	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi												431.160.000	474.276.000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)	Keterangan	
								Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
						Pembangunan Pendidikan	Meningkatkan kualitas pemuda	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah peserta pemilihan PPAN, KPN, PEPELINGASIH, JPD	49 pemuda	431.160.000	474.276.000	Meningkatkan kualitas pemuda	Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing
2	19	0 x	1.0 1	0 x	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera												1.057.887.571	1.163.676.328		
						Pembangunan Pendidikan	Meningkatkan kualitas pemuda	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah peserta pemilihan Pasukan Pengibar Bendera dan jumlah peserta Pasukan Pengibar Bendera	74 pemuda	1.057.887.571	1.163.676.328	Meningkatkan kualitas pemuda	Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing
2	19	0 x	1.0 1	0 x	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan Provinsi												-	-		
						Pembangunan Pendidikan	Meningkatkan kualitas pemuda											-	Meningkatkan kualitas pemuda	Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing
2	19	0 x	1.0 1	0 x	Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan kepada Pemuda dan Organisasi Pemuda Provinsi yang Berprestasi												100.000.000	110.000.000		
						Pembangunan Pendidikan	Meningkatkan kualitas pemuda	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah Pemuda yang diberikan penghargaan	30 pemuda	100.000.000	110.000.000	Meningkatkan kualitas pemuda	Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing
											Persentase Pemuda yang Memiliki Keterampilan	0,03%					98.940.000	108.834.000		
											Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	48,61%					400.000.000	440.000.000		
2	19	0 x	1.0 2		Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi												498.940.000	548.834.000		
													Jumlah pemuda yang mengikuti pelatihan kewirausahaan	21 peserta			98.940.000	108.834.000		
2	19	0 x	1.0 2	0 x	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha												98.940.000	108.834.000		
						Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Menurunkan tingkat pengangguran	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah peserta Pelatihan Kewirausahaan Pemuda	21 peserta	98.940.000	108.834.000	Menurunkan tingkat pengangguran	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
													Jumlah organisasi pemuda yang aktif	35 organisasi pemuda			400.000.000	440.000.000		
2	19	0 x	1.0 2	0 x	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi												400.000.000	440.000.000		
						Pembangunan Pendidikan	Meningkatkan kualitas pemuda	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah organisasi pemuda yang dibina	35 organisasi pemuda	400.000.000	440.000.000	Meningkatkan kualitas pemuda	Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing
2	19	0 x			Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan												8.000.000.000	8.800.000.000		
											Persentase Organisasi Pramuka yang memiliki kapasitas	2,01%					8.000.000.000	8.800.000.000		
2	19	0 x	1.0 1		Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan												8.000.000.000	8.800.000.000		
													Jumlah peserta yang mengikuti Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	4.370 orang			8.000.000.000	8.800.000.000		
2	19	0 x	1.0 1	0 x	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik												-	-		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)	Keterangan	
								Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
						Pembangunan Pendidikan	Meningkatkan kualitas pemuda											-	Meningkatkan kualitas pemuda	Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing
2	19	0	1.0	0	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi												2.000.000.000	2.200.000.000		
						Pembangunan Pendidikan	Meningkatkan kualitas pemuda	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah laporan	1 laporan	2.000.000.000	2.200.000.000	Meningkatkan kualitas pemuda	Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing
2	19	0	1.0	0	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Provinsi												-	-		
						Pembangunan Pendidikan	Meningkatkan kualitas pemuda											-	Meningkatkan kualitas pemuda	Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing
2	19	0	1.0	0	Sub Kegiatan Penyediaan Pusat Pendidikan dan Perlatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota												-	-		
						Pembangunan Pendidikan	Meningkatkan kualitas pemuda											-	Meningkatkan kualitas pemuda	Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing
2	19	0	1.0	0	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi												-	-		
						Pembangunan Pendidikan	Meningkatkan kualitas pemuda											-	Meningkatkan kualitas pemuda	Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing
2	19	0	1.0	0	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Provinsi												6.000.000.000	6.600.000.000		
						Pembangunan Pendidikan	Meningkatkan kualitas pemuda	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah Prasarana dan Sarana yang tersedia	8 jenis	6.000.000.000	6.600.000.000	Meningkatkan kualitas pemuda	Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing
2	19	0	1.0	0	Sub Kegiatan Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Provinsi												-	-		
						Pembangunan Pendidikan	Meningkatkan kualitas pemuda											-	Meningkatkan kualitas pemuda	Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing
2	19	0	1.0	0	Sub Kegiatan Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan												-	-		
						Pembangunan Pendidikan	Meningkatkan kualitas pemuda											-	Meningkatkan kualitas pemuda	Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing
2	19	0			Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan												28.436.774.192	14.780.451.611		
											Persentase atlet pelajar yang berprestasi	14,29%					9.017.973.589	9.919.770.948		
2	19	0	1.0		Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga												7.817.973.589	8.599.770.948		
													Jumlah atlet pelajar yang dibina	550 atlet			7.817.973.589	8.599.770.948		
2	19	0	1.0	0	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga multi Event dan Single event Tingkat Provinsi												6.422.050.589	7.064.255.648		
						Pembangunan Pendidikan	Meningkatkan pembangunan olahraga	Belitung/ Bangka/ Bangka Tengah	Tanjungpandan/ Sungailiat/ Koba	Tanjungpandan/ Bukit Betung/ Koba					Jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan dalam kejuaraan	10 cabor	6.422.050.589	7.064.255.648	Meningkatkan pembangunan olahraga, Meningkatkan kualitas pendidikan, Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata	Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing
2	19	0	1.0	0	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi, dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi												-	-		
						Pembangunan Pendidikan	Meningkatkan pembangunan olahraga												Meningkatkan pembangunan olahraga, Meningkatkan kualitas pendidikan, Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata	Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing
2	19	0	1.0	0	Sub Kegiatan Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan multi Event dan Single event												1.395.923.000	1.535.515.300		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)	Keterangan	
								Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
						Pembangunan Pendidikan	Meningkatkan pembangunan olahraga	Palembang/ Pangkalpinang	Seberang Ulu 1/ Bukit Intan/ menunggu info Kemenpora	Sila Beranti/ Air Itam/ Menunggu info kemenpora					Jumlah peserta yang ikut serta dalam pengiriman kontingen	208 peserta	1.395.923.000	1.535.515.300	Meningkatkan pembangunan olahraga, Meningkatkan kualitas pendidikan	Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing
2	19	0 2	1.0 2		Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi												1.200.000.000	1.320.000.000		
													Jumlah atlet pelajar yang dibina	125 atlet			1.200.000.000	1.320.000.000		
2	19	0 2	1.0 2	0 1	Sub Kegiatan Seleksi Atlet Daerah												-	-		
						Pembangunan Pendidikan	Meningkatkan pembangunan olahraga												Meningkatkan pembangunan olahraga, Meningkatkan pembangunan pendidikan	Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing
2	19	0 2	1.0 2	0 2	Sub Kegiatan Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)												1.200.000.000	1.320.000.000		
						Pembangunan Pendidikan	Meningkatkan pembangunan olahraga	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah peserta yang ikut dalam Training Camp	159 peserta	1.200.000.000	1.320.000.000	Meningkatkan pembangunan olahraga, Meningkatkan pembangunan pendidikan	Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing
2	19	0 2	1.0 2	0 3	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi												-	-		
						Pembangunan Pendidikan	Meningkatkan pembangunan olahraga											-	Meningkatkan pembangunan olahraga, Meningkatkan pembangunan pendidikan	Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing
2	19	0 2	1.0 2	0 4	Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan Olahraga Provinsi												-	-		
						Pembangunan Pendidikan	Meningkatkan pembangunan olahraga										-	-	Meningkatkan pembangunan olahraga, Meningkatkan pembangunan pendidikan	Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing
2	19	0 2	1.0 2	0 5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga												-	-		
						Pembangunan Pendidikan	Meningkatkan pembangunan olahraga												Meningkatkan pembangunan olahraga, Meningkatkan pembangunan pendidikan	Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing
											Persentase cabang olahraga yang dibina	61,54%					19.418.800.603	4.860.680.663		
2	19	0 2	1.0 1		Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada jenjang pendidikan kewenangan Daerah Provinsi												4.418.800.603	4.860.680.663		
													Jumlah cabang olahraga yang dibina	8 cabor			4.418.800.603	4.860.680.663		
2	19	0 2	1.0 1	0 1	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh masyarakat dan dunia usaha												442.810.603	487.091.663		
						Pembangunan Pendidikan	Meningkatkan pembangunan olahraga	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah atlet pelajar yang dibina	10 peserta	442.810.603	487.091.663	Meningkatkan kualitas pendidikan, Meningkatnya kesehatan masyarakat	Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing
2	19	0 2	1.0 1	0 2	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi Oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus												575.990.000	633.589.000		
						Pembangunan Pendidikan	Meningkatkan pembangunan olahraga	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah peserta kegiatan keolahragaan	200 peserta	575.990.000	633.589.000	Meningkatkan kualitas pendidikan, Meningkatnya kesehatan masyarakat	Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing
2	19	0 2	1.0 1	0 3	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi												3.400.000.000	3.740.000.000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)	Keterangan	
								Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
						Pembangunan Pendidikan	Meningkatkan pembangunan olahraga	Bangka Selatan	Payung	Desa Irat					Jumlah sarana dan prasarana yang terbangun	1 prasarana	3.400.000.000	3.740.000.000	Meningkatkan pembangunan olahraga, Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata	Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing
2	19	0	1.0		Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga												15.000.000.000	-		
													Jumlah organisasi keolahragaan yang dibina	1 organisasi			15.000.000.000	-		
2	19	0	1.0	0	Sub Kegiatan Standarisasi Organisasi Keolahragaan												-	-		
						Pembangunan Pendidikan	Meningkatkan pembangunan olahraga											-	Meningkatkan pembangunan olahraga, Meningkatkan pembangunan pendidikan	Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing
2	19	0	1.0	0	Sub Kegiatan Pengembangan Organisasi Keolahragaan												15.000.000.000	-		
						Pembangunan Pendidikan	Meningkatkan pembangunan olahraga	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah laporan	1 laporan	15.000.000.000		Meningkatkan pembangunan olahraga, Meningkatkan pembangunan pendidikan	Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing
2	19	0	1.0	0	Sub Kegiatan Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait												-	-		
						Pembangunan Pendidikan	Meningkatkan pembangunan olahraga												Meningkatkan pembangunan olahraga, Meningkatkan pembangunan pendidikan	Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing
2	19	0	1.0	0	Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi												-	-		
						Pembangunan Pendidikan	Meningkatkan pembangunan olahraga												Meningkatkan pembangunan olahraga, Meningkatkan pembangunan pendidikan	Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2021

Organisasi : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/ Indikator Program		Hasil Kegiatan/ Indikator Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan/ Indikator Sub kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
					URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR													**25.432.049.531**	**27.397.204.484**		
					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH													**12.361.293.250**	**13.591.372.575**		
2	16				**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**													**12.361.293.250**	**13.591.372.575**		
											Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80								
2	16	01	1.01		**Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**													**232.000.000**	**255.200.000**		
													Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	**12**				**232.000.000**	**255.200.000**		
2	16	01	1.01	01	***Sub Kegiatan Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah***													***100.000.000***	***110.000.000***		
						Peningkatan tata kelola birokrasi dan pelayanan publik	Meningkatkan tata kelola pemerintah	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah dokumen perencanaan Renstra/Renja PD	2 dokumen	100.000.000	110.000.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
2	16	01	1.01	01	***Sub Kegiatan Penyusunan Program dan kegiatan perangkat daerah dalam dokumen perencanaanan***													***20.000.000***	***22.000.000***		
						Peningkatan tata kelola birokrasi dan pelayanan publik	Meningkatkan tata kelola pemerintah	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah dokumen DPA/DPPA yang tersusun	2 dokumen	20.000.000	22.000.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
2	16	01	1.01	01	***Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah***													***25.000.000***	***27.500.000***		
						Peningkatan tata kelola birokrasi dan pelayanan publik	Meningkatkan tata kelola pemerintah	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi PD	4 dokumen	25.000.000	27.500.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
2	16	01	1.01	01	***Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah***													***52.000.000***	***57.200.000***		
						Peningkatan tata kelola birokrasi dan pelayanan publik	Meningkatkan tata kelola pemerintah	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah dokumen kesepakatan Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan PD	1 dokumen	52.000.000	57.200.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
2	16	01	1.01	01	***Sub Kegiatan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah***													***35.000.000***	***38.500.000***		
						Peningkatan tata kelola birokrasi dan pelayanan publik	Meningkatkan tata kelola pemerintah	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah dokumen Evalusi kinerja PD	3 dokumen	35.000.000	38.500.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
2	16	01	1.02		**Kegiatan Administrasi Keuangan**													**7.182.440.194**	**7.900.684.213**		
													Survey kepuasan pelayanan	**100%**				**7.182.440.194**	**7.900.684.213**		
2	16	01	1.02	01	***Sub Kegiatan Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN***													***7.157.440.194***	***7.873.184.213***		
						Peningkatan tata kelola birokrasi dan pelayanan publik	Meningkatkan tata kelola pemerintah	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah ASN yang terima gaji dan tunjangan	55 orang	7.157.440.194	7.873.184.213	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/ Indikator Program		Hasil Kegiatan/ Indikator Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan/ Indikator Sub kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2	16	01	1.02	07	***Sub Kegiatan Penyusunan laporan keuangan bulanan/semesteran***												***15.000.000***	***16.500.000***		
						Peningkatan tata kelola birokrasi dan pelayanan publik	Meningkatkan tata kelola pemerintah	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah laporan keuangan bulanan / semesteran	12 laporan	15.000.000	16.500.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
2	16	01	1.02	09	***Sub Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun***												***10.000.000***	***11.000.000***		
						Peningkatan tata kelola birokrasi dan pelayanan publik	Meningkatkan tata kelola pemerintah	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 laporan	10.000.000	11.000.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
2	16	01	1.03		**Kegiatan Administrasi umum**												**4.926.853.056**	**5.419.538.362**		
													Survey kepuasan pelayanan internal	**100%**			**4.926.853.056**	5.419.538.362		
2	16	01	1.03	01	***Sub Kegiatan Penyediaan Jasa surat menyurat***												***1.026.300.000***	**1.128.930.000**		
						Peningkatan tata kelola birokrasi dan pelayanan publik	Meningkatkan tata kelola pemerintah	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah Surat/Barang yang dikirim	50 surat/barang	3.000.000	3.300.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
						Peningkatan tata kelola birokrasi dan pelayanan publik	Meningkatkan tata kelola pemerintah	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah Meterai	1600 lembar	5.400.000	5.940.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
						Peningkatan tata kelola birokrasi dan pelayanan publik	Meningkatkan tata kelola pemerintah	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah tenaga pramubakti yang dipekerjakan	27 orang	1.017.900.000	1.119.690.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
2	16	01	1.03	02	***Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***												***2.276.400.000***	***2.504.040.000***		
						Peningkatan tata kelola birokrasi dan pelayanan publik	Meningkatkan tata kelola pemerintah	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah bulan tagihan rekening listrik, air, telepon/fax, tv kabel, virtual meeting yang	12 bulan	2.276.400.000	2.504.040.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
2	16	01	1.03	03	***Sub Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor***												***208.500.000***	***229.350.000***		
						Peningkatan tata kelola birokrasi dan pelayanan publik	Meningkatkan tata kelola pemerintah	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor	20 kali	20.000.000	22.000.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
						Peningkatan tata kelola birokrasi dan pelayanan publik	Meningkatkan tata kelola pemerintah	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah tenaga keamanan/satpam kantor yang dipekerjakan	5 orang	188.500.000	207.350.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
2	16	01	1.03	06	***Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***												***82.400.000***	***90.640.000***		
						Peningkatan tata kelola birokrasi dan pelayanan publik	Meningkatkan tata kelola pemerintah	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah kendaraan operasional yang dipelihara (STNK, KIR)	3 unit	7.000.000	7.700.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
						Peningkatan tata kelola birokrasi dan pelayanan publik	Meningkatkan tata kelola pemerintah	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah tenaga sopir yang dipekerjakan	3 orang	75.400.000	82.940.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
2	16	01	1.03	07	***Sub Kegiatan Penyediaan jasa Administrasi keuangan***												***136.720.000***	***150.392.000***		
						Peningkatan tata kelola birokrasi dan pelayanan publik	Meningkatkan tata kelola pemerintah	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah pengelola administrasi keuangan yang bekerja	12 orang	136.720.000	150.392.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
2	16	01	1.03	08	***Sub Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor***												***120.100.000***	***7.700.000***		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/ Indikator Program		Hasil Kegiatan/ Indikator Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan/ Indikator Sub kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
						Peningkatan tata kelola birokrasi dan pelayanan publik	Meningkatkan tata kelola pemerintah	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah tenaga kebersihan yang dipekerjakan	3 orang	113.100.000	124.410.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
						Peningkatan tata kelola birokrasi dan pelayanan publik	Meningkatkan tata kelola pemerintah	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah jenis bahan dan Peralatan kebersihan kantor yang tersedia	3 jenis	7.000.000	7.700.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
2	16	01	1.03	10	***Sub Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor***												***50.000.000***	***55.000.000***		
						Peningkatan tata kelola birokrasi dan pelayanan publik	Meningkatkan tata kelola pemerintah	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah jenis ATK yang dibeli	80 jenis	50.000.000	55.000.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
2	16	01	1.03	11	***Sub Kegiatan Penyediaan barang cetak dan penggandaan***												***33.000.000***	***36.300.000***		
						Peningkatan tata kelola birokrasi dan pelayanan publik	Meningkatkan tata kelola pemerintah	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah barang cetak	250 eksemplar	30.000.000	33.000.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
						Peningkatan tata kelola birokrasi dan pelayanan publik	Meningkatkan tata kelola pemerintah	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah penggandaan	6000 lembar	3.000.000	3.300.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
						Peningkatan tata kelola birokrasi dan pelayanan publik	Meningkatkan tata kelola pemerintah	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah penjilidan	25 buku/dokumen/laporan	-	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
2	16	01	1.03	12	***Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***												***23.000.000***	***25.300.000***		
						Peningkatan tata kelola birokrasi dan pelayanan publik	Meningkatkan tata kelola pemerintah	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia	5 jenis	23.000.000	25.300.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
2	16	01	1.03	13	***Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***												***100.000.000***	***110.000.000***		
						Peningkatan tata kelola birokrasi dan pelayanan publik	Meningkatkan tata kelola pemerintah	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	2 jenis	100.000.000	110.000.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
2	16	01	1.03	15	***Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***												***50.600.000***	***55.660.000***		
						Peningkatan tata kelola birokrasi dan pelayanan publik	Meningkatkan tata kelola pemerintah	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan yang	1200 eksemplar	50.600.000	55.660.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
2	16	01	1.03	16	***Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor***												***30.000.000***	***33.000.000***		
						Peningkatan tata kelola birokrasi dan pelayanan publik	Meningkatkan tata kelola pemerintah	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	5 unit	30.000.000	33.000.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
2	16	01	1.03	17	***Sub Kegiatan Penyediaan makan dan minum***												***30.000.000***	***33.000.000***		
						Peningkatan tata kelola birokrasi dan pelayanan publik	Meningkatkan tata kelola pemerintah	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah makan dan minum tamu yang tersedia	428 pax	15.000.000	16.500.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
						Peningkatan tata kelola birokrasi dan pelayanan publik	Meningkatkan tata kelola pemerintah	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah makan dan minum rapat yang tersedia	1000 pax	15.000.000	16.500.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
2	16	01	1.03	18	***Sub Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah***												***350.000.000***	***385.000.000***		
						Peningkatan tata kelola birokrasi dan pelayanan publik	Meningkatkan tata kelola pemerintah	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dilaksanakan	80 kali	150.000.000	165.000.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/ Indikator Program		Hasil Kegiatan/ Indikator Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan/ Indikator Sub kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
						Peningkatan tata kelola birokrasi dan pelayanan publik	Meningkatkan tata kelola pemerintah	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah dilaksanakan	60 kali	200.000.000	220.000.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
2	16	01	1.03	23	***Sub Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor***												***50.000.000***	***55.000.000***		
						Peningkatan tata kelola birokrasi dan pelayanan publik	Meningkatkan tata kelola pemerintah	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan	10 jenis	50.000.000	55.000.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
2	16	01	1.03	25	***Sub Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor***												***50.000.000***	***55.000.000***		
						Peningkatan tata kelola birokrasi dan pelayanan publik	Meningkatkan tata kelola pemerintah	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	10 unit/ jenis	50.000.000	55.000.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
2	16	01	1.03	26	***Sub Kegiatan Pengadaan mebeleur***												***60.000.000***	***66.000.000***		
						Peningkatan tata kelola birokrasi dan pelayanan publik	Meningkatkan tata kelola pemerintah	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah mebelair yang diadakan	3 unit	60.000.000	66.000.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
2	16	01	1.03	31	***Sub Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan***												***125.000.000***	***137.500.000***		
						Peningkatan tata kelola birokrasi dan pelayanan publik	Meningkatkan tata kelola pemerintah	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah kendaraan operasional yang dipelihara	3 unit	125.000.000	137.500.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
2	16	01	1.03	33	***Sub Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung***												***50.833.056***	***55.916.362***		
						Peningkatan tata kelola birokrasi dan pelayanan publik	Meningkatkan tata kelola pemerintah	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	1 unit/jenis/set	50.833.056	55.916.362	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
2	16	01	1.03	35	***Sub Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***												***74.000.000***	***81.400.000***		
						Peningkatan tata kelola birokrasi dan pelayanan publik	Meningkatkan tata kelola pemerintah	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	1 unit/jenis/set	50.000.000	55.000.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
						Peningkatan tata kelola birokrasi dan pelayanan publik	Meningkatkan tata kelola pemerintah	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah BBM Genset	1 liter	24.000.000	26.400.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
2	16	01	1.04		**Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**												**20.000.000**	**15.950.000**		
													Survey kepuasan pelayanan kepegawaian	**100%**			**20.000.000**	**15.950.000**		
2	16	01	1.04	01	***Sub Kegiatan Pengadaan mesin/kartu absensi***												***5.500.000***	***6.050.000***		
						Peningkatan tata kelola birokrasi dan pelayanan publik	Meningkatkan tata kelola pemerintah	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah mesin/kartu absensi yang diadakan	1 unit	5.500.000	6.050.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
2	16	01	1.04	09	***Sub Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal***												***14.500.000***	***15.950.000***		
						Peningkatan tata kelola birokrasi dan pelayanan publik	Meningkatkan tata kelola pemerintah	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah pegawai ASN yang ikut pendidikan dan pelatihan formal	30 orang	14.500.000	15.950.000	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
2	16				**Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika**												**11.850.756.281**	**13.035.831.909**		
2	16	02			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**												**8.996.198.281**	**9.895.818.109**		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/ Indikator Program		Hasil Kegiatan/ Indikator Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan/ Indikator Sub kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
											Persentase Jumlah saluran komunikasi yang dikelola, Jumlah data/informasi pemerintah daerah serta Jumlah mitra yang terfasilitasi	**95%**								
2	16	02	1.01		**Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi**												**8.996.198.281**	**9.895.818.109**		
													Persentase Jumlah data/informasi pemerintah daerah, Jumlah Media Komunikasi	**60%**			**8.996.198.281**	9.895.818.109	**Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata**	
2	16	02	1.01	04	***Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik***												***5.869.397.049***	***6.456.336.754***		
						Peningkatan tata kelola birokrasi dan pelayanan publik	Meningkatkan tata kelola pemerintah	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah konten yang dimutakhirkan dan dikembangkan.	236 Video,2 web dan 4 Medsos	5.869.397.049	6.456.336.754		
2	16	02	1.01	05	***Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik***												***798.171.732***	***877.988.905***		
						Peningkatan tata kelola birokrasi dan pelayanan publik	Meningkatkan tata kelola pemerintah	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah saluran komunikasi pemda yang dikelola; Jumlah saluran komunikasi non Pemda yang	1 saluran dan 9saluran	798.171.732	877.988.905		
2	16	02	1.01	06	***Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik***												***1.637.407.500***	***1.801.148.250***		
						Peningkatan tata kelola birokrasi dan pelayanan publik	Meningkatkan tata kelola pemerintah	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah informasi dan Publikasi PD yang dikelola Jumlah Lembaga Informasi non	34 PD, 2 LEMBAGA	1.637.407.500	1.801.148.250	Meningkatkan kontribusi sektor Kesehatan Masyarakat	
2	16	02	1.01	12	***Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas***												***691.222.000***	***760.344.200***		
						Peningkatan tata kelola birokrasi dan pelayanan publik	Meningkatkan tata kelola pemerintah	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah Informasi/data publik Pemda yang diupdate Jumlah Mitra yang terfasilitasi serta Jumlah data/informasi publik pemda yang update. Jumlah Mitra yang terfasilitasi serta Jumlah data/informasi publik pemda yang	12766 Pemberitaan 35 Mitra 720 KIM	691.222.000	760.344.200		
2	16	03			**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**												**2.854.558.000**	**3.140.013.800**		
											Persentase Jumlah layanan infrastruktur dan teknologi dan Kapasitas layanan publik dan pemerintah berbasis e-	**90%**								

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/ Indikator Program		Hasil Kegiatan/ Indikator Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan/ Indikator Sub kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2	16	03	1.01		**Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Subdomain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi**												**600.000.000**	**660.000.000**		
													Persentase (%) jumlah aplikasi informatika yang terkelola	**60%**			**600.000.000**	**660.000.000**		
2	16	03	1.01	01	***Sub Kegiatan Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi***												***100.000.000***	***110.000.000***		
						Peningkatan tata kelola birokrasi dan pelayanan publik	Meningkatkan tata kelola pemerintah	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah Pendaftaran Nama Domain yang terlayani	10	100.000.000	110.000.000		
2	16	03	1.01	03	***Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah***												***500.000.000***	***550.000.000***		
						Peningkatan tata kelola birokrasi dan pelayanan publik	Meningkatkan tata kelola pemerintah								Jumlah terhubungnya interkoneksi jaringan internet OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan antar Pemerintah Provinsi	45 jaringan OPD, 20 unifi AP-AC Pro, 20 unifi switch 16 port, 10 Power Beam 5AC Gen2, 10 SFP Modul SM 1G	500.000.000	550.000.000		
2	16	03	1.02		**Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi**												**2.254.558.000**	**2.480.013.800**		
													Indeks SPBE	**20%**			**2.254.558.000**	**2.480.013.800**		
2	16	03	1.02	03	***Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah***												***1.904.558.000***	***2.095.013.800***		
						Peningkatan tata kelola birokrasi dan pelayanan publik	Meningkatkan tata kelola pemerintah	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah layanan Infrastruktur dan Teknologi	3 paket layanan (colacotion, hotspot, data center)	1.904.558.000	2.095.013.800		
2	16	03	1.02	07	***Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik***												***200.000.000***	***220.000.000***		
						Peningkatan tata kelola birokrasi dan pelayanan publik	Meningkatkan tata kelola pemerintah	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah Aplikas dan Proses Bisnis Pemerintah Berbasis Elektronik	4 Aplikasi	200.000.000	220.000.000		
2	16	03	1.02	10	***Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah***												***150.000.000***	***165.000.000***		
						Peningkatan tata kelola birokrasi dan pelayanan publik	Meningkatkan tata kelola pemerintah	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah layanan penyediaan data dan inormasi serta layanan	21 kali 6 kabupaten	150.000.000	165.000.000		
2	20				**Urusan Pemerintahan Bidang Statistik**												**520.000.000**	-		
2	20	02			**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**												**520.000.000**	**572.000.000**		
											Persentase Identifikasi kebutuhan Data Statistik Sektoral Daerah Provinsi dan Diskominfo	**75%**								

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/ Indikator Program		Hasil Kegiatan/ Indikator Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan/ Indikator Sub kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2	20	02	1.01		Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral dilingkup Daerah Provinsi												520.000.000	572.000.000		
													Identifikasi kebutuhan Data Statistik Sektoral Daerah Provinsi dan Diskominfo Kabupaten/Kota	60%			520.000.000	572.000.000		
2	20	02	1.01	01	SubKegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral												360.000.000	396.000.000		
						Peningkatan tata kelola birokrasi dan pelayanan publik	Meningkatkan tata kelola pemerintah	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					1). Jumlah kebutuhan data Statistik Sektoral Daerah (OPD); 2). Jumlah penghargaan yang diberikan kepada OPD Provinsi dan Diskominfo Kab/Kota (OPD) ; 3). Jumlah SDM OPD Provinsi dan	1). 40 data; 2). 1 Buku; 3). 1 Buku; 4). 5 Penghargaan	360.000.000	396.000.000		
2	20	02	1.01	03	SubKegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral												160.000.000	176.000.000		
						Peningkatan tata kelola birokrasi dan pelayanan publik	Meningkatkan tata kelola pemerintah	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah laporan Metadata Statistik Sektoral Daerah Provinsi Kep.	20 Laporan Metadata Statistik Sektoral Daerah	160.000.000	176.000.000		
2	21				Urusan Pemerintahan Bidang Persandian												700.000.000	770.000.000		
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI												600.000.000	660.000.000		
											Persentase penerapan e-Government di Prov. Kep babel dengan sistem informasi pemerintah daerah	90%								
2	21	02	1.01		Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi												600.000.000	660.000.000		
													Indeks kematangan Keamanan informasi	75%			600.000.000	660.000.000		
2	21	02	1.01	01	*Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi*												*200.000.000*	*220.000.000*		
						Peningkatan tata kelola birokrasi dan pelayanan publik	Meningkatkan tata kelola pemerintah	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Sertifikat ISO 27001 dan PERGUB	3 kebijakan	200.000.000	220.000.000		
2	21	02	1.01	03	*Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik*												*250.000.000*	*275.000.000*		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/ Indikator Program		Hasil Kegiatan/ Indikator Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan/ Indikator Sub kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
						Peningkatan tata kelola birokrasi dan pelayanan publik	Meningkatkan tata kelola pemerintah	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Persentase penilaian mandiri penerapan sistem manajemen pengaman informasi	**60%**	250.000.000	275.000.000		
2	21	02	1.01	04	***Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi***												***150.000.000***	***165.000.000***		
						Peningkatan tata kelola birokrasi dan pelayanan publik	Meningkatkan tata kelola pemerintah	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Tersedianya layanan keamanan informasi untuk Pemda Tersedianya SDM keamanan informasi	4 Layanan 3 orang	150.000.000	165.000.000		
2	21	02			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**												**100.000.000**	**110.000.000**		
											Indeks Kematangan Keamanan	**Baik**								
2	21	02	1.02		**Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Provinsi**												**100.000.000**	**110.000.000**		
													Presentase Keterhubungan Perangkat Daerah dalam Jaringan Komunikasi Sandi	**85%**			**100.000.000**	110.000.000		
2	21	02	1.02	01	***Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi***												***100.000.000***	***110.000.000***		
						Peningkatan tata kelola birokrasi dan pelayanan publik	Meningkatkan tata kelola pemerintah	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah Keterhubungan Perangkat Daerah dalam Jaringan Komunikasi Sandi yang memanfaatkan	34 PD	100.000.000	110.000.000		

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2021

UNIT ORGANISASI : **DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA**
SUB UNIT ORGANISASI :

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2					**URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR**												**#VALUE!**	**#VALUE!**		
2	**08**	**01**			**URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**												**8.398.629.043,00**	**9.238.491.947**		
2	**08**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Meningkatkan Pembangunan Sosial**											**1.368.754.480,00**	**1.505.629.928**		**Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing**
											Nilai Sakip PD	74 (B)			Nilai Sakip PD	74 (B)		-		
2	**08**	**01**	**1**		**Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Meningkatkan Pembangunan Sosial**									**Jumlah dok perencanaan dan evaluasi**	**12 Dokumen**	**132.340.000**	**145.574.000**		**Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing**
													Jumlah dok perencanaan dan evaluasi	12 Dokumen				-		
2	**08**	**01**	**1**	**01**	**Sub Kegiatan Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah**	**Meningkatkan Pembangunan Sosial**											**28.350.000,00**	**31.185.000**	**....**	**Meningkatkan SDM Berkualitas dan**
								Bangka							Jumlah dok perencanaan	2 dokumen	28.350.000,00	31.185.000		
2	**08**	**01**	**1**	**02**	**Sub Kegiatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan**	**Meningkatkan Pembangunan Sosial**											**13.925.000,00**	**15.317.500**		**Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing**
								Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah RKA/DPA yang tersusun	2 dokumen	13.925.000,00	15.317.500		
2	**08**	**01**	**1**	**03**	**Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah**	**Meningkatkan Pembangunan Sosial**											**25.725.000,00**	**28.297.500**		**Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing**
								Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah dok evaluasi PD (DALEV)	4 Dokumen	25.725.000,00	28.297.500		
2	**08**	**01**	**1**	**04**	**Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat**	**Meningkatkan Pembangunan Sosial**											**44.915.000,00**	**49.406.500**		**Meningkatkan SDM Berkualitas dan**
								Bangka							jumlah dokumen kesepakatan	1 dokumen	44.915.000,00	49.406.500		
2	**08**	**01**	**1**	**05**	**Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Meningkatkan Pembangunan Sosial**											**19.425.000,00**	**21.367.500**		**Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing**
								7 kab/kota dan luar daerah							Jumlah dok Evalusi kinerja PD (LKPJ, LAKIP, LPPD dan ATA)	3 dokumen	19.425.000,00	21.367.500		
2	**08**	**01**	**1**		**Kegiatan Administrasi Keuangan**	**Meningkatkan Pembangunan Sosial**											**7.029.874.563,00**	**7.732.862.019**		**Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing**
													Survey kepuasan pelayanan keuangan	100				-		Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
													jumlah ASN yang terima gaji dan	49 orang			7.029.874.563,00	7.732.862.019		
								Pangkalpinang							jumlah ASN yang terima gaji dan	49 orang				
2	**08**	**01**	**1**		**Kegiatan Administrasi Umum**	**Meningkatkan Pembangunan Sosial**											**1.201.109.800,00**	**1.321.220.780**		**Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
													survey kepuasan pelayanan umum	100				-		
2	08	01	1	01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat												156.700.000,00	172.370.000		Meningkatkan SDM Berkualitas dan
								Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah Surat/Barang yang	180 Surat/barang yang dikirim	2.000.000,00	2.200.000		
								Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah Materai	800 lembar	3.900.000,00	4.290.000		
								Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah tenaga pramubakti yang dipekerjakan	4 orang	150.800.000,00	165.880.000		
2	08	01	1	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan												156.000.000	171.600.000		Meningkatkan SDM Berkualitas dan
								Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Tagihan rekening listrik, air, telepon/fax, tv kabel, virtual meeting yang dibayarkan	12 bulan	156.000.000,00	171.600.000		
2	08	01	1	03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor												75.400.000	82.940.000		Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
								Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah tenaga keamanan/satpam kantor	2 orang	75.400.000,00	82.940.000		
2	08	01	1	06	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasioanal												119.550.000	131.505.000		Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
								Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					jumlah kendaraan operasional yang dipelihara	7 Unit	6.450.000,00	7.095.000		
								Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah tenaga sopir	3 orang	113.100.000,00	124.410.000		
2	08	01	1	07	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan												139.395.000	153.334.500		Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
								Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah pengelola administrasi keuangan	17 orang	139.395.000,00	153.334.500		
2	08	01	1	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor												160.800.000	176.880.000		Meningkatkan SDM Berkualitas dan
								Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah tenaga kebersihan yang dipekerjakan	4 orang	150.800.000,00	165.880.000		
								Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah jenis bahan dan Peralatan kebersihan kantor yang tersedia	12 jenis	10.000.000,00	11.000.000		
2	08	01	1	09	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja												6.650.000,00	7.315.000		Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
								Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					jumlah peralatan kerja yang	11 unit	6.650.000,00	7.315.000		
2	08	01	1	10	Sub Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor												64.305.200,00	70.735.720		Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
								Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					jumlah jenis ATK	79 Jenis	64.305.200,00	70.735.720		
2	08	01	1	11	Sub Kegiatan Penyediaan Barang												19.000.000,00	20.900.000		Meningkatkan SDM
								Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					jumlah barang cetak	100 ekslampar	10.000.000,00	11.000.000		
								Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah penggandaan	30000 Lembar	9.000.000,00	9.900.000		
2	08	01	1	12	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor												5.000.000,00	5.500.000		Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
								Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia	10 Jenis	5.000.000,00	5.500.000		
2	08	01	1	14	**Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga**												**3.000.000,00**	**3.300.000**		**Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing**
								Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	unit	3.000.000,00	3.300.000		
2	08	01	1	15	**Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**												**10.800.000,00**	**11.880.000**		**Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing**
								Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan	7 eksemplar	10.800.000,00	11.880.000		
2	08	01	1	17	**Sub Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman**												**20.000.000,00**	**22.000.000**		**Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing**
								Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah makan dan minum Tamu	200 Pax	10.000.000,00	11.000.000		
								Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah makan dan minum rapat	200 Pax	10.000.000,00	11.000.000		
2	08	01	1	18	**Sub Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultansi ke Luar Daerah**												**150.000.000**	**165.000.000**		**Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing**
								Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	48 kali	100.000.000,00	110.000.000		
								Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah	48 kali	50.000.000,00	55.000.000		
2	08	01	1	23	**Pengadaan perlengkapan gedung kantor**												**20.000.000,00**	**22.000.000**		**Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing**
								Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan	1 Jenis	20.000.000,00	22.000.000		
2	08	01	1	25	**Pengadaan peralatan gedung kantor**												**20.000.000,00**	**22.000.000**		**Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing**
								Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	1 Unit	20.000.000,00	22.000.000		
2	08	01	1	29	**Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor**												**20.000.000,00**	**22.000.000**		**Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing**
								Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 unit	20.000.000,00	22.000.000		
2	08	01	1	31	**Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/Oprasional**												**34.509.600,00**	**37.960.560**		**Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing**
								Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah kendaraan oprasional yang dipelihara	7 Unit	34.509.600,00	37.960.560		
2	08	01	1	33	**Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor**												**10.000.000,00**	**11.000.000**		**Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing**
2	08	01	1	35	**Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor**												**10.000.000,00**	**11.000.000**		**Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing**
								Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	2 Jenis	10.000.000,00	11.000.000		Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
																				Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
2	08				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**												**#VALUE!**			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Meningkatkan Pembangunan Sosial	Meningkatkan Pembengunan responsif Gender				Persentase Perangkat Daerah yang responsif Gender	84.37%					#VALUE!	#VALUE!	Meningkatkan Pembengunan responsif Gender	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
2	08	02	1		Kegiatan Pelembagaan Pengarus Utamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan	Meningkatkan Pembangunan Sosial							Jumlah kabupaten kota yang dibina	7 KAB/kota			#VALUE!	#VALUE!		Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
2	08	02	1	02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Meningkatkan Pembangunan Sosial											60.560.000,00	66.616.000		Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
								Pangkalpinang	Bukit intan	air itam					Jumlah peserta penguatan kapasitas pelaksanaan PUG dan PPRG	75 orang	60.560.000,00	66.616.000		
2	08	02	1	03	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Meningkatkan Pembangunan Sosial											64,350,000.00	#VALUE!		Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
								Kab/Kota							Jumlah peserta Advokasi dan KIE PUG dan PKHP	240 orang	64,350,000.00	#VALUE!		
2	08	02	1	04	Sub Kegiatan Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termsauk PPRG Kewenangan Provinsi	Meningkatkan Pembangunan Sosial											50,719,000.00	#VALUE!		Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
								Pangkalpinang							Jumlah OPD peserta pengembangan materi dan	32 OPD	50,719,000.00	#VALUE!		
2	08	02	1		Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	Meningkatkan Pembangunan Sosial							Jumlah kab/kota yang dibina	7 kab/kota			75.700.000,00	83.270.000		Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
2	08	02	1	02	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Meningkatkan Pembangunan Sosial											75.700.000,00	83.270.000		Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
								Pangkalpinang	Bukit intan	air itam					Jumlah peserta Pelatihan dan pembentukan	75 orang	75.700.000,00	83.270.000		
2	08	02	1		Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia	Meningkatkan Pembangunan Sosial							Jumlah kab/kota yang dibina	7 kab/kota			65.000.000,00	71.500.000		Meningkatkan SDM Berkualitas dan
2	08	02	1	02	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Meningkatkan Pembangunan Sosial											65.000.000,00	71.500.000		Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
								Pangkalpinang	Bukitintan	air itam					Jumlah peserta	45 orang	65,000,000.00	#VALUE!		
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Meningkatkan Pembangunan Sosial	Meningkatkan Pembengunan responsif Gender				Persentase SDM Perlindungan Perempuan	0.039%					#VALUE!	#VALUE!	Meningkatkan Pembengunan responsif Gender	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
2	08	03	1		Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Pembangunan Sosial							jumlah laporan upaya pencegahan perlindungan perempuan dan para pihak yang terlibat dalam upaya perlindungan			131,560,000.00	#VALUE!		Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2	08	03	1	02	Sub Kegiatan Advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan privinsi	Meningkatkan Pembangunan Sosial											131.560.000,00	144.716.000		Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
						Meningkatkan Pembangunan Sosial		Pangkalpinang	bukit intan	air itam					Jumlah kebijkan	1 kebijakan	131.560.000,00	144.716.000		Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
															jumlah peserta sosialisasi pencegahan pelecehan sseksual bagi perempuan	100 Orang		-		Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
2	08	03	1		Kegiatan Penyediaan Layanan BagiPerempuan Korban Kekerasan	Meningkatkan Pembangunan Sosial							Persentase Layanan	100			47.000.000,00	51.700.000		Meningkatkan SDM Berkualitas dan
2	08	03	1	01	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan lintas daerah kab/kota	Meningkatkan Pembangunan Sosial											47.000.000,00	51.700.000		Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
								7 kab/kota							Jumlah laporan layanan Pengaduan Masyarakat yang ditangani	1 Laporan	47.000.000,00	51.700.000		
2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Meningkatkan Pembangunan Sosial	Meningkatkan Pembengunan responsif Gender				Persentase IR yang di bina	0.71%					508.044.000,00	558.848.400	Meningkatkan Pembengunan responsif Gender	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
2	08	04	1		Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan	Meningkatkan Pembangunan Sosial							Jumlah Kab/Kota yang di bina	7 Kab/Kota			356.644.000,00	392.308.400		Meningkatkan SDM Berkualitas dan
2	08	04	1	01	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Meningkatkan Pembangunan Sosial											84.124.000	92.536.400		Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
								kab/kota							jumlah peserta sekolah perempuan	200 orang	84,124,000.00	#VALUE!		
2	08	04	1	03	Sub Kegiatan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga	Meningkatkan Pembangunan Sosial											272.520.000,00	299.772.000		Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
								PHI di Bateng, Hari Kartini di Bangka							Jumlah peserta kegiatan Peningkatan Nilai-nilai Kejuangan Perempuan Indonesia	500 Orang	215.745.000,00	237.319.500		
								Pangkalpinang dan belitung	Bukit Intan dan tanjungpandan						Jumlah peserta Pembinaan Industri Rumahan	90 Orang	56.775.000,00	62.452.500		
2	08	04	1		Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia	Meningkatkan Pembangunan Sosial							Jumlah Kab/Kota yang di bina	7 Kab/Kota			151.400.000,00	166.540.000		Meningkatkan SDM Berkualitas dan
2	08	04	1	01	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Meningkatkan Pembangunan Sosial											75.700.000,00	83.270.000		Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
								Pangkalpinang	bukitintan	airitam					Jumlah peserta pembinaan organisasi perempuan	40 Orang	75.700.000,00	83.270.000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2	08	04	1	03	Sub Kegiatan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Meningkatkan Pembangunan Sosial											75.700.000,00	83.270.000		Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
								Pangkalpinang	bukitintan	airitam					Jumlah Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan	45 Orang	75.700.000,00	83.270.000		
2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Meningkatkan Pembangunan Sosial	Meningkatkan kesejahteraan anak				Persentase OPD yang menyediakan data pilah gender	84.37%					75.700.000,00	83.270.000	Meningkatkan kesejahteraan anak	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
2	08	05	1		Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam kelembagaan Data	Meningkatkan Pembangunan Sosial							Jumlah profil dan data gender dan anak yang	1 buku/dokumen			75.700.000,00	83.270.000		Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
2	08	5	1	01	Sub Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Meningkatkan Pembangunan Sosial											75.700.000,00	83.270.000		Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
						Meningkatkan Pembangunan Sosial		Pangkalpinang	bukit intan	air itam					Jumlah dokumen profil dan data gender dan anak yang tersedia	1 dokumen	75.700.000,00	83.270.000		
2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK	Meningkatkan Pembangunan Sosial	Meningkatkan kesejahteraan anak				Persentase SDM dalam Pemenuhan Partisipasi ANAK	90,00%					730.946.920,00	804.041.612	Meningkatkan kesejahteraan anak	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
2	08	06	1		Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Meningkatkan Pembangunan Sosial							Jumlah Kegiatan yang Melibatkan Pelembagaan PHA pada Lembaga				118.490.920,00	130.340.012		Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
2	08	06	1	01	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Meningkatkan Pembangunan Sosial											118.490.920,00	130.340.012		Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
						Meningkatkan Pembangunan Sosial		Pangkalpinang	Bukitintan	Air itam					Jumlah peserta advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi dan media publikasi	160 orang peserta	118.490.920,00	130.340.012		
2	08	06	1		Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Meningkatkan Pembangunan Sosial							Jumlah kab/kota yang dibina	7 kab/kota			612.456.000,00	673.701.600		Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
2	08	06	1	03	Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Meningkatkan Pembangunan Sosial											612.456.000,00	673.701.600		Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
						Meningkatkan Pembangunan Sosial		Bangka, Pangkalpinang, Bangka Barat							Jumlah Peserta FA tingkat provinsi dan tingkat nasional dan peserta HAN	977 orang	612.456.000,00	673.701.600		
2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Meningkatkan Pembangunan Sosial	Meningkatkan kesejahteraan anak				Persentase SDM Perlindungan Anak	0.20%					569.335.000,00	626.268.500	Meningkatkan kesejahteraan anak	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
2	08	07	1		Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Pembangunan Sosial							Jumlah Laporan	1 laporan			171.100.000,00	188.210.000		Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2	08	07	1	01	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Meningkatkan Pembangunan Sosial											171.100.000,00	188.210.000		Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
						Meningkatkan Pembangunan Sosial		Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itan					jumlah peserta TOT bagi aktivis PATBM kab/kota	100 Orang	171.100.000,00	188.210.000		
2	08	07	1		Kegiatan Penyediaan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus dan Memerlukan Koorodinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Pembangunan Sosial							Persentase Layanan Anak yang memerlkan Perlindungan Khusus	100			398.235.000,00	438.058.500		Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
2	08	07	1	01	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan provinsi	Meningkatkan Pembangunan Sosial											119.660.000,00	131.626.000		Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
						Meningkatkan Pembangunan Sosial		7 kab/kota							Jumlah laporan layanan penanganan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenanganan provinsi	1 laporan	119.660.000,00	131.626.000		
2	08	07	1	04	Sub Kegiatan Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Meningkatkan Pembangunan Sosial											278.575.000,00	306.432.500		Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
						Meningkatkan Pembangunan Sosial		Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itan					Jumlah Kelembagaan KPAD	1 lembaga	278.575.000,00	306.432.500		
																		-		
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL											406.741.777,00			
2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Meningkatkan Pembangunan Sosial	Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk				Persentase masyarakat yang memiliki dokumen pendaftaran penduduk (KK, KTP, KIA)	78,33%					93.101.500,00	102.411.650	Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
2	12	02	1		Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	Meningkatkan Pembangunan Sosial							Jumlah kabupaten/kota yang mencapai target dokumen pendaftaran penduduk (KTP, KK, KIA)	2 Kab/Kota		2 Kab/Kota	93.101.500,00	102.411.650		Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
2	12	02	1	01	Sub Kegiatan Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi												93.101.500,00	102.411.650		Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
						Meningkatkan Pembangunan Sosial		pangkalpinang	bukit intan	air itam					Jumlah peserta Kegiatan Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	120 orang (Berubah Menjadi 60 Org)	93.101.500,00	102.411.650		
2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Meningkatkan Pembangunan Sosial	Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk				Persentase masyarakat yang memiliki akta pencatatan sipil (Akta Lahir, Akta Mati, Akta	98,33%				70%	57.421.500,00	63.163.650	Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2	12	03	1		Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Meningkatkan Pembangunan Sosial							Jumlah kabupaten/	7 Kab/Kota			57.421.500,00	63.163.650		Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
2	12	03	1	01	Sub Kegiatan Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	Meningkatkan Pembangunan Sosial											57.421.500,00	63.163.650		Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
						Meningkatkan Pembangunan Sosial		Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah peserta Kegiatan Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	60 Orang	57.421.500,00	63.163.650		
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Meningkatkan Pembangunan Sosial	Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk				Persentase perangkat daerah dan lembaga lain yang mengadakan pejanjian kerjasama	37,84%					180.518.777,00	198.570.655	Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
2	12	04	1		Kegiatan Penataan Administrasi Kependudukan	Meningkatkan Pembangunan Sosial							Jumlah kab/kota yang dibina	2 Kab/Kota			38.228.777,00	42.051.655		Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
2	12	04	1	02	Sub Kegiatan Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan Yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi Dan Kabupaten/Kota	Meningkatkan Pembangunan Sosial											38.228.777,00	42.051.655		Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
						Meningkatkan Pembangunan Sosial		Pangkalpinang							Jumlah peserta Kegiatan Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan	56 Orang	38.228.777,00	42.051.655		
2	12	04	1		Kegiatan Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan Provinsi	Meningkatkan Pembangunan Sosial							Jumlah kab/kota yang difasilitasi penyelenggaraan adminduk	7 kab/kota			52.990.000,00	58.289.000		Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
2	12	04	1	03	Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Meningkatkan Pembangunan Sosial											52.990.000,00	58.289.000		Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
						Meningkatkan Pembangunan Sosial		Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah peserta dan media publikasi	50 Orang dan 3 media publikasi	52.990.000,00	58.289.000		
2	12	04	1		Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Provinsi	Meningkatkan Pembangunan Sosial							Jumlah kab/kota yang difasilitasi penyelenggaraan adminduk	7 kab/kota			89.300.000,00	98.230.000		Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
2	12	04	1	04	Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	Meningkatkan Pembangunan Sosial											89.300.000,00	98.230.000		Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
						Meningkatkan Pembangunan Sosial		7 kab/kota							Jumlah Laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan adminduk	1 Laporan	89.300.000,00	98.230.000		
2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Meningkatkan Pembangunan Sosial	Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk				Persentase penyediaan penyajian database kependudukan tingkat provinsi	100%					75.700.000,00	83.270.000	Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2	12	05	1		Kegiatan Penyediaan Profil Kependudukan	Meningkatkan Pembangunan Sosial							Jumlah jenis profil	2 Profil			75.700.000,00	83.270.000		Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
2	12	05	1	02	Sub Kegiatan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi	Meningkatkan Pembangunan Sosial											75.700.000,00	83.270.000		Meningkatkan SDM Berkualitas dan
						Meningkatkan Pembangunan Sosial		Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah pengembangan aplikasi dan Jumlah Buku profil	1 Aplikasi dan 100 buku (Berubah menjadi buku profil dan buku aggregat)	75.700.000,00	83.270.000		
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA												813.396.500,00			
2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Meningkatkan Pembangunan Sosial	Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk				persentase kab/kota yang memiliki Dokumen pengendalian penduduk	71,42%					47.396.500,00	52.136.150	Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
2	14	02	1		Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Meningkatkan Pembangunan Sosial							jumlah laporan pengendalian penduduk	1 dokumen			47.396.500,00	52.136.150		Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
2	14	02	1	06	Sub Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Meningkatkan Pembangunan Sosial											47.396.500,00	52.136.150		Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
						Meningkatkan Pembangunan Sosial		pangkalpinang, babar, basel, bateng, bangka belitung dan beltim							jumlah kabupaten/kota yang dibina	7 kab/kota	47.396.500,00	52.136.150		
2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Meningkatkan Pembangunan Sosial	Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk				Persentase kab/kota yang di bina	71,42%					309.000.000,00	339.900.000	Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
2	14	03	1		Kegiatan Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Meningkatkan Pembangunan Sosial							jumlah kab/kota yang melaksanakan pengelolaan dan pengembangan advokasi dan KIE sesuai kearifan budaya lokal	7 kab/kota			259.000.000,00	284.900.000		Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
2	14	03	1	02	Sub Kegiatan Pelaksanaan Hari Keluarga Nasional (Harganas)	Meningkatkan Pembangunan Sosial											209.000.000,00	229.900.000		Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
						Meningkatkan Pembangunan Sosial		Kab. Belitung							Jumlah kategori perlombaan Hari Keluarga	1 kategori,	209.000.000,00	229.900.000		
2	14	03	1	05	Sub Kegiatan Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra Kerja	Meningkatkan Pembangunan Sosial											50.000.000,00	55.000.000		Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
						Meningkatkan Pembangunan Sosial		pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah peserta advokasi program KKBPK	30 orang	50.000.000,00	55.000.000		
2	14	03	1		Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Meningkatkan Pembangunan Sosial							jml kab/kota yang melaksanakan upaya pemberdayaan dan peningkatan kesertaan ber-KB	7 kab/kota			50.000.000,00	55.000.000		Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
2	14	03	1	03	Sub Kegiatan Pengembangan Dan Penguatan Jejaring Kemitraan Dalam Program KKBPK	Meningkatkan Pembangunan Sosial											50.000.000,00	55.000.000		Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
						Meningkatkan Pembangunan Sosial		pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					jumlah peserta kegiatan penguatan jejaring kemitraan dalam program KKBPK	30 orang	50.000.000,00	55.000.000		
2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Meningkatkan Pembangunan Sosial	Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk				Persentase Kampun	79,28%					457.000.000,00	502.700.000	Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
2	14	04	1		Kegiatan Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Meningkatkan Pembangunan Sosial							jumlah kab/kota yang melaksanakan pengelolaan program pembangunan	7 kab/kota			220.000.000,00	242.000.000		Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
2	14	04	1	04	Sub Kegiatan Sosialisasi Dan Pembinaan Remaja Tentang Generasi Berencana	Meningkatkan Pembangunan Sosial											110.000.000,00	121.000.000		Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
						Meningkatkan Pembangunan Sosial		Belitung Timur	Manggar						jumlah konselor terlatih	35 orang	110.000.000,00	121.000.000		
2	14	04	1	08	Sub Kegiatan Fasilitasi pengembangan kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)	Meningkatkan Pembangunan Sosial											110.000.000,00	121.000.000		Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
						Meningkatkan Pembangunan Sosial		pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					jumlah peserta kegiatan PIK Remaja	20 orang	110.000.000,00	121.000.000		
2	14	04	1		Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Keejahteraan Keluarga	Meningkatkan Pembangunan Sosial							jumlah kab/kota yang melaksanakan pembinaan ormas dalam upaya ketahanan dan keserjahteraan keluarga	7 kab/kota			237.000.000,00	260.700.000		Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
2	14	04	1	05	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung KB	Meningkatkan Pembangunan Sosial											237.000.000,00	260.700.000		Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
						Meningkatkan Pembangunan Sosial		7 kab/kota : pangkalpinang, babar, basel, bateng, bangka, belitung, belitung timur							Jumlah kampung KB yang terbentuk / kampung KB yang di bina	34 kampung KB/kampung KB cikar	237.000.000,00	260.700.000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
				Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Bangka Belitung
Tahun 2021

Unit Organisasi : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sub Unit Organisasi :

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
									Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan/ Desa	Hasil Program/Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
												Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
						UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
2	13					Urusan Pemerintah Pemberdayaan Masyarakat dan desa												11.530.754.402	13.273.660.199		
						Urusan Rutin												8.980.754.402	10.313.660.199		
2	13					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH												8.980.754.402	10.313.660.199		
												Nilai Sakip PD	82					8.980.754.402	10.313.660.199		
2	13	01	1	01		Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												195.000.000	477.472.000		
																Jumlah dok perencanaan dan evaluasi	10 dokumen	195.000.000	477.472.000		
2	*13*	*01*	*1*	*01*	*01*	*Sub Kegiatan Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah*												*45.000.000*	*250.000.000*	*peningkatan tata kelola pemerintahan*	*Reformasi Birokrasi*
							Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah dok perencanaan PD	2 dokumen			45.000.000	250.000.000		
2	*13*	*01*	*1*	*01*	*03*	*Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah*												35.000.000	35.000.000		
							Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi PD (Dalev Triwulan)	4 dokumen			35.000.000	35.000.000		
2	*13*	*01*	*1*	*01*	*04*	*Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan PD*												*75.000.000*	*150.000.000*		
							Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa	Belitung Timur	Gantung	Gantung			Jumlah Kesepakatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan PD	1 Laporan			75.000.000	150.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
2	*13*	*01*	*1*	*01*	*05*	*Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*												*40.000.000*	*42.472.000*		
							Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD (LKPJ, LAKIP, LPPD dan Dalev)	4 Laporan			40.000.000	42.472.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
2	*13*	*01*	*1*	*02*		Kegiatan Administrasi Keuangan												6.975.893.011	7.449.475.199		
																Survey kepuasan pelayanan keuangan	83	6.975.893.011	7.449.475.199		
2	*13*	*01*	*1*	*02*	*01*	*Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*												*6.975.893.011*	*7.407.003.199*		
							Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			jumlah ASN yang terima gaji dan tunjangan	**50 Pegawai**			6.975.893.011	7.407.003.199	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
2	*13*	*01*	*1*	*03*		Kegiatan Administrasi Umum												1.809.861.391	2.386.713.000		
																survey kepuasan pelayanan umum	80	1.809.861.391	2.386.713.000		
2	*13*	*01*	*1*	*03*	*01*	*Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*												*22.500.000*	*25.000.000*		
							Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah Surat/Barang yang dikirim	1 paket			9.000.000	25.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
							Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah Materai	3000 lembar (2000 Lbr x Rp.6.000, dan 500 lbr x			13.500.000	13.500.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
									Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan/ Desa	Hasil Program/Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
												Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2	*13*	*01*	*1*	*03*	*02*	***Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik***												***78.000.000***	***100.000.000***		
							Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah tagihan listrik	12 bulan rekening			72.000.000	75.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
							Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah tagihan komunikasi	12 bulan rekening			6.000.000	25.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
2	*13*	*01*	*1*	*03*	*03*	***Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor***												***236.200.000***	***261.200.000***		
							Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1 Tahun			10.000.000	35.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
							Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah tenaga keamanan/satpam kantor	6 orang			226.200.000	226.200.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
2	*13*	*01*	*1*	*03*	*07*	***Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan***												***120.000.000***	***150.000.000***		
							Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah pengelola administrasi keuangan	16 orang			120.000.000	150.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
2	*13*	*01*	*1*	*03*	*08*	***Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor***												***800.700.000***	***941.413.000***		
							Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah pengelola jasa kebersihan kantor	1 paket			9.000.000	149.713.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
							Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah tenaga kebersihan/pramubakti	21 orang			791.700.000	791.700.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
2	*13*	*01*	*1*	*03*	*10*	***Sub Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor***												***30.000.000***	***50.000.000***		
							Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			jumlah jenis ATK yang dibeli	12 bulan			30.000.000	50.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
2	*13*	*01*	*1*	*03*	*11*	***Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan***												***20.000.000***	***52.000.000***		
							Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			jumlah barang cetak	12 bulan			8.000.000	32.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
							Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah penggandaan	40000 lembar			12.000.000	20.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
2	*13*	*01*	*1*	*03*	*12*	***Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan***												***5.000.000***	***10.000.000***		
							Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah komponen instalasi listrik	12 bulan			5.000.000	10.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
2	*13*	*01*	*1*	*03*	*13*	***Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan***												***18.000.000***	***24.000.000***		
							Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan	3 Media			18.000.000	24.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
2	*13*	*01*	*1*	*03*	*17*	***Sub Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman***												***14.000.000***	***80.000.000***		
							Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah makan dan minum rapat (snack)	12 bulan			7.000.000	80.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
														Jumlah makan dan minum tamu	12 bulan			7.000.000	80.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
2	*13*	*01*	*1*	*03*	*18*	***Sub Kegiatan Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah***												***137.361.391***	***350.000.000***		
							Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 Bulan			75.000.000	250.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
							Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah	12 Bulan			62.361.391	100.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
2	*13*	*01*	*1*	*03*	*23*	***Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor***												***15.000.000***	***30.000.000***		

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
									Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan/ Desa	Hasil Program/Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
												Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
							Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			jumlah jenis perlengkapan gedung kantor	3 unit (AC)			15.000.000	30.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
2	*13*	*01*	*1*	*03*	*29*	*Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor*												***100.000.000***	***100.000.000***		
							Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 Paket			100.000.000	100.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
2	*13*	*01*	*1*	*03*	*31*	*Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan*												***100.000.000***	***100.000.000***		
							Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah mobil oprasional yang dipelihara	2 unit mobil, 2 unit motor			100.000.000	100.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
2	*13*	*01*	*1*	*03*	*06*	*Sub Kegiatan pelayanan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional*												***113.100.000***	***113.100.000***		
							Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah tenaga sopir	3 orang			113.100.000	113.100.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
						Urusan Wajib												**2.550.000.000**	**2.960.000.000**		
2	**13**	**05**				**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**												**2.550.000.000**	**2.960.000.000**		
							Peningkatan Ekonomi Masyarakat	**Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa**	**Bangka Selatan, Belitung, Belitung Timur, Bangka, Bangka Tengah , Bangka Barat, Pangkalpinang**			**Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif. Persentase lembaga adat desa yang aktif**	**100%**				**2.550.000.000**	**2.960.000.000**		
2	**13**	**05**	**1.01**			**Kegiatan Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota**												**2.300.000.000**	**2.960.000.000**		
							Peningkatan Ekonomi Masyarakat	**Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa**	**Bangka Selatan, Belitung, Belitung Timur, Bangka, Bangka Tengah , Bangka Barat, Pangkalpinang**							**Jumlah lembaga kemasyarakatan , lembaga adat yang terbina**	**309 desa**	**2.300.000.000**	**2.960.000.000**	**Menurunkan tingkat pengangguran**	**Peningkatan ekonomi masyarakat**
2	**13**	**05**	**1.01**	**03**		***Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan***												***1.500.000.000***	***1.500.000.000***		
							Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa	Bangka Selatan, Belitung, Belitung Timur, Bangka, Bangka Tengah , Bangka Barat, Pangkalpinang					2. Jumlah PKK Provinsi, Kab, Kecamatan dan Desa yang dibina	7 Kab./Kota,			1.500.000.000	1.500.000.000		
2	**13**	**05**	**1.01**	**05**		***Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyakat***												***300.000.000***	***910.000.000***		
							Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa	Bangka Selatan, Belitung, Belitung Timur, Bangka, Bangka Tengah , Bangka Barat, Pangkalpinang					1. Jumlah BUMDESA yang aktif	12 BUMDESA,			120.000.000	700.000.000		Peningkatan Ekonomi Masyarakat

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
									Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan/ Desa	Hasil Program/Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
												Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
							Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa	Bangka Selatan, Belitung, Belitung Timur, Bangka, Bangka Tengah , Bangka Barat, Pangkalpinang					2.Jumlah Produk unggulan Desa yang dikelola	20 Prudes			80.000.000	100.000.000		
							Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa	Bangka Selatan, Belitung, Belitung Timur, Bangka, Bangka Tengah , Bangka Barat, Pangkalpinang					3. Jumlah berkah mart yang difasilitasi dan didampingi pengembangannya	230 Berkah Mart			100.000.000	110.000.000		
2	**13**	**05**	**1.01**	**06**		***Sub Kegiatan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna***												***500.000.000***	***550.000.000***		
							Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa	Papua					Meningkatnya Teknologi Tepat Guna Sektor Pertanian	7 Kab/Kota			250.000.000	100.000.000	Meningkatkan nilai tambah sektor pertanian	
							Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa	Papua					Meningkatnya Teknologi Tepat Guna Sektor Perikanan	7 Kab/Kota			250.000.000	250.000.000	Meningkatkan nilai tambah sektor perikanan	
2	**13**	**03**				**PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA**												**250.000.000**	**250.000.000**		
							Peningkatan Ekonomi Masyarakat	**Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa**	**Bangka Selatan, Belitung, Belitung Timur, Bangka, Bangka Tengah , Bangka Barat**			**Persentase kerjasama Desa yang dilaksanakan**	**0,97**					**250.000.000**	**250.000.000**		
2	**13**	**03**	**1.01**			**Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama antardesa yang Menjadi Kewenangan Provinsi**												**250.000.000**	**250.000.000**		
							Peningkatan Ekonomi Masyarakat	**Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa**	**Bangka Selatan, Belitung, Belitung Timur, Bangka, Bangka Tengah , Bangka Barat**							**Jumlah kerjasama antardesa kewenangan provinsi yang terlaksana**	**3 Kerjasama**	**250.000.000**	**250.000.000**	**Menurunkan tingkat pengangguran**	**Peningkatan Ekonomi Masyarakat**
2	***13***	***03***	***1.01***	***01***		***Sub Kegiatan Fasilitasi Kerjasama antardesa lintas Kabupaten/Kota***												***250.000.000***	***250.000.000***		
							Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa	Pangkalpinang					1. Jumlah Peserta Rakor yang terlaksana	75 orang			160.000.000	160.000.000	Menurunkan tingkat pengangguran	Peningkatan Ekonomi Masyarakat
							Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa	Bangka Selatan, Belitung, Belitung Timur, Bangka, Bangka Tengah , Bangka Barat					2. Identifikasi Pru kades Lintas Kabupaten	1 Laporan			90.000.000	90.000.000	Menurunkan tingkat pengangguran	Peningkatan Ekonomi Masyarakat

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Bangka Belitung
Tahun 2021

Unit Organisasi : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sub Unit Organisasi : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif 2021 (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kabupaten/Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
					Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar																
					PROGRAM/KEGIATAN RUTIN													**12.172.468.907**	**12.555.475.000**		
2	**23**	**01**			**Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																
											Nilai Sakip PD	**77**					**52.220.000**	**12.555.475.000**		
2	**23**	**01**	**1.01**		**Kegiatan : Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**																
															Jumlah dok	**5**		**52.220.000**	**100.000.000**		
2	23	01	1.01	01	Sub Kegiatan : Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah																
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Taman sari	Opas			Jumlah dok perencanaan Renstra/Renja PD	2 dokumen			Rp 14.940.000	Rp30.000.000	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
2	23	01	1.01	02	Sub Kegiatan : Penyusunan Program dan kegiatan perangkat daerah dalam dokumen perencanaan																
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Taman sari	Opas			Jumlah RKA/DPA yang tersusun	2 dokumen			Rp 7.900.000	Rp15.000.000	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
2	23	01	1.01	03	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah																
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Taman sari	Opas			Jumlah Dokumen Pengendalian dan evaluasi PD	4 dokumen			Rp 16.890.000	Rp25.000.000	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
2	23	01	1.01	04	Sub Kegiatan : Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah																
2	23	01	1.01	05	Sub Kegiatan : Evaluasi kinerja Perangkat Daerah																
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Taman sari	Opas			Jumlah Dokmen Evaluasi kinerja PD	3 dokumen			Rp 12.490.000	Rp30.000.000	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
											survey kepuasan pelayanan internal	**100**					**12.120.248.907**			
2	**23**	**01**	**1.02**		**Kegiatan 2 : Administrasi Keuangan**																
															Survey kepuasan pelayanan keuangan	**100**	**9.789.365.401**	**9.040.375.000**	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
2	23	01	1.02	01	Sub Kegaiatan : Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN																
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Taman sari	Opas			jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	62 orang			9.789.365.401	9.040.375.000	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
2	**23**	**01**	**1.03**		**Kegiatan 3 : Administrasi umum**																
															survey kepuasan pelayanan umum	**100**	**2.295.883.506**	**3.360.100.000**	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
2	23	01	1.03	01	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa surat menyurat																
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Taman sari	Opas			Jumlah Surat/Barang yang dikirim	50 surat/barang yang dikirim			Rp 3.000.000	Rp13.000.000	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Taman sari	Opas			Jumlah Materai	1165 lembar			Rp 6.495.000	Rp15.000.000	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Taman sari	Opas			Jumlah tenaga pramul	18 orang			Rp 678.600.000	Rp 678.600.000	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
2	23	01	1.03	02	Sub Kegiatan :Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik																

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif 2021 (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kabupaten/Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Taman sari	Opas			Tagihan rekening listrik, air, telepon/fake, tv kabel, virtual meeting yang dibayarkan	12 bulan			Rp 61.296.000	Rp78.000.000	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
2	23	01	1.03	03	Sub Kegiatan : Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor															
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Taman sari	Opas			Jumlah tenaga keamanan/satpam kantor yang dipekerjakan	6 orang			Rp 226.200.000	Rp226.200.000	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
2	23	01	1.03	06	subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional															
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Taman sari	Opas			Jumlah tenaga sopir yang diperkerjakan	5 orang			Rp 188.500.000	Rp188.500.000	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
2	23	01	1.03	07	subkegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan															
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Taman sari	Opas			Jumlah pengelola administrasi keuangan yang bekerja	11 orang			Rp 79.695.000	Rp100.000.000	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
2	23	01	1.03	08	subkegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor															
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Taman sari	Opas			jumlah alat kebersihan kantor	10 jenis			Rp 25.000.000	Rp 35.000.000	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Taman sari	Opas			Jumlah tenaga kebersihan yang di pekerjakan	4 orang			Rp 150.800.000	Rp 150.800.000	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
2	23	01	1.03	09	subkegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja															
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Taman sari	Opas			jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	15 unit/jenis			Rp 41.250.000	Rp50.000.000	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
2	23	01	1.03	10	subkegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor															
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Taman sari	Opas			jumlah jenis ATK yang dibeli	50 jenis			Rp 52.833.950	Rp80.000.000	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
2	23	01	1.03	11	subkegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Taman sari	Opas			jumlah barang cetak	50 eksemplar			Rp 20.000.000	Rp30.000.000	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Taman sari	Opas			Jumlah penggandaan	85715 lembar			Rp 29.914.535	Rp40.000.000	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
2	23	01	1.03	12	subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Taman sari	Opas			Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia	25 jenis			Rp 16.700.000	Rp35.000.000	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
2	23	01	1.03	15	subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan															
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Taman sari	Opas			Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan yang tersedia	5670 eksemplar			Rp 29.994.300	Rp40.000.000	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
2	23	01	1.03	16	subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Taman sari	Opas			jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	5 jenis			Rp 25.000.000	Rp35.000.000	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
2	23	01	1.03	17	subkegiatan Penyediaan makan dan minum															
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Taman sari	Opas			Jumlah makan dan minum tamu yang tersedia	1000 pax			Rp 35.000.000	Rp35.000.000	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif 2021 (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kabupaten/Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Taman sari	Opas			Jumlah makan dan minum rapat tersedia	800 pax			Rp 30.000.000	Rp50.000.000	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
2	23	01	1.03	18	subkegiatan Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah															
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Taman sari	Opas			jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dilaksanakan	40 kali			Rp 204.916.000	Rp500.000.000	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Taman sari	Opas			jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dilaksanakan	33 kali			Rp 99.530.000	Rp350.000.000	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
2	23	01	1.03	23	subkegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor															
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Taman sari	Opas			Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan	3 jenis			Rp 33.250.000	Rp 100.000.000	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
2	23	01	1.03	29	subkegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor															
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Taman sari	Opas			jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 unit			Rp 83.656.471	Rp 200.000.000	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
2	23	01	1.03	31	subkegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional															
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Taman sari	Opas			Jumlah kendaran oprasional yang dipelihara	5 kendaraan			Rp 129.000.000	Rp 200.000.000	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
2	23	01	1.03	33	subkegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor															
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Taman sari	Opas			Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	5 jenis			Rp 5.002.250	Rp50.000.000	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
2	23	01	1.03	35	subkegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor															
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Taman sari	Opas			jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	2 jenis			Rp 35.250.000	Rp50.000.000	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
2	23	01	1.03	36	subkegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur															
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Taman sari	Opas			jumlah mebeler yang dipelihara	2 jenis			Rp 5.000.000	Rp30.000.000	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
2	**23**	**01**	**1.04**		**Kegiatan 4 : Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**															
															survey kepuasan pelayan kepegawaian	**100**	**35.000.000**	Rp55.000.000	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
2	23	01	1.04	09	subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal															
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Taman sari	Opas			jumlah pegawai ASN yang ikut pendidikan dan pelatihan formal	30 orang			Rp 35.000.000	Rp55.000.000	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
2	**23**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**															
2	**23**	**02**			**Program 2 : Program Pembinaan Perpustakaan**															
											persentase perpustakaan yang	**35%**					**78.191.500**	**275.000.000**		
2	**23**	**02**	**1.01**		**Kegiatan 1 : kegiatan pengelolaan perpustakaan tingkat daerah provinsi**															
															persentase peningkatan pengelolaan perpustakaan tingkat daerah provinsi	**60%**	**78.191.500**	**275.000.000**	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
2	23	02	1.01	02	subkegiatan pengembangan perpustakaan di tingkat daerah provinsi															
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	7 Kab/kota					jumlah perpustakaan yang memenuhi standart nasional	7 perpustakaan			Rp 35.000.000	Rp75.000.000	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif 2021 (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kabupaten/Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2	23	02	1.01	06	subkegiatan peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah provinsi (lomba pustakawan / pengelola pustakawan)															
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang					jumlah pustakawan dan pengelola perpustakaan yang berprestasi	8 pustakawan/pengelola perpustakaan			Rp 43.191.500	Rp200.000.000	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
											persentase perpustakaan yang dibina	**60%**					**416.375.000**	**525.000.000**		
2	**23**	**02**	**1.02**		**Kegiatan 2 : kegiatan pembudayaan gemar membaca tingkat daerah provinsi**															
															jumlah pengunjung perpustakaan	**10.000 pengunjun**	**416.375.000**	**525.000.000**	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
2	23	02	1.02	01	subkegiatan sosialisasi budaya baca dan literasi pada satuan pendidikan tingkat menengah dan pendidikan khusus serta masyarakat															
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang					jumlah peserta lomba	120 peserta			Rp 125.000.000	Rp275.000.000	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
2	23	02	1.02	02	subkegiatan pembangunan dan pemeliharaan sarana perpustakaan di tempat-tempat umum yang menjadi kewenangan daerah provinsi (4 kabupaten di prov.kep babel)															
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	7 Kab/kota					jumlah pengunjung perpustakaan keliling	7.125 orang			Rp 241.375.000	Rp100.000.000	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
2	23	02	1.02	04	subkegiatan pengembangan literasi berbasis inklusi sosial															
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Desa/Kelurahan					jumlah peserta pelatihan pengembangan literasi berbasis inklusi sosial	50 orang			Rp 50.000.000	Rp150.000.000	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
2	**23**	**03**			**Program 3 : program pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno**															
											jumlah koleksi nasional dan naskah kuno	**9 dokumen**					**239.000.000**	**239.000.000**		
2	**23**	**03**	**1.02**		**Kegiatan 2 : kegiatan penerbitan katalog induk daerah dan bibliografi daerah**															
															jumlah katalog induk daerah dan bibliografi daerah	**2 dokumen**	**164.000.000**	**164.000.000**	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
2	23	03	1.02	01	subkegiatan penerbitan katalog induk daerah															
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	7 Kab/kota					jumlah dokumen katalog induk daerah yang dicetak	1 dokumen			Rp 87.007.500	Rp82.000.000	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
2	23	03	1.02	01	subkegiatan penerbitan bibliografi induk daerah															
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	7 Kab/kota					jumlah dokumen bibliografi induk daerah yang dicetak	1 dokumen			Rp 76.992.500	Rp82.000.000	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
2	**23**	**03**	**1.04**		**Kegiatan 4 : kegiatan pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh pemerintah daerah provinsi**															
															jumlah dokumen koleksi budaya etnis nusantara	**7 dokumen**	**75.000.000**	**75.000.000**	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
2	23	03	1.04	02	subkegiatan pengolahan dan penyiangan koleksi budaya etnis nusantara															
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	7 Kab/kota					jumlah dokumen koleksi budaya etnis nusantara yang dikelola	7 dokumen			Rp 75.000.000	Rp75.000.000	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
2	**24**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**															
2	**24**	**02**			**Program 4 : Program Pengelolaan Arsip**															
											Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Kearsipan sesuai dengan standard baku kearsipan	**20%**					**Rp 424.997.315**	**Rp 1.115.425.000**		
2	**24**	**02**	**1.01**		**Kegiatan 1 : kegiatan pengelolaan arsip dinamis provinsi**															

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif 2021 (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kabupaten/Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
															Persentase PD/UPTD, LKD, SMA/SMK/MA, SLB dan BUMD yang mengelola arsip dinamis yang sesuai dengan standard baku kearsipan dan berbasis TIK	**20%**	**Rp 120.238.315**	**Rp 150.000.000**	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
2	24	02	1.01	01	subkegiatan penciptaan dan penggunaan arsip dinamis															
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang					Jumlah unit kearsipan PD/UPTD, LKD, SMA/SMK/MA, SLB dan BUMD pencipta dan penggunaan arsip dinamis yang memenuhi standard baku kearsipan dan berbasis TIK	8 unit kearsipan			68.003.315	50.000.000	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
2	24	02	1.01	02	subkegiatan pemeliharaan dan penyusutan arsip dinamis															
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang					Jumlah Arsip InAktif PD/UPTD, LKD, SMA/SMK/MA, SLB dan BUMD yang didata dan didata pada tahun berjalan	360 arsip inaktif			Rp 13.500.000	Rp20.000.000	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang					Jumlah Peserta Bimtek Pengelolaan Arsip aktif PD/UPTD, LKD, SMA/SMK/MA, SLB dan BUMD yang didata	43 orang			Rp 38.735.000	Rp80.000.000	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
2	**24**	**02**	**1.02**		**Kegiatan 2 : kegiatan pengelolaan arsip statis daerah provinsi**															
															Persentase layanan arsip statis yang autentik dan dipercaya sebagai	**5%**	**Rp 145.410.000**	**Rp445.425.000**	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
2	24	02	1.02	01	subkegiatan pengumpulan dan penyampaian salinan otentik naskah asli arsip terjaga kepada ANRI															
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang					Jumlah penambahan salinan otentik naskah Asli arsip terjaga yang diterima dan disimpan LKD Provinsi	36 Naskah Khasanah Arsip			Rp 43.934.000	Rp48.900.000	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
2	24	02	1.02	02	subkegiatan akuisisi, pengolahan, preservasi dan akses arsip statis															
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang					Jumlah Unit Depo Arsip Provinsi yang dikelola	1 Unit Depo Arsip			Rp 39.801.000	Rp50.000.000	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang					Jumlah peserta bimtek akuisisi, pengolaan, preservasi dan akses arsip statis yang didata	30 orang			Rp 61.675.000	Rp346.525.000	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
2	**24**	**02**	**1.03**		**Kegiatan 3 : kegiatan pengeloaan simpul jaringan dalam sistem informasi kearsipan nasional tingkat provinsi**															
															Persentase PD dan LKD yang mengelola Simpul Jaringan dalam SIKN Daerah Provinsi	**50%**	**Rp 159.349.000**	**Rp 520.000.000**	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
2	24	02	1.03	01	subkegiatan penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan tingkat daerah provinsi melalui JIKN															

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif 2021 (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kabupaten/Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang					Jumlah PD dan LKD yang memanfaatkan Simpul Jaringan dalam penyediaan informasi, akses layanan kearsipan	1 PD/LKD			Rp 30.769.000	Rp 300.000.000	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
2	24	02	1.03	02	subkegiatan pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan lembaga kearsipan daerah provinsi															
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang					Jumlah LKD Kabupaten /Kota yang memperoleh pengawasan kearsipan dengan kategori B(baik)ke atas (LAKE)	7 LKD Kab/Kota			Rp 66.470.000	Rp 120.000.000	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang					Jumlah peserta lomba arsiparis teladan tingkat provinsi	21 arsiparis			Rp 62.110.000	Rp 100.000.000	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
	24	**03**			**Program 5 :program perlindungan dan penyelamatan arsip**															
											Persentase berkas arsip yang dilindungi dan diselamatkan sesuai dengan ketentuan	**20%**					**Rp 120.000.000**	**Rp120.000.000**		
2	**24**	**03**	**1.01**		**Kegiatan 1 : Kegiatan Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki retensi dibawah 10 tahun**															
															Persentase peningkatan unit kearsipan PD dan LKD yang melakukan pemusnahan berkas arsip yang memiliki retensi dibawah 10 tahun	**20%**	**Rp 70.000.000**	**Rp70.000.000**	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
2	24	03	1.01	01	subkegiatan Penilaian, Penetapan dan PelaksanaanPemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi diBawah 10 (Sepuluh) Tahun															
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang					Jumlah unit kearsipan PD dan LKD yang melakukan penilaian berkas arsip retensi dibawah 10 tahun untuk dimusnahkan	8 Unit Kearsipan			Rp 65.102.000	Rp50.000.000	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
2	24	03	1.01	02	subkegiatan Pelaksaan Pemusnahan Arsip yang memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun															
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang					Jumlah Unit Kearsipan Perangkat Daerah yang melakukan pemusnahan Arsip retensi dibawah 10 tahun	8 Unit Kearsipan			Rp 4.898.000	Rp20.000.000	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
2	**24**	**03**	**1.04**		**Kegiatan 4 : kegiatan autentifikasi arsip dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan provinsi**															
															Persentase berkas arsip statis hasil autentifikasi arsip dan asrsip hasil alih media yang sesuai persyaratan penjaminan keabsahan arsip	**20%**		**50.000.000**	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
2	24	03	1.04	01	subkegiatan penilaian dan penetapan autentifikasi arsip sesuai persyaratan penjaminan keabsahan arsip															

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif 2021 (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kabupaten/Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang					Jumlah berita acara penilaian dan penetapan hasil autentifikasi arsip statis yang sesuai persyaratan penjaminan keabsahan arsip	2 Berita Acara			Rp	43.766.000	Rp25.000.000	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
2	24	03	1.04	02	subkegiatan penilaian dan penetapan hasil alih media sesuai persyaratan penjaminan keabsahan arsip															
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang					Jumlah daftar arsip hasil penilaian dan penetapan arsip hasil alih media yang sesuai persyaratan penjaminan keabsahan arsip	2 Daftar arsip			Rp	6.234.000	Rp25.000.000	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
2	**24**	**04**			**Program 6 : program perizinan penggunaan arsip**															
											Persentase berkas layanan perizinan penggunaan arsip yang	**15%**					**55.200.000**	**107.836.000**		
2	**24**	**04**	**1.01**		**Kegiatan 1 : kegiatan pelayanan izin penggunaan arsip yang tertutup di daerah provinsi**															
															Persentase berkas perizinan penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang dilayani	**15%**		**55.200.000**	**107.836.000**	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
2	24	04	1.01	01	subkegiatan penyusunan dan penerapan SOP penggunaan arsip yang bersifat tertutup															
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang					Jumlah unit pengelola layanan perizinan penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang dikelola	1 Unit Layanan			Rp	21.200.000	Rp62.836.000	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
2	24	04	1.01	02	subkegiatan penyediaan daftar dan penetapan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup															
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang					Jumla orang yang mendapatkan sosialisasi layanan penrapan izin	50 orang			Rp	34.000.000	Rp45.000.000	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
TOTAL																		**13.506.232.722**	**14.937.736.000**		

Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Bangka Belitung
Tahun 2021

Unit Organisasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sub Unit Organisasi :

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																
					RUTIN												**8.341.630.908**	**8.977.444.105**		
		01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENINGKATAN PEMBANGUNAN BIDANG KEBENCANAAN	Meningkatnya Kapasitas daerah terhadap bencana				Nilai Sakip PD	**82**					**8.341.630.908**	**8.977.444.105**		
		01	1.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PENINGKATAN PEMBANGUNAN BIDANG KEBENCANAAN									Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	10 dokumen	**200.587.604**	**220.646.364**		
		01	1.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	PENINGKATAN PEMBANGUNAN BIDANG KEBENCANAAN		Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah Dokumen Perencanaan Renstra/Renja PD	3 Dokumen			**30.000.000**	**33.000.000**		
		01	1.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	PENINGKATAN PEMBANGUNAN BIDANG KEBENCANAAN		Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah RKA/DPA Yang Tersusun	4 Dokumen			**25.000.000**	**27.500.000**		
		01	1.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	PENINGKATAN PEMBANGUNAN BIDANG KEBENCANAAN		Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah Dokumen Evaluasi PD (DALEV)	1 Dokumen			**25.000.000**	**27.500.000**		
		01	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	PENINGKATAN PEMBANGUNAN BIDANG KEBENCANAAN		Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah kesepakatan Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan PD	1 Dokumen			**80.587.604**	**88.646.364**		
		01	1.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PENINGKATAN PEMBANGUNAN BIDANG KEBENCANAAN		Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah dok Evalusi kinerja PD (LKPJ, LAKIP, LPPD)	3 Dokumen			**40.000.000**	**44.000.000**		
		.01	1.02		Administrasi Keuangan	PENINGKATAN PEMBANGUNAN BIDANG KEBENCANAAN									Survey kepuasan pelayanan keuangan	**83**	**5.618.243.304**	**5.969.652.740**		
		01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PENINGKATAN PEMBANGUNAN BIDANG KEBENCANAAN		Provinsi Kep Bangka Belitung	Provinsi Kep Bangka Belitung	Provinsi Kep Bangka Belitung			Jumlah ASN yang terima gaji dan tunjangan				**5.508.243.304**	**5.848.652.740**		
		01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	PENINGKATAN PEMBANGUNAN BIDANG KEBENCANAAN		Provinsi Kep Bangka Belitung	Provinsi Kep Bangka Belitung	Provinsi Kep Bangka Belitung			Jumlah Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				-	-		
		01	1.02	03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	PENINGKATAN PEMBANGUNAN BIDANG KEBENCANAAN		Provinsi Kep Bangka Belitung	Provinsi Kep Bangka Belitung	Provinsi Kep Bangka Belitung			Jumlah laporan Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	1 dokumen			**20.000.000**	**22.000.000**		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
		01	1.02	04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	PENINGKATAN PEMBANGUNAN BIDANG KEBENCANAAN		Provinsi Kep Bangka Belitung	Provinsi Kep Bangka Belitung	Provinsi Kep Bangka Belitung			Jumlah laporan akuntasi keuangan	1 dokumen					10.000.000	11.000.000		
		01	1.02	05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	PENINGKATAN PEMBANGUNAN BIDANG KEBENCANAAN		Provinsi Kep Bangka Belitung	Provinsi Kep Bangka Belitung	Provinsi Kep Bangka Belitung			Jumlah laporan pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemerikasaan	1 dokumen					25.000.000	27.500.000		
		01	1.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	PENINGKATAN PEMBANGUNAN BIDANG KEBENCANAAN		Provinsi Kep Bangka Belitung	Provinsi Kep Bangka Belitung	Provinsi Kep Bangka Belitung			Jumlah laporan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen					10.000.000	11.000.000		
		01	1.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	PENINGKATAN PEMBANGUNAN BIDANG KEBENCANAAN		Provinsi Kep Bangka Belitung	Provinsi Kep Bangka Belitung	Provinsi Kep Bangka Belitung			Jumlah laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	2 dokumen					30.000.000	33.000.000		
		01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	PENINGKATAN PEMBANGUNAN BIDANG KEBENCANAAN		Provinsi Kep Bangka Belitung	Provinsi Kep Bangka Belitung	Provinsi Kep Bangka Belitung										-		
		01	1.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	PENINGKATAN PEMBANGUNAN BIDANG KEBENCANAAN		Provinsi Kep Bangka Belitung	Provinsi Kep Bangka Belitung	Provinsi Kep Bangka Belitung			Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 dokumen					15.000.000	16.500.000		
		.01	.01.03		Administrasi Umum	PENINGKATAN PEMBANGUNAN BIDANG KEBENCANAAN									survey kepuasan pelayanan umum	80			2.522.800.000	2.787.145.000		
		.01	01.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PENINGKATAN PEMBANGUNAN BIDANG KEBENCANAAN		Provinsi Kep Bangka Belitung	Provinsi Kep Bangka Belitung	Provinsi Kep Bangka Belitung									29.500.000	32.450.000		
													Jumlah Surat/Barang yang dikirim	88 paket					16.000.000	17.600.000		
													Jumlah Materai	2.700 lembar					13.500.000	14.850.000		
		.01	01.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENINGKATAN PEMBANGUNAN BIDANG KEBENCANAAN		Provinsi Kep Bangka Belitung	Provinsi Kep Bangka Belitung	Provinsi Kep Bangka Belitung									179.000.000	196.900.000		
													Jumlah tagihan listrik	24 bulan rekening					150.000.000	165.000.000		
													Jumlah tagihan komunikasi	12 bulan rekening					12.000.000	13.200.000		
													Jumlah tagihan Air	12 bulan rekening					6.000.000	6.600.000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
													jumlah tagihan surat kabar/majalah	12 bulan rekening			**11.000.000**	**12.100.000**		
		.01	01. 03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENINGKATAN PEMBANGUNAN BIDANG KEBENCANAAN		Provinsi Kep Bangka Belitung	Provinsi Kep Bangka Belitung	Provinsi Kep Bangka Belitung							**263.900.000**	**290.290.000**		
													jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor	25 jasa layanan			-	-		
													Jumlah tenaga keamanan/satpam kantor	7 orang			**263.900.000**	**290.290.000**		
		.01	01. 03	04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	PENINGKATAN PEMBANGUNAN BIDANG KEBENCANAAN		Provinsi Kep Bangka Belitung	Provinsi Kep Bangka Belitung	Provinsi Kep Bangka Belitung			Jumlah pegawai non PNS yang memiliki jaminan kesehatan	480 orang jasa layanan (40X12x150.000)			**72.000.000**	**79.200.000**		
		.01	01. 03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	PENINGKATAN PEMBANGUNAN BIDANG KEBENCANAAN		Provinsi Kep Bangka Belitung	Provinsi Kep Bangka Belitung	Provinsi Kep Bangka Belitung							**427.400.000**	**470.140.000**		
													jumlah kendaraan operasional yang dipelihara	1 Kendaraan Mobil & 2 kendaraan Motor			**125.800.000**	**138.380.000**		
													Jumlah tenaga sopir	8 orang sopir			**301.600.000**	**331.760.000**		
		.01	01. 03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	PENINGKATAN PEMBANGUNAN BIDANG KEBENCANAAN		Provinsi Kep Bangka Belitung	Provinsi Kep Bangka Belitung	Provinsi Kep Bangka Belitung							**316.200.000**	**347.820.000**		
													Jumlah pengelola administrasi keuangan	11 orang			**90.000.000**	**99.000.000**		
													Jumlah Pramubakti	6 orang			**226.200.000**	**248.820.000**		
		.01	01. 03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	PENINGKATAN PEMBANGUNAN BIDANG KEBENCANAAN		Provinsi Kep Bangka Belitung	Provinsi Kep Bangka Belitung	Provinsi Kep Bangka Belitung							**155.800.000**	**155.213.000**		
													Jumlah tenaga kebersihan	4 orang			**150.800.000**	**149.713.000**		
													Jumlah jenis bahan dan Peralatan kebersihan kantor	5 jenis			**5.000.000**	**5.500.000**		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
		.01	01. 03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	PENINGKATAN PEMBANGUNAN BIDANG KEBENCANAAN		Provinsi Kep Bangka Belitung	Provinsi Kep Bangka Belitung	Provinsi Kep Bangka Belitung			jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	10 peralatan					**100.000.000**	**110.000.000**		
		.01	01. 03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	PENINGKATAN PEMBANGUNAN BIDANG KEBENCANAAN		Provinsi Kep Bangka Belitung	Provinsi Kep Bangka Belitung	Provinsi Kep Bangka Belitung			jumlah jenis ATK yang dibeli	70 jenis					**56.000.000**	**61.600.000**		
		.01	01. 03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PENINGKATAN PEMBANGUNAN BIDANG KEBENCANAAN		Provinsi Kep Bangka Belitung	Provinsi Kep Bangka Belitung	Provinsi Kep Bangka Belitung			jumlah barang cetak	20 jenis					**20.000.000**	**22.000.000**		
		.01	01. 03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENINGKATAN PEMBANGUNAN BIDANG KEBENCANAAN		Provinsi Kep Bangka Belitung	Provinsi Kep Bangka Belitung	Provinsi Kep Bangka Belitung			Jumlah komponen instalasi listrik	15 jenis					**10.000.000**	**11.000.000**		
		.01	01. 03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENINGKATAN PEMBANGUNAN BIDANG KEBENCANAAN		Provinsi Kep Bangka Belitung	Provinsi Kep Bangka Belitung	Provinsi Kep Bangka Belitung			jumlah Jenis peralatan kantor	15 jenis					**50.000.000**	**55.000.000**		
		.01	01. 03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	PENINGKATAN PEMBANGUNAN BIDANG KEBENCANAAN		Provinsi Kep Bangka Belitung	Provinsi Kep Bangka Belitung	Provinsi Kep Bangka Belitung			Jumlah peralatan rumah	1 jenis					**5.000.000**	**5.500.000**		
		.01	01. 03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	PENINGKATAN PEMBANGUNAN BIDANG KEBENCANAAN		Provinsi Kep Bangka Belitung	Provinsi Kep Bangka Belitung	Provinsi Kep Bangka Belitung			Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan	9 jenis					-	-		
		.01	01. 03	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENINGKATAN PEMBANGUNAN BIDANG KEBENCANAAN		Provinsi Kep Bangka Belitung	Provinsi Kep Bangka Belitung	Provinsi Kep Bangka Belitung			jumlah bahan logistik kantor	10 jenis					**12.000.000**	**13.200.000**		
		.01	01. 03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	PENINGKATAN PEMBANGUNAN BIDANG KEBENCANAAN		Provinsi Kep Bangka Belitung	Provinsi Kep Bangka Belitung	Provinsi Kep Bangka Belitung									**45.000.000**	**49.500.000**		
													Jumlah makan dan minum Tamu	1200 orang					**15.000.000**	**16.500.000**		
													Jumlah makan dan minum rapat	4770 orang					**30.000.000**	**33.000.000**		
		.01	01. 03	18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	PENINGKATAN PEMBANGUNAN BIDANG KEBENCANAAN		Luar Daerah & Dalam daerah	Luar Daerah & Dalam daerah	Luar Daerah & Dalam daerah									**350.000.000**	**385.000.000**		
								Luar Daerah	Luar Daerah	Luar Daerah			jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	32 kali					**200.000.000**	**220.000.000**		
								Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dalam Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah	55 kali					**150.000.000**	**165.000.000**		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
		.01	01. 03	22	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	PENINGKATAN PEMBANGUNAN BIDANG KEBENCANAAN		Provinsi Kep Bangka Belitung	Provinsi Kep Bangka Belitung	Provinsi Kep Bangka Belitung			Jumlah peralatan gedung kantor	5 unit					**50.000.000**	**55.000.000**		
		.01	01. 03	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	PENINGKATAN PEMBANGUNAN BIDANG KEBENCANAAN		Provinsi Kep Bangka Belitung	Provinsi Kep Bangka Belitung	Provinsi Kep Bangka Belitung			Jumlah rumah dinas yang dipelihara	1 unit					**20.000.000**	**22.000.000**		
		.01	01. 03	25	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	PENINGKATAN PEMBANGUNAN BIDANG KEBENCANAAN		Provinsi Kep Bangka Belitung	Provinsi Kep Bangka Belitung	Provinsi Kep Bangka Belitung			jumlah gedung kantor yang dipelihara	2 unit					**25.000.000**	**27.500.000**		
		.01	01. 03	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	PENINGKATAN PEMBANGUNAN BIDANG KEBENCANAAN		Provinsi Kep Bangka Belitung	Provinsi Kep Bangka Belitung	Provinsi Kep Bangka Belitung			jumlah mobil jabatan yang dipelihara	1 unit					**45.000.000**	**49.500.000**		
		.01	01. 03	27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	PENINGKATAN PEMBANGUNAN BIDANG KEBENCANAAN		Provinsi Kep Bangka Belitung	Provinsi Kep Bangka Belitung	Provinsi Kep Bangka Belitung			Jumlah mobil oprasional yang dipelihara	3 unit					**30.000.000**	**33.000.000**		
		.01	01. 03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	PENINGKATAN PEMBANGUNAN BIDANG KEBENCANAAN		Provinsi Kep Bangka Belitung	Provinsi Kep Bangka Belitung	Provinsi Kep Bangka Belitung			Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	60 unit					**50.000.000**	**95.562.000**		
		.01	01. 03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	PENINGKATAN PEMBANGUNAN BIDANG KEBENCANAAN		Provinsi Kep Bangka Belitung	Provinsi Kep Bangka Belitung	Provinsi Kep Bangka Belitung			jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	75 unit					**50.000.000**	**55.000.000**		
		.01	01. 03	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	PENINGKATAN PEMBANGUNAN BIDANG KEBENCANAAN		Provinsi Kep Bangka Belitung	Provinsi Kep Bangka Belitung	Provinsi Kep Bangka Belitung			jumlah mebeler yang dipelihara	8 unit					**11.000.000**	**5.500.000**		
		.01	01. 03	41	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	PENINGKATAN PEMBANGUNAN BIDANG KEBENCANAAN		Provinsi Kep Bangka Belitung	Provinsi Kep Bangka Belitung	Provinsi Kep Bangka Belitung			jumlah kendaraan dinas yang direhabilitasi	3 unit					**150.000.000**	**159.270.000**		
					URUSAN WAJIB														**8.612.100.455**	**9.473.310.501**		
					PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	PENINGKATAN PEMBANGUNAN BIDANG KEBENCANAAN	Meningkatnya Kapasitas daerah terhadap bencana												**8.612.100.455**	**9.473.310.501**		
					Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	PENINGKATAN PEMBANGUNAN BIDANG KEBENCANAAN		Prov.Kep.Bangka Belitung	Prov.Kep.Bangka Belitung	Prov.Kep.Bangka Belitung					Jumlah Pelayanan Informasi Publikasi Rawan Bencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	10 Media cetak/elektronik	550.000.000	605.000.000		Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
					Penyusunan Kajian Resiko Bencana Provinsi	PENINGKATAN PEMBANGUNAN BIDANG KEBENCANAAN		Prov.Kep.Bangka Belitung	Prov.Kep.Bangka Belitung	Prov.Kep.Bangka Belitung			Jumlah Dokumen Penyusunan Kajian Kebencanaan di daerah rawan bencana di 7 Kabupaten/kota	1 Dokumen			300.000.000	330.000.000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
					Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	PENINGKATAN PEMBANGUNAN BIDANG KEBENCANAAN		Prov.Kep.Bangka Belitung	Prov.Kep.Bangka Belitung	Prov.Kep.Bangka Belitung			Jumlah Orang Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	100 orang			100.000.000	110.000.000		
					Pengembangan Sistem Peringatan Dini (Early Warning System) Bencana	PENINGKATAN PEMBANGUNAN BIDANG KEBENCANAAN		Prov.Kep.Bangka Belitung	Prov.Kep.Bangka Belitung	Prov.Kep.Bangka Belitung			Jumlah Pengembangan Sistem Peringatan Dini (Early Warning System) Bencana	1 Unit			150.000.000	165.000.000		
					Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	PENINGKATAN PEMBANGUNAN BIDANG KEBENCANAAN		Prov.Kep.Bangka Belitung	Prov.Kep.Bangka Belitung	Prov.Kep.Bangka Belitung					Jumlah Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Di 7 Kab/Kota	Di 7 Kab/Kota	6.489.112.695	7.138.023.965		Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
					Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	PENINGKATAN PEMBANGUNAN BIDANG KEBENCANAAN		Prov.Kep.Bangka Belitung	Prov.Kep.Bangka Belitung	Prov.Kep.Bangka Belitung			Jumlah Laporan Tersusunnya Rencana Penanggulangan Bencana.	1 Laporan			393.472.395	432.819.635		
					Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	PENINGKATAN PEMBANGUNAN BIDANG KEBENCANAAN		Prov.Kep.Bangka Belitung	Prov.Kep.Bangka Belitung	Prov.Kep.Bangka Belitung			Jumlah Orang Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	100 Orang			200.000.000	220.000.000		
					Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	PENINGKATAN PEMBANGUNAN BIDANG KEBENCANAAN		Prov.Kep.Bangka Belitung	Prov.Kep.Bangka Belitung	Prov.Kep.Bangka Belitung			Jumlah Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1 Pengendalian Operasi Pusdalops	-	-	1.950.000.000	2.145.000.000		
					Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	PENINGKATAN PEMBANGUNAN BIDANG KEBENCANAAN		Prov.Kep.Bangka Belitung	Prov.Kep.Bangka Belitung	Prov.Kep.Bangka Belitung			Jumlah Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	4 item peralatan			150.000.000	165.000.000		
					Pengelolaan Risiko Bencana	PENINGKATAN PEMBANGUNAN BIDANG KEBENCANAAN		Prov.Kep.Bangka Belitung	Prov.Kep.Bangka Belitung	Prov.Kep.Bangka Belitung			Jumlah Pengelolaan Risiko Bencana Di 7 Kab/Kota Prov.Kep.Bangka Belitung	7 Kab/Kota Prov.Kep.Bangka Belitung			100.000.000	110.000.000		
					Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	PENINGKATAN PEMBANGUNAN BIDANG KEBENCANAAN		Prov.Kep.Bangka Belitung	Prov.Kep.Bangka Belitung	Prov.Kep.Bangka Belitung			Jumlah Orang Dalam Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	100 Orang			150.000.000	165.000.000		
					Penanganan Pascabencana	PENINGKATAN PEMBANGUNAN BIDANG KEBENCANAAN		Prov.Kep.Bangka Belitung	Prov.Kep.Bangka Belitung	Prov.Kep.Bangka Belitung			Jumlah Penanganan Pasca Bencana di 7 Kab/Kota Prov.Kep.Bangka Belitung	7 Kab/Kota Prov.Kep.Bangka Belitung			3.145.640.300	3.460.204.330		
					Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	PENINGKATAN PEMBANGUNAN BIDANG KEBENCANAAN		Prov.Kep.Bangka Belitung	Prov.Kep.Bangka Belitung	Prov.Kep.Bangka Belitung			Jumlah Orang Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	100 Orang			400.000.000	440.000.000		
					Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	PENINGKATAN PEMBANGUNAN BIDANG KEBENCANAAN		Prov.Kep.Bangka Belitung	Prov.Kep.Bangka Belitung	Prov.Kep.Bangka Belitung					Jumlah Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Di 7 Kab/Kota Prov.Kep.Bangka Belitung	7 Kab/Kota Prov.Kep.Bangka Belitung	1.572.987.760	1.730.286.536		Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
					Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	PENINGKATAN PEMBANGUNAN BIDANG KEBENCANAAN		Prov.Kep.Bangka Belitung	Prov.Kep.Bangka Belitung	Prov.Kep.Bangka Belitung			Jumlah Waktu Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	1 Bulan			300.000.000	330.000.000		
					Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	PENINGKATAN PEMBANGUNAN BIDANG KEBENCANAAN		Prov.Kep.Bangka Belitung	Prov.Kep.Bangka Belitung	Prov.Kep.Bangka Belitung			Jumlah Waktu Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	1 Bulan			300.000.000	330.000.000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
					Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	PENINGKATAN PEMBANGUNAN BIDANG KEBENCANAAN		Prov.Kep.Bangka Belitung	Prov.Kep.Bangka Belitung	Prov.Kep.Bangka Belitung			Jumlah Pengerahan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Di 7 Kab/Kota Prov.Kep.Bangka Belitung	37 orang			400.000.000	440.000.000		
					Penyediaan Logistik Penyelatam dan Evakuasi Korban Bencana	PENINGKATAN PEMBANGUNAN BIDANG KEBENCANAAN		Prov.Kep.Bangka Belitung	Prov.Kep.Bangka Belitung	Prov.Kep.Bangka Belitung			Jumlah Item Penyediaan Logistik Penyelatam dan Evakuasi Korban	10 jenis			572.987.760	630.286.536		
					JUMLAH TOTAL												**16.953.731.363**	**18.450.754.605**		

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2021

UNIT ORGANISASI : INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kabupaten	Kota	Kelurahan	Hasil Program/ Indikator Program		Hasil Kegiatan/ Indikator Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan/ Indikator Sub kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN																
					URUSAN PENGAWASAN												19.888.216.979	23.832.963.639		
6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH												17.548.216.979	19.422.963.639		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas ASN		Pangkalpinang	Air Itam	Nilai Sakip PD	80,00					17.548.216.979	19.422.963.639	Peningkatan tata kelola pemerintahan	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
											Survey Kepuasan Pelayanan Internal	85%								
6	01	01	1.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												272.000.000	535.000.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas ASN		Pangkalpinang	Air Itam			Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	14 Dokumen			272.000.000	535.000.000		
6	01	01	1.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah												80.000.000	160.000.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas ASN		Pangkalpinang	Air Itam					Jumlah dok perencanaan Renstra/Renja PD	2 dokumen	80.000.000	160.000.000		
6	01	01	1.01	02	Penyusunan Program dan kegiatan perangkat daerah dalam dokumen perencanaan												40.000.000	65.000.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas ASN		Pangkalpinang	Air Itam					Jumlah dokumen DPA/DPPA yang tersusun	4 Dokumen	40.000.000	65.000.000		
6	01	01	1.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah												24.000.000	100.000.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas ASN		Pangkalpinang	Air Itam					Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi PD	4 Dokumen	24.000.000	100.000.000		
6	01	01	1.01	04	Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah												80.000.000	150.000.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas ASN		Pangkalpinang	Air Itam					jumlah dokumen kesepakatan Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan PD	1 Dokumen	80.000.000	150.000.000		
6	01	01	1.01	05	Evaluasi kinerja Perangkat Daerah												48.000.000	60.000.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas ASN		Pangkalpinang	Air Itam					Jumlah dokumen Evaluasi kinerja PD	3 Dokumen	48.000.000	60.000.000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kabupaten	Kota	Kelurahan	Hasil Program/ Indikator Program		Hasil Kegiatan/ Indikator Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan/ Indikator Sub kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
6	**01**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan**												**14.913.679.656**	**15.685.763.639**		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik	**Meningkatnya Kualitas ASN**		**Pangkalpinang**	**Air Itam**			Survey Kepuasan Pelayanan Keuangan	95			**14.913.679.656**	**15.685.763.639**		
6	01	01	1.02	01	Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN												14.881.679.656	15.625.763.639		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas ASN		Pangkalpinang	Air Itam					jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	88 orang	14.881.679.656	15.625.763.639		
6	01	01	1.02	07	Penyusunan laporan keuangan bulanan/semesteran												20.000.000	30.000.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas ASN		Pangkalpinang	Air Itam					Jumlah laporan keuangan bulanan/ Semesteran	14 laporan	20.000.000	30.000.000		
6	01	01	1.02	09	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun												12.000.000	30.000.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas ASN		Pangkalpinang	Air Itam					Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 laporan	12.000.000	30.000.000		
6	**01**	**01**	**1.03**		**Adminstrasi Umum**												**2.170.687.323**	**2.877.200.000**		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik	**Meningkatnya Kualitas ASN**		**Pangkalpinang**	**Air Itam**			**survey kepuasan pelayanan internal**	**95**			**2.170.687.323**	**2.877.200.000**		
6	01	01	1.03	01	Penyediaan Jasa surat menyurat												287.340.000	329.900.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas ASN		Pangkalpinang	Air Itam					Jumlah Surat/Barang yang dikirim	300 Surat/Barang yang dikirim	16.000.000	30.000.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas ASN		Pangkalpinang	Air Itam					Jumlah Materai	4500 Lembar	7.440.000	36.000.000		
															Jumlah tenaga pramubakti yang dipekerjakan	7 orang	263.900.000	263.900.000		
6	01	01	1.03	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik												170.377.323	260.000.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas ASN		Pangkalpinang	Air Itam					Tagihan rekening listrik, air, telepon/fax, tv kabel, virtual meeting yang dibayarkan	12 bulan	170.377.323	260.000.000		
6	01	01	1.03	03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor												190.800.000	245.800.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas ASN		Pangkalpinang	Air Itam					jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor	45 kali	40.000.000	95.000.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas ASN		Pangkalpinang	Air Itam					Jumlah tenaga keamanan/satpam kantor yang dipekerjakan	4 orang	150.800.000	150.800.000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kabupaten	Kota	Kelurahan	Hasil Program/ Indikator Program		Hasil Kegiatan/ Indikator Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan/ Indikator Sub kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
6	01	01	1.03	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional												49.700.000	52.700.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas ASN		Pangkalpinang	Air Itam					jumlah kendaraan operasional yang dipelihara	4 unit	12.000.000	15.000.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas ASN		Pangkalpinang	Air Itam					Jumlah tenaga sopir yang dipekerjakan	1 orang	37.700.000	37.700.000		
6	01	01	1.03	07	Penyediaan jasa Administrasi keuangan												44.200.000	55.250.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas ASN		Pangkalpinang	Air Itam					Jumlah pengelola administrasi keuangan yang bekerja	12 orang	44.200.000	55.250.000		
6	01	01	1.03	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor												303.900.000	313.900.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas ASN		Pangkalpinang	Air Itam					Jumlah tenaga kebersihan/pramu bakti	7 orang	263.900.000	263.900.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas ASN		Pangkalpinang	Air Itam					Jumlah jenis bahan dan Peralatan kebersihan kantor yang tersedia	70 Jenis	40.000.000	50.000.000		
6	01	01	1.03	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja												40.000.000	50.000.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas ASN		Pangkalpinang	Air Itam					jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	79 Jenis	40.000.000	50.000.000		
6	01	01	1.03	10	Penyediaan alat tulis kantor												80.000.000	100.000.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas ASN		Pangkalpinang	Air Itam					jumlah jenis ATK yang dibeli	85 jenis	80.000.000	100.000.000		
6	01	01	1.03	11	Penyediaan barang cetak dan penggandaan												33.250.000	40.250.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas ASN		Pangkalpinang	Air Itam					jumlah barang cetak	13 eksemplar	28.000.000	35.000.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas ASN		Pangkalpinang	Air Itam					Jumlah penggandaan	15000 lembar	5.250.000	5.250.000		
6	01	01	1.03	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor												16.000.000	20.000.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas ASN		Pangkalpinang	Air Itam					Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia	30 Jenis	16.000.000	20.000.000		
6	01	01	1.03	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor												80.000.000	100.000.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas ASN		Pangkalpinang	Air Itam					jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	40 jenis	80.000.000	100.000.000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kabupaten	Kota	Kelurahan	Hasil Program/ Indikator Program		Hasil Kegiatan/ Indikator Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan/ Indikator Sub kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
6	01	01	1.03	14	Penyediaan peralatan rumah tangga												2.000.000	2.000.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas ASN		Pangkalpinang	Air Itam					Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	1 unit	2.000.000	2.000.000		
6	01	01	1.03	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan												16.000.000	20.000.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas ASN		Pangkalpinang	Air Itam					Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan yang tersedia	5 eksemplar	16.000.000	20.000.000		
6	01	01	1.03	16	Penyediaan bahan logistik kantor												20.000.000	25.000.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas ASN		Pangkalpinang	Air Itam					jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	7 jenis	20.000.000	25.000.000		
6	01	01	1.03	17	Penyediaan makan dan minum												113.920.000	142.400.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas ASN		Pangkalpinang	Air Itam					Jumlah makan dan minum Tamu yang tersedia	36 Pax	49.920.000	62.400.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas ASN		Pangkalpinang	Air Itam					Jumlah makan dan minum rapat yang tersedia	48 Pax	64.000.000	80.000.000		
6	01	01	1.03	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah												360.000.000	600.000.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas ASN		Pangkalpinang	Air Itam					jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dilaksanakan	36 kali	280.000.000	400.000.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas ASN		Pangkalpinang	Air Itam					Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah dilaksanakan	36 kali	80.000.000	200.000.000		
6	01	01	1.03	23	Pengadaan perlengkapan gedung kantor												40.000.000	50.000.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas ASN		Pangkalpinang	Air Itam					jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan	14 jenis	40.000.000	50.000.000		
6	01	01	1.03	25	Pengadaan peralatan gedung kantor												20.000.000	25.000.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas ASN		Pangkalpinang	Air Itam					Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	12 jenis	20.000.000	25.000.000		
6	01	01	1.03	29	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor												80.000.000	100.000.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas ASN		Pangkalpinang	Air Itam					jumlah gedung kantor yang dipelihara	2 unit	80.000.000	100.000.000		
6	01	01	1.03	30	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan												24.000.000	30.000.000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kabupaten	Kota	Kelurahan	Hasil Program/ Indikator Program		Hasil Kegiatan/ Indikator Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan/ Indikator Sub kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas ASN		Pangkalpinang	Air Itam					jumlah mobil jabatan yang dipelihara	1 unit	24.000.000	30.000.000		
6	01	01	1.03	31	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/Operasional												92.000.000	115.000.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas ASN		Pangkalpinang	Air Itam					Jumlah kendaraan operasional yang dipelihara	3 unit	92.000.000	115.000.000		
6	01	01	1.03	33	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor												40.000.000	50.000.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas ASN		Pangkalpinang	Air Itam					Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	60 unit	40.000.000	50.000.000		
6	01	01	1.03	35	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor												67.200.000	150.000.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas ASN		Pangkalpinang	Air Itam					jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	36 unit	60.000.000	140.000.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas ASN		Pangkalpinang	Air Itam					Jumlah BBM Genset	750 liter	7.200.000	10.000.000		
6	**01**	**01**	**1.04**		**Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**												**191.850.000**	**325.000.000**		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik	**Meningkatnya Kualitas ASN**		**Pangkalpinang**	**Air Itam**			**Survey kepuasan pelayanan kepegawaian**	**95**			**191.850.000**	**325.000.000**		
6	01	01	1.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal												191.850.000	325.000.000		
					Pendidikan dan pelatihan formal	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas ASN		Pangkalpinang	Air Itam					jumlah pegawai ASN yang ikut pendidikan dan pelatihan formal	88 orang	191.850.000	325.000.000		
6	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**												**1.480.000.000**	**3.000.000.000**		
								DKI Jakarta, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Bangka Barat, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpinang	**Sesuai Lokasi**	**Sesuai Lokasi**	**Persentase Tingkat Materialitas Temuan Hasil Pemeriksaan**	**<5%**				**1.480.000.000**	**3.000.000.000**	**Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik**	**Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar**
6	**01**	**02**	**1.01**		**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**												**1.280.000.000**	**2.600.000.000**		
								Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Bangka Barat, Belitung, Belitung Timur,	**DKI Jakarta, Pangkalpinang**	**Sesuai Lokasi**			**Persentase Obyek Pemeriksaan yang dilakukan pengawasan internal meliputi Audit, Review, Pemantauan dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan**	**100%**			**1.280.000.000**	**2.600.000.000**		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kabupaten	Kota	Kelurahan	Hasil Program/ Indikator Program		Hasil Kegiatan/ Indikator Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan/ Indikator Sub kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
6	01	02	1.01	01	Audit Kinerja dan Keuangan												376.000.000	775.000.000		
								Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Bangka Barat, Belitung, Belitung Timur	Pangkalpinang	Sesuai Lokasi					Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dihasilkan Bidang Pemerintahan dan Aparatur	40 Laporan	120.000.000	250.000.000		
								Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Bangka Barat, Belitung, Belitung Timur	DKI Jakarta, Pangkalpinang	Sesuai Lokasi					Jumlah LHP yang dihasilkan wilayah Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	40 Laporan	136.000.000	275.000.000		
								Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Bangka Barat, Belitung, Belitung Timur	Pangkalpinang	Sesuai Lokasi					Jumlah LHP yang dihasilkan Bidang Pembangunan, Sosial, Ekonomi dan Budaya	40 Laporan	120.000.000	250.000.000		
6	01	02	1.01	02	Review Kinerja dan Keuangan												360.000.000	900.000.000		
									Pangkalpinang	Air Itam					Jumlah LHR yang dihasilkan Bidang Pemerintahan dan Aparatur	34 Laporan	120.000.000	300.000.000		
									Pangkalpinang	Air Itam					Jumlah LHR yang dihasilkan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	34 Laporan	120.000.000	300.000.000		
									Pangkalpinang	Air Itam					Jumlah LHR yang dihasilkan Bidang Pembangunan, Sosial, Ekonomi dan Budaya	34 Laporan	120.000.000	300.000.000		
								DKI Jakarta, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Bangka Barat, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpinang	**Sesuai Lokasi**	**Sesuai Lokasi**	**Persentase Peningkatan TLHP BPK dan APIP**	**85%**				**384.000.000**	**650.000.000**	**Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik**	**Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar**
6	01	02	1.01	03	Pemantauan Kinerja dan Keuangan												364.000.000	625.000.000		
								Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah Laporan Hasil Pemantauan yang dihasilkan Bidang Pemerintahan dan Aparatur	20 Laporan	120.000.000	200.000.000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kabupaten	Kota	Kelurahan	Hasil Program/ Indikator Program		Hasil Kegiatan/ Indikator Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan/ Indikator Sub kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
								Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah Laporan Hasil Pemantauan yang dihasilkan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	20 Laporan	124.000.000	225.000.000		
								Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah Laporan Hasil Pemantauan yang dihasilkan Bidang Pembangunan, Sosial, Ekonomi dan Budaya	20 Laporan	120.000.000	200.000.000		
6	01	02	1.01	04	Evaluasi Kinerja dan Keuangan												180.000.000	300.000.000		
								Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah LHE yang dihasilkan Bidang Pemerintahan dan Aparatur	12 Laporan	60.000.000	100.000.000		
								Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah LHE yang dihasilkan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	13 Laporan	60.000.000	100.000.000		
								Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah LHE yang dihasilkan Bidang Pembangunan, Sosial, Ekonomi dan Budaya	13 Laporan	60.000.000	100.000.000		
6	**01**	**02**	**01.02**		**Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu**												**200.000.000**	**400.000.000**		
								DKI Jakarta, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Bangka Barat, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpinang	**Sesuai Lokasi**	**Sesuai Lokasi**			**Persentase Obyek Pemeriksaan yang dilakukan pengawasan dengan tujuan tertentu meliputi Audit Kinerja dan Keuangan**	**100%**			**200.000.000**	**400.000.000**		
6	01	02	01.02	01	Audit Kinerja dan Keuangan												200.000.000	400.000.000		
								DKI Jakarta, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Bangka Barat, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpinang	Sesuai Lokasi	Sesuai Lokasi					Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dihasilkan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Bidang Investigatif	100%	100.000.000	200.000.000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kabupaten	Kota	Kelurahan	Hasil Program/ Indikator Program		Hasil Kegiatan/ Indikator Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan/ Indikator Sub kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
								DKI Jakarta, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Bangka Barat, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpinang	Sesuai Lokasi	Sesuai Lokasi					Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dihasilkan Pengawasan Lainnya Bidang Investigatif	100%	100.000.000	200.000.000		
6	**01**	**03**			**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**												**860.000.000**	**1.410.000.000**		
									Pangkalpinang	**Air Itam**	**Nilai Hasil Evaluasi Maturitas SPIP Level 3**	**3**					**240.000.000**	**425.000.000**	**Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik**	**Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar**
6	**01**	**03**	**1.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan**												**240.000.000**	**425.000.000**		
									Pangkalpinang	**Air Itam**			**Persentase Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang dirumuskan**	**100%**			**240.000.000**	**425.000.000**		
6	01	03	1.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasan												80.000.000	100.000.000		
									Pangkalpinang	Air Itam					Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang dirumuskan Bidang Pemerintahan dan Aparatur	2 Dokumen	20.000.000	25.000.000		
									Pangkalpinang	Air Itam					Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang dirumuskan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2 Dokumen	20.000.000	25.000.000		
									Pangkalpinang	Air Itam					Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang dirumuskan Bidang Pembangunan, Sosial, Ekonomi dan Budaya	2 Dokumen	20.000.000	25.000.000		
									Pangkalpinang	Air Itam					Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang dirumuskan Bidang Investigatif	2 Dokumen	20.000.000	25.000.000		
6	01	03	1.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Fasilitasi Pengawasan												160.000.000	325.000.000		
								Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah Dokumen Peta Risiko Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Aparatur	12 Dokumen	20.000.000	50.000.000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kabupaten	Kota	Kelurahan	Hasil Program/ Indikator Program		Hasil Kegiatan/ Indikator Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan/ Indikator Sub kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
								Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah Dokumen Peta Risiko Perangkat Daerah Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	12 Dokumen	20.000.000	50.000.000		
								Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah Dokumen Peta Risiko Perangkat Daerah Bidang Pembangunan, Sosial, Ekonomi dan Budaya	12 Dokumen	20.000.000	50.000.000		
								Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah Sistem Informasi Pengawasan	1 Aplikasi	100.000.000	175.000.000		
											Nilai Hasil Kapabilitas APIP Level 3	**3**					**620.000.000**	**985.000.000**		
6	**01**	**03**	**01:02**		**Asistensi dan Pendampingan**												**620.000.000**	**985.000.000**		
								Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Bangka Barat, Belitung, Belitung Timur	**DKI Jakarta, Pangkalpinang**	**Sesuai Lokasi**			**Persentase Asistensi dan Pendampingan yang dilaksanakan**	**100%**			**620.000.000**	**985.000.000**		
6	01	03	01.02	01	Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat												120.000.000	200.000.000		
								Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Bangka Barat, Belitung, Belitung Timur	DKI Jakarta, Pangkalpinang	Sesuai Lokasi					Persentase Pengaduan Masyarakat ditindak lanjuti	100%	120.000.000	200.000.000		
6	01	03	01.02	02	Asistensi dan Pendampingan												500.000.000	785.000.000		
									Pangkalpinang	Air Itam					Persentase Kepatuhan Laporan e-LHPKN	100%	80.000.000	100.000.000		
									Pangkalpinang	Air Itam					Persentase Kepatuhan Laporan LHKASN	100%	80.000.000	100.000.000		
									Pangkalpinang	Air Itam					Jumlah Laporan Tim Satgas Saber Pungli	2 Laporan	80.000.000	100.000.000		
									Pangkalpinang	Air Itam					Persentase Penyelesaian Laporan dalam Sistem Monitoring Center and Prevention Korsupgah KPK	100%	20.000.000	50.000.000		
									Pangkalpinang	Air Itam					Persentase Penyelesaian Laporan dalam Strategi Nasional Pencengahan Korupsi (jaga.id)	100%	20.000.000	50.000.000		
									Pangkalpinang	Air Itam					Persentase Capaian Nilai PMPRB Area Penguatan Pengawasan	85%	20.000.000	50.000.000		
									Pangkalpinang	Air Itam					Jumlah unit Kerja yang diusulkan untuk Zona Integritas	2 Unit	20.000.000	50.000.000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kabupaten	Kota	Kelurahan	Hasil Program/ Indikator Program		Hasil Kegiatan/ Indikator Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan/ Indikator Sub kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
									Pangkalpinang	Air Itam					Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP	34 PD	40.000.000	60.000.000		
									Pangkalpinang	Air Itam					Persentase Tindak Lanjut atas Pengaduan melalui Whistle Blowing System	100%	20.000.000	50.000.000		
									Pangkalpinang	Air Itam					Jumlah Laporan Gratifikasi	4 Laporan	20.000.000	50.000.000		
									Pangkalpinang	Air Itam					Persentase penyelesaian Kerugian Daerah	20%	100.000.000	125.000.000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Bangka Belitung
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.04.5.04.0.00.01.00 BADAN KEUANGAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.04.5.04.0.00.01.00 BADAN KEUANGAN DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
				Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
	SUB UNIT : BADAN KEUANGAN DAERAH												69.880.101.573,00	73.326.594.151,65		
	PROGRAM/KEGIATAN RUTIN												64.337.213.423,00	67.554.074.094,15		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						Nilai Sakip PD	80					64.337.213.423,00	67.554.074.094,15		
01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										Jumlah dok perencanaan dan evaluasi	10 dokumen	141.000.000,00	148.050.000,00		
01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah								Jumlah dok perencanaan PD	3 dokumen			45.400.000,00	47.670.000,00		
01.2.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah								Jumlah dok evaluasi PD (DALEV)	7 dokumen			95.600.000,00	100.380.000,00		
01.2.02	Administrasi Keuangan										Survey kepuasan pelayanan keuangan	83	53.473.887.423,00	56.147.581.794,15		
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								jumlah ASN yang terima gaji dan tunjangan				53.423.887.423,00	56.095.081.794,15		
01.2.02.08	*Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi anggaran*								jumlah pelaksana tugas ASN				50.000.000,00	52.500.000,00		
01:02:03	Administrasi Umum										survey kepuasan pelayanan umum	80	10.722.326.000,00	11.258.442.300,00		
01.2.03.01	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*								Jumlah Surat/Barang ya	88 paket			63.600.000,00	66.780.000,00		
									Jumlah Materai	5500 lembar						
01.2.03.02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*								Jumlah tagihan listrik	96 bulan rekening			945.600.000,00	992.880.000,00		
									Jumlah tagihan komunikasi	276 bulan rekening						
									Jumlah tagihan Air	36 bulan rekening						
01.2.03.03	*Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*								jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor	25 jasa layanan			1.809.600.000,00	1.900.080.000,00		
									Jumlah tenaga keamanan/satpam kantor	48 orang						
01.2.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan								Jumlah pengelola administrasi keuangan	36 orang			1.220.846.000,00	1.281.888.300,00		
01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor								Jumlah pengelola jasa kebersihan kantor	4 jasa layanan			3.641.100.000,00	3.823.155.000,00		
									Jumlah tenaga kebersihan/pramubakti	86 orang						
01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor								jumlah jenis ATK yang dibeli	70 jenis			400.000.000,00	420.000.000,00		
01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								jumlah barang cetak	20 jenis			906.000.000,00	951.300.000,00		
									Jumlah penggandaan	280000 lembar						
01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								Jumlah komponen instalasi listrik	15 jenis			18.000.000,00	18.900.000,00		
01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan	9 jenis			30.000.000,00	31.500.000,00		
01.2.03.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								jumlah bahan logistik kantor	10 jenis			40.600.000,00	42.630.000,00		
01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman								Jumlah makan dan minum Tamu	1200 orang			30.000.000,00	31.500.000,00		
									Jumlah makan dan minum rapat	4770 orang						
01.2.03.18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah								jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	32 kali			250.000.000,00	262.500.000,00		
									Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah	55 kali						

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
				Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor								Jumlah rumah dinas yang dipelihara	3 unit			630.100.000,00	661.605.000,00		
									jumlah gedung kantor yang dipelihara	8 unit						
01.2.03.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan								jumlah mobil jabatan yang dipelihara	1 unit			51.500.000,00	54.075.000,00		
01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional								Jumlah mobil oprasional yang dipelihara	31 unit			565.380.000,00	593.649.000,00		
									Jumlah tenaga sopir	12 orang						
01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor								Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	60 unit			120.000.000,00	126.000.000,00		
									jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	75 unit						
									jumlah mebeler yang dipelihara	8 unit						
									jumlah rumah dinas yang direhabilitasi	5 unit						
									jumlah kendaraan dinas yang direhabilitasi	3 unit						
05.02	**Urusan Keuangan**												5.542.888.150	5.772.520.058		
05.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						persentase Transaparansi dan akuntabiitas pengelolaan	**100**					2.834.351.650,00	2.976.069.232,50		
05.02.02.1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah										Prosentase ketepatan waktu penetapan APBD dan APBD	100	1.415.340.000,00	1.486.107.000,00		
											Persentase pemenuhan ketaatan pada peraturan dalam	100				
05.02.02.1.01.01	Penyusunan KUA dan PPAS								Jumlah dokumen KUA dan PPAS	2 dokumen			115.050.000	120.802.500,00		
05.02.02.1.01.02	Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS								Jumlah dokumen KUPA dan Perubahan PPAS	2 dokumen			115.050.000	120.802.500,00		
05.02.02.1.01.05	Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD								Jumlah peraturan tersusun	2 peraturan			518.345.000	544.262.250,00		
05.02.02.1.01.06	Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD								Jumlah peraturan tersusun	2 peraturan			516.895.000	542.739.750,00		
05.02.02.1.01.08	Penyusunan Regulasi Bidang Anggaran	**Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik**	**Meningkatkan tata kelola pemerintahan**						Jumlah peraturan tersusun	3 peraturan			150.000.000	157.500.000,00		
05.02.02.1.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan daerah Kabupaten/Kota	**Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik**	**Meningkatkan tata kelola pemerintahan**								Persentase ketepatan waktu penyampaian rancangan APBD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	100	401.448.000,00	421.520.400,00	**peningkatan tata kelola pemerintahan**	**Reformasi Birokrasi**
		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Persentase ketepatan waktu penyampaian rancangan pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	100				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
				Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
05.02.02.1.02.01	Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota								Jumlah Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi KAbupaten/Kota	7 keputusan			84.737.000	88.973.850,00		
05.02.02.1.02.02	Evaluasi APBD Kabupaten/Kota								Jumlah Keputusan Gubernur tentang Evaluasi APBD KAbupaten/Kota	7 keputusan			84.737.000	88.973.850,00	**266.921.550,00**	
05.02.02.1.02.03	Evaluasi Perubahan APBD Kabupaten/Kota								Jumlah Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Perubahan APBD KAbupaten/Kota	7 keputusan			84.737.000	88.973.850,00	**66730387,5**	
05.02.02.1.02.04	Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota								Jumlah Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	7 keputusan			84.737.000	88.973.850,00		
05.02.02.1.02.05	Asistensi Pengeloaan Keuangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			jumlah asistensi pemecahan permasalahan penyusunan APBD Kab/kota	2 kali asistensi			62.500.000	65.625.000,00		
05.02.02.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					prosentase kesesuaian waktu pelayanan terhadap pencairan dana keuangan	100	492.091.200,00	516.695.760,00		
05.02.02.1.03.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah dokumen register SP2D, Buku Kas Umum B.IX BUD, Laporan posisi kas harian dan laporan posisi kas bulanan, dokumen SPD	38 dokumen			101.101.200	106.156.260,00		
05.02.02.1.03.02	Penatausahaan Pembiayaan Daerah								jumlah dokumen penatausahaan pembiayaan	1 dokumen			72.900.000	76.545.000,00		
05.02.02.1.03.03	Koordinasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya								Dokumen kesepakatan Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer lainnya	1 dokumen			63.700.000	66.885.000,00		
05.02.02.1.03.04	Pemprosesan, Penerbitan dan Pendistribusian Lembar SP2D								Jumlah SP2D yang dikeluarkan	5000 dokumen			53.000.000	55.650.000,00		
05.02.02.1.03.05	Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan Rincian Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji, Serta Penerbitan SKPP	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah dokumen terverifikasi	5200 dokumen			50.820.000	53.361.000,00		
05.02.02.1.03.08	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			jumlah dokumen rekonsiliasi dan laporan	24 dokumen			150.570.000	158.098.500,00		
05.02.02.1.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					persentase laporan keuangan PD yang sesuai dengan SAP	100	525.472.450,00	551.746.072,50		
05.02.02.1.04.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah dokumen rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah	1 dokumen			68.544.600	71.971.830,00		
05.02.02.1.04.02	Koordinasi dan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Provinsi	**Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik**	**Meningkatkan tata kelola pemerintahan**						Jumlah asistensi penyusunan laporan keuangan kepada SKPD	34 asistensi			121.877.850	127.971.742,50	**peningkatan tata kelola pemerintahan**	**Reformasi Birokrasi**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
				Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
05.02.02.1.04.04	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah Perda pertanggungjawaban APBD	1 peraturan			245.300.000	257.565.000,00		
05.02.02.1.04.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah peraturan tersusun	2 peraturan			44.500.000	46.725.000,00		
05.02.02.1.04.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah peraturan tentang sisdur	1 peraturan			45.250.000	47.512.500,00		
05.02.03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**						persentase tindak lanjut temuan BPK terhadap nilai aset daerah yang dianggap belum diyakini kewajarannya/tidak memadai	95.5%					1.125.689.000	1.134.460.950		
05.02.03.1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	**Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik**	**Meningkatkan tata kelola pemerintahan**								persentase laporan BMD PD yang sesuai dengan Peraturan	100	1.125.689.000	1.134.460.950		
05.02.03.1.01.01	Koordinasi dan Penyusunan Standar Harga Berdasarkan Jenis dan Tipe Barang	**Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik**	**Meningkatkan tata kelola pemerintahan**						Jumlah Keputusan Gubernur tentang penetapan HSBJ	1 keputusan			113.040.000	118.692.000,00	**peningkatan tata kelola pemerintahan**	**Reformasi Birokrasi**
05.02.03.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah Keputusan tentang standar kebutuhan BMD	1 keputusan			58.765.000	61.703.250,00		
05.02.03.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Pemeliharaan/Perawatan Barang Milik Daerah	**Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik**	**Meningkatkan tata kelola pemerintahan**						Jumlah Keputusan Gubernur tentang RKPBMD	1 keputusan			58.765.000	61.703.250,00	**peningkatan tata kelola pemerintahan**	**Reformasi Birokrasi**
05.02.03.1.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Tersajinya data BMD yang terupdate pada sistem Informasi Pengelolaan BMD	34 dokumen			97.100.000	101.955.000,00		
05.02.03.1.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Tersusunnya dokumen inventarisasi BMD	1 dokumen			165.950.000	174.247.500,00		
05.02.03.1.01.07	Koordinasi Pelaksanaan Pengamanan Fisik, Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah	**Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik**	**Meningkatkan tata kelola pemerintahan**						Jumlah laporan Koordinasi Pelaksanaan Pengamanan Fisik, Administrasi dan Hukum Barang Milik	1 dokumen			146.369.000	153.687.450,00	**peningkatan tata kelola pemerintahan**	**Reformasi Birokrasi**
05.02.03.1.01.08	Koordinasi Hasil Penilaian Barang Milik Daerah	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah Dokumen Penilaian Asset dalam rangka pemindahtanganan, pemanfaatan dan penyusunan neraca	3 dokumen			182.430.000	191.551.500,00		
05.02.03.1.01.09	Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah								Jumlah laporan pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 laporan			93.360.000	98.028.000,00		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
				Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
05.02.03.1.01.10	Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Pemindahtanganan Barang Milik Daerah								Jumlah laporan pengawasan dan pengendalian atas Pemindahtanganan Barang Milik Daerah				93.880.000	98.574.000,00		
05.02.03.1.01.11	Koordinasi Pelaksanaan Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah								Jumlah dokumen Rekonsiliasi BMD	34 dokumen			70.780.000	74.319.000,00	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
05.02.03.1.01.12	Konsolidasi Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah dari SKPD	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah Laporan BMD	2 dokumen			45.250.000	47.512.500,00		
05.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam	Persentase Peningkatan pertumbuhan PAD	7,52%					1.582.847.500	1.661.989.875,00		
05.02.04.1.01	Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah										Persentasse PAD terhadap Pendapatan Daerah	32.74	1.582.847.500	1.661.989.875,00	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
05.02.04.1.01.01	Penyusunan Kebijakan Teknis Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			jumlah dokumen kebijakan teknis perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah	2 peraturan			226.840.000	238.182.000,00		
05.02.04.1.01.08	Penyelenggaraan Sistem Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			jumlah dokumen	2 dokumen			819.982.500	860.981.625,00		
05.02.04.1.01.09	Pemeliharaan dan Pemutakhiran Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah								Jumlah dokumen data pajak daerah dan retribusi daerah	2 dokumen			49.050.000	51.502.500,00	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
05.02.04.1.01.10	Pemeriksanaan Pajak Daerah	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah Razia yang dilaksanakan	84 kali			358.025.000	375.926.250,00		
05.02.04.1.01.11	Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah UPT yang dievaluasi	25 UPT			128.950.000	135.397.500,00		
	SUB UNIT : UPTB KOTA PANGKALPINANG												919.084.000,00	965.038.200,00		
	PROGRAM/KEGIATAN RUTIN												919.084.000,00	965.038.200,00		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						Nilai Sakip PD	80					797.584.000,00	837.463.200,00		
01:02:03	Administrasi Umum										survey kepuasan pelayanan umum	80	797.584.000,00	837.463.200,00		
01.2.03.01	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*								Jumlah Surat/Barang ya	7 paket			8.750.000	9.187.500,00		
									Jumlah Materai	300 lembar						
01.2.03.02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*								Jumlah tagihan listrik	12 bulan rekening			356.000.000	373.800.000,00		
									Jumlah tagihan komunikasi	12 bulan rekening						
01.2.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan								Jumlah pengelola administrasi keuangan	8 orang			50.734.000	53.270.700,00		
01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor								Jumlah pengelola jasa kebersihan kantor	1 jasa layanan			18.000.000	18.900.000,00		
01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor								jumlah jenis ATK yang dibeli	70 jenis			120.000.000	126.000.000,00		
01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								jumlah barang cetak	20 jenis			31.000.000	32.550.000,00		
									Jumlah penggandaan	100000 lembar						
01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								Jumlah komponen instalasi listrik	15 jenis			10.000.000	10.500.000,00		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
				Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan	5 jenis			6.000.000	6.300.000,00		
01.2.03.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								jumlah bahan logistik kantor	10 jenis			13.000.000	13.650.000,00		
01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman								Jumlah makan dan minum Tamu	780 orang			39.000.000	40.950.000,00		
									Jumlah makan dan minum rapat	780 orang						
01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional								Jumlah mobil oprasional yang dipelihara	5 unit			62.100.000	65.205.000,00		
01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor								Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	15 unit			83.000.000	87.150.000,00		
									jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	20 unit						
									jumlah mebeler yang dipelihara	1 unit						
05.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam	Persentase Peningkatan pertumbuhan PAD	7,52%					121.500.000	127.575.000,00		
05.02.04.1.01	Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah										Persentasse PAD terhadap Pendapatan Daerah	32.74	121.500.000	127.575.000,00	**peningkatan tata kelola pemerintahan**	**Reformasi Birokrasi**
05.02.04.1.01.08	Penyelenggaraan Sistem Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			jumlah dokumen	2 dokumen			89.000.000	93.450.000,00		
05.02.04.1.01.09	Pemeliharaan dan Pemutakhiran Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah								Jumlah dokumen data pajak daerah dan retribusi daerah	2 dokumen			32.500.000	34.125.000,00	**peningkatan tata kelola pemerintahan**	**Reformasi Birokrasi**
	SUB UNIT : UPTB KABUPATEN BANGKA												1.020.209.000,00	559.239.450,00		
	PROGRAM/KEGIATAN RUTIN												1.020.209.000,00	559.239.450,00		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						Nilai Sakip PD	**80**					786.209.000,00	559.239.450,00		
01:02:03	Administrasi Umum										survey kepuasan pelayanan umum	**80**	786.209.000,00	559.239.450,00		
01.2.03.01	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*								Jumlah Surat/Barang ya	7 paket			13.900.000	14.595.000,00		
									Jumlah Materai	300 lembar						
01.2.03.02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*								Jumlah tagihan listrik	12 bulan rekening			258.000.000	52.614.450,00		
									Jumlah tagihan komunikasi	12 bulan rekening						
01.2.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan								Jumlah pengelola administrasi keuangan	8 orang			50.109.000	26.775.000,00		
01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor								Jumlah pengelola jasa kebersihan kantor	1 jasa layanan			18.000.000	6.300.000,00		
01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor								jumlah jenis ATK yang dibeli	70 jenis			120.000.000	17.220.000,00		
01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								jumlah barang cetak	20 jenis			25.500.000	40.950.000,00		
									Jumlah penggandaan	100000 lembar						
01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								Jumlah komponen instalasi listrik	15 jenis			6.000.000	91.350.000,00		
01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan	5 jenis			6.000.000	6.300.000,00		
01.2.03.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								jumlah bahan logistik kantor	10 jenis			16.400.000	17.220.000,00		
01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman								Jumlah makan dan minum Tamu	780 orang			39.000.000	40.950.000,00		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
				Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
									Jumlah makan dan minum rapat	780 orang						
01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional								Jumlah mobil oprasional yang dipelihara	5 unit			146.300.000	153.615.000,00		
01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor								Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	15 unit			87.000.000	91.350.000,00		
									jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	20 unit						
									jumlah mebeler yang dipelihara	1 unit						
05.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam	Persentase Peningkatan pertumbuhan PAD	7,52%					234.000.000	245.700.000,00		
05.02.04.1.01	Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah										Persentasse PAD terhadap Pendapatan Daerah	32.74	234.000.000	245.700.000,00	**peningkatan tata kelola pemerintahan**	**Reformasi Birokrasi**
05.02.04.1.01.08	Penyelenggaraan Sistem Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			jumlah dokumen	2 dokumen			194.000.000	203.700.000,00		
05.02.04.1.01.09	Pemeliharaan dan Pemutakhiran Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah								Jumlah dokumen data pajak daerah dan retribusi daerah	2 dokumen			40.000.000	42.000.000,00	**peningkatan tata kelola pemerintahan**	**Reformasi Birokrasi**
	SUB UNIT : UPTB KABUPATEN BELITUNG												1.019.310.000,00	868.938.000,00		
	PROGRAM/KEGIATAN RUTIN												1.019.310.000,00	868.938.000,00		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						Nilai Sakip PD	**80**					827.560.000,00	868.938.000,00		
01:02:03	Administrasi Umum										survey kepuasan pelayanan umum	**80**	827.560.000,00	868.938.000,00		
01.2.03.01	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*								Jumlah Surat/Barang y	7 paket			18.600.000	19.530.000,00		
									Jumlah Materai	300 lembar						
01.2.03.02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*								Jumlah tagihan listrik	12 bulan rekening			190.300.000	199.815.000,00		
									Jumlah tagihan komunikasi	12 bulan rekening						
01.2.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan								Jumlah pengelola administrasi keuangan	8 orang			190.300.000	199.815.000,00		
01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor								Jumlah pengelola jasa kebersihan kantor	1 jasa layanan			18.000.000	18.900.000,00		
01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor								jumlah jenis ATK yang dibeli	70 jenis			120.000.000	126.000.000,00		
01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								jumlah barang cetak	20 jenis			31.500.000	33.075.000,00		
									Jumlah penggandaan	100000 lembar						
01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								Jumlah komponen instalasi listrik	15 jenis			10.000.000	10.500.000,00		
01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan	5 jenis			10.000.000	10.500.000,00		
01.2.03.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								jumlah bahan logistik kantor	10 jenis			19.900.000	20.895.000,00		
01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman								Jumlah makan dan minum Tamu	780 orang			39.000.000	40.950.000,00		
									Jumlah makan dan minum rapat	780 orang						
01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional								Jumlah mobil oprasional yang dipelihara	5 unit			127.960.000	134.358.000,00		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
				Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor								Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	15 unit			52.000.000	54.600.000,00		
									jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	20 unit						
									jumlah mebeler yang dipelihara	1 unit						
05.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam	Persentase Peningkatan pertumbuhan PAD	7,52%					191.750.000	201.337.500,00		
05.02.04.1.01	Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah										Persentasse PAD terhadap Pendapatan Daerah	32.74	191.750.000	201.337.500,00	**peningkatan tata kelola pemerintahan**	**Reformasi Birokrasi**
05.02.04.1.01.08	Penyelenggaraan Sistem Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			jumlah dokumen	2 dokumen			125.000.000	131.250.000,00		
05.02.04.1.01.09	Pemeliharaan dan Pemutakhiran Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah								Jumlah dokumen data pajak daerah dan retribusi daerah	2 dokumen			66.750.000	70.087.500,00	**peningkatan tata kelola pemerintahan**	**Reformasi Birokrasi**
	SUB UNIT : UPTB KABUPATEN BANGKA TENGAH												610.489.000,00	501.625.950,00		
	PROGRAM/KEGIATAN RUTIN												610.489.000,00	501.625.950,00		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						Nilai Sakip PD	**80**					477.739.000,00	501.625.950,00		
01:02:03	Administrasi Umum										survey kepuasan pelayanan umum	**80**	477.739.000,00	501.625.950,00		
01.2.03.01	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*								Jumlah Surat/Barang y	7 paket			8.000.000	8.400.000,00		
									Jumlah Materai	300 lembar						
01.2.03.02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*								Jumlah tagihan listrik	12 bulan rekening			157.500.000	165.375.000,00		
									Jumlah tagihan komunikasi	12 bulan rekening						
01.2.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan								Jumlah pengelola administrasi keuangan	8 orang			39.359.000	41.326.950,00		
01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor								Jumlah pengelola jasa kebersihan kantor	1 jasa layanan			17.000.000	17.850.000,00		
01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor								jumlah jenis ATK yang dibeli	70 jenis			85.000.000	89.250.000,00		
01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								jumlah barang cetak	20 jenis			8.700.000	9.135.000,00		
									Jumlah penggandaan	100000 lembar						
01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								Jumlah komponen instalasi listrik	15 jenis			6.000.000	6.300.000,00		
01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan	5 jenis			5.300.000	5.565.000,00		
01.2.03.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								jumlah bahan logistik kantor	10 jenis			11.580.000	12.159.000,00		
01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman								Jumlah makan dan minum Tamu	780 orang			25.000.000	26.250.000,00		
									Jumlah makan dan minum rapat	780 orang						
01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional								Jumlah mobil oprasional yang dipelihara	5 unit			61.300.000	64.365.000,00		
01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor								Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	15 unit			53.000.000	55.650.000,00		
									jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	20 unit						

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
				Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
									jumlah mebeler yang dipelihara	1 unit						
05.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam	Persentase Peningkatan pertumbuhan PAD	7,52%					132.750.000	139.387.500,00		
05.02.04.1.01	Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah										Persentasse PAD terhadap Pendapatan Daerah	32.74	132.750.000	139.387.500,00	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
05.02.04.1.01.08	Penyelenggaraan Sistem Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			jumlah dokumen	2 dokumen			104.000.000	109.200.000,00		
05.02.04.1.01.09	Pemeliharaan dan Pemutakhiran Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah								Jumlah dokumen data pajak daerah dan retribusi daerah	2 dokumen			28.750.000	30.187.500,00	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
	SUB UNIT : UPTB KABUPATEN BANGKA BARAT												668.389.500,00	545.096.475,00		
	PROGRAM/KEGIATAN RUTIN												668.389.500,00	545.096.475,00		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						Nilai Sakip PD	80					519.139.500,00	545.096.475,00		
01:02:03	Administrasi Umum										survey kepuasan pelayanan umum	80	519.139.500,00	545.096.475,00		
01.2.03.01	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*								Jumlah Surat/Barang ya	7 paket			12.900.000	13.545.000,00		
									Jumlah Materai	300 lembar						
01.2.03.02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*								Jumlah tagihan listrik	12 bulan rekening			118.400.000	124.320.000,00		
									Jumlah tagihan komunikasi	12 bulan rekening						
01.2.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan								Jumlah pengelola administrasi keuangan	8 orang			44.734.000	46.970.700,00		
01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor								Jumlah pengelola jasa kebersihan kantor	1 jasa layanan			15.000.000	15.750.000,00		
01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor								jumlah jenis ATK yang dibeli	70 jenis			76.000.500	79.800.525,00		
01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								jumlah barang cetak	20 jenis			17.325.000	18.191.250,00		
									Jumlah penggandaan	100000 lembar						
01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								Jumlah komponen instalasi listrik	15 jenis			4.400.000	4.620.000,00		
01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan	5 jenis			5.400.000	5.670.000,00		
01.2.03.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								jumlah bahan logistik kantor	10 jenis			11.680.000	12.264.000,00		
01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman								Jumlah makan dan minum Tamu	780 orang			30.000.000	31.500.000,00		
									Jumlah makan dan minum rapat	780 orang						
01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional								Jumlah mobil oprasional yang dipelihara	5 unit			146.300.000	153.615.000,00		
01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor								Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	15 unit			37.000.000	38.850.000,00		
									jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	20 unit						
									jumlah mebeler yang dipelihara	1 unit						
05.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam	Persentase Peningkatan pertumbuhan PAD	7,52%					149.250.000	156.712.500,00		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
				Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
05.02.04.1.01	Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah										Persentasse PAD terhadap Pendapatan Daerah	32.74	149.250.000	156.712.500,00	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
05.02.04.1.01.08	Penyelenggaraan Sistem Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			jumlah dokumen	2 dokumen			113.000.000	118.650.000,00		
05.02.04.1.01.09	Pemeliharaan dan Pemutakhiran Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah								Jumlah dokumen data pajak daerah dan retribusi daerah	2 dokumen			36.250.000	38.062.500,00	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
	SUB UNIT : UPTB KABUPATEN BANGKA SELATAN												723.754.392,00	603.229.611,60		
	PROGRAM/KEGIATAN RUTIN												723.754.392,00	603.229.611,60		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						Nilai Sakip PD	80					574.504.392,00	603.229.611,60		
01:02:03	Administrasi Umum										survey kepuasan pelayanan umum	80	574.504.392,00	603.229.611,60		
01.2.03.01	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*								Jumlah Surat/Barang ya	7 paket			12.000.000	12.600.000,00		
									Jumlah Materai	300 lembar						
01.2.03.02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*								Jumlah tagihan listrik	12 bulan rekening			143.000.000	150.150.000,00		
									Jumlah tagihan komunikasi	12 bulan rekening						
01.2.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan								Jumlah pengelola administrasi keuangan	8 orang			50.109.000	52.614.450,00		
01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor								Jumlah pengelola jasa kebersihan kantor	1 jasa layanan			15.000.000	15.750.000,00		
01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor								jumlah jenis ATK yang dibeli	70 jenis			84.195.392	88.405.161,60		
01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								jumlah barang cetak	20 jenis			17.000.000	17.850.000,00		
									Jumlah penggandaan	100000 lembar						
01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								Jumlah komponen instalasi listrik	15 jenis			4.000.000	4.200.000,00		
01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan	5 jenis			4.000.000	4.200.000,00		
01.2.03.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								jumlah bahan logistik kantor	10 jenis			8.100.000	8.505.000,00		
01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman								Jumlah makan dan minum Tamu	780 orang			30.000.000	31.500.000,00		
									Jumlah makan dan minum rapat	780 orang						
01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional								Jumlah mobil oprasional yang dipelihara	5 unit			147.100.000	154.455.000,00		
01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor								Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	15 unit			60.000.000	63.000.000,00		
									jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	20 unit						
									jumlah mebeler yang dipelihara	1 unit						
05.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam	Persentase Peningkatan pertumbuhan PAD	7,52%					149.250.000	156.712.500,00		
05.02.04.1.01	Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah										Persentasse PAD terhadap Pendapatan Daerah	32.74	149.250.000	156.712.500,00	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
05.02.04.1.01.08	Penyelenggaraan Sistem Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			jumlah dokumen	2 dokumen			113.000.000	118.650.000,00		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
				Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
05.02.04.1.01.09	Pemeliharaan dan Pemutakhiran Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah								Jumlah dokumen data pajak daerah dan retribusi daerah	2 dokumen			36.250.000	38.062.500,00	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
	SUB UNIT : UPTB KABUPATEN BELITUNG TIMUR												736.534.000,00	614.548.200,00		
	PROGRAM/KEGIATAN RUTIN												736.534.000,00	614.548.200,00		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						Nilai Sakip PD	80					585.284.000,00	614.548.200,00		
01:02:03	Administrasi Umum										survey kepuasan pelayanan umum	80	585.284.000,00	614.548.200,00		
01.2.03.01	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*								Jumlah Surat/Barang ya	7 paket			18.750.000	19.687.500,00		
									Jumlah Materai	300 lembar						
01.2.03.02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*								Jumlah tagihan listrik	12 bulan rekening			125.000.000	131.250.000,00		
									Jumlah tagihan komunikasi	12 bulan rekening						
01.2.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan								Jumlah pengelola administrasi keuangan	8 orang			44.734.000	46.970.700,00		
01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor								Jumlah pengelola jasa kebersihan kantor	1 jasa layanan			10.000.000	10.500.000,00		
01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor								jumlah jenis ATK yang dibeli	70 jenis			100.000.000	105.000.000,00		
01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								jumlah barang cetak	20 jenis			17.000.000	17.850.000,00		
									Jumlah penggandaan	100000 lembar						
01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								Jumlah komponen instalasi listrik	15 jenis			8.000.000	8.400.000,00		
01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan	5 jenis			8.000.000	8.400.000,00		
01.2.03.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								jumlah bahan logistik kantor	10 jenis			9.500.000	9.975.000,00		
01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman								Jumlah makan dan minum Tamu	780 orang			29.000.000	30.450.000,00		
									Jumlah makan dan minum rapat	780 orang						
01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional								Jumlah mobil oprasional yang dipelihara	5 unit			146.300.000	153.615.000,00		
01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor								Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	15 unit			69.000.000	72.450.000,00		
									jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	20 unit						
									jumlah mebeler yang dipelihara	1 unit						
05.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam	Persentase Peningkatan pertumbuhan PAD	7,52%					151.250.000	158.812.500,00		
05.02.04.1.01	Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah										Persentasse PAD terhadap Pendapatan Daerah	32.74	151.250.000	158.812.500,00	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
05.02.04.1.01.08	Penyelenggaraan Sistem Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			jumlah dokumen	2 dokumen			120.000.000	126.000.000,00		
05.02.04.1.01.09	Pemeliharaan dan Pemutakhiran Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah								Jumlah dokumen data pajak daerah dan retribusi daerah	2 dokumen			31.250.000	32.812.500,00	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
JUMLAH													75.577.871.465,00	77.984.310.038,25		

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2021

PERANGKAT DAERAH : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode Rekening					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
					Urusan Penunjang Pemerintahan Perencanaan												21.824.242.200	17.581.659.000		
					URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH												15.366.686.200	13.235.000.000		
5	05	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												15.366.686.200	13.235.000.000		
											Nilai Sakip PD	83,24					150.000.000	190.000.000		
5	05	01	1.01		Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												150.000.000	190.000.000		
													Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	6 Dokumen			150.000.000	190.000.000		
5	05	01	1.01	01	Sub Kegiatan Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah												66.300.000	80.000.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah dok perencanaan Renstra/Renja PD	2 Dokumen	66.300.000	80.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
5	05	01	1.01	02	Sub Kegiatan Penyusunan Program dan kegiatan perangkat daerah dalam dokumen perencananan												9.100.000	20.000.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah dokumen DPA/DPPA yang tersusun	2 Dokumen	9.100.000	20.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
5	05	01	1.01	03	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah												25.000.000	40.000.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi PD	4 Dokumen	25.000.000	40.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
5	05	01	1.01	04	Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah												5.000.000	10.000.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					jumlah dokumen kesepakatan Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan PD	1 Dokumen	5.000.000	10.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
5	05	01	1.01	05	Sub Kegiatan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah												44.600.000	40.000.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah dok Evalusi kinerja PD	3 Dokumen	44.600.000	40.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
											survey kepuasan pelayanan internal	75					15.216.686.200	13.045.000.000		
5	05	01	1.02		Kegiatan Admintrasi Keuangan												10.941.565.200	13.045.000.000		
													survey kepuasan pelayanan keuangan	75			10.941.565.200	13.045.000.000		
5	05	01	1.02	01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tujangan ASN												10.887.445.200	13.000.000.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah ASN yang menrima gaji dan tunjangan	74 ASN	10.887.445.200	13.000.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
5	05	01	1.02	07	Sub Kegiatan Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Semesteran												44.120.000	30.000.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam				54.120.000	Jumlah laporan keuangan bulanan/semesteran	2 Laporan	44.120.000	30.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
5	05	01	1.02	09	Sub Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun												10.000.000	15.000.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah laporan keuanagn akhir tahun	1 Laporan	10.000.000	15.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
5	05	01	1.03		Kegiatan Administrasi umum												4.075.121.000	3.260.900.000		
													survey kepuasan pelayanan umum	75			4.075.121.000	3.260.900.000		
5	05	01	1.03	01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa surat menyurat												628.200.000	636.200.000		

Kode Rekening					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah Surat/Barang yang dikirim	40 Surat/Barang	10.000.000	15.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah Materai	4500 Lembar	15.000.000	18.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah tenaga pramubakti yang dipekerjakan	16 Orang	603.200.000	603.200.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
5	05	01	1.03	02	Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik												264.800.000	230.000.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah Tagihan rekening listrik, air, telepon/fax, internet, TV Kkabel, virtual meeting yang dibayarkan	12 Bulan	264.800.000	230.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
5	05	01	1.03	03	Sub Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor												150.800.000	150.800.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah tenaga keamanan/satpam kantor yang dipekerjakan	4 Orang	150.800.000	150.800.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
5	05	01	1.03	06	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/oprasional												91.400.000	105.400.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					jumlah Kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	5 Unit	16.000.000	30.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah tenaga sopir yang dipekerjakan	2 Orang	75.400.000	75.400.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
5	05	01	1.03	07	Sub Kegiatan Penyediaan jasa Administrasi keuangan												165.000.000	130.000.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah pengelola administrasi keuangan yang bekerja	17 Orang	165.000.000	130.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
5	05	01	1.03	08	Sub Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor												238.500.000	228.500.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah tenaga kebersihan yang dipekerjakan	5 Orang	188.500.000	188.500.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah jenis bahan dan peralatan kebersihan kantor yang tersedia	20 Jenis	50.000.000	40.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
5	05	01	1.03	10	Sub Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor												150.000.000	150.000.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah jenis ATK yang dibeli	31 Jenis	150.000.000	150.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
5	05	01	1.03	11	Sub Kegiatan Penyediaan barang cetak dan penggandaan												95.000.000	140.000.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah barang cetak	1300 Eksemplar	60.000.000	80.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah penggandaan	100000 Lembar	35.000.000	60.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
5	05	01	1.03	12	Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor												30.000.000	35.000.000		

Kode Rekening					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah komponen instalasi listrik yang tersediia	7 Jenis	30.000.000	35.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
5	05	01	1.03	14	Sub Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga												5.000.000	35.000.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	5 Jenis	5.000.000	35.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
5	05	01	1.03	15	Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan												40.000.000	50.000.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan yang tersedia	276 eksplar	40.000.000	50.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
5	05	01	1.03	16	Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor												30.000.000	30.000.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	4 Jenis	30.000.000	30.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
5	05	01	1.03	17	Sub Kegiatan Penyediaan makan dan minum												150.000.000	150.000.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah makan dan minum Tamu yang tersedia	250 Pax	35.000.000	50.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah makan dan minum rapat yang tersedia	7000 Pax	115.000.000	100.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
5	05	01	1.03	18	Sub Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah												612.110.000	780.000.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	85 Kali	432.930.000	600.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah (tahun)	240 Kali	179.180.000	180.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
5	05	01	1.03	25	Sub Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor												312.500.000	80.000.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah peralatan gedung kantor	6 Jenis	312.500.000	80.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
5	05	01	1.03	29	Sub Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor												837.961.000	190.000.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 Unit	837.961.000	190.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
5	05	01	1.03	31	Sub Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/Oprasional												162.850.000	40.000.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah mobil oprasional yang dipelihara	5 Unit	162.850.000	40.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
5	05	01	1.03	35	Sub Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor												111.000.000	100.000.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	10 Jenis	72.000.000	40.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah BBM Genset	6186 Liter	39.000.000	60.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
5	05	01	1.04		Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur												200.000.000	150.000.000		

Kode Rekening					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
													survey kepuasan pelayanan kepegawaian (angka)	75			200.000.000	150.000.000		
5	05	01	1.04	01	Sub Kegiatan Pengadaan mesin/kartu absensi												20.000.000	-		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah mesin/kartu absensi yang diadakan	2 Unit	20.000.000	-	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
5	05	01	1.04	09	Sub Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal												180.000.000	150.000.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah pegawai ASN yang ikut pendidikkan dan pelatihan formal	40	180.000.000	150.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
5					URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN												6.457.556.000	4.346.659.000		
5	01				URUSAN PERENCANAAN												3.871.401.000	3.836.659.000		
5	01	02			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah												2.805.647.000	2.926.659.000		
											Persentase konsistensi program pembangunan di RKPD dengan RPJMD dan Renstra dengan RPJMD	100					2.805.647.000	2.926.659.000		
5	01	02	1.01		Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah												1.648.988.000	1.770.000.000		
													Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tersusun (Dokumen)	2 Dokumen			1.648.988.000	1.770.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
5	01	02	1.01	01	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen PerencanaanPembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)Provinsi												436.031.000	500.000.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah laporan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Laporan)	3 Laporan	436.031.000	500.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
5	01	02	1.01	02	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen PerencanaanPembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)Kabupaten/Kota												103.990.000	110.000.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah laporan hasil fasilitasi/evaluasi perencanaan kabupaten/kota (Laporan)	7 Laporan	103.990.000	110.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
5	01	02	1.01	03	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Musrenbang Provinsi												295.405.000	300.000.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah Dokumen Berita Acara Musrenbang (Dokumen)	1 Dokumen	295.405.000	300.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
5	01	02	1.01	04	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat												213.700.000	250.000.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah Dokumen Berita Acara Forum PD/Forum Lintas PD (Dokumen)	2 Dokumen	213.700.000	250.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
5	01	02	1.01	05	Sub Kegiatan Pengintegrasian Dokumen Perencanaan												425.862.000	430.000.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah Laporan pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah dengan rencana pembangunan lainnya (Laporan)	2 Laporan	425.862.000	430.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
5	01	02	1.01	07	Sub Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan												125.800.000	130.000.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah Laporan data update dalam Aplikasi (Laporan)	1 Laporan	125.800.000	130.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
5	01	02	1.01	09	Sub Kegiatan Pengumpulan dan Analisis Data dan Informasi												48.200.000	50.000.000		

Kode Rekening					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah data PD yang diverifikasi dan dianalisis (Data)	2000 Data	48.200.000	50.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
5	**01**	**02**	**1.03**		**Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah**												**1.156.659.000**	**1.156.659.000**		
													Jumlah laporan pengendaian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah	**21 Laporan**			**1.156.659.000**	**1.156.659.000**		
5	**01**	**02**	**1.03**	**02**	**Sub Kegiatan Evaluasi Capaian Program/Kegiatan terkait SPM**												**221.883.000**	**221.883.000**		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah laporan hasil evaluasi capaian program/kegiatan SPM (Laporan)	4 Laporan	221.883.000	221.883.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
5	**01**	**02**	**1.03**	**03**	**Sub Kegiatan Evaluasi Capaian Program/Kegiatan PerangkatDaerah**												**602.933.000**	**602.933.000**		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah laporan hasil evaluasi capaian program Perangkat Daerah (Laporan)	4 Laporan	401.596.500	401.596.500	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumah Sistem Informasi Perencanaan Daerah yang Terkelola (aplikasi)	1 Aplikasi	201.336.500	201.336.500	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
5	**01**	**02**	**1.03**	**04**	**Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan Capaian PembangunanDaerah**												**331.843.000**	**331.843.000**		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah laporan evaluasi hasil RKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota (Laporan)	8 Laporan	70.464.400	70.464.400	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah laporan monitoring RKPD Kabupaten/Kota (Laporan)	4 Laporan	69.464.400	69.464.400	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah laporan hasil evaluasi capaian program/kegiatan SDGs (Laporan)	1 Laporan	191.914.200	191.914.200	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
5	**01**	**03**			**Program Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**												**424.366.000**	**490.000.000**		
											Pesentase kesesuaian dokumen perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	**100**					**424.366.000**	**490.000.000**		
5	**01**	**03**	**1.01**		**Kegiatan Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan**												**224.366.000**	**140.000.000**		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			**Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan**	**6 Laporan**			**224.366.000**	**140.000.000**	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
5	**01**	**03**	**1.01**	**01**	**Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang**												**80.216.000**	**80.000.000**		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang pemerinntahan	2 Laporan	80.216.000	80.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
5	**01**	**03**	**1.01**	**03**	**Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD,**												**144.150.000**	**60.000.000**		

Kode Rekening					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah Laporan monitoring dan evaluasi penyusunnan dikumen perencanaan pebangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang pemerintahan yang dilaksanakan	4 Laporan	144.150.000	60.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
5	**01**	**03**	**1.02**		**Kegiatan Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia.**												**100.000.000**	**180.000.000**		
													Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia.	**6 Laporan**			**100.000.000**	**180.000.000**		
5	**01**	**03**	**1.02**	**01**	**Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang**												**35.000.000**	**80.000.000**		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia	2 Laporan	35.000.000	80.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
5	**01**	**03**	**1.02**	**03**	**Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD,**												**65.000.000**	**100.000.000**		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia yang dilaksanakan	4 Laporan	65.000.000	100.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
5	**01**	**03**	**1.03**		**Kegiatan Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat.**												**100.000.000**	**170.000.000**		
													Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat	**6 Laporan**			**100.000.000**	**170.000.000**		
5	**01**	**03**	**1.03**	**01**	**Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang**												**35.000.000**	**70.000.000**		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat	2 Laporan	35.000.000	70.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
5	**01**	**03**	**1.03**	**03**	**Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD,**												**65.000.000**	**100.000.000**		

Kode Rekening					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah laporan hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat yang dilaksanakan	4 Laporan	65.000.000	100.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
5	01	04			**Program Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam**												**325.723.000**	**420.000.000**		
											Pesentase kesesuaian dokumen perencanaan bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	**100**					**325.723.000**	**420.000.000**		
5	01	04	1.01		**Kegiatan Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian**												**105.000.000**	**160.000.000**		
													Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan bidang perekonomian	**6 Laporan**			**105.000.000**	**160.000.000**		
5	01	04	1.01	01	**Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang**												**70.000.000**	**100.000.000**		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang perekonomian	2 Laporan	70.000.000	100.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
5	01	04	1.01	03	**Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD,**												**35.000.000**	**60.000.000**		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah Lapoan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang perekonomiam yang dilaksanakan	4 Laporan	35.000.000	60.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
5	01	04	1.02		**Kegiatan Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen**												**60.000.000**	**100.000.000**		
													Jumlah Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif	**1 Laporan**			**60.000.000**	**100.000.000**		
5	01	04	1.02	01	**Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang**												**60.000.000**	**100.000.000**		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah Laporan Koordinasi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif	1 Laporan	60.000.000	100.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
5	01	04	1.03		**Kegiatan Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam**												**160.723.000**	**160.000.000**		

Kode Rekening					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
													Jumlah laporan hasil Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan bidang sumber daya alam	**6 Laporan**			**160.723.000**	**160.000.000**		
5	**01**	**04**	**1.03**	**01**	**Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang**												**59.873.000**	**60.000.000**		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang sumber daya alam	2 Laporan	59.873.000	60.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
5	**01**	**04**	**1.03**	**03**	**Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD,**												**100.850.000**	**100.000.000**		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang sumber daya alam yang dilaksanakan	4 Laporan	100.850.000	100.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
5	**01**	**05**			**PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN**												**315.665.000**			
											Persentase kesesuaian dokumen perencanaan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	**100**					**227.314.000**	**420.000.000**		
5	**01**	**05**	**1.01**		**Kegiatan Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup**												**85.000.000**	**160.000.000**		
													Jumlah Laporan Hasil FasilitasiPenyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Lingkungan Hidup (Laporan)	**6 Laporan**			**85.000.000**	**160.000.000**		
5	**01**	**05**	**1.01**	**01**	**Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang**												**55.000.000**	**100.000.000**		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Lingkungan Hidup	2 Laporan	55.000.000	100.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
5	**01**	**05**	**1.01**	**03**	**Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD,**												**30.000.000**	**60.000.000**		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Lingkungan Hidup yang dilakasanakan	4 Laporan	30.000.000	60.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
5	**01**	**05**	**1.02**		**Kegiatan Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan**												**100.000.000**	**160.000.000**		

Kode Rekening					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			**Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informasi, Statistik, Persandian**	**6 Laporan**			**100.000.000**	**160.000.000**	**peningkatan tata kelola pemerintahan**	**Reformasi Birokrasi**
5	**01**	**05**	**1.02**	**01**	**Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang**												**65.000.000**	**100.000.000**		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah Laporan Koordinasi Hasil Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informasi, Statistik, Persandian	2 Laporan	65.000.000	100.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
5	**01**	**05**	**1.02**	**03**	**Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD,**												**35.000.000**	**60.000.000**		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informasi, Statistik, Persandian yang dilaksanakan	4 Laporan	35.000.000	60.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
5	**01**	**05**	**1.03**		**Kegiatan Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan**												**130.665.000**	**200.000.000**		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			**Jumlah laporan hasil fasilitasi dan monev dokumen perencanaan Bidang Bidang BIna Marga, SUmber Daya Air, Tata Ruang , Jasa konstruksi,Kawasan Perumahan dan Permukiman dan Kewilayahan**	**7 Laporan**			**42.314.000**	**100.000.000**		
5	**01**	**05**	**1.03**	**01**	**Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang**												**88.351.000**	**100.000.000**		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang BIna Marga, SUmber Daya Air, Tata Ruang , Jasa konstruksi,Kawasan Perumahan dan Permukiman dan Kewilayahan	2 Laporan	88.351.000	100.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
5	**01**	**05**	**1.03**	**03**	**Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD,**												**42.314.000**	**100.000.000**		

Kode Rekening					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah LaporanHasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Bina Marga, Sumber Daya Air, Tata Ruang , Jasa konstruksi,Kawasan Perumahan dan Permukiman dan Kewilayahan yang dilakasanakan	4 laporan	42.314.000	100.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
5	**05**				**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**												**2.586.155.000**	**510.000.000**		
5	**05**	**02**			**Program Penelitian dan Pengembagan Daerah**												**2.586.155.000**	**510.000.000**		
											Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang digunakan sebagai bahan perumusan kebijakan	**80**					**1.236.155.000**	**305.000.000**		
5	**05**	**02**	**1.01**		**Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**												**134.411.000**	**80.000.000**		
													Jumlah dokumen data penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan (Laporan)	**3 Laporan**			**134.411.000**	**80.000.000**		
5	**05**	**02**	**1.01**	**12**	**Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan**												**134.411.000**	**80.000.000**		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah laporan pengelolaan data penelitian dan pengembangan dan peraturan	3 Laporan	134.411.000	80.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
5	**05**	**02**	**1.02**		**Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**												**950.872.000**	**110.000.000**		
													Jumlah lokumen penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan	**2 Laporan**			**950.872.000**	**110.000.000**		
5	**05**	**02**	**1.02**	**01**	**Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial**												**75.436.000**	**55.000.000**		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah penelitian dan pengembangan bidang aspek-aspek sosial	1 Laporan	75.436.000	55.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
5	**05**	**02**	**1.02**	**03**	**Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan**												**875.436.000**	**55.000.000**		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah laporan penelitian dan pengembangan pendidikan dan kebudayaan (laporan)		875.436.000	55.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
5	**05**	**02**	**1.03**		**Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan**												**150.872.000**	**115.000.000**		
													Jumlah laporan penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	**2**			**150.872.000**	**115.000.000**		
5	**05**	**02**	**1.03**	**05**	**Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan**												**75.436.000**	**60.000.000**		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	1 Laporan	75.436.000	60.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
5	**05**	**02**	**1.03**	**07**	**Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup**												**75.436.000**	**55.000.000**		

Kode Rekening					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 Laporan	75.436.000	55.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
											Persentase jumlah inovasi daerah yang dikembangkan	**75**					**1.350.000.000**	**205.000.000**		
5	**05**	**02**	**1.04**		**Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi**												**1.350.000.000**	**205.000.000**		
													Jumlah laporan pengembagan Inovasi dan Teknologi (Laporan)	**4**			**1.350.000.000**	**205.000.000**		
5	**05**	**02**	**1.04**	**01**	**Sub Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi**												**1.300.000.000**	**150.000.000**		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah Laporan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (Laporan)	2	1.300.000.000	150.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi
5	**05**	**02**	**1.04**	**04**	**Sub Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan**												**50.000.000**	**55.000.000**		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam					Jumlah Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan (Laporan)	2	50.000.000	55.000.000	peningkatan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2021

PERANGKAT DAERAH : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif 2021	Perkiraan Maju 2022	Keterangan	
								Kab/Kota	Kec.	Kel.	Hasil Program/Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/Indikator Kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
5					Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan												29.407.845.368	38.283.491.436		
5	03				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH												25.215.008.456	27.501.990.662		
5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH												25.215.008.456	27.501.990.662		
											Nilai SAKIP PD	85					17.915.500	125.000.000		
5	03	01	1.01		Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												17.915.500	125.000.000		
															Jumlah dok perencanaan dan evaluasi	7 dokumen	17.915.500	125.000.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
5	03	01	1.01	03	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah												8.915.500	65.000.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan Tata kelola pemerintahan	Pk.Pinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah dok evaluasi PD (DALEV)	4 dokumen			8.915.500	65.000.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
5	03	01	1.01	05	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												9.000.000	60.000.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan Tata kelola pemerintahan	Pk.Pinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah dok Evalusi kinerja PD (LKPJ, LAKIP, LPPD dan ATA)	3 dokumen			9.000.000	60.000.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
											survey kepuasan pelayanan internal	95					25.197.092.956	27.376.990.662		
5	03	01	1.02		Kegiatan Administrasi Keuangan												19.794.498.522	20.289.360.985		
															Survey kepuasan pelayanan	95	19.794.498.522	20.289.360.985	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas
5	03	01	1.02	01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												19.794.498.522	20.289.360.985		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan Tata kelola pemerintahan	Pk.Pinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah ASN yang terima gaji dan tunjangan	107 Orang			19.794.498.522	20.289.360.985	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
5	03	01	1.03		Kegiatan Administrasi Umum												5.402.594.434	7.087.629.677		
															Survey kepuasan pelayanan umum	95	5.402.594.434	7.087.629.677	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
5	03	01	1.03	01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat												1.066.350.000	27.500.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan Tata kelola pemerintahan	Pk.Pinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah Surat/Barang yang dikirim	10 Surat/Barang			2.800.000	9.500.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan Tata kelola pemerintahan	Pk.Pinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah Materai	1500 Lembar			7.950.000	18.000.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan Tata kelola pemerintahan	Pk.Pinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah tenaga pramubakti yang dipekerjakan	28 Orang			1.055.600.000	1.055.600.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
5	03	01	1.03	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												737.700.000	650.000.000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif 2021	Perkiraan Maju 2022	Keterangan	
								Kab/Kota	Kec.	Kel.	Hasil Program/Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/Indikator Kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatnya kualitas ASN	Pk.Pinang	Bukit Intan	Air Itam			Tagihan rekening listrik, air, telepon/fax, tv kabel, virtual meeting yang dibayarkan	12 Bulan			737.700.000	650.000.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
5	03	01	1.03	03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor												452.400.000	452.400.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan Tata kelola pemerintahan	Pk.Pinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah tenaga keamanan/satpam kantor yang dipekerjakan	12 Orang			452.400.000	452.400.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
5	03	01	1.03	06	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional												45.950.000	49.850.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan Tata kelola pemerintahan	Pk.Pinang	Bukit Intan	Air Itam			jumlah kendaraan operasional yang dipelihara	7 Unit			8.250.000	12.150.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan Tata kelola pemerintahan	Pk.Pinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah tenaga sopir yang dipekerjakan	1 Orang			37.700.000	37.700.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi
5	03	01	1.03	07	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan												137.520.000	227.520.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan Tata kelola pemerintahan	Pk.Pinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah pengelola administrasi keuangan yang bekerja	14 Orang			137.520.000	227.520.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
5	03	01	1.03	08	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor												1.628.000.000	1.868.000.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan Tata kelola pemerintahan	Pk.Pinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah tenaga kebersihan yang dipekerjakan	40 Orang			1.508.000.000	1.508.000.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan Tata kelola pemerintahan	Pk.Pinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah jenis bahan dan Peralatan kebersihan kantor yang tersedia	10 Jenis			120.000.000	360.000.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
5	03	01	1.03	09	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja												146.937.206	760.000.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan Tata kelola pemerintahan	Pk.Pinang	Bukit Intan	Air Itam			jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	20 Unit			146.937.206	760.000.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
5	03	01	1.03	10	Sub Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor												48.000.000	140.000.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan Tata kelola pemerintahan	Pk.Pinang	Bukit Intan	Air Itam			jumlah jenis ATK yang dibeli	5 Jenis			48.000.000	140.000.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
5	03	01	1.03	11	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan												59.360.000	100.000.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan Tata kelola pemerintahan	Pk.Pinang	Bukit Intan	Air Itam			jumlah barang cetak	2 Eksemplar			59.360.000	100.000.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
5	03	01	1.03	12	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor												28.000.000	200.000.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan Tata kelola pemerintahan	Pk.Pinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia	20 Komponen			28.000.000	200.000.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
5	03	01	1.03	16	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor												28.000.000	94.380.000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif 2021	Perkiraan Maju 2022	Keterangan	
								Kab/Kota	Kec.	Kel.	Hasil Program/Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/Indikator Kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan Tata kelola pemerintahan	Pk.Pinang	Bukit Intan	Air Itam			jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	7 Jenis			28.000.000	94.380.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
5	03	01	1.03	17	Sub Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman												76.000.000	369.884.677		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan Tata kelola pemerintahan	Pk.Pinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah makan dan minum Tamu yang tersedia	80 Pax			16.000.000	180.000.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan Tata kelola pemerintahan	Pk.Pinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah makan dan minum rapat yang tersedia	1200 Pax			60.000.000	189.884.677	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
5	03	01	1.03	18	Sub Kegiatan Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah												457.087.491	1.200.000.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan Tata kelola pemerintahan	Pk.Pinang	Bukit Intan	Air Itam			jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dilaksanakan	41 Kali			249.067.491	800.000.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan Tata kelola pemerintahan	Pk.Pinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang dilaksanakan	239 Kali			208.020.000	400.000.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
5	03	01	1.03	29	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor												274.876.587	980.000.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan Tata kelola pemerintahan	Pk.Pinang	Bukit Intan	Air Itam			jumlah gedung kantor yang dipelihara	3 Unit			274.876.587	980.000.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
5	03	01	1.03	31	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional												159.630.000	114.095.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan Tata kelola pemerintahan	Pk.Pinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah kendaraan oprasional yang dipelihara	7 Unit			159.630.000	114.095.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
5	03	01	1.03	35	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor												56.783.150	504.000.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan Tata kelola pemerintahan	Pk.Pinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	2 Jenis			44.345.000	480.000.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan Tata kelola pemerintahan	Pk.Pinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah BBM Genset	1131 Liter			12.438.150	24.000.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
5	**03**				**KEPEGAWAIAN**												**2.532.629.720**	**4.531.200.774**		
5	**03**	**02**			**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**												**2.532.629.720**	**4.531.200.774**		
											Persentase Pemenuhan Pegawai ASN yang sesuai dengan kebutuhan dan formasi	**96%**					**1.698.250.813**	**2.716.768.882**		
5	03	02	1.01		Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi ASN												211.950.728	437.966.319		
															Persentase Data Pegawai yang di kelola	100%	211.950.728	437.966.319	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan
5	03	02	1.01	03	Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian												94.720.000	187.699.851		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif 2021	Perkiraan Maju 2022	Keterangan	
								Kab/Kota	Kec.	Kel.	Hasil Program/Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/Indikator Kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan Tata kelola pemerintahan	Pk.Pinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah Sistem Informasi Yang Di Kelola	1 Aplikasi			94.720.000	187.699.851	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
5	03	02	1.01	04	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian												117.230.728	250.266.468		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan Tata kelola pemerintahan	Pk.Pinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah Pegawai yang Dikelola Datanya	5469 Orang			117.230.728	250.266.468	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
5	03	02	1.02		Kegiatan Administrasi Kepegawaian												736.131.424	875.932.637		
															Persentase ASN yang ditempatkan sesuai kompetensi	92%	736.131.424	875.932.637	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
5	03	02	1.02	01	Sub Kegiatan Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi, dan Pelaksanaan Pengadaan ASN												271.907.424	775.932.637		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan Tata kelola pemerintahan	Pk.Pinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah Dokumen Analisis Kebutuhan dan Formasi ASN	1 Dokumen			61.845.000	187.699.851	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan Tata kelola pemerintahan	Pk.Pinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah CASN/IPDN yang Lulus Seleksi	146 Orang (121 CASN, 25 IPDN)			210.062.424	588.232.786	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
5	03	02	1.02	04	Sub Kegiatan Penyelesaian Pemberhentian dan Pemberian Pensiun												63.556.000	187.699.851		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan Tata kelola pemerintahan	Pk.Pinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah PNS yang diterbitkan SK Pensiun	91 orang			63.556.000	187.699.851	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
5	03	02	1.02	06	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengadaan dan Pemberhentian												43.556.000	100.000.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan Tata kelola pemerintahan	Pk.Pinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah Pegawai Tenaga Kontrak yang dilakukan penataan	3650 Orang			43.556.000	100.000.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
5	03	02	1.02	08	Sub Kegiatan Pengelolaan Penempatan Dalam Jabatan ASN												293.556.000	988.765.722		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan Tata kelola pemerintahan	Pk.Pinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah ASN yang ditempatkan sesuai Kompetensi	200 Orang			293.556.000	988.765.722	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
5	03	02	1.02	10	Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN												63.556.000	187.699.851		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan Tata kelola pemerintahan	Pk.Pinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah PNS yang diterbitkan SK Kenaikan Pangkat	1150 Orang			63.556.000	187.699.851	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
5	03	02	1.04		Kegiatan Pengembangan Karir ASN												750.168.661	825.444.924		
															Jumlah ASN yang dikembangkan karirnya	211 Orang	750.168.661	825.444.924	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
5	03	02	1.04	01	Sub Kegiatan Pengembangan Karir dan Promosi ASN												699.800.000	825.444.924		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan Tata kelola pemerintahan	Pk.Pinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah ASN yang dipetakan kompetensinya	200 Orang			256.774.309	325.000.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan Tata kelola pemerintahan	Pk.Pinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah ASN yang menerima beasiswa	11 Orang			443.025.691	500.444.924	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif 2021	Perkiraan Maju 2022	Keterangan	
								Kab/Kota	Kec.	Kel.	Hasil Program/Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/Indikator Kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
5	03	02	1.04	02	Sub Kegiatan Penyusunan Pedoman Pola Pengembangan Karir												50.368.661	-		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan Tata kelola pemerintahan	Pk.Pinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah Pedoman Pengembangan Karir	1 Pedoman			50.368.661	0	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
											Persentase ASN yang memiliki kinerja dan disiplin minimal baik	**99,79%**					**834.378.907**	**1.814.431.892**		
5	03	02	1.03		Kegiatan Peningkatan Kapasitas ASN												664.779.449	1.402.869.926		
															Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya	5051 Orang	664.779.449	1.402.869.926	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi
5	03	02	1.03	02	Sub Kegiatan Pengembangan Penilaian Kinerja ASN												165.779.449	287.806.438		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan Tata kelola pemerintahan	Pk.Pinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah ASN yang diukur nilai indeks profesionalitasnya	5469 Orang			165.779.449	287.806.438	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
5	03	02	1.03	04	Sub Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan Profesi ASN (KORPRI dan lembaga profesi ASN lainnya)												50.000.000	125.133.234		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan Tata kelola pemerintahan	Pk.Pinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah Kelembagaan Profesi ASN	1 Lembaga			50.000.000	125.133.234	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
5	03	02	1.03	05	Sub Kegiatan Fasilitasi Profesi ASN												449.000.000	989.930.254		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan Tata kelola pemerintahan	Pk.Pinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah Pemberian Bantuan Hukum/LKBH KORPRI	5 Bantuan			399.000.000	938.499.254	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan Tata kelola pemerintahan	Pk.Pinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah Peserta Penyegaran Rohani KORPRI	600 Orang			50.000.000	51.431.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
5	03	02	1.05		Kegiatan Pembinaan ASN												169.599.458	411.561.966		
															Jumlah ASN yang terbina	2508 Orang	169.599.458	411.561.966	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
5	03	02	1.05	01	Sub Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN												77.456.488	198.835.468		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan Tata kelola pemerintahan	Pk.Pinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah ASN yang dibina disiplinya	2000 Orang			77.456.488	198.835.468	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan
5	03	02	1.05	02	Sub Kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN												52.142.970	87.593.264		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan Tata kelola pemerintahan	Pk.Pinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah Kasus Pelanggaran Disiplin yang Ditangani	8 Kasus			52.142.970	87.593.264	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi
5	03	02	1.05	03	Sub Kegiatan Penegakkan Disiplin, Pemberian Penghargaan dan Perlindungan												40.000.000	125.133.234		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan Tata kelola pemerintahan	Pk.Pinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah Penerbitan Satya Lencana	500 Satya Lencana			40.000.000	125.133.234	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi
5	**04**				**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**												**1.660.207.192**	**6.250.300.000**		
5	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**												1.660.207.192	6.250.300.000		
											Persentase ASN yang meningkat kompetensinya	**74%**					**1.660.207.192**	**6.250.300.000**		
5	04	02	1.02		Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional												1.190.777.017	2.961.000.000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif 2021	Perkiraan Maju 2022	Keterangan	
								Kab/Kota	Kec.	Kel.	Hasil Program/Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/Indikator Kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
															Persentase ASN yang meningkat kompetensi manajerial dan fungsional	78%	1.190.777.017	2.961.000.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
5	04	02	1.02	03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota												125.000.000	676.000.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan Tata kelola pemerintahan	Pk.Pinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah ASN yang tersertifikasi	40 Orang			125.000.000	676.000.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
5	04	02	1.02	04	Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar												220.000.000	770.000.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan Tata kelola pemerintahan	Pk.Pinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah Dokumen Mutu Pengembangan Kompetensi	8 Dokumen			220.000.000	770.000.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi
5	04	02	1.02	07	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan												825.777.017	1.500.000.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan Tata kelola pemerintahan	Pk.Pinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah CASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Prajabatan	120 Orang			825.777.017	1.500.000.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi
5	04	02	1.02	08	Sub Kegiatan Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan												20.000.000	15.000.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan Tata kelola pemerintahan	Pk.Pinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah Laporan Monev Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah dan Jabatan	1 Laporan			20.000.000	15.000.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi
5	04	02	1.01		Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis												469.430.175	3.289.300.000		
															Persentase ASN yang meningkat kompetensi teknis	53%	469.430.175	3.289.300.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
5	04	02	1.01	01	Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Teknis Dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Konkuren, Pemerintahan Umum												27.324.000	200.000.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan Tata kelola pemerintahan	Pk.Pinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah Dokumen Petunjuk Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis	4 Dokumen			27.324.000	200.000.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
5	04	02	1.01	02	Sub Kegiatan Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum												22.108.000	246.000.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan Tata kelola pemerintahan	Pk.Pinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah Dokumen Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam	4 Dokumen			22.108.000	246.000.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi
5	04	02	1.01	03	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum												398.008.175	2.795.300.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan Tata kelola pemerintahan	Pk.Pinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi Teknis	320 Orang			398.008.175	2.795.300.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi
5	04	02	1.01	04	Sub Kegiatan Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum												21.990.000	48.000.000		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan Tata kelola pemerintahan	Pk.Pinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah Laporan Monev Pengembangan Kompetensi Teknis	4 Laporan			21.990.000	48.000.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan

RKPD TAHUN 2021 SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Sub Unit Organisasi : 7 (tujuh biro setda)

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)	Keterangan	
								Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan				Program Juara/ Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4					Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan															
4	01				Sekretariat Daerah															
X	XX	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												89.996.875.049	99.096.062.554		
											Nilai Sakip Perangkat Daerah	85					185.000.000	203.500.000		
X	XX	01	1.01		Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												185.000.000	203.500.000		
															Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi	9	185.000.000	203.500.000		
X	XX	01	1.01	01	Sub Kegiatan Penyusunan Renstra, Renja, dan Renja Perubahan Perangkat Daerah	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam							66.000.000	72.600.000		
						Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah Dokumen Perencanaan Renstra, Renja, Renja Perubahan PD	3 Dokumen			66.000.000	72.600.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
X	XX	01	1.01	02	Sub Kegiatan Penyusunan Program dan kegiatan perangkat daerah dalam dokumen perencanaan	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam							16.000.000	17.600.000		
													Jumlah RKA/DPA yang tersusun	1 Dokumen			16.000.000	17.600.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
X	XX	01	1.01	03	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam							60.000.000	66.000.000		
													Jumlah Dokumen Evaluasi PD (DALEV)	1 Dokumen			60.000.000	66.000.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
X	XX	01	1.01	04	Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam							24.000.000	26.400.000		
						Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah Kesepakatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan PD	1 Dokumen			24.000.000	26.400.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
X	XX	01	1.01	05	Sub Kegiatan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam							19.000.000	20.900.000		
													Jumlah Dokumen Evalusi kinerja PD (LKPJ, LAKIP, LPPD)	3 Dokumen			19.000.000	20.900.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
X	XX	01									Presentase Terlaksananya Layanan Administrasi Keuangan	100%					49.274.795.830	54.202.275.413		
X	XX	01	1.02		Kegiatan Administrasi Keuangan												49.274.795.830	54.202.275.413		
															Terlaksananya Layanan Administrasi Keuangan	100%	49.274.795.830	54.202.275.413	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
X	XX	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												49.274.795.830	54.202.275.413		
													Jumlah ASN yang terima gaji dan tunjangan	319 Orang			47.783.417.525	52.561.759.278	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
													Jumlah gaji dan tunjangan yang diterima KDH dan WKDH	2 Orang			1.491.378.305	1.640.516.136	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)	Keterangan	
								Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan				Program Juara/ Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
X	**XX**	**01**									**Persentase Terlaksananya Cakupan Layanan Administrasi Umum**	**100%**					**40.227.079.219**	**44.349.287.141**		
X	**XX**	**01**	**1.03**		**Kegiatan Administrasi Umum**												**40.227.079.219**	**44.349.287.141**		
															Meningkatnya kualitas dan kuantitas Cakupan Layanan Administrasi Umum	**80%**	**40.227.079.219**	**44.160.499.641**	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
X	**XX**	**01**	**1.03**	**01**	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kota Pangkalpinang	Kota Pangkalpinang	Kota Pangkalpinang							4.941.500.000	5.435.650.000		
													Jumlah surat yang dikirim	1540 surat			33.000.000	36.300.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
													Jumlah materai	1250 lembar			7.500.000	8.250.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
													Jumlah tenaga pramubakti yang dipekerjakan	130 orang			4.901.000.000	5.391.100.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
X	**XX**	**01**	**1.03**	**02**	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kabupaten/ Kota Prov. Kep. Bangka Belitung	Kabupaten/ Kota Prov. Kep. Bangka Belitung	Kabupaten/ Kota Prov. Kep. Bangka Belitung							4.441.000.000	4.885.100.000		
													Tagihan rekening listrik, air, telepon/fax, tv kabel, virtual meeting yang dibayarkan	12 bln			4.441.000.000	4.885.100.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
X	**XX**	**01**	**1.03**	**03**	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kota Pangkalpinang	Kota Pangkalpinang	Kota Pangkalpinang							1.575.200.000	1.832.220.000		
													Jumlah Jasa Perlengkapan dan peralatan Kantor	12 Kali			1.438.000.000	1.581.800.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
													Jumlah Tenaga keamanan dan Satpam kantor yang dipekerjakan	1 orang			137.200.000	250.420.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
X	**XX**	**01**	**1.03**	**06**	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kota Pangkalpinang	Kota Pangkalpinang	Kota Pangkalpinang							1.611.291.900	1.772.421.090		
						Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kota Pangkalpinang	Kota Pangkalpinang	Kota Pangkalpinang			jumlah kendaraan operasional yang dipeliharan	3 jenis			65.591.900	72.151.090	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
													jumlah tenaga pengemudi	41 org			1.545.700.000	1.700.270.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
X	**XX**	**01**	**1.03**	**07**	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kota Pangkalpinang	Kota Pangkalpinang	Kota Pangkalpinang							576.872.250	634.559.475		
													Jumlah pengelola administrasi keuangan yang bekerja	64 org			576.872.250	634.559.475	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
X	**XX**	**01**	**1.03**	**08**	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kota Pangkalpinang	Kota Pangkalpinang	Kota Pangkalpinang							2.236.533.900	2.460.187.290		
													Jumlah pengelola kebersihan	1 pengelola			833.100.000	916.410.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
													Jumlah tenaga kebersihan yang dipekerjakan	30 org			1.131.000.000	1.244.100.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
													Jumlah jenis bahan dan peralatan kebersihan kantor yang tersedia	3 jenis			272.433.900	299.677.290	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
X	**XX**	**01**	**1.03**	**09**	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kota Pangkalpinang	Kota Pangkalpinang	Kota Pangkalpinang							1.483.800.000	1.632.180.000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)	Keterangan	
								Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan				Program Juara/ Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
													Jumlah jenis peralatan kerja yang di perbaiki	7 jenis			907.500.000	998.250.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
													Jumlah operator genset,fotocopy, telepon/fax, lifft dan damkar	27 org			576.300.000	633.930.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
X	XX	01	1.03	10	Sub Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kota Pangkalpinang	Kota Pangkalpinang	Kota Pangkalpinang							400.000.000	440.000.000		
													Jumlah jenis atk yang di beli	17 jenis			400.000.000	440.000.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
X	XX	01	1.03	11	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kota Pangkalpinang	Kota Pangkalpinang	Kota Pangkalpinang							357.378.980	393.116.878		
													Jumlah barang cetak	12 examplar			339.337.980	373.271.778	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
													Jumlah Penggandaan	48.000 lbr			16.841.000	18.525.100	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
													Jumlah Penjilidan	12 laporan			1.200.000	1.320.000		
X	XX	01	1.03	12	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kota Pangkalpinang	Kota Pangkalpinang	Kota Pangkalpinang							788.511.638	867.362.802		
													Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia	11 komponen			788.511.638	867.362.802	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
X	XX	01	1.03	13	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kota Pangkalpinang	Kota Pangkalpinang	Kota Pangkalpinang							75.000.000	82.500.000		
													Jumlah jenis perlengkapan kantor yang tersedia	1 jenis			75.000.000	82.500.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
X	XX	01	1.03	14	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kota Pangkalpinang	Kota Pangkalpinang	Kota Pangkalpinang							75.000.000	82.500.000		
													Jumlah peralatan rumah tanggayang tersedia	2 jenis			75.000.000	82.500.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
X	XX	01	1.03	15	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kota Pangkalpinang	Kota Pangkalpinang	Kota Pangkalpinang							169.953.000	186.948.300		
													Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan yang tersedia	12 bln			169.953.000	186.948.300	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
X	XX	01	1.03	16	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kota Pangkalpinang	Kota Pangkalpinang	Kota Pangkalpinang							65.069.000	71.575.900		
													Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	2 unit			65.069.000	71.575.900	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
X	XX	01	1.03	17	Sub Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kota Pangkalpinang	Kota Pangkalpinang	Kota Pangkalpinang							3.364.125.000	3.700.537.500		
													Jumlah makanan dan minuman tamu yang tersedia	12 bln			2.214.125.000	2.435.537.500	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
													Jumlah makanan dan minuman rapat/ kegiatan yang tersedia	12 bln			1.150.000.000	1.265.000.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
X	XX	01	1.03	18	Sub Kegiatan Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kabupaten/ Kota Prov. Kep. Bangka Belitung	Kabupaten/ Kota Prov. Kep. Bangka Belitung	Kabupaten/ Kota Prov. Kep. Bangka Belitung							4.433.006.841	4.876.307.525		
													Jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dilaksanakan	12 bln			500.000.000	550.000.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)	Keterangan	
								Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan				Program Juara/ Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
								Kabupaten/ Kota Prov. Kep. Bangka Belitung	Kabupaten/ Kota Prov. Kep. Bangka Belitung	Kabupaten/ Kota Prov. Kep. Bangka Belitung			Jumlah petugas keamanan KDH dan WKDH (patwal)	14 org			525.000.000	577.500.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
								Luar Daerah Prov. Kep. Bangka Belitung	Luar Daerah Prov. Kep. Bangka Belitung	Luar Daerah Prov. Kep. Bangka Belitung			Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan	12 bln			3.408.006.841	3.748.807.525	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
X	XX	01	1.03	21	Sub Kegiatan Kendaraan Dinas/Operasional	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kota Pangkalpinang	Kota Pangkalpinang	Kota Pangkalpinang							4.500.000.000	4.950.000.000		
													jumlah jenis kendaraan dinas/operasional	2 jenis			4.500.000.000	4.950.000.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
X	XX	01	1.03	25	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kota Pangkalpinang	Kota Pangkalpinang	Kota Pangkalpinang							785.875.000	864.462.500		
													jumlah Peralatan gedung kantor yang diadakan	2 unit			785.875.000	864.462.500	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
X	XX	01	1.03	27	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kota Pangkalpinang	Kota Pangkalpinang	Kota Pangkalpinang							400.000.000	440.000.000		
													Jumlah rumah jabatan yang di pelihara	2 unit			400.000.000	440.000.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
X	XX	01	1.03	28	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kota Pangkalpinang	Kota Pangkalpinang	Kota Pangkalpinang							854.616.260	940.077.886		
													Jumlah rumah dinas yang dipelihara	27 unit			854.616.260	940.077.886	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
X	XX	01	1.03	29	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kabupaten/ Kota Prov. Kep. Bangka Belitung	Kabupaten/ Kota Prov. Kep. Bangka Belitung	Kabupaten/ Kota Prov. Kep. Bangka Belitung							3.000.000.000	3.300.000.000		
													Jumlah gedung kantor yang dipelihara	14 unit			3.000.000.000	3.300.000.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
X	XX	01	1.03	30	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kota Pangkalpinang	Kota Pangkalpinang	Kota Pangkalpinang							1.095.536.150	1.205.089.765		
													Jumlah mobil jabatan yang dipelihara	4 unit			1.095.536.150	1.205.089.765	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
X	XX	01	1.03	31	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kota Pangkalpinang	Kota Pangkalpinang	Kota Pangkalpinang							2.184.637.000	2.403.100.700		
													Jumlah kendaraan dinas/operasional mobil yang dipelihara	69 unit mobil			2.013.012.000	2.214.313.200	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
													Jumlah kendaraan dinas/operasional motor yang dipelihara	27 unit motor			171.625.000	188.787.500		
X	XX	01	1.03	34	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kota Pangkalpinang	Kota Pangkalpinang	Kota Pangkalpinang							34.095.000	37.504.500		
													Jumlah peralatan rumah jabatan/dinas yang dipelihara	5 unit			34.095.000	37.504.500	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
X	XX	01	1.03	35	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor												628.077.300	690.885.030		
													Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	2 jenis			203.517.300	223.869.030	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
													Jumlah BBM Genset	42456 liter			424.560.000	467.016.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
X	XX	01	1.03	40	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kabupaten/ Kota Prov. Kep. Bangka Belitung	Kabupaten/ Kota Prov. Kep. Bangka Belitung	Kabupaten/ Kota Prov. Kep. Bangka Belitung							50.000.000	55.000.000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)	Keterangan	
								Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan				Program Juara/ Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
													Jumlah mobil jabatan yang di rehabilitasi	4 unit			50.000.000	55.000.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
X	XX	01	1.03	41	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/ Operasional	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kabupaten/ Kota Prov. Kep. Bangka Belitung	Kabupaten/ Kota Prov. Kep. Bangka Belitung	Kabupaten/ Kota Prov. Kep. Bangka Belitung							100.000.000	110.000.000		
													Jumlah kendaraan dinas/operasional yang direhabilitasi	5 unit			100.000.000	110.000.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
X	**XX**	**01**									**Persentase Tersedianya sarana penunjang kedisiplinan dan peningkatan Kapasitas ASN**	**90%**					**310.000.000**	**341.000.000**		
X	**XX**	**01**	**1.04**		**Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**												**310.000.000**	**341.000.000**		
															Meningkatnya Disiplin dan Kompetensi ASN	**80%**	**310.000.000**	**341.000.000**	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
X	XX	01	1.04	02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kabupaten/ Kota Prov. Kep. Bangka Belitung	Kabupaten/ Kota Prov. Kep. Bangka Belitung	Kabupaten/ Kota Prov. Kep. Bangka Belitung							160.000.000	176.000.000		
													Jumlah pakaian dinas KDH dan WKDH	2 paket			100.000.000	110.000.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
								Kota Pangkalpinang	Kota Pangkalpinang	Kota Pangkalpinang			Jumlah pakaian dinas Petugas Protokol beserta perlengkapannya yang diadakan	3 paket			60.000.000	66.000.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
X	XX	01	1.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Luar Daerah Prov. Kep. Bangka Belitung	Luar Daerah Prov. Kep. Bangka Belitung	Luar Daerah Prov. Kep. Bangka Belitung							150.000.000	165.000.000		
													Jumlah pegawai ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	20 org			150.000.000	165.000.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
4	**01**	**02**			**Program Pemerintahan dan Keseiahteraan Rakyat**												**36.731.042.470**	**40.441.411.168**		
											Persentase Kebijakan dibidang Penyelenggaran Pemerintahan Daerah yang Terimplementasikan	**90%**					**36.731.042.470**	**40.441.411.168**		
4	**01**	**02**	**1.01**		**Kegiatan Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah**												**1.632.381.466**	**1.795.619.613**		
															Persentase pelaksanaan administrasi pemerintahan dan fasilitasi penataan wilayah yang sesuai aturan	**90%**	**193.668.000**	**213.034.800**		
4	**01**	**02**	**1.01**	**01**	Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Pemerintahan dan Fasilitasi Penataan Wilayah	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	7 kabupaten/ kota	7 kabupaten/ kota	7 kabupaten/ kota							146.270.000	160.897.000		
													Jumlah dokumen batas wilayah yang terlaksana	7 dokumen penataan			146.270.000	160.897.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
													Jumlah dokumen rupabumi/toponimi yang terlaksana	7 dokumen penataan						
													Jumlah dokumen pembentukan daerah	1 dokumen						
													Jumlah dokumen evaluasi kecamatan	53 dokumen						

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)	Keterangan	
								Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan				Program Juara/ Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
													Pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan							
													Penyelenggaraan administrasi pertanahan							
													Penyusunan LPPD	1 dokumen						
4	**01**	**02**	**1.01**	**02**	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	7 kabupaten/kota	7 kabupaten/kota	7 kabupaten/kota							47.398.000	52.137.800		
													Jumlah dokumen pelaksanaan SPM	7 dokumen			47.398.000	52.137.800	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
													Fasilitasi pelaksanaan urusan Forkompimda							
													Pelaksanaan urusan Trantib dan Bencana							
															Persentase pelaksanaan pengembangan otonomi dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai	**90%**	**1.040.508.000**	**1.144.558.800**		
4	**01**	**02**	**1.01**	**03**	Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	kota pangkalpinang	kota pangkalpinang	kota pangkalpinang							381.456.000	419.601.600		
													Jumlah kegiatan pelayanan administrasi kepala daerah dan DPRD yang terlaksana	5 dokumen			381.456.000	419.601.600	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
													Jumlah rumusan pencalonan dan pelaksanaan pilkada	4 dokumen						
4	**01**	**02**	**1.01**	**04**	Sub Kegiatan Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	7 kabupaten/kota	7 kabupaten/kota	7 kabupaten/kota							160.418.000	176.459.800		
													Jumlah dokumen penataan urusan yang terlaksana	6 dokumen			160.418.000	176.459.800	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
													Pelaksanaan HUT RI dan HUT Provinsi	2 kali						
													Jumlah dokumen NSPK yang tersusun	6 dokumen						
4	**01**	**02**	**1.01**	**05**	Sub KegiatanEvaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	7 kabupaten/kota	7 kabupaten/kota	7 kabupaten/kota							498.634.000	548.497.400		
													Jumlah Dokumen LKPj KDH yang tersusun	1 dokumen			498.634.000	548.497.400	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
													Jumlah Dokumen LPPD yang tersusun	1 dokumen						
													Jumlah dokumen EKPPD Kabupaten/Kota	7 dokumen kab/kota						
															Persentase pelaksanaan kegiatan kerjasama pemerintah daerah	**90%**	**398.205.466**	**438.026.013**		
4	**01**	**02**	**1.01**	**06**	Sub Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	kota pangkalpinang	kota pangkalpinang	kota pangkalpinang							398.205.466	438.026.013		
													Jumlah proposal kerjasama pemerintah daerah yang terealisasi	5 proposal			398.205.466	438.026.013	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
													Evaluasi kerjasama pemerintah daerah yang terselenggara	5 dokumen						

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)	Keterangan	
								Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan				Program Juara/ Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4	01	02	1.01	07	Sub Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	kota pangkalpinang	kota pangkalpinang	kota pangkalpinang							-	-		
													Terlaksananya evaluasi kerjasama pemerintah daerah	5 proposal					Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
4	01	02	1.01	08	Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	kota pangkalpinang	kota pangkalpinang	kota pangkalpinang							-	-		
													Terselenggaranya pelaksanaan kerjasama antara pemerintah dan Badan usaha/swasta	10 dokumen					Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
											Persentase Kebijakan dibidang Kesejahteraan Rakyat yang terimplementasikan	**100%**					**34.273.071.745**	**37.737.643.370**		
4	01	02	1.02		**Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat**												**34.273.071.745**	**37.737.643.370**		
															Persentase pelaksanaan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat yang dibutuhkan	**100%**	**34.273.071.745**	**37.737.643.370**		
4	01	02	1.02	01	Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Pembangunan Reformasi Birokrasi		kota pangkalpinang	kota pangkalpinang	kota pangkalpinang							10.302.265.000	11.332.491.500		
													Prosentase Pengelolaan Sarana dan Prasarana SpiritualL	100%			10.302.265.000	11.332.491.500	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
4	01	02	1.02	02	Sub Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	kota pangkalpinang	kota pangkalpinang	kota pangkalpinang							1.846.275.005	2.030.902.506		
													Prosentase Pembinaan Masyarakat dan Frekuensi Penyelenggaraan Safari Ramadhan	100%			1.846.275.005	2.030.902.506	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
4	01	02	1.02	03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat non Pelayanan Dasar	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	kota pangkalpinang	kota pangkalpinang	kota pangkalpinang							296.406.250	326.046.875		
													Jumlah Partisipasi Acara HUT Bangka Belitung	3.000 orang			296.406.250	326.046.875	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
4	01	02	1.02	04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pelayanan Dasar	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	kota pangkalpinang	kota pangkalpinang	kota pangkalpinang							3.752.355.490	3.752.355.490		
													Terlaksananya Evaluasi dan Analisis Proposal Bansos dan Hibah	520 proposal			3.752.355.490	3.752.355.490	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
4	01	02	1.02	05	Sub Kegiatan Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesehatan	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	kota pangkalpinang	kota pangkalpinang	kota pangkalpinang							493.250.000	542.575.000		
													Terlaksananya pelayanan yang optimal kepada masyarakat	7 Kabupaten/Kota			493.250.000	542.575.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
4	01	02	1.02	06	Sub Kegiatan Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja Terkait Sosial	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	kota pangkalpinang	kota pangkalpinang	kota pangkalpinang							17.332.520.000	19.065.772.000		
													Jumlah Proposal Bansos dan Hibah yang di monitoring dan evaluasi	250 proposal			17.332.520.000	19.065.772.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
4	01	02	1.02	07	Sub Kegiatan Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja Terkait Pendidikan	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	kota pangkalpinang	kota pangkalpinang	kota pangkalpinang							625.000.000	687.500.000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)	Keterangan	
								Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan				Program Juara/ Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
													Jumlah Sekolah yang dinilai	28			625.000.000	687.500.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
											Persentase Produk Hukum yang selaras dan terimplementasikan	**90%**					**825.589.259**	**908.148.185**		
4	**01**	**02**	**1.03**		**Kegiatan Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah**												**825.589.259**	**908.148.185**		
															Persentase Penyusunan Kebijakan Daerah yang Terimplementasikan	**90%**	**825.589.259**	**908.148.185**		
4	**01**	**02**	**1.03**	**01**	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam							400.000.000	440.000.000		
													Jumlah Pergub yg selesai disusun	70 Pergub			400.000.000	440.000.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
													Jumlah Kep Gub yg selesai disusun	900 Kep Gub						
													Jumlah Usulan Perda yg selesai disusun	10 raperda						
													Jumlah Usulan Propemperda yg selesai disusun	1 propemperda						
4	**01**	**02**	**1.03**	**02**	Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam							60.000.000	66.000.000		
													Jumlah Produk Hukum yg dipublikasikan melalui JDIH	100 PHD			60.000.000	66.000.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
													Jumlah Perda yg dipublikasikan di Media Massa	5 Perda						
													Jumlah Perda yg dipublikasikan melaui Radio	3 Perda						
													Jumlah Artikel yg dipublikasikan melalui Website	120 artikel						
													Jumlah abstrak PHD yg disususn	250 abstrak						
													Jumlah buku katalog dan kompilasi PHD yg disusun	150 buku						
													Jumlah Produk Hukum Daerah yg didokumentasikan	1000 PHD						
													Jumlah Naskah Hukum yg disusun	100 NHL						
4	**01**	**02**	**1.03**	**03**	Sub Kegiatan Evaluasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	7 kab/kota	7 kab/kota	7 kab/kota							120.000.000	132.000.000		
													Jumlah Raperda Kab/Kota yg disusun	10 Raperda			120.000.000	132.000.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
													Jumlah Perka Kab/Kota yg disusun	30 Raperkada						
4	**01**	**02**	**1.03**	**04**	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	7 kab/kota	7 kab/kota	7 kab/kota							180.500.000	198.550.000		
4													Jumlah Kasus Sengketa Perdata yg melalui Tahapan Proses Penyelesaian	1 kasus			180.500.000	198.550.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
													Jumlah Kasus Sengketa TUN yg melalui Tahapan Prosese Penyelesaian	1 kasus						

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)	Keterangan	
								Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan				Program Juara/ Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
													Jumlah Laporan Pembinaan Penyelesaian Sengketa Kab/Kota	1 Laporan			65.089.259	71.598.185		
4	01	02	1.03	05	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	7 kab/kota	7 kab/kota	7 kab/kota										
													Jumlah Laporan Pembinaan Pelaksanaan HAM	1 Laporan			65.089.259	71.598.185	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
													Jumlah Masyarakat Miskin yg diberikan bantuan	45 Orang						
4	**01**	**03**			**Program Perekonomian dan Pembangunan**												**3.344.339.101**	**3.706.453.689**		
											Persentase Kebijakan dibidang ekonomi yang teimplementasikan	**90%**					**323.403.576**	**355.743.934**		
4	**01**	**03**	**1.01**		Kegiatan Pengelolaan Kebijakan Perekonomian												**323.403.576**	**355.743.934**		
															Jumlah Rekomendasi Kebijakan Perekonomian	**23 Rekomendasi**	**323.403.576**	**355.743.934**		
4	**01**	**03**	**1.01**	**01**	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam							93.403.576	102.743.934		
													Jumlah rekomendasi Terkait Kebijakan Ekonomi Makro	5 rekomendasi			93.403.576	102.743.934	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
4	**01**	**03**	**1.01**	**02**	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam							40.000.000	44.000.000		
													Jumlah rekomendasi Terkait Kebijakan Ekonomi Mikro	6 rekomendasi			40.000.000	44.000.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
4	**01**	**03**	**1.01**	**03**	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam							30.000.000	33.000.000		
													Jumlah rekomendasi Terkait Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	3 rekomendasi			30.000.000	33.000.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
4	**01**	**03**	**1.01**	**04**	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam							30.000.000	33.000.000		
													Jumlah rekomendasi Terkait Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	2 rekomendasi			20.000.000	22.000.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
													Jumlah Kontribusi dan iuran ADPM (Asosiasi Daerah Penghasilan Migas)	10 Kali			10.000.000	11.000.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
4	**01**	**03**	**1.01**	**05**	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam							60.000.000	66.000.000		
													Jumlah rekomendasi Terkait Kebijakan Energi dan Air	2 rekomendasi			60.000.000	66.000.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
4	**01**	**03**	**1.01**	**06**	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam							30.000.000	33.000.000		
													Jumlah rekomendasi Terkait Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	3 rekomendasi			30.000.000	33.000.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)	Keterangan	
								Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan				Program Juara/ Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4	01	03	1.01	07	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam							20.000.000	22.000.000		
													Jumlah rekomendasi Terkait Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	1 rekomendasi			20.000.000	22.000.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
4	01	03	1.01	08	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam							20.000.000	22.000.000		
													Jumlah rekomendasi Terkait Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	1 rekomendasi			20.000.000	22.000.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
											Tingkat Kematangan UKPBJ	**Level 4**					**2.750.935.525**	**3.026.029.078**		
4	**01**	**03**	**1.02**		**Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa**	**Pembangunan Reformasi Birokrasi**	**Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan**	**Pangkalpinang**	**Bukit Intan**	**Air Itam**							**2.750.935.525**	**3.053.709.756**		
															Nilai kematangan kinerja PBJ	**Level 4**	**2.750.935.525**	**3.026.029.078**	**Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan**	**Reformasi Birokrasi**
4	01	03	1.02	01	Sub Kegiatan Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam							100.000.000	110.000.000		
													Jumlah SOP pengadaan yang terintegrasi	4 SOP			100.000.000	110.000.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
4	01	03	1.02	02	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam							1.335.440.000	1.468.984.000		
													Jumlah paket pengadaan barang/jasa	200 paket			1.335.440.000	1.468.984.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
4	01	03	1.02	03	Sub Kegiatan : Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam							100.000.000	110.000.000		
													Jumlah laporan pemantauan monev pemantauan barang/jasa	1 Laporan			100.000.000	110.000.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
4	01	03	1.02	04	Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam							937.960.846	1.031.756.931		
													Jumlah pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik	1 Laporan			937.960.846	1.031.756.931	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
4	01	03	1.02	05	Sub Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam							50.000.000	55.000.000		
													Jumlah sistem PBJ yang dikembangkan	1 Aplikasi			50.000.000	55.000.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
5	01	03	1.03	06	Sub Kegiatan Layanan dan Dukungan	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam							-	-		
6	01	03	1.04	07	Sub Kegiatan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam							50.000.000	55.000.000		
													Jumlah laporan penggunaan sistem informasi PBJ	1 Laporan			50.000.000	55.000.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
7	01	03	1.05	08	Sub Kegiatan Pembinaan Kelembangaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam							59.000.000	64.900.000		
													Jumlah lembaga UKPBJ yang dibina	7 Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)			59.000.000	64.900.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)	Keterangan	
								Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan				Program Juara/ Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4	01	03	1.02	09	Sub Kegiatan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam							59.000.000	92.580.678		
													Jumlah laporan tentang pendampingan, konsultasi, dan/atau bimtek Pengadaan Barang/Jasa	1 Laporan			59.000.000	64.900.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
5	01	03	1.03	10	Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (tidak ada di pemendagri 90)	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam							59.534.679	65.488.147		
													Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa	1 Laporan			59.534.679	65.488.147	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
6	01	03	1.04	11	Sub Bagian Tata Usaa	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam										
											Persentase Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	**85%**					**270.000.000**	**297.000.000**		
4	**01**	**03**	**1,03**		**Kegiatan Evaluasi Administrasi Pembangunan**	**Pembangunan Reformasi Birokrasi**	**Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan**	**Prov, Kab/Kota**	**Prov, Kab/Kota**	**Prov, Kab/Kota**							**270.000.000**	**297.000.000**		
						Pembangunan Reformasi Birokrasi	**Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan**	**Prov, Kab/Kota**	**Prov, Kab/Kota**	**Prov, Kab/Kota**					**Persentase Capaian Realisasi Anggaran APBD**	**90**	**90.000.000**	**99.000.000**		
4	**01**	**03**	**1,03**	**01**	Sub Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Prov, Kab/Kota	Prov, Kab/Kota	Prov, Kab/Kota							50.000.000	55.000.000		
													Jumlah OPD yang melaporkan Realisasi Anggaran tepat waktu	42			50.000.000	55.000.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
				02	Sub Kegiatan Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Prov, Kab/Kota	Prov, Kab/Kota	Prov, Kab/Kota							40.000.000	44.000.000		
													Jumlah OPD yang telah sesuai perbandingan antara Capaian (realisasi) dan Rencana (target) pembangunan	42			40.000.000	44.000.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
															Persentase Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan APBN	**85**	**90.000.000**	**99.000.000**		
4	**01**	**03**	**1,03**	**03**	Sub Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Prov, Kab/Kota	Prov, Kab/Kota	Prov, Kab/Kota							50.000.000	55.000.000		
													Jumlah Satker (APBN/Dekon/TP) yang melaporkan realisasi anggaran tepat waktu	54			50.000.000	55.000.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
				04	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Prov, Kab/Kota	Prov, Kab/Kota	Prov, Kab/Kota							40.000.000	44.000.000		
													Jumlah Tindaklanjut Perumusan Kebijakan Teknis pelaksanaan Pembangunan	4 Dokumen			40.000.000	44.000.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)	Keterangan	
								Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan				Program Juara/ Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
															Persentase Capaian Pengendalian Fisik Pembangunan	**85**	**90.000.000**	**99.000.000**		
4	**01**	**03**	**1,03**	**05**	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Prov, Kab/Kota	Prov, Kab/Kota	Prov, Kab/Kota							50.000.000	55.000.000		
													Jumlah Kabupaten/Kota yang menyampaikan laporan realisasi fisik pembangunan tepat waktu	Kabupaten / Kota			50.000.000	55.000.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
4	**01**	**03**	**1,03**	**06**	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Prov, Kab/Kota	Prov, Kab/Kota	Prov, Kab/Kota							40.000.000	44.000.000		
													Jumlah Laporan Capaian Kinerja pembangunan	4 Laporan			40.000.000	44.000.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
4	**01**	**04**			**Program Penataan Administrasi Umum**												**4.995.196.795**	**5.494.716.475**		
											Persentase OPD dengan type kelembagaan yang tepat dan nilai kinerja baik	**80%**					**805.705.855**	**886.276.441**		
4	**01**	**04**	**1.01**		**Kegiatan Penataan Organisasi**												**805.705.855**	**886.276.441**		
															Persentase Penataan Organisasi yang tepat dan nilai kinerja baik	**75%**	**805.705.855**	**886.276.441**		
4	**01**	**04**	**1.01**	**01**	Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Meningkatkan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam							80.000.000	88.000.000		
													- Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah '- Draf Perubahan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	2 Draf Peraturan			80.000.000	88.000.000	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing
4	**01**	**04**	**1.01**	**02**	Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Meningkatkan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam							90.000.000	99.000.000		
													Laporan tentang pembinaan, pemantauan dan pengendalian kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan	1 Laporan			90.000.000	99.000.000	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing
4	**01**	**04**	**1.01**	**03**	Sub Kegiatan Penataan Analisis Jabatan	Meningkatkan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam							95.000.000	104.500.000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)	Keterangan	
								Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan				Program Juara/ Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
													- Tervalidasinya analisa jabatan perangkat daerah, UPT/Cabdin Dinas dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung '- Analisa Beban Kerja ASN pada Perangkat Daerah, UPT/Cabdin	2 Dokumen			95.000.000	104.500.000	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing
4	01	04	1.01	04	Sub Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas ASN	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam							95.000.000	104.500.000		
													Nilai Reformasi Birokrasi	A			95.000.000	104.500.000	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya
4	01	04	1.01	05	Sub Kegiatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Meningkatkan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam							90.000.000	99.000.000		
													Tingkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	BB			90.000.000	99.000.000	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya
4	01	04	1.01	06	Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Meningkatkan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas ASN	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam							90.000.000	99.000.000		
													Tingkat budaya kerja perangkat daerah semakin baik	42 Perangkat Daerah			90.000.000	99.000.000	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya
4	01	04	1.01	07	Sub Kegiatan Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Meningkatkan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam							50.000.000	55.000.000		
													Laporan, evaluasi dan pelaksanaan SOP	1 Laporan			50.000.000	55.000.000	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya
4	01	04	1.01	08	Sub Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam							215.705.855	237.276.441		
													- Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat '- Jumlah Laporan SKM yang nilainya baik	- 41 Perangkat Daerah '- 10 Unit Layanan			215.705.855	237.276.441	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing
											Persentase Cakupan Layanan Pelaksanaan Administrasi Umum	**100%**					**2.671.846.940**	**2.939.031.634**		
4	**01**	**04**	**1.02**		**Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Umum**												**2.671.846.940**	**2.939.031.634**		
															Meningkatnya kualitas dan kuantitas Cakupan Layanan Pelaksanaan Administrasi Umum	**80%**	**2.671.846.940**	**2.939.031.634**	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
4	01	04	1.02	01	Sub Kegiatan Pengelolaan Urusan Rumah Tangga Gubernur	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kota Pangkalpinang	Kota Pangkalpinang	Kota Pangkalpinang							583.709.644	642.080.608		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)	Keterangan	
								Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan				Program Juara/ Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
													Jumlah urusan rumah tangga gubernur yang dikelola	3 urusan			583.709.644	642.080.608	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
4	01	04	1.02	02	Sub Kegiatan Pengelolaan Urusan Rumah Tangga Wakil Gubernur	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kota Pangkalpinang	Kota Pangkalpinang	Kota Pangkalpinang							278.137.296	305.951.026		
													Jumlah urusan rumah tangga wakil gubernur yang dikelola	2 urusan			278.137.296	305.951.026	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
4	01	04	1.02	03	Sub Kegiatan Pengelolaan Urusan Kesekretariatan Daerah	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kota Pangkalpinang	Kota Pangkalpinang	Kota Pangkalpinang							400.000.000	440.000.000		
													Jumlah urusan kesekretariatan yang dikelola	3 urusan			400.000.000	440.000.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
4	01	04	1.02	04	Sub Kegiatan Pengelolaan Akuntansi dan Penatausahaan Aset	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kota Pangkalpinang	Kota Pangkalpinang	Kota Pangkalpinang							250.000.000	275.000.000		
													Jumlah pengelolaan akuntansi dan penatausahaan aset	2 laporan			250.000.000	275.000.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
4	01	04	1.02	05	Sub Kegiatan Fasilitasi Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kota Pangkalpinang	Kota Pangkalpinang	Kota Pangkalpinang							1.160.000.000	1.276.000.000		
													Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah tenaga ahli/staf khusus gubernur yang dilaksanakan	9 kali			100.000.000	110.000.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
								Kota Pangkalpinang	Kota Pangkalpinang	Kota Pangkalpinang			Jumlah koordinasi dan konsultasi luar daerah tenaga ahli/staf khusus gubernur yang dilaksanakan	20 kali			100.000.000	110.000.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
								Kota Pangkalpinang	Kota Pangkalpinang	Kota Pangkalpinang			Jumlah tenaga ahli/staf khusus gubernur yang dipekerjakan	9 org			960.000.000	1.056.000.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
											Persentase Cakupan Layanan Pelaksanaan Administrasi Pimpinan	**100%**					**1.517.644.000**	**1.669.408.400**		
4	01	04	1.03		**Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pimpinan**												**1.517.644.000**	**1.669.408.400**		
															Meningkatnya kualitas dan kuantitas Cakupan Layanan Pelaksanaan Administrasi	**80%**	**1.517.644.000**	**1.669.408.400**	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
4	01	04	1.03	01	Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kota Pangkalpinang	Kota Pangkalpinang	Kota Pangkalpinang							72.850.000	80.135.000		
													Jumlah komunikasi pimpinan yang di fasilitasi	11 bln			72.850.000	80.135.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
4	01	04	1.03	02	Sub KegiatanFasilitasi dan koordinasi pelaksanaan acara	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kota Pangkalpinang	Kota Pangkalpinang	Kota Pangkalpinang							118.500.000	130.350.000		
													Jumlah pelaksanaan acara yang difasilitasi dan di komunikasi	12 bln			118.500.000	130.350.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
4	01	04	1.03	03	Sub Kegiatan Fasilitasi Tamu	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kota Pangkalpinang	Kota Pangkalpinang	Kota Pangkalpinang							827.244.000	909.968.400		
													Jumlah tamu yang di fasilitasi	12 bulan			827.244.000	909.968.400	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)	Keterangan	
								Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan				Program Juara/ Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4	01	04	1.03	04	Sub Kegiatan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Pembangunan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kota Pangkalpinang	Kota Pangkalpinang	Kota Pangkalpinang							499.050.000	548.955.000		
													Jumlah hubungan keprotokolan yang di kelola	12 bulan			499.050.000	548.955.000	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi
														TOTAL ANGGARAN			**135.067.453.415**	**148.738.643.885**		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Bangka Belitung
Tahun 2021

Unit Organisasi : 4.06.02 SEKRETARIAT DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.06.02 SEKRETARIAT DPRD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
					Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan													**107.625.108.692**	**118.387.619.561**		
					Urusan Pemerintahan FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													**107.625.108.692**	**118.387.619.561**		
4	**06**	**02**	**1.00**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**												**21.385.851.963**	**23.524.437.159**		
						Meningkatkan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik	**Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan**	**Pangkalpinang**	**Bukit Intan**	**Air Itam**	**Nilai Sakip PD**	**79 Nilai**					**21.385.851.963**	**23.524.437.159**	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	
4	**06**	**02**	**1.01**		Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												91.012.500	100.113.750		
						Meningkatkan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik	**Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan**	**Pangkalpinang**	**Bukit Intan**	**Air Itam**					**Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi**	**11 Dokumen**	**91.012.500**	**100.113.750**	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	
4	06	02	1.01	01	Sub Kegiatan Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah												22.500.000	24.750.000		
						Meningkatkan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah dokumen perencanaan Renstra/Renja PD	2 Dokumen			22.500.000	24.750.000	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
4	06	02	1.01	02	Sub Kegiatan Penyusunan Program dan kegiatan perangkat daerah dalam dokumen perencanaan												22.500.000	24.750.000		
						Meningkatkan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah dokumen DPA/DPPA yang tersusun	2 Dokumen			22.500.000	24.750.000	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
4	06	02	1.01	03	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah												27.262.500	29.988.750		
						Meningkatkan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi PD	4 Dokumen			27.262.500	29.988.750	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
4	06	02	1.01	05	Sub Kegiatan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah												18.750.000	20.625.000		
						Meningkatkan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah dokumen Evalusi kinerja PD	3 Dokumen			18.750.000	20.625.000	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
											Survey Kepuasan Pelayanan Internal	**92**								
4	**06**	**02**	**1.02**		**Kegiatan Administrasi Keuangan**												**10.209.202.221**	**11.230.122.443**		
															Survey Kepuasan Pelayanan Keuangan	**92 Nilai**	**10.209.202.221**	**11.230.122.443**		
4	06	02	1.02	01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												10.209.202.221	11.230.122.443		
						Meningkatkan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Keuangan Daerah	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	77 Orang			10.209.202.221	11.230.122.443	Meningkatkan Tata Kelola Keuangan Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
4	06	02	1.03		Kegiatan Administrasi Umum												10.940.437.242	12.034.480.966		
															Survey Kepuasan Pelayanan Umum	92 Nilai	10.940.437.242	12.034.480.966		
4	06	02	1.03	01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa surat menyurat												3.397.600.000	3.737.360.000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
						Meningkatkan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah Surat/Barang yang dikirim	200 surat/barang yang dikirim			11.000.000	12.100.000	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
						Meningkatkan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah Materai	14.000 lembar			90.000.000	99.000.000	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
						Meningkatkan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah Tenaga Pramubakti yang dipekerjakan	96 orang			3.204.500.000	3.524.950.000	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
						Meningkatkan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Honor PPTK				92.100.000	101.310.000	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
4	06	02	1.03	02	Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik												1.034.300.000	1.137.730.000		
						Meningkatkan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah Tagihan Rekening Listrik, Air, Telepon/ Fax , TV Kabel, Virtual Meeting yang dibayarkan	12 bulan			1.034.300.000	1.137.730.000	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
4	06	02	1.03	03	Sub Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor												1.221.000.000	1.343.100.000		
						Meningkatkan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor	10 kali			90.000.000	99.000.000	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
						Meningkatkan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah tenaga keamanan/satpam kantor yang dipekerjakan	30 Orang			1.131.000.000	1.244.100.000	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
4	06	02	1.03	04	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/oprasional												337.100.000	370.810.000		
						Meningkatkan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			jumlah kendaraan operasional yang dipelihara	14 Unit			35.500.000	39.050.000	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
						Meningkatkan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah tenaga sopir yang dipekerjakan	8 Orang			301.600.000	331.760.000	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
4	06	02	1.03	05	Sub Kegiatan Penyediaan jasa Administrasi keuangan												159.900.000	175.890.000		
						Meningkatkan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah pengelola administrasi keuangan yang bekerja	12 Orang			159.900.000	175.890.000	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
4	06	02	1.03	06	Sub Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor	Meningkatkan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam							883.000.000	971.300.000		
						Meningkatkan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah tenaga kebersihan yang dipekerjakan	20 orang			754.000.000	829.400.000	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
						Meningkatkan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah jenis bahan dan Peralatan kebersihan kantor yang tersedia	4 jenis			117.000.000	128.700.000	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
						Meningkatkan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah pengambilan/pengumpulan/pengangkutan	12 bulan			12.000.000	13.200.000		
4	06	02	1.03	07	Sub Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja												222.500.000	244.750.000		
													jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	4 unit/jenis			222.500.000	244.750.000	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
4	06	02	1.03	08	Sub Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor												333.450.000	366.795.000		
						Meningkatkan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah jenis ATK yang dibeli	80 jenis			333.450.000	366.795.000	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
4	06	02	1.03	09	Sub Kegiatan Penyediaan barang cetak dan penggandaan												408.600.000	449.460.000		
						Meningkatkan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			jumlah barang cetak	25 eksamplar			346.100.000	380.710.000	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
						Meningkatkan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah penggandaan	150.000 lembar			62.500.000	68.750.000	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
4	06	02	1.03	10	Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor												80.000.000	88.000.000		
						Meningkatkan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia	5 jenis			80.000.000	88.000.000	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
4	06	02	1.03	11	Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor												54.000.000	59.400.000		
						Meningkatkan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	2 jenis			54.000.000	59.400.000	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
4	06	02	1.03	12	Sub Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga												18.500.000	20.350.000		
						Meningkatkan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang tersedia	3 Jenis			18.500.000	20.350.000	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
4	06	02	1.03	13	Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan												282.000.000	310.200.000		
						Meningkatkan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	44.148 eksemplar			282.000.000	310.200.000	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
4	06	02	1.03	15	Sub Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman												843.000.000	927.300.000		
						Meningkatkan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah makan dan minum tamu yang tersedia	8600 Pax			430.000.000	473.000.000	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
						Meningkatkan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah makan dan minum rapat yang tersedia	8600 pax			413.000.000	454.300.000	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4	06	02	1.03	16	Sub Kegiatan Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah												463.362.500	509.698.750		
						Meningkatkan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dilaksanakan	200 kali			289.362.500	318.298.750	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
						Meningkatkan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang dilaksanakan	180 kali			174.000.000	191.400.000	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
4	06	02	1.03	22	Sub Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor												792.274.742	871.502.216		
						Meningkatkan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 unit			792.274.742	871.502.216	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
4	06	02	1.03	23	Sub Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan												96.000.000	105.600.000		
						Meningkatkan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			jumlah mobil jabatan yang dipelihara	2 Unit			96.000.000	105.600.000	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
4	06	02	1.03	24	Sub Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/Operasional												148.850.000	163.735.000		
						Meningkatkan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah kendaraan operasional yang dipelihara	12 Unit			148.850.000	163.735.000	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
4	06	02	1.03	26	Sub Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor												165.000.000	181.500.000		
						Meningkatkan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	3 unit/jenis/set			130.000.000	143.000.000	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
						Meningkatkan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah BBM Genset	3500 liter			35.000.000	38.500.000	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
4	06	02	1.04		KEGIATAN Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur												145.200.000	159.720.000		
															survey kepuasan pelayanan kepegawaian	92 Nilai	145.200.000	159.720.000		
4	06	02	1.04	06	Sub Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal												75.200.000	82.720.000		
						Meningkatkan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas ASN	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			jumlah pegawai ASN yang ikut pendidikan dan pelatihan formal	20 orang			75.200.000	82.720.000	Meningkatnya Kualitas ASN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
4	06	02	1.04	08	Sub Kegiatan Bimbingan teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan												70.000.000	77.000.000		
						Meningkatkan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas ASN	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			jumlah peserta bimbingan teknis peraturan perundang-undangan	20 orang			70.000.000	77.000.000	Meningkatnya Kualitas ASN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
4	**06**	**02**	**2.00**		**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**												**47.952.788.487**	**52.748.067.336**		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
						Meningkatkan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik	**Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan**				**Persentase Meningkatnya Fungsi Lembaga DPRD**	**82%**					**47.952.788.487**	**52.748.067.336**		
4	**06**	**02**	**2.01**		KEGIATAN Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD												8.543.804.014	9.398.184.415		
															Jumlah Produk Hukum Daerah dan Pendukung Produk Hukum yang ditetapkan	22 Produk Hukum Daerah dan 7 Pendukung Produk Hukum Daerah	8.543.804.014	9.398.184.415		
4	06	02	2.01	01	Sub Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah												615.950.888	677.545.977		
						Meningkatkan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Jumlah Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen			615.950.888	677.545.977	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
4	06	02	2.01	02	Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Perda												7.127.853.126	7.840.638.439		
						Meningkatkan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang Dibahas	15 Raperda dan Rancangan Produk Hukum Lainnya			7.127.853.126	7.840.638.439	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
4	06	02	2.01	03	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan												100.000.000	110.000.000		
						Meningkatkan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Jumlah Produk Hukum yang Dikaji	5 Produk Hukum			100.000.000	110.000.000	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
4	06	02	2.01	04	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik												700.000.000	770.000.000		
						Meningkatkan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Jumlah Penyusunan Naskah Akademik yang Difasilitasi	7 Naskah Akademik			700.000.000	770.000.000	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
4	**06**	**02**	**2.02**		KEGIATAN Pembahasan Kebijakan Anggaran												1.389.979.607	1.528.977.568		
															Jumlah Kebijakan Anggaran yang Dibahas	6 Dokumen	1.389.979.607	1.528.977.568		
4	06	02	2.02	01	Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS												233.329.935	256.662.929		
						Meningkatkan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Jumlah KUA dan PPAS yang Dibahas	1 Dokumen			233.329.935	256.662.929	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
4	06	02	2.02	02	Sub Kegiatan Pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan												233.329.935	256.662.929		
						Meningkatkan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Jumlah KUPA dan PPAS yang Dibahas	1 Dokumen			233.329.935	256.662.929	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
4	06	02	2.02	03	Sub Kegiatan Pembahasan APBD												233.329.935	256.662.929		
						Meningkatkan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Jumlah APBD yang Dibahas	1 Dokumen			233.329.935	256.662.929	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
4	06	02	2.02	04	Sub Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan												233.329.935	256.662.929		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
						Meningkatkan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Jumlah APBD Perubahan yang Dibahas	1 Dokumen			233.329.935	256.662.929	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
4	06	02	2.02	05	Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Semester												228.329.935	251.162.929		
						Meningkatkan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Jumlah Laporan Semester yang Dibahas	1 Dokumen			228.329.935	251.162.929	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
4	06	02	2.02	06	Sub Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD												228.329.932	251.162.925		
						Meningkatkan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Jumlah Pertanggungjawaban APBD yang Dibahas	1 Dokumen			228.329.932	251.162.925	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
4	**06**	**02**	**2.03**		KEGIATAN Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan												20.281.551.672	22.309.706.839		
															Jumlah Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	242 Laporan	20.281.551.672	22.309.706.839		
4	06	02	2.03	01	Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemeritahan Bidang Pemerintahan dan Hukum												4.695.387.918	5.164.926.710		
						Meningkatkan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	60 Laporan			4.695.387.918	5.164.926.710	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
4	06	02	2.03	02	Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemeritahan Bidang Infrastruktur												3.695.387.918	4.064.926.710		
						Meningkatkan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	40 Laporan			3.695.387.918	4.064.926.710	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
4	06	02	2.03	03	Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemeritahan Bidang Kesejahteraan Rakyat												4.695.387.918	5.164.926.710		
						Meningkatkan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	60 Laporan			4.695.387.918	5.164.926.710	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
4	06	02	2.03	04	Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemeritahan Bidang Perekonomian												4.695.387.918	5.164.926.710		
						Meningkatkan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	60 Laporan			4.695.387.918	5.164.926.710	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
4	06	02	2.03	05	Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemeritahan Bidang Sumber Daya Alam												1.000.000.000	1.100.000.000		
						Meningkatkan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	20 Laporan			1.000.000.000	1.100.000.000	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4	06	02	2.03	06	Sub Kegiatan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan												500.000.000	550.000.000		
						Meningkatkan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Jumlah Laporan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Laporan			500.000.000	550.000.000	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
4	06	02	2.03	07	Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Anggaran												1.000.000.000	1.100.000.000		
						Meningkatkan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Jumlah Laporan Pengawasan Penggunaan Anggaran	1 laporan			1.000.000.000	1.100.000.000	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
4	**06**	**02**	**2.04**		Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD												3.753.368.271	4.128.705.098		
															Persentase Peningkatan Kapasitas, Publikasi dan Dokumentasi Tugas dan Fungsi DPRD	80%	3.753.368.271	4.128.705.098		
4	06	02	2.04	02	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis DPRD												303.222.585	333.544.844		
						Meningkatkan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan						Jumlah Keikutsertaan Pimpinan dan Anggota DPRD Pada Diklat	90 kali			303.222.585	333.544.844	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
4	06	02	2.04	03	Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan												1.352.083.186	1.487.291.505		
						Meningkatkan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan						Jumlah Kegiatan Dewan yang Dipublikasikan dan Didokumentasikan	200 publikasi			1.352.083.186	1.487.291.505	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
4	06	02	2.04	04	Sub Kegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli												562.500.000	618.750.000		
						Meningkatkan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan						Jumlah Kelompok Pakar dan Tim Ahli yang Tersedia	7 kelompok pakar dan tim ahli			562.500.000	618.750.000	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
4	06	02	2.04	05	Sub Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi												445.500.000	490.050.000		
						Meningkatkan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan						Jumlah Tenaga Ahli Fraksi yang Tersedia	7 Orang			445.500.000	490.050.000	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
4	06	02	2.04	06	Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja DPRD												1.090.062.500	1.199.068.750		
						Meningkatkan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan						Jumlah Program Kerja DPRD yang Tersusun	1 Dokumen			1.090.062.500	1.199.068.750	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
4	**06**	**02**	**2.05**		Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat												4.535.287.923	4.988.816.715		
															Jumlah Laporan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat yang Tersusun	3 Kali	4.535.287.923	4.988.816.715	....	....
4	06	02	2.05	02	Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses												4.535.287.923	4.988.816.715		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
						Meningkatkan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Jumlah Reses yang Dilaksanakan	3 Kali			4.535.287.923	4.988.816.715	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
4	**06**	**02**	**2.06**		Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD												337.500.000	371.250.000		
															Jumlah Laporan Kinerja Bidang Pengawasan DPRD yang Dipublikasikan	2 peraturan dan 6 dokumen	337.500.000	371.250.000		
4	06	02	2.06	01	Sub Kegiatan Penyusunan Kode Etik DPRD												236.250.000	259.875.000		
						Meningkatkan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan						Jumlah Peraturan DPRD tentang Kode Etik dan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan yang Ditetapkan	2 Peraturan					236.250.000	259.875.000	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
4	06	02	2.06	02	Sub Kegiatan Pengawasan Kode Etik DPRD												101.250.000	111.375.000		
						Meningkatkan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan						Jumlah Laporan Kinerja Bidang Pengawasan DPRD yang Dipublikasikan	6 Dokumen			101.250.000	111.375.000	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
4	**06**	**02**	**2.07**		Kegiatan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD												9.111.297.000	10.022.426.700		
															Jumlah Kegiatan Pimpinan DPRD yang Difasilitasi	72 kegiatan/laporan	9.111.297.000	10.022.426.700		
4	06	02	2.07	01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD												5.661.343.875	6.227.478.263		
						Meningkatkan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan						Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD yang Dilaksanakan oleh Pimpinan DPRD	48 Laporan			5.661.343.875	6.227.478.263	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
4	06	02	2.07	02	Sub Kegiatan Pelaksanaan Undangan DPRD												3.449.953.125	3.794.948.438		
						Meningkatkan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan						Jumlah Undangan DPRD yang Dilaksanakan	24 Laporan			3.449.953.125	3.794.948.438	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
4	**06**	**02**	**3.00**		**PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN**												**38.286.468.242**	**42.115.115.066**		
											Survey Kepuasan Pelayanan Sekretariat DPRD terhadap DPRD	**82 Nilai**					**38.286.468.242**	**42.115.115.066**		
4	**06**	**02**	**3.01**		Kegiatan Layanan Administrasi DPRD												317.830.000	349.613.000		
															Survey Kepuasan Pelayanan Administrasi Sekretariat DPRD terhadap DPRD	92 Nilai	317.830.000	349.613.000		
4	06	02	3.01	02	Sub Kegiatan Fasilitasi Rapat DPRD												242.830.000	267.113.000		
						Meningkatkan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah Rapat DPRD yang Difasilitasi	15 kali			242.830.000	267.113.000	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4	06	02	3.01	06	Sub Kegiatan Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan yang Terkait dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah												75.000.000	82.500.000		
						Meningkatkan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah Bantuan Hukum yang Difasilitasi oleh Sekretariat DPRD	3 Bantuan Hukum			75.000.000	82.500.000	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
4	**06**	**02**	**3.02**		Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD												37.968.638.242	41.765.502.066		
															Survey Kepuasan Pelayanan Keuangan Sekretariat DPRD terhadap DPRD	92 Nilai	37.968.638.242	41.765.502.066		
4	06	02	3.02	01	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD												37.266.638.242	40.993.302.066		
						Meningkatkan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Keuangan Daerah	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang dilayani	45 Orang			37.266.638.242	40.993.302.066	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
4	06	02	3.02	02	Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD												522.000.000	574.200.000		
						Meningkatkan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Keuangan Daerah	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Tersedia	225 Stel Pakaian dan 45 Unit Atribut			522.000.000	574.200.000	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
4	06	02	3.02	03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD												180.000.000	198.000.000		
						Meningkatkan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Keuangan Daerah	Pangkalpinang	Bukit Intan	Air Itam			Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang Difasilitasi Medical Chek UP	45 Orang			180.000.000	198.000.000	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2021

PERANGKAT DAERAH : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi					Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
	Prioritas Daerah	Sasaran daerah	Kab	Kota	Kelurahan	Hasil Program/ Indikator Program		Hasil Kegiatan/ Indikator Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan/ Indikator Sub kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar															
Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat												**22.136.757.708**	**23.062.228.000**		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												**JUMLAH SELURUH PAGU KEGIATAN**	**JUMLAH SELURUH PAGU KEGIATAN**		
	Prioritas Pembangunan Berdemokrasi	**Meningkatkan Hak-Hak Politik**		**Pangkalpinang**		**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**78**					**123.091.708**	**141.091.000**		
	Prioritas Pembangunan Berdemokrasi	**Meningkatkan Hak-Hak Politik**		**Pangkalpinang**		**Survei kepuasan pelayanan internal**	**90%**					**13.432.110.000**	**12.473.148.000**		
Kegiatan Perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah												**JUMLAH SELURUH PAGU SUB KEGIATAN**	**JUMLAH SELURUH PAGU SUB KEGIATAN**		
	Prioritas Pembangunan Berdemokrasi	Meningkatkan Hak-Hak Politik		Pangkalpinang				Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi	7 dokumen			123.091.708	141.091.000		
Penyusunan renstra dan renja perangkat daerah												**JUMLAH PAGU INDIKATOR SUB KEGIATAN**	**JUMLAH PAGU INDIKATOR SUB KEGIATAN**		
				Pangkalpinang						Jumlah dokumen perencanaan Renstra/Renja PD	2 dokumen	42.000.708	60.000.000		
Penyusunan dokumen evaluasi perangkat daerah															
				Pangkalpinang						Jumlah dokumen pengendalian evaluasi kinerja PD	4 dokumen	15.000.000	15.000.000		
Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah															
				Pangkalpinang						Jumlah kesepakatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan PD	1 dokumen	35.000.000	35.000.000		
Evaluasi kinerja perangkat daerah															
				Pangkalpinang						Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD	4 dokumen	31.091.000	31.091.000		
Kegiatan Administrasi Keuangan												**JUMLAH SELURUH PAGU SUB KEGIATAN**	**JUMLAH SELURUH PAGU SUB KEGIATAN**		
	Prioritas Pembangunan Berdemokrasi	Meningkatkan Hak-Hak Politik		Pangkalpinang				Survei kepuasan pelayanan keuangan	80%			11.910.562.000	10.819.000.000		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
				Pangkalpinang						Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	78 orang	11.888.562.000	10.800.000.000		
Penyusunan laporan keuangan bulanan/semesteran															
				Pangkalpinang						Jumlah laporan keuangan bulanan semesteran	4 laporan	12.000.000	14.000.000		
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun															
				Pangkalpinang						Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 laporan	10.000.000	5.000.000		
Kegiatan Administrasi Umum												**JUMLAH SELURUH PAGU SUB KEGIATAN**	**JUMLAH SELURUH PAGU SUB KEGIATAN**		
	Prioritas Pembangunan Berdemokrasi	Meningkatkan Hak-Hak Politik		Pangkalpinang				Survei kepuasan pelayanan umum	90%			1.521.548.000	1.654.148.000		
Penyediaan jasa surat menyurat												6.300.000			
				Pangkalpinang						Jumlah barang yang dikirim	12 barang	1.200.000	1.200.000		
				Pangkalpinang						Jumlah materai	600 lembar	2.400.000	2.400.000		

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
			Kab	Kota	Kelurahan	Hasil Program/ Indikator Program		Hasil Kegiatan/ Indikator Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan/ Indikator Sub kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
				Pangkalpinang						Jumlah surat yang dikirim	120 surat	1.425.000	2.850.000		
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik															
				Pangkalpinang						Tagihan rekening listrik, air, telepon/fax, tv kabel, virtual meeting yang dibayarkan	12 bulan	60.800.000	3.000.000		
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional															
				Pangkalpinang						Jumlah kendaraan operasional yang dipelihara	22 unit	17.050.000	17.050.000		
				Pangkalpinang						Jumlah tenaga sopir yang dipekerjakan	9 orang	339.300.000	287.100.000		
Penyediaan jasa administrasi keuangan															
				Pangkalpinang						Jumlah pengelola administrasi keuangan yang bekerja	10 orang	90.000.000	90.000.000		
Penyediaan jasa kebersihan kantor															
				Pangkalpinang						Jumlah tenaga kebersihan yang dipekerjakan	3 orang	113.100.000	95.700.000		
				Pangkalpinang						Jumlah jenis bahan dan peralatan kebersihan kantor yang tersedia	10 jenis	9.000.000	9.000.000		
Penyediaan alat tulis kantor															
				Pangkalpinang						jumlah jenis ATK yang dibeli	20 jenis	90.400.000	120.000.000		
Penyediaan cetak dan penggandaan															
				Pangkalpinang						Jumlah barang cetak	10 eksamplar	5.000.000	5.000.000		
				Pangkalpinang						Jumlah penggandaan	36000 lembar	10.800.000	10.800.000		
				Pangkalpinang						Jumlah cetak spanduk dan umbul umbul	12 meter	528.000	528.000		
				Pangkalpinang						Jumlah cetak umbul umbul	30 buah	1.320.000	1.320.000		
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor															
				Pangkalpinang						Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia	10 jenis	10.000.000	10.000.000		
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor															
				Pangkalpinang						jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	7 jenis	0	113.500.000		
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan															
				Pangkalpinang						Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan yang tersedia	3960 eksamplar	16.560.000	16.560.000		
Penyediaan bahan logistik kantor															
				Pangkalpinang						jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	1448 unit	19.440.000	19.440.000		
Penyediaan makan dan minum															
				Pangkalpinang						Jumlah makan dan minum rapat yang tersedia	480 pax	24.000.000	35.000.000		
				Pangkalpinang						Jumlah makan dan minum Tamu yang tersedia	480 pax	24.000.000	48.000.000		
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah															

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
	Prioritas Daerah	Sasaran daerah	Kab	Kota	Kelurahan	Hasil Program/ Indikator Program		Hasil Kegiatan/ Indikator Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan/ Indikator Sub kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
				Pangkalpinang						jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dilaksanakan	30 kali	200.000.000	225.000.000		
										jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang dilaksanakan	200 kali	200.000.000	225.000.000		
Pengadaan meubelair															
				Pangkalpinang						Jumlah mebelair yang diadakan	-	0	6.750.000		
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor															
				Pangkalpinang						Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 unit	25.000.000	50.000.000		
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional															
				Pangkalpinang						Jumlah kendaraan operasional yang dipelihara	22 unit	232.950.000	232.950.000		
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor															
				Pangkalpinang						Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	13 unit	13.000.000	13.000.000		
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor															
				Pangkalpinang						Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	20 unit	13.000.000	13.000.000		
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor															
				Pangkalpinang						Jumlah gedung kantor yang direhab	1 unit pagar	0	0		
Kegiatan Peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya manusia												JUMLAH SELURUH PAGU SUB KEGIATAN	JUMLAH SELURUH PAGU SUB KEGIATAN		
	Prioritas Pembangunan Berdemokrasi	Meningkatkan Hak-Hak Politik		Pangkalpinang				Survei kepuasan pelayanan kepegawaian	85%			0	0		
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya															
				Pangkalpinang						Jumlah pakaian dinas	20 stel (PDH Pol Par)	0	0		
Pengadaan pakaian kerja lapangan															
				Pangkalpinang						Jumlah pakaian lapangan	230 stel (PDL)	0	0		
Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum												**JUMLAH SELURUH PAGU KEGIATAN**			
	Prioritas Pembangunan Berdemokrasi	**Meningkatkan Hak-Hak Politik**	**Bangka, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Bangka Barat, Belitung, Belitung Timur**	**Pangkalpinang**		**Persentase pelanggaran tibumtranmas yang ditindak**	**100%**					**7.833.056.000**	**8.534.489.000**		
	Prioritas Pembangunan Berdemokrasi	**Meningkatkan Hak-Hak Politik**	**Bangka, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Bangka Barat, Belitung, Belitung Timur**	**Pangkalpinang**		**Persentase penegakan pelanggar perda**	**100%**					**250.000.000**	**300.000.000**		
	Prioritas Pembangunan Berdemokrasi	**Meningkatkan Hak-Hak Politik**	**Bangka, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Bangka Barat, Belitung, Belitung Timur**	**Pangkalpinang**		**Persentase satlinmas yang terlatih dalam penyelenggaraan kantrantibmas dan membantu penanganan bencana dan kebakaran**	**44,78%**					**175.000.000**	**310.000.000**		

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
	Prioritas Daerah	Sasaran daerah	Kab	Kota	Kelurahan	Hasil Program/ Indikator Program		Hasil Kegiatan/ Indikator Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan/ Indikator Sub kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
	Prioritas Pembangunan Berdemokrasi	**Meningkatkan Hak-Hak Politik**	**Bangka, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Bangka Barat, Belitung, Belitung Timur**	**Pangkalpinang**		**Persentase personil satpol pp yang berkompeten**	**83,75%**					**246.500.000**	**326.500.000**		
Kegiatan Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi												**JUMLAH SELURUH PAGU SUB KEGIATAN**	**JUMLAH SELURUH PAGU SUB KEGIATAN**		
	Prioritas Pembangunan Berdemokrasi	Meningkatkan Hak-Hak Politik	Bangka, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Bangka Barat, Belitung, Belitung Timur	Pangkalpinang				Jumlah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	1548 kali			8.254.556.000	9.170.989.000		
Sub Kegiatan Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum												2.404.755.000			
			Bangka, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Bangka Barat, Belitung, Belitung Timur	Pangkalpinang						Jumlah pengawalan	30 kali	39.000.000	65.000.000		
				Pangkalpinang						Jumlah pengamanan demo	24 kali	28.600.000	33.600.000		
				Pangkalpinang						Jumlah pengamanan aset/piket	360 hari	2.116.018.000	2.843.452.000		
				Pangkalpinang						Jumlah patroli	1080 kali	60.000.000	70.000.000		
										Jumlah deteksi dini pelanggaran Tibumtranmas	12 kali	60.000.000	70.000.000		
			Bangka, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Bangka Barat, Belitung, Belitung Timur	Pangkalpinang						Jumlah peserta gelar pasukan	600 orang	101.137.000	101.137.000		
Sub Kegiatan Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkada															
			Bangka, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Bangka Barat, Belitung, Belitung Timur	Pangkalpinang						Jumlah penertiban pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	20 kali	5.405.406.000	5.036.500.000		
Sub Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum tingkat provinsi															
			Bangka, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Bangka Barat, Belitung, Belitung Timur	Pangkalpinang						Jumlah kegiatan rakor	1 kali	0	75.000.000		
Sub Kegiatan Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum															

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
			Kab	Kota	Kelurahan	Hasil Program/ Indikator Program		Hasil Kegiatan/ Indikator Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan/ Indikator Sub kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
				Pangkalpinang						Jumlah peserta satlinmas dalam penyelenggaraan kantrantibmas	50 orang satlinmas	175.000.000	180.000.000		
			Bangka, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Bangka Barat, Belitung, Belitung Timur	Pangkalpinang						Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan bencana dan kebakaran bagi satlinmas	100 orang satlinmas	0	130.000.000		
Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuasa Hak Asasi Manusia (HAM)															
				Pangkalpinang						Jumlah peserta pembinaan mental dan spritual	200 orang	12.000.000	22.000.000		
				Pangkalpinang						Jumlah latihan fisik	22 kali	25.000.000	37.000.000		
				Pangkalpinang						Jumlah peserta pelatihan pelaksanaan tugas pol pp	50 orang	18.000.000	20.000.000		
				Pangkalpinang						Jumlah pelatihan instruktur upacara	44 kali	24.750.000	24.750.000		
				Pangkalpinang						Jumlah peserta yang ditingkatkan kompetensinya	10 orang	100.000.000	130.000.000		
Sub Kegiatan Pembinaan jabatan fungsional Satuan Polisi Pamong Praja															
			Bangka, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Bangka Barat, Belitung, Belitung Timur	Pangkalpinang						Jumlah pembinaan pejabat fungsional satpol pp	4 kali	40.750.000	66.750.000		
				Pangkalpinang						Jumlah rakor pembinaan jabatan fungsional satpol pp	2 kali	26.000.000	26.000.000		
Sub Kegiatan Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum												22.895.000			
				Pangkalpinang						Pengadaan motor patroli	5 motor	0	245.000.000		
				Pangkalpinang						Pengadaan HT	4 HT	12.000.000	0		
				Pangkalpinang						Pengadaan spy cam	2 unit	9.100.000	0		
				Pangkalpinang						Pengadaan BBM	4500 liter	40.500.000	64.800.000		
Kegiatan Penegakan peraturan daerah provinsi dan peraturan gubernur												JUMLAH SELURUH PAGU SUB KEGIATAN	JUMLAH SELURUH PAGU SUB KEGIATAN		
	Prioritas Pembangunan Berdemokrasi	Meningkatkan Hak-Hak Politik	Bangka, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Bangka Barat, Belitung, Belitung Timur	Pangkalpinang				Jumlah aktivitas penegakan perda dan perkada	52 kali			250.000.000	300.000.000		
Sub Kegiatan Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan gubernur															

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
	Prioritas Daerah	Sasaran daerah	Kab	Kota	Kelurahan	Hasil Program/ Indikator Program		Hasil Kegiatan/ Indikator Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan/ Indikator Sub kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
			Bangka, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Bangka Barat, Belitung, Belitung Timur	Pangkalpinang						Penindakan pelanggar perda secara non yustisial (masyarakat/badan hukum)	12 orang	70.000.000	80.000.000		
			Bangka, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Bangka Barat, Belitung, Belitung Timur	Pangkalpinang						Jumlah razia ASN	20 kali	60.000.000	65.000.000		
Sub Kegiatan Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan gubernur															
			Bangka, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Bangka Barat, Belitung, Belitung Timur	Pangkalpinang						Penyelidikan pelanggar perda/perkada	10 kasus	60.000.000	50.000.000		
			Bangka, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Bangka Barat, Belitung, Belitung Timur	Pangkalpinang						Penyidikan pelanggar perda/perkada	3 kasus	60.000.000	90.000.000		
				Pangkalpinang						Jumlah rapat koordinasi sekretariat PPNS	4 kali	0	15.000.000		
Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)												**JUMLAH SELURUH PAGU SUB KEGIATAN**	**JUMLAH SELURUH PAGU SUB KEGIATAN**		
	Prioritas Pembangunan Berdemokrasi	Meningkatkan Hak-Hak Politik		Pangkalpinang				Jumlah PPNS yang mampu melakukan pemberkasan penyidikan	-			0	100.000.000		
Sub Kegiatan Pengembangan kapasitas dan karier PPNS															
				Pangkalpinang						Jumlah PPNS yang mampu melakukan pemberkasan penyidikan	-	0	100.000.000		
Program Penanggulangan Kebakaran												**JUMLAH SELURUH PAGU KEGIATAN**	**JUMLAH SELURUH PAGU KEGIATAN**		
	Prioritas Pembangunan Berdemokrasi	**Meningkatkan Hak-Hak Politik**	Bangka, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Bangka Barat, Belitung, Belitung Timur	Pangkalpinang		**Cakupan relawan pemadan kabakaran di kabupaten dan kota**	**0,26**					**77.000.000**	**977.000.000**		
Kegiatan Penyelenggaraan pemetaan rawan bencana kebakaran												**JUMLAH SELURUH PAGU SUB KEGIATAN**	**JUMLAH SELURUH PAGU SUB KEGIATAN**		
	Prioritas Pembangunan Berdemokrasi	Meningkatkan Hak-Hak Politik	Bangka, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Bangka Barat, Belitung, Belitung Timur	Pangkalpinang				Jumlah dokumen peta daerah rawan kebakaran	-			77.000.000	977.000.000		
Sub Kegiatan Penyediaan dan pemuktahiran informasi daerah rawan kebakaran dan peta rawan kebakaran															

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
	Prioritas Daerah	Sasaran daerah	Kab	Kota	Kelurahan	Hasil Program/ Indikator Program		Hasil Kegiatan/ Indikator Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan/ Indikator Sub kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
			Bangka, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Bangka Barat, Belitung, Belitung Timur	Pangkalpinang						Jumlah dokumen peta daerah rawan kebakaran	-	0	100.000.000		
Sub Kegiatan Peningkata kapasitas sumber daya manusia															
				Pangkalpinang						Jumlah relawan kebakaran yang mampu menanggulangi kebakaran	100 orang	77.000.000	77.000.000		
Sub Kegiatan Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan kebakaran															
				Pangkalpinang						Jumlah mobil suplai air mobil pemadam kebakaran	-	0	800.000.000		
Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN												SUB KEGIATAN INI TIDAK DIGUNAKAN			
								jumlah dokumen penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1 dokumen			147.218.680			

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Bangka Belitung
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.06.02. BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
Sub Unit Organisasi : 5.06.02. BADAN PENGHUBUNG PROVINSI

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
					Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan													**9.120.369.710**	**15.843.515.013**		
					Urusan Pemerintahan FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													**9.120.369.710**	**15.843.515.013**		
5	**06**	**02**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**												**8.536.595.827**	**10.762.186.987**		
											Nilai Sakip PD	**80**					**46.336.859**	**101.687.449**		
5	**06**	**02**	**1.01**		**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**												**46.336.859**	**101.687.449**		
															Jumlah dok perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	**11 dokumen dan 67 koordinasi**	**46.336.859**	**101.687.449**		
5	***06***	***01***	***1.01***	***01***	***Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah***												***5.281.921***	***11.591.315***		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Jakarta Timur	Pulogadung	Rawamangun			Jumlah dokumen perencanaan Renstra/Renja PD	2 Dokumen			5.281.921	11.591.315	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
5	***06***	***01***	***1.01***	***02***	***Penyusunan Program dan kegiatan perangkat daerah dalam dokumen perencanaan***												***5.281.921***	***11.591.315***		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Jakarta Timur	Pulogadung	Rawamangun			Jumlah dokumen DPA/DPPA yang tersusun	2 Dokumen			5.281.921	11.591.315	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
5	***06***	***01***	***1.01***	***03***	***Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah***												***5.281.921***	***11.591.315***		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Jakarta Timur	Pulogadung	Rawamangun			Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi PD	4 Dokumen			5.281.921	11.591.315	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
5	***06***	***01***	***1.01***	***04***	***Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah***												***20.007.276***	***43.906.498***		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Jakarta Timur	Pulogadung	Rawamangun			jumlah dokumen kesepakatan Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan PD	4 dokumen			20.007.276	43.906.498	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
5	***06***	***01***	***1.01***	***05***	***Evaluasi kinerja Perangkat Daerah***												***10.483.821***	***23.007.005***		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Jakarta Timur	Pulogadung	Rawamangun			Jumlah dokumen Evalusi kinerja PD	3 Dokumen			10.483.821	23.007.005	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
											survey kepuasan pelayanan internal	**90**					**8.490.258.968**	**10.660.499.538**		
5	***06***	***01***	***1.02***		***Administrasi Keuangan***												***4.283.367.820***	***4.739.909.862***		
															Survey Kepuasan Pelayanan Internal	**1 Dokumen**	**4.283.367.820**	**4.739.909.862**		
5	***06***	***01***	***1.02***	***01***	***Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN***												***4.257.598.448***	***4.683.358.293***		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Jakarta Timur	Pulogadung	Rawamangun			jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	33 orang			4.257.598.448	4.683.358.293	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
5	***06***	***01***	***1.02***	***03***	***Penyusunan laporan keuangan bulanan/semesteran***												***15.285.559***	***33.544.564***		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Jakarta Timur	Pulogadung	Rawamangun			Jumlah laporan keuangan bulanan/ Semesteran	2 laporan			15.285.559	33.544.564	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
5	*06*	*01*	*1.02*	*04*	***Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun***												***10.483.813***	***23.007.005***		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Jakarta Timur	Pulogadung	Rawamangun			Jumlah laporan keuangan akhir tahun	2 laporan			10.483.813	23.007.005	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
5	*06*	*01*	*1.03*		***Kegiatan Administrasi umum***												***4.176.880.233***	***5.867.901.879***		
															Survey Kepuasan Pelayanan Umum	**1 Dok**	**4.176.880.233**	**5.867.901.879**		
5	*06*	*01*	*1.03*	*01*	***Penyediaan Jasa surat menyurat***												***419.605.132***	***386.904.057***		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Jakarta Timur	Pulogadung	Rawamangun			Jumlah Surat/Barang yang dikirim (tahun)	264 Surat/barang yang dikirim			8.002.949	17.562.599	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Jakarta Timur	Pulogadung	Rawamangun			Jumlah Materai	4500 lembar			6.002.183	13.171.949	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
													Jumlah tenaga pramubakti yang dipekerjakan	8 orang			405.600.000	356.169.509	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
5	*06*	*01*	*1.03*	*02*	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***												***253.144.871***	***576.228.875***		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Jakarta Timur	Pulogadung	Rawamangun			Tagihan rekening listrik, air, telepon/fax, tv kabel, virtual meeting yang dibayarkan	12 Bulan			253.144.871	576.228.875	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
5	*06*	*01*	*1.03*	*03*	***Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor***												***489.630.553***	***532.673.629***		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Jakarta Timur	Pulogadung	Rawamangun			Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor	18 kali			84.030.553	176.504.121	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Jakarta Timur	Pulogadung	Rawamangun			Jumlah tenaga keamanan/satpam kantor yang dipekerjakan	8 orang			405.600.000	356.169.509	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
5	*06*	*01*	*1.03*	*05*	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/oprasional***												***38.013.825***	***83.422.346***		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Jakarta Timur	Pulogadung	Rawamangun			jumlah kendaraan operasional yang dipelihara	17 unit			38.013.825	83.422.346	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Jakarta Timur	Pulogadung	Rawamangun										
5	*06*	*01*	*1.03*	*06*	***Penyediaan jasa Administrasi keuangan***												***75.987.635***	***133.405.502***		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Jakarta Timur	Pulogadung	Rawamangun			Jumlah pengelola administrasi keuangan yang bekerja	16 orang			75.987.635	133.405.502	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
5	*06*	*01*	*1.03*	*08*	***Penyediaan jasa kebersihan kantor***												***429.433.668***	***398.012.401***		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Jakarta Timur	Pulogadung	Rawamangun			Jumlah tenaga kebersihan yang dipekerjakan	8 orang			405.600.000	356.169.509	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Jakarta Timur	Pulogadung	Rawamangun			Jumlah jenis bahan dan Peralatan kebersihan kantor yang tersedia	35 jenis			23.833.668	41.842.892	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
5	06	*01*	*1.03*	*09*	***Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja***												***18.006.549***	***31.612.678***		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Jakarta Timur	Pulogadung	Rawamangun			Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki (komputer, 2 unit mesin foto copy dan 15 unit printer)	15 unit			18.006.549	31.612.678	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
5	06	*01*	*1.03*	*#*	***Penyediaan alat tulis kantor***												***35.012.734***	***61.469.097***		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Jakarta Timur	Pulogadung	Rawamangun			Jumlah jenis ATK yang dibeli	35 jenis			35.012.734	61.469.097	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
5	06	*01*	*1.03*	*#*	***Penyediaan barang cetak dan penggandaan***												***18.506.731***	***32.490.808***		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Jakarta Timur	Pulogadung	Rawamangun			Jumlah barang cetak	15 eksamplar			17.506.367	30.734.548	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Jakarta Timur	Pulogadung	Rawamangun			Jumlah penggandaan	5000 lembar			1.000.364	1.756.260	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
													Jumlah penjilidan	..... laporan						
5	06	*01*	*1.03*	*#*	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***												***7.752.820***	***13.611.014***		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Jakarta Timur	Pulogadung	Rawamangun			Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia	15 jenis			7.752.820	13.611.014	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
5	06	*01*	*1.03*	*#*	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***												***190.069.125***	***197.579.239***		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Jakarta Timur	Pulogadung	Rawamangun			jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	14 jenis			190.069.125	197.579.239	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
5	06	*01*	*1.03*	*#*	***Penyediaan peralatan rumah tangga***												***160.108.229***	***281.089.398***		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Jakarta Timur	Pulogadung	Rawamangun			Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	20 jenis			160.108.229	281.089.398	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
5	06	*01*	*1.03*	*#*	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***												***3.251.182***	***5.707.845***		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Jakarta Timur	Pulogadung	Rawamangun			Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan yang tersedia	735 eksamplar			3.251.182	5.707.845	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
5	06	*01*	*1.03*	*#*	***Penyediaan bahan logistik kantor***												***28.660.423***	***50.316.846***		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Jakarta Timur	Pulogadung	Rawamangun			jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	4 unit			28.660.423	50.316.846	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
5	06	*01*	*1.03*	*#*	***Penyediaan makan dan minum***												***145.052.753***	***254.657.686***		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Jakarta Timur	Pulogadung	Rawamangun			Jumlah makan dan minum Tamu yang tersedia	3.572 Pax			125.045.477	219.532.488	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Jakarta Timur	Pulogadung	Rawamangun			Jumlah makan dan minum rapat yang tersedia	571 Pax			20.007.276	35.125.198	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
5	*06*	*01*	*1.03*	*#*	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah***												***332.620.969***	***583.956.419***		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Jakarta Timur	Pulogadung	Rawamangun			jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dilaksanakan	104 kali			312.613.693	548.831.221	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Jakarta Timur	Pulogadung	Rawamangun			Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah dilaksanakan	36 kali			20.007.276	35.125.198	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
5	*06*	*01*	*1.03*	*19*	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***												***300.109.145***	***526.877.972***		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Jakarta Timur	Pulogadung	Rawamangun			Jumlah gedung kantor yang dipelihara	3 unit			300.109.145	526.877.972	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
5	*06*	*01*	*1.03*	*20*	***Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan***												***488.546.677***	***857.702.894***		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Jakarta Timur	Pulogadung	Rawamangun			Jumlah mobil jabatan yang dipelihara (Roda 4)	8 unit			488.546.677	857.702.894	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
5	*06*	*01*	*1.03*	*21*	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/Oprasional***												***743.367.213***	***860.183.172***		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Jakarta Timur	Pulogadung	Rawamangun			Jumlah kendaraan operasional yang dipelihara	9 unit			236.367.213	414.971.286	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
													Jumlah tenaga sopir yang dipekerjakan	10 Orang			507.000.000	445.211.886	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
5	*06*	*01*	*1.04*		***Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur***												***30.010.914***	***52.687.797***		
															Survey Kepuasan Pelayanan Kepegawaian	**1 Dokumen**	**30.010.914**	**52.687.797**		
5	*06*	*01*	*1.04*	*01*	***Pendidikan dan pelatihan formal***												***30.010.914***	***52.687.797***		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Jakarta Timur	Pulogadung	Rawamangun			jumlah pegawai ASN yang ikut pendidikan dan pelatihan formal	10 Orang			30.010.914	52.687.797	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
5	*06*	*01*	*1.04*	*02*	***Sub Kegiatan : Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapanya***												-	-		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Jakarta Timur	Pulogadung	Rawamangun			Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya	33 Orang			-	-	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
5	**06**				**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**												**583.773.883**	**5.081.328.026**		
5	**06**	**02**			**PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG**												**583.773.883**	**5.081.328.026**		
							Meningkatnya pelayanan pemerintah daerah di luar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung				**Jumlah Pelayanan Penghubung yang terlaksana**	**100%**					**583.773.883**	**5.081.328.026**		
5	**06**	**02**	**1.01**		**Kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Penghubung**												**583.773.883**	**5.081.328.026**		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi			Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil Program/Indikator Program		Keluaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/Indikator kegiatan				Program Juara/Prioritas Pembangunan Tematik	Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
															Jumlah Pelayanan Penghubung yang terlaksana	**100%**	**583.773.883**	5.081.328.026	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
5	***06***	***0 2***	***1,01***	***0 1***	***Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bagi Aparatur dan Masyarakat***												***12.504.548***	-		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	di luar prov.kep. Bangka Belitung	di luar prov.kep. Bangka Belitung	di luar prov.kep. Bangka Belitung			Jumlah Peserta yang mengikuti Diklat	3 orang			12.504.548	-	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
5	***06***	***0 2***	***1,01***	***0 2***	***Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat***												***50.000.000***	***1.271.395.250***		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	di luar prov.kep. Bangka Belitung	di luar prov.kep. Bangka Belitung	di luar prov.kep. Bangka Belitung			Jumlah pelayanan kelembagaan dan masyarakat	2 acara			50.000.000	1.271.395.250	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
5	***06***	***0 2***	***1,01***	***0 4***	***Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan pelestarian Seni Budaya***												***310.000.000***	***3.331.884.550***		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	di luar prov.kep. Bangka Belitung	di luar prov.kep. Bangka Belitung	di luar prov.kep. Bangka Belitung			Jumlah Pameran dan Seni Budaya yang diikuti	10 acara			310.000.000	3.331.884.550	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
5	***06***	***0 2***	***1,01***	***0 5***	***Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung***												***211.269.335***	***478.048.226***		
						Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	di luar prov.kep. Bangka Belitung	di luar prov.kep. Bangka Belitung	di luar prov.kep. Bangka Belitung			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi yang dilaksanakan oleh Badan Penghubung	24 Kali			211.269.335	478.048.226	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
Kompleks Pusat Perkantoran dan Perumahan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Jl. Pulau Belitung No. 2,Kel. Air Itam, Telp. (0717) 439333-439336 Fax: (0717) 439335
PANGKALPINANG 33149